PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

PERTAMINA GAS NEGARA



STRENGTH IN BALANCE

2025

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

PULL

SANGKALAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)
Disclaimer and Limits of Responsibility

Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2025 berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan yang menunjukkan proyeksi, asumsi, dan ekspektasi. Meski disusun melalui pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman selama ini, PGN tidak dapat menjamin hal-hal tersebut dapat terealisasi di masa depan karena kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi, seperti: perubahan kondisi ekonomi dan politik baik nasional maupun global, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, permintaan dan penawaran pasar, perubahan kompetisi pasar, perubahan regulasi dan prinsip-prinsip akuntansi, serta perubahan kebijakan dan pedoman lainnya.

Dalam Laporan Tahunan ini, nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk disingkat menjadi "PGN". Penulisan kata "Perusahaan", "PGN Grup", "Subholding Gas", "Pertamina Gas Negara", atau "Perseroan" diasosiasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan ini juga memuat kata pekerja, pegawai, karyawan dan insan Perwira PGN, yang merujuk pada Perwira Subholding Gas. Penyebutan kata gas dan gas alam yang dimaksud dalam Laporan Tahunan ini merujuk pada gas bumi. Notasi angka dalam Laporan Tahunan ini menggunakan kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia.

The 2025 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk contains statements that can be considered as forward looking statements reflecting projections, assumptions, and expectations. Although prepared through careful considerations based on our experiences, PGN cannot guarantee that these matters will be realized in the future due to possible changes, such as: changes in economic and political situations, both domestically and globally; fluctuations in foreign exchange rates; changes in prices, market demand and supply; shifts in market competition; changes in regulations and accounting principles; as well as changes in other policies and guidelines.

In this Annual Report, the name PT Perusahaan Gas Negara Tbk is abbreviated as "PGN." The terms "Company," "PGN Group," "Gas Subholding," "Pertamina Gas Negara", or "Corporation" are associated with PT Perusahaan Gas Negara Tbk. This Annual Report also includes the terms manpower, staff, officers, and PGN Employees, which refer to Gas Subholding Employees. The terms gas and natural gas used in this Annual Report refer to natural gas. The numerical notation in this Annual Report applies the writing rules applicable in the Indonesian language.











STRENGTH IN BALANCE

Kekuatan dalam Keseimbangan

Di tengah dinamika strategis tahun 2025 PGN berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, ketahanan, dan keberlanjutan bisnis. Di saat Perseroan menghadapi ketidakseimbangan *supply–demand*, keterbatasan pasokan gas pipa dan LNG domestik, volatilitas ekonomi global, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi stabilitas energi nasional, PGN menegaskan bahwa stabilitas bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui disiplin dalam menjalankan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip tata kelola dan keberlanjutan, Perseroan memperkuat ketahanan melalui manajemen risiko yang *prudent*, optimasi operasional, peningkatan jasa regasifikasi, serta berbagai inisiatif strategis seperti pengembangan infrastruktur gas, efisiensi operasi, dan perluasan portofolio energi yang mendukung transisi energi.

PGN juga mengambil keputusan strategis jangka panjang secara berintegritas untuk menjaga kesinambungan layanan, relevansi bisnis, serta daya saing perusahaan, di tengah tekanan eksternal dan tantangan kinerja akibat pasokan yang terbatas. Kekuatan PGN terletak pada kemampuan menavigasi ketidakpastian, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan dan tanggung jawab keberlanjutan, untuk mempertahankan nilai perusahaan dan memberikan kontribusi yang kuat bagi perekonomian nasional.

Amid the strategic dynamics in 2025, PGN stays true to its commitment to maintaining a balance between growth, resilience, and business continuity. As the Company faces a supply-demand imbalance, limited pipeline gas and domestic LNG supplies, global economic volatility, and geopolitical dynamics affecting national energy stability, PGN emphasizes that stability is not a barrier to growth but rather the foundation for creating long-term value for all stakeholders.

Through disciplined execution of business growth aligned with governance and sustainability principles, the Company bolsters its resilience through prudent risk management, operational optimization, enhanced regasification services, and various strategic initiatives such as gas infrastructure development, operational efficiency, and expansion of its energy portfolio to support the energy transition.

PGN also makes long-term strategic decisions with integrity to ensure service continuity, business relevance, and corporate competitiveness amid external pressures and performance challenges resulting from limited supply. PGN's strength lies in its ability to navigate uncertainty while maintaining a balance between growth needs and sustainability responsibilities, preserving corporate values and contributing strongly to the national economy.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY



2024

RESILIENCE TO DELIVER

PGN secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis selama tahun 2024 untuk menghasilkan kinerja positif Perseroan. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui penerapan strategi bisnis yang konsisten yaitu dengan terus melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat bisnis utama distribusi dan transmisi gas bumi, melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan dan optimalisasi infrastruktur yang dimiliki Perseroan, menjalankan bisnis baru LNG *trading* serta pengembangan bisnis hijau untuk memastikan komitmen Perseroan dalam upaya keberlanjutan dan mengakselerasi energi bersih yang lebih luas.

Perseroan terus beradaptasi dan bertransformasi untuk memimpin perubahan guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan melalui pengembangan teknologi dan inovasi untuk membangun infrastruktur gas bumi yang terintegrasi serta membangun bisnis energi rendah karbon agar dapat memperluas aksesibilitas gas bumi bagi masyarakat Indonesia. Dalam prosesnya, Perseroan secara aktif melakukan *engagement* dengan seluruh pemangku kepentingan serta melakukan kolaborasi strategis dengan seluruh pelanggan dan mitra bisnis untuk memberikan nilai terbaik serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta memberikan kontribusi bagi Negara.

PGN has consistently demonstrated its ability to face various challenges and business dynamics during 2024 to generate positive performance for the Company. This achievement was accomplished through the implementation of a consistent business strategy, namely continuing to increase the leverage of natural gas to strengthen the main business of natural gas distribution and transmission, diversifying the business through the development and optimization of the Company's infrastructure, running a new LNG Trading business, and developing a green business to ensure the Company's steadfast commitment to sustainability efforts and accelerating wider clean energy.

The Company continues to adapt and transform to lead change in order to achieve a balance between energy needs and environmental preservation through the development of technology and innovation to build integrated natural gas infrastructure and build a low-carbon energy business, expanding the accessibility of natural gas for Indonesians. The Company, in the process, actively engages with all stakeholders and collaborates strategically with all customers and business partners to provide the best value and create a positive impact on society and the environment while contributing to the Nation.



2023

STRENGTHENING PRESENCE

PGN berkomitmen untuk terus memperkuat kehadirannya dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk itu, PGN menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkokoh keberadaannya di tengah pasar yang dinamis.

Selama tahun 2023, PGN telah menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi, baik melalui ekspansi infrastruktur, peningkatan kapabilitas teknologi, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan, maupun secara konsisten menambah portofolio pelanggan baru untuk mencapai target volume pengelolaan gas bumi. Beragam inisiatif yang telah dilakukan mencerminkan tekad PGN untuk tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri, tetapi juga menjelajahi peluang baru dan memimpin perubahan di bidangnya.

PGN akan terus menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan fokus penguatan fundamental dan inovasi, PGN siap mengukir masa depan energi yang mengedepankan keberlanjutan.

PGN stays true to its commitment to continuing to strengthen its presence in the natural gas transmission and distribution sector. To that end, PGN is implementing strategic and innovative measures to reinforce its presence in a dynamic market.

Throughout 2023, PGN has made various efforts to increase its presence, including infrastructure expansion, improvements in its technological capabilities, strategic collaborations with stakeholders, and the continued addition of new customer portfolios to achieve the target volume for natural gas management. Various initiatives that have been undertaken reflect PGN's determination not only to be a leading player in the industry but also to embark on new opportunities and drive change in its field.

PGN will continue to deliver added value to customers, stakeholders, and society at large. With a focus on strengthening fundamentals and innovation, PGN is poised to create an energy future that promotes sustainability.



2022

GROWING TOWARDS ENERGY SOLUTION

PGN memiliki peran penting dalam upaya memastikan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui upaya memperkuat pasokan dan memperluas pembangunan infrastruktur gas bumi. Sebagai Subholding Gas, PGN juga memiliki peran pada masa transisi energi Indonesia menuju *Net Zero Emission* (NZE) di 2060.

Gas bumi yang memiliki sifat pembakaran lebih bersih dibandingkan energi lain, dapat menurunkan emisi hingga 40% dan akan menjadi salah satu solusi untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia hingga 377 juta tCO_2eq pada 2035. Untuk mendukung upaya tersebut, selama tahun 2022 PGN terus melakukan terobosan bisnis, mengembangkan infrastruktur serta peningkatan pemanfaatan gas bumi menuju perusahaan yang menyediakan solusi energi bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk sektor komersial, industri, kelistrikan, transportasi dan rumah tangga.

PGN plays a vital role in ensuring national energy security by strengthening supply and expanding natural gas infrastructure development. As a Gas Subholding, PGN also plays a role in Indonesia's energy transition phase toward Net Zero Emissions (NZE) by 2060.

Natural gas, which has cleaner combustion properties than other energy sources, can reduce emissions by up to 40% and serve as a solution to meet Indonesia's target to reduce emissions by up to 377 million tCO_2eq in 2035. To support these efforts, throughout 2022, PGN continued to make business breakthroughs, develop infrastructure, and increase the use of natural gas, becoming a Company that provides energy solutions for the people of Indonesia, primarily in the commercial, industrial, electricity, transportation, and household sectors.



2021

GREATER COLLABORATION STRONGER SYNERGY

Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), PGN berkomitmen membangun jaringan gas bumi di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2021, semangat "One Energy, One Pertamina" diwujudkan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik demi masa depan berkelanjutan yang sejahtera. Kini saatnya, PGN memantapkan langkah, menyongsong tantangan ke depan dengan percaya diri serta bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih kuat.

As a Gas Subholding and part of PT Pertamina (Persero) Oil and Gas Holding, PGN is committed to establishing natural gas networks in various regions. Throughout 2021, the spirit of One Energy, One Pertamina is manifested by promoting synergy and collaboration to support the Government in providing better energy sources for a prosperous and sustainable future. It is now time for PGN to steady its steps, face future challenges with confidence, and transform to become better, bigger, and stronger.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

TEMA 2
Theme

KESINAMBUNGAN TEMA 2
Theme Continuity

DAFTAR ISI 4
Table of Contents

PENYEDIA ENERGI BAIK UNTUK INDONESIA 14
Good Energy Provider for Indonesia

IKHTISAR CAPAIAN 2025 16
Performance Highlights 2025

MEMPERKUAT PERAN GAS BUMI DENGAN STRATEGI G-A-S 18
Strengthening the Role of Natural Gas through the G-A-S Strategy



01 IKHTISAR KINERJA
Performance Highlights

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 22
Important Financial Data Highlights

KINERJA KEUANGAN 25
Financial Performance

KINERJA OPERASIONAL 27
Operational Performance

PORTOFOLIO INFRASTRUKTUR PIPA SUBHOLDING GAS 28
Gas Subholding Pipeline Infrastructure Portfolio

KINERJA SAHAM 30
Stock Performance

AKSI KORPORASI TERKAIT SAHAM 33
Corporate Actions Related to Shares

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/ PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM 33
Suspension of Shares Trading Delisting of Shares

KINERJA OBLIGASI 33
Bond Performance

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 34
Awards and Certifications

PENGHARGAAN 34
Awards

SERTIFIKASI 60
Certifications

PERISTIWA PENTING 64
Significant Events



02 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS 92
Board of Commissioners' Report

LAPORAN DIREKSI 104
Board of Directors' Report

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 130
Liability Statement Letter



03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

TENTANG PGN 134
About PGN

RIWAYAT SINGKAT 136
Brief History

PERJALANAN BISNIS PGN 138
PGN's Business Journey

TRANSFORMASI LOGO PGN 140
PGN's Logo Transformation

PGN SEBAGAI SUBHOLDING GAS 142
PGN as Gas Subholding

LINGKUP BISNIS SUBHOLDING GAS 143
Gas Subholding's Scope of Businesses

PENYEDIA SOLUSI ENERGI TERINTEGRASI 143
Provider of Integrated Energy Solution

PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL 145
Operator of National Natural Gas Infrastructures

VISI DAN MISI 146
Vision and Mission

BUDAYA PERUSAHAAN 146
Corporate Culture

PROGRAM BUDAYA *LIVING CORE VALUES* 2025 148
Living Core Values Culture Program 2025

BIDANG USAHA 150
Nature of Businesses

KEGIATAN USAHA 150
Business Activites

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar 150
Business Activities Pursuant to Articles of Association

Kegiatan Usaha Utama 150
Main Business Activities

Kegiatan Usaha Penunjang 151
Supporting Business Activities

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU 152
Business Activities in the Financial Year

PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN 153
Products or Services

WILAYAH OPERASIONAL PGN 155
PGN Operation Regions

STRUKTUR ORGANISASI 156
Organizational Structure

STRUKTUR USAHA 161
Business Structures

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PGN SELAMA TAHUN BUKU 2025 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2025 162
Changes in the Composition of PGN's Board of Commissioners and Board of Directors During and After the 2025 Fiscal Year

PROFIL DEWAN KOMISARIS 166
Profile of the Board of Commissioners

PROFIL DIREKSI 172
Profil Direksi

INFORMASI PEMEGANG SAHAM 179
Information of Shareholders

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 179
Shareholders Composition

Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia 180
Share Ownership of the Republic of Indonesia

Kepemilikan Saham PGN yang Mencapai 5% atau Lebih 180
PGN Share Ownership with 5% or More

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi (Secara Langsung) 180
Direct Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi (Secara Tidak Langsung) 182
Indirect Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Klasifikasi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat (Kepemilikan Saham Masing-Masing Kurang dari 5%) 182
Classification of Community Shareholder Groups (Each Share Ownership Less Than 5%)

10 Pemegang Saham Terbesar PGN Per 31 Desember 2025 183
PGN 10 Largest Shareholders as of December 31, 2025

STRUKTUR SUBHOLDING GAS 184
Subholding Gas Structure

ENTITAS ANAK DAN AFILIASI 185
Information on Subsidiary Entities and Affiliates

PROFIL ENTITAS ANAK 187
Profile Of Subsidiary

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM 192
Chronology of Share Listing

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP) 192
Management And Employee Stock Option Plan (MSOP/ESOP)

PEMECAHAN SAHAM 193
Stock Split

PEMBELIAN SAHAM KEMBALI 193
Share Buyback

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI 196
Chronology of Bond Listing

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK 197
Information on Public Accountants and Public Accounting Firms

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 198
Name And Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI 200
List of Association Memberships

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN 201
Information on Company's Website



04 PENUNJANG BISNIS
Business Support

PERWIRA SUBHOLDING GAS 204
Gas Subholding Employees

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS 204
Profile of Gas Subholding Employees

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender 204
Number of Gas Subholding Employees Based on Employment Status and Gender

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Rentang Usia dan Gender 205
Number of Gas Subholding Employees by Age Group and Gender

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Pendidikan dan Gender 206
Number of Gas Subholding Employees by Education and Gender

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender 206
Number of Gas Subholding Employees by Position Group and Gender

KOMITMEN KESETARAAN GENDER 207
Commitment to Gender Equality

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS* 208
Human Capital Management as a Strategic Business Partners

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 209
Competency Development

KEBIJAKAN HEALTH, SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT 216
Health, Safety, Security, and Environment Policies

UPAYA DALAM MEMINIMALKAN RISIKO 217
Efforts to Minimize Risks

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGELOLAANNYA 219
Hazard Identification and Management

MENJAGA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN KARYAWAN 220
Maintaining and Enhancing Employee Health

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER 222
Information Technology and Cybersecurity

FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 223
Strategic Focus and Policy

REALISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI 225
Realization of Information Technology Implementation Program

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN/ATAU PENILAIAN TEKNOLOGI INFORMASI 226
Follow-Up to Audit Results and/or Information Technology Assessment

REALISASI PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI 228
Realization of Information Technology Financing

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPERKUAT LAYANAN 230
Leveraging Technology to Strengthen Services

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER 233
Governance of Information Technology and Cybersecurity

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI 233
IT Talent Competency Development

RENCANA DAN STRATEGI ICT 2026 237
ICT Plan and Strategy for 2026



05 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI 242
Macroeconomic and Industrial Overview

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA 246
Operational Overview Per Business Segment

SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI 246
Trading and Transmission Business Segment

SEGMEN USAHA EKSPLORASI SERTA PRODUKSI MINYAK DAN GAS 253
Oil and Gas Exploration and Production Business Segment

SEGMEN USAHA LAINNYA 256
Other Business Segments

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN 259
Description of Financial Performance

LAPORAN LABA RUGI 259
Statement of Profit or Loss

Pendapatan 259
Revenue

Beban Pokok Pendapatan 260
Cost of Revenue

Laba Bruto 271
Gross Profit

Beban Umum dan Administrasi
General and Administrative Expenses 261

Pendapatan/(Beban) Lain-Lain - net
Other Income/(Expenses) - net 261

Laba Operasi
Operating Profit 261

Pendapatan Keuangan
Financial Revenue 262

Beban Keuangan
Financial Expenses 262

Laba/(Rugi) Selisih Kurs
Exchange Rate Gain/(Loss) 262

Bagian Laba Ventura Bersama
Joint Venture Profit Share 262

Penurunan Nilai Properti Minyak dan Gas
Impairment of Oil and Gas Properties 262

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Profit/(Loss) Before Income Tax 263

Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense 263

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income/(Loss) 264

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity 264

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests 264

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity 264

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests 265

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Statement Of Financial Position 266

Total Aset
Total Assets 266

Aset Lancar
Current Assets 266

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets 267

Liabilitas
Liabilities 268

Liabilitas Jangka Pendek
Short-term Liabilities 268

Liabilitas Jangka Panjang
Long-Term Liabilities 269

Ekuitas
Equity 270

LAPORAN ARUS KAS
Cash Flows Statement 271

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Cash Flows from Operating Activities 271

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Cash Flows from Investing Activities 271

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Cash Flows from Financing Activities 272

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Statement of Changes in Equity 272

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
Ability to Pay Debt 274

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Receivables Collectibility Level 275

STRUKTUR MODAL
Capital Structure 276

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Material Commitment for Capital Expenditure 277

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
Realization of Capital Expenditure 278

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Report Date 279

PROSPEK USAHA
Business Outlook 280

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2025
Comparison of Target and Realization 2025 288

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/ PRODUKSI DAN PEMASARAN
Analysis of Operation/Production and Marketing Realization Achievement 288

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/RUGI DAN STRUKTUR MODAL
Analysis Of Profit/Loss And Capital Structure Realization Achievement 290

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM
Analysis of HR Development Realization Achievement 291

RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG
Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year 292

PROYEKSI STRATEGIS PERUSAHAAN
Company's Strategic Projection 292

PROYEKSI PEMASARAN DAN OPERASIONAL
Marketing and Operational Outlook 294

PROYEKSI PENDAPATAN, LABA, STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
Revenue, Profit, Capital Structure, And Dividend Policy Outlook 294

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM
Human Capital Development Outlook 295

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects 296

PANGSA PASAR
Market Share 296

PROFIL PELANGGAN
Customer Profile 297

PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN
Adjustment of PGN Natural Gas Selling Price 299

STRATEGI PEMASARAN
Marketing Strategy 300

PENINGKATAN LAYANAN DIGITAL
Improvement of Digital Services 301

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN
Marketing Communication Strategies 304

PENGEMBANGAN PRODUK
Product Development 305

POSITIONING PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN
Product Positioning in The Markets and Customers 307

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN
Customer Satisfaction Index 308

KEBIJAKAN DIVIDEN
Dividend Policy 308

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Realization of Use of Proceeds from Public Offering 310

INFORMASI MENGENAI REALISASI ATAS RENCANA AKSI KORPORASI
Information on Realization of Corporate Action Plans 310

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL 311
Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Business Consolidation/Merger, Acquisition, and Debt/Capital Restructurization

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI 311
Material Information Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 316
Changes in Laws and Regulations

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 318
Changes in Accounting Policies

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA 319
Contribution to the Country

PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 320
KPI Achievement and Company Soundness Level

RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2025 321
Details of Issues Arising During 2025

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN 323
Report on The Utilization of Additional State Capital Injection (PMN)

PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN 323
Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA 324
Information on Business Continuity



06 TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN 328
Good Corporate Governance

PENERAPAN GCG PGN 328
Implementation of GCG

PRINSIP GCG 329
GCG Principles

TUJUAN PENERAPAN GCG PGN 330
Objectives of GCG Implementation

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG PGN 330
Legal Basis for GCG Implementation

PERJALANAN PENERAPAN GCG PGN 332
Milestones of GCG Implementation

KEBIJAKAN PENDUKUNG PELAKSANAAN GCG DI PGN 337
Policies Supporting GCG Implementation

MEMPERKUAT BUDAYA PENERAPAN GCG 338
Strengthening the Culture of GCG Implementation

VISI PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN 341
Company Vision in Supporting Company's Sustainable Performance

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 341
Corporate Governance Structure

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 343
General Meeting of Shareholders (GMS)

PEMEGANG SAHAM 343
Shareholders

Hak Pemegang Saham 343
Shareholders' Rights

Tanggung Jawab Pemegang Saham 345
Shareholders' Responsibilities

Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham 346
Fair Treatment of Shareholders

PELAKSANAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2025 346
Implementation of the 2025 GMS

KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA 358
Resolutions of the Previous GMS

DEWAN KOMISARIS 359
Board of Commissioners

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 359
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Tugas Komisaris Utama 360
Duties of the President Commissioner

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS 360
Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS 361
Board Manual of the Board of Commissioners

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS 361
Board of Commissioners Policy on Concurrent Positions and Conflicts of Interest

KEBIJAKAN LARANGAN MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN 362
Policy on Prohibition of Obtaining Loans from the Company

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS 362
Types of Decisions Requiring the Approval of the Board of Commissioners

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 363
Implementation of Duties of the Board of Commissioners

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 365
Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Rapat Internal Dewan Komisaris 366
Internal Meeting of the Board of Commissioners

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 382
Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Kehadiran Dewan Komisaris Dalam RUPS 384
Attendance of the Board of Commissioners at GMS

KOMISARIS INDEPENDEN 385
Independent Commissioners

Kriteria Penentuan Komisaris Independen 385
Criteria for Independent Commissioners

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen 386
Composition and Membership of Independent Commissioners

Pernyataan Independensi Komisaris Independen 387
Independence Statement of Independent Commissioners

DIREKSI 388
Board of Directors

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI 388
Scope of Work and Responsibility of Each Member of the Board of Directors

Tanggung Jawab atas Pengelolaan Risiko ESG 394
Responsibility for ESG Risk Management

BOARD MANUAL DIREKSI 394
Board Manual of The Board of Directors

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI 395
Concurrent Positions and Conflicts of Interest of the Board of Directors

KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 395
Prohibition Policy of Granting Loans to the Board of Directors and the Board of Commissioners

RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI 396
Meetings and Decisions of the Board of Directors

Rapat Internal Direksi 396
Board of Directors Internal Meeting

Kehadiran Direksi Dalam RUPS 418
Attendance of the Board of Directors at the GMS

Keputusan Sirkuler Direksi 419
Board of Directors Circular Resolution

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI 419
Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE 420
Performance Assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS 420
Performance Assessment of the Board of Commissioners

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris 422
Performance Assessment Criteria of the Board of Commissioners

Pihak yang Melakukan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris 422
Party Conducting the Performance Assessment of the Board of Commissioners

PENILAIAN KINERJA DIREKSI 422
Assessment of the Board of Directors

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Perseroan 424
Performance Assessment Criteria of the Company's Directors

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi 424
Party Conducting the Performance Assessment of the Board of Directors

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS 424
Performance Assessment of the Committees of the Board of Commissioners

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris 425
Performance Assessment Criteria of the Committees of the Board of Commissioners

Hasil Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris 425
Results of the Performance Assessment of the Committees of the Board of Commissioners

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 426
Policy and Process for the Nomination of Members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI 426
Policy and Process for the Nomination of Members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris 427
Nomination Procedure for the Board of Commissioners

Prosedur Nominasi Direksi 428
Procedure for the Directors Nomination

Kebijakan Suksesi/Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris 428
Succession/Nomination Policy of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 430
Procedure and Implementation of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris 430
Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 432
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

Besaran Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 433
Remuneration of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 434
Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Pengembalian Tantiem dan Insentif Kinerja (*Clawback*) dan Tantiem yang Ditangguhkan (*Malus*) 435
Clawback of Tantiem and Performance Incentives and Deferred Tantiem (Malus)

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 436
Training Programs to Enhance the Competence of the Board of Commissioners and the Board of Directors

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 436
Training and/or Competency Development Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2025 437
Training and/or Competency Development of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU 446
Policy on Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2025 446
Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 447
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

PENGALAMAN DAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 449
Experience and Competence of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 449
Representation of Female Members on the Board of Commissioners and Board of Directors

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI (PER 31 DESEMBER 2025) 450
Affiliations among the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders (as of December 31, 2025)

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS 451
Committees under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT 451
The Audit Committee

Perubahan Komposisi Komite Audit 451
Changes in the Composition of the Audit Committee

Profil Anggota Komite Audit Per 31 Desember 2025 452
Profile of Audit Committee Members as of December 31, 2025

Keahlian Komite Audit 454
Expertise of the Audit Committee

Independensi Komite Audit 454
Independence of the Audit Committee

Dasar Hukum 456
Legal Basis

Piagam Komite Audit 456
Audit Committee Charter

Periode dan Masa Jabatan 456
Period and Term of Office

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit 457
Membership Requirements for the Audit Committee

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 458
Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Wewenang Komite Audit 459
Authority of the Audit Committee

Program Pelatihan Anggota Komite Audit 460
Training Programs for Members of the Audit Committee

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 461
Implementation of Audit Committee Activities

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Lainnya dalam Penyusunan dan Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan 463
Implementation of Other Audit Committee Activities in the Preparation and Publication of Annual Financial Statement

Kendala/Tantangan Pelaksanaan Kinerja dan Antisipasi yang Dilakukan 463
Performance Implementation Challenges/Obstacles and Mitigation Strategies

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Audit 464
Policy, Frequency, and Attendance of Audit Committee Meetings

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG 468
Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Perubahan Komposisi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 468
Changes in the Composition of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG per 31 Desember 2025 470
Profile of Nomination, Remuneration, and GCG Committee as of December 31, 2025

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 471
Independence of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 472
Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter

Periode dan Masa Jabatan 472
Period and Term of Office

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 475
Duties and Responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 475
Authorities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Program Pelatihan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 476
Nomination, Remuneration, and GCG Committee Member Training Program

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 477
Implementation of Duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 478
Policy, Frequency, and Attendance of Nomination, Remuneration and GCG Committee Meetings

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA 479
Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 480
Changes in the Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Members

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha per 31 Desember 2025 481
Profile of Risk Management and Business Development Monitoring Committee as of December 31, 2025

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 483
Independence of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 483
Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter

Masa Jabatan 484
Term of Office

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 484
Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 485
Authorities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Program Pelatihan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 485
Training Programs for Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 487
Implementation of Duties and Activities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha 489
Policy, Frequency, and Attendance of Meetings of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI 489
Integrated Governance Committee

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi 490
Composition of the Integrated Governance Committee

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Independence of the Integrated Governance Committee 491

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
Charter of the Integrated Governance Committee 491

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee 491

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi
Authorities of the Integrated Governance Committee 492

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi
Implementation of Duties and Activities of the Integrated Governance Committee 492

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Policy, Frequency, and Attendance of Meetings of the Integrated Governance Committee 493

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Secretary to the Board of Commissioners 494

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Profile of the Secretary to the Board of Commissioners 495

PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Training Program of the Secretary to the Board of Commissioners 496

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2025
Implementation of Duties of the Secretary to the Board of Commissioners 2025 496

KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Committees Under the Board of Directors 497

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee 497

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary 498

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary Profile 498

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Basis for the Appointment of the Corporate Secretary 499

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY
Functions and Responsibilities of the Corporate Secretary 499

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY
Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary 499

STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY
Organizational Structure of the Corporate Secretary 501

PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY 2025
Implementation of the Corporate Secretary's Duties in 2025 501

KETERBUKAAN INFORMASI
Information Disclosure 502

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary Training 502

INVESTOR RELATIONS
Investor Relations 503

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI INVESTOR RELATIONS
Duties and Responsibilities of the Investor Relations Division 504

KEGIATAN DIVISI INVESTOR RELATIONS PADA 2025
Investor Relations Division Activities in 2025 506

INTERNAL AUDIT
Internal Audit 506

PROFIL CHIEF AUDIT EXECUTIVE
Chief Audit Executive Profiles 510

DASAR PENGANGKATAN CHIEF AUDIT EXECUTIVE
Basis for the Appointment of Chief Audit Executive 510

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CHIEF AUDIT EXECUTIVE
Appointment and Dismissal of the Chief Audit Executive 510

KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN
Position of Internal Audit within the Company's Structure 511

PIAGAM INTERNAL AUDIT
Internal Audit Charter 511

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Duties and Responsibilities 513

Wewenang
Authority 514

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT INTERNAL AUDIT DENGAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU KOMITE AUDIT JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT
Policy and Implementation of the Frequency of Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee 514

JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT
Number of Internal Audit Personnel 514

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONEL INTERNAL AUDIT
Competency Development of Internal Audit Personnel 515

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT
Internal Audit Professional Certifications 516

PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2025
Internal Audit Activity Implementation Across 2025 517

Insight
Insight 517

Pelaksanaan Audit dan Konsultasi
Audit and Consultation Implementation 517

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
Follow-Up Actions on Audit Recommendations 517

Pendampingan Auditor Eksternal
Assistance for External Auditor 519

Lain-Lain
Miscellaneous 519

AUDITOR EKSTERNAL
Auditor Eksternal 520

PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor Appointment Process 520

BESARAN BIAYA JASA AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor Service Fees 521

JASA LAIN
Other Services 522

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System 523

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System Conformity 523

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
Financial and Operational Control and Compliance with Laws and Regulations 524

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018
Conformity of Internal Control System with ISO 31000:2018 525

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Evaluation of Internal Control System Effectiveness 525

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 526
Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

FUNGSI KEPATUHAN 527
Compliance Function

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN 527
Organizational Structure of Compliance Function

AUDIT KEPATUHAN DI PGN 527
Compliance Audit at PGN

PENGADAAN BARANG/JASA 528
Goods/Services Procurement

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA 528
Goods/Services Procurement Policy

PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 530
Manual for Increasing Domestic Product Use

DIGITALISASI *PROCUREMENT* 530
Procurement Digitalization

KEBIJAKAN *GREEN PROCUREMENT* 531
Green Procurement Policy

KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI 532
Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

PROGRAM DAN PROSEDUR 533
Programs and Procedures

PROGRAM DAN PROSEDUR DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (*KICKBACKS*), *FRAUD*, SUAP DAN/ ATAU GRATIFIKASI 534
Programs and Procedures to Overcome Corruption Practices, Kickbacks, Fraud, Briberies, and/or Gratification

PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANTIKORUPSI 535
Anti-Corruption Training and Outreach Program

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 536
Gratification Control

PENGELOLAAN GRATIFIKASI 536
Gratification Management

ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI 537
Ethics Related to Gratification

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2025 537
Gratification Control Report 2025

PENANAMAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI 537
Anti-Gratification Culture

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM 538
Prevention Against Insider Trading

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 539
Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN)

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN 539
LHKPN Submission and Management Policy

WAJIB LAPOR LHKPN 539
Mandatory LHKPN Report

PENGELOLA LHKPN 539
LHKPN Management

SISTEM MANAJEMEN RISIKO 540
Risk Management System

ORGAN PENGELOLA RISIKO 540
Risk Management Organ

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO 542
Duties and Responsibilities of Risk Management

TUGAS DAN FUNGSI RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM 543
Risk Management Champions Team Duties and Functions

IMPLEMENTASI FRAMEWORK ISO 31000:2018 545
Implementation of ISO 31000:2018 Framework

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO 546
Development of Risk Management Information System

ROADMAP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO 548
Risk Management Roadmap

SERTIFIKASI PERSONEL 549
Personnel Certification

STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN 550
Risk Strategy in the Company

Kebijakan Selera Risiko 550
Risk Appetite Policy

Kebijakan Ambang Batas Risiko 550
Risk Threshold Policy

PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN 550
Managing Risks Faced by the Company

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO 552
Risk Management Governance Structure

PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN 554
Programs to Improve the Company's Risk Awareness Culture

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS 555
Implementation of Business Continuity Management System

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO 555
Review of the effectiveness of the risk management system

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO 556
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Risk Management System

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI 557
Legal Cases

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK 563
Legal Cases Faced by Subsidiaries

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PGN 566
Important Cases Faced by Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PGN

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK 566
Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF 567
Information on Administrative Sanctions

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT 567
Administrative Sanctions from Relevant Authorities

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM ATAU PERATURAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN ATAU MATERIAL 567
Sanctions for Non-Compliance with Laws or Regulations Pertaining to Significant or Material Related-Party Transactions

SANKSI DARI REGULATOR TERKAIT PERISTIWA PENTING 567
Sanctions from Regulators Related to Important Events

SANKSI TERKAIT PERATURAN PENCATATAN 567
Sanctions Related to Listing Regulations

SANKSI TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN 567
Sanctions Related to Tax Regulations

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN 568
Management and Control of Tax Aspects

KODE ETIK PERUSAHAAN 569
Company's Code of Ethics

POKOK-POKOK KODE ETIK 571
Code of Ethics Principles

Etika Usaha 571
Business Ethics

Etika Kerja 571
Work Ethics

Kebijakan Sosial dan Politik 572
Sociopolitical Policy

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI 573
Statement of Code of Ethics Applicable to All Organization Levels

SOSIALISASI KODE ETIK 573
Outreach of the Code of Ethics

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK 574
Measures to Implement and Enforce the Code of Ethics

SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK 574
Sanctions for Violations of the Code of Ethics

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2025 575
Violations of the Code of Ethics and Imposition of Sanctions in 2025

MONITORING DAN EVALUASI 575
Monitoring and Evaluation

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN 576
Development of PGN Corporate Culture and Increased Employee Engagement with the Company

PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* 579
Increasing Employee Engagement

PROGRAM ESOP/MSOP 581
ESOP/MSOP Program

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN 583
Management Share Ownership Disclosure Policy

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN 583
Conflict of Interest Guidelines

PRINSIP DASAR 583
Basic Principles

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 583
Situations of Conflict of Interest

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN 584
Conflict of Interest Reporting

WHISTLEBLOWING SYSTEM 585
Whistleblowing System

CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN 586
Mechanism to Submit Whistleblowing

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER* 588
Protection for Whistleblower

PENANGANAN PENGADUAN 588
Grievance Response

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN 589
Parties Authorized to Manage Grievances

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA 590
Results of Grievance Response and Follow-Up Actions

PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2025 590
Grievances Through the Whistleblowing System in 2025

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 591
Preparation of Financial Statements

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN 592
Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN 592
Transparency of the Company's Financial Condition

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN 592
Transparency of the Company's Non-Financial Condition

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN 593
Access to Company Information and Data

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI 594
Access to Information and Communication

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 595
Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

PENERAPAN PARAMETER ACGS 595
Implementation of ACGS

PEMENUHAN PARAMETER OJK DAN PUGKI 602
Fulfillment of OJK and PUGKI Parameters

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai Ketentuan OJK 602
Implementation of Public Company Corporate Governance Aspects and Principles in Accordance with OJK Regulation

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan PUG-KI 2021 611
Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in Accordance with PUGKI 2021 Provisions

RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2026 658
GCG Strengthening Plan in 2026



07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Corporate Social Responsibility

IMPLEMENTASI KONSEP KEBERLANJUTAN DAN INTEGRASINYA DALAM PROSES BISNIS PERUSAHAAN 662
Implementation of Sustainability Concept and Its Integration into the Company's Business Processes

FOKUS KEBERLANJUTAN 662
Sustainability Focus

PROSEDUR DAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 666
Procedures and Information Systems for Sustainability Report Preparation

Acuan Penyusunan Laporan 666
Reference for Report Preparation

Proses Penentuan Topik Material 666
Material Topic Determination Process



08 LAPORAN KEUANGAN 670
Financial Statements



09 REFERENSI
Reference

REFERENSI SEOJK NO 16/ SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK 940
Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/ SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report

LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 960
Appendix VII - Regulation Of The Minister Of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines For Governance and Significant Corporate Activities of Stateowned Enterprises



PENYEDIA ENERGI BAIK UNTUK INDONESIA

GOOD ENERGY PROVIDER FOR INDONESIA

60 TAHUN PGN BERSAMA INDONESIA

60 Years PGN
With Indonesia



Pemain Utama di Perdagangan Gas dengan Pangsa Pasar 91,36%*

A Leading Player in the Gas Trade with a 91.36%* Market Share

Memiliki Wilayah Operasional di 18 Provinsi dan 78 Kota/Kabupaten di Indonesia

With Operation Regions in 18 Provinces and 78 Cities/Regencies in Indonesia

MENJANGKAU
Reaching

>820.000

Pelanggan Rumah Tangga Jargas
City Gas Household Customers

MEMBANGUN
Building

>33.490 km

Jaringan Pipa Gas Nasional
National Gas Pipeline Networks

MELAYANI
Serving

>6.000

Pelanggan Kecil, Industri, dan Komersial
Small Businesses, Industrial, and Commercial Customers

*) Pangsa pasar ini dihitung berdasarkan niaga gas melalui pipa dan tidak mencakup niaga *point-to-point* yang dilakukan oleh *eligible buyers*, seperti PLN dan industri pupuk, yang melakukan pembelian langsung dari *upstream*.
The calculation of market share is based on gas trading via pipelines and excluding point-to-point trading conducted by eligible buyers, such as PLN and fertilizer industries purchasing directly from the upstream.

IKHTISAR CAPAIAN 2025
PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2025

KINERJA KEUANGAN
Financial Performance

Pendapatan
Revenue
USD 3.976 Juta million

Laba
Net Profit
USD 215 Juta million

KINERJA OPERASIONAL
Operational Performance

Niaga
Trading
836 BBTUD

Transmisi
Transmission
1.609 MMSCFD

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
Company Soundness Level

FitchRatings

Peringkat Berdiri Sendiri
Stand Alone Rating
bb+/aa (idn)

Peringkat Akhir
Final Rating
BBB-/AA+ (idn)/Stable

BERDASARKAN PERMEN BUMN NOMOR PER-2/MBU/03/2023
BASED ON PERMEN BUMN NUMBER PER-2/MBU/03/2023

AAA Sangat Sehat
Excellent Soundness

TATA KELOLA
Governance

PENERAPAN TATA KELOLA
GOVERNANCE PRACTICE

50 Besar Perusahaan dengan Penerapan GCG Terbaik di ASEAN dan Top 5 di Indonesia*
Top 50 Companies with the Best GCG Implementation in ASEAN and Top 5 in Indonesia*

ACGS
114,60 Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)

PUGKI
Apply untuk seluruh prinsip
All principles applied

OJK
Comply untuk seluruh aspek
Fully complied

KEPUASAN PELANGGAN
Customer Satisfaction

Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index (CSI)

4,67 Sangat Baik / Very Good
Indeks Skala 1-5 / Scale Index 1-5

Indeks Loyalitas Pelanggan
Customer Loyalty Index (CLI)

4,75 Sangat Baik / Very Good
Indeks Skala 1-5 / Scale Index 1-5

Tingkat Keinginan Pelanggan Memberikan Rekomendasi untuk Menggunakan Produk dan Layanan PGN (*Net Promoter Score*)
Level of Customer Eagerness to Recommend PGN Products and Services (Net Promoter Score)

71,68% *High to promote*
Indeks Skala <-30 - >30 / Scale Index <-30 - >30

KINERJA SAHAM & DIVIDEN
Stock Performance & Dividend

Kinerja saham PGAS meningkat sebesar **20%** jika dibandingkan dengan harga penutupan tahun lalu.

PGAS stock performance increased by **20%** compared to the closing price in the previous year.

Tren *Dividend Payout Ratio* Tiga Tahun Terakhir
Trends in Dividend Payout Ratio Over the Last Three Years
>70%

Tren *Dividend Yield* Tiga Tahun Terakhir
Dividend Yield Trends Over the Last Three Years
>9%

* Berdasarkan penilaian Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mencakup 569 PLCs dengan kapitalisasi pasar yang besar di tingkat ASEAN.
Based on the Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment covering 569 PLCs with large capital market at the ASEAN level.

PERINGKAT KREDIT
Credit Rating

Periode *Period*	Moody's		Fitch	
	Ratio	Outlook	Rating	Outlook
2025	**Baa2**	Stable	**BBB-**	Stable
2024	**Baa2**	Stable	**BBB-**	Stable

OPERATIONAL EXCELLENCE
Operational Excellence

PGN senantiasa mewujudkan *Operational Excellent* melalui upaya implementasi Sistem Manajemen Aset Infrastruktur Gas berbasiskan standar internasional ISO 55001 dan penerapan berbagai kebijakan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur gas PGN yang merupakan tulang punggung penyaluran gas bumi nasional didukung dengan teknologi yang memadai untuk memastikan operasional infrastruktur dan penyaluran gas dapat berjalan dengan menjamin faktor kehandalan, keselamatan, keamanan dan lingkungan.

PGN terus melakukan peninjauan kesesuaian untuk memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan demi peningkatan mutu dan layanan operasional infrastruktur serta penyaluran gas.

PGN is committed to achieve operational excellence by adopting Asset Management System for Natural Gas Infrastructure aligned with the ISO 55001 International Standard, complemented by the implementation of various strategic policies.

The availability and functionality of PGN gas infrastructure, serving as the backbone of the national natural gas transmission and distribution network, are supported by fit-to-purpose technologies designed to ensure seamless operations for gas transmission and distribution. This approach prioritizes reliability, safety, security, and adherence to environmental standards.

PGN continuously conducts compliance evaluations to ensure improvements in the quality and operational performance of its gas infrastructure for transmission and distribution services.

KINERJA HSSE
HSSE Performance

PGN mencatatkan total 45.380.400 jam kerja aman dengan akumulasi mencapai 518.307.557 jam kerja aman pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001, ISO 45001, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai wujud komitmen terhadap standar manajemen lingkungan dan keselamatan kerja yang berkelanjutan.

PGN recorded a total of 45,380,400 safe man-hours in 2025, bringing the cumulative total to 518,307,557 safe man-hours. Furthermore, the company successfully maintained its ISO 14001, ISO 45001, and Occupational Health and Safety Management System (SMK3) certifications, reflecting its continuous commitment to sustainable environmental and safety management standards.

PERWIRA SUBHOLDING GAS
Gas Subholding Employees

2.735 **Pekerja**
Employees

3,14% **Tingkat *Turnover***
Turnover Level

Keterikatan Pegawai
Employee Engagement

87,47 **dari 100**
out of 100

MEMPERKUAT PERAN GAS BUMI DENGAN STRATEGI G-A-S

STRENGTHENING THE ROLE OF NATURAL GAS THROUGH THE G-A-S STRATEGY

Gas bumi berperan penting sebagai energi transisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi fondasi pengembangan energi yang lebih rendah emisi. Untuk mendukung hal tersebut, sebagai Subholding Gas di bawah PT Pertamina (Persero), PGN senantiasa berupaya menyusun strategi korporat yang dapat memastikan keberlanjutan pasokan dan keandalan layanan gas bumi, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, dan menjaga daya saing bisnis niaga gas.

Lebih dari itu, dinamika pasokan gas bumi, pergeseran pola kebutuhan gas antar sektor dan wilayah, serta arah kebijakan transisi energi, menuntut PGN untuk memiliki strategi korporat yang mampu menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan transformasi bisnis ke depan. Sejalan dengan penguatan peran gas bumi sebagai energi transisi, PGN juga mengembangkan portofolio bisnis rendah karbon secara bertahap dan terukur.

Natural gas is a vital enabler of energy transition, driving national economic growth while laying the groundwork for the development of lower-emission energy. To achieve this, as Gas Subholding under PT Pertamina (Persero), PGN consistently strives to develop corporate strategies that ensure natural gas supply continuity and reliable services, optimize infrastructure utilization, and maintain the competitiveness of the gas trading business.

Furthermore, the dynamics of natural gas supply, shifting gas demand patterns across sectors and regions, and the trajectory of energy transition policies, require PGN to adopt corporate strategies that address current needs while preparing for future business transformation. Aligned with strengthening the role of natural gas as transition energy, PGN is also developing a low-carbon business portfolio in a progressive and measured manner.

GROW

Strategi Grow diarahkan untuk memperkuat dan menumbuhkan bisnis inti gas bumi melalui peningkatan volume niaga, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, serta penguatan peran PGN dalam rantai pasok gas nasional. Fokus utama pilar ini adalah menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mengedepankan keandalan pasokan dan efisiensi operasional dengan ruang lingkup sebagai berikut:

The Grow strategy is designed to fortify and grow the core national gas business by increasing trading volumes, optimizing infrastructure utilization, as well as strengthening the role of PGN in the national gas supply chain. The core focus of this pillar is to maintain sustainable growth by prioritizing supply reliability and operational efficiency, covering the following scope:

- *Midstream Business*
  Pengembangan infrastruktur pengangkutan minyak & gas bumi (termasuk BBM & LPG), Infrastruktur regasifikasi LNG, pengolahan *stranded* gas serta pemrosesan gas bumi.
- *Downstream Business*
  - Peningkatan kehandalan pasokan gas bumi dan LNG serta pasokan unconventional (SNG, CBM, dll)
  - Pengembangan niaga gas bumi melalui jaringan pipa dan *beyond pipeline* (CNG/LNG retail)
- *City Gas Network*
  Perluasan jaringan gas kota untuk melayani rumah tangga guna mendukung program Pemerintah dalam mengurangi impor LPG.
- *Upstream Business*
  Pengembangan dan optimisasi lapangan produksi dan eksplorasi dalam rangka peningkatan cadangan migas.

- Midstream Business
  Developing oil and natural gas transportation infrastructure (including fuel and LPG), LNG regasification infrastructure, stranded gas processing, and natural gas processing.
- Downstream Business
  - Improving the reliability of natural gas and LNG supplies, as well as unconventional supplies (SNG, CBM, etc.).
  - Developing natural gas trading through pipelines and beyond pipelines (CNG/LNG retail).
- City Gas Network
  Expanding the city gas network to serve households in support of the Government's program to reduce LPG imports.
- Upstream Business
  Developing and optimizing production and exploration fields to boost oil and gas reserves.

ADAPT

Strategi Adapt diarahkan pada pengembangan bisnis pendukung yang masih terkait dengan bisnis utama PGN sebagai bentuk diversifikasi usaha. Ruang lingkup pilar ini mencakup penyediaan layanan energi terpadu (*total energy solutions*) melalui anak usaha PGN, untuk menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Ruang lingkup Adapt adalah sebagai berikut:

The Adapt strategy is oriented towards developing supporting businesses that are still related to PGN's main business as a form of business diversification. The scope of this pillar includes the provision of total energy solutions through PGN's subsidiaries, in order to respond to customer needs in a more comprehensive and integrated manner. The scope of Adapt includes the following scope:

- *Domestic Upstream LNG Infrastructure*
  Penyertaan dalam infrastruktur upstream LNG domestik untuk memperkuat posisi SHG dalam supply chain LNG, dan sebagai ketahanan pasokan.
- *Overseas Business Development*
  Perluasan pasar gas bumi dan penguatan posisi PGN di ekosistem gas internasional.
- *Total solutions Energy Services*
  Penyediaan layanan energi terintegrasi mulai dari konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, digitalisasi, serta properti, untuk memberi nilai tambah bagi pelanggan.

- Domestic Upstream LNG Infrastructure
  Engagement in domestic upstream LNG infrastructure to strengthen SHG's position in the LNG supply chain and ensure supply security.
- Overseas Business Development
  Expanding the natural gas market and strengthening PGN's position in the international gas ecosystem.
- Total Solutions Energy Services
  Providing integrated energy services, starting from construction, operation, maintenance, digitalization to property, to add value to customers.

STEP OUT

Strategi Step Out diarahkan pada persiapan untuk pengembangan bisnis masa depan, khususnya inisiatif rendah karbon, sebagai bagian dari transformasi jangka panjang dan penguatan peran PGN sebagai penyedia energi transisi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

The Step Out strategy is oriented towards preparing for future business development, particularly low-carbon initiatives, as part of a long-term transformation and reinforcement of PGN's role as a provider of transition energy, in the following scope:

- *Gas Derivatives Business*
  Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bernilai tambah (hilirisasi), seperti grey hydrogen, methanol, ammonia, urea, dan turunan petrokimia lainnya.
  Fokus bisnis ini adalah mendorong monetisasi gas domestik, memperluas industri hilir, dan memperkuat ketahanan rantai pasok kimia nasional.
- *Low Carbon Business*
  Pengembangan bisnis rendah karbon melalui *biomethane*, inisiatif blue ammonia dan blue hydrogen, pipa CO_2 untuk CCS/CCUS untuk memenuhi kebutuhan ekosistem energi bersih.
  Bisnis ini untuk menguatkan posisi bisnis utama PGN sebagai penyedia solusi energi yang berkelanjutan.

- Gas Derivatives Business
  Utilizing natural gas as a raw material to produce value-added products (downstreaming), such as grey hydrogen, methanol, ammonia, urea, and other petrochemical derivatives.
  This business focuses on promoting domestic gas monetization, expanding downstream industries, and strengthening the resilience of the national chemical supply chain.
- Low Carbon Business
  Developing low-carbon businesses through biomethane, blue ammonia and blue hydrogen initiatives, and CO_2 pipelines for CCS/CCUS to meet the needs of the clean energy ecosystem.
  This business solidifies PGN's core business position as a provider of sustainable energy solutions.

IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS



01


FSRU JAWA BARAT

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan Revenues	3.975.918.206,00	3.788.619.187,00	3.646.304.165,00	3.568.594.775,00	3.036.100.956,00
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(3.277.594.774,00)	(3.031.238.285,00)	(2.912.724.687,00)	(2.788.052.353,00)	(2.449.252.234,00)
Laba Bruto Gross Profit	698.323.432,00	757.380.902,00	733.579.478,00	780.542.422,00	586.848.722,00
Beban Umum & Administrasi General and Administrative Expenses	(167.882.063,00)	(201.214.919,00)	(196.895.201,00)	(198.664.089,00)	(167.098.168,00)
Pendapatan Lain-lain Other Income	27.791.020,00	40.293.915,00	24.623.337,00	29.097.489,00	37.477.725,00
Beban Lain-lain Other Expenses	(38.598.156,00)	(73.802.786,00)	(18.890.000,00)	(18.800.468,00)	(36.912.649,00)
Laba Operasi Operating Profit	519.634.233,00	522.657.112,00	542.417.614,00	592.175.354,00	420.315.630,00
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(31.428.226,00)	55.632.766,00	(18.530.605,00)	(49.471.093,00)	47.623.265,00
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit/(loss) Before Income Tax	488.206.007,00	578.289.878,00	523.887.009,00	542.704.261,00	467.938.895,00
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(141.605.828,00)	(138.652.608,00)	(147.271.108,00)	(141.361.720,00)	(103.404.760,00)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(loss) for the Year	346.600.179,00	439.637.270,00	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income/(Loss)	(29.451.186,00)	10.236.286,00	14.934.137,00	(11.436.356,00)	(11.540.867,00)
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year	317.148.993,00	449.873.556,00	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit/(Loss) for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent entity	215.364.799,00	339.427.774,00	278.091.179,00	326.239.697,00	303.823.865,00
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	131.235.380,00	100.209.496,00	98.524.722,00	75.102.844,00	60.710.270,00
Total Total	346.600.179,00	439.637.270,00	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	185.913.613,00	349.664.060	293.025.316,00	314.803.341,00	292.213.202,00
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interests	131.235.380,00	100.209.496,00	98.524.722,00	75.102.844,00	60.780.066,00
Total Total	317.148.993,00	449.873.556,00	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00
Laba/(Rugi) Bersih Per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Dasar dan Dilusian Earning/(Loss) Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity – Basic and Diluted	0,009	0,014	0,0115	0,013	0,013
EBITDA	971.196.992,00	1.076.683.217,00	1.085.552.739*)	1.218.815.618,00*)	855.001.519,87

*) Memperhitungkan laba/(rugi) selisih kurs dan bagian laba dari ventura bersama
*) Accounting for foreign exchange profit/(loss) and the portion of profit attributable from joint ventures

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Financial Position

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Total Aset Lancar Total Current Assets	2.073.924.082,00	1.986.961.762,00	1.892.425.055,00	2.212.365.073,00	2.191.174.530,00
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	4.158.460.129,00	4.428.987.968,00	4.706.813.414,00	4.982.494.909,00	5.319.774.372,00
Total Aset Total Assets	6.232.384.211,00	6.415.949.730,00	6.599.238.469,00	7.194.859.982,00	7.510.948.902,00
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.169.445.891,00	1.134.487.375,00	1.462.417.579 ,00	992.569.575,00	863.911.451,00
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilites	1.455.102.750,00	1.609.935.071,00	1.596.417.511,00	2.760.519.769,00	3.362.112.893,00
Total Liabilitas Total Liabilities	2.624.548.641,00	2.744.422.446,00	3.058.835.090,00	3.753.089.344,00	4.226.024.344,00
Total Ekuitas Total Equity	3.607.835.570,00	3.671.527.284,00	3.540.403.379,00	3.441.770.638,00	3.284.924.558,00
Belanja Modal Capital Expenditure	282.429.599,00	255.374.464,00	231.898.089,00	214.818.556,00	260.602.127,00
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	904.478.191,00	852.474.387,00	430.007.476,00	1.219.795.498,00	1.310.264.730,00
Jumlah Investasi pada Entitas Lain Total Investment in Other Entities	305.825.339,00	311.953.210,00	307.204.288,00	302.802.841,00	338.967.517,00

ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Consolidated Cash Flows

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	657.096.215,00	785.214.989,00	723.688.604,00	969.699.872,00	581.705.258,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flows From Investing Activities	(126.223.903,00)	(48.538.485,00)	(57.667.488,00)	30.381.919,00	117.178.339,00
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(560.404.290,00)	(568.061.771,00)	(878.205.110,00)	(995.743.678,00)	(133.687.716,00)
Kas Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Balance at the Beginning of The Year	1.383.182.362,00	1.244.731.682,00	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00	1.179.044.518,00
Kas setara Kas Akhir Tahun End of the Year Cash and Cash Equivalents	1.336.288.104,00	1.383.182.362,00	1.244.731.682,00	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00

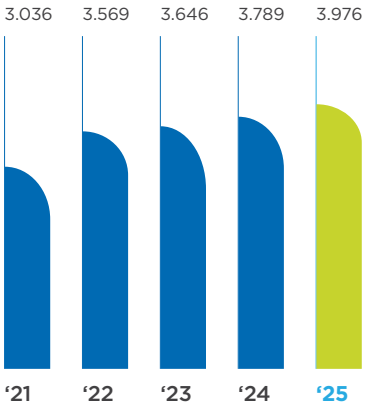
RASIO KEUANGAN
Financial Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Current Ratio (X) Current Ratio (X)	1,77	1,75	1,29	2,23	2,49
Cash Ratio (X) Cash Ratio (X)	1,14	1,24	0,85	1,46	1,71
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Marjin Laba Kotor Gross Profit Margin (%)	17,56	19,99	20,12	21,87	19,33
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin (%)	5,42	8,96	7,63	9,14	10,01
Rasio Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)(%)	5,97	9,24	7,85	9,48	9,25
Rasio Imbalan atas Aset (ROA) Return on Assets (ROA) (%)	3,46	5,29	4,21	4,53	4,05
Rasio Pertumbuhan Growth Ratios					
Tingkat Pertumbuhan Bisnis Sales Growth Rate (%)	4,94	3,90	2,18	17,54	5,22
Tingkat Pertumbuhan Laba Bersih Net Profit Growth Rate (%)	(36,55)	22,06	(14,76)	7,38	214,75
Rasio Pemodalan Capital Adequacy Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity (%)	30,46	34,63	43,65	62,46	89,82
Rasio Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset (%)	17,63	19,82	23,42	29,88	39,28
Rasio Saham Stock Price Ratios					
Rasio Harga Saham terhadap Laba per Saham Price to Earning (X)	12,69	7,03	6,36	8,61	7,41
Rasio Harga Saham terhadap Ekuitas Buku Price to Book Value (X)	0,77	0,363	0,283	0,443	0,398

KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE

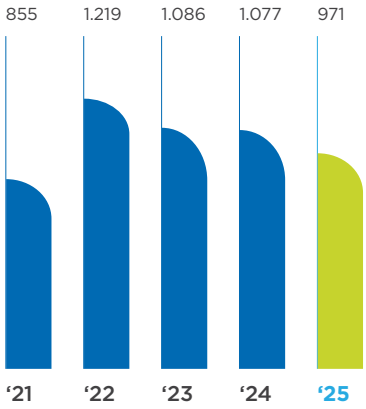
PENDAPATAN
REVENUE

Juta USD
Millions USD



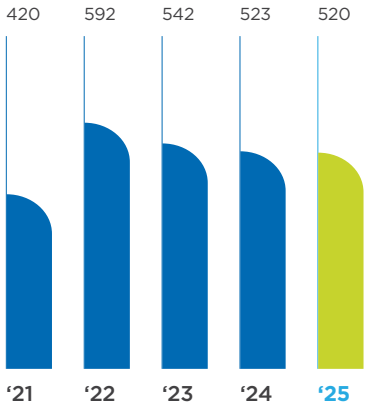
EBITDA
EBITDA

Juta USD
Millions USD



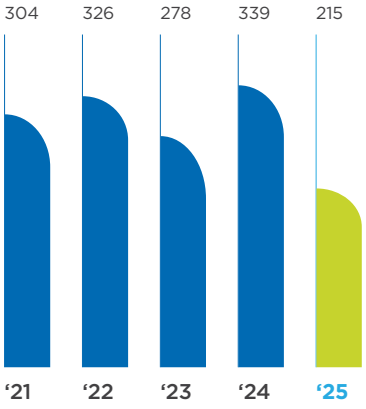
LABA OPERASI
OPERATING PROFIT

Juta USD
Millions USD



LABA BERSIH*
NET PROFIT*

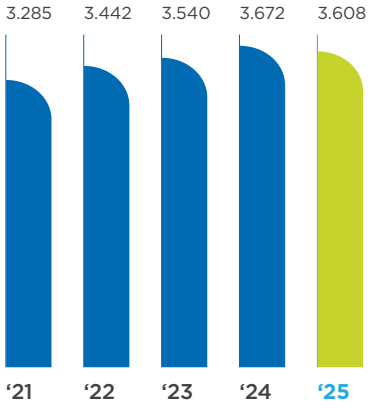
Juta USD
Millions USD



*laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
profit for the year attributable to owners of the parent entity

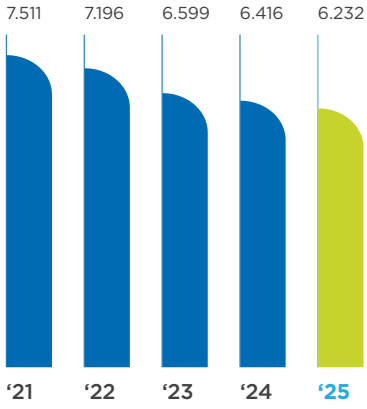
TOTAL EKUITAS
TOTAL EQUITIES

Juta USD
Millions USD



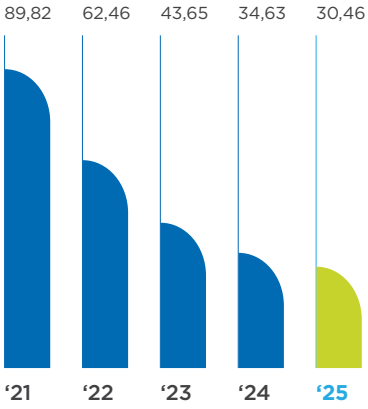
TOTAL ASET
TOTAL ASSETS

Juta USD
Millions USD



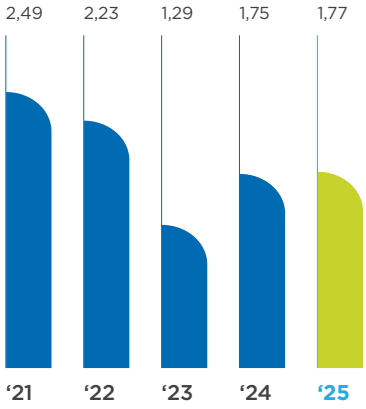
DEBT TO EQUITY RATIO
DEBT TO EQUITY RATIO

Dalam %
In %



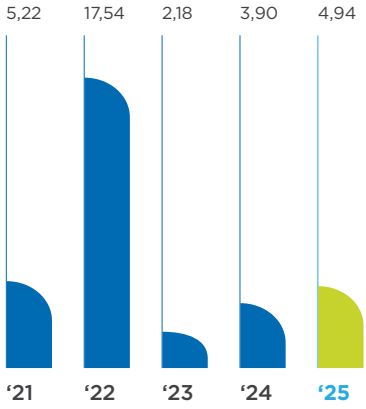
CURRENT RATIO
CURRENT RATIO

Dalam X
In X



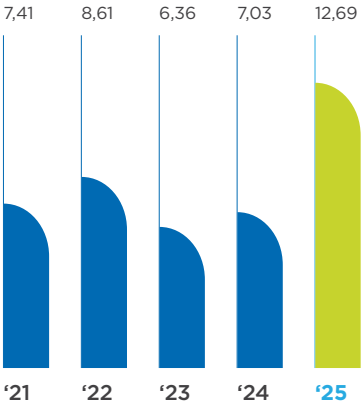
SALES GROWTH RATIO
SALES GROWTH RATIO

Dalam %
In %



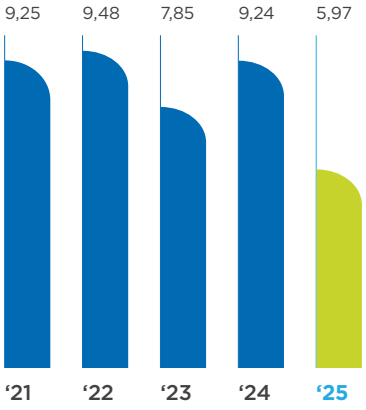
PRICE TO EARNINGS RATIO
PRICE TO EARNINGS RATIO

Dalam X
In X



ROE
ROE

Dalam X
In X

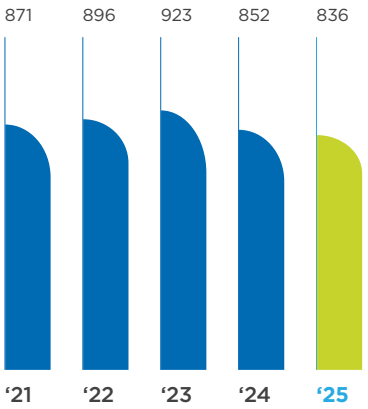




KINERJA OPERASIONAL
OPERATIONAL PERFORMANCE

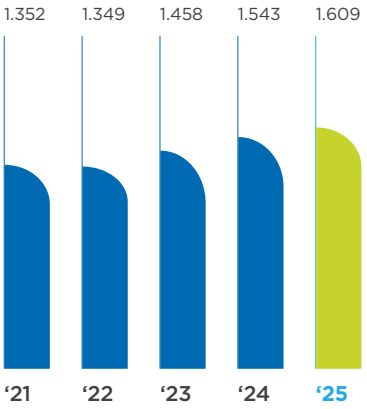
VOLUME NIAGA (BBTUD)
TRADING VOLUME (BBTUD)

Volume Niaga (BBTUD)
Trading Volume (BBTUD)



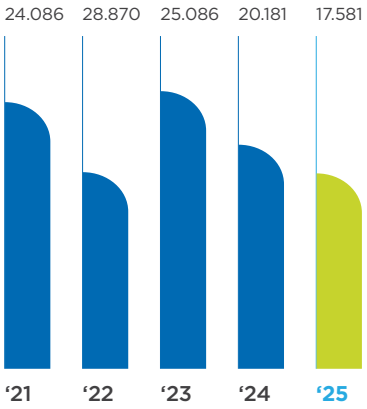
VOLUME TRANSMISI (MMSCFD)
TRANSMISSION VOLUME (MMSCFD)

Volume (MMSCFD)
Volume (MMSCFD)



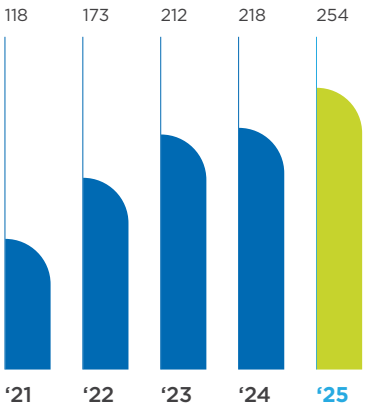
VOLUME *LIFTING* (BOEPD)
VOLUME LIFTING (BOEPD)

Volume (BOEPD)
Volume (BOEPD)



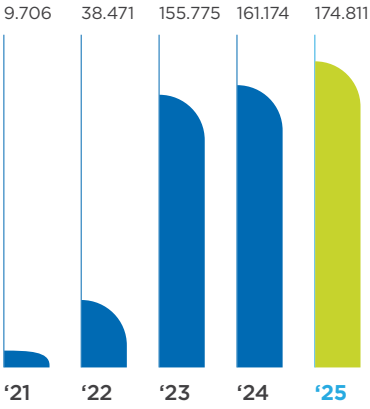
VOLUME REGASIFIKASI+TUA (BBTUD)
REGASSIFICATION VOLUME+TUA (BBTUD)

Volume (BBTUD)
Volume (BBTUD)



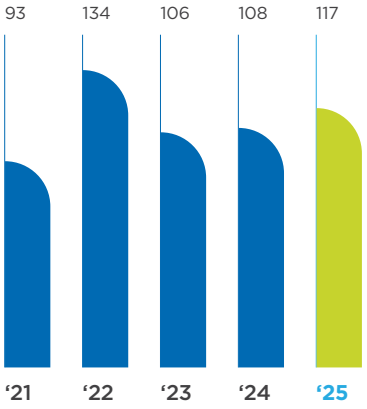
VOLUME TRANSPORTASI MINYAK (BOEPD)
OIL TRANSPORTATION VOLUME (BOEPD)

Volume (BOEPD)
Volume (BOEPD)



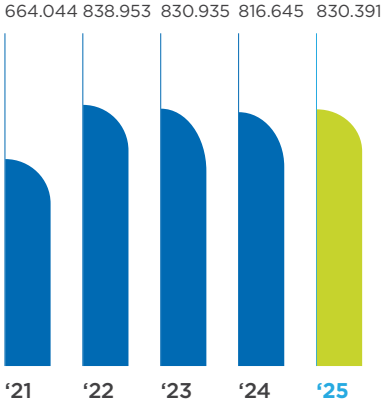
VOLUME PEMROSESAN LPG (TPD)
LPG PROCESSING VOLUME (TPD)

Volume (TPD)
Volume (TPD)



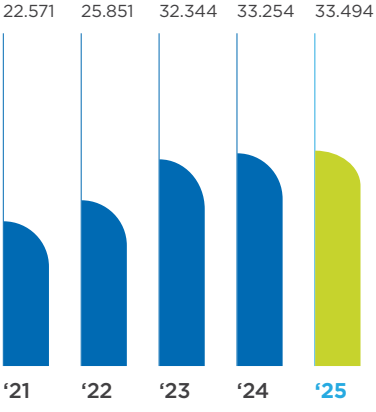
JUMLAH PELANGGAN
TOTAL CUSTOMERS

Jumlah Pelanggan
Total Customers



PANJANG PIPA (KM)
LENGTH OF PIPELINES (KM)

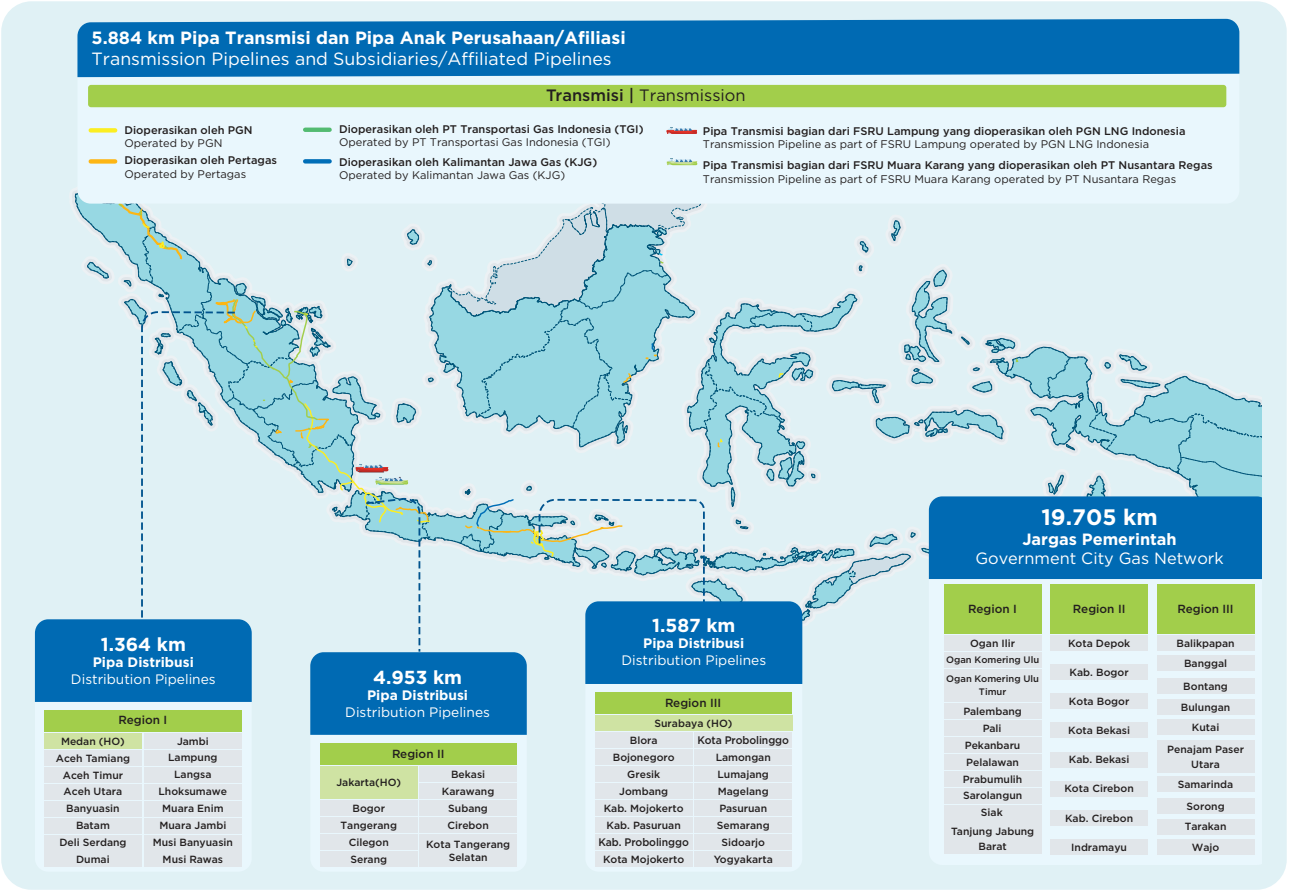
Panjang Pipa (KM)
Length of Pipelines (KM)



PORTOFOLIO INFRASTRUKTUR PIPA SUBHOLDING GAS
GAS SUBHOLDING PIPELINE INFRASTRUCTURE PORTFOLIO

Subholding Gas mengoperasikan 7.904 km Pipa Distribusi, 5.884 km Pipa Transmisi dan Pipa Anak Perusahaan/ Afiliasi, serta 19.705 km Pipa Jargas. Kegiatan operasional infrastruktur gas bumi PGN dikelola oleh Satuan Kerja Operation and Maintenance Management yang tersebar di 12 Provinsi serta operasional infrastruktur lainnya yang dikelola oleh Anak Perusahaan/Afiliasi PGN di enam Provinsi.

Gas Subholding operates 7,904 km of Distribution Pipelines, 5,884 km of Transmission Pipelines and Subsidiaries/ Affiliate Pipelines, as well as 19,705 km Gas Network Pipelines. PGN's natural gas infrastructure operations are managed by the Operation and Maintenance Management Unit operating across 12 provinces, while other operational infrastructures are managed by PGN's Subsidiaries and Affiliates in six Provinces.



Dalam Kilometer
In Kilometer

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Distribusi | Distribution					
Region I					
Medan	693	692	676	661	655
Pekanbaru	15	15	15	15	15
Batam	208	193	185	171	166
Dumai	84	81	80	70	68
Palembang	222	219	202	195	194
Lampung	141	138	135	100	98
Region II					
Jakarta	1.037	930	913	782	754
Bogor	744	740	736	660	657
Tangerang	1.419	1.413	1.090	512	505

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Cilegon	196	195	135	124	124
Bekasi	737	724	595	495	487
Karawang	353	348	266	230	216
Cirebon	467	461	461	433	414
Region III					
Sidoarjo	435	433	425	422	419
Pasuruan	228	225	221	217	217
Surabaya	694	661	635	604	606
Semarang	224	195	97	23	18
Bojonegoro	2	1	1	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-
Bangai	2	2	2	-	-
Sorong	1	1	1	-	-
Total Distribusi **Total Distribution**	7.904	7.669	6.872	5.715	5.613
Transmisi | Transmission					
Transmisi Medan Medan Transmission	37	37	37	37	37
SSWJ	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
LNG Jakarta*)	15	15	15	15	15
LNG Lampung*)	21	21	21	21	21
Kepodang-Tambak Lorok	201	201	201	201	201
Total Transmisi **Total Transmission**	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Pertagas					
Pipa Gas Gas Pipe	2.993	2.993	2.930	2.896	2.615
Pipa Minyak Oil Pipe	605	605	605	629	262
Total Pertagas	3.598	3.598	3.535	3.525	2.877
Total Infrastruktur Subholding Gas **Total Gas Subholding Infrastructure**	12.780	12.547	11.687	11.520	9.770
Jargas)** **City Gas Network**	19.705	19.701	19.651	14.326	11.795
Total Pengelolaan Jaringan Pipa **Total Management of Pipeline Network**	32.487	32.248	31.338	24.846	21.565
Afiliasi Tidak Terkonsolidasi | Non-Consolidated Affiliation					
Grissik Duri	536	536	536	536	536
Grissik-Batam-Singapore	469	469	469	469	469
Total Afiliasi Total Affiliates	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Total Pengelolaan Jaringan Pipa PGN & Afiliasi **Total Pipeline Network managed by PGN and Its Affiliates**	33.494	33.254	32.344	25.851	22.571

*) Pipa transmisi sebagai bagian fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG
**) Jargas terdiri dari jaringan gas yang dibangun dengan menggunakan APBN dan jaringan gas yang merupakan Barang Milik Negara yang telah diinbrengkan kepada Pertamina sebagai Penambahan Penyertaan Modal Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023. Sejak tahun 2015, Jargas Pemerintah tersebut dikelola operasionalnya oleh PGN Group

*) Transmission pipeline is part of LNG receiving terminals and regasification facilities
**) Gas Networks includes the State Budget-funded gas networks and gas networks designated as State-Owned Assets that were contributed in-kind to Pertamina as Addition of the State Capital Participation pursuant to Government Regulation Number 50 of 2020 and Government Regulation Number 48 of 2023. Since 2015, PGN Group has been responsible for operating the City Gas Network

KINERJA SAHAM
STOCK PERFORMANCE

Pada tahun 2025, harga saham PGN dengan kode saham PGAS dibuka di level Rp1.610. Likuiditas saham PGAS sangat tinggi dengan rata-rata volume perdagangan harian mencapai 426.678 lot di sepanjang tahun 2025. Harga saham PGAS berada pada titik terendah di posisi Rp1.425 pada 8 April 2025, dan harga tertinggi Rp1.925 pada 24 Desember 2025.

In 2025, PGN's share price with ticker code PGAS was opened at the level of Rp1,610. The liquidity of PGAS shares was very high, with an average daily trading volume of 426,678 lots throughout the year. The share price reached its lowest point at Rp1,425 on April 8, 2025 and its highest at Rp1,925 on December 24, 2025.

Saham PGAS ditutup pada harga Rp1.910 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp46.301 miliar. Harga saham PGAS pada penutupan tahun 2025 telah meningkat 20% jika dibandingkan dengan harga penutupan pada periode tahun sebelumnya.

PGAS share was closed at Rp1,910, with a market capitalization value of Rp46.301 billion. The share price at the end of 2025 increased by 20% from the previous year's closing price.

Saham PGAS tercatat di dalam sejumlah indeks saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, MNC36, Sminfra18, ESGL, SRIKEHATI, ESGQ KEHATI, Investor 33, IDXVESTA28, ISSI, JII, JII70, IDX-MES BUMN 17, IDXSHAGROW, IDX BUMN 20, IDX SMC Liquid, IDX SMC Composite, IDX HIDIV 20, IDX G30, IIDX LQ 45 Low Carbon Leaders, IDX Value 30, dan Main Board Index/MBX.

PGAS share was listed in several stock indices on the Indonesia Stock Exchange, namely LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, MNC36, Sminfra18, ESGL, SRIKEHATI, ESGQ KEHATI, Investor 33, IDXVESTA28, ISSI, JII, JII70, IDX-MES BUMN 17, IDXSHAGROW, IDX BUMN 20, IDX SMC Liquid, IDX SMC Composite, IDX HIDIV 20, IDX G30, IIDX LQ 45 Low Carbon Leaders, IDX Value 30, and Main Board Index/MBX.

KINERJA SAHAM 5 TAHUN TERAKHIR
Stock Performance over the Last 5 Years

Uraian Description		2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar) Number of Outstanding Shares (Million shares)		24.242	24.242	24.242	24.242	24.242
Kapitalisasi Pasar (RpTriliun) Market Capitalization (Trillion Rp)	Q4	46	39	27	43	33
	Q3	41	35	33	37	29
	Q2	39	37	32	39	24
	Q1	38	33	33	34	32
Volume Perdagangan Rata-rata (Lot) Average Trading Volume (lot)	Q4	382.144	376.797	391.958	562.979	1.661.361
	Q3	336.175	466.460	572.466	1.143.847	1.122.143
	Q2	679.632	562.850	605.447	1.305.070	1.267.694
	Q1	352.493	491.481	397.913	866.224	2.409.008

Uraian Description			2025	2024	2023	2022	2021
Harga Saham (Rp) Share Price (Rp)	Tertinggi Highest	Q4	1.925	1.665	1.420	1.995	1.640
		Q3	1.800	1.700	1.535	1.990	1.215
		Q2	1.895	1.650	1.475	1.860	1.345
		Q1	1.725	1.385	1.770	1.620	1.315
	Terendah Lowest	Q4	1.605	1.430	1.060	1.720	1.205
		Q3	1.560	1.435	1.310	1.500	960
		Q2	1.425	1.275	1.295	1.325	995
		Q1	1.445	1.090	1.325	1.260	1.290
	Penutupan Closing	Q4	1.910	1.590	1.130	1.760	1.375
		Q3	1.690	1.435	1.375	1.535	1.190
		Q2	1.615	1.540	1.305	1.590	1.005
		Q1	1.555	1.360	1.380	1.405	1.315

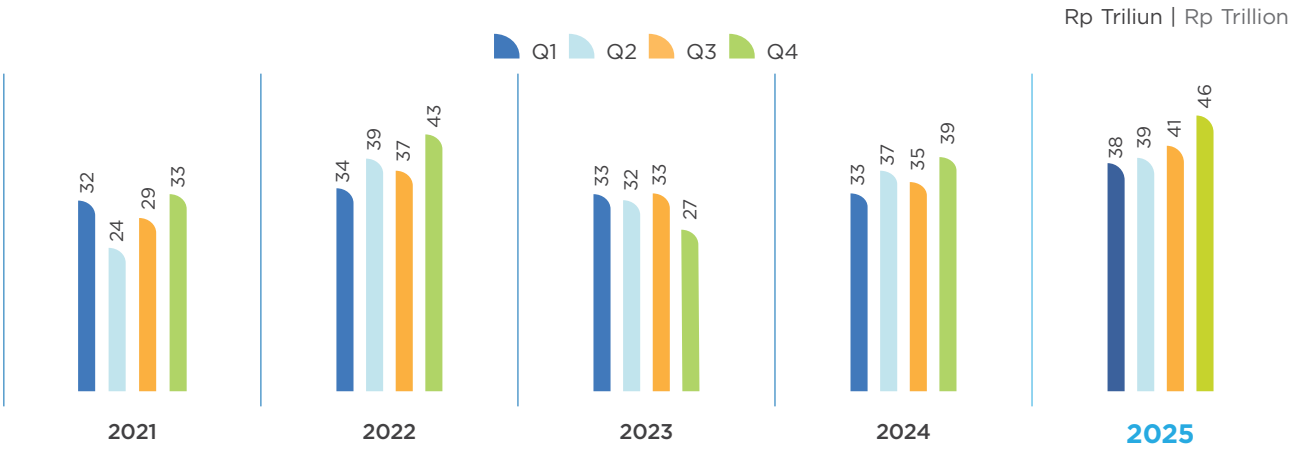
RASIO SAHAM
Stock Ratio

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Earning per Share (USD)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Price to Earning (x)	12,69	7,03	6,36	8,61	7,41
Price to Book Value (x)	0,77	0,65	0,50	0,79	0,71
Return on Equity (%)	5,97	9,24	7,85	9,48	9,25
Dividend Payout Ratio (%)	80,00	80,00	70,00	67,79	0,00
Dividend Yield (%)	9,66	10,46	9,73	7,01	0,00

GRAFIK HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM RATA-RATA PERIODE 2021-2025
Chart of Closing Price and Average Share Trading Volume 2021-2025



KAPITALISASI PASAR (RP TRILIUN)
MARKET CAPITALIZATION (RP TRILLION)



PERGERAKAN HARGA SAHAM TAHUN 2025
Stock Price Movement 2025



Selama tahun 2025, terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja saham PGAS:

1. Konflik geopolitik di Timur Tengah, Rusia dan Ukraina menimbulkan fluktuasi harga energi yang kemudian memengaruhi neraca perdagangan, inflasi energi domestik, dan saham energi/komoditas;
2. Terjadinya perang tarif AS yang memicu aksi balasan, mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi, sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi dunia;

Across 2025, several external and internal factors impacted PGAS's stock performance:

1. Geopolitical conflicts in the Middle East, Russia, and Ukraine caused fluctuations in energy prices, which subsequently impacted the trade balance, domestic energy inflation, and energy/commodity stocks;
2. The US tariff war triggered retaliatory measures, disrupted the global supply chains, increased production costs, and led to a global economic slowdown;

3. Pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi yang relatif stabil, dan kebijakan moneter BI menurunkan suku bunga ke level yang lebih akomodatif (4,75%);
4. Dominasi saham-saham konglomerasi yang meningkat secara tajam sehingga membuat IHSG dan Index Energi meningkat ke level tertinggi;
5. Kebijakan pemerintah dan stimulus keuangan yang mendorong perekonomian di Indonesia pada Q3-Q4 2025;
6. Terjadinya *foreign capital inflow* di kuartal empat, yang masuk ke saham-saham defensif, likuid, dan berfundamental kuat, termasuk PGAS;
7. Ketidakseimbangan *supply demand*, proyeksi margin, kebijakan dividen, isu potensi *one-off transaction*, berita rencana divestasi SAKA dan kasus Gunvor;
8. Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2024 yang mencatat kinerja sangat baik dengan kenaikan laba sebesar 22%;
9. Keputusan RUPS Tahunan PGN Tahun Buku 2024 untuk membagikan *Dividen Payout Ratio* sebesar 80%; dan
10. Kinerja keuangan PGN yang kuat hingga kuartal III 2025.

3. The weakening of the rupiah, relatively stable inflation, and Bank Indonesia's monetary policy lowering interest rates to a more accommodative level (4.75%);
4. The sharp increase in the dominance of conglomerate stocks, which has driven the Jakarta Composite Index (JCI) and the Energy Index to their highest levels;
5. Government policies and financial stimulus that supported economic growth in Indonesia during Q3–Q4 2025;
6. Foreign capital inflows in the fourth quarter, entering defensive, liquid, and fundamentally sound stocks, including PGAS;
7. Supply-demand imbalances, margin projections, dividend policy, potential issue of one-off transactions, news regarding SAKA's divestment plan, and the Gunvor case;
8. The 2024 Audited Financial Statements recorded stellar performance with a 22% profit increase;
9. PGN's 2024 AGMS Resolution to distribute a Dividend Payout Ratio of 80%; and
10. PGN's strong financial performance as of Q3 2025.

AKSI KORPORASI TERKAIT SAHAM

Sepanjang tahun 2025, PGN tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal. PGN juga tidak mencatatkan realisasi atas rencana aksi korporasi lainnya seperti penjualan aset, penerbitan surat utang, setoran modal, dan lainnya yang terjadi pada tahun 2025.

CORPORATE ACTIONS RELATED TO SHARES

Throughout 2025, PGN undertook no corporate actions that could have caused changes in shares, such as stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, or additions and reductions in capital. Additionally, PGN did not record the realization of other corporate action plans, including asset sales, issuance of debt securities, paid-in capital, and others during 2025.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Hingga akhir tahun 2025 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) saham PGAS.

SUSPENSION OF SHARES TRADING DELISTING OF SHARES

As of the end of 2025, there were no suspensions and/or delisting of PGAS shares.

KINERJA OBLIGASI
BOND PERFORMANCE

Pada tahun 2025 Perseroan tidak menerbitkan obligasi.

In 2025, the Company did not issue any bonds.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN
AWARDS

Direktorat Utama | Principal Directorate



STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2025
Oleh The Stevie® Awards | By The Stevie® Awards

1. PGN - Gold Winner - Company of The Year
2. PGN - Gold Winner - Innovating Utility Through Web
3. PGN Bronze Winner - Best Annual Report – Publicly Held Corporations
4. PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS) - Silver Winner Best Annual Report – Privately-Owned Companies
5. PT PGN LNG Indonesia (PGN LNG Indonesia) - Silver Winner - Best Annual Report – Privately-Owned Companies
6. PT Permata Graha Nusantara (PGN Mas) - Bronze Winner - Best Annual Report – Privately-Owned Companies
7. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) - Bronze Winner - Best Annual Report – Privately-Owned Companies

Penghargaan ini menunjukkan apresiasi dari kancah internasional atas pencapaian PGN Group dalam kompetisi global terkait pencapaian bisnis, yang diikuti berbagai perusahaan di seluruh dunia.

These awards demonstrate international recognition of the achievements of PGN Group in global business competitions, which are participated in by companies from around the globe.

WORLD BRANDING AWARDS 2025
Oleh World Branding Forum – London UK | By World Branding Forum – London UK

PGN kembali mendapatkan pengakuan internasional atas kualitas serta inovasi dalam mengusung *branding*/ merek perusahaan. Kepercayaan public pada *branding* perusahaan semakin kuat, beda dari yang lain, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di tengah-tengah industri gas bumi.

PGN once again received international recognition for its quality and innovation in promoting the branding of the company. Unlike others, public trust in the branding of the company has grown stronger, further strengthening its position in the natural gas industry.



ARC AWARDS INTERNATIONAL XXXIX

Oleh Mercomm | By Mercomm

1. GAGAS berhasil mendapatkan Silver Winner atas pencapaian dalam menghadirkan laporan tahunan yang informatif, transparan, dan berstandar internasional, melalui penyajian data yang akurat serta narasi yang menggambarkan kinerja berkelanjutan.
2. PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) meraih tiga penghargaan untuk kategori Script/ Writing (Silver Winner), Designs/Graphics (Silver Winner) dan Chairman's Letter/ Presentation (Bronze Winner).

1. GAGAS was named a Silver Winner for its achievement in providing an informative and transparent annual report that meets international standards, with accurate data presentation and narration that illustrates sustainable performance.
2. PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) won three awards for Script/Writing (Silver Winner), Designs/Graphics (Silver Winner), and Chairman's Letter/Presentation (Bronze Winner).



LACP ANNUAL REPORT AWARD

Oleh League of American Communications Professionals LLC (LACP) | By League of American Communications Professionals LLC (LACP)

- Gold Award - PT Pertagas Niaga
- Peringkat Top 20 Indonesian Reports dan Top 100 Reports Regional Asia-Pasifik - PT PGAS Solution (PGASOL)

Pencapaian ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam menyajikan laporan tahunan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga kreatif, informatif, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

- Gold Award - PT Pertagas Niaga
- Peringkat Top 20 Indonesian Reports dan Top 100 Reports Regional Asia-Pasifik - PT PGAS Solution (PGASOL)

Pencapaian ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam menyajikan laporan tahunan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga kreatif, informatif, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.



ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING (ASRRAT) 2025

Oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) | By National Center for Corporate Reporting (NCCR) and Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)

PT Pertamina Gas (Pertagas) meraih Gold Rank atas penilaian Laporan Keberlanjutan Pertagas Tahun Buku 2024.

PT Pertamina Gas (Pertagas) earned the Gold Rank for the assessment of Pertagas Sustainability Report for the 2024 Financial Year.



COMMUNITAS AWARD 2025

Oleh Association of Marketing & Communication Professionals (AMCP) | By Association of Marketing & Communication Professionals (AMCP)

Pertamina Gas Operation Kalimantan Area meraih penghargaan Excellence pada bidang Community Service and Social Responsibility kategori Empowerment, Economics, and Environment Program.

Pertamina Gas Operation Kalimantan Area won the Excellence award in the Community Service and Social Responsibility for Empowerment, Economics, and Environment Program category.



ASIAN IMPACT AWARDS 2025

Oleh La Tofi School of Social Responsibility dan Portman College | By La Tofi School of Social Responsibility dan Portman College

Penghargaan ini adalah wujud dari komitmen Pertagas dalam mendukung program pemerintah untuk pengembangkan UMKM dan menggerakkan ekonomi desa, serta membuktikan bahwa langkah kecil yang dijalankan secara konsisten mampu memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

This award manifests the commitment of Pertagas to supporting the government program for MSME and village economy development, proving that small yet consistent actions can have a great impact on the lives of communities. It aligns with the sixth mission of President Prabowo's Asta Cita (Eight Missions), namely making development from villages and grassroots to foster economic growth and eradicate poverty.



ASEAN OSHNET AWARD 2025

Oleh The 6th ASEAN-OSHNET Awards Ceremony (AOA 6) | By The 6th ASEAN-OSHNET Awards Ceremony (AOA 6)

Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjuk PGASOL sebagai wakil resmi Indonesia untuk mengikuti ajang penghargaan internasional ASEAN OSHNET AWARD 2025. Dalam kesempatan tersebut, jajaran manajemen tidak hanya hadir untuk menerima penghargaan, namun juga mempresentasikan profil perusahaan serta bentuk implementasi sistem manajemen K3 yang telah diterapkan secara konsisten.

The Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia has appointed PGASOL as the official Indonesian representative to compete in the international event of ASEAN OSHNET AWARDS 2025. The management attended the event not only to receive an award but also to present the company profile and forms of consistent implementation of the OSH management system.



GALAXY AWARDS 2025

Oleh Mercomm, Inc | By Mercomm, Inc

1. PGN Mas meraih Silver Winner untuk kategori Design Annual Report regional Asia/ Pasific.
2. PGASOL meraih Silver Winner untuk kategori Calender Design 2025.

1. PGN Mas was named the Silver Winner for the Annual Report Design category for the Asia/Pacific region.
2. PGASOL was named the Silver Winner for the 2025 Calendar Design category.



Indonesia SAFETY EXCELLENCE AWARD - OSH ASIA'S SUMMIT 2025

Oleh First Indonesia Magazine | By First Indonesia Magazine

1. Predikat Safety Bintang 5 - Pertagas
2. The Best CEO Committed on OSH Culture - PT Nusantara Regas dan Pertagas
3. The Best Occupational Safety and Health Performance in Energy Sector - PT Nusantara Regas
4. The Best Communication on Safety Message - PT Nusantara Regas
5. The Most Safety Program - PT Nusantara Regas dan Pertagas
6. The Best Continuous Improvement - Pertagas
7. The Best Workforce & Expansion – Pertagas
8. The Best HSE Manager yang diraih oleh Erwin Jonathan

Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi perusahaan dalam menempatkan HSSE sebagai budaya kerja yang mutlak dan dijalankan secara menyeluruh oleh PT Nusantara Regas dan Pertagas.

1. 5 Star Safety Title - Pertagas
2. The Best CEO Committed on OSH Culture - PT Nusantara Regas dan Pertagas
3. The Best Occupational Safety and Health Performance in the Energy Sector - PT Nusantara Regas
4. The Best Communication on Safety Message - PT Nusantara Regas
5. The Most Safety Program - PT Nusantara Regas dan Pertagas
6. The Best Continuous Improvement - Pertagas
7. The Best Workforce & Expansion – Pertagas
8. The Best HSE Manager, won by Erwin Jonathan.

These achievements stand a testament to the consistent efforts of the company to make HSSE an absolute working culture that PT Nusantara Regas and Pertagas comprehensively implement.



PENGHARGAAN PROPER 2024-2025 | PROPER AWARD 2024-2025

Oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI | By the Ministry of the Environment of the Republic of Indonesia

Penghargaan 4 PROPER Emas dan 5 PROPER Hijau diraih oleh:

- **PROPER Emas** diraih oleh PGN Stasiun Pagardewa, Pertagas Operation South Sumatera Area (OSSA), Pertagas Operation East Java Area (OEJA), dan Pertagas Operation Kalimantan Area (OKA)
- **PROPER Hijau** diraih oleh PGN Stasiun Cimanggis, PGN Stasiun Panaran, PGN SOR III, Pertagas Operation West Java Area (OWJA), dan PGN SAKA Indonesia Pangkah Limited

4 Gold PROPER and 5 Green PROPER awards won by:

- **Gold PROPER** awarded to PGN Stasiun Pagardewa, Pertagas Operation South Sumatera Area (OSSA), Pertagas Operation East Java Area (OEJA), and Pertagas Operation Kalimantan Area (OKA)
- **Green PROPER** awarded to PGN Stasiun Cimanggis, PGN Stasiun Panaran, PGN SOR III, Pertagas Operation West Java Area (OWJA), and PGN SAKA Indonesia Pangkah Limited



CSR & PENGEMBANGAN DESA BERKELANJUTAN (PDB) AWARDS 2025 (PGN) | CSR & SUSTAINABLE VILLAGE DEVELOPMENT (PDB) AWARDS 2025 (PGN)

Oleh Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) & Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal | By Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) and the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions

1. Gold – Program BHUMI Tembesi (Batam)
2. Gold – Program Pesona Tani Dewa (Muara Enim, Sumsel)
3. Silver – Program Harum Manis (Cimanggis, Jabar)
4. Silver – Program SIDOBAIK (Sidoarjo, Jatim)

Penghargaan didapatkan atas komitmen PGN untuk terus menghadirkan program CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, namun juga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di desa-desa binaan PGN. Kolaborasi antara PGN, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci terciptanya nilai tambah yang berkesinambungan.

1. Gold – BHUMI Tembesi Program (Batam City)
2. Gold – Pesona Tani Dewa Program (Muara Enim Regency, South Sumatra Province)
3. Silver – Harum Manis Program (Cimanggis District, West Java Province)
4. Silver – SIDOBAIK Program (Sidoarjo Regency, East Java Province)

PGN received these awards for its commitment to continuously running CSR programs focused not only on business sustainability but also on making a real impact in improving people's quality of life, especially in the villages it fosters. Collaboration among PGN, communities, and the government is key to creating sustainable added values.



WOMEN EMPOWERMENT & CSR AWARDS (WECA) 2025

Oleh Warta Ekonomi | By Warta Ekonomi

PGN meraih penghargaan The Best Women Empowerment Company 2025 in Strengthening Women Engagement Through Social Innovation Programs sebagai pengakuan atas komitmen Perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan lebih daripada yang dipersyaratkan regulasi, maupun kontribusinya dalam menjalankan program-program keberlanjutan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.

PGN was awarded The Best Women Empowerment Company 2025 in Strengthening Women Engagement Through Social Innovation Programs. It is recognition of the Company's commitment to protecting the environment beyond regulatory requirements, as well as its contribution to running social sustainability programs that bring a positive impact on the community.



BEST SOE SUBSIDIARIES AWARD 2025

Oleh The Iconomics | By The Iconomics

PGN meraih penghargaan Best SOE Subsidiaries Award 2025 untuk kategori Oil & Gas Utilities. Penilaian dilakukan oleh The Iconomics berdasarkan pengukuran sejumlah *keyword* dalam penelusuran BUMN, anak hingga cicit perusahaan BUMN sepanjang tahun 2024, yang kemudian diseleksi berdasarkan tingkat *Related News* hingga *Sentiment Analysis*. Berdasarkan penilaian tersebut, PGN termasuk dalam daftar penilaian teratas dalam menjaga reputasi perusahaan yang baik di media.

PGN won the Best SOE Subsidiaries Award 2025 for the Oil & Gas Utilities category. The Iconomics made the assessment by measuring several keywords in searches for SOEs and subsidiaries of SOEs throughout 2024, which were then selected according to levels of Related News and Sentiment Analysis. Based on the assessment, PGN was included in the top search list for maintaining a good company reputation in the media.



PR POPULAR COMPANIES AWARDS 2025

Oleh The Iconomics | By The Iconomics

PGN meraih penghargaan untuk kategori Oil & Gas Utilities atas peran strategis tim Public Relations (PR) maupun kehumasan dalam menjaga dan memperkuat citra positif Perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan konsumen.

PGN won an award for the Oil & Gas Utilities category for the strategic role of its Public Relations team in maintaining and enhancing the positive image of the Company in the eyes of stakeholders, including communities and consumers.



CORPORATE SECRETARY CHAMPIONS 2025

Oleh Majalah SWA | By Majalah SWA

Corporate Secretary (Corsec) PGN terpilih dalam jajaran *best practices* Corporate Secretary pilihan versi Majalah SWA. Corsec PGN menetapkan tiga pilar strategi utama, yaitu *Communications*, *Relations* dan *Governance*, guna memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional dan reputasi Perusahaan serta memastikan tata kelola yang baik setiap lini.

The Corporate Secretary (Corsec) of PGN was included in SWA Magazine's list of Corporate Secretaries with best practices. The Corsec of PGN applies three main strategic pillars, namely Communications, Relations, and Governance, to play a strategic role in maintaining operational flow and Company reputation, as well as ensuring good governance across all business lines.



NATIONAL PRIORITY SUPPORT AWARD

Oleh Human Initiative | By Human Initiative

Penghargaan didapatkan atas upaya PGN untuk terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

PGN received this award for its efforts to continue to strengthen its support for national priority programs in food security and improving community nutrition. This commitment is shown through strategic collaboration with the National Nutrition Agency (BGN) in implementing the Free Nutritious Meal (MBG) program.



INDONESIA SUSTAINABILITY AWARD (ISA) 2025

Oleh First Indonesia Magazine | By First Indonesia Magazine

Pertagas meraih penghargaan:
- The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices
- Best Company for Impact Investments in ESG Initiatives
- The Best CEO for Outstanding Commitments to ESG Principles yang diraih Direktur Utama Pertagas, Gamal Imam Santoso.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas implementasi ESG dan komitmen Pertagas dalam praktik keberlanjutan serta tanggung jawab sosial.

Pertagas won the following awards:
- The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices
- Best Company for Impact Investments in ESG Initiatives
- The Best CEO for Outstanding Commitments to ESG Principles awarded to the President Director of Pertagas, Gamal Imam Santoso.

This award recognizes the ESG implementation and commitment demonstrated by Pertagas to sustainability practices and social responsibility.



ANUGERAH BRAND POPULER Indonesia - DISWAY AWARDS 2025

Oleh Disway Group | By Disway Group

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan PGN sebagai salah satu merek/ *brand* di Indonesia yang bersinar di kancah nasional dan internasional.

This award recognizes PGN's success as one of Indonesia's most prominent brands on the national and international stage.



INDONESIA BEST COMPANIES IN HSE IMPLEMENTATION 2025

Oleh SWA Network | By SWA Network

Penghargaan ini diberikan atas inovasi PT Nusantara Regas dalam mendukung *operational excellence* dan *risk management*. Sejumlah inovasi HSSE berbasis teknologi diterapkan PT Nusantara Regas untuk menunjang kelancaran operasional dan keandalan aset, mulai dari *improvement* pada sistem *Vaporizer*, *Marine Loading Arm*, *LNG Safety Layer Protection System*, serta penyesuaian *Control System* yang mengedepankan aspek ergonomis untuk memastikan kelancaran penyaluran gas kepada pelanggan.

This award recognizes PT Nusantara Regas innovation in supporting operational excellence and risk management. PT Nusantara Regas implemented several technology-based HSSE innovations to support operational efficiency and asset reliability, ranging from improvements to the Vaporizer system, Marine Loading Arm, LNG Safety Layer Protection System, as well as adjustments to the Control System that prioritize ergonomic aspects, ensuring the seamless distribution of gas to customers.



CSR DAN PENGEMBANGAN DESA BERKELANJUTAN (PDB) AWARD 2025 (PERTAGAS) | CSR AND SUSTAINABLE VILLAGE DEVELOPMENT AWARD 2025 (PERTAGAS)

Oleh Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal | By Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) and the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kontribusi Pertagas dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berdampak nyata di sekitar wilayah operasional.

This award recognizes Pertagas' contribution to supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs that have a tangible impact in the surrounding operational areas.



APRESIASI MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN 2025 | COMMUNITY ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP AWARD 2025

Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta | By the Environmental Agency of the Provincial Government of Jakarta

Apresiasi atas salah satu program kolaboratif yang dijalankan oleh PT Nusantara Regas, yaitu Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Program ini dijalankan bersama Yayasan Rumah Literasi Hijau dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu selama empat bulan, mulai dari September 2025 hingga Januari 2026. Program ini menargetkan 50 persen warga Pulau Lancang untuk teredukasi dan terdaftar sebagai rumah pilah serta nasabah aktif bank sampah.

The award recognizes one of PT Nusantara Regas' collaborative programs, namely the Integrated Waste Management Program on Lancang Island in the Thousand Islands. This program was carried out in collaboration with the Yayasan Rumah Literasi Hijau (Green Literacy House Foundation) and the Thousand Islands Environmental Agency for four months, from September 2025 to January 2026. The program aimed to educate and register 50 percent of residents of Lancang Island as waste-sorting households and active customers of the waste bank.



TOP CSR AWARDS 2025

Oleh Top Business | By Top Business

- #4 PGASOL
- #5 PT Nusantara Regas
- TOP Leader on CSR Commitment, Mohd. Iskandar Mirza - Direktur Utama PT Nusantara Regas
- TOP Leader on CSR Commitment 2025, Sabarrudin - Direktur Utama PGASOL

Penghargaan ini merupakan bukti konsistensi dalam menghadirkan program-program CSR yang berdampak nyata, baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Komitmen ini memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar.

- #4 PGASOL
- #5 PT Nusantara Regas
- TOP Leader on CSR Commitment, Mohd. Iskandar Mirza - President Director of PT Nusantara Regas
- TOP Leader on CSR Commitment 2025, Sabarrudin - President Director of PGASOL

This award stands a testament to the commitment of delivering CSR programs that have a real impact, be it in social, environmental, or economic aspects. This commitment reinforces the Company's contribution to sustainable development through innovation, collaboration, and responsibility towards the community and the surrounding environment.



PR INDONESIA AWARDS (PRIA) 2025

Oleh PR Indonesia | By PR Indonesia

Pertagas meraih tiga penghargaan pada program Komunikasi Social Responsibility, Sub Kategori Pemberdayaan untuk Program Perkasa Bumiku - Pertamina Gas Operation West Java Area, Perempuan Lubuk Karet: Upscale Produk Nanas - Operation Central Sumatera Area, dan Pusaka Tirta - Operation South Sumatera Area.

Pertagas won three awards at the Social Responsibility Communication program, Empowerment Subcategory for these following programs: Perkasa Bumiku Pertamina Gas Operation West Java Area, Perempuan Lubuk Karet: Upscale Pineapple Products - Operation Central Sumatera Area, and Pusaka Tirta - Operation South Sumatera Area.



PENGHARGAAN PILOT PROJECT LOW CARBON INITIATIVE | LOW CARBON INITIATIVE PILOT PROJECT AWARD

Oleh SKK Migas | By SKK Migas

Penghargaan ini didapatkan atas program penanaman pohon mangrove yang dijalankan oleh entitas SAKA yaitu Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL). SAKA berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan kegiatan hulu migas serta memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

This award was received for the mangrove planting program carried out by SAKA Indonesia Pangkah Limited (SIPL), a SAKA entity. SAKA is committed to supporting the sustainability of upstream oil and gas activities, while delivering direct benefits to the environment and surrounding community.



MITRA STRATEGIS DAN MITRA UTAMA PILOT PROJECT PENGELOLAAN SAMPAH KOLABORATIF | STRATEGIC PARTNER AND MAIN PARTNER OF THE COLLABORATIVE WASTE MANAGEMENT PILOT PROJECT

Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta | By the Environmental Agency of the Jakarta Provincial Government

PT Nusantara Regas meraih penghargaan sebagai Mitra Strategis dan Mitra Utama Pilot Project Pengelolaan Sampah Kolaboratif dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen para pihak yang aktif berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan Jakarta.

PT Nusantara Regas won awards for Strategic Partner and Main Partner of the Collaborative Waste Management Pilot Project in the Large-Scale Collaboration for the Environment. These awards were granted as a token of appreciation for the commitment of parties who actively contribute to maintaining the sustainability of the Jakarta's environment.



INDONESIAN SDG'S AWARDS 2025

Oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) | By Corporate Forum for CSR Development (CFCD)

PT Nusantara Regas meraih Penghargaan Gold untuk Program Konservasi Lingkungan Kepulauan Seribu serta Penghargaan Gold untuk Program Beasiswa pada Pilar Sosial.

PT Nusantara Regas received a Gold Award for its Thousand Islands Environmental Conservation Program and a Gold Award for its Scholarship Program under the Social Pillar.



WSO INDONESIA SAFETY CULTURE AWARDS (WISCA)

Oleh WSO INDONESIA | By WSO INDONESIA

Penghargaan diraih SAKA atas penerapan *Safety Culture* melalui proses verifikasi dokumen HSSE, mekanisme *interview* dan presentasi program-program unggulan *Safety Culture*.

SAKA won the award for implementing Safety Culture through the verification process of HSSE documents, interview mechanism, and presentations of its Safety Culture flagship program.



NUSANTARA CSR AWARD

Oleh La Tofi School of Social Responsibility | By La Tofi School of Social Responsibility

Penghargaan ini diberikan kepada Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) atas komitmen dan kontribusinya dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang diwujudkan dalam pengembangan ekonomi komunitas di sekitar wilayah kerja Pangkah.

This award was granted to Pangkah Limited (SIPL) for its commitment and contribution in building a better Indonesia, made possible through community-based economic development in the areas surrounding the Pangkah work area.



PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL TAHUN 2024 - 2025 | ZERO ACCIDENT AWARD 2024 - 2025

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI | By Kementerian Tenaga Kerja RI

PGN LNG Indonesia berhasil meraih penghargaan ini atas penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara baik hingga mencapai kondisi tanpa kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja (*lost time accident*).

PGN LNG Indonesia successfully won this award for the effective implementation of Occupational Safety and Health (OSH) to achieve zero lost time accidents.



PENGHARGAAN SMK3 TAHUN 2024 - 2025 | OSHMS AWARD 2024 - 2025

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI | By the Indonesian Ministry of Manpower

PGN LNG Indonesia menerapkan SMK3 dengan baik, dibuktikan melalui audit dan penilaian kepatuhan terhadap PP Nomor 50/2012 dengan kategori emas.

PGN LNG Indonesia has properly implemented the OSH Management System (OSHMS), as evidenced by audits and compliance assessments with Government Regulation Number 50/2012 with a gold rating.



PENGHARGAAN P2HIV/AIDS TAHUN 2024 - 2025 | P2HIV/AIDS AWARD 2024 - 2025

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI | By Ministry of Manpower

PGN LNG Indonesia menerapkan program Pencegahan & Pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja secara efektif, dengan kriteria meliputi kebijakan tertulis anti-stigma, edukasi rutin (pelatihan, sosialisasi), penyediaan layanan konseling/VCT, dan dukungan bagi pekerja dengan HIV/AIDS (ODHA), sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja aman dan mendukung target Indonesia Eliminasi AIDS 2030.

PGN LNG Indonesia effectively implemented HIV/AIDS Prevention & Control (P2HIV/AIDS) programs in the workplace, with criteria including written anti-stigma policies, regular education (training, information dissemination), provision of counseling/VCT services, and support for workers with HIV/AIDS (PLWHA), in an effort to create a safe and supportive work environment and support Indonesia's goal to End HIV/AIDS by 2030.



THE SEVEN CSR AWARDS 2025

Oleh The Iconomics Media and Axia Research | By The Iconomics Media and Axia Research

PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) meraih penghargaan CSR kategori Program Energi Berkelanjutan.

PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) received a CSR award for the Sustainable Energy category.



INDONESIA REGULATORY COMPLIANCE AWARDS 2025

Oleh Hukumonline | By Hukumonline

PT Transportasi Gas Indonesia meraih penghargaan Most Strategic Enterprise In Regulatory Compliance sektor *Oil and Gas* (*Upstream & Downstream*) Prosper B dan The Most Inspiring Leader of The Year in Regulatory Compliance.

PT Transportasi Gas Indonesia won the Most Strategic Enterprise In Regulatory Compliance in the Oil and Gas (Upstream & Downstream) sector for Prosper B category and the Most Inspiring Leader of the Year in Regulatory Compliance.



CSR IMPACT CHALLENGE 2025

Oleh Radar Banten | By Radar Banten

PGN Sales Operation and Region II (SOR II) meraih penghargaan CSR bidang Sosial dari CSR Impact Challenge 2025. Bapaian ini membuktikan implementasi ESG melalui kegiatan CSR di wilayah operasi, khususnya Cilegon yang bermanfaat bagi pelanggan maupun masyarakat sekitar.

PGN Sales Operation and Region II (SOR II) received the CSR award for the Social category from the CSR Impact Challenge 2025. This achievement demonstrates the implementation of ESG principles through CSR activities in its operational areas, particularly in Cilegon, delivering benefits to both customers and the surrounding community.



BINA INDUSTRI RUMAH LINGKUNGAN (BRILIAN) | ENVIRONMENTAL HOME INDUSTRY DEVELOPMENT (BRILIAN)

Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik | By Government of Gresik Regency

SAKA meraih kategori GOLD atau kategori tertinggi bagi perusahaan yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah operasi dan sekitarnya sesuai dengan peraturan perundangan.

SAKA won the GOLD category or the highest category for companies that have implemented environmental management in their operational areas and surroundings in accordance with applicable laws and regulations.



KABUPATEN GRESIK DAN CSR AWARD 2025 | GRESIK REGENCY AND CSR AWARD 2025

Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik | By Government of Gresik Regency

Entitas SAKA yaitu Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) sebagai "The Most Committed Corporate to Economic and Community Empowerment, Infrastructure, Environment, Health, and Education" atas komitmennya terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, Infrastruktur, Lingkungan, Kesehatan, dan Pendidikan.

Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL), a SAKA entity, received the title "the Most Committed Corporate to Economic and Community Empowerment, Infrastructure, Environment, Health, and Education" in acknowledgment of its sustained commitment to strengthening Economic and Community Empowerment, Infrastructure, Environment, Health, and Education initiatives.

Direktorat Keuangan | Directorate of Finance



INDEX 52 2025

Oleh TEMPO & IDNFinancials | By TEMPO & IDNFinancials

Penghargaan ini menegaskan posisi PGN sebagai perusahaan penyalur gas bumi di Indonesia yang mampu menjaga konsistensi kinerja serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat. Selain itu, menunjukkan bahwa perusahaan diakui BEI sebagai emiten dengan prospek pertumbuhan menjanjikan, sekaligus memberikan keyakinan lebih bagi investor untuk berinvestasi di saham PGN.

This award underscores PGN's position as a natural gas distributor in Indonesia capable of demonstrating consistent performance and value creation for shareholders and society. It also reflects the recognition by the Indonesia Stock Exchange (IDX) on PGN as an issuer with promising growth outlook, enhancing investor confidence in its shares.



INDONESIA 20 MOST INNOVATIVE CFO AWARD 2025

Oleh The Iconomics Media | By The Iconomics Media

Top manajemen PT Transportasi Gas Indonesia meraih Indonesia 20 Most Innovative CFO Awards 2025 yang diberikan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi Sahat P. Simarmata.

The top management of PT Transportasi Gas Indonesia earned Indonesia 20 Most Innovative CFO Awards 2025, which was presented to Director of Finance and Administration Sahat P. Simarmata.

Direktorat Komersial | Directorate of Commerce



SUBROTO AWARD 2025

Oleh Kementerian ESDM | By Ministry of Energy and Mineral Resources

PGN mendapatkan predikat sebagai Badan Usaha Hilir Migas Terbaik atas kontribusi dan kinerjanya dalam mengelola distribusi gas bumi secara andal, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

PGN was recognized as the Best Downstream Oil and Gas Company for its strong contribution and performance in delivering reliable, efficient, and sustainable natural gas distribution across Indonesia.



APRESIASI BPH MIGAS 2025 BIDANG GAS BUMI | BPH MIGAS APPRECIATION AWARD FOR THE NATURAL GAS SECTOR 2025

Oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) | By the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas)

PGN Grup mendapatkan apresiasi sebagai badan usaha yang berkontribusi aktif dalam kemajuan hilir gas bumi nasional, antara lain:

- Badan Usaha Niaga Terbesar Terbaik (Volume di atas 10%) diraih oleh PGN, TGI dan Pertagas
- Badan Usaha Terbesar yang Menjalankan Penugasan HGBT dari Pemerintah diraih oleh PGN
- Badan Usaha dalam Pengembangan Jargas diraih oleh PGN
- Badan Usaha yang mendukung Penyediaan dan Pendistribusian Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera diraih oleh PGN
- Sinergi badan usaha hilir migas dan BPH Migas dalam penanggulangan bencana di Sumatera diraih oleh PGN, TGI dan Pertagas
- Kontribusi Badan Usaha terhadap Penerimaan Negara Bidang Gas Bumi diraih oleh Pertagas dan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG)

- PGN Group earned recognition for its active contribution as a business entity to the development of the national downstream natural gas sector, including:
- The Best Largest Trading Business Entity (with a volume above 10%) awards were awarded to PGN, TGI and Pertagas
- The award for the Largest Business Entity Implementing the Government's Certain Natural Gas Price (HGBT) Policy was presented to PGN
- The award for the Business Entity in the Development of the Gas Network (Jargas) was awarded to PGN
- The award for the Business Entity Supporting Energy Provision and Distribution in Disaster-Affected Areas of Sumatra was awarded to PGN
- The awards for the Collaborative Efforts between Downstream Oil and Gas Business Entities and BPH Migas in Disaster Response in Sumatra were awarded to PGN, TGI and Pertagas
- The awards for the Business Entity Contribution to State Revenue in the Natural Gas Sector were awarded to Pertagas and PT Kalimantan Jawa Gas (KJG)
- Pertagas dan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG)



INDONESIA'S 20 CHIEF MARKETING OFFICER (CMO) AWARD 2025

Oleh The Iconomics | By The Iconomics

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan komitmen PGN dalam merespons dinamika pasar global melalui strategi pemasaran yang inovatif dan transformasi digital. Upaya tersebut memperkuat peran PGN dalam memimpin pemasaran energi bersih di Indonesia sekaligus meningkatkan aksesibilitas gas bumi bagi masyarakat dan sektor industri.

This award recognizes PGN's dedication and commitment in responding to global market dynamics through innovative marketing strategies and digital transformation. These efforts have solidified PGN's role in leading clean energy marketing in Indonesia while enhancing the accessibility of natural gas for communities and industrial sectors.



THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2025

Oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) | By Indonesia Contact Center Association (ICCA)

PGN berhasil meraih The Best Agent Inbound Badan Publik – Bronze Winner sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Perseroan dalam menyediakan layanan informasi gas bumi melalui Contact Center. Penghargaan ini mencerminkan upaya PGN dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap peran Perseroan serta pemanfaatan gas bumi di tengah masyarakat.

PGN was honored as the Best Public Sector Inbound Agent – Bronze Winner in recognition of its continued efforts in providing natural gas information services through the Contact Center. The award highlights PGN's ongoing efforts to enhance public awareness of the Company's role and the use of natural gas in society.



BUMN ENTREPRENEURIAL MARKETING AWARD 2025

Oleh Markplus Indonesia | By Markplus Indonesia

- Gold Award untuk kategori Marketing 5.0
- Silver Award untuk kategori Tactical Marketing
- "Dewi BUMN" kepada Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial PGN dan Rosa Permata Sari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN

Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan PGN dalam menerapkan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus mengimplementasikan taktik pemasaran yang gesit dan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pelanggan serta pertumbuhan pendapatan perusahaan.

- Gold Award in the Marketing 5.0 category
- Silver Award in the Tactical Marketing category
- "Dewi BUMN" awards were presented to Ratih Esti Prihatini as the Commercial Director of PGN and Rosa Permata Sari as the Strategy and Business Development Director of PGN

This award underscores PGN's ability to implement adaptive marketing strategies in response to digital technology advancements, while implementing agile and high-impact marketing tactics that have accelerated customer acquisition and strengthened revenue growth.



OMNI BRAND OF THE YEAR 2025

Oleh Marketeers | By Marketeers

PGN meraih penghargaan Branding Campaign Through Multi Platform melalui kampanye yang dinilai unggul dalam aspek *Creativity*, *Innovation*, *Reach*, dan *Impact*. Penghargaan ini menempatkan PGN sebagai salah satu contoh keberhasilan transformasi pemasaran digital di sektor energi nasional.

PGN earned the Branding Campaign Through Multi-Platform award for delivering an outstanding campaign that excelled in Creativity, Innovation, Reach, and Impact. This award establishes PGN as one of the successful examples of digital marketing transformation in the national energy sector.



INDONESIA BRANDING CAMPAIGN OF THE YEAR 2025

Oleh Markplus Indonesia | By Markplus Indonesia

PGN meraih Bronze Winner pada kategori Above the Line atas keberhasilan kampanye "Your Future Energy, Today!". Kampanye tersebut dinilai unggul dari sisi kreativitas, inovasi, dan jangkauan, serta mampu menciptakan dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan penggunaan gas bumi oleh masyarakat maupun sektor bisnis.

PGN was named Bronze Winner in the Above the Line category for the "Your Future Energy, Today!" campaign. The campaign was recognized for its excellence in creativity, innovation, and reach, and for its significant impact in raising awareness and promoting the use of natural gas among both the community and the business sector.



INDONESIA BEST ELECTRICITY AWARD 2025

Oleh Majalah Listrik Indonesia | By Listrik Indonesia Magazine

PGN terpilih sebagai salah satu perusahaan yang terdepan dalam menjaga keandalan pasokan gas untuk sektor listrik dan industri.

PGN was selected as one of the leading companies in ensuring the reliability of gas supply for the electricity and industrial sectors.



INDUSTRY AWARD 2025

Oleh Warta Ekonomi | By Warta Ekonomi

PGN meraih penghargaan Indonesia Best Oil and Gas Industry for Optimizing the Utilization of Domestic Gas dalam kategori Energy and Mining atas kinerja dalam meningkatkan kredibilitas dan *branding* perusahaan industri di Indonesia.

PGN earned the Indonesia Best Oil and Gas Industry for Optimizing the Utilization of Domestic Gas award in the Energy and Mining category for its strong performance in strengthening corporate credibility and industry branding in Indonesia.



INDONESIA KITA AWARDS 2025

Oleh Garuda TV | By Garuda TV

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi PGN dalam pengelolaan gas bumi nasional, yang secara konsisten memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

This award was presented in recognition of PGN's role and contribution to the management of the national natural gas sector, which has consistently delivered positive impacts on national progress.



ANUGERAH BUMN 2025

Oleh Kementerian BUMN | By Ministry of SOEs

PGNCOM mendapat penghargaan:

- Inovasi Bisnis Terbaik II (Corporate Category), mencerminkan perusahaan dalam menciptakan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra bisnis.
- Best CEO in Strategic Digital Collaboration: Larassetyo Wibowo (President Director PGNCOM)

PGNCOM was presented with the following awards:

- Second Best Business Innovation Award (Corporate Category), reflecting the Company's ability to create innovative solutions that provide added value to customers and business partners.
- Best CEO in Strategic Digital Collaboration: Larassetyo Wibowo (President Director PGNCOM)



BEST PROFESSIONAL ORAL PRESENTATION 2025

Oleh Indonesia Petroleum Association | By Indonesia Petroleum Association

SAKA meraih kategori Facilities Operation Improvement atas presentasinya terkait inovasi teknologi Processing Integrated Transformation Analytics (PITA). Penghargaan ini diberikan pada ajang the 49th IPA Convex 2025.

SAKA won the Facilities Operation Improvement category for its presentation on the Processing Integrated Transformation Analytics (PITA) technology innovation. The award was presented at the 49th IPA Convex 2025.

Direktorat Infrastruktur dan Teknologi | Directorate of Infrastructure and Technology



PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2025 | OIL AND GAS SAFETY AWARD 2025

Oleh Kementerian ESDM RI | By Ministry of Energy and Mineral Resources

PGN menegaskan komitmen yang kuat terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerapan budaya keselamatan yang berkelanjutan di seluruh lini operasi, dengan meraih 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, yang terdiri dari kategori Patra Nirbhaya Karya (Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan) dan Patra Karya Raksa (Pembinaan Keselamatan Kerja).

PGN reaffirmed its strong commitment to Occupational Health and Safety (OHS) and the implementation of a sustainable safety culture across all operations, with 21 Oil and Gas Safety Awards 2025. These included the Patra Nirbhaya Karya (Zero Lost Work Hours Due to Accidents) category and the Patra Karya Raksa (Occupational Safety Development) category.



NAKER INSPIRATIONAL LEADERSHIP AWARD 2025

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI | By the Indonesian Ministry of Manpower

PGASOL mendapatkan Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari pemerintah bagi perusahaan atas keunggulan produktivitas secara konsisten dan terukur, serta menjadi salah satu penghargaan produktivitas tertinggi di tingkat nasional. PGASOL memperkuat tekad untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan daya saing, dan mengalirkan energi baik yang membawa manfaat luas bagi bangsa.

PGASOL received the Paramakarya Productivity Award from the Government in recognition of the Company's consistent and measurable exemplary performance in productivity. This award is one of the highest productivity awards at the national level. PGASOL reinforces its commitment to continuously drive innovation, enhance competitiveness, and channel positive energy that benefits society at large.



TEMU KARYA MUTU DAN PRODUKTIVITAS NASIONAL (TKMPN) XXIX 2025 | 29TH NATIONAL QUALITY AND PRODUCTIVITY WORK MEETING (TKMPN) 2025

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI | By the Indonesian Ministry of Manpower

Pertagas meraih predikat:
- Diamond dan Best Performance untuk Tim PCP CHARLIE ST 52
- Platinum untuk PCP Jejak Si Gondrong
- Gold untuk PCP Senbal

Penghargaan ini diberikan atas inovasi Pertagas dalam pengembangan metode crossing pipa gas pada proyek Tol Trans Sumatera, yang memungkinkan pembangunan tol melintas di bawah pipa tanpa menghentikan penyaluran gas.

Pertagas was awarded the following honors:
- Diamond and Best Performance for the PCP CHARLIE ST 52 team
- Platinum for PCP Jejak Si Gondrong
- Gold for PCP Senbal

The awards were presented in recognition of Pertagas' innovation in developing a gas pipeline crossing method for the Trans-Sumatra Toll project, enabling the toll road to be constructed beneath existing pipelines without interrupting gas supply.

Direktorat Strategi dan Pengembangan Bisnis | Strategy and Business Development Directorate



ENERGY AND MINERAL AWARD 2025

Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) & B Universe | By Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) & B Universe

PGN sebagai Subholding Gas Pertamina kembali mendapatkan penghargaan atas komitmen dalam mengimplementasikan prinsip ESG demi mendorong transisi energi dan keberlanjutan lingkungan.

PGN as Pertamina's Gas Subholding was once again awarded for its commitment in implementing ESG principles, driving energy transition and environmental sustainability.



KATADATA ESG INDEX 2025

Oleh Katadata Indonesia | By Katadata Indonesia

PGN meraih penghargaan Katadata ESG Index 2025 pada pilar Tata Kelola atas kontribusi nyata perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola yang selaras dengan program keberlanjutan. Prinsip tata kelola tersebut telah diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari di PGN. Dengan komitmen yang sama dalam hal keberlanjutan, diharapkan PGN dapat terus tumbuh sebagai perusahaan yang kompeten, berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat.

PGN won the Katadata ESG Index 2025 award in the Governance pillar for the Company's tangible contributions in implementing governance practices aligned with sustainability programs. The principles of governance have been internalized as part of the daily work culture at PGN. With the same commitment to sustainability, it is expected that PGN can continue to grow as a competent and competitive company, contributing meaningfully to society.



THE BEST CORPORATE EMISSION REDUCTION TRANSPARENCY AWARDS 2025

Oleh Investor Trust | By Investor Trust

PGN meraih penghargaan Best of The Best Public Company with Trusted Green Achievement in Emission Reduction serta Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen PGN sebagai perusahaan energi dalam mengelola emisi secara bertanggung jawab dan transparan, sekaligus menghadirkan solusi energi yang lebih bersih bagi masa depan.

PGN won the Best of the Best Public Company with Trusted Green Achievement in Emission Reduction and Trusted Diamond Achievement in Emission Transparency awards. These awards recognize PGN's commitment as an energy company in managing emissions responsibly and transparently, while providing cleaner energy solutions for the future.



GREEN AND SUSTAINABLE COMPANIES 2025 AWARD

Oleh SWA Group | By SWA Group

PGN meraih kategori Best Innovation in ESG Implementation atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Environmental*, *Social*, *and Governance* (ESG) di dalam kegiatan operasional dan pengelolaan lingkungan, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat.

PGN won the Best Innovation in ESG Implementation category for its success in implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in its operational activities and environmental management, thus providing sustainable benefits for the Company and the community.



INVESTORTUST ESG AWARDS 2025

Oleh Investor Trust | By Investor Trust

PGN meraih apresiasi Platinum Star atas prinsip penerapan ESG secara konsisten dan efektif di Indonesia.

PGN received the Platinum Star award for its consistent and effective implementation of ESG principles in Indonesia.



INVESTOR DAILY ESG APPRECIATION 2025

Oleh B-Universe | By B-Universe

PGN mendapatkan apresiasi atas komitmen prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan usaha.

PGN earned recognition for its commitment to environmental, social, and governance (ESG) principles in its business activities.



ESG BUSINESS AWARD

Oleh ESG Business | By ESG Business

PGN Mas meraih penghargaan ESG BUSINESS AWARD dengan kategori Sustainable Infrastructure Award di Kuala Lumpur.

PGN Mas won the ESG BUSINESS AWARD in the Sustainable Infrastructure Award category in Kuala Lumpur.

Direktorat Manajemen Risiko | Risk Management Directorate



ASEAN CGCA AWARDS 2025

Oleh ASEAN Capital Markets Forum | By ASEAN Capital Markets Forum

PGN berhasil meraih ASEAN Corporate Governance Awards 2025 (ACGS 2025), dan masuk ke dalam jajaran 50 Publicly Listed Companies (PLC) teratas di ASEAN serta Top 5 Perusahaan Terbaik atas hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) 2024 yang mencakup 569 PLC dengan *capital market* yang besar di tingkat ASEAN.

PGN was honored with the ASEAN Corporate Governance Awards 2025 (ACGS 2025) and was recognized among the Top 50 Publicly Listed Companies (PLCs) in ASEAN. In addition, PGN was ranked among the Top 5 Best Companies based on the 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment, which evaluated 569 PLCs with significant market capitalization across ASEAN.



TOP GRC AWARDS 2025

Oleh Majalah Top Business & Asosiasi GRC Indonesia | By Top Business Magazine & the Indonesia GRC Association

- #5 Star - PGN
  Arief Kurnia Risdianto selaku Direktur Utama PGN meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025
- #5 Star – PT Nusantara Regas
  Ali Azmy selaku Direktur Manajemen Risiko PT Nusantara Regas – The Most Committed Leader 2025
- #5 Star – PT Transportasi Gas Indonesia
  Anak Agung Putu Bagus Putra selaku Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia - The Most Committed Leader 2025

Penghargaan ini mencerminkan komitmen PGN dalam menjunjung tinggi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan kepatuhan (*compliance*) ("GRC") dalam setiap proses bisnis. Sebagai perusahaan terbuka, PGN menempatkan GRC sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

- #5 Star - PGN
  Arief Kurnia Risdianto, President Director of PGN, was honored with the title The Most Committed GRC Leader 2025.
- #5 Star – PT Nusantara Regas
  Ali Azmy, Director of Risk Management of PT Nusantara Regas, was received as The Most Committed Leader 2025.
- #5 Star – PT Transportasi Gas Indonesia
  Anak Agung Putu Bagus Putra, President Director of PT Transportasi Gas Indonesia, was recognized as The Most Committed Leader 2025.

These awards reflect PGN's strong commitment to upholding the implementation of Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, and Compliance ("GRC") across all business processes. As a publicly listed company, PGN places GRC as one of its top priorities in ensuring sound and responsible corporate management.

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis | Directorate of Human Resources and Business Support



LEARNING EXCELLENCE AWARD 2025

Oleh Markplus | By Markplus

PGN memperoleh predikat Excellence in Learning Engagement, yang membuktikan keunggulan program pembelajaran serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk tim Sales & Customer Management segmen Komersial & Industri dalam memberikan pelayanan gas bumi yang optimal.

PGN received the Excellence in Learning Engagement distinction, demonstrating the strength of its learning programs and human capital development initiatives for the Sales & Customer Management team in the Commercial & Industrial segment, aimed at delivering optimal natural gas services.



BEST HC AWARD 2025

Oleh Majalah Business Asia Indonesia | By Business Asia Indonesia Magazine

PGN meraih sejumlah penghargaan, yaitu Best Director HC, Best Human Investment, Best Digital Innovation, dan Best Company. Penghargaan Best Director HC 2025 diberikan kepada Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN, Rachmat Hutama.

PGN received several awards, including Best Director HC, Best Human Investment, Best Digital Innovation, and Best Company. The Best Director HC 2025 award was presented to PGN's Director of Human Resources and Business Support, Rachmat Hutama.



HUMAN CAPITAL AWARDS 2025

Oleh Top Business | By Top Business

PGASOL dinilai unggul dalam penerapan strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi, dengan perolehan penghargaan sebagai berikut:
- TOP HUMAN CAPITAL Awards 2025 #4
- The High Performing Human Capital Director 2025: Ariadi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis)

PT Transportasi Gas Indonesia meraih penghargaan:
- Top Human Capital Awards 2025 # STAR 5
- The High Performing Human Capital Director: Sahat Parlindungan Simarmata (Finance and Administration Director)
- The High Performing Human Capital Manager: Indah Pritanti (HR Manager)

PGASOL was recognized for excellence in implementing an integrated human capital management strategy, as evidenced by the following awards:
- OP Human Capital Awards 2025 #4
- The High Performing Human Capital Director 2025: Ariadi (Director of Finance and Business Support)

PT Transportasi Gas Indonesia also received the following recognitions:
- TOP Human Capital Awards 2025 #STAR 5
- The High Performing Human Capital Director: Sahat Parlindungan Simarmata (Director of Finance and Administration)
- The High Performing Human Capital Manager: Indah Pritanti (HR Manager)



INDONESIA DIGITAL INNOVATION & ACHIEVEMENT AWARDS 2025 (IDIA AWARDS)

Oleh Majalah Business Asia Indonesia | By Business Asia Indonesia Magazine

PGN dan Anak Perusahaan yaitu Pertagas meraih kategori
- Best Digital Digital Technology Implementation - PGN
- Best Digital Transformation - Pertagas
- Best Digital Innovation & Integrated System - PGN & Pertagas

Penghargaan ini mengapresiasi perusahaan atas inovasi dan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan keunggulan bisnis yang adaptif.

PGN and its subsidiary, Pertagas, received recognition in the following categories:
- Best Digital Technology Implementation – PGN
- Best Digital Transformation – Pertagas
- Best Digital Innovation & Integrated System – PGN & Pertagas

These awards acknowledge the companies' innovation and adoption of digital technologies to enhance adaptive business excellence.



HUMAN CAPITAL ON RESILIENCE EXCELLENCE AWARD 2025

Oleh First Indonesia Magazine | By First Indonesia Magazine

PGNCOM meraih penghargaan:
- The Best CEO Committed to HC of The Year 2025
- The Best Digital Transformation in Human Capital
- The Best Sustainable Development and Decent Jobs
- The Most Innovative Human Capital Development

PGNCOM meraih penghargaan:
- The Best CEO Committed to HC of The Year 2025
- The Best Digital Transformation in Human Capital
- The Best Sustainable Development and Decent Jobs
- The Most Innovative Human Capital Development



SKK MIGAS CAREER DEVELOPMENT MANAGEMENT (CDM)

Oleh SKK Migas | By SKK Migas

SAKA berhasil meraih juara dua dalam sistem evaluasi dan apresiasi untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor hulu migas.

SAKA secured second place in the evaluation and appreciation system for Production Sharing Contract Contractors (KKKS), demonstrating a strong commitment to human capital development in the upstream oil and gas sector.



PENGHARGAAN JASA KEARSIPAN | ARCHIVAL SERVICES AWARD

Oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | By the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI)

PGN Mas mendapatkan predikat sebagai Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan Bidang Penyimpanan Arsip (Akreditasi "A") dan Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan Bidang Alih Media Arsip (Akreditasi "B").

PGN Mas was awarded the distinction of Archival Service Provider Institution in the Field of Records Storage (Accreditation "A") and Archival Service Provider Institution in the Field of Records Media Conversion (Accreditation "B").



INDONESIA HR EXCELLENCE AWARDS 2025

Oleh Swanetworks | By Swanetworks

PGN Mas memperoleh apresiasi atas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di tengah era digitalisasi serta meningkatnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia profesional.

PGN Mas received recognition for its excellence in human capital management amid the age of digitalization and the increased adoption of Artificial Intelligence (AI) in the professional landscape.



PARITRANA AWARD 2025

Oleh BPJS Ketenagakerjaan | By BPJS Ketenagakerjaan

PGN Grup meraih penghargaan Paritrana Award Provinsi DKI Jakarta kategori Usaha Skala Besar Sektor Pertambangan, Manufaktur dan Konstruksi. Penghargaan tersebut diberikan kepada entitas PGN Grup, meliputi PGN, Pertagas, Kalimantan Jawa Gas (KJG), dan TGI.

PGN Group received the Paritrana Award for the Province of DKI Jakarta in the Large-Scale Enterprise Category for the Mining, Manufacturing, and Construction Sector. The award was conferred upon PGN Group entities, including PGN, Pertagas, Kalimantan Jawa Gas (KJG), and TGI.

SERTIFIKASI
CERTIFICATIONS



Sertifikasi | Certification
ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Sistem Manajemen Quality, Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Quality, Environment, and Occupational Health and Safety Management System

Diterbitkan oleh | Issued by
PT LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
30 Januari 2027
January 30, 2027



Sertifikasi | Certification
ISO 37001: 2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Diterbitkan oleh | Issued by
PT LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
4 Februari 2027
February 4, 2027



Sertifikasi | Certification
ISO 55001:2014
Sistem Manajemen Aset Infrastruktur Transmisi dan Distribusi Gas
Asset Management System of Gas Transmission & Distribution Infrastructure

Diterbitkan oleh | Issued by
PT BSI Group Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
31 Juli 2027
July 31, 2027



Sertifikasi | Certification
ISO 22301:2019
Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis
Business Continuity Management System

Diterbitkan oleh | Issued by
BSI Group Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
25 November 2027
November 25, 2027



Sertifikasi | Certification
ISO/IEC 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Information Security Management System

Diterbitkan oleh | Issued by
Bureau Veritas Certification

Masa Berlaku | Validity Period
27 Desember 2026
December 27, 2026



Sertifikasi | Certification
Tingkat Kematangan Keamanan Siber
Cyber Security Maturity Level Certification

Diterbitkan oleh | Issued by
BSSN
National Cyber and Encryption Agency (BSSN)

Masa Berlaku | Validity Period
20 November 2026
November 20, 2026



Sertifikasi | Certification
Tata Kelola TI COBIT 2019
IT Governance – COBIT 2019

Diterbitkan oleh | Issued by
Multimatic

Masa Berlaku | Validity Period
2024 - 2026



Sertifikasi | Certification
Risk Maturity Assessment
Skor Risk Maturity Index sesuai PER-2 BUMN
3,6 (skala 1-5) "Fase Praktik yang Baik (+)"
Risk Maturity Index Score in accordance with PER-2 BUMN:
Score: 3.6 (Scale 1–5) – "Good Practice Phase (+)"

Diterbitkan oleh | Issued by
Indonesia Risk & Business Advisory (IRBA)

Masa Berlaku | Validity Period
9 Desember 2025
December 9, 2025



Sertifikasi | Certification
Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety Management System (OHS) Award Certificate

Diterbitkan oleh | Issued by
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

Masa Berlaku | Validity Period
6 Agustus 2027
August 6, 2027



Sertifikasi | Certification
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan - Jaringan Transmisi Gas Bumi South Sumatera-West Java
Security Management System Audit Certificate – South Sumatra-West Java Natural Gas Transmission Network

Diterbitkan oleh | Issued by
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesian National Police

Masa Berlaku | Validity Period
8 Desember 2028
December 8, 2028



Sertifikasi | Certification
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PGN Sales and Operation Region II Area Tangerang St Gas Bitung 2,3,4
Security Management System Audit Certificate – PGN Sales and Operation Region II, Tangerang Area, Bitung Gas ST 2, 3, 4

Diterbitkan oleh | Issued by
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesian National Police

Masa Berlaku | Validity Period
15 Desember 2026
December 15, 2026



Sertifikasi | Certification
Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PGN Sales and Operation Region III ST Gas Semare Jatim
Security Management System Audit Certificate – PGN Sales and Operation Region III, Semare East Java ST

Diterbitkan oleh | Issued by
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesian National Police

Masa Berlaku | Validity Period
15 Desember 2026
December 15, 2026

PERISTIWA PENTING
SIGNIFICANT EVENTS

JANUARI | JANUARY



PGN MANFAATKAN LNG DARI LAPANGAN TANGGUH
PGN UTILIZES LNG FROM THE TANGGUH FIELD

PGN bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat untuk memanfaatkan alokasi LNG dengan volume sebesar ± 20 MMSCFD atau setara dua kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh, Papua Barat. Sinergi ini penting untuk memastikan alokasi LNG dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mematuhi ketentuan pemerintah yang berlaku.

PGN collaborated with the Regional-Owned Enterprise (BUMD) of West Papua to utilize an LNG allocation of approximately 20 MMSCFD, equivalent to two cargoes per year, from the BP Tangguh Refinery in West Papua. This synergy is essential to ensure optimal utilization of LNG allocations while complying with prevailing government regulations.



PGN SEMAKIN AKTIF CARI SUMBER PASOKAN GAS BARU DAN REGASIFIKASI LNG
PGN INTENSIFIES EFFORTS TO SECURE NEW GAS SUPPLY SOURCES AND LNG REGASIFICATION

PGN berkomitmen mendukung keberlanjutan energi untuk industri nasional dengan memastikan pasokan gas yang andal dan berkelanjutan. Menjawab tantangan ketersediaan pasokan gas pipa di beberapa wilayah strategis seperti Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat, PGN aktif mencari sumber pasokan gas pipa baru serta solusi alternatif pasokan gas hasil regasifikasi LNG yang bersumber dari dalam negeri seperti dari Tangguh, Bontang dan Donggi Senoro.

PGN remains committed to supporting national energy sustainability by ensuring a reliable and sustainable gas supply. In response to pipeline gas supply constraints in strategic regions such as Central Sumatra, South Sumatra, Lampung, and West Java, PGN actively pursued new pipeline gas sources as well as alternative supply solutions through domestic LNG regasification from Tangguh, Bontang, and Donggi Senoro.

JANUARI | JANUARY





PGN DAPAT PASOKAN GAS DARI BLOK JABUNG

PGN SECURES ADDITIONAL GAS SUPPLY FROM THE JABUNG BLOCK

PGN mendapat tambahan pasokan gas dari PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) sebesar 4.651 BBTU dari Blok Jabung. Tambahan pasokan gas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri dan kelistrikan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Titik serah gas dari Blok Jabung berada di Betara Gas Plant, Jambi.

PGN secured an additional gas supply of 4,651 BBTU from PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) from the Jabung Block. The additional supply is allocated to meet industrial and power generation demand in accordance with Government allocations. The gas delivery point is located at Betara Gas Plant, Jambi.

MOODY'S NAIKKAN RATING PGN KE "BAA2"

MOODY'S UPGRADES PGN'S RATING TO "BAA2"

PGN berhasil meningkatkan *Baseline Credit Assessment* (BCA) *standalone* dari BAA3 menjadi BAA2 dari Moody's Ratings (Moody's). Selain itu, PGN juga mempertahankan peringkat kredit konsolidasi pada level BAA2 dengan *outlook* Stabil. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi PGN dalam menjaga kesehatan dan kestabilan keuangan, didukung oleh keberhasilan pelunasan obligasi pada kuartal kedua 2024 serta kontribusi kinerja operasional.

PGN successfully upgraded its standalone Baseline Credit Assessment (BCA) from BAA3 to BAA2 by Moody's Ratings. The Company also maintained its consolidated credit rating at BAA2 with a Stable outlook. The upgrade reflects PGN's consistent financial resilience, fueled by successful bond repayment in the second quarter of 2024 and solid operational performance.

FEBRUARI | FEBRUARY



PGN PASOK GAS BUMI UNTUK DAPUR MBG
PGN SUPPLIES NATURAL GAS FOR MBG KITCHEN

PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS) mendukung program prioritas Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemenuhan gas bumi ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat Boyolali. Setiap hari, SPPG ini menyediakan 6.000 porsi MBG untuk 34 sekolah. Untuk mendukung program tersebut, GAGAS menyalurkan 2.000-3.000 m^3 gas bumi per bulan dengan mekanisme *beyond pipeline* yaitu *Compressed Natural Gas* (CNG). GAGAS juga menyediakan gas bumi untuk program MBG di Batam, Semarang, dan Bogor.

Through its subsidiary PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS), PGN supported the Government's Free Nutritious Meals (MBG) program by supplying natural gas to the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) kitchen in Gagaksipat, Boyolali. The facility serves 6,000 meal portions daily for 34 schools. As part of its support for the program, GAGAS supplies 2,000–3,000 m^3 of natural gas per month via a beyond-pipeline mechanism using Compressed Natural Gas (CNG). Similar support is also provided in Batam, Semarang, and Bogor.



PROPER 2023-2024
PROPER 2023-2024

Penghargaan 4 PROPER Emas dan 5 PROPER Hijau diraih oleh:
- **PROPER Emas** diraih oleh PGN Stasiun Pagardewa, Pertagas Operation South Sumatera Area (OSSA), Pertagas Operation West Java Area (OWJA), dan Pertagas Operation Kalimantan Area (OKA)
- **PROPER Hijau** diraih oleh PGN Stasiun Cimanggis, PGN Stasiun Panaran, PGN SOR III, Pertagas Operation East Java Area (OEJA), dan PGN SAKA Indonesia Pangkah Limited

4 Gold PROPER and 5 Green PROPER awards won by:
- **Gold PROPER** awarded to PGN Stasiun Pagardewa, Pertagas Operation South Sumatera Area (OSSA), Pertagas Operation West Java Area (OWJA), and Pertagas Operation Kalimantan Area (OKA)
- **Green PROPER** awarded to PGN Stasiun Cimanggis, PGN Stasiun Panaran, PGN SOR III, Pertagas Operation East Java Area (OEJA), and PGN SAKA Indonesia Pangkah Limited

MARET | MARCH



PGN DATANGKAN LNG DARI BERAU KALIMANTAN TIMUR

PGN PROCURES LNG FROM BERAU, EAST KALIMANTAN

PGN terus memperkuat pasokan gas domestik dengan mendatangkan LNG dari fasilitas likuefaksi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketahanan energi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat. Volume LNG yang dimanfaatkan berkisar antara 350.000 hingga 700.000 MMBTU per tahun.

PGN continues to strengthen domestic gas supply by procuring LNG from a liquefaction facility in Berau Regency, East Kalimantan. This initiative is undertaken to ensure energy security and to meet steadily increasing demand. The LNG volume utilized ranges from approximately 350,000 to 700,000 MMBTU per year.



PGN SIAPKAN LAYANAN GAS BUMI KE KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND

PGN PREPARES GAS SERVICES FOR JATENGLAND INDUSTRIAL ESTATE

PGN menjajaki penyediaan pasokan dan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri Jatengland, Jawa Tengah. Langkah ini menjadi aksi nyata PGN dalam memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. PGN dan PT Jawa Tengah Lahan Andalan menandatangani Nota Kesepahaman penyediaan pasokan dan infrastruktur gas bumi untuk *tenant* di kawasan industri tersebut.

PGN explored the provision of natural gas supply and infrastructure in the Jatengland Industrial Estate, Central Java. This initiative represents a concrete step by PGN to expand the utilization of natural gas in support of national industrial growth. PGN and PT Jawa Tengah Lahan Andalan signed a Memorandum of Understanding on the provision of natural gas supply and infrastructure for tenants within the industrial estate.

MARET | MARCH



PGN DAN BSB CITY KERJA SAMA PENGEMBANGAN REAL ESTATE HIJAU DI SEMARANG

PGN AND BSB CITY COLLABORATE ON GREEN REAL ESTATE DEVELOPMENT IN SEMARANG

PGN gandeng pengembang kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) City untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai energi bersih. Kerja sama ini bertujuan mendukung konsep hunian dan bisnis yang lebih ramah lingkungan serta berkontribusi pada transisi energi di Indonesia. Dengan moda jaringan pipa, PGN siap memasok kebutuhan gas bumi untuk kawasan ini, selaras dengan visi BSB City yang mengedepankan energi bersih.

PGN partnered with the developer of the Bukit Semarang Baru (BSB) City area to expand the utilization of natural gas as a clean energy source. This collaboration aims to support environmentally friendly residential and commercial concepts, while contributing to Indonesia's energy transition. Through a pipeline network system, PGN stands ready to supply natural gas to the area, in alignment with BSB City's vision of prioritizing clean energy.



PGN MENANG LELANG HAK KHUSUS WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DI BATAM

PGN WINS AUCTION FOR SPECIAL RIGHTS FOR NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORK AREA IN BATAM

PGN resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi di Kota Batam oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 14/KD/Lelang/BPH Migas/Kom/2025. Keputusan ini menjadi langkah strategis bagi PGN dalam memperluas layanan gas bumi di Batam dan wujud dukungan PGN dalam perbaikan tata kelola gas bumi yang diinisiasi Pemerintah.

PGN has officially won the auction for the Special Rights for the Natural Gas Distribution Network Area (WJD) in Batam City by the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). This stipulation is based on the Decree of the Head of BPH Migas Number 14/KD/Lelang/BPH Migas/Kom/2025. This represents PGN's strategic step in expanding natural gas services in Batam, demonstrating PGN's unwavering support for the Government-initiated improvements in natural gas governance.

APRIL | APRIL



PGN DAN PTBA MENGEMBANGKAN SNG DARI BATU BARA

PGN AND PTBA DEVELOP SNG FROM COAL

PGN menjalin kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam inisiatif pengembangan *Synthetic Natural Gas* (SNG) dari batu bara, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi dan penguatan ketahanan energi. Proyek ini memanfaatkan cadangan *low-rank coal* milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. Lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di Pagardewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur.

PGN partnered with PT Bukit Asam Tbk (PTBA) to develop Synthetic Natural Gas (SNG) from coal, as part of its strategy to diversify energy supplies and strengthen energy security. This project utilizes PTBA's low-rank coal reserves in Tanjung Enim, South Sumatra, which have not been optimally monetized. It is located close to PGN's transmission pipeline network in Pagardewa, South Sumatra, potentially saving on infrastructure development.

MEI | MAY



PGN KEMBALI TERIMA LNG DOMESTIK DARI TANGGUH

PGN RECEIVES DOMESTIC LNG FROM TANGGUH

PGN kembali memperkuat ketahanan pasokan gas nasional dengan menerima tambahan *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebesar 130.000 m^3 dari Lapangan Tangguh. Kargo tersebut diregasifikasi melalui *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) Lampung, guna mendukung kebutuhan sektor industri dan kelistrikan. PGN melaksanakan proses *ship-to-ship* (STS) transfer LNG dari Terminal LNG Tangguh melalui PT PGN LNG Indonesia.

PGN has again strengthened the resilience of the national gas supply by receiving an additional 130,000 m^3 of Liquefied Natural Gas (LNG) from the Tangguh Field. The cargo was regasified through the Lampung Floating Storage Regasification Unit (FSRU) to support the needs of the industrial and electricity sectors. PGN carried out the ship-to-ship (STS) transfer of LNG from the Tangguh LNG Terminal through, PT PGN LNG Indonesia.

MEI | MAY





"DARI TITIK INI", DOKUMENTER PERJALANAN PGN SELAMA ENAM DEKADE

"DARI TITIK INI," A DOCUMENTARY OF PGN's SIX-DECADE JOURNEY

Perjalanan PGN selama 60 tahun dalam menyediakan gas bumi di berbagai sektor terdokumentasi apik dalam buku dokumenter "Dari Titik Ini". Buku ini tidak hanya sekedar memulai cerita dari masa lalu, namun memulai dari "titik capaian hari ini" yang menempatkan posisi PGN sebagai pemimpin pasar dan infrastruktur gas bumi nasional. Buku ini juga merefleksikan pencapaian yang dibangun PGN dari dekade ke dekade, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Hingga pada akhirnya, kembali ke masa kini yang bukan puncak, melainkan awal yang baru.

PGN's 60-year journey in providing natural gas to various sectors is meticulously featured in the book titled "Dari Titik ini" (From This Point). This book doesn't simply begin with the past, but rather with "today's achievements," placing PGN as a leader in the national natural gas market and infrastructure. The book also reflects on the achievements PGN has built over the decades, including the challenges faced. Ultimately, it returns to the present, which is not a peak, but rather a new beginning.

PGN GALI POTENSI PEMANFAATAN WILAYAH KERJA TUNGKAL

PGN EXPLORES POTENTIAL UTILIZES TUNGKAL WORK AREA

PGN terus berupaya untuk memperkuat ketersediaan pasokan gas bumi bagi pelanggan melalui kerja sama MontD'or Oil Tungkal Limited (MOTL) untuk menjajaki potensi gas bumi dari Wilayah Kerja Tungkal. Dalam kerja sama ini, PGN juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pemanfaatan Wilayah Kerja Tungkal yang dikelola oleh MOTL. Perkiraan volume potensial yang dapat dikelola dari Wilayah Kerja Tungkal sekitar 3 – 8 MMSCFD.

PGN continues to strive to strengthen the availability of natural gas supplies for customers through a partnership with MontD'or Oil Tungkal Limited (MOTL) to embark on the natural gas potential of the Tungkal Work Area. With this collaboration, PGN also created a synergy with the government to seek the best solution for utilizing the Tungkal Work Area, managed by MOTL. The potential volume that can be managed from the Tungkal Work Area is estimated at around 3-8 MMSCFD.

MEI | MAY



PGN MENANDATANGANI PJBG DAN KERJA SAMA STRATEGI DALAM IPA CONVEX 2025

PGN SIGNS GSA AND STRATEGIC PARTNERSHIP IN IPA CONVEX 2025

Komitmen PGN untuk terus menyediakan energi baik gas bumi secara berkelanjutan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah, yang terealisasi dengan ditandatanganinya sejumlah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan kerja sama strategis dalam forum Indonesian Petroleum Association Convention; Exhibition (IPA Convex) 2025, meliputi:

1. PJBG untuk Jargas dengan Pema Global Energi dengan volume gas bumi sebesar 0,9 BBTUD.
2. PJBG dengan Pertamina EP Jawa Barat dengan volume gas bumi sebesar 12 – 17 BBTUD (*ramp up*).
3. PJBG dengan Minarak Brantas Gas, Inc. (MBGI) dengan volume gas bumi sebesar 0,35 BBTUD.
4. PJBG dengan PHE Ogan Komering dengan volume gas bumi sebesar 3,99 BBTUD.
5. Amandemen PJBG dengan PHE North Sumatera Offshore dengan volume gas bumi sebesar 8,48 BBTUD.
6. Amandemen PJBG dengan Pertamina EP Medan dengan volume gas bumi sebesar 4,5 – 11 BBTUD.
7. *Heads of Agreement* (HOA) dengan Petronas Bukit Panjang untuk potensi pasokan gas bumi hingga 31 BBTUD dan menjadi peluang dari sumber pasokan yang baru.

PGN's commitment to continuously providing sustainable energy, including natural gas, has gained full support from the government, as demonstrated by the signing of several Gas Sales and Purchase Agreements (GSAs) and strategic partnerships at the Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025, including:

1. GSA for the Gas Network with Pema Global Energi, with a gas volume of 0.9 BBTUD.
2. GSA with Pertamina EP West Java, with a gas volume of 12-17 BBTUD (ramp-up).
3. GSA with Minarak Brantas Gas, Inc. (MBGI), with a gas volume of 0.35 BBTUD.
4. GSA with PHE Ogan Komering, with a gas volume of 3.99 BBTUD.
5. GSA Amendment with PHE North Sumatra Offshore, with a gas volume of 8.48 BBTUD.
6. GSA Amendment with Pertamina EP Medan, with a natural gas volume of 4.5–11 BBTUD.
7. Heads of Agreement (HOA) with Petronas Bukit Panjang for a potential natural gas supply of up to 31 BBTUD and opportunities for new supply sources.

MEI | MAY

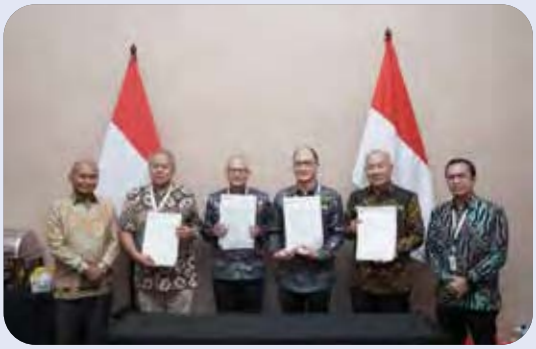


PGN TAMBAH PASOKAN DARI SWAP GAS AGREEMENT

PGN INCREASES SUPPLY FROM GAS SWAP AGREEMENT

Atas dukungan dari Pemerintah, PGN kembali mendapatkan dua kesepakatan strategis yaitu *Domestic Swap Agreement* dan *Gas Sales Agreement* dengan West Natuna Group. Dua perjanjian ini mengatur sejumlah volume gas yang sebelumnya dialirkan ke Singapura dari West Natuna Group, akan dialihkan dan dimanfaatkan PGN untuk memenuhi kebutuhan domestik.

PGN has secured two more strategic agreements thanks to Government support, namely a Domestic Swap Agreement and a Gas Sales Agreement with the West Natuna Group. These two agreements stipulate that a certain volume of gas previously supplied to Singapore from the West Natuna Group will be diverted and utilized by PGN to meet domestic demand.



PGN DAN INDEX MASELA TANDA TANGAN HOA LNG BLOK MASELA

PGN AND INDEX MASELA SIGN LNG HoA FOR MASELA BLOCK

PGN dan INPEX Masela menandatangani *Heads of Agreement* (HoA) untuk penjualan LNG dari proyek Lapangan Abadi di Blok Masela. Penandatanganan HoA LNG dengan INPEX Masela berlangsung dalam IPA Convex 2025 (21/05/202), disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dimana PGN sebagai salah satu *offtaker*. PGN mematuhi arahan dari Pemerintah perihal komersialisasi dan alokasi gas dari Blok Masela yang akan diprioritaskan untuk kebutuhan gas dalam negeri.

PGN and INPEX Masela entered into a Heads of Agreement (HoA) for LNG sales from the Abadi Field project in the Masela Block. The LNG HoA signing with INPEX Masela took place at the IPA Convex 2025 (May 21, 2020), witnessed by President Prabowo Subianto, of which PGN is one of the offtakers. PGN complies with Government directives regarding the commercialization and allocation of gas from the Masela Block, which will be prioritized for domestic gas needs.

MEI | MAY



RUPST PGN TAHUN BUKU 2024 SETUJUI PEMBAGIAN DIVIDEN 80% DARI LABA BERSIH

PGN'S AGMS YEAR 2024 APPROVES 80% OF NET PROFIT DIVIDEND DISTRIBUTION

PGN melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 di Auditorium Graha PGAS Kantor Pusat PGN, Jakarta, pada Rabu, (28/05/2025). RUPST ini mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

Dalam agenda Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 yang berjumlah USD339,4 juta, pemegang saham memutuskan untuk mengalokasikan sebesar USD271,5 juta atau 80% dari laba bersih sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai porsi kepemilikan saham di Perseroan. Kemudian sebesar USD67,8 juta sebagai saldo laba ditahan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

PGN convened its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 fiscal year at the Graha PGAS Auditorium, PGN Head Office, Jakarta, on Wednesday (May 28, 2025). The AGM ratified the Company's Annual Report for the 2024 fiscal year, the Company's Annual Financial Report for the 2024 fiscal year, and the Financial Report for the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2024 fiscal year. The meeting also approved the release and discharge of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.

In the agenda item "Determination of the Use of Net Profit for the 2024 Fiscal Year," which amounted to USD339.4 million, shareholders decided to allocate USD271.5 million, or 80% of the net profit, as dividends to shareholders based on their share ownership in the Company. Then, USD67.8 million as retained earnings balance, including to support operational activities and sustainable business development.

MEI | MAY



"FUN EDUCATIVE" GAS BUMI, PGN GELAR TAMAN JARGAS 2025 DI BXC PARK BINTARO

"FUN EDUCATIVE" NATURAL GAS, PGN HOLDS JARGAS PARK 2025 AT BXC PARK BINTARO

PGN menghadirkan Taman Jargas Nusantara 2025 di kawasan BXC Park Bintaro Jaya Xchange Mall. Program berkarakter *fun educative* ini gratis dan terbuka untuk umum, yang dirancang untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap manfaat gas bumi dan meningkatkan "*engagement*" PGN dengan pelanggan Jargas rumah tangga dan UMKM di wilayah Bintaro. Taman Jargas yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 ini juga menyediakan sarana terbuka dalam rangka mendorong minat calon pelanggan untuk langsung dapat menjadi pelanggan PGN pada saat *event* berlangsung. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 PGN.

PGN presented the 2025 Nusantara Gas Network (Jargas) Park at BXC Park Bintaro Jaya Xchange Mall. This fun, educational program is for free and open to the public. This event aims to raise public awareness of the benefits of natural gas and increase PGN's engagement with household Jargas customers and MSMEs in the Bintaro area. The Jargas Park, which ran from May 29 to June 1, 2025, also provides open facilities to encourage potential customers to become PGN customers directly during the event. This program is also held as part of a series of PGN's 60th Anniversary celebrations.



GANDENG UMKM DAN KESENIAN LOKAL, PGN GELAR SUADESA FESTIVAL 2025

PGN HOLDS SUADESA FESTIVAL 2025, PARTNERS WITH MSMEs AND LOCAL ARTS

Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-60 yang diperingati pada 13 Mei 2025, PGN menyelenggarakan Suadesa Festival 2025 pada 10 – 11 Mei 2025 di Gasblock PGN Karangrejo, Magelang. Festival ini merupakan perwujudan program Desa Energi Berdikari Pertamina dengan menampilkan Desa Karangrejo, Borobudur yang merupakan desa binaan PGN. Melalui program CSR PGN, Festival Suadesa 2025 mampu menggerakan perekonomian desa dengan perputaran ekonomi sebesar Rp3 miliar dan menarik >3.000 pengunjung dalam bentuk konsumsi produk UMKM, penginapan, ojek komunal, pembelian tiket, pembelian paket tour, restoran dan lain sebagainya.

In celebration of its 60th anniversary, which fell on May 13, 2025, the Suadesa Festival 2025 was held on May 10-11, 2025, at the PGN Karangrejo Gas Block in Magelang. This festival embodies Pertamina's Independent Energy Village program, showcasing Karangrejo Village in Borobudur, a PGN-fostered village. Through PGN's CSR program, The 2025 Suadesa Festival managed to spur the village economy with an economic turnover of Rp3 billion and attract >3,000 visitors in the form of consumption of MSMEs products, accommodation, communal motorcycle taxis, ticket purchases, tour package purchases, restaurants and so on.

JUNI | JUNE



PGN PERTAHANKAN PERINGKAT NASIONAL "SANGAT SEHAT AAA"

PGN RETAINS NATIONAL RATING OF "EXCELLENT SOUNDNESS AAA"

PGN mempertahankan peringkat nasional atas tingkat kesehatan perusahaan tahun buku 2024 yaitu AAA atau sangat sehat (*excellent soundness*), menunjukkan kesehatan perusahaan dalam keadaan kokoh dan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan melalui kerja sama dengan Fitch Ratings Indonesia, dengan hasil peringkat BB+/AA (idn) dalam *Stand Alone Rating* dan peringkat BBB-/AA+ (idn)/*stable* dalam *Final Rating*. PGN dinyatakan kembali memperoleh predikat "Sangat Sehat" untuk Tahun Buku 2024 serupa dengan capaian tahun sebelumnya.

PGN retained its national rating for corporate soundness for the 2024 fiscal year at AAA - excellent soundness, indicating the Company's sound and sustainable health. This assessment was conducted in collaboration with Fitch Ratings Indonesia, resulting in a BB+/AA (idn) rating in the Stand-Alone Rating and a BBB-/AA+ (idn)/stable rating in the Final Rating. PGN has been declared to have re-established its "Excellent Soundness" status for the 2024 fiscal year, similar to the previous year's achievement.

JULI | JULY



PGN DAN MUBADALA ENERGY JAJAKI POTENSI PASOKAN GAS BLOK ANDAMAN

PGN AND MUBADALA ENERGY EMBARK ON GAS SUPPLY POTENTIAL IN ANDAMAN BLOCK

PGN dan Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD (Mubadala Energy) melakukan kajian bersama terhadap pemanfaatan gas bumi dari Kontrak Kerja Sama (KKS) South Andaman, mencakup penjajakan pengembangan infrastruktur pipa gas serta opsi pemanfaatan potensi infrastruktur LNG. Selain itu, juga dilakukan penjajakan studi terhadap fasilitas kilang Arun dan terminal regasifikasi guna mendukung kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

PGN and Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD (Mubadala Energy) conducted a joint study on the leverage of natural gas from the South Andaman Production Sharing Contract (PSC). This included exploring the development of gas pipeline infrastructure and options for utilizing potential LNG infrastructure. Additionally, an exploratory study was conducted on the Arun refinery and regasification terminal facilities, supporting upstream oil and gas activities.

JULI | JULY



PGN JAJAKI POTENSI PENYALURAN GAS BUMI KE TAMBANG EMAS GOSOWONG

PGN EMBARKS ON POTENTIAL FOR NATURAL GAS DISTRIBUTION TO GOSOWONG GOLD MINE

PGN menjajaki potensi kerja sama penyaluran gas bumi ke industri pertambangan emas bersama PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Kedua perusahaan menyusun studi bersama mengenai pemanfaatan gas bumi di Tambang Gosowong, Halmahera Utara, Maluku Utara yang mencakup evaluasi teknis dan komersial mengenai kesiapan infrastruktur dan *supply* gas.

PGN is embarking on the potential for collaboration with PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) to distribute natural gas to the gold mining industry. The two companies are conducting a joint study on natural gas utilization at the Gosowong Mine in North Halmahera, North Maluku, which includes technical and commercial evaluations of infrastructure readiness and gas supply.



PGN MASUK 50 BESAR PERUSAHAAN DENGAN PENERAPAN GCG TERBAIK DI ASEAN

PGN RANKS TOP 50 COMPANIES WITH THE BEST GCG PRACTICE IN ASEAN

PGN berhasil meraih ASEAN Corporate Governance Conference; Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025) di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menempatkan PGN dalam jajaran 50 Public Listed Companies (PLCs) teratas di ASEAN dan 5 Terbaik di Indonesia atas hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, yang mencakup penilaian dari 569 PLCs dengan kapitalisasi pasar yang besar tingkat ASEAN. PGN juga meraih nilai tertinggi dalam kategori Top 5 Indonesia PLCs berdasarkan hasil *assessment* GCG dengan parameter ACGS 2024. Penilaian ACGS merupakan bagian dari program Forum Pasar Modal ASEAN atau ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

PGN won the ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025) in Kuala Lumpur, Malaysia, ranking PGN among the Top 50 Publicly Listed Companies (PLCs) in ASEAN and among the Top 5 in Indonesia based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 assessment, which included an assessment of 569 PLCs with large capital markets in ASEAN. PGN also achieved the highest score in the Top 5 Indonesian PLCs category based on the GCG assessment results using the ACGS 2024 parameters. The ACGS assessment is part of the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) program.

AGUSTUS | AUGUST



BANGUN LNG HUB, PGN PERKUAT LAYANAN GAS BUMI DI BANDUNG
PGN BUILDS LNG HUB TO STRENGTHEN NATURAL GAS SERVICES IN BANDUNG

PGN bersama afiliasinya GAGAS, menegaskan komitmen dalam memberikan solusi energi yang bersih, andal, dan efisien khususnya bagi sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) di Bandung, melalui layanan gas bumi dalam bentuk CNG maupun LNG melalui produk Gaslink. GAGAS juga membangun LNG HUB bersama PT Nusantara Regas untuk memperluas akses dan ketersediaan LNG berkualitas tinggi untuk sektor retail dan industri di Bandung.

PGN, along with its affiliate, GAGAS, reaffirmed its commitment to providing clean, reliable, and efficient energy solutions, particularly for the hotel, restaurant, and cafe sector in Bandung. This is conducted through the provision of natural gas services in the form of CNG and LNG through its Gaslink product. GAGAS also built an LNG HUB with PT Nusantara Regas, expanding access and availability of high-quality LNG for the retail and industrial sectors in Bandung.

AGUSTUS | AUGUST



RUPSLB PGN TETAPKAN PENGURUS BARU PERSEROAN

PGN's EGMS APPOINTS COMPANY's NEW MANAGEMENT

PGN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan agenda tunggal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Keputusan RUPSLB, menetapkan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo
- Komisaris: Edward Omar Sharif Hiariej
- Komisaris: Rambe Kamarul Zaman
- Komisaris: Thanon Aria Dewangga
- Komisaris Independen: Conny Lolyta Rumondor
- Komisaris Independen: Widjono Hardjanto

Direksi
- Direktur Utama: Arief Kurnia Risdianto
- Direktur Keuangan: Catur Dermawan
- Direktur Komersial: Aldiansyah Idham
- Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis: Mirza Mahendra
- Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Hery Murahmanta
- Direktur Manajemen Risiko: Eri Surya Kelana
- Direktur SDM dan Penunjang Bisnis: Rachmat Hutama

PGN convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on August 27th, 2025, with the sole agenda of Changes in the Composition of the Company's Management. The EGMS resolution, determined the composition of the Company's Management as follows:

Board of Commissioners
- President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner: Tony Setia Boedi Hoesodo
- Commissioner: Edward Omar Sharif Hiariej
- Commissioner: Rambe Kamarul Zaman
- Commissioner: Thanon Aria Dewangga
- Independent Commissioner: Conny Lolyta Rumondor
- Independent Commissioner: Widjono Hardjanto

Board of Directors
- President Director: Arief Kurnia Risdianto
- Director of Finance: Catur Dermawan
- Director of Commerce: Aldiansyah Idham
- Director of Strategy and Business Development: Mirza Mahendra
- Director of Infrastructure and Technology: Hery Murahmanta
- Director of Risk Management: Eri Surya Kelana
- Director of Human Resources and Business Support: Rachmat Hutama

AGUSTUS | AUGUST



PIPA BBM CIKAMPEK-PLUMPANG MULAI DIGARAP

CIKAMPEK-PLUMPANG FUEL PIPELINE CONSTRUCTION COMMENCES

Pertagas mulai menerima pasokan pipa baja dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk proyek pipanisasi bahan bakar minyak (BBM) Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km. Pertagas mengoptimalkan komponen dalam negeri pada proyek BUMN untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri.

Pertagas has begun receiving steel pipe supplies from PT Krakatau Steel (Persero) Tbk for the 96-km Cikampek-Plumpang fuel pipeline project. Pertagas is optimizing domestic components in the state-owned enterprise project, boosting national industrial and economic growth by increasing domestic component level.



ANALIS PASAR MODAL TINJAU FSRU NUSANTARA REGAS SATU

CAPITAL MARKET ANALYSTS INSPECT FSRU NUSANTARA REGAS SATU

PGN menggelar *site visit* ke fasilitas *Floating Storage & Regasification Unit* (FSRU) Nusantara Regas Satu di Teluk Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran manajemen kedua perusahaan serta analis pasar modal. *Site visit* ini memperkenalkan secara langsung peran strategis FSRU Nusantara Regas Satu dalam menjaga keandalan pasokan energi gas di wilayah Jawa Bagian Barat, serta menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemenuhan kebutuhan energi primer untuk sektor kelistrikan.

PGN paid a site visit to the Nusantara Regas Satu Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) facility in Jakarta Bay, with management from both companies and capital market analysts in attendance. The site visit introduced firsthand the strategic role of the Nusantara Regas Satu FSRU in maintaining reliable gas energy supplies in the Western Java region, as well as its role as a key pillar in promoting national energy security by meeting primary energy needs for the electricity sector.

SEPTEMBER | SEPTEMBER



CITY GAS TOUR 2025 HADIR DI 4 KOTA DI SUMATERA
CITY GAS TOUR 2025 GOES TO 4 CITIES IN SUMATRA

PGN kembali menghadirkan program City Gas Tour dalam rangka memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan gas bumi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. City Gas Tour 2025 akan menyambangi empat kota di Sumatera, yaitu Medan, Pekanbaru, Dumai, dan Batam, dengan titik keberangkatan dari Kantor Pusat PGN di Jakarta.

PGN once again presented its City Gas Tour program in a bid to strengthen education to the public on the safe, efficient, and environmentally friendly use of natural gas. City Gas Tour 2025 visited four cities in Sumatra, namely Medan, Pekanbaru, Dumai, and Batam, with a departure point from PGN's Head Office in Jakarta.



PEMBANGUNAN MOTHER STATION CNG PERTAMA DI SUMATERA UTARA
CONSTRUCTION OF THE FIRST CNG MOTHER STATION IN NORTH SUMATRA

PGN resmi memulai pembangunan *Mother Station* (MS) *Compressed Natural Gas* (CNG) pertama di Kota Medan. Pembangunan ini menjadi tonggak penting dalam perluasan skema *Beyond Pipeline* di Sumatera Utara. Dengan kapasitas hingga 1 MMSCFD, MS tersebut diproyeksikan mampu melayani CNG hingga 4,48 BBTUD di Sumatera Utara, termasuk sektor industri, komersial, dan UMKM.

PGN has officially begun construction of the first Compressed Natural Gas (CNG) Mother Station (MS) in Medan, North Sumatra province. This development marks a significant milestone in the expansion of the Beyond Pipeline scheme in the province. With a capacity of up to 1 MMSCFD, the MS is expected to serve up to 4.48 BBTUD of CNG in North Sumatra, including the industrial, commercial, and MSME sectors.



PGN, PEMKAB JEPARA DAN BRIN KEMBANGKAN 20 HEKTARE PADI BIOSALINE DI PESISIR JEPARA
PGN, JEPARA REGENCY GOVERNMENT AND BRIN DEVELOP 20 HECTARES OF BIOSALINE RICE ON THE JEPARA COAST

PGN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan budidaya padi *biosalin* di wilayah pesisir Kabupaten Jepara. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana dan pemulihan pasca bencana akibat intrusi air laut dan perubahan iklim yang selama bertahun-tahun menurunkan produktivitas lahan pertanian pesisir.

Together with the National Research and Innovation Agency (BRIN), PGN is solidifying its support for the national food security program by developing biosaline rice cultivation in the coastal areas of Jepara regency. This initiative is part of a disaster mitigation and recovery strategy for post-disasters caused by seawater intrusion and climate change, which have for years reduced the productivity of coastal agricultural land.

OKTOBER | OCTOBER



REVITALISASI TANGKI LNG ARUN CAPAI 81%

ARUN LNG TANK REVITALIZATION REACHES 81% COMPLETION

Proyek revitalisasi tangki LNG Arun F-6004 yang dijalankan PGN melalui cucu usaha PT Perta Arun Gas (PAG), menunjukkan progres signifikan. Hingga Juni 2025, pembangunan telah mencapai 81,1% untuk tangki dan 94,39% untuk fasilitas pendukungnya, dengan target *commissioning* pada akhir 2025.

The Arun F-6004 LNG tank revitalization project, implemented by PGN through its subsidiary, PT Perta Arun Gas (PAG), has shown significant progress. As of June 2025, construction had reached 81.1% completion for the tank and 94.39% completion for its supporting facilities, with commissioning targeted for the end of 2025.



PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS DARI SUMUR PENGEMBANGAN SIDAYU

INCREASE IN OIL AND GAS PRODUCTION FROM THE SIDAYU DEVELOPMENT WELL

SAKA melakukan pengeboran Sumur Pengembangan Sidayu-5 di Wilayah Kerja Pangkah, Jawa Timur. Upaya ini akan memperkuat portofolio *asset* migas Pertamina, memastikan penambahan produksi migas di Wilayah Kerja Pangkah, sekaligus meningkatkan potensi cadangan migas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Produksi dari Sumur Pengembangan Sidayu-5 akan berkontribusi nyata terhadap kinerja operasional dan menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

SAKA drilled the Sidayu-5 Development Well in the Pangkah Work Area, East Java. This effort will strengthen Pertamina's oil and gas asset portfolio, ensure additional oil and gas production in the Pangkah Working Area, and increase potential oil and gas reserves for domestic use. Production from the Sidayu-5 Development Well will significantly contribute to operational performance and maintain the stability of the national energy supply.

OKTOBER | OCTOBER





PGN SALURKAN GAS BUMI KE RUSUN WISMA ATLET

PGN DISTRIBUTES NATURAL GAS TO WISMA ATLET HIGH-RISE APARTMENT

PGN resmi menyalurkan perdana (Gas In) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Wisma Atlet, Jakarta Utara. Inisiatif ini menandai langkah PGN dalam memperluas pemanfaatan energi bersih di kawasan permukiman perkotaan, khususnya rumah susun. Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap, dengan tahap pertama ditargetkan sebanyak 1.932 Sambungan Rumah (SR) di Unit C Pademangan dan tahap kedua sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran. Dengan demikian, total unit yang akan menggunakan Jargas mencapai 6.540 SR.

PGN officially launched the first natural gas connection (Gas In) for households (Jargas) at Wisma Atlet in North Jakarta. This initiative marks PGN's initiative in expanding the use of clean energy in urban residential areas, particularly high-rise apartments. Gas distribution at Wisma Atlet is being carried out in stages, with the first phase targeting 1,932 house connections (SR) in Unit C Pademangan and the second phase targeting 4,608 SR in Unit D Kemayoran, bringing the total number of units using Jargas to 6,540 SR.

KARGO LNG KE-30 DI FSRU JAWA BARAT

30TH LNG CARGO AT WEST JAVA FSRU

PT Nusantara Regas kembali mendukung keandalan energi nasional melalui penerimaan kargo LNG ke-30 di fasilitas FSRU Nusantara Regas Satu. Proses *ship-to-ship* (STS) LNG transfer ke FSRU Nusantara Regas Satu dengan volume LNG sebesar 130 ribu m^3, yang berasal dari Kilang LNG Tangguh. Gas hasil regasifikasi selanjutnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi primer di pembangkit listrik PLN, yaitu PLTGU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar.

PT Nusantara Regas stays true to its commitment to support national energy reliability by receiving its 30th LNG cargo at the Nusantara Regas Satu FSRU facility. The LNG transfer to the Nusantara Regas Satu FSRU, which was ship-to-ship (STS), involved 130,000 m^3 of LNG from the Tangguh LNG Refinery. The regasified gas is subsequently distributed to meet the primary energy needs of PLN's power plants, namely the Muara Karang, Tanjung Priok, and Muara Tawar combined cycle gas turbine (CCGT) plants.

NOVEMBER | NOVEMBER



PGN MULAI BANGUN BIOMETHANE INJECTION POINT DI PAGARDEWA

PGN BEGINS CONSTRUCTION OF BIOMETHANE INJECTION POINT IN PAGARDEWA

PGN mulai membangun *injection point* di Pagardewa, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari inisiatif pengembangan proyek strategis Biomethane. Injection Point di Pagardewa terdiri dari *Pressure Reducing System* (PRS) yang dapat digunakan sebagai titik injeksi sumber pasokan lainnya, misalnya *coalbed methane* (CBM), *stranded gas* dan sumber pasokan lainnya.

As part of its strategic Biomethane project development initiative, PGN has begun construction of an injection point in Pagardewa, South Sumatra. The Pagardewa injection point consists of a Pressure Reducing System (PRS) that can be used as an injection point for other supply sources, such as coalbed methane (CBM), stranded gas, and other supply sources.



FSRU LAMPUNG TERIMA KARGO LNG UNTUK KELISTRIKAN

LAMPUNG FSRU RECEIVES LNG CARGO FOR ELECTRICITY

FSRU Lampung kembali menerima kargo *Liquefied Natural Gas* (LNG) untuk melayani kebutuhan pembangkit listrik sebesar ±132.800 m^3 dari Lapangan Tangguh, Papua. Penerimaan LNG ini dilakukan melalui proses *Ship-to-Ship Transfer* (STS) oleh PGN LNG Indonesia pada 27 – 29 Oktober 2025. STS ini merupakan penerimaan kargo ke-19 sepanjang tahun 2025.

The Lampung FSRU has again received a cargo of Liquefied Natural Gas (LNG) to serve the power plant's needs, amounting to approximately ±132,800 m^3 from the Tangguh Field in Papua. This LNG receipt was carried out through a Ship-to-Ship Transfer (STS) process by, PGN LNG Indonesia, from October 27-29, 2025. This STS is the 19th cargo received in 2025.

NOVEMBER | NOVEMBER



GEDUNG KANTOR PGN AREA BEKASI USUNG KONSEP *GREEN BUILDING* DAN INKLUSIVITAS

PGN BEKASI AREA OFFICE BUILDING FEATURES GREEN BUILDING AND INCLUSIVITY CONCEPT

PGN resmikan Kantor Area Bekasi yang mengusung konsep *green building* dan berhasil meraih Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) Preliminary Certificate dari Green Building Council Indonesia (GBCI), bagian dari standar internasional IFC—World Bank Group. Sertifikasi EDGE pada tahap desain mengakui bahwa Kantor Area Bekasi mampu mencapai 35% penghematan energi, 30% penghematan air, serta 23% pengurangan jejak karbon material dibandingkan bangunan konvensional. Gedung ini juga dirancang humanis, aman, dan inklusif yang ramah bagi disabilitas, serta ruang kerja ergonomis yang mendorong kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas seluruh pekerja.

PGN inaugurated its Bekasi Area Office, which embraces a green building concept and has successfully achieved the Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) Preliminary Certificate from the Green Building Council Indonesia (GBCI), part of the IFC-World Bank Group international standards. The EDGE certification, during the design phase, recognized that the Bekasi Area Office achieved 35% energy savings, 30% water savings, and a 23% reduction in the carbon footprint of materials compared to conventional buildings. The building was also designed to be humane, safe, and inclusive, with accessibility for people with disabilities, and ergonomic workspaces that promote comfort, health, and productivity for all employees.



FSRU LAMPUNG TERIMA KARGO LNG KE-20

LAMPUNG FSRU RECEIVES 20TH LNG CARGO

FSRU Lampung kembali menerima kargo LNG untuk kebutuhan PGN sebesar ±131.000 m^3, yang bersumber dari LNG Plant domestik. Penerimaan kargo dengan proses *Ship-to-Ship-Transfer* (STS) dilaksanakan oleh anak usaha PGN yaitu PGN LNG Indonesia. Kegiatan ini menjadi penerimaan kargo ke-20 sepanjang tahun 2025, yang menandai operasional FSRU Lampung tetap andal dan stabil.

The Lampung FSRU has once again received an LNG cargo of approximately ±131,000 m^3 for PGN's needs, sourced from a domestic LNG plant. The cargo was received through a ship-to-ship transfer (STS) process conducted by PGN's subsidiary, PGN LNG Indonesia. This marked the 20th cargo received in 2025, demonstrating the continued reliability and stability of the Lampung FSRU's operations.

DESEMBER | DECEMBER



PGN DAN DART ENERGY KERJA SAMA PEMANFAATAN CBM DARI WILAYAH KERJA GMB TANJUNG ENIM

PGN AND DART ENERGY COOPERATE ON CBM UTILIZATION FROM THE TANJUNG ENIM GMC WORK AREA

PGN dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (Dart Energy) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batu bara atau *Coalbed Methane* (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik, sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.

PGN and Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd. (Dart Energy) signed a Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) to utilize gas supplies from the development of the Coalbed Methane (CBM) field in the Tanjung Enim Work Area, South Sumatra. This collaboration marks an important step in joint efforts to make the most of the potential of domestic gas resources while promoting the diversification of the national natural gas supply.



PGN GERAK CEPAT SALURKAN BANTUAN BENCANA DI ACEH DAN SUMATERA UTARA

PGN's SWIFT MOVE TO DISTRIBUTE DISASTER AID IN ACEH AND NORTH SUMATRA

PGN bergerak cepat membantu korban banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai bentuk respons darurat, PGN menyiapkan berbagai bantuan awal untuk logistik yang mencakup kebutuhan pangan, obat-obatan, serta perlengkapan bagi ibu dan anak, yang segera didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi bencana.

PGN moved swiftly to assist flood victims that hit several areas in Aceh and North Sumatra. As an emergency response, PGN prepared various initial logistical aid items, including food, medicine, and supplies for mothers and children. These were immediately distributed to affected areas to support the community's basic needs following the disaster.

DESEMBER | DECEMBER





KERJA SAMA PENYEDIAAN *COMPRESSED BIOMETHANE GAS* (CBG)

COOPERATION ON COMPRESSED BIOMETHANE GAS (CBG) SUPPLY

GAGAS dan PT Renikola Primer Energi melakukan kerja sama penyediaan *Compressed Biomethane Gas* (CBG) dengan titik penyerahan di Sumatera Utara. Kerja sama ini menandai langkah strategis dalam mendukung transisi energi hijau di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi besar limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan.

GAGAS and PT Renikola Primer Energi have entered into a collaboration to supply Compressed Biomethane Gas (CBG) with a delivery point in North Sumatra. This marks a strategic step in supporting the green energy transition in Indonesia, particularly in North Sumatra, which has significant potential for organic waste from the plantation and livestock sectors.

PATUHI UU BUMN, RUPLSB PGN SETUJUI PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR

PGN'S EGMS APPROVES ADJUSTMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION, COMPLIES WITH SOE LAW

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN pada tanggal 29 Desember 2025, menyetujui tiga mata acara yaitu Perubahan Hak atas Saham Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.

PGN's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 29, 2025 approved three agenda items: the Amendement of Company's Shareholder Rights, the Amendment of Company's Articles of Association, and the Delegation of Authority to the Company's Board of Commissioners to approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026, and the Company's Long-Term Corporate Plan (RJPP) for the Period 2026-2030, including the amendments.


PERTAMINA
GAS NEGARA

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

02




PERTAMINA
BAGUS WIRANTO



1

Widjono Hardjanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

2

Conny Lolyta Rumondor
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3

Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner



4

Rambe Kamarul Zaman
Komisaris
Commissioner

5

Thanon Aria Dewangga
Komisaris
Commissioner

6

Edward Omar Sharif Hiariej
Komisaris
Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi, dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan dan inisiatif untuk menjaga kinerja PGN tetap positif.

Overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has managed the company effectively amidst the challenges faced, anticipating them through various strategies, policies, and initiatives to maintain PGN's positive performance."



TONY S. B. HOESODO

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commisssioner

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Tahun 2025 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi PGN akibat adanya penurunan pasokan gas pipa, peningkatan pasokan LNG yang mempengaruhi harga beli gas, peningkatan biaya keuangan seiring perubahan kondisi keuangan global, serta adanya biaya penyesuaian aset hulu. Sehingga laba tahun berjalan yang dapat di atribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat USD215,36 juta atau menurun 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, PGN terus mengembangkan investasi infrastruktur jaringan gas bagi pelanggan industri maupun pelanggan rumah tangga, melaksanakan revitalisasi tanki LNG, melanjutkan pengeboran migas, melakukan pengelolaan likuiditas yang disiplin, serta meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui digitalisasi.

Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi dan karyawan, yang dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika industri, selalu menerapkan strategi bisnis adaptif dan responsif dan mengimplementasikan tata kelola yang baik, untuk mendukung peran PGN sebagai penyedia gas utama di Indonesia yang mampu memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Kami terus menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 dan kesesuaian dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025 - 2029. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap perumusan serta penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi untuk memastikan PGN tetap berada di jalur yang tepat dan selaras dengan visi jangka panjang serta prinsip governansi korporat.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Di tengah ketidakpastian perdagangan global dan situasi geopolitik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sekitar 5,11% (BPS) dan tingkat inflasi yang relatif rendah sesuai target Bank Indonesia yaitu sekitar 2,5± 1%. Dari sisi industri migas, harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2025 berada pada kisaran USD67,38 per barel, lebih rendah dibanding rata-rata ICP tahun 2024 sekitar USD78,32 per barel. Permintaan atas energi gas bumi industri tetap bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, namun pasokan gas pipa mengalami ketidakpastian sehingga mendorong pemanfaatan sumber pasokan yang lebih

DEAR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

The year 2025 continued to present challenges for PGN amid declining pipeline gas supply, increasing LNG supply that influenced gas purchase prices, higher financial expenses driven by the evolving global financial conditions, as well as the recognition of upstream asset adjustments. Consequently, PGN recorded profit for the year atributable to owners of the parent entity of USD215.36 million, representing a decrease of 37% compared to the previous year. Notwithstanding these challenges, the Company continued to invest in developing gas infrastructure for both industrial and household customers, revitalizing LNG storage tanks, advancing upstream drilling activities, maintaining disciplined liquidity management, and enhancing customer service through digitalization

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and all employees who, amid industry complexity and dynamic conditions, always implemented adaptive and responsive business strategies and upheld strong corporate governance practices. These efforts support PGN's role as a leading gas provider in Indonesia, delivering long-term value to shareholders and stakeholders.

The Board of Commissioners consistently carried out its supervisory duties over the management of the Company by the Board of Directors, including overseeing the execution of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) and ensuring its alignment with the 2025–2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP). In addition, the Board closely monitored the formulation and implementation of strategies and policies to ensure that PGN remained on track to achieve its long-term vision in alignment with corporate governance principles.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Amid ongoing global trade uncertainty and geopolitical developments, Indonesia's economy grew by approximately 5.11% in 2025 (BPS), while inflation remained under control at around 2,5± 1%, in line with Bank Indonesia's target. Within the oil and gas sector, the Indonesian Crude Price (ICP) averaged USD67.38 per barrel in 2025, lower than the 2024 average of USD78.32 per barrel. Demand for natural gas from the industrial sector continued to grow in line with the expansion of economic activity. However, uncertainty over pipeline gas supply led to increased reliance on more flexible supply sources, including LNG and non-pipeline

fleksibel, termasuk pemanfaatan LNG dan solusi non-pipa sebagai alternatif. PGN juga secara berkesinambungan melaksanakan Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan Jaringan Gas Kota Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, serta penugasan dari Pemerintah menyangkut penyediaan bahan bakar gas bumi untuk transportasi dan penyaluran gas bumi dengan harga tertentu.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi sehingga PGN membukukan kinerja keuangan yang baik dengan Pendapatan Konsolidasian sebesar USD3,98 miliar atau tumbuh 5% dari tahun sebelumnya, serta Laba Bersih Konsolidasian mencapai USD215,36 juta atau turun 37% dari tahun sebelumnya. Belanja modal pada tahun 2025 tercatat sebesar USD282,43 juta atau meningkat 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi arus kas solid pada akhir tahun 2025 sebesar USD1,34 miliar. Semua rasio keuangan dapat terpenuhi di atas target.

Tingkat Kesehatan Perusahaan menjadi penilaian yang menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha dan mencapai tujuan strategisnya. Penilaian ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi, sekaligus menjadi opini independen kepada pemegang saham mengenai kestabilan kinerja, kepatuhan regulasi OJK, serta prospek perusahaan di masa mendatang dimana pada tahun 2025 PGN berhasil mencapai AAA (Sangat Sehat).

Sepanjang tahun 2025, PGN mampu memperluas jaringan pipa infrastruktur distribusi serta jumlah pelanggan gas bumi yang memanfaatkan pipa gas dan *beyond pipeline,* seperti CNG dan LNG Ritel baik pelanggan kecil, komersial dan industri serta pelanggan rumah tangga. Indikator *customer satisfaction* dan *employee engagement* juga mengalami peningkatan. Indikator pengelolaan *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE) juga tercapai dengan *zero number of accidents*. *Cybersecurity Maturity Assessment* pada Domain Identifikasi, bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero), juga mengalami peningkatan. Kegiatan operasi dan pemeliharaan aset juga telah dilakukan sesuai dengan praktik terbaik.

solutions. PGN also continued to carry out a National Strategic Project, namely the development of City Gas Networks for Households and Small Business Customers, as well as Government assignments related to the provision of natural gas as a transportation fuel, and the distribution of natural gas at regulated prices.

The Board of Commissioners commends the Board of Directors for delivering a solid performance, with consolidated revenue reaching USD3.98 billion, representing year-on-year growth of 5%, while consolidated net profit amounted to USD215.36 million, a decrease of 37% compared to the previous year. Capital expenditure totaled USD282.43 million, increasing by 11% year-on-year, while the Company maintained a strong cash position of USD1.34 billion at year-end. All key financial ratios exceeded their respective targets.

The Company's Soundness Level serves as a comprehensive assessment of the company's financial, operational, corporate governance, and risk management conditions, highlighting the company's ability to maintain business sustainability and achieve its strategic objectives. This assessment is the manifestation of the Board of Commissioners' oversight function to the Board of Directors and provides an independent opinion to shareholders regarding the company's performance stability, compliance with OJK regulations, and future outlook. PGN has successfully achieved AAA (Excellent Soundness) in 2025.

Throughout 2025, PGN expanded its distribution pipeline and infrastructure natural gas customer base across both pipeline and beyond-pipeline solutions, including CNG and retail LNG, serving the small business, commercial, industrial, and household segments. Customer satisfaction and employee engagement indicators improved, as did our Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) performance, achieving zero Number of Accidents (NoA). We also saw an improvement in the Company's Cybersecurity Maturity Assessment in the Identification domain, conducted in collaboration with PT Pertamina (Persero). In addition, operations and maintenance activities were carried out in accordance with industry best practices.

Pada tahun 2025, investasi difokuskan untuk memperluas jaringan distribusi gas ke pelanggan, pengeboran sumur migas, termasuk menjajaki bisnis baru seperti *biomethane*, LNG *bunkering*, monetisasi *stranded gas* dan *pilot project* bauran energi.

Kami menyadari bahwa pencapaian tersebut tidak luput dari tantangan, diantaranya keterbatasan pasokan gas bumi, preferensi pelanggan atas harga gas yang lebih kompetitif, penurunan produksi sumur migas secara alamiah, tantangan dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga, pelemahan nilai tukar USD dan kebutuhan berkelanjutan akan pengembangan talenta yang relevan untuk mendukung bisnis masa depan PGN.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan dengan baik, di tengah tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan dan inisiatif untuk menjaga kinerja PGN tetap positif.

Namun demikian, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk meningkatkan pengelolaan ketersediaan pasokan gas, peningkatan realisasi investasi, percepatan pembangunan jaringan gas bagi pelanggan kecil dan rumah tangga serta peningkatan berkelanjutan atas kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini dan masa mendatang.

PENGAWASAN PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan dukungan, saran, serta nasihat yang dibutuhkan terhadap perumusan dan penerapan strategi termasuk kebijakan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian lebih terhadap penerapan strategi oleh Direksi, dalam mendukung pencapaian RKAP dan RJPP.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris juga mencermati serta mengawasi rencana investasi pembangunan infrastruktur yang dijalankan Direksi dengan memperhatikan kelayakan teknis dan keekonomian, serta mendukung pemanfaatan

In 2025, investments were directed toward expanding distribution networks, advancing upstream drilling, and exploring new business opportunities such as biomethane, LNG bunkering, stranded gas monetization, and energy mix pilot projects.

The Board recognizes that these achievements were attained amid a number of challenges, including limited gas supply, increasing customer preference for more competitive pricing, natural declines in upstream production, constraints on developing household gas networks, exchange rate volatility, and the need to continuously develop talent to support future business growth.

Overall, the Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has managed the Company effectively, demonstrating sound judgment and responsiveness in addressing these challenges through a range of strategies, policies, and initiatives that have sustained PGN's positive performance.

Nevertheless, the Board continues to encourage the Board of Directors to further strengthen gas supply reliability, accelerate investment realization, expedite the development of gas infrastructure for small business and household customers, and continuously enhance human capital capabilities in line with evolving business requirements.

OVERSIGHT OF STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners actively oversees and provides support, recommendations, and advice on the formulation and implementation of the Company's strategies and policies. Particular emphasis is placed on ensuring that these strategies effectively support the achievement of RKAP and RJPP targets.

The Board also closely reviews and supervises the Board of Directors' infrastructure investment plans, taking into account both technical feasibility and economic viability, while encouraging the adoption of advanced technologies

berbagai opsi teknologi terkini dalam industri minyak dan gas, dengan tetap menjaga kepatuhan kepada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibantu oleh Komite Dewan Komisaris, secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, kinerja operasional serta *top risk* Perusahaan, termasuk pengelolaan operasional bisnis, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan teknologi informasi serta pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan fluktuasi harga saham.

in the oil and gas sector and ensuring compliance with internal policies and the prevailing regulations. With the support of the Board Committees, we regularly evaluate the Company's financial and operational performance, as well as key risks, which include business operations, human capital development, information technology management, risk management implementation, internal control systems, and share price movements.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 50 Rapat Dewan Komisaris, termasuk 12 kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga melaksanakan 10 kegiatan berupa kunjungan kerja dan *Management Walkthrough* (MWT). Adapun persetujuan, nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2025 di antaranya, sebagai berikut:

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 50 meetings, including 12 Joint Meetings with the Board of Directors. Additionally, the Board of Commissioners also held 10 activities, including working visits and Management Walkthrough (MWT). The Board provided various approvals, recommendations, and advisory inputs to the Board of Directors throughout the year, as follows:

Perihal Subject	**Persetujuan/Nasihat/Saran** Approval/Advice/Recommendation
Strategi, Pengelolaan Bisnis dan Investasi Strategy, Business Management and Investment	1. Persetujuan Revisi RKAP 2025. Approval of the Revision of the RKAP 2025. 2. Persetujuan Re-FID atas Investasi Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack Wilayah Kerja Muara Bakau PT Saka Energi Indonesia. Approval of the Re-FID for the Investment in JNE-07 Sidetrack Well Drilling Muara Bakau Block PT Saka Energi Indonesia. 3. Penelaahan atas kebijakan operasional Perusahaan dan proses bisnis turunannya. Review of the Company's operational policies and the related business processes. 4. Penelaahan berkala terkait kinerja Perusahaan, baik kinerja operasional, keuangan, HSSE, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Harga Saham. Periodic reviews in relation to corporate performance, including operational performance, finances, HSSE, human capital, information technology and share price.
Audit Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Audit, Internal Control and Risk Management	1. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko. Approval of the Risk Management Policy. 2. Penelaahan hasil audit internal dan proses audit investigasi internal. Review of the internal audit results and internal investigative audit process. 3. Penelaahan risiko utama Perusahaan dan rencana mitigasinya. Review of the Company's key risks and plans for their mitigation.
Sumber Daya Manusia dan GCG Human Capital and GCG	1. Persetujuan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan. Approval of the Change in Management of the Subsidiary. 2. Persetujuan Pedoman Board Manual. Approval of the Board Manual. 3. Persetujuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Approval of the Good Corporate Governance Guidelines. 4. Penelaahan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan GCG, penerapan tata kelola terintegrasi, implementasi ESG. Review of the plans for Human Capital development, GCG enhancement, integrated governance implementation, and ESG implementation. 5. Pemantauan perkembangan kasus-kasus hukum utama yang dihadapi Perusahaan. Monitoring of the development of principal cases against the Company.

EVALUASI IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PEMANTAUAN *WHISTLE BLOWING*

Dewan Komisaris memastikan bahwa sepanjang tahun 2025 PGN secara konsisten memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dalam seluruh aspek operasional. Praktik-praktik ini penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mencermati perkembangan terkini, Direksi telah melakukan pembaruan terhadap beberapa *Good Corporate Governance* (GCG) *soft structure* di antaranya pembaruan Board Manual, Pedoman Tata Kelola Yang Baik, serta beberapa pedoman lainnya yang bertujuan untuk menyelaraskan operasional Perseroan dengan praktik terbaik. Kami juga memperhatikan upaya peningkatan kesadaran GCG dan anti penyuapan berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan penyebaran konten GCG yang konsisten dan menggunakan berbagai media komunikasi Perusahaan. Kami juga mengapresiasi upaya Direksi dalam menjalankan Survei Pemahaman GCG agar meningkatkan pemahaman GCG di internal serta menciptakan budaya perusahaan yang berintegritas, yang dapat mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

Pada tahun 2025, PGN kembali melakukan asesmen internal atas penerapan GCG dengan perolehan KPI GCG *Implementation Compliance* sebesar 94,86%, berada di atas target Holding 94,50%. PGN juga melakukan evaluasi penerapan GCG menggunakan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) Revised October 2023 (Version 2 March 2024) dan memperoleh *adoption rate* 114,60 dari standar yang diharapkan, melebihi standar minimum dan meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 91,11. Lebih lanjut, PGN melakukan evaluasi tata kelola dengan kriteria yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) yaitu PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan kualifikasi "*Apply*" untuk "Seluruh Prinsip" mempertahankan kualifikasi Apply yang juga didapatkan untuk tahun 2024, serta penerapan GCG berdasarkan parameter Peraturan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 yang mencapai predikat "*Comply*" untuk "Seluruh Aspek" mempertahankan kualifikasi Comply yang juga didapatkan untuk tahun 2024.

EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AND WHISTLEBLOWING OVERSIGHT

Throughout 2025, the Board of Commissioners ensured that PGN consistently upheld the principles of transparency, accountability, and fairness across all aspects of its operations. These principles are fundamental to maintaining stakeholder trust and supporting sustainable business growth. In response to recent developments, the Board of Directors updated several Good Corporate Governance (GCG) soft structures, including the Board Manual, GCG Guidelines, and other supporting policies, to align operations with best practices. We observed that efforts to strengthen GCG awareness and anti-bribery practices were effectively implemented through continuous communication and engagement across various corporate platforms. We also appreciated the Board of Directors' initiative in implementing the GCG Understanding Survey, which supports the development of an integrity-driven corporate culture and long-term business sustainability.

In 2025, PGN conducted an internal GCG assessment, achieving a GCG Implementation Compliance KPI of 94.86%, exceeding the Company's target of 94.50%. The Company also evaluated its governance practices using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), achieving an adoption rate of 114.60, exceeding the minimum standard and improving from 91.11 in 2024. PGN also conducted a governance evaluation based on the criteria issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI) 2021, achieving an "Apply" rating for "All Principles," thereby maintaining the same qualification as in 2024. Meanwhile, PGN's compliance with OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 achieved a "Comply" rating across all aspects, also consistent with the prior year.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, Dewan Komisaris mendukung penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dengan melakukan pengawasan secara komprehensif dan memastikan diterapkannya sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami juga menilai penerapan WBS di PGN sudah sesuai dengan adanya Pedoman WBS Nomor P-002/A011 yang mengatur mengenai cara penyampaian pelanggaran, proses kerja WBS, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan hingga tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran. Dalam rangka sinergi kolaborasi Holding dan Subholding untuk penerapan WBS seperti tercantum dalam Piagam Internal Audit Tahun 2025, maka Perseroan bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pengelolaan WBS. Sampai dengan tahun 2025 terdapat 77 pengaduan yang masuk melalui saluran WBS PT Pertamina (Persero) dengan 38 status *ongoing progress* dan 39 *closed* dan 29 pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perseroan dengan status 8 *closed* dan 21 *ongoing progress*.

The Board of Commissioners supports the implementation of the Whistleblowing System (WBS) as a key aspect of governance through comprehensive oversight and by ensuring that appropriate sanctions are imposed for any substantiated violations. We concluded that the WBS was implemented in accordance with Guideline Number P-002/A011, which governs reporting mechanisms, processes, whistleblower protection, case handling, and follow-up actions. To strengthen synergy between the Holding and Subholding, as mandated in the 2025 Internal Audit Charter, the Company collaborates with PT Pertamina (Persero) in managing the WBS. As of 2025, 77 reports were received through PT Pertamina (Persero)'s WBS channel with 38 cases ongoing and 39 resolved, while 29 reports were received through the Company's WBS channel, with 8 resolved and 21 ongoing.

Prinsip-prinsip keberlanjutan juga senantiasa diintegrasikan ke dalam setiap proses bisnis, mulai dari perumusan strategi dan kebijakan hingga pembuatan program-program Perseroan. Seluruhnya disesuaikan dengan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sustainability principles continue to be embedded across all business processes, from strategic and policy planning to program implementation, in alignment with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles and the Sustainable Development Goals (SDGs).

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2025, saya diangkat menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PGN, menggantikan Bapak Amien Sunaryadi. RUPSLB juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Warih Sadono sebagai Komisaris; Bapak Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen; Ibu Dini S. Purwono sebagai Komisaris Independen; dan Bapak Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen. PGN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepemimpinan, dedikasi dan kontribusi selama masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on August 27, 2025, I was appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PGN, succeeding Mr. Amien Sunaryadi. The EGMS also approved the honorable dismissal of Mr. Warih Sadono as Commissioner, and Mr. Christian H. Siboro, Ms. Dini S. Purwono and Mr. Abdullah Aufa Fuad as Independent Commissioners. PGN extends its sincere appreciation for their leadership, dedication, and valuable contributions during their tenure.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai Keputusan RUPSLB tanggal 27 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners, in accordance with the Resolution of the EGMS on August 27, 2025, is as follows:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commisssioner	**Tony S. B. Hoesodo**
Komisaris Commissioner	**Edward O.S. Hiariej**
Komisaris Commissioner	**Rambe Kamarul Zaman**
Komisaris Commissioner	**Thanon Aria Dewangga**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Widjono Hardjanto**
Komisaris Independen Independent Commissioner	**Conny Lolyta Rumondor**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki empat Komite Penunjang Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, selaras dengan rencana kerja dan fungsi yang dimiliki masing-masing Komite. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya rekomendasi yang diberikan komite, capaian kinerja selama tahun buku 2025, kompetensi yang dimiliki dan tingkat kehadiran dalam rapat.

Komite Audit telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pengawasan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan proses audit Perseroan yang dilakukan dalam 33 kali pertemuan. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan rekomendasi dalam sistem nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pengembangan organisasi serta penerapan pengelolaan tata kelola, yang dilakukan dalam 13 pertemuan. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pengawasan sistem manajemen risiko serta memberikan rekomendasi pengembangan usaha atau rencana investasi, yang dilakukan dalam 20 pertemuan. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pengawasan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal secara terintegrasi pada Perusahaan dan Anak Usaha, yang dilakukan dalam 8 pertemuan.

EVALUATION OF BOARD COMMITTEES' PERFORMANCE

The Board of Commissioners is supported by four committees: the Audit Committee; the Nomination, Remuneration and GCG Committee; the Risk Management and Business Development Committee; and the Integrated Governance Committee. In 2025, the Board concluded that all committees discharged their duties effectively, in line with their respective mandates and work plans. This assessment was based on various criteria, including the recommendations provided, performance achievements during 2025, competencies, and meeting attendance.

The Audit Committee effectively supported oversight of internal control systems and audit processes, meeting 33 times. The Nomination, Remuneration and GCG Committee provided recommendations on the nomination and remuneration systems, organizational development, and governance practices through 13 meetings. The Risk Management and Business Development Committee supported risk oversight and provided recommendations on business development and investment initiatives, convening 20 meetings. The Integrated Governance Committee oversaw integrated risk management, compliance, and internal control across the Company and its subsidiaries, holding 8 meetings.

EVALUASI ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Di tahun 2026, kendati dihadapkan pada sejumlah peluang pertumbuhan bisnis, PGN juga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, seperti fluktuasi harga energi global dan tekanan untuk beralih ke sumber energi terbarukan, termasuk dinamika kondisi ekonomi global dan domestik.

Dinamika geopolitik di Timur Tengah pada awal tahun 2026, diproyeksikan akan menimbulkan beberapa tantangan diantaranya terkait fluktuasi harga minyak global yang dipengaruhi eskalasi perang AS-Israel dan Iran, yang dapat mempengaruhi formula harga gas hasil regasifikasi LNG, sehingga berdampak pada kenaikan harga gas, kemampuan bayar pelanggan, volume penyerapan, dan margin distribusi gas bumi, yang akan akan dimitigasi secara optimal oleh Perseroan.

Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi dalam mencapai RKAP 2026 dengan mengimplementasikan strategi G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*) sebagai langkah optimalisasi pasokan, pengembangan infrastruktur, peningkatan bisnis LNG, serta ekspansi ke sektor energi hijau. Dengan strategi yang adaptif, diversifikasi portofolio, peningkatan efisiensi operasional dan pelaksanaan manajemen risiko yang kuat, kami optimis dapat mengatasi tantangan tersebut dan Direksi dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa peluang pertumbuhan di masa mendatang tetap terbuka dan terus mendukung segala upaya yang akan dijalankan Direksi dalam rangka memperkuat bisnis PGN ke depan.

EVALUATION OF BUSINESS PROSPECTS

While a number of growth opportunities await PGN in 2026, it will also have to contend with tough challenges, including volatility in global energy prices, the transition to renewable energy, and evolving global and domestic economic conditions.

The geopolitical dynamics in the Middle East at the beginning of 2026 are expected to present additional challenges, particularly in the form of global oil price volatility driven by the escalation of the United States and Israel's war with Iran. This may affect the pricing formula for regasified LNG, potentially leading to higher gas prices, with implications for customers' purchasing power, gas offtake volumes, and natural gas distribution margins. The Company remains committed to proactively mitigating these risks.

The Board of Commissioners supports the Board of Directors in the execution of the 2026 RKAP through the G-A-S (Grow–Adapt–Step Out) strategy, which emphasizes supply optimization, infrastructure development, the growth of the LNG business, and expansion into the green energy sector. With adaptive strategies, portfolio diversification, enhanced operational efficiency, and robust risk management, the Board remains confident that the Company can navigate these challenges and capitalize on emerging opportunities to achieve sustainable growth. Overall, the Board believes that the Company's growth prospects remain strong and will continue to support the strategic initiatives undertaken by the Board of Directors to strengthen the business over the long term.

PENUTUP

Menutup laporan ini, kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang tulus kepada jajaran Direksi, Perwira Subholding Gas, serta para pemegang saham yang selama ini senantiasa berkontribusi dan mendukung kepada pencapaian kinerja PGN. Semoga, kerja keras yang telah kita dedikasikan untuk PGN dapat membawa manfaat tidak hanya kepada kami, melainkan juga kepada pemangku kepentingan yang lebih besar.

Akhir kata, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyambut tahun yang akan datang dengan semangat dan optimisme. Kami yakin, bersama-sama kita dapat melewati segala tantangan yang membentang, meraih peluang yang akan datang, dan terus berkontribusi untuk Indonesia.

CLOSING

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, we extend our sincere appreciation to the Board of Directors, all Company personnel, and our shareholders for their continued support and contributions to PGN's performance. We trust that our collective efforts will create lasting value not only for the Company but also for our broader stakeholders.

Finally, we invite all our stakeholders to welcome the coming year with renewed spirit and optimism. Together, we are well-positioned to overcome challenges, seize opportunities, and continue to contribute meaningfully to Indonesia.

Jakarta,
23 April 2026
April 23, 2026



Tony S. B. Hoesodo
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commisssioner



1	2	3
Rachmat Hutama **Direktur SDM dan Penunjang Bisnis** Director of HR and Business Support	**Aldiansyah Idham** **Direktur Komersial** Director of Commerce	**Arief K. Risdianto** **Direktur Utama** President Directors



4

Mirza Mahendra
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

5

Catur Dermawan
Direktur Keuangan
Director of Finance

6

Eri Surya Kelana
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

7

Hery Murahmanta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Dalam menghadapi dan merespons dinamika geopolitik dan ekonomi global serta pasar industri energi nasional, Perusahaan tetap mampu menjaga pengelolaan bisnis secara fundamental dengan baik, mencerminkan kondisi *strength in balance*.

Despite the volatile global geopolitical and economic landscape and the shifts in the national energy market, the Company maintained strong business fundamentals, demonstrating its strength in balance.



ARIEF K. RISDIANTO

Direktur Utama
President Director

Sepanjang tahun 2025, PGN terus memperkuat perannya sebagai penyedia energi yang andal sekaligus mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, Perusahaan tetap mampu menjaga pengelolaan bisnis secara operasional dan fundamental dengan baik. Tingkat kesehatan perusahaan juga tetap terjaga, mencerminkan kondisi *strength in balance*.

Perusahaan berhasil merespons dinamika pasar energi nasional dengan membukukan kinerja yang menunjukkan komitmen untuk mengelola bisnis gas bumi secara optimal, andal, dan aman. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Perekonomian global mencatat pertumbuhan sebesar 3,3% pada tahun 2025, berdasarkan estimasi IMF. Meskipun relatif stabil, pertumbuhan tersebut dibayangi oleh berbagai tantangan, antara lain meningkatnya ketidakpastian perdagangan akibat kebijakan proteksionis, perlambatan ekonomi di sejumlah negara utama, serta konflik geopolitik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut turut memicu volatilitas di pasar keuangan global, termasuk fluktuasi nilai tukar JPY terhadap USD dan IDR terhadap USD.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,11% (BPS), didukung oleh resiliensi konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang makin membaik. Meskipun sedikit di bawah target 5,2%, capaian ini mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat. Tingkat inflasi mengalami kenaikan, namun tetap terjaga dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5± 1% atau kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Aktivitas sektor manufaktur menunjukkan ekspansi, dengan PMI Manufaktur pada bulan Desember tercatat sebesar 51,2, didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri yang menguat. Dari sisi pasar keuangan, *yield* Surat Berharga Negara (SBN) menurun dari 7,02% pada akhir 2024 menjadi 6,01% pada akhir 2025, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat signifikan sebesar 22,13% *year-on-year*. Namun demikian, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan depresiasi yang cukup besar sepanjang tahun, meskipun Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah stabilisasi dan intervensi di pasar.

Throughout 2025, PGN continued to strengthen its role as a reliable energy provider and a strategic partner in supporting national development. Despite significant challenges, the Company maintained sound operational performance and strong business fundamentals. The Company's overall financial and operational health also remained solid, reflecting a position of strength and balance.

Amid the evolving dynamics of Indonesia's energy market, the Company delivered a performance that demonstrates its commitment to managing the natural gas business in an optimal, reliable, and safe manner. At the same time, the Company continued to focus on creating sustainable value for our shareholders and other stakeholders.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Global economic *growt*h was estimated at 3.3% in 2025, according to the International Monetary Fund (IMF). While relatively stable, the global outlook remained overshadowed by several challenges, including heightened trade uncertainty driven by protectionist policies, slowing economic growth in several major economies, and prolonged geopolitical conflicts. These factors also contributed to volatility in global financial markets, including fluctuations in the Yen to US Dollar and US Dollar to Rupiah exchange rates.

Against this global backdrop, Indonesia's economy recorded 5.11% growth in 2025, based on data from BPS-Statistics Indonesia. The performance was supported by resilient household consumption and improving export performance. Although slightly below the 5.2% target, the achievement reflects relatively strong domestic economic fundamentals. Inflation edged higher during the year but remained within the target range set by Bank Indonesia of 2.5± 1% or between 1.5% and 3.5%. The manufacturing sector also continued to expand, with the Manufacturing PMI reaching 51.2 in December, supported by strengthening domestic and external demand. In financial markets, yields on government bonds (SBN) declined from 7.02% at the end of 2024 to 6.01% at the end of 2025, while the Jakarta Composite Index (IHSG) recorded a significant 22.13% year-on-year increase. Nevertheless, the Rupiah faced notable depreciation pressure throughout the year, despite stabilization measures and market interventions undertaken by Bank Indonesia.

Di sektor energi, berdasarkan data Kementerian ESDM *lifting* minyak bumi nasional sebesar 605,3 ribu barel per hari (MBOPD) dan *lifting* gas bumi sebesar 951,8 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) di tahun 2025. Dari total produksi gas bumi sebesar 5.600,35 BBTUD, sebanyak 3.908 BBTUD atau 69,78% dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Seluruh kebutuhan gas nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri, mencerminkan komitmen terhadap ketahanan energi nasional.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2025 tercatat sekitar USD67,38 per barel, lebih rendah dibandingkan USD72,32 per barel pada tahun 2024 dan berada di bawah asumsi harga dalam APBN 2025 sekitar USD82 per barel. Penurunan harga ini turut memengaruhi dinamika sektor energi dan penerimaan negara sepanjang tahun berjalan. Sepanjang tahun 2025, pasar gas bumi nasional berada dalam fase yang dinamis. Permintaan energi secara struktural terus meningkat, namun diiringi dengan perilaku pelanggan yang semakin selektif dan sensitif terhadap harga. Ketidakpastian pasokan gas dari sektor hulu mendorong kebutuhan akan sumber pasokan yang lebih fleksibel, termasuk pemanfaatan LNG dan solusi non-pipa sebagai alternatif.

Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah seperti Harga Gas Bumi Tertentu turut membentuk pola konsumsi baru di kalangan pelanggan industri yang semakin berorientasi pada efisiensi operasional dan kepastian biaya. Kondisi tersebut menjadikan lanskap pasar bergerak lebih hati-hati dan adaptif terhadap perubahan pasokan maupun dinamika regulasi.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

PGN beradaptasi secara proaktif melalui penguatan strategi komersial, operasional, dan infrastruktur untuk menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, mempertahankan keseimbangan usaha, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari sisi komersial, Perusahaan mengelola portofolio pelanggan secara lebih seimbang, memprioritaskan sektor strategis, serta mengoptimalkan fleksibilitas harga dan skema layanan agar tetap kompetitif di tengah sensitivitas biaya pelanggan. Di sisi operasional, PGN terus memperkuat ketahanan hubungan dengan pelanggan, tercermin dari *Customer Retention Rate* yang tinggi sebesar 97,49%, sekaligus berhasil mempertahankan

In the energy sector, the Ministry of Energy and Mineral Resources reported national crude oil lifting of 605.3 thousand barrels per day (MBOPD) and natural gas lifting of 951.8 thousand barrels of oil equivalent per day (MBOEPD) in 2025. Of the total natural gas production of 5,600.35 BBTUD, approximately 3,908 BBTUD, or 69.78%, was allocated to meet domestic demand. Overall, national gas requirements were fully supplied from domestic production, reflecting Indonesia's continued commitment to strengthening national energy security.

Meanwhile, the Indonesian Crude Price (ICP) averaged USD67.38 per barrel in 2025, down from USD72,32 per barrel in 2024 and below the USD82 per barrel assumption set in the 2025 State Budget. This decline influenced energy sector dynamics and government revenues during the year. Throughout 2025, Indonesia's natural gas market remained highly dynamic. Structurally rising energy demand was accompanied by increasingly selective and price-sensitive customer behavior. At the same time, uncertainty in upstream gas supply heightened the need for more flexible supply sources, including the use of LNG and non-pipeline solutions as alternatives.

Government policies, such as the HGBT (Specific Natural Gas Price) program, have also influenced consumption patterns among industrial customers, who are increasingly focused on operational efficiency and cost certainty. As a result, the market has become more cautious and adaptive in responding to changes in supply conditions as well as evolving regulatory dynamics.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

PGN adopted a proactive approach, strengthening our commercial, operational, and infrastructure strategies to maintain competitiveness, improve efficiency, preserve business balance, and support sustainable growth. From a commercial perspective, we managed our customer portfolio more strategically by prioritizing key sectors as well as optimizing pricing flexibility and service schemes to remain competitive amid increasing customer cost sensitivity. Operationally, PGN continued to strengthen customer relationships, as reflected in a Customer Retention Rate of 97.49%, while successfully maintaining our existing customer base in the increasingly selective

pelanggan eksisting di tengah kondisi pasar yang selektif. Sementara dari sisi pasokan, Perusahaan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur alternatif, seperti FSRU untuk regasifikasi LNG, guna menjaga keandalan pasokan di tengah ketidakstabilan gas pipa dari hulu. Upaya-upaya ini memastikan distribusi dan pengelolaan pelanggan tetap stabil meskipun pasar bergerak hati-hati akibat dinamika regulasi dan pasokan.

Prioritas tersebut diimplementasikan dalam kerangka rencana strategis jangka panjang PGN, G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*), yang menekankan pendorong pertumbuhan dan pencapaian pendapatan melalui komersialisasi bisnis gas bumi, dengan senantiasa mengedepankan aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) dalam setiap kegiatan usaha.

Pada 2025, prioritas dalam strategi *Grow* difokuskan pada penerapan strategi pasokan gas domestik yang fleksibel melalui kolaborasi hulu pada sumber gas konvensional dan non-konvensional, serta optimalisasi kargo LNG dari pemasok domestik seperti Donggi Senoro, Tangguh, dan Bontang untuk memenuhi permintaan pasar. Mendukung strategi ini, PGN juga melakukan integrasi operasional infrastruktur FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat agar dapat beroperasi dengan kapasitas penuh, sehingga mampu memenuhi kebutuhan *captive demand* dari sektor Industri, Komersial, dan Kelistrikan. Sementara itu, *Coal Bed Methane* (CBM) dan *Synthetic Natural Gas* (SNG) juga dikembangkan sebagai alternatif sumber pasokan gas non-konvensional.

Selain memperkuat pasokan LNG, Perusahaan mengembangkan pasar niaga gas melalui program *Customer Attachment* dengan membangun infrastruktur pipa dan fasilitas pendukung ke pelanggan, serta mengembangkan portofolio transportasi minyak dan gas melalui pembangunan infrastruktur Pipa Transmisi Minyak/BBM Cikampek–Plumpang sesuai kebutuhan *shipper*. Kami juga mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor melalui perluasan program Jargas serta pengembangan pabrik pengolahan LPG dari sumber *stranded gas*. Di samping itu, Perusahaan tetap mengembangkan segmen bisnis hulu melalui pengembangan lapangan produksi dan optimalisasi blok-blok yang ada.

market environment. On the supply side, the Company enhanced the utilization of alternative infrastructure, including Floating Storage Regasification Units (FSRU) for LNG regasification, to maintain supply reliability despite the volatility in upstream pipeline gas supply. These efforts ensured stable distribution and customer management in a more cautious market shaped by evolving regulatory and supply dynamics.

These priorities were implemented through PGN's long-term strategic plan, G-A-S (Grow-Adapt-Step Out), which emphasizes growth drivers and revenue generation through the commercialization of the natural gas business, while consistently prioritizing Health, Safety, Security and Environment (HSSE) in all business activities.

In 2025, the Grow strategy focused on implementing a flexible domestic gas supply approach through upstream collaboration on both conventional and unconventional gas resources, while optimizing LNG cargoes from domestic suppliers such as Donggi Senoro to meet market demand. To support this strategy, PGN also accelerated the integration of our FSRU infrastructure to ensure full-capacity operations, enabling us to fulfil captive demand from the industrial, commercial, and power generation sectors. In parallel, we are developing Coal Bed Methane (CBM) and Synthetic Natural Gas (SNG) as alternative unconventional gas supply sources.

Beyond strengthening LNG supply, we continued to expand the gas trading market through the Customer Attachment program by developing pipeline infrastructure and supporting facilities. We also strengthened the Company's oil and gas transportation portfolio through the development of the Cikampek–Plumpang Oil and Fuel Transmission Pipeline in accordance with shipper requirements. In addition, we supported the Government's efforts to reduce reliance on imported LPG through the expansion of the Jargas (household gas network) program and the development of LPG processing facilities utilizing stranded gas sources. At the same time, PGN has continued to develop the upstream business segment through the development of production fields and the optimization of existing blocks.

Prioritas utama strategi *Adapt* pada tahun 2025 mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan LNG, serta perluasan pasar CNG dan ritel LNG untuk melayani wilayah dan sektor yang belum terjangkau, dengan biaya optimal. Di samping itu, Perusahaan juga terus mengoptimalkan bisnis layanan energi total, termasuk telekomunikasi, EPC, O&M, serta pengelolaan fasilitas Pertamina Group.

Under the Adapt strategy, key priorities in 2025 included the development of LNG storage facilities and the expansion of the Compressed Natural Gas (CNG) and retail LNG markets to serve regions and sectors that have not yet been reached, while maintaining cost efficiency. The Company also continued to optimize its total energy services business, including telecommunications, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Operations and Maintenance (O&M), as well as facility management within the Pertamina Group.

Strategi *Step Out* berfokus pada pengembangan bisnis gas yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, yaitu *biomethane*. Pengembangan bisnis *biomethane* beserta *Injection Point Facility* menandai langkah pertama perusahaan memasuki bisnis rendah karbon, sejalan dengan target *Net Zero Emissions* (NZE) nasional.

The Step-Out strategy, meanwhile, focuses on developing gas-based businesses derived from new and renewable energy sources, particularly biomethane. The development of biomethane infrastructure, including Injection Point Facilities, marks the Company's first entry into the low-carbon business segment, in line with Indonesia's Net Zero Emissions (NZE) targets.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi tersebut, PGN mengimplementasikan berbagai inisiatif pendukung, antara lain penguatan desain organisasi berbasis kapabilitas masa depan melalui program perbaikan berkelanjutan serta penerapan model tata kelola yang *agile*. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis ke depan sekaligus memperkuat tata kelola berbasis ESG, selaras dengan *Human Capital Blueprint* dan *Roadmap* Perseroan.

To support the execution of these strategies, PGN introduced several enabling initiatives, including refining the Company's organizational design by orienting it towards future capabilities through continuous improvement programs, and adopting a more agile governance model. These initiatives are designed to support future business development while reinforcing ESG-based governance, in alignment with the Company's Human Capital Blueprint and Corporate Roadmap.

Dari sisi pengembangan teknologi dan digitalisasi, PGN melanjutkan integrasi kecerdasan buatan (AI), analitik data, serta berbagai teknologi digital lainnya ke dalam proses bisnis inti dan layanan pelanggan. Untuk memitigasi risiko digital, Perusahaan memperkuat aspek keamanan siber pada dimensi *People, Process,* dan *Technology*, sekaligus meningkatkan tata kelola ICT serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

From technology and digitalization development perspective, PGN continued to integrate artificial intelligence (AI), data analytics, and other digital technologies into core business processes and customer services. To mitigate digital risks, we strengthened the cybersecurity framework across the People, Process, and Technology dimensions, while further enhancing ICT governance and ensuring regulatory compliance.

Sebagai bagian penting dari strategi tahun 2025, PGN juga memperkuat advokasi kebijakan kepada Pemerintah, khususnya terkait pengembangan gas bumi, LNG ritel, SNG, dan energi rendah karbon. Upaya ini bertujuan mendorong terciptanya ekosistem kebijakan yang selaras antara prioritas nasional, kebutuhan industri, dan strategi jangka panjang Perusahaan.

As part of PGN's strategic priorities in 2025, we also intensified our policy advocacy with the Government, particularly in relation to the development of natural gas, retail LNG, SNG, and low-carbon energy. Through these efforts, we seek to support the creation of a policy ecosystem that aligns national priorities, industry needs, and the Company's long-term strategy.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi bertanggung jawab dalam mengarahkan kegiatan usaha dan operasional Perusahaan, termasuk menetapkan arah strategis serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Direksi melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh melalui evaluasi dan supervisi guna memastikan bahwa pelaksanaan strategi korporasi tetap selaras dengan tujuan jangka panjang dan prioritas strategis PGN.

Pada tahun 2025, Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Subholding Gas (RJPP) 2025–2029 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam proses penyusunannya, Direksi melakukan penelaahan kembali terhadap strategi yang tercantum dalam RJPP dengan mempertimbangkan perkembangan tren pasar, kondisi makroekonomi, serta dinamika geopolitik guna memastikan relevansinya dalam menghadapi risiko, tantangan, dan peluang yang berkembang. Selain itu, Direksi memastikan bahwa kebijakan dan arah strategis PGN sepenuhnya selaras dengan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang PT Pertamina (Persero) selaku Holding Migas. Sepanjang proses perencanaan strategis, Direksi berkoordinasi secara intensif dengan Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan atas strategi, rencana kerja, dan anggaran yang ditetapkan.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi

Selain aspek perencanaan, Direksi juga bertanggung jawab memastikan implementasi dan pelaksanaan strategi PGN berjalan efektif di seluruh jenjang organisasi. Sepanjang tahun, Direksi melakukan analisis secara proaktif dan berkelanjutan terhadap kondisi internal maupun eksternal Perseroan guna memastikan strategi, kebijakan, dan rencana tetap relevan dengan tujuan PGN. Pada saat yang sama, Direksi memastikan bahwa arah strategis, pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta komitmen keberlanjutan Perusahaan. Direksi juga memimpin koordinasi, komunikasi, dan pengawasan yang diperlukan agar setiap inisiatif dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai hasil yang ditetapkan.

Salah satu wujud nyata kepemimpinan tersebut adalah pelaksanaan *Management Walkthrough* (MWT) oleh jajaran Direksi dan Manajemen yang dilakukan sebanyak 565 kali sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif dijalankan secara konsisten di lapangan sesuai dengan standar dan nilai-nilai PGN.

Board of Directors' Role in Developing Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors is responsible for directing the Company's business and operational activities, including setting the strategic direction and overseeing the implementation of corporate policies. In carrying out this mandate, the Board exercises comprehensive oversight through continuous evaluation and supervision to ensure that the execution of the strategy remains aligned with PGN's long-term objectives and strategic priorities.

In 2025, the Board of Directors formulated the Company's Work Plan and Budget (RKAP) with reference to the Company's Long-Term (RJPP) for 2025–2029 and the State Budget (APBN). As part of this process, we reviewed the strategies outlined in the RJPP, taking into consideration evolving market trends, macroeconomic conditions, and geopolitical developments to ensure their continued relevance in addressing emerging risks, challenges, and opportunities. The Board also ensured that PGN's policies and strategic direction remained fully aligned with the short-, medium-, and long-term objectives of the PT Pertamina (Persero) as the oil and gas holding company. Throughout the strategic planning process, the Board maintained close coordination with the Board of Commissioners and obtained the approvals required for the proposed strategy, work plan, and budget.

The Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Beyond strategic planning, the Board of Directors is also responsible for ensuring the effective implementation of PGN's strategy across the organization. Throughout the year, we conducted proactive and ongoing assessments of both internal and external developments to ensure that PGN's strategies, policies, and plans remained relevant and responsive to evolving conditions. At the same time, we ensured that the Company's strategic direction, decision-making, and execution were aligned with the principles of good corporate governance and PGN's sustainability commitments. The Board also led the necessary coordination, communication, and oversight to ensure that each initiative was executed as planned and delivered the intended results.

One tangible demonstration of this leadership was the 565 Management Walkthroughs (MWT) carried out by members of the Board of Directors and senior management during 2025. The MWTs were intended to ensure that policies and initiatives were consistently implemented in the field in accordance with PGN's standards and core values.

PENCAPAIAN KINERJA 2025

Perbandingan Kinerja Keuangan *Year on Year*

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar USD3,98 miliar, meningkat 4,94% dibandingkan USD3,79 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh bisnis niaga gas, transportasi migas, jasa regasifikasi, dan layanan lainnya yang mengalami pertumbuhan, menunjukkan fundamental bisnis utama *midstream* dan *downstream* gas bumi tetap kuat. Di sisi lain, segmen bisnis hulu (lifting migas) mengalami penurunan sebagai dampak berkurangnya volume produksi akibat *natural decline* sumur minyak dan gas, serta penurunan segmen bisnis niaga (*LNG trading*) yang dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah dunia.

Dari sisi biaya, peningkatan biaya pembelian gas bumi dan volume gas hasil regasifikasi LNG menyebabkan kenaikan beban konsolidasian sebesar 8,13%, menjadi USD3,28 miliar pada tahun 2025, dibandingkan USD3,03 miliar pada 2024.

Kondisi pengembangan ladang dan sumur gas bumi pemasok memengaruhi volume pasokan dan biaya pembelian gas. Dengan penurunan pasokan secara alamiah, kebutuhan gas bagi pelanggan harus dipenuhi melalui pembelian LNG, sehingga kontribusi gas hasil regasifikasi LNG dalam bauran pasokan tahun 2025 meningkat. Sementara itu, harga gas pipa yang ditawarkan oleh perusahaan hulu migas sebagai pemasok cenderung naik akibat peningkatan investasi dan biaya pengelolaan lapangan, yang turut mendorong kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) dan berdampak pada penurunan laba bruto sebesar 7,80%, dari USD757,38 juta menjadi USD698,32 juta.

Dengan berbagai upaya efisiensi, penguatan likuiditas, pengelolaan keuangan yang cermat, optimalisasi strategi perpajakan, serta peningkatan kualitas tata kelola, meskipun laba operasi terdampak oleh penurunan laba bruto, PGN mencatat EBITDA sebesar USD971,24 juta pada tahun 2025, dibandingkan USD1,08 miliar pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan Perusahaan mempertahankan profitabilitas operasional serta kesehatan keuangan yang baik.

Beban keuangan PGN dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, di mana pelemahan IDR/USD menimbulkan rugi kurs translasi atas aset bersih Perusahaan, sementara penguatan JPY/USD menyebabkan rugi kurs translasi atas kewajiban bersih. Total aset PGN pada 2025 tercatat sebesar USD6,23 miliar, dibandingkan USD6,42 miliar pada 2024, dengan pelemahan IDR/USD turut berdampak pada kerugian translasi atas aset bersih.

2025 ACHIEVEMENTS

Year-on-Year Comparison of Financial Performance

In 2025, the Company recorded consolidated revenue of USD3.98 billion, representing a 4.94% increase from USD3.79 billion in 2024. This growth was primarily driven by the positive performance of the gas trading, oil and gas transportation, regasification services, and other service segments, reaffirming the resilience of the Company's core midstream and downstream natural gas businesses. Conversely, the upstream business segments, including oil and (gas lifting) and global (LNG trading), experienced a drop in performance due to lower production volumes resulting from natural decline, as well as the impact of weaker crude oil prices.

From a cost perspective, higher natural gas procurement costs and the increased contribution of regasified LNG, resulted in an 8.13% increase in consolidated expenses to USD3.28 billion in 2025, compared to USD3.03 billion in 2024.

Developments in suppliers' natural gas fields and wells affected both supply volumes and gas procurement costs. As the natural decline in supply persisted, customer demand increasingly had to be met by procuring LNG, resulting in a higher share of regasified LNG in the 2025 supply mix. At the same time, pipeline gas prices offered by upstream oil and gas producers continued to trend upward due to rising investment requirements and field management costs. This increased the Cost of Goods Sold (COGS) and contributed to a 7.80% decline in gross profit, from USD757.38 million to USD698.32 million.

In response to the pressure of lower gross profit on operating income, the Company implemented cost efficiency, strengthened liquidity, maintained prudent financial, management, optimized tax strategies, and enhanced governance practices. As a result, PGN recorded EBITDA of USD971.24 million in 2025, compared to USD1.08 billion in the previous year, demonstrating its ability to sustain operational profitability and maintain sound financial health.

PGN's financing expenses were influenced by exchange rate fluctuations. The depreciation of the Indonesian Rupiah against the US Dollar resulted in translation losses on the Company's net assets, while the strengthening of the Japanese Yen against the US Dollar generated translation losses on net liabilities. PGN's total assets stood at USD6.23 billion in 2025, compared to USD6.42 billion in 2024, with the depreciation of the Rupiah also contributing to translation losses on net assets.

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan penyesuaian nilai aset hulu (*impairment*) sebagai bagian dari proses evaluasi rutin tahunan dengan mengacu pada kinerja *reservoir* aktual serta hasil evaluasi teknis independen terbaru. Dampak atas penyesuaian aset ini tercermin pada penurunan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk secara *year-on-year* menjadi USD215,36 juta. Namun demikian, penyesuaian ini bersifat *non-cash* dan *non-recurring*.

In 2025, the Company adjusted the valuation of its upstream assets (impairment) as part of the annual evaluation process, based on actual reservoir performance and the most recent independent technical assessments. Its impact is reflected in a year-on-year decline in profit for the year attributable to owners of the parent entity to USD215.36 million. However, the adjustment is non- cash and non-recurring.

Penyelesaian beban tersebut diharapkan mendukung PGN dalam melaksanakan program strategis jangka panjang sekaligus memperkuat kemampuan Perusahaan mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.

Resolving these expenses is expected to support the execution of PGN's long-term strategic programs while strengthening its capacity to support the Government in advancing national strategic initiatives.

Dari sisi kinerja arus kas, PGN mampu menjaga arus kas operasional tetap positif dengan posisi kas dan setara kas Perseroan yang berada pada level solid sekitar USD1,34 miliar.

From a cash flow perspective, PGN successfully maintained a positive operating cash flow, with cash and cash equivalents remaining at a solid level of approximately USD1.34 billion. In 2025,

PGN merealisasikan belanja modal sebesar USD282,43 juta pada tahun 2025, meningkat sebesar 10,59% dibandingkan USD255,37 juta pada tahun 2024. Peningkatan belanja modal difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

PGN realized capital expenditure of USD282.43 million, representing an increase of 10.59% compared to USD255.37 million in 2024. This increase was primarily directed toward infrastructure development and strategic projects to support long-term business sustainability.

Perbandingan Kinerja Operasional *Year on Year*

Penurunan alami pasokan gas pipa yang masih terjadi di tahun 2025 menimbulkan tekanan pada volume niaga gas. Untuk mengatasi kekurangan pasokan dan memastikan keandalan pasokan gas bagi pelanggan, PGN mengambil langkah adaptif, terutama melalui peningkatan volume gas dari regasifikasi LNG dalam bauran pasokan.

Year-on-Year Operational Performance Comparison

In 2025, the natural decline in pipeline gas supply continued to exert pressure on gas trading volumes. To address supply shortages and ensure reliable gas delivery to customers, PGN took a range of adaptive measures that included increasing LNG regasification volumes within the supply mix. The rise in ex regasification LNG selling prices also contributed positively to the Company's financial performance.

Dengan langkah ini, PGN berhasil menjaga kinerja penjualan, dengan total penjualan gas PGN mencapai 836,02 BBTUD, sedikit menurun dibandingkan 852,22 BBTUD pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga volume penjualan di tengah keterbatasan pasokan dan dinamika perilaku pelanggan yang semakin selektif dan sensitif terhadap harga.

Accordingly, PGN demonstrated resilient sales performance, with total gas sales reaching 836.02 BBTUD, slightly lower than 852.22 BBTUD in 2024. This performance underscores the Company's ability to maintain sales volumes amid limited supply and increasingly selective, price-sensitive customer behavior.

Pencapaian volume penyaluran regasifikasi dan TUA tahun 2025 mengalami peningkatan yang solid sebesar 16,63% menjadi 254,31 BBTUD dari 218,06 BBTUD di tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi berkelanjutan FSRU Lampung melalui kontrak jasa regasifikasi, serta layanan regasifikasi di Arun LNG Hub.

In 2025, PGN recorded solid growth in regasification and TUA distribution volumes, increasing by 16.63% to 254.31 BBTUD from 218.06 BBTUD in 2024. This achievement was supported by the continued optimization of the Lampung FSRU through regasification service contracts, as well as ongoing regasification services at the Arun LNG Hub.

Pencapaian dari bisnis transmisi gas di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,32% menjadi 1.609,29 MMSCFD dari 1.542,64 MMSCFD pada tahun 2024. Pertumbuhan positif ini didorong oleh peningkatan kebutuhan dari pembangkit listrik di Jawa dan Sumatra, peningkatan kebutuhan kilang di Kalimantan dan kenaikan pengaliran gas dari *shipper* baru.

The gas transmission business also posted positive results, with volumes increasing 4.32% to 1,609.29 MMSCFD in 2025, upfrom1,542.64MMSCFDin2024.This growth was driven by rising demand from power plants in Java and Sumatra, higher refinery demand in Kalimantan, and increased gas throughput from new shippers.

Segmen bisnis hulu mencapai volume *lifting* sebesar 17.580,64 BOEPD atau menurun dari 20.180,89 BOEPD pada tahun 2024. Penurunan volume *lifting* terutama dipengaruhi penurunan produksi alamiah akibat *natural decline* dan adanya kegiatan pemeliharaan dan operasional termasuk *shutdown* terencana maupun tidak terencana.

In the upstream segment, lifting volumes reached 17,580.64 BOEPD, a decline from 20,180.89 BOEPD in 2024. The decrease was primarily due to the natural production decline as well as scheduled and unscheduled maintenance and operational activities.

Realisasi *capital expenditure* (capex) tahun 2025 sebesar USD282,43 juta menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 10,59% dari capex tahun 2024 sebesar USD255,37 juta. Perusahaan memfokuskan strategi percepatan pengembangan infrastruktur gas bumi melalui pembangunan jaringan sebagai akses bagi pelanggan, baik melalui skema *Business Development*, *Customer Attachment* maupun pengembangan infrastruktur Jargas, serta menjaga agar infrastruktur tetap terjaga keandalannya. Proyek utama yang mendukung prioritas tersebut pada tahun 2025 antara lain, infrastruktur pipa minyak Cikampek-Plumpang; *restaging* kompresor Cilamaya; revitalisasi tanki F-6004 pendukung keandalan jaringan; pengembangan fasilitas penyimpanan LNG Flat Bottom di Jawa Timur; kegiatan *drilling*, *workover* dan survei seismik di sumur migas WK Saka, serta pembangunan *Injection Point Facility* untuk mengintegrasikan *biomethane* dan sumber pasokan lain ke dalam jaringan pipa gas.

Capital expenditure (capex) totaled USD282.43 million, representing a significant 10.59% increase from USD255.37 million in 2024. The Company focused on accelerating the development of gas infrastructure to expand customer access through our Business Development and Customer Attachment schemes, as well as the expansion of the Jargas network, while maintaining a strong focus on asset reliability. Key projects supporting these priorities in 2025 included the Cikampek-Plumpang oil pipeline, the restaging of the Cilamaya compressor, the revitalization of the F-6004 tank to support network reliability, the development of Flat Bottom LNG storage facilities in East Java; drilling, workover, and seismic surveys in our Saka Block oil and gas wells; and the construction of an Injection Point Facility to integrate biomethane and other supply sources into the gas network.

Inisiatif baru yang diluncurkan dan dikembangkan pada tahun 2025 mencakup, antara lain, *biomethane*, LNG *bunkering,* monetisasi *stranded gas* dan *pilot project* bauran energi. Inisiatif *biomethane* mendukung strategi diversifikasi portofolio energi dengan mengembangkan, memanfaatkan dan mengintegrasikan sumber energi alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya ini memungkinkan PGN untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur gas yang ada sambil memanfaatkan sumber pasokan baru dari *biomethane*, CBM, maupun *stranded gas* melalui pembangunan fasilitas *injection point*. Pengintegrasian *biomethane* dengan pasokan gas PGN dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung ketahanan energi nasional.

New initiatives launched and developed in 2025 included biomethane, LNG bunkering, stranded gas monetization, and energy mix pilot projects. The biomethane initiative supports the Company's energy portfolio diversification strategy by developing, utilizing, and integrating cleaner, more sustainable alternative energy sources. This enables PGN to optimize the use of existing gas infrastructure while leveraging new supply sources from biomethane, CBM, and stranded gas by establishing injection point facilities. Integrating biomethane into PGN's gas supply can enhance operational efficiency and support national energy security.

Dengan adanya regulasi *International Maritime Organization* (IMO) *Sulphur Cap* 2020 yang mengatur batasan maksimal sulphur hasil pembakaran kapal – kapal rute pelayaran internasional yang melalui wilayah *Emission Control Area* (ECA) dan melalui wilayah *Global Cap*, maka akan semakin

With the introduction of the International Maritime Organization (IMO) Sulphur Cap 2020 regulation, which limits sulphur emissions from vessels operating in Emission Control Areas (ECAs) and under the Global Cap, LNG will increasingly be used as a marine fuel due to its cleaner

banyak penggunaan LNG sebagai bahan bakar kapal karena lebih bersih dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional.

LNG *bunkering* memungkinkan kapal bertenaga LNG untuk melakukan pengisian bahan bakar secara langsung di pelabuhan melalui dermaga dengan skema seperti *direct berthing* atau *ship-to-ship transfer*. Inisiatif bisnis LNG *bunkering* di Terminal Bontang menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk memasuki bisnis ritel LNG di dalam negeri dengan menjadi penyedia LNG *bunkering* pertama di Indonesia.

properties, producing lower emissions than conventional fuels.

LNG bunkering allows LNG-powered vessels to refuel directly in port, either through direct berthing or ship-to-ship transfer. The LNG bunkering initiative at Bontang Terminal marks the Company's first step into the domestic retail LNG market, positioning it as Indonesia's first LNG bunkering provider.

Inisiatif monetisasi sumur *gas stranded* tidak hanya berpotensi membuka sumber pasokan gas baru dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, tetapi juga merupakan peluang bagi PGN untuk menyediakan solusi monetisasi bagi sumur *gas stranded* yang diperkirakan akan bertambah banyak di masa mendatang. Dengan pemanfaatan kembali fasilitas yang dibangun pada proyek monetisasi Sengeti sebagai fasilitas bersama bagi sumur-sumur *gas stranded* lainnya, maka dapat meningkatkan keekonomian sumur-sumur gas tersebut meskipun dengan volume produksi yang lebih kecil dan durasi lebih singkat. Hal ini akan memungkinkan PGN untuk mengamankan pasokan gas baru bagi pelanggan eksisting dengan harga yang lebih kompetitif, yang sekaligus menjadi potensi peningkatan pendapatan Perusahaan.

The stranded gas monetization initiative not only unlocks new sources of gas supply to meet rising energy demand, but also creates opportunities for PGN to deliver monetization solutions for stranded wells, which are expected to increase in number in future. By repurposing facilities developed under the Sengeti monetization project as shared infrastructure for other stranded wells, the economic viability of these assets can be enhanced, albeit at lower production volumes and over shorter productive lifecycles. This initiative will enable PGN to secure additional gas supply for existing customers at more competitive prices, while simultaneously generating incremental revenue streams.

Pengembangan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) di Kota Batam merupakan sebuah *pilot project* bauran energi yang dapat mewujudkan Batam sebagai salah satu *Smart City* dengan ekosistem gas yang terintegrasi dalam melayani masyarakat dengan total potensi mencapai 113.980 sambungan rumah tangga.

The development of Distribution Network Areas (WJD) and Specific Trading Areas (WNT) in the city of Batam represents a pilot energy mix initiative, supporting the transformation of Batam into a Smart City with an integrated gas ecosystem to serve the community, with the potential to reach 113.980 household connections.

Dengan tingkat ketersediaan infrastruktur Perseroan yang mencapai 99,64%, PGN berhasil memperkuat tingkat retensi pelanggan yang sangat tinggi sebesar 97,49% dan keberhasilan mempertahankan basis pelanggan eksisting di tengah kondisi pasar yang selektif, sambil memperoleh pelanggan baru melalui program *Customer Attachment*.

Supported by infrastructure availability, which reached 99,64%, PGN strengthened customer resilience, with a high retention rate of 97,49% and the ability to maintain its existing customer base amidst the selective customer's behaviour, while also attracting new customers through the Customer Attachment program.

PGN juga terus memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap gas bumi dengan mendukung pembangunan dan pengembangan inisiatif strategis jaringan gas rumah tangga (Jargas). Pada tahun 2025, PGN menyelesaikan 601 km jaringan pipa Jargas dengan kapasitas menjangkau hingga 106.424 rumah tangga, dan berhasil mengalirkan gas ke 35.567 sambungan rumah tangga baru sepanjang tahun.

PGN also continued to expand access to natural gas for Indonesian households through the strategic development of the household gas network (Jargas). In 2025, the Company completed 610 kilometers of Jargas pipelines, providing capacity for up to 106.424 households, with 35,567 new household connections established during the year. To date,

PGN telah mengelola Jargas sebanyak 824 ribu sambungan rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dibangun melalui skema pendanaan oleh APBN maupun pendanaan internal.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

PGN mencatat pendapatan konsolidasi sebesar USD3,98 miliar, atau 84,59% dari target 2025, yang terutama dipengaruhi oleh kinerja segmen Niaga Gas, volume *lifting* minyak dan gas, serta pergerakan ICP. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD215,36 juta, atau 67,17% dari target 2025, disebabkan oleh penurunan laba kotor pada segmen Niaga Gas, pencatatan biaya sumur terbuang (*sunk well costs*) pada WK Ketapang, adanya penurunan nilai (*impairment*) pada WK Sesulu Selatan, serta kerugian translasi kurs IDR terhadap mata uang asing (USD dan JPY).

Total volume niaga gas tahun 2025 mencapai 836,02 BBTUD, atau 91,15% dari volume yang ditargetkan dalam RKAP. Tantangan utama meliputi keterbatasan pasokan gas pipa, daya beli pelanggan terhadap pasokan gas dari regasifikasi LNG, serta sejumlah gangguan pasokan akibat pemeliharaan terencana maupun tidak terencana oleh pemasok gas PGN, yang semakin memengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.

Volume penyaluran regasifikasi di tahun 2025 mencapai 254,31 BBTUD atau berhasil melampaui target sebesar 132.91%. Dengan optimalisasi berkelanjutan FSRU Lampung melalui *Terminal Usage Agreement* (TUA), volume penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kelistrikan mencapai 99,61 BBTUD atau 110% dari target 2025, sementara penyaluran volume gas regasifikasi LNG fasilitas di Arun mencapai 154,69 BBTUD atau 153% dari target tahun 2025. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menjalankan bisnis LNG *trading* internasional dengan melakukan penjualan 7 kargo LNG atau setara dengan 58,90 BBTUD.

Pada tahun 2025, bisnis transmisi gas mencatatkan realisasi volume sebesar 1.609,29 MMSCFD atau mencapai 111,22% dari target tahun 2025. Pencapaian ini didorong oleh kontribusi positif di berbagai wilayah operasi, yaitu peningkatan kebutuhan dari pembangkit listrik di wilayah Jawa, kenaikan volume melalui ruas Cirebon - Semarang, optimalisasi operasi *shipper* dan pengaliran gas dari *shipper* baru yang semakin memperkuat volume pasokan, serapan pembangkit listrik yang optimal di wilayah Sumatra, serta peningkatan kebutuhan pelanggan kilang di wilayah Kalimantan.

PGN manages 824,000 household connections nationwide, supported by both APBN allocations and internal resources.

Comparison Between Achieved and Targeted Results

PGN recorded consolidated revenue of USD3,98 billion in 2025, representing 84.59% of the target for the year. This was driven primarily by the performance of the Gas Trading segment, oil and gas lifting volumes, and movements in the Indonesian Crude Price (ICP). Profit for the year attributable to owners of the parent entity amounted to USD215.36 million, or 67.17% of the 2025 target, reflecting lower gross profit in the Gas Trading segment, the recognition of sunk well costs at the Ketapang Block, impairment charges at the South Sesulu Block, as well as foreign exchange translation losses of the IDR against foreign currencies (USD and JPY).

The total gas trading volume in 2025 reached 836.02 BBTUD, representing 91.15% of the volume targeted in the 2025 RKAP. Among the key challenges during the year were the limitations on pipeline gas supply, weakening customer purchasing power for gas supplied from the regasification of LNG, and a series of supply disruptions due to planned and unplanned maintenance by PGN's gas suppliers, which further influenced the imbalance between supply and demand.

Regasification distribution volume in 2025 reached 254.31 BBTUD, exceeding the annual target by 132.91%. Through continued optimization of the Lampung FSRU under our Terminal Usage Agreement (TUA), the volume of gas distributed to meet electricity sector demand reached 99.61 BBTUD, or 110% of the 2025 target. Meanwhile, regasified LNG distribution through the Arun facility reached 154.69 BBTUD, or 153% of the 2025 target. In addition, throughout 2025 the Company successfully engaged in international LNG trading, completing the sale of 7 LNG cargoes, equivalent to 58.90 BBTUD.

In 2025, the gas transmission business recorded realized volumes of 1,609.29 MMSCFD, or 111.22% of the 2025 target. This achievement was driven by positive contributions across several operational regions, including increased demand from power plants in Java, higher volumes along the Cirebon–Semarang transmission corridor, optimized shipper operations and additional gas flows from new shippers that further strengthened supply volumes. We also saw optimal power plant offtake in Sumatra, alongside rising demand from refinery customers in Kalimantan.

Realisasi *lifting* Minyak dan Gas mencapai 17.580,64 BOEPD atau tercapai sedikit di bawah target 2025 disebabkan penurunan produksi alamiah (*natural decline*), penundaan jadwal pengeboran sumur WPA-06 terkendala operasi pemboran (*rig*) di WK Pangkah, adanya kegiatan pemeliharaan dan operasional termasuk *shutdown* terencana maupun tidak terencana di WK Ketapang serta perubahan jadwal *onstream* sumur JNE-7ST di WK Muara Bakau. Di sisi lain terdapat pencapaian yang memperkuat kinerja *lifting* Minyak dan Gas, yaitu empat sumur hasil pemboran di WK Fasken telah berhasil *onstream* dan terselesaikannya kendala teknis tangki kondensat dan pengangkutan kondensat di WK Bangkanai.

Tingkat ketersediaan infrastruktur PGN mencapai 99,64% pada tahun 2025, jauh di atas target 98%, menunjukkan meningkatnya kapasitas PGN dalam menjamin kontinuitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Realisasi capex sebesar USD282,43 juta, mencapai sekitar 83,56% dari RKAP, mencerminkan kemampuan eksekusi manajemen serta fokus dalam mengamankan proyek sesuai dengan rencana dan komitmen membangun infrastruktur minyak dan gas, infrastruktur *beyond pipeline* dan fasilitas pendukung pemanfaatan gas *non conventional* untuk memperluas jangkauan kepada pelanggan. Mengingat kondisi likuiditas dan pasar, PGN memenuhi 100% kebutuhan investasi dari dana internal.

Pada tahun 2025, PGN turut mengembangkan infrastruktur gas bumi *beyond-pipeline* dengan memanfaatkan CNG dan LNG di wilayah yang belum memiliki jaringan pipa, seperti wilayah Indonesia tengah dan timur. Inisiatif ini menargetkan pelanggan di sektor pertambangan, sektor industri, serta segmen pasar ritel.

Tantangan yang dihadapi dan Langkah Mitigasinya

Di tahun 2025, kami menghadapi tantangan untuk dapat memenuhi kebutuhan gas pelanggan dari sumber gas pipa dan pada saat yang sama menhadapi dinamika perilaku pelanggan yang selektif dan sensitif terhadap harga gas dari sumber regasifikasi LNG. Selain itu, fluktuasi harga energi global, konflik geopolitik yang berkepanjangan, ketidakpastian perdagangan akibat kebijakan proteksionis (tarif perdagangan), yang memengaruhi ekonomi global dan ekonomi Indonesia, dan meningkatnya tuntutan terhadap transisi energi menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi bisnis Perusahaan.

Oil and gas lifting reached 17,580.64 BOEPD, slightly below the 2025 target. This shortfall was primarily attributable to the natural decline in production, delays in the WPA- 06 well drilling schedule due to operational constraints at the Pangkah Block, maintenance and operational activities including both planned and unplanned shutdowns at the Ketapang Block, as well as adjustments to the on-stream schedule of the JNE-7ST well at the Muara Bakau Block. Nevertheless, several developments supported lifting performance, including the successful onstreaming of four newly drilled wells at the Fasken Block, as well as the resolution of technical condensate tank and condensate transportation constraints at the Bangkanai Block.

PGN's infrastructure availability rate reached 99.64% in 2025, well ahead of the 98% target, reflecting the Company's growing capability to ensure service reliability, maintain operational continuity, and deliver customer satisfaction.

Capex realization amounted to USD282.43 million, representing approximately 83.56% of the RKAP target. This reflects the management's execution capability and its continued focus on securing projects in line with planned commitments to develop oil and gas infrastructure, beyond-pipeline infrastructure, and facilities supporting the utilization of non-conventional gas to expand customer reach. In light of prevailing liquidity and market conditions, PGN funded 100% of its investment needs through internal resources.

In 2025, PGN also expanded its beyond-pipeline gas infrastructure by leveraging CNG and LNG solutions in regions not yet connected to pipeline networks, particularly across central and eastern Indonesia. This initiative targets customers in the mining sector, industrial sector, and retail market segments.

Identifying Challenges and Implementing Mitigations

In 2025, we encountered challenges to meet gas demand from customers with gas pipe sources and at the same time experienced the dynamics of customer behaviour which were selective and sensitive towards gas price from LNG regasification sources. External factors such as fluctuations in global energy prices, prolonged geopolitical conflict, heightened trade uncertainty driven by protectionist policies (trade tariff), which impacted the global and Indonesia's economy, and the growing demand for energy transition for clean energy also affected our business.

Kondisi pengembangan ladang dan sumur gas bumi pemasok dan penurunan alami pasokan gas pipa di tahun 2025 memengaruhi volume pasokan yang dapat disalurkan PGN kepada pelanggan. Untuk mengatasi kekurangan pasokan dan memastikan keandalan pasokan gas bagi pelanggan, PGN mengambil langkah adaptif, terutama melalui peningkatan volume gas regasifikasi LNG dalam bauran pasokan melalui pemanfaatan infrastruktur alternatif, FSRU untuk regasifikasi LNG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses distribusi dan pengelolaan pelanggan tetap stabil.

Developments in suppliers' natural gas fields and natural decline of the gas well in 2025 affected the supply volumes to customers. To address supply shortages and ensure reliable gas delivery to customers, PGN took a range of adaptive measures that included increasing LNG regasification volumes within the supply mix by utilizing alternative infrastructure, such as FSRUs for LNG regasification. These measures were intended to maintain stable distribution and consistent customer service.

Terhadap kondisi pasar atau perilaku pelanggan yang berhati-hati dan selektif terhadap harga gas dari regasifikasi LNG, PGN terus memperkuat ketahanan hubungan dengan pelanggan, yang tercermin dari tingkat retensi pelanggan yang sangat tinggi sebesar 97,49% dan keberhasilan mempertahankan basis pelanggan eksisting.

As we were aware of the dynamics of customer behaviour which were selective and sensitive towards gas price from LNG regasification sources, we continued to strengthen customer resilience, with a high retention rate of 97,49% and the ability to maintain its existing customer base.

Untuk menjaga kinerja keuangan, Perusahaan menerapkan strategi *Smart Cost Allocation* untuk seluruh pengeluaran operasional dan investasi, sehingga kami tidak hanya fokus pada efisiensi biaya operasional tetapi juga pada alokasi biaya yang tepat. Perusahaan juga melakukan penguatan likuiditas, pengelolaan keuangan yang cermat, optimalisasi strategi perpajakan, serta peningkatan kualitas tata kelola. Strategi ini meliputi optimalisasi arus kas operasional, pengendalian biaya, penajaman prioritas belanja modal, dan pengelolaan struktur permodalan. Selain itu, kami terus memantau indikator makroekonomi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko keuangan. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan di seluruh satuan kerja, termasuk anak perusahaan dan afiliasi, guna memastikan perbaikan kinerja serta pengambilan keputusan keuangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi. Dengan berbagai upaya tersebut, meskipun laba operasi terdampak oleh penurunan laba bruto, PGN tetap mencatatkan EBITDA positif pada tahun 2025, yang menunjukkan kemampuan Perusahaan mempertahankan profitabilitas operasional serta kesehatan keuangan yang baik.

To ensure the Company's financial performance, we implemented a Smart Cost Allocation strategy across all operational expenditures and investments, focusing not only on cost efficiency but also on optimal cost allocation. The Company also strengthened liquidity, maintained prudent financial management, optimized tax strategies, and enhanced governance practices. Key initiatives included optimizing operational cash flows, tightening cost controls, sharpening capital expenditure priorities, and actively managing the capital structure. In parallel, we closely monitored macroeconomic indicators to maintain a balanced approach between PGN's growth objectives and financial risk. Regular monitoring and evaluation were conducted across all business units, including subsidiaries and affiliates, to support performance improvements and enable adaptive, responsive financial decision making. As a result of these initiatives, despite the pressure of lower gross profit on operating income, PGN recorded positive EBITDA in 2025, demonstrating its ability to sustain operational profitability and maintain sound financial health.

Pada tahun 2025, Perusahaan mengambil keputusan yang cukup krusial, yaitu melakukan penyesuaian nilai aset hulu (*impairment*) untuk memastikan laporan keuangan yang mencerminkan nilai aset yang wajar, akurat, dan mencerminkan potensi manfaat ekonomi yang sebenarnya di masa depan serta bagian dari penguatan fondasi bisnis untuk mengakselerasi inisiatif strategis yang lebih menciptakan nilai untuk keberlanjutan bisnis PGN kedepan.

In 2025, the Company took an important strategic decision to adjust the valuation of its upstream assets. This step was taken to ensure that the Company's financial statements reflect fair and accurate asset values that appropriately represent their future economic potential, and to strengthen the business foundations and accelerate strategic initiatives that create long-term value in support of PGN's long-term sustainability.

Penyesuaian nilai aset hulu dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi rutin tahunan dengan mengacu pada kinerja reservoir aktual serta hasil evaluasi teknis independen terbaru. Dampak atas penyesuaian aset ini tercermin pada penurunan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk secara *year-on-year*. Namun demikian, penyesuaian ini bersifat *non-cash* dan *non-recurring*.

The adjustment of upstream asset values was made as part of the annual evaluation process, based on actual reservoir performance and the most recent independent technical assessments. Its impact is reflected in a year-on-year decline in profit for the year attributable to owners of the parent entity. However, the adjustment is non- cash and non-recurring.

Dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, strategi yang dilaksanakan adalah untuk memastikan kehandalan, integritas aset, dan efisiensi biaya. Pelaksanaan pengelolaan aset infrastruktur dilaksanakan berdasarkan *best practice* ISO 55001, baik untuk Perusahaan maupun Anak Perusahaan. Strategi untuk seluruh proses pengelolaan infrastruktur dilaksanakan melalui kontrak payung *multi-year*, optimalisasi sinergi antara PGN, Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta penerapan digitalisasi. Pendekatan ini diperkuat dengan optimalisasi sinergi pemangku kepentingan, efisiensi serta metode konstruksi yang mendukung integrasi jaringan dan pengembangan berkelanjutan.

Operational and maintenance strategies were aimed at ensuring asset reliability, integrity, and cost efficiency. Compliance with ISO 55001 best practices remained a top priority for infrastructure asset management in the Company and its subsidiaries. These infrastructure management strategies were executed through multi-year master contracts; optimized synergies between PGN and our subsidiaries and affiliates; and digitalization initiatives. This approach was reinforced through stakeholder collaboration, operational efficiency, and construction methods that support network integration and sustainable development.

Dalam upaya menuju transisi energi, Perusahaan memperkuat portofolio solusi berbasis gas rendah karbon dan gas non-konvensional dengan persetujuan investasi untuk pembangunan *Injection Point Facility* untuk pasokan *biomethane*, serta integrasi *Coal Bed Methane* (CBM) ke dalam jaringan gas PGN. Pasokan CBM direncanakan mulai beroperasi pada 2026, sedangkan *biomethane* pada 2027, menandai langkah pertama PGN memasuki bisnis rendah karbon.

In response to energy transition direction, the Company strengthened portfolio of low-carbon and non-conventional gas solutions by approving the investment for the development of an Injection Point Facility to supply biomethane, along with the integration of Coal Bed Methane (CBM) into PGN's gas network. Biomethane supply is expected to go onstream in 2027, while CBM integration is planned for 2026, marking PGN's first entry into the low-carbon business segment.

PGN juga berkolaborasi dalam proyek percontohan LNG *bunkering* (LNG untuk kebutuhan maritim), yang ditargetkan untuk diimplementasikan pada 2026, serta memulai Studi Kelayakan bersama terkait pengembangan *Synthetic Natural Gas* (SNG) dari gasifikasi batubara sebagai opsi pasokan jangka menengah hingga panjang dari sumber non-konvensional. Inisiatif-inisiatif ini merupakan pilihan pertumbuhan strategis yang akan memperkuat peran kunci PGN dalam era transisi energi.

PGN also collaborated on an LNG bunkering pilot project for marine purposes, targeted for implementation in 2026, and initiated a joint feasibility study on the development of Synthetic Natural Gas (SNG) from coal gasification as a potential medium- to long-term supply option from non-conventional sources. These initiatives represent strategic growth avenues that will further strengthen PGN's role in supporting Indonesia's energy transition while expanding its long-term business opportunities.

Melalui langkah-langkah strategis sebagai mitigasi terhadap tantangan yang dihadapi tersebut, PGN berupaya menjaga keberlanjutan bisnis serta memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi nasional.

Through these strategic approaches which were taken as the mitigation to business challenges, PGN aimed to ensure business sustainability and make a significant contribution to national energy security.

Kinerja HSSE

Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (*Health, Safety Security and Environment*, atau HSSE) yang meliputi keselamatan manusia, perlindungan aset strategis, serta keberlanjutan lingkungan, merupakan nilai fundamental sekaligus prioritas utama dalam seluruh aktivitas PGN. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh jenjang organisasi.

Sebagai wujud kepemimpinan dan keteladanan, jajaran Direksi dan Manajemen secara konsisten melaksanakan *Management Walkthrough* (MWT) sebanyak 565 kali sepanjang tahun 2025 untuk memastikan implementasi HSSE berjalan efektif di lapangan. Komitmen PGN terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab juga tercermin dari capaian penghargaan PROPER, baik PROPER Biru sebagai pengakuan atas kepatuhan, maupun PROPER Hijau dan Emas sebagai bukti kinerja lingkungan yang melampaui standar regulasi hingga tingkat unggul.

Sepanjang tahun 2025, PGN mencatatkan kinerja *Zero Number of Accidents* (NoA) dengan total Jam Kerja Aman mencapai 45.380.400 jam. Kedepannya, HSSE akan terus menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan PGN yang berkelanjutan, andal, dan berintegritas. Melalui penguatan kepemimpinan HSSE, budaya sadar risiko, serta disiplin operasional, Perseroan berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan setiap energi yang disalurkan dihasilkan melalui proses yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

HSSE Performance

Health, Safety, Security and Environment (HSSE), which covers human safety, the safeguarding of strategic assets, and environmental sustainability, are fundamental values and take the highest priority in all of PGN's activities. This principle serves as the foundation for decision-making at every level of the organization.

Demonstrating strong leadership and commitment, the Board of Directors and Management conducted a total of 565 Management Walkthroughs (MWTs) throughout 2025 to ensure the effective implementation of HSSE practices across all operational areas. PGN's commitment to responsible environmental management was further reflected in its achievements under the PROPER program. The Company received PROPER Blue ratings in recognition of regulatory compliance, as well as PROPER Green and Gold ratings, signalling environmental performance that exceeds regulatory requirements and reflects best practices.

In 2025, PGN achieved Zero Number of Accidents (NoA), recording a total of 45,380,400 Safe Working Hours. Going forward, HSSE will remain a cornerstone of PGN's sustainable, reliable, and responsible growth. By strengthening HSSE leadership, fostering a strong risk-awareness culture, and maintaining operational discipline, the Company is committed to sustaining stakeholder trust and ensuring that every unit of energy delivered is produced through processes that are safe, responsible, and sustainable.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2025, PGN terus memperkuat pengelolaan dan pengembangan *Human Capital* sebagai pendorong utama transformasi bisnis dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi *Human Capital* dirancang untuk memastikan kesiapan organisasi dan talenta dalam menghadapi kompleksitas operasional PGN, ekspansi bisnis, serta transisi menuju bisnis rendah karbon.

Aspek krusial dari strategi ini mencakup pengembangan kapabilitas strategis, pembentukan budaya kinerja tinggi, serta percepatan transformasi digital. Untuk mendukung hal tersebut, PGN melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain program pembelajaran dan pengembangan yang selaras dengan kebutuhan bisnis, termasuk program sertifikasi guna membangun kompetensi baru di bidang energi terbarukan

HUMAN RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

In 2025, PGN continued to strengthen the management and development of our Human Capital as a key driver of our business transformation and sustainable growth. The Human Capital strategy is designed to ensure organizational and talent readiness in addressing PGN's operational complexity, business expansion, and transition to becoming a low-carbon business.

Key priorities of this strategy include the development of strategic capabilities, the cultivation of a high-performance culture, and the acceleration of our digital transformation. To support these objectives, PGN implemented a range of initiatives, including learning and development programs aligned with evolving business needs, as well as certification programs aimed at building new competencies in renewable

dan keberlanjutan. Kapabilitas internal di bidang ICT juga terus ditingkatkan agar mampu menjawab tuntutan bisnis yang berkembang pesat.

Di sisi lain, transformasi digital dalam pengelolaan *Human Capital* dipercepat melalui pengembangan Digital Employee Self-Service Center, *dashboard* terintegrasi, serta pemanfaatan *people analytics* guna mendukung perencanaan dan pengelolaan talenta secara lebih efektif. Seluruh upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan budaya kinerja tinggi yang berlandaskan nilai-nilai inti PGN, yang dievaluasi secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kematangan implementasi nilai inti dan survei keterlibatan karyawan.

PGN terus melaksanakan transformasi digital untuk mendukung tujuan utama bisnis dan mendorong inovasi. Sepanjang tahun 2025, berbagai peningkatan berkelanjutan dilakukan pada kapabilitas teknologi, tata kelola dan kepatuhan ICT, serta kesadaran dan ketahanan siber. Teknologi AI berhasil diterapkan dalam perencanaan jaringan pipa gas, membantu Perseroan memetakan area dengan potensi tinggi untuk mengoptimalkan proses *canvassing* dan pemanfaatan belanja modal. Peningkatan proses bisnis juga dilakukan di layanan pelanggan, termasuk pengembangan aplikasi PGN Mobile yang lebih canggih bagi pelanggan dan digitalisasi layanan lapangan melalui platform PGN Partner.

Selain itu, PGN memperkenalkan *smart metering* berbasis platform IoT dan sistem SmartGEP untuk mendukung proses pengadaan digital terintegrasi.

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2026, tensi geopolitik dan perdagangan global diperkirakan meningkat dan berpotensi memengaruhi rantai pasok internasional serta stabilitas pasar keuangan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% dan pertumbuhan ekonomi Indoensia sebesar 5,1%. Sementara dalam APBN 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4%. Permintaan domestik yang tetap kuat, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif, diperkirakan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menargetkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 5,70%–6,20%, dengan inflasi dijaga pada 2,5± 1%, serta asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD70 per barel.

energy and sustainability. We also continuously strengthened internal capabilities in information and communication technology (ICT) to meet the demands of our fast-moving business environment.

At the same time, we accelerated the digital transformation of Human Capital management through the development of our Digital Employee Self-Service Center, integrated dashboards, and the application of people analytics to support more effective talent planning and management. These efforts were further reinforced by fostering a high-performance culture grounded in PGN's core values, which is regularly evaluated through core value maturity assessments and employee engagement surveys.

PGN also continued to advance our digital transformation to support core business objectives and drive innovation. Throughout 2025, we continually enhanced technological capabilities, ICT governance and compliance, as well as cyber awareness and resilience. Artificial intelligence (AI) was successfully implemented in gas pipeline network planning, enabling the Company to identify high-potential areas and optimize canvassing processes as well as capex allocation. We also made improvements to customer service processes, including the development of a more advanced PGN Mobile application for customers and the digitalization of field services through the PGN Partner platform.

Meanwhile, to support integrated digital procurement processes, PGN introduced IoT-based smart metering and the SmartGEP system.

BUSINESS PROSPECTS

In 2026, rising geopolitical tensions and global trade frictions are expected to weigh on international supply chains and financial market stability. According to the IMF's projections, global economic growth will remain at 3.3% and Indonesia's economy will grow by 5.1%. Meanwhile, in the 2026 State Budget (APBN), the Government is targeting economic growth of 5.4%. Strong domestic demand, supported by accommodative fiscal and monetary policies, is expected to remain the primary driver of economic expansion. The Government is also targeting 10-year government bond (SBN) yields in the range of 5.70%–6.20%, with inflation maintained at 2.5± 1%, while the Indonesian Crude Price (ICP) is projected at USD70 per barrel.

Pada tahun 2026, Perseroan masih akan menghadapi sejumlah tantangan krusial, terutama terkait ketidakseimbangan pasokan gas yang dipicu oleh penurunan alami produksi dari beberapa pemasok, khususnya di wilayah Sumatra dan Jawa Barat. Di sisi lain, volatilitas harga minyak dunia sebagai dampak atas eskalasi perang AS-Israel dan Iran berpotensi memengaruhi formula harga gas yang bersumber dari gas hasil regasifikasi LNG. Kenaikan harga gas dan kemampuan bayar (*ability to pay*) pelanggan akan memengaruhi volume penyerapan pelanggan dan menekan margin distribusi gas bumi. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik juga berpotensi melemahkan mata uang rupiah yang akan menimbulan kerugian selisih kurs. Perubahan dan penyesuaian kebijakan Pemerintah juga merupakan faktor strategis yang berpengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan pasar energi serta pola konsumsi nasional, termasuk permintaan terhadap gas bumi.

In 2026, the Company will continue to face key challenges, particularly gas supply imbalances caused by the natural production decline of several upstream suppliers, notably in Sumatra and West Java. At the same time, global oil price volatility arising from the escalation of the war between USA-Israel and Iran may influence gas pricing formulas linked to LNG regasification. Rising gas prices, coupled with customers' ability to absorb higher costs, could impact demand volumes and put pressure on natural gas distribution margins. In addition, geopolitical instability may lead to a weakening of the Indonesian Rupiah, potentially resulting in foreign exchange losses. Moreover, changes and adjustments in Government policies remain strategic factors that have a significant influence on the direction of energy market development and national consumption patterns, including demand for natural gas.

Namun demikian, dalam perspektif yang lebih luas, prospek permintaan gas bumi domestik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang didorong oleh ekspansi sektor-sektor utama seperti industri manufaktur, pembangkit listrik, dan komersial, serta pertumbuhan populasi, diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan gas bumi dari sekitar 18,8 juta *ton oil equivalent* (TOE) pada tahun 2030 menjadi sekitar 56,6–71,1 juta TOE pada tahun 2060.

Nonetheless, on a broader scale, domestic gas demand prospects point to a significant upward trend. Indonesia's economic growth, driven by the expansion of key sectors such as manufacturing, power generation, and commercial industries, as well as population growth, is expected to increase natural gas demand from approximately 18.8 million tons of oil equivalent (TOE) in 2030 to roughly 56.6–71.1 million TOE by 2060.

Sejalan dengan itu, komitmen Pemerintah terhadap penguatan kemandirian dan ketahanan energi, hilirisasi industri, serta optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi akan semakin memperkokoh fundamental bisnis PGN. Dalam kebijakan energi nasional, gas bumi memiliki posisi strategis sebagai energi transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Pemanfaatannya akan terus dioptimalkan hingga EBT mampu memenuhi kebutuhan sistem energi domestik secara memadai, sekaligus menjadi substitusi bahan bakar minyak dan batu bara dalam mendukung dekarbonisasi sektor energi.

In line with this, the Government's commitment to strengthening energy independence and resilience, advancing industrial downstreaming, and optimizing the utilization of natural gas as a transition fuel will further reinforce PGN's business fundamentals. Within the national energy policy framework, natural gas holds a strategic role as a transition fuel toward new and renewable energy (NRE). Natural gas will therefore continue to be optimized until NRE can adequately meet domestic energy needs, while also serving as a substitute for oil and coal in supporting the decarbonization of the energy sector.

Di tengah proyeksi tersebut, minyak dan gas bumi masih menjadi kontributor utama dalam bauran energi nasional, meskipun cadangannya terus mengalami penurunan. Dalam konteks ini, PGN memegang peran strategis dalam dinamika industri energi nasional, khususnya dalam mendukung agenda jangka panjang transisi energi Indonesia serta memastikan keberlanjutan pasokan energi yang andal dan berdaya saing.

Within this context, oil and gas will remain key contributors to the national energy mix, despite declining reserves. PGN therefore plays a strategic role in Indonesia's energy landscape, particularly in supporting the country's long-term energy transition agenda and ensuring a reliable and competitive energy supply.

Untuk mencapai target kinerja tahun mendatang sekaligus memanfaatkan peluang pengembangan bisnis serta mendukung transisi energi Indonesia, PGN menetapkan prioritas strategis utama tahun 2026 dalam kerangka strategi G-A-S (*Grow–Adapt–Step Out*).

Pada pilar *Grow*, keberlanjutan pasokan gas tetap menjadi fokus utama. Selain melakukan perpanjangan kontrak pasokan gas pipa, PGN menyiapkan langkah mitigasi melalui optimalisasi pemanfaatan LNG serta penyusunan skema kontrak jangka menengah dan panjang guna meningkatkan fleksibilitas portofolio pasokan. Alternatif sumber pasokan dari gas non-konvensional, yaitu *Coal Bed Methane* (CBM) ditargetkan dapat terintegrasi ke jaringan pasokan PGN pada tahun 2026.

Dalam pilar *Adapt*, Perusahaan akan meningkatkan bisnis LNG melalui *pilot project* LNG *Bunkering* (LNG *for Marine*) bekerja sama dengan Pertamina Group, dan perluasan pasar gas bumi di ekosistem gas internasional. Sejalan dengan itu, berbagai kajian *mergers and acquisitions* (M&A) yang relevan dengan strategi bisnis Perusahaan akan terus dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi portofolio dan eksplorasi peluang pertumbuhan anorganik yang mendukung agenda jangka panjang.

Pada strategi *Step Out*, dilakukan pengembangan bisnis rendah karbon sejalan dengan target NZE nasional melalui pengembangan bisnis *biomethane* dan penyelesaian infrastruktur pendukung berupa fasilitas *Injection Point* di Stasiun Pagardewa. Pembangunan *Injection Point Facility* ditargetkan selesai pada tahun 2026, sehingga pasokan *biomethane* dapat mulai disalurkan ke jaringan PGN pada tahun 2027. Momentum ini sekaligus menandai langkah awal (*first entry*) PGN dalam pengembangan bisnis rendah karbon.

Keseluruhan strategi ini akan memperkuat dan memperluas posisi PGN sebagai agregator gas nasional yang mengokohkan pasokan, mengintegrasikan infrastruktur gas dan LNG, serta memperluas pasar gas bumi. Hal tersebut mencerminkan komitmen PGN dalam memperluas akses energi bersih guna mendukung pertumbuhan industri dan program Pemerintah menuju kemandirian energi. Perusahaan juga akan terus memperkuat kemitraan dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempertahankan serta memperluas peran dalam proyek-proyek infrastruktur gas.

To achieve its performance targets in the coming year while capturing business development opportunities and supporting Indonesia's energy transition, the Company has established its 2026 strategic priorities under the G-A-S (Grow–Adapt–Step Out) framework.

Under the Grow pillar, securing sustainable gas supply remains the top priority. In addition to extending pipeline gas contracts, PGN is preparing mitigation measures through optimized LNG utilization and the development of medium and long-term contract schemes to enhance supply portfolio flexibility. Alternative unconventional gas sources, particularly Coal Bed Methane (CBM), are also targeted for integration into the Company's supply network in 2026.

Under the Adapt pillar, the Company will expand its LNG business through an LNG bunkering (LNG for Marine) pilot project in collaboration with the Pertamina Group, as well as growing the natural gas market within the international gas ecosystem.At the same time, we will continue to explore potential mergers and acquisitions that are aligned with PGN's strategic direction, as part of our portfolio consolidation and inorganic growth objectives in pursuit of our long-term growth strategy.

Under the Step Out pillar, PGN is advancing low-carbon business initiatives in line with national Net Zero Emissions (NZE) targets, including biomethane and the completion of supporting infrastructure such as the Injection Point Facility at the Pagardewa Station. The Injection Point Facility is targeted for completion in 2026, with biomethane distribution through the Company's network expected to commence in 2027. This milestone will mark PGN's initial entry into the low-carbon business segment.

Collectively, these strategies will strengthen and expand PGN's position as a national gas aggregator by consolidating supply, integrating gas and LNG infrastructure, and broadening the domestic gas market. This reflects PGN's commitment to expanding access to cleaner energy to support industrial growth and Government programs aimed at achieving energy self-sufficiency. The Company will continue to strengthen partnerships with the Government and key stakeholders to sustain and expand its role in gas infrastructure development.

Pencapaian sasaran strategis ini akan didukung oleh fokus berkelanjutan pada efisiensi biaya operasional, fleksibilitas struktur permodalan, manajemen risiko, serta optimalisasi ketersediaan likuiditas dan fasilitas pendanaan.

Untuk memastikan prospek pertumbuhan PGN yang berkelanjutan, Perusahaan telah menetapkan RKAP dan RJPP Subholding Gas 2025-2029 Suplemen 2034, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai parameter strategis, baik global maupun nasional, mencakup aspek makroekonomi, geopolitik, regulasi, serta dinamika industri energi. Perencanaan ini menjadi landasan dalam mengantisipasi risiko sekaligus menangkap peluang pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Prospek pertumbuhan tersebut turut diperkuat oleh keterlibatan aktif Anak Perusahaan dan Afiliasi melalui sejumlah inisiatif strategis. Perusahaan melakukan *rebalancing* dan *fine-tuning* portofolio dengan memprioritaskan entitas yang memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan, sekaligus mendorong sebagian portofolio pengembangan ke tahap studi dan *pilot project* sebagai persiapan *scale-up* pada periode berikutnya. Pada saat yang sama, maturitas portofolio bisnis rendah karbon dan solusi berbasis gas terus diperkuat sebagai opsi pertumbuhan di era transisi energi.

PGN juga mendorong implementasi kemitraan strategis pada Anak Perusahaan dan Afiliasi dengan menggandeng mitra dalam pengembangan infrastruktur hilir, guna menjaga peningkatan volume gas di segmen *midstream* dan *downstream* serta mendukung eksekusi pengembangan bisnis baru. Evaluasi maturitas investasi dilakukan secara lebih selektif untuk memastikan setiap investasi memberikan imbal hasil optimal sesuai jadwal (*On Schedule*) dan anggaran (*On Budget*), disertai pemantauan kemajuan proyek dan *benefit tracking* secara berkala.

Melalui *Strategic Aligning* dan *Portfolio Rebalancing*, Perusahaan memastikan setiap belanja modal (CAPEX) di Anak Perusahaan selaras dengan arah strategis PGN 2026 sebagai *Energy Transition Leader*, dengan menitikberatkan pada prioritas investasi dan evaluasi kinerja portofolio. Sinergi dan kolaborasi lintas entitas (*cross-subsidiary collaboration*) juga terus diperkuat untuk menciptakan efisiensi dan optimalisasi sumber daya.

The achievement of these strategic priorities will be supported by a continued focus on operational cost efficiency, a flexible capital structure, robust risk management, and the optimization of liquidity and financing facilities.

To ensure sustainable growth, PGN has set out its 2026 Work Plan (RKAP) and the 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP), with a 2034 Supplement. This was developed with reference to global and national strategic parameters, including macroeconomic conditions, geopolitical developments, regulatory frameworks, and energy industry dynamics. This planning framework provides a solid foundation for anticipating risks and capturing medium- and long-term growth opportunities.

The growth prospects outlined above are further strengthened by the active participation of PGN's subsidiaries and affiliates in our strategic initiatives. The Company is rebalancing and refining its portfolio by prioritizing entities that contribute directly to revenue generation, while advancing other development projects to study and pilot project phases in preparation for future scale-up. At the same time, the Company's low-carbon and gas-based business portfolio is maturing into a viable growth platform for the energy transition era.

PGN is also promoting strategic collaboration across our subsidiaries and affiliates, particularly in downstream infrastructure development, to support increased gas volumes in both the midstream and downstream segments and to enable new business development. Investment maturity is assessed selectively to ensure that optimal returns are delivered on schedule and on budget, supported by regular monitoring of project progress and benefit tracking.

Through strategic alignment and portfolio rebalancing, the Company will continue to ensure that all Capex by our subsidiaries is aligned with PGN's 2026 strategy priorities as an Energy Transition Leader, with a strong focus on investment prioritization and portfolio performance. We will also continue to strengthen cross-subsidiary collaboration and synergy to drive efficiency and optimize resource utilization.

Selain itu, Perusahaan akan terus menjalin kerja sama aktif dengan lembaga pembuat kebijakan dalam perencanaan migas nasional guna memastikan posisi strategis gas bumi dalam bauran energi jangka panjang. PGN juga berkomitmen membangun infrastruktur gas bumi yang terintegrasi agar pemanfaatannya semakin luas dan merata bagi sektor industri, komersial, maupun rumah tangga.

In parallel, PGN will continue to engage proactively with policymakers on national oil and gas planning to secure the strategic position of natural gas in the long-term energy mix. We also reaffirm our commitment to developing integrated gas infrastructure to expand access to natural gas across industrial, commercial, and household sectors.

PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), salah satu fokus utama kami adalah memperkuat tata kelola perusahaan guna melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, baik pemegang saham Pemerintah maupun publik. Penguatan ini diawali dengan memastikan bahwa setiap keputusan strategis diambil melalui pertimbangan menyeluruh terhadap tiga pilar utama tata kelola, yaitu aspek legal dan kepatuhan, manajemen risiko yang terintegrasi, serta auditabilitas melalui fungsi audit internal. Dengan berlandaskan pada ketiga pilar tersebut, setiap keputusan diharapkan telah melalui proses pengujian yang komprehensif, sehingga seluruh aspek tata kelola terpenuhi dan selaras dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

GOVERNANCE

As a publicly listed company, one of our key priorities is to strengthen corporate governance in order to safeguard the interests of all shareholders, including both Government and public investors. This effort begins with ensuring that every strategic decision is made through comprehensive consideration of the three core pillars of governance: legal and regulatory compliance, integrated risk management, and auditability through a robust internal audit function. By anchoring decisions in this way, the Company ensures that all governance aspects are rigorously assessed and fully aligned with the applicable laws and regulations.

Sebagai wujud komitmen PGN dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan juga secara konsisten mendorong transparansi melalui keterbukaan informasi kepada publik serta pembaruan informasi secara berkala melalui situs web resmi Perseroan. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan investor, dapat mengikuti perkembangan Perseroan secara jelas dan berkesinambungan di bawah kepemimpinan Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan upaya tersebut dimonitor dan didukung oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG (NRGCG).

As part of our commitment to good corporate governance, PGN consistently promotes transparency through timely and comprehensive public disclosures, including regular updates on the Company's official website. This approach enables all stakeholders, particularly the public and investors, to follow the Company's developments clearly and continuously under the leadership of the Board of Directors and the supervision of the Board of Commissioners. These efforts are further supported and monitored by the Nomination, Remuneration, and GCG (NRGCG) Committee.

Perbaikan tata kelola sepanjang tahun 2025 antara lain mencakup revisi Kode Etik Tata Kelola Perusahaan yang telah diadopsi oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada November 2025. Penguatan kompetensi di bidang GCG juga dilakukan melalui berbagai program sertifikasi bagi karyawan yang menjalankan fungsi kepatuhan dan tata kelola.

In 2025, governance enhancements included the revision of the Corporate Governance Code of Ethics, formally adopted by the Board of Directors and the Board of Commissioners in November 2025. The Company also strengthened governance capabilities through certification programs for employees responsible for compliance and governance functions.

Setiap tahun, PGN melakukan penilaian atas praktik tata kelolanya berdasarkan tiga parameter eksternal utama, yaitu regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum*. Pada tahun 2025, kinerja Perseroan dalam ACGS—yang diverifikasi oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship*—menempatkan PGN di antara lima perusahaan terbuka terbaik di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 50 ASEAN.

Selain itu, PGN secara aktif menjalin komunikasi dengan para pembuat kebijakan dan regulator sepanjang tahun, termasuk memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan regulasi baru maupun usulan perubahan regulasi. Regulasi tersebut mencakup regulasi sektoral di industri minyak dan gas, arahan dari BP BUMN (sebelumnya Kementerian BUMN), serta sejumlah regulasi di bidang pasar modal.

Penerapan Nilai Keberlanjutan

Sepanjang tahun 2025, PGN terus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengambilan keputusan bisnis dan kegiatan operasional perusahaan. Untuk mendukung implementasi tersebut, pada tahun 2024 PGN membentuk divisi Program and Sustainability Management yang berada dalam *Corporate Strategy and Sustainability Group*, dengan fokus pada penguatan penerapan ESG dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan usaha.

Langkah ini mendukung peningkatan kinerja operasional sekaligus memperkuat ketahanan bisnis perusahaan. Secara keseluruhan, pencapaian PGN sepanjang tahun 2025 tercermin melalui tiga pilar utama, yaitu Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang menjadi fokus perusahaan dalam implementasi keberlanjutan.

Pada aspek lingkungan, PGN mencatat kinerja dekarbonisasi yang melampaui target 2025, dengan realisasi reduksi emisi sebesar 38.995,25 tCO_2eq hingga akhir Desember 2025. Pencapaian ini didorong oleh berbagai inisiatif efisiensi energi dan optimasi operasional di lingkungan Perusahaan serta Anak Perusahaan yang berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi kinerja bisnis.

Each year, PGN evaluates its governance practices against three major external benchmarks: regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) published by the National Committee on Governance Policy (KNKG), and the ASEAN Capital Market Forum's Corporate Governance Scorecard (ACGS). In 2025, the Company's ACGS performance, independently verified by the Indonesian Institute for Corporate Directorship, ranked the Company among the top five publicly listed companies in Indonesia and within the ASEAN Top 50.

In addition, the Company actively engages with policymakers and regulators throughout the year, providing constructive input on new regulations and proposed amendments. This includes sector-specific regulations in the oil and gas industry, directives from BP BUMN (formerly the Ministry of State-Owned Enterprises), as well as capital market regulations, ensuring that the Company's perspectives contribute to the development of a fair and effective regulatory environment.

Applying Our Sustainability Values

In 2025, PGN continued to strengthen the implementation of sustainability principles by fully integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations into decision-making and operational activities. To support this, in 2024 PGN established the Program and Sustainability Management Division within the Corporate Strategy and Sustainability Group, with a mandate to embed ESG practices across the development and management of business operations.

This initiative has enhanced operational performance while reinforcing the Company's overall resilience. PGN's achievements in 2025 are reflected across the three core ESG pillars—Environment, Social and Governance—which remain central to our sustainability agenda.

On the environmental front, PGN exceeded the 2025 decarbonization targets, achieving a total emissions reduction of 39,995.25 tCO_2eq as of December 2025. This performance was driven by energy efficiency initiatives and operational optimization across the Company and its Subsidiaries that have not only supported our sustainability objectives but also enhanced business efficiency.

Pada aspek sosial, PGN terus memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama operasional melalui penerapan sistem manajemen K3 yang terintegrasi di seluruh wilayah kerja. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil mempertahankan ZERO *Number of Accidents* (NoA) dengan total Jam Kerja Aman mencapai 45.380.400 jam. Pencapaian ini didukung kepatuhan terhadap standar internasional ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, pelaksanaan audit internal berkala, dan tindak lanjut yang berkesinambungan atas hasil evaluasi. Upaya ini mencerminkan komitmen PGN dalam melindungi pekerja, menjaga keandalan operasional, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta berkelanjutan.

In the social domain, PGN continued to prioritize occupational health and safety by implementing an integrated OHS management system across all operational areas. In 2025, the Company successfully maintained our zero accidents record (Number of Accidents/NoA), with a total of 45,380,400 safe work hours. This performance reflects compliance with international standards, including ISO 45001:2018 for Occupational Health and Safety Management and ISO 14001:2015 for Environmental Management, supported by regular internal audits and continuous follow-up on evaluation outcomes. These efforts underscore PGN's commitment to safeguarding its workforce, maintaining operational reliability, and fostering a safe and sustainable working environment.

Komitmen sosial PGN juga tercermin melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan dan ketahanan bisnis perusahaan. Program TJSL berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta terjaganya Tingkat Kepuasan Pelanggan pada kategori Sangat Baik. Kinerja ini memperkuat kepercayaan publik terhadap PGN sebagai perusahaan energi yang mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan.

PGN's social commitment is further demonstrated through our Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, which form an integral part of our sustainability and business resilience strategy. These initiatives focus on community empowerment while maintaining Customer Satisfaction at an "Excellent" level, reinforcing public trust in PGN as a safe and sustainability-oriented energy provider.

Sepanjang tahun 2025, PGN terus memperkuat pelaksanaan TJSL dengan tujuan memastikan setiap program memberikan dampak yang terukur dan relevan bagi masyarakat. Dalam mendukung ketahanan pangan, PGN melanjutkan program biosalin pada lebih dari ±115 hektare lahan marginal dan pesisir, yang melibatkan lebih dari 115 petani binaan. Program ini berhasil meningkatkan produktivitas lahan hingga 20–30% dibandingkan metode konvensional, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani dan optimalisasi lahan yang sebelumnya kurang produktif.

Throughout 2025, PGN strengthened the implementation of our TJSL programs to ensure that each initiative delivers measurable and meaningful impact. In support of food security, the Company continued the biosaline program across approximately 115 hectares of marginal and coastal land, engaging more than 115 assisted farmers. The program has increased land productivity by 20–30% compared to conventional methods, while boosting farmers' income and optimizing underutilized land.

Pada sektor transisi energi, melalui program EcoGasMove, PGN telah menyalurkan lebih dari 107 unit *converter kit* kendaraan berbahan bakar gas yang berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 440 tCO_2eq per tahun. Di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program TJSL telah menjangkau sekitar 120.000 penerima manfaat melalui penguatan infrastruktur sosial, pengembangan ekonomi kreatif dan pengelolaan potensi kawasan secara berkelanjutan.

In support of the energy transition, through the EcoGasMove program, PGN distributed more than 107 gas-fueled vehicle converter kits, contributing to an annual emissions reduction of approximately 440 tCO_2eq. In the field of community empowerment, the implementation of the CSR program has reached around 120,000 beneficiaries through strengthening social infrastructure, developing the creative economy and managing regional potential sustainably.

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah Sumatra dan Aceh, PGN menyalurkan 7.291 paket sembako, 1.940 paket kesehatan dan obat-obatan, 1.087 paket *hygiene kit*, 150 paket kasur dan tikar, serta 75 paket perlengkapan ibadah. Dukungan ini dilengkapi dengan penyediaan air bersih sekitar 10.000 liter per hari selama satu bulan (±300.000 liter) di Aceh serta pengoperasian 1 unit Mini Water Treatment Plant di Sumatra Utara, guna membantu puluhan ribu warga terdampak pada fase tanggap darurat dan pemulihan awal.

In an effort to mitigate the severe flooding in Sumatra and Aceh, PGN distributed 7,291 food packages, 1,940 health and medicine kits, 1,087 hygiene kits, 150 mattress and mat packages, and 75 packages of religious supplies. In addition, the Company delivered approximately 10,000 liters of clean water per day for a month (±300,000 liters) in Aceh and operated one Mini Water Treatment Plant in North Sumatra, supporting tens of thousands of affected residents during the emergency response and early recovery phases.

Pada aspek tata kelola, PGN terus memperkuat fondasi governansi melalui pengelolaan risiko, integritas, dan ketahanan sistem. Tingkat kematangan keamanan siber yang telah mencapai level terkelola (‘*managed*’) menunjukkan pengendalian dan pemantauan sistem yang konsisten. Dari sisi integritas, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis standar internasional ISO 37001:2016 dilakukan secara berkelanjutan, dilengkapi evaluasi dan pengawasan berkala. Upaya ini menegaskan komitmen PGN dalam membangun budaya integritas yang kuat serta tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

On the governance front, PGN continued to reinforce risk management, integrity, and system resilience. Our cybersecurity maturity has reached a “managed” level, reflecting consistent system control and monitoring. Regarding integrity, PGN continues to implement an Anti-Bribery Management System based on the ISO 37001:2016 standard, supported by regular evaluation and oversight. These measures underscore the Company’s commitment to cultivating a strong integrity culture and maintaining transparent, accountable, and sustainable corporate governance.

Secara keseluruhan, pencapaian keberlanjutan PGN pada 2025 menunjukkan bahwa integrasi ESG tidak hanya mendorong peningkatan kinerja lingkungan dan sosial, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya, keandalan operasional, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis PGN di masa depan.

In summary, PGN’s sustainability performance in 2025 demonstrates that ESG integration not only enhances environmental and social outcomes, but also improves cost efficiency, operational reliability, and stakeholder confidence in the Company’s long-term business sustainability.

Dalam perjalanannya, PGN menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perubahan iklim, dinamika regulasi, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang. Oleh karena itu, setiap inisiatif keberlanjutan senantiasa diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), sehingga langkah yang diambil tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga konsisten dengan arah pertumbuhan dan penciptaan nilai jangka panjang Perusahaan.

PGN continues to face challenges, particularly related to climate change, evolving regulatory dynamics, and rising stakeholder expectations. Accordingly, all sustainability initiatives are aligned with the Company’s Long-Term Plan (RJPP), ensuring that actions remain responsive to immediate needs while supporting long-term growth and value creation.

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan serta meningkatkan daya saing sektor industri nasional, sekaligus memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Sejalan dengan tujuan

INCREASED USE OF DOMESTIC PRODUCTS (P3DN)

The Government’s Domestic Component Level (TKDN) policy plays a strategic role in strengthening resilience and enhancing the competitiveness of the national industrial sector, while also expanding Indonesia’s participation in global supply chains. In line with these objectives, and

tersebut, dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), PGN memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional maupun investasi telah memenuhi ketentuan TKDN yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan semakin mengoptimalkan pengelolaan P3DN, antara lain melalui pengembangan dokumentasi TKDN berbasis digital *melalui Local Content Management System* (LCMS), serta penyelarasan sistem P3DN dengan entitas induk. Hingga Triwulan IV 2025, Perusahaan mencapai komitmen TKDN sebesar 62,21% atas seluruh pengadaan barang dan jasa. Hasil ini melampaui batas minimum 40% yang ditetapkan dalam KPI Perusahaan tahun 2025.

Realisasi TKDN tersebut telah diverifikasi terhadap 53 paket kontrak pengadaan barang dan jasa yang menjadi KPI Perusahaan, dengan nilai verifikasi sebesar 70,97%. Hasil tersebut mencerminkan komitmen PGN dalam mendukung pemberdayaan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2025, terdapat sejumlah perubahan pada susunan Direksi PGN berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2025. RUPSLB memberhentikan dengan hormat Bapak Arief Setiawan Handoko sebagai Direktur Utama, Bapak Fadjar Harianto Widodo sebagai Direktur Keuangan, Ibu Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Komersial, Ibu Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, dan Bapak Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Atas kontribusi dan dedikasi selama masa jabatan di Perusahaan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada RUPSLB tersebut, Bapak Arief Kurnia Risdianto diangkat menjadi Direktur Utama, Bapak Catur Dermawan sebagai Direktur Keuangan, Bapak Aldiansyah Idham sebagai Direktur Komersial, Bapak Mirza Mahendra sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Bapak Hery Murahmanta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi, dan Bapak Eri Surya Kelana sebagai Direktur Manajemen Risiko. Sementara itu, Bapak Rachmat Hutama tetap menjabat sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis.

in compliance with the Domestic Product Utilization Improvement Program (P3DN), the Company ensures that all procurement processes for goods and services—whether for operational needs or investment activities—fully adhere to the applicable TKDN requirements.

Throughout 2025, the Company continued to optimize its P3DN management, including by developing digital-based TKDN documentation through the Local Content Management System (LCMS) and aligning the P3DN system with that of our parent entity. By the fourth quarter of 2025, the Company had achieved a TKDN commitment of 62.21% across all procurement of goods and services, surpassing the minimum target of 40% set in the Company's 2025 KPIs.

This TKDN achievement was verified across 53 procurement contract packages for goods and services included in the Company's KPIs, with a verified value of 70.97%. These results reflect PGN's strong commitment to supporting the development of domestic industry and fostering sustainable economic growth.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, several changes were made to the composition of the Board of Directors following the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on 27 Agustus 2025. The EGMS honorably dismissed Mr. Arief Setiawan Handoko from his position as President Director, Mr. Fadjar Harianto Widodo as Director of Finance, Ms. Ratih Esti Prihatini as Director of Commerce, Ms. Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business Development, and Mr. Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology. We express our deepest appreciation and gratitude for their contributions and dedication throughout their tenure at the Company.

The EGMS also appointed Mr. Arief Kurnia Risdianto as President Director, Mr. Catur Dermawan as Director of Finance, Mr. Aldiansyah Idham as Director of Commerce, Mr. Mirza Mahendra as Director of Strategy and Business Development, Mr. Hery Murahmanta as Director of Infrastructure and Technology, and Mr. Eri Surya Kelana as Director of Risk Management. Meanwhile, Mr. Rachmat Hutama remained in his position as Director of HR and Business Support.

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat penyelarasan strategi dan kinerja Perseroan dengan tujuan jangka panjang, serta untuk menjawab berbagai tantangan dan mengoptimalkan peluang yang akan dihadapi di masa mendatang.

These changes were undertaken to strengthen the alignment of the Company's strategy and performance with its long-term objectives, as well as to address emerging challenges and capitalize on future opportunities.

Perubahan komposisi anggota Direksi ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 01 tanggal 09 September 2025 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Akta Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum Nomor AHU-AHA.01.09.0336642 tanggal 11 September 2025.

The updated composition of the Board of Directors was formalized in the Statement of Shareholders' Resolution PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 01 dated 9 September 2025 before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, in Jakarta. The corresponding Deed of Changes to the Company's Management has also been submitted to and accepted by the Minister of Law, as documented in Minister of Law Letter Number AHU-AHA.01.09.0336642 dated 11 September 2025.

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi sesuai Keputusan RUPSLB tanggal 27 Agustus 2025 sebagai berikut:

Accordingly, the composition of the Board of Directors following the EGMS on 27 August 2025 is as follows:

Direktur Utama President Director	**Arief Kurnia Risdianto**
Direktur Keuangan Director of Finance	**Catur Dermawan**
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	**Eri Surya Kelana**
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	**Mirza Mahendra**
Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	**Hery Murahmanta**
Direktur Komersial Director of Commerce	**Aldiansyah Idham**
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	**Rachmat Hutama**

PENUTUP

Mewakili seluruh Direksi PGN, kami menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para pelanggan, mitra usaha, pemasok, investor, kreditor, regulator, media, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan kepada Perseroan. Hasil kinerja PGN 2025 membuktikan ketahanan Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis untuk menghasilkan kinerja yang tetap positif.

Kepercayaan tersebut menjadi landasan bagi kami untuk terus menghadirkan layanan energi yang andal dan bernilai tambah, memperkuat kolaborasi yang transparan dan saling menguntungkan, serta menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berdampak nyata. Tidak kalah penting, penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh perwira PGN yang dengan dedikasi tinggi terus menjalankan operasional secara aman, andal, dan berorientasi pada pelayanan, sebagai penggerak utama penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Seluruh upaya PGN senantiasa dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip tata kelola yang baik guna menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kedepan, Perseroan akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi layanan energi, serta mengoptimalkan penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dengan semangat kebersamaan dan harmoni, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Hubungan yang terbuka dan komunikatif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga akuntabilitas dan reputasi perusahaan.

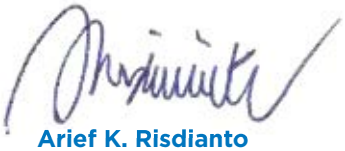
CLOSING

On behalf of PGN's Board of Directors, I would like to extend our sincere appreciation to our customers, business partners, suppliers, investors, creditors, regulators, the media, and all stakeholders for their continued trust and support. PGN's 2025 performance demonstrates its resilience in navigating diverse challenges and business dynamics while delivering positive results.

This trust serves as the foundation for our commitment to providing reliable, value-added energy services, fostering transparent and mutually beneficial collaboration, and implementing impactful social and environmental responsibility programs. Equally important, we express our highest appreciation to all PGN's personnel, whose dedication ensures safe, reliable, and service-oriented operations. They are the driving force behind the creation of long-term value for the Company. All of PGN's efforts are guided by sound corporate governance principles, aimed at generating sustainable value for all stakeholders.

Looking ahead, the Company will continue to strengthen cross-sector collaboration, drive innovation in energy services, and optimize the creation of economic, social, and environmental value in a balanced manner. With a spirit of unity and harmony, we remain confident in our ability to sustain growth while making meaningful contributions to the nation's progress. Open and communicative relationships with all stakeholders will remain central to maintaining the Company's accountability and reputation.

Jakarta,
23 April 2026
April 23, 2026



Arief K. Risdianto
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 April 2026
Jakarta, April 23, 2026

Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

Widjono Hardjanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Conny Lolyta Rumondor
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rambe Kamarul Zaman
Komisaris
Commissioner

Edward Omar Sharif Hiariej
Komisaris
Commissioner

Thanon Aria Dewangga
Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' AND BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITY ON THE 2025 ANNUAL REPORT

We, the undersigned, declare that all the information included in the Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the Fiscal Year of 2025 has been thoroughly disclosed and we are fully responsible for the veracity of the content of the Company's Annual Report.

In witness whereof, this statement is made truthfully.

Jakarta, 23 April 2026
Jakarta, April 23, 2026

Arief K. Risdianto
Direktur Utama
President Director

Mirza Mahendra
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

Hery Murahmanta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

Catur Dermawan
Direktur Keuangan
Director of Finance

Aldiansyah Idham
Direktur Komersial
Director of Commerce

Eri Surya Kelana
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

Rachmat Hutama
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



03



TENTANG PGN
ABOUT PGN



Nama dan Domisili Name and Domicile	**PT Perusahaan Gas Negara Tbk*** disingkat PGN, berdomisili di Jakarta abbreviated as PGN, domiciled in Jakarta
Tanggal Pendirian Date of Establishment	13 Mei 1965 May 13, 1965
Bidang Usaha Line of Business	Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Transmission and Distribution of Natural Gas
Alamat Perseroan Company Address	Kantor Pusat Head Office Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat 11140 F : +62 21 397 00645; +62 21 6334 838 T : +62 21 6333 080 Kantor Korespondensi Correspondence Office Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat 11140 F : +62 21 397 00645; +62 21 6334 838 T : +62 21 6333 080
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued Capital and Paid-Up Capital	Rp2.424.150.819.600 (dua triliun empat ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) Rp2,424,150,819,600 (two trillion four hundred twenty-four billion one hundred fifty million eight hundred nineteen thousand and six hundred rupiah)
Modal Dasar Authorized Capital	Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah) Rp7,000,000,000,000 (seven trillion rupiah)
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for It's Establishment	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) Government Regulation Number 19 of 1965 concerning Dissolution of the Governing Body of the State Electricity Company (PLN) and the State Gas Company (PGN)

* Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Desember 2025, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, nama Perseroan berubah dari sebelumnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Perubahan berlaku efektif sejak 29 Januari 2026 setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.

* Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated December 29, 2025, the Company amended its Articles of Association to conform with Law Number 16 of 2025 regarding the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. In connection therewith, the Company's name was changed from PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Such change became effective as of January 29, 2026, upon obtaining the approval of the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

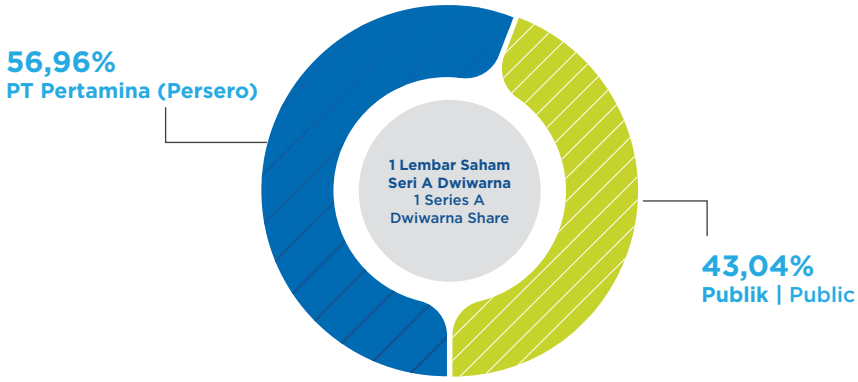


Pencatatan di Bursa
Listing of the Stock Exchange

Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), pada tanggal 15 Desember 2003
The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange) on December 15, 2003

Kepemilikan
Ownership

Struktur Pemegang Saham Per 31 Desember 2025
Shareholder Structure as of December 31, 2025



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024	
	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan (%) Ownership	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan (%) Ownership
Saham Seri A Dwiwarna | Series A Dwiwarna Shares				
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1	0	1	0
Saham Seri B | Series B Shares				
PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96%	13.809.038.755	56,96%
Publik | Public	10.432.469.440	43,04%	10.432.469.440	43,04%
Total	24.241.508.196	100%	24.241.508.196	100%

Kode Saham
Stock Code

PGAS

Kontak Konsumen, Situs Web, dan Media Sosial
Consumer Contact, Website, and Social Media

- 135
- Perusahaan Gas Negara
- pcc135@pertamina.com
- @gas_negara
- www.pgn.co.id
- @PerusahaanGasNegaraPGN
- @gas_negara
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk
- @gas_negara

RIWAYAT SINGKAT
BRIEF HISTORY

1859
FIRMA L.J.N. EINDHOVEN & CO GRAVENHAGE

Pertama kali Perusahaan didirikan oleh keluarga Eindhoven.
Firstly founded by the Eindhoven family.

1863
NV NETHERLAND INDISCHE GAS MAATSCHAPPIJ (NIGM)

Pemerintah Belanda mengambil alih usaha keluarga Eindhoven dan mengubah nama Perusahaan menjadi NIGM. Pada 1879, NIGM mengoperasikan dua pabrik gas di Jakarta dan Surabaya.
The Dutch Government took over the Eindhoven family business and changed the company name into NIGM. In 1879, NIGM operated two gas plants in Jakarta and Surabaya.

1950
NV OVERZEESE GAS EN ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ (NV OGEM)

Pemerintah Belanda mengoperasikan 11 pabrik gas dari 33 pembangkit listrik, menggabungkan NIGM dengan perusahaan listrik Pemerintah Belanda, lalu mengubah namanya menjadi NV OGEM.
The Dutch Government operated 11 gas plants from 33 power plants, merged NIGM with the Dutch Government's electricity company, and changed its name to NV OGEM.

1958
BADAN PENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LISTRIK DAN GAS (BP3LG)

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
The Indonesian Government nationalized foreign companies.

1961
BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (BPU-PLN)

Peleburan perusahaan gas dan Perusahaan listrik negara.
Dissolution of the state gas and electricity companies.

1965
PERUSAHAAN GAS NEGARA

Pada 13 Mei 1965, berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965, PGN didirikan sebagai Perusahaan Negara.
On May 13, 1965, pursuant to Government Regulation Number 19 of 1965, PGN was declared a State Company.

1984
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GAS NEGARA

Perubahan bentuk usaha PGN menjadi Perusahaan Umum (Perum).
The change of corporate form of PGN into a Public Company (Perum).

1994
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)

Perubahan status PGN menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), diiringi penambahan ruang lingkup usaha. Selain di bidang distribusi gas bumi, PGN juga berperan sebagai transporter di bidang transmisi.
The change of status of PGN into a limited liability state-owned company (Persero), pursuant to Government Regulation Number 37 of 1994 concerning the Conversion of Public Company (Perum) Gas Negara into a Limited Liability State-Owned Company (Persero), accompanied by an expansion of the Company's business scope. In addition to its activities in the distribution of natural gas, PGN also undertakes the role of transporter in the transmission sector.

2003
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk

Saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 15 Desember 2003, dengan kode transaksi perdagangan PGAS.
PGN shares were listed on the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange on December 15, 2003, traded under the ticker code PGAS.

2018
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018, pada 11 April 2018, Pemerintah mengalihkan 56,96% saham Seri B kepada PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) menjadi Pemegang Saham PGN, dan PGN berubah status menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Langkah ini sejalan dengan inisiatif pembentukan Holding BUMN Migas dan PGN sebagai Subholding Gas.
Pursuant to Government Regulation Number 6 of 2018, dated April 11, 2018, the Government handed over 56.96% of its B Series shares to PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) became shareholder of PGN, and PGN status changed into a limited liability company that is fully subject to the Law on Limited Liability Companies. This measure is aligned with its initiative to establish Oil and Gas SOE Holding and PGN as its Gas Subholding.

2025
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Perubahan status PGN kembali menjadi perusahaan perseroan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PGN tanggal 29 Desember 2025 yang telah dituangkan dalam akta perubahan Anggaran Dasar PGN dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004617.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
The status of PGN was changed back into a limited liability state-owned company (Persero), based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PGN dated December 29, 2025, as set forth in the deed of amendment to the Articles of Association of PGN and subsequently approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia pursuant to Ministerial Decree Number AHU-0004617.AH.01.02.Year 2026 dated January 29, 2026 concerning the Approval of the Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk, abbreviated as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.


PERTAMINA
PERTAMINA
HEDO KURNIAWAN

PERJALANAN BISNIS PGN
PGN'S BUSINESS JOURNEY

1998
PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi Ruas Grissik-Duri, yang diikuti dengan pembentukan Entitas Anak yang bertugas mengoperasikan pipa transmisi tersebut yaitu PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), pada tahun 2002.

PGN managed to complete the Grissik-Duri Section Transmission Pipeline and established a Subsidiary in charge of managing the transmission pipelines namely PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) in 2002.

2003
Penyelesaian Pipa Transmisi Grissik-Batam-Singapura yang merupakan pipa hilir gas bumi pertama yang melintasi batas negara. Pipa transmisi ini dioperasikan oleh TGI.

The Company completed the Grissik-Batam-Singapore Transmission Pipeline, which is the first natural gas pipeline across the border. This pipeline is operated by TGI.

2007
Pada 25 Oktober 2007, PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi South Sumatra West Java yang terdiri dari SSWJ I dengan Ruas Stasiun Penerima Gas Pagardewa-Bojonegara dan SSWJ II dengan Ruas Grissik-Muara Bekasi. Pada periode yang sama, PGN juga mendirikan Entitas Anak di bidang telekomunikasi yaitu PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM), yang mengoperasikan dan memelihara jaringan kabel fiber optic yang dibangun untuk pengoperasian SCADA, untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi di sepanjang jaringan pipa transmisi Grissik-Batam-Singapura.

On October 25, 2007, PGN managed to complete the installation of the South Sumatra-West Java transmission pipeline, which consists of SSWJ I, connecting Gas Receiving Stations of Pagardewa-Bojonegara, and SSWJ II, connecting that of Grissik-Muara Bekasi. In the same period, PGN established a Subsidiary in the telecommunication sector namely PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM). It operates and maintains a fiber optic cable network built for SCADA operations to maintain the reliability of natural gas distribution along the Grissik-Batam-Singapore transmission pipeline network.

2009
PGN membentuk Entitas Anak bernama PT PGAS Solution yang bergerak di bidang usaha rekayasa teknik, operasi dan pemeliharaan, kontraktor EPC, serta perdagangan.

PGN established a Subsidiary PT PGAS Solution to deal with technical engineering, operation and maintenance, EPC contractor, and trading.

2010
PT Pertamina (Persero) dan PGN mendirikan Perusahaan patungan di bidang LNG, yaitu PT Nusantara Regas sebagai tonggak baru pemanfaatan LNG untuk domestik.

PT Pertamina (Persero) and PGN established a joint venture in the LNG sector, namely PT Nusantara Regas as a new milestone for domestic use of LNG.

2011
PGN membentuk dua Entitas Anak yaitu PT Saka Energi Indonesia di bidang hulu, dan PT Gagas Energi Indonesia di bidang hilir.

PGN established two Subsidiaries, namely PT Saka Energi Indonesia in the upstream sector and PT Gagas Energi Indonesia in the downstream sector.

2012
PGN mendirikan Entitas Anak PT PGN LNG Indonesia (PLI) dengan lingkup usaha antara lain pengadaan pasokan LNG dan niaga, penyimpanan termasuk regasifikasi kepada pembeli, serta kegiatan usaha lainnya di bidang LNG.

PGN established a Subsidiary PT PGN LNG Indonesia (PLI) with a scope of business including procurement of LNG supply and trade, storage including regasification for buyers, as well as other business activities in the LNG sector.

2014
PGN mendirikan entitas anak PT Permata Graha Nusantara dengan lingkup usaha pengelolaan properti, penyediaan jasa tenaga kerja, fasilitas manajemen, serta profitisasi sumber daya dan aset Perusahaan. Perusahaan juga mulai mengoperasikan FSRU Lampung secara komersial untuk mendukung keandalan pasokan gas bumi di Jawa Bagian Barat dengan menggunakan LNG.

PGN established a Subsidiary PT Permata Graha Nusantara with a scope of business including property management, provision of manpower services, management facilities, and monetization of the Company's resources and assets. The Company also commenced the commercial operation of the Lampung FSRU to support the reliability of natural gas supply in Western part of Java using LNG.

2015
Pada Agustus 2015, PGN melalui entitas afiliasi PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) berhasil menyelesaikan pembangunan ruas pipa Transmisi Kalija I dari lapangan gas bumi Kepodang ke PLTG Tambak Lorok Semarang sepanjang 201 km dan dilanjutkan dengan komersialisasi pipa tersebut. Di tahun yang sama, Pertagas menyelesaikan pembangunan Pipa Transmisi Ruas Arun Belawan sepanjang 350 kilometer untuk mendukung keandalan penyaluran gas bumi di wilayah Sumatra Bagian Utara. PT Perta Arun Gas berhasil menyelesaikan revitalisasi kilang LNG Arun menjadi terminal penerima dan regasifikasi LNG. Langkah ini melengkapi fasilitas terminal penerima dan regasifikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Teluk Jakarta dan Lampung.

In August 2015, PGN through an affiliated entity, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) managed to complete the construction of a 201 km-long Kalija I transmission pipeline connecting Kepodang natural gas field and Tambak Lorok Gas Power Plant in Semarang, subsequently commercializing it. In the same year, Pertagas completed the construction of the 350 km-long Arun Belawan Transmission Pipeline to support the reliability of natural gas distribution in the Northern part of Sumatra. PT Perta Arun Gas managed to complete the revitalization of LNG Arun plant to become a receiving terminal and regasification of LNG. In addition, the Company also provided additional facilities for receiving terminal and regasification of existing plants in Teluk Jakarta and Lampung.

2018
Sejalan dengan inisiatif Pemerintah untuk membentuk Holding BUMN Migas, pada 11 April 2018, PGN menjadi bagian dari PT Pertamina (Persero) dengan dialihkannya saham seri B milik negara RI yang menandai terbentuknya Holding BUMN Migas. Selanjutnya pada 28 Desember 2018, PGN resmi menjadi Subholding Gas dengan pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas.

In line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding State Owned Enterprises, on April 11, 2018, PGN became part of PT Pertamina (Persero) following the acquisition of the State's B series shares, which marked the establishment of Oil and Gas Holding SOEs. On December 28, 2018, PGN officially became a Gas Subholding by taking over 51% shares of PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas.

2019
PGN melakukan pelunasan atas akuisisi 51% saham Pertagas pada bulan Maret 2019 sebagai bagian dari rangkaian Holding BUMN Migas.

PGN completed the payment for the acquisition of 51% of Pertagas shares in March 2019, as part of the Oil and Gas SOE Holding.

2020

PGN melakukan restrukturisasi organisasi Subholding Gas yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis gas guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pada periode yang sama, PGN mencanangkan program strategis korporat yaitu Tujuh Program Gasifikasi Nasional atau Sapta PGN. Sebagai bentuk peran Subholding Gas yang mendukung Pemerintah dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan industri nasional di masa pandemi, PGN mengimplementasikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 89 & 91 Tahun 2020, dimana sektor industri dan kelistrikan mendapatkan gas harga khusus hingga diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

PGN restructured the organization of the Gas Subholding organization to improve its management efficiency and effectiveness in achieving sustainable development. Also during this period, PGN launched a strategic corporate program, namely Seven National Gasification Programs or Sapta PGN. In its capacity as a Gas Subholding, PGN supported the Government in national development and the growth of national industries during the pandemic by implementing Decrees of the Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) Number 89 and 91 of 2020, enabling the industrial and electricity sectors to obtain special gas prices, thereby supporting faster and more sustainable national economic growth.

2021

PGN sebagai Subholding Gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), meluncurkan logo Pertamina Gas Negara dengan semangat Satu Pertamina, yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Program konversi penggunaan energi seperti *coal* & diesel ke gas bumi dalam masa transisi menjadikan peran gas bumi semakin penting. Oleh karenanya Perusahaan terus melakukan inisiasi dan penyelesaian program-program investasi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi yang semakin luas.

PGN, as a Gas Subholding of Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero), launched the Pertamina Gas Negara logo with the spirit of `One Pertamina' to promote synergy and collaboration to support the Government in providing better and more sustainable energy. Conversion programs to replace coal & diesel with natural gas in the transition period has resulted in an increasingly important role for natural gas. Therefore, the Company continued to initiate and complete various investment programs to support the wider utilization of natural gas.

2022

PGN sebagai Subholding Gas memperkuat sinergi di dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero) melalui penyelesaian pembangunan pipa minyak mentah koridor Minas-Duri Dumai & koridor Batam-Bangko-Dumai, serta pembangunan pipa transmisi gas ruas Gresik-Semarang untuk pasokan gas dari Jimbaran Tiung Biru. Perusahaan juga memperkuat dampak positif bagi negeri, antara lain melalui Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan menggunakan investasi mandiri dan mendukung pertumbuhan industri nasional melalui implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 & 135 Tahun 2021 (revisi atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 dan 91 Tahun 2020). Pada tahun ini, PGN juga memperoleh predikat Medium Risk dari badan sertifikasi internasional dalam implementasi ESG.

PGN as a Gas Subholding further strengthened the synergy within Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero) through the completion of the construction of the Minas-Duri-Dumai corridor crude oil pipeline and that of the Batam-Bangko-Dumai corridor as well as the construction of the Gresik-Semarang gas transmission pipeline for gas supply from Jimbaran Tiung Biru. The Company also continued to positively impact the country, including through the Development of Household Gas Networks by means of independent investment, and to support the growth of the national industry through the implementation of Decrees of MEMR Number 134 and 135 of 2021 (amendment to MEMR Decrees Number 89 and 91 of 2020). PGN also received a Medium Risk rating from an international certification body for ESG implementation.

2025

Sepanjang tahun 2025, PGN mencatatkan kinerja yang solid di tengah dinamika pasokan gas domestik dan arah kebijakan energi nasional. PGN menjaga keberlanjutan penyaluran gas bumi melalui pengelolaan operasional yang andal, optimalisasi infrastruktur, serta peningkatan pemanfaatan gas hasil regasifikasi LNG sebagai bagian dari pengelolaan bauran pasokan. Sejalan dengan agenda transisi energi, PGN juga memulai pembangunan *injection point biomethane* sebagai langkah awal pengembangan bisnis rendah karbon yang mendukung bisnis inti, menambah potensi pasokan, dan menjawab kebutuhan pelanggan menuju energi yang lebih bersih.

Throughout 2025, PGN delivered solid performance amid domestic gas supply dynamics and the course of national energy policy. PGN maintained the continuity of natural gas distribution through reliable operational management, infrastructure optimization, and increased utilization of regasified LNG as part of supply mix management. Aligned with the energy transition agenda, PGN also commenced the development of biomethane injection points as an initial step in low-carbon business development, supporting core operations, enhancing supply potential, and addressing customer needs for cleaner energy.

2024

PGN mengesahkan visi dan misi yang baru sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Visi dan misi yang baru berfokus untuk mengakselerasi transisi energi dan mendukung energi berkelanjutan di Indonesia yang diwujudkan dalam pembangunan LNG Hub Arun, pembangunan pipa BBM Cikampek-Plumpang untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia, dan memulai bisnis energi terbarukan dalam bentuk pemanfaatan *biomethane*. Perusahaan juga melakukan Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi subsidi dan impor LPG.

PGN ratified its new vision and mission as part of its adaptation to face future business challenges. The new vision and mission is focused on accelerating the energy transition and supporting sustainable energy in Indonesia, which is reflected in the construction of the Arun LNG Hub, the construction of the Cikampek-Plumpang fuel pipeline to maintain energy resilience in Indonesia, and the initiation of a renewable energy business in the form of biomethane utilization. The Company also carried out a National Strategic Project, namely the construction of the Household Gas Network to support the Government's efforts to reduce LPG subsidies and imports

2023

PGN sebagai Subholding Gas terus bersinergi di dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero) melalui penyelesaian Pembangunan Pipa Senipah-RU V Balikpapan, serta turut berperan menyukseskan program transisi energi PT Pertamina (Persero) melalui uji coba penggunaan *Diesel Dual Fuel* (DDF) untuk truk tangki PT Pertamina Patra Niaga. PGN juga melaksanakan Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan lebih agresif. Di luar itu, PGN juga melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan bisnis anak perusahaan dengan membangun LNG Hub Arun serta mengembangkan *green energy business* melalui pemanfaatan *biomethane* dari limbah pabrik kelapa sawit.

PGN as the Gas Subholding continued to create synergy within Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero) through the completion of the Senipah - RU V Balikpapan Pipeline and contributed to the success of PT Pertamina (Persero)'s energy transition program through the trial use of Diesel Dual Fuel (DDF) for PT Pertamina Patra Niaga's tank trucks. PGN also implemented the National Strategic Project, namely the Construction of Household Gas Networks more aggressively. Additionally, PGN diversified its business through the development of a subsidiary business by establishing the Arun LNG Hub and developing a green energy business through the utilization of biomethane from palm oil mill waste.

TRANSFORMASI LOGO PGN
PGN'S LOGO TRANSFORMATION



1859-1965

Logo yang digunakan saat Perusahaan bernama Firma L.J.N Eindhoven & CO Gravenhage.
Logo used when the Company's name was registered as Firma L.J.N. Eindhoven & CO Gravenhage.



1965-1994

Melambangkan sifat pelayanan utilitas gas dengan bumi sebagai sumbernya, serta misi Perusahaan dalam kegiatan produksi, instalasi, transmisi, dan distribusi.
It symbolizes the nature of gas utility services with the earth as its source, and the Company's mission in production, installation, transmission, and distribution activities.



1994-2003

Gambar lidah api dengan kesan dinamis menggambarkan semangat dan inovasi yang menjadi tekad Perusahaan dalam memberikan pelayanan. Sementara lingkaran hitam melambangkan bumi dan pipa sebagai sarana penghantar gas bumi.
It is an image of a dynamic flame. The Company is determined to provide services with spirit and innovation. The black circle represents the earth and the pipe as a means to distribute natural gas.



2003-2011

Mencerminkan visi Perusahaan yang berorientasi global, menjadi Perusahaan publik terkemuka di bidang penyedia gas bumi. Tulisan "Gas Negara" menjadi bagian yang tak terpisahkan dari logo, menyiratkan sifat Perusahaan yang dinamis dan terus berkembang.
It reflects the Company's globally oriented vision to be a leading public Company in the natural gas sector. "Gas Negara" or State Gas is an integrated part of the logo, indicating its nature as a dynamic and continuously growing Company.



2011-2018

Menyimbolkan api yang terdiri dari lima elemen yang mewakili lima pemangku kepentingan utama yaitu konsumen, investor, pekerja, Negara, dan PGN.
It symbolizes five elements of flame, representing five major stakeholders, namely customers, investors, employees, the Nation, and PGN.



2018-2021

Penambahan tagline "A MEMBER OF PERTAMINA" menandakan kedudukan PGN sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero) sejalan dengan inisiatif Pemerintah membentuk Holding BUMN Migas.
The addition of "A MEMBER OF PERTAMINA" tagline indicates PGN's position as part of PT Pertamina (Persero) in line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding SOEs.

2021-Sekarang | 2021-Present:

PGN sebagai Subholding Gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) (Pertamina) meluncurkan logo Pertamina Gas Negara dengan semangat Satu Pertamina, yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penggunaan logo tersebut merupakan kelanjutan dari pembentukan enam Subholding di bawah Pertamina pada tanggal 12 Juni 2020, yang telah mencapai legal *end state* dan efektif berlaku per tanggal 1 September 2021 , yaitu: Subholding Upstream, Subholding Gas, Subholding Power & NRE, Subholding Commercial & Trading, Subholding Refinery & Petrochemical, dan Subholding Shipping.

Logo Pertamina Gas Negara menyimbolkan transformasi PGN sebagai Subholding Gas Pertamina, dengan penyesuaian pada struktur *masterbrand* yang mengikuti identitas *Brand* Holding Pertamina dengan prinsip *"One Brand"*, yang ditetapkan oleh Pertamina bagi anak usahanya.

Identitas baru masih memiliki arti yang sama jika dijadikan kependekan menjadi PGN. Selain itu memiliki arti kepemilikan baru, Pertamina Gas Negara. Nama Pertamina Gas Negara dipilih oleh mayoritas *stakeholder* karena masih mengadopsi identitas PGN, yaitu Gas Negara. PGN dinilai telah memiliki *brand value* yang kuat di publik, sehingga ketika berubah perlu nama yang juga mudah bagi publik untuk mengenal identitas baru PGN.

Dengan konsisten menggemakan semangat "Satu Energi, Satu Pertamina", sinergi segala upaya dan kegiatan dalam penyediaan energi menjadi kekuatan gabungan yang akan memberdayakan Perusahaan untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam rangka mencari solusi untuk tantangan energi masa depan.

PGN, as the Gas Subholding and part of the Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero) (Pertamina) launched the `Pertamina Gas Negara' logo with the spirit of `One Pertamina', emphasizing energy and collaboration to support the Government's efforts to provide better and more sustainable energy.

The use of the logo represents a continuation of the establishment of six Subholdings under Pertamina on June 12, 2020, which reached the legal end state and became effective as of September 1, 2021, namely: the Upstream Subholding, the Gas Subholding, the Power and NRE Subholding, the Commercial and Trading Subholding, the Refinery and Petrochemical Subholding, and the Shipping Subholding.

The Pertamina Gas Negara logo symbolizes the transformation of PGN as the Gas Subholding of Pertamina, with adjustment to the masterbrand structure in alignment with the Pertamina Holding Brand identity under the "One Brand" principle established by Pertamina for its subsidiaries.

The new Identity retains the same meaning when abbreviated as PGN. Additionally, it also reflects the new ownership under the name Pertamina Gas Negara. The name Pertamina Gas Negara was chosen by the majority of stakeholders as it continues to adopt the PGN identity, namely Gas Negara. PGN is regarded as having a strong brand value with the public, therefore the new name must remain easily identifiable to facilitate public recognition.

With consistently promoting the spirit of "One Energy, One Pertamina", the synergy across all efforts and activities in energy provision serves as a combined strength, enabling the Company to make a greater impact in navigating future energy challenges.

PGN SEBAGAI SUBHOLDING GAS
PGN AS GAS SUBHOLDING

Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN menambah Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PGN, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Pertamina (Persero).

Seluruh saham Seri B pada Perseroan yang dialihkan Negara Republik Indonesia kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 13.809.038.755 lembar saham, sedangkan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa tetap dipegang Negara Republik Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/ KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (Persero). Pemerintah menetapkan nilai penambahan modal negara ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) sebesar Rp38.136.346.046.696 yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara kepada PGN.

Proses ini dilengkapi dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham antara Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) tanggal 13 April 2018 yang menyatakan berlakunya peralihan terhitung efektif sejak tanggal 11 April 2018. Dengan adanya pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PGN kepada PT Pertamina (Persero), maka PT Pertamina (Persero) menjadi induk usaha (holding), PGN menjadi anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, dan terjadi perubahan status pada PGN yang semula merupakan BUMN Persero menjadi anak perusahaan BUMN.

Selanjutnya, sebagai bagian dari rangkaian pembentukan Holding BUMN Migas, PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada 29 Juni 2018.

The State of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises increases the State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Limited Liability Companies (Persero) of PT Pertamina (Persero) through the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia to PGN, as stipulated in Government Regulation Number 6 of 2018. This measure was taken by the Government to strengthen capital structure and boost the business capacity of PT Pertamina (Persero).

The B Series shares in the Company transferred by the State of the Republic of Indonesia (the SOE Ministry) to PT Pertamina (Persero) amounted to 13.809.038.755 shares, while one Dwiwarna A Series share remains held by the State of the Republic of Indonesia in accordance with the mandate of Government Regulation Number 72 of 2016, which amends Government Regulation Number 44 of 2005 on the Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

Government Regulation Number 6 of 2018 was followed up with the signing of the Decree of the Minister of Finance Number 286/KMK.06/2018 on the Determination of the Value of Additional Capital Participation of the Republic of Indonesia State into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Pertamina (Persero). The government determined the value of additional state capital into the share capital of PT Pertamina (Persero) at Rp38,136,346,046,696 sourced from the transfer of all Series B shares owned by the State to PGN.

This process was completed with the signing of the Share Contribution Deed between the Ministry of SOEs and PT Pertamina (Persero) dated April 13, 2018 which stated that the transfer was effective from April 11, 2018. With the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in PGN to PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) became the holding company, PGN became a subsidiary of a state-owned enterprise as referred to in Government Regulation Number 72 of 2016, and a change in status was made for PGN which was originally a state-owned enterprise (Persero) to become a subsidiary of a state-owned enterprise.

As part of the establishment of the Oil and Gas State-Owned Enterprises Holding, PGN signed a Conditional Share Purchase Agreement to acquire PT Pertamina Gas and its subsidiaries on June 29, 2018.

Melalui penandatanganan Amandemen dan Pernyataan kembali Perjanjian Jual Beli Saham, pada 28 Desember 2018 dilakukan transaksi pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas oleh PGN, termasuk lima anak usaha PT Pertamina Gas yakni:

1. PT Pertagas Niaga
2. PT Perta Arun Gas
3. PT Perta Daya Gas
4. PT Perta-Samtan Gas
5. PT Perta Kalimantan Gas

Dengan ditetapkannya PT Pertamina (Persero) sebagai Holding BUMN Migas, PGN berperan sebagai Subholding Gas yang mengelola bisnis hilir gas bumi nasional secara terintegrasi. Dalam peran tersebut, PGN bertanggung jawab atas pemanfaatan dan penyaluran gas bumi dari sumber domestik melalui jaringan gas pipa dan LNG untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan, meliputi rumah tangga, pelanggan kecil, sektor komersial, industri, SPBG, dan pembangkit listrik.

PGN mengelola dan mengoperasikan infrastruktur gas bumi sebagai aktivitas utama dalam kegiatan usaha. Di samping itu, PGN juga menjalankan berbagai bisnis pendukung di bidang gas bumi dan layanan energi sebagai bagian dari pengembangan portofolio usaha Perseroan.

LINGKUP BISNIS SUBHOLDING GAS

With the signing of the Amendment and Restatement of the Share Purchase Agreement, on December 28, 2018 PGN acquired 51% of the shares owned by PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas, including five subsidiaries of PT Pertamina Gas, namely:

1. PT Pertagas Niaga
2. PT Perta Arun Gas
3. PT Perta Daya Gas
4. PT Perta-Samtan Gas
5. PT Perta Kalimantan Gas

With the establishment of PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas SOE Holding, PGN serves as the Gas Subholding, managing the national downstream gas business in an integrated manner. In this role, PGN is responsible for the use and distribution of natural gas from domestic sources through pipeline networks and LNG to fulfill the needs of various customer segments, including households, small-scale customers, the commercial and industrial sectors, gas filling stations, and power plants.

PGN manages and operates natural gas infrastructure as its core business activity. Additionally, PGN conducts various supporting businesses in the natural gas and energy services sectors as part of the development of the Company's business portfolio.

GAS SUBHOLDING'S SCOPE OF BUSINESSES



PENYEDIA SOLUSI ENERGI TERINTEGRASI

PGN bersama Entitas Anak dan Afiliasi sebagai bagian dari Subholding Gas menjalankan peran yang saling terintegrasi dan saling mendukung dalam penyediaan gas bumi kepada pengguna akhir. Sinergi tersebut memungkinkan PGN menghadirkan layanan gas bumi yang andal, berkelanjutan, dan bernilai tambah melalui pengelolaan rantai bisnis gas bumi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, serta didukung oleh bisnis pendukung yang relevan.

PROVIDER OF INTEGRATED ENERGY SOLUTION

PGN and its Subsidiaries and Affiliates as part of the Gas Subholding support each other and provide added value in the provision of natural gas to end users. This synergy enables PGN to provide reliable, sustainable, and value-added natural gas services through the comprehensive management of the natural gas business chain, from upstream to downstream, driven by relevant supporting businesses.

Kontribusi Entitas Anak dan Afiliasi dalam mendukung bisnis inti penyediaan gas bumi dilaksanakan melalui beberapa bidang usaha utama sebagai berikut:

The contributions of Subsidiaries and Affiliates in supporting the core natural gas supply business are carried out through the following main business areas:

a. Bidang Usaha Hulu (*Upstream*) - Produksi Minyak dan Gas Bumi
Upstream Businesses - Oil and Gas Production

Melalui Entitas Anak yang bergerak di sektor hulu, yaitu SAKA, PGN berperan mengelola kegiatan produksi minyak dan gas bumi. Keberadaan SAKA mendukung ketahanan pasokan gas bumi domestik sekaligus memberikan fleksibilitas strategis bagi Subholding Gas dalam merespons dinamika pasokan jangka menengah dan panjang.

Through its Subsidiary in the upstream sector, namely SAKA, PGN manages oil and gas production. SAKA contributes to the security of domestic natural gas supply and enhances the Gas Subholding's strategic flexibility in responding to medium and long term supply dynamics.

b. Bidang Usaha *Midstream* – Transportasi dan Regasifikasi
Midstream Businesses – Transportation and Regasification

Pada segmen *midstream*, PGN bersama Entitas Anak dan Afiliasi menjalankan kegiatan transportasi serta pengelolaan infrastruktur gas bumi melalui jaringan pipa dan moda transportasi non-pipa, serta penyediaan jasa regasifikasi LNG. Kegiatan ini dijalankan oleh Pertagas dan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dalam pengelolaan pipa transportasi gas bumi, serta oleh PLI dan PT Perta Arun Gas (PAG) dalam penyediaan layanan regasifikasi. Segmen ini berperan penting dalam menjaga keandalan distribusi gas serta fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan.

In the midstream segment, PGN, together with its Subsidiaries and Affiliates, manages natural gas transportation and infrastructure through pipeline networks and non-pipeline modes, while providing LNG regasification services. Pertagas and PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) handle the natural gas transportation pipelines, while PLI and PT Perta Arun Gas (PAG) provide the regasification services. The midstream segment plays a key role in maintaining distribution reliability and meeting diverse customer needs with flexibility.

c. Bidang Usaha Hilir (*Downstream*) – Niaga Gas Bumi
Downstream Businesses – Natural Gas Commercialization

Pada segmen hilir, PGN bersama Entitas Anak menjalankan kegiatan niaga gas bumi melalui gas pipa, LNG, dan CNG guna memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna akhir, termasuk pembangkit listrik, industri, komersial, transportasi, pelanggan kecil, dan rumah tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PGN, PT Pertagas Niaga (PTGN), dan GAGAS dengan fokus pada penyediaan solusi energi yang kompetitif serta selaras dengan karakteristik kebutuhan pelanggan.

In the downstream segment, PGN, together with its Subsidiaries, conducts natural gas commercialization through pipelines, LNG, and CNG to fulfill the needs of various end-user segments, including power plants, industrial and commercial customers, transportation, small-scale customers, and households. These activities are carried out by PGN, PT Pertagas Niaga (PTGN), and GAGAS with the focus on delivering competitive energy solutions tailored to customer characteristics.

d. Bisnis Pendukung (*Support*)
Supporting Businesses

Selain bisnis inti, PGN juga menjalankan bisnis pendukung yang berkontribusi terhadap kelancaran operasional dan pengembangan bisnis Subholding Gas. Bisnis ini dijalankan melalui PGASOL sebagai penyedia layanan *Engineering*, *Procurement*, *Construction* (EPC), termasuk jasa operasi dan pemeliharaan serta *supply chain* untuk infrastruktur gas bumi dan fasilitas pendukungnya. PGNMAS yang berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung dan pengelolaan aset, serta PGNCOM yang menyediakan layanan teknologi informasi dan solusi digital.

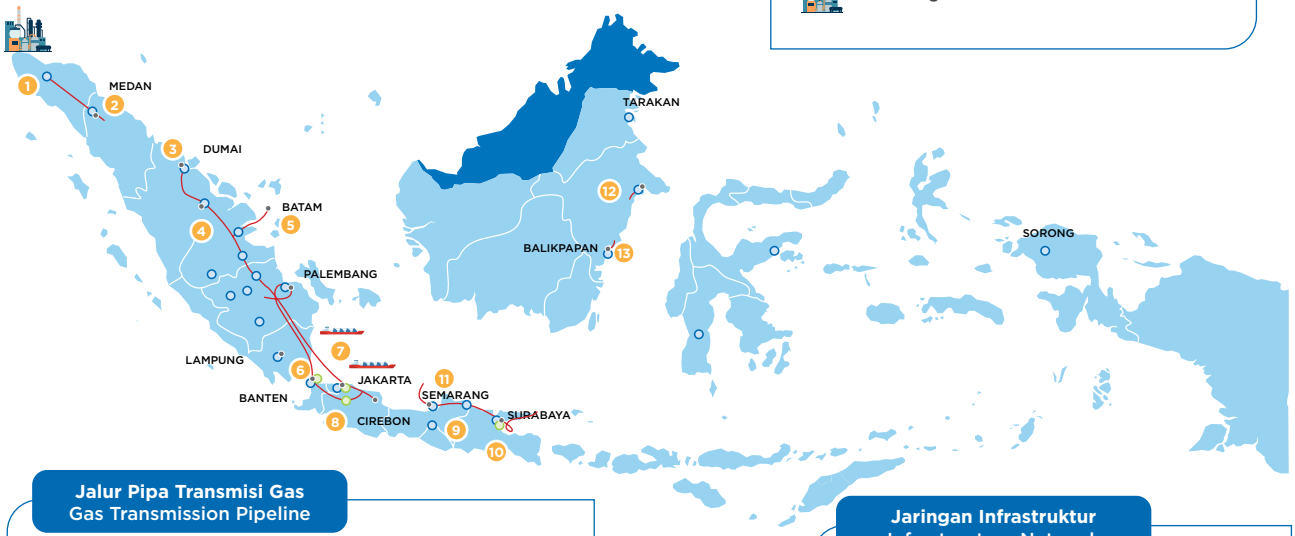
In addition to its core business, PGN also runs supporting businesses that contribute to the smooth operation and business development of the Gas Subholding. These activities are carried out by PGASOL, as a provider of integrated energy services, including Operations, Maintenance, and Construction (EPC). PGNMAS, as a service provider of supporting facilities and asset management, and PGNCOM, as a provider of information technology services and digital solutions.

PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL

OPERATOR OF NATIONAL NATURAL GAS INFRASTRUCTURES

Keterangan
Description

- **Jalur Pipa Transmisi Gas**
  Gas Transmission Pipeline
- **Area Distribusi**
  Distribution Area
- **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)**
  Gas Refueling Station (SPBG)
- **FSRU**
- **LNG Regasification**



Jalur Pipa Transmisi Gas
Gas Transmission Pipeline

1. Arun - Belawan
2. Belawan - Sei Mengkei
3. Duri - Dumai
4. Grissik - Duri
5. Grissik - Singapore
6. Labuan Maringgai - Bojonegara
7. Labuan Maringgai - Bekasi
8. West Java
9. Gresik - Semarang
10. East Java
11. Kalimantan Jawa phase 1
12. Kalimantan Timur
13. Senipah - Balikpapan

Jaringan Infrastruktur
Infrastructure Network

- 5,884 km Pipa Transmisi | Transmission Pipeline
- 7,904 km Pipa Ditribusi | Distribution Pipeline
- ±19,705 km Jaringan Gas (Jargas) | City Gas Network
- 2 Floating Storage Regasification Unit
- 1 Land Based Regasification Unit
- 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas | Gas Fuel Station
- 4 Mobile Refueling Unit

VISI DAN MISI
VISION AND MISSION

Dewan Komisaris dan Direksi PGN telah menyetujui Visi dan Misi Perseroan. Visi dan Misi Perseroan sebagai Subholding Gas juga telah diperbarui dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 062000.K/PR.00/PDO/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Suplemen hingga 2034 dan Visi Misi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sedangkan budaya Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 037800.K/OT.04/PDO/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penerapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di Lingkungan Subholding Gas.

PGN's Board of Commissioners and Board of Directors approved the Company's Vision and Mission. The Company's Vision and Mission as a Gas Subholding has also been updated and stipulated through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 062000.K/PR.00/PDO/2024 dated September 25, 2024, regarding the Determination of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029 Supplement to 2034 and the Vision and Mission of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Meanwhile, the Company's culture is stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 037800.K/OT.04/PDO/2020 dated October 16, 2020, regarding the Implementation of AKHLAK Core Values within the Gas Subholding.



VISI
Vision

Menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan

To be the clean energy solution provider for a greener and more sustainable world



MISI
Mission

Menjalankan bisnis gas di bidang *midstream* dan *downstream* dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan:

Conducting midstream and downstream gas business and other supporting businesses committed to increasing the value for all stakeholders through:

1. Menyediakan energi berbasis gas yang memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan.
   Providing gas-based energy that adds value to all customers.
2. Mengakselarasi transisi energi di Indonesia.
   Accelerating the energy transition in Indonesia.

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Untuk mendukung peran PGN sebagai Subholding Gas dan pengelola utama bisnis gas bumi di Indonesia, Perseroan menjadikan penerapan budaya perusahaan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai faktor kunci dalam mencapai visi dan misi Subholding Gas. Perseroan juga memastikan bahwa perilaku seluruh organisasi sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang berlaku bagi seluruh Perwira Subholding Gas. Penilaian perilaku masing-masing pekerja dilakukan setiap tahun melalui aplikasi website intra-iam.pertamina.com.

Efektivitas penerapan budaya tersebut selanjutnya dimonitor melalui survei yang mengukur implementasi nilai budaya Perseroan. Hasil survei ini menjadi salah satu indikator evaluasi budaya perusahaan serta diintegrasikan dalam penilaian kinerja manajemen, termasuk dalam Key Performance Indicators (KPI) Direksi.

In support of PGN's role as a Gas Subholding and the major operator of the natural gas business in Indonesia, the Company has made the implementation of a corporate culture of trustworthy, competent, harmonious, loyal, adaptive, and collaborative a key enabler to achieve the Gas Subholding's vision and mission. The Company also ensures that the behavior of the entire organization aligns with the corporate values that apply to all Gas Subholding Employees. Each employee's behavior is assessed annually through the intra-iam.pertamina.com website.

The effectiveness of this culture implementation is further monitored through a survey that measures the implementation of the Corporate cultural values. The results of this survey serve as an indicator for evaluating the corporate culture and are included in management performance assessments, including the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs).

01 AMANAH TRUSTWORTHY

Perilaku AMANAH:
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

TRUSTWORTHY Behavior:
- Fulfilling promises and commitments.
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions.
- Adhering to moral and ethical values.

02 KOMPETEN COMPETENT

Perilaku KOMPETEN:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

COMPETENT Behavior:
- Improving self-competence to respond to everchanging challenges.
- Helping others to learn.
- Completing tasks with the highest quality.

03 HARMONIS HARMONIOUS

Perilaku HARMONIS:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

HARMONIOUS Behavior:
- Respecting everyone regardless of background.
- Willing to help others.
- Building a conducive work environment.

04 LOYAL LOYAL

Perilaku LOYAL:
- Menjaga nama baik sesama Perwira Subholding Gas, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

LOYAL Behavior:
- Maintaining the reputation of fellow Gas Subholding Employees, leaders, SOEs, and the State.
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
- Obeying the leadership as long as it is not against the law and ethics

05 ADAPTIF ADAPTIVE

Perilaku ADAPTIF:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

ADAPTIVE Behavior:
- Quickly adapting to become better.
- Making continuous improvement following technological developments.
- Being proactive.

06 KOLABORATIF COLLABORATIVE

Perilaku KOLABORATIF:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

COLLABORATIVE Behavior:
- Providing opportunities for various parties to contribute.
- Being open about working together to generate added value.
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

PROGRAM BUDAYA *LIVING CORE VALUES* 2025
LIVING CORE VALUES CULTURE PROGRAM 2025

ONE PERTAMINA

PROGRAM STANDAR
STANDARD PROGRAM

One Hour Meeting

Program "One Hour Meeting" usaha membangun budaya meeting yang efektif dan efisien di lingkungan Pertamina agar:
- Tidak ada meeting dalam meeting (fokus)
- Bangun suasana positif dan konstruktif
- Libatkan seluruh peserta yang diundang

"One Hour Meeting" Program is an initiative to cultivate a culture of effective and efficient meetings within Pertamina, aimed at ensuring that:
- Meetings remain focused;
- A positive and constructive atmosphere is fostered
- All invited participants are actively evolved.

PROGRAM MANDATORY
MANDATORY PROGRAM

One Action

Program "One Action" adalah program budaya untuk memberikan kualitas terbaik dalam setiap aspek pekerjaan.

"One Action" Program is a cultural program designed to deliver the highest quality in every aspect of work.

PROGRAM SPESIFIK
SPESIFIC PROGRAM

One Kolab

Program budaya unggulan yang dapat meningkatkan kinerja fungsi melalui kolaborasi dan sinergi antar fungsi/Direktorat/ Entitas bisnis, dengan salah satu wajib menyasar pada "10 Fokus Keberlanjutan Pertamina".

A flagship cultural program designed to enhance functional performance through collaboration and synergy across functions/ directorates/business entities, with at least one initiative required to align with the "10 Pertamina Sustainability Focus Areas."


Exit

BIDANG USAHA
NATURE OF BUSINESSES

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 ("Anggaran Dasar Perseroan") yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha PGN adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
2. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (gas hidrokarbon).
3. Pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam, karbonasi dan gasifikasi batu bara atau bahan hidrokarbon lain, termasuk proses regasifikasi LNG (KBLI 35201).
4. Penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan (KBLI 35202).
5. Penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
6. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair kepada konsumen melalui saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
7. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas (KBLI 35202).
8. Pengangkutan gas dalam bentuk gas dan cair dari produsen ke tempat konsumen dengan saluran pipa maupun moda transportasi darat dan laut atas dasar *fee* atau kontrak (KBLI 49300).
9. Pengoperasian gardu pompa (KBLI 49300).
10. Penyimpanan gas dalam bentuk gas dan cair sementara sebelum gas tersebut dikirim ke konsumen (KBLI 52101; KBLI 52109).

BUSINESS ACTIVITES

Business Activities Pursuant to Articles of Association

Article 3 of PGN's Articles of Association as stipulated in Deed Number 28 dated May 11, 2021 ("Company's Articles of Association"), made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, PGN's business activities are as follows:

Main Business Activities

1. Planning, development, management, and expansion of downstream natural gas businesses, including processing, transportation, storage, and trading activities.
2. Planning, development, production enhancement, supply, transmission, and distribution of manufactured gas (hydrocarbon gas).
3. Processing of gaseous fuels that can be directly utilized as fuel, including quality upgrading processes such as purification, blending, and other treatments derived from natural gas, coal carbonization and gasification, or other hydrocarbon materials, including LNG regasification processes (KBLI 35201).
4. Transmission of gas through extra high-pressure pipelines (above 10 bar), high-pressure pipelines (between 4 bar and 10 bar), and medium- to low-pressure pipelines (below 4 bar), whether sourced from the Company's own production or third parties, up to end consumers or customers (KBLI 35202).
5. Transmission, distribution, and procurement of all types of gaseous and liquefied gas fuels through pipeline systems and land and sea transportation (KBLI 35202).
6. Trading of gaseous and liquefied gas fuels to consumers through pipeline systems as well as land and sea transportation (KBLI 35202).
7. Trading of gaseous and liquefied gas fuels through gas distribution systems operated by third parties, including the operation of commodity exchanges and gas transportation capacity (KBLI 35202).
8. Transportation of gaseous and liquefied gas fuels from producers to consumers via pipelines and land or sea transportation modes on a fee or contract basis (KBLI 49300).
9. Operation of pumping stations (KBLI 49300).
10. Storage of gaseous and liquefied gas fuels prior to delivery to consumers (KBLI 52101; KBLI 52109).

11. Perdagangan bahan bakar gas dan cair, serta produk sejenisnya dalam skala industri maupun *retail* (KBLI 46610).
12. Instalasi gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal (KBLI 43223).
13. Pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran gas (KBLI 43223).

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan usaha utama, termasuk namun tidak terbatas pada:

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Penyertaan modal di bidang usaha hulu minyak dan gas, infrastruktur pipa minyak, LNG termasuk LNG *carrier*, NGL, LPG, CNG, jasa konstruksi, *engineering*, kelistrikan, informasi dan komunikasi, properti dan manajemen aset, kawasan pariwisata, penyediaan jasa tenaga kerja, konsultasi, dan bidang usaha lainnya.
2. Kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki Perseroan.

Adapun Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 26 Januari 2026. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004617. AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

11. Wholesale and retail trading of gaseous and liquefied fuels and similar products (KBLI 46610).

12. nstallation of gas systems in residential and non-residential buildings (KBLI 43223).
13. Maintenance and repair of gas pipeline installations (KBLI 43223).

In addition to the main business activities, the Company may carry out other supporting business activities that are directly related to and/or support the main business activities, including but not limited to:

Supporting Business Activities

1. Capital participation in upstream oil and gas businesses; oil pipeline infrastructure; LNG, including LNG carriers; NGL; LPG; CNG; construction services; engineering; electricity; information and communication; property and asset management; tourism areas; manpower services; consulting; and other related business sectors.
2. Provision of services related to natural gas mining conducted on a fee or contract basis.
3. Optimization of the utilization of the Company's assets and other resources.

The Company's Articles of Association have been amended based on Deed Number 17 dated January 26, 2026. The amendment has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number AHU-0004617.AH.01.02.YEAR 2026 dated January 29, 2026 on Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk or Abbreviated as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU
BUSINESS ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR

NIAGA DAN TRANSMISI TRADING AND TRANSMISSION

Segmen niaga dan transmisi gas melakukan kegiatan niaga dan transmisi minyak dan gas dan pengolahan LNG kepada pelanggan industri, komersial dan rumah tangga, serta LNG trading.

The gas trading and transmission segment is involved in trading and transmission of oil and gas and processing of LNG to industrial, commercial and household customers, and LNG trading.

EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS

Segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

The exploration and production of oil and gas segment is mainly involved in exploration, exploitation and business development in oil and gas.

OPERASI LAINNYA OTHER OPERATIONS

Segmen operasional lainnya berupa telekomunikasi, pemrosesan gas, jasa regasifikasi, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa, serta layanan pengelolaan fasilitas dan manajemen aset.

The other operations segment includes telecommunication, gas processing, regasification services, pipeline network construction and maintenance as well as facility and asset management services.

Pada tahun 2025, PGN meningkatkan pemanfaatan pasokan gas hasil regasifikasi LNG sebagai bagian dari pengelolaan bauran pasokan, guna menjaga keberlanjutan penyaluran gas bumi di tengah tren penurunan alamiah pasokan gas pipa dari lapangan eksisting.

In 2025, PGN increased the utilization of regasified LNG supply as part of its supply portfolio management strategy, ensuring the continuity of natural gas distribution amidst a natural downward trend in pipeline gas supply from existing fields.

Untuk mendukung kegiatan niaga tersebut, PGN mengoperasikan infrastruktur gas bumi secara terintegrasi serta melaksanakan layanan operasional dan layanan pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku.

To support its gas trading activities, PGN operates integrated natural gas infrastructure and delivers operational and customer services in accordance with applicable standards.

Pengelolaan pelanggan dilakukan PGN berdasarkan segmentasi pelanggan yang dibagi menjadi:
1. Pelanggan Rumah Tangga (RT)
2. Pelanggan Kecil (PK)
3. Pelanggan Sektor Transportasi (SPBG)
4. Pelanggan Komersial dan Industri (KI)

PGN carried out customer management based on customer segmentation which is divided into:
1. Household Customers (RT)
2. Small-scale Customers (PK)
3. Customers in Transportation Sectors (SPBG/Gas Refueling Station)
4. Commercial and Industrial Customers (KI)

Selain kegiatan hilir gas bumi, PGN melalui anak perusahaan PT Saka Energi Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan tersebut mencakup eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan lapangan migas, dengan produk yang dihasilkan berupa minyak bumi, gas bumi, dan LPG.

In addition to its downstream natural gas business, PGN, through its subsidiary PT Saka Energi Indonesia, conducts oil and gas exploration and production activities. These activities include exploration, exploitation, and field development, producing crude oil, natural gas, and LPG.

Di samping itu, PGN juga menjalankan kegiatan usaha lainnya yang bersifat pendukung kegiatan inti niaga gas bumi, antara lain penyediaan jasa *fiber optic*, jasa konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan, guna mendukung keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan.

PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN

Dalam bisnis niaga, PGN menawarkan produk-produk yang berbeda kepada masing-masing segmentasi pelanggan, di antaranya:

Furthermore, PGN also undertakes supporting business activities complementary to its core gas trading operations, including fiber optic services, construction services as well as operations and maintenance services, and the management and leasing of buildings and equipment, driving the overall sustainability of the Company's business operations.

PRODUCTS OR SERVICES

In the commercial business, PGN offers different products to each customer segment, among others:

gasline – Your Energy Efficiency Partner	**Solusi pemanfaatan energi terintegrasi yang andal dan berfokus pada pelanggan melalui *excellent customer experience* untuk segmen pelanggan komersial dan industri.**	Reliable customer-focused integrated energy utilization solutions through excellent customer experience in the commercial and industrial customer segments.
gaskita – Juaranya Gas Ngalir Terus	**Solusi pemanfaatan energi yang praktis, aman, dan ramah lingkungan untuk segmen pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil.**	Practical, safe and ecofriendly energy utilization solutions for households and retail customer segments.
gasku – Melaju Dengan Bersih	**Solusi penyediaan bahan bakar gas yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien dengan moda CNG untuk segmen pelanggan transportasi.**	Solution for providing clean, ecofriendly and efficient gas fuel using CNG mode in the transportation customer segment.
gaslink – Bring Energy to You	**Solusi penyediaan gas bumi untuk lokasi tanpa jaringan distribusi gas bumi melalui Gas Transport Module (GTM), yaitu kendaraan yang membawa gas bumi dengan moda CNG untuk segmen pelanggan Industri, Komersial dan UMKM.**	Solution for providing natural gas for locations without a natural gas distribution network through the Gas Transport Module (GTM), where natural gas in transported using CNG mode for the Industrial, Commercial and MSME customer segments.

PGN menyediakan gas bumi dalam dua bentuk utama: gas pipa dan *beyond pipeline*. Untuk kategori gas pipa, PGN menawarkan produk GasLine dan GasKita, sementara dalam kategori *beyond pipeline*, tersedia produk GasKu dan GasLink.

Produk GasLine menawarkan pilihan solusi terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi pemanfaatan gas bumi pelanggan melalui berbagai kriteria kontrak ke beberapa kelompok berdasarkan jumlah pemakaian gas bumi, yaitu:

1. Bronze 1, pemakaian 1.001-10.000 m^3/bulan;
2. Bronze 2, pemakaian 350-1.750 mmbtu/bulan;
3. Bronze 3, pemakaian 1.751-17.500 mmbtu/bulan;
4. Silver, pemakaian 17.501-125.000 mmbtu/bulan;
5. Gold, pemakaian 125.001-350.000 mmbtu/bulan;
6. Platinum, pemakaian lebih besar dari 350.000 mmbtu/bulan.

Selain GasLine, PGN juga menghadirkan GasLink sebagai solusi bagi segmen pelanggan komersial dan industri melalui moda transportasi gas atau *Gas Transport Module (GTM)* dalam bentuk CNG dan LNG. Produk ini dirancang khusus untuk calon pelanggan yang belum terjangkau oleh jaringan pipa PGN, sebagai upaya dalam memastikan akses energi yang lebih luas dan fleksibel.

Pada segmen pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil, produk GasKita disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kategori produk berikut:

1. Produk GasKita Praktis: diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil dengan fitur yang praktis namun tetap dapat memenuhi kebutuhan gas pelanggan;
2. Produk GasKita Pintar: dirancang khusus untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil, dilengkapi dengan fitur tambahan yang meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan gas bumi PGN.

Sedangkan untuk segmen pelanggan transportasi, PGN menyediakan produk GasKu dalam bentuk CNG yang dapat diakses pada SPBG dan MRU yang telah tersedia di Sumatra bagian selatan, Jawa, dan Balikpapan.

PGN provides natural gas in two primary delivery schemes: pipeline gas and beyond pipeline. For pipeline gas, PGN offers the GasLine and GasKita products, while for beyond pipeline services, PGN provides GasKu and GasLink.

GasLine offers integrated solutions tailored to customers' operational requirements for natural gas utilization. Contract schemes are categorized into several groups based on monthly gas consumption levels, as follows:

1. Bronze 1, usage of 1,001-10,000 m3/month;
2. Bronze 2, usage of 350-1,750 mmbtu/month
3. Bronze 3, usage of 1,751-17,500 mmbtu/month;
4. Silver, usage of 17,501-125,000 mmbtu/month;
5. Gold, usage of 125,001-350,000 mmbtu/month;
6. Platinum, usage of more than 350,000 mmbtu/month.

In addition to GasLine, PGN offers GasLink as a solution for commercial and industrial customers through gas transportation modes, known as the Gas Transport Module (GTM), in the form of CNG and LNG. This product is specifically designed for prospective customers not yet connected to PGN's pipeline network, ensuring broader and more flexible energy access.

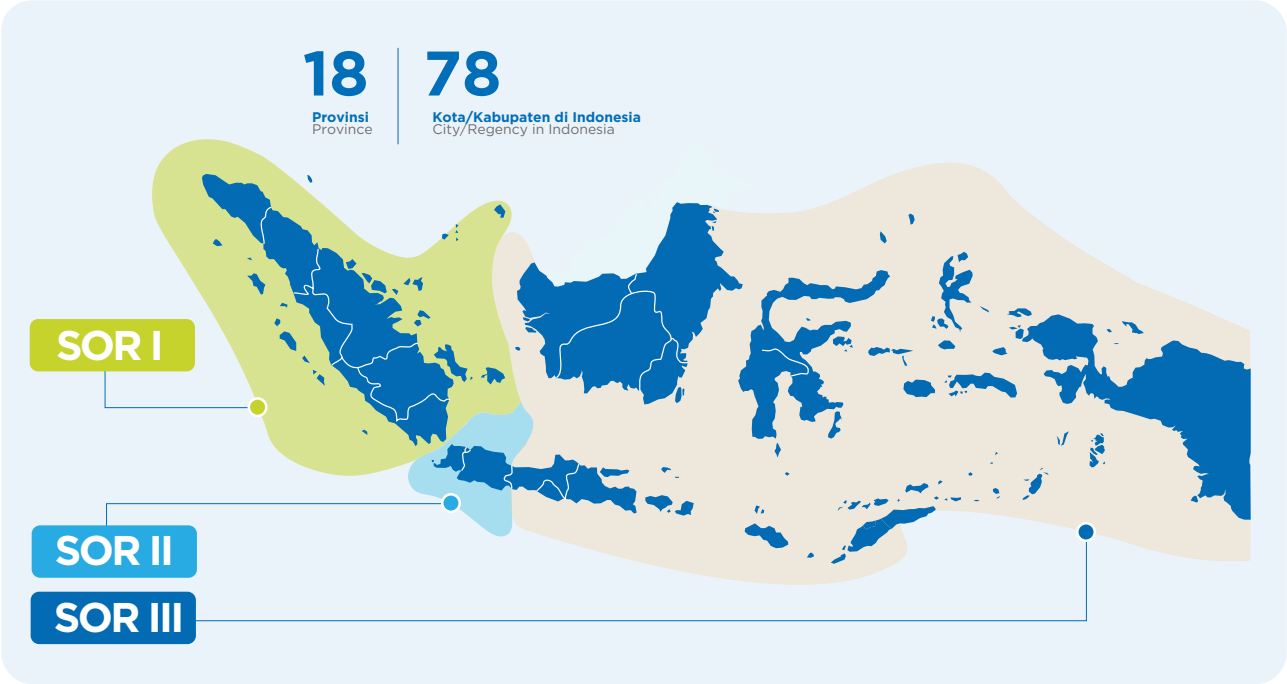
For household and small-scale customer segments, PGN provides GasKita to meet customer needs in the following product categories:

1. GasKita Praktis: intended for household and small-scale customers, offering practical features while meeting essential gas needs.

2. GasKita Pintar: designed specifically for household and small-scale customers, equipped with additional features to enhance convenience in utilizing PGN's natural gas services.

As for the transportation customer segment, PGN provides GasKu in the form of CNG that can be accessed at SPBG and MRUs that are already available in southern Sumatra, Java, and Balikpapan.

WILAYAH OPERASIONAL PGN
PGN OPERATION REGIONS



Wilayah kegiatan usaha PGN tersebar di 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, portofolio pengelolaan infrastruktur hilir gas bumi PGN Group mencakup 97% dari infrastruktur hilir gas bumi yang sudah terbangun dan beroperasi. Kegiatan operasional usaha niaga gas bumi PGN dikelola oleh Sales and Operation Region (SOR) yang terbagi dalam SOR I, II, dan III dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

1. Wilayah SOR I meliputi pulau Sumatra & Kepulauan Riau, dengan Area terdiri dari Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam dan sekitarnya.
2. Wilayah SOR II meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dengan Area terdiri dari DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon dan sekitarnya.
3. Wilayah SOR III meliputi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, serta pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku dengan Area terdiri dari Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang, Kalimantan (Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan) dan Kawasan Timur Indonesia (Makassar, Banggai dan Sorong).

Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN memiliki wilayah operasi yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wilayah operasi di luar negeri, yaitu pada Lapangan Fasken di Texas, Amerika Serikat yang dimiliki oleh PT Saka Energi Indonesia.

The area of PGN's business activities is spread across 18 provinces and 78 cities/regencies nationwide. Until the end of 2025, PGN Group's downstream natural gas infrastructure management portfolio covers 97% of the built and operating downstream natural gas infrastructure. PGN's natural gas trading business operations are managed by the Sales and Operation Region (SOR), which is divided into SOR I, II, and III with the following details of each SOR area:

1. SOR I Region covers the island of Sumatra & Riau Islands, with Areas consisting of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam, and surrounding areas.
2. SOR II Region covers the provinces of West Java, DKI Jakarta, Banten, with Areas consisting of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon, and surrounding areas.
3. SOR III Region covers the provinces of Central Java, Special Region of Yogyakarta, East Java, Bali, as well as Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku Islands with Areas consisting of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang, Kalimantan (Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan) and Eastern Indonesia (Makassar, Banggai, and Sorong).

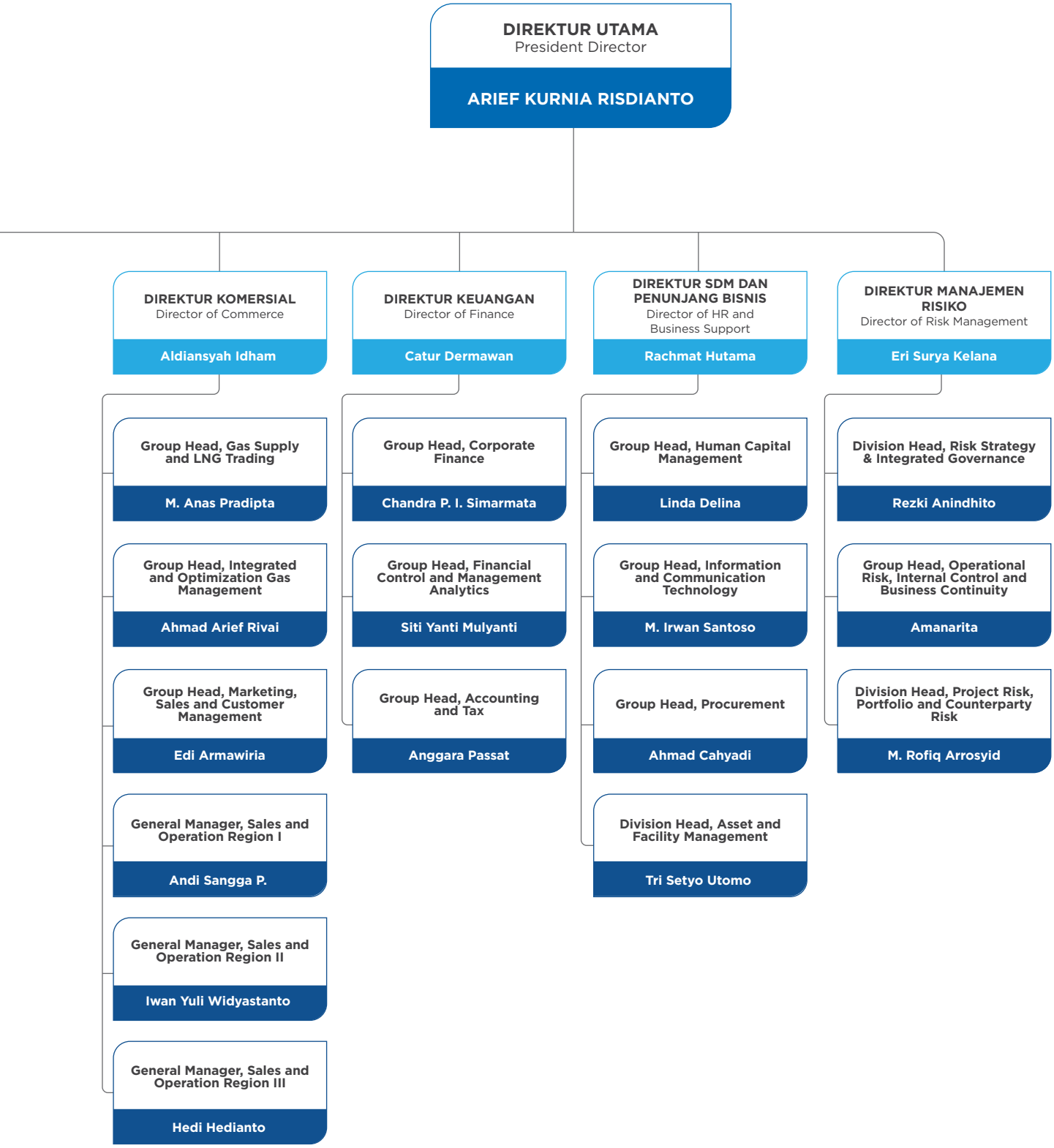
PGN's Subsidiaries and Affiliates have operating areas spread throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and abroad, including the Fasken Field in Texas, the United States, owned by PT Saka Energi Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2025 sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 atas agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, serta sesuai Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 062100.K/OT.00/HCGS/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Struktur Organisasi beserta PRL dan Formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, adalah sebagai berikut:

The Company's organizational structure as of December 31, 2025, in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 27, 2025 regarding the agenda of Changes in the Composition of the Company's Management, and in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number: 062100.K/OT.00/HCGS/2024 dated December 31, 2024 on the Organizational Structure along with PRL and Formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, is as follows:




DIREKTUR UTAMA
President Director
ARIEF KURNIA RISDIANTO
DIREKTUR KOMERSIAL
Director of Commerce
Aldiansyah Idham
Group Head, Gas Supply and LNG Trading
M. Anas Pradipta
Group Head, Integrated and Optimization Gas Management
Ahmad Arief Rivai
Group Head, Marketing, Sales and Customer Management
Edi Armawiria
General Manager, Sales and Operation Region I
Andi Sangga P.
General Manager, Sales and Operation Region II
Iwan Yuli Widyastanto
General Manager, Sales and Operation Region III
Hedi Hedianto
DIREKTUR KEUANGAN
Director of Finance
Catur Dermawan
Group Head, Corporate Finance
Chandra P. I. Simarmata
Group Head, Financial Control and Management Analytics
Siti Yanti Mulyanti
Group Head, Accounting and Tax
Anggara Passat
DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS
Director of HR and Business Support
Rachmat Hutama
Group Head, Human Capital Management
Linda Delina
Group Head, Information and Communication Technology
M. Irwan Santoso
Group Head, Procurement
Ahmad Cahyadi
Division Head, Asset and Facility Management
Tri Setyo Utomo
DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
Director of Risk Management
Eri Surya Kelana
Division Head, Risk Strategy & Integrated Governance
Rezki Anindhito
Group Head, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity
Amanarita
Division Head, Project Risk, Portfolio and Counterparty Risk
M. Rofiq Arrosyid

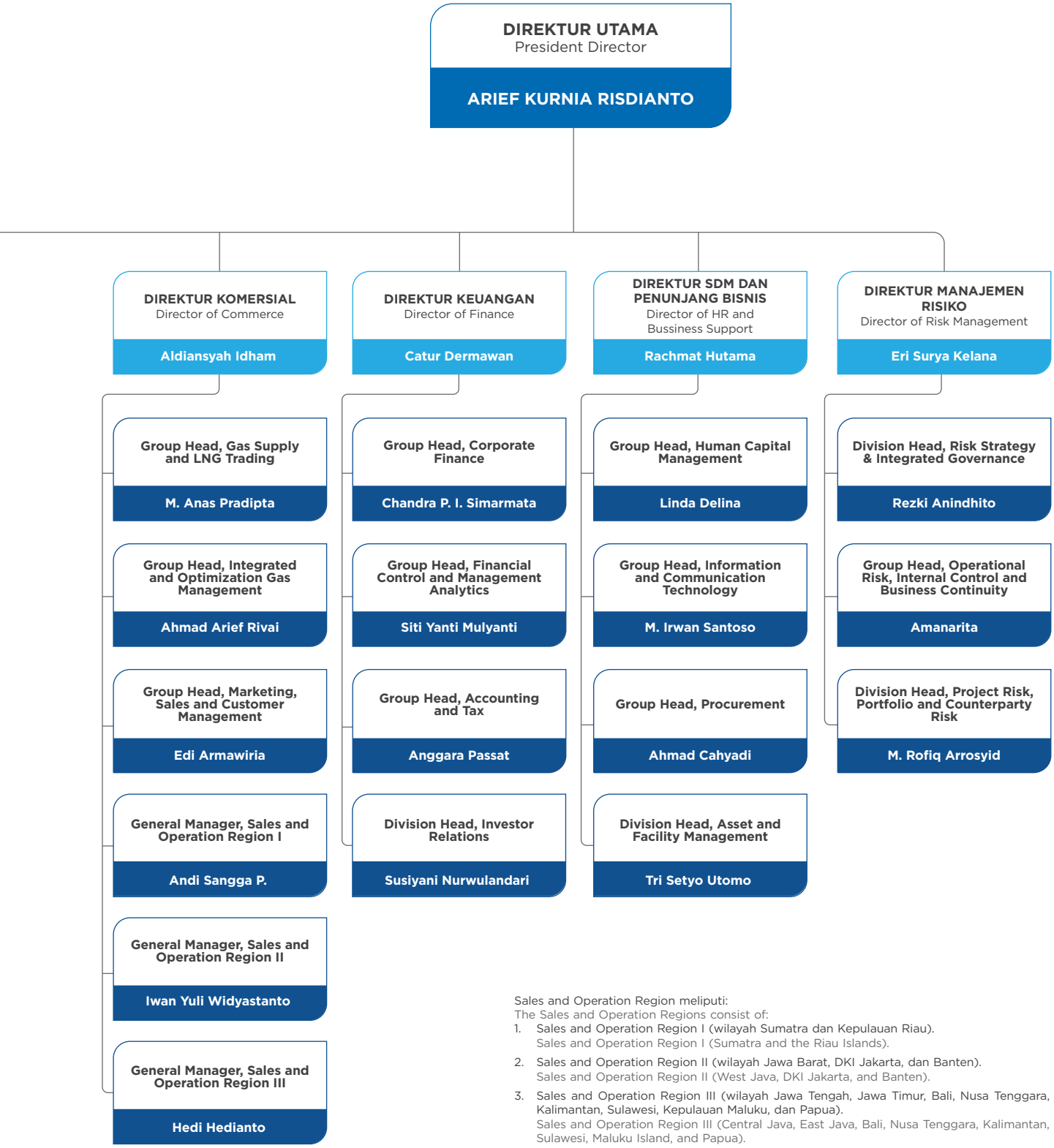
Efektif sejak 1 Januari 2026, PGN mengalami perubahan organisasi BOD-1 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 078000.K/OT.00/HCGS/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 062100.K/OT.00/HCGS/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 076300.K/OT.00/HCGS/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Perubahan organisasi meliputi perpindahan garis lapor Fungsi Strategic Business Advocacy, yang semula berada di bawah Direktur Utama berubah menjadi di bawah Corporate Secretary. Kemudian, perpindahan garis lapor Fungsi Investor Relations yang semula berada di bawah Corporate Secretary, berubah menjadi di bawah Direktur Keuangan.

Effective as per January 1, 2026, PGN implemented changes to its BOD-1 organizational structure as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 078000.K/OT.00/HCGS/2025 dated December 31, 2025 on the Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 062100.K/OT.00/HCGS/2024 dated December 31, 2024, and the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 076300.K/OT.00/HCGS/2025 dated December 16, 2025.

The organizational changes included the reassignment of reporting lines for the Strategic Business Advocacy Function, which was previously under the President Director and has been placed under the Corporate Secretary. Additionally, the reporting line of the Investor Relations Function was transferred to the Director of Finance from the Corporate Secretary.



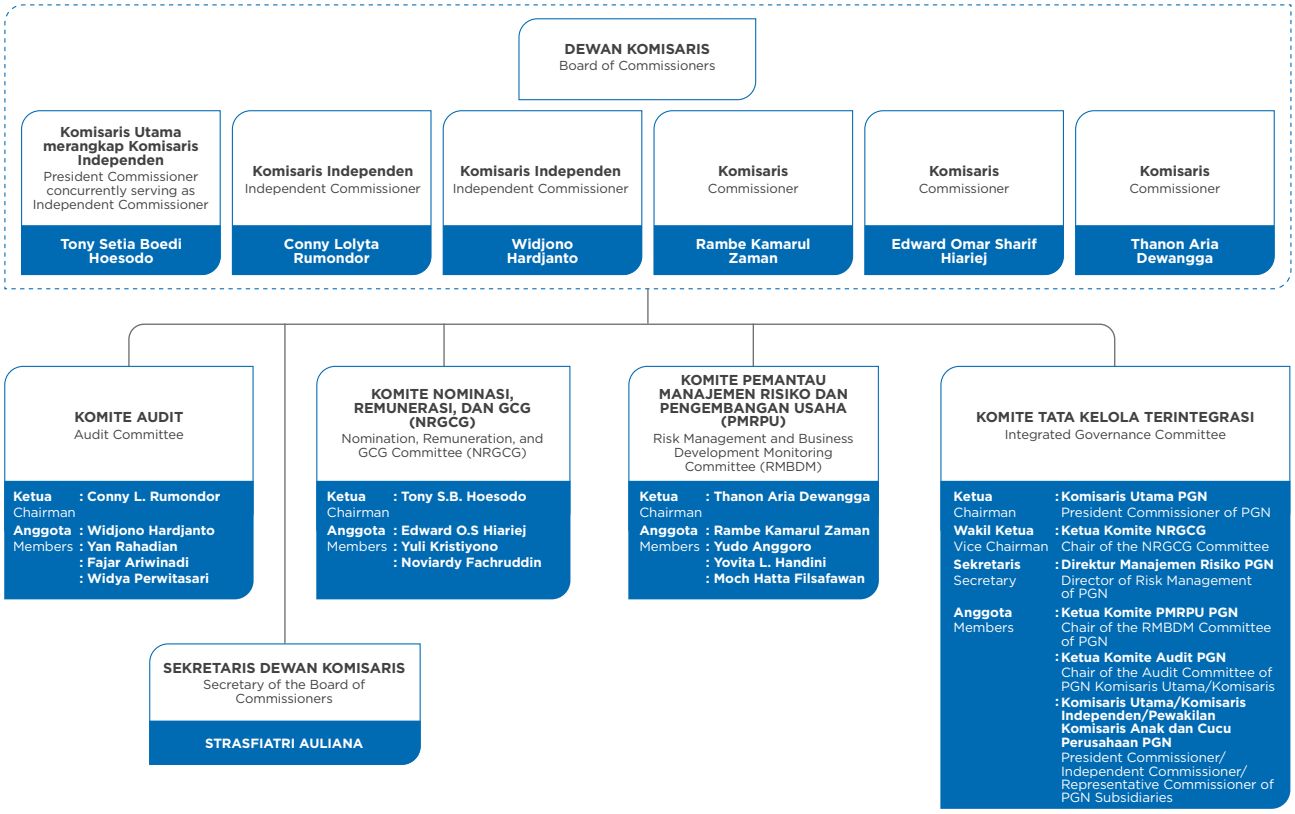


Sales and Operation Region meliputi:
The Sales and Operation Regions consist of:

1. Sales and Operation Region I (wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau).
   Sales and Operation Region I (Sumatra and the Riau Islands).
2. Sales and Operation Region II (wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten).
   Sales and Operation Region II (West Java, DKI Jakarta, and Banten).
3. Sales and Operation Region III (wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua).
   Sales and Operation Region III (Central Java, East Java, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Island, and Papua).

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE

(PER 31 DESEMBER 2025 | AS OF DECEMBER 31, 2025)



STRUKTUR USAHA
BUSINESS STRUCTURES



PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PGN SELAMA TAHUN BUKU 2025 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2025

CHANGES IN THE COMPOSITION OF PGN'S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DURING AND AFTER THE 2025 FISCAL YEAR

Sepanjang tahun buku 2025, terdapat beberapa perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN yang dilakukan dengan tujuan memperkuat kepemimpinan dalam merespons tantangan pasar. Informasi secara rinci perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN, sebagai berikut:

Across the 2025 fiscal year, several changes were made to the composition of PGN's Board of Commissioners and Board of Directors, aimed at strengthening leadership in responding to market challenges. Detailed information on the changes to the composition of PGN's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Terakhir Latest Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Pengalihan Tugas Date of Transfer of Duties	Tanggal Pemberhentian Date of Termination	Alasan Perubahan Grounds for Change
1.	Luky Alfirman	Komisaris Commissioners	-	-	25 Maret 2025 March 25, 2025	Pemberhentian, Diangkat sebagai Komisaris di BUMN lain Dismissal, Appointed as Commissioner at another SOE
2.	Warih Sadono	Komisaris Commissioners	28 Mei 2025 May 28, 2025	-	15 Mei 2025 May 15, 2025	Berakhirnya Masa Jabatan, Diangkat kembali Periode Kedua Term of Office ends, Reappointed for Second Term
3.	Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	4 Juli 2025 July 4, 2025	Pemberhentian, Diangkat sebagai Direksi di Anak Perusahaan BUMN lain Dismissal, Appointed as Director in Subsidiary of another SOE
4.	Arief Setiawan Handoko	Direktur Utama President Directors	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
5.	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
6.	Ratih Esti Prihatini	Direktur Komersial Director of Commerce	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
7.	Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
8.	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
9.	Warih Sadono	Komisaris Commissioner	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
10.	Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
11.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment
12.	Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Pemberhentian, Penyegaran Dismissal, Refreshment

No.	Nama Name	Jabatan Terakhir Latest Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Pengalihan Tugas Date of Transfer of Duties	Tanggal Pemberhentian Date of Termination	Alasan Perubahan Grounds for Change
13.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Directors	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	Pengalihan Tugas semula Direktur Manajemen Risiko menjadi Direktur Utama, Penyegaran Transfer of Duties from Director of Risk Management to President Director, Refreshment
14.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	-	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	Pengalihan Tugas semula Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Penyegaran Transfer of Duties from Independent Commissioner to President Commissioner and Independent Commissioner, Refreshment
15.	Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
16.	Catur Dermawan	Direktur Keuangan Director of Finance	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
17.	Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
18.	Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Director of Commerce	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
19.	Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
20.	Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
21.	Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
22.	Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	27 Agustus 2025 27 Agustus 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
23.	Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment
24.	Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	27 Agustus 2025 August 27, 2025	-	-	Pengangkatan, Penyegaran Appointment, Refreshment

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Subsequently, the composition of the PGN's Board of Commissioners and the Board of Directors as of December 31, 2025 is as follows:

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 Dasar Pengalihan Tugas: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of the Annual GMS dated May 30, 2024 Basis for Transfer of Duties: Resolution of the Extraordinary GMS dated August 27, 2025	30 Mei 2024*-sekarang May 30, 2024*-present
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present

*) masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pada saat pengangkatan sebagai Komisaris Independen tanggal 30 Mei 2024
*) The term of office continues the remaining term of office at the time of appointment as Independent Commissioner on May 30, 2024

DIREKSI
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Directors	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 Dasar Pengalihan Tugas: Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of the Annual GMS dated May 30, 2024 Basis for Transfer of Duties: Resolution of the Extraordinary GMS dated August 27, 2025	30 Mei 2024**-sekarang May 30, 2024**-present
Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Catur Dermawan	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Director of Commerce	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 Resolution of Extraordinary GMS held on August 27, 2025	27 Agustus 2025-sekarang August 27, 2025-present
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 Resolution of Annual GMS held on May 30, 2024	30 Mei 2024-sekarang May 30, 2024-present

**) masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pada saat pengangkatan sebagai Direktur Manajemen Risiko tanggal 30 Mei 2024
**) the term of office continues the remaining term of office at the time of appointment as Director of Risk Management on May 30, 2024

Tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah akhir tahun buku hingga tanggal penerbitan Laporan Tahunan PGN 2025.

No changes were made to the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors after the end of the financial year until the publication date of the 2025 PGN Annual Report.



PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

TONY SETIA BOEDI HOESODO
KOMISARIS UTAMA MERANGKAP KOMISARIS INDEPENDEN
PRESIDENT COMMISSIONER CONCURRENTLY SERVING AS INDEPENDENT COMMISSIONER

30 Mei 2024 - Sekarang | May 30, 2024 - Present

Usia Age	71 tahun per 31 Desember 2025 71 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Tulungagung, 6 Maret 1954 Tulungagung, March 6, 1954
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	1. Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025 mengalihkan tugas sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pada saat pengangkatan sebagai Komisaris Independen tanggal 30 Mei 2024. 2. Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. 1. Resolution of the Extraordinary GMS dated August 27, 2025 transferred the duties as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner with a term of office continuing the remaining term of office at the time of appointment as Independent Commissioner on May 30, 2024. 2. Appointed as Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2024.



Periode Jabatan Term of Office	30 Mei 2024 - Sekarang (Periode Pertama) May 30, 2024 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S3 Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2013) • S2 Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) • S2 MSDM, STIMA IMMI, Jakarta (2012) • S1 MSDM, STIA LAN Jakarta (2012) • S1 Administrasi Pembangunan, Universitas Terbuka Bandung (1998) • SESKOAD (1992) • AKABRI Darat (1977) • Doctorate in National Resilience, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2013) • Master's in National Resilience, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009) • Master's in Human Resources Management, STIMA IMMI, Jakarta (2012) • Bachelor's in Human Resources Management, STIA-LAN Jakarta (2012) • Bachelor's in Development Administration, Universitas Terbuka Bandung (1998) • Army Command and Staff College-SESKOAD (1992) • Indonesian Army Academy-AKABRI Darat (1977)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris Independen, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-sekarang) • Staf Khusus Ketua Umum, KONI Pusat • Kepala Bidang Pembinaan Prestasi, KONI Pusat • Tenaga Profesional Bidang Sosbud dan Hankam, Lemhanas • Deputi Pendidikan, Lemhanas RI • Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Tannas, Lemhanas RI • Direktur Materi Pendidikan, Lemhanas RI • Direktur Program Pendidikan, Lemhanas RI • Dan Pusdikif, TNI AD (2006) • Danrem 151 Binaiya, Maluku (2003-2004) • Asops Kasdam, Pattimura (2000-2003) • Dandim, Timika Papua (1995-1996) • Karo Bangpur Koopskam, Timtim (1989-1990) • Independent Commissioner, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-present) • Special Staff to the General Chairperson, KONI Pusat • Head Division of Achievement Development, KONI Pusat • Professional Staff for Socio-Cultural and Defense and Security Affairs, Lemhanas • Deputy for Education, Lemhanas RI) • Expert Analyst for National Defense, Lemhanas RI • Director of Educational Materials, Lemhanas RI • Director of Educational Programs, Lemhanas RI • Head of the Education and Training Center (Pusdikif), TNI AD (2006) • Military Resort Commander 151 Binaiya, Maluku (2003-2004) • Assistant Operations for the Regional Military Command (Kasdam), Pattimura (2000-2003) • Military District Commander, Timika, Papua (1995-1996) • Bureau Head of the Combat Support of the Security Operations Command, East Timor (1989-1990)
Sertifikasi Certifications	Certified Risk Professional (CRP)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 437-438 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 437-438
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (27 Agustus 2025-sekarang) • Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG (1 September 2025-sekarang) • Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN (4 Juni-27 Agustus 2025) • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN (1 Januari-3 Juni 2025) • Chairman of the Integrated Governance Committee (August 27, 2025-present) • Chairman of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee (September 1, 2025-present) • Chairman of the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee (June 4-August 27, 2025) • Member of the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee (January 1-June 3, 2025) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions
Independensi Independency	Telah menyampaikan surat pernyataan independensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Having submitted a statement of independence pursuant to the provisions stipulated by the Financial Services Authority (FSA).

WIDJONO HARDJANTO
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-Present

Usia Age	69 tahun per 31 Desember 2025 69 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Amsterdam, 24 November 1956 Amsterdam, November 24, 1956
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025-sekarang (Periode Pertama) 2025-present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S1 Hukum, Universitas Indonesia (1976) • Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1976)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Komisaris Independen, PT PLN Nusantara Power (2024-2025) • Direktur Utama, PT Nusantara Energi (2002-2014) • Vice President, PT Kiani Kertas (2000-2018) • Independent Commissioner, PT PLN Nusantara Power (2024-2025) • President Director, PT Nusantara Energi (2002-2014) • Vice President, PT Kiani Kertas (2000-2018)
Sertifikasi Certifications	CRP
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 439 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 439
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Anggota Komite Audit (1 September 2025-sekarang) • Member of the Audit Committee (September 1, 2025-present) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions
Independensi Independency	Telah menyampaikan surat pernyataan independensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Having submitted a statement of independence pursuant to the provisions stipulated by the Financial Services Authority (FSA).



CONNY LOLYTA RUMONDOR
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2025 64 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Manado, 24 Oktober 1961 Manado, October 24, 1961
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Institut Pertanian Bogor, Bogor (1991) • S1 Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1984) • Master's Degree, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1991) • Bachelor's Degree, Faculty of Agriculture, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1984)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Anggota Independen, Dewan Pengawas PERURI (2024-2025) • Wakil Ketua Umum, DPP Real Estat Indonesia (2016-sekarang) • Sekretaris Badan Kehormatan, DPRD Kota Manado (2012-2013) • Anggota Badan Kehormatan, DPRD Kota Manado (2012-2013) • Staf Bidang Ekonomi, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara (1986-1994) • Independent Member, PERURI Supervisory Board (2024-2025) • Deputy General Chairperson, Indonesian Real Estate Executive Board (2016-present) • Secretary of the Honorary Council, Manado City Council (2012-2013) • Member of the Honorary Council, Manado City Council (2012-2013) • Economic Staff, North Sulawesi Provincial Development Planning Agency (BAPPEDA) (1986-1994)
Sertifikasi Certifications	CRP
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 438 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 438
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Ketua Komite Audit (1 September 2025-sekarang) • Chairperson of the Audit Committee (September 1, 2025-present) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Anggota Independen, Dewan Pengawas PERURI (2024-2025) • Wakil Ketua Umum, DPP Real Estat Indonesia (2016-sekarang) • Independent Member, PERURI Supervisory Board (2024-2025) • Deputy General Chairperson, Indonesian Real Estate Executive Board (2016-present)
Independensi Independency	Telah menyampaikan surat pernyataan independensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Having submitted a statement of independence pursuant to the provisions stipulated by the Financial Services Authority (FSA).



RAMBE KAMARUL ZAMAN
KOMISARIS
COMMISSIONER

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-present

Usia Age	69 tahun per 31 Desember 2025 69 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Pinarik, 24 Oktober 1956 Pinarik, October 24, 1956
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S3 Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta (2022) • S2 Manajemen, STIE Kusuma Negara, Jakarta (2012) • S1 Manajemen Industri, STMI Jakarta (1983) • Doctor of Political Science, Universitas Nasional, Jakarta (2022) • Master's in Management, Kusuma Negara Institute of Economics, Jakarta (2012) • Bachelor's in Industrial Management, STMI Jakarta (1983)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Wakil Ketua, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI (2019-sekarang) • Ketua, Komisi II DPR RI (2014-2019) • Ketua, Tim Kerja II Sosialisasi Putusan MPR RI (2005-2009) • Ketua, Komite Kerja DPR - DPD RI (2004-2009) • Deputy Chairperson, the People's Consultative Assembly/MPR RI Constitutional Review Commission (2019-present) • Chairperson, Commission II of the House of Representatives (2014-2019) • Chairperson, Working Team II for Outreach of MPR RI Decisions (2005-2009) • Chairperson, DPR-DPD RI Working Committee (2004-2009)
Sertifikasi Certifications	CRP
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 439 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 439
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (1 September 2025-sekarang) • Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee (September 1, 2025-present) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Wakil Ketua, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI (2019-sekarang) • Deputy Chairman, MPR RI Constitutional Review Commission (2019-present)



EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ
KOMISARIS
COMMISSIONER

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2025 52 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Ambon, 10 April 1973 Ambon, April 10, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Period)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S3 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) • S2 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004) • S1 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998) • Doctor of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) • Master of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004) • Bachelor of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Wakil Menteri Hukum, Republik Indonesia (2024-sekarang) • Wakil Menteri Hukum dan HAM, Republik Indonesia (2020-2023) • Komisaris, Pertamina EP Cepu (2020-2023) • Dewan Pengawas, Gelora Bung Karno (2020-2023) • Penasihat Senior, Kantor Staf Presiden, Republik Indonesia (2020-2023) • Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999-sekarang) • Vice Minister of Law, Republic of Indonesia (2024-present) • Vice Minister of Law and Human Rights, Republic of Indonesia (2020-2023) • Commissioner, Pertamina EP Cepu (2020-2023) • Supervisory Board, Gelora Bung Karno Stadium (2020-2023) • Senior Advisor, Presidential Staff Office, Republic of Indonesia (2020-2023) • Lecturer at Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999-present)
Sertifikasi Certifications	CRP
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 439 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 439
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG (Komite NRGCG) (1 September 2025-sekarang) • Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee (NRGCG Committee) (September 1, 2025-present) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia (2024-sekarang) • Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999-sekarang) • Vice Minister of Law of the Republic of Indonesia (2024-present) • Lecturer at Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999-present)
Independensi Independency	Telah menyampaikan surat pernyataan independensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Having submitted a statement of independence pursuant to the provisions stipulated by the Financial Services Authority (FSA).



THANON ARIA DEWANGGA
KOMISARIS
COMMISSIONER

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-Present

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2025 52 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 19 Mei 1973 Bandung, May 19, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran, Bandung (2016) • S2 Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta (2002) • S1 Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Bandung (1996) • Doctorate of Government Science, Universitas Padjajaran, Bandung (2016) • Master's Degree in International Relations, Universitas Indonesia, Jakarta (2002) • Bachelor's Degree in International Relations, Universitas Padjajaran, Bandung (1996)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara (2024-sekarang) • Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet (2019-2024) • Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet (2017-2019) • Deputy for Administration, Cabinet Support Secretariat, Ministry of State Secretariat (2024-present) • Deputy for Cabinet Work Support, Cabinet Secretariat (2019-2024) • Expert Staff for Law and International Relations, Cabinet Secretariat (2017-2019)
Sertifikasi Certifications	CRP
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab GCG halaman 438 Information on training for the Board of Commissioners can be found in the GCG chapter page 438
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (1 September 2025-sekarang) • Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee (September 1, 2025-present) **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. • **Institusi Lainnya** | Other Institution • Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara (2024-sekarang) • Deputy for Administration, Cabinet Support Secretariat, Ministry of State Secretariat (2024-present)



PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS



ARIEF KURNIA RISDIANTO
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2025 47 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 28 September 1978 Bandung, 28 September, 1978
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pengalihan tugas sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. Transfer of duties as President Director based on the Resolution of the Extraordinary GMS dated August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2024 - Sekarang (Periode Pertama)* 2024 - Present (First Term)*
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Teknologi Kelautan, World Maritime University (2010) • S1 Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (2000) • Master of Marine Technology, World Maritime University (2010) • Bachelor of Law, Universitas Padjadjaran (2000)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Manajemen Risiko, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-27 Agustus 2025) • Senior Vice President Logistics, Integration & Optimization PT Pertamina (Persero) (Purnawaktu) (2022-2024) • Director of Operation, PT Pertamina International Shipping (2020-2022) • Ship Operation Manager (2017-2020) • Director of Risk Management, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-August 27, 2025) • Senior Vice President of Logistics, Integration & Optimization, PT Pertamina (Persero) (Full-time) (2022-2024) • Director of Operations, PT Pertamina International Shipping (2020-2022) • Ship Operations Manager (2017-2020)
Sertifikasi Certifications	• Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified Contract Drafter) (Angkatan VLVII) (2024) • Sertifikasi Manajemen Risiko Utama (Certified Risk Professional) oleh BNSP (2024) • Certified Contract Drafter Certification (Class VLVII) (2024) • Certified Risk Professional Certification by the National Profession Standardization Agency/BNSP (2024)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 440 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 440
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan • No concurrent positions.

*) masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pada saat pengangkatan sebagai Direktur Manajemen Risiko tanggal 30 Mei 2024
*) The term of office continues the remaining term of office at the time of appointment as Director of Risk Management on May 30, 2024

CATUR DERMAWAN
DIREKTUR KEUANGAN
DIRECTOR OF FINANCE

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-Present

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2025 52 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 10 Desember 1973 Jakarta, December 10 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Director of Finance based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Magister Manajemen, Universitas Sriwijaya, Palembang (2009) • S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1996) • Master of Management, Universitas Sriwijaya, Palembang (2009) • Bachelor of Economics and Accounting, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1996)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Finance & Business Support, PT Pertamina Lubricants (2021-27 Agustus 2025) • Direktur Keuangan, PT Pertamedika (2019-2021) • Manager BP&D Finance, PT Pertamina (Persero) (2017-2019) • Manager Account, PT Pertamina (Persero) (2017) • Director of Finance & Business Support, PT Pertamina Lubricants (2021-August 27, 2025) • Director of Finance, PT Pertamedika (2019-2021) • BP&D Finance Manager, PT Pertamina (Persero) (2017-2019) • Account Manager, PT Pertamina (Persero) (2017)
Sertifikasi Certifications	• Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018, IRBA (2025) • Certified Risk Executive Registered (CREL) • Certified Merger & Acquisitions • Sertifikasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Certification of National Value Internalization
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 441 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 441
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions.



HERY MURAHMANTA
DIREKTUR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
DIRECTOR OF INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2025 52 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Kulon Progo, 14 September 1973 Kulon Progo, September 14, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Director of Infrastructure and Technology based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	27 Agustus 2025 - Sekarang (Periode Pertama) August 27, 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 MBA, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008-2010) • S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro, Semarang (1992-1998) • Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008-2010) • Bachelor of Managerial Economics, Universitas Diponegoro, Semarang (1992-1998)
Riwayat Jabatan Work Experience	• SVP Procurement, PT Pertamina (Persero) (2024-2025) • Pj SVP Procurement, PT Pertamina (Persero) (2024) • VP Shared Services Finance, PT Pertamina (Persero) (2020-2024) • Manager BP&D Finance, PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Manager Record to Report, PT Pertamina (Persero) (2018-2019) • Manager Account Payable, PT Pertamina (Persero) (2018) • Manager Finance RU IV, PT Pertamina (Persero) (2017) • SVP Procurement, PT Pertamina (Persero) (2024-2025) • Pj SVP Procurement, PT Pertamina (Persero) (2024) • VP Shared Services Finance, PT Pertamina (Persero) (2020-2024) • Manager BP&D Finance, PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Manager Record to Report, PT Pertamina (Persero) (2018-2019) • Manager Account Payable, PT Pertamina (Persero) (2018) • Manager Finance RU IV, PT Pertamina (Persero) (2017)
Sertifikasi Certifications	Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 oleh IRBA Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 by IRBA
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 443 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 443
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan • No concurrent positions.



MIRZA MAHENDRA
DIREKTUR STRATEGI DAN PENGEMBANGAN BISNIS
DIRECTOR OF STRATEGY AND BUSINESS DEVELOPMENT

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-Present

Usia Age	44 tahun per 31 Desember 2025 44 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 3 Februari 1981 Jakarta, February 3, 1981
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Director of Business Strategy and Development based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	27 Agustus 2025 - Sekarang (Periode Pertama) August 27, 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 MBA, Universitas Prasetiya Mulya (2021) • S3 Teknik Kimia, Universitas Indonesia (2015) • S2 Teknik Gas, Universitas Indonesia (2008) • S1 Teknik Mesin, Universitas Trisakti (2003) • Master of Business Administration, Universitas Prasetiya Mulya (2021) • PhD in Chemical Engineering, Universitas Indonesia (2015) • Master of Gas Engineering, Universitas Indonesia (2008) • Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Trisakti (2003)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Plt Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas (Februari-Agustus 2025) • Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas, (2024-Agustus 2025) • Komisaris, PT Pertamina Hulu Indonesia, (2022-2025) • Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Ditjen Migas, (2022-2024) • Inspektur IV, Kementerian ESDM (2021-2022) • Risk Management Monitoring Committee, PT Angkasa Pura II (Persero) (2020-2022) • Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hulu Migas, Ditjen Migas (2018-2021) • Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM (2015-2018) • Interim Director of Oil and Gas Downstream Business Development, Directorate General of Oil and Gas (February - August 2025) • Director of Oil and Gas Program Development, Directorate General of Oil and Gas (2024 - August 2025) • Commissioner, PT Pertamina Hulu Indonesia, (2022-2025) • Director of Oil and Gas Engineering and Environment, Directorate General of Oil and Gas (2022-2024) • Inspector IV, Ministry of Energy and Mineral Resources (2021-2022) • Risk Management Monitoring Committee, PT Angkasa Pura II (Persero) (2020-2022) • Head of Sub-Directorate of Oil and Gas Upstream Safety, Directorate General of Oil and Gas (2018-2021) • Head of Sub-Directorate of Oil and Gas Downstream Safety, Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2015-2018)
Sertifikasi Certifications	• Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 • Professional Engineer Competency Certificate (ITB & Persatuan Insinyur Indonesia | Indonesian Engineers Association), 2024
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 442-443 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 442-443
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions.



ALDIANSYAH IDHAM
DIREKTUR KOMERSIAL
DIRECTOR OF COMMERCE

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2025 47 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Medan, 04 November 1978 Medan, November 04, 1978
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Komersial, berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Director of Commerce based on the Resolution of Extraordinary GMS 2025 on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	2025 - Sekarang (Periode Pertama) 2025 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Elektro, Universitas Medan Area (2006) • Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Medan Area (2006)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Operasi PT PGAS Solution (2021 - Agustus 2025) • Senior Advisor, Health and Safety, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, (2020-2021) • Division Head, Government and Community Relations PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018-2020) • Advisor, Government Relations, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2016-2017) • Director of Operations, PT PGAS Solution (2021 - August 2025) • Senior Advisor, Health and Safety, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, (2020-2021) • Division Head, Government and Community Relations PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018-2020) • Advisor, Government Relations, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2016-2017)
Sertifikasi Certifications	Profesional Engineer Competency - "Insinyur Profesional Utama Executive Professional Engineer" - Fakultas Teknik UGM/Yogyakarta - Tahun 2025 Professional Engineer Competency - "Insinyur Profesional Utama Executive Professional Engineer" - Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada/Yogyakarta - 2025
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 441-442 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 441-442
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan • No concurrent positions.



ERI SURYA KELANA
DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025-Present

Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2025 54 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Padang, 21 Maret 1971 Padang, March 21, 1971
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025. First appointed as Director of Risk Management based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 27, 2025.
Periode Jabatan Term of Office	27 Agustus 2025 - sekarang (Periode Pertama) August 27, 2025 - present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2002) • S1 Akuntansi, Universitas Trisakti (1996) • Master of Administrative Science, Universitas Indonesia (2002) • Bachelor of Accounting, Universitas Trisakti (1996)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Group Head, Risk Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2022-2023) • Division Head, Treasury PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2022) • Sr. Advisor, Revenue Assurance PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2021-2022) • Direktur Keuangan dan Administrasi PT Gagas Energy Indonesia (2019-2021) • Senior Executive Officer, Taxation Direktorat Keuangan (2018-2019) • Sr. Officer, Taxation Direktorat Keuangan (2017-2018) • Direktur Keuangan dan Administrasi, PT PGN LNG Indonesia (2016-2017) • Direktur, PT PGN LNG Indonesia (2015-2016) • Direktur Keuangan dan Administrasi, PT PGN LNG Indonesia (2013-2015) • Direktur Keuangan, PT Saka Energi Indonesia (2011-2013) • Group Head, Risk Management, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2022-2023) • Division Head, Treasury, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2022) • Sr. Advisor, Revenue Assurance, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2021-2022) • Director of Finance and Administration, PT Gagas Energy Indonesia (2019-2021) • Senior Executive Officer, Taxation, Directorate of Finance (2018-2019) • Sr. Officer, Taxation, Directorate of Finance (2017-2018) • Director of Finance and Administration, PT PGN LNG Indonesia (2016-2017) • Director, PT PGN LNG Indonesia (2015-2016) • Director of Finance and Administration, PT PGN LNG Indonesia (2013-2015) • Director of Finance, PT Saka Energi Indonesia (2011-2013)
Sertifikasi Certifications	• Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified GRC Executive Officer), CRMS Indonesia (2025) • Pelatihan & Sertifikasi Ulang Manajemen Risiko (Certified Risk Professional), PT IRBA Group Indonesia (2025) • Training and Certification for Contract Designers (Certified GRC Executive Officer), CRMS Indonesia (2025) • Risk Management Retraining and Certification (Certified Risk Professional), PT IRBA Group Indonesia (2025)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 444-445 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 444-445
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions.



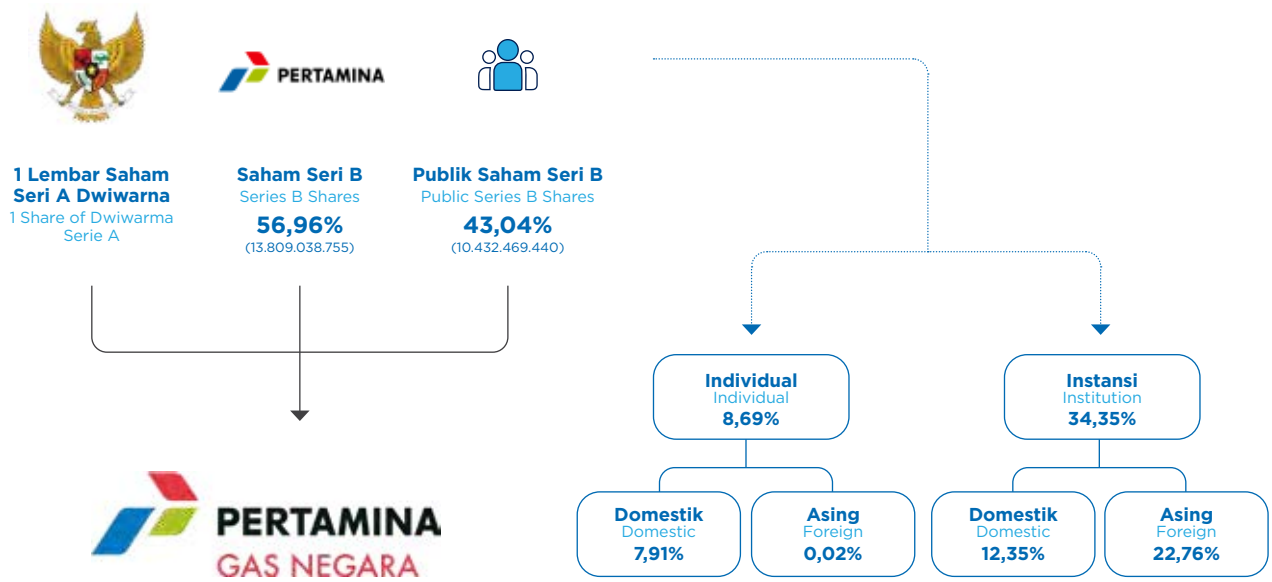
RACHMAT HUTAMA
DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS
DIRECTOR OF HR AND BUSINESS SUPPORT

27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 - Present

Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2025 52 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 13 Juli 1973 Jakarta, July 13, 1973
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed as Director of Human Resources and Business Support based on the Resolution of Annual GMS on May 30, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	2024 - Sekarang (Periode Pertama) 2024 - Present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Magister Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia (2021) • Sarjana Hukum Perdata Dagang, Universitas Diponegoro (1996) • Master of Laws, Universitas Al-Azhar Indonesia (2021) • Bachelor of Commercial Civil Law, Universitas Diponegoro (1996)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018-2024) • Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa (2019) (Purnawaktu) • Plt. Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2017-2018) • Division Head Legal, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2014-2017) • Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2018-2024) • President Commissioner, PT Permata Karya Jasa (2019) (Full-time) • Interim Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2017-2018) • Legal Division Head, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2014-2017)
Sertifikasi Certifications	Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Pelatihan Direksi dapat dilihat pada bab GCG halaman 443-444 Information on training for the Board of Directors can be found in the GCG chapter page 443-444
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Tidak ada rangkap jabatan. • No concurrent positions. **Perusahaan Lainnya** | Other Company • Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di perusahaan tercatat lainnya. • Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees in any other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Tidak ada rangkap jabatan • No concurrent positions.



INFORMASI PEMEGANG SAHAM
INFORMATION OF SHAREHOLDERS



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Total jumlah saham PGN yang ditempatkan dan disetor penuh hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar saham.

PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% (lima puluh enam koma sembilan enam persen) saham Seri B Perseroan dan Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa.

Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahtangankan, memiliki hak-hak istimewa dalam hal perubahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan likuidasi Perusahaan.

Adapun untuk pemegang saham publik berjumlah 43,04% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan rincian kepemilikan pemegang saham individual sebesar 8,69% dan pemegang saham instansi sebesar 34,35%.

SHAREHOLDERS COMPOSITION

PGN had a total of 24.241.508.196 (twenty-four billion two hundred forty-one million five hundred eight thousand one hundred ninety-six) issued and fully paid-up shares as of December 31, 2025.

PT Pertamina (Persero) is a majority shareholder, owning 56.96% (fifty-six point nine six percent) of Series B shares of the Company, and The Republic of Indonesia has one Series A Dwiwarna share with special rights.

Series A Dwiwarna shares are non-transferable, have special rights in terms of changes in capital, appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, changes to the Articles of Association, merger, consolidation, acquisition, dissolution, and liquidation of the Company.

Meanwhile, public shareholders represent 43.04% of the total issued and fully paid-up shares, with details of individual shareholder and institutional shareholder ownership amounting to 8.69% and 34.35%, respectively.

Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia

Share Ownership of the Republic of Indonesia

No	Pemegang Saham Shareholder	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding (%)	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding (%)
1	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1	0	1	0

Kepemilikan Saham PGN yang Mencapai 5% atau Lebih

PGN Share Ownership with 5% or More

No	Pemegang Saham Shareholder	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding (%)	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding (%)
1	PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96	13.809.038.755	56,96

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi (Secara Langsung)

Selama tahun 2025, terdapat pembelian saham oleh sebagian anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN, sebagaimana yang diungkapkan pada tabel di bawah ini:

Direct Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2025, several members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PGN made purchases of shares, as disclosed in the following table:

Nama Name	Jabatan dan Periode Jabatan Position and Term of Office	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership(%) (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership(%) (%)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners **Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025** / Period of January 1 – August 27, 2025					
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	0	0	0	0
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	1.016.000	0,0041912	0	0
Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	886.700	0,0036578	0	0
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0

Nama Name	Jabatan dan Periode Jabatan Position and Term of Office	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership(%) (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership(%) (%)
Dewan Komisaris / Board of Commissioners **Periode 27 Agustus 2025 - sekarang** / Period of August 27, 2025 – present					
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	0	0	0	0
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	0	0	0	0
Direksi / Board of Directors **Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025** / Period of January 1 – August 27, 2025					
Arief S. Handoko	Direktur Utama President Director	472.200	0,0019479	0	0
Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director Infrastructure and Technology	401.400	0,0016558	0	0
Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	1.861.300	0,0076782	0	0
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	95.900	0,0003956	0	0
Ratih Esti Prihatini	Direktur Komersial Director of Commerce	95.900	0,0003956	0	0
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	0	0	0	0
Direksi / Board of Directors **Periode 27 Agustus 2025 - sekarang/** Period of August 27 2025 – present					
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Director	0	0	0	0
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	2.500	0,0000103	2.500	0,0000103
Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	0	0	0	0
Catur Dermawan	Direktur Keuangan Director of Finance	0	0	0	0
Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Director of Commerce	0	0	60.000	0,0002475
Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	0	0	0	0
Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director Infrastructure and Technology	0	0	0	0

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi (Secara Tidak Langsung)

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN yang memiliki saham PGN secara tidak langsung.

Indirect Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Until December 31, 2025, no members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of PGN owned indirect shares of PGN.

Klasifikasi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat (Kepemilikan Saham Masing-Masing Kurang dari 5%)

Classification of Community Shareholder Groups (Each Share Ownership Less Than 5%)

No	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
		Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Shareholding (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Shareholding (%)
Pemodal Domestik Domestic Investor							
1	Perseorangan Indonesia Individual Indonesian	77.900	2.606.351.768	10,75%	68.522	1.918.555.166	7,91%
2	Koperasi Cooperative	5	158.800	0,00066%	2	45.600	0,00019 %
3	Yayasan Foundation	16	25.312.300	0,10442%	15	19.312.900	0,07967%
4	Dana Pensiun Pension Fund	97	1.213.138.900	5,00439%	90	1.235.489.500	5,09659%
5	Asuransi Insurance	124	459.276.358	1,89459%	168	576.934.000	2,37994 %
6	Bank	1	2.500.000	0,01%	1	2.500.000	0,01%
7	Perseroan Terbatas Limited Company	176	582.404.924	2,40%	157	567.287.875	2,34059%
8	Lembaga Pemerintahan Government Institution	1	500	0,00%	1	500	0,00%
9	Reksadana Mutual Fund	156	495.118.857	2,04%	178	591.341.148	2,43937%
	Subtotal	**78.476**	**5.384.262.407**	**22,21%**	**69.134**	**4.911.466.689**	**20,261%**

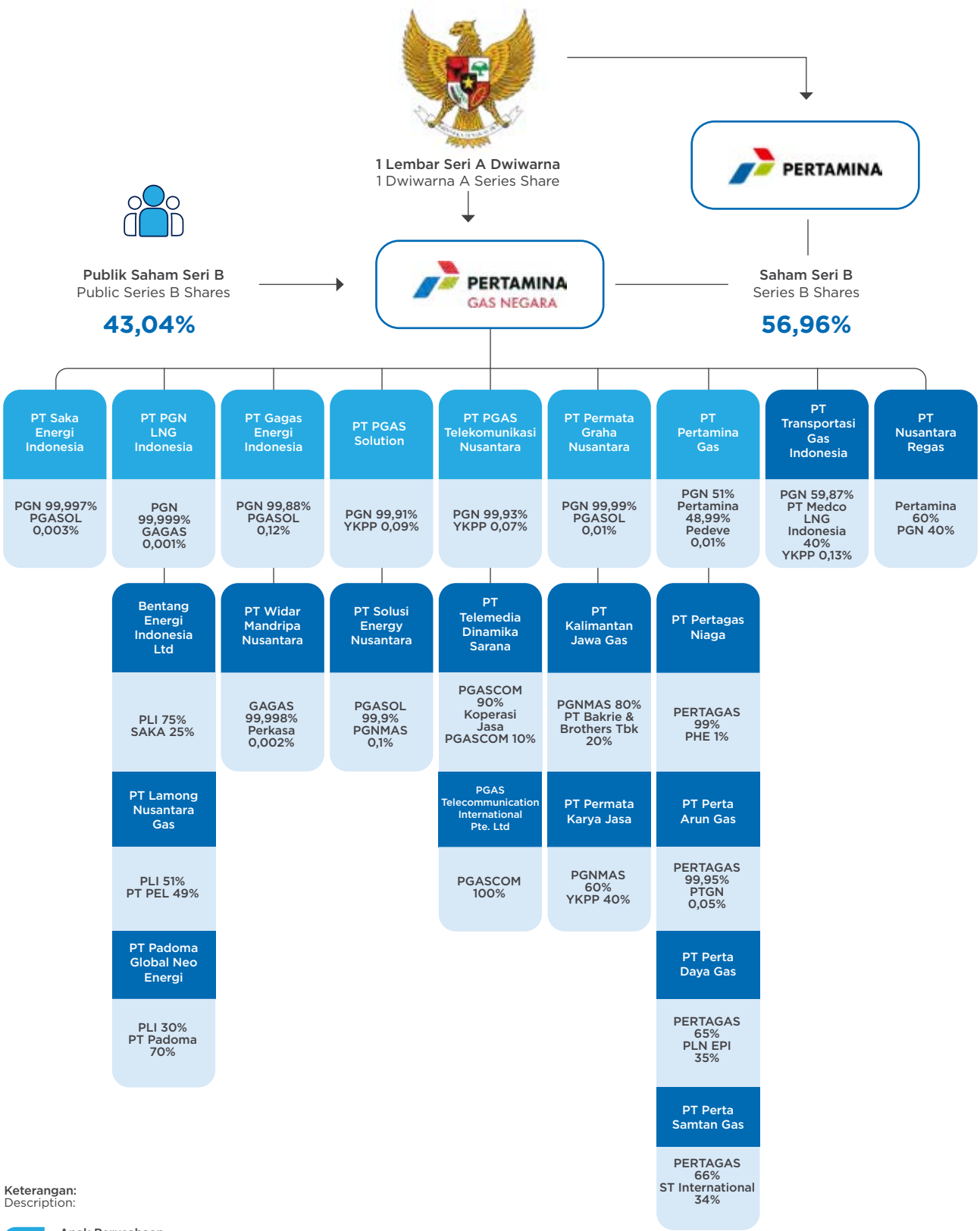
No	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025 January 1, 2025 Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Shareholding (%)	31 Desember 2025 December 31, 2025 Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Shareholding (%)
Pemodal Asing Foreign Investors							
10	Perorangan Asing Individual Foreign	283	4.964.200	0,02%	273	4.046.500	0,01669%
11	Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	488	5.043.242.833	20,81%	512	5.516.956.251	22,75830%
	Subtotal	**771**	**5.048.207.033**	**20,83%**	**785**	**5.521.002.751**	**22,775%**
Total		**79.247**	**10.432.469.440**	**43,04%**	**69.921**	**10.432.469.440**	**43,04%**

10 Pemegang Saham Terbesar PGN Per 31 Desember 2025

PGN 10 Largest Shareholders as of December 31, 2025

No	Nama Name	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding (%)	Status
1	PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96%	Pengendali | Controlling
2	BPJS Ketenegakerjaan	1.126.569.100	4,65%	Publik | Public
3	PT Panin Sekuritas	453.729.600	1,87%	Publik | Public
4	iShares	388.545.807	1,60%	Publik | Public
5	Vanguard	371.743.986	1,53%	Publik | Public
6	Petronas	307.260.500	1,27%	Publik | Public
7	Lo Kheng Hong	234.886.100	0,97%	Publik | Public
8	Blackrock	222.706.000	0,92%	Publik | Public
9	UBS	211.269.229	0,87%	Publik | Public
10	State Street	165.988.540	0,68%	Publik | Public

STRUKTUR SUBHOLDING GAS
SUBHOLDING GAS STRUCTURE



Keterangan:
Description:

- Anak Perusahaan
  Subsidiary
- Afiliasi
  Affiliate

ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
INFORMATION ON SUBSIDIARY ENTITIES AND AFFILIATES

Nama Perusahaan Company Name	**Anak Perusahaan** Subsidiaries Afiliates	**Komposisi Pemegang Saham** Composition of Shareholders	**Bidang Usaha** Nature of Businesses	**Jumlah Aset 2025 (juta USD)** 2025 Total Assets (million USD)	**Status Operasi** Operational Status
PT Pertamina Gas	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 51% • PT Pertamina (Persero) – 48,99% • PT Pertamina Pedeve Indonesia – 0,01%	Transportasi Minyak dan Gas Bumi Transportation of Oil and Natural Gas	2.377	Beroperasi Operating
PT Saka Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,997% • PT PGAS Solution – 0,003%	Hulu Minyak dan Gas Bumi Upstream Oil and Gas	1.039	Beroperasi Operating
PT Gagas Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,88% • PT PGAS Solution - 0,12%	Bisnis SPBG, CNG dan LNG Retail Gas Refueling Station Business, CNG and LNG Retail	81	Beroperasi Operating
PT PGN LNG Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,999% • PT Gagas Energi Indonesia - 0,001%	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastructure	581	Beroperasi Operating
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,93% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara - 0,07%	ICT dan Operation Technology ICT and Operation Technology	51	Beroperasi Operating
PT PGAS Solution	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan – 99,91% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara - 0,09%	Enjinering, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan Engineering, Construction, Operation & Maintenance	124	Beroperasi Operating
PT Permata Graha Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan - 99,99% • PT PGAS Solution - 0,01%	Pengelolaan Aset dan Fasilitas, Entrepreneur Real Estate, Design & Build Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Design & Build	59	Beroperasi Operating
PT Transportasi Gas Indonesia	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 59,87% • PT Medco LNG Indonesia. - 40% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara - 0,13%	Transportasi Gas Bumi Transportation of Natural Gas	291	Beroperasi Operating
PT Nusantara Regas	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 40% • PT Pertamina (Persero) - 60%	Bisnis Jasa Regasifikasi & Pengembangan Infrastruktur LNG Regasification Business Services, LNG Infrastructure Development	281	Beroperasi Operating
PT Kalimantan Jawa Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara- 80% • PT Bakrie & Brothers Tbk - 20%	Transportasi Gas Bumi Transportation of Natural Gas	12	Beroperasi Operating
PT Permata Karya Jasa	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara-60% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara - 40%	Penyedia Tenaga Kerja Labor Service Provider	22	Beroperasi Operating
PT Solusi Energy Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Solution – 99,9% • PT Permata Graha Nusantara- 0,1%	Enjinering, Konsultasi, dan Jasa Engineering, Consultant, and Services	14	Beroperasi Operating
PT Widar Mandripa Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT Gagas Energi Indonesia -99,998% • PT Permata Karya Jasa - 0,002%	Bisnis Kelistrikan Electricity Business	8	Beroperasi Operating

Nama Perusahaan Company Name	Anak Perusahaan Subsidiaries Afiliates	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	Bidang Usaha Nature of Businesses	Jumlah Aset 2025 (juta USD) 2025 Total Assets (million USD)	Status Operasi Operational Status
PT Telemedia Dinamika Sarana	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Telekomunikasi Nusantara - 90% • Koperasi Jasa PGASCOM - 10%	Telekomunikasi Telecommunication	7	Beroperasi Operating
PT Pertagas Niaga	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 99% • PT Pertamina Hulu Energi - 1%	Bisnis CNG, Penyimpanan CNG dan LNG Retail CNG Business, CNG Storage and LNG Retail	107	Beroperasi Operating
PT Perta Arun Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas – 99,95% • PT Pertagas Niaga – 0,05%	Penyediaan Infrastruktur LNG & Komersialisasi Infrastruktur LNG LNG Infrastructure Provider & LNG Infrastructure Commercialize	314	Beroperasi Operating
PT Perta-Samtan Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 66% • ST International - 34%	Pemrosesan LPG LPG Processing	126	Beroperasi Operating
PT Perta Daya Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas - 65% • PT PLN Energi Primer - 35%	Penyimpanan CNG untuk PLN CNG Storages for PLN	27	Beroperasi Operating
PT Gas Energi Jambi	Afiliasi Affiliate	• Perseroan - 40% • PT Wahana Catur Mas - 40% • PT Jambi Indoguna Internasional - 10% • PT Bukaka Corporindo - 10%	Pengangkutan Gas Bumi Natural Gas Transmission	N/A	Tidak Beroperasi Not Operating
PT Baskara Asri Ghas	Afiliasi Affiliate	• Perseroan – 0,05% • PT Asri Prima Baskara – 93% • PT Banten Global Synergi – 4,304% • Izma Agyano Bursman – 2,65%	Jasa Pengangkutan, Perdagangan dan Pertambangan Gas Bumi Transportation, Trading and Mining Services	7*	Beroperasi Operating
Bentang Energi Indonesia Ltd	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 75% • PT Saka Energi Investasi – 25%	Perdagangan dan Transportasi Minyak dan LNG Trading and Transportation of Oil and LNG	<1	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Padoma Global Neo Energi	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 30% • PT Papua Doberai Mandiri - 70%	Penyediaan LNG Provision of LNG	<1*	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Lamong Nusantara Gas	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia - 51% • PT Pelindo Energi Logistik - 49%	Pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian Terminal LNG Construction, Management and Operation of LNG Terminal	3	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PGAS Telecommunication International Pte. Ltd	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Telekomunikasi Nusantara - 100%	Industri Informasi, Komunikasi & Teknologi, Penjualan *leased circuit service*, Transit IP, Layanan Internet Information, Communication & Technology Industry, Sales of Leased Circuit Service, IP Transit, Internet Service	5	Beroperasi Operating

* Angka tahun 2024. Angka tahun 2025 tersedia setelah tanggal penerbitan Laporan Tahunan 2025 dan akan disajikan dalam Laporan Tahunan 2026.
* Figures in 2024. The 2025 figures are available after the publication date of the 2025 Annual Report and will be presented in the 2026 Annual Report.

PROFIL ENTITAS ANAK

PROFILE OF SUBSIDIARY

PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	23 Februari 2007	February 23, 2007
Kantor Pusat Head Office	Grha Pertamina, Pertamax Tower, Lantai 20-23, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat, 10110 Indonesia.	Graha Pertamina, Pertamax Tower, 20th-23th Floor, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Central Jakarta, 10110 Indonesia
Kontak Contact	Telp. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com	Tel. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com
Bidang Usaha Industry	Transportasi Minyak dan Gas Bumi	Transportation of Oil and Natural Gas
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Dua Anak Perusahaan dan Dua Afiliasi	Two Subsidiaries and Two Affiliates

PT Pertamina Gas (Pertagas) bergerak di bidang usaha transportasi gas, transportasi minyak, pemrosesan, distribusi gas, niaga gas bumi dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Perusahaan melakukan kegiatan usaha pemrosesan gas bumi melalui dua LPG Plant yakni LPG Plant ENP yang bekerja sama dengan PT Energi Nusantara Perkasa, dan LPG Plant Sumatra Selatan yang dikelola oleh PT Perta-Samtan Gas.

Pertagas juga melakukan kegiatan usaha penyimpanan CNG, pengoperasian dan perawatan fasilitas CNG untuk PLN yang dijalankan oleh PT Perta Daya Gas. Sedangkan kegiatan usaha regasifikasi LNG dijalankan oleh PT Perta Arun Gas melalui pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG di Arun Lhokseumawe Aceh sejak awal 2015.

Perusahaan memiliki wilayah operasional kerja di seluruh Indonesia, meliputi pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah kerja Pertagas terbagi dalam delapan wilayah operasional, dengan enam daerah operasi menangani jaringan pipa gas bumi, dan dua daerah operasi menangani jaringan pipa minyak.

PT Pertamina Gas (Pertagas) is engaged in the gas transportation, oil transportation, processing, gas distribution, natural gas trading business and other businesses related to natural gas and its derivative products. The Company carries out natural gas processing activities through two LPG Plants, the LPG Plant ENP in collaboration with PT Energi Nusantara Perkasa and the LPG Plant South Sumatra managed by PT Perta-Samtan Gas.

Pertagas also conducts CNG storage businesses, the operation and maintenance of CNG facilities for PLN, operated by PT Perta Daya Gas. Meanwhile, LNG regasification activities are operated by PT Perta Arun Gas through the LNG Receiving and Regasification Terminal in Arun, Lhokseumawe, Aceh, which has been in operation since early 2015.

The Company has operational work areas in Indonesia, covering the islands of Sumatra, Java, and Kalimantan. The Company's work areas are divided into eight operational areas, with six operational areas handling natural gas pipeline networks, and the other two handling oil pipeline networks.

PT SAKA ENERGI INDONESIA (SEI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 26 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 26th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com	Tel. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com
Bidang Usaha Industry	Hulu Minyak dan Gas Bumi	Upstream Oil and Gas
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	28 Anak Perusahaan dan Lima Afiliasi	28 Subsidiaries and Five Affiliates

PT Saka Energi Indonesia (SAKA) melaksanakan usaha dan investasi di bidang hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan usaha di bidang minyak dan gas alam, CBM, serta sumber energi lainnya.

Hingga akhir tahun 2025, SAKA memiliki hak partisipasi (*Participating Interest*) atas sepuluh PSC di Indonesia dan satu blok *shale gas* Amerika Serikat. Enam diantaranya dioperasikan penuh oleh SAKA dengan kepemilikan *participating interest* 100%, yaitu Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC, Sangkar PSC, Pekawai Gross Split dan West Yamdena Gross Split.

PT Saka Energi Indonesia (SAKA) runs business and investment in the upstream Oil and Natural Gas (Migas) sector, including exploration, exploitation, business development activities of oil and gas, CBM, and other energy sources.

As of the end of 2025, SAKA holds Participating Interest in ten PSCs in Indonesia and one gas shale block in the United States. Six of the assets are fully operated by SAKA with 100% participating interest ownership, namely Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC, Sangkar PSC, Pekawai Gross Split, and West Yamdena Gross Split.

PT GAGAS ENERGI INDONESIA (GAGAS)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 9-10 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 9th-10th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 2907 1415/2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 Email: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id	Tel. +62 21 2907 1415/2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 E-mail: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id
Bidang Usaha Industry	Bisnis SPBG, CNG dan LNG Retail	Gas Refueling Station Business, CNG and LNG Retail
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Satu Anak Perusahaan	One Subsidiary

PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS) bergerak dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi serta energi lainnya. GAGAS menyediakan gas bumi sektor transportasi, industri dan sektor kegiatan usaha komersial melalui CNG dan mini LNG, SPBG dan *Mobile Refueling Unit (MRU).*

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dan memperluas distribusi dan utilisasi gas bumi untuk sektor transportasi (Gasku), GAGAS telah mengelola 11 SPBG dan empat MRU serta mengelola tiga SPBG Pertamina dengan lokasi yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Batam. GAGAS terus melakukan inovasi dan memperluas pasar dengan menghadirkan produk CNG Cylinder dengan target pasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau industri kecil.

PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS) engaged in processing, transporting, storing, and trading oil and natural gas and other energy businesses. GEI supplies natural gas for the transportation, industrial and business activity sectors through CNG and mini LNG, SPBG, and Mobile Refueling Unit (MRU).

To support government programs and expand the distribution and utilization of natural gas for the transportation sector (Gasku), GAGAS now manages 11 SPBGs and four MRUs as well as manages three Pertamina SPBGs in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Lampung, and Batam. GAGAS continues to innovate and expand the market by presenting GNG Cylinder products with Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) or small industries as the markets.

PT PGAS TELEKOMUNIKASI NUSANTARA (PGASCOM)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	10 Januari 2007	January 10, 2007
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 3 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 3rd Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 6333 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id	Tel. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 633 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id
Bidang Usaha Industry	ICT dan Operation Technology	ICT and Operation Technology
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Dua Anak Perusahaan	Two Subsidiaries

PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) bergerak dalam bisnis jaringan telekomunikasi. Sebagai penyedia layanan ICT, PGASCOM memiliki layanan *connectivity, managed service*, dan *business solution* yang dapat digunakan oleh semua perusahaan dari kelas *large corporation* sampai ke *Small Medium Enterprise (SME).*

Produk dan layanan PGASCOM terdiri dari *connectivity* seperti IPLC dan DPLC, global internet dan internet akses yang disediakan melalui anak usahanya PT Telemedia Dinamika Sarana, layanan *business solution* seperti pengembangan aplikasi, video, *video conference*, infrastruktur IT maupun OT (SCADA), dan *managed service* baik untuk IT, SCADA, maupun *seat management*. PGASCOM juga mengembangkan usahanya untuk IoT seperti *smart office* maupun *smart home/building.*

PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) engaged in telecommunication network business. As an ICT service provider, PGASCOM offers connectivity services, managed services, business solutions to businesses of all sizes, from large corporation to Small Medium Enterprise (SME)

PGASCOM products and services consists of connectivity such as IPLC dan DPLC, global internet dan internet access offered through its subsidiary PT Telemedia Dinamika Sarana, business solution services such as application development, video, video conference, IT and OT (SCADA) infrastructure, and managed services for IT, SCADA, seat management. PGASCOM is also developing its businesses for IoT such as smart offices and smart homes/buildings.

PT PGAS SOLUTION (PGASOL)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	6 Agustus 2009	August 6, 2009
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +6 2 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id	Tel. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +62 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id
Bidang Usaha Industry	Enjinering, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan	Engineering, Construction, Operation & Maintenance
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Satu Anak Perusahaan	One Subsidiary

PT PGAS Solution (PGASOL) mempunyai empat fokus bidang utama, yaitu: *Engineering Procurement Construction (EPC), Operation and Maintenance (O&M), Supply Chain,* dan *Engineering*. PGASOL memegang peranan penting dalam bisnis PGN, khususnya dalam hal kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan pipa dan infrastruktur PGN di seluruh area operasi di Indonesia, guna menjamin keandalan jaringan dalam penyaluran gas bumi dari hulu sampai ke pelanggan terakhir PGN.

PT PGAS Solution (PGASOL) has four primary areas of focus: Engineering Procurement Construction (EPC), Operation and Maintenance (O&M), Supply Chain, and Engineering. PGASOL plays an important role in PGN's business, particularly in operations and maintenance activities of PGN's pipeline networks and infrastructure throughout Indonesia's operational areas, ensuring network reliability in distributing natural gas from upstream to PGN's final customers.

PT PERMATA GRAHA NUSANTARA (PGNMAS)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	24 April 2014	April 24, 2014
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 6-8 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 6th-8th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id	Tel. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id
Bidang Usaha Industry	Pengelolaan Aset & Fasilitas, *Enterpreneur Real Estate, Design & Build*	Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Design & Build
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Dua Anak Perusahaan	Two Subsidiaries

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) memiliki kegiatan usaha di bidang Pengelolaan Aset & Fasilitas, *Enterpreneur Real Estate*, *Design & Build*. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PGNMAS bersinergi dengan entitas di dalam Pertamina Group untuk menyediakan jasa di bidang *Facility Management*, Manajemen Kearsipan, dan Penyediaan Jasa Transportasi.

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) has business activities in the fields of Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Design & Build. In running its business, PGNMAS creates synergy with entities within Pertamina Group to provide services in the field of Facility Management, Archives Management, and Transportation Services Provision.

PT PGN LNG INDONESIA (PLI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	26 Juni 2012	June 26, 2012
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 29 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 29th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, South Jakarta 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id	Tel. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/ 2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id
Bidang Usaha Industry	LNG *Wholesales* & Infrastruktur LNG	LNG Wholesales & LNG's Infrastucture
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	Tiga Anak Perusahaan	Three Subsidiaries

PT PGN LNG Indonesia (PLI) bergerak di bidang *Liquefied Natural Gas*, namun tidak terbatas pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Didirikan pada tahun 2012, sejak tahun 2014 PLI telah mengoperasikan FSRU Lampung yang berlokasi di Labuhan Maringgai, dengan kapasitas 1,5–1,7 MTPA dan volume penyaluran mencapai 240 MMscfd. FSRU Lampung terintegrasi dengan fasilitas pipa transmisi SSWJ, yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi di Sumatra dengan pelanggan potensial terbesar di Jawa Barat.

PT PGN LNG Indonesia (PLI) engaged in the Liquefied Natural Gas sector, but also runs the processing, transportation, storing, and trading business among many. Founded in 2012, since 2014 PLI has operated FSRU Lampung located in Labuhan Maringgai, with a capacity of 1,5–1,7 MTPA and a distribution volume of 240 MMscfd. FSRU Lampung is integrated into the SSWJ transmission pipeline facility, connecting natural gas sources in Sumatra with the largest potential customers in West Java.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Pada 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) saham.

Jumlah saham terdiri dari 475.309.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu) saham dari divestasi saham Negara Republik Indonesia, dan 820.987.000 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham baru, dengan total lembar saham dicatatkan sebanyak 4.320.987.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham.

Harga penawaran umum saham senilai Rp1.500 per lembar saham. Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan ”PGAS”.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Hingga akhir 2007 jumlah saham dicatatkan Perseroan meningkat sebanyak 218.898.805 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima) saham menjadi 4.539.885.805 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima) saham, sebagai akibat pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan dan *Management Stock Option Plan* (MSOP).

Pada 15 Januari sampai 14 Februari 2008, *Exercise Window Employee Stock Option Plan* (ESOP) tercatat 54.012.338 (lima puluh empat juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hak opsi saham yang dibagikan.

Dari jumlah tersebut, tercatat 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) opsi saham dieksekusi dan menghasilkan saham Seri B baru sebanyak 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham.

Dengan demikian, total jumlah saham dicatatkan Perseroan bertambah menjadi 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham.

On December 5, 2003, the Company received an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to carry out an Initial Public Offering of Shares to the public for its 1,296,296,000 (one billion two hundred ninety six million two hundred ninety six thousand) shares.

The number of shares consists of 475,309,000 (four hundred seventy five million three hundred nine thousand) shares from the divestment of shares of the Government of the Republic of Indonesia and 820,987,000 (eight hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) new shares, with a total share of 4,320,987,000 (four billion three hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) shares.

The public offering price of shares was Rp1.500 per share. The Company’s shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange) on December 15, 2003 under ”PGAS” ticker code.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Until the end of 2007 the Company’s shares had increased in number by 218,898,805 (two hundred eighteen million eight hundred ninety eight thousand eight hundred five) shares to 4,539,885,805 (four billion five hundred thirty nine million eight hundred eighty five thousand eight hundred five) shares as a result of the conversion of Government debt to the Company and the Management Stock Option Plan (MSOP).

Between January 15 and February 14, 2008, the Employee Stock Option Plan (ESOP) Exercise Window 54,012,338 (fifty four million twelve thousand three hundred thirty eight) share option rights were distributed.

Of this figure, 53,551,388 (fifty three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) stock options were exercised that resulted in 53,551,388 (fifty three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) new Series B shares.

As a result, the total number of shares listed by the Company rose to 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety three million four hundred thirty seven thousand one hundred ninety three) shares.

PEMECAHAN SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN pada 13 Juni 2008, menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) PGAS dengan rasio 1 (satu) saham dengan nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ditukar dengan 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang semula 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham menjadi 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham. Pecahan saham baru berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia pada 4 Agustus 2008. Pada tahun 2025, Perseroan tidak melakukan pemecahan saham.

PEMBELIAN SAHAM KEMBALI

Berdasarkan keputusan RUPSLB PGN pada 22 Desember 2008, Perseroan melakukan pembelian kembali atas saham yang beredar sebesar 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham pada 24 Oktober 2008.

Dengan pembelian saham kembali, maka pada akhir 2008 Perseroan memiliki 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham sebagai Saham *Treasury,* dan total jumlah saham beredar menjadi sebesar 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham.

Hingga akhir 2009, jumlah saham Perseroan meningkat sebanyak 1.274.322.231 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) saham, sebagai akibat dari pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan pada April dan Oktober 2009 hingga total jumlah saham dicatatkan Perseroan menjadi 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham.

Jumlah saham akhir tahun buku 2010 sampai akhir tahun 2015 adalah 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham, dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 13.809.038.756 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham (56,96%) dan publik sebesar 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham (43,04%).

STOCK SPLIT

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PGN on June 13, 2008, a nominal share value split (stock split) of PGAS was approved with a ratio of 1 (one) share with a nominal value of Rp500 (five hundred rupiah) per share to 5 (five) shares with a nominal value of Rp 100 (one hundred rupiah) per share.

Accordingly, the number of shares multiplied from previously 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety three million four hundred thirty seven thousand one hundred ninety three) shares to 22,967,185,965 (twenty two billion nine hundred sixty seven million one hundred eighty five thousand nine hundred sixty five) shares. The new share split came into effect on the Indonesia Stock Exchange on August 4, 2008. In 2025, the Company did not undertake any stock split.

SHARE BUYBACK

Based on the Resolution of PGN's EGMS on December 22, 2008, the Company repurchased 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) shares on October 24, 2008.

With the buyback, the Company had 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) shares as Treasury Shares at the end of 2008 and the total number of outstanding shares became 22,967,185,965 (twenty two billion nine hundred sixty seven million one hundred eighty five thousand ninety hundred sixty five) shares.

Until the end of 2009, the Company's total shares increased by 1,274,322,231 (one billion two hundred seventy four million three hundred twenty two thousand two hundred thirty one) shares, as a result of the conversion of Government debt to the Company in April and October 2009, bringing the total number of listed shares to 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred ninety six) shares.

Total shares at the end of the 2010 financial year to the end of 2015 was 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred ninety six) shares with the ownership of the Government of the Republic of Indonesia amounting to 13,809,038,756 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred fifty six) shares (56.96%) and the public holding 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty two million four hundred sixty nine thousand four hundred forty) shares (43.04%).

Jumlah saham publik terdiri dari 10.430.619.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh) saham *free float* dan 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham *Treasury*. Saham *Treasury* sejumlah 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham Seri B, telah dijual kembali seluruhnya pada Maret 2016.

Pada 2018 terjadi pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia di Perseroan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka pembentukan Holding BUMN Migas, dengan Negara tetap mempertahankan kepemilikan 1 saham Seri A Dwiwarna sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Setelah pengalihan seluruh saham Seri B Negara kepada PT Pertamina (Persero), maka PT Pertamina (Persero) menggantikan kedudukan Negara sebagai pemegang saham pada Perseroan dengan kepemilikan sebesar 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham, dan kepemilikan publik 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham.

The number of public shares consists of 10,430,619,440 (ten billion four hundred thirty million six hundred nineteen thousand four hundred forty) free float shares and 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) Treasury shares. 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) Series B Treasury shares were completely resold in March 2016.

In 2018, all Series B shares of the Republic of Indonesia in the Company were transferred to PT Pertamina (Persero) as part of the establishment of the Oil and Gas SOE Holding, while the State retained the ownership of 1 Series A Dwiwarna share as mandated by Government Regulation Number 72 of 2016 on Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 on Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

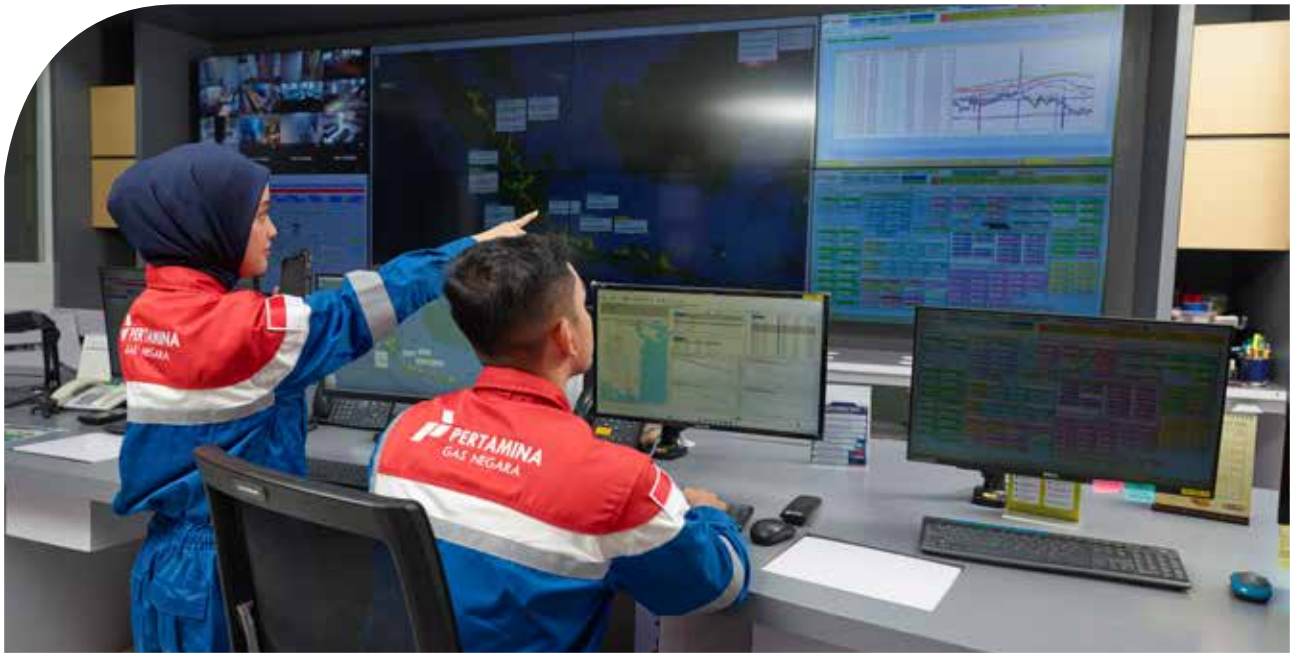
After the transfer of all of the State's Series B Shares to PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) took the position of the State as shareholder in the Company with ownership of 13,809,038,755 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred fifty five) shares, and public ownership of 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty two million four hundred sixty nine thousand four hundred forty) shares.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Shares Listing

No	**Aksi Korporasi** Corporate Actions	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Negara Republik Indonesia (lembar)** The State (shares)	**Pertamina (lembar)** (shares)	**Publik (lembar)** Public (shares)	**Treasury (lembar)** (shares)	**Total (lembar)** (shares)	**Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia** Percentage of Ownership by the State **(%)**	**Persentase Kepemilikan Pertamina** Percentage of Ownership by Pertamina **(%)**
1	Sebelum IPO Before IPO		3.500.000.000				3.500.000.000	100,00	
2	IPO (15 Desember 2003) dicatatkan di BEJ dan BES IPO (December 15, 2003) listed on the JSE and SSE								
	Divestasi Divestment		-864.198.000		864.198.000				
	Penerbitan Saham Baru tanpa HMETD Issuance of New Shares without HMETD	Rp500			820.987.000				
		Rp500	2.635.802.000		1.685.185.000		4.320.987.000	61,00	

No	**Aksi Korporasi** Corporate Actions	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Negara Republik Indonesia (lembar)** The State (shares)	**Pertamina (lembar)** (shares)	**Publik (lembar)** Public (shares)	**Treasury (lembar)** (shares)	**Total (lembar)** (shares)	**Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia** Percentage of Ownership by the State **(%)**	**Persentase Kepemilikan Pertamina** Percentage of Ownership by Pertamina **(%)**
3	Konversi DPP 1 (2004) Conversion of DPP 1 (2004)	Rp500	56.943.305						
	MSOP 1 (2005-2006)	Rp500			108.024.675				
	MSOP 2 (2006-2007)	Rp500			53.930.825				
		Rp500	2.692.745.305		1.847.140.500		4.539.885.805	59,31	
4	Divestasi Desember 2006 Divestment December 2006	Rp500	-185.802.000		185.802.000				
		Rp500	2.506.943.305		2.032.942.500		4.539.885.805	55,22	
5	MSOP 3 (2007-2008)	Rp500			53.551.388				
		Rp500	2.506.943.305		2.086.493.888		4.593.437.193	54,58	
6	Stock Split 5:1 (Agustus 2008) Stock Split 5:1 (August 2008)	Rp100	12.534.716.525		10.432.469.440		22.967.185.965	54,58	
7	Buy Back (Oktober 2008) Buy Back (October 2008)	Rp100			-1.850.000	1.850.000			
		Rp100	12.534.716.525		10.430.619.440	1.850.000	22.967.185.965	54,58	
8	Konversi DPP 2 tahap 1 (April 2009) Conversion of DPP 2 stages 1 (April 2009)	Rp100	992.724.172						
			13.527.440.697		10.430.619.440	1.850.000	23.959.910.137	56,46	
9	Konversi DPP 2 tahap 2 (Oktober 2009) Conversion of DPP 2 stages 2 (October 2009)	Rp100	281.598.059						
			13.809.038.756		10.430.619.440	1.850.000	24.241.508.196	56,96	
10	Penjualan Kembali saham Treasury (Maret 2016) Resale of Treasury shares March 2016	Rp100	13.809.038.756		10.432.469.440		24.241.508.196	56,96	
11	Pengalihan Saham Seri B Negara RI ke Pertamina 2018 Transfer of RI State Series B Shares to Pertamina 2018	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96
12	Jumlah Saham Akhir Tahun Number of Share End Year	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI
CHRONOLOGY OF BOND LISTING



Perseroan tidak menerbitkan obligasi pada tahun 2025. Sebelumnya Perseroan menerbitkan obligasi PGN dan obligasi SAKA yang telah lunas pada tahun 2024.

The Company did not issue any bonds in 2025. Previously, The Company issued PGN Bonds and SAKA Bonds, which were fully paid off in 2024.

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI
Chronology of Bond Listing

Penerbitan Obligasi Bonds Issuance	**Tanggal Penerbitan** Date of Issuance	**Nilai** Amount	**Bunga per Tahun** Annual Interest	**Wali Amanat** Trustee	**Pencatatan** Listing	**Peringkat (per 31 Desember 2024)** Rating (as of December 31, 2024)	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date
Obligasi PGN **PGN Bonds** Senior Unsecured Fixed Rate Notes	12 Mei 2014 May 12, 2014	USD1.350.000.000	5,125%	The Bank of New York Mellon	Singapore Exchange Securities Trading Limited	Moodys: Baa2 dengan | with *outlook Stable* Fitch Ratings: BBB- dengan | with *outlook Stable*	16 Mei 2024 May 16, 2024 **Status: Lunas** **Status: Paid in Full**
Obligasi SAKA **SAKA Bonds** Senior Unsecured Fixed Rate Notes	26 April 2017 April 26, 2017	USD625.000.000	4,45%	Citicorp International Limited	Singapore Exchange Securities Trading Limited	Moodys: B2 dengan | with *outlook Stable* Fitch Ratings: B+ dengan | with *outlook Stable*	5 Mei 2024 May 5, 2024 **Status: Lunas** **Status: Paid in Full**

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

INFORMATION ON PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS

PURWANTO SUSANTI DAN SURJA (A MEMBER FIRM OF ERNST AND YOUNG GLOBAL LIMITED)

Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Irwan Haswir
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Buliding, Tower 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Jasa Yang Diberikan Services Provided	• Jasa Audit Umum (Eksternal/ Independen) Laporan Keuangan Konsolidasian PGN dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025. General Audit Services (External and Internal) of the Consolidated Financial Statements of PGN and Subsidiaries for the Fiscal Year 2025. • Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil Terkait Program Tanggung Jawab Sosial Tahun Buku 2025. General Audit of the Financial Statements for the Small and Medium Enterprise Financing Program under the Corporate Social Responsibility for the Fiscal Year 2025. • Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA62) tahun buku 2025. Compliance Audit on Laws and Regulations and Internal Control (PSA62) for the Fiscal Year 2025. • Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial Direksi/Korporat dan KPI Individual Direksi/KPI Direktorat Tahun Buku 2025. Implementation of Agreed-Upon Procedures related to the Evaluation Reports of the Collegial Board of Directors/Corporate Key Performance Indicators (KPIs) and Individual Director/Directorate KPIs for the Fiscal Year 2025.
Jasa Lain Other Services	Tidak ada jasa lain yang diberikan kecuali yang telah disebutkan di atas. No other services were rendered aside from those listed above.
Biaya Fee	Rp13.400.000.000,- (belum termasuk PPN) Rp13,400,000,000,- (not including VAT)
Periode Penugasan Assignment Period	2025

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NAME AND ADDRESS OF CAPITAL MARKET SUPPORTING AGENCIES AND/OR PROFESSIONS

BIRO ADMINISTRASI EFEK
Securities Administration Bureau

Nama Perusahaan Company Name	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Pusat 10220 Telp. +62 21 570 9009, Fax. +62 21 570 9020
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Biro Administrasi Efek (Pengelolaan Daftar Pemegang Efek) Securities Administration Bureau (Securities Holder List Management)
Biaya Fee	Rp44.400.000 (termasuk pajak) Rp44,400,000 (including tax)
Periode Penugasan Assignment Period	Desember 2024 – November 2025 December 2024 – November 2025

BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange

Nama Perusahaan Company Name	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp. 0800-100-9000 Web: callcenter@idx.co.id
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Pencatatan Tahunan Saham Annual Stock Listing
Biaya Fee	Rp277.500.000 (termasuk pajak) Rp277,500,000 (including tax)
Periode Penugasan Assignment Period	Januari – Desember 2025 January – December 2025

KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Indonesia Central Securities Depository

Nama Perusahiaan Company Name	PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 2190, Indonesia Telp. +62 21 515 2855, Fax +62 21 5299 1199
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Jasa Kustodian Sentral dan Penyelesaian Transaksi Central Custodian Services and Transaction Settlement
Biaya Fee	Rp11.100.000 (termasuk pajak) Rp11,100,000 (including tax)
Periode Penugasan Assignment Period	Januari – Desember 2025 January – December 2025

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK
Securities Rating Agency

Nama Perusahaan Company Name	Moody's Investors Services Singapore Pte. Ltd. Sdf
Alamat Address	71 Robinson Road Singapore, 05-01, Singapore 068895 Telp. +91 (865) 792 0807
Jasa Yang Diberikan Services Provided	*Credit Rating* Credit Rating
Periode Penugasan Assignment Period	1 Juli 2025 – 30 Juni 2026 July 1, 2025 – June 30, 2026

Nama Perusahaan Company Name	Fitch Ratings Ltd
Alamat Address	30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN Telp. +44 20 3530 1000, Fax +44 20 3530 1000
Jasa Yang Diberikan Services Provided	*Credit Rating* Credit Rating
Periode Penugasan Assignment Period	1 Oktober 2025 – 30 September 2026 October 1, 2025 – September 30, 2026

LEMBAGA PEMERINGKAT ESG RISK RATING
ESG Risk Rating Agency

Nama Perusahaan Company Name	Morningstar - Sustainalytics
Alamat Address	Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Netherlands inquiries.EMEA@sustainalytics.com Telp. +44 20 4526 5640
Jasa Yang Diberikan Services Provided	*ESG Risk Rating* ESG Risk Rating
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2025 Fiscal Year 2025

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
LIST OF ASSOCIATION MEMBERSHIPS

PGN secara aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan asosiasi yang relevan, termasuk di bidang usaha gas bumi. Keanggotaan tersebut merupakan upaya PGN untuk mengikuti dinamika regulasi, standar industri, serta praktik terbaik yang mendukung penguatan kinerja bisnis sekaligus penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan dalam asosiasi, PGN juga memperluas kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan, khususnya terkait aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). PGN tidak memberikan kontribusi finansial di luar iuran keanggotaan yang bersifat rutin. Hingga akhir tahun 2025, PGN tercatat sebagai anggota dari beberapa asosiasi sebagai berikut:

PGN actively engages in various relevant organizations and associations, including those in the natural gas sector. Such memberships represent PGN's efforts to stay abreast of regulatory dynamics, industry standards, and best practices that support business performance enhancement and the implementation of sustainable finance principles.

Through its participation in associations, PGN also expands collaboration and synergy with stakeholders, particularly in relation to Environment, Social, and Governance (ESG) aspects. PGN does not make any financial contributions other than regular membership fees, As of the end of 2025, PGN is listed as a member of the following associates:

KEANGGOTAAN ASOSIASI
Association Membership

Nama Asosiasi Name of Association	Status Keanggotaan Membership Status
Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises Legal Forum	Anggota Aktif Active Member
Indonesian Gas Society	Anggota Aktif Active Member
Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Issuers Association	Anggota Aktif Active Member
National Investor Relations Institute	Anggota Aktif Active Member
Forum Human Capital Indonesia Indonesian Human Capital Forum	Anggota Aktif Active Member
The Institute of Internal Auditors Indonesia	Anggota Aktif Active Member
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Internal Oversight Unit Communication Forum	Anggota Aktif Active Member
Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia Indonesian Gas Association	Anggota Aktif Active Member
Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants	Anggota Aktif Active Member
Indonesian Industrial Hygiene Association	Anggota Aktif Active Member
Asosiasi Investor Relations Indonesia Indonesian Investor Relation Association	Anggota Aktif Active Member
Indonesia Carbon Capture and Storage Center	Anggota Aktif Active Member

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
INFORMATION ON COMPANY'S WEBSITE



Situs web PGN yakni www.pgn.co.id, dibuat dan dikelola dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang *website* emiten atau Perusahaan Publik. Situs web PGN dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memenuhi komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya transparansi kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

The Company's website, www.pgn.co.id, is developed and managed in accordance with FSA Regulation Number 8/POJK.04/2015 on issuer or Publicly Listed Company websites. Our website can be accessed in the Indonesian and English language to fulfill the Company's commitment to implementing Law Number 8 of 1995 on Capital Markets and to enhance Good Corporate Governance, especially transparency for shareholders, customers, the public, the Government, and other shareholders.

WWW.PGN.CO.ID

Informasi Information	**Menu**
Informasi pemegang saham Shareholder Information	"Investor - Pemegang Saham Kami" "Investor - Our Shareholders"
Pedoman Perilaku Etika Code of Conduct and Ethics	"Tentang Kami - Tata Kelola" "About Us - Governance"
Informasi terkait RUPS Information on GMS	"Investor - Rapat Umum Pemegang Saham" "Investor - General Meeting of Shareholders"
Informasi Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Company's Financial Information and Annual Financial Statements (the last 5 years)	"Investor – Informasi Keuangan" "Investor - Financial Information"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	"Tentang Kami - Dewan Komisaris dan Direksi" "About Us - Board of Commissioners and Directors "
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	"Tentang Kami - Tata Kelola" "About Us - Governance"
Informasi terkait Inisiatif Keberlanjutan PGN Information related to PGN's Sustainability Initiatives	"ESG" dan "Keberlanjutan" "ESG" and "Sustainability"

PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORT

04





PERWIRA SUBHOLDING GAS
GAS SUBHOLDING EMPLOYEES

Perwira Subholding Gas merupakan salah satu aset strategis untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis PGN dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk terus mendorong kapabilitas pekerja, melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan penyediaan ruang untuk berkembang.

PGN Group menjamin lingkungan kerja yang profesional, aman, dan nyaman bagi Perwira Subholding Gas, dengan memastikan ruang lingkup kerja yang bebas dari diskriminasi di tempat kerja. Hal ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama dan *Respectful Workplace Commitment* yang telah disepakati oleh seluruh Direksi Subholding Gas.

Gas Subholding Employees are one of strategic assets to boost the business growth and sustainability of PGN in the long run. To that end, the Company is committed to continuously improving employees' capabilities through various competency improvement programs and opportunities for growth.

PGN Group ensures a professional, safe, and convenient work environment for Gas Subholding Employees by ensuring a workplace that is free of discrimination. This is implemented through the Collective Labor Agreement and Respectful Workplace Commitment, which have been agreed upon by all members of the Board of Directors of the Gas Subholding.

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS

PROFILE OF GAS SUBHOLDING EMPLOYEES



2.735 Orang | Peoples

Pekerja PGN Group
PGN Group Employees

Hingga akhir tahun 2025, jumlah pekerja PGN secara Group mencapai 2.735 orang, yang terdiri dari 1.125 orang di Perusahaan/Subholding Gas, dan 1.610 orang di entitas anak (termasuk afiliasi dan perusahaan patungan).

Perusahaan secara konsisten mengelola *manpower* secara optimal untuk menjaga keseimbangan operasional dan efisiensi, dengan jumlah yang relatif stabil setiap tahun. Hal ini mendukung keberlangsungan bisnis dan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan. Tingkat perputaran pekerja (*turnover rate*) pada 2025 sebesar 3,14%.

As of the end of 2025, PGN Group had a total of 2,735 employees, with 1,125 at the Company/Subholding Gas and 1,610 at subsidiary entities (including affiliates and joint venture companies).

The Company consistently manages its manpower optimally to maintain operational balance and efficiency, with a relatively stable number each year. This supports business continuity and sustainable performance. The employee turnover rate in 2025 stood at 3.14%.

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender

Pekerja PGN Group dan Anak Perusahaan terbagi menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Pekerja Tidak Tetap. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pekerja tetap tercatat 2.584 orang, sedangkan pekerja tidak tetap 151 orang.

Number of Gas Subholding Employees Based on Employment Status and Gender

Employees of PGN Group and Subsidiaries are divided into Tenured Employees (PKWTT)/Permanent Employees and Non-Tenured Employees (PKWT)/Non-Permanent Employees. As of the end of 2025, the number of tenured employees was recorded at 2,584 people, while that of non-tenured employees reached 151 people.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Gas Subholding Employees By Employment Status

Kelompok Jabatan Employment Status	2025			2024			2023		
	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T
PKWTT	1.916	668	2.584	1.913	623	2.536	1.900	618	2.518
PKWT	128	23	151	144	30	174	145	28	173
Jumlah Total	**2.044**	**691**	**2.735**	**2.057**	**653**	**2.710**	**2.045**	**646**	**2.691**

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Rentang Usia dan Gender

Komposisi Perwira Subholding Gas berdasarkan usia didominasi oleh pekerja berusia 45 tahun ke bawah atau masuk kelompok usia pekerja produktif sebanyak 1.967 orang.

Number of Gas Subholding Employees By Age Group and Gender

Based on age, the composition of Gas Subholding Employees is dominated by those aged 45 and under, with 1,967 people, who belong to the age group of productive employees.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN USIA
Number of Gas Subholding Employees By Age

Usia Age	2025			2024			2023		
	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T
≥51 tahun | years old	244	61	305	265	55	320	261	59	320
41-50 tahun | years old	767	212	979	727	196	923	680	175	855
31-40 tahun | years old	779	274	1.053	811	270	1.081	831	282	1.113
≤30 tahun | years old	254	144	398	254	132	386	273	130	403
Jumlah Total	**2.044**	**691**	**2.735**	**2.057**	**653**	**2.710**	**2.045**	**646**	**2.691**

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Berdasarkan latar belakang pendidikan, Perwira Subholding Gas terbesar adalah lulusan Sarjana sebanyak 1.543 orang. Disusul pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 596 orang, Magister sebanyak 486 orang, SLTA/ setara ke bawah sebanyak 108 orang, dan Doktor 2 orang.

Number of Gas Subholding Employees By Education and Gender

Based on educational background, the largest group of Gas Subholding employees holds undergraduate degrees with 1,543 people, followed by associate degrees with 596, master's degrees with 486, senior high school diplomas or equivalent and below with 108, and doctoral degrees with 2 people.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN
Number of Gas Subholding Employees By Education

Pendidikan Education	2025			2024			2023		
	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T
Strata 3 (S3) Doctor	2	0	2	2	0	2	3	0	3
Strata 2 (S2) Master's	357	129	486	344	113	457	335	118	453
Strata 1 (S1) Bachelor's	1.113	430	1.543	1.118	413	1.531	1.126	403	1.529
Diploma Associate	479	117	596	413	112	525	394	108	502
SLTA Senior High School	93	15	108	180	15	195	187	17	204
Jumlah Total	**2.044**	**691**	**2.735**	**2.057**	**653**	**2.710**	**2.045**	**646**	**2.691**

Keterangan | Note: P: Pria/Male, W: Wanita/Female, T: Total

Jumlah Perwira Subholding Gas Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender

Kelompok jabatan yang ada di PGN Group terdiri dari Manajemen Puncak, Manajemen Madya, Manajemen Dasar, dan tingkat jabatan lainnya di bawah Manajemen Dasar atau Pelaksana. Pada tahun 2025, total jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan yang terbanyak yaitu ada pada jabatan Pelaksana (Staf) sebanyak 1.045 orang, diikuti oleh Perwira Subholding Gas terbanyak kedua yaitu jabatan Manajemen Dasar sebanyak 972 orang, disusul dengan jabatan Manajemen Madya sebanyak 483 orang serta Manajemen Puncak sebanyak 235 orang.

Number of Gas Subholding Employees By Position Group and Gender

The position groups at PGN Group comprise Senior Management, Middle Management, First-Line Management, and other position levels under First-Line Management or Staff. In 2025, the total number of Employees of Gas Subholding and Subsidiaries with the largest number is Staff position with 1,045 people, followed by the second largest number of Gas Subholding Employees, namely the First-Line Management position with 972 people, followed by the Middle Management position with 483 people and Senior Management with 235 people.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN
Number of Gas Subholding Employees By Position Group

Kelompok Jabatan Position Group	2025			2024			2023		
	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T	P/M	W/F	T
Manajemen Puncak Senior Management	186	49	235	174	51	225	173	52	225
Manajemen Madya Middle Management	368	115	483	333	87	420	335	88	423
Manajemen Dasar First-Line Management	721	251	972	1.053	346	1.399	743	256	999
Pelaksana Staff	769	276	1.045	497	169	666	794	250	1.044
Jumlah Total	**2.044**	**691**	**2.735**	**2.057**	**653**	**2.710**	**2.045**	**646**	**2.691**

Keterangan | Note: P: Pria/Male, W: Wanita/Female, T: Total

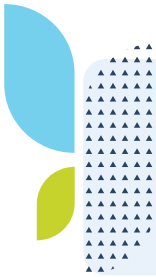
JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN RENTANG USIA, GENDER, DAN TINGKAT JABATAN
Number of Gas Subholding Employees by Age Group, Gender, and Position Level

Rentang Usia (tahun) Age Group (years old)	2025									2024								
	Level Jabatan Position Level								Jumlah Pegawai Number of Employees	Level Jabatan Position Level								Jumlah Pegawai Number of Employees
	Pelaksana Staff		Manajemen Dasar First-Line Management		Manajemen Madya Middle Management		Manajemen Puncak Senior Management			Pelaksana Staff		Manajemen Dasar First-Line Management		Manajemen Madya Middle Management		Manajemen Puncak Senior Management		
	P/M	W/F	P/M	W/F	P/M	W/F	P/M	W/F		P/M	W/F	P/M	W/F	P/M	W/F	P/M	W/F	
18-24	6	6	1	0	0	0	0	0	13	12	11	1	3	0	0	0	0	27
25-34	285	149	121	69	18	9	6	1	658	231	121	194	85	9	7	0	0	647
35-44	355	96	396	134	181	59	59	16	1.296	151	28	605	196	160	41	55	17	1.253
45-54	102	23	171	40	156	39	105	29	665	79	7	227	52	151	35	109	31	691
>=55	21	2	32	8	13	8	16	3	103	24	2	26	10	13	4	10	3	92

Keterangan | Note: P: Pria/Male, W: Wanita/Female, T: Total

KOMITMEN KESETARAAN GENDER

COMMITMENT TO GENDER EQUALITY



22,69% **Pekerja Wanita** | **Female Employees**

dalam *Nominated* Talent
in Nominated Talent

PGN berkomitmen untuk menerapkan prinsip non diskriminasi, serta kesempatan yang sama dan setara tanpa membedakan gender dalam pengelompokan jabatan dan kesempatan pengembangan karier. Dengan komitmen ini, penentuan posisi jabatan serta pengembangan karier Perwira Subholding Gas sepenuhnya didasarkan atas hasil penilaian, kemampuan, dan kecakapan pekerja.

Hingga akhir Desember 2025, perbandingan jumlah pekerja pria dan wanita adalah 74,73% dan 25,27%, dengan jumlah pekerja pria 2.044 orang, dan pekerja wanita 691 orang. PGN berkomitmen meningkatkan persentase pekerja wanita dalam posisi puncak atau *nominated talent*. Jumlah pekerja wanita yang masuk dalam *nominated talent* mencapai 27 orang dari 119 orang *talent* (pria dan wanita), dengan presentase 22,69%, hal ini melebihi target KPI rasio pekerja wanita dalam *nominated talent* sebesar 18% di tahun 2025.

PGN is committed to implementing non-discriminatory principles and creating equal and equitable opportunities, regardless of gender, for position grouping and career development. With this commitment, the determination of positions and career development of Gas Subholding Employees are entirely based on their assessment results, capabilities, and skills.

As of the end of December 2025, male and female employees accounted for 74.73% and 25.27% of the workforce, with 2,044 male employees and 691 female employees. Although the number is not too significant, 27 female employees are listed among the nominated talents, out of a total of 119, representing 22.69%. This percentage exceeded the 2025 KPI target for female representation in the nominated talent list, which was set at 18%.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS MEWAKILI KESETARAAN GENDER
Number of Gas Subholding Employees Representing Gender Equality

Level Jabatan Position Level	**Pria** Male		**Wanita** Female	
	Jumlah Pekerja Number of Employees	**Persentase Pekerja** Percentage of Employees **(%)**	**Jumlah Pekerja** Number of Employees	**Persentase Pekerja** Percentage of Employees **(%)**
Manajemen Puncak Top Management	186	9,10	49	7,10
Manajemen Madya Middle Management	368	18,00	115	16,64
Manajemen Dasar Low Management	721	35,27	251	36,32
Pelaksana Staff	769	37,62	276	39,94
Jumlah Total	**2.044**	**100**	**691**	**100**

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNER*

Human Capital Management Division PGN terus memperkuat perannya sebagai *strategic business partner* yang mendukung pengelolaan bisnis melalui pengembangan talenta Perwira Subholding Gas, mengendalikan proses strategi sumber daya manusia, serta mengembangkan kompetensi karyawan.

Peran tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan empat Program Strategis Bidang Human Capital Tahun 2025 yang meliputi:

1. ***Organization & Governance***
   Strategi ini diarahkan pada penyempurnaan desain organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan kapabilitas masa depan. Implementasi strategi ini mencakup penyusunan *organization design* berbasis *future capabilities*, penerapan *agile governance model* untuk mendukung pengembangan *low carbon business*, penguatan tata kelola berbasis ESG, penyusunan *Human Capital Blueprint & Roadmap*, pelaksanaan *continuous improvement program*, serta penerapan kebijakan *respectful workplace* guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berintegritas.
2. ***Talent Management***
   Strategi pengelolaan talenta difokuskan pada pemenuhan kapasitas dan kapabilitas SDM yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Program yang dijalankan antara lain *business-aligned learning development* (termasuk *stakeholder management,* LNG, dan *low carbon business*), pengembangan kompetensi baru di bidang *renewable & sustainability*, serta pelaksanaan global dan *cross talent mobility* di lingkungan BUMN.
3. ***Corporate Culture***
   Pada aspek budaya, strategi HCM tahun 2025 menekankan penguatan budaya kinerja tinggi dan budaya ONE Pertamina. Implementasinya dilakukan melalui program *Diversity, Equity & Inclusivity* (DEI), ESG *enablement*, *employee wellbeing*, internalisasi *core values* Perseroan, penguatan HSSE *culture*, pengembangan *Agent of Change Culture*, pengukuran level *maturity* implementasi *core values*, serta pelaksanaan *engagement survey*.
4. ***Digitalized HC & Analytics***
   Strategi ini bertujuan mempercepat transformasi digital di bidang SDM. Fokus utamanya meliputi pengembangan *Digital Employee Self-Service Center*, *integrated dashboard*, serta *people analytic* untuk mendukung *talent planning*.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AS STRATEGIC BUSINESS PARTNER

PGN's Human Capital Management Division continues to strengthen its role as a strategic business partner that supports business management by carrying out talent development of Gas Subholding Employees, managing the human capital strategic process, and developing the competency of employees.

This role serves as a foundation to implement four Strategic Programs of the Human Capital Division in 2025, which cover:

1. **Organization & Governance**
   This strategy aims to enhance an organizational design that is adaptive to future capability needs. This strategy was implemented by formulating an organizational design based on future capabilities, applying the agile governance model to develop a low-carbon business, reinforcing ESG-based governance, designing the Human Capital Blueprint & Roadmap, carrying out continuous improvement programs, and implementing respectful workplace policies, creating a safe and inclusive work environment with integrity.

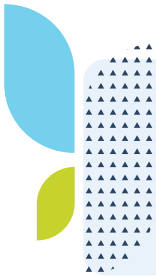
2. **Talent Management**
   Talent management strategies focus on enhancing human resource capacities and capabilities to meet business needs. The programs in place include business-aligned learning development (including stakeholder management, LNG, and low-carbon business), development of new competencies in the renewable & sustainability field, and global and cross-talent mobility across SOEs.
3. **Corporate Culture**
   On the cultural aspect, the HCM strategy for 2025 underscored a strengthened high-performance culture and the ONE Pertamina culture. It was implemented through programs in Diversity, Equity & Inclusivity (DEI), ESG enablement, employee wellbeing, Corporate core value internalization, HSSE culture strengthening, Agent of Change culture development, measurement of core value implementation maturity, and survey engagement.
4. **Digitalized HC & Analytics**
   This strategy aims to expedite digital transformation in the human resources field. The key focus covers the development of the Digital Employee Self-Service Center, an integrated dashboard, and people analytics to support talent planning.Overall, the HCM strategies

Secara keseluruhan, strategi HCM tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan *high performance organization*, memastikan kesiapan talenta masa depan, meningkatkan produktivitas, mendukung agenda ESG, serta memperkuat digitalisasi sistem Human Capital secara terintegrasi.

for 2025 were earmarked at creating a high-performance organization, ensuring the preparedness of future talents, boosting productivity, supporting the ESG agenda, and strengthening the integrated digitalization of the Human Capital System.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCY DEVELOPMENT



93,69% **(dari 100%) | (out of 100%)**

Hasil Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2)
Level 2 (L2) Training Evaluation Results

Pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang serta pencapaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Melalui pengelolaan SDM yang tepat, Perseroan mendorong peningkatan kinerja pekerja melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan kompetensi (diklat) teknis dan manajerial, baik *in-house* maupun *public training*, serta pelaksanaan sertifikasi dan kegiatan *sharing knowledge*. Untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi tersebut, PGN juga telah menyediakan fasilitas *online learning management system.*

A structured and continued HR competency development is carried out to foster long-term business growth as well as the achievement of the Company Long-Term Plan (RJPP). Through proper HR management, the Company pushes for enhanced employee performance through various training and education programs for technical and managerial competencies, be it in-house or public training, as well as certifications and knowledge sharing. An online learning management system is also provided by PGN, aiming at supporting such competency development activities.

Pada tahun 2025, PGN kembali melaksanakan Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2) dengan capaian sebesar 93,69% (dari 100%), sebagai indikator efektivitas pelatihan dalam mendukung peningkatan kinerja Perusahaan.

In 2025, PGN once again conducted the Level 2 (L2) Training Evaluation, achieving 93.69% (out of 100%), which serves as an indicator of effective training in boosting the Company's performance.

Talent Development Program

Talent Development Program

70% ***Assignment*** **20%** ***Coaching*** **10%** ***Training***

***Talent Development Program* PGN**
Talent Development Program PGN

Talent Development Program di PGN dilaksanakan melalui program yang berjenjang untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan Perusahaan. Program ini dirancang untuk mempersiapkan pemimpin yang memiliki kapabilitas *Ambidextrous*, yaitu kemampuan menyeimbangkan dua pendekatan berbeda dalam memimpin untuk mendorong inovasi, namun juga memastikan hasil yang maksimal dengan fondasi yang kokoh. PGN mengembangkan dan mempersiapkan program ini untuk seluruh level Perwira Subholding Gas, baik level Manajemen Dasar, Manajemen Madya hingga Manajemen Puncak.

In PGN, Talent Development Program is carried out through a tiered program to ensure the continuity of the Company's leadership. This program is devised with the aim to equip leaders with ambidextrous capabilities - the ability to balance two different leadership approaches to foster innovation while ensuring maximum outcomes with a solid foundation. PGN developed and prepared this program for all levels of Gas Subholding Employees, be it First-Line Management, Middle Management, or Senior Management levels.

Program *leadership development* terdiri dari tiga jenis, yaitu:

The leadership development program comprises three types, as follows:

Program *Enforce* **Enforce Program**	Program dasar yang bersifat wajib untuk memperkuat kompetensi *leadership* dan *critical behavior* yang dibutuhkan dalam menghadapi lingkup pekerjaan, serta memaksimalkan potensi individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawab saat ini. A mandatory basic program to strengthen leadership competencies and critical behaviors necessary to navigate the work environment, while maximizing individual potential in fulfilling current roles and responsibilities.
Program *Enhance* **Enhance Program**	Program akselerasi pengembangan kepemimpinan yang terstruktur dan komprehensif dalam menyiapkan *Top Talent* Pertamina untuk jenjang kepemimpinan berikutnya. A structured, comprehensive leadership development acceleration program to prepare Pertamina's Top Talent for the next leadership level.
Program *Enrich* **Enrich Program**	Program pengayaan pengembangan kepemimpinan yang disusun berdasarkan kebutuhan rencana pengembangan individu secara spesifik untuk membekali para pemimpin dengan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan masa depan dan tujuan strategis Pertamina. A leadership development enrichment program tailored to the needs for specific individual development plans to equip leaders with skills aligned with Pertamina's future needs and strategic objectives.

PGN menerapkan pendekatan 70:20:10, yang terdiri atas 70% *assignment*, 20% *coaching*, dan 10% *training* sebagai acuan efektivitas program pengembangan. Melalui pendekatan *experiential learning*, peserta ditempa melalui berbagai penugasan yang tidak hanya memperkuat kompetensi para peserta namun juga berkontribusi bagi Perusahaan melalui inisiatif *continuous improvement*. Sedangkan kegiatan *coaching* menjadi wadah diskusi, *networking*, serta penguatan kompetensi *coaching* bagi para *leader* muda.

PGN melakukan penyelarasan strategi dengan Pertamina sebagai induk perusahaan, salah satunya dengan menyelaraskan program *leadership* dan kesiapan *talent mobility* melalui *succession planning* untuk posisi-posisi kunci di Perusahaan. Oleh karena itu, PGN berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan dan percepatan talenta yang diselenggarakan Pertamina, antara lain Program Catalyzer Pertamina dan Akselerasi Trailblazer.

Program Catalyzer merupakan program *enhance top talent development* yang dirancang untuk mempersiapkan talenta pada posisi-posisi strategis. Program ini bertujuan mengembangkan *leadership skill* bagi Perwira Subholding Gas *top talent* yang diharapkan dapat mengisi posisi *top level* di Perusahaan. Pada tahun 2025, Perusahaan mengikutsertakan Pekerja level top management untuk mengikuti program Catalyzer dan Catalyzer Mastery.

Adapun program Trailblazer dirancang untuk mempersiapkan Perwira Subholding Gas *talent pool/successor* di level Manajemen Madya menjadi Operational Leader dalam hal *leadership skills* dan *managing business*. Program ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan mengelola operasional fungsi, berperan efektif mendukung visi & misi Pertamina, serta meningkatkan wawasan, kepekaan dan ketajaman bisnis perusahaan (*business acumen*). Pada tahun 2025, sebanyak 27 orang pekerja Subholding Gas mengikuti program Trailblazer.

Selain program *enhance* atau percepatan *talent*, PGN juga menyelenggarakan program *enforce/mandatory* yaitu Team Leader Development Program (TLDP) dan People Leader Development Program (PLDP). Di samping itu, PGN mengikutsertakan pekerja pada program Pertamina, seperti Early Leader Development Program (ELDP) dan Operational Leader Development Program (OLDP). Program-program

PGN applies a 70:20:10 approach, consisting of 70% assignments, 20% coaching, and 10% training, as a benchmark for its effective development program. Through experiential learning, participants are honed through various assignments that not only strengthen their competencies but also contribute to the Company through continuous improvement initiatives. Coaching activities, meanwhile, provide a room for discussion, networking, and strengthened coaching competencies for young leaders.

PGN tailors its strategy with its parent company, Pertamina, by aligning its leadership program and talent mobility readiness through succession planning for key positions within the Company. Therefore, PGN participates in various talent development and acceleration programs organized by Pertamina, including the Pertamina Catalyzer Program and Trailblazer Acceleration.

The Catalyzer Program is a top talent development 'enhance' program designed to prepare talent for strategic positions. This program aims to develop leadership skills for top-talented Gas Subholding Employees, who are expected to fill top-level positions within the Company. In 2025, the Company included top management level employees in the Catalyzer and Catalyzer Mastery programs.

The Trailblazer program is designed to prepare Middle-Management Gas Subholding Employees from the talent pool/successors to become Operational Leaders, focusing on leadership skills and managing business. This program aims to equip participants with the ability to manage operational functions, play an effective role in supporting Pertamina's vision and mission, and enhance the company's business insight, sensitivity, and acumen. As many as 27 Gas Subholding employees participated in the Trailblazer program in 2025.

Apart from '*enhance*' program or talent acceleration, PGN also implements '*enforce*'/mandatory programs, namely the Team Leader Development Program (TLDP) and the People Leader Development Program (PLDP). Furthermore, PGN enrolls its employees in Pertamina programs, such as the Early Leader Development Program (ELDP) and the Operational Leader Development Program (OLDP). These

tersebut bertujuan untuk membekali pekerja yang baru menduduki jabatan strategis dengan kapabilitas dan kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya.

Dalam rangka meningkatkan wawasan terkait kepemimpinan, PGN mengimplementasikan program yang bertajuk Leaders' Talk. Program ini merupakan forum interaksi dan *sharing knowledge* antara *executive management* PGN dengan *inspirational leader* dari tokoh-tokoh eksternal.

PGN juga menyelenggarakan program *enrich* atau pengayaan kompetensi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis tertentu, sebagai berikut:

- Project Managemet Academy adalah program pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan bagi pekerja level Manajemen Madya yang dikemas dengan konsep *experiential learning* untuk membekali para *successor* di bidang infratruktur, khususnya pada fungsi Project Management Office, Engineering & Technology & City Gas Project.
- PULSE – Competency Based Development Program merupakan program pemenuhan *gap* dan pengayaan bagi pekerja PGN level Manajemen Madya yang diperbantukan ke Anak Perusahaan/Afiliasi dengan tuntutan peran dan tanggung jawab yang lebih besar dan kompleks.

Knowledge Management

PGN menjalankan *knowledge management* dalam pengelolaan SDM, yang dirancang dan dikembangkan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimiliki oleh Perwira Subholding Gas sebagai individu agar dapat digunakan kembali di dalam Perusahaan. *Knowledge management* dibagi menjadi beberapa program, yaitu GAS *Talk*, *Knowledge Harvesting*, *e-Library*, dan *Innovation Award*.

Program GAS *Talk* merupakan *sharing knowledge* yang melibatkan Perwira Subholding Gas sebagai narasumber. Melalui program ini, Perwira Subholding Gas dapat menambah wawasan tentang berbagai hal terkait bisnis Perseroan sehingga memiliki pengetahuan lebih

programs aim to equip employees newly appointed to strategic positions with leadership capabilities and abilities appropriate to their responsibilities.

To enhance leadership-related insights, PGN initiated a program called Leaders' Talk. This program serves as a forum for interaction and knowledge sharing between PGN executive management and inspirational leaders from external sources.

PGN also offers '*enrich*' program or competency enrichment designed to support specific business needs, as follows:

- Project Management Academy is a technical and leadership competency development program for Middle-Management employees. This program is presented with an experiential learning concept to equip future successors in the infrastructure sector, specifically in the Project Management Office, Engineering & Technology, and City Gas Project functions.
- PULSE – Competency-Based Development Program is a gap-filling and enrichment program for PGN Middle-Management employees assigned to Subsidiaries/ Affiliates with bigger, more complex roles and responsibilities.

Knowledge Management

PGN implements knowledge management in human resource management, which is designed and developed to identify, create, explain, and transfer knowledge possessed by Gas Subholding Employees as individuals, enabling it to be reused within the Company. Knowledge management is divided into several programs, namely GAS Talk, Knowledge Harvesting, e-Library, and Innovation Award.

The GAS Talk program constitutes a knowledge sharing program with Gas Subholding Employees as resource persons. This program is expected to broaden Gas Subholding Employees' knowledge on various matters related to the Company's business, equipping them with

komprehensif terhadap posisi PGN dalam perkembangan bisnis industrinya. Program ini dilaksanakan setiap kuartal dengan format *talkshow*.

Program *Knowledge Harvesting* merupakan kegiatan mendokumentasikan pengetahuan yang melekat pada individu ke dalam bentuk dokumen. Program ini bertujuan menangkap, memelihara dan mengembangkan pengetahuan di lingkungan PGN ke dalam *Knowledge Guide Book* PGN serta *Harvesting Talk* dalam format *talkshow*.

PGN juga menyelenggarakan Innovation Award Program sebagai bentuk apresiasi kepada Perwira Subholding Gas yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan Perseroan melalui ide dan inovasi kreatif.

Program ini mengadaptasi metode *Continuous Improvement Program* Pertamina yang bertujuan membangun sinergi Subholding Gas, meningkatkan kreativitas dan pemikiran inovatif, menciptakan lingkungan bagi Perwira Subholding Gas untuk mengeksplorasi peluang bisnis demi keberlanjutan Perusahaan, dan meningkatkan keterlibatan Perwira Subholding Gas melalui pengakuan terhadap inovasi mereka. Perwira Subholding Gas terbaik yang telah mengikuti program ini akan diikutsertakan ke tahap Annual Pertamina Quality Award.

a more comprehensive understanding of PGN's position in the development of its industry. This program is held every quarter in a talk show format.

The Knowledge Harvesting Program is an activity to document the knowledge inherent to individuals in the form of documents. This program aims to capture, maintain, and develop knowledge within PGN into the PGN Knowledge Guide Book and Harvesting Talks held in a talk show format.

PGN also holds an Innovation Award Program as a token of appreciation for Gas Subholding Employees for their contribution to boost the Company's capabilities through creative ideas and innovations.

This program adapts Pertamina's Continuous Improvement Program methods, aiming to build synergy within Gas Subholding, enhance creativity and innovative thinking, create an environment for Gas Subholding Employees to explore business opportunities for the Company's sustainability, and enhance Gas Subholding Employees' engagement through recognition of their innovations. The best Gas Subholding Employees participating in this program will be included in the Annual Pertamina Quality Award.



Program Pelatihan dan Sertifikasi

- Sepanjang tahun 2025, Perwira Subholding Gas telah mengikuti berbagai program sertifikasi, seperti 23 program sertifikasi teknik yang diikuti oleh 16 orang, dan 18 program sertifikasi non teknik yang diikuti oleh 18 orang. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme Perwira Subholding Gas agar semakin siap menangkap peluang bisnis yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Perseroan.
- PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi teknis Perwira Subholding Gas, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program pengembangan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode komprehensif 70:20:10, di mana 70% disampaikan melalui *project assignment*, 20% melalui *coaching*, dan 10% melalui program *in class training*.
- Pada tahun 2025, terdapat tiga program pengembangan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja dan performa Perseroan di bidang komersial, operasional, dan pengembangan bisnis, yaitu:
  1. *Customer-Oriented Marketing & Persuasive Sales Strategy* (COMPASS), merupakan program pengembangan kapabilitas personel *Sales Commercial Industry & Customer Management* untuk mengoptimalkan kontribusi *commercial industry* melalui perilaku yang lebih adaptif, solutif, dan berbasis kebutuhan pelanggan.
  2. *Project Management Academy* (PM Academy), merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk membekali pekerja konstruksi dan *engineering* terkait manajemen proyek secara berjenjang, serta mempersiapkan suksesor dan meningkatkan kapabilitas *Project Manager* yang sudah ada.
  3. *Carbon Capture* dan *Storage/ Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS Academy), merupakan program pengembangan kapabilitas personel terkait implementasi CCS/ CCUS untuk mendukung *low carbon business strategy*.

Training and Certification Program

- Across 2025, Gas Subholding Employees attended various certification programs, such as 23 technical certification programs with 16 participants, and 18 non-technical certification programs with 18 participants. These certifications aim to upgrade the skills and professionalism of Gas Subholding Employees, enabling them to be more ready to seize business opportunities and improve the quality of service and performance of the Company.
- PGN is committed to consistently improve technical competencies of Gas Subholding Employees, which is materialized through the implementation of various structured, tiered, and continued development programs with applying a comprehensive 70:20:10 method, comprising 70% project assignment, 20% coaching, and 10% in class training program.

- In 2025, three development programs were launched aimed to boost the Company's performance in the fields of commerce, operations, and business development, namely:
  1. Customer-Oriented Marketing & Persuasive Sales Strategy (COMPASS) - a Commercial Industry Sales & Customer Management personnel capability development program to optimize the commercial industry's contribution through more adaptive, solution-oriented, and customer-needs-based behavior.
  2. Project Management Academy (PM Academy) - a competency development program devised with the aim to equip construction and engineering employees related to project management in stages, prepare successors and enhance existing Project Manager capabilities.
  3. Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS Academy) - a personnel capability development program related to the implementation of CCS/ CCUS to foster low carbon business strategy.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Education and Training Program

Kategori Categories	Jumlah Program Number of Programs		Jumlah Peserta Total Participants	
	2025	2024	2025	2024
Pendidikan Education				
S2 Dalam Negeri (Full Scholarship) Master's Degree in Indonesia (Full Scholarship)	4	1	7	2
S2 Luar Negeri (Swakelola Reguler) Master's Degree overseas (Regular Self-Management)	-	2	-	2
S2 Dalam Negeri (Swakelola Reguler) Master's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)	-	6	-	7
S1 Dalam Negeri (Swakelola Reguler) Bachelor's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)	-	1	-	3
Inhouse dan Public Training Inhouse and Public Training				
Kompetensi Manajerial (Publik) Managerial Competence (Public)	2	3	70	236
Kompetensi Teknik Technical Competence	151	143	2.523	4.127
Sertifikasi Certification				
Sertifikasi Teknik Technical Certification	41	23	565	16
Sertifikasi Non Teknik Non-Technical Certification	3	18	41	18
Program Talent Talent Program				
Catalyzer	15	1	1	5
Trailblazer	20	3	3	6
Knowledge Management				
GAS Talk	13	9	1.468	1.256
Knowledge Harvesting	3	4	344	456
Program Magang Kementerian Ministry Internship Program				
Magang Reguler Regular Internship	1	2	218	341
Magang Bersertifikat dari Kementerian BUMN Certified Internship from SOE Ministry	1	1	18	38

INVESTASI DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2025, biaya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan Perwira Subholding Gas mencapai Rp10,5 miliar atau turun sebesar 6,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp11,2 miliar.

Informasi lebih lanjut mengenai Perwira Subholding Gas dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PGN 2025.

INVESTMENT IN COMPETENCY DEVELOPMENT

In 2025, the cost of implementing the Gas Subholding Employees development and management program reached Rp10.5 billion, or a decrease of 6.25% compared to 2024, which was recorded at Rp11.2 billion.

Further information on Gas Subholding Employees can be found in the 2025 PGN's Sustainability Report.

KEBIJAKAN HEALTH, SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT

HEALTH, SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT POLICIES

Sebagai perusahaan energi yang bergerak di bidang pengelolaan gas bumi, penerapan kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, Lingkungan (HSSE) menjadi hal yang mutlak dilakukan di dalam setiap proses operasional. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan operasional yang aman dan andal, PGN telah menerapkan Sistem Manajemen, Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, Lingkungan (HSSE).

As an energy company engaged in natural gas management, it is essential to implement the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) policies in every operational process. To ensure safe and reliable operational activities, PGN has implemented a Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Management System.

PGN mengimplementasikan pengelolaan HSSE secara terintegrasi melalui penguatan aspek Process Safety dan Asset Integrity Management, didukung oleh penerapan standar teknis yang andal, pengendalian proses yang aman, serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Perusahaan juga memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat dan krisis melalui sistem tanggap darurat yang terstruktur, responsif, dan efektif di seluruh lini operasi dan proyek.

PGN implements integrated HSSE management through strengthened Process Safety and Asset Integrity Management, supported by the implementation of reliable technical standards, safe process controls, and the provision of competent human resources. The Company also ensures preparedness for emergencies and crises through a structured, responsive, and effective emergency response system across all operations and projects.

Sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan, PGN secara konsisten mendorong pemahaman dan penerapan Corporate Life Saving Rules (CLSR) serta praktik *Good Housekeeping*, termasuk pelaksanaan intervensi terhadap kondisi dan perilaku tidak aman. Upaya ini diperkuat melalui komunikasi, konsultasi, dan pelibatan aktif pekerja serta mitra kerja untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan yang aman dan berwawasan lingkungan.

As part of strengthening its safety culture, PGN consistently encourages the understanding and implementation of Corporate Life Saving Rules (CLSR) and Good Housekeeping practices, including interventions against unsafe conditions and behaviors. These efforts are reinforced through communication, consultation, and the active engagement of employees and partners to raise awareness and accountability for safe and environmentally sound work practices.

Dalam memastikan komitmen terhadap keberlanjutan, PGN terus meningkatkan kinerja lingkungan melalui pengelolaan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, penerapan prinsip ekonomi sirkular (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, *Recovery*), serta perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, Perusahaan secara aktif melakukan pembelajaran dari setiap insiden melalui investigasi yang komprehensif dan transparan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

In ensuring a commitment to sustainability, PGN continues to improve its environmental performance through greenhouse gas emission management, energy efficiency, the implementation of circular economy principles (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), and biodiversity protection. Additionally, the Company actively learns from each incident through comprehensive and transparent investigations, preventing similar incidents from recurring in the future.

PGN juga mengacu kepada standar internasional seperti ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 terkait Sistem Manajemen K3. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, setiap tahun PGN melakukan audit Sistem Manajemen HSSE yang menjadi bagian dari Sistem Manajemen Terintegrasi, melalui audit internal dan eksternal oleh pihak independen minimal sekali dalam setahun.

PGN also adheres to international standards such as ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems and ISO 45001:2018 on OHS Management Systems. To ensure effective implementation, PGN conducts an annual audit of its HSSE Management System, which is part of its Integrated Management System, through internal and external audits by independent parties at least once a year.



100% **Fasilitas PGN | PGN Facilities**

Telah Memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sistem Manajemen Lingkungan
100% of Have Obtained Occupational Health and Safety Management System and Environmental Management System Certifications

Pada tahun 2025, PGN berhasil mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen HSSE, termasuk sertifikasi SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, dan sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan dengan predikat Gold Reward sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019.

Melalui implementasi kebijakan HSSE yang terintegrasi, PGN menegaskan peran HSSE tidak hanya sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan aset, tetapi juga sebagai *enabler* utama dalam menjaga reputasi, meningkatkan kinerja ESG, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

UPAYA DALAM MEMINIMALKAN RISIKO

Sejalan dengan kebijakan, komitmen, dan target HSSE, PGN secara konsisten mengelola risiko operasional melalui pendekatan risk-based management dengan mengedepankan prinsip As Low as Reasonably Practicable (ALARP), khususnya dalam pengendalian potensi Bahaya Kecelakaan Besar / Major Accident Hazard (MAH) guna memastikan keberlangsungan bisnis yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Berbagai upaya yang dilakukan mencakup penerapan peralatan standar, implementasi Process Safety and Asset Integrity pengelolaan SDM yang kompeten, serta penyediaan sistem tanggap darurat dan krisis. Perseroan juga menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan Corporate Life Saving Rules (CLSR) oleh pekerja dan mitra kerja, untuk mengambil tindakan korektif terhadap kondisi atau perilaku yang berisiko.

Sebagai pendukung, PGN memiliki Panduan Penanggulangan Keadaan Darurat Nomor P-002/12.00/2024 yang dirancang untuk mengurangi dampak situasi darurat melalui penanganan yang cepat, efektif, dan optimal. Panduan ini berlaku bagi seluruh lini operasi bisnis dan proyek di lingkup Subholding Gas.

In 2025, PGN successfully maintained its HSSE Management System certification, including OHSMS certification in accordance with Government Regulation Number 50 of 2012, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, and a Security Management System Audit certificate with a Gold Reward rating in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2019.

Through the implementation of an integrated HSSE policy, PGN accentuates the role of HSSE not only as an effort to protect its employees and assets, but also as a key enabler in maintaining reputation, improving ESG performance, and promoting sustainable business growth.

EFFORTS TO MINIMIZE RISKS

Aligned with its HSSE policies, commitments, and targets, PGN consistently manages operational risks through a risk-based management approach, prioritizing the As Low as Reasonably Practicable" (ALARP) principle, particularly in controlling potential Major Accident Hazard (MAH), ensuring safe, reliable, and sustainable business continuity.

Various efforts undertaken include the implementation of standard equipment, Process Safety and Asset Integrity System, competent human resource management, and the provision of emergency and crisis response systems. The Company also emphasizes the importance of understanding and implementing Corporate Life Saving Rules (CLSR) by employees and partners, enabling them to take corrective action against risky conditions or behavior.

As a supporting measure, PGN has established Emergency Response Guidelines Number P-002/12.00/2024, designed to mitigate the impact of emergency situations through prompt, effective, and optimal response. These guidelines apply to all business operations and project lines within the Gas Subholding.

Agar dapat meminimalkan risiko terkait mitra bisnis, PGN telah mewajibkan para mitra kerja dan kontraktor PGN untuk mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor atau Contractor Safety Management System (CSMS), yang menjadi salah satu persyaratan yang wajib diikuti oleh seluruh kontraktor atau mitra kerja PGN sebagai bagian dalam melakukan penyediaan barang dan jasa.

CSMS mencakup berbagai faktor, termasuk penilaian risiko, prakualifikasi, pemilihan kontraktor, perencanaan pra-pelaksanaan, pelaksanaan pekerja, serta evaluasi akhir sebagai dari evaluasi kesesuaian terhadap pedoman yang berlaku. Sebelum memulai pekerjaan, PGN juga memberikan pelatihan HSSE kepada kontraktor sebagai bentuk pembekalan pra-pekerjaan, yang diikuti dengan penerbitan HSSE Passport.

To minimize risks associated with business partners, PGN has required its partners and contractors to comply with the Contractor Safety Management System (CSMS), which is a prerequisite for all PGN contractors and partners as part of the provision of goods and services.

The CSMS covers various factors, including risk assessment, pre-qualification, contractor selection, pre-implementation planning, employee execution, and final evaluation to verify compliance with applicable guidelines. Prior to commencing work, PGN also provides HSSE training to contractors as a form of pre-work preparation, followed by the issuance of an HSSE Passport.

	Target 2025 2025 Target	**Pencapaian 2025** 2025 Achievement
Number of Accident (NoA)*	0	0
Total Recordable Injury Rate (TRIR)	≤ 0,17	0,09
Total Recordable Incident Security (TRIS) dengan kategori *Significant* dan/atau *Catastrophic* Total Recordable Incident Security (TRIS) with Significant and/or Catastrophic Category	0	0
Process Safety Event Level 1	0	0
Penyakit Akibat Kerja (PAK) Occupational Diseases	0	0

*Kategori NoA mencakup:
*The NoA category includes:

- *Fatality* (diluar korban meninggal dunia dari pihak ketiga).
  Fatalities (excluding third-party fatalities).
- Jumlah kejadian (*event*) *safety process incident* yang parah, termasuk korban meninggal dunia dari pihak ketiga, *Major oil spill* (≥10.000 L), *Major property damage* (*direct loss* ≥USD5 juta).
  The number of severe safety process incident events, including third-party fatalities, major oil spills (≥10,000 liters), and major property damage (direct loss ≥ USD 5 million).

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGELOLAANNYA

Untuk meningkatkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, PGN telah mengadopsi metode identifikasi bahaya dan manajemen risiko, antara lain:

- Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBAPR), untuk mengidentifikasi bahaya, melakukan analisis, dan menentukan profil risiko dari aktivitas rutin.
- *Job Safety Analysis* (JSA), yang digunakan untuk kegiatan non rutin seperti proyek.
- *Process Safety and Asset Integrity Management System* (PSAIMS), sebagai sistem untuk memastikan risiko keselamatan proses dan integritas aset dapat terkendali dengan baik dengan menerapkan metode *Process Hazard Analysis* (PHA)

Dari hasil identifikasi, terdapat risiko-risiko keadaan darurat yang dapat terjadi di PGN, seperti *fatality*, cedera serius, insiden medis yang melibatkan banyak orang, pandemik penyakit menular, kebocoran gas, kebakaran dan/atau ledakan di fasilitas station atau jaringan pipa atau fasilitas operasi dan aset lainnya, insiden transportasi atau kecelakaan lalu lintas, bencana alam, hingga tumpahan/kebocoran Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau limbah B3 yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Untuk itu, PGN telah mengembangkan sistem penanggulangan keadaan darurat yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan terhadap keadaan darurat dengan mengadopsi standar internasional berbasis standar *Federal Emergency Management Agency (FEMA): Incident Command System (ICS),* yang mengakomodir eskalasi keadaan darurat secara berjenjang.

Perseroan juga memiliki mekanisme pelaporan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan insiden yang dilakukan oleh seluruh Perwira Subholding Gas melalui sistem HSSE *Online System and Indicator Performance Center (HOLISTIC),* minimal sekali dalam sebulan. Hasil pelaporan akan digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen K3 PGN.

HAZARD IDENTIFICATION AND MANAGEMENT

To strengthen occupational health and safety practices, PGN has adopted systematic hazard identification and risk management methodologies, including:

- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA), aimed at identifying hazards, conducting risk analysis, and determining the risk profile of routine activities.
- Job Safety Analysis (JSA), applied to non-routine activities, including project-related work.
- Process Safety and Asset Integrity Management System (PSAIMS), implemented to ensure that process safety risks and asset integrity are effectively managed through the application of Process Hazard Analysis (PHA) methodologies.

Based on the identification results, PGN recognizes potential emergency risks that may arise, including fatalities, serious injuries, mass casualty medical incidents, infectious disease outbreaks or pandemics, gas leaks, fires and/or explosions at station facilities, pipeline networks, or other operational facilities and assets, transportation or traffic accidents, natural disasters, as well as spills or leaks of Hazardous and Toxic Materials (B3) and/or hazardous waste that may result in environmental pollution.

To that end, PGN has developed a comprehensive emergency response system encompassing mitigation, preparedness, response, and recovery measures. The system adopts international standards aligned with the Federal Emergency Management Agency (FEMA) : Incident Command System (ICS), which accommodates tiered emergency escalation mechanisms.

The Company has also established a reporting mechanism for unsafe conditions, unsafe acts, and incidents, which must be carried out by all Gas Subholding Employees through the HSSE Online System and Indicator Performance Center (HOLISTIC) at least once a month. The reporting results are utilized to evaluate and continuously enhance PGN's Occupational Health and Safety management system.

MENJAGA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN KARYAWAN

Sebagai bagian dari komimen PGN untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, Perseroan menyediakan fasilitas perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Program pemeliharaan dan peningkatan kesehatan karyawan dan keluarga dikelompokkan menjadi kesehatan kerja yang bersifat medis, serta kesehatan kerja yang berfokus pada kesehatan lingkungan kerja.

PGN telah melengkapi area operasional dan perkantoran dengan fasilitas klinik, sebagai pelayanan kesehatan bagi pekerja. Selain itu, terdapat pula fasilitas pendukung seperti ruang menyusui, tempat ibadah, tempat parkir, dan perangkat K3 untuk keadaan darurat. Perseroan juga melaksanakan berbagai program kesehatan bagi Perwira Subholding Gas yang meliputi upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.

Berbagai program tersebut mencakup pelaksanaan Daily Check Up (DCU) dan Medical Check-Up (MCU) secara berkala, program kebugaran sebagai bagian dari program Preventif, serta pelaksanaan seminar kesehatan dan kerja dan konsultasi kesehatan sebagai bagian dari program Promotif.

Perseroan juga menyediakan program Kuratif seperti memberi layanan kesehatan bagi Pekerja melalui fasilitas kesehatan umum dan di kantor, serta menyediakan program Rehabilitatif yang meliputi program rehabilitasi bagi karyawan dan program kembali bekerja bagi karyawan yang sakit berkepanjangan.

Layanan Kesehatan Mental dan Fisik

Sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif, PGN mengimplementasikan program SEBUSEPRO (Sehat, Bugar, Senang, Produktif), yaitu inisiatif *corporate wellness* di lingkungan Pertamina Group. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pekerja sekaligus mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di lingkungan kerja.

Melalui program ini, Perseroan mengintegrasikan berbagai kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan. Inisiatif tersebut meliputi kampanye gaya hidup sehat,

MAINTAINING AND ENHANCING EMPLOYEE HEALTH

As part of PGN's commitment to providing a safe and conducive work environment, the Company facilitates health protection programs for employees and their families. Employee and family health maintenance and improvement programs are categorized into occupational health services of a medical nature, as well as occupational health initiatives focused on maintaining a healthy work environment.

PGN has equipped its operational and office areas with on-site clinic facilities to provide healthcare services for employees. Additionally, supporting facilities are available, including lactation rooms, places of worship, parking areas, and OHS emergency equipment. The Company also implements various health programs for Gas Subholding Employees, encompassing preventive, curative, rehabilitative, and promotive measures.

Berbagai program tersebut mencakup pelaksanaan Daily Check Up (DCU) dan Medical Check-Up (MCU) secara berkala, program kebugaran sebagai bagian dari program Preventif, serta pelaksanaan seminar kesehatan dan kerja dan konsultasi kesehatan sebagai bagian dari program Promotif.

The Company also provides curative programs, including access to healthcare services through public healthcare facilities and on-site office clinics. Additionally, rehabilitative programs are available, comprising employee rehabilitation programs and return-to-work programs for employees recovering from prolonged illness.

Mental and Physical Health Services

As part of its commitment to manifesting a healthy, safe, and productive work environment, PGN has implemented a Healthy, Fit, Happy, Productive program, known as SEBUSEPRO - a corporate wellness initiative within the Pertamina Group. This program aims to improve employees' physical and mental health while encouraging a healthy lifestyle culture within the workplace.

Through this program, the Company integrates various promotional and preventive health activities. These initiatives include healthy lifestyle campaigns, joint

aktivitas olahraga bersama, pemantauan kondisi kesehatan pekerja, serta edukasi mengenai pengelolaan stres dan keseimbangan kehidupan kerja. Program ini juga didukung dengan berbagai kegiatan seperti tantangan kebugaran, konsultasi kesehatan, serta program pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

exercise activities, employee health monitoring, and education on stress management and work-life balance. The program also comes with various activities such as fitness challenges, health consultations, and program to control risk factors for non-communicable diseases.

Pelaksanaan SEBUSEPRO tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan individu pekerja, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas kerja, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, serta memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Perusahaan.

The SEBUSEPRO implementation not only focuses on improving individual employee health but also supports increased work productivity, reduces the risk of occupational diseases, and strengthens the culture of occupational health and safety within the Company.

Melalui implementasi program secara berkelanjutan, Perseroan berharap dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang sehat, bugar, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mendukung keberhasilan operasional serta pencapaian kinerja Perusahaan. Sejak diluncurkan, jumlah karyawan Subholding Gas dan afiliasi yang mengakses aplikasi digital ini mencapai 2.173 orang.

Through sustainable program implementation, the Company hopes to foster healthy, fit, and highly competitive human resources, thereby promoting operational success and achieving Company performance. Since its launch, a total of 2,173 employees within the Gas Subholding and its affiliated entities have accessed this digital application.

Mendukung Kesehatan Mental Pekerja
Promoting Employees' Mental Health

Perseroan juga menyelenggarakan *Employee Assistance Program* (EAP) sebagai wujud komitmen terhadap *Employee Wellbeing*. Program ini ditujukan untuk memberikan dukungan profesional dan rahasia kepada pekerja yang menghadapi berbagai tantangan personal maupun pekerjaan. Program ini menyediakan akses kepada layanan konseling dan konsultasi yang dapat membantu pekerja dalam mengelola stres kerja, tekanan emosional, permasalahan keluarga, maupun tantangan psikologis lainnya yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan performa kerja. Selain memberikan dukungan kepada individu, program ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inklusif, dan suportif. Perusahaan secara berkala juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental.

The Company also runs the Employee Assistance Program as a form of commitment to Employee Wellbeing. This program aims to provide professional support and confidentiality to employees facing personal and professional challenges. This program provides access to counseling and consultation services that can help employees manage work stress, emotional distress, family issues, and other psychological challenges that could potentially impact their wellbeing and work performance. In addition to providing support to individuals, this program also contributes to creating a healthier, more inclusive, and supportive work environment. The Company also regularly conducts outreach and education activities related to mental health aimed to raise employee awareness on the importance of maintaining mental health.

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PGN 2025 dalam buku terpisah.

Further information regarding the Occupational Health and Safety Policy can be found in the 2025 PGN's Sustainability Report, presented in a separate publication.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER
INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBERSECURITY

PGN menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis Teknologi Informasi (TI) sebagai fondasi utama transformasi digital perusahaan. Dalam menghadapi dinamika industri energi dan tuntutan efisiensi operasional, PGN tidak lagi memposisikan TI sebagai fungsi pendukung, melainkan sebagai *enabler* utama dalam mendukung keunggulan daya saing dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Transformasi digital di PGN dijalankan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup penguatan infrastruktur, integrasi sistem, adopsi model layanan berbasis *managed service*, serta pengembangan solusi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan analitik data. Implementasi layanan digital pelanggan melalui platform PGN Mobile dan perluasan kanal digitalisasi berlangganan gas, menjadi tonggak penting dalam layanan kepada masyarakat.

PGN juga mencatat capaian signifikan dalam tata kelola dan keamanan TI. Melalui asesmen COBIT 2019 dan instrumen IKAS, Perusahaan berhasil meraih tingkat kematangan tata kelola dan keamanan siber yang kuat, dengan penerapan kebijakan yang terstruktur, prosedur yang terdokumentasi, dan investasi pada teknologi keamanan mutakhir. Dari sisi pembiayaan, strategi *opex-based* dengan pendekatan *outsourcing* terbukti efektif menjaga efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan TI.

PGN juga berfokus pada pengembangan kompetensi SDM TI melalui pelatihan bersertifikasi, *knowledge sharing*, dan transformasi budaya kerja digital. Persiapan menuju unifikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan Holding dan implementasi *data & AI governance* di tahun 2026, mempertegas arah strategis PGN dalam menjadi perusahaan energi berbasis digital kelas dunia.

PGN menyadari bahwa tantangan TI global seperti meningkatnya risiko siber, kebutuhan adaptasi teknologi yang cepat, dan urgensi pengelolaan data, akan menuntut respons yang adaptif dan terukur. Dengan tata kelola yang kokoh dan strategi digital yang terintegrasi, PGN terus menavigasi kompleksitas transformasi ini secara proaktif, guna memastikan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

PGN reaffirms its commitment to bolstering the strategic role of Information Technology (IT) as a fundamental pillar of the Company's digital transformation. In responding to the dynamics of the energy industry and increasing demands for operational efficiency, PGN no longer positions IT merely as a supporting function, but rather as a key enabler in driving competitive advantage and ensuring long-term business sustainability.

PGN's digital transformation is implemented through a comprehensive approach encompassing infrastructure enhancement, , adoption of managed service–based service models, and the development of solutions leveraging Artificial Intelligence (AI) and data analytics. The implementation of digital customer services through the PGN Mobile platform, along with the expansion of digital gas subscription channels, represents a significant milestone in service to the public.

PGN has also recorded significant achievements in IT governance and cybersecurity. Through the COBIT 2019 assessments and IKAS instrument, the Company attained a strong level of governance and cybersecurity maturity, driven by structured policies, well-documented procedures, and sustained investment in advanced security technologies. From a financial perspective, the adoption of an opex-based strategy with an outsourcing approach has proven effective in maintaining cost efficiency without compromising the quality of IT services.

PGN continues to prioritize the development of IT human capital through certified training programs, knowledge-sharing initiatives, and the advancement of a digital-oriented work culture. Preparations for Enterprise Resource Planning (ERP) unification with the Holding and the implementation of data and AI governance in 2026 further underscore PGN's strategic direction toward becoming a world-class digital-based energy company.

The Company recognizes that global IT challenges—such as escalating cyber threats, the need for rapid technological adaptation, and the increasing urgency of robust data governance—require adaptive and measured responses. With a strong governance framework and an integrated digital strategy, PGN proactively navigates the complexities of digital transformation to ensure sustainable value creation for all stakeholders in the future.

FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PGN pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2025–2029 yang disusun untuk menyelaraskan inisiatif TIK dengan sasaran bisnis Perusahaan serta arah kebijakan Grup Pertamina sebagai entitas induk.

Salah satu fokus utama kebijakan strategis TIK PGN adalah memperkuat sinergi internal di lingkungan Subholding Gas Pertamina dan dengan fungsi *Enterprise* IT di Pertamina, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program ICT dapat terintegrasi secara menyeluruh di seluruh organisasi.

Fungsi ICT PGN diposisikan sebagai mitra strategis bisnis dalam menggerakkan transformasi digital Perusahaan, antara lain melalui penyediaan solusi berbasis data (*data-driven solutions*) dan pengembangan aplikasi yang lincah sebagai penggerak bisnis (*business enablers*) sesuai standar yang ditetapkan Pertamina.

PGN juga memprioritaskan implementasi solusi *Enterprise Resource Planning (ERP)* yang terpadu antara Subholding Gas dan Pertamina, agar proses bisnis inti maupun pendukung dapat berjalan lebih efisien dan selaras di seluruh lini.

Dalam bidang infrastruktur, fokus kebijakan TIK pada tahun 2025 adalah peningkatan keandalan dan ketersediaan sistem melalui konvergensi teknologi informasi dan operasional *(IT-OT convergence*). PGN mengintegrasikan infrastruktur TI dengan sistem teknologi operasional untuk memungkinkan pemantauan terpadu serta analitika operasional yang lebih maju.

Sejalan dengan itu, Perusahaan juga menerapkan kebijakan keamanan informasi menyeluruh, termasuk pengembangan pusat operasi keamanan terpadu *(Integrated Security Operations Center/SOC)* yang mencakup lingkungan IT dan OT untuk meningkatkan deteksi dan respons insiden siber secara *real-time*.

Keseluruhan fokus dan kebijakan strategis TI tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya nilai tambah bagi Perusahaan melalui kontribusi pendapatan baru, penyederhanaan proses bisnis, dan optimalisasi biaya operasional dari setiap investasi TI.

STRATEGIC FOCUS AND POLICY

PGN's Information and Communication Technology (ICT) strategy for 2025 refers to the 2025-2029 Information Technology Strategic Plan (ITSP) formulated to align ICT initiatives with the Company's business targets and the policy direction of Pertamina Group as the parent entity.

One of the key strategic focuses of PGN's ICT strategic policy is to bolster internal synergy within Pertamina's Gas Subholding and with Pertamina's Enterprise IT, enabling fully integrated ICT program planning and execution across the entire organization.

PGN positions its ICT function as a strategic business partner in driving the Company's digital transformation, including through the provision of data-driven solutions and the development of agile applications as business enablers aligned with standards set by Pertamina.

PGN further places priority on the implementation of an integrated Enterprise Resource Planning (ERP) solutions across Gas Subholding and Pertamina, ensuring that core and supporting business processes run more efficiently and remain aligned across all lines.

In the infrastructure sector, the focus of ICT policy in 2025 is to enhance system reliability and availability through information and operational technology convergence (IT-OT convergence). PGN integrates IT infrastructure with operational technology systems, enabling integrated monitoring and more advanced operational analytics.

In parallel, the Company also enforces a holistic information security policy, including the development of an Integrated Security Operations Center (SOC) that covers IT and OT environments to strengthen real-time cyber-incident detection and response capabilities.

Collectively, these IT strategic focuses and policies are aimed at generating added value for the Company through new revenue streams, streamlined business processes, and operational-cost optimization from every IT investment.

FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS TIK PGN 2025
STRATEGIC FOCUS AND POLICY ICT PGN 2025

Selaras RSTI 2025–2029 & Kebijakan Grup Pertamina
Aligned with RSTI 2025-2029 & Group Pertamina Policy

ARAH KEBIJAKAN TIK 2025
ICT Policy Direction 2025

- **Berpedoman pada RSTI 2025–2029**
  Guided by RSTI 2025–2029
- **Selaras dengan Strategi Bisnis PGN**
  Aligned with PGN Business Strategy
- **Mendukung Arah Kebijakan Grup Pertamina**
  Supporting Pertamina Group Policy Direction
- **TIK sebagai *enabler* transformasi digital**
  ICT as an enabler of digital transformation

SINERGI SUBHOLDING GAS & PERTAMINA
Sinergy of Subholding Gas & Pertamina

- **Integrasi program ICT Subholding Gas**
  Integration of Gas Subholding ICT programs
- **Kolaborasi dengan *Enterprise* IT Pertamina**
  Collaboration with Pertamina Enterprise IT
- **Standarisasi perencanaan & implementasi ICT**
  Standardization of ICT planning & implementation
- **Harmonisasi kebijakan & arsitektur TI**
  Harmonization of IT policies & architecture

ICT SEBAGAI *BUSINESS PARTNER*
ICT as Business Partner

- **ICT sebagai *strategic business partner***
  ICT as a strategic business partner
- **Solusi berbasis data**
  Data-driven solutions
- **Aplikasi yang efisien sebagai *business enabler***
  Lean applications as business enablers
- **Pengembangan sesuai standar Pertamina**
  Development in accordance with Pertamina standards

ERP TERPADU SUBHOLDING GAS – PERTAMINA
Integrated ERP Gas Subholding – Pertamina

- **Implementasi ERP terintegrasi**
  Implementation of integrated ERP
- **Proses bisnis inti & pendukung lebih efisien**
  More efficient core & supporting business process
- **Konsistensi data & transparansi grup**
  Group data consistency & transparency
- **Mendukung tata kelola & pelaporan**
  Support for governance & reporting

KEANDALAN INFRASTRUKTUR & IT-OT CONVERGENCE
Infrastructure Reliability & IT-OT Convergence

- **Integrasi IT & *Operational Technology* (OT)**
  Integration of IT & OT
- **Monitoring terpadu sistem operasional**
  Integrated monitoring of operational system
- **Analitika operasional lanjutan**
  Advanced operational analytics
- **Peningkatan *availability* & *reliability***
  Enhanced availability & reliability

KEAMANAN SIBER & SOC TERINTEGRASI
Cybersecurity & Integrated SOC

- **Kebijakan keamanan informasi menyeluruh**
  Thorough information security policy
- ***Integrated* SOC (IT & OT)**
  Integrated SOC (IT & OT)
- **Deteksi & respons insiden *real-time***
  Real-time detection & response
- **Perlindungan infrastruktur kritikal**
  Critical infrastructure protection

REALISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, PGN melaksanakan berbagai program kerja TI sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Di bidang infrastruktur dasar, PGN meningkatkan kapasitas konektivitas dan jaringan komunikasi data untuk mendukung operasional yang andal.

Perusahaan juga menyediakan perangkat kerja modern bagi pegawai melalui skema sewa perangkat komputer dan perangkat *gadget*, sehingga pegawai dapat menggunakan teknologi terkini tanpa membebani belanja modal yang besar.

Selain itu, PGN mengalihdayakan layanan pemeliharaan TI kritikal melalui skema *managed services*. Langkah ini mencakup pemeliharaan infrastruktur TI, layanan keamanan siber untuk lingkungan TI maupun teknologi operasional (OT), serta layanan manajemen *backup-restore* data, guna memastikan sistem penting selalu tersedia dan terlindungi dengan standar layanan yang tinggi.

PGN juga menjaga keandalan aplikasi bisnis inti dengan memanfaatkan penyediaan layanan terkelola untuk aplikasi dan solusi integrasi, serta menjamin keberlangsungan sistem penagihan (*billing system*) melalui kontrak pemeliharaan khusus. Untuk mendukung operasional tersebut, Perusahaan menganggarkan lisensi dan dukungan teknis berbagai perangkat lunak yang dibutuhkan, serta memastikan seluruh sistem selalu *up-to-date* dan sesuai ketentuan lisensi.

Dari sisi efisiensi biaya, fungsi ICT menerapkan mekanisme *chargeback* melalui *Shared Service Center* Pertamina, sehingga biaya layanan TI didistribusikan secara proporsional ke unit-unit terkait di dalam Perusahaan. Pendekatan ini mendorong transparansi biaya dan penggunaan sumber daya TI yang lebih optimal.

Di bidang pelayanan pelanggan, PGN meluncurkan platform digitalisasi pelanggan gas (Digitalisasi Kepelangganan Gas) yang memudahkan proses pendaftaran pelanggan baru secara daring. Melalui inovasi ini, calon pelanggan dapat mendaftar layanan gas PGN secara lebih cepat dan praktis, meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperluas jangkauan layanan Perusahaan.

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROGRAM

Throughout 2025, PGN carried out various IT work programs in accordance with the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP). In the basic infrastructure sector, PGN enhanced connectivity capacity and data communication network to ensure reliable operations.

The Company also equipped employees with modern working devices through a leasing arrangement for computers and gadgets, enabling employees to utilize the latest technology without imposing significant capital expenditure.

Additionally, PGN outsourced critical IT maintenance services through a managed services scheme. This covers IT infrastructure maintenance, cybersecurity services for IT and OT environments, as well as data backup-restore management services to ensure mission-critical systems remain available and protected under high service-level standards

PGN also maintains the reliability of its core business applications by utilizing managed services for applications and integrated solutions, while ensuring the continuity of its billing system through a dedicated maintenance agreement. To support these operations, the Company allocates budgets for software licences and technical support, ensuring that all systems remain up-to-date and compliant with licensing requirements.

From the cost efficiency perspective, the ICT function applies a chargeback mechanism through Pertamina's Shared Service Center, through which IT service costs are distributed proportionally to the relevant units within the Company. This approach promotes cost transparency and drives more optimal utilization of IT sources.

In the area of customer service, PGN launched a Gas Customer Digitalization platform that simplifies an online registration process for new customers. Through this innovation, prospective customers are able to register for PGN services more swiftly and conveniently, improving customer experience as well as expanding the Company's service outreach.

PGN juga telah menerapkan inisiatif teknologi maju pada tahun 2025, salah satunya melalui implementasi *platform* AI dan analitika yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas pengolahan data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai fungsi. Perusahaan juga membangun *integration gateway* sebagai infrastruktur integrasi yang memungkinkan pertukaran data antar sistem secara lebih mulus dan *real-time*, sehingga ekosistem aplikasi PGN dapat terhubung secara efektif.

PGN also advanced its technology initiatives in 2025, including the deployment of AI and analytics platforms designed to enhance data-processing capabilities and support data-driven decision-making across various functions. The Company also developed an integration gateway infrastructure to facilitate seamless and real-time data exchange between systems, ensuring effective connectivity across PGN's application ecosystem.

Dalam proses akselerasi digital yang berlangsung di tahun 2025, secara simultan Perusahaan juga meningkatkan aspek keamanan informasi. PGN bekerja sama dengan penyedia jasa keamanan siber untuk menjalankan program peningkatan kesadaran keamanan siber (*cyber security awareness*) bagi seluruh karyawan, sebagai lini pertahanan pertama terhadap berbagai ancaman digital.

During the digital acceleration process throughout 2025, the Company simultaneously also strengthened its information security aspect. PGN partnered with cybersecurity service providers to run cybersecurity awareness programs for all employees, serving as the first line of defense against various digital threats.

Sepanjang tahun, fungsi ICT PGN juga melaksanakan serangkaian audit dan penilaian atas sistem TI untuk memastikan kepatuhan dan kinerja sesuai standar yang ditetapkan. Selaras dengan regulasi terbaru, PGN melakukan pemantauan intensif terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam lingkungan teknologi informasi, demi menjamin kepatuhan dan perlindungan data pemangku kepentingan. PGN juga telah menyusun dokumen RSTI 2025 - 2029 serta pemutakhiran *Enterprise Architecture*, yang akan menjadi panduan strategis bagi pengembangan TI dan inisiatif digital Perusahaan di tahun-tahun berikutnya.

Throughout the year, the ICT function at PGN also undertook a series of IT system audits and assessments to ensure compliance and performance in accordance with established standards. In response to the latest regulations, PGN also carried out intensive monitoring of the implementation of Law Number 27 of 2022 of Personal Data Protection (PDP Law) across its information technology environment to ensure regulatory compliance and protect stakeholder data. PGN further prepared the 2025-2029 IT Strategic Plan (RSTI) document and updated its Enterprise Architecture, which will serve as a strategic guidance for the Company's IT development and digital initiatives for the coming years.

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN/ATAU PENILAIAN TEKNOLOGI INFORMASI

FOLLOW-UP TO AUDIT RESULTS AND/OR INFORMATION TECHNOLOGY ASSESSMENT



3,56 **(dari skala 5) - Level *Defined***
(from a scale of 5) - Defined Level

Tingkat Kematangan Tata Kelola TI PGN
The Maturity Level of PGN's IT Governance

PGN telah melaksanakan penilaian maturitas tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 pada tahun 2024. Hasil *assessment* tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI PGN berada pada level "*Defined*" (terdefinisi) dengan skor rata-rata 3,56 dari skala 5.

Menyikapi hasil penilaian ini, pada 2025 PGN menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kematangan proses-proses TI sesuai rekomendasi *assessment*, dengan target mencapai level "*Quantitatively Managed*" (terkelola secara kuantitatif) dengan skor minimal 4,00.

Upaya peningkatan difokuskan pada proses-proses yang sebelumnya dinilai masih lemah atau belum konsisten. Sebagai contoh, terdapat beberapa proses manajemen TI (seperti pengelolaan inovasi) yang pada penilaian awal berada di Level 2 (*Managed Process*), sehingga Perusahaan memprakarsai langkah-langkah perbaikan seperti standarisasi prosedur dan penerapan metrik kinerja di area tersebut.

Di sisi lain, PGN juga mengidentifikasi proses-proses yang sudah memiliki kematangan tinggi, bahkan telah mencapai Level 5 atau "*Optimizing*", seperti pengelolaan vendor, manajemen keamanan, dan manajemen program. Praktik-praktik terbaik dari area yang sudah unggul ini dijadikan acuan bagi proses lain, sehingga terjadi peningkatan yang lebih merata di seluruh domain tata kelola TI.

Selain audit tata kelola, PGN bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melakukan penilaian kematangan keamanan siber Perusahaan menggunakan instrumen IKAS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapabilitas keamanan siber PGN pada sejumlah domain (seperti domain Identifikasi, Proteksi, Deteksi, dan Respons Insiden) umumnya telah berada pada kategori "Terkelola" (Level 4 dari 5 tingkat maturitas). Temuan ini mengindikasikan praktik keamanan siber yang sudah terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Meskipun demikian, *assessment* IKAS berhasil mengidentifikasi area-area spesifik yang masih perlu ditingkatkan pada masing-masing domain keamanan, dan BSSN memberikan serangkaian rekomendasi perbaikan berdasarkan kelemahan yang teridentifikasi tersebut. Menindaklanjuti rekomendasi ini, PGN menyusun rencana aksi untuk memperkuat kerangka keamanan siber Perusahaan.

PGN conducted an IT governance maturity assessment based on the 2019 COBIT framework in 2024. The assessment result showed that PGNS's IT governance maturity was at the "Defined" level, with an average score of 3.56 out of a 5-point scale.

Based on these findings, PGN developed a follow-up plan in 2025 to improve the maturity of its IT processes in accordance with the assessment recommendations, targeting the "Quantitatively Managed" level with a minimum score of 4.00.

Improvement efforts focused on processes previously identified as underperforming or lacking consistency. For instance, several IT management processes (such as innovation management), which were initially assessed at Level 2 (Managed Process), prompted the Company to initiate improvement measures including procedure standardization and the adoption of performance metrics in those areas.

Additionally, PGN also identified processes that have achieved a high maturity level, including those at Level 5 or "Optimizing", such as vendor management, security management, and program management. Best practices from these high-performing areas used as benchmarks for other processes to drive more consistent improvement across all IT governance domains.

In addition to governance audits, PGN in collaboration with the National Cyber and Encryption Agency (BSSN), conducted a cybersecurity-maturity assessment using the IKAS instrument. The results indicated that PGN's cybersecurity capabilities in several domains—such as Identification, Protection, Detection, and Incident Response—were generally at the "Managed" category (Level 4 out of 5). These findings indicate that PGN reinforces well-structured and well-documented cybersecurity practices.

At the same time, the IKAS assessment also successfully identified specific areas within each domain that still required further improvement, and BSSN subsequently issued a set of improvement recommendations to address the identified weaknesses. In response, PGN developed an action plan to strengthen the Company's cybersecurity framework.

Berbagai kebijakan dan pengendalian keamanan ditinjau dan diperbarui sesuai panduan BSSN, mencakup penyusunan kebijakan keamanan siber yang lebih komprehensif, peningkatan prosedur uji kerentanan dan *penetration testing*, penguatan perlindungan data/informasi, serta penyempurnaan rencana penanganan insiden siber.

PGN juga menjalin kerja sama berkelanjutan dengan BSSN, termasuk menyelenggarakan lokakarya dan konsultasi, untuk memastikan rekomendasi perbaikan diimplementasikan secara efektif. Langkah-langkah tindak lanjut ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan tingkat maturitas keamanan informasi PGN ke tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang.

REALISASI PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Anggaran ICT PGN pada tahun 2025 dialokasikan secara seimbang untuk mendukung kebutuhan operasional yang rutin sekaligus pendanaan proyek-proyek strategis. Realisasi belanja TI sepanjang tahun 2025 secara umum sesuai rencana dan terkelola dengan efisien di berbagai inisiatif.

Sebagian besar pos anggaran difokuskan pada pengeluaran operasional (OPEX), melalui skema layanan dan sewa, sehingga Perusahaan memperoleh fleksibilitas biaya dan teknologi terkini tanpa investasi modal yang besar di awal. Sebagai contoh, alih-alih membeli aset TI secara langsung, PGN memilih menyewa perangkat keras seperti komputer kerja karyawan dan infrastruktur TI lainnya.

Model pembiayaan ini memastikan peremajaan teknologi secara berkala dengan beban biaya yang tersebar. Di luar itu, penggunaan *managed services* untuk pemeliharaan sistem dan keamanan siber memungkinkan Perusahaan mendapatkan keahlian khusus dengan biaya yang terukur, tanpa harus menambah beban sumber daya internal secara permanen. Pendekatan model pembiayaan ini mencerminkan strategi keuangan TI yang *prudent*, selaras dengan prinsip bahwa belanja TI harus sepadan dengan nilai manfaat yang diperoleh.

Sementara itu, investasi strategis TI seperti pengembangan platform AI & analitika serta implementasi *integration gateway* dilaksanakan dengan perencanaan anggaran yang cermat. Setiap proyek inovatif diukur manfaatnya terhadap bisnis dan diupayakan tetap dalam koridor biaya yang dialokasikan.

Various security policies and controls were reviewed and updated based on BSSN guidelines, including the development of a more comprehensive cybersecurity policy, improvements in vulnerability testing and penetration testing procedures, refinements to the cyber-incident response plans.

PGN also maintains ongoing collaboration with BSSN, through workshops and consultation sessions to ensure the recommended improvements are implemented effectively. These follow-up actions are expected to accelerate the advancement of the maturity level of information security at PGN in the coming years.

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FINANCING

PGN allocated the 2025 ICT budget in a balanced manner to support recurring operational needs while also financing strategic projects. The realization of IT expenditure throughout 2025 generally aligned with the plan and was efficiently managed across multiple initiatives.

A significant portion of the budget was directed toward operational expenditures (OPEX) through service and leasing scheme so that the Company gains cost flexibility and access to the latest technology without large upfront capital investments. For instance, rather than purchasing IT assets directly, PGN opted to lease hardwares such as workstations for employees and other IT infrastructures.

This financing model ensures regular technology renewal with costs distributed over time. In addition, the use of managed services for system maintenance and cybersecurity provides the Company access to specialized expertise at measurable costs, without permanently adding internal resource burdens. This approach reflects prudent IT financial strategy, aligned with the principle that IT expenditures must be proportional to the value generated.

Meanwhile, IT strategic investments such as the development of IT and analytics platforms as well as the implementation of an integration gateway were executed through careful budgetary planning. Each innovative project is assessed for its business impact and managed to remain within the allocated cost parameters.



PGN juga menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pemenuhan kepatuhan dan tata kelola TI (termasuk pelaksanaan audit, *assessment*, serta penyesuaian sistem terhadap UU PDP) dan penyusunan inisiatif strategis baru. Hingga akhir 2025, eksekusi anggaran TI menunjukkan disiplin yang baik, seluruh program utama berhasil dijalankan tanpa pemborosan, dan berbagai inisiatif transformasi digital dapat terlaksana sesuai jadwal.

Hasilnya, pengeluaran TIK 2025 berhasil mencapai keseimbangan antara pemeliharaan operasional dan investasi inovasi, sekaligus memenuhi target optimalisasi biaya yang telah ditetapkan. Realisasi rencana pembiayaan yang efektif ini berkontribusi pada efisiensi biaya Perusahaan secara keseluruhan dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi PGN.

PGN also allocated an adequate budget for IT compliance and governance activities (including audits, assessments, and system adjustments to the PDP Law) and the formulation of new strategic initiatives. By the end of 2025, IT budget execution demonstrated discipline, with all key programs successfully executed without waste, and various digital transformation initiatives delivered on schedule.

This resulted in 2025 ICT spending that successfully achieved a balance between operational maintenance and innovation investment, while meeting established cost optimization targets. The effective implementation of this financing plan contributed to the Company's overall cost efficiency and provided tangible added value to PGN.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MEMPERKUAT LAYANAN

PGN memanfaatkan teknologi digital terutama untuk memudahkan akses informasi dan layanan bagi pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Selama 2025, PGN terus memperkuat kanal layanan digital bagi pelanggan, seperti menyediakan fasilitas pendaftaran sambungan gas rumah tangga (GasKita) secara daring melalui situs web resmi (pgas.id) maupun aplikasi PGN Mobile, sehingga calon pelanggan dapat mengajukan berlangganan gas kapanpun dan dimanapun.

Sistem pendaftaran *online* ini secara signifikan menyederhanakan proses *onboarding* pelanggan baru, menunjukkan kemampuan adaptasi PGN dalam mengadopsi solusi digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aplikasi PGN Mobile juga dimanfaatkan oleh pelanggan eksisting untuk mengakses informasi akun mereka secara mandiri, seperti melihat tagihan gas, memantau penggunaan gas *secara real-time*, hingga mengumpulkan poin loyalitas.

Selain itu, PGN telah mengimplementasikan sistem manajemen perjanjian gas *online* atau *Electronic Gas Agreement Management* (E-Nol), yang memungkinkan calon pelanggan menandatangani kontrak baru atau melakukan amandemen kontrak secara elektronik tanpa dokumen fisik, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat. Melalui berbagai platform digital tersebut, PGN memastikan pelanggan dapat memperoleh informasi dan layanan Perusahaan secara cepat, transparan, dan mudah.

Secara internal, PGN telah mengoperasikan sistem informasi terintegrasi untuk memfasilitasi akses data operasional dan manajerial secara *real-time*. Perusahaan menerapkan *Integrated Control System* (ICS) yang mengotomatisasi pengumpulan dan pengelolaan data di jaringan distribusi gas, sehingga proses yang sebelumnya manual kini berjalan *online* dan tersentralisasi.

Data operasional yang diperoleh dari berbagai stasiun gas bumi dan perangkat ukur otomatis atau *Automatic Meter Reading* (AMR) dikonsolidasikan dalam sistem ini, kemudian diolah oleh aplikasi manajemen gas yang terintegrasi. Sistem ini mendukung berbagai alat digital yang bermanfaat bagi PGN maupun pelanggan, salah satunya adalah tersedianya *dashboard* manajemen yang menampilkan informasi kinerja penjualan, progres akuisisi pelanggan, hingga status penyambungan pipa gas secara *real-time*.

LEVERAGING TECHNOLOGY TO STRENGTHEN SERVICES

PGN leverages digital technology primarily to facilitate access to information and services for customers and other stakeholders. Throughout 2025, PGN continues to strengthen its digital service channels for customers, such as providing online household gas connection registration (GasKita) through the official website (pgas.id) and the PGN Mobile app, allowing prospective customers to apply for gas subscriptions anytime and anywhere.

This online registration system significantly simplifies the onboarding process for new customers, demonstrating PGN's adaptability in adopting digital solutions to meet consumer needs. Existing customers also use the PGN Mobile app to independently access their account information, such as checking gas bills, monitoring real-time gas usage, and accumulating loyalty points.

Additionally, PGN has implemented an online gas agreement management system, or Electronic Gas Agreement Management (E-Nol), allowing prospective customers to sign new contracts or amend contracts electronically with no physical documents, resulting in faster and more accurate administrative processes. Through these various digital platforms, PGN ensures that customers can access Company information and services quickly, transparently, and easily.

Internally, PGN has utilized an integrated information system to facilitate real-time access to operational and managerial data. The Company has implemented an Integrated Control System (ICS) that automates data collection and management across the gas distribution network, converting formerly manual processes into centralized and online operations.

Operational data from natural gas stations and Automatic Meter Reading (AMR) devices are consolidated within the system and processed through an integrated gas management application. The system supports digital tools that provide benefits for both PGN and its customers, including a real-time management dashboard displaying sales performance, customer acquisition progress, and gas pipeline connection status.

PGN juga menggunakan aplikasi *Sales Force* untuk mencatat dan memonitor aktivitas penjualan secara daring dan terintegrasi sejak tahun 2018, sehingga pimpinan dapat memantau *pipeline* penjualan dan interaksi pelanggan melalui satu platform terpadu. Dari sisi operasional teknis, PGN memanfaatkan sistem *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) guna mengawasi penyaluran gas bumi dan akuisisi data teknis di seluruh jaringan secara *real-time*. Melalui SCADA, pengaturan tekanan dan aliran gas dapat dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu, alarm keadaan darurat (seperti *emergency shutdown valve*), dapat direspons dengan cepat demi keselamatan.

Since 2018, PGN has also utilized the Sales Force application to digitally record and monitor sales activities in an integrated manner, enabling management to oversee the sales pipeline and customer interactions through an integrated platform. On the technical operations side, PGN utilizes a Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system to monitor natural gas distribution and acquire technical data across the entire network in real time. Through SCADA, gas pressure and flow can be remotely controlled. Additionally, emergency alarms, such as emergency shutdown valves, can be promptly responded to ensure safety.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi di PGN memastikan informasi Perusahaan yang akurat dan terkini selalu tersedia, baik bagi pelanggan yang ingin memeriksa penggunaan gasnya, manajemen yang membutuhkan data kinerja untuk pengambilan keputusan, maupun petugas operasional yang memantau infrastruktur energi. Hal ini meningkatkan transparansi, respons layanan, dan kualitas pengambilan keputusan di PGN.

Overall, technology utilization at PGN ensures that accurate and up-to-date Company information is readily available, be it for customers who wish to check their gas usage, management who require performance data for decision-making, or operational staff who monitor energy infrastructure. This enhances transparency, service responsiveness, and decision-making quality at PGN.



Pemanfaatan Teknologi untuk Akses Informasi Perusahaan
Utilization of Technology for Access to Company Information

PGN memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan perusahaan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

PGN takes advantage of digital technology to provide ease to information access and Company services for customers and stakeholders.

Kanal Layanan Digital PGN
PGN Digital Service Channel

GasKita Online

Daftar sambungan **Gaskita** via situs pgas.id & aplikasi PGN Mobile
Register **GasKita** connection via PGN Mobile app & web pgas.id

- ✓ Akses akun gas, cek tagihan, pemakaian *real-time*, & *loyalty points*
  Access to gas account, billing, real-time usage, & loyalty points
- ✓ Proses lebih cepat, transparan, kapan pun & di mana pun
  Faster, more transparent process anytime & anywhere



E-NOL (*Electronic Gas Agreement Management*)

- ✓ Tandatangani/amendemen kontrak gas *online*
  Online gas contract amendment/sign
- ✓ Hemat waktu & tanpa dokumen fisik
  Save time & no physical documents
- ✓ Administrasi lebih cepat & akurat
  A more accurate & faster administration process





Integrated Control System (ICS)

- ✓ Otomatisasi pemantauan distribusi gas
  Automatization of gas distribution monitoring
- ✓ Display data operasional *real-time*
  Display of real-time operational data
- ✓ *Dashboard* kinerja & akuisisi pelanggan
  Performance dashboard & customer acquisition



SCADA & AMR

- ✓ Awasi tekanan & aliran gas jarak jauh
  Monitor gas pressure & flow remotely
- ✓ Alarm darurat *real-time* (*shutdown valve*, dll)
  Real-time emergency alarm (shutdown valve, etc.)
- ✓ Mendukung keselamatan & responsivitas
  Support safety & responsiveness

Hasil: Akses Informasi Cepat, Transparan, & Akurat
Results: Fast, Transparent, & Accurate Information Access

- ✓ Memantau penggunaan gas & kinerja Perusahaan
  Monitor gas usage & Company performance
- ✓ Keputusan manajemen berbasis data
  Data-driven management decision
- ✓ Responsivitas & keselamatan operasional meningkat
  Rising operational responsiveness & safety

Pemanfaatan teknologi memastikan setiap pihak, dapat mengakses informasi Perusahaan secara cepat, akurat, dan mudah.

The utilization of technology ensures that every party can access Company information in a fast, accurate, and easy manner.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER

PGN menerapkan tata kelola TI yang kuat, untuk memastikan seluruh inisiatif teknologi terselenggara secara terkendali dan mendukung pencapaian sasaran strategis. Kerangka tata kelola TI PGN diselaraskan dengan praktik terbaik serta kebijakan Grup Pertamina selaku perusahaan induk, mengingat PGN merupakan Subholding Gas di bawah Pertamina.

PGN mengadopsi kerangka kerja internasional seperti COBIT 2019 dalam mengelola tata kelola TI, dimana capaian dan kapabilitas proses TI dievaluasi secara berkala untuk diukur tingkat maturitasnya dan ditingkatkan apabila diperlukan. Kebijakan dan prosedur standar TI dikembangkan di berbagai area, mulai dari manajemen proyek TI, pengembangan aplikasi, layanan operasi TI, hingga pengelolaan data dan keamanan informasi.

Secara rutin, PGN melakukan tinjauan serta audit yang dilakukan secara internal oleh Fungsi ICT terhadap kepatuhan atas kebijakan TI, sekaligus mengundang audit eksternal atau asesmen independen untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Struktur tata kelola juga memastikan adanya koordinasi lintas fungsi, sehingga inisiatif TI selalu sejalan dengan kebutuhan bisnis dan peraturan yang berlaku.

Keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola TI di PGN. Perusahaan memiliki kebijakan dan kerangka pengendalian keamanan informasi yang komprehensif, mengikuti standar global maupun regulasi nasional di bidang pelindungan infrastruktur vital.

Pada tahun 2025, PGN menekankan pendekatan keamanan terpadu yang mencakup sistem TI korporat sekaligus teknologi operasional (OT) di lapangan. Salah satu inisiatif yang penting adalah pengembangan *Security Operations Center* (SOC) terpadu yang memantau ancaman keamanan di lingkungan IT dan OT secara *real-time*, sehingga insiden siber dapat dideteksi dan direspons secara cepat dan terkoordinasi. PGN juga berkolaborasi dengan BSSN dalam memperkuat tata kelola keamanannya.

GOVERNANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBERSECURITY

PGN implements solid IT governance to ensure that all technology initiatives are carried out in a controlled manner and support the achievement of strategic objectives. The PGN IT governance framework is aligned with the best practices and policies of the Pertamina Group as the holding company, considering that PGN is a gas subholding under Pertamina.

PGN adopts international frameworks such as COBIT 2019 in managing IT governance, in which IT process outcomes and capabilities are periodically evaluated to determine their maturity and enhanced as needed. Standard IT policies and procedures are developed in various areas, from IT project management, application development, IT operations services, to data management and information security.

PGN regularly conducts reviews and internal audits by the ICT Function to ensure compliance with IT policies, while also engaging external auditors or independent assessors to identify opportunities for improvement. The governance structure further ensures cross-functional coordination, maintaining alignment between IT initiatives, business objectives, and applicable regulations.

Cybersecurity constitutes an integral part of IT governance at PGN. The Company implements comprehensive information security policies and control frameworks, aligning it with global standards and national regulations on critical infrastructure protection.

In 2025, PGN emphasized an integrated security approach that covered both corporate IT systems and operational technology (OT) in the field. One important initiative was the development of an integrated Security Operations Center (SOC) capable of monitoring security threats in IT and OT environments in real time, enabling rapid and coordinated detection and response to cyber incidents. PGN also collaborated with BSSN to strengthen its security governance.

Secara berkala, para pakar BSSN memberikan asistensi kepada PGN dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan keamanan siber perusahaan, pelaksanaan pengujian keamanan (seperti penilaian kerentanan dan uji penetrasi), peningkatan langkah - langkah pelindungan data, serta penyempurnaan prosedur penanganan insiden.

Untuk menumbuhkan budaya keamanan yang kuat, PGN secara berkesinambungan menggelar program-program kesadaran keamanan siber bagi seluruh karyawan, disertai pelatihan teknis lanjutan bagi tim TI yang menangani aspek keamanan. Perusahaan juga memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi terkait, termasuk UU PDP, dengan melakukan *monitoring* dan penyesuaian kebijakan internal agar selalu sesuai ketentuan hukum.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI

PGN menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang TI merupakan kunci keberhasilan transformasi digital. Oleh karena itu, sepanjang 2025 PGN menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi bagi perwira di fungsi ICT. Pendekatan yang digunakan bersifat terstruktur, dimulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi dan peran masing-masing personel TI, hingga penyusunan program pelatihan yang tepat sasaran.

Seluruh perwira yang memenuhi kriteria pada jabatan-jabatan tertentu, diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan, sehingga setiap peran kritikal memiliki tingkat keahlian yang terstandar. Perusahaan juga mengelola catatan pelatihan secara sistematis dan melakukan evaluasi pasca-pelatihan untuk mengukur peningkatan kemampuan serta efektivitas program, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Materi dan metode pelatihan senantiasa ditinjau ulang secara periodik agar selaras dengan perkembangan ancaman siber dan kemajuan teknologi terbaru, sehingga budaya sadar keamanan dan inovasi di PGN dapat terus ditumbuhkan secara konsisten.

Di samping pelatihan internal rutin, PGN menjalin kerja sama dengan pihak eksternal guna mempercepat peningkatan kapabilitas SDM TI. Pada tahun 2025 PGN berkolaborasi dengan BSSN untuk menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, dan pelatihan di bidang keamanan siber bagi para perwira. Kegiatan ini secara signifikan memperkuat keterampilan tim keamanan informasi PGN sekaligus meningkatkan kesadaran siber di tingkat perusahaan.

The BSSN experts regularly assist PGN in developing and improving the Company's cybersecurity policies, implementing security testing (such as vulnerability assessments and penetration tests), enhancing data protection measures, and improving incident handling procedures.

To nurture a robust security culture, PGN consistently holds cybersecurity awareness programs for all employees, accompanied by advanced technical training for IT teams who handle security-related matters. The Company also ensures compliance with various relevant regulations, including the PDP Law, by monitoring and adjusting internal policies to remain aligned with prevailing laws.

IT TALENT COMPETENCY DEVELOPMENT

PGN recognizes that capable IT talent is essential to driving digital transformation. Therefore, throughout 2025, PGN rolled out various competency development programs for employees within the ICT function. PGN adopted a structured approach, starting from identifying training needs based on the competencies and roles of each IT personnel, to developing effective training programs.

All employees who meet the criteria for certain positions are required to complete relevant education and training, ensuring that every critical role has a standardized level of expertise. The Company also manages training data systematically and conducts post-training evaluations to measure skill improvement and program effectiveness, which serve as a benchmark for continuous improvement. Training materials and methods are reviewed periodically to align with the latest cyber threats and technological advances, enabling a culture of security awareness and innovation at PGN to continue to consistent growth.

In addition to regular internal training, PGN collaborates with external parties to accelerate the improvement of IT talent capabilities. In 2025, PGN collaborated with BSSN to organize technical guidance, workshops, and training on cybersecurity for employees. These programs significantly strengthened the skills of PGN's information security team and raised cybersecurity awareness at the corporate level.

Perusahaan juga mendorong insan TI untuk meraih sertifikasi profesional dan mengikuti program pengembangan lanjutan sebagai upaya menutup kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Perwira difasilitasi apabila ingin mengambil sertifikasi di bidang tata kelola TI (misalnya COBIT atau ITIL), manajemen proyek TI, komputasi awan, analitika data, keamanan jaringan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Melalui inisiatif pengembangan SDM TI yang komprehensif ini, PGN memastikan tim TI internal selalu memiliki pengetahuan dan keahlian mutakhir untuk mengimplementasikan teknologi baru dan mengelola sistem informasi perusahaan dengan optimal.

The Company also encourages IT staff to obtain professional certifications and enroll in advanced training programs as part of its efforts to bridge identified competency gaps. Employees are provided with support to obtain certifications in IT governance (such as COBIT or ITIL), IT project management, cloud computing, data analytics, network security, and others as needed. This comprehensive IT talent development initiative allows PGN to ensure that its internal IT team is prepared with the latest knowledge and skills to implement new technologies and manage corporate information systems most effectively.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT TI
IT-RELATED COMPETENCY DEVELOPMENT

No	Klaster Kompetensi Competency Cluster	Fokus Pengembangan Development Focus	Tujuan Strategis Strategic Objectives
1	Tata Kelola & Manajemen TI IT Governance & Management	COBIT 2019, manajemen risiko TI, kebijakan & kinerja TI COBIT 2019, IT risk management, IT policy & performance	Memperkuat peran ICT sebagai mitra strategis bisnis Strengthening the role of ICT as a strategic business partner
2	Keamanan Siber & Ketahanan Digital Cybersecurity and Digital Resilience	Cyber security governance, respons insiden, perlindungan data Cybersecurity governance, incident response, data protection	Meningkatkan ketahanan siber dan keamanan informasi Enhancing cyber resilience and information security
3	Data, Analitika & AI Data, Analytics & AI	Data governance, analitika data, pemanfaatan AI Data governance, data analytics, AI utilization	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data Supporting data-driven decision-making
4	Infrastruktur, Cloud & Integrasi Infrastructure, Cloud & Integration	Infrastruktur TI, *cloud computing*, ERP & integrasi sistem IT infrastructure, cloud computing, ERP & system integration	Menjamin keandalan dan integrasi layanan TI Ensuring the reliability and integration of IT services
5	Delivery & Transformasi Digital Digital Delivery & Transformation	Manajemen proyek TI, *agile*, *change management* IT project management, agile, change management	Memastikan eksekusi program digital yang efektif Ensuring effective digital program execution
6	SDM & Budaya Digital HR & Digital Culture	Sertifikasi profesional, *knowledge sharing*, budaya inovasi Professional certification, knowledge sharing, culture of innovation	Menjaga kesiapan dan keberlanjutan kapabilitas SDM TI Maintaining the readiness and sustainability of IT human resource capabilities

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI

IT HR COMPETENCY DEVELOPMENT

PGN berkomitmen meningkatkan keterampilan SDM TI melalui program pelatihan terstruktur & kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung transformasi digital dan keamanan siber.
PGN is committed to improving IT HR skills through a structured training program & cooperation with external party to support digital transformation and cybersecurity.

Kerangka Program Pelatihan
Training program framework

- ✓ Evaluasi kompetensi per bidang TI identifikasi kebutuhan pelatihan
  Competency evaluation as per IT sector, identifying training needs
- ✓ Pelatihan berbasis program oleh pakar sesual area keahlian
  Program-based training by experts with their expertise
- ✓ Monitoring pasca-pelatihan untuk ukur peningkatan
  Monitoring post training to measure improvement
- ✓ Mengembangkan budaya keamanan & inovasi konsisten
  Develop security culture & consistent innovations

5 Klaster Kompetensi SDM TI
5 Clusters of IT HR Competence

Tata Kelola & Manajemen TI
IT Governance & Management
COBIT 2019 & manajemen risiko TI
COBIT 2019 & IT risk management

Keamanan Siber & Ketahanan Digital
Cybersecurity & Digital Resilience
Cybersecurity governance, respons insiden, perlindungan data
Cybersecurity governance, incident response, data protection

Data, Analitika & AI
Data, Analytics, & AI
Data *governance*, analitika data, AI
Data governance, data analytics, AI

Infrastruktur, Cloud & Integrasi
Infrastructure, Cloud & Integration
Infrastruktur TI, *cloud computing*, ERP & integrasi
IT infrastructure, cloud computing, ERP & integration

Delivery & Transformasi Digital
Delivery & Digital Transformation
Manajemen proyek TI, *agile*, *change management*
IT project management, agile, change management

Kerjasama & Sertifikasi Eksternal
External Cooperation & Certification

- ✓ Kolaborasi dengan BSSN, pakar, & lembaga internasional
  Collaboration with BSSN, experts, & international institutions
- ✓ Pelatihan bidang keamanan informasi dan sertifikasi diadakan berkala
  Training on information security & certifications held periodically
- ✓ Mendukung sertifikasi bidang TI (ITIL, manajemen proyek, keamana, dsb.)
  Supporting certifications on IT (ITIL, project management, security, etc.)



Hasil: SDM TI Unggul Mendukung Transformasi Digital & Keamanan Siber
Results: skilled IT HR to support digital transformation & cybersecurity

- ✓ Terampil & siap menghadapi ancaman siber
  Skilled & ready to tackle cyber threats
- ✓ Kompeten mengelola inovasi Ti/transformasi digital
  Ready to implement new technology in the Company
- ✓ Siap implementasikan teknologi baru dalam Perusahaan
  Ready to implement new technology in the Company

PGN memastikan SDM TI terus unggul & adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keamanan siber untuk mencapai tujuan strategis Perusahaan
PGN ensures that IT HR continues to be excel and adaptive to technology development and cybersecurity to achieve Company strategic objectives.

RENCANA DAN STRATEGI ICT 2026

Memasuki tahun 2026, strategi TI PGN disusun untuk melanjutkan momentum transformasi digital dengan menargetkan peningkatan lebih lanjut pada kapabilitas teknologi, ketahanan infrastruktur, dan keselarasan korporat. Salah satu tema utama untuk 2026 adalah otomatisasi dan adopsi teknologi komputasi awan *(cloud)* dalam infrastruktur TI PGN.

Perusahaan merencanakan implementasi solusi *infrastructure automation* serta arsitektur *multi-cloud* untuk jaringan dan pusat data, guna meningkatkan keandalan sistem dan memastikan *redundancy* (cadangan) antar pusat data. Langkah ini akan memperkuat kesiapan PGN dalam menghadapi skenario *disaster recovery* serta meningkatkan skalabilitas layanan digital.

Sejalan dengan itu, PGN juga akan memodernisasi sistem penyimpanan dan pencadangan data, termasuk melakukan pembaruan teknologi *backup* di site pemulihan bencana *(Disaster Recovery Center)*, agar data kritikal Perusahaan lebih aman dan proses pemulihan pasca insiden dapat berlangsung lebih cepat.

Tata kelola data dan pemanfaatan analitika lanjut menjadi fokus berikutnya dalam rencana 2026. PGN berencana membentuk kerangka *Data Governance* dan *AI Governance* yang lebih formal untuk memaksimalkan nilai *insight* dari data, sekaligus menjaga kualitas, privasi, dan keamanan data tersebut.

Penerapan tata kelola ini akan memastikan inisiatif *big data* dan AI di PGN berjalan sesuai prinsip kepatuhan dan etika. Selain itu, perusahaan akan mengimplementasikan mekanisme *Change Data Capture* (CDC) yang memungkinkan integrasi dan replikasi data antar sistem berlangsung hampir seketika. Dengan CDC, sinkronisasi data antar aplikasi diharapkan menjadi lebih baik, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasi lintas sistem yang lebih selaras secara *real-time*.

Pada aspek aplikasi dan layanan pelanggan, PGN berencana untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem informasi penjualan dan platform layanan digital. Salah satu inisiatifnya adalah peningkatan fungsi pada aplikasi *Sales Force* yang digunakan tim penjualan, antara lain dengan menambahkan fitur peramalan penjualan (*sales forecasting*), agar PGN dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan.

ICT PLAN AND STRATEGY FOR 2026

As we enter 2026, IT strategies for PGN are designed to maintain the momentum of digital transformation by targeting further improvements in technological capabilities, infrastructure resilience, and corporate alignment. One of the key themes for 2026 is automation and the adoption of cloud computing technology within PGN's IT infrastructure.

The Company plans to implement infrastructure automation solutions and multi-cloud architecture for its network and data centers to improve system reliability and ensure redundancy between data centers. This step will strengthen PGN's preparedness in the event of a disaster recovery scenario and improve the scalability of its digital services.

As such, PGN will also modernize its data storage and backup systems, including upgrading the backup technology at its Batam Disaster Recovery Center, enabling the Company's critical data to be more secure, and the post-incident recovery process can proceed rapidly.

The next priorities in the 2026 plan are data governance and advanced analytics utilization. PGN intends to establish a more formal Data Governance and AI Governance framework to maximize data insight values and maintain data quality, privacy, and security.

By adopting this governance approach, PGN's big data and AI initiatives will be carried out in accordance with compliance and ethical principles. Additionally, the Company will implement a Change Data Capture (CDC) mechanism that enables nearly instantaneous data integration and replication across systems. Using CDC mechanism, data synchronization between applications is expected to improve, enabling faster decision-making and more seamless cross-system operations in real time.

On the application and customer service aspects, PGN plans to further develop its sales information system and digital service platform. One of its initiatives is to enhance the functions of the Sales Force application used by the sales team, including the addition of a sales forecasting feature, allowing PGN to be more proactive in anticipating market demand and customer needs.

Data dari lapangan penjualan akan diolah untuk memprediksi tren ke depan, sehingga dapat membantu manajemen dalam perencanaan bisnis yang lebih akurat. Program digitalisasi layanan pelanggan (digitalisasi kepelangganan) akan terus dilanjutkan di 2026, untuk menjangkau basis pengguna yang lebih luas dan memberikan pengalaman layanan yang semakin mudah dan modern. PGN juga akan menyempurnakan kanal-kanal digital bagi pelanggan, termasuk pengembangan lebih lanjut aplikasi *mobile* dan portal daring, sehingga interaksi pelanggan dengan Perusahaan menjadi semakin efisien.

Data derived from sales activities will be processed and analyzed to anticipate future trends, enabling management to develop more accurate business plans. The customer service digitalization program will continue in 2026 to reach a more extensive user base and provide an easier and more modern service experience. PGN will also improve digital channels for customers, including further development of mobile applications and online portals, resulting in more efficient customer interactions with the Company.

Dari perspektif tata kelola dan keunggulan operasional, tahun 2026 akan diwarnai oleh inisiatif peningkatan pengelolaan layanan TI serta sinergi dengan induk usaha. PGN menganggarkan biaya untuk implementasi alat *monitoring* layanan TI dan sistem manajemen aset TI yang lebih canggih, termasuk penguatan manajemen *patch*, peningkatan otomasi *deployment* perangkat lunak, serta integrasi sistem manajemen identitas untuk server-server kritikal.

From governance and operational excellence perspectives, the year 2026 will be dominated by initiatives to improve IT service management and create synergies with holding companies. PGN allocates funds for the implementation of more advanced IT service monitoring tools and IT asset management systems, including strengthening patch management, improving software deployment automation, and integrating identity management systems for critical servers.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan semua aset TI Perusahaan terinventarisir dengan baik, selalu dalam versi *patch* terbaru, dan memenuhi standar keamanan. Inisiatif strategis utama lainnya adalah rencana standardisasi dan harmonisasi sistem ERP PGN dengan sistem ERP Pertamina. Hal ini akan menyelaraskan proses bisnis dan data keuangan antara PGN dan induknya, mendorong efisiensi operasional dan transparansi laporan dalam lingkup grup.

These efforts aim to ensure that all IT assets are properly inventoried, timely patched to the latest versions, and fully compliant with applicable security standards. Another key strategic initiative is the plan to standardize and harmonize PGN's ERP system with Pertamina's ERP system. In doing so, business processes and financial data between PGN and its holding company will be aligned, promoting operational efficiency and transparency of reporting within the group.

Di luar itu, PGN akan terus memperkuat keamanan siber, serta meneruskan layanan *managed security* dan program *awareness* untuk melindungi lingkungan digital PGN yang kian berkembang. Kegiatan audit dan *assessment*, seperti untuk penilaian kesiapan infrastruktur baru dan evaluasi berkala atas *posture* keamanan, akan rutin dijalankan sepanjang 2026 untuk memastikan program-program TI yang diimplementasikan tetap sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

Beyond that, PGN will continue to reinforce cybersecurity and continue its managed security services and awareness programs to protect PGN's growing digital environment. Audit and assessment activities, such as assessing the readiness of new infrastructure and periodically evaluating security posture, will be carried out on a regular basis throughout 2026,ensuring that the IT programs implemented remain on track and deliver the anticipated results.

Secara keseluruhan, seluruh rencana TI diharapkan dapat memantapkan perjalanan transformasi digital PGN. Strategi TI tahun 2026 diarahkan pada pembangunan sistem yang lebih cerdas, tangguh, dan terintegrasi, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan, namun juga menciptakan keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan. Targetnya, pada akhir 2026 PGN telah mencapai kemajuan signifikan dalam tingkat kematangan TI, mendekati sasaran level tata kelola yang telah ditetapkan, serta memperkokoh posisinya sebagai Perusahaan yang berorientasi digital di sektor energi.

Overall, all IT plans are expected to cement PGN's digital transformation journey. The 2026 IT strategy is aimed at building smarter, more resilient, and integrated systems that support the Company's business growth and create competitive advantages in terms of operational efficiency and customer service quality. By the end of 2026, PGN aims to achieve significant progress in its IT maturity level, achieve a level close to the established governance target, and solidify its position as a digitally oriented company in the energy sector.

RENCANA DAN STRATEGI ICT 2026
ICT PLAN AND STRATEGY IN 2026

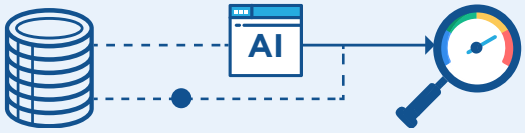
TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PGN YANG CERDAS & TERINTEGRASI
DIGITAL TRANSFORMATION FOR SMART & INTEGRATED PGN

INFRASTRUKTUR DIGITAL MODERN
MODERN DIGITAL INFRASTRUCTURE



- Multi-Cloud & Data Center Redundansi
- Disaster Recovery DRC
- Otomasi & Backup Canggih
  Advanced Automation & Backup
- Skalabilitas Layanan Tinggi
  High Service Scalability

TATA KELOLA DATA & ANALITIKA
DATA & ANALYTICS GOVERNANCE



- Data Governance & AI Ethics
- Big Data & Change Data Capture
- Sinkronisasi Data *Real-Time*
  Synchronized Real-Time Data

APLIKASI BISNIS & LAYANAN DIGITAL
DIGITAL SERVICE & BUSINESS APP



- *Sale Forecasting* & Analitik
  Sales Forecasting & Analytics
- *Platform* Layanan Digital
  Digital Service Platform
- Pengalaman Pelanggan Modern
  Modern Customer Experience

KELOLA TI & SINERGI GRUP
IT MANAGEMENT & GROUP SYNERGY



- IT Monitoring & ERP Harmonis
  Harmonious IT Monitoring & ERP
- Manajemen Aset & Keamanan
  Security & Asset management
- *Cyber Security* & Audit Berkala
  Cyber security & Periodic Audit

TARGET AKHIR 2026
2026 FINAL TARGET

- ***Maturity* TI Meningkat**
  IT Maturity Increases
- **Sistem Tangguh & Aman**
  Secure & Robust System
- **Integrasi Grup Kuat**
  Strong Group Integration
- **Layanan *Scalable***
  Scalable Services
- **Keunggulan Kompetitif**
  Competitive Excellence

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



05


NUSANTARA REGAS SATU

TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI
MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

Berbagai tantangan membayangi pertumbuhan ekonomi global pada 2025. Tantangan seperti fragmentasi perdagangan global karena proteksionisme dan kebijakan tarif, serta ketidakpastian geopolitik karena konflik regional dan tensi geopolitik, sangat memengaruhi kinerja Perseroan. Tantangan-tantangan tersebut mengakibatkan rantai pasok global menjadi kurang efisien dan lebih mahal, menekan perdagangan dan investasi lintas negara, serta mendorong volatilitas harga komoditas.

Dalam *World Economic Outlook Update* yang di terbitkan pada Januari 2026, IMF memproyeksikan ekonomi global akan bertumbuh sebesar 3,3% atau naik 0,2% dibandingkan proyeksi di bulan Oktober 2025. IMF memandang pertumbuhan global tersebut didukung oleh meredanya ketegangan perdagangan global, stimulus fiskal yang lebih tinggi dari perkiraan, kondisi keuangan yang akomodatif, fleksibilitas sektor swasta dalam mengurangi gangguan perdagangan, serta kerangka kebijakan yang lebih baik, terutama di negara-negara berkembang. Sementara, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mencapai 5%, sama dengan pertumbuhan tahun 2024.

Meski dinamika perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid. Perekonomian Indonesia tumbuh kuat di 2025, menjadi landasan untuk tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan. Pada kuartal IV 2025, ekonomi tumbuh 5,39% (*year-on-year*/YoY), dan keseluruhan tahun mencapai 5,11%. Capaian ini ditopang kuatnya permintaan domestik, investasi yang tumbuh tinggi, belanja Pemerintah yang optimal, ekspor yang stabil, serta dukungan penempatan kas Negara di bank komersial. Dari sisi produksi, sektor bernilai tambah tinggi dan pendukung mobilitas masyarakat menjadi sumber pertumbuhan.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV dan 4,98% sepanjang tahun, mencerminkan daya beli yang kuat didukung peningkatan mobilitas masyarakat dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah pada kuartal IV mencapai 4,55% (yoy) dan sepanjang tahun tumbuh 2,5%. Belanja negara memberikan efek pengganda yang luas bagi ekonomi, yang tidak hanya menggerakkan aktivitas dunia usaha, tetapi juga memperkuat konsumsi masyarakat.

Various challenges overshadowed global economic growth in 2025. Challenges such as the fragmentation of global trade due to protectionism and tariff policies, as well as geopolitical uncertainty stemming from regional conflicts and geopolitical tensions, significantly affected the Company's performance. These challenges resulted in global supply chains becoming less efficient and more costly, putting pressure on cross-border trade and investment, and driving volatility in commodity prices.

In the World Economic Outlook Update published in January 2026, the IMF projected global economic growth of 3.3%, an increase of 0.2% compared to the October 2025 projection. The IMF views this global growth as being supported by easing global trade tensions, higher-than-expected fiscal stimulus, accommodative financial conditions, the flexibility of the private sector in mitigating trade disruptions, and stronger policy frameworks, particularly in developing countries. Meanwhile, the IMF estimates Indonesia's economic growth in 2025 to reach 5%, the same as that in 2024.

Despite ongoing uncertainty in the global economic environment, Indonesia's economy throughout 2025 continued to demonstrate resilience and solid performance. The Indonesian economy grew strongly in 2025, providing a foundation for higher and more sustainable growth. In the fourth quarter of 2025, the economy grew 5.39% YoY, while overall growth for the year reached 5.11%. This achievement was supported by strong domestic demand, robust investment growth, optimal government spending, stable exports, and support from the placement of state funds in commercial banks. From the production side, high value-added sectors and sectors supporting community mobility became the key drivers of growth.

From the expenditure side, Household Consumption, as the main contributor, grew 5.11% (YoY) in the fourth quarter and 4.98% for the full year, reflecting strong purchasing power supported by increased community mobility and controlled inflation. Government Consumption grew 4.55% (YoY) in the fourth quarter and 2.5% for the year. Government spending generated broad multiplier effects for the economy, not only driving business activities but also strengthening public consumption.

Pertumbuhan Investasi pada kuartal IV tumbuh 6,12% (yoy) dan sepanjang tahun mencapai 5,09%. Kinerja impresif ini didorong investasi Mesin dan Perlengkapan yang tumbuh 17,99% pada 2025, mengindikasikan penguatan aktivitas industri. Sementara itu, investasi kendaraan tumbuh 5,16% seiring peningkatan aktivitas impor pendukung logistik. Stabilitas makroekonomi dan sinergi kebijakan fiskal-moneter meningkatkan kepercayaan investor, tercermin dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 12,66% pada 2025. Peran belanja modal Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkit investasi swasta, khususnya dengan operasional Danantara. Secara keseluruhan, kinerja ini memperkuat struktur modal nasional untuk mendukung keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi tinggi.

Kinerja Ekspor barang dan jasa riil pada kuartal IV tumbuh 3,25% (yoy), meningkat 7,03% secara tahunan. Peningkatan ekspor terutama bersumber dari ekspor minyak hewan dan nabati, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektronik. Ekspor jasa turut menguat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh 12,5%. Di sisi lain, impor barang dan jasa riil tumbuh 3,96% pada kuartal IV (yoy) dan 4,77% secara tahunan, terutama untuk kebutuhan bahan baku dan barang modal pendukung aktivitas produksi.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan Inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38% (yoy), sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan *imported inflation* yang tetap terkendali.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tertekan sepanjang 2025 dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kebijakan tarif AS dan ketidakpastian The Fed AS dalam menurunkan suku bunga acuan. Rupiah ditutup melemah sebesar 3,64% menjadi Rp16.675 per Dolar AS dari harga penutupan di Desember 2025. Berbagai kebijakan juga diterapkan oleh otoritas moneter, antara lain memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada September 2025. Level 4,75% ini kemudian dipertahankan hingga akhir 2025.

Investment growth in the fourth quarter reached 6.12% (YoY) and 5.09% for the full year. This impressive performance was driven by investment in Machinery and Equipment, which grew 17.99% in 2025, indicating strengthening industrial activity. Meanwhile, vehicle investment grew 5.16% aligned with increased imports supporting logistics activities. Macroeconomic stability and fiscal-monetary policy synergy boosted investor confidence, reflected in the realization of Foreign Direct Investment (FDI) and Domestic Direct Investment (DDI), which grew 12.66% in 2025. The role of government capital expenditure and State-Owned Enterprises (SOEs) also leveraged private investment, particularly with the operation of Danantara. Overall, this performance strengthened the national capital structure to support the sustainability of high economic growth momentum.

The performance of real exports of goods and services in the fourth quarter grew 3.25% (YoY) and increased 7.03% annually. Export growth mainly came from animal and vegetable oils, iron and steel, and machinery and electronic equipment. Service exports also strengthened along with the increase in international tourist arrivals to Indonesia, which grew 12.5%. On the other hand, real imports of goods and services grew 3.96% (YoY) in the fourth quarter and 4.77% annually, mainly to meet the demand for raw materials and capital goods supporting production activities.

The Consumer Price Index (CPI) inflation in 2025 remained within the target range of 2.5±1%, with December 2025 CPI inflation at 2.92% (YoY). Core inflation remained low at 2.38% (YoY), aligned with economic growth that was still below capacity, supported by the consistency of Bank Indonesia's monetary policy interest rate in anchoring inflation expectations aligned with its target, and controlled imported inflation.

The Rupiah exchange rate against the US Dollar saw pressure throughout 2025 due to external factors, particularly US tariff policies and uncertainty regarding the US Federal Reserve's interest rate cuts. The Rupiah closed 3.64% weaker at Rp16,675 per US Dollar, compared with the closing price in December 2024. Various policies were also implemented by the monetary authority, including a 25 bps interest rate cut to 4.75% in September 2025, which was then maintained until the end of 2025.

Pada tahun 2025, pencapaian industri minyak dan gas, cukup menggembirakan. Kementerian ESDM menyampaikan pencapaian lifting minyak bumi di tahun 2025, mencapai 605,3 MBOPD per hari atau 100,05% dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Sementara itu, rata-rata lifting gas bumi pada tahun 2025 mencapai 951,8 MBOEPD per hari, atau di bawah target APBN sebesar 1.005 ribu barel.

In 2025, achievements in the oil and gas industry were quite encouraging. The Ministry of EMR reported that crude oil lifting in 2025 reached 605.3 MBOPD per day, or 100.05% of the target set in the 2025 State Budget. Meanwhile, average natural gas lifting in 2025 reached 951.8 MBOEPD per day, slightly below the APBN target of 1,005 thousand barrels.

Seluruh kebutuhan gas, di tahun 2025, tidak berasal dari impor dan dipasok dari produksi gas dalam negeri. Adapun dari total 5.600 BBTUD gas bumi, sebagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik sebanyak 3.908 BBTUD atau 69%. Jumlah tersebut digunakan untuk kebutuhan hilirisasi dan domestik lain, seperti Bahan Bakar Gas (BBG), jaringan gas bumi (jargas), peningkatan produksi migas, ketenagalistrikan, *Liquefied Natural* Gas (LNG), dan *Liquefied Petroleum* Gas (LPG). Sisanya sebesar 1.691 BBTUD atau 31% diekspor.

All gas demand in 2025 was supplied entirely from domestic gas production without imports. Out of a total of 5,600 BBTUD of natural gas, the majority 3,908 BBTUD (69%) was used for domestic needs. This amount supported downstream processing and other domestic uses such as Gas Fuel (BBG), gas pipeline networks (jargas), increased oil and gas production, electricity generation, Liquefied Natural Gas (LNG), and Liquefied Petroleum Gas (LPG). The remaining 1,691 BBTUD (31%) was exported.

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ ICP) selama tahun 2025, bergerak fluktuatif mengikuti harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan energi global, geopolitik dan konflik internasional, perang tarif, serta kebijakan ekonomi global. ICP, selama tahun 2025, bergerak di level USD61 sampai USD77 per barel dan di bawah asumsi APBN 2025 sebesar USD82 per barel.

The Indonesian Crude Price (ICP) during 2025 fluctuated, aligned with global oil prices influenced by global energy supply and demand dynamics, geopolitics and international conflicts, tariff wars, and global economic policies. Throughout 2025, the ICP ranged between USD61 and USD77 per barrel, below the 2025 State Budget assumption of USD82 per barrel.

Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023, yang menetapkan skema baru HGBT bagi tujuh sektor pengguna gas bumi tertentu, meliputi pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

The Government also adjusted policies related to the Certain Natural Gas Price (HGBT) through Decree of Energy and Mineral Resources Minister Number 76.K/ MG.01/MEM.M/2025 on the second amendment to Decree Number 91.K/MG.01/MEM.M/2023, which establishes a new HGBT scheme for seven natural gas user sectors: fertilizers, petrochemicals, oleochemicals, steel, ceramics, glass, and rubber gloves. Through this policy, the Government expects the industrial sector to become more competitive in the global market, create new employment opportunities, and generate positive impacts on the national economy. Additionally, the policy is expected to make domestic product prices more affordable for the public.

Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik. Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/ MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum.

Furthermore, the Government remains fully committed to accelerating the utilization of natural gas in the energy mix for electricity generation. This policy is accompanied by the issuance of Decree of Energy and Mineral Resources Minister Number 77.K/MG.01/MEM.M/2025 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Electricity Supply Sector for Public Interest.

PGN, sebagai Subholding Gas bagian dari Pertamina, berperan dalam melakukan penyaluran gas HGBT kepada pelanggan penerima HGBT. Didukung jaringan pas dan infrastruktur gas yang luas, PGN telah menyalurkan 346,80 BBTUD kepada pelanggan HGBT atau sebesar 41,50% dari total penyaluran gas PGN

PGN, as Pertamina's Gas Subholding, plays a role in distributing HGBT gas to eligible customers. Supported by an extensive gas infrastructure and network, PGN has distributed 346.80 BBTUD to HGBT customers or 41.50% of PGN's total gas distribution.

Lebih jauh, selaras dengan tren ekonomi dalam negeri yang berdaya tahan, Perseroan terus berupaya mencapai tren kinerja yang positif. Volume penjualan niaga gas di tahun 2025 mencapai 836,02 BBTUD, sedangkan untuk volume transmisi gas bumi sebesar 1.609,29 MMSCFD. Segmen hulu minyak dan gas bumi masih menunjukkan kinerja positif, dengan volume *lifting* sebesar 17.580,64 BOEPD. Realisasi volume regasifikasi LNG, termasuk TUA, mencapai sebesar 254,31 BBTUD dan pencapaian volume transportasi minyak bumi sebesar 174.811,43 BOEPD. Perseroan juga mencatatkan penjualan LNG global yang mencapai 58,90 BBTUD.

Aligned with the resilient domestic economic trend, the Company continues striving to achieve a positive performance trend. Gas trading sales volume in 2025 reached 836.02 BBTUD, while natural gas transmission volume reached 1,609.29 MMSCFD. The upstream oil and gas segment continued to show positive performance, with lifting volume reaching 17,580.64 BOEPD. The realization of LNG regasification volume, including TUA, reached 254.31 BBTUD, and crude oil transportation volume reached 174,811.43 BOEPD. The Company also recorded global LNG sales of 58.90 BBTUD.

PGN sebagai Subholding Gas Pertamina secara konsisten memperkuat kualitas layanan pelanggan melalui keandalan pasokan, pengembangan infrastruktur, dan inovasi berkelanjutan. Diversifikasi sumber pasokan, mencakup gas konvensional (pipa, LNG, stranded gas) serta gas nonkonvensional (CBM), menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan fleksibilitas portofolio gas bumi domestik.

As Pertamina's Gas Subholding, PGN consistently strengthens customer service quality through supply reliability, infrastructure development, and sustainable innovation. Diversification of supply sources, including conventional gas (pipeline, LNG, stranded gas) and unconventional gas (CBM), is a key pillar in strengthening the resilience and flexibility of the domestic natural gas portfolio.

Subholding Gas akan terus memastikan kinerja yang bertumbuh dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif di antaranya strategi optimasi melalui penambahan pelanggan dan penetrasi pasar, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis untuk menopang keberlanjutan bisnis Perusahaan melalui pengembangan bisnis turunan hilir gas, pengelolaan biaya yang efektif serta program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan.

The Gas Subholding will continue ensuring growing performance by implementing various initiatives, including optimization strategies through customer expansion and market penetration, expansion of household services, business diversification to support the Company's long-term sustainability through downstream gas derivative business development, effective cost management, and sustainable Human Resources (HR) development programs.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PGN menjalankan tiga segmen usaha utama, yaitu Segmen Usaha Niaga & Transmisi, Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Segmen Usaha Operasi Lainnya berupa telekomunikasi, pemrosesan gas, jasa regasifikasi, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa, serta layanan pengelolaan fasilitas dan manajemen aset.

PGN has three main business segments, namely Natural Gas Trading & Transmission Business Segment, Oil and Gas Exploration and Production Business Segment, and Other Operation Business Segment, which includes telecommunication, gas processing, regasification services, pipeline network construction and maintenance, as well as facility and asset management services.

PROFITABILITAS PER SEGMEN USAHA
PROFITABILITY PER BUSINESS SEGMENT

dalam Juta USD
in million USD

Segmen Usaha Business Segment	Niaga & Transmisi Trading and Transmision		Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Exploration and Production of Oil and Gas		Operasi Lainnya Other Operations		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidation	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Pendapatan Revenues	3.711,27	3.443,61	288,99	369,54	375,96	365,16	(400,30)	(379,69)	3.975,92	3.788,62
Beban Segmen Segment Exspenses	(3.204,96)	(2.883,05)	(254,47)	(316,32)	(302,62)	(320,95)	389,50	391,20	(3.372,55)	(3.129,12)
Laba Segmen Segment Profit	506,31	550,56	34,52	53,22	73,34	44,21	10,80	(11,51)	603,37	659,50

SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI

Segmen Usaha Niaga

Segmen usaha niaga gas bumi merupakan kegiatan penyaluran dan penjualan gas bumi ke pengguna akhir, meliputi pelanggan komersial dan industri manufaktur, pembangkit listrik, pelanggan kecil (UMKM), serta pelanggan rumah tangga dengan menggunakan moda penjualan gas bumi melalui pipa maupun non-pipa. Segmen usaha niaga gas bumi juga termasuk kegiatan usaha LNG trading yang mencakup kegiatan pembelian dan penjualan gas alam dalam bentuk LNG di pasar global. Segmen usaha niaga ini dikelola langsung oleh PGN dan juga beberapa entitas anak usaha/afiliasi, yaitu GAGAS, Pertagas, dan PTGN. Wilayah kegiatan usahanya tersebar di 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten di Indonesia.

PGN melalui Sales and Operation Region (SOR) melaksanakan kegiatan operasional usaha niaga gas bumi yang terbagi dalam SOR I, II, dan III dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

TRADING AND TRANSMISSION BUSINESS SEGMENT

Trading Business Segment

Natural gas trading business segment is an activity of distributing and selling natural gas to end users, comprising customers of commerce and manufacturing industry, power plants, small-scale businesses (MSMEs), as well as households through pipeline and non-pipeline natural gas trading mode. The natural gas trading business segment also includes LNG trading business activities, which include the purchase and sales of natural gas in the form of LNG on the global market. This trading business segment is managed directly by PGN and also several subsidiary/affiliated entities, namely GAGAS, Pertagas, and PTGN. The business activity areas are spread in 18 provinces and 78 cities/regencies in Indonesia.

Through its Sales and Operation Regions (SORs), PGN carries out natural gas trading business operational activities, divided into SOR I, II, and III with the following details for each SOR area:

Wilayah SOR I SOR I Area	Sumatra dan Kepulauan Riau, meliputi area penjualan Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, dan Batam. Sumatra and the Riau Islands, covering the sales areas of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, and Batam.
Wilayah SOR II SOR II Area	Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, meliputi area penjualan Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, dan Cirebon. West Java, DKI Jakarta and Banten, covering the sales areas of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, and Cirebon.
Wilayah SOR III SOR III Area	Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, meliputi area penjualan Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang serta Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur (KIT). Central Java, East Java, Bali and Nusa Tenggara, covering the sales areas of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang as well as Kalimantan, and the Eastern Indonesia Region (KIT).

SEGMENTASI PELANGGAN GAS BUMI PGN
PGN Natural Gas Customer Segmentation

Pelanggan Rumah Tangga Household Customers	**Pelanggan Kecil** Small-Scale Customers	**Pelanggan Komersial dan Industri** Commerce and Industry Customers	**Total Pelanggan PGN Group** Total Customers of PGN Group
824.052	2.949	3.390	830.391

PGN melakukan segmentasi pasar untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang berfokus kepada pengelompokan pelanggan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang spesifik, fleksibilitas klausul komersial dan operasi, serta simplifikasi dan akurasi layanan dengan menghadirkan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pelanggan gas bumi PGN dibagi empat segmen, yaitu:

1. **Pelanggan Rumah Tangga**
   Mencakup perumahan, rumah susun yang dikelola Pemerintah maupun swasta, rumah dinas pemerintahan (termasuk TNI dan Polri), kondominium, apartemen, serta pengembang kawasan hunian dan *real estate*.

2. **Pelanggan Kecil**
   Mencakup rumah sakit, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan Pemerintahan dan swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, kantor Pemerintah dan swasta, hotel, restoran, pertokoan/mall/swalayan. Segmentasi Pelanggan Kecil mengacu kepada Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPH Migas Nomor 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, sehingga dalam penyajian jumlah pelanggan dan volume niaga gas bumi tetap ditampilkan. Adapun untuk penyajian

PGN uses market segmentation to boost customer loyalty, focusing on classifying customers based on the identification of specific needs, flexibility of commercial and operational clauses, and simplification and accuracy of services by providing products and services with added values for customers. The customers of PGN's natural gas are categorized into four segments, namely:

1. **Household Customers**
   This comprises housing complexes, flats managed by the Government and private companies, government official residences (including those of the Indonesian National Defense Forces and the Indonesian National Police), condominiums, apartments, and residential area and real estate developers.

2. **Small-Scale Customers**
   This consists of hospitals, community health centers, orphanages, places of worship, Government and private educational institutions, religious institutions, social institutions, Government and private company offices, hotels, restaurants, shops/malls/supermarkets. The segmentation of Small-Scale Customers refers to Regulation of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 4 of 2021 on the Second Amendment to Regulation of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 on the Stipulation of Natural Gas Prices for Households and

dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, pendapatan segmen Pelanggan Kecil dimasukkan ke dalam segmen Komersial dan Industri.

3. **Pelanggan BBG Transportasi**
   Mencakup pelanggan yang menggunakan gas pada kegiatan pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor. Dalam penyajian volume niaga, segmen pelanggan BBG Transportasi dimasukkan ke dalam segmen pelanggan Komersial dan Industri.
4. **Pelanggan Komersial dan Industri**
   Mencakup pelanggan komersial dan industri serta pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar dan/atau bahan baku dalam kegiatan usaha di bidang jasa, komersial, manufaktur sektor industri kimia, keramik, logam dasar, logam fabrikasi, pupuk, kertas, kaca, kayu, semen, makanan, tekstil, *lifting oil, refinery*, pembangkit listrik dan industri manufaktur lainnya.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah pelanggan PGN Group mencapai 830.391 dengan rincian 824.052 pelanggan rumah tangga, 2.949 pelanggan kecil, dan 3.390 pelanggan komersial dan industri.

Segmen Usaha Transmisi/Transportasi

Segmen usaha transmisi gas bumi dan transportasi minyak bumi merupakan kegiatan pengangkutan gas bumi maupun minyak bumi milik *shipper* dari titik terima di lapangan atau sumber lainnya menuju titik serah (*offtaker*) melalui jaringan pipa transmisi bertekanan tinggi. Dalam segmen ini, PGN Group mengoperasikan sejumlah ruas pipa transmisi untuk menyalurkan gas bumi dan minyak bumi milik *shipper*, dengan memperoleh imbalan berupa *toll fee* atas jasa transportasi tersebut. Pelaksanaan usaha transmisi/transportasi gas bumi dilakukan oleh entitas anak usaha, yaitu PGN, TGI, KJG, dan Pertagas. Sementara itu, kegiatan transportasi minyak bumi dilaksanakan oleh Pertagas.

Pipa transmisi yang dimiliki PGN juga digunakan untuk mengangkut gas bumi milik sendiri guna menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi PGN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi kemudian terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Untuk pengangkutan gas bumi milik sendiri ini, PGN tidak mendapatkan imbalan berupa *toll fee*.

Small-Scale Customers. Therefore, in the presentation, the number of customers and trading volume of natural gas remain on display. As for the presentation in the Consolidated Financial Statements, the revenue from the Small-Scale Customers segment is included in the Commerce and Industry segment.

3. **Fuel Gas Transportation Customers**
   This comprises customers who use gas to refill fuel gas for motorized vehicles. In the presentation of trading volume, the Fuel Gas Transportation customer segment is included in the Commerce and Industry segment.
4. **Commerce and Industry Customers**
   This segment consists of commerce and industry customers as well as power plants that use natural gas as fuel and/or raw materials in business activities in the service sector, commercial sector, and manufacturing sector, such as chemical, ceramic, base metal, metal fabrication, fertilizer, paper, glass, timber, cement, food, textile, oil lifting, refinery, power plant and manufacturing industries.

As of December 31, 2025, the number of PGN Group customers reached 830,391 with 824,052 household customers, 2,949 small-scale customers, and 3,390 commerce and industry customers.

Transmission/Transportation Business Segment

The natural gas transmission and oil transportation business segment is the activity of transporting shipper's natural gas or oil from the receiving point in the natural gas or oil field or other sources to the offtaker's delivery point via high-pressure pipelines. In this business segment, PGN Group operates several transmission pipelines to distribute shipper's natural gas and oil and receives compensation in the form of toll fees. The natural gas transmission/transportation business segment is carried out by PGN, TGI, KJG, and Pertagas. Meanwhile, the oil transportation segment is carried out by Pertagas.

PGN's transmission pipelines are also utilized to transport its own natural gas to support its natural gas trading business activities, as regulated in Government Regulation Number 36 of 2004 on Downstream Oil and Natural Gas Business Activities, most recently amended by Government Regulation Number 30 of 2009. As for the transportation of its own natural gas, PGN received no compensation in the form of toll fees.

Dalam penyajian informasi kinerja di segmen transmisi, kinerja TGI disajikan pada akun Bagian Laba dari Ventura Bersama.

In the transmission segment, TGI performance is presented in the Profit from Joint Ventures Section.

Portofolio Infrastruktur Perusahaan

Sebagai perusahaan gas nasional yang terdepan dalam pemanfaatan gas bumi, infrastruktur penyaluran gas bumi menjadi aset terpenting bagi Perseroan untuk menjamin ketersediaan energi bagi pelanggan. Di samping itu, portofolio infrastruktur perusahaan juga mencakup infrastruktur untuk kegiatan usaha transportasi minyak melalui pipa.

Company Infrastructure Portfolio

As the leading national gas company in natural gas utilization, natural gas distribution infrastructure serves as the Company's most important asset to ensure energy availability for customers. Additionally, the company infrastructure portfolio covers infrastructure for oil transportation business activities through pipelines.

Hingga dengan 31 Desember 2025, total panjang pipa yang dikelola Perseroan secara keseluruhan mencapai 33.494 km atau tumbuh 0,7% atau 241 km dibandingkan tahun 2024. Pipa yang dikelola tersebut terdiri dari: Pipa Distribusi sepanjang 7.904 km, Pipa Transmisi sepanjang 4.879 km, Pipa Jargas APBN sepanjang 19.706 km, Pipa Anak Perusahaan/Afiliasi 1.005 km.

As of December 31, 2025, the total length of pipeline managed by the Company reached 33,494 km, an increase of 0.7% or 241 km from 2024. The managed pipeline consists of: 7,904-km-long Distribution Pipeline, 4,879-km-long Transmission Pipeline, 19,706-km-long State Budget Gas Network Pipeline, and 1,005-km-long Subsidiary/Affiliate Pipeline.

Kinerja Segmen Usaha Niaga dan Transmisi Terkait Operasi/Produksi

Performance of Trade and Transmission Business Segments Related to Operations/ Production

KINERJA SEGMEN USAHA NIAGA
Trade Business Segment Performance

Uraian Segmen Usaha Niaga Trade Business Segment Description	2025	2024	Δ	
			Nilai Amount	%
Volume Niaga (BBTUD) Trade Volume (BBTUD)	836,02	852,22	(16,20)	(1,90)
LNG Trading (BBTUD) LNG Trading (BBTUD)	58,90	59,73	(0,83)	(1,39)
Jumlah Pelanggan (Pelanggan) Number of Customers (Customers)	830.391	816.645	13.746	1,68

Pada tahun 2025, PGN berhasil melaksanakan niaga gas kepada seluruh pelanggan hingga 836,02 BBTUD, menurun sebesar 16,02 BBTUD atau 1,90% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat mencapai 852,22 BBTUD. Untuk LNG Trading, sepanjang tahun 2025 PGN telah mengirimkan LNG rata-rata sebesar 58,90 BBTUD ke pelanggan di China, setara tujuh kargo.

In 2025, the volume of gas that PGN managed to trade with all customers reached 836.02 BBTUD, declined by 16.02 BBTUD or 1.90% from 2024, which recorded a volume of 852.22 BBTUD. As for LNG Trading, throughout 2025, PGN shipped an average of 58.90 BBTUD of LNG to customers in China, equivalent to seven cargoes.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Niaga

Pencapaian volume niaga dipengaruhi oleh penurunan pasokan dari beberapa pemasok utama akibat dari *natural decline,* serta *planned* dan *unplanned maintenance* di tahun 2025. Sementara pada tahun 2025, PGN telah mengirimkan tujuh kargo LNG ke pelanggan di China.

Explanation on Increase/Decrease of Trading Performance

The trade volume was affected by reduced supplies from several main suppliers due to natural decline, and planned and unplanned maintenance activities in 2025. In the meantime, in 2025, PGM has sent seven LNG cargoes to customers in China.

Pencapaian kinerja niaga menunjukkan komitmen Subholding Gas untuk terus mendukung dan melaksanakan penugasan Kepmen ESDM Nomor 91.K/2023, Kepmen Nomor 255.K/2024, serta Kepmen Nomor 135.K/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri dan Pembangkit Listrik. Di samping itu terkait Proyek Jargas/Gas Untuk Rumah Tangga, Kementerian ESDM telah menugaskan Pertamina dan PGN untuk mengembangkan Jargas untuk kebutuhan bagi rumah tangga. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya impor LPG dan memiliki potensi volume +/- 10 BBTUD dengan target empat juta Sambungan Rumah (SR) sampai dengan 2025.

The trading performance achievement shows the Gas Subholding's commitment to continuing to support and carry out the mandate of Decree of Energy and Mineral Resources Minister Number 91.K/2023, Number 255.K/2024, and Number 135.K/2021 on Specific Natural Gas Prices for Industries and Power Plants. As for the Gas Network/Gas for Households Project, the Ministry of Energy and Mineral Resources has assigned Pertamina and PGN to develop a gas network to meet household demands. The project is expected to reduce LPG imports and has a potential volume of +/- 10 BBTUD, targeting four million household connections by 2025.

KINERJA SEGMEN USAHA TRANSMISI/TRANSPORTASI
Transmission/Transportation Business Segment Performance

Uraian Description	2025	2024	Δ	
			Nilai Value	%
Transmisi Gas (MMSCFD) Gas Transmission (MMSCFD)	1.609,29	1.542.64	66,65	4,32
Transportasi Minyak (BOPD) Oli Transportation (BOPD)	174.811,43	161.174,43	13.637,01	8,46

Pada tahun 2025, volume gas bumi yang ditransportasikan melalui infrastruktur pipa transmisi gas bumi PGN adalah sebesar 1.609,29 MMSCFD sedangkan pada tahun 2024 sebesar 1.542,64 MMSCFD. Realisasi volume pada tahun ini meningkat sekitar 4,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk segmen transportasi minyak, volume mengalami peningkatan sebesar 8,46% dari 161.174,43 BOEPD di tahun 2024, menjadi 174.811,43 BOEPD di tahun 2025.

In 2025, the natural gas volume transported through PGN's natural gas transmission pipeline infrastructure amounted to 1,609.29 MMSCFD. This year's volume realization rose from 1,542.64 MMSCFD or approximately 4.32% in 2024. As for the oil transportation segment, the volume saw a 8.46% increase, from 161,174.43 BOEPD in 2024 to 174,811.43 BOEPD in 2025.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Transmisi

Peningkatan volume penyaluran transmisi pada tahun 2025, dikontribusikan dari Pertagas dan KJG, dari kenaikan penyerapan di ruas Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur serta penyaluran dari *shipper* baru. Sedangkan kenaikan volume transportasi minyak seiring dengan naiknya produksi dari beberapa lapangan dan meningkatnya serapan dari shipper.

Explanation on Increase/Decrease of Transmission Performance

The growth of transmission distribution volume in 2025 was contributed by Pertagas and KJG thanks to the absorption increase in segments in the provinces of North Sumatra, West Java, and East Java, as well as distribution from new shippers. Meanwhile, the increase in oil transportation volume is attributed to the rising production from several fields and rising uptake from shippers.

VOLUME TRANSMISI GAS BERDASARKAN OPERATOR
Gas Transmission Volume Based on Operator

Uraian Description	2025	2024	Δ	
			Nilai Amount	%
PGN	1,95	2,01	(0,06)	(2,95)
KJG	10,84	9,15	1,69	18,50
Pertagas	1.596,50	1.531,48	65,02	4,25
Jumlah (MMSCFD) **Total (MMSCFD)**	**1.609,29**	**1.542,64**	**66,65**	**4,32**

Kinerja Segmen Usaha Niaga dan Transmisi Terkait Pendapatan/Profitabilitas
Performance of Trading and Transmission Business Segment in terms of Revenue and Profitability

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Pendapatan Niaga Gas Gas Trading Revenue	2.773,00	2.519,78	253,22	10,05
LNG Trading	189,47	221,51	(32,04)	(14,46)
Pendapatan Transmisi Gas Gas Transmission Revenue	249,77	250,69	(0,92)	(0,37)
Pendapatan Transportasi Minyak Oil Transportation Revenue	173,67	154,22	19,45	12,61
Total Pendapatan Segmen Total Segment Revenue	**3.385,91**	**3.146,20**	**239,71**	**7,62**
Laba Segmen Niaga/Transmisi Trading/Transmission Segment Profit	**506,31**	**550,56**	**(44,25)**	**(8,04)**

Segmen usaha Niaga dan Transmisi adalah kontributor utama pendapatan PGN, dimana sekitar 84,81% pendapatan Perseroan dikontribusikan dari segmen ini. Pada tahun 2025, pendapatan Niaga dan Transmisi, setelah eliminasi, mencapai USD3,39 miliar yang meningkat 7,62% atau setara USD239,71 juta dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD3,15 miliar.

Kontributor utama untuk pendapatan segmen Niaga dan Transmisi adalah dari aktivitas niaga gas, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan peningkatan penggunaan LNG dalam bauran pemenuhan kebutuhan gas pipa. Pendapatan niaga gas meningkat sekitar 10,05% atau USD253,22 juta dibanding periode 2024 menjadi sebesar USD2,77 miliar.

Sementara itu, kegiatan LNG *trading* mengalami penurunan USD32,04 juta atau sekitar 14,46% yang disebabkan oleh penurunan volume penjualan. Di sisi lain Pendapatan Transportasi Minyak mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai USD19,45 juta atau sekitar 12,61% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi pendapatan transmisi dari Afiliasi yaitu TGI, pada Laporan Keuangan Konsolidasian, dicatatkan sebagai bagian laba dari ventura bersama yaitu sebesar USD42,88 juta.

The Trading and Transmission business segment is the primary contributor to PGN's revenue, accounting for around 84.81% of the Company's total revenue. In 2025, the Trading and Transmission revenue, after elimination, reached USD3.39 billion, an increase of 7.62% or USD239.71 million compared to the 2024 figure of USD3.15 billion.

The primary contributor to the Trading and Transmission segment's revenue is from gas trading activities, which experienced an increase in 2025. This increase was driven by the growing use of LNG in the pipeline gas supply mix. Gas trading revenue rose by approximately 10.05%, or USD253.22 million, compared to the 2024 figure, amounting to USD2.77 billion.

Meanwhile, LNG trading revenue fell by USD32.04 million, or approximately 14.46%, due to a decline in sales volume. However, oil transportation revenue rose significantly, reaching USD16.45 million, or approximately 12.6%, compared to the same period last year.

The contribution of transmission revenue from the Affiliate, namely TGI, in the Consolidated Financial Statements, is recorded as part of the profit from the joint venture, amounting to USD 42.88 million.

Profitabilitas segmen usaha Niaga dan Transmisi Gas Bumi, sebelum eliminasi, di 2025 adalah sebesar USD506,31 juta atau mengalami penurunan USD44,25 juta atau 8,04% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD550,56 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan penggunaan LNG dalam bauran pemenuhan pasokan gas pipa yang menyebabkan margin kotor mengalami penurunan.

The profitability of the Natural Gas Trading and Transmission business segment in 2025 is projected to reach USD506.31 million, a drop of USD44.25 million, or 8.04%, compared to the 2024 figure of USD550.56 million. This drop is mainly due to the increased use of LNG in the pipeline gas supply mix, leading to a decline in gross margins.

Pasokan Gas

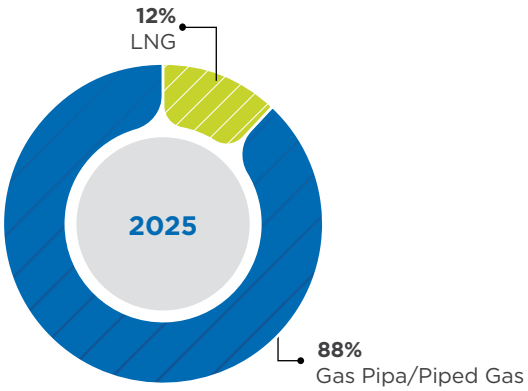
Perseroan memenuhi kebutuhan pasokan gas bumi melalui Perjanjian Jual Beli Gas (*Gas Sales and Purchase Agreement*) dari lapangan gas yang dikelola oleh produsen gas dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan melalui Perjanjian Jual Beli LNG dari produsen LNG seperti Bontang, Donggi Senoro, dan Tangguh. Guna menjamin kelangsungan pasokan gas bumi kepada pelanggan, Perseroan membuat perjanjian pembelian gas dengan pemasok dengan jangka waktu perjanjian merujuk kepada surat penetapan alokasi gas bumi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

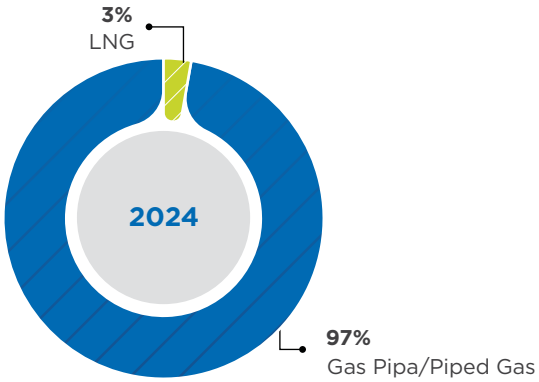
Gas Supply

The Company meets its natural gas supply requirements through Gas Sales and Purchase Agreements from gas fields managed by gas producers from production sharing contract contractors and LNG Sales and Purchase Agreement from LNG producers, such as those in Bontang, Donggi Senoro, and Tangguh. To ensure the continued supply of natural gas to customers, with the agreement term referring to the natural gas allocation determination letter issued by the Government.

Untuk menjaga keandalan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sepanjang tahun 2025 Perseroan secara aktif memanfaatkan LNG regasifikasi sebagai portofolio pasokan gas bumi, dengan bauran pasokan 88% dari gas pipa dan 12% dari LNG. Jumlah pemanfaatan LNG meningkat dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan menurunnya pasokan dari gas pipa.

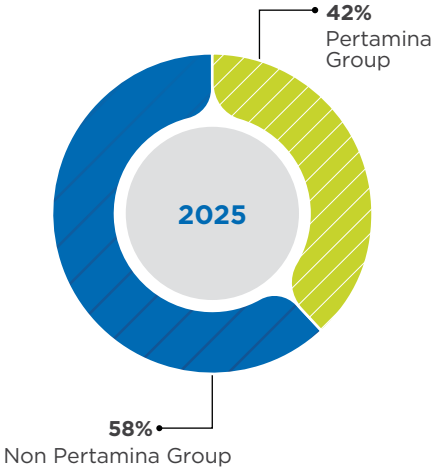
As part of our efforts to ensure a reliable supply to meet customer demand, throughout 2025, the Company actively utilized regasified LNG in our gas supply portfolio, with 88% sourced from piped gas and 12% from LNG. The volume of LNG utilized increased compared to that of the previous year, reflecting the decline in piped gas supply.

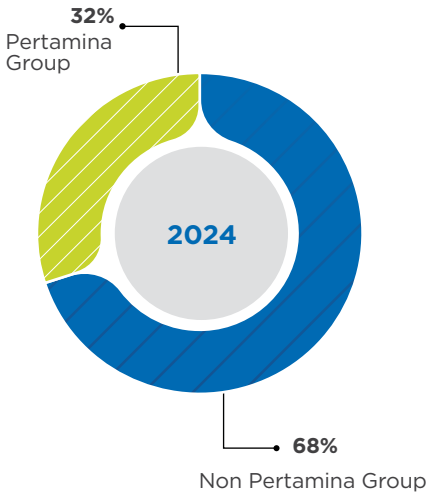




Sementara itu jika dilihat dari sumber pasokan gas, pada tahun 2025, 42% pasokan gas PGN berasal dari Pertamina Grup dan sebesar 58% dari pemasok di luar Pertamina Grup. Dibandingkan tahun 2024, peningkatan persentase pasokan Pertamina Group berasal dari kenaikan penyaluran gas lapangan Jambaran Tiung Biru.

Meanwhile, in terms of gas supply sources, in 2025, 42% of PGN's gas supply came from Pertamina Group, and the remaining 58% from suppliers outside the Pertamina Group. Compared to that of 2024, the increase in entity percentage from Pertamina Group was driven by an increase in gas field distribution from Jambaran Tiung Biru.





Untuk menjaga keberlanjutan penyediaan pasokan selama tahun 2025, beberapa upaya strategis yang dilakukan PGN adalah sebagai berikut:

- Perpanjangan perjanjian pembelian gas bumi yang berakhir pada tahun 2024.
- Optimasi penyaluran gas dari perjanjian jual beli gas bumi eksisting.
- Agresif menangkap peluang komersialisasi gas dari potensi pasokan baru.
- Pengalihan volume pasokan gas peruntukan ekspor untuk pemenuhan gas bumi domestik.
- *Unlocking* pemanfaatan *stranded* gas dan juga pemanfaatan Coalbed Methane sebagai alternatif sumber pasokan non-konvensional.
- Memanfaatkan LNG *spot* dan/atau *uncommitted cargo* untuk menambah keandalan pasokan dari sisi LNG.

SEGMEN USAHA EKSPLORASI SERTA PRODUKSI MINYAK DAN GAS

Segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah kegiatan usaha dan investasi PGN di bidang hulu minyak dan gas bumi. Segmen usaha ini meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha ini menjadi wujud upaya PGN untuk memperluas portofolio pada rantai bisnis energi melalui SAKA.

Pendapatan SAKA berasal dari *lifting* minyak bumi, gas bumi, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan Liquefied Natural Gas (LNG). Sementara beban pokok yang diperlukan dalam kegiatan usaha ini antara lain biaya produksi dan *lifting*, biaya penyusutan aset minyak dan gas, serta alokasi biaya terkait eksplorasi dan eksploitasi.

To maintain sustainable supply through 2025, PGN has undertaken several strategic initiatives, including:

- Extension of the natural gas purchase agreement expiring in 2024.
- Optimization of gas distribution from existing gas sales and purchase agreements.
- Aggressively seizing gas commercialization opportunities from potential new supplies.
- Diverting gas supply volumes intended for export to meet domestic natural gas needs.
- Unlocking the use of stranded gas and coalbed methane as alternative non-conventional supply sources.
- Utilizing spot LNG and/or uncommitted cargo to increase LNG supply reliability.

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION BUSINESS SEGMENT

The oil and gas exploration and production business segment comprises PGN's business and investment activities in the upstream oil and gas sector. This business segment includes exploration, exploitation, and development activities in the oil and gas sector. These business activities reflect PGN's efforts to expand its portfolio in the energy business chain through SAKA.

SAKA's revenue is derived from lifting of crude oil, natural gas, Liquefied Petroleum Gas (LPG), and Liquefied Natural Gas (LNG). Meanwhile, the main expenses required for these business activities include production and lifting costs, depreciation of oil and gas assets, as well as the allocation of costs related to exploration and exploitation.

Pada tahun 2025, SAKA mengelola portofolio blok minyak dan gas bumi sebanyak 11 blok dengan status 6 blok telah berproduksi dan lima blok dalam tahap eksplorasi, 10 blok berlokasi di Indonesia dan satu blok di Amerika Serikat.

In 2025, SAKA managed the portfolio of 11 oil and natural gas blocks, consisting of six producing blocks and five blocks in the exploration stage. Among those, ten blocks are located in Indonesia and one block is located in the United States.

PORTOFOLIO BLOK MINYAK DAN GAS SAKA
SAKA OIL AND GAS BLOCK PORTFOLIO

No	Blok Block	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Operator	Status
1	Pangkah PSC	100	SEI	Produksi / Production
2	Fasken	36	Silverbow	Produksi / Production
3	Ketapang PSC	19,4	Petronas	Produksi / Production
4	Bangkanai PSC	30	Medco	Produksi / Production
5	Muriah PSC	100	SEI	Produksi / Production
6	Muara Bakau PSC	11,7	ENI	Produksi / Production
7	West Bangkanai PSC	30	Medco	Eksplorasi / Exploration
8	South Sesulu PSC	100	SEI	Eksplorasi / Exploration
9	Pekawai PSC	100	SEI	Eksplorasi / Exploration
10	West Yamdena PSC	100	SEI	Eksplorasi / Exploration
11	Sangkar PSC	100	SEI	Eksplorasi / Exploration

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas terkait Operasi dan Produksi

Pada tahun 2025, SAKA secara berkelanjutan melakukan aktivitas eksplorasi dan produksi atas portofolio blok minyak dan gas bumi yang dimiliki. Dari aktivitas ini, SAKA menghasilkan beberapa komoditas yaitu minyak bumi, gas bumi, LPG, dan LNG. Volume *lifting* dari masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment in terms of Operations and Production

In 2025, SAKA continued its exploration and production activities across its portfolio of oil and gas blocks. From these activities, SAKA produced several commodities, including crude oil, natural gas, LPG, and LNG. The lifting volumes for each product are as follows

KINERJA *LIFTING* SEI
SEI Lifting Performance

Uraian Description	2025	2024	Δ	
			Nilai Value	%
Minyak Bumi (BOPD) Oil (BOPD)	5.679,38	7.143,37	(1,46)	(20,49)
Gas Bumi (BBTUD) Natural Gas (BBTUD)	54,59	60,25	(5,67)	(9,41)
LPG (Ton/hari) LPG (Ton/day)	55,33	99,73	(44,40)	(44,52)
LNG (BBTUD) LNG (BBTUD)	10,64	9,93	0,71	7,14
Total *Lifting* (BOEPD) Total Lifting (BOEPD)	17.580,64	20.180,89	(2.600,25)	(12,88)

Pada tahun 2025, kinerja *lifting* SAKA total mencapai 17.580,64 BOEPD, mengalami penurunan sebesar 2.600,25 BOEPD atau 12,88% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 20.180,89 BOEPD.

In 2025, SAKA's total lifting performance reached 17,580.64 MBOEPD, a decrease of 2,600.25 MBOEPD or 12.88% compared to the figure in 2024 at 20,180.89 MMBOE.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Penurunan kinerja operasi SAKA terutama dipengaruhi penurunan produksi dari beberapa blok, seperti blok Pangkah dan Ketapang, utamanya karena *natural decline,* disamping terdapat beberapa penundaan pengeboran serta *uplanned shutdown.*

Explanation on the Increase/Decrease in the Oil and Gas Exploration and Production Business Performance

The decline in SAKA's operational performance was largely caused by a drop in production from several blocks, such as the Pangkah and Ketapang blocks, primarily due to natural decline, in addition to several drilling delays and unplanned shutdowns.

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi serta Produksi Minyak dan Gas terkait Pendapatan/Profitabilitas
Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment in terms of Revenue/ Profitability

dalam Juta USD
in Million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	Δ%
Minyak Mentah Crude Oil	140,20	206,37	(66,17)	(32,06)
Gas Bumi Natural Gas	103,26	106,64	(3,38)	(3,17)
LPG LPG	11,32	22,27	(10,95)	(49,17)
LNG LNG	34,21	34,26	(0,05)	(0,15)
Total Pendapatan Segmen Total Revenue Segment	288,99	369,54	(80,55)	(21,80)
Total Laba Segmen Total Profit Segment	34,52	53,22	(18,70)	(35,14)

Pada tahun 2025, pendapatan dari segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas, tercatat sebesar USD288,99 juta, mengalami penurunan 21,80% atau setara dengan USD80,55 juta dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD369,54 juta. Penurunan ini disebabkan *volume lifting* minyak dan gas bumi yang turun dari tahun sebelumnya. Rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) sepanjang tahun 2025 di level USD67,38/BBL, sementara rata-rata di tahun 2024 yang sebesar USD78,32/BBL.

In 2025, revenue from the oil and gas exploration and production business segment was recorded at USD288.99 million, a 21.80% decrease, equivalent to USD80,55 million, compared to USD369.54 million in 2024. This decrease was due to a decrease in oil and gas lifting volume compared to the previous year. The average Indonesian Crude Price (ICP) throughout 2024 was USD67.9/BBL, the same as the 2024 average of USD78.3/BBL.

Penurunan pendapatan mempengaruhi profitabilitas segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada tahun 2025, profitabilitas segmen ini mencapai USD34,52 juta, turun hingga 35,14% atau setara USD18,70 juta dibandingkan profitabilitas tahun sebelumnya yang mengalami keuntungan sebesar USD53,22 juta. Penurunan profitabilitas disebabkan dari penurunan volume *lifting* dan penurunan ICP.

The decline in revenue impacted the profitability of the oil and gas exploration and production business segment. In 2025, the profitability of this segment reached USD34.52 million, a 35.14% decrease, equivalent to USD18.70 million, compared to USD53.22 million in the previous year. The decrease in profitability was due to the decrease in lifting volume and the ICP.

SEGMEN USAHA LAINNYA

Segmen usaha lainnya adalah kegiatan usaha lain yang langsung berkaitan dengan dan/atau mendukung usaha utama PGN sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui Entitas Anak dan Afiliasi. Kegiatan usaha lainnya antara lain:

1. **Telekomunikasi**
   PGNCOM bergerak pada jasa penyediaan solusi terpadu di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) serta telekomunikasi. Sebagai penyedia jaringan Fiber Optic (FO), PGNCOM telah memiliki pengalaman dan telah mengoperasikan jaringannya mulai dari Singapura dan Jakarta sampai kota-kota besar lainnya di bagian barat Indonesia dan menyediakan layanan *connectivity, managed service* dan *business solution*.

2. **Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Pipa**

   PGASOL bergerak di bidang *supporting service* dengan konsentrasi pada empat bidang usaha , yaitu: engineering, Konstruksi, Supply Chain, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa. Produk dan jasa PGASOL tidak hanya memenuhi kebutuhan internal PGN Grup, tetapi juga untuk sektor industri dan komersial di lingkup eksternal.

3. **Facility & Asset Management**
   PGN Mas adalah anak perusahaan yang bergerak pada empat bidang usaha manajemen property yaitu pengelolaan aset & fasilitas, *entrepreneurial real estate*, serta *design* & build. Produk layanannya meliputi properti dan jasa antara lain penyediaan fasilitas untuk mendukung operasional bisnis pelanggan seperti pengelolaan gedung, layanan perkantoran, layanan transportasi, penunjang migas, pendayagunaan dan optimalisasi aset, penyediaan produk properti komersial dan residensial, serta jasa lainnya.

4. **Pemrosesan Gas dan Jasa Regasifikasi**
   Bisnis pemrosesan gas, Pertagas memproduksi LPG yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan LPG di pasar domestik. Pertagas juga melakukan bisnis jasa regasifikasi yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan jasa regasifikasi LNG utamanya kepada PLN, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Jasa regasifikasi juga mencakup aktivitas pemanfaatan terminal regasifikasi LNG Lampung yang dioperasikan oleh PLI dan fasilitas regasifikasi Arun yang dioperasikan oleh PAG untuk memenuhi kebutuhan gas bagi pembangkit listrik PLN dan industri khususnya di Jawa Barat, serta Sumatra bagian Tengah & Selatan.

OTHER BUSINESS SEGMENTS

Other business segments consist of other business activities that are directly related to and/or support PGN's main business in accordance with the prevailing laws and regulations through its Subsidiaries and Affiliates. Other business activities include:

1. **Telecommunication**
   PGNCOM is engaged in providing integrated solutions in the Information and Communication Technology (ICT) and telecommunications sector. As a Fiber Optic (FO) network provider, PGNCOM has extensive experience and operates a cross-border network extending from Singapore and Jakarta to major cities throughout western Indonesia, as well as delivering connectivity services, managed services, and business solutions.

2. **Construction, Operation, and Maintenance of Pipeline Network**
   PGASOL is a Subsidiary of PGN engaging in the supporting services, focusing on four business areas, including EPC management (natural gas pipeline and station construction), operations and maintenance (O&M) management, supply chain, and engineering.

3. **Facility & Asset Management**
   PGN MAS is a subsidiary engaged in four property management business areas, namely facility management, asset management, entrepreneurial real estate, and design & build. Its service products include property and services to provide facilities to support customers' business operations, such as building management, office services, transportation services, oil and gas support, asset utilization and optimization, provision of commercial and residential property products, and other related services.

4. **Gas Processing and Regasification Services**
   In the gas processing business, Pertagas produces LPG used to meet domestic LPG demand. Pertagas also provides regasification services, primarily to PLN, particularly in eastern Indonesia. Regasification services also include the utilization of the Lampung LNG terminal operated by PLI and the Arun regasification facility operated by PAG to meet the gas needs of PLN power plants and industries, primarily in West Java, as well as Central & Southern parts of Sumatra.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Produksi/Operasi

Segmen usaha lainnya terdiri dari sektor telekomunikasi, sewa pembiayaan, pemrosesan gas, jasa regasifikasi, *facility & asset management,* serta konstruksi dan O&M. Untuk segmen konstruksi dan O&M serta *facility & asset management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

Pada tahun 2025, kinerja segmen usaha lainnya turut memberikan kontribusi bagi bisnis Perusahaan yang dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Performance of Other Business Segments Related to Production/Operation

Other business segments consist of telecommunications, leasing, gas processing, regasification services, facility & asset management, as well as construction and O&M. As for the construction and O&M as well as facility & asset management segments, most of the performance is eliminated by the Parent Entity since the majority of its businesses are to support PGN's performance.

In 2025, the performance of other business segments also contributed to the Company's business, which can be shown in the following table:

SEGMEN USAHA LAINNYA
Other Business Segments

Uraian Description	2025	2024	Δ	
			Nilai Value	%
Telekomunikasi (MBPS) Telecommunication (MBPS)	31.180.000,00	27.619.301,00	(27,619,301)	(100.0)
Pemrosesan Gas (TPD)*) Gas Processing (TPD)	117,42	107,94	9,48	8,78
Jasa Regasifikasi (BBTUD) **) Regasification Services (BBTUD)	254,31	218,06	36,24	16,62

*) Tanpa PT Perta Samtan Gas/Except PT Perta Samtan Gas
**) Termasuk Terminal Usage Agreement/Include Terminal Usage Agreement

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2025, kinerja sektor telekomunikasi mengalami peningkatan sebesar 12,89% dibandingkan 2024. Peningkatan ini didukung adanya *upgrade* kapasitas yang berdampak pada peningkatan kapasitas penjualan *bandwith* kepada pelanggan eksternal.

Pada sektor pemrosesan gas di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,72% dibandingkan tahun 2024, karena optimalisasi produksi di LNG plant milik ENP.

Explanation of the Increase/Decrease in the Performance of Other Business Segments

In 2025, the performance of the telecommunications sector recorded a 12.89% increase compared to 2024. This improvement was driven by capacity upgrades, which enabled greater bandwidth sales capacity to external customers.

In 2025, the gas processing sector rose by 8.72% from 2024, due to production optimization at ENP's LNG plant.

Untuk sektor jasa regasifikasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 16,62% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan penyerapan oleh PLN, baik di Arun maupun di FSRU Lampung.

Untuk segmen Konstruksi dan O&M serta *Facility & Asset Management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

The regasification services sector in 2025 posted a 16.62% improvement over 2024, largely attributed by an increase of LNG absorption by PLN, both at the Arun facility and the Lampung FSRU.

For the Construction and O&M and Facility & Asset Management segments, most of the reported performance is eliminated by the Parent Entity, as these activities primarily function to support PGN's performance.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Pendapatan/Profitabilitas
Performance of Other Business Segments in terms of Revenue/Profitability

dalam Juta USD
in Millions USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Pemrosesan Gas Gas Processing	25,01	25,72	(0,71)	(2,77)
Jasa Regasifikasi Regasification Services	186,86	172,45	14,41	8,36
Jasa Jaringan Telekomunikasi Telecommunication Network Services	28,02	26,13	1,89	7,23
Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan Construction and Maintenance Services	80,54	63,60	16,94	26,64
Total Pendapatan Segmen Total Revenue Segment	**320,43**	**287,90**	**32,53**	**11,30**
Total Laba Segmen Total Profit Segment	**73,34**	**44,21**	**29,12**	**65,87**

Pada tahun 2025, pendapatan dari segmen usaha lainnya mencapai USD320,43 juta atau meningkat 11,30%, dari USD287,9 juta pada tahun 2024. Kenaikan pendapatan dikontribusikan dari peningkatan kinerja jasa regasifikasi, Jasa konstruksi dan pemeliharaan (konstruksi, O&M, dan *Facility Mangement*), dan Jasa Jaringan Telekomunikasi. Sedangkan segmen pemrosesan gas tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun profitabilitas segmen usaha lainnya mengalami kenaikan 65,87% atau USD29,12 juta dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan terutama untuk Jasa Regasifikasi dan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan.

In 2025, other business segments generated USD320.43 million in revenue, or up 11.30% from USD287.90 million in 2024. The revenue growth was driven by improved performance in regasification services, construction and maintenance services (construction, O&M, and Facility Management), and telecommunications network services. Meanwhile, the gas processing segment did not experience any significant change from the previous year.

The profitability of other business segments increased by 65.87% or USD29.12 million compared to the previous year, due to a significant rise in revenue, particularly from Regasification Services and Construction and Maintenance Services.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
DESCRIPTION OF FINANCIAL PERFORMANCE

Uraian atas kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. PGN menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, serta telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited, dengan opini audit menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Secara umum, kinerja keuangan konsolidasian pada tahun 2025 mencatatkan kinerja yang tetap positif. Hal ini terlihat dari capaian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD215,36 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai sebesar USD339,43 juta. Dari sisi capaian posisi keuangan, Perusahaan berhasil mencatatkan total aset sebesar USD6,23 miliar turun 2,86% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar USD6,42 miliar. Perolehan kinerja keuangan dengan penurunan total aset tersebut terutama disebabkan manajemen melakukan pembayaran pinjaman dalam rangka menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, pada tahun 2025 perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada para pemegang saham dengan membayarkan dividen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

The description of financial performance has been prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and its Subsidiaries for the years ended on December 31, 2025 and December 31, 2024. PGN prepares the Consolidated Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and the has been audited by KAP Purwanto Susanti dan Surja, a member firm of Ernst & Young Global Limited, which issued an audit opinion present fairly in all material respects.

In general, consolidated financial performance in 2025 remained positive. This is reflected from the current year's profit of USD215.36 million attributable to the owners of the parent entity compared to USD339.43 million that was reached in the previous year. In terms of financial position achievements, the Company recorded a total assets of USD6.23 billion, a 2.86% decrease compared to the previous year, which amounted to USD6.42 billion, primarily due to loan repayments made as part of the Company's efforts to maintain financial health. Additionally, in 2025 the Company was able to deliver greater value to shareholders by distributing higher dividends compared to the previous year.

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Perusahaan memperoleh pendapatan yang berasal dari tiga segmen usaha yaitu niaga/transmisi gas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dan usaha lainnya yang mencakup (1) Pemrosesan Gas, (2) Jasa Regasifikasi, (3) Jasa jaringan Telekomunikasi dan (4) Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan. Pada tahun 2025, kontribusi masing-masing usaha terhadap pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Revenue

The Company earns revenue from three business segments, namely gas trading/transmission, oil and gas exploration and production, and other businesses consisting of (1) Gas Processing, (2) Regasification Services, (3) Telecommunication Network Services, and (4) Construction and Maintenance Services. In 2025, each business contributed to the business revenue as follows:

PENDAPATAN
Revenue

dalam Juta USD
in Millions USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Niaga gas Gas Commercial	2.773,00	2.519,78	253,22	10,05
LNG trading LNG trading	189,47	221,51	(32,04)	(14,46)
Transmisi gas Gas Transmission	249,77	250,69	(0,92)	(0,37)
Transportasi minyak Oil Transportation	173,67	154,22	19,45	12,61
Minyak dan gas Oil and Gas	269,57	354,52	(84,95)	(23,96)

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Lainnya / Others:				
Pemrosesan gas Processing Gas	25,01	25,72	(0,71)	(2,76)
Pendapatan jasa regasifikasi Regasification	186,86	172,45	14,41	8,36
Jasa jaringan telekomunikasi Fiber Optic Rental	28,02	26,13	1,89	7,23
Jasa konstruksi dan pemeliharaan Construction and maintenance services	80,54	63,60	16,94	26,64
Total pendapatan usaha Total Revenue	3.975,92	3.788,62	187,30	4,94
Total beban pokok pendapatan Total Cost of Revenue	(3.277,59)	(3.031,24)	(246,36)	8,13
Total laba kotor Total Gross Profit	698,32	757,38	(59,06)	(7,80)

Pada tahun 2025, PGN membukukan pendapatan sebesar USD3,98 miliar, naik 4,94% dibanding 2024, yang tercatat sebesar USD3,79 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan niaga gas, transportasi minyak, jasa regasifikasi, jasa jaringan telekomunikasi dan pendapatan konstruksi dan pemeliharaan. Pendapatan segmen usaha niaga gas yang memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap pendapatan konsolidasi, mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat penggunaan LNG pada bauran pemenuhan pasokan gas pipa sehingga meningkatkan harga jual gas. Pendapatan niaga gas sampai Desember 2025 mencapai USD2,77 miliar atau naik 10,05% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun terdapat kenaikan pendapatan, namun kenaikan tersebut juga diikuti dengan kenaikan beban pokoknya sehingga laba kotor mengalami penurunan USD59,06 juta atau sekitar 7,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

In 2025, PGN recorded a revenue of USD3.98 billion, 4.94% higher than that of 2024 at USD3.79 billion. The revenue growth was thanks to the increase in revenues from gas trading, oil transportation, regasification services, telecommunication network services, and construction and maintenance services. The gas trading segment, which accounted for 70% of the consolidated revenue, recorded a significant increase compared to the same period last year mainly due to the use of LNG in the supply mix for pipeline gas, which resulted in an increase in gas selling prices. Gas trading revenue reached USD2.77 billion as of December 2025, up 10.05% from the previous year. Despite the increase in revenue, the rise was accompanied by higher cost of revenues, leading to a decline in gross profit of USD59.06 million, or approximately 7.80% compared to the same period last year.

Beban Pokok Pendapatan

Realisasi beban pokok pendapatan tahun 2025 mencapai USD3,28 miliar, mengalami peningkatan 8,13% atau USD246,35 juta, dari tahun 2024 yang tercatat sebesar USD3,03 miliar. Peningkatan beban pokok pendapatan ini terutama dikontribusikan peningkatan beban pokok pendapatan niaga gas. Kenaikan beban pokok pendapatan niaga gas mencapai USD295,92 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban pokok ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya karena terdapat peningkatan porsi penggunaan LNG untuk pemenuhan pasokan gas pipa.

Cost of Revenue

The realization of cost of revenue in 2025 reached USD3.28 billion, an increase of 8.13% or USD246.35 million, from 2024 which was recorded at USD3.03 billion. The increase of cost of revenue was mainly attributable to an increase in gas trading costs. The cost of revenue for gas trading rose by USD295.92 million compared to the same period last year. The increase in cost of revenue exceeded the growth in revenue due to the higher proportion of LNG used to meet the gas pipeline supply.

BEBAN POKOK PENDAPATAN
Cost of Revenue

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Pembelian gas bumi Purchase of Natural Gas	2.115,49	1.819,57	295,92	16,26
LNG trading LNG trading	178,35	208,67	(30,32)	(14,53)
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi Oil and Gas Operations	243,70	305,71	(62,01)	(20,28)
LNG LNG	65,29	64,81	0,48	0,74
Pemrosesan gas Gas Processing	24,88	25,70	(0,82)	(3,19)
Sewa dan jasa lainnya Rent & Other Services	57,66	43,26	14,40	33,29
Beban niaga & infrastruktur Direct Cost	592,22	563,53	28,69	5,09
Total	**3.277,59**	**3.031,24**	**246,35**	**8,13**

Laba Bruto
Laba bruto PGN tahun 2025 turun 7,80% menjadi USD698,32 juta, dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD757,38juta. Penurunan ini terutama disebabkan kenaikan beban pokok niaga gas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya akibat dari peningkatan penggunaan LNG dalam pemenuhan bauran pasokan gas pipa.

Gross Profit
PGN's gross profit in 2025 decreased by 7.80% to USD698.32 million, compared to USD757.38 million in 2024. This decline was mainly due to a higher increase in the gas trading costs compared to the rise in revenue due to the increased use of LNG to meet the pipeline gas supply mix.

Beban Umum dan Administrasi
Beban umum dan administrasi turun USD33,33 juta atau 16,57% menjadi USD167,88 juta di tahun 2025, dari USD201,21 juta di 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pengelolaan fasilitas, sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah, perjalanan dinas dan transportasi, dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

General and Administrative Expenses
General and administrative expenses decreased by USD33.33 million, or 16.57%, to USD167.88 million in 2025, down from USD201.21 million in 2024. This decrease was mainly due to lower expenses related to facility management, short-term leases and low-value assets, business travel and transportation, and repair and maintenance expenses.

Pendapatan/(Beban) Lain-Lain - net
Pendapatan/(beban) lain-lain - net turun USD22,70 juta terutama disebabkan adanya penurunan beban cadangan penurunan nilai piutang dimana pada tahun sebelumnya terdapat beban cadangan penurunan nilai piutang yang cukup besar terkait dengan putusan arbitrase KJG.

Other Income/(Expenses) - net
Other income/(expenses) - net decreased by USD22.70 million, primarily due to a decrease in the allowance for impairment of receivables, whereas in the previous year, there was a significant expense for the allowance for impairment of receivables related to the KJG arbitration decision.

Laba Operasi
Pada tahun 2025, PGN mengalami penurunan laba operasi sebesar 0,58% menjadi USD519,63 juta dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD522,66 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penuruan laba kotor.

Operating Profit
In 2025, PGN reported a 0.6% decline in operating profit to USD519.63 million, compared to the USD522.66 million recorded in 2024. This decline was mostly due to a decrease in gross profit.

Pendapatan Keuangan

Pada tahun 2025, pendapatan keuangan mengalami kenaikan sebesar 6,13% menjadi sebesar USD63,88 juta dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD60,19 juta. Kenaikan pendapatan keuangan disebabkan keberhasilan manajemen dalam memanfaatkan kas & setara kas yang dikelola melalui giro dan deposito untuk mengoptimalkan pendapatan keuangan.

Financial Revenue

In 2025, financial revenue increased by 6.13% to USD63.88 million, compared to the 2024 figure of USD60.19 million. The increase in financial revenue was attributed to the management's success in utilizing cash and cash equivalents managed through current accounts and time deposits to optimize financial revenue.

Beban Keuangan

Beban keuangan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 13,78% menjadi sebesar USD64,95 juta dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD75,33 juta. Penurunan beban keuangan terutama disebabkan liability management yang dilaksanakan dengan melakukan *buyback* obligasi PGN dan SAKA di tahun 2024 sehingga beban bunga di tahun 2025 menjadi lebih efisien.

Financial Expenses

Financial expenses for 2025 experienced a decrease of 13.78% to USD64.95 million, compared to the 2024 figure of USD75.33 million. The decrease in financial expenses was mainly due to liability management, which involved the buyback of PGN and SAKA bonds in 2024, resulting in more efficient interest expenses in 2025.

Laba/(Rugi) Selisih Kurs

Pada tahun 2025, terdapat rugi kurs-neto sebesar (USD7,23 juta), naik USD18,35 juta jika dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar laba kurs USD11,13 juta. Kenaikan rugi kurs neto ini terutama karena terdapat pelemahan nilai tukar IDR/USD (Desember 2024: IDR16.157/USD; Desember 2025: IDR16.720/USD) menyebabkan rugi translasi pada net aset. Selain itu terdapat penguatan kurs JPY/USD (Desember 2024: IDR157,84/JPY; Desember 2025: 155,40/JPY) sehingga menyebabkan rugi translasi atas pinjaman dalam JPY.

Exchange Rate Gain/(Loss)

In 2025, the Company recorded a net foreign exchange loss of USD7.23 million, an increase of USD18.35 million compared to its 2024 net foreign exchange gain of USD11.13 million. This increase in net foreign exchange loss was mainly due to the depreciation of the rupiah against the US dollar (December 2024: IDR16,157/USD; December 2025: IDR16,720/USD), resulting in a translation loss on net assets. Additionally, there was a strengthening of the Japanese yen/US dollar exchange rate (December 2024: IDR157.84/JPY; December 2025: 155.40/JPY), resulting in a translation loss on loans in Japanese yen.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba dari ventura bersama terdiri dari bagian laba TGI, PT Nusantara Regas (NR), PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas. Pada tahun 2025, terdapat kenaikan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD4,20 juta menjadi sebesar USD76,40 juta dari tahun 2024 sebesar USD72,20 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan laba, TGI dan PT Perta Daya Gas.

Joint Venture Profit Share

The profit share from joint ventures consists of the profit shares of TGI, PT Nusantara Regas (NR), PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, and PT Perta Daya Gas. In 2025, the profit share from associated entities and joint ventures increased by USD4.20 million to USD76.40 million, compared to USD72.20 million in 2024. This increase was primarily driven by the higher profits of TGI and PT Perta Daya Gas.

Penurunan Nilai Properti Minyak dan Gas

Pada tahun 2025, Grup mencatat penurunan nilai atas blok Sesulu Selatan sebesar USD99,53 juta yang disebabkan adanya pengkinian data, pendekatan teknis yang lebih konservatif serta bertambahnya pemahaman atas kondisi *subsurface*, sebagaimana tercermin dalam audit *reserves* LAPI ITB tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan ketidakpastian geologi dan volumetrik yang berdampak pada penurunan signifikan estimasi cadangan serta dampaknya terhadap indikator keekonomian. Perhitungan NPV menjadi negatif, sehingga menyebabkan kemampuan aset untuk memulihkan nilai tercatat tidak lagi didukung secara ekonomi.

Impairment of Oil and Gas Properties

In 2025, the Group recorded an impairment loss of USD99.53 million for the South Sesulu block due to updated data, a more conservative technical approach, and an increased understanding of subsurface conditions, as reflected in the 2025 LAPI ITB reserves audit. This indicates geological and volumetric uncertainties that have resulted in a significant decrease in reserve estimates and their impact on economic indicators. The NPV calculation becomes negative, resulting in the asset's ability to recover its carrying amount no longer being economically supported.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, PGN mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar USD488,21 juta turun sekitar 15,58% atau sebesar USD90,08 juta dibandingkan 2024 yang tercatat laba sebesar USD578,29 juta. Penurunan ini disebabkan penurunan laba usaha, peningkatan penurunan nilai properti minyak dan gas, dan adanya rugi selisih kurs.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2025, beban pajak-neto naik 2,13% menjadi USD141,61 juta dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD138,65 juta. Pajak kini yang diperhitungkan pada 2025 mengalami penurunan sebesar USD8,92 juta menjadi USD102,28 juta dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD111,21 juta. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan provisi atas penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu. Sedangkan beban pajak tangguhan mengalami kenaikan menjadi USD39,32 juta dari tahun sebelumnya sebesar USD27,44 juta. Kenaikan tersebut secara umum disebabkan oleh pembayaran provisi atas penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu.

Adapun rincian beban pajak penghasilan berdasarkan wilayah operasional di berbagai negara adalah sebagai berikut:

Profit/(Loss) Before Income Tax

In 2025, PGN recorded a profit before income tax of USD488.21 million, a decrease of approximately 15.58%, or USD90.08 million, compared to USD578.29 million in 2024. This decrease was due to lower operating profit, increased impairment losses on oil and gas properties, and foreign exchange losses.

Income Tax Expense

In 2025, the net tax burden increased by 2.13% to USD141.61 million compared to that of 2024 which was recorded at USD138.65 million. Current taxes calculated in 2025 decreased by USD8.92 million to USD102.28 million compared to that 2024 which was recorded at USD111.21 million. This decrease was generally attributed to a decrease in provisions for adjustments to the purchase price of certain natural gas. Meanwhile, the deferred tax expense increased to USD39.32 million from the previous year's USD27.44 million. The increase was generally attributed to provision payments for adjustments to the purchase price of certain natural gas.

The following are details of income tax expenses based on operational areas in various countries:

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
INCOME TAX EXPENSE

dalam USD
in USD

Negara Country	Bidang Usaha Line of Business	Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	Tarif Pajak Negara Country Tax Rate	Pajak Kini Current Tax	Pajak Tangguhan Deferred Tax
Indonesia	Transportasi dan Distribusi Gas, Eksplorasi Minyak dan Gas Transportation and Distribution, Oil and Gas Exploration	482.615.382,59	22%*	102.528.357,43	39.317.846,00
United States	Eksplorasi Minyak dan Gas Oil and Gas Exploration	4.479.175,77	29%	(374.964,00)	0
Singapore	Eksplorasi Minyak dan Gas, Layanan Telekomunikasi Oil and Gas Exploration, Telecommunication Services	1.111.448,64	17%	134.588,57	0

*) PGN memperoleh pengurangan tarif pajak sebesar 3% sehingga efektif tax rate menjadi 19%
PGN received a 3% tax rate reduction, bringing its effective tax rate to 19%.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

1. Pada tahun 2025, PGN tidak memiliki lagi aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sedangkan pada tahun 2024 mengalami kerugian sebesar USD0,02 juta
2. Pada tahun 2025, rugi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar USD19,2 juta, sedangkan tahun 2024 mencatatkan rugi selisih kurs sebesar USD6,9juta.
3. Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan beban atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja setelah pajak aktuaria neto adalah sebesar USD10,3 juta naik USD27,5 juta dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan pendapatan sebesar USD17,2 juta. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja setelah pajak merupakan hasil perhitungan aktuaris atas imbalan kerja Perusahaan di mana setiap akhir periode terdapat penyesuaian variabel/asumsi sesuai dengan kondisi pada saat tersebut.

Other Comprehensive Income/(Loss)

1. In 2025, PGN no longer had any financial assets at fair value through other comprehensive income, while in 2024 it experienced a loss of USD0.02 million.

2. In 2025, the foreign exchange loss due to financial statement translation amounted to USD19.2 million, while in 2024 it recorded a foreign exchange loss of USD6.9 million.
3. In 2025, the Company recorded a charge for the remeasurement of net actuarial post-employment benefit liabilities after tax of USD10.3 million, an increase of USD27.5 million compared to the income of USD17.2 million recorded in 2024. The remeasurement of net actuarial post-employment benefit liabilities after tax is the result of actuarial calculations for the Company's employee benefits, with adjustments to variables/ assumptions at the end of each period based on current conditions.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2025, PGN mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD215,36 juta atau turun 36,55% dibandingkan 2024 sebesar USD339,42 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan laba sebelum pajak dan peningkatan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan pada kepentingan non-pengendali.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2025, PGN recorded a profit for the year attributable to owners of the parent entity of USD215.36 million, a 36.55% decrease compared to USD339.42 million in 2024. This decrease was primarily due to a decrease in profit before tax and an increase in profit for the year attributable to non-controlling interests.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Pada tahun 2025, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD131,23 juta sedangkan di 2024 laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD100,21 juta.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

In 2025, profit for the year attributable to non-controlling interests amounted to USD131.23 million, while in 2024, profit for the year attributable to non-controlling interests amounted to USD100.21 million.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2025, PGN menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD185,9 juta, turun 46,8% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD349,7 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2025, PGN generated total comprehensive income for the year attributable to owners of the parent entity of USD185.9 million, down 46.8% compared to 2024 which was recorded at USD349.7 million.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di 2025 adalah sebesar USD131,2 juta dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD100,2 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2025 was USD131.2 million compared to 2024 which was recorded at USD100.2 million.

RASIO PROFITABILITAS
PROFITABILITY RATIOS

Uraian Description	2025	2024	Δ%
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	5,42	8,96	(39,54)
Imbal Hasil atas Aset Return on Asset	3,46	5,29	(34,68)
Imbal Hasil atas Ekuitas Return on Equity	5,97	9,24	(35,43)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Total Aset

Pada tahun 2025, PGN mencatatkan total aset tercatat sebesar USD6,23 miliar. Nilai total aset ini turun 2,86% dibandingkan 2024 sebesar USD6,42 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, beban dibayar di muka, depresiasi aset tetap, amortisasi aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortisasi properti minyak dan gas.

Aset Lancar

Aset lancar PGN pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,38% menjadi USD2,07 miliar jika dibandingkan 2024 yang sebesar USD1,99 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan persediaan, piutang lain-lain dan uang muka. Kenaikan persediaan terutama disebabkan adanya peningkatan persediaan LNG In Transit. Sedangkan peningkatan uang muka disebabkan peningkatan uang muka pembelian gas bumi.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Assets

In 2025, PGN recorded total assets of USD6.23 billion. This total asset value decreased 2,86% compared to USD6.42 billion in 2024. This decrease was primarily due to decreases in cash and cash equivalents, prepaid expenses, depreciation of fixed assets, amortization of right-of-use assets, and depreciation, depletion, and amortization of oil and gas properties.

Current Assets

PGN's current assets in 2025 increased by 4.38% to USD2.07 billion, compared to the 2024 figure of USD1.99 billion. This increase was primarily due to increases in inventories, other receivables, and advances. The increase in inventories was primarily due to an increase in LNG In Transit inventories. The increase in advances was due to an increase in advance payments for natural gas purchases.

ASET LANCAR
Current Assets

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.336,29	1.383,18	(46,89)	(3,39)
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	27,32	21,22	6,10	28,75
Investasi jangka pendek Short term investment	0,00	0,62	(0,62)	(100,00)
Piutang usaha - neto Trade receivables - net	398,64	385,83	12,81	3,32
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivable	1,67	6,46	(4,79)	(74,15)
Piutang lain-lain - neto -pihak ketiga Other receivables - net - third parties	47,37	27,78	19,59	70,52
Persediaan - neto Inventories - net	143,26	81,93	61,33	74,86
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak Prepaid taxes and estimated claims for tax refund	41,53	34,17	7,36	21,54
Uang muka Advances	60,63	18,55	42,08	226,85
Beban dibayar di muka Prepaid expenses	17,22	27,21	(9,99)	(36,71)
Total **Total**	**2.073,92**	**1.986,96**	**86,96**	**4,38**

Aset Tidak Lancar

Pada tahun 2025, aset tidak lancar turun sebesar 6,11% menjadi USD4,16 miliar jika dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD4,43 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap, aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortiasi properti minyak dan gas.

Non-Current Assets

In 2025, non-current assets decreased by 6.1% to USD4.16 billion, compared to USD4.43 billion in 2024. This decrease was primarily due to depreciation of fixed assets, right-of-use assets, and depreciation, depletion, and amortization of oil and gas properties.

ASET TIDAK LANCAR
Non-Current Assets

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	158,74	148,41	10,33	6,96
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivable	75,76	76,99	(1,23)	(1,60)
Piutang lain-lain - pihak ketiga Other non-current receivables third parties	43,92	46,14	(2,22)	(4,81)
Uang muka - bagian tidak lancar Advances - non-current portion	1,65	3,38	(1,73)	(51,18)
Beban dibayar di muka - bagian tidak lancar Prepaid expenses -non-current portion	30,39	30,33	0,06	0,20
Penyertaan saham dan ventura bersama Investment in shares and joint ventures	305,83	311,95	(6,12)	(1,96)
Aset tetap - neto Fixed assets - net	2.470,04	2.509,27	(39,23)	(1,56)
Aset hak-guna - neto Right-of-use assets - net	326,51	371,29	(44,78)	(12,06)
Aset eksplorasi dan evaluasi Exploration and evaluation assets	50,49	65,23	(14,74)	(22,60)
Properti minyak dan gas - neto Oil and gas properties - net	564,14	695,79	(131,65)	(18,92)
Aset takberwujud - neto Intangible assets - net	1,81	2,22	(0,41)	(18,47)
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak Prepaid taxes and estimated claims for tax refund	21,48	30,83	(9,35)	(30,33)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	70,30	95,85	(25,55)	(26,66)
Pendapatan sewa yang masih harus diterima Accrued lease income	30,48	34,11	(3,62)	(10,64)
Lain-lain Others	6,89	7,19	(0,30)	(4,17)
Total **Total**	**4.158,46**	**4.428,99**	**(270,53)**	**(6,11)**

Liabilitas

Pada tahun 2025, PGN membukukan total liabilitas sebesar USD2,62 miliar. Nilai total liabilitas ini turun 4,37% jika dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD2,74 miliar. Penurunan total liabilitas sebesar USD119,87 juta terutama disebabkan penurunan pinjaman bank jangka panjang.

Liabilities

In 2025, PGN recorded total liabilities of USD2.62 billion. This total liabilities decreased by 4.37% compared to USD2.74 billion in 2024. The USD119.87 million decrease in total liabilities was primarily due to a decrease in long-term bank loans.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2025, liabilitas jangka pendek naik 3,08% menjadi USD1,17 miliar jika dibandingkan tahun 2024 sebesar USD1,13 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang.

Short-term Liabilities

In 2025, short-term liabilities increased 3.08% to USD1.17 billion, compared to USD1.13 billion in 2024. This increase was primarily due to an increase from current portion of long-term bank loans.

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Short-term Liabilities

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Utang usaha Trade payables	281,58	237,40	44,18	18,61
Utang lain-lain -pihak ketiga Other payables - third parties	95,27	98,35	(3,08)	(3,13)
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	35,00	100,00	(65,00)	(65,00)
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka pendek Accrued liabilities current	407,52	425,59	(18,07)	(4,25)
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang Current portion of long-term bank loans	148,04	72,45	75,59	104,33
Liabilitas sewa bagian jangka pendek Current portion of lease liabilities	42,59	41,36	1,23	2,97
Utang pajak jangka pendek Current taxes payable	38,80	41,55	(2,75)	(6,62)
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Current employee benefits liabilities	101,28	86,98	14,30	16,44
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan Current portion of deferred revenue	19,36	30,81	(11,45)	(37,16)
Total **Total**	**1.169,45**	**1.134,49**	**34,96**	**3,08**

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang turun di tahun 2025 9,62% menjadi USD1,46 miliar dibandingkan 2024 sebesar USD1,61 miliar. Penurunan USD154,84 juta terutama disebabkan penurunan pinjaman bank jangka panjang.

Long-Term Liabilities

Long-term liabilities decreased by 9.62% in 2025 to USD1.46 billion, compared to USD1.61 billion in 2024. The USD154.84 million decrease was primarily attributed to a decrease in long-term bank loans.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Long Term Liabilities

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Pinjaman bank jangka panjang Non-current bank loans	559,33	703,69	(144,36)	(20,51)
Liabilitas sewa jangka panjang Non-current lease liabilities	313,84	353,87	(40,03)	(11,31)
Utang pajak jangka panjang Non-current taxes payable	7,21	5,55	1,66	29,91
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	135,62	123,06	12,56	10,21
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka Panjang Accrued liabilities-Non-current	72,03	72,03	0,00	0,00
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area Asset abandonment and site restoration obligations	164,73	146,13	18,60	12,73
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefit obligation	122,58	107,50	15,08	14,03
Pendapatan ditangguhkan - jangka Panjang Non-current Deferred revenues	79,77	98,10	(18,33)	(18,69)
Total **Total**	**1.455,10**	**1.609,94**	**(154,84)**	**(9,62)**

Ekuitas

Pada tahun 2025, ekuitas Perusahaan mengalami penurunan 1,73% menjadi USD3,61 miliar jika dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD3,67 miliar. Hal ini disebabkan pada 2025 Perusahaan mengalami penurunan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Equity

In 2025, the Company's equity declined by 1.73% to USD3.61 billion, compared to USD3.67 billion in 2024. This is due to a decrease in net profit in 2025 compared to the previous year.

EKUITAS
Equity

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owner of the Parent Entity	344,02	344,02	0,00	0,00
Tambahan modal disetor Other paid-in capital	(467,57)	(467,57)	0,00	0,00
Saldo Laba Retained earnings				
Dicadangkan Appropriated	2.715,71	2.647,82	67,89	2,56
Tidak dicadangkan Unappropriated	215,36	339,43	(124,07)	(36,55)
Komponen ekuitas lainnya Other components of equity	(67,10)	(37,65)	(29,45)	78,22
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total Equity attributable to owner of the Parent Entity	2.740,42	2.826,05	(85,63)	(3,03)
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	867,42	845,48	21,94	2,59
Total **Total**	**3.607,84**	**3.671,53**	**(63,69)**	**(1,73)**

LAPORAN ARUS KAS

Pada tahun 2025, posisi kas dan setara kas turun sebesar 3% menjadi USD1,34 miliar jika dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD1,38 miliar. Penurunan saldo kas dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok, peningkatan penggunaan kas untuk penambahan Properti Minyak dan Gas, dan kenaikan pembayaran dividen.

CASH FLOWS STATEMENT

In 2025, cash and cash equivalents decreased by 3% to USD1.34 billion, compared to USD1.38 billion in 2024. The decrease in cash balance was driven by increased payments to suppliers, increased cash usage for additional Oil and Gas Properties, and increased dividend payments.

LAPORAN ARUS KAS
Cash Flows Statement

dalam Juta USD
in million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Arus kas dari aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	657,10	785,21	(128,11)	(16,32)
Arus kas dari aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(126,22)	(48,54)	(77,68)	160,03
Arus kas dari aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(560,40)	(568,06)	7,66	(1,35)
Pengaruh perubahan Kurs Neto dari Kas dan Setara Kas Net Effects of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents	(17,36)	(30,16)	12,80	(42,44)
Kenaikan/(Penurunan) - neto Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) Cash and Cash Equivalents	(46,89)	138,45	(185,34)	(133,87)
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.383,18	1.244,73	138,45	11,12
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at End of Year	1.336,29	1.383,18	(46,89)	(3,39)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2025, arus kas dari aktivitas operasi turun sebesar 16,32% menjadi USD657,10 juta jika dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar USD785,21 juta. Penurunan ini terutama disebabkan kenaikan pembayaran kepada pemasok, dan kenaikan pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya.

Cash Flows from Operating Activities

In 2025, cash flows from operating activities decreased by 16.32% to USD657.10 million, compared to USD785.21 million in 2024. This decrease was primarily due to increased payments to suppliers and higher payments for operating expenses and other operating activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2025, arus kas dari aktivitas investasi sebesar negatif USD126,22 juta, Nilai pengeluaran kas investasi tersebut meningkat sebesar USD77,68 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD48,54 juta. Kenaikan pengeluaran kas untuk aktivitas Investasi ini terutama disebabkan adanya peningkatan pengeluaran kas untuk perolehan properti minyak dan gas dan perolehan aset tetap.

Cash Flows from Investing Activities

In 2025, cash flows from investing activities was negative USD126.22 million. The value of cash expenditures for investing activities increased by USD77.68 million compared to USD48.54 million in the previous year. This increase in cash expenditures for investing activities was primarily due to increased cash expenditures for the acquisition of oil and gas properties and the acquisition of fixed assets.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 tercatat negatif USD560,40 juta, Nilai pengeluaran kas pendanaan tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD568,06 juta.

Cash Flows from Financing Activities

Cash outflows used for financing activities in 2025 was recorded at negative USD560.40 million. The value of the funding cash expenditure was slightly lower than the previous year, which reached USD568.06 million.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

The consolidated statement of changes in equity for the year ended December 31, 2025 is as follows:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Statement of Changes in Equity

Uraian Description	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity								Kepentingan Non pengendali Non-controlling interest	Ekuitas Neto Net Equity
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Share Capital	Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	Saldo Laba Profit Balance		Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components					
			Dicadangkan Reserved	Tidak Dicadangkan Not Reserved	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference in Translation of Financial Statements of Subsidiaries	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja, setelah Pajak Remeasurement of Post-employment Benefit Liabilities, net of Taxes	Perubahan Nilai Wajar dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Changes in Fair Value of Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Total Komponen Ekuitas Lainnya Total Other Equity Components		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024 **Balance as of January 1, 2024**	344,02	467,57	2.592,20	278,09	30,94	16,91	0,03	47,88	841,55	3.540,40
Laba tahun berjalan Profit for the Year	-	-	-	339,43	-	-	-	-	100,21	439,64
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year	-	-	-	-	6,99	17,25	0,02	10,24	-	10,24
Pembayaran dividen Dividend payment	-	-	-	222,47	-	-	-	-	96,28	318,75
Penyisihan cadangan umum Provision for general reserves	-	-	55,62	55,62	-	-	-	-	-	-

Uraian Description	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity								Kepentingan Non pengendali Non-controlling interest	Ekuitas Neto Net Equity
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Share Capital	Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	Saldo Laba Profit Balance		Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components					
			Dicadangkan Reserved	Tidak Dicadangkan Not Reserved	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference in Translation of Financial Statements of Subsidiaries	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja, setelah Pajak Remeasurement of Post-employment Benefit Liabilities, net of Taxes	Perubahan Nilai Wajar dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Changes in Fair Value of Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Total Komponen Ekuitas Lainnya Total Other Equity Components		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 **Balance as of December 31, 2024**	344,02	467,57	2.647,82	339,43	37,93	0,34	0,05	37,65	845,48	3.671,53
Laba tahun berjalan Profit for the Year	-	-	-	215,36	-	-	-	-	131,24	346,60
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year	-	-	-	-	19,20	10,25	-	29,45	-	29,45
Pembayaran dividen Dividend payment	-	-	-	271,54	-	-	-	-	109,30	380,84
Penyisihan cadangan umum Provision for general reserves	-	-	67,89	67,89	-	-	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025 **Balance as of December 31, 2025**	344,02	467,57	2.715,71	215,36	57,13	9,92	0,05	67,10	867,42	3.607,84

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
ABILITY TO PAY DEBT

Kemampuan membayar utang Perusahaan diukur melalui *debt to equity ratio* dan debt *service coverage ratio*. Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, *debt to equity ratio* mengalami penurunan menjadi 30,46% dari 34,63% pada 31 Desember 2024, dan *debt service coverage ratio* mengalami peningkatan menjadi 4,4 kali dari 1,5 kali di tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki tingkat kemampuan membayar utang yang baik.

The Company's debt repayment ability is measured through the debt to equity ratio and debt service coverage ratio. As of the financial year ended December 31, 2025, the debt to equity ratio had decreased to 30.46% from 34.63% on December 31, 2024, and the debt service coverage ratio increased to 4.4 times from 1.5 times in the previous year. This demonstrates the Company's ability to settle its financial obligations.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
Ability to Pay Debt

Uraian Description	2025	2024	Δ%
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	30,46	34,63	(12,05)
Utang Bersih/EBITDA (X) Net Debt/EBITDA (X)	(0,2)	(0,1)	135,5
EBITDA/Beban Bunga (X) EBITDA/Interest Expense (X)	17,4	15,8	10,1
EBITDA/(Beban Bunga + Pokok Pinjaman) (X) EBITDA/(Interest Expense+Principle) (X)	4,4	1,5	193,3

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL

Perusahaan mengukur tingkat kolektibilitas piutang dengan menggunakan *cash convertion cycle.* Hingga akhir 2025, Perusahaan memerlukan 14 hari untuk menghasilkan kas dari kegiatan usahanya, sedangkan pada tahun sebelumnya memerlukan hampir 19 hari.

The Company measures the collectability of its receivables using the cash conversion cycle. By the end of 2025, the Company took 14 days to generate cash from its business activities, while in the previous year it took almost 19 days.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Receivables Collectibility Level

Uraian Description	2025	2024	Unit
Pendapatan Revenue	3.975,92	3.788,62	juta million USD
Piutang Usaha Trade Receivable	398,64	385,83	juta million USD
***Collection Period* dalam hari** **Collection Period in days**	**36,6**	**37,3**	**hari** **days**
HPP COGS	3.277,59	3.031,24	juta million USD
Inventory Inventory	76,53	81,93	juta million USD
***Inventory Turnover* dalam hari** **Inventory Turnover in days**	**8,52**	**9,9**	**hari** **days**
HPP COGS	3.277,59	3.031,24	juta million USD
Utang Usaha Trade Payable	281,58	237,40	juta million USD
***Payment Period* dalam hari** **Payment Period in days**	**31,4**	**28,7**	**hari** **days**
Jumlah hari Number days	365,0	366,0	juta million USD
Jumlah Hari Konversi Kas **Cash Conversion Cycle**	**13,8**	**18,5**	**hari** **days**

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Perusahaan memperhitungkan struktur modal dengan perimbangan antara komposisi pinjaman yang dikenakan bunga serta ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2025 struktur modal PGN adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Company's capital structure takes into account the balance between the composition of loans bearing interest and equity. Based on the 2025 Financial Statements, PGN's capital structure is as follows:

dalam Juta USD
in Million USD

Uraian Description	2025	2024	Δ	%
Total Pinjaman **Interest Bearing Debt**	1.098,80	1.271,40	(172,60)	(13,58)
Utang bank jangka pendek Current bank loans	35,00	100,00	(65,00)	(65,00)
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang Current portion of non-current bank loans	148,04	72,40	75,64	104,48
Liabilitas sewa bagian jangka pendek Current portion of lease liabilities	42,59	41,40	1,19	2,87
Pinjaman bank jangka panjang Non-current bank loans	559,33	703,70	(144,37)	(20,52)
Liabilitas sewa jangka panjang Non-current lease liabilities	313,84	353,90	(40,06)	(11,32)
Ekuitas **Equity**	**3.607,84**	**3.671,50**	**(63,66)**	**(1,73)**
Komposisi Struktur Modal (Pinjaman : Ekuitas) **Capital Structure Composition (Debt : Equity)**	**23 : 77**	**26 : 74**		

Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang kepada bank dan kepada entitas yang berelasi dengan Pemerintah. Total Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan tahun 2025 adalah sebesar USD1,10 miliar menurun sebesar 13,58% dibandingkan dengan komposisi utang berbunga tahun 2024 disebabkan karena adanya pelunasan pinjaman jangka pendek, pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa yang dilakukan oleh PGN Grup.

The Company's interest-bearing debt consists of short-term loans, long-term loans to government-related entities, and bonds. The Company's total interest-bearing debt in 2025 stood at USD1.10 billion, a 13.58% decrease compared to the 2024 interest-bearing debt due to the repayment of short-term loans, long-term loan installment payments, and lease liabilities undertaken by the PGN Group.

Komposisi ekuitas Perusahaan sebesar USD3,61 miliar, terdiri dari modal saham disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Pada Desember 2003, saham Perusahaan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas Negara Republik Indonesia, dan sejak 2018, PT Pertamina (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas setelah pembentukan holding migas.

The Company's equity composition was USD3.61 billion, consisting of paid-in share capital, retained earnings and other equity components. In December 2003, the Company's shares was first listed on the Indonesian Stock Exchange with majority shares owned by the Republic of Indonesia, and since 2018, PT Pertamina (Persero) has become the majority shareholder after the establishment of the oil and gas holding company

Pada tahun 2025, tidak terdapat aksi korporasi yang mengubah struktur ekuitas PGN.

In 2025, there were no corporate actions that would've changed PGN's equity structure.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. PGN telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar. Manajemen juga senantiasa memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas dan *debt service ratio*. Lebih lanjut, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan peninjauan kesesuaian struktur modal dan utang Perseroan dengan tujuan strategis dan selera risiko Perusahaan (*risk appetite*).

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PGN strives to maintain an optimal capital structure in order to achieve business objectives, including by maintaining a healthy capital ratio and maximizing shareholder value. Certain debt instruments of the Group have financial ratios that require a maximum leverage ratio. PGN has complied with all capital requirements set by creditors. Similarly, the management constantly monitors capital using a variety of financial leverage ratios, most notably the debt-to-equity and debt service ratios. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors also review the conformity of the Company's capital and debt structure with the Company's strategic objectives and risk appetite.

DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN menetapkan kebijakan struktur modal dengan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas sesuai (tidak lebih) dari *financial covenant* dalam perjanjian pinjaman PGN kepada pihak kreditur sebesar 70%:30%. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung berdasarkan pembagian antara porsi utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan

BASIS OF MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE

PGN sets a capital structure policy by maintaining a debt-to-equity ratio in accordance with (not exceeding) the financial covenant in the PGN loan agreement with creditors at 70%:30%. The debt-to-equity ratio is calculated based on the division of the interest-bearing debt portion to the Company's equity.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE

Pada akhir 2025, tidak terdapat adanya ikatan yang material terkait dengan investasi barang modal di PGN.

At the end of 2025, there were no material commitments related to capital expenditure at PGN.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE

Setiap tahun PGN mengalokasikan investasi barang modal (*capex*) yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan pertumbuhan. Penjelasan atas realisasi investasi barang modal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pengeluaran Barang Modal Pada 2025, PGN melakukan investasi barang modal di beberapa sektor yaitu sektor *Upstream, Midstream, Downstream*, dan *Supporting/Related*.

2. Tujuan Pengeluaran Barang Modal Investasi pada sektor *Upstream* merupakan pengembangan lapangan hulu minyak dan gas bumi, yang bertujuan meningkatkan produksi pada lapangan yang sudah beroperasi. Investasi juga dilakukan pada lapangan yang berada pada tahap pengembangan dan eksplorasi sebagai komitmen Perusahaan kepada Pemerintah dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi. Investasi pada sektor *Midstream* dan *Downstream* terdiri dari pembangunan jaringan pipa dan fasilitas penunjang distribusi gas bumi serta pembangunan LNG, yang bertujuan untuk *customer attachment*, meningkatkan keandalan integritas jaringan, dan meningkatkan kapasitas fasilitas penunjang. Hal ini merupakan upaya PGN memberikan layanan prima kepada pelanggan. Sementara itu, investasi pada sektor Supporting/Related bertujuan mendukung bisnis utama PGN yaitu niaga dan transportasi gas bumi seperti telekomunikasi, *property & services*, serta *construction & operation maintenance*.

3. Jumlah Pengeluaran Barang Modal

Each year, PGN allocates capital expenditure (capex) aimed to develop its business and spur growth. The following is the description for capital expenditure realization in 2025:

1. Types of Capital Expenditure In 2025, PGN invested in capital expenditure in several sectors, namely the Upstream, Midstream, Downstream, and Supporting/ Related sectors

2. Capital Expenditure Objectives Investment in the Upstream sector is a development of the upstream oil and natural gas field, with the objective of scaling up production in fields that are already operational. Investment is also made in fields that are in the development and exploration stages as the Company's commitment to the Government in developing oil and natural gas fields. Investment in the Midstream and Downstream sectors consisted of the construction of pipeline networks, supporting facilities for natural gas distribution, and the construction of LNG. The purpose is to achieve customer attachment, improve the reliability of network integrity, and increase the capacity of supporting facilities. These are PGN's efforts to provide excellent service to customers. Investment in the Supporting/Related sector aims to support the main business of PGN, namely natural gas trading and transportation, such as telecommunications, property & services, as well as construction & operation maintenance.

3. Capital Expenditure Amount

Nilai Belanja Modal Capital Expenditure Value	**Target 2025 (USD Juta)** (USD Million)	**Realisasi 2025** Realization 2025	
		USD Juta USD Million	**(%) Full Year**
Downstream, Midstream & Others	226,46	171,31	75,65
Upstream	111,54	111,12	99,62
Total	**338,00**	**282,43**	**83,56**

4. Sumber Pendanaan untuk biaya investasi tersebut di atas menggunakan dana internal Perusahaan.

5. Mata Uang yang menjadi denominasi masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS. Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada aset dan liabilitas, moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan yakni dalam bentuk Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

4. Source of Funding for the above mentioned investment was sourced from the Company's internal fund.

5. Currency denomination each entity in the Group considers key indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company has determined to use the United States dollar ("USD" or "US dollar") as its functional currency and use the same currency in the presentation of its consolidated financial statements. Monetary balances in non-US Dollar denominations are posted in assets and liabilities, monetary in foreign currencies owned by the Company, namely in the form of Indonesian Rupiah, Japanese Yen, and Singapore Dollar.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Setelah tanggal periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2025 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, terdapat informasi dan fakta material yang terjadi di PGN dan Entitas Anak maupun Afiliasi, sebagai berikut:

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Desember 2025, untuk melakukan perubahan pada Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33.

   Sebagaimana termuat pada Akta Notaris Nomor 17 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. beserta dokumen pendukungnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0004617.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

2. **Perubahan Nama Perusahaan**
   Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nomor 17 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 26 Januari 2026 dan telah menerima persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0004617.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3. **Pengangkatan Chief Audit Executive**
   Berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 015100.K/KP/PDO/2026 tertanggal 2 Maret 2026, Direksi Perseroan telah mengangkat Erwansyah Nasrul Fuad untuk menjalankan tugas sebagai Chief Audit Executive Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2026.

After the reporting period concluding on December 31, 2025 until the publication of this Annual Report, there are material information and facts that occurred at PGN and its Subsidiaries and Affiliates, as follows:

1. **Amendments to the Company's Articles of Association**
   Amendments to the Company's Articles of Association were approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 29, 2025, to amend Article 4 Paragraph 4, Article 4 Paragraph 5, Article 4 Paragraph 6, Article 4 Paragraph 7, Article 4 Paragraph 8, Article 4 Paragraph 9, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33.

   As stated in Notarial Deed Number 17 dated January 26, 2026 made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. along with supporting documents have been received and recorded in the Legal Entity Administration System as stated in the Decree of the Minister of Law Number AHU- 0004617.AH.01.02.YEAR 2026 dated January 29, 2026 on Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk or Abbreviated as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

2. **Change of Company's Name**
   Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on December 29, 2025 which was notarized in Notarial Deed Number 17 by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 26, 2026 and has received approval from the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in Decree Number AHU-0004617.AH.01.02.Tahun 2026 dated January 29, 2026, the shareholders approved the change of the Company's name from PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3. **Appointment of Chief Audit Executive**
   Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Number 015100.K/KP/PDO/2026 dated March 2, 2026, the Company's Board of Directors has appointed Erwansyah Nasrul Fuad to perform his duties as the Company's Chief Audit Executive, effective from March 1, 2026.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

KONDISI MAKRO EKONOMI 2025

Perekonomian global pada periode 2025 -2026 mengalami fase penyesuaian akibat meningkatnya proteksionisme perdagangan melalui kebijakan tarif Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang mempengaruhi harga energi, serta perlambatan ekonomi China. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan menurun dari sekitar 3,2% pada tahun 2025 menjadi 3,1% pada tahun 2026.

Di tengah penurunan ekonomi global, IMF memprediksi ekonomi dalam negeri dapat mencapai 4,9%. Sementara Bank Dunia juga memprediksi di level yang sama, dengan kecenderungan akan terus bertumbuh ditopang oleh investasi yang kuat, kontribusi ekspor, kebijakan makroekonomi yang mendukung, serta potensi ekonomi digital.

Berdasarkan APBN 2026, Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 5,4%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Target ini didasarkan pada optimisme terhadap kuatnya konsumsi domestik, peningkatan investasi melalui perbaikan iklim usaha dan insentif fiskal, penguatan ekspor melalui perluasan kerja sama perdagangan, serta strategi hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri.

Pertumbuhan dalam negeri di atas dijabarkan dalam Program Prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada 10 Februari 2025. Peran gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

a. Memperluas jangkauan pelayanan gas bumi dengan cara mengembangkan jaringan distribusi dan transmisi gas bumi;
b. Melanjutkan penugasan jaringan gas rumah tangga;
c. Mendukung rencana pengembangan hilirisasi tambang;
d. Mendukung rencana pengembangan hilirisasi gas bumi pada industri petrokimia;
e. Menyalurkan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Industri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus;
f. Membantu upaya dekarbonisasi pada sektor industri dengan cara mengkonversi penggunaan bahan bakar industri menjadi menggunakan energi yang lebih bersih;
g. Membantu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan meningkatkan pemanfaatan gas terbarukan seperti *biomethane*.

MACROECONOMIC CONDITIONS IN 2025

The global economy in 2025-2026 experiences an adjustment phase due to increasing trade protectionism through US tariff policies, geopolitical tensions affecting energy prices, and China's economic slowdown. This combination of factors has led to a projected decline in global economic growth from around 3.2% in 2025 to 3.1% in 2026.

Amidst the global economic downturn, the IMF predicts that the domestic economy could grow by 4.9%. The World Bank also predicts a similar level, with a trend of continued growth supported by strong investment, export contributions, supportive macroeconomic policies, and the potential of the digital economy.

Based on the 2026 State Budget, the Indonesian government has set a 2026 economic growth target of 5.4%, higher than the projected global economic growth. This target is based on optimism regarding strong domestic consumption, increased investment through an improved business climate and fiscal incentives, strengthened exports through expanded trade cooperation, and a strategy for downstreaming natural resources to increase industrial value.

The domestic growth above is outlined in the Priority Programs listed in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which was established on February 10, 2025. Here are the roles of natural gas in supporting Indonesia's economic growth as outlined in the 2025-2029 RPJMN:

a. Expanding the reach of natural gas services by developing a natural gas distribution and transmission network;
b. Continuing the assignment of household gas networks;
c. Supporting the mining downstream development plan;
d. Supporting the natural gas downstream development plan in the petrochemical industry;
e. Distributing natural gas to meet the needs of Industrial Areas and/or Special Economic Zones;
f. Assisting decarbonization efforts in the industrial sector by converting the use of industrial fuels to using cleaner energy;
g. Helping reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions by increasing the use of renewable gases such as biomethane.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan juga membuka peluang bagi pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi. Dalam kebijakan tersebut, gas bumi diproyeksikan berperan dalam program gasifikasi pembangkit listrik untuk menggantikan penggunaan bahan bakar minyak serta mendukung pengoperasian pembangkit berbasis gas dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan selama proses transisi menuju dominasi energi terbarukan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan arah pengelolaan energi nasional hingga tahun 2060. Dalam kebijakan tersebut, konsumsi gas bumi diproyeksikan meningkat secara bertahap dari sekitar 18,8-20,1 juta TOE pada tahun 2030 hingga 56,6-71,1 juta TOE pada tahun 2060, serta diikuti dengan target perluasan jaringan gas rumah tangga hingga 5,6-7,5 juta sambungan rumah pada tahun 2060.

Berbagai kebijakan dan regulasi tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran gas bumi dalam bauran energi nasional sekaligus membuka peluang peningkatan pemanfaatan gas di berbagai sektor. Bagi PGN, arah kebijakan tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur gas bumi serta peningkatan permintaan gas domestik, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan di masa mendatang.

Untuk dapat menjawab harapan besar Pemerintah dalam hal peningkatan pengelolaan gas bumi, PGN melakukan penyelaraskan target yang akan dicapai oleh Perusahaan dalam beberapa aspek. Pada aspek niaga gas, PGN memproyeksikan volume niaga gas bumi sekitar 942 BBTUD pada tahun 2026 atau meningkat sebesar 5,26% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Target ini didukung oleh optimalisasi kontrak yang telah berjalan dan ekspansi ke wilayah baru. Pada aspek transportasi gas, PGN memproyeksikan volume transportasi sebesar 1.619 MMSCFD sedangkan aspek transportasi minyak mentah, proyeksi volume transportasi minyak mentah sebesar 175.012 BOEPD.

Aligned with this policy direction, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 10 of 2025 concerning the Roadmap for Energy Transition in the Electricity Sector also opens up opportunities for the use of natural gas as a transitional energy source. This policy projects natural gas to play a role in the gasification program for power plants to replace the use of fuel oil and support the operation of gas-based power plants to maintain the reliability of the electricity system during the transition to renewable energy dominance.

Furthermore, Government Regulation Number 40 of 2025 concerning the National Energy Policy establishes the direction of national energy management until 2060. This policy projects natural gas consumption to increase gradually from approximately 18.8-20.1 million TOE in 2030 to 56.6-71.1 million TOE in 2060, followed by a target expansion of the household gas network to 5.6-7.5 million household connections by 2060.

These various policies and regulations demonstrate the increasingly important role of natural gas in the national energy mix and open up opportunities for increased gas utilization in various sectors. For PGN, this policy direction supports the development of natural gas infrastructure and increases domestic gas demand, potentially driving the company's business growth in the future.

To meet the government's high expectations for improved natural gas management, PGN has aligned its targets across several areas. In the gas trade sector, PGN projects a natural gas trade volume of approximately 942 BBTUD in 2026, representing a 5.26% increase compared to the previous year. This target is supported by the optimization of existing contracts and expansion into new areas. For gas transportation, PGN projects a transportation volume of 1,619 MMSCFD. For crude oil transportation, the projected crude oil transportation volume is 175,012 BOEPD.

Pencapaian target-target pertumbuhan tersebut memerlukan keandalan atas ketersediaan pasokan, di mana saat ini pasokan gas eksisting yang berasal dari cadangan konvensional cenderung mengalami penurunan karena *natural decline*. PGN berupaya memenuhi kebutuhan gas dan minyak bumi dengan menargetkan *lifting* sebesar 19.161 BOEPD pada tahun 2026. Namun, strategi jangka panjang untuk menjaga kestabilan pasokan energi nasional dilakukan melalui upaya memperoleh alokasi dari temuan-temuan cadangan gas baru serta perluasan kapasitas produksi LNG domestik eksisting. Pemenuhan kebutuhan demand domestik yang diproyeksikan meningkat ke depan juga akan ditopang oleh suplai LNG.

Achieving these growth targets requires reliable supply availability, as existing gas supplies from conventional reserves tend to decline due to natural decline. PGN strives to meet gas and oil needs by targeting a lifting of 19,161 BOEPD in 2026. However, its long-term strategy to maintain the stability of the national energy supply involves securing allocations from new gas reserve discoveries and expanding existing domestic LNG production capacity. Meeting domestic demand, which is projected to increase in the future, will also be supported by LNG supply.

Sejalan dengan itu, PGN mengembangkan strategi penyediaan pasokan LNG jangka panjang (*long-term LNG supply contract*) untuk mengamankan kebutuhan *existing* maupun *projected demand* sehingga risiko ketidakterserapan kargo LNG (*take or pay risk*) dapat diminimalkan. Berdasarkan proyeksi ketersediaan kargo domestik, potensi volume *long-term* LNG domestik akan ditopang oleh komitmen dari beberapa sumber utama seperti Bontang, DSLNG, dan Masela. Apabila masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan LNG jangka panjang, pemenuhan akan dilakukan melalui kontrak *short-term* maupun spot cargo guna menjaga keandalan suplai. Selain LNG, peningkatan pasokan domestik juga diperkuat melalui pengembangan sumber-sumber gas non-konvensional. Salah satu potensi signifikan berasal dari *Coal Bed Methane* (CBM) yang mulai *onstream* pada 2026.

Aligned with this, PGN is developing a long-term LNG supply contract strategy to secure both existing and projected demand, thereby minimizing the risk of unavailability of LNG cargoes (take-or-pay risk). Based on projections of domestic cargo availability, the potential long-term domestic LNG volume will be supported by commitments from several key sources, such as Bontang, DSLNG, and Masela. If a gap remains between long-term LNG demand and availability, this will be met through short-term contracts or spot cargoes to maintain supply reliability. In addition to LNG, increasing domestic supply is also being strengthened through the development of unconventional gas sources. One significant potential source is Coal Bed Methane (CBM), which will begin onstream in 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, PGN telah menyiapkan berbagai program strategis pengembangan usaha dengan tujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan bisnis di tengah situasi yang menantang. Program ini juga diarahkan untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan pengembangan segmen bisnis dan produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (*low carbon business*). Strategi tersebut dituangkan dalam tiga pilar utama pengembangan bisnis PGN, yaitu *Grow, Adapt, dan Step-out* (GAS).

In response to these conditions, PGN has prepared various strategic business development programs aimed at continuing to drive business growth amidst challenging conditions. These programs are also aimed at capitalizing on the momentum of economic recovery, accelerating the energy transition, and the need to develop future business segments and derivative products that support low-carbon business. This strategy is outlined in three main pillars of PGN's business development, namely Grow, Adapt, and Step-out(GAS).

Adapun program strategis GAS tersebut meliputi:

1. ***Grow and maintain gas business***
   Program peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur gas, CNG, maupun LNG. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya: penyediaan infrastruktur transmisi, distribusi, dan regasifikasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmentasi pelanggan (Industri, Komersial, dan Rumah Tangga), penambahan portofolio pasokan gas pipa (dan LNG sesuai kebutuhan), penyediaan infrastruktur *beyond pipeline* (CNG & LNG), optimasi bisnis *upstream* melalui peningkatan kegiatan produksi dan eksplorasi, serta pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan penyaluran BBM melalui pipa maupun peningkatan *lifting* migas dengan bersinergi bersama Pertamina Group.

2. ***Adapt business, pursue adjacent opportunities***
   Program penyediaan layanan bisnis turunan yang mendukung peningkatan kinerja melalui diversifikasi produk maupun optimalisasi portofolio yang sudah dimiliki oleh PGN. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di antaranya: pelaksanaan strategi pertumbuhan secara organik dan penjajakan secara anorganik dalam penyediaan fasilitas untuk LNG *Bunkering*, LNG *Trading* dan *Global Venture*, pengembangan bisnis LNG Hub; serta *total energy solution* dalam rangka penyediaan jasa dan layanan penunjang kepada pelanggan.

3. ***Step-out and scale to new businesses.***
   Program penyiapan bisnis baru diarahkan untuk mendukung pengembangan hilirisasi industri berbasis gas, khususnya pada sektor petrokimia, serta pengembangan bisnis *clean and renewable energy* seperti *biomethane*. Selain itu, PGN juga mulai menjajaki berbagai inisiatif yang mendukung pencapaian *Net Zero Emission*, antara lain pengembangan hidrogen dan amonia serta potensi transportasi CO_2 (*CO_2 transport*). Pengembangan inisiatif tersebut dilakukan secara bertahap dengan membangun kompetensi, memperluas akses pasar, serta memastikan ketersediaan pasokan yang saat ini masih terbatas, melalui kemitraan strategis dengan berbagai badan usaha.

The GAS strategic program includes:

1. **Grow and maintain gas business**
   The program to increase the utilization of natural gas through the development of gas, CNG, and LNG infrastructure. Some of the work programs that will be implemented include: providing natural gas transmission, distribution, and regasification infrastructure to meet the needs of various customer segments (Industrial, Commercial, and Household), increasing the pipeline gas supply portfolio (and LNG as needed), providing infrastructure beyond pipelines (CNG & LNG), optimizing upstream business through increasing production and exploration activities, and building infrastructure to support fuel distribution activities through pipelines and increasing oil and gas lifting by synergizing with the Pertamina Group.

2. **Adapt business, pursue adjacent opportunities.**
   Program to provide derivative business services that support performance improvement through product diversification and optimization of PGN's existing portfolio. Some of the work programs that will be implemented include: implementation of organic growth strategies and inorganic exploration in the provision of facilities for LNG Bunkering, LNG Trading, and Global Venture, development of the LNG Hub business, development of mini LNG liquefaction plant infrastructure; as well as total energy solutions in order to provide services and supporting services to customers.

3. **Step-out and scale to new businesses.**
   The new business development program is aimed at supporting the development of gas-based downstream industries, particularly in the petrochemical sector, as well as the development of clean and renewable energy businesses such as biomethane. Furthermore, PGN has begun exploring various initiatives to support the achievement of Net Zero Emissions, including the development of hydrogen and ammonia, as well as the potential for CO_2 transport. These initiatives are being developed in stages by building competencies, expanding market access, and ensuring the availability of currently limited supplies through strategic partnerships with various business entities.

PENGEMBANGAN USAHA

Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan serta menangkap peluang pengembangan bisnis energi gas di Indonesia, PGN telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang berfokus pada penguatan kompetensi inti perusahaan di sektor *midstream* dan *downstream*. Melalui pengembangan infrastruktur, distribusi, serta pemanfaatan gas bumi di berbagai segmen pasar, PGN terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi energi berbasis gas bumi. Fokus pada penguatan bisnis *midstream* dan *downstream* ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, sekaligus memperluas pemanfaatan gas bumi di sektor industri, komersial, pembangkit listrik, dan rumah tangga.

LNG Hub Arun

Di Indonesia, penggunaan gas bumi ke depannya diperkirakan akan bergeser dari pemanfaatan gas pipa menuju penggunaan *Liquefied Natural Gas* (LNG), seiring dengan kebutuhan fleksibilitas suplai dan munculnya temuan cadangan gas baru seperti Lapangan Abadi di Blok Masela serta Blok Andaman di lepas pantai utara Sumatra. Perubahan ini mendorong peningkatan peran infrastruktur LNG dalam memastikan keandalan pasokan energi nasional.

Salah satu infrastruktur kunci adalah Terminal LNG Arun, yang berlokasi strategis di jalur perdagangan internasional antara negara pemasok dan pembeli LNG, serta berdekatan dengan pasar LNG yang berkembang pesat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dengan keunggulan lokasi dan konektivitasnya, Terminal LNG Arun ditetapkan untuk dikembangkan sebagai LNG *hub leader* di Asia pada tahun 2030.

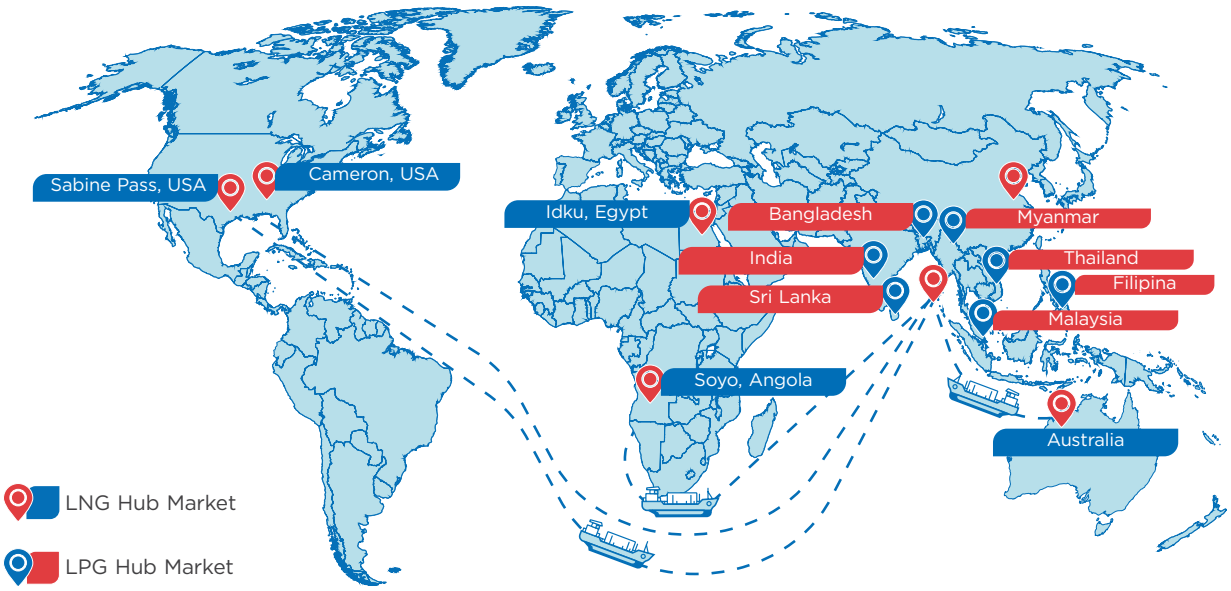
BUSINESS DEVELOPMENTS

To navigate future challenges and seize opportunities to develop the gas energy business in Indonesia, PGN has prepared several strategic steps focused on strengthening the company's core competencies in the midstream and downstream sectors. Through the development of natural gas infrastructure, distribution, and utilization across various market segments, PGN continues to strengthen its role as a provider of natural gas-based energy solutions. This focus on strengthening the midstream and downstream businesses is expected to optimize the utilization of existing networks and infrastructure, while simultaneously expanding the use of natural gas in the industrial, commercial, power generation, and residential sectors.

Arun LNG Hub

In Indonesia, future natural gas use is expected to shift from pipeline gas to Liquefied Natural Gas (LNG), in line with the need for supply flexibility and the discovery of new gas reserves, such as the Abadi Field in the Masela Block and the Andaman Block off the north coast of Sumatra. This shift is driving the increasing role of LNG infrastructure in ensuring the reliability of the national energy supply.

One key infrastructure is the Arun LNG Terminal, strategically located along international trade routes between LNG supplying and purchasing countries, and close to rapidly growing LNG markets in Southeast and South Asia. With its superior location and connectivity, the Arun LNG Terminal is set to develop into a leading LNG hub in Asia by 2030.



Untuk mewujudkan visi tersebut, PGN melakukan penguatan infrastruktur melalui penambahan jumlah tangki yang dapat dioperasikan di Terminal LNG Arun. Salah satu tangki saat ini telah berhasil menyelesaikan tahap revitalisasi, yang menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan, fleksibilitas operasi, dan kemampuan layanan terminal dalam mendukung ekosistem LNG domestik maupun regional.

To realize this vision, PGN is strengthening its infrastructure by increasing the number of operational tanks at the Arun LNG Terminal. One of the tanks has now successfully completed the revitalization phase, which is the first step in increasing the terminal's storage capacity, operational flexibility, and service capabilities to support the domestic and regional LNG ecosystem.

Pemanfaatan *Biomethane* dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Sebagai Upaya dalam Reduksi Emisi Karbon di Indonesia

Sebagai bagian dari strategi bisnis *Step-out*, PGN berupaya mengembangkan bisnis *biomethane* dengan memanfaatkan Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menghasilkan biogas. Pemanfaatan *biomethane* berpotensi menggantikan bahan bakar minyak berbasis fosil sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah cair tersebut. Selain itu, proyek ini juga merupakan langkah diversifikasi bisnis PGN dalam menyediakan energi bersih guna memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan.

Pilot project bisnis *biomethane* ini akan berlokasi di Sumatra, wilayah dengan dominasi perkebunan kelapa sawit. Mengingat PGN memiliki jaringan pipa gas transmisi di Sumatra, kami akan mengupayakan pengangkutan *biomethane* melalui jaringan pipa gas dari Sumatra ke berbagai wilayah, termasuk Jawa dan Sumatra sendiri. Proyek *biomethane* ini sendiri akan terus dikembangkan di daerah lain di Indonesia.

Utilization of Biomethane from Palm Oil Mill Effluent (POME) as an Effort to Reduce Carbon Emissions in Indonesia

As part of the step-out business strategy, PGN is trying to develop a biomethane business that uses Palm Oil Mill Effluent (POME) to produce biogas. Biomethane has the potential to replace fossil-based fuel oil while reducing environmental pollution from liquid waste. In addition, this project is also a step in diversifying PGN's business in providing clean energy to meet customers' natural gas needs.

This biomethane business pilot project will be located in Sumatra, an area dominated by oil palm plantations. Given that PGN has a gas transmission pipeline network in Sumatra, we will try to transport biomethane through a gas pipeline network from Sumatra to various regions within the island and Java. The development of this biomethane project will extend to other areas in Indonesia.

Sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan optimalisasi jaringan pipa PGN, proyek ini juga mendukung implementasi *Grand Energy Strategy* (GENS) serta Program *Net Zero Emissions* (NZE). PGN melihat potensi besar dalam penyediaan energi bersih seperti *biomethane* sebagai alternatif energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam mendukung target Pemerintah Indonesia mencapai NZE 2060, PGN juga berencana menyalurkan *biomethane* sebagai *green energy* ke pusat-pusat permintaan, khususnya Jawa Bagian Barat. *Biomethane* yang berasal dari limbah POME di Sumatra akan dialirkan melalui pemanfaatan jaringan pipa *South Sumatra-West Java* (SSWJ). Untuk memungkinkan integrasi *biomethane* maupun pasokan gas lainnya ke dalam jaringan pipa tersebut, diperlukan pembangunan fasilitas *injection point* yang saat ini sedang dipersiapkan dan ditargetkan *onstream* pada tahun 2027. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur hijau nasional serta membuka peluang komersial baru bagi pemanfaatan energi rendah karbon.

Perluasan Pasar dan Penguatan Pasokan Gas Bumi

Pemerintah terus mendorong penguatan infrastruktur gas bumi nasional, antara lain melalui pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II (Cisem II) yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas jaringan gas nasional serta membuka peluang pemanfaatan gas bumi yang lebih luas di berbagai wilayah.

Sejalan dengan arah kebijakan transisi energi nasional serta meningkatnya kebutuhan energi yang lebih bersih pada sektor industri, pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi diproyeksikan akan terus meningkat. Untuk menangkap peluang tersebut, PGN memperkuat strategi pengembangan pasar melalui peningkatan keterikatan pelanggan (*customer attachment*) serta perluasan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri dan komersial.

Untuk menjaga peran PGN sebagai badan usaha penyedia gas bumi dengan jaringan terbesar di Indonesia, Perusahaan terus memperkuat pengembangan bisnis pada segmen *midstream* dan *downstream*, tidak hanya melalui pengembangan jaringan pipa, tetapi juga melalui pengembangan layanan *beyond pipeline*. Pengembangan tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan solusi energi berbasis LNG dan CNG retail untuk menjangkau pasar yang belum terhubung jaringan pipa.

As part of PGN's business development and pipeline network optimization, this project also supports the implementation of the Grand Energy Strategy (GENS) and the Net Zero Emissions (NZE) Program. PGN sees significant potential in providing clean energy, such as biomethane, as an alternative energy source to drive economic growth in Indonesia.

To support the Indonesian government's target of achieving NZE by 2060, PGN also plans to distribute biomethane as green energy to demand centers, particularly in Western Java. Biomethane derived from POME waste in Sumatra will be transported through the South Sumatra-West Java (SSWJ) pipeline network. To enable the integration of biomethane and other gas supplies into this pipeline network, the construction of an injection point facility is required, which is currently under preparation and targeted for onstream operation in 2027. The presence of this facility is expected to strengthen the national green infrastructure and open new commercial opportunities for low-carbon energy utilization.

Market Expansion and Strengthening Natural Gas Supply

The government continues to encourage the strengthening of national natural gas infrastructure, including through the construction of the Cirebon-Semarang Phase II (Cisem II) natural gas transmission pipeline, targeted for completion in 2026. This infrastructure is expected to improve national gas network connectivity and open up opportunities for broader natural gas utilization in various regions.

Aligned with the direction of the national energy transition policy and the growing demand for cleaner energy in the industrial sector, the use of natural gas as a transition energy source is projected to continue to increase. To capture this opportunity, PGN is strengthening its market development strategy by increasing customer engagement and expanding natural gas utilization in the industrial and commercial sectors.

To maintain PGN's role as the natural gas provider with the largest network in Indonesia, the Company continues to strengthen business development in the midstream and downstream segments, not only through pipeline network development but also through the development of beyond-pipeline services. This development includes providing retail LNG and CNG-based energy solutions to reach markets not yet connected to pipeline networks.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, PGN akan membangun *mother station* untuk pemanfaatan gas *Coal Bed Methane* (CBM) di Muara Enim dan merencanakan pengembangan LNG Hub di Bandung yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026 guna memperluas akses energi gas pada berbagai segmen pelanggan retail.

Pengembangan Jargas

PGN terus mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan ketergantungan terhadap impor LPG melalui perluasan pemanfaatan gas bumi pada segmen rumah tangga. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan jaringan gas rumah tangga (Jargas) sebagai alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, PGN menargetkan tambahan sekitar 50 ribu sambungan rumah tangga yang akan dibangun melalui pendanaan internal Perusahaan melalui program Gaskita Pintar.

Implementasi program Jargas berpotensi untuk dikembangkan secara lebih masif apabila didukung oleh kebijakan Pemerintah, antara lain melalui insentif harga beli gas serta dukungan subsidi harga jual kepada pelanggan. Selain itu, PGN juga terus memperluas kemitraan dengan berbagai badan usaha dalam pembangunan infrastruktur Jargas guna mempercepat peningkatan pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga.

Sebagai bagian dari upaya percepatan program tersebut, PGN juga merencanakan pengembangan Batam sebagai pilot project untuk pengalihan penggunaan LPG rumah tangga menjadi jaringan gas, yang diharapkan dapat menjadi model implementasi bagi pengembangan Jargas di wilayah lainnya di Indonesia.

Transportasi Minyak Mentah & BBM

Dengan pengalaman dan keahlian dalam bisnis transportasi melalui jaringan pipa serta sinergi dengan Pertamina Group, PGN mendukung Pertamina dalam pembangunan pipa minyak mentah Rokan sepanjang 360 km, yang telah beroperasi sejak Februari 2022 (*first oil in)*. Selanjutnya, PGN juga melaksanakan proyek pembangunan pipa BBM Cikampek -Plumpang yang ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur distribusi energi nasional.

As part of this strategy, PGN will build a mother station for the utilization of Coal Bed Methane (CBM) gas in Muara Enim and plans to develop an LNG Hub in Bandung, which is targeted to start operating in 2026 to expand access to gas energy for various retail customer segments.

Gas Network Development

PGN continues to support the government's efforts to reduce dependence on LPG imports by expanding the use of natural gas in the household segment. One step being taken is the development of a household gas network (Jargas) as a more efficient and sustainable energy alternative. By 2026, PGN is targeting an additional 50,000 household connections, which will be built through the company's internal funding through the Gaskita Pintar program.

The Jargas program has the potential to be expanded more extensively if supported by government policies, including gas purchase price incentives and sales price subsidies for customers. Furthermore, PGN continues to expand partnerships with various business entities in the development of Jargas infrastructure to accelerate the increase in natural gas utilization in the household sector.

As part of this program's acceleration efforts, PGN also plans to develop Batam as a pilot project for shifting household LPG use to a gas network. This is expected to serve as a model for Jargas development in other regions of Indonesia.

Transportation of Crude Oil and Fuel

With its experience and expertise in the pipeline transportation business and synergy with the Pertamina Group, PGN supports Pertamina in the construction of the 360-km Rokan crude oil pipeline, which has been operational since February 2022 (first oil in). Furthermore, PGN is also carrying out the Cikampek-Plumpang fuel pipeline construction project which is targeted to be completed and start operating in 2026, as part of efforts to strengthen the national energy distribution infrastructure.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2025

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION 2025

PGN kembali dapat melewati tantangan selama tahun 2025 dengan baik. Pencapaian kinerja di tahun 2025 merupakan wujud upaya PGN untuk terus melakukan pengelolaan bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal dan aman serta tetap menghadirkan *value* bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PGN was able to navigate through the challenges during 2025 well. The performance achievement in 2025 is a manifestation of PGN's efforts to continue to manage the downstream natural gas business optimally, reliably and safely while still providing value for shareholders and other stakeholders.

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/ PRODUKSI DAN PEMASARAN

Realisasi Niaga Gas mencapai 836,02 BBTUD atau 91,15% dari target 2025 terutama dipengaruhi keterbatasan pasokan gas pipa, rendahnya daya beli pelanggan terhadap pasokan LNG, serta sejumlah gangguan pasokan akibat pemeliharaan terencana maupun tidak terencana oleh pemasok gas PGN, yang semakin menambah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Mengantisipasi hal ini, PGN menjalankan beberapa strategi di antaranya melalui perluasan jangkauan infrastruktur pipa gas serta optimalisasi terminal regasifikasi LNG untuk pengembangan produk (*product development*) melalui diversifikasi sumber pasokan dengan menyediakan gas hasil regasifikasi LNG.

Dengan optimalisasi berkelanjutan terminal regasifikasi LNG di Lampung melalui *Terminal Usage Agreement* (TUA), volume penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kelistrikan mencapai 99,61 BBTUD atau 110,27% dari target 2025 serta penyaluran volume gas regasifikasi LNG fasilitas di Arun mencapai 154,69 BBTUD atau 153,17% dari target 2025. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menjalankan bisnis *trading* internasional dengan melakukan penjualan 7 kargo LNG atau setara 58,90 BBTUD.

Pencapaian dari bisnis transmisi gas di tahun 2025 tercatat sebesar 1.609,29 MMSCFD atau berhasil mencapai 111,22% dari target 2025 yang dikontribusikan dari berbagai wilayah operasi. Tercatat pada wilayah Jawa dikontribusikan oleh peningkatan kebutuhan dari pembangkit listrik, kenaikan volume melalui ruas Cisem, optimalisasi operasi shipper dan pengaliran gas dari shipper baru yang semakin memperkuat aliran pasokan, sedangkan di wilayah Sumatra dikontribusikan oleh serapan pembangkit listrik yang optimal serta peningkatan kebutuhan pelanggan kilang di wilayah Kalimantan.

ANALYSIS OF OPERATION/PRODUCTION AND MARKETING REALIZATION ACHIEVEMENT

Gas trade realization reached 836.02 BBTUD, or 91.15% of the 2025 target, primarily influenced by limited pipeline gas supply, low customer purchasing power for LNG, and a number of supply disruptions due to planned and unplanned maintenance by PGN's gas suppliers, which further exacerbated the supply-demand imbalance. To anticipate this, PGN implemented several strategies, including expanding the reach of its gas pipeline infrastructure and optimizing its LNG regasification terminal for product development through diversified supply sources by providing LNG regasified gas.

With the continuous optimization of the LNG regasification terminal in Lampung through the Terminal Usage Agreement (TUA), the distribution volume to meet electricity customer needs reached 99.61 BBTUD or 110.27% of the 2025 target and the distribution volume of LNG regasification gas from the Arun facility reached 154.69 BBTUD or 153.17% of the 2025 target. Additionally, throughout 2025, the Company successfully carried out an international trading business by selling 7 LNG cargoes or the equivalent of 58.90 BBTUD.

The gas transmission business achieved 1,609.29 MMSCFD in 2025, or 111.22% of the 2025 target, contributed by various operating areas. In the Java area, this was driven by increased demand from power plants, increased volumes through the Cisem section, optimized shipper operations, and the flow of gas from new shippers, further strengthening the supply flow. In Sumatra, this was driven by optimal power plant uptake and increased demand from refinery customers in Kalimantan.

Realisasi *Lifting* Minyak dan Gas mencapai 17.580,64 BOEPD atau tercapai sedikit di bawah target 2025 disebabkan penurunan produksi alamiah (*natural decline*), penundaan jadwal pengeboran sumur WPA-06 terkendala operasi pemboran (*rig*) di Wilayah Kerja Pangkah, adanya kegiatan pemeliharaan dan operasional termasuk shutdown terencana maupun tidak terencana di Wilayah Kerja Ketapang serta perubahan jadwal *onstream* sumur JNE-7ST. Di sisi lain terdapat pencapaian yang memperkuat kinerja *lifting* Minyak dan Gas yaitu empat sumur hasil pemboran di Wilayah Kerja Fasken telah berhasil *onstream*, selain itu terselesaikannya *issue top tank condensate* dan kendala *trucking* kondensat di Wilayah Kerja Bangkanai.

Oil and gas lifting reached 17,580.64 BOEPD, slightly below the 2025 target due to natural production decline, delays in the WPA-06 well drilling schedule due to rig constraints in the Pangkah Work Area, maintenance and operational activities, including planned and unplanned shutdowns in the Ketapang Work Area, and changes to the onstream schedule for the JNE-7ST well. On the other hand, there are achievements that strengthen the performance of Oil and Gas lifting, namely four wells drilled in the Fasken Work Area have been successfully onstream, in addition to the resolution of the top tank condensate issue and condensate trucking problems in the Bangkanai Work Area.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI OPERASI
COMPARISON OF OPERATIONAL TARGET AND REALIZATION

Uraian Description	**Target 2025** 2025 Target	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**%**
Volume Niaga Gas (BBTUD) Gas Trading Volume (BBTUD)	917,18	836,02	91,15
Volume Transmisi Gas (MMSCFD) Gas Transmission Volume (MMSCFD)	1.447,00	1.609,29	111,22
LNG Trading (BBTUD) LNG Trading (BBTUD)	126,58	58,90	46,53
Lifting Minyak & Gas (BOEPD) Oil & Gas Lifting (BOEPD)	18.098,23	17.580,64	97,14
Regasifikasi (BBTUD)* Regasification (BBTUD)*	191,34	254,31	132,91
Transportasi Minyak (BOEPD) Oil Transportation (BOEPD)	178.558,70	174.811,43	97,90
Pemrosesan LPG (TPD) LPG Processing (TPD)	100,00	117,42	117,42

*) Termasuk volume TUA
Include TUA volume

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/ RUGI DAN STRUKTUR MODAL

Pendapatan Bersih 2025 terealisasi USD3,98 miliar atau 84,56% dari target yang dipengaruhi volume operasional niaga gas, *lifting* minyak dan gas. Namun untuk bisnis transportasi gas, transportasi minyak, dan jasa regas PGN meraih pendapatan yang optimal seiring dengan peningkatan serapan dari *shipper*.

Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk terealisasi USD215,36 juta atau 67,17% karena turunnya volume niaga gas dan membukukan kekurangan BPP HGBT 2023-2024, pembukuan *sunk cost* sumur Hikmah dan Perkasa di WK Ketapang, *write-off* atas tidak diperpanjangnya TWE WK West Bangkanai, pembukuan *impairment* WK South Sesulu, dan rugi selisih kurs.

Disisi lain terdapat bagian laba Joint Venture (JV) di atas target dan optimasi pendapatan keuangan. Realisasi Biaya Pokok Pendapatan sebesar USD3.277,6 juta atau 82,07% dari target.

ANALYSIS OF PROFIT/LOSS AND CAPITAL STRUCTURE REALIZATION ACHIEVEMENT

Net revenue for 2025 reached USD3.98 billion, or 84.56% of the target. This is driven by operational volumes of gas trading and oil and gas lifting. However, PGN's gas transportation, oil transportation, and regas services businesses achieved optimal revenues due to increased absorption from shippers.

Profit for the Year attributable to owners of the parent entity reached USD215.36 million, or 67.17%, due to a decrease in gas trading volume and a shortfall in the 2023-2024 HGBT BPP, the recording of sunk costs for the Hikmah and Perkasa wells in the Ketapang Work Area, a write-off due to the non-renewal of the TWE for the West Bangkanai Work Area, an impairment recording for the South Sesulu Work Area, and foreign exchange losses.

Furthermore, the Joint Venture (JV) profit surpassed the target and financial revenue optimization. Cost of Revenue reached USD3,277.6 million, or 82.07% of the target.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI LABA/RUGI DAN STRUKTUR MODAL
COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF PROFIT/LOSS AND CAPITAL STRUCTURE

Keterangan Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	%
Laba (Rugi)/Profit & Loss			
Pendapatan (Juta USD) Revenue (Million USD)	4.700,16	3.975,92	84,59
BPP (Juta USD) BPP (Million USD)	3.993,49	3277,59	82,07
Laba Bruto (Juta USD) Gross Profit (Million USD)	706,67	698,32	98,82
Beban Operasi (Juta USD) Operating Expenses (Million USD)	195,12	167,88	86,04
Laba Operasi (Juta USD) Operating Profit (Million USD)	586,57	519,63	88,59
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Juta USD) Profit for the year attributable to owners of the parent entity (Million USD)	320,62	215,36	67,17
Struktur Modal/Capital Structure			
Rasio utang terhadap ekuitas Debt to equity ratio*)	29,22%	30,46%	

*)Utang yang dikenakan bunga
*)Interest-bearing debt

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM

PGN secara berkelanjutan meningkatkan program pengembangan pekerja yang komprehensif dan konsisten melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknikal dan *leadership*, sertifikasi, serta *sharing knowledge*.

Program-program tersebut dirancang secara sistematis agar sesuai perkembangan bisnis Perseroan, sehingga setiap pekerja PGN memiliki kompetensi yang memadai, mampu bekerja secara profesional sesuai bidang dan posisi jabatannya, serta berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan mendukung peran PGN sebagai *Subholding* Gas.

Sebagai wujud komitmen dalam membekali dan memenuhi gap kompetensi pekerja, PGN menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial melalui *in-house training*, *public training*, serta sertifikasi.

Pada tahun 2025, PGN menetapkan target pelaksanaan program pelatihan *in-house* kompetensi teknis sebanyak 57 program, dengan realisasi mencapai 61 program. Tingkat partisipasi pekerja dalam program pengembangan tercatat sebesar 109,6% dari target sebesar 85%.

Penjelasan lebih lanjut terkait pengembangan SDM PGN dapat dilihat pada Bab Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

ANALYSIS OF HR DEVELOPMENT REALIZATION ACHIEVEMENT

PGN continuously enhances its employee development program comprehensively and consistently through functional/technical and leadership education and training programs, certification, and knowledge sharing.

These programs are systematically designed to align with the Company's business development, ensuring that every PGN employee possesses adequate competencies, is able to work professionally in their field and position, and contributes to achieving the vision and mission, while supporting PGN's role as a Gas Subholding.

As a manifestation of its commitment to equipping employees and addressing employee competency gaps, PGN holds various technical and managerial competency development programs through in-house training, public training, and certification.

In 2025, PGN set a target of implementing 57 in-house technical competency training programs, with 61 programs completed. Employee participation in these development programs reached 109.6% of the target of 85%.

Further details regarding PGN's HR development can be found in the Business Support Chapter of this Annual Report.

PROGRAM *LEARNING DEVELOPMENT*
LEARNING DEVELOPMENT PROGRAM

No	Uraian Description	2025		2024	
		Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
1	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Teknis In-House Technical Competency Training Program	57	61	55	56
2	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Manajerial In-House Managerial Competency Training Program	2	8	2	6
3	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis Public Technical Competency Training Program	77	99	72	74
4	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial Public Managerial Competency Training Program	1	2	1	1
5	Tingkat Partisipasi Pekerja Employee Participation Rate	85%	109,6%	85%	127,9%

RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG
PLANS, STRATEGIES, AND OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR

Proyeksi-proyeksi berikut mengandung ketidakpastian dan risiko. Hasil, kinerja, atau pencapaian aktual dapat berbeda dengan yang diproyeksikan dalam laporan ini karena faktor-faktor seperti antara lain perubahan kondisi ekonomi dan politik nasional dan regional; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; pergeseran harga, permintaan, dan penawaran pasar komoditas; perubahan lanskap persaingan; perubahan hukum, peraturan, prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan, atau pedoman; dan revisi terhadap asumsi-asumsi yang mendasari pernyataan-pernyataan yang bersifat *forward looking*.

The following projections carry uncertainties and risks. Actual results, performance, or achievements may differ materially from those projected in this report due to certain factors such as changes in national and regional economic and political conditions; fluctuations in foreign exchange rates; shifts in commodity market prices, demand, and supply; changes in the competitive landscape; changes in laws, regulations, accounting principles, policies or guidelines; and revisions to the assumptions underlying the forward-looking statements.

PROYEKSI STRATEGIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan strategi pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*), program strategis Perusahaan pada tahun 2026 terdiri dari:

Grow - Menjaga Bisnis Eksisting

1. Penguatan Bisnis Niaga dan Transportasi, melalui antara lain:
   a. Penyediaan pasokan LNG; serta mengupayakan harga beli LNG yang kompetitif.
   b. Menjaga *affordability* niaga gas dengan menerapkan strategi *marketing* dan strategi harga yang disesuaikan dengan portofolio pasokan gas pipa dan LNG.
   c. Melanjutkan pembangunan Jargas dengan penambahan 50 ribu SRT.
   d. Optimasi FSRU Lampung melanjutkan kontrak jasa regasifikasi TUA untuk LNG Alokasi PLN.
   e. Penyediaan Infrastruktur LNG dan pengembangan Kawasan Indonesia Timur dan Tengah (KITT).
   f. Sinergi dengan Subholding Upstream Pertamina untuk Komersialisasi Stranded Gas.
   g. Pengembangan wilayah Batam.
   h. Memperluas *market share* CNG dan LNG Retail.
   i. Koordinasi dengan *shipper* untuk optimasi transportasi minyak dan gas.
2. Melanjutkan Pembangunan Pipa Transmisi Minyak/BBM Cikampek-Plumpang.
3. Pengembangan bisnis hulu migas melalui pengeboran 5 sumur produksi, *workover* WK Pangkah, partisipasi aktif pelaksanaan program kerja WK Fasken, serta eksplorasi WK Pangkah dan WK Pekawai.

COMPANY'S STRATEGIC PROJECTION

In accordance with the Company's G-A-S (Grow-Adapt-Step Out) business growth achievement strategy, the Company's strategic program in 2026 consists of:

Grow - Maintain of Existing Business

1. Strengthening the Trade and Transportation Business, through, among other things:
   a. Providing LNG supplies and striving for competitive LNG purchase prices.
   b. Maintaining the affordability of the gas trade by implementing marketing and pricing strategies tailored to the pipeline gas and LNG supply portfolio.
   c. Continuing the development of the gas network with an additional 50,000 SRT.
   d. Optimizing the Lampung FSRU by continuing the TUA regasification service contract for PLN's allocated LNG.
   e. Providing LNG infrastructure and developing the Eastern and Central Indonesia Region (KITT).
   f. Creating synergy with Pertamina's Upstream Subholding for Stranded Gas Commercialization.
   g. Developing the Batam region.
   h. Expanding the market share of CNG and LNG Retail.
   i. Coordinating with shippers to optimize oil and gas transportation.
2. Continuing the construction of the Cikampek-Plumpang Oil/Fuel Transmission Pipeline.
3. Developing upstream oil and gas business through drilling 5 production wells, workover of Pangkah Work Area, active participation in the implementation of Fasken Work Area work program, and exploration of Pangkah and Pekawai Work Area.

Adapt – Pengembangan Bisnis Pendukung dengan Karakteristik Berdekatan dengan Bisnis Eksisting

1. Pengembangan LNG Hub & Storage.
2. Penjajakan kerjasama strategis di infrastruktur LNG *plant*, LNG *vessel*, dan fasilitas regasifikasi.

Step Out – Pengembangan Bisnis Baru

1. Hilirisasi gas bumi, seperti pengembangan bisnis *hydrogen.*
2. Kajian pengembangan *biomethane* dan produk derivatif gas lainnya sebagai tambahan pasokan niaga gas domestik

Untuk mendukung strategi pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan G-A-S, perusahaan menetapkan strategi dan program kerja utama lainnya, terdiri dari:

1. **HSSE & *Sustainability***
   a. HSSE *Excellence* dan peningkatan budaya HSSE menuju level budaya *generative*.
   b. Reduksi Emisi Karbon 2026 ≥ 35.000 Ton.
   c. Mempertahankan Rating ESG skor pada level Medium Risk atau Level C.
2. **Penyediaan Pasokan Gas dan LNG**
   a. Optimasi penyaluran gas dari portofolio pasokan gas pipa dan LNG.
   b. Menangkap peluang komersialisasi gas dari potensi pasokan baru.
   c. Memanfaatkan LNG *spot* dan/atau *uncommitted cargo* untuk menambah keandalan pasokan dari sisi LNG.
3. ***Demand***
   a. Optimalisasi pengelolaan kegiatan penjualan gas bumi, pengembangan produk dan pengelolaan pelanggan.
   b. Mengembangkan potensi *demand* di sektor industri baru.
   c. Penambahan pelanggan Jargas.
4. **Infrastruktur**
   a. Pengembangan Infrastruktur yang berdampak pada peningkatan dan penguatan pasar.
   b. Menjaga keandalan dan keamanan infrastruktur gas bumi.
5. **Implementasi *Data Center/Cloud Server, IT/OT Security, IT/OT Platform, Big Data Analytics & AI* serta *Cyber Security*.**
6. **Peningkatan kapabilitas SDM (*development program* terintegrasi) dan peningkatan *employee productivity*.**

Adapt – Pursue Adjacent Opportunities

1. Developing an LNG Hub & Storage.
2. Embarking on strategic partnerships in LNG plant infrastructure, LNG vessels, and regasification facilities.

Step Out – Scale to New Businesses

1. Downstreaming natural gas, such as the development of hydrogen business.
2. Studying the development of biomethane and other gas derivative products to supplement domestic gas trade supplies.

To support the Company's G-A-S business growth achievement strategy, the Company has set other main strategies and work programs, consisting of:

1. **HSSE & Sustainability**
   a. HSSE Excellence and improving HSSE culture towards a generative culture level.
   b. Carbon Emissions Reduction by 2026 ≥ 35,000 Tons.
   c. Maintaining an ESG Rating score at Medium Risk or Level C.
2. **Provision of Gas and LNG Supply**
   a. Optimizing gas distribution from the pipeline gas and LNG supply portfolio.
   b. Seizing gas commercialization opportunities from potential new supplies.
   c. Utilizing spot LNG and/or uncommitted cargo to increase LNG supply reliability.
3. **Demand**
   a. Optimizing the management of natural gas sales activities, product development, and customer management.
   b. Developing potential demand in new industrial sectors.
   c. Increasing the number of Jargas customers.
4. **Infrastructure**
   a. Developing Infrastructure that impacts market growth and strengthening.
   b. Maintaining the reliability and security of natural gas infrastructure.
5. **Implementing Data Center/Cloud Server, IT/OT Security, IT/OT Platform, Big Data Analytics & AI, and Cybersecurity.**
6. **Improving HR capabilities (integrated development programs) and increasing employee productivity.**

PROYEKSI PEMASARAN DAN OPERASIONAL

PGN optimis dapat terus meningkatkan kinerja pemasaran dan operasional dengan target peningkatan volume operasi pada tahun mendatang sebagai berikut:

MARKETING AND OPERATIONAL OUTLOOK

PGN is optimistic that it can continue to improve its marketing and operational performance with the following target of increasing operating volume in the coming year:

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Target 2026 2026 Target
Volume Niaga Gas (BBTUD) Gas Trading Volume (BBTUD)	836,02	876,75
Volume Transportasi Gas (BBTUD) Gas Transportation Volume (BBTUD)	1.609,29	1.619,47
Lifting Minyak & Gas (BOEPD) Oil & Gas Lifting (BOEPD)	17.580,64	19.160,93
LNG Trading (BBTUD) LNG Trading (BBTUD)	58,90	65,21
Pemrosesan LPG (TPD) LPG Processing (TPD)	117,42	100,00
Transportasi Minyak (BOEPD) Oil Transportation (BOEPD)	174.811,43	175.011,57
Regasification (BBTUD) (termasuk volume TUA) Regasification (BBTUD) (including TUA volume)	254,31	219,17

PROYEKSI PENDAPATAN, LABA, STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada tahun 2026, PGN memproyeksikan pertumbuhan Pendapatan yang sejalan dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan. Untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan, PGN akan terus memfokuskan pengelolaan pada bisnis niaga dan transmisi gas bumi, serta memenuhi pasokan gas, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG, serta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah melalui implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) maupun pengembangan jaringan gas (Jargas). Selain itu, PGN juga memperkuat perannya sebagai Subholding Gas melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi di lingkungan Pertamina Group guna mengoptimalkan potensi bisnis, sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan pada segmen bisnis lain yang telah menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya.

REVENUE, PROFIT, CAPITAL STRUCTURE, AND DIVIDEND POLICY OUTLOOK

In 2026, PGN projected Revenue growth aligned with the improvement in the Company's operational performance. To maintain financial performance stability, PGN will continue to focus its management on the natural gas trading and transmission business, as well as fulfilling gas supplies, both from pipeline gas and LNG, and is committed to supporting Government policies through the implementation of Specific Natural Gas Prices (HGBT) and the development of gas networks (Jargas). Additionally, PGN is also strengthening its role as a Gas Subholding by increasing synergy and collaboration within the Pertamina Group to optimize business potential, while encouraging sustainable growth in other business segments that have shown improved performance in the previous year.

Sejalan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target operasional, PGN memproyeksikan pertumbuhan Pendapatan dalam satu tahun ke depan berada pada kisaran *low to mid-double digit*. Sejalan dengan itu, proyeksi pasokan gas dari LNG yang meningkat, akan mempengaruhi Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk diperkirakan akan menyesuaikan seiring dengan peningkatan Beban Pokok Pendapatan. Dari sisi struktur permodalan, Rasio Utang terhadap Ekuitas diproyeksikan berada di kisaran 29%. Adapun kebijakan dividen diperkirakan mempertahankan Rasio Pembayaran Dividen pada kisaran 50%-70%.

Aligned with various efforts to improve operational target achievement, PGN projects revenue growth in the next year to be in the low to mid-double digit range. Correspondingly, the projected increase in LNG gas supply will affect Profit Attributable to Owners of the Parent Entity, which is expected to adjust aligned with the increase in Cost of Revenue. In terms of capital structure, the Debt to Equity Ratio is projected to be around 29%. Meanwhile, the dividend policy is expected to maintain the Dividend Payout Ratio in the range of 50%-70%.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Ke depan, PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi pekerja melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan. Pada tahun 2026, PGN merencanakan pelaksanaan pelatihan *in-house* kompetensi teknis sebanyak 57 program dan in-house kompetensi manajerial sebanyak dua program.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, PGN juga akan melanjutkan pengembangan modul *online learning* yang mendukung proses transformasi digital, memperluas jangkauan pengembangan pekerja di seluruh wilayah operasi, serta meningkatkan efisiensi kinerja dan biaya Perseroan.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OUTLOOK

Going forward, PGN is committed to continuously developing employee competency through various training programs. By 2026, PGN plans to implement 57 in-house technical competency training programs and two in-house managerial competency programs.

Aligned with technological advancements, PGN will also continue developing online learning modules to support the digital transformation process, expand employee development across all operational areas, and improve the Company's performance and cost efficiency.

PROGRAM *LEARNING DEVELOPMENT* 2026
2026 Learning Development Programs

No	Keterangan Description	Proyeksi 2026 2026 Outlook
1.	Program Pelatihan In-house Kompetensi Teknis Technical Competency Inhouse Training Program	57
2.	Program Pelatihan In-house Kompetensi Manajerial Managerial Competency Inhouse Training Program	2
3.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis Technical Competency Public Training Program	77
4.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial Managerial Competency Public Training Program	2
5.	Tingkat Partisipasi Pekerja Employee Participation Rate	85%

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

PANGSA PASAR

Berdasarkan data Kementerian ESDM, secara nasional, realisasi penyaluran gas bumi pada tahun 2025 mencapai 5.600 BBTUD. Pemanfaatan gas untuk domestik mencapai 3.908 BBTUD atau 69,78%, sedangkan pemanfaatan gas untuk ekspor, jumlahnya mencapai 1.692 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi untuk domestik tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3.866 BBTUD, sedangkan pemanfaatan gas untuk ekspor turun dari tahun 2024 sebesar 1.746 BBTUD. Pemanfaatan gas untuk ekspor meningkat di tahun 2025, seiring dengan upaya Pemerintah untuk mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi.

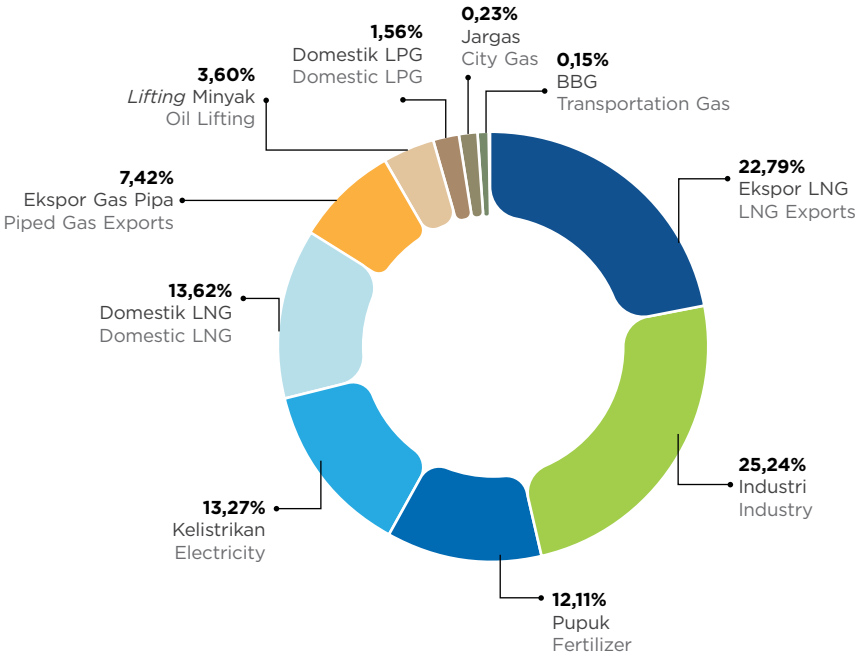
Dari total pemanfaatan gas bumi domestik, penyaluran paling besar adalah untuk sektor industri yang mencapai 1.414 BBTUD atau sekitar 25,24%. Kemudian diikuti oleh pemanfaatan gas bumi untuk LNG domestik sebesar 763 BBTUD atau sekitar 13,62%, kelistrikan sebesar 743 BBTUD atau sekitar 13,27%, serta pupuk sebesar 678 BBTUD atau sekitar 12,11%. Sementara pemanfaatan gas bumi untuk *lifting* minyak 202 BBTUD, LPG domestik 87 BBTUD, Jargas sebesar 13 BBTUD dan Bahan Bakar Gas (BBG) sebesar 8 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi ekspor adalah untuk ekspor LNG yang mencapai 1.276 BBTUD dan ekspor gas pipa yang mencapai 416 BBTUD.

MARKET SHARE

Data from the EMR Ministry reveals that nationwide realization of natural gas distribution reached 5,600 BBTUD in 2025. Domestic gas utilization reached 3,908 BBTUD, or 69.78%, while export gas utilization reached 1,692 BBTUD. Domestic gas utilization saw an increase compared to 3,866 BBTUD in 2024, while export gas utilization decreased from 1,746 BBTUD in 2024. Export gas utilization increased in 2025, aligned with the Government's efforts to support natural gas downstreaming by encouraging the growth of natural gas-using industries.

Of the total domestic natural gas utilization, the largest distribution is for the industrial sector, reaching 1,414 BBTUD or approximately 25.24%. This is followed by the utilization of natural gas for domestic LNG at 763 BBTUD or around 13.62%, electricity at 743 BBTUD or around 13.27%, and fertilizer at 678 BBTUD or around 12.11%. Meanwhile, the utilization of natural gas for oil lifting is 202 BBTUD, domestic LPG at 87 BBTUD, Jargas at 13 BBTUD and Gas Fuel (BBG) at 8 BBTUD. The utilization of natural gas for export is for LNG exports reaching 1,276 BBTUD and pipeline gas exports reaching 416 BBTUD.

Realisasi Pemanfaatan Produksi Gas Bumi Indonesia
Realization of Indonesia's Natural Gas Utilization

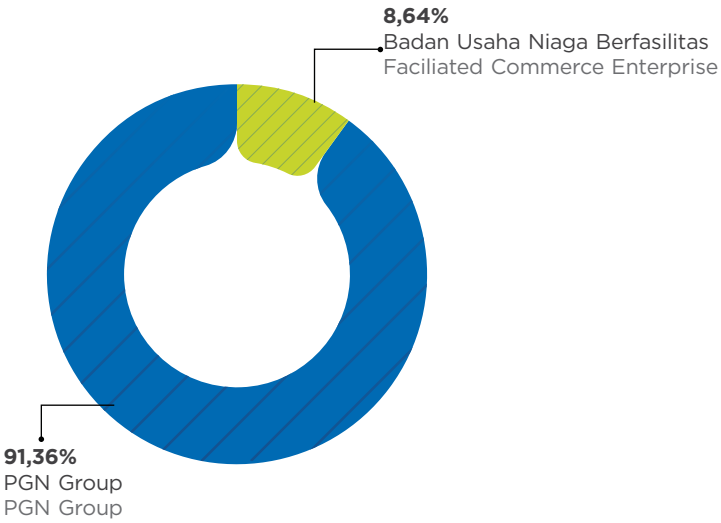


Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minyak dan Gas Bumi Tahun 2025, 27 Februari 2026
Source: Performance Report of the Directorate General of Oil and Gas 2025, February 27, 2026

Selama tahun 2025, PGN Grup menguasai sekitar 91,36% pangsa pasar niaga hilir gas bumi melalui pipa distribusi di Indonesia, dengan volume niaga gas mencapai 836,03 BBTUD. Perhitungan *market share* Niaga hilir gas bumi dilakukan berdasarkan *nature* bisnis kegiatan hilir niaga gas bumi berfasilitas melalui pipa distribusi.

During 2025, PGN Group controlled around 91.36% of the downstream natural gas trading market share through distribution pipelines in Indonesia, with a gas trading volume reaching 836.03 BBTUD. The calculation of the downstream natural gas trading market share is carried out based on the nature of the business of downstream natural gas trading activities facilitated through distribution pipelines.

Pangsa Pasar Niaga PGN Keseluruhan
Overall Commercial Market Share of PGN



PROFIL PELANGGAN

Sepanjang tahun 2025, PGN menyalurkan gas bumi ke Pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Stasiun Pengisian BBG, maupun Pelanggan Komersial dan Industri sebanyak 830.391 pelanggan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 816.645 pelanggan.

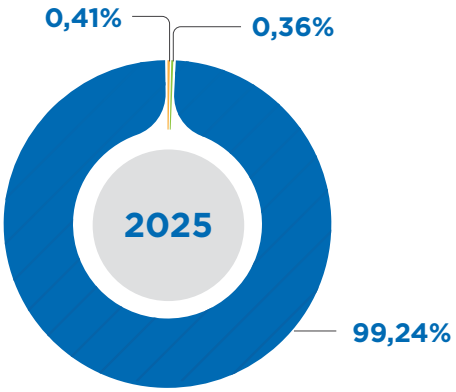
Jumlah pelanggan PGN saat ini masih didominasi oleh segmen pelanggan Rumah Tangga yaitu lebih dari 99% dari total pelanggan gas bumi PGN. Berkaca dari *market share* dan jumlah pelanggan, PGN senantiasa menunjukkan dominansinya dalam bisnis gas bumi seiring bertumbuhnya infrastruktur jaringan gas.

CUSTOMER PROFILE

Throughout 2025, PGN distributed natural gas to 830,391 household customers, small-scale customers, gas filling stations, and commercial and industrial customers. This number increased compared to 816,645 customers in 2024.

PGN's current customer base remains dominated by the household segment, accounting for over 99% of its total natural gas customers. Based on market share and customer numbers, PGN continues to demonstrate its dominance in the natural gas business as its gas network infrastructure grows.

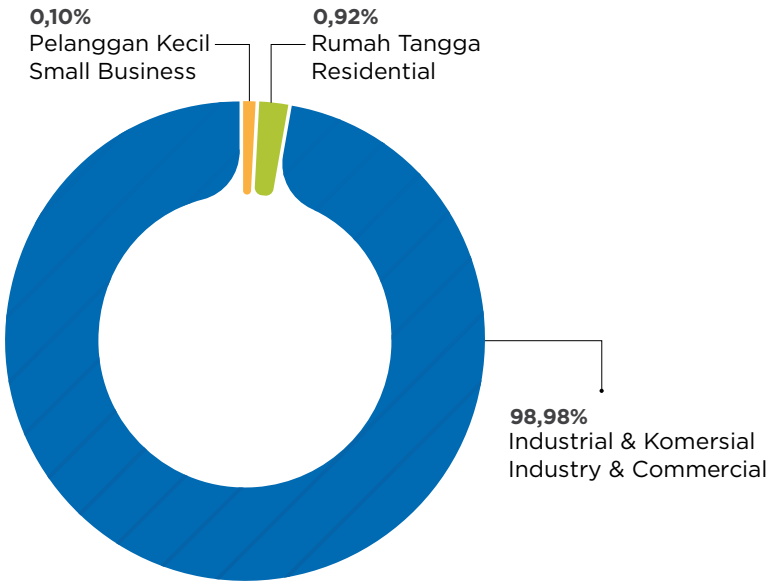
Jenis Pelanggan Customer Type	2025 Jumlah Total	2025 %	2024 Jumlah Total	2023 Jumlah Total
Segmen Komersial dan Industri Commercial and Industry Segment	3.390	0,41	3.276	3.103
Segmen Pelanggan Kecil Small Business Segment	2.949	0,36	2.539	1.976
Segmen Rumah Tangga Household Segment	824.052	99,24	810.830	825.856
Jumlah Total	**830.391**	**100,00**	**816.645**	**830.935**



Berdasarkan portofolio volume penyaluran niaga gas bumi ke pelanggan, porsi volume penyaluran terbesar adalah segmen pelanggan komersial dan industri yaitu sebesar 98,98% dari total penyaluran niaga gas bumi PGN.

Based on the portfolio of natural gas trading distribution volume to customers, the largest portion of distribution volume is the commercial and industrial customer segment, which is 98.98% of PGN's total natural gas trading distribution.

Kontribusi Volume Niaga Gas
Contribution of Gas Trading Volume



PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN

PGN telah mengimplementasikan berbagai kebijakan harga jual gas bumi bagi beberapa wilayah distribusi maupun harga jual atas diferensiasi produk dan layanan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi Pelanggan eksisting serta memperluas cakupan wilayah usaha PGN untuk segmen komersial dan industri, sebagai berikut:

1. Harga Gas untuk Pelanggan Komersial dan Industri Selain Pelanggan Korporat.
2. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan selain Pelanggan Korporat.
3. Harga Gas untuk Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Pelanggan *Captive Power* atau Pelanggan dengan Kontrak Bersyarat lainnya.
4. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan Korporat.
5. Harga Gas untuk Pelanggan Pupuk.
6. Harga Gas untuk Pelanggan Kelistrikan.
7. Harga gas untuk Pelanggan Kilang.

Untuk sektor Rumah Tangga, Pemerintah melalui BPH Migas telah menetapkan peraturan mengenai harga jual gas bumi per kota/kabupaten untuk segmen pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Pada 2025, PGN melakukan penetapan harga jual gas bumi sesuai dengan Peraturan dari BPH Migas untuk Produk GasKita Pintar dengan harga jual gas sebesar Rp10.000/ m^3 di wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Kabupaten Banyuasin;
2. Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Kabupaten Serang;
4. Kota Probolinggo.

ADJUSTMENT OF PGN NATURAL GAS SELLING PRICE

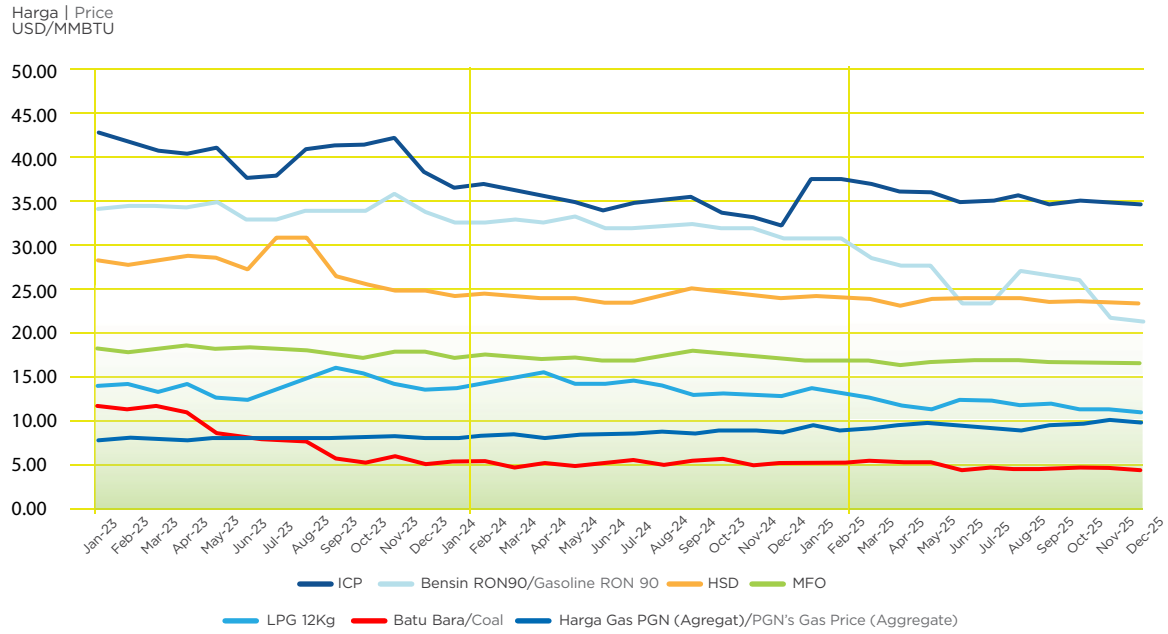
In order to increase the use of natural gas for existing Customers as well as expanding the coverage of PGN's business area for the commercial and industrial segments, PGN has implemented various natural gas selling price policies for several distribution areas, as well as selling prices for product and service differentiation as follows:

1. Gas Prices for Commercial and Industrial Customers other than Corporate Customers.
2. Gas Prices for Certain Industries for Customers other than Corporate Customers.
3. Gas Prices to Optimize Natural Gas Utilization for Captive Power Customers or Customers with other Conditional Contracts.
4. Gas Prices for Certain Industrial Gas Prices for Corporate Customers.
5. Gas Prices for Fertilizer Customers.
6. Gas Prices for Electricity Customers.
7. Gas Prices for Refinery Customers.

For the household sector, the Government, through the BPH Migas has set regulations regarding the selling price of natural gas per city/regency for the Households and Small-scale customer segments. In 2025, PGN has determined Rp10,000/ m^3 as the selling price of natural gas in accordance with the Regulation from BPH Migas for GasKita Pintar products in the following areas:

1. Banyuasin Regency;
2. Musi Banyuasin Regency;
3. Serang Regency;
4. Probolinggo City.

PERBANDINGAN DAYA SAING HARGA JUAL GAS BUMI PGN DENGAN BAHAN BAKAR LAIN
Comparison of the Competitiveness of PGN's Natural Gas Selling Price with Other Fuels



Dalam tiga tahun terakhir, harga rata-rata gas bumi PGN tetap menunjukkan daya saing yang lebih baik dan stabil dibandingkan produk bahan bakar lainnya. Stabilitas harga gas PGN didukung oleh struktur pasokan domestik serta kebijakan pemerintah yang menjaga kepastian harga hulu dan pasokan.

Berbeda dengan High Speed Diesel (HSD) dan Marine Fuel Oil (MFO) yang sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak global sehingga cenderung berfluktuasi, harga gas PGN lebih teredam dari volatilitas eksternal dan bergerak relatif moderat. Dengan kondisi tersebut, gas bumi PGN tetap menjadi opsi energi yang kompetitif dan berisiko lebih rendah bagi pelanggan, khususnya sektor industri. Harga yang ditampilkan pada grafik merupakan harga energi di titik serah pelanggan.

Over the past three years, PGN's average natural gas price has remained competitive and stable compared to other fuel products. PGN's gas price stability is supported by the domestic supply structure and government policies that maintain certainty in upstream prices and supply.

Unlike HSD and MFO, which are heavily influenced by global oil price dynamics and therefore tend to fluctuate, PGN's gas price is more cushioned from external volatility and fluctuates relatively moderately. Under these conditions, PGN's natural gas remains a competitive and lower-risk energy option for customers, particularly in the industrial sector. The prices shown in the graph represent energy prices at the customer's point of delivery.

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2025, PGN terus melakukan berbagai upaya peningkatan bisnis sepanjang tahun yang membutuhkan penyesuaian strategi bisnis, perubahan pola operasi dan struktur biaya yang lebih efisien. Sepanjang tahun PGN terus fokus pada kinerja komersial dengan meningkatkan digitalisasi proses bisnis dan menjaga keberlangsungan kerja sama jangka panjang melalui program layanan kepelangganan, serta strategi *customer acquisition* yang dilakukan secara tepat.

MARKETING STRATEGY

In 2025, PGN continued to undertake various business improvement efforts throughout the year, requiring business strategy adjustments, changes to operating patterns, and a more efficient cost structure. Throughout the year, PGN maintained its focus on commercial performance by enhancing the digitalization of business processes and maintaining the sustainability of long-term partnerships through customer service programs, as well as implementing a well-defined customer acquisition strategy.

PGN kembali berhasil melakukan penetrasi pasar dan pengembangan pasar eksisting untuk mendukung pemanfaatan gas bumi dan efisiensi penggunaan bahan bakar, di mana selama 2025 PGN telah menyalurkan gas bumi ke berbagai sektor industri dalam segmen Pelanggan Komersial dan Industri di seluruh wilayah operasi niaga PGN. Perluasan pemanfaatan gas bumi yang dilakukan antara lain:

a. Dimulainya penyaluran gas ke PLN Batam - PLTMG Sagulung;
b. Penambahan titik serah pembangkit PLN Batam pada *Terminal Usage Agreement* (TUA) serta peningkatan penyaluran gas regasifikasi untuk sektor PLN dengan skema TUA.

PENINGKATAN LAYANAN DIGITAL

Dalam upaya meningkatkan layanan dan mempermudah proses pembayaran oleh pelanggan, Perseroan memperkuat inisiatif digitalisasi seperti:

PGN once again successfully penetrated and developed existing markets to support natural gas utilization and fuel efficiency. During 2025, PGN distributed natural gas to various industrial sectors within the Commercial and Industrial Customer segments across PGN's commercial operations.Expansion of natural gas utilization, includes:

a. The commencement of gas distribution to PLN Batam - PLTMG Sagulung;
b. The addition of PLN Batam power plant delivery points to the Terminal Usage Agreement (TUA) and an increase of the distribution of regasification gas for the PLN sector with the TUA.

IMPROVEMENT OF DIGITAL SERVICES

In an effort to improve services and facilitate payment processes for customers, the Company strengthens its digitalization initiatives, including:

1. Integrasi Pembayaran Tagihan Gas Rumah Tangga di aplikasi MyPertamina;
   The integration of Household Gas Bill Payments in the My Pertamina application;
2. Penambahan fitur *chatbot* pada WhatsApp Official PGN 081541500645, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi 50% lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya;
   Addition of a chatbot feature on PGN's Official WhatsApp at 081541500645, to facilitating customers to access information 50% faster than the previous year;
3. Integrasi dengan Pertamina Call Center 135, menyederhanakan pengalaman layanan pelanggan Pertamina Group pada saluran call center yang sama;
   The integration with Pertamina Call Center 135, which simplifies the Pertamina Group customer service experience on the same call center channel;
4. *Landing page* www.pgas.id telah mudah ditemukan dari *search engine* paling populer di Indonesia untuk mendapatkan *product knowledge* produk Gaskita (Segmen Residensial & UMKM) dan *form* berlangganan Gaskita;
   It is now much easier to find the www.pgas.id landing page using the most popular search engines in Indonesia to gain product knowledge of Gaskita products (Residential and MSME Segments) and Gaskita subscription forms;
5. *Landing page* www.pgas.id/business telah dilengkapi dengan *product knowledge* Gasline (Segmen Industri & Komersial), fitur "*book an online meeting*" untuk *meeting* dengan Tim Sales PGN serta *self-service energy cost efficiency comparison;*
   The landing page www.pgas.id/business now comes with Gasline product knowledge (Industrial & Commercial Segments), a "book an online meeting" feature for meetings with the PGN Sales Team, and self-service energy cost efficiency comparison;
6. Penambahan kanal sosial media pada platform TikTok yaitu @gas_negara, untuk memperluas cakupan *target audience* yang lebih muda, dan tetap konsisten pada kanal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube;
   Addition of media social channels on the Tiktok platform, namely @gas_negara, to expand the reach of a younger target audience and remain consistent on Facebook, Instagram, X, and YouTube channels;

7. Penambahan fitur pada PGN Mobile, yaitu Catat Meter Mandiri dan *tracking* layanan teknis yang mempermudah pelanggan untuk memeriksa progres perbaikan yang diminta melalui PGN Contact Center;
   Additional features on PGN Mobile, namely Self-Meter Reading and technical service tracking, which make it easier for customers to check the progress of repairs requested through the PGN Contact Center;

8. Peningkatan fitur pada *Operation Support System* sehingga sistem informasi untuk keperluan administratif dalam proses berlangganan gas dan program layanan lainnya dapat terintegrasi serta menghasilkan *output* yang lebih optimal;
   Improved features on the Operation Support System so that the information system for administrative purposes in the gas subscription process and other service programs can be integrated and produce more optimal output;

9. *Enhancement* PGN Mobile

   Aplikasi resmi PGN Mobile version terbaru yang dapat diunduh melalui Apps Store dan Google Play Store, kini telah di-*update* dengan berbagai informasi mengenai pemakaian dan tagihan gas bumi, produk & layanan, lokasi SPBG, catat meter mandiri dan fitur lainnya. Pengembangan fitur dilakukan secara berkelanjutan yaitu fitur untuk monitor progres Berlangganan gas, pengajuan layanan baik komersial & teknis serta Gas Poin. Penambahan fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan dan *engagement* ke Pelanggan;
   The latest version of the official PGN Mobile, available on the Apps Store and Google Play Store, has been updated with various information regarding natural gas usage and billing, products & services, SPBG locations, self-meter reading, and other features. Feature development is carried out continuously, namely features to monitor gas subscription progress, submitting commercial & technical services, as well as Gas Points. The addition of these features is expected to improve service and engagement with Customers;

10. PGN Partner, merupakan aplikasi resmi PGN untuk pelaporan aktivitas lapangan, termasuk pada pelaporan gas in pelanggan rumah tangga. Sehingga seluruh proses bisnis pemasangan gas bumi ke pelanggan dapat terekam secara digital. PGN Partner juga telah ditambahkan fitur *tagging* koordinat untuk mengetahui lokasi pelanggan yang telah dilakukan Gas In oleh petugas lapangan sehingga data tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang memperbaharui jaringan pipa gas. PGN Partner sedang dilakukan pengembangan untuk pelaporan pekerjaan pemasangan pipa servis, pipa instalasi dan meter Gas. Sehingga memberikan kemudahan *monitoring* progres pekerjaan konstruksi di Pelanggan serta mendukung digitalisasi dan otomatisasi;
    PGN Partner, is the official application of PGN for reporting field activities, including gas-in reporting for household customers, enabling the entire business processes of installing natural gas to customers to be digitally recorded. PGN Partner also has added a coordinate tagging feature to find out the location of customers who have undergone Gas-In procedures by field officers so that the data can be integrated with the application that updates the gas pipeline network. PGN Partner is currently developing reporting on the installment of services pipeline, installation pipelines, and Gas meters so that it provides easy monitoring of construction progress at customer sites and supports digitalization and automation;

11. Registrasi dan Layanan Online PGN (Rely On PGN)
PGN Online Registration and Services (Rely on PGN)

Digitalisasi proses administrasi berlangganan gas rumah tangga menggunakan sistem Registrasi dan Layanan Online (*Rely On*) PGN telah dimanfaatkan lebih dari 750 ribu data pendaftar gas rumah tangga. Peningkatan *security* aplikasi ini terus dilakukan untuk menjaga data pribadi dari pendaftar gas bumi;
Digitalization of the household gas subscription administration process using the PGN Online Registration and Services (Rely On) system has been utilized by more than 750 thousand household gas registrants. Enhancements of application security continue to be implemented to protect the personal data of natural gas registrants.

12. Laman Pertiwi
Pertiwi Page

Kini akses informasi mengenai penggunaan gas harian, sudah dapat diakses oleh pelanggan Industri dan Komersial melalui pertiwi.pgn.co.id; memudahkan pengelolaan energi bagi pelanggan non-residensial;
Now information on daily gas usage is accessible to Industrial and Commercial customers via pertiwi.pgn.co.id, facilitating energy management for non-residential customers;

13. Saluran Pembayaran
Payment Channels

PGN terus menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan maupun penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk mempermudah mekanisme pembayaran pelanggan terutama pelanggan rumah tangga. PGN telah menyediakan berbagai macam saluran pembayaran, di antaranya:
PGN continues to collaborate with financial agencies and financial service providers to improve customer service and satisfaction. The objective is to facilitate the payment mechanism for customers, especially household customers. PGN has provided various payment channels, including:

a. Aplikasi: MyPertamina, Gojek, Shopee, Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, BNI Mobile Banking, Livin by Mandiri, BSI Mobile, Klik Indomaret, Bank Lampung
   Applications: MyPertamina, Gojek, Shopee, Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, BNI Mobile Banking, Livin by Mandiri, BSI Mobile, Klik Indomaret, Bank Lampung
b. E-commerce: Tokopedia, Blibli
   E-commerce: Tokopedia, Blibli
c. E-wallet: LinkAja, Gopay, DANA
   E-wallet: LinkAja, Gopay, DANA
d. Bank (ATM): BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, dan CIMB Niaga
   Bank (ATM): BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, dan CIMB Niaga
e. Minimarket: Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Alfamidi
   Minimarket: Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Alfamidi
f. Lain-lain: Payment Point Online Banking (PPOB), Pos Indonesia, Pegadaian
   Others: Payment Point Online Banking (PPOB), Pos Indonesia, Pegadaian

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN

Pada tahun 2025, selain PGN menerapkan strategi komunikasi pemasaran baik *offline* maupun *online* sebagai berikut:

1. ***Focus Group Discussion***
   Melakukan *Focus Group Discussion* dengan *stakeholder* seperti Kementerian Perindustrian, untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan Kawasan Industri di Indonesia berbasis gas bumi. Selain itu PGN juga melaksanakan *Focus Group Discussion* bersama Kawasan-Kawasan Industri yang membutuhkan gas bumi terutama untuk Wilayah Timur Indonesia.
2. **Transformasi *Hybrid Prospecting***
   Perubahan kebiasaan calon pelanggan dimana mereka lebih memilih untuk berinteraksi melalui multi-channel (*online-offline*) dan *self-service* diakomodir PGN dengan pembuatan laman www.pgas.id/business dengan adanya fitur *Calculate Saving* dan *Book an Online Meeting*.

   Fitur *Calculate Saving* memberikan ilustrasi estimasi penghematan biaya energi yang didapatkan bila beralih menggunakan gas bumi. Sementara fitur *Book an Online Meeting* memberikan kemudahan kepada calon pelanggan untuk memilih jadwal meeting dengan Tim Sales PGN. Fitur ini akan men-*generate link online meeting* menggunakan MS Teams antara calon Pelanggan dengan Tim Sales PGN.
3. **Temu Pelanggan**
   Melalui Temu Pelanggan, PGN bisa mendapatkan informasi mengenai rencana pertumbuhan permintaan gas bumi dari pelanggan. Kegiatan yang dilakukan baik kepada pelanggan Rumah Tangga maupun Komersial dan Industri ini juga menjadi momentum bagi PGN untuk menyapa pelanggan secara langsung, menjalin interaksi yang lebih erat, menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan melalui saluran komunikasi dalam format kegiatan temu bisnis, sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh kategori pelanggan, baik itu *Bronze*, *Silver*, *Gold*, maupun *Platinum*.

   PGN sebagai Subholding Gas berkomitmen untuk melakukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi dengan stakeholder untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan utilisasi gas bumi serta memberikan nilai tambah terhadap layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tujuannya untuk tumbuh bersama-sama secara berkelanjutan.

MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES

In 2025, PGN implemented offline and online marketing communication strategies, as outlined below:

1. **Focus Group Discussion**
   Conducting Focus Group Discussion with stakeholders, such as the Ministry of Industry to synergize in developing natural-gas-based Industrial Estates in Indonesia. In addition, PGN also holds Focus Group Discussions with Industrial Estates that need natural gas, especially in the Eastern Region of Indonesia.

2. **Hybrid Prospecting Transformation**
   Changes in prospective customers' habits where they prefer to interact via multi-channel (online-offline) and self-service are accommodated by PGN by creating the www. pgas.id/business page with the Calculate Saving and Book an Online Meeting features.

   The Calculate Saving feature provides an illustration of the estimated energy cost savings when converting to natural gas. Meanwhile, the Book an Online Meeting feature facilitates prospective customers to select a meeting schedule with the PGN Sales Team. This feature will generate an online meeting link using MS Teams between potential customers and the PGN Sales Team.
3. **Meeting Customers**
   Customer meeting activities enable PGN to capture information regarding plans for growth in natural gas demand from customers. The activity, which aims at both Household and Commercial & Industrial customers, also serves as an opportunity for PGN to greet customers directly, to establish closer interaction, and create new experiences for customers through communication channels in business-meeting formats while showing appreciation to all categories of customers, both Bronze, Silver, Gold, and Platinum.

   As a Gas Subholding, PGN is committed to enabling synergize, collaborations, and integration with stakeholders to promote infrastructure development and natural gas utilization while adding value to services provided to communities across the country. The objective is to grow together in a sustainable manner.

4. **Taman Jargas Nusantara**
   Tahun 2025 merupakan tahun pertama diadakannya event Taman Jargas Nusantara, yaitu kegiatan branding dan aktivasi pelanggan jaringan rumah tangga di Area Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan di Mall Bintaro *Exchange* selama empat hari berturut-turut.
5. ***City Gas Tour***
   Tahun 2025 merupakan tahun keempat diadakannya City Gas Tour, yaitu kegiatan *food truck* keliling kota sebagai sarana promosi dan aktivasi jaringan gas rumah tangga. Kegiatan lain yang dilakukan adalah demo memasak dan senam bersama. Titik singgah *City Gas Tour* tahun ini adalah kota Pekanbaru, Dumai, Medan, dan Batam.
6. **Media Sosial**
   PGN secara konsisten memberikan konten promosi dan product *knowledge* di semua kanal media sosial.

PENGEMBANGAN PRODUK

Pada tahun 2025, PGN terus melakukan pengembangan produk dan promosi untuk meningkatkan performa penjualan di tiap segmen pelanggan melalui langkah-langkah berikut:

1. **Gas Hasil Regasifikasi**
   PGN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan gas termasuk penambahan pasokan dari regasifikasi LNG. Pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diperlukan sebagai balancer dari fluktuasi pasokan gas pipa eksisting, baik karena terjadinya gangguan pada sumur gas maupun adanya pemeliharaan rutin oleh pemasok.

2. **Pengembangan Produk untuk Memfasilitasi Fleksibilitas Kontrak**
   Pemberlakuan basis kontrak kepada Pelanggan yang semula hanya tersedia basis kontrak bulanan menjadi tersedia beberapa pilihan basis kontrak antara lain bulanan, tahunan dan harian. Pengembangan produk berbasis kontrak tersebut memberikan nilai tambahan bagi Pelanggan melalui fleksibilitas dalam menggunakan gas sesuai dengan rencana dan kebutuhan Pelanggan. Pengembangan produk tersebut merupakan suatu langkah *continuous improvement* yang dilakukan PGN dan sebagai aksi nyata tindak lanjut PGN atas *customer voice* yang disampaikan Pelanggan dalam survei kepuasan Pelanggan.

4. **Taman Jargas Nusantara**
   2025 marked the debut of the Taman Jargas Nusantara, a branding and customer activation program for household gas network customers in the Tangerang Area. This event was held at Bintaro Exchange Mall for four consecutive days.
5. **City Gas Tour**
   2025 is the fourth year of the City Gas Tour, which is a food truck activity around the city as a means for promoting and introducing household gas networks. Other activities include cooking demonstrations and gymnastics. This year's City Gas Tour stops were Pekanbaru, Dumai, Medan, and Batam.
6. **Social Media**
   PGN consistently provides promotional materials and product knowledge on all social media platforms.

PRODUCT DEVELOPMENT

In 2025, PGN continued to develop its products and promotional initiatives to improve sales performance in each customer segment through the following measures:

1. **Regasified Gas**
   PGN needs to increase the availability of gas supply including additional supply from LNG regasification. What it needs further is the supply of gas from LNG regasification as a balancer for fluctuations in the existing pipeline gas supply due either to disruptions in gas wells or routine maintenance by suppliers.

2. **Product Development to Facilitate Contract Flexibility**

   The application of contract-based offerings for customers, which was previously only available on a monthly contract basis, now provides several contract basis options, including daily, monthly, and annually. The contract-based product development offers added value to customers through flexibility in using gas according to customer plans and needs. The product development is a continuous improvement measure carried out by PGN and as a concrete follow-up action by PGN for the customers' voice in the Customer satisfaction survey.

Selain produk berbasis kontrak tersebut di atas, PGN juga memberikan pilihan-pilihan produk tambahan kepada Pelanggan seperti "*Spot Gas*" untuk Pelanggan yang membutuhkan gas lebih dari Pemakaian Maksimum per Bulan Kontrak Pelanggan, "Gas Substitusi" untuk memenuhi kebutuhan energi Pelanggan dalam kondisi terjadi gangguan penyaluran gas pipa, dan "Multi Destinasi" untuk memberikan fleksibilitas Pelanggan *Group* dalam menggunakan gas.

3. *Positioning* Produk di Pelanggan dan Pasar

Pada tahun 2025, PGN memberlakukan berbagai promosi-promosi kepada Pelanggan Komersial dan Industri melalui pemberian harga gas yang kompetitif (program promosi *Overage, Slice dan Early Flare, Starter Pack*) dan fleksibilitas atas ketentuan komersial (program promosi Breakout) sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Adapun tujuan PGN memberlakukan promosi tersebut adalah untuk memberikan manfaat secara optimal dan peningkatan efisiensi biaya dalam penggunaan gas kepada Pelanggan sebagaimana positioning produk Gasline.

Dalam menjaga positioning produk kepada Pelanggan, serta untuk memberikan *customer experience* dan kemudahaan dalam pelaksanaan komersialisasi Gas kepada Pelanggan dan *improvement* proses bisnis, PGN mengembangkan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Pertiwi.

Aplikasi Pertiwi ini merupakan bentuk transformasi digital dimana seluruh proses *acquisition, evaluation, retention* dan *attrition* dilakukan dalam suatu *platform* yang akan memberikan kemudahan bagi PGN dan Pelangan dalam melakukan interaksi.

4. Pengembangan Solusi *Beyond Pipeline*

Pada tahun 2025, PGN terus memperluas wilayah pemasaran untuk produk GasLink kepada pelanggan sektor Komersial dan Industri. Produk ini merupakan solusi penyaluran gas bumi *beyond pipeline*, baik itu berupa CNG maupun LNG untuk calon pelanggan sektor Komersial dan Industri.

GasLink LNG mulai dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga upaya penurunan karbon dari pelaku industri hotel dan restoran. Hingga akhir tahun 2025, terdapat 637 pelanggan yang telah menjadi pengguna GasLink.

In addition to the abovementioned contract-based products, PGN also offers additional product options to Customers such as "Spot Gas" for Customers requiring more gas than the Customer Monthly Contract's Maximum Gas Usage, "Gas Substitusi" to meet Customer energy needs in the event of disruptions in the pipeline Gas distribution, and "Multi Destinasi" to provide gas usage flexibility for Group Customers.

3. Product Positioning in Customers and Markets

In 2025, PGN implemented a variety of promotions for Commercial and Industrial Customers by providing competitive gas prices (Overage, Slice and Early Flare, and Starter Pack promotional programs) and flexibility over commercial terms (Breakout promotional program) in accordance with applicable terms and conditions.

PGN's aim in implementing this promotion is to deliver optimal value and enhance cost efficiency for customers in gas usage, consistent with the Gasline product positioning.

In terms of maintaining product positioning for Customers and to create and deliver customer experience as well as convenience in implementing Gas commercialization for Customers and improving business processes, PGN developed a web-based application, namely the Pertiwi application.

The Pertiwi application is a form of digital transformation in which the entire acquisition, evaluation, retention, and attrition processes are carried out on a platform that facilitates PGN and Customers to interact.

4. Development of Beyond-Pipeline Solutions

In 2025, PGN further expanded its marketing area for GasLink products to customers in the Commercial and Industrial sector. This product is a solution for distributing natural gas in CNG and LNG, using beyond pipeline modes, for prospective customers in the Commercial and Industrial sector.

GasLink LNB began to be marketed to meet energy needs and also serves as efforts to reduce carbon from industrial actors in the hotel-restaurant sector. Until the end of 2025, there were 637 customers recorded as GasLink users.

POSITIONING PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN

Positioning dari produk gas bumi PGN secara umum adalah untuk memastikan bahan bakar gas bumi yang selalu tersedia, praktis tanpa ruang penyimpanan, ekonomis dan paling ramah lingkungan. Pembagian produk gas bumi disesuaikan dengan kategori segmen konsumen.

Gaskita untuk Pelanggan Residensial & Usaha Kecil diposisikan sebagai "Juaranya Gas Ngalir Terus" karena nilai jualnya sebagai bahan bakar yang selalu tersedia. Kemudian ada Gasline untuk Pelanggan Industri & Komersial, yang diposisikan sebagai "*Your Energy Efficiency Partner*".

Sementara Gaslink untuk Pelanggan Industri & Komersial diposisikan sebagai "*Bring Energy to You*" karena diperuntukan untuk pelanggan yang berada jauh dari pipa gas PGN sehingga disalurkan melalui CNG.

Adapun Gasku yang menyasar pelanggan transportasi diposisikan sebagai "Melaju Dengan Bersih", karena moda transportasi yang menggunakan gas bumi lebih ramah lingkungan dibanding energi fosil lainnya.

Alokasi Dana/Biaya Pemasaran/Biaya Pengelolaan Pelanggan dan Efisiensi

Pada tahun 2025, PGN melakukan komunikasi pemasaran melalui *online channel* yang kembali terbukti berhasil meningkatkan efisiensi untuk mengenalkan produk gas bumi milik PGN dan mendapatkan data registrasi calon pelanggan. Aktivitas ini dilakukan melalui iklan/promosi pada platform Google Ads dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga bekerja sama dengan *influencer* sosial media.

Secara konsisten, PGN juga berupaya untuk meningkatkan standar layanan guna menciptakan pelayanan prima bagi pelanggan. Hal ini merupakan cara PGN untuk membuktikan kesungguhan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan bisnis maupun kompetitor di masa yang akan datang.

PRODUCT POSITIONING IN THE MARKETS AND CUSTOMERS

In general, the positioning of natural gas products is to ensure the availability of reliable fuel supply, practical with no need for storage, economical, and the most environmentally friendly. The division of natural gas products is tailored to the consumer segment category.

For Residential & Small Business Customers, GasKita is positioned as "Juaranya Gas Ngalir Terus" (Undisputed Flowing Gas) given its value proposition as a fuel for its at-all-time availability. Meanwhile, Gasline for Industrial and Commercial Customers, is positioned as "Your Energy Efficiency Partner".

Gaslink, targeted for Industrial and Commercial Customers, is positioned as "Bring Energy to You" as it caters to customers residing not anywhere near PGN gas pipes so the gas needs to be distributed via CNG.

Gasku, aimed at transportation customers, is positioned as "Melaju Dengan Bersih" (literally Driving Cleanly) since gas transportation mode is more eco-friendly than other modes run on fossil energy.

Allocation for Funds/Marketing Costs/ Customers Management Fees and Efficiency

In 2025, PGN carried out marketing communications through online channels, which have again proven successful, in increasing efficiency in introducing PGN's natural gas products and obtaining registration data for prospective customers. These activities include carrying out digital marketing activities through advertisements/ promotions on the Google Ads platform and social media, such as Facebook, Instagram, X, and collaborating with social media influencers.

PGN also consistently strives to improve service standards to provide excellent services for customers. Through this measure, PGN demonstrates its commitment to improve satisfaction and loyalty while also preparing to face various future business challenges and competitors.

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN
CUSTOMER SATISFACTION INDEX

4,67 dari Skala 5 (Sangat Baik) - *Customer Satisfaction Index* (CSI)
Customer Satisfaction Index (CSI) 4.67 out of 5 (Very Good)

4,75 dari Skala 5 (Sangat Baik) - *Customer Loyalty Index* (CLI)
Customer Loyalty Index (CLI) 4.75 out of 5 (Very Good)

71,68% Indeks Skala <-30 - >30 (*High to Promote*) - *Net Promoter Score*
Net Promoter Score - Scale Index <-30 - >30 (High to Promote)

Untuk meningkatkan standar layanan, pada tahun 2025, PGN melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) dengan menggunakan acuan 5 aspek kualitas layanan yang diperkenalkan oleh Zeithaml, Bitner dan Parasuraman, yaitu *Reliability, Responsive, Assurance, Empathy* dan *Tangible* (RRAET).

Pada tahun 2025, PGN berhasil mendapatkan nilai CSI sebesar 4,67 dari skala 5 (Sangat Baik). Sementara itu, untuk Indeks Loyalitas Pelanggan atau *Customer Loyalty Index* (CLI) tahun 2025 mendapatkan nilai 4,75 dari skala 5 (Sangat Baik). Lebih jauh lagi, PGN juga melakukan pengukuran *Net Promoter Score* atau tingkat keinginan pelanggan memberikan rekomendasi untuk menggunakan produk dan layanan PGN sebesar 71,68%.

To improve service standards, in 2025, PGN conducted a Customer Satisfaction Index (CSI) using the five service quality aspects introduced by Zeithaml, Bitner and Parasuraman, namely Reliability, Responsive, Assurance, Empathy, and Tangible (RRAET).

In 2025, PGN managed to obtain a CSI score of 4.67 out of a 5 (Very Good) scale. Meanwhile, the Customer Loyalty Index (CLI) for 2025, with a score of 4.75 on a 5 (Very Good) scale. Furthermore, PGN also measured the Net Promoter Score, or the willingness level of customers to recommend PGN's products and services, at 71.68%.

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

PGN mengimplementasikan kebijakan dividen yang terukur, mencakup penetapan target rasio pembayaran dividen maupun target dividen per lembar saham, dengan senantiasa memperhatikan kinerja dan kemampuan arus kas Perusahaan serta mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kebutuhan pengembangan usaha. Usulan kebijakan dividen selanjutnya ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

PGN implements a measured dividend policy, including setting a target dividend payout ratio and a target dividend per share, while continuously paying attention to the Company's performance and cash flows capabilities, as well as considering operational needs and business development needs. Subsequently, the proposed dividend policy is determined based on shareholder approval at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
Announcement and Payments of Dividends

80%

Rasio Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023 dan 2024
Dividend Payment Ratio for 2023 and 2024 Financial Year

Pada tahun 2025, Perseroan melalui RUPS Tahunan tanggal 28 Mei 2025 memutuskan pembagian dividen tunai sebesar USD271.542.219 (setara Rp4.413.918.773.096), atau 80% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2024 yang dibagikan Rp182,08 per lembar saham.

Sementara untuk tahun sebelumnya, Perseroan melalui RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD222.472.943,20 (setara Rp3.595.162.762.112), atau 80% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2023 yang dibagikan Rp148,21 per lembar saham.

Informasi detail mengenai pembagian jumlah dividen yang dibagikan Perseroan sebagai berikut:

In 2025, the Company through the Annual GMS on May 28, 2025, decided to distribute cash dividends in the amount of USD271,542,219 (equivalent to Rp4,413,918,773,096), or 80% of net profit (in the statement of changes in equity) with Rp182.08 per share of cash dividends for the 2024 Financial Year.

Meanwhile, for the previous year, the Company through the Annual GMS on May 30, 2024 decided to distribute cash dividends in the amount of USD222,472,943.20 (equivalent to Rp3,595,162,762,112), or 80% of net profit (in the statement of changes in equity) with Rp148.21 per share of cash dividends for the 2023 Financial Year.

The following is detailed information regarding the distribution of dividends distributed by the Company:

Uraian Description	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Laba Bersih (USD) Net Profit (USD)	339.427.774	278.091.179	326.239.697	303.823.865	(264.773.584)
Dividen (Rp) Dividend (Rp)	4.413.918.773.096	3.595.162.762.112	3.419.350.889.793	3.016.128.449.746	
Dividen per saham (Rp) Dividend per share (Rp)	182,08	148.31	141,05	124,42	
Jumlah Lembar Saham Number of Shares	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196
Dividen Pay Out Ratio (%) Dividend Pay Out Ratio (%)	80	80	70	68	0
Tanggal Pengumuman Announcement Date	28 Mei 2025 May 28, 2025	30 Mei 2024 May 30, 2024	30 Mei 2024 May 30, 2024	27 Mei 2022 May 27, 2022	3 Mei 2021 May 3, 2021
Tanggal Pembayaran Payment Date	1 Juli 2025 July 1, 2025	26 Juni 2024 June 26, 2024	28 Juni 2023 June 28, 2023	29 Juni 2022 June 29, 2022	
Dividen setara USD Dividend equivalent in USD	271,542,219	222,472,943.20	228.367.788	205.955.966	
Kurs | Currency Rates	16.255	16.160	14.973	14.645	

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga akhir tahun 2025, PGN tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

As of the end of 2025, PGN was not obligated to report the use of proceeds from public offering.

Periode Period	**Jumlah Hasil Penawaran Umum** Proceeds of Public offering	**Biaya Penawaran Umum** Public Offering Fee	**Hasil Bersih** Net Proceeds	**Setoran ke Kas Negara** Deposit to the State Treasury	**Pendanaan Proyek SSWJ** SSWJ Project Funding	**Progres Pendanaan Proyek SSWJ** SSWJ Project Funding Progress	**Saldo Akhir** End Balance
31 Desember 2003 December 31, 2003	2.527,78	147,239	2.380,54	1.217,21	1.163,33	-	1.163,33
31 Maret 2003 March 31, 2003	-	-	-	-	-	-	1.163,33
30 Juni 2004 June 30, 2004	-	-	-	-	-	-	1.163,33
30 September 2004 September 30, 2004	-	-	-	-	-	6.984	1.156,35
31 Desember 2004 December 31, 2004	-	-	-	-	-	6.748	1.149,60
31 Maret 2005 March 31, 2005	-	-	-	-	-	1.19	1.148,41
30 Juni 2005 June 30, 2005	-	-	-	-	-	24.766	1.123,64
30 September 2005 September 30, 2005	-	-	-	-	-	61.249	1.062,39
31 Desember 2005 December 31, 2005	-	-	-	-	-	516.877	545,517
31 Maret 2006 March 31, 2006	-	-	-	-	-	463.361	82,155
30 Juni 2006 June 30, 2006	-	-	-	-	-	82.155	-

INFORMASI MENGENAI REALISASI ATAS RENCANA AKSI KORPORASI

INFORMATION ON REALIZATION OF CORPORATE ACTION PLANS

Sepanjang tahun 2025, PGN tidak mencatatkan adanya realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat utang, perubahan kepemilikan saham dan perubahan struktur permodalan, pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan, pemecahan saham (*stock split*) dan penggabungan saham (*reverse stock split*), dan restrukturisasi Perseroan.

Throughout 2025, PGN did not record any realization of corporate action plans, such as asset sales, issuance of debt securities, changes in share ownership and changes in capital structure, buyback of shares by the Company, stock split and reverse stock split, or restructurization of the Company.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS CONSOLIDATION/MERGER, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURIZATION

Selama tahun 2025, PGN tidak melakukan transaksi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

Throughout 2025, PGN did not make any material transactions related to investment, expansion, divestment, business consolidation/merger. acquisition, and debt/ capital restructurization.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

MATERIAL INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND AFFILIATED TRANSACTIONS

Dalam melaksanakan transaksi baik dengan pihak afiliasi maupun pihak non-afiliasi, Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK Nomor 42/2020"), serta Peraturan OJK Nomor 17/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK Nomor 17/2020").

Di sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan:
1. Transaksi material yang mengandung transaksi afiliasi;
2. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan;
3. Transaksi material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan;
4. Transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan; dan
5. Transaksi benturan kepentingan.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, PGN tidak mencatatkan adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

In conducting transactions with affiliates and non-affiliates, the Company consistently refers to Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK Number 42/2020") and Regulation of the OJK Number 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK Number 17/2020").

Throughout 2025, the Company did not carry out any:
1. Material transactions containing affiliated transactions;
2. Material transactions containing conflicts of interest;
3. Material transactions that could potentially disrupt the Company's business continuity
4. Affiliate transactions containing conflicts of interest; and
5. Transactions of conflicts of interests.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

Throughout 2025, PGN did not record any material transactions containing conflicts of interest.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Sepanjang 2025, PGN melaksanakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud POJK Nomor 42/2020 sebagai berikut:

Transaksi Afiliasi yang wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 42/2020

PGN melaksanakan Transaksi Afiliasi yang wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c POJK Nomor 42/2020, yaitu (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi; (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat; dan (c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud huruf b kepada OJK. Adapun Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan telah dilakukan keterbukaan informasi adalah sebagai berikut:

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED OR RELATED PARTIES

Throughout 2025, PGN made Affiliated Transactions as referred to in POJK Number 42/2020 as follows:

Affiliated Transactions that must meet the provisions of Article 4 paragraph (1) of POJK Number 42/2020

In conducting Affiliated Transactions, PGN must meet the provisions of Article 4 paragraph (1) letters a, b, and c of POJK Number 42/2020, namely (a) use the services of an appraiser to determine the fair value of the object of Affiliated Transaction and/or fairness of transaction; (b) announce disclosure of information on Affiliated Transaction to the public; and (c) disclose information as referred to in letter b to the OJK. The Company made the following Affiliated Transactions and have conducted the information disclosure:

Tanggal Transaksi Date of Transaction	**Obyek Transaksi** Object of Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Transaction Parties	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliation	**Nilai Transaksi** Value of Transaction
8 Desember 2025 8 December 2025	Pengalihan Data Biaya Pra-Proyek Pembangunan Infrastruktur Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping Transfer of Data on Pre-Project Cost of West Natuna Transportation System Pipeline Infrastructure Development to Pemping Island	Perseroan dengan PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") The Company and PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI")	Keduanya berada di bawah pengendalian yang sama oleh Negara Republik Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan di bawah kendali langsung Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna, dan PLN EPI di bawah kendali tidak langsung Negara Republik Indonesia melalui PT PLN (Persero) The two companies are directly and indirectly under the control of the Republic of Indonesia. The Company is under the direct control of the Republic of Indonesia through the ownership of Dwiwarna A Series, while PLN EPI is under indirect control of the Republic of Indonesia through PT PLN (Persero)	Rp29.991.816.096

Transaksi Afiliasi yang wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 42/2020

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 42/2020, terdapat transaksi dengan kriteria tertentu yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi. Adapun Transaksi Afiliasi dengan kriteria tertentu yang dilaksanakan oleh Perseroan dan telah dilaporkan kepada OJK adalah sebagai berikut:

Affiliated Transactions that must meet the provisions of Article 6 of POJK Number 42/2020

In accordance with Article 6 paragraph (1) of POJK Number 42/2020, there are transactions with specific criteria that must be reported to the OJK no later than at the end of the second business day following the date of the affiliated transaction. The Company made the following Affiliated Transactions with specific criteria and have reported them to the OJK:

Tanggal Transaksi Date of Transaction	**Obyek Transaksi** Object of Transaction	**Pihak yang Bertransaksi** Transaction Parties	**Sifat Hubungan Afiliasi** Nature of Affiliation	**Nilai Transaksi** Value of Transaction
15 September 2025 September 15, 2025	Pekerjaan Jasa Pengurusan Persetujuan Lingkungan untuk Pekerjaan di Lingkungan Project Management Office Environmental Approval Services for Project Management Office Work	Perseroan dengan PT Solusi Energy Nusantara ("SENA") The Company and PT Solusi Energy Nusantara ("SENA")	SENA dimiliki 99% oleh PGASOL, dan PGASOL dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan SENA is 99% owned by PGASOL, and more than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp8.230.000.000
19 September 2025 September 19, 2025	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pelaksanaan Investasi Pembangunan Untuk Pekerjaan Konstruksi Wilayah Jaringan Distribusi/ Wilayah Niaga Tertentu Batam Consultant Services for Supervision of Investment Implementation for Construction Work in Distribution Network Areas/Certain Trading Areas in Batam	Perseroan dengan SENA The Company and SENA	SENA dimiliki 99% oleh PGASOL, dan PGASOL dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan SENA is 99% owned by PGASOL, and more than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp1.945.000.000
25 September 2025 September 25, 2025	Jasa Sewa Kendaraan Operasional City Gas Project Tahun 2025–2027 City Gas Project Operational Vehicle Rental Services 2025–2027	Perseroan dengan PT Permata Graha Nusantara ("PGNMAS") The Company with PT Permata Graha Nusantara ("PGNMAS")	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan PGNMAS is more than 99% owned by the Company	Rp19.326.000.000
14 Oktober 2025 October 14, 2025	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Jakarta, Bekasi dan Bogor Construction of Natural Gas Network for Households in Jakarta, Bekasi and Bogor	Perseroan dengan PT PGAS Solution ("PGASOL") The Company with PT PGAS Solution ("PGASOL")	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp4.515.070.743
14 Oktober 2025 October 14, 2025	Pembangunan Jargas GasKita di City Gas 2 Tahap 3 (Kota dan Kabupaten Tangerang). Construction of the GasKita gas network in City Gas 2 Phase 3 (Tangerang City and Regency).	Perseroan dengan PGASOL Company with PGASOL	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp2.599.004.549
14 Oktober 2025 October 14, 2025	Pekerjaan Perbaikan Kantor Batam, Pekanbaru dan Dumai Office Repair Work in Batam, Pekanbaru and Dumai	Perseroan dengan PGNMAS Company with PGNMAS	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGNMAS is owned by the Company	Rp4.515.070.743

Tanggal Transaksi Date of Transaction	Obyek Transaksi Object of Transaction	Pihak yang Bertransaksi Transaction Parties	Sifat Hubungan Afiliasi Nature of Affiliation	Nilai Transaksi Value of Transaction
31 Oktober 2025 October 31, 2025	Pekerjaan Pemeriksaan Teknis Peralatan Untuk Penerbitan Certificate of Inspection dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi sebagai Persyaratan Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi (PLO) Tahun 2025 Technical Inspection Work of Equipment for Issuance of Certificate of Inspection and Installation Safety Inspection as a Requirement for Submitting the Issuance of Operational Approval (PLO) in 2025	Perseroan dengan SENA Company with SENA	SENA dimiliki 99% oleh PGASOL, dan PGASOL dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan SENA is 99% owned by PGASOL, and PGASOL is more than 99% owned by the Company	Rp3.650.000.000
25 November 2025 November 25, 2025	Pemasangan Sambungan Kompor dan Sambungan Rumah Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Surabaya Tengah dan Surabaya Timur Installation of Stove Connections and Natural Gas Network Connections for Households in Central Surabaya and East Surabaya	Perseroan dengan PGASOL Company with PGASOL	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp14.539.983.237
28 November 2025 November 28, 2025	Pemasangan Sambungan Kompor dan Sambungan Rumah Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Gresik Installation of Stove Connections and Natural Gas Network Connections for Households in Gresik	Perseroan dengan PGASOL Company with PGASOL	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan PGAS Solution is more than 99% owned by the Company	Rp12.292.928.972
15 Desember 2025 December 15, 2025	Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Gudang Klari milik Perseroan Cooperation on the Utilization of the Company's Klari Warehouse Land	Perseroan dengan PGASOL Company with PGASOL	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp250.000.000
23 Desember 2025 December 23, 2025	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tiket Penerbangan untuk Korporasi Cooperation Agreement on Provision of Flight Tickets for Corporations	Perseroan dengan PT Pelita Air Service Company with PT Pelita Air Service	Perseroan dan PT Pelita Air Service berada di bawah pengendalian yang sama yaitu PT Pertamina (Persero) The Company and PT Pelita Air Service are under the same control, namely PT Pertamina (Persero).	Tidak terdapat nilai transaksi There is no transaction value
24 Desember 2025 December 24, 2025	Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Batam Construction of a Household Gas Network in Batam City	Perseroan dengan PGASOL Company with PGASOL	PGNMAS dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan More than 99% of PGASOL is owned by the Company	Rp42.766.527.501

Transaksi Afiliasi yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan

PGN mencatatkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 POJK Nomor 42/2020, yaitu transaksi afiliasi yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin. Transaksi Afiliasi tersebut telah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PGN tanggal 31 Desember 2025, dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 33 tentang Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak-Pihak Berelasi.

Kebijakan serta Pernyataan Manajemen atas Prinsip Kewajaran Transaksi serta Penelaahan dan Persetujuan Transaksi dengan Pihak Berelasi yang Material/Signifikan

Terhadap Transaksi Afiliasi yang dilakukan, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar. Direksi memastikan bahwa transaksi yang dilakukan PGN telah melalui prosedur yang memadai dan telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 42/2020. Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan mengacu pada praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Selain itu, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan wajib melakukan peninjauan terhadap transaksi afiliasi yang material, dan menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Affiliate Transactions Conducted as Part of the Company's Business Activities

PGN records Affiliate Transactions as referred to in Article 8 of POJK Number 42/2020, namely affiliate transactions conducted as part of the Company's business activities to generate business revenue and conducted on a regular basis. These Affiliate Transactions have been included in PGN's Consolidated Financial Statements as of December 31, 2025, in Notes to the Financial Statements Number 33 on Balances and Significant Transactions with Related Parties.

Management Policy and Statement Regarding Arm's Length Principle and Review and Approval of Material/ Significant Related Party Transactions

With regard to Affiliated Transactions conducted, the Board of Directors ensures that all transactions have undergone adequate procedures and adhered to arm's length principles. Likewise, the Board of Directors ensures that transactions PGN conducted have undergone adequate procedures and complied with the provisions of POJK Number 42/2020. All transactions with affiliated party are conducted in accordance with generally accepted business practices and comply with the arm's length principle.

Additionally, the Company's Board of Commissioner and Audit Committee is obligated to review material affiliated-party transactions and certify that such transactions are made in the interests of the company and shareholders.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS

PGN sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengangkutan dan niaga gas bumi serta LNG sesuai perannya sebagai Subholding Gas diwajibkan untuk tunduk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan dan/atau diubah yang terkait langsung dan berdampak signifikan terhadap bisnis operasional yang selama ini dijalankan PGN.

PGN, as a business entity engaged in the transportation and trading of natural gas and LNG, is required, in accordance with its role as a Gas Subholding, to comply with applicable laws and regulations. Throughout 2025, several regulations were issued and/or amended that were directly related to and significantly impacted PGN's current business operations.

Ringkasan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan antara lain:

A summary of the changes in laws and regulations that significantly impacted the Company and their impact on the Financial Statements includes:

Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	**Pokok dan Alasan Perubahan** Subject and Grounds for Change
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 berfungsi sebagai finalisasi tahap utama reformasi BUMN dengan memusatkan fungsi regulasi pada BP BUMN, memprofesionalkan fungsi pengelolaan investasi pada BPI Danantara, menata ulang struktur kepemilikan dan tujuan BUMN, serta membangun kerangka akuntabilitas dan evaluasi normatif. Law Number 16 of 2025 serves as the finalization of the main stage of SOE reform by centralizing regulatory functions in BP SOEs, professionalizing investment management functions in BPI Danantara, restructuring the ownership structure and objectives of SOEs, and establishing a normative accountability and evaluation framework.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Government Regulation Number 9 of 2025 on the Amount and Use of Business Entity Contributions in Oil and Gas Business Activities at the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency	Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang mana Peraturan Pemerintah tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 mengenai hal serupa. Terdapat penyesuaian besaran persentase iuran pengangkutan gas bumi melalui pipa menjadi tarif tetap sebesar 2,50% dari tarif pengangkutan per MSCF dikalikan dengan volume gas bumi yang diangkut per bulan. The government has enacted Government Regulation Number 9 of 2025 on the Amount and Use of Business Entity Fees in Oil and Gas Business Activities at the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency. This Government Regulation revokes Government Regulation Number 48 of 2019 on a similar matter. The percentage fee for pipeline natural gas transportation has been adjusted to a fixed rate of 2.50% of the transportation rate per MSCF multiplied by the monthly volume of natural gas transported.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation Number 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan reformulasi menyeluruh sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang: (i) menyesuaikan diri dengan perubahan di tingkat undang-undang, (ii) memperluas cakupan sektor dan memperdalam integrasi OSS, (iii) memperkenalkan standar kualitas layanan dan rezim sanksi administratif terpusat, dan (iv) memberikan kepastian hukum yang lebih kuat atas proses dan pengawasan perizinan berusaha di seluruh Indonesia. Government Regulation Number 28 of 2025 is a comprehensive reformulation of the risk-based business licensing system that: (i) adapts to changes at the legislative level, (ii) expands sector coverage and deepens OSS integration, (iii) introduces service quality standards and a centralized administrative sanctions regime, and (iv) provides stronger legal certainty over the business licensing process and oversight throughout Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok dan Alasan Perubahan Subject and Grounds for Change
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Presidential Regulation Number 12 of 2025 on the National Medium-Term Development Plan	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 membakukan RPJM Nasional 2025–2029 sebagai rencana pembangunan jangka menengah yang secara normatif: (i) menerjemahkan visi-misi Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 ke dalam kerangka hukum pembangunan, (ii) menjamin kesinambungan dengan RPJP Nasional, (iii) mengintegrasikan perencanaan pusat dan daerah serta lintas kementerian/lembaga, dan (iv) memperkuat akuntabilitas dan fleksibilitas pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi, dan penganggaran yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Presidential Regulation Number 12 of 2025 standardizes the 2025–2029 National RPJM as a medium-term development plan that normatively: (i) translates the vision and mission of the President/Vice President resulting from the 2024 Election into a legal framework for development, (ii) ensures continuity with the National RPJP, (iii) integrates central and regional planning and cross-ministerial/institutional planning, and (iv) strengthens accountability and flexibility in development implementation through control, evaluation, and budgeting mechanisms that are explicitly regulated in Articles 2 to 6 of Presidential Regulation Number 12 of 2025.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 Tahun 2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 77.K/MG.01/MEM.M/2025 of 2025 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Field of Electricity Supply for Public Interest	Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 mengatur: (i) penetapan daftar pengguna dan struktur HGBT sektor penyediaan tenaga listrik umum; (ii) mekanisme penetapan volume, penyesuaian harga, dan tarif penyaluran beserta perlakuan perpajakan; (iii) mandat koordinasi teknis kepada SKK Migas dan BPH Migas; (iv) tenggat waktu penyelesaian kontrak dan pelaporan; (v) pemanfaatan volume gas yang tidak terserap; dan (vi) pencabutan rezim keputusan Menteri ESDM sebelumnya, serta penetapan berlaku surut sejak 1 Januari 2025, semuanya berdiri di atas kerangka Peraturan Presiden 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 dan pedoman evaluasi HGBT lintas sektor yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022. The Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 77.K/MG.01/MEM.M/2025 regulates: (i) the determination of the list of users and the structure of HGBT in the general electricity supply sector; (ii) the mechanism for determining volume, price adjustments, and distribution tariffs along with tax treatment; (iii) the technical coordination mandate to SKK Migas and BPH Migas; (iv) the deadline for contract completion and reporting; (v) the utilization of unabsorbed gas volume; and (vi) the revocation of the previous decree regime of the Minister of Energy and Mineral Resources, as well as the determination of retroactive effect from January 1, 2025, all based on the framework of Presidential Regulation 40 of 2016 in conjunction with Presidential Regulation Number 121 of 2020 and the cross-sector HGBT evaluation guidelines stipulated through the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 134.K/MG.01/MEM.M/2022.
Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 Tahun 2025 Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 282.K/MG.01/MEM.M/2025 of 2025 Amendment to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 77.K/MG.01/MEM.M/2025 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Field of Electricity Supply for Public Interest.	Keputusan Menteri ESDM 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tidak mengubah struktur norma substantif Keputusan Menteri 77.K/MG.01/MEM.M/2025, melainkan mengoreksi dan memutakhirkan lampirannya agar daftar pengguna, volume, dan harga gas bumi tertentu di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum sesuai dengan: (i) mandat Peraturan Presiden 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020, (ii) pedoman evaluasi lintas sektor, (iii) perubahan organisasi Kementerian ESDM, dan (iv) kondisi aktual pasokan gas, kebutuhan kelistrikan, serta keseimbangan penerimaan negara. The Minister of Energy and Mineral Resources Decree 282.K/MG.01/MEM.M/2025 does not change the substantive norm structure of Ministerial Decree 77.K/MG.01/MEM.M/2025, but rather corrects and updates its attachments so that the list of users, volumes, and prices of certain natural gas in the field of electricity supply for public interest is in accordance with: (i) the mandate of Presidential Regulation 40 of 2016 in conjunction with Presidential Regulation Number 121 of 2020, (ii) cross-sector evaluation guidelines, (iii) changes in the organization of the Ministry of Energy and Mineral Resources, and (iv) the actual conditions of gas supply, electricity needs, and the balance of state revenues.

Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok dan Alasan Perubahan Subject and Grounds for Change
Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi BPH Migas Regulation Number 3 of 2025 on Special Rights in Transmission Sections and/or Distribution Network Areas	Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2025ini menyatukan dan memperbaharui rezim Hak Khusus dengan mencabut Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi. Keseluruhan pengaturan adalah pembentukan rezim Hak Khusus yang lebih jelas, terintegrasi dengan mekanisme lelang, dilengkapi sanksi dan prosedur pencabutan, namun tetap menjaga keberlanjutan hak dan kewajiban yang sudah ada, sehingga pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa berjalan dengan kepastian hukum yang lebih kuat. BPH Migas Regulation Number 3 of 2025 unifies and updates the Special Rights regime by revoking BPH Migas Regulation Number 8 of 2019 on the Granting of Special Rights to Transmission Sections and/or Distribution Network Areas. The overall regulation establishes a clearer Special Rights regime, integrated with an auction mechanism, equipped with sanctions and revocation procedures, while still maintaining the continuity of existing rights and obligations, so that the management of natural gas transmission and distribution networks through pipelines runs with stronger legal certainty.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

PGN menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup:

1. **Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran**
   Amendemen tersebut mengklarifikasi bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dan bagaimana entitas harus menentukan nilai tukar spot ketika kemampuan tukarnya kurang, serta mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari adanya mata uang yang bisa ditukar. Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini.

   Amandemen ini diharapkan tidak akan memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PGN prepares Consolidated Financial Statements according to Financial Accounting Standards in Indonesia, which include Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Accounting Standards and Regulations as well as Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Reports issued by the Financial Services Authority (OJK).

The Company initially applies all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, including the following revised standards that do not have a significant impact on the Group's consolidated financial statements:

1. **Amendments to PSAK 221: Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability**
   The amendments clarify how an entity should assess the exchangeable nature of a currency and how it should determine the spot exchange rate when it lacks convertibility. They also require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of currency convertibility. These amendments are effective on January 1, 2025, and may be applied earlier.

   These amendments are not expected to have an impact on the Group's consolidated financial statements.

2. **PSAK 117: Kontrak Asuransi**

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini diharapkan tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

2. **PSAK 117: Insurance Contracts**

A new comprehensive accounting standard for insurance contracts, covering recognition and measurement, presentation, and disclosure. Upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts—life, non-life, direct insurance, and reinsurance—regardless of the issuing entity, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features. Several scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, and requires comparative figures. Early adoption is permitted if an entity also applies PSAK 109 and PSAK 115 on or before the initial adoption date of PSAK 117. This standard is not expected to have an impact on the Group's financial reporting upon initial adoption.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

PGN berkomitmen untuk mendistribusikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada negara. PGNyakin bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuanganyang baik selaras dengan kontribusi Perusahaan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Pada tahun 2025, total kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:

- Pajak: PGN memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak sebesar Rp5.034 miliar.
- Dividen: PGN membagikan dividen kepada negara selaku pemilik satu lembar saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp182,08, dan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp2.514 miliar atas kinerja keuangan tahun buku 2024.
- PNBP Lainnya: Kontribusi berupa PNBP lainnya sebesar Rp297 miliar.

PGN is committed to distributing economic benefits, both directly and indirectly, to all stakeholders, including the state. PGN firmly believes that strong operational and financial performance goes hand in hand with the Company's greater contribution to the nation and the state.

In 2025, the total contributions to the state through the fulfillment of tax and non-tax state revenue (PNBP) obligations were as follows:

- Tax: PGN contributed Rp5,034 billion in taxes to the state.
- Dividends: PGN m distributed dividends to the state, as the owner of one A Series Dwiwarna share, amounted to Rp182.08, and to PT Pertamina (Persero), as the Proxy for the A Series Dwiwarna Shareholders, amounted to Rp2,514 billion, based on the financial performance for the 2024 financial year.
- Other PNBP: Other PNBP contributions amounted to Rp297 billion.

PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

KPI ACHIEVEMENT AND COMPANY SOUNDNESS LEVEL

Skor *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial PGN yang disajikan masih merupakan hasil evaluasi internal PGN, dengan skor tercapai 106,02 dan jika memperhitungkan *Boundary* KPI menjadi sebesar 110,00. Skor final KPI akan diperoleh berdasarkan Laporan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Direksi Secara Kolegial PGN untuk Tahun Buku 2025 oleh Kantor Akuntan Publik yang belum diperoleh hingga penerbitan laporan ini.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Fitch Ratings pada tanggal 2 April 2026, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (Stand Alone Rating): bb+/aa (idn);
b. Peringkat Akhir (Final Rating): BBB-/AA+(idn)/Outlook Stabil.

Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2023, Tingkat Kesehatan PGN Tahun Buku 2025 adalah Sangat Sehat (AAA), sama dengan Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2024.

The PGN Collegial Key Performance Indicator (KPI) scores presented are still the results of PGN's internal evaluation, with a score of 106.02 achieved, and when considering the KPI Boundary, it reaches 110.00. The final KPI score will be obtained based on the Agreed-Upon Procedures Report, based on the PGN Board of Directors' Collegial KPI Performance Evaluation Report for Fiscal Year 2025 by a Public Accounting Firm, which has not yet been obtained as of the publication of this report.

Based on the rating conducted by Fitch Ratings on April 2, 2026, the results are as follows:

a. Stand-Alone Rating: bb+/aa (idn);
b. Final Rating: BBB-/AA+(idn)/Stable Outlook.

Thus, as stipulated in Regulation of the SOE Minister Number 02/MBU/2023, PGN's Soundness Level for 2025 Financial Year is Excellent Soundness (AAA), the same as the Company's Soundness Level in 2024.

RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA 2025
DETAILS OF ISSUES ARISING DURING 2025

Rincian masalah yang timbul di sepanjang tahun 2025, dampak, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh PGN sebagai berikut:

Pasokan Gas Bumi
Sepanjang tahun 2025, PGN menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan pasokan gas bumi di sejumlah wilayah operasional utama. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pasokan dari sisi hulu serta dinamika alokasi gas nasional, yang berdampak pada penyesuaian volume penyaluran gas kepada pelanggan.

Secara umum, permintaan gas domestik tetap menunjukkan tren yang relatif stabil seiring dengan aktivitas industri dan kebutuhan energi nasional. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di beberapa periode menyebabkan terjadinya defisit pasokan gas yang perlu dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan layanan dan keandalan jaringan distribusi gas PGN.

Gangguan dan defisit pasokan gas selama tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. **Penurunan Produksi Gas Hulu (*Natural Decline*)**
   Produksi gas dari beberapa lapangan utama mengalami penurunan alami (*natural decline*), serta adanya keterlambatan *onstream* beberapa proyek hulu baru, yang menyebabkan keterbatasan pasokan.

2. **Gangguan Operasional dan *Unplanned Shutdown***
   Beberapa kejadian gangguan operasional di sisi hulu maupun *midstream*, termasuk pemeliharaan tidak terencana (*unplanned shutdown*), turut mengurangi volume pasokan yang tersedia secara temporer.

Kondisi defisit dan gangguan pasokan gas tersebut memberikan beberapa dampak terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan, antara lain:

1. **Penurunan Volume Penyaluran Gas dan Penyesuaian Pola Konsumsi Pelanggan**
   Terbatasnya pasokan menyebabkan penurunan volume niaga gas. Realisasi volume niaga gas sedikit lebih rendah 2% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari pemasok utama di wilayah Sumatra dan Jawa dan adanya penurunan penyerapan di sisi pelanggan terutama di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2025.

Details of issues arising during 2025, their impacts, and handling efforts PGN undertook are as follows:

Natural Gas Supply
Throughout 2025, PGN encountered structural challenges in the form of limited natural gas supply in several key operational areas. This condition was primarily driven by the decreased upstream supply and the dynamics of national gas allocations, which impacted adjustments in gas distribution volumes to customers.

In general, domestic gas demand remained relatively stable aligned with industrial activity and national energy needs. However, the imbalance between demand and supply in certain periods resulted in gas supply deficits that needed to be carefully managed to maintain service continuity and the reliability of PGN's gas distribution network.

Gas supply disruptions and deficits during 2025 were caused by several key factors, as follows:

1. **Natural Decline in Upstream Gas Production**
   Gas production from several major fields experienced a natural decline, as well as delays in the onstreaming of several new upstream projects, leading to supply constraints.

2. **Operational Disruptions and Unplanned Shutdowns**
   Several operational disruptions in the upstream and midstream sectors, including unplanned maintenance shutdowns, contributed to a temporary reduction in available supply volume.

The gas supply deficit and disruptions have had several impacts on the Company's operational and financial performance, including:

1. **Decreased Gas Distribution Volume and Adjustments to Customer Consumption Patterns**
   Limited supply has resulted in a decrease in gas trading volume. Actual gas trading volume was slightly lower by 2% compared to 2024. This decrease was primarily driven by reduced piped gas supply from major suppliers in Sumatra and Java and decreased absorption on the customer side, particularly in the second and third quarters of 2025.

2. **Tekanan terhadap Margin**
   Dengan peningkatan penggunaan LNG yang memiliki biaya pasokan lebih tinggi, memberikan tekanan terhadap margin usaha, khususnya pada segmen niaga dan distribusi gas. Beban Pokok Pendapatan, meningkat sebesar 8% secara *year on year*, yang dikontribusikan terutama dari segmen niaga atas pembelian LNG sebagai pasokan di tahun 2025 yang mencapai 12% dari total pasokan gas.

2. **Pressure on Margins**
   The increased use of LNG, which has higher supply costs, has put pressure on operating margins, particularly in the gas trading and distribution segments. Cost of Revenue increased by 8% year-on-year, primarily contributed by the trading segment, with LNG purchases as supply in 2025 reaching 12% of total gas supply

Dalam merespons kondisi tersebut, PGN secara proaktif melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan meminimalkan dampak terhadap pelanggan:

In response to these conditions, PGN proactively implemented various strategic steps to maintain supply sustainability and minimize the impact on customers:

1. **Optimalisasi dan Diversifikasi Sumber Pasokan**
   PGN melakukan optimalisasi kontrak pasokan eksisting serta diversifikasi sumber gas, termasuk pemanfaatan LNG, guna menutup gap pasokan.

1. **Optimization and Diversification of Supply Sources**
   PGN optimized existing supply contracts and diversified gas sources, including the use of LNG, to close the supply gap.

2. **Penggunaan Infratruktur LNG**
   Peningkatan pemanfaatan fasilitas LNG, termasuk regasifikasi, dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan gas pipa, terutama di wilayah dengan defisit pasokan.

2. **LNG Infrastructure Utilization**
   Increased utilization of LNG facilities, including regasification, was implemented to cover the shortfall in pipeline gas supply, particularly in areas with supply deficits.

3. **Pengelolaan Alokasi Gas Secara Selektif**
   PGN menerapkan manajemen alokasi gas, termasuk penyesuaian sementara volume penyaluran, guna menjaga stabilitas pasokan nasional.

3. **Selective Gas Allocation Management**
   PGN implemented gas allocation management, including temporary adjustments to distribution volumes, to maintain national supply stability.

4. **Peningkatan Keandalan dan Fleksibilitas Infrastruktur**
   Perseroan melakukan program *debottlenecking*, optimalisasi operasi jaringan, serta peningkatan keandalan infrastruktur untuk meningkatkan fleksibilitas distribusi dan meminimalkan risiko gangguan pasokan.

4. **Improved Infrastructure Reliability and Flexibility**
   The Company implemented a debottlenecking program, optimized network operations, and improved infrastructure reliability to increase distribution flexibility and minimize the risk of supply disruptions.

5. **Koordinasi Intensif dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan**
   PGN secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah, regulator, pelaku industri hulu, dan produsen LNG untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan sinkronisasi kebijakan energi nasional.

5. **Intensive Coordination with the Government and Stakeholders**
   PGN actively coordinated with the Government, regulators, upstream industry players, and LNG producers, ensuring supply sustainability and synchronization of national energy policies.

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN
REPORT ON THE UTILIZATION OF ADDITIONAL STATE CAPITAL INJECTION (PMN)

Selama tahun 2025, PGN tidak menerima tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

During 2025, PGN did not receive any additional State Capital Injection (Penyertaan Modal Negara / PMN).

PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN
IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS

Sepanjang tahun 2025, PGN melanjutkan mandat untuk melaksanakan proyek strategis nasional atau penugasan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga**
   PGN senantiasa berkomitmen untuk melakukan perluasan pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil dengan pembangunan jaringan gas bumi. Program ini juga turut mendukung penurunan impor dan subsidi LPG dengan mengoptimalkan utilisasi gas bumi domestik. Hingga tahun 2025, PGN telah melayani lebih dari 827 ribu Pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. **Implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)**
   Sejak bulan April tahun 2020, PGN Group mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri melalui penerapan HGBT kepada 7 Sektor Industri dan pembangkit listrik dengan volume penyaluran rata-rata pada tahun 2025 sebesar 347 BBTUD.
3. **Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Transportasi Jalan**
   PGN melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas untuk sektor transportasi jalan dengan mengoperasikan 14 SPBG dan 4 MRU yang tersebar di 11 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.
4. **Penugasan pembangunan Jargas IKN**

   Sebagai bentuk dukungan penyediaan energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), PGN telah membangun dan menyalurkan gas bumi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara sejak Agustus 2024. PGN senantiasa memperluas pemanfaatan gas bumi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur gas bumi di wilayah IKN.

Throughout 2025, PGN continued to carry out mandates related to national strategic projects and other assignments, with details as follows:

1. **City Gas Network Development Program**
   PGN remains committed to expanding the utilization of natural gas for the household sector and small customers through the development of natural gas pipeline networks. This program also supports the reduction of LPG imports and subsidies by optimizing the utilization of domestic natural gas. As of 2025, PGN has served more than 827 thousand household and small customers.
2. **Implementation of Certain Natural Gas Price (HGBT)**
   Since April 2020, the PGN Group has supported the Government's program to enhance industrial competitiveness through the implementation of Certain Natural Gas Prices (HGBT) for seven industrial sectors and power plants, with an average gas distribution volume in 2025 of 347 BBTUD.
3. **Assignment for the Provision and Distribution of Natural Gas for Road Transportation**
   PGN carries out the assignment to provide and distribute gas fuel for the road transportation sector by operating 14 Gas Fuel Filling Stations (SPBG) and 4 Mobile Refueling Units (MRU) located across 11 cities on the islands of Java and Sumatra.
4. **Assignment for the Development of the IKN Gas Network (Jargas)**
   As part of its support for the provision of clean energy in the Nusantara Capital City (IKN), PGN has built and distributed natural gas within the Core Government Center Area of the Nusantara Capital City since August 2024. PGN continues to expand the utilization of natural gas by further developing natural gas infrastructure in the IKN area.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan dihadapkan oleh berbagai risiko yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian laba Perseroan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen. Hal-hal yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan antara lain:

- Risiko sengketa hukum dan penyesuaian kebijakan;
- Risiko penurunan pasokan gas atau keterbatasan LNG;
- Risiko pengelolaan aset Migas;
- Risiko terkait pengelolaan keamanan siber;
- Risiko Operasional terkait keandalan Infrastruktur;
- Risiko Operasional terkait pengelolaan HSSE.

In carrying out its business activities, the Company faces various risks that have the potential to significantly affect the achievement of the Company's profits and performance targets set by management. Factors that may have a significant impact include:

- Risk of legal disputes and policy adjustments;
- Risk of declining gas supply or limitations in LNG availability;
- Risk related to the management of oil and gas assets;
- Risk related to cybersecurity management;
- Operational risks related to infrastructure reliability;
- Operational risks related to HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) management.

LANGKAH MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG DAPAT MEMENGARUHI KELANGSUNGAN USAHA

Perseroan telah menerapkan praktik terbaik manajemen risiko dalam melakukan evaluasi atau penelaahan atas penyusunan rencana strategis, dan melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk mencapai target untuk menjamin kelangsungan usaha.

Dalam prosesnya, PGN senantiasa melakukan pengelolaan risiko korporat untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi Perseroan, mengevaluasi risiko dan mengelola penanganan terhadap risiko sehingga dapat diterima pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite*.

Secara rutin, Perseroan menelaah dan memperbarui kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di industri migas serta pemenuhan aspek kepatuhan pengelolaan korporasi.

Secara spesifik, pengelolaan risiko terkait aspek keuangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko yang dihadapi Perseroan dengan tingkat pengembalian serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan PGN.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN

Manajemen puncak melakukan asesmen risiko atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha PGN. Asesmen didasarkan pada asumsi yang dituangkan dalam RKAP PGN yang merujuk pada APBN.

MANAGEMENT MEASURES TO MANAGE POTENTIAL FACTORS AFFECTING BUSINESS CONTINUITY

The Company has implemented best practices in risk management by conducting evaluations and reviews of the formulation of strategic plans, as well as assessing the Company's ability to achieve its targets in order to ensure business continuity.

In the process, PGN consistently implements corporate risk management to identify all risks faced by the Company, evaluate those risks, and manage mitigation measures so that the risks can be maintained at levels acceptable in accordance with the Company's risk appetite.

On a regular basis, the Company reviews and updates its risk management policies and systems to align with changes and developments in the oil and gas industry, as well as to ensure compliance with corporate governance requirements.

Specifically, risk management related to financial aspects aims to achieve an appropriate balance between the risks faced by the Company and the expected level of return, while minimizing potential negative impacts on PGN's financial performance.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

Top management conducts risk assessments on matters that have the potential to cause significant negative impacts on the business continuity of PGN. The assessment is based on assumptions outlined in PGN's Annual Work Plan and Budget (RKAP), which refers to the State Budget (APBN).

Asumsi yang digunakan Perseroan mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga ICP. Selain itu, Perseroan juga menggunakan asumsi internal yakni terkait ketersediaan pasokan gas dan LNG dengan harga yang kompetitif.

ASESMEN DAN LANGKAH MANAJEMEN UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN USAHA

Perseroan telah melakukan langkah-langkah praktik manajemen risiko terbaik untuk menjaga kelangsungan usaha berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, antara lain:

- Fokus dalam menjalankan program kerja sehingga kinerja Perseroan tercapai sesuai target yang sudah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP.
- Melaksanakan kegiatan operasi dan investasi secara prudent, dengan mengutamakan skala prioritas, efektivitas dan efisiensi serta peningkatan produktivitas kinerja Perseroan.
- Melaksanakan penanganan risiko (mitigasi) secara efektif atas hal-hal yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja Perseroan.
- Meningkatkan kompetensi karyawan untuk mendorong nilai tambah (*upside risk/opportunity*) Perseroan.
- Mengupayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (*zero accident*).
- Mengupayakan pelaksanaan program sinergi antara PGN dengan Pertamina selaku Holding Migas dengan mengutamakan optimalisasi kinerja Perseroan.
- Melaksanakan RKAP Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Dokumen Acuan Kerja yang berlaku sesuai dengan prinsip Governansi korporat.
- Mengimplementasikan proteksi keamanan siber terhadap *database* dan sistem informasi yang dimiliki/dikelola Perseroan.

The assumptions used by the Company include economic growth rates, inflation rates, interest rates, exchange rates, and the Indonesian Crude Price (ICP). In addition, the Company also uses internal assumptions related to the availability of gas and LNG supply at competitive prices.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT MEASURES TO MAINTAIN BUSINESS CONTINUITY

The Company has implemented best-practice risk management measures to maintain business continuity based on the results of the assessments that have been conducted, including:

- Focusing on the implementation of work programs so that the Company's performance achieves the targets set in the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Annual Work Plan and Budget (RKAP).
- Conducting operational and investment activities prudently, prioritizing scale of priorities, effectiveness and efficiency, as well as improving the Company's productivity performance.
- Implementing effective risk management (mitigation) for matters that may affect the achievement of the Company's performance.
- Enhancing employee competencies to drive the Company's value creation (upside risk/opportunity).
- Ensuring occupational health and safety to achieve zero accidents.
- Promoting the implementation of synergy programs between PGN and Pertamina as the Oil and Gas Holding, with a focus on optimizing the Company's performance.
- Implementing the 2025 RKAP while adhering to the applicable Work Reference Documents in accordance with corporate governance principles.
- Implementing cybersecurity protection for the Company's databases and information systems that are owned and/or managed by the Company.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

06




PERTAMINA

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Di tengah dinamika industri energi, perubahan regulasi, serta tuntutan keberlanjutan yang semakin kompleks, Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam menjaga konsistensi arah Perseroan sekaligus mengelola risiko dan peluang usaha secara seimbang. Penerapan GCG juga menjadi dasar bagi PGN dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

Amidst the dynamics of the energy industry, changes in regulation, and an increasingly complex sustainability demand, Good Corporate Governance (GCG) plays a pivotal role in maintaining the Company's consistent direction while implementing risk management and managing business opportunities in a balanced manner. The GCG implementation also serves as a benchmark for PGN in building stakeholder trust and maintaining sustainable business continuity.

PENERAPAN GCG PGN
IMPLEMENTATION OF GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PGN diwujudkan melalui penguatan struktur, mekanisme, dan kebijakan tata kelola yang dijalankan secara konsisten di seluruh tingkat organisasi. Praktik tata kelola atau governansi diintegrasikan ke dalam proses bisnis, hingga pengambilan keputusan yang strategis.

Komitmen ini diinternalisasikan menjadi budaya kerja yang wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen, hingga seluruh Perwira Subholding Gas, guna memastikan tata kelola perusahaan berjalan berkesinambungan.

PGN juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola, yang selengkapnya dapat dilihat pada situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

The implementation of GCG principles is materialized through strengthened governance structure, mechanism, and policies consistently carried out at all levels of the organization. The practice of governance is incorporated into business processes, including strategic decision-making.

This commitment is internalized into a work culture mandatory for the Board of Commissioners, the Board of Directors, management, and all Gas Subholding Employees, ensuring the sustainable implementation of GCG.

PGN has also established Governance Guidelines, which is available on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

PRINSIP GCG

Seluruh proses kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan berdasarkan implementasi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

GCG PRINCIPLES

All of the Company's business activities are carried out based on the implementation of the GCG principles, as follows:

Transparansi
Transparency

Merupakan hak pemegang saham atas informasi Perusahaan yang benar dan tepat, ikut dalam pengambilan putusan mengenai perubahan mendasar Perusahaan, dan hak atas keuntungan Perusahaan. Dapat diartikan juga keterbukaan informasi dalam proses pengambilan putusan maupun pengungkapan informasi tentang Perusahaan.

Shareholders are entitled to obtain correct and appropriate information regarding the Company and participate in the decision-making process concerning basic changes to the Company and rights to its profits. It is also interpreted as information transparency in the decision-making process and disclosure of information regarding the Company.

Akuntabilitas
Accountability

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan hingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs to ensure an effective management of the Company.

Pertanggungjawaban
Responsibility

Merupakan kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Conformity of the Company's management to laws and regulations as well as sound corporate principles.

Kemandirian
Independence

Merupakan keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

A condition where the Company is professionally managed with no conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations as well as sound corporate principles.

Kewajaran
Fairness

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Fairness and equality in meeting Stakeholders' rights that arise based on agreements as well as the laws and regulations.

PRINSIP GCG
GCG PRINCIPLES

TUJUAN PENERAPAN GCG PGN

Penerapan tata kelola di PGN memiliki tujuan:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
5. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya Perusahaan yang lebih baik;
6. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, karakter dan motivasi Perwira Subholding Gas untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan Perusahaan serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
7. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG PGN

Penerapan GCG di lingkungan PGN didasarkan pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG aims to:

1. Optimize the Company's value to have a robust competitiveness at the national and international levels, enabling it to maintain its presence and sustainable life to achieve the Company's purposes and objectives;
2. Encourage professional, efficient, and effective management of the Company, as well as empower functions and improve the independence of the Company's Organs;
3. Encourage the Company's Organs to make decisions, take actions based on high moral values, comply with laws and regulations, and be aware of the Company's social responsibility to its Stakeholders as well as environmental sustainability around the Company;
4. Boost the Company's contribution to the national economy and create a favorable environment for the development of national investment;
5. Develop attitudes and behaviors aligned with the demands of the Company's development and business changes toward better corporate culture;
6. Create a conducive climate, encourage the formation of identity, characteristics, and motivate Gas Subholding Employees to behave and act aligned with the Company's guidelines based on sound moral and ethical values; and
7. Improve the Company's reputation.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG within PGN is based on the applicable provisions and guidelines, including:

1. Regulation of SOE Minister Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Decree of the Secretary to the Ministry of SOE Number SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023, on Revocation of the Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012, on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;



3. Surat edaran dari kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2023 perihal Pelaksanaan *Assessment* GCG BUMN tahun 2023;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
9. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

3. Circular letter from the Ministry of SOE Number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2023 on the Implementation of GCG Assessment of SOE in 2023;
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 on Implementation of Governance Implementation for Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
6. Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies;
7. Circular of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on Governance Guidelines for Public Companies;
8. Company's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); and
9. Company's Regulations and Policies.

PERJALANAN PENERAPAN GCG PGN

2003

- *Initial Public Offering* (IPO) PGN
- Penetapan Keputusan Direksi tentang GCG
- Pengangkatan Komisaris Independen
- Pembentukan Komite Dewan Komisaris (Audit, Nominasi, Remunerasi, dan GCG)
- Penetapan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit
- Pembentukan Satuan Kerja Fungsional bidang GCG & Budaya Perusahaan (GCG & BP) dan Analisis Bisnis & Manajemen Risiko (ABMR)
- Penetapan Manual Manajemen Risiko
- Initial Public Offering (IPO) by PGN
- Stipulation of Decision of BOD on GCG
- Appointment of Independent Commissioners
- Establishment of BOC Committee (for Audit, Nomination, Remuneration, and GCG)
- Installation of Independent Commissioner as the Head of Audit Committee
- Establishment of a Functional Work Unit for GCG and Corporate Culture (GCG & BP and Business Analysis & Risk Management
- Stipulation of Risk Management Manual

2004

- Pemetaan GCG
- Penyusunan Panduan GCG
- Penyusunan *Board Manual*
- Pembentukan Komite Asuransi dan Risiko Usaha
- Penetapan Charter Komite Audit
- GCG Mapping
- Preparation of GCG Guideline
- Preparation of Board Manual
- Establishment of Insurance and Business Risk Committee
- Determination on Audit Committee Charter

2005

- Penyusunan Kebijakan GCG
- Pelaksanaan Kerangka Kerja Implementasi GCG
- Penandatanganan Komitmen GCG oleh Direktur Utama, Komisaris Utama serta Ketua Serikat Pekerja
- Preparation of Policy on GCG
- Implementation of GCG Frameworks
- Signing of Commitment on GCG by President Director, President Commissioner, and Head of Labor Union

2006

- Pengesahan *soft structure* GCG: Pedoman GCG & *Board Manual*
- Penghargaan Emiten Terbaik 2006 dalam "Capital Market Award" oleh BEJ
- Penetapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
- Sosialisasi GCG
- Endorsement for GCG soft structure: GCG Guideline & Board Manual
- The Best Issuer Award 2006 in "the Capital Market Award" by Jakarta Stock Exchange
- Stipulation on Code of Conducts
- Dissemination on GCG

MILESTONES OF GCG IMPLEMENTATION

2010-2011

- Pembentukan Divisi Organisasi dan Proses Bisnis yang bertugas mengelola GCG dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT Nusantara Regas
- GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Business Process and Organization Division assigned to manage GCG within the Directorate of General Affairs
- Establishment of PT Nusantara Regas
- GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2009

- Pembaruan *Charter* Komite Audit
- Penetapan Pedoman Audit Internal
- Penetapan Pedoman Manajemen Risiko berbasis COSOERM
- Pendirian PT PGAS Solution
- Pengakuan dari Governance Metrics International (GMI) menaikkan peringkat PGN dari 1,5 (Maret 2008) menjadi 4,5 (September 2009)
- Sosialisasi GCG
- Audit Committee Charter Update
- Establishment of Internal Audit Guidelines
- Establishment of COSOERM-based Risk Management Guidelines
- Establishment of PT PGAS Solution
- Recognition from Governance Metrics International (GMI) raising PGN's rating from 1.5 (March 2008) to 4.5 (September 2009)
- Dissemination on GCG

2008

- Penetapan Budaya Perusahaan "ProCISE"
- Penggabungan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Pemindahan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Keuangan
- GCG *Assessment* pertama kali menggunakan Company *Corporate Governance Scorecard* yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation on "ProCISE" Corporate Culture
- Unification of Nomination and Remuneration Committees
- Transfer of Risk Management Unit under the Directorate of Finance
- GCG Assessment applied for the first time Company Corporate Governance Scorecard developed by the Ministry of State-Owned Enterprises
- Dissemination on GCG

2007

- Pembentukan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT PGAS Telekomunikasi
- Persiapan GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Risk Management Unit under the Directorate for General Affairs
- Establishment of PT PGAS Telekomunikasi
- Preparation of GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2012

- Pembaruan Pedoman GCG
- Pelaksanaan Semiloka GCG
- Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (PMRPU)
- Penyusunan *Charter* Komite PMRPU
- Pendirian PT PGN LNG Indonesia
- Pelaksanaan LHKPN pertama kali
- Sosialisasi GCG
- Updates on GCG Guideline
- Implementation of GCG Seminar & Workshop
- Establishment of Monitoring Committee for Risk Management and Business Development
- Preparation of PMRPU Committee Charter
- Establishment of PT PGN LNG Indonesia
- First Application of the State Officials Wealth Report
- Dissemination on GCG

2013

- Penetapan *Whistleblowing System*
- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Piagam Komite Audit
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Whistleblowing System Guideline
- Updates on Board Manual
- Updates on Audit Committee Charter
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2014

- Penetapan SK benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
- Pendirian PT Permata Graha Nusantara
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Decree on Conflict of Interests and Gratification Control
- Establishment of PT Permata Graha Nusantara
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2015

- Pembentukan Komite Remunerasi, Nominasi, dan GCG
- Pembentukan Divisi Risk Management & GCG di bawah Direktorat Utama
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Remuneration, Nomination and GCG Committee
- Transfer of Risk Management & GCG Division under the Principal Directorate
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2016

- Pembaruan *Board Manual*
- Penetapan Pedoman Tata Kelola Hubungan PGN sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan/Afiliasi
- Penetapan Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penetapan Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Afiliasi
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Stipulation of Guidelines for PGN's Relations Governance as a Subsidiary/Affiliate Shareholder
- Stipulation of Guidelines for Appointment, Dismissal, and Determination of Income for Members of the BOD and Members of the BOC of Subsidiaries and Affiliates
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2017

- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)
- Sosialisasi GCG
- e-LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ASEAN Corporate Governance Scorecard - ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2018

- Pembentukan PGN sebagai Subholding Gas ke dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero)
- Akuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Asistensi *Soft Structure* GCG di 6 Anak Perusahaan/Afiliasi
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Establishment of PGN as Gas Sub-Holding Company under PT Pertamina's Oil and Gas Holding
- Acquisition of PT Pertamina Gas and its subsidiaries
- Updates on GCG Guidelines
- Updates on Code of Conduct
- Assistance for GCG Soft Structure in 6 Subsidiaries/Affiliates
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2019

- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Afiliasi
- Pengukuran Tingkat Maturitas GCG
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Update on GCG Guidelines
- Update on the Code of Conduct
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Document for Subsidiaries/ Affiliates
- Measuring GCG Maturity Rate
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2020

- Penerapan dan Sertifikasi SMAP ISO 37001
- Penetapan Proses Subholding Gas
- Penetapan Budaya "AKHLAK"
- Penetapan Visi Misi
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Afiliasi
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG
- Penetapan penggunaan Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Implementation and Certification of SMAP ISO 37001
- Determination of Gas Subholding Process
- Determination of "AKHLAK" Culture
- Determination of Vision and Mission
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Documents for Subsidiaries/ Affiliates
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination on GCG
- Determination of GCG Online System (GOLS) Application

2021

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Antikorupsi Kolaborasi KPK dan PGN
- Penyempurnaan Pedoman Proses Bisnis Subholding Gas
- Pembaruan *Board Manual* dan Pedoman GCG, Etika, WBS, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi
- Pembaruan *Charter* Komite-Komite
- Pembaruan Anggaran Dasar
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Pelaksanaan GCG *Self Assessment* Anak Perusahaan/Afiliasi
- Penerapan Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Penyusunan Modul GCG *Self Assessment* untuk Anak Perusahaan/ Afiliasi
- Implementation of Anti-Corruption Technical Guidance in collaboration with the Corruption Eradication Commission/KPK and PGN
- Improvement of Gas Subholding Business Process Guidelines
- Updates on Board Manual and Guidelines for GCG, Ethics, WBS, Conflicts of Interest and Gratification
- Updates on Charter of the Committees
- Updates on Articles of Association
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Self-Assessment by Subsidiaries/ Affiliates
- Implementation of GCG Online System Application
- Preparation of GCG Self-Assessment Module for Subsidiaries/ Affiliates

2022

- Penggabungan fungsi GCG ke dalam Group Legal Counsel and Compliance di bawah koordinasi Direktorat Utama
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* menggunakan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Pelaporan Gratifikasi secara berkala melalui Aplikasi GOLS
- Capaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko "MANAGED"
- Pembaruan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Pedoman Perilaku Etika
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship
- Merging of GCG functions into Legal Counsel and Compliance Group under the coordination of Principal Directorate
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- GCG Assessment used the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI) developed by the KNKG
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Online System (GOLS) Application
- Commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)
- Implementation of Gratification Reporting periodically through the GOLS Application
- Achievement of Risk Management Maturity Level "MANAGED"
- Updates on Guidelines for Good Corporate Governance and Code of Conduct
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship)

2023

- GCG *Self Assessment* (*review*) hasil tahun 2022 dengan Parameter BUMN (SK-16)
- GCG *Self Assessment* ACGS *new version* 2023
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG Assessment berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh KNKG
- Pelaksanaan *awareness* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan dan pengembangan Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Surat Pernyataan Conflict of Interest dan terkait Gratifikasi secara berkala
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja
- Pembuatan Komitmen BOD dan BOC : Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi
- Sertifikasi SMAP di Anak Perusahaan
- Perluasan ruang lingkup penerapan anti penyuapan (*Extend scope*)
- ISO Integrasi: HSSE, QM dan SMAP
- Pengelolaan UPG semula dari Internal Audit dipindahkan ke Legal Counsel and Compliance
- Mendapat penghargaan tata kelola yang baik: the Best State Owned Enteprises dari IICD dan perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) Terbaik I dan Pengembangan Talenta & SDM Unggul Terbaik II dalam Anugerah BUMN 2023 yang diselenggarakan oleh BUMN Track

- GCG Self Assessment (review) of 2022 results with SOE Parameters (SK-16)
- GCG Self Assessment ACGS new version 2023
- GCG Assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG Assessment based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by KNKG
- Implementation of GCG awareness
- Implementation of e- LHKPN
- Dissemination on GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation and development of GCG Online System Application (GOLS)
- Implementation of World Anti-Corruption Day Commemoration (HAKORDIA)
- Implementation of Conflict of Interest Statement Letter and related Gratification periodically
- Update of Work Reference Document
- Making BOD and BOC Commitment: Commitment Statement on the implementation of good corporate governance and business/ work ethics as well as gratification control
- SMAP certification in subsidiaries
- Expansion of the scope of anti-bribery implementation (Extend scope)
- ISO Integration: HSSE, QM and SMAP
- UPG management has been transferred from Internal Audit to Legal Counsel and Compliance
- Received good governance awards: the Best State Owned Enterprises from IICD and the company with the Best Good Corporate Governance (GCG) I and the Best Talent & HR Development II in the BUMN Award 2023 organized by BUMN Track

2024

- GCG *Self Assessment* ACGS *new version* 2023
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG Assessment berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh KNKG
- Pelaksanaan *awareness* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN dengan capaian 100%
- Sosialisasi GCG, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan
- Training SMAP ISO 37001 dengan prinsip 4NO's
- Implementasi COMPOLS (Compliance Online Systems) dan pengembangan Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan lomba dan penyebaran publikasi
- Deklarasi Surat Pernyataan Sosialisasi GCG, COC, *Conflict of Interest* dan terkait Gratifikasi secara berkala
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja, di antaranya Pedoman Perilaku Etika, Pedoman Pengelolaan Optimasi Sinergi Barang dan atau Jasa di PGN Group, Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja (DAK) dan sebagainya
- Pembaharuan Komitmen BOD dan BOC: Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi
- Re-Sertifikasi SMAP Subholding Gas dengan perluasan ruang lingkup penerapan anti penyuapan (*Extend scope*)
- *Monitoring* dan Evaluasi per semester dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Meraih Penghargaan *Award for Implementation Prevention of Bribery Program* 2024 dalam puncak peringatan HAKORDIA
- Hasil Evaluasi Implementasi PPG oleh KPK meraih skor 81,6 (Baik)
- Peningkatan kompetensi personil Compliance dengan Sertifikasi Certified Compliance Professional (CCP)

- GCG Self-Assessment by ACGS new version 2023
- GCG Assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG Assessment based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by KNKG
- Implementation of GCG awareness
- e-LHKPN implementation with 100% achievement
- Dissemination of GCG, Anti-Corruption, Gratification Control, and Antibribery
- SMAP ISO 37001 Training with the 4NO's principle
- Implementation of COMPOLS (Compliance Online Systems) and development of the GCG Online System (GOLS) Application
- Organizing World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) with competitions and dissemination of publications
- Declaration of Statement Letter on the Dissemination of GCG, COC, Conflict of Interest, and Gratification regularly
- Renewal of Work Reference Documents, including the Code of Conduct, Guidelines for the Management of Synergy Optimization of Goods and or Services in PGN Group, Guidelines for the Management of Work Reference Documents (DAK), etc.
- Renewal of BOD and BOC Commitment: Statement of Commitment to the Implementation of good corporate governance and business/ work ethics as well as gratification control
- Gas Sub-holding SMAP Re-Certification with extended scope of antibribery implementation (Extend scope)
- Monitoring and Evaluation per semester with the Corruption Eradication Commission (KPK)
- Received the Award for Implementation of Prevention of Bribery Program 2024 at the highlight of HAKORDIA commemoration
- PPG Implementation Evaluation Results by KPK achieved a score of 81.6 (Good)
- Improved the competence of the Compliance employees with CCP Certification (certified compliance professional)

2025

- GCG *Assessment* ACGS new version Maret 2024
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* menggunakan metode Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh KNKG
- Pelaksanaan e-LHKPN dengan capaian 100%
- *Awareness*/Sosialisasi GCG, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan untuk Internal/eksternal
- Training SMAP ISO 37001 dengan prinsip 4NO's untuk tim Auditor Internal SMAP, Pekerja, *Stakeholder* & Vendor
- Pengembangan sistem Aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Deklarasi Kepatuhan Pernyataan Pemahaman GCG, COC, *Conflict of Interest* dan pengendalian Gratifikasi secara berkala melalui aplikasi COMPOLS (Compliance Online Systems) dan aplikasi GCG Online System (GOLS)
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja GCG dan Compliance: Pedoman Code of Corporate Governance (COCG)
- Pembaruan *Board Manual* 2025
- Pembaharuan Komitmen BOD dan BOC: Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi persiapan struktur perluasan ruang lingkup penerapan sistem anti penyuapan (*Extend scope*) ISO 37001:2025
- *Monitoring* dan Evaluasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi GOL KPK
- E-learning KPK: Pelatihan Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 3 *batch*
- Meraih *1st winner Family Integration Competition* dalam puncak peringatan HAKORDIA
- Nilai Implementasi PPG oleh KPK Tahun 2025 skor 68.5 (skala 0-100) terjadi perubahan mekanisme penilaian tahun 2024 (Januari-Desember) menjadi Januari - Agustus / satu kali setahun
- Peningkatan kompetensi personil GCG dan Compliance dengan Sertifikasi Certified Governance Profesional (CGP) dan Certified Chief Governance Officer (CCGO)

- GCG Assessment ACGS new version March 2024
- GCG assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG assessment using the 2021 Manual for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) method issued by the KNKG
- Implementation of e-LHKPN with 100% achievement
- Awareness/Outreach of GCG, Anti-Corruption, Gratification Control, and Anti-Bribery for Internal/External
- SMAP ISO 37001 Training with the 4NOs principle for the SMAP Internal Audit team, Employees, Stakeholders, and Vendors
- Developing the GCG Online System (GOLS) Application
- Organization of the Commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)
- Declaration of Compliance: Statement of Understanding of GCG, COC, Conflict of Interest, and Gratification Control periodically through the COMPOLS (Compliance Online Systems) and GCG Online System (GOLS) applications
- Updated Work Reference Documents GCG and Compliance: Code of Corporate Governance (COCG) Guidelines
- Updated Board Manual 2025
- Updated BOD and BOC Commitments: Statement of Commitment to Implement Good Corporate Governance and Business/Work Ethics, as well as Gratification Control; Preparation of Structure for Expanding the Scope of the ISO 37001:2025 Anti-Bribery System
- Monitoring and Evaluation with the Corruption Eradication Commission (KPK) through the GOL KPK Application
- KPK E-Learning: Gratification Understanding Improvement Training (3 Batches)
- Achieved First Place in the Family Integration Competition at the HAKORDIA Commemoration
- KPK's PPG Implementation Score in 2025 was 68.5 (scale 0-100). The assessment mechanism was changed in 2024 from January-December to January-August, or once a year.
- Enhanced the competency of GCG and Compliance personnel with Certified Governance Professional (CGP) and Certified Chief Governance Officer certifications (CCGO)



PGN berhasil meraih award dalam ajang ASEAN CGCA 2025: 1. Top 5 ASEAN Asset Class;2. Top 5 PLCs from each participating Country; 3. Top 50 ASEAN PLCs

PGN successfully won awards at the ASEAN CGCA 2025: 1. Top 5 ASEAN Asset Class; 2. Top 5 PLCs from each participating country; 3. Top 50 ASEAN PLCs

KEBIJAKAN PENDUKUNG PELAKSANAAN GCG DI PGN

PGN menerapkan serta melakukan pembaruan secara berkala atas berbagai kebijakan dan pedoman pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan pedoman ini secara garis besar memuat panduan bagi Perusahaan dan seluruh Perwira Subholding Gas dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan pemangku kepentingan dalam aspek pemenuhan tata kelola, antara lain:

1. *Board Manual*;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
4. Pedoman Benturan Kepentingan;
5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
6. Pedoman *Whistleblowing System*;
7. Pedoman Pengelolaan Risiko;
8. Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis;
9. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, serta Anti Penyuapan;
10. Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja (DAK);
11. Pedoman Pengelolaan *Community Involvement Development*;
12. Pedoman Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi;
13. Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan;
14. Pedoman Pengelolaan Optimasi Sinergi Barang dan atau Jasa di PGN Group;
15. Pedoman Anggaran;
16. Perjanjian Kerja Bersama;
17. Pedoman Perlakuan Akuntansi;
18. Pedoman Pengukuran Kepuasan Pelanggan;
19. Pedoman Berlangganan Gas;
20. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan;
21. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan LNG Trading Internasional;
22. Pedoman Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN);
23. Pedoman Penanganan Keadaan Darurat;
24. Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
25. Pedoman Pengelolaan Sistem Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset (PSAIMS);
26. Pedoman Pengelolaan Dana;
27. Pedoman Sistem Pengelolaan Kinerja;
28. Pedoman Pengelolaan Maturitas Investasi;
29. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit; dan
30. Piagam Audit Internal.

POLICIES SUPPORTING GCG IMPLEMENTATION

PGN applied and made periodic updates of various policies and supporting manuals in accordance with prevailing laws and regulations. These policies and manuals in general contain guidelines for the Company and Gas Subholding Employees in carrying out business activities as well as interacting with stakeholders in the aspect of fulfilling governance, such as:

1. Board Manual;
2. Guidelines for Good Corporate Governance;
3. Guidelines for Code of Conduct;
4. Guidelines for Conflicts of Interest;
5. Guidelines for Gratification Control;
6. Guidelines for Whistleblowing System;
7. Guidelines for Risk Management;
8. Guidelines for Business Sustainability Management System;
9. Guidelines for Quality Management System, Occupational Health and Safety, Security, as well as Anti-Bribery;
10. Guidelines for Work Reference Document (DAK) Management;
11. Guidelines for Community Involvement Development Management;
12. Guidelines for Technology and Communication Governance;
13. Guidelines for Corporate Information Management;
14. Guidelines for the Management of Goods and or Services Synergy Optimization in PGN Group;
15. Guidelines for Budget;
16. Collective Labor Agreement;
17. Guidelines for Accounting Treatment;
18. Guidelines for Measuring Customer Satisfaction;
19. Guidelines for Gas Subscription;
20. Guidelines for Preparation of Financial Statements;
21. Guidelines for the Implementation of International LNG Trading Activities;
22. Guidelines for the Management of Increased Use of Domestic Products (P4DN);
23. Guidelines for Emergency Response;
24. Guidelines for the Management of the Exercise of Rights and Fulfilment of Tax Obligations;
25. Guidelines for the Management of the Process Safety and Asset Integrity System (PSAIMS);
26. Guidelines for Funds Management;
27. Guidelines for the Performance Management System;
28. Guidelines for Investment Maturity Management;
29. Guidelines for the Management of Internal Audit Unit Activities; and
30. Internal Audit Charter.

MEMPERKUAT BUDAYA PENERAPAN GCG

PGN secara berkala melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi GCG baik secara *offline* maupun *online*, untuk memperkuat internalisasi penerapan GCG sebagai budaya perusahaan. Materi program mencakup nilai-nilai Etika Perusahaan, tata kelola, serta pencegahan penyuapan dan gratifikasi. Seluruh program wajib diikuti oleh Perwira Subholding Gas. Sepanjang tahun 2025, kegiatan sosialisasi dan internalisasi GCG yang dilaksanakan PGN antara lain:

STRENGTHENING THE CULTURE OF GCG IMPLEMENTATION

PGN regularly implements GCG outreach and internalization programs, both in an offline and online format, to bolster the internalization of GCG implementation as a corporate culture. Program materials include Corporate Ethics values, governance, and prevention of bribery and gratuities. All programs are mandatory for Gas Subholding Employees. Throughout 2025, GCG outreach and internalization activities held by PGN include:

KEGIATAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG TAHUN 2025
2025 Good Corporate Governance (GCG) Socialization and Internalization Activities

No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Implementation Period
1	*Awareness* Implementasi ISO 37001:2016 yang mencakup materi *4 NO's* dalam acara "*Townhall Meeting* PGN." Awareness of ISO 37001:2016 Implementation which includes the 4 NO's material in the "PGN Townhall Meeting" event.	9 Januari 2025 January 9, 2025
2	Penayangan materi edukasi Larangan Penerimaan/Pemberian Hadiah/Gratifikasi pada hari raya keagamaan melalui media digital, meliputi *website, email blasting, totem/tv frame*, *PGN inside* di lingkungan gedung PGN. Displaying educational materials on the Prohibition of Receiving/Giving Gifts/Gratuities on Religious Holidays through digital media, including the website, email blasts, totems/TV frames, and PGN inside PGN building.	Januari – Maret 2025 January-March, 2025
3	Penayangan *awareness building* GCG, Etika, Kepatuhan, Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Anti Korupsi secara berkala melalui digital media meliputi *website,email blasting*, *totem/tv frame*, *PGN inside* Regularly broadcasting awareness-building materials on GCG, Ethics, Compliance, Anti-Bribery, Gratuity Control, and Anti-Corruption through digital media, including the website, email blasts, totems/TV frames, and PGN inside.	Januari – Desember 2025 January-December, 2025
4	Sosialisasi Pedoman Benturan Kepentingan kepada satuan kerja City Gas Project (CGP). Dissemination of Conflict of Interest Guidelines to City Gas Project (CGP) work units.	4 Februari 2025 February 4, 2025
5	Sosialisasi *4 NO's* kepada satuan kerja Strategic Business Advocacy (SBA) dalam rangka pembahasan Perubahan ke-3 Undang-Undang BUMN Dissemination of the 4 NOs to the Strategic Business Advocacy (SBA) work unit in the context of discussions on the 3rd Amendment to the State-Owned Enterprises Law.	10 Februari 2025 February 10, 2025
6	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang mencakup materi *4 NO's* kepada vendor satuan kerja *Procurement* dalam acara "*Upskilling & Coaching Update Data*, Ketentuan CSMS dan fitur pada aplikasi *i-Vendor* Penggunaan aplikasi Smart GEP." Dissemination of the Anti-Bribery Management System (ABMS), which includes the 4 NOs, to vendors in the Procurement work unit during the event "Upskilling & Coaching: Updating Data, CSMS Provisions, and Features in the i-Vendor Application: Using the Smart GEP Application."	12 November 2025 November 12, 2025
7	Sosialisasi: a. Pedoman Benturan kepentingan b. Pedoman Gratifikasi c. *Board Manual* Pada acara rapat koordinasi Fungsi GCG and Compliance Subholding Gas. Dissemination: a. Conflict of Interest Guidelines b. Gratification Guidelines c. Board Manual At the Gas Subholding GCG and Compliance Function Coordination Meeting.	18 Februari 2025 February 18, 2025
8	Penayangan *awareness building* GCG, Etika, Kepatuhan, Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Anti Korupsi secara berkala melalui digital media meliputi *website,email blasting*, *totem/tv frame*, *PGN inside.* Regular broadcasts of awareness-building materials on GCG, Ethics, Compliance, Anti-Bribery, Gratification Control, and Anti-Corruption through digital media, including the website, email blasts, totems/TV frames, and PGN inside.	1 April 2025 - 30 Juni 2025 April 1, 2025-June 30, 2025

No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Implementation Period
9	Diskusi COMPOLS bersama Komisaris Utama. COMPOLS discussions with the President Commissioner.	9 April 2025 April 9, 2025
10	*Pelaksanaan e-Learning* "Pemahaman Gratifikasi KPK" *Batch* 1. Implementation of the e-Learning program "Understanding KPK Gratification" Batch 1.	21-23 April 2025 April 21-23, 2025
11	Sosialisasi *Compliance* dan GCG di area Batam dalam acara "Perizinan Import LNG ke Batam dan Bintan." Dissemination of Compliance and GCG in the Batam area during the event "LNG Import Licensing to Batam and Bintan."	29 April 2025 April 29, 2025
12	Pertemuan KTKT dengan tema "Aspek Kepatuhan Implementasi GCG dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Subholding Gas Grup termasuk di dalamnya SMAP". KTKT meeting with the theme "Compliance Aspects of GCG Implementation to Enhance Transparency and Accountability of the Gas Subholding Group, including the ABMS."	25 April 2025 April 25, 2025
13	Sosialisasi Standar Perilaku (COC) dalam acara "Pra Seleksi Instalatur Gas SOR II Periode Juli." Dissemination of Standards of Conduct (COC) during the event "Pre-Selection of Gas Installers for SOR II, July Period."	27 Mei 2025 May 27, 2025
14	Pelaksanaan *e-Learning* "Pemahaman Gratifikasi KPK" *Batch* 2. Implementation of the e-Learning program "Understanding KPK Gratification" Batch 2.	10 Juni 2025 June 10, 2025
15	Sosialisasi Etika, SMAP, *4 NO's* dan GCG di area Surabaya dan SOR III dalam rangka kegiatan Audit Internal Semester II. Dissemination of Ethics, ABMS, 4 NO's, and GCG in the Surabaya area and SOR III as part of the Internal Audit activities of Semester II.	10-11 Juni 2025 June 10-11, 2025
16	Pelaksanaan Pelatihan *Self-Learning* "*Fraud Awareness*" melalui Mobile Learning. Implementation of "Fraud Awareness" Self-Learning Training through Mobile Learning.	10-24 Juni 2025 June 10-24, 2025
17	Sosialisasi GOL KPK dan Rapat Koordinasi Subholding bersama Compliance Holding. Dissemination of the KPK's Goals (Goals) and Subholding Coordination Meeting with Compliance Holding.	13 Juni 2025 June 13, 2025
18	Penayangan *awareness building* GCG, Etika, Kepatuhan, Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi, Anti Korupsi secara berkala melalui digital media meliputi *website,email blasting*, *totem/tv frame*, *PGN inside.* Regular broadcast of awareness-building materials on GCG, Ethics, Compliance, Anti-Bribery, Gratuity Control, and Anti-Corruption through digital media, including the website, email blasts, totems/TV frames, and PGN inside.	1 Juli - 30 September 2025 July 1-September 30, 2025
19	Pelatihan In House "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi melalui *E-Learning* KPK" di Subholding Gas Group Batch 3 In-House Training "Improving Understanding of Gratuities through KPK E-Learning" at the Gas Group Subholding Batch 3	7 - 9 Juli 2025 July 7-9, 2025
20	*Awareness* Anti Penyuapan dengan materi *4 NO's* dalam acara "Validasi Dokumen Pengajuan Izin Usaha Niaga SOR 3 Tahun 2023-2024" Anti-Bribery Awareness with the topic of the 4 NOs at the event "Validation of Documents for Applications for Commercial Business Licenses for 2023-2024"	14 Juli 2025 July 14, 2025
21	GAS Talk Leader dengan tema "*Whistle Blowing System*" GAS Talk Leader with the theme "Whistle-Blowing System"	22 Juli 2025 July 22, 2025
22	Pelatihan Auditor Internal ISO 37001:2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025 Internal Auditor Training on Anti-Bribery Management System	30-31 Juli 2025 July 30-31, 2025
23	Internalisasi *awareness* Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Etika kepada pekerja internal dalam acara "*Meeting* Budaya & AKHLAK." Internalization of awareness of Anti-Bribery, Anti-Corruption, Gratuity Control, and Ethics to internal employees at the event "Culture & Moral Meeting."	29 Juli dan 29 Agustus 2025 July 29 and August 29, 2025
24	Pengisian materi *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) KPK oleh UPG PGN Providing material on the KPK's Monitoring and Evaluation (Monev) by the PGN Technical Implementation Unit	29 Agustus 2025 August 29, 2025
25	Induksi materi Compliance dan GCG dalam kegiatan Pengenalan Perusahaan Untuk Dewan Komisaris pada RUPSLB Tahun 2025 Induction of Compliance and GCG material during the Company Introduction for the Board of Commissioners at the 2025 EGMS	2 September 2025 September 2, 2025
26	Internalisasi *Awareness* Anti Korupsi dalam rangka Diskusi, Presentasi dan Klarifikasi Penyesuaian Izin Usaha Niaga SOR III PGN dengan peserta BPH Migas, Legal Counsel, PMO, OMM, dan SOR III Internalization of Anti-Corruption Awareness during the Discussion, Presentation, and Clarification of the Adjustment of PGN's SOR III Trading Business License with participants from the Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas), Legal Counsel, PMO, OMM, and SOR III	11-12 September 2025 September 11-12, 2025

No	Kegiatan Activities	Waktu Pelaksanaan Implementation Period
27	Internalisasi *Awareness* Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Etika melalui penayangan video dan *flyer* Anti Korupsi dalam acara "Temu Pelanggan Industri Area Tangerang." Internalization of Anti-Bribery, Anti-Corruption, Gratuity Control, and Ethics Awareness through the screening of Anti-Corruption videos and flyers at the "Industrial Customer Gathering in the Tangerang Area."	12 September 2025 September 12, 2025
28	Internalisasi *Awareness* Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Etika kepada *Customer* Industri Area Cilegon Internalization of Anti-Bribery, Anti-Corruption, Gratuity Control, and Ethics Awareness for Industrial Customers in the Cilegon Area.	15 September 2025 September 15, 2025
29	Internalisasi *Awareness* Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Etika dalam kegiatan eksternal "Legal Preventive Program Subholding Gas" Bersama praktisi hukum, praktisi akademik UNDIP dan Danantara, dengan tema "Batasan dan Konsekuensi Hukum Terkait Ketentuan Pelimpahan Kewenangan Menteri BUMN Kepada Danantara terkait Pengelolaan BUMN berdasarkan Undang-Undang BUMN" Internalization of Anti-Bribery, Anti-Corruption, Gratuity Control, and Ethics Awareness in the "Legal Preventive Program for Gas Subholding" external activity with legal practitioners, academics from Diponegoro University (UNDIP), and Danantara, with the theme "Limitations and Legal Consequences Related to the Provisions on the Delegation of Authority from the Minister of SOEs to Danantara Regarding the Management of SOEs Based on the SOE Law."	29 September 2025 September 29, 2025
30	*Workshop Self-Assesment* GCG dengan PUGKI 2025 dengan AP Subholding Gas serta *awareness* anti korupsi. GCG Self-Assessment Workshop with PUGKI 2025 with AP Gas Subholding, as well as anti-corruption awareness.	3 Oktober 2025 October 3, 2025
31	Sosialisasi Anti Penyuapan, Etika, Anti Korupsi kepada Pekerja Area Karawang Dissemination of Anti-Bribery, Ethics, and Anti-Corruption to Employees in the Karawang Area.	10 Oktober 2025 October 10, 2025
32	*Awareness* GCG dan SMAP kepada pekerja fungsi anggaran SOR II. Dissemination of Anti-Bribery, Ethics, and Anti-Corruption to Employees in the Karawang Area.	20 Oktober 2025 October 20, 2025
33	Awareness compliance dan anti korupsi dalam acara *Training Legal for Non Legal* Compliance and anti-corruption awareness at the Legal for Non-Legal Training event.	28 Oktober 2025 October 28, 2025
34	*Online Training* ISO 37001:2025 SMAP untuk vendor Subholding Gas. Online ISO 37001:2025 SMAP training for Gas Subholding vendors.	12 November 2025 November 12, 2025
35	*Awareness* Anti Korupsi/Penyuapan dan sosialiasi Pedoman Transaksi Afiliasi, Transaksi Material, Transaksi Benturan Kepentingan kepada Anak Perusahaan kepada seluruh satuan kerja PGN, AP dan Afiliasi. Anti-Corruption/Bribery Awareness and dissemination of Guidelines for Affiliated Transactions, Material Transactions, and Conflict of Interest Transactions to Subsidiaries to all PGN, AP, and Affiliate work units.	25 November 2025 November 25, 2025
36	Mendukung KPK dengan berpartisipasi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) se-Pertamina Group pada tanggal dengan membuka *booth* HAKORDIA dan memperoleh *award* sebagai 1st winner Family Integrity Competition. Supporting the Corruption Eradication Commission (KPK) by participating in the Pertamina Group's commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) on 12/01/2019. We opened a HAKORDIA booth and received an award as the first winner of the Family Integrity Competition.	3 Desember 2025 December 3, 2025



VISI PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan, adalah visi PGN yang mencerminkan arah jangka panjang dan fokus strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Visi tersebut menjadi acuan bagi seluruh elemen organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional, guna mendukung pencapaian kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PGN mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri atas tiga organ utama perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

COMPANY VISION IN SUPPORTING COMPANY'S SUSTAINABLE PERFORMANCE

PGN Vision is to become a provider of clean energy solutions for a greener and more sustainable world, demonstrating the Company's long-term direction and strategic focus in conducting its business activities. This vision serves as a benchmark for all elements of the organization in carrying out operational activities, supporting the Company's sustainable performance.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

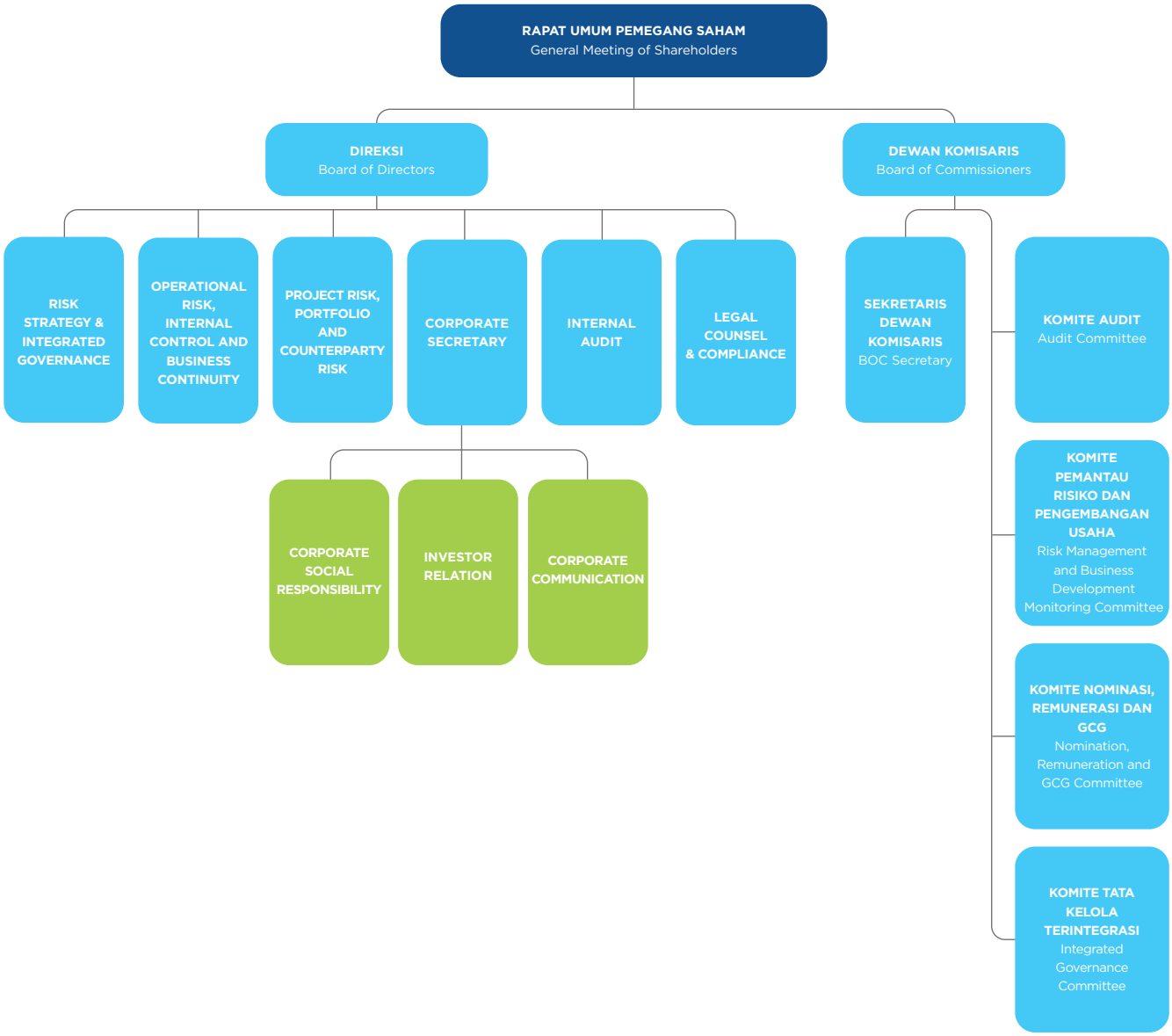
PGN's Corporate Governance Structure is based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, comprising three main company organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Perseroan memiliki pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Presiden Komisaris/*Chairman* selaku anggota dari Dewan Komisaris, dan Presiden Direktur/CEO yang menjadi bagian dari anggota Direksi, sebagaimana diatur di dalam *Board Manual* dan Anggaran Dasar Perseroan.

Board Manual juga mengatur secara jelas mengenai tata kerja hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perseroan secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

The Company has a clear separation of duties and responsibilities between the President Commissioner/Chairman, as a member of the Board of Commissioners, and the President Director/CEO, who is a member of the Board of Directors, as outlined in the Board Manual and the Company's Articles of Association.

The Board Manual also clearly regulates the working procedures for the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The complete Articles of Association and Board Manual can be found on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola tertinggi Perusahaan, yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Kekuasaan dalam RUPS lebih tinggi dibandingkan Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui penyelenggaraan RUPS, para Pemegang Saham dapat menerima informasi penting mengenai kinerja Perusahaan dan menggunakan haknya untuk pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's highest governance organ and has authority that is not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits set by the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association.

The power of the GMS is higher than that of the Board of Directors and Board of Commissioners. Through the GMS, Shareholders can receive important information on the Company's performance and exercise their rights in relation to the Company's strategic decision-making.

PEMEGANG SAHAM

Komposisi pemegang saham PGN adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki satu saham seri A Dwiwarna, PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% saham seri B, dan 43,04% saham seri B yang dimiliki oleh pemegang saham publik. Uraian mengenai informasi dan struktur pemegang saham telah dibahas pada Bab Profil Perusahaan bagian Informasi Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

SHAREHOLDERS

PGN's shareholder composition, namely the Republic of Indonesia owns one series A Dwiwarna share, PT Pertamina (Persero) is the major shareholder with 56.96% of the series B shares, and 43.04% of the series B shares are owned by public shareholders. The description of the shareholder information and structure has been discussed in the Company Profile chapter of the Shareholder Information section of this Annual Report.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
3. Menerima perlakuan yang adil dan setara;
4. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
5. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shareholders' Rights

Shareholders are entitled to:

1. Attending and casting their votes at the GMS;
2. Obtaining material information about the Company, in a timely, measurable, and regular manner;
3. Receiving equal and fair treatment;
4. Receiving payment of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares owned; and
5. Exercising other rights based on the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS, pemegang saham memiliki hak untuk menyetujui atau menolak usulan kebijakan dan mekanisme remunerasi yang diajukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan masukan terkait kebijakan maupun realisasi remunerasi dalam forum RUPS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

The remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined through the mechanism of General Meeting of Shareholders (GMS). At the GMS, shareholders have the rights to approve or reject the proposed remuneration policies and mechanisms in accordance with the provisions of the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Company also provides shareholders with the opportunity to ask questions, express opinions, and give inputs on both the remuneration policy and its implementation during the GMS as part of its commitment to transparency and accountability.

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama sepanjang Anggaran Dasar Perseroan tidak menetapkan lain. Selaras dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
   b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
   c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran; serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan; dan
5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, dengan mekanisme penggunaan hak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan terhadap Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, kecuali pelaksanaan Hak Istimewa pada angka 1.c dan 1.d.

Kemudian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-10/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan kuasa khusus kepada

The Company's shares are shares in name and issued in the name of the owner registered in the Shareholder Register, consisting of:

1. Series A Dwiwarna shares, which can exclusively be owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Series A Dwiwarna Shareholders and Series B Shareholders have the same rights to the extent that the Company's Articles of Association do not stipulate otherwise. As outlined in the Company's Articles of Association, Series A Dwiwarna Shares are shares owned exclusively by the Republic of Indonesia which grants the holder Prerogative Rights as a Series A Dwiwarna Shareholder, namely:

1. The rights to agree at the GMS regarding the following matters:
   a. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
   b. Approval of amendments to the Articles of Association;
   c. Approval of amendments to the shareholding structure;
   d. Approval regarding the merger, consolidation, separation, and dissolution; as well as the takeover of the Company by another company.
2. The right to nominate Candidates for Members of the Board of Directors and Candidates for Members of the Board of Commissioners;
3. The right to propose GMS agenda items;
4. The right to request for and access Company data and documents; and
5. The right to determine strategic policies to always remain aligned and in accordance with the policies and regulations that apply to Series B Shareholders with ownership of most of the Company's shares, with a mechanism for exercising rights in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and laws and regulations.

The exercise of the Series A Dwiwarna Shareholder's Prerogative Rights may be authorized to the Series B Shareholders with a majority ownership of the Company's shares, except for the exercise of the Prerogative Rights in points 1.c and 1.d.

Subsequently, pursuant to Special Power of Attorney Number SKK10/MBU/05/2018 dated May 9, 2018, the Series A Dwiwarna Shareholders grant special power of attorney

PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tercantum di atas, termasuk hak untuk menyetujui usulan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak, Pemegang Saham sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) UUPT, Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUPT, yaitu:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; dan
4. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Tanggung jawab Pemegang Saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan Pemegang Saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

to PT Pertamina (Persero) as the Series B shareholders with a majority ownership of the Company's shares to take actions, which is the authority and/or rights of the Series A Dwiwarna Shareholders as stated above, including the right to approve the proposal of the Company's Board of Commissioners on the Board of Directors' actions as referred to in the Company's Articles of Association.

Shareholders' Responsibilities

In addition to having rights, Shareholders as capital owners also have responsibilities that must be carried out. Substantially, according to Article 3 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT), Shareholders are not personally responsible for the engagement made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses over the shares owned. This principle is made clear in the Elucidation section of Article 3 paragraph (1) of UUPT that Shareholders are solely responsible for the amount paid for all the shares they own and do not cover their own assets.

In certain events, this does not rule out the possibility of the elimination of the said limited liability if it is proven that the matters as referred to in Article 3 paragraph (2) UUPT occur, namely:

1. The Company's requirements as a legal entity have not been or are not met;
2. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, in bad faith exploits the Company for personal gain;
3. The relevant Shareholder is involved in an unlawful act committed by the Company; and
.
4. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, unlawfully uses the Company's assets, resulting in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts.

Shareholders' responsibility in the amount of the deposit for all shares they own may be nullified if it is proven that, among other things, there is a mixing of the Shareholders' assets and the Company's assets so that the Company is established solely as a tool used by the Shareholders to fulfill their personal goals. As a form of accountability, Shareholders implement GCG in accordance with their authority and responsibility.

Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

PGN memastikan seluruh pemegang saham mendapatkan perlakuan yang adil dan setara melalui langkah berikut:

1. Hak suara dan dividen dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham; dan
2. Perseroan menyediakan keterbukaan informasi yang sama kepada seluruh pemegang saham dalam waktu serentak, baik melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, hingga melalui pertemuan langsung seperti *Public Expose* dan *Press Conference.*

Fair Treatment of Shareholders

PGN ensures that all shareholders receive fair and equal treatment through the following steps:

1. Voting rights and dividends are calculated based on the number of shares owned; and
2. The Company provides equal information disclosure to all shareholders simultaneously, both through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and through in-person meetings such as Public Exposes and Press Conferences.

PELAKSANAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2025

IMPLEMENTATION OF THE 2025 GMS

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 28 Mei 2025

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Rabu, 28 Mei 2025
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta, 11140
2. Kuorum
   RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.683.268.753 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 77,0713959% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Tahunan.
3. Kehadiran Dewan Komisaris, yaitu:

Annual GMS for the 2024 Fiscal Year dated May 28, 2025

1. Time and Place
   a. Day/date: Wednesday, May 28, 2025
   b. Place: Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin Number 20, Jakarta, 11140
2. Quorum
   The Annual GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of shareholders of 18.683.268.753, including Series A Dwiwarna shares representing 77,0713959% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company, totaling 24.241.508.196. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been fulfilled, and therefore, the Annual GMS is valid and has the right to make valid and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Annual GMS.
3. Attendance of Board of Commissioners, namely:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Amien Sunaryadi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen Independent Commissioner	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Komisaris Independen Independent Commissioner	Dini Shanti Purwono

4. Kehadiran Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama President Director	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan Director of Finance	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Komersial Director of Commercial	Ratih Esti Prihatini

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	Harry Budi Sidharta
Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	Arief Kurnia Risdianto
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	Rachmat Hutama

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam melakukan proses penghitungan suara dan/ atau melakukan validasi, Perseroan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan seluruhnya. Penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

5. Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals. In counting the vote and/or conducting the validation process, the Company was assisted by the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. As of the publication of this Annual Report, the resolutions of the 2025 Annual GMS have been fully implemented. The explanation of each agenda item of the 2025 Annual GMS is set out in the table below.

Mata Acara 1 Agenda Item 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.		Approval of the Company's Annual Report for the 2024 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		1 (One) Shareholder raised a question.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju |** Against
	18.194.037.847 suara/ votes (97,3814491%)	478.155.706 suara/ votes (2,5592722%)	11.075.200 suara/ votes (0,0592787%)
Keputusan Mata Acara 1 Resolution of Agenda Item 1	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.		Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year, ending on December 31, 2024, and granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions in the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions in the Company that have been carried out during the fiscal year ending on December 31, 2024, as long as such actions do not constitute a criminal offense and have been reflected in the Company's report books.
Tindak Lanjut Follow-up	Tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Perseroan atas keputusan Mata Acara 1.		No matters need to be followed up by the Company regarding the resolution of Agenda Item 1.

Mata Acara 2 Agenda Item 2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.		Ratification of the Company's Annual Financial Statements of the 2024 Fiscal Year and the Financial Statements of Micro and Small Enterprises Financing Program for the 2024 Fiscal Year, as well as the granting of full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		No Shareholders raised any questions.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju |** Against
	17.886.733.147 suara/ votes (95,7366368%)	785.376.906 suara/ votes (4,203 6376%)	11.158.700 suara/ votes (0,0597256%)

Keputusan Mata Acara 2 Resolution of Agenda Item 2	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young*) sesuai Laporan Nomor 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young*) sesuai Laporan Nomor 00355/2.1032/AU.2/10/1726-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.	Ratified the Company's Consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) in accordance with Report Number 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 dated March 25, 2025 with the opinion "fair, in all material respects", and ratified the Company's Micro and Small Business Funding Program Financial Statements for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024 which is part of the Corporate Social Responsibility Report audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) in accordance with Report Number 00355/2.1032/AU.2/10/1726-3/1/III/2025 dated March 25, 2025 with the opinion "fair, in all material respects", and granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions in the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions in the Company that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2024, as long as these actions do not constitute a criminal act and have been reflected in the Company's report books.
Tindak Lanjut Follow-up	Tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Perseroan atas keputusan Mata Acara 2.	No matters need to be followed up by the Company regarding the resolution of Agenda Item 2.

Mata Acara 3 Agenda Item 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.	Approval of the distribution of the Company's Net Profit, including the dividend distribution for the 2024 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju |** Against
	18.287.332.633 suara/ votes (97,8807985%)	362.558.520 suara/ votes (1,9405519%)	33.377.600 suara/ votes (0,1786497%)

Keputusan Mata Acara 3 Resolution of Agenda Item 3	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar USD339,427,774 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut: 1. Sebesar 80% atau sejumlah USD271,542,219 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024. b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Sebesar 20% atau sejumlah USD67,885,555 (enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai saldo laba ditahan.	Determined the distribution of Consolidated Net Profit attributable to owners of the parent entity for the 2024 Fiscal Year in the amount of USD339,427,774 (three hundred thirty-nine million four hundred twenty-seven thousand seven hundred seventy-four United States Dollars), as follows: 1. 80%, or USD271,542,219 (two hundred seventy-one million five hundred forty-two thousand two hundred and nineteen United States Dollars), shall be designated as Cash Dividends. Payment shall be made under the following conditions: a. Dividends for the 2024 Fiscal Year shall be paid proportionally to each Shareholder whose name is registered in the Shareholder Register on the recording date and shall be paid in cash in Rupiah using Bank Indonesia's middle exchange rate as of the date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. b. The Board of Directors is authorized and empowered with the right of substitution to: i. Determine the schedule and distribution procedures related to Dividend Payments for the 2024 Fiscal Year in accordance with statutory provisions; ii. Withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations; iii. Other technical matters in accordance with statutory provisions. 2. 20%, or USD67,885,555 (sixty-seven million eight hundred eighty-five thousand five hundred fifty-five United States Dollars), will be used as retained earnings.

Tindak Lanjut Follow-up	• Tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 tercantum pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan melalui situs web Perusahaan, situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2025. • Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 telah dilakukan pada tanggal 2 Juli 2025.	• The procedure for payment of Cash Dividends for the 2024 Fiscal Year is outlined in the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority website on June 2, 2025. • The Cash Dividend payment for the 2024 Fiscal Year was made on July 2, 2025.

Mata Acara 4 Agenda Item 4	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.	Determination of Salaries/Honoraria, Facilities, and Allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 Fiscal Year, and Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the 2024 Fiscal Year Performance.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan namun tidak relevan dengan Mata Acara 4.	1 (One) Shareholder raised a question unrelated to Agenda Item 4.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** | In Favor: 17.152.889.809 suara/ votes (91,8088266%) **Abstain**: 365.417.720 suara/ votes (1,9558554%) **Tidak Setuju** | Against: 1.164.961.224 suara/ votes (6,2353180%)	
Keputusan Mata Acara 4 Resolution of Agenda Item 4	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024; dan b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025.	1. Granting authority and power to PT Pertamina (Persero) as the Company's largest B Series Shareholder, with prior consultation with the Dwiwarna A Series Shareholders, to determine the following for members of the Board of Commissioners: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance in the 2024 Fiscal Year; and b. Honoraria, allowances, and facilities for the 2025 Fiscal Year. 2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, after obtaining written approval from PT Pertamina (Persero) as the largest B Series Shareholder of the Company, with prior consultation with the Dwiwarna A Series Shareholders, to determine the following for members of the Board of Directors: a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for performance in the 2024 Fiscal Year; and b. Salaries, allowances, and facilities for the 2025 Fiscal Year.
Tindak Lanjut Follow-up	Besaran Remunerasi tahun 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti Surat Nomor: 63P/ SKEL.00/D-KOM/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023, Remunerasi 2024 serta Pelaksanaan Pembayaran Tantiem Yang Ditangguhkan Tahun Buku 2022 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang merupakan tindaklanjut dari Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor: R-053/ C00000/2024-S8 tanggal 27 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The amount of remuneration for 2025 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is in accordance with Letter Number: 63P/SKEL.00/ D-KOM/2024 dated September 30, 2024 on the Determination of Annual Performance Awards for the 2023 Fiscal Year. the 2024 Remuneration as well as the Implementation of Deferred Tantiem Payments for the 2022 Fiscal Year for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which is a follow-up to the Letter of the President Director of PT Pertamina (Persero) Number: R-053/ C00000/ 2024-S8 dated September 27, 2024 on the Determination of Awards for Performance in the 2023 Fiscal Year and the 2024 Remuneration of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pertamina Gas Negara Tbk.

Mata Acara 5 Agenda Item 5	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025.	Appointment of a Public Accounting Firm to conduct the Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, the PSA 62 Compliance Audit, the Audit of the Financial Statements for Micro and Small Business Funding (PUMK) related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the Application of Agreed-Upon Procedures on the Report of the Evaluation of Corporate KPI and Individual KPI Performance for the 2025 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju |** Against
	16.881.907.251 suara/ votes (90,3584243%)	658.715.920 suara/ votes (3,5256995%)	1.142.645.582 suara/ votes (6,1158762%)

Keputusan Mata Acara 5 Resolution of Agenda Item 5	Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2025. 2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; serta menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.	Granting authority to the Board of Commissioners, with prior coordination with the Largest B Series Shareholders, for: 1. Appointing a Public Accounting Firm to conduct the Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, the PSA 62 Compliance Audit, the Audit of the Financial Statements for Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Program, and the Application of Agreed-Upon Procedures on the Report of the Evaluation of Corporate KPI and Individual KPI Performance for the Fiscal Year 2025. 2. Determining the amount of audit fees for the Public Accounting Firm as approved in the resolution number 1 above, and the addition of the necessary scope of work and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm. 3. Appointing a Public Accountant and/or a Substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for any reason based on capital market rules and regulations; as well as determining the conditions, requirements for appointment, and honorarium of the Substitute Public Accounting Firm.
Tindak Lanjut Follow-up	Penetapan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-14/DKOM/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan Pernyataan Standar Auditing (PSA) 62, Audit Independen/Eksternal atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Audit Penerapan Prosedur Yang Disepakati sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) Korporat dan KPI Individual Direksi untuk Tahun Buku 2025 bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Appointment of Public Accountants from Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) based on the Board of Commissioners Decree Number Kep-14/DKOM/2025 dated July 10, 2025 on the Appointment of a Public Accounting Firm as the Auditor of the Consolidated Financial Statements, the Compliance Audit of Auditing Standards Statement (PSA) 62, Independent/External Audit of the Financial Statements for Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Program, Audit of the Implementation of Agreed-Upon Procedures in relation to the Report on the Evaluation of Corporate Key Performance Indicators (KPIs) and Individual KPIs of the Board of Directors for the 2025 Fiscal Year for PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Mata Acara 6 Agenda Item 6	Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.	Approval of Special Assignment to the Company.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** | In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju** | Against
	14.244.562.520 suara/ votes (76,2423466%)	365.434.212 suara/ votes (1,9559437%)	4.073.272.021 suara/ votes (21,8017097 %)

Keputusan Mata Acara 6 Resolution of Agenda Item 6	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, untuk menyetujui penugasan khusus Pemerintah kepada Perseroan dalam rangka: 1. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Gas Bumi Non APBN; dan 2. Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Tegal-Cilacap; yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Granting power and authority to the Minister of State-Owned Enterprises as the holder of Dwiwarna A Series Shares, with prior approval from the President of the Republic of Indonesia, to approve the Government's special assignment to the Company for the following purposes: 1. Development and Management of Non-State Budget Natural Gas Networks; and 2. The construction and operation of the Tegal-Cilacap Natural Gas Pipeline; the implementation of which shall be carried out in accordance with the statutory provisions.
Tindak Lanjut Follow-up	Perseroan telah melaksanakan serangkaian pembahasan dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga terkait sedang menyusun rancangan peraturan yang mengatur secara rinci Penugasan Khusus sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.	The Company has held a series of discussions with relevant Ministries/Institutions. Currently, the Government, through the relevant Ministries/Institutions, is drafting a regulation that regulates in detail the Special Assignment as a derivative of Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises as last amended by Law Number 16 of 2025 ong the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.

Mata Acara 7 Agenda Item 7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Changes to the Composition of the Company's Management
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** | In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju** | Against
	13.895.498.028 suara/ votes (74,3740199%)	672.670.320 suara/ votes (3,6003888%)	4.115.100.405 suara/ votes (22,0255912%)

Keputusan Mata Acara 7 Resolution of Agenda Item 7	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: b. Sdr. Luky Alfirman sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 25 Maret 2025; c. Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 15 Mei 2025. 2. Mengangkat kembali Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris Perseroan untuk periode kedua. 3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.	1. Ratifying the honorable dismissal of the following members of the Company's Board of Commissioners: a. Luky Alfirman as Commissioner, effective as of March 25, 2025; b. Warih Sadono as Commissioner, effective as of May 15, 2025. 2. Reappointing Warih Sadono as Commissioner of the Company for the second term. 3. For members of the Board of Commissioners appointed as referred to in point 2 who are still holding other positions prohibited by laws and regulations from being concurrently held with the position of Commissioner of a Subsidiary of a State-Owned Enterprise, the relevant member shall resign from or be dismissed from such position.

	4. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaruan data Portal HC Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pelaksanaan RUPS tersebut.	4. Ratification of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company as referred to in points 1 and 2 shall be resolved at a Company's GMS, with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. 5. The results of the GMS determination regarding the ratification of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company as referred to in point 4 shall be submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises through the updating of data in the Ministry of SOEs HC Portal, as stipulated in Article 54 paragraph (4) of Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, no later than five (5) working days after the implementation of the GMS.
Tindak Lanjut Follow-up	Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Nomor 037600.S/KU.06.01/COS/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Informasi Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 31 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0298509 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners have been reported to the FSA through Letter Number 037600.S/KU.06.01/COS/2025 dated June 2, 2025 on the Information on Changes to the Management of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, and outlined in the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 31 dated June 13, 2025, drawn up before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The deed has been submitted to and received by the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Minister of Law's Letter Number AHU-AH.01.09-0298509 dated June 16, 2025 on the Receipt of Notification of Changes to the Company Data of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

RUPS Luar Biasa tanggal 27 Agustus 2025

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta, 11140.
2. Kuorum
   RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan/kuasa dari Pemegang Saham sebanyak 18.634.197.885 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 76,8689709% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Luar Biasa adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Luar Biasa.
3. Kehadiran Dewan Komisaris, yaitu:

Extraordinary GMS dated August 27, 2025

1. Time and Place
   a. Day/date: Wednesday, August 27, 2025
   b. Place: Graha PGAS Auditorium, 2nd Floor, Jl. KH. Zainul Arifin Number 20, Jakarta, 11140.
2. Quorum
   The EGMS was attended by Shareholders and/or representatives/proxies of Shareholders amounting to 18,634,197,885 including the Dwiwarna A Series shares or representing 76.8689709% of the total number of valid voting shares issued by the Company, which amounted to 24,241,508,196 shares. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been met and therefore the EGMS is valid and has the right to make valid and binding resolutions on matters discussed in accordance with the EGMS agenda.
3. The attendance of the Board of Commissioners, namely:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Amien Sunaryadi
Komisaris Independen Independent Commissioner	Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen Independent Commissioner	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Komisaris Independen Independent Commissioner	Dini Shanti Purwono
Komisaris Commissioner	Warih Sadono

4. Kehadiran Direksi, yaitu:

4. The attendance of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama President Director	Arief Setiawan Handoko
Direktur Keuangan Director of Finance	Fadjar Harianto Widodo
Direktur Komersial Director of Commercial	Ratih Esti Prihatini
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis merangkap PTH Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Strategy and Business Development, serving as Acting Director of Infrastructure and Technology	Rosa Permata Sari
Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	Harry Budi Sidharta
Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	Arief Kurnia Risdianto
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	Rachmat Hutama

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam melakukan proses penghitungan suara dan/ atau melakukan validasi, Perseroan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, hasil Keputusan RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan. Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

5. Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals. In counting the vote and/or conducting validation process, the Company was assisted by the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. As of the publication of this Annual Report, the resolutions of the Extraordinary GMS have been implemented. The explanation of each agenda item of the Extraordinary GMS is set out in the table below.

Mata Acara Rapat Meeting Agenda Item	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Changes to the Composition of the Company's Management
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor 14.062.836.823 suara/ votes (75,4678946%)	**Abstain** 468.053.313 suara/ votes (2,5117975%)
	Tidak Setuju | Against 4.103.307.749 suara/ votes (22,0203079%)	
Keputusan Mata Acara Resolutions of Agenda Item	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2025. 2. Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Arief Setiawan Handoko sebagai Direktur Utama b. Sdr. Fadjar Harianto Widodo sebagai Direktur Keuangan c. Sdri. Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Komersial d. Sdri. Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis e. Sdr. Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen f. Sdr. Warih Sadono sebagai Komisaris g. Sdr. Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen h. Sdr. Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen i. Sdri. Dini Shanti Purwono sebagai Komisaris Independen 3. Mengalihkan tugas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:	1. Ratifying the honorable dismissal of Harry Budi Sidharta as Director of Infrastructure and Technology of the Company, effective as of July 4, 2025. 2. Honorably dismissing the following members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners: a. Arief Setiawan Handoko as President Director b. Fadjar Harianto Widodo as Director of Finance c. Ratih Esti Prihatini as Director of Commerce d. Rosa Permata Sari as Director of Strategy and Business Development e. Amien Sunaryadi as President Commissioner and Independent Commissioner f. Warih Sadono as Commissioner g. Abdullah Aufa Fuad as Independent Commissioner h. Christian H. Siboro as Independent Commissioner i. Dini Shanti Purwono as Independent Commissioner 3. Transferring the duties of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:

Nama | Name	Semula | Initially	Menjadi | Appointed as
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	Direktur Utama President Director
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan-jabatan sesuai Keputusan RUPS Pengangkatan masing-masing.

4. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
   a. Sdr. Hery Murahmanta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi
   b. Sdr. Catur Dermawan sebagai Direktur Keuangan
   c. Sdr. Mirza Mahendra sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
   d. Sdr. Aldiansyah Idham sebagai Direktur Komersial
   e. Sdr. Eri Surya Kelana sebagai Direktur Manajemen Risiko
   f. Sdr. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Komisaris
   g. Sdr. Rambe Kamarul Zaman sebagai Komisaris
   h. Sdr. Thanon Aria Dewangga sebagai Komisaris
   i. Sdri. Conny Lolyta Rumondor sebagai Komisaris Independen
   j. Sdr. Widjono Hardjanto sebagai Komisaris Independen

5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
7. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, agar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Hasil penetapan RUPSLB atas pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 7 agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaruan data Portal HC Kementerian BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

with a term of office continuing the remaining term of office in accordance with the respective GMS resolutions on their appointments.

4. Appointing the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as follows:
   a. Hery Murahmanta as Director of Infrastructure and Technology
   b. Catur Dermawan as Director of Finance
   c. Mirza Mahendra as Director of Strategy and Business Development
   d. Aldiansyah Idham as Director of Commerce
   e. Eri Surya Kelana as Director of Risk Management
   f. Edward Omar Sharif Hiariej as Commissioner
   g. Rambe Kamarul Zaman as Commissioner
   h. Thanon Aria Dewangga as Commissioner
   i. Conny Lolyta Rumondor as Independent Commissioner
   j. Widjono Hardjanto as Independent Commissioner

5. The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in point 4 shall be in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, without reducing the rights of the GMS to dismiss them at any time.
6. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who will be appointed as referred to in point 4 and still hold other positions that are prohibited by law from being concurrently held with positions on the Board of Directors and Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise Subsidiary must resign or be dismissed from those positions.
7. The ratification of the dismissal, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as referred to in points 1, 2, 3, and 4 shall be determined at an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company, with regard to the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
8. The results of the EGMS decision on the confirmation of dismissal, transfer of duties, and appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in point 7 shall be submitted to the Ministry of SOEs through updating the data on the Ministry of SOEs' HC Portal as stipulated in Article 54 paragraph (4) of the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, no later than five (5) working days after the implementation of the EGMS.

Tindak Lanjut Follow-up	Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Nomor 055100.S/KU.06.01/COS/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Informasi Perubahan Pengurus PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 01 tanggal 9 September 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Atas tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum Nomor AHU-AH.01.09-0336642 tanggal 11 September 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The dismissal and appointment of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have been reported to the FSA through Letter Number 055100.S/KU.06.01/COS/2025 dated August 29, 2025 on the Information on Changes to the Management of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, and outlined in the Deed of Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 01 dated September 9, 2025 made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The deed has been submitted to and received by the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Minister of Law's Letter Number AHU-AH.01.09-0336642 dated September 11, 2025 on the Receipt of Notification of Changes to the Company Data of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

RUPS Luar Biasa tanggal 29 Desember 2025

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Senin, 29 Desember 2025
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta, 11140.
2. Kuorum
   RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan/kuasa dari Pemegang Saham sebanyak 20.761.421.407 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 85,6440995% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Luar Biasa adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Luar Biasa.
3. Kehadiran Dewan Komisaris, yaitu:

Extraordinary GMS dated December 29, 2025

1. Time and Place
   a. Day/date: Monday, December 29, 2025
   b. Place: Graha PGAS Auditorium, 2nd Floor, Jl. KH. Zainul Arifin Number 20, Jakarta, 11140.
2. Quorum
   The EGMS was attended by Shareholders and/or representatives/proxies of Shareholders amounting to 20,761,421,407 including the Dwiwarna A Series shares or representing 85.6440995% of the total number of valid voting shares issued by the Company, which amounted to 24,241,508,196 shares. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been met and therefore the EGMS is valid and has the right to make valid and binding resolutions on matters discussed in accordance with the Extraordinary GMS agenda.
3. The attendance of the Board of Commissioners, namely:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Commissioner	Thanon Aria Dewangga
Komisaris Commissioner	Rambe Kamarul Zaman
Komisaris Independen Independent Commissioner	Conny Lolyta Rumondor
Komisaris Commissioner	Edward Omar Sharif Hiariej

4. Kehadiran Direksi, yaitu:

4. The attendance of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama President Director	Arief Kurnia Risdianto
Direktur Keuangan Director of Finance	Catur Dermawan
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	Mirza Mahendra
Direktur Komersial Director of Commercial	Aldiansyah Idham
Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	Hery Murahmanta
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	Rachmat Hutama
Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	Eri Surya Kelana

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi, Perseroan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

5. Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals. In counting the vote and/or conducting validation process, the Company was assisted by the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

6. Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, hasil Keputusan RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan. Penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

6. As of the publication of this Annual Report, the resolutions of the Extraordinary GMS have been implemented. The explanation of each agenda item of the Extraordinary GMS is set out in the table below.

Mata Acara 1 Agenda Item 1	Perubahan Hak atas Saham Perseroan.	Changes in Rights to Company Shares
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	1 (One) Shareholder raised a question
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Mengingat terdapat 2 (dua) klasifikasi saham yang terdampak atas penyesuaian (pengurangan dan penambahan) Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka proses pemungutan suara/voting dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut:	Considering that there are 2 (two) classifications of shares affected by the adjustment (reduction and addition) of the Special Rights of the Dwiwarna A Series Shareholders, the voting process was conducted twice, as follows:
	1. Pemungutan Suara/Voting oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Pengurangan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	1. Voting by Dwiwarna A Series Shareholders for the Reduction of Special Rights of Dwiwarna A Series Shareholders
	Setuju | In Favor / **Abstain** / **Tidak Setuju | Against**	
	1 suara/ vote (100%) / 0 suara/ vote (0%) / 0 suara/ vote (0%)	
	2. Pemungutan Suara/Voting oleh Pemegang Saham Seri B untuk Penambahan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	2. Voting by B Series Shareholders for the Addition of Special Rights of Dwiwarna A Series Shareholders
	Setuju | In Favor / **Abstain** / **Tidak Setuju | Against**	
	16.041.351.562 suara/ (77,2651894%) / 601.499.521 suara/ vote (2,8971982%) / 4.118.570.323 suara/ vote (19,8376125%)	
Keputusan Mata Acara 1 Resolutions of Agenda Item 1	Menyetujui penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Approving the adjustment of special rights on the State of the Republic of Indonesia's Dwiwarna A Series Shares in accordance with Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.
Tindak Lanjut Follow-up	Perubahan Anggaran Dasar telah dituangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004617.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	The amendments to the Articles of Association have been outlined in Deed Number 17 dated January 26, 2026, made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. These amendments have been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Minister of Law of the Republic of Indonesia Decree Number AHU-0004617.AH.01.02. YEAR 2026 dated January 29, 2026 on the Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk or abbreviated as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Mata Acara 2 Agenda Item 2	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Amendment to the Company's Articles of Association.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.	No Shareholders raised any questions.

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** | In Favor	**Abstain**	**Tidak Setuju** | Against
	16.041.355.363 suara/ suara (77,2652077%)	601.500.421 suara/ vote (2,8972025%)	4.118.565.623 suara/ vote (19,8375898%)

Keputusan Mata Acara 2 Resolutions of Agenda Item 2		
	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas, termasuk persetujuan perubahan hak atas saham pada Mata Acara Rapat 1; dan 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	1. Approving the amendments to the Company's Articles of Association, among others, in order to comply with laws and regulations and policies, including Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises; 2. Agreeing to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association into a comprehensive codification in relation to the changes referred to in point 1 of the above resolution, including approval of changes to share rights in Agenda Item 1; and 3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting Agenda Item, including revising and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and granting power with the right of substitution to submit to the relevant agencies to obtain receipt of notification and approval of the amendments to the Company's Articles of Association, and to perform all actions deemed necessary and beneficial for such purposes, without exception, including making additions and/ or amendments to the amendments to the Articles of Association, if required by the relevant agencies.
Tindak Lanjut Follow-up	Perubahan Anggaran Dasar telah dituangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004617.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Disingkat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	The amendments to the Articles of Association have been outlined in Deed Number 17 dated January 26, 2026, made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. These amendments have been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on the Minister of Law of the Republic of Indonesia Decree Number AHU-0004617.AH.01.02. YEAR 2026 dated January 29, 2026 on the Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk or abbreviated as PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Mata Acara 3 Agenda Item 3	1. Pertamina selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak telah memberikan persetujuan atas RKAP 2026 melalui Surat Direktur Utama Pertamina No. R-040/C00000/2026-S0 tanggal 9 April 2026 perihal Persetujuan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2026 Subholding Gas. 2. Dewan Komisaris telah menyetujui RKAP 2026 melalui Surat Dewan Komisaris PGN No. 44P/SKEL.00/D-KOM/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Persetujuan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2026 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	1. As the majority shareholder of Series B shares, Pertamina has approved the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) through Letter of Pertamina's President Director Number R-040/C00000/2026-S0 dated April 9, 2026, on Approval of the Proposed 2026 RKAP and the 2026 Key Performance Indicators (KPI) for the Gas Subholding. 2. The Board of Commissioners has approved the 2026 RKAP through Letter of PGN's Board of Commissioners Number 44P/SKEL.00/D-KOM/2026 dated April 10, 2026, on Approval of the Proposed 2026 RKAP and the 2026 Key Performance Indicators (KPI) for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan Number of Shareholders who raised questions	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan satu Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat.	1 (One) Shareholder raised a question and 1 (one) Shareholder provided opinions.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju |** In Favor 18.922.539.570 suara/ suara (91,1427941%)	**Abstain** 612.762.677 suara/ suara (2,9514486%)
	Tidak Setuju | Against 1.226.119.160 suara/ suara (5,905573%)	
Keputusan Mata Acara 3 Resolutions of Agenda Item 3	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya.	Granting authority and power to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Majority B Series Shareholders, to approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 and the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the 2026-2030 period, including any amendments.
Tindak Lanjut Follow-up	3. Perseroan telah melaksanakan pembahasan dengan PT Pertamina selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Alur Persetujuan RKAP 2026. 4. Direktur Utama PGN telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Direktur Utama PGN kepada Dewan Komisaris PGN Nomor 009900.S/KU.00.00/PDO/2026 tanggal 06 Februari 2026 perihal Penyampaian Usulan-6 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Usulan Key Perfomance Indicator (KPI) Tahun 2026 PT Perusahaan Gas Negara (Pesero) Tbk 5. Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat kepada PT Pertamina selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak melalui Surat Dewan Komisaris Nomor.23/SKEL.00/D-KOM/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Penyampaian Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2026 Subholding Gas	1. The Company has held discussions with PT Pertamina, as the majority shareholder of Series B shares, concerning the approval process for the 2026 Work Plan and Budget (RKAP). 2. The President Director of PGN has submitted a letter to the Board of Commissioners, through Letter Number 009900.S/KU.00.00/PDO/2026 dated February 6, 2026, concerning the Submission of Proposal 6 for the 2026 Company Work Plan and Budget (RKAP) and Proposed Key Performance Indicators (KPI) for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 3. The Board of Commissioners has submitted a letter to PT Pertamina, as the majority shareholder of Series B shares, through Letter Number 23/SKEL.00/D-KOM/2026 dated February 13, 2026, concerning the Submission of Proposal 6 for the 2026 Company Work Plan and Budget (RKAP) and Proposed Key Performance Indicators (KPI) for the Gas Subholding.

KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan satu RUPST pada 30 Mei 2024 dan Perseroan tidak menyelenggarakan RUPSLB 2024. Seluruh keputusan RUPS tersebut telah terealisasi pada tahun 2024 atau sesuai waktu yang diputuskan dalam RUPS, dan telah dilaporkan di dalam Laporan Tahunan Perseroan 2024.

RESOLUTIONS OF THE PREVIOUS GMS

Throughout 2024, the Company held one AGMS on May 30, 2024 and did not convene any EGMS during the year. All resolutions adopted at the AGMS were realized in 2024 or in accordance with the timeline approved at the GMS, and have been disclosed in the Company's 2024 Annual Report.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola yang menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan oleh Direksi, serta memastikan penerapan prinsip GCG berjalan secara berkesinambungan.

The Board of Commissioners is a governance body that performs supervisory functions over the management policies and implementation of company management by the Board of Directors, and ensures the continuous application of GCG principles.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan dan memastikan kualitas penerapan tata kelola perusahaan melalui evaluasi atas efektivitas sistem GCG serta menyampaikan arahan dan rekomendasi perbaikan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bila terjadi gejala turunnya kinerja Perseroan;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang pasar modal;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Every member of the Board of Commissioners is responsible for supervising the management of the Company and ensuring the quality of corporate governance implementation through evaluation of the GCG system's effectiveness, as well as providing directives and recommendations for improvement to the Board of Directors.
In carrying out its duties, the Board of Commissioners is responsible for:

1. Providing advice to the Board of Directors on the management of the Company;
2. Providing opinions and approval on the Company's Annual Work Plan and Budget, as well as other work plans drawn up by the Board of Directors;
3. Monitoring the progress of the Company's activities, giving opinions and advice to the GMS on every issue deemed significant to the management of the Company;
4. Reporting to the Dwiwarna A Series Shareholders in the event of a decline in the Company's performance;
5. Proposing to the GMS for the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books;
6. Analyzing and reviewing periodic reports and annual reports compiled by the Board of Directors and signing the annual report;
7. Providing explanations, opinions, and advice to the GMS on the annual report;
8. Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings and keeping the copies;
9. Reporting to the Company on their and/or their family's share ownership in the Company and other companies;
10. Reporting on the supervisory duties performed during the previous fiscal year to the GMS;
11. Providing explanations on all matters inquired or requested by the Dwiwarna A Series Shareholders, taking into account the laws and regulations, particularly those applicable in the capital market;

12. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan komite lain yang dianggap perlu untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; dan
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Komisaris Utama

Tugas Dewan Komisaris bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris merujuk pada acuan tugas Dewan Komisaris, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan BUMN Nomor PER-1/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
10. Anggaran Dasar Perseroan; dan
11. *Board Manual* Perseroan.

12. Nomination & Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, and other committees deemed necessary
13. Performing other duties in the framework of supervisory and advisory tasks, provided that they do not conflict with the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.

Duties of the President Commissioner

The duties of the Board of Commissioners are collective and collegial in nature, meaning that there is no separation of duties and responsibilities between the President Commissioner and other members of the Board of Commissioners.

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties on the policies and management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the guidelines governing the duties of the Board of Commissioners, namely:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. SOEs Regulation Number PER-1/MBU/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of SOEs;
3. SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
4. SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of SOEs;
5. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
6. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee;
9. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
10. The Company's Articles of Association; and
11. The Company's Board Manual.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yaitu *Board manual*. Pedoman tersebut dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Board Manual* berfungsi sebagai tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual* Perseroan diatur secara khusus dalam Bab III yang mencakup:

1. Tugas-tugas Dewan Komisaris;
2. Batasan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
4. Lowong Jabatan Dewan Komisaris;
5. Rangkap Jabatan;
6. Independensi dan Etika Jabatan Dewan Komisaris;
7. Wewenang Dewan Komisaris;
8. Rapat Dewan Komisaris;
9. Rapat Gabungan;
10. Komite-Komite Dewan Komisaris;
11. Sekretaris Dewan Komisaris;
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris;
13. Kebijakan Suksesi Direksi;
14. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
15. Waktu Kerja Dewan Komisaris.

Board manual Dewan Komisaris secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Selaras dengan ketentuan Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan;

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is governed by guidelines for the implementation of its duties and responsibilities, namely the Board Manual. This manual is evaluated and updated periodically in accordance with applicable regulations. The Board Manual serves as a binding working procedure for each member of the Board of Commissioners in carrying out their duties efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

The Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners in the Company's Board Manual are specifically regulated in Chapter III, which comprises:

1. Duties of the Board of Commissioners;
2. Limitations on the Responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Preparation of the Work Plan and Annual Budget;
4. Vacant Positions of the Board of Commissioners;
5. Concurrent Positions;
6. Independence and Code of Ethics of the Board of Commissioners;
7. Authority of the Board of Commissioners;
8. Meetings of the Board of Commissioners.
9. Joint Meetings;
10. Committees of the Board of Commissioners;
11. Secretary of the Board of Commissioners;
12. Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners;
13. Succession Policy for the Board of Directors;
14. Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
15. Working Hours of the Board of Commissioners.

The complete Board Manual of the Board of Commissioners can be accessed on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

BOARD OF COMMISSIONERS POLICY ON CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST

Aligned with the provisions in Article 14 paragraph (29) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding the following concurrent positions:

1. Member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or private-owned enterprise, except member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise that is the Corporation's B Series Majority Shareholder;

2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

KEBIJAKAN LARANGAN MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN

Mengacu pada *Board Manual*, Perseroan menetapkan kebijakan yang melarang anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerima pinjaman dari Perseroan.

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Board Manual mengatur mengenai jenis-jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. **Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris**
   a. Mengangkat dan memberhentikan Corporate Secretary dan Chief Audit Executive;
   b. Penetapan dan perubahan logo Perseroan;
   c. RJPP dan perubahannya;
   d. RKAP dan perubahannya;
   e. Penetapan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi;
   f. Laporan Tahunan;
   g. Tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
   h. Membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain di luar wilayah Republik Indonesia;
   i. Melaksanakan transaksi afiliasi yang memerlukan keterbukaan informasi;
   j. Melakukan tindakan sesuai batasan kewenangan Anggaran Dasar; dan
   k. Melakukan tindakan sesuai batasan kewenangan persetujuan investasi.
2. **Tindakan Direksi sebagai pelaksana kebijakan/peraturan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris**
   a. Kebijakan serta strategi manajemen risiko;
   b. Piagam Internal Audit;
   c. Annual Audit Plan;
   d. Kebijakan tata kelola terintegrasi;

2. Political party officials and/or candidate/member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, Regional Legislative Council Level I and Level II, and/or regional head/deputy regional head;
3. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations; and/or
4. Other positions that may cause a conflict of interest.

POLICY ON PROHIBITION OF OBTAINING LOANS FROM THE COMPANY

With reference to the Board Manual, the Company has established a policy prohibiting members of the Board of Directors and Board of Commissioners from taking out loans from the Company.

TYPES OF DECISIONS REQUIRING THE APPROVAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board Manual specifies the types of decisions made by the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners, as follows:

1. **Actions of the Board of Directors requiring written approval from the Board of Commissioners**
   a. Appointing and dismissing the Corporate Secretary and Chief Audit Executive;
   b. Determining and modifying the Company's logo;
   c. RJPP and its modifications;
   d. RKAP and its modifications;
   e. Determining the organizational structure one level below the Board of Directors;
   f. Annual Report;
   g. Actions not specified in the RKAP;
   h. Opening branch offices or representative offices in other locations outside the territory of the Republic of Indonesia;
   i. Carrying out affiliated transactions that require disclosure of information;
   j. Taking actions within the limits of the authority of the Articles of Association; and
   k. Taking actions within the limits of the authority of investment approval.
2. **Actions of the Board of Directors in implementing policies/regulations that require the approval of the Board of Commissioners**
   a. Risk management policies and strategies;
   b. Internal Audit Charter;
   c. Annual Audit Plan;
   d. Integrated governance policies;

e. Penjabaran KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual; dan
f. Penetapan prosedur operasional standar/mitra *operating procedure* kerja sama untuk mencari mitra.

3. Tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Pemegang saham Seri B terbanyak sesuai dengan batasan kewenangan Anggaran Dasar

a. Melepaskan (menghapusbukukan)/(memindahtangankan) dan/atau mengagunkan aset Perseroan, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan;
b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Built Operate Own*/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama;
c. Melakukan penyertaan, melepaskan penyertaan serta perubahan struktur permodalan pada Perseroan lain, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
d. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borglavalist*);
g. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang;
h. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali kepada Anak Perusahaan; dan
i. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;
j. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

A. Penyampaian Persetujuan atas topik:

1. Perubahan Pengurus Anak Perusahaan;
2. Piagam Audit Internal;
3. *Annual Audit Plan* Internal Audit Division 2025;

e. Breakdown of collegial Board of Directors KPIs into individual Board of Directors KPIs; and
f. Determination of standard operating procedures/partner operating procedures for seeking partners.

3. Actions of the Board of Directors requiring written approval from the Board of Commissioners and the majority of A Series/B Series shareholders in accordance with the limits of authority set forth in the Articles of Association

a. Releasing (writing off/transferring) and/or pledging the Company's assets, except for assets recorded as inventory;
b. Establishing cooperation with business entities or other parties in the form of Joint Operations (KSO), Business Cooperation (KSU), Licensing Agreements, Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Operate-Own (BOO) and other agreements of a similar nature;
c. Making capital participation, divesting capital participation, and changing the capital structure of other Companies, Subsidiaries, and Joint Ventures, provided that such actions are not for the purpose of receivables recovery;
d. Establishing Subsidiaries and/or Joint Ventures;
e. Merging, consolidating, acquiring, separating, and dissolving Subsidiaries and Joint Ventures;
f. Binding the Company as a guarantor (borglavalist);
g. Receiving medium/long-term loans and providing medium/long-term loans;
h. Providing short-term/medium-term/long-term loans for non-operational purposes, except to Subsidiaries;
i. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books; and
j. Proposing representatives of the Company to become candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries contributing significantly to the Company and/or having strategic value.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2025, the Board of Commissioners performed the following duties and activities:

A. Submission of Approval of the following topics:

1. Changes in the Management of Subsidiaries;
2. Internal Audit Charter;
3. Annual Audit Plan Internal Audit Division 2025;

4. Penunjukan Perusahaan Jasa Pemeringkat Kredit Untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode 2024;
5. *Board Manual* 2025;
6. KPI Kolegial 2025;
7. Pedoman Benturan Kepentingan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
8. Kebijakan Manajemen Risiko;
9. *Annual Audit Plan* 2025;
10. Re-FID atas Investasi Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack Wilayah Kerja Muara Bakau PT Saka Energi Indonesia

B. Penyampaian Penelaahan dan Nasihat/Saran/Tanggapan atas topik:

1. Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group;
2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Harga Saham;
3. Pengelolaan Anak Perusahaan;
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
5. Laporan Hasil Audit;
6. Kebijakan Perusahaan;
7. Usulan/Inisiatif dan Realisasi Investasi;
8. Kontrak Kerja sama;
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Struktur Organisasi;
11. GCG *Assessment*;
12. Penyampaian Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk Pekerjaan *Agreed-Upon Procedure* Peringkat Komposit Risiko PGN Tahun Buku 2023, 2024 dan 2025;
13. Usulan *Contigency Plan* PGN Tahun 2025;
14. Laporan Realisasi RKAP PGN Triwulan I, II dan III Tahun 2025; dan
15. Laporan Manajemen Bulanan PGN.

C. Penyampaian Usulan dan Rekomendasi Kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak atas topik:

1. Rekomendasi Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN;
2. Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris serta Usulan Penilaian Kinerja Direksi PGN Tahun 2024;
3. Realisasi KPI Dewan Komisaris PGN Tahun 2024, Triwulan I, II, dan III Tahun 2025;
4. KPI Dewan Komisaris PGN Tahun 2025;
5. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024;

4. Appointment of a Credit Rating Agency to Assess the Financial Health of the Company for the 2024 Period;
5. Board Manual 2025;
6. 2025 Collegial KPIs;
7. Conflict of Interest Guidelines and Gratuity Control Guidelines;
8. Risk Management Policy;
9. 2025 Annual Audit Plan;
10. Re-FID on the Drilling Investment of the JNE-07 Sidetrack Well in the Muara Bakau Work Area of PT Saka Energi Indonesia.

B. Submission of Review and Advice/Suggestion/Response on the following topics:

1. Changes in the Management of Subsidiaries/Affiliated Companies of the Pertamina Group;
2. Evaluation of Company Performance and Share Price;
3. Subsidiary Management;
4. Risk Management and Internal Control;
5. Audit Reports;
6. Company Policies;
7. Investment Proposal/Initiative and Realization;
8. Cooperation Agreement;
9. Human Resources Development;
10. Organizational Structure;
11. GCG Assessment;
12. Submission of Public Accounting Firm Procurement for Agreed-Upon Procedure Work on PGN Composite Risk Rating for the 2023, 2024, and 2025 Fiscal Years;
13. Proposed PGN Contingency Plan for 2025;
14. PGN RKAP Realization Report for the Q1, Q2, and Q3 of 2025; and
15. PGN Monthly Management Report.

C. Submission of Proposals and Recommendations to Majority B Series Shareholders on the following topics:

1. Recommendation for Changes in the Management of PGN Subsidiaries;
2. Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committee and the Proposed Performance Assessment of the Board of Directors of PGN in 2024;
3. KPI Realization of the Board of Commissioners of PGN for the Year 2024, Q1, Q2, and Q3 of the Year 2025;
4. KPI of the Board of Commissioners of PGN for the Year 2025;
5. Board of Commissioners' Supervision Report for the 2024 Fiscal Year;

6. Usulan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Honorarium BOD BOC Tahun Buku 2025;
7. Usulan Penggunaan Laba (Dividen) PGN Tahun Buku 2024;
8. Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik PGN Tahun Buku 2024 dan Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) PGN Tahun Buku 2025;
9. Usulan Penugasan Khusus kepada PGN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024

6. Proposed Tantiem for the 2024 Fiscal Year and BOD-BOC Honorarium for the 2025 Fiscal Year;
7. Proposed Use of PGN's Profit (Dividends) for the 2024 Fiscal Year;
8. Evaluation of the Performance of PGN's Public Accounting Firm for the 2024 Fiscal Year and Proposed Appointment of PGN's Public Accounting Firm (KAP) for the 2025 Fiscal Year;
9. Proposed Special Assignment to PGN at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

50 Kali | Times

Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2025
The Board of Commissioners' Meetings in 2025

Kebijakan mengenai ketentuan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris adalah berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 16 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam ketentuan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan dan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 50 kali, terdiri dari 38 kali Rapat Dewan Komisaris dan 12 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

The policy regarding the implementation of Board of Commissioners meetings is based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-2/MBU/03/2023 Article 16 on the Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Article 31 paragraph (1) and (3) of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as Article 16 of the Company's Articles of Association.

Under such regulations, the Board of Commissioners is required to conduct meetings at least once every two months and joint meetings with the Board of Directors at least once every four months. Throughout 2025, the Board of Commissioners convened 50 meetings, comprising 38 Board of Commissioners' Meetings and 12 Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the following details:

Rapat Internal Dewan Komisaris
Internal Meeting of the Board of Commissioners

Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025 | January 1 – August 27, 2025 Period

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
9 Januari 2025 January 9, 2025	1. Diskusi Cara Melakukan Pengawasan & Pemberian Nasihat Agar Target RKAP 2025 Tercapai; Discussion on Carrying Out Supervision & Providing Advice to Achieve the Targets of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP); 2. *Review* Permohonan Persetujuan *Annual Audit Plan* Fungsi Internal Audit PGN Tahun 2025 (Komite Audit); Review of the Approval Request for the Annual Audit Plan for the 2025 Internal Audit Function of PGN (Audit Committee); 3. Paparan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Dewan Komisaris, dan Anggota Komite Tahun 2024 (Komite NRGCG); Presentation of the Implementation of the 2024 Individual Performance Assessment of Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Committees (NRGCG Committee); 4. *Update Review* Revisi *Board Manual* (Semua Komite); dan Review Update on Board Manual Review Update Revision (All Committees); and 5. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
14 Januari 2025 January 14, 2025	1. Revisi Pedoman Benturan Kepentingan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi (KNRGCG); Revision of Conflict of Interest Manual and Gratification Control Manual (NRGCG Committee); 2. Tanggapan Usulan Kebijakan Manajemen Risiko (KPMRPU); Response to Risk Management Policy Proposals (PMRPU Committee); 3. *Update* Realisasi KPI Komite dan KPI Dekom Tahun 2024 (KNRGCG); Update on the Realization of Committee KPI and Board of Commissioners KPI for 2024 (NRGCG Committee); 4. Usulan Evaluator AKHLAK Behavior Survey (ABS) Terkait Penilaian Kinerja Individu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tahun 2024 (KNRGCG); dan Proposal of the AKHLAK Behavior Survey (ABS) Evaluator Regarding the 2024 Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Committees (NRGCG Committee); and 5. Lain-lain Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 Januari 2025 January 22, 2025	*Action Plan* Pemenuhan Pasokan Gas dan Pencapaian Target Niaga Gas 2025. Action Plan for Fulfilling Gas Supply and Achieving the 2025 Gas Trading Target.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Februari 2025 February 10, 2025	Evaluasi Pembangunan Jargas 2024 dan *Action Plan* Pembangunan Jargas 2025. Evaluation of the 2024 Gas Network Development and Action Plan for the 2025 Gas Network Development	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
27 Februari 2025 February 25, 2025	1. Tanggapan Laporan Pelaksanaan Pengadaan GCG Assesment Parameter ACGS (KNRGCG); Response to Report on GCG Assessment Implementation Based on ACGS Parameters (KNRGCG); 2. Tanggapan Atas Penyampaian Hasil Perhitungan Sendiri Terkait Pencapaian KPI Korporat dan Direktorat Tahun 2024 Unaudited (KNRGCG); Response to the Submission of Self-Assessment Results for 2024 Unaudited Corporate and Directorate KPI Achievements (NRGCG Committee); 3. Tanggapan terhadap Penyempurnaan Kajian Risiko atas Usulan Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga GasKita PGN Sayang Ibu (PSI) SOR III (KPMRPU); Response to the Enhancement of Risk Assessment of Proposed Investment in the Installation of Gas Pipeline Infrastructure for the GasKita PGN Sayang Ibu (PSI) Household Customer Attachment in SOR III (PMRPU Committee); 4. Masa Tugas AKNK Yang Berakhir Tahun 2025 (KNRGCG); dan Term of Duty of Non-Commissioner Committee Members Ending in 2025 (NRGCG Committee); and 5. Lain-lain Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Maret 2025 March 6, 2025	1. Review Usulan Revisi RJPP 2025 – 2029, Suplemen Hingga 2034 dan Program Strategis Korporat 2025 (Semua Komite); dan Review of Proposed Revision to the 2025 – 2029 Long-Term Company Plan, Supplements Extending to 2034, and 2025 Corporate Strategic Programs (All Committees); and 2. Lain-lain. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Maret 2025 March 12, 2025	1. Review Usulan Persetujuan Re-FID Investasi Pengeboran JNE-07 Sidetrack WK Muara Bakau PT Saka Energi Indonesia; dan Review of the Proposed Re-FID Approval of JNE-07 Sidetrack Drilling Investment in Muara Bakau Working Area of PT Saka Energi Indonesia; 2. Lain-lain. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
17 Maret 2025 March 17, 2025	1. Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tahun 2024 (khusus Penilaian Kinerja Direktur dihadiri Direktur Utama); dan Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Committees for 2024 (Performance Assessment of Directors was attended by the President Director); and 2. Lain-lain. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Maret 2025 March 27, 2025	1. Tanggapan atas Pemberitahuan Perubahan Rencana Realokasi Anggaran Biaya atas Usulan Re-FID Drilling Development JNE-07 Side Track WK Muara Bakau (KPMRPU); Response to the Notification of Changes to the Budget Reallocation Plan for the Proposed Re-FID Drilling Development of JNE-07 Side Track in Muara Bakau Working Area (PMRU Committee); 2. Informasi Kelanjutan Pekerjaan 3D Seismik WK Pangkah PT Saka Energi (KA); Information on the Continuation of 3D Seismic Work in the Pangkah Working Area of PT Saka Energi (Audit Committee); 3. Tanggapan atas Concern Dewan Komisaris Laporan IAD TW II dan TW III 2024 (KA); Response to Concerns of the Board of Commissioners on the IAD Report for Q2 and Q3 of 2024 (Audit Committee); 4. Tanggapan atas Informasi Tindak Lanjut Temuan IA PGN 2024 di PT Pertagas (KA); Response to Information on Follow-Up to the 2024 PGN IA Findings at PT Pertagas (Audit Committee) 5. Tanggapan atas Penyampaian Laporan Hasil Audit TW IV 2024 (KA); Response to the Submission of Audit Results Report for Q4 of 2024 (Audit Committee); 6. Current Issues terkait Dewan Komisaris; dan Current Issues related to the Board of Directors; 7. Lain-lain. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
22 April 2025 April 22, 2025	1. Tanggapan terkait Annual Report dan Sustainability Report 2024 (Komite Audit); dan Response to the 2024 Annual Report and Sustainability Report (Audit Committee); and 2. Lain-lain. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
25 April 2025 April 25, 2025	1. Laporan Realisasi RKAP Triwulan I 2025 sesuai PER-2/MBU/03/2023; RKAP Realization Report for the First Quarter of 2025, in accordance with PER-2/MBU/03/2023; 2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024; Board of Commissioners Supervisory Report for 2024; 3. Tanggapan Usulan Dividen Tahun 2024; Response to the 2024 Dividend Proposal; 4. Tanggapan Laporan Penugasan Pemerintah terkait Jargas dan Rencana Penugasan Khusus Jargas 2025; Response to Government Assignment Report for Gas Network and Special Gas Network Assignment Plan for 2025; 5. Tanggapan Hasil Penilaian dan Fairness Opinion KJPP terkait Rencana Transaksi Sewa Aset Jargas 2021- 2024; Response to Assessment Results and Fairness Opinion of Public Appraisal Service Firm (KJPP) regarding 2021 - 2024 Gas Network Asset Lease Transaction Plan; 6. Usulan Tantiem Tahun 2024 dan Remunerasi Tahun 2025 Direksi dan Dewan Komisaris (Komite NRGCG); Proposal of Tantiem for 2024 and Remuneration for 2025 for the Board of Directors and the Board of Commissioners (NRGCG Committee 7. Penetapan Pimpinan RUPST Tahun Buku 2024 dan RUPS Independen; dan Appointment of the Chair the AGMS for the 2024 Financial Year and the Independent GMS; and 8. Lain-lain. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
15 Mei 2025 Mei 15, 2025	1. *Update* Usulan Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan; Update on the Government's Special Assignment Proposal to the Company; 2. *Update* Pengadaan Kantor Akuntan Publik; Update on the Procurement of a Public Accounting Firm; 3. *Update* Proses Pemutakhiran Portal HC KBUMN; Update on Progress of the Human Capital Portal of the Ministry of SOEs; 4. *Update* Hal-hal Lain terkait RUPST TB 2024; dan Update on Other Matters Related to the AGMS for the 2024 Financial YEar; and 5. Lain-lain Others	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
25 Mei 2025 Mei 25, 2025	1. Kajian LCC atas Masa Tugas Komisaris PGN dan Hal-hal Yang Perlu Ditindaklanjuti; LCC Review of PGN Commissioners' Term of Office and Matters Requiring Follow-up; 2. Draft Surat Dekom ke Pemegang Saham terkait Penugasan Khusus kepada Perseroan (Agenda ke 6 RUPST TB 2024); Draft of the Board of Commissioners' Letter to Shareholders regarding Special Assignments for the Company (Agenda 6 of the AGMS for the 2024 Financial Year); 3. Pendapat KPMRPU atas Pemenuhan Persyaratan Dokumen FID Pengeboran Sumur UPA-17 WK Pangkah (KPMRPU); Opinion of PMRPU Committee on Fulfillment of FID Document Requirements for the UPA-17 Well Drilling in Pangkah Working Area (PMRPU Committee);	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
	4. Pendapat KPMRPU atas Penyampaian Besaran Batasan Kewenangan Persetujuan Investasi Direksi dan Dewan Komisaris PGN Berdasarkan Laporan Keuangan Teraudit Perseroan Tahun 2024 (KPMRPU); Opinion of PMRPU Committee on the Submission of the Extent of the Limitation of the Investment Approval Authority of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners Based on the Company's 2024 Audited Financial Statements (PMRPU Committee); 5. Tanggapan Laporan Keuangan Program Pendanaan PUMK PGN 2024 (Komite Audit dan Komite NRGCG); dan Response to the 2024 PGN Micro and Small Business Funding Program Financial Statements (Audit Committee and NRGCG Committee); and 6. Lain-lain Others							
27 Mei 2025 May 27, 2025	1. *Update* Hasil *Fact Findings* dari Komite Audit; Update on Fact Finding Results from the Audit Committee; 2. *Update* Persiapan RUPST TB 2024; dan Update on the 2024 Financial Year GMS Preparation; and 3. Lain-lain. Others	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
4 Juni 2025 June 4, 2025	1. Tanggapan atas Laporan KAP EY Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial Direksi dan KPI Individual Tahun Buku 2024 (Komite NRGCG); Response to EY Public Accounting Firm's Report on the Collegial and Individual KPI Performance Evaluation Results of the Board of Directors for the 2024 Financial Year (NRGCG Committee); 2. Pengaturan Tugas Anggota Komisaris; dan Division of Duties for Members of the Board of Commissioners; and 3. Lain-lain. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
19 Juni 2025 June 19, 2025	1. Tanggapan atas Laporan Internal Audit TW I Tahun 2025 (Komite Audit); Response to the Q1 2025 Internal Audit Report (Audit Committee); 2. *Update* atas Kualitas Pipa Jargas (Direktur Infrastruktur dan Teknologi); dan Update on Gas Network Pipeline Quality (Audit Committee); 3. Lain-lain. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
3 Juli 2025 July 3, 2025	1. Tanggapan atas Hasil Pengadaan Jasa Audit Umum (Eksternal/ Independen) Atas Laporan Keuangan, Jasa Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (Audit PSA 62), Audit Independen/ Eksternal Atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terkait Program TJSL, dan Jasa Audit Independen/ Eksternal Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan Dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial Direksi/ Korporat dan KPI Individual Direksi/ KPI Direktorat Tahun Buku 2025 (Komite Audit); Response to the Results of the Procurement of General Audit Services (External/ Independent) for Financial Statements, Audit Services for Compliance with Legislation and Internal Control (PSA 62 Audit), Independent/External Audit for Financial Statements of Micro and Small Business Funding Programs Related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Independent/External Audit Services for the Implementation of Agreed-Upon Procedures in Respect of the Report on the Performance Evaluation Results of the Collegial KPI of the Board of Directors/Corporate and the Individual KPI of the Board of Directors/Directorate KPI for the 2025 Financial Year (Audit Committee); 2. Review Laporan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial dan Individual Direksi Tahun Buku 2024 (Komite Audit); Review of the Agreed-Upon Procedures Report Based on the Results of the Collegial and Individual KPI Evaluation of the Board of Directors for the 2024 Financial Year (Audit Committee);	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
	3. Update Review Usulan – 3 Revisi RKAP Tahun 2025 (Semua Komite); Proposal Review Update – 3 Revisions to the 2025 RKAP (All Committees); 4. Tindak Lanjut Arahan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam Rapat KTKT PT Pertamina (Persero) tanggal 18 Juni 2025; dan Follow-Up on the Directives of the President Commissioner of PT Pertamina (Persero) at the Integrated Governance Meeting of PT Pertamina (Persero) on 18 June 2025; and 5. Lain-lain. Others							
10 Juli 2025 July 10, 2025	1. Penetapan PTH Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN; Determination of PTH of PGN's Director of Infrastructure and Technology; 2. Realisasi KPI Dewan Komisaris sampai dengan 30 Juni 2025; dan KPI Realization of the Board of Commissioners as of 30 June 2025; and 3. Lain-lain: Pengadaan Jasa KAP Others: Procurement of Public Accounting Firm Services	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
24 Juli 2025 July 24, 2025	1. Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan II 2025 dan Laporan Realisasi RKAP Triwulan II 2025; Response to Management Report for the Second Quarter of 2025 and RKAP Realization Report for the Second Quarter of 2025; 2. Penetapan Pimpinan RUPSLB Tahun 2025; dan Appointment of Chair of the 2025 EGMS; and 3. Lain-lain. Others.	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman*	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
30 Juli 2025 July 30, 2025	1. Rekomendasi Pengadaan Kantor Akuntan Publik atas Pekerjaan *Agreed-Upon Procedure* Peringkat Komposit Risiko Tahun Buku 2023, 2024 dan 2025 (Komite Audit); dan Recommendation for the Procurement of a Public Accounting Firm to Conduct Agreed-Upon Procedures on the Composite Risk Rating for the 2023, 2024, and 2025 Financial Years (Audit Committee); and 2. Lain-lain. Others.	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
7 Agustus 2025 August 7, 2025	1. Tanggapan atas Usulan – 4 Revisi RKAP Tahun 2025 PGN (Komite Audit dan Komite PMRPU); Response to Proposal – 4 Revisions to PGN's 2025 RKAP (Audit Committee and PMRPU Committee); 2. Tanggapan atas Usulan Contigency Plan PT PGN Tahun 2025 (Komite PMRPU); Response to PT PGN's 2025 Contingency Plan Proposal (PMRPU Committee); 3. Tanggapan atas Usulan – 1 RKAP Tahun 2026 PGN (Semua Komite); dan Response to Proposal – 1 Revision to PGN's 2026 RKAP (All Committees); and 4. Lain-lain. Others.	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
14 Agustus 2025 August 14, 2025	1. Masa Tugas AKNK Komite Audit dan Hasil Wawancara Calon AKNK Komite Audit (Komite Audit dan Komite NRGCG); dan Term of Duty of Non-Commissioner Members of the Audit Committee and Interview Results of Candidates for the Non-Commissioner Members of the Audit Committee (Audit Committee and NRGCG Committee); 2. Lain-lain. Others.	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

*Tidak menjabat sejak 25 Maret 2025
*No longer in office since March 25, 2025

Periode 27 Agustus – 31 Desember 2025 | August 27 – December 31, 2025 Period

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
1 September 2025 September 1, 2025	1. Pembagian Tugas Dewan Komisaris; Division of Duties of the Board of Commissioners; 2. Perpanjangan Masa Tugas AKNK Komite Audit (Catatan: Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris ke XXIV); Extension of the Term of Duty of Non-Commissioner Members of the Audit Committee (Note: Follow-Up on the 24th Meeting of the Board of Commissioners); 3. Tanggapan Atas Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN (Catatan: Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris ke XXIV); dan Response to Proposed Changes in PGN's Subsidiary Management (Note: Follow-Up on the 24th Meeting of the Board of Commissioners); and 4. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 September 2025 September 8, 2025	1. Tanggapan Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN; dan Response to Proposed Changes in PGN's Subsidiary Management; 2. Tanggapan Permohonan Persetujuan *Contigency Plan* PGN (KPMRPU); Response to PGN's Contingency Plan Approval Request (PMRPU Committee); 3. *Review* Laporan Internal Audit Triwulan II Tahun 2025 (KA); Review of Internal Audit Report for the SEcond Quarter of 2025 (Audit Committee); 4. *Review* Laporan PSA 62 Tahun 2024 (KA); Review of the 2024 PSA 64 Report (Audit Committee); 5. *Review* Hasil RUPST Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN (KNRGCG); dan Review of AGMS Resolutions of PGN's Subsidiaries and Affiliates (NRGCG Committee); and 6. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
18 September 2025 September 18, 2025	1. *Review* Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan II Tahun 2025 (KA); Review of Internal Audit Activity Report for the Second Quarter of 2025 (Audit Committee); 2. *Review* Laporan Audit PSA 62 Tahun 2024 (KA); Review of the 2024 PSA 62 Audit Report (Audit Committee); 3. *Review* Hasil RUPST Anak Perusahaan dan Afiliasi PT PGN Tbk (KNRGCG); Review of AGMS Resolutions of Subsidiaries and Affiliates of PT PGN Tbk (NRGCG Committee); 4. *Review* Usulan Revisi Annual Audit Plan Semester I Tahun 2025 Fungsi Internal Audit (KA); Review of Proposed Revisions to the Internal Audit Function's Annual Audit Plan for the First Semester of 2025 (Audit Committee); 5. *Review* Usulan Revisi Pedoman Kerja sama Pengembangan Bisnis (KNRGCG); Review of Proposed Revisions to the Manual on Business Development Cooperation (NRGCG Committee); 6. *Review* Usulan Draft KPI Direksi Individual Tahun 2025 (KNRGCG); Review of Proposed Draft of Individual KPI of the Board of Directors for 2025 (NRGCG Committee); 7. *Review* Usulan-2 RKAP 2026 (Semua Komite); Review of Proposal 2 to the 2026 RKAP (All Committees); 8. *Update* Realisasi KPI Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2025; dan Update on the 2025 KPI Realization of the Board of Commissioners and Committee of the Board of Commissioners ; and 9. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
2 Oktober 2025 October 2, 2025	1. *Review* Usulan Draft KPI Direksi Individual Tahun 2025 (KNRGCG); Review of the Proposed Draft of Individual KPI of the Board of Directors for 2025 (NRGCG Committee); 2. *Review* Tindak Lanjut Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (T JSL) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2024 (KNRGCG); dan Review of the Follow-Up on Social and Environmental Responsibility (TJSL) Report and Financial Statements on Micro and Small Business Funding (PUMK) Program for 2024 (NRGCG Committee); and 3. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Oktober 2025 October 9, 2025	1. *Update* Realisasi Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris TW III Tahun 2025; Update on the Q3 2025 Realization of the Key Performance Indicators of the Board of Commissioners; 2. Draft Usulan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2026; dan Draft of Proposed Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Commissioners for 2026; and 3. Lain-lain Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 Oktober 2025 October 14, 2025	1. Tanggapan Atas Permohonan Penunjukan Asesor Asesmen GCG oleh Dewan Komisaris (Komite NRGCG); Response to the Request for Assessor Appointment for GCG Assessment by the Board of Commissioners (NRGCG Committee); 2. *Update* Penelaahan Kinerja Anak Perusahaan PGN (AKNK KNRGCG); dan Update on Performance Review of PGN Subsidiaries (Non-Commissioner Committee Members of the NRGCG Committee); and 3. Lain-lain Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
24 Oktober 2025 October 24, 2025	1. *Review* Laporan Realisasi RKAP Triwulan III Tahun 2025 (Semua Komite); Review of RKAP Realization Report for the Third Quarter of 2025 (All Committees); 2. Tanggapan Usulan Revisi-2 RKAP 2025 (Semua Komite); Response to Proposed Revision-2 to the 2025 RKAP (All Committees); 3. *Update* Program TJSL (KNRGCG dan KA); dan TJSL Program Update (NRGCG Committee and Audit Committee); and 4. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 November 2025 November 11, 2025	1. *Review* Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN (KNRGCG); Review of Proposed Changes in PGN's Subsidiary Management (NRGCG Committee); 2. *Review* Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Dasar (BOD-1) Tahun 2025; Review of the Proposed Adjustment of the Basic Organizational Structure (BOD-1) for 2025; 3. *Review* Permohonan Informasi Strategic Issue, BOC dan Komite Audit Concern untuk Penyusunan Annual Audit Plan 2026 (Komite Audit); Review of Information Requests on Strategic Issues, BOC, and Audit Committee Concerns for the Formulation of the 2026 Annual Audit Plan (Audit Committee); 4. *Review* Laporan Hasil Audit Triwulan III Tahun 2025 (Komite Audit); dan Review of Audit Results Report for the Third Quarter of 2025 (Audit Committee); and 5. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 November 2025 November 14, 2025	1. *Review* Usulan Revisi-3 RKAP 2025 (Semua Komite); dan Review of Proposed Revision-3 to the 2025 RKAP (All Committees); and 2. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
20 November 2025 November 20, 2025	1. *Update* Persiapan BOD BOC Retret Terintegrasi Pertamina Group Tahun 2025 (Sekretaris Perusahaan); Update on the 2025 Pertamina Group Integrated BOD BOC Retreat Preparation (Corporate Secretary); 2. Mengikuti Secara *Online* Arahan oleh Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Paparan Umum RJPP 2026-2030 oleh Direksi PT Pertamina (Persero) dalam Acara Pembahasan Teknis Rancangan RJPP 2026 -2030; dan Virtual Attendance to Receive Directives of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) and General Presentation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2026-2030 by the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) during the Technical Discussion of the 2026-2030 RJPP Draft; and 3. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 November 2025 November 27, 2025	1. *Review* Usulan Persetujuan Amendemen Shareholder Loan (SHL) PT Saka Energi Indonesia Tahun 2025 (KA dan KNRGCG); Review of Proposed Approval of Amendments to the Shareholder Loan (SHL) of PT Saka Energi Indonesia for 2025 (Audit Committee and NRGCG Committee); 2. *Review* Laporan Kegiatan Internal Audit TW III Tahun 2025 (Komite Audit); Review of Internal Audit Activity Report for Q3 of 2025 (Audit Committee); 3. *Review* Usulan-3 dan Usulan-4 RKAP 2026 (Semua Komite); Review of Proposal 3 and Proposal 4 to the 2026 RKAP (All Committees); 4. Draft Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Tahun 2026 (Semua Komite); dan Draft of the Work Plan of the Board of Commissioners and the Work Plan of Committees for 2026 (All Committees); and 5. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardjanto	Conny Lolyta Rumondor	Edward Omar Sharif Hiariej	Rambe Kamarul Zaman	Thanon Aria Dewangga
5 Desember 2025 December 5, 2025	1. *Review* Usulan Transaksi Pengalihan Data WNTS Pemping antara PGN dan PLN EPI (KNRGCG dan KA); Review of the Proposed WNTS Pemping Data Transfer Transaction between PGN and PLN EPI (NRGCG Committee and Audit Committee); 2. *Review* Usulan Piagam Audit Internal (Audit Charter) Tahun 2025 (KA); Review of Proposed 2025 Internal Audit Charter (Audit Committee); 3. *Update* Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Tahun 2026 (Semua Komite); dan Update on the Work Plan of the Board of Commissioners and the Work Plan of Committees for 2026 (All Committees); and 4. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 Desember 2025 December 18, 2025	1. Mekanisme penyiapan bahan Rapat Gabungan; Mechanism for Joint Meeting Material Preparation; 2. Finalisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Tahun 2026; Finalization of the Work Plan of the Board of Commissioners and the Work Plan of Committees for 2026; 3. *Review* RJPP 2026-2030 (Semua Komite); Review of the Company's Long-Term Plan for 2026-2030 (All Committees); 4. Penetapan Pimpinan RUPSLB 2025; dan Appointment of Chair of the 2025 Extraordinary GMS; and 5. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 dan 29 Desember 2025 Desember 22 and 29, 2025	1. Masa Tugas Organ Dewan Komisaris PGN; dan Term of Duty of Organs of PGN's Board of Commissioners; and 2. Lain-lain. Others.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase Kehadiran Masing-masing Anggota Attendance Rate of Each Member		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners in Attendance	Direktur yang Hadir Directors in Attendance	Agenda Agenda
Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025 | January 1 – August 27, 2025 Period				
1.	22 Januari 2025 January 22, 2025	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Desember 2024; Management Report for December 2024 Period; 2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
2.	24 Februari 2025 January 24, 2025	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Januari 2025; Management Report for January 2025 Period; 2. *Draft* Laporan Keuangan *Audited* 2024; Draft of the 2024 Audited Financial Statements; 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
3.	20 Maret 2025 March 20, 2025	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Februari 2025; Management Report for February 2025 Period; 2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
4.	24 April 2025 April 24, 2025	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Maret 2025; Management Report for March 2025 Period; 2. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
5.	22 Mei 2025 May 22, 2025	• Amien Sunaryadi • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode April Tahun 2025; Management Report for April 2025 Period; 2. Usulan Keputusan RUPST Tahun Buku 2024; Proposal of the AGMS Resolution of the 2024 Financial Year; 3. Wacana Pembangunan Jargas di seluruh wilayah Batam; Discourse on Gas Network Development across all Batam regions; 4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
6.	26 Juni 2025 June 26, 2025	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Rachmat Hutama • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Mei Tahun 2025; Management Report for May 2025 Period; 2. *Update* Rencana Kegiatan Tim Konsolidasi PGN Group; Update on PGN Group Consolidation Team Activity Plan; 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
7.	23 Juli 2025 July 23, 2025	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Juni sekaligus Triwulan II Tahun 2025; Management Report for June 2025 and the Second Quarter of 2025; 2. *Update* Strategi dan Program Pembinaan Karyawan Mendukung RJPP 2025 – 2029; dan Update on Strategies and Employee Development Programs to Support the 2025 – 2029 RJPP; and 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners in Attendance	Direktur yang Hadir Directors in Attendance	Agenda Agenda
8.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Juli Tahun 2025; Management Report for July 2025 Period; 2. *Update* Rencana Pengembangan / Restrukturisasi Bisnis PT PGAS Solution; Update on PT PGAS Solution Business Development/ Restructuring Plan 3. *Update* Persiapan RUPSLB Tahun 2025; dan Update on Preparations for the 2025 EGMS; and 4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
Periode 27 Agustus – 31 Desember 2025 | August 27 – December 31, 2025 Period				
9.	25 September 2025 September 25, 2025	• Tony S.B Hoesodo • Rambe Kamarul Zaman • Conny Lolyta Rumondor • Widjono Hardjanto • Edward O.S Hiariej • Thanon Aria Dewangga	• Arief Kurnia Risdianto • Rachmat Hutama • Hery Murahmanta • Catur Dermawan • Aldiansyah Idham • Mirza Mahendra • Eri Surya Kelana	1. Laporan Manajemen PGN Periode Agustus Tahun 2025; PGN Management Report for August 2025 Period; 2. *Update* Kasus-kasus Hukum PGN dan Anak Perusahaan PGN; Update on Legal Cases of PGN and Its Subsidiaries; 3. *Update* Strategi Pencapaian RKAP 2025 dan KPI Korporat 2025; dan Update on Strategies to Achieve the 2025 RKAP and 2025 Corporate KPI; and 4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
10.	24 Oktober 2025 October 24, 2025	• Tony S.B Hoesodo • Rambe Kamarul Zaman • Conny Lolyta Rumondor • Widjono Hardjanto • Edward O.S Hiariej • Thanon Aria Dewangga	• Arief Kurnia Risdianto • Rachmat Hutama • Hery Murahmanta • Catur Dermawan • Aldiansyah Idham • Mirza Mahendra • Eri Surya Kelana	1. Laporan Manajemen PGN Periode September dan Triwulan III Tahun 2025; PGN Management Report for September 2025 and the Third Quarter of 2025; 2. Usulan-3 RKAP 2026 dan *Update* Tindak Lanjut Konsinyering Rancangan RKAP 2026 Pertamina (Persero); dan Proposal-3 to the 2026 RKAP and Update on Follow-Up Meeting for the 2026 RKAP Draft of Pertamina (Persero); and 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
11.	27 November 2025 November 27, 2025	• Tony S.B Hoesodo • Rambe Kamarul Zaman • Conny Lolyta Rumondor • Widjono Hardjanto • Edward O.S Hiariej • Thanon Aria Dewangga	• Arief Kurnia Risdianto • Rachmat Hutama • Hery Murahmanta • Catur Dermawan • Aldiansyah Idham • Mirza Mahendra • Eri Surya Kelana	1. Laporan Manajemen PGN Periode Oktober Tahun 2025; PGN Management Report for October 2025 Period; 2. *Update* Persiapan RUPSLB PGN Tahun 2025; Update on Preparations for PGN's 2025 EGMS; 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
12.	22 Desember 2025 December 22, 2025	• Tony S.B Hoesodo • Rambe Kamarul Zaman • Conny Lolyta Rumondor • Widjono Hardjanto • Edward O.S Hiariej • Thanon Aria Dewangga	• Arief Kurnia Risdianto • Rachmat Hutama • Hery Murahmanta • Catur Dermawan • Aldiansyah Idham • Mirza Mahendra • Eri Surya Kelana	1. Laporan Manajemen PGN Periode November Tahun 2025; PGN Management Report for November 2025 Period; 2. *Update* Persiapan RUPSLB dan Usulan Persetujuan Keputusan RUPSLB Tahun 2025; Update on Preparations for EGMS and Approval Request for the Resolutions of the 2025 EGMS; 3. Usulan RKAP Tahun 2026; Proposal for the 2026 RKAP; 4. Kalender Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2026; 2026 Activity Calendar of the Board of Commissioners; 5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Other matters that the Board of Directors needed to report to the Board of Commissioners.
Persentase Kehadiran Attendance Rate		100%	100%	

Keterangan: Bapak Luky Alfirman sudah tidak menjabat sejak 25 Maret 2025
Note: Luky Alfirman is no longer in office since March 25, 2025

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS
Attendance of the Board of Commissioners at GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran pada RUPST 28 Mei 2025 Attendance at AGMS on May 28, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	Kehadiran pada RUPSLB 2025 Attendance at EGMS on 2025			
				27 Agustus 2025 August 27, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	29 Desember 2025 December 29, 2025	Persentase(%) Percentage (%)
Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025 | January 1 – August 27, 2025 Period							
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	1	100	1	100	-	-
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	100	1	100	-	-
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	-	-	1	100	-	-
Luky Alfirman*	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	-
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	100	1	100	-	-
Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	100	1	100	-	-
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	1	100	1	100	1	100
Periode 27 Agustus 2025-sekarang | August 27, 2025 – Present Period							
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	1	100	1	100	1	100
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-
Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	1	100
Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	1	100
Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	1	100
Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	1	100

*Tidak menjabat sejak 25 Maret 2025
*No longer in office since March 25, 2025

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan independen. Untuk menjaga independensi, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, maupun pihak lain, termasuk BUMN terkait, yang berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada bagian ketiga, pasal 15 ayat (4). Berdasarkan peraturan tersebut, Komisaris Independen harus berasal dari luar Perseroan dan wajib memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Criteria for Independent Commissioners

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who carry out the supervisory function objectively and independently. To maintain independence, Independent Commissioners have no financial relations, management relations, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholders, or other parties, including relevant SOEs, that may influence independence in decision-making.

This provision aligns with Article 15 paragraph (4) in the third part of Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 on Manual for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. Based on the regulation, Independent Commissioners must come from outside the Company and must meet the independence requirements as stipulated in Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including:

1. Not working nor having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last six months;
2. Not owning any shares of the Company;
3. Not having any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the majority shareholders of the Company; and
4. Not having any business relations related to the business activities of the Company.

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen

Composition and Membership of Independent Commissioners



50%

Anggota Dewan Komisaris adalah Independen
Members of the Board of Commissioners are Independent

Terdapat perubahan komposisi Komisaris Independen selama tahun 2025, sebagai berikut:

1. Periode 1 Januari – 25 Maret 2025, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah tujuh orang dengan lima anggota Komisaris Independen.
2. Periode 26 Maret – 26 Agustus 2025, anggota Dewan Komisaris berjumlah enam orang dengan lima anggota Komisaris Independen.
3. Periode 27 Agustus – 31 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris berjumlah enam orang dengan tiga anggota Komisaris Independen.

Komisaris Independen PGN per 31 Desember 2025 dijabat oleh Tony Setia Boedi Hoesodo, Widjono Hardjanto, dan Conny Lolyta Rumondor.

Per 31 Desember 2025, jumlah Komisaris Independen PGN mencapai 50% dari seluruh anggota Dewan, atau telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

The following changes were made in the composition of Independent Commissioners in 2025:

1. From January 1 to March 25, 2025, the Company's Board of Commissioners consisted of seven members, five of whom were Independent Commissioners.
2. From March 26 to August 26, 2025, the Company's Board of Commissioners consisted of six members, five of whom were Independent Commissioners.
3. From August 27 to December 31, 2025, the Company's Board of Commissioners consisted of six members, three of whom were Independent Commissioners.

PGN's Independent Commissioners as of December 31, 2025 were Tony Setia Boedi Hoesodo, Widjono Hardjanto, and Conny Lolyta Rumondor.

As of December 31, 2025, PGN's Independent Commissioners represent 50% of the total board members, complying with the provision in Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which stipulates that every public company must have Independent Commissioners who represent a minimum of 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Jumlah Komisaris Independen PGN juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa paling sedikit 20% dari komposisi Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The number of PGN's Independent Commissioners has also adhered to the provision in Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 on Manual for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which states that in the composition of the Board of Commissioners, at least 20% are Independent Commissioners as stipulated in the decree of appointment.

Independence Statement of Independent Commissioners

All Independent Commissioners have met the criteria in accordance with applicable laws and regulations.

No.	Uraian Description	Tony Setia Boedi Hoesodo	Widjono Hardianto	Conny Lolyta Rumondor
Pernyataan Independensi/ Statement of Independence				
1	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir Not working nor having the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last six months	✓	✓	✓
2	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan Not directly or indirectly owning any shares of the Company	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Not having any affiliation with the Company, majority/controlling shareholders, or any members of the Board of Commissioners or the Board of Directors	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan Not directly or indirectly having any work/professional relationship with the Company	✓	✓	✓
Pernyataan Kepatuhan/ Statement of Compliance				
1	Memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai Piagam Dewan Komisaris dan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Meeting the requirements to become a member of the Board of Commissioners in accordance with the Charter of the Board of Commissioners and the provisions stated in Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies	✓	✓	✓

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ tata kelola yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Seluruh pelaksanaan tugas Direksi dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Perseroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial. Masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil putusan sesuai pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direktur, namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

The Board of Directors is a governance organ that has the authority and responsibility for managing the Company for the Company's best interests based on the purpose and objectives of the Company, as well as representing the Company inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS.

Every duty of the Board of Directors is carried out in good faith and with full responsibility. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally and collectively for the Company's losses if he/she is guilty or neglects to perform his/her duties in accordance with the provisions of laws and regulations.

The Board of Directors performs its duties and responsibilities collegially. Each Director may take actions and make decisions in accordance with the division of duties and authorities, but the implementation of duties by each Director remains a collective responsibility. All members of the Board of Directors, including the President Director, have equal status. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Directors.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang Direksi dapat diatur oleh RUPS. Namun dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi melakukan penetapan sendiri atas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi secara lebih rinci melalui Keputusan Direksi Nomor 085700.K/OT.00/PDO/2024 tanggal 24 Desember 2024.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITY OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The division of duties and authority of the Board of Directors may be determined by the GMS. However, in the event that the GMS does not stipulate it, the division of duties and authority of members of the Board of Directors is determined based on the decree of the Board of Directors. The Board of Directors stipulates on its own the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in further detail in Decree of the Board of Directors Number 085700.K/OT.00/PDO/2024 dated December 24, 2024.

Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

Information on the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is as follows:

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
1	Direktur Utama President Director	1. Pengelolaan relasi dan komunikasi dengan investor, pengelolaan strategi komunikasi korporat, pengelolaan relasi *stakeholder*, layanan dukungan BOD BOC, serta kegiatan CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Manage relations and communications with investors, corporate communication strategy management, support services for the BOD and BOC, and CSR activities in accordance with applicable laws and regulations; 2. Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak, penanganan kasus litigasi dan non liligasi di lingkungan Perusahaan, serta memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG); Ensure compliance with laws and regulations, draft contracts, handle litigation and non-litigation cases within the Company, and ensure the implementation of good corporate governance (GCG); 3. Pengelolaan kegiatan audit Perusahaan berikut tindak lanjutnya. serta memberikan konsultasi fungsi pengawasan dan pendampingan audit eksternal; Manage the Company's audit activities and the follow-up actions and provide consultation for supervisory function and external audit assistance; 4. Pengelolaan penyusunan dan implementasi kebijakan, pedoman, dan program HSSE, berikut *monitoring*-nya; Manage and monitor the formulation and implementation of HSSE policies, manuals, and programs; 5. Pengelolaan kegiatan advokasi regulasi serta isu kritikal Perusahaan kepada *stakeholder* strategis Manage advocacy activities related to regulations and critical Company issues directed at strategic stakeholders.
2	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	1. Pengelolaan pengembangan bisnis baru dan portofolio hilir pemanfaatan gas bumi; pengelolaan dan pengembangan inkubasi bisnis; optimalisasi perencanaan infrastruktur *midstream* Subholding Gas, termasuk infrastruktur antar Wilayah Jaringan Distribusi serta Wilayah Niaga Tertentu (WJD/WNT); pengelolaan Rencana Umum Penyediaan Gas (RUPG) Subholding Gas, serta optimalisasi rantai pasokan untuk perencanaan sistem infrastruktur terintegrasi Subholding Gas; Manage new business development and portfolio of downstream natural gas utilization; manage and develop business incubation; optimize Gas Subholding midstream infrastructure planning, including infrastructure connecting Distribution Network Regions and Specified Trade Areas (WJD/WNT); manage the Gas Supply General Plan (RUPG) of Gas Subholding; and optimize supply chain for the integrated infrastructure planning of Gas Subholding; 2. Pengelolaan perencanaan dan *roadmap* strategis Perusahaan, pengelolaan Transformasi dan proses bisnis Perusahaan; pengelolaan program strategis Perusahaan; pengelolaan program *sustainability* Perusahaan (ESG); Manage the Company's strategic planning and roadmap, manage the Company's Transformation and business process; manage the Company's strategic programs; and manage the Company's sustainability program (ESG); 3. Pengelolaan KPI Korporat & Direktorat; *monitoring* dan evaluasi kinerja investasi untuk Subholding Gas Group (secara fisik dan keuangan); Penyusunan kebijakan maturitas investasi, serta koordinator investasi & *office* proses persetujuan investasi; Manage Corporate & Directorate KPIs; monitor and evaluate investment performance for Gas Subholding Group (physically and financially); prepare investment maturity policies; investment coordinators, and investment approval process office; 4. Pengelolaan kegiatan portofolio Perusahaan, *strategic partnership*, mengoordinasikan proses kemitraan (termasuk M&A) Subholding Gas, menyusun pengikatan kemitraan untuk bisnis yang diinisiasi oleh Business Development. Manage the Company's portfolio activities, manage strategic partnerships, coordinate partnership processes (including M&A) of Gas Subholding, and draft partnership agreements for businesses initiated by Business Development.
3	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	1. Pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Engineering dan Technology, serta standar dan prosedur pelaksanaan proyek infrastruktur; Manage policies and implement activities related to Engineering and Technology, as well as ensure standards and procedures for infrastructure project implementation; 2. Pengelolaan eksekusi proyek pengembangan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan non pipa), melakukan *monitoring progress* fisik atas kegiatan investasi Subholding Gas, serta melakukan *gap analysis* kinerja investasi dan *recovery plan*-nya; Manage the execution of natural gas (pipeline and non-pipeline network) infrastructure development projects, monitor the physical progress of Gas Subholding investment activities, and conduct gap analysis of investment performance and the recovery plan;

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
		3. Pengelolaan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga (Jargas RT), *dashboarding* konstruksi proyek jargas RT; serta strategi optimasi aset Jargas RT; Manage the acceleration of household gas network infrastructure development, manage the household gas network project construction dashboard, and manage household gas network asset optimization strategies; 4. Pengelolaan sasaran kinerja, standar, kebijakan kegiatan manajemen aset jaringan gas bumi (pipa dan non pipa), dan kegiatan *operation and maintenance* serta integritas infrastruktur gas bumi (pipa dan non pipa) sesuai *process safety and asset integrity management system*. Manage performance targets, standards, and policies related to asset management of natural gas network (pipeline and non-pipeline), manage operation and maintenance activities, and ensure the integrity of natural gas infrastructure (pipeline and non-pipeline) according to the process safety and asset integrity management system.
4	Direktur Komersial Director of Commercial	1. Pengelolaan pasokan gas bumi (pipa dan non pipa), serta kegiatan Trading LNG PGN, termasuk kegiatan transportasi LNG; Manage natural gas supply (pipeline and non-pipeline) as well as PGN's LNG Trading activities, including LNG transportation activities; 2. Penguatan integrasi dalam kegiatan optimasi penyaluran gas ke pelanggan, serta pengelolaan keseimbangan pasok dan permintaan pelanggan; Strengthen integration in gas distribution optimization activities to customers, as well as manage the balance between supply and customer demand; 3. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan program kegiatan niaga (*marketing*, *sales*, dan *customer management*); melakukan market research dan *canvasing* di wilayah baru; agregasi pengelolaan bisnis niaga gas bumi di Subholding Gas Group; melakukan penyusunan *roadmap* pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (Jargas) dan mengoordinasikan pengembangan Jargas; mengonsolidasikan realisasi pencapaian (kinerja) niaga gas bumi; serta kegiatan niaga untuk pelanggan korporat; Manage strategies, policies and programs for trade activities (marketing, sales, and customer management); conduct market research and canvassing in new regions; aggregate natural gas trade business management in Gas Subholding Group; formulate a roadmap for household natural gas network development and coordinate natural gas development; consolidate the realizations of natural gas trade achievements (performance); and manage trade activities for corporate customers; 4. Pengelolaan kegiatan niaga di regional; melakukan pengembangan bisnis gas bumi di wilayah eksisting; melakukan pengelolaan anggaran biaya, relasi dengan *stakeholder*, layanan umum, dan berperan sebagai *Point of Contact* di Regional dan Area, serta memberikan *support*dalam kegiatan penanggulangan keadaan darurat. Manage trade activities at the regional level; carry out natural gas business development in existing regions; manage budgets, relations with stakeholders, and general services; act as the Regional and Area Point of Contact; and provide support for emergency response activities.
5	Direktur Keuangan Director of Finance	1. Pengelolaan kebijakan, strategi, dan standar untuk penyusunan RKAP, pengendalian RKAP serta *management analytics* Subholding Gas Group, Pengelolaan *cost, revenue analytics and reporting, investment tracking* dan *revenue management* Subholding Gas Group; Manage policies, strategies, and standards for RKAP formulation, RKAP control, and management analytics of Gas Subholding Group; manage cost, revenue analytics and reporting, investment tracking, and revenue management of Gas Subholding Group; 2. Pengelolaan kebijakan, sistem dan prosedur *corporate finance*, pendanaan, *trade finance* serta asuransi aset di Subholding Gas Group, Pengelolaan *cash flow* PGN, serta Pengelolaan kegiatan *revenue assurance* atas kegiatan usaha gas PGN dan pengelolaan piutang usaha PGN; Manage policies, systems, and procedures for corporate finance, funding, trade finance, and asset insurance at Gas Subholding Group; Manage PGN's cash flow; as well as manage revenue assurance activities for PGN's gas business activities and manage PGN's trade receivables; 3. Pengelolaan kebijakan, strategi, perencanaan, pengendalian akuntansi dan kepatuhan perpajakan, perancangan dan *monitoring* implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) di PGN, serta Pengelolaan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; Manage policies, strategies, planning, and control of accounting and tax compliance, plan and monitor the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at PGN, and manage the execution of financial reporting in accordance with the accounting standards applicable in Indonesia.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
6	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	1. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan bidang Human Capital dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan budaya perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi; Manage strategies, policies, and implementation in the Human Capital field to develop Human Resources (HR) according to the corporate culture in an effective and efficient manner to achieve the purposes of the organization; 2. Pengelolaan pengembangan dan implementasi layanan Information and Communication Technology (ICT) Perusahaan terkait dengan teknologi informasi; infrastruktur ICT dan penyelarasan strategi bisnis dalam lingkup ICT dengan Holding Migas; Manage the development and implementation of the Company's Information and Communication Technology services, manage ICT infrastructure, and align business strategies within the scope of ICT with the Oil and Gas Holding; 3. Pengelolaan kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa Perusahaan proyek infrastruktur gas bumi dan non keproyekan, serta pengelolaan penggunaan komponen dalam negeri; Manage policies and strategies of the Company's goods/services procurement for natural gas infrastructure project and non-project, and manage the use of local components; 4. Pengelolaan aset non jaringan, pengelolaan penggunaan lahan, pengelolaan fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan layanan umum Subholding Gas. Manage non-network assets, land use, supporting facilities for operational activities, and general services of Gas Subholding;
7	Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	1. Pengelolaan strategi manajemen risiko dan melaksanakan penerapan tata kelola manajemen risiko secara terintegrasi; Manage risk management strategies and implement integrated risk management governance; 2. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan operasional Perusahaan, pengelolaan pengendalian internal dalam mendukung manajemen risiko, dan sistem manajemen keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management System/BCMS); Manage risks of the Company's operational activities, internal control to support risk management, and Business Continuity Management System (BCMS); 3. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan investasi Perusahaan serta pengelolaan risiko atas pengembangan bisnis dan kerja sama dengan pihak lain. Manage risks of the Company's investment activities as well as risks of business development and cooperation with other parties.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2026, terdapat perubahan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi melalui Keputusan Direksi Nomor 000500.K/OT.00/PDO/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Struktur Organisasi BOD-1 PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Effective from January 1, 2026, there were changes in the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors based on Decree of the Board of Directors Number Number 000500.K/OT.00/PDO/2026 dated January 7, 2026 on the BOD-1 Organizational Structure of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
1	Direktur Utama President Director	1. Pengelolaan strategi advokasi regulasi dan isu bisnis strategis Perusahaan terkait regulasi tata kelola gas bumi dan LNG, strategi *stakeholder management*, strategi komunikasi korporat, layanan dukungan korporat, serta kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Manage strategies for regulatory advocacy and the Company's strategic business issues related to natural gas and LNG governance regulations, stakeholder management strategies, corporate communication strategies, corporate support services, and Corporate Social Responsibility (CSR) activities in accordance with applicable laws and regulations; 2. Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak, penanganan kasus litigasi dan non litigasi di lingkungan Perusahaan, serta memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG); Ensure compliance with laws and regulations, draft contracts, handle litigation and non-litigation cases within the Company, and ensure the implementation of good corporate governance (GCG); 3. Pengelolaan kegiatan audit Perusahaan berikut tindak lanjutnya. serta memberikan konsultasi fungsi pengawasan dan pendampingan audit eksternal; Manage the Company's audit activities and the follow-up actions and provide consultation for supervisory function and external audit assistance; 4. Pengelolaan penyusunan dan implementasi kebijakan, pedoman, dan program HSSE, berikut proses *monitoring*. Manage and monitor the formulation and implementation of HSSE policies, manuals, and programs.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
2	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	1. Pengelolaan pengembangan bisnis baru dan portofolio hilir pemanfaatan gas bumi; pengelolaan dan pengembangan inkubasi bisnis; optimalisasi perencanaan infrastruktur *midstream* SH Gas, termasuk infrastruktur antar Wilayah Jaringan Distribusi serta Wilayah Niaga Tertentu (WJD/WNT); pengelolaan Rencana Umum Penyediaan Gas (RUPG) Subholding Gas, serta optimalisasi rantai pasokan untuk perencanaan sistem infrastruktur terintegrasi Subholding Gas; Manage new business development and portfolio of downstream natural gas utilization; manage and develop business incubation; optimize Gas Subholding midstream infrastructure planning, including infrastructure connecting Distribution Network Regions and Specified Trade Areas (WJD/WNT); manage the Gas Supply General Plan (RUPG) of Gas Subholding; and optimize supply chain for the integrated infrastructure planning of Gas Subholding; 2. Pengelolaan perencanaan dan *roadmap* strategis Perusahaan, pengelolaan Transformasi dan proses bisnis Perusahaan; pengelolaan program strategis Perusahaan; pengelolaan program *sustainability* Perusahaan (ESG); Manage the Company's strategic planning and roadmap, manage the Company's Transformation and business process; manage the Company's strategic programs; and manage the Company's sustainability program (ESG); 3. Pengelolaan KPI Korporat & Direktorat; *monitoring* dan evaluasi kinerja investasi untuk Subholding Gas Group (secara fisik dan keuangan); Penyusunan kebijakan maturitas investasi, serta koordinator investasi & *office* proses persetujuan investasi; Manage Corporate & Directorate KPIs; monitor and evaluate investment performance for Gas Subholding Group (physically and financially); prepare investment maturity policies; investment coordinators, and investment approval process office; 4. Pengelolaan kegiatan portofolio Perusahaan, *strategic partnership*, mengoordinasikan proses kemitraan (termasuk M&A) Subholding Gas, menyusun pengikatan kemitraan untuk bisnis yang diinisiasi oleh Business Development. Manage the Company's portfolio activities, manage strategic partnerships, coordinate partnership processes (including M&A) of Gas Subholding, and draft partnership agreements for businesses initiated by Business Development.
3	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	1. Pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Engineering dan Technology, serta standar dan prosedur pelaksanaan proyek infrastruktur; Manage policies and implement activities related to Engineering and Technology, as well as ensure standards and procedures for infrastructure project implementation; 2. Pengelolaan eksekusi pr oyek pengembangan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan non pipa), melakukan *monitoring progress* fisik atas kegiatan investasi Subholding Gas, serta melakukan *gap analysis* kinerja investasi dan *recovery plan*-nya; Manage the execution of natural gas (pipeline and non-pipeline network) infrastructure development projects, monitor the physical progress of Gas Subholding investment activities, and conduct gap analysis of investment performance and the recovery plan; 3. Pengelolaan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga (Jargas RT), *dashboarding* konstruksi proyek jargas RT; serta strategi optimasi aset Jargas RT; Manage the acceleration of household gas network infrastructure development, manage the household gas network project construction dashboard, and manage household gas network asset optimization strategies; 4. Pengelolaan sasaran kinerja, standar, kebijakan kegiatan manajemen aset jaringan gas bumi (pipa dan non pipa), dan kegiatan *operation and maintenance* serta integritas infrastruktur gas bumi (pipa dan non pipa) sesuai *process safety and asset integrity management system*. Manage performance targets, standards, and policies related to asset management of natural gas network (pipeline and non-pipeline), manage operation and maintenance activities, and ensure the integrity of natural gas infrastructure (pipeline and non-pipeline) according to the process safety and asset integrity management system.
4	Direktur Komersial Director of Commercial	1. Pengelolaan pasokan gas bumi (pipa dan non pipa), serta kegiatan Trading LNG PGN, termasuk kegiatan transportasi LNG; Manage natural gas supply (pipeline and non-pipeline) as well as PGN's LNG Trading activities, including LNG transportation activities; 2. Penguatan integrasi dalam kegiatan optimasi penyaluran gas ke pelanggan, serta pengelolaan keseimbangan pasok dan permintaan pelanggan; Strengthen integration in gas distribution optimization activities to customers, as well as manage the balance between supply and customer demand; 3. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan program kegiatan niaga (*marketing, sales,* dan *customer management*); melakukan *market research* dan *canvasing* di wilayah baru; agregasi pengelolaan bisnis niaga gas bumi di Subholding Gas Group; melakukan penyusunan *roadmap* pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (Jargas) dan mengoordinasikan pengembangan Jargas; mengonsolidasikan realisasi pencapaian (kinerja) niaga gas bumi; serta kegiatan niaga untuk pelanggan korporat; Manage strategies, policies, and programs for trade activities (marketing, sales, and customer management); conduct market research and canvassing in new regions; aggregate natural gas trade business management in Gas Subholding Group; formulate a roadmap for household natural gas network development and coordinate natural gas development; consolidate the realizations of natural gas trade achievements (performance); and manage trade activities for corporate customers;

No.	Direktorat Directorate	Fungsi Functions
		4. Pengelolaan kegiatan niaga di regional; melakukan pengembangan bisnis gas bumi di wilayah eksisting; melakukan pengelolaan anggaran biaya, relasi dengan *stakeholder*, layanan umum, dan berperan sebagai *Point of Contact* di Regional dan Area, serta memberikan *support* dalam kegiatan penanggulangan keadaan darurat. Manage trade activities at the regional level; carry out natural gas business development in existing regions; manage budgets, relations with stakeholders, and general services; act as the Regional and Area Point of Contact at the Regional and Area levels; and provide support for emergency response activities.
5	Direktur Keuangan Director of Finance	1. Pengelolaan kebijakan, strategi, dan standar untuk penyusunan RKAP, pengendalian RKAP serta *management analytics* Subholding Gas Group, Pengelolaan *cost, revenue analytics and reporting, financial modeling* RJPP, kajian dampak keuangan aksi korporasi dan revenue management Subholding Gas Group; Manage policies, strategies, and standards for RKAP formulation, RKAP control, and management analytics of Gas Subholding Group; manage cost, revenue analytics and reporting, RJPP financial modeling, review of financial impact of corporate actions, and revenue management of Gas Subholding Group; 2. Pengelolaan kebijakan, sistem dan prosedur *corporate finance*, pendanaan, *trade finance* serta asuransi aset di Subholding Gas Group, Pengelolaan *cash flow* PGN, serta Pengelolaan kegiatan *revenue assurance* atas kegiatan usaha gas PGN dan pengelolaan piutang usaha PGN; Manage policies, systems, and procedures for corporate finance, funding, trade finance, and asset insurance at Gas Subholding Group; Manage PGN's cash flow; as well as manage revenue assurance activities for PGN's gas business activities and manage PGN's trade receivables; 3. Pengelolaan kebijakan, strategi, perencanaan, pengendalian akuntansi dan kepatuhan perpajakan, perancangan dan *monitoring* implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) di PGN, serta Pengelolaan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; Manage policies, strategies, planning, and control of accounting and tax compliance, plan and monitor the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at PGN, and manage the execution of financial reporting in accordance with the accounting standards applicable in Indonesia; 4. Pengelolaan relasi dan komunikasi dengan investor. Manage relations and communications with investors.
6	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of Human Resources and Business Support	1. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan bidang Human Capital dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan budaya perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi; Manage strategies, policies, and implementation in the Human Capital field to develop Human Resources (HR) according to the corporate culture in an effective and efficient manner to achieve the purposes of the organization; 2. Pengelolaan pengembangan dan implementasi layanan Information and Communication Technology (ICT) Perusahaan terkait dengan teknologi informasi; infrastruktur ICT dan penyelarasan strategi bisnis dalam lingkup ICT dengan Holding Migas; Manage the development and implementation of the Company's Information and Communication Technology services, manage ICT infrastructure, and align business strategies within the scope of ICT with the Oil and Gas Holding; 3. Pengelolaan kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa Perusahaan proyek infrastruktur gas bumi dan non keproyekan, serta pengelolaan penggunaan komponen dalam negeri; Manage policies and strategies of the Company's goods/services procurement for natural gas infrastructure project and non-project, and manage the use of local components; 4. Pengelolaan aset non jaringan, pengelolaan penggunaan lahan, pengelolaan fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan layanan umum Subholding Gas. Manage non-network assets, land use, supporting facilities for operational activities, and general services of Gas Subholding;
7	Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	1. Pengelolaan strategi manajemen risiko dan melaksanakan penerapan tata kelola manajemen risiko secara terintegrasi; Manage risk management strategies and implement integrated risk management governance; 2. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan operasional Perusahaan, pengelolaan pengendalian internal dalam mendukung manajemen risiko, dan sistem manajemen keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management System/BCMS); Manage risks of the Company's operational activities, internal control to support risk management, and Business Continuity Management System (BCMS); 3. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan investasi Perusahaan serta pengelolaan risiko atas pengembangan bisnis dan kerja sama dengan pihak lain. Manage risks of the Company's investment activities as well as risks of business development and cooperation with other parties.

Tanggung Jawab atas Pengelolaan Risiko ESG

Direksi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas risiko-risiko terkait dengan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang dapat berdampak pada risiko bisnis korporasi yang juga menjadi bagian dari KPI Direksi.

Dalam melakukan pengawasan atas risiko-risiko ESG tersebut, Direksi membentuk Komite Keberlanjutan yang diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direksi lainnya.

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pertama kali disusun pada tahun 2006, *Board Manual* PGN terus diperbarui mengikuti perkembangan Perusahaan dengan perubahan terakhir pada 2025.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* PGN diatur secara khusus dalam Bab II yang mencakup:

1. Tugas Pokok Direksi;
2. Batasan Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas-tugas Direksi;
4. Hak dan Wewenang Direksi;
5. Pendelegasian Wewenang;
6. Independensi dan Etika Jabatan Direksi;
7. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan;
8. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
9. Lowong Jabatan Direksi;
10. Rangkap Jabatan;
11. Rapat Direksi;
12. Corporate Secretary;
13. Internal Audit;
14. Manajemen Risiko;
15. Whistleblowing System dan Gratifikasi;
16. Evaluasi Kinerja Direksi
17. Kinerja Perseroan; dan
18. Waktu Kerja Direksi

Board manual Direksi secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Responsibility for ESG Risk Management

The Board of Directors is also responsible for overseeing risks related to Environment, Social, Governance (ESG) aspects that may affect the corporate business risks and are also incorporated into the Board of Director's KPI.

In carrying out oversight of the ESG risks, the Board of Directors established a Committee of Sustainability, chaired by the President Director and compromising other members of the Board of Directors.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) constitute a set of procedures on relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Initially prepared in 2006, PGN's Board Manual has been regularly updated aligned with the Company's development, with the most recent update made in 2025.

The Board of Directors Work Guidelines and Code of Conduct in PGN' Board Manual are specifically regulated in Chapter II, which include:

1. Main Duties of the Board of Directors;
2. Limitations of Responsibilities of the Board of Directors;
3. Duties of the Board of Directors;
4. Rights and Authority of the Board of Directors;
5. Delegation of Authority;
6. Independence and Ethics of the Board of Directors;
7. Determination of Policies on Company Management;
8. Division of Duties and Authority of Members of the Board of Directors;
9. Vacant Position of the Board of Directors;
10. Concurrent Position;
11. Meeting of the Board of Directors;
12. Corporate Secretary;
13. Internal Audit;
14. Risk Management;
15. Whistleblowing System and Gratification;
16. Performance Evaluation of the Board of Directors;
17. Corporate Performance;
18. Work Hour of the Board of Directors

The complete Board Manual of the Board of Directors can be accessed on PGN's website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar PGN yang dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021, seluruh anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
5. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar PGN.

KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada *Board Manual*, Perseroan menetapkan kebijakan yang melarang anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerima pinjaman dari Perseroan.

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to Article 11 paragraph (28) of the Article of Association of PGN stipulated in Deed Number 28 dated May 11, 2021, all members of the Board of Directors are prohibited from holding the following concurrent positions:

1. member of the Board of Directors at SOEs, Regional-Owned Enterprises (ROEs), Private-Owned Enterprises;
2. member of the Board of Commissioners and/or the Supervisory Board at SOEs;
3. other structural and functional positions at central and/or regional government institution/agency;
4. Management of political party, member of the House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the Regional People's Representatives Council (DPRD) Level I and II and/or regional head/deputy regional head;
5. candidate/member of the House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the Regional People's Representatives Council (DPRD) Level I and II or candidate regional head/deputy regional head;
6. fother positions that may cause a conflict of interest; and/or
7. other positions according to the provisions of the applicable laws and regulations.

Throughout 2025, no members of the Board of Directors held concurrent positions, as stated in PGN's Articles of Association.

PROHIBITION POLICY OF GRANTING LOANS TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Adhering to the Board Manual, the Company enforces a policy that prohibits members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from obtaining any form of loan from the Company.

RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI

MEETINGS AND DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

73 Kali | Times

Rapat Direksi di Tahun 2025
The Board of Directors' Meetings in 2025

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang satu kali setiap bulan, dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (rapat gabungan) secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 73 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Based on FSA Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, it is required to hold regular Board of Directors meetings at least one time every month and regular joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least one time every four months. Throughout 2025, the Board of Directors convened 73 meetings, with the following details:

Rapat Internal Direksi
Board of Directors Internal Meeting

Periode 1 Januari - 27 Agustus 2025 | Period January 1 - August 27, 2025

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
6 Januari 2025 January 6, 2025	1. Permohonan Persetujuan Penawaran Harga Gas untuk Proses Pemilihan Langsung Gas Akasia Bagus Zona 7 PT Pertamina EP Request for Approval of Gas Price Offer for the Direct Selection Process of Akasia Bagus Gas Zone 7 PT Pertamina EP 2. Pembahasan Hasil Konsultansi Penyusunan *Roadmap and Business Plan for Ammonia and CO_2 Business* Discussion on the Results of Consultancy for the Preparation of the Roadmap and Business Plan for Ammonia and CO_2 Business in PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 Januari 2025 January 13, 2025	1. *Update Issue* (Kinerja HSSE Tahun 2024, Rencana Kegiatan Bulan K3 SH Gas Tahun 2025) Update on Issues (HSSE Performance in 2024, Activity Plan for SH Gas K3 Month in 2025) 2. Permohonan Izin Prinsip atas Keberminatan SHG dalam Pengambilalihan Saham VICO pada PT Badak NGL ("Badak") Request for Principal Approval of SHG's Interest in Acquiring VICO Shares in PT Badak NGL ("Badak")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
	3. Penandatanganan Perjanjian Regasifikasi LNG antara PGN-PAG Signing of LNG Regasification Agreement between PGN and PAG 4. Rencana Penandatanganan Perjanjian Induk Pengangkutan LNG antara PGN dengan PT PIS Planned Signing of Master Agreement for LNG Transportation between PGN and PT PIS 5. Permohonan Persetujuan Direksi atas rencana menyampaikan *Corporate Guidance* dan pelaksanaan *Analyst Briefing* 2025 Request for Board of Directors' Approval on the Plan to Deliver Corporate Guidance and Conduct the 2025 Analyst Briefing.							
20 Januari 2025 January 20, 2025	1. Laporan Kinerja Desember 2024 Performance Report for December 2024 Permohonan Persetujuan Revisi SK *Hurdle* Rate SHG Request for Approval of the Revision to SHG Hurdle Rate Decree 2. Penandatanganan Perjanjian Master FOB LNG Sale and Purchase Agreement antara Tangguh PSC dan PGN *Contractor Parties* dan PGN Signing of the Master FOB LNG Sale and Purchase Agreement between Tangguh PSC Contractor Parties and PGN *3. Update* Keikutsertaan PGN dalam Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Kota Batam Update on PGN's Participation in the Tender for Batam City Distribution Network Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 Januari 2025 January 22, 2025	1. Finalisasi dan Penandatanganan Notulen *Steering Committee Meeting* – Skema Sewa Jargas periode 2021-2024 dan Pengalihan Jargas Pertamina Ex-APBN ke PGN Tahun 2025 Finalization and Signing of the Minutes of the Steering Committee Meeting – Jargas Lease Scheme for the 2021–2024 Period and Transfer of Pertamina Ex-APBN Jargas to PGN in 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 Februari 2025 February 3, 2025	1. Permohonan Persetujuan Pembelian Pasokan Gas EMP Bentu Request for Approval of Gas Supply Purchase from EMP Bentu. 2. *Lesson Learned* 2024 – *Dry Run Retreat* Lesson Learned 2024 – Dry Run Retreat. 3. Tindaklanjut *Letter of Intent* atas WK Muriah Follow-up on the Letter of Intent regarding the Muriah Working Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
10 Februari 2025 February 10, 2025	1. Pembahasan Aspek HCM Discussion on Human Capital Management (HCM) Aspects. 2. Persetujuan Dokumen Penawaran PGN dalam Lelang WJD Kota Batam Approval of PGN's Bid Documents for the Tender of Batam City Distribution Network Area 3. Update Tindak Lanjut Pasca Kepmen ESDM terkait Pencabutan Penugasan Pipa WNTS – Pemping kepada PGN Update on Follow-up Actions after the Minister of Energy and Mineral Resources Decree regarding the Revocation of the WNTS–Pemping Pipeline Assignment to PGN. 4. Revisi FID atas Investasi Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack WK Muara Bakau PT Saka Energi Indonesia. Revision of FID for the Drilling Investment of JNE-07 Sidetrack Well in Muara Bakau Working Area by PT Saka Energi Indonesia. 5. Hasil Pengadaan Jasa Pemeringkat Kredit untuk TKP TB 2024 Results of Credit Rating Service Procurement for TKP TB 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Februari 2025 February 17, 2025	1. *Update* Aspek HSSE Update on HSSE Aspects 2. *Update* Rencana Pelaksanaan RUPST PGN Tahun Buku 2024 Update on the Implementation Plan for PGN's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2024 3. Laporan Pelaksanaan HGBT 2020-2024 dan Rencana Penyaluran HGBT 2025 Report on the Implementation of HGBT 2020–2024 and the Plan for HGBT Distribution in 2025 4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PGN dan PLN EPI tentang *Swap* LNG Signing of a Joint Agreement between PGN and PLN EPI on LNG Swap 5. *Impairment* SHL KJG Impairment of SHL KJG 6. Laporan Manajemen Januari 2025 Management Report for January 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 Februari 2025 February 19, 2025	1. *Update* Kasus Gunvor Update Regarding the Gunvor Case	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Februari 2025 February 24, 2025	1. Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 kepada OJK dan BEI Submission of the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024 to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
	2. Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Usulan Revisi RJPP PGN 2025-2029 Suplemen 2034 Request for Approval from PGN's Board of Directors on the Proposed Revision of PGN's Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2025–2029 Supplement 2034. 3. Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Usulan Rencana Induk untuk Pengembangan Jargas di Kawasan Permukiman Request for PGN Board of Directors' Approval on the Proposed Masterplan for Jargas Development in Residential Areas 4. Permohonan Izin Prinsip Pelaksanaan Negosiasi dan Penandatanganan HoA Jual Beli LNG PGN-NES Request for Principal Approval for the Implementation of Negotiation and Signing of LNG Sale and Purchase Heads of Agreement (HoA) between PGN and NES 5. Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Perpanjangan Alokasi Pasokan PGE WK B dan Rencana Pasokan EMP Gebang Request for PGN Board of Directors' Approval for the Extension of PGE WK B Supply Allocation and EMP Gebang Supply Plan							
3 Maret 2025 March 3, 2025	1. Pengelolaan Jaminan Pembayaran Pelanggan Tahun 2025 Management of Customer Payment Guarantees for 2025 2. Usulan Implementasi HGBT sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tanggal 26 Februari 2025 kepada Penerima di 7 Sektor Industri Proposal for the Implementation of HGBT in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 76.K/MG.01/MEM.M/2025 dated February 26, 2025 for Recipients in 7 Industrial Sectors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Maret 2025 March 6, 2025	1. Ketentuan Penyediaan Jaminan Pembayaran Pelanggan Tahun 2025 Provisions for Customer Payment Guarantee in 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Maret 2025 March 10, 2025	1. *Update Issue* (Kinerja HSSE YTD Februari 2025, Penyampaian Target dan Komitmen HSSE Tahun 2025) Update on Key Issue (HSSE Performance YTD February 2025, Submission of the 2025 HSSE Targets and Commitments) 2. Rencana Pembelian Kargo LNG April 2025 dari Bontang Plan for LNG Cargo Purchase in April 2025 from Bontang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
	3. Usulan Amandemen PJB LNG Kayan untuk Penambahan Harga Premium pada periode 2025 Proposal for Amendment of LNG Kayan Sales and Purchase Agreement (SPA) to Include Premium Price during the 2025 Period 4. Pemaparan Kajian Restrukturisasi PT Nusantara Regas Presentation on the Restructuring Study of PT Nusantara Regas							
11 Maret 2025 March 11, 2025	1. Usulan RKAP 2025 PGN Proposal for the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PGN 2. Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Usulan Revisi RJPP PGN 2025-2029 Suplemen 2034 Request for PGN Board of Directors' Approval on the Proposed Revision of PGN's Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2025–2029 Supplement 2034 3. *Dry Run* Undangan RDP Komisi VI DPR RI 12 Maret 2025 Dry Run for the Invitation to the Working Meeting (RDP) with Commission VI of the House of Representatives (DPR RI) on March 12, 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Maret 2025 March 17, 2025	1. Persetujuan Penanganan Klaim Ganti Rugi PT HLI *Green Power* Approval for Handling Compensation Claim of PT HLI Green Power 2. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Amandemen IV PJBG PHE WMO Request for Approval to Sign Amendment IV of the Gas Sales and Purchase Agreement (PJBG) with PHE WMO 3. Pemaparan Hasil Kajian Konsultan Pendampingan Pengalihan Bisnis Gas dan Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas *Action Plan* Implementasi Pengalihan Bisnis Niaga Gas Pipa dan CNG/LNG Retail Presentation of the Consultant's Study on Advisory for Gas Business Transfer and Request for PGN Board of Directors' Approval of the Action Plan for Implementing the Transfer of Pipeline Gas Trading and CNG/LNG Retail Business 4. Laporan Manajemen Februari 2025 February 2025 Management Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Penilaian Kinerja BOD-1 dan Direktur AP SH Gas Grup Performance Assessment of BOD-1 and Director of AP SH Gas Group	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Maret 2025 March 24, 2025	1. Persetujuan *Baseline* Alokasi Gas Pipa (TW II-V 2025) dan Harga Jual Gas Regasifikasi (TW II 2025) Approval of Baseline Pipeline Gas Allocation (TW II-V 2025) and Regasified Gas Selling Price (TW II 2025)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
	2. Penyampaian *Update* Usulan Investasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Tegal-Cilacap PT Pertamina Gas Presentation of the Updated Investment Proposal for the Construction of the Tegal–Cilacap Gas Transmission Pipeline by PT Pertamina Gas							
14 April 2025 April 14, 2025	1. Rencana Pembelian Kargo LNG April 2025 dari Tangguh Plan for Purchasing LNG Cargo from Tangguh in April 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 April 2025 April 16, 2025	1. Hasil Valuasi Transaksi Sewa Menyewa Aset Jargas Periode 2021-2024 dari Pertamina ke PGN Valuation Reports on the 2021-2024 Jargas Asset Lease Transaction from Pertamina to PGN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 April 2025 April 17, 2025	1. Usulan Penggunaan Laba (Dividen) PGN Tahun Buku 2024 Proposal on the Use of PGN's Net Profits (Dividends) for the Financial Year 2024 2. Laporan Kinerja & *Update* Prognosa Basis *Real* Maret 2025 Performance Report and Real-Basis Forecast Update for March 2025 3. Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2025 ke OJK dan Bursa Efek Indonesia Submission of the Consolidated Financial Statements as of March 31, 2025 to OJK IDX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 April 2025 April 21, 2025	1. Kinerja HSSE YTD Maret 2025 dan Laporan *Learn* Insiden Petronas HSSE Performance YTD March 2025 and Petronas Incident Learning Report 2. Paparan Hasil Pemeringkat Fitch untuk Tingkat Kesehatan PGN 2024 Presentation of the Fitch Rating Report for PGN's 2024 Financial Health	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 April 2025 April 24, 2025	1. Permohonan Persetujuan *Initial Decision* Investasi Ekstraksi LPG LP AGRU JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi ("Investasi Ekstraksi LPG Tomori) Request for Approval of the Initial Investment Decision for the LPG Extraction at LP AGRU JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi ("LPG Extraction Investment at Tomori) 2. Lain-lain Other Agendas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
28 April 2025 April 28, 2025	1. *Dry Run* Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI Dry Run for the Hearing Session with the Commission XII of the Indonesian House of Representatives 2. Rencana Hilirisasi Gas Bumi melalui Akuisisi PT Petro Oxo Nusantara (PON) Plan for Natural Gas Downstreaming through the Acquisition or PT Petro Oxo Nusantara (PON) 3. *Update Project* Valentine (Progres Divestasi WK Muriah PT Saka Energi Indonesia) Update on Valentine Project (Progress of the Muriah WK Divestment by PT Saka Energi Indonesia) 4. Persetujuan Agenda RUPST Tahun Buku 2024 AP dan Afiliasi Approval of the AGMS Agenda for the Financial Year 2024 for Subsidiaries and Affiliates	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Mei 2025 May 5, 2025	1. *Dry Run SteerCo*: Penugasan Khusus dalam RUPST : Jargas Non-APBN, HGBT, Pipa Galacap Dry Run of the Steering Committee Meeting: Special AGMS Assignments on Non-APBN Jargas, HGBT, and the Galacap Pipeline 2. Potensi dan Pengembangan Bisnis *Biomethane* termasuk Progres Kerjasama dengan Konsorsium Jepang Biomethane Business Potential and Development, including Progress of Collaboration with the Japanese Consortium 3. *Update Progress* Inisiatif Gasifikasi Batubara menjadi *Synthetic Natural Gas* Progress Update on the Coal Gasification Initiative into Synthetic Natural Gas 4. Dampak Pengalihan Alokasi Gas Bumi (JTB ke Butonas) Impacts of the Reallocation of Natural Gas (JTB to Butonas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 Mei 2025 May 19, 2025	1. Laporan Manajemen Bulan April 2025 Management Report for April 2025 2. *Update* Tindak Lanjut Pengadaan KAP Update on Follow-Up Actions for the KAP Procurement 3. Persetujuan Nilai Pasar Wajar Saham Subholding Gas (PGN beserta Anak Perusahaan/Afiliasi nya) per 31 Desember 2024 Approval of the Fair Market Value of Gas Subholding Shares (PGN and its Subsidiaries/Affiliates) as of December 31, 2024 4. Usulan Amandemen SHL PT Saka Energi Indonesia Proposal for Amendment to the SHL Agreement of PT Saka Energi Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
	5. Implementasi LCT di PGN Group Implementation of LCT in the PGN Group 6. Laporan Hasil Reviu BPKP atas Aspek Keuangan Pelaksanaan Penyaluran Gas Bumi Tertentu periode April 2020 sampai dengan Desember 2022 BPKP Review Report on the Financial Aspects of the Implementation of Targeted Natural Gas Distribution for April 2020– December 2022 7. Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Gas dari *West* Natuna melalui *Domestic Swap Gas Agreement* Request for Approval of the Utilization of Gas from West Natuna through a Domestic Swap Gas Agreement 8. *Update* Rencana Seremoni Penandatanganan Kontrak Pasokan Gas PGN pada Acara IPA Convex 2025 Update on the Ceremony Plan for Signing PGN's Gas Supply Contract at the 2025 IPA Convex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26 Mei 2025 May 26, 2025	1. Pembahasan Agenda HCM (Terbatas) Discussion on HCM Agenda (Limited Session) 2. Rencana Pembelian Kargo LNG Juni 2025 dari Tangguh dan Oktober 2025 dari Donggi Senoro Plan for Purchasing LNG Cargo from Tangguh for June 2025 and from Donggi Senoro for October 2025 3. Pemaparan Kerjasama BOT Gembong Surabaya dan BOT Ketapang dan Penyediaan Gedung Kantor PGN Area Lampung Presentation on BOT Cooperation for Gembong Surabaya and Ketapang, and Provision of the Office Building of PGN Lampung Area 4. Penyampaian Skenario dan Materi RUPST PGN Submission of Scenarios and Materials for PGN's AGMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 Juni 2025 June 10, 2025	*1. Update Progress* Program *Charter Prepaid Smart* Meter NB to IoT Progress Update on the Charter Program for Prepaid Smart Meter to IoT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 Juni 2025 June 16, 2025	1. Laporan Manajemen Mei 2025 dan Prognosa Basis *Real* Mei 2025 Management Report for May 2025 and Real-Basis Forecast for May 2025 2. Formula Harga Gas untuk Wilayah Jawa Barat, Lampung, Batam, Pekanbaru, dan Dumai untuk periode Juli, Agustus, dan September 2025 Gas Price Formula for West Java, Lampung, Batam, Pekanbaru, and Dumai for July, August, and September 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
16 Juni 2025 June 16, 2025	3. *Resettlement* Biaya Alokasi Pasokan SPBG Gagas 2020-2023 Cost Resettlement of SPBG Gagas Supply Allocation (2020–2023) 4. *Update Progress* Divestasi Wilayah Kerja Muriah (Project Valentine) SAKA Progress Update on Muriah Working Area Divestment (Project Valentine) – SAKA 5. *Update*/Pembaruan Proses Arbitrase Gunvor di LCIA Update on the Gunvor Arbitration Proceedings at the LCIA							
17 Juni 2025 June 17, 2025	1. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Pasokan WK Brantas kepada PGN dan/atau Afiliasi Request for Approval of the Extension of Gas Supply from Brantas Working Area to PGN and/or Its Affiliates 2. Rencana Pembelian Kargo LNG Juli dari Bontang dan Oktober dari Donggi Senoro serta Rencana Optimasi Volume LNG SPA IDD Rapak Plan for Purchasing LNG Cargo from Bontang in July and from Donggi Senoro in October, as well as Plan for Volume Optimization under LNG SPA IDD Rapak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Kajian Dampak Perang Israel vs Iran terhadap Bisnis SH Gas Assessment of the Impact of the Israel–Iran Conflict on SH Gas Business 2. *Update* Rencana Kegiatan Tim Konsolidasi PGN Grup Update on the Activity Plan of the PGN Group Consolidation Team 3. Persetujuan *Guideline* RKAP Tahun 2026 Approval of the Guidelines for the 2026 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 Juni 2025 June 30, 2025	1. Permohonan Persetujuan FID Usulan Investasi PERC Loading Arm Dermaga-3 Perta Arun Gas Request for Approval of the Final Investment Decision (FID) for the PERC Loading Arm Investment at Jetty 3 – Perta Arun Gas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Juli 2025 July 7, 2025	1. Usulan Tindak Lanjut Tanggapan atas Penyampaian Hasil Penilaian dan *Fairness Opinion* KJPP atas Rencana Transaksi Sewa Aset Jargas 2021 – 2024 Proposal for the Follow-Up Actions in Response to the Valuation Results and Fairness Opinion Issued by the Public Appraisal Service Firm (KJPP) on the 2021–2024 Jargas Asset Lease Transaction Plan 2. Tindak Lanjut *Facility Agreement* SHL PT Kalimantan Jawa Gas Follow-Up on the SHL Facility Agreement with PT Kalimantan Jawa Gas 3. Agenda Terbatas HCM Limited Session: Human Capital Management (HCM) Agenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
8 Juli 2025 July 8, 2025	1. Persiapan Pelaksanaan RUPS LB PGN Preparation for the Implementation of PGN's EGMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 Juli 2025 July 14, 2025	1. Permohonan Persetujuan FID Usulan Investasi PERC *Loading Arm* Dermaga-3 Perta Arun Gas ("Investasi PERC *Loading Arm* PAG") Request for Approval of the Final Investment Decision (FID) for the PERC Loading Arm Investment Proposal at Jetty 3 – Perta Arun Gas 2. Pembahasan Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Discussion on the Ratification of Implementation Guidelines for Affiliated Transactions, Conflict-of-Interest Transactions, and Related Transactions 3. Agenda Terbatas HCM Limited Session: Human Capital Management (HCM) Agenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 Juli 2025 July 17, 2025	1. Laporan Manajemen Juni 2025 & Prognosa Basis *Real* Juni 2025 dan Laporan Realisasi RKAP TW II 2025 Management Report and Real-Basis Forecast for June 2025, including the RKAP Realization Report for Q2 2025 2. Materi *Performance Review* Pertamina Pertamina Performance Review Materials 3. Usulan Penetapan *Contingency* Plan PGN Proposal for the Establishment of PGN's Contingency Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 Juli 2025 July 21, 2025	1. Permohonan Persetujuan Penawaran Harga Gas dalam Proses Pemilihan Langsung Gas PEP Lapangan Sengeti Request for Approval of the Gas Price Offer in the Direct Selection Process for PEP Sengeti Field Gas 2. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Alokasi Pasokan Gas HCML Lapangan 2M Request for Approval of the Extension of Gas Supply Allocation from the 2M Field operated by HCML *3. Update* Usulan Revisi RKAP 2025 dan Usulan RKAP 2026 PGN Update on the Proposed Revision of the 2025 RKAP and the Proposed 2026 RKAP of PGN 4. Hasil *Stress Test* RKAP 2025 PGN Results of the 2025 RKAP Stress Test for PGN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
28 Juli 2025 July 28, 2025	1. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 PGN Proposal for PGN's 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Alokasi Pasokan Gas HCML Lapangan 2M (MDA-MBH) periode 1 Januari 2026 – 19 Oktober 2032 Request for Approval of the Extension of Gas Supply Allocation from the 2M Field operated by HCML (MDA–MBH) for the Period 1 January 2026–19 October 2032 3. Rencana Penyaluran Gas Terproses Sumber Pasok Petronas Bukit Panjang untuk Kilang LPG Gresik Plan for the Distribution of Processed Gas from the Petronas Bukit Panjang Supply Source to the Gresik LPG Refinery 4. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Pasokan Pertamina EP SSWJ Request for Approval of the Extension of Gas Supply from Pertamina EP SSWJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Agustus 2025 August 4, 2025	1. *Update* Usulan Revisi RJPP 2025-2029 Update on the Proposed Revision of the 2025–2029 RJPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Agustus 2025 August 7, 2025	1. *Update* Status dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Proses Arbitrase PGN – Gunvor di LCIA Update on the Status and Follow-Up Plan for the PGN–Gunvor Arbitration Proceedings at the LCIA 2. *Update Progress* Temuan Audit Progress Update on Audit Findings	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 Agustus 2025 August 11, 2025	1. *Update Issue* HSSE (*Update* Kinerja HSSE YTD Juli, Proper 2025, MCU 2025) Update on Key HSSE Issues: YTD July Performance, PROPER 2025, and MCU 2025 2. Tindak Lanjut *Asset Integrity & Safety Stand-Down* Pertamina Group Follow-Up Actions on Pertamina Group Asset Integrity & Safety Stand-Down 3. Tanggapan Atas *Expression of Interest Posco International Corporation* Terhadap Aset PT Saka Energi Indonesia Management Response to Posco International Corporation's Expression of Interest regarding PT Saka Energi Indonesia Assets 4. Permohonan Persetujuan Penetapan Pedoman Kerjasama Pengembangan Bisnis PGN Request for Approval of the Establishment of PGN Business Development Cooperation Guidelines	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih E. Prihatini	Arief K. Risdianto
13 Agustus 2025 August 13, 2025	1. Agenda Terbatas HCM Limited Session: Human Capital Management (HCM) Agenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 Agustus 2025 August 15, 2025	1. Update Isu Pasokan Gas Update on Gas Supply Issues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 Agustus 2025 August 19, 2025	1. Laporan Kinerja Juli dan Prognosa Basis *Real* Juli 2025 Performance Report and Real-Basis Forecast Update for July 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Rencana Pembelian Kargo LNG 2026-2027 LNG Cargo Purchase Plan for 2026–2027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Agustus 2025 August 20, 2025	1. Persetujuan Skema Kerjasama Sewa Lahan Teluk Lamong Dengan Pelindo dan *Update* CAPEX Inisiatif Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG Untuk Terminal LNG Jawa Timur (*Flat Bottom*) Approval of the Teluk Lamong Land Lease Cooperation Scheme with Pelindo and CAPEX Update on the LNG Storage Facility Construction Project Initiative for the East Java LNG Terminal (Flat Bottom)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26 Agustus 2025 August 26, 2025	1. Penjelasan Kronologis dan *Update* Inisiatif Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG Untuk Terminal LNG Jawa Timur (*Flat Bottom*) Chronological Explanation and Update on the LNG Storage Facility Construction Project Initiative for the East Java LNG Terminal (Flat Bottom) 2. Pemaparan Temuan Hasil Audit Presentation of Audit Findings 3. Permohonan Persetujuan Penawaran Harga Gas dalam Proses Pemilihan Langsung Gas PEPC Lapangan Gas NKT Request for Approval of the Gas Price Offer in the Direct Selection Process for PEPC NKT Gas Field	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Periode 27 Agustus - 31 Desember 2025 | Periode August 27 – December 31, 2025

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
1 September 2025 September 1, 2025	1. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Alokasi dan Harga Gas Bongas hingga 31 Desember 2029 Request for Approval of the Extension of Bongas Gas Allocation and Pricing until 31 December 2029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
	2. Persetujuan Penyesuaian Ketentuan atas Pemberlakuan *Over Usage Penalty* Harian kepada Pelanggan untuk Jumlah Gas Terpakai lebih dari Pemakaian Maksimum Kuota per Hari selama terjadi Gangguan Penyaluran Gas pada Agustus 2025 Approval of Adjustments to Daily Over-Usage Penalty Provisions for Customers Exceeding Maximum Daily Quota during the August 2025 Gas Distribution Disruption 3. Usulan Nilai Pemanfaatan PPF dengan PT Jababeka Infrastruktur untuk Pengembangan Niaga Gas di KIK Proposal on the Utilization Value of PPF with PT Jababeka Infrastruktur for Gas Trading Development in KIK 4. *Update* NPAT Prognosa 2025 dan Usulan RKAP 2026 Update on the 2025 NPAT Forecast and the Proposed 2026 RKAP							
2 September 2025 September 2, 2025	1. Persetujuan Penyesuaian Ketentuan atas Pemberlakuan *Over Usage Penalty* Harian kepada Pelanggan untuk Jumlah Gas Terpakai lebih dari Pemakaian Maksimum Kuota per Hari selama terjadi Gangguan Penyaluran Gas pada Agustus 2025 Approval of Adjustments to Daily Over-Usage Penalty Provisions for Customers Exceeding Maximum Daily Quota during the August 2025 Gas Distribution Disruption	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 September 2025 September 9, 2025	1. Rencana Pembelian Kargo LNG September 2025 dari Tangguh dan Padoma, serta Q4 2025 dari Donggi Senoro LNG Cargo Purchase Plan: in September 2025 from Tangguh and Padoma and in Q4 2025 from Donggi Senoro 2. Usulan *Top Risk* Korporat 2026 SH Gas Proposal for the 2026 Corporate Top Risks of the Gas Subholding 3. Tindak Lanjut *Facility Agreement / Shareholder Loan* PT KJG Follow-Up on the Facility Agreement/Shareholder Loan for PT KJG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
15 September 2025 September 15, 2025	1. Permohonan Persetujuan Revisi FID *Upgrade* Kapasitas DWDM Jakarta – Singapore Request for Approval of the Revised FID for the DWDM Capacity Upgrade (Jakarta–Singapore) 2. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Alokasi dan Harga Gas Bongas hingga 31 Desember 2029 Explanation of Proposal 2 and Proposal 3 for the 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) of Gas Subholding (SHG) 3. Penjelasan Usulan 2 dan Usulan 3 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Subholding Gas (SHG) tahun 2026 Submission of Performance Report for August 2025 and Real-Basis Forecast Update for August 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 September 2025 September 18, 2025	1. Penyampaian Laporan Kinerja Agustus & *Update* Prognosa Basis *Real* Agustus 2025 Submission of Performance Report for August 2025 and Real-Basis Forecast Update for August 2025 2. Usulan 3 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Subholding Gas (SHG) tahun 2026: Strategi peningkatan NPAT RKAP 2026 sesuai arahan Holding pada CS RKAP 2026 Third Proposal (Proposal 3) of the 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) of Gas Subholding (SHG): Strategy to Increase NPAT in the 2026 RKAP aligned with Holding's Direction under the 2026 RKAP Corporate Strategy (CS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 September 2025 September 21, 2025	1. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Subholding Gas (SHG) tahun 2026 Discussion of the Proposed 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) of Gas Subholding (SHG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 Oktober 2025 October 7, 2025	1. Agenda Terbatas HCM Limited Session: Human Capital Management (HCM) Agenda 2. Permohonan Persetujuan Revisi FID *Upgrade* Kapasitas DWDM Jakarta - Singapore Request for Approval of the Revised FID for the DWDM Capacity Upgrade (Jakarta–Singapore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
	3. Permohonan Persetujuan atas Rencana Perubahan Konsep Kontrak Jual Beli LNG antara PGN Group dengan Kayan menjadi Konsep Kontrak Payung (*Master* LNG Sale & *Purchase Agreement* / MSPA) Request for Approval of the Plan to Amend the LNG Sale and Purchase Contract Framework between PGN Group and Kayan into a Master Contract Framework (Master LNG Sale & Purchase Agreement/MSPA) 4. Usulan 3 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Subholding Gas (SHG) Tahun 2026 Third proposal (Proposal 3) of the 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) of Gas Subholding (SHG)							
13 Oktober 2025 October 13, 2025	*1.* *Update* Informasi Pembelian Kargo LNG dari Donggi Senoro (Q4 2025) & 2026-2027 Information Update on LNG Cargo Purchases from Donggi Senoro (Q4 2025) and 2026–2027 2. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Alokasi dan Harga Gas Bongas hingga 31 Desember 2029 Request for Approval of the Extension of Bongas Gas Allocation and Pricing until December 31, 2029 3. Usulan Revisi-2 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Subholding Gas (SHG) tahun 2025 dan *Dry run* CS RKAP 2026 Second Revision Proposal of the 2025 Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Gas Subholding (SHG) and Dry Run of the Corporate Strategy of the 2026 RKAP *4.* *Update* Kajian Legal untuk Pengalihan Bisnis LNG Portfolio dan *Update* Pengalihan Bisnis JTB Update on the Legal Review for the Transfer of the LNG Portfolio Business and Update on the JTB Business Transfer 5. Permohonan Persetujuan Kajian Awal Penyelarasan Bisnis SH Gas ("KAPB") untuk disampaikan kepada Pertamina dan Pengaturan Pengusulan Inisiatif Pengembangan dan Investasi pada RKAP 2026 Request for Approval of the Preliminary Business Alignment Study ("KAPB") for Gas SH to be Submitted to Pertamina, and the Framework for Proposing Development and Investment Initiatives in the 2026 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
14 Oktober 2025 October 14, 2025	1. Permohonan Persetujuan Rencana Pasokan Sumatera Tengah, Selatan dan Jawa Bagian Barat Request for Approval of the Supply Plan for Central Sumatra, South Sumatra, and Western Java 2. Kajian Awal Penyelarasan Bisnis SH Gas ("KAPB") untuk Disampaikan kepada Pertamina dan Tindak Lanjut Kajian Pra-Implementasi dalam Rangka Konsolidasi Bisnis Niaga Gas Preliminary Business Alignment Study (KAPB) of Gas SH to be Submitted to Pertamina and Follow-Up on the Pre-Implementation Study for Gas Trading Business Consolidation 3. Laporan Manajemen periode September 2025 Management Report for September 2025 *Draft* KPI SH Gas 2026 Draft 2026 KPIs for Gas Subholding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21 Oktober 2025 October 21, 2025	1. Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian TW III 2025 Approval of the Consolidated Financial Statements for Q3 2025 2. *Dry Run* Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Dry Run of Materials for the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors 3. *Update* Pengalihan Bisnis JTB, SPBG dan Jargas Pertamina Update on the Transfer of JTB, SPBG, and Pertamina Jargas Businesses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 Oktober 2025 October 27, 2025	1. Pembahasan Materi *Performance Management Review* Subholding Gas Triwulan III Tahun 2025 Discussion of Performance Management Review Materials for Gas Subholding – Q3 2025 2. Usulan 4 RKAP 2026 *Topdown* Arahan Holding & Cascading NPAT RKAP 2026 ke AP/ Afiliasi SH Gas Fourth Proposal (Proposal 4) of the 2026 RKAP: Top-Down Holding Directives and Cascading of NPAT Targets to Gas Subholding Subsidiaries/ Affiliates in the 2026 RKAP 3. RUPS LB Kedua PGN 2025 PGN's Second EGMS in 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
3 November 2025 November 3, 2025	1. Permohonan Persetujuan Pembelian Pasokan WK Pangkah dan Penandatanganan Perjanjian antara PGN dan Saka Indonesia Pangkah Ltd Request for Approval of Supply Purchase from Pangkah Working Area and Signing of the Agreement between PGN and Saka Indonesia Pangkah Ltd 2. Usulan konsep Amendemen Kesepakatan Bersama Peminjaman dan Pengembalian LNG antara PGN dan PLN EPI Proposal for the Amendment Framework of the Joint Agreement on the LNG Loan and Return between PGN and PLN EPI 3. Permohonan Persetujuan Rencana Transaksi Pengalihan Data antara PGN dengan PLN EPI atas Proyek WNTS Pemping Request for Approval of the Data Transfer Transaction Plan between PGN and PLN EPI for the WNTS Pemping Project 4. Agenda Terbatas HCM Limited Session: Human Capital Management (HCM) Agenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 November 2025 November 7, 2025	1. Usulan Revisi 3 RKAP 2025 PGN Proposal for the Third Revision of PGN's 2025 Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2. *Update* Usulan KPI 2026 PGN Update on the Proposed PGN KPIs for 2026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 November 2025 November 10, 2025	1. Permohonan Persetujuan Pembelian 6 Kargo LNG DSLNG, 2 Kargo LNG Tangguh dan 1 Kargo LNG Bontang untuk periode 2026 Request for Approval to Purchase 6 DSLNG LNG Cargoes, 2 Tangguh LNG Cargoes, and 1 Bontang LNG Cargo for 2026 2. Permohonan Persetujuan Penawaran Harga untuk Tender Volume LNG North Hub dari Bontang Terminal Request for Approval of the Price Offer for the LNG North Hub Volume Tender from Bontang Terminal 3. Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Gas di Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) di Area Semarang - SOR III Approval of the Gas Supply Cooperation Agreement for Wijaya Kusuma Industrial Estate (KIW), Semarang Area – SOR III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
13 November 2025 November 13, 2025	1. Permohonan Persetujuan *Update* Penawaran Harga untuk Tender Volume LNG North Hub dari Bontang Terminal Request for Approval of the Updated Price Offer for the LNG North Hub Volume Tender (Bontang Terminal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 November 2025 November 17, 2025	1. *Update* Inisiatif Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG Untuk Terminal LNG Jawa Timur (*Flat Bottom*) Update on the LNG Storage Facility Construction Project Initiative for the East Java LNG Terminal (Flat Bottom) 2. Persetujuan Penunjukan Konsultan Hukum Jasa Konsultansi dan Pendampingan Pemberian Keterangan di Aparat Penegak Hukum Approval of the Appointment of Legal Counsel for Consultation and Assistance in Proceedings with Law Enforcement Authorities	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 November 2025 November 18, 2025	1. Laporan Manajemen Oktober 2025 & Prognosa Basis *Real* Oktober 2025 Performance Report for October 2025 and Real-Basis Forecast Update for October 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. *Update* Kajian Awal Penyelarasan Bisnis SH Gas ("KAPB") dan Permohonan Arahan dalam Rangka Konsensus Aksi Penyelarasan Bisnis dengan Pertamina Update on the Preliminary Business Alignment Study (KAPB) and Request for Direction toward Business Alignment Consensus with Pertamina 3. *Update* Penyusunan RJPP 2026 - 2030 Update on the Preparation of the 2026–2030 RJPP 4. Rencana *Booking Capacity New* FSRU Jawa Barat Plan for Capacity Booking of the New West Java FSRU 5. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Pasokan PHE NSO Request for Approval of the Extension of Supply from PHE NSO 6. *Update* Rencana Amendemen SHL PT Saka Energi Indonesia Update on the Plan to Amend the SHL Agreement of PT Saka Energi Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
24 November 2025 November 24, 2025	1. *Update* Potensi Pasokan Gas dari WK South Andaman Update on Gas Supply Potential from the South Andaman Working Area 2. Permohonan Penandatanganan Joint Pre-Development Agreement Proyek LNG Plant Bangkanai Request for Signing of the Joint Pre-Development Agreement (JPDA) for the Bangkanai LNG Plant Project 3. Perubahan Anggaran Dasar PGN Amendment to PGN's Articles of Association	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 Desember 2025 December 1, 2025	1. Permohonan Keputusan Kelanjutan Inisiatif Proyek Pembangunan Fasilitas LNG Terminal Jawa Timur Request for Decision on the Continuation of Facility Construction Project Initiative of the East Java LNG Terminal Development Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Desember 2025 December 2, 2025	1. Permohonan Persetujuan Pembelian Pasokan Gas dari Wilayah Kerja ("WK") Tungkal (Mont D'or Oil Tungkal Limited) kepada PGN; dan Perpanjangan Domestic Swap Agreement West Natuna Gas Supply Group Request for Approval of Gas Supply Purchase from Tungkal Working Area (Mont D'or Oil Tungkal Ltd) to PGN and Extension of the Domestic Swap Agreement with the West Natuna Gas Supply Group 2. Persetujuan Anggaran *Bulk* Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* SOR II Tahun 2026 Approval of Bulk Budget for Gas Pipeline Infrastructure Installation for Customers Attachment in SOR II for 2026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Desember 2025 December 8, 2025	1. *Update Issue* HSSE (*Update* Kinerja HSSE YTD November 2025, Rencana Pelaksanaan MERE 2025) Update on Key HSSE Issues: November 2025 YTD Performance and the 2025 MERE Implementation Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
	2. Persetujuan Keputusan Direksi Mekanisme Agregasi Segmen Pelanggan Untuk Analisis Kelayakan Jargas sebagai PSN dan Persetujuan Investasi (FID) Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Jargas SOR I Area Batam Tahun 2025 Approval of Board Decision on Customer Segment Aggregation Mechanism for Jargas Feasibility as a National Strategic Project (PSN) and FID Approval for Gas Pipeline Infrastructure Installation for Customers Attachment in SOR I Jargas in Batam for 2025 3. Persetujuan Investasi (FID) Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA Approval of Final Investment Decision (FID) for the Construction of the PGN MIRRA Office Building 4. Persetujuan Investasi *Well Exploration* Saka Manpatu (SM)-1 pada Wilayah Kerja (WK) Pekawai Approval of Investment for the Saka Manpatu (SM)-1 Exploration Well in the Pekawai Working Area							
12 Desember 2025 December 12, 2025	1. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kontrak LNG SPA IDD Bangka Request for Approval of the Extension of the LNG SPA Contract – IDD Bangka 2. Tanggapan Atas Permintaan Penandatanganan *Charter* Penyelarasan Bisnis Subholding Gas oleh Pertamina Management Response to Pertamina's Request for Signing the Gas Subholding Business Alignment Charter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 Desember 2025 December 15, 2025	1. Laporan Manajemen November 2025 Management Report for November 2025 2. Permohonan Persetujuan Penandatanganan JPDA Proyek LNG Plant Bangkanai Request for Approval to Sign the JPDA for the Bangkanai LNG Plant Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
16 Desember 2025 December 16, 2025	1. Persetujuan Investasi (FID) Pelaksanaan Pengembangan Lapangan Bukit Panjang Wilayah Kerja Ketapang Approval of Final Investment Decision (FID) for the Development of Bukit Panjang Field – Ketapang Working Area 2. Harga Gas Formula untuk Wilayah Sumatera Tengah, Selatan dan Jawa Bagian Barat Tahun 2026 Gas Price Formula for Central Sumatra, South Sumatra, and Western Java for 2026 3. Permohonan Persetujuan Pembelian Tambahan 5 Kargo LNG DSLNG & *Update* Informasi Perubahan Formulasi Harga Kargo LNG Tangguh Request for Approval of Additional Purchase of 5 DSLNG LNG Cargoes and Update on Changes to the Pricing Formula of Tangguh LNG Cargo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 Desember 2025 December 18, 2025	1. Persetujuan ReFID Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG Untuk Terminal LNG Jawa Timur Approval of the Revised FID of the LNG Storage Facility Construction Project Initiative for the East Java LNG Terminal 2. *Update* Materi RUPSLB PGN Terkait Perubahan Anggaran Dasar (Perubahan Status PGN kembali menjadi PT (PERSERO)/BUMN) Update on EGMS Materials Related to Amendments to PGN's Articles of Association (Reinstatement of PGN as PT (PERSERO)a SOE) 3. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Jambaran Tiung Biru/JTB antara Pertamina dan PGN Extension of the Cooperation Agreement on Management and Distribution of Jambaran Tiung Biru (JTB) Gas between Pertamina and PGN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
	4. Persetujuan Keputusan Direksi Mekanisme Agregasi Segmen Pelanggan Untuk Analisis Kelayakan Jargas Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ("Kepdir Agregasi Jargas 2025") dan Persetujuan Investasi (FID) Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Jargas SOR I Area Batam Tahun 2025 Approval of Board Decision on Customer Segment Aggregation Mechanism for Jargas Feasibility as a National Strategic Project (PSN) (and FID Approval for Gas Pipeline Infrastructure Installation for Customers Attachment in SOR I Jargas in Batam for 2025 5. Persetujuan RKAP 2026 (Usulan 5) Approval of the 2026 RKAP (Proposal 5)							
22 Desember 2025 December 22, 2025	1. Update Rencana Pengambilalihan Saham VICO pada PT Badak NGL Update on VICO's Share Acquisition Plan at PT Badak NGL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Rencana Penandatanganan *Heads of Agreement* (HoA) *non-binding* dan *Master Sales and Purchase Agreement* (MSPA) LNG ISO Tank antara PGN dan Petronas LNG Ltd Planned Signing of the Non-Binding Heads of Agreement (HoA) and Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) for LNG ISO Tank between PGN and Petronas LNG Ltd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Desember 2025 December 24, 2025	1. Permohonan Persetujuan *Swap Fee* untuk Perpanjangan *Domestic Swap Agreement West Natuna Gas Supply Group* Application for Swap Fee Approval for the Extension of the West Natuna Gas Supply Group Domestic Swap Agreement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Komersial Industri SOR III Tahun 2026 Approval of the Bulk Budget for the Installation of Gas Pipeline Infrastructure for Commercial Industrial Customer Attachment SOR III in 2026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Agenda	Arief Kurnia Risdianto	Hery Murahmanta	Rachmat Hutama	Catur Dermawan	Mirza Mahendra	Aldiansyah Idham	Eri Surya Kelana
24 Desember 2025 December 24, 2025	3. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan antara PGN dan PT Surya Energi Parahita (SEP) serta *Underlying Document* Kerjasama Pemanfaatan Lahan Approval of the Extension of the Land Utilization Cooperation Agreement between PGN and PT Surya Energi Parahita (SEP) and the Underlying Document for the Land Utilization Cooperation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase Kehadiran Masing-masing Anggota Attendance Percentage of Each Member		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kehadiran Direksi dalam RUPS
Attendance of the Board of Directors at the GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran pada RUPST 28 Mei 2025 Attendance at AGMS, May 28, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	Kehadiran pada RUPSLB 2025 Attendance at EGMS 2025			
				27 Agustus 2025 August 27, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	29 Desember 2025 December 29, 2025	Persentase(%) Percentage (%)
Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025 | Period January 1 - August 27, 2025							
Arief Setiawan Handoko	Direktur Utama President Director	1	100	1	100	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	1	100	1	100	-	-
Ratih Esti Prihatini	Direktur Komersial Director of Commercial	1	100	1	100	-	-
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	1	100	1	100	-	-
Harry Budi Sidharta*	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	1	100	1	100	-	-
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	1	100	1	100	-	-
Periode 27 Agustus 2025-sekarang | Period August 27, 2025 - present							
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	1	100
Catur Dermawan	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-	1	100
Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Director of Commercial	-	-	-	-	1	100
Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	-	-	1	100

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran pada RUPST 28 Mei 2025 Attendance at AGMS, May 28, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	Kehadiran pada RUPSLB 2025 Attendance at EGMS 2025			
				27 Agustus 2025 August 27, 2025	Persentase(%) Percentage (%)	29 Desember 2025 December 29, 2025	Persentase(%) Percentage (%)
Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	-	-	1	100
Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	-	-	-	-	1	100
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of Human Resources and Business Support	1	100	1	100	1	100

*Tidak menjabat sejak 4 Juli 2025
*No longer in office since July 4, 2025

Keputusan Sirkuler Direksi
Board of Directors Circular Resolution

Tanggal Date	Agenda Agenda
23 Juni 2025 June 23, 2025	010/CR-BOD/2025 Penunjukan PT Gagas Energi Indonesia sebagai Perwakilan PGN untuk Melakukan Penyertaan Modal pada Special Purpose Company *Biomethane* Appointment of PT Gagas Energi Indonesia as PGN's Representative to Make Capital Participation in a Biomethane Special Purpose Company
29 Oktober 2025 October 29, 2025	020/CR-BOD/2025 Pembayaran Panjar Insentif Tahun Buku 2025 di Lingkungan SH Gas Payment of Advance Incentive for Financial Year 2025 within SH Gas
2 Desember 2025 December 2, 2025	030/CR-BOD/2025 Pembayaran Panjar Insentif Kedua Tahun Buku 2025 di Lingkungan SH Gas Payment of the Second Advance Incentive for Financial Year 2025 within SH Gas

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Pada tahun 2025, sehubungan dengan telah ditetapkannya Direktur Manajemen Risiko dengan dilengkapi Tata Kerja Direktorat Manajemen Risiko dan Organisasi di lingkup Direktorat Manajemen Risiko di akhir tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka pengelolaan risiko dilakukan tidak lagi melalui Komite di bawah Direksi, namun menjadi tugas dan tanggung jawab dari Direktur Manajemen Risiko sebagai Chief Risk Officer. Sehingga tidak terdapat penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, following the appointment of the Director of Risk Management and the establishment of the Work Procedures of the Risk Management Directorate and its organizational structure at the end of 2024, in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, risk management is no longer carried out through a Committee under the Board of Directors. Instead, risk management has become the duty and responsibility of the Director of Risk Management as the Chief Risk Officer. Accordingly, there is no performance assessment of Committees under the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KOMITE

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND COMMITTEES



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris pada tahun 2025 dilakukan melalui penyampaian Laporan Pencapaian KPI secara triwulanan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/09/2021.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, telah menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina melalui Pedoman Nomor A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022. Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian kinerja organ tata kelola di lingkungan Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina.

Mengacu pada pedoman tersebut, KPI Dewan Komisaris mencakup aspek perencanaan, aspek pengawasan dan nasihat, aspek pelaporan dan aspek dinamis, dalam

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The assessment evaluation of the Board of Commissioners in 2025 was conducted through the submission of Quarterly KPI Achievement Reports to the Minister of SOEs as the holder of the Series A Dwiwarna Share, in accordance with the provisions set forth in the Circular Letter of the Minister of SOEs Number SE-9/MBU/09/2021.

Aligned with these provisions, PT Pertamina (Persero), as the Majority shareholder of Series B Shares and the recipient of Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share, has established the Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries through Guideline Number A05-002/K20000/2022-S9 pursuant to Letter Number 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022. These guidelines serve as the reference for implementing performance assessment of governance organs within Pertamina Subholdings and Subsidiaries.

Referring to these guidelines, the KPI of the Board of Commissioners encompasses planning aspects, supervisory and advisory aspects, reporting aspects, and dynamic

menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pengurusan jalannya Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Adapun proses penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Selanjutnya, melalui Surat PT Pertamina (Persero) Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina Tahun 2024, dinyatakan bahwa pedoman penilaian kinerja tersebut tetap berlaku dan digunakan hingga saat ini sebagai acuan pelaksanaan penilaian kinerja tahunan.

aspects, in carrying out the supervisory function over the management policies of the Company and providing advice to the Board of Directors in the interest and for the objectives of the Company. The performance assessment process of the Board of Commissioners for 2025 was conducted by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Furthermore, pursuant to PT Pertamina (Persero) Letter Number 113/K00000/2024-S8 regarding the Policy on the Implementation of Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries for 2024, it is stated that the aforementioned performance assessment guidelines remain valid and continue to be used as the reference for the implementation of annual performance assessment.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
Procedure for the Performance Assessment of the Board of Commissioners

1

Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan KPI Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

The Board of Commissioners prepares and submits the KPI of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

2

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan *self-assessment* realisasi KPI Dewan Komisaris dan hasil Akhlak Behaviour Survey (ABS) 360°

The Board of Commissioners conducts a performance assessment based on a self-assessment of the realization of its KPI and the results of the 360° Akhlak Behaviour Survey (ABS).

3

Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

The Board of Commissioners reports the results of its performance assessment to PT Pertamina (Persero) as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Realisasi KPI Dewan Komisaris.
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil Akhlak Behavior Survey (ABS) 360° yang dilakukan oleh sesama Anggota Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, kemudian dilaporkan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penetapan KPI Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mengatur perihal Kontrak Manajemen Tahunan dan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). KPI Direksi terdiri dari KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual.

KPI Direksi Kolegial disetujui dan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Kementerian BUMN cq. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), yang terdiri atas:

1. KPI Bersama (bobot 40%), merupakan KPI yang disepakati menjadi tanggung jawab seluruh Subholding di bawah PT Pertamina (Persero) sebagai Holding.
2. KPI Subholding (bobot 60%), merupakan KPI Perseroan sebagai Subholding Gas.

Adapun KPI Direksi Individual disusun menggunakan kerangka sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Performance Assessment Criteria of the Board of Commissioners

1. The realization of the Board of Commissioners' KPI.
2. The implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Commissioners as the core values established by the Ministry of SOEs, based on the results of the 360° Akhlak Behavior Survey (ABS) conducted among fellow members of the Board of Commissioners.

Party Conducting the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The assessment of the Board of Commissioners is conducted independently through a self-assessment mechanism facilitated by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, and subsequently reported to PT Pertamina (Persero) as the Majority Shareholder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The determination of the Board of Directors' KPI refers, among others, to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which govern the Annual Management Contract and Key Performance Indicators (KPI). The KPI of the Board of Directors comprises the Collegial KPI of the Board of Directors and the Individual KPI of each Director.

The Collegial KPI of the Board of Directors is approved and signed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Ministry of State-Owned Enterprises c.q. the President Director of PT Pertamina (Persero), comprising:

1. Shared KPI (40% weight), representing KPIs agreed upon as the collective responsibility of all Subholdings under PT Pertamina (Persero) as the Holding; and
2. Subholding KPI (60% weight), representing the Company's KPI as the Gas Subholding.

The Individual KPI of each Director is prepared based on the framework stipulated in Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 and is subject to approval by the Board of Commissioners.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina Nomor A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Selanjutnya, melalui surat PT Pertamina (Persero) Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2024, menyatakan bahwa pedoman penilaian kinerja tersebut masih berlaku hingga saat ini. Proses penilaian Direksi tahun 2025 dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero), as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share, established the Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries Number A05-002/K20000/2022-S9 pursuant to Letter Number 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

Furthermore, pursuant to PT Pertamina (Persero) Letter Number 113/K00000/2024-S8 concerning the Policy on the Implementation of the Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries for 2024, it is stated that the aforementioned performance assessment guidelines remain valid to date. The performance assessment process of the Board of Directors for 2025 was conducted by the Board of Commissioners together with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Procedure for the Performance Assessment of the Board of Directors

1

Direksi menyusun dan menyampaikan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual kepada Dewan Komisaris

The Board of Directors prepares and submits the realization of the Collegial KPI and the Individual KPI of the Directors to the Board of Commissioners.

2

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual hasil Akhlak Behaviour Survey (ABS) 360°

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the realization of the Collegial KPI and the Individual KPI of the Directors, as well as the results of the 360° Akhlak Behaviour Survey (ABS).

3

Dewan Komisaris menyampaikan usulan penilaian kinerja Direksi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

The Board of Commissioners submits the proposed performance assessment of the Board of Directors to PT Pertamina (Persero) as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Perseroan

1. Realisasi KPI Kolegial Direksi dan KPI Individual Direksi.
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Direksi sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil Akhlak *Behavior Survey* (ABS).

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian diselenggarakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, dan selanjutnya hasil penilaian diusulkan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina Nomor A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Ketentuan tersebut selanjutnya ditegaskan kembali melalui Surat PT Pertamina (Persero) Nomor 113/ K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

Performance Assessment Criteria of the Company's Directors

1. The realization of the Collegial KPI of the Directors and the Individual KPI of each Director.
2. The implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Directors as the core values established by the Ministry of SOEs, based on the results of the Akhlak Behavior Survey (ABS).

Party Conducting the Performance Assessment of the Board of Directors

The evaluation is conducted by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee and submitted to the Board of Commissioners. Subsequently, the evaluation results are proposed to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination, Remuneration and GCG Committee, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero), as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share, established the Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries Number A05-002/K20000/2022-S9 pursuant to Letter Number 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

These provisions were subsequently reaffirmed through PT Pertamina (Persero) Letter Number 113/K00000/2024-S8 on the Policy on the Implementation of the Annual Individual Performance Assessment of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Supporting Committees of the Board of Commissioners within Pertamina Subholdings and Subsidiaries for 2024, which states that the aforementioned guidelines remain in effect.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS
Procedure for the Performance Assessment of The Committees of the Board of Commissioners

1

Komite Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris yang merupakan penjabaran dari fungsi Dewan Komisaris

The Committees of the Board of Commissioners prepare and submit their Annual Work Plan to the Board of Commissioners, which constitutes a translation of the functions of the Board of Commissioners.

2

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris berdasarkan self-assessment realisasi Rencana Kerja Tahunan termasuk Tugas Khusus dan hasil Akhlak Behaviour Survey (ABS) 360°

The Board of Commissioners conducts a performance assessment of the Committees of the Board of Commissioners based on the self-assessment of the realization of the Annual Work Plan, including Special Assignments, and the results of the Akhlak Behaviour Survey (ABS) 360°.

3

Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

The Board of Commissioners reports the results of the performance assessment of the Committees of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as the Majority Holder of Series B Shares receiving Special Power of Attorney from the holder of the Series A Dwiwarna Share.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. Realisasi Rencana Kerja dan Tugas Khusus Komite Dewan Komisaris.
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Komite Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil Akhlak Behaviour Survey (ABS).

Hasil Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Hasil penilaian atas kinerja Komite Dewan Komisaris menyatakan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu pengawasan Dewan Komisaris.

Performance Assessment Criteria of the Committees of the Board of Commissioners

1. The realization of the Work Plan and Special Assignments of the Committees of the Board of Commissioners.
2. The implementation of AKHLAK cultural values by the Committees of the Board of Commissioners as the core values established by the Ministry of State-Owned Enterprises, based on the results of the Akhlak Behaviour Survey (ABS).

Results of the Performance Assessment of the Committees of the Board of Commissioners

The results of the performance assessment of the Committees of the Board of Commissioners indicate that the committees have properly carried out their duties and responsibilities in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY AND PROCESS FOR THE NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

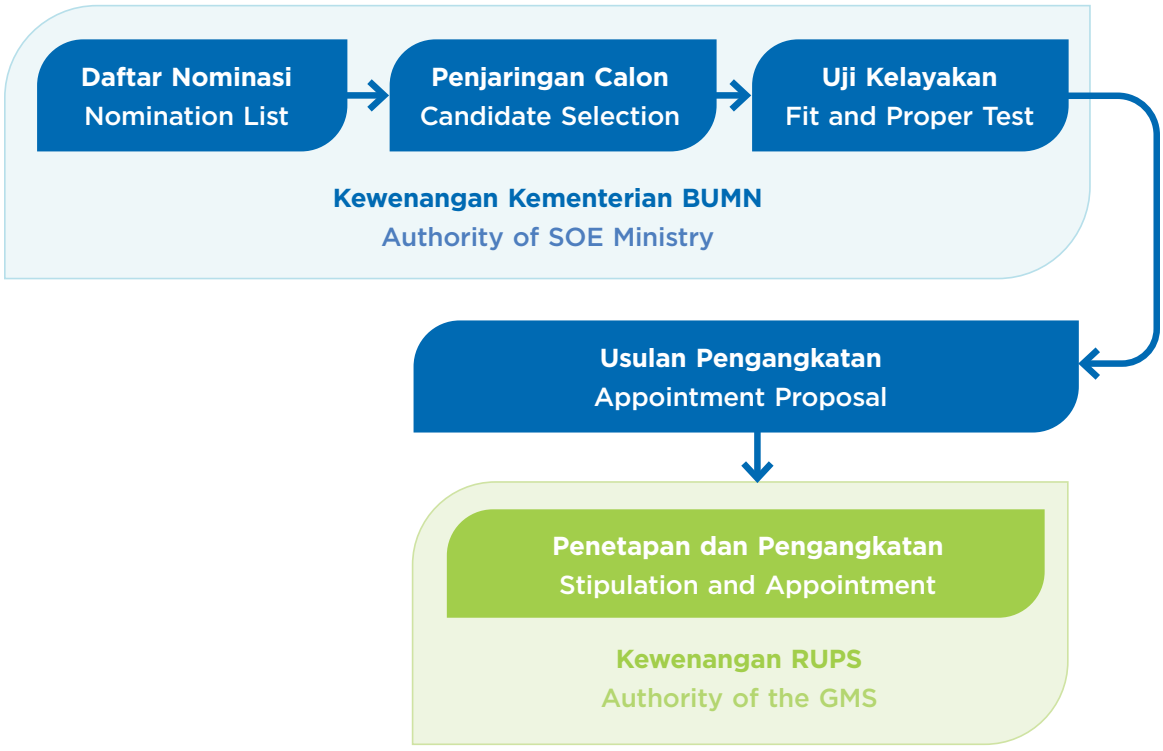
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prosedur pengusulan hingga penetapan Dewan Komisaris dan Direksi PGN tunduk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pengajuan calon, penjaringan, uji kelayakan untuk Direksi, serta usulan pengangkatan ditetapkan oleh Komite Talenta BUMN melalui Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN. Selanjutnya, pengangkatan dan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan dalam RUPS.

POLICY AND PROCESS FOR THE NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR THE BOARD OF DIRECTORS

As a State-Owned Enterprise (SOE), the procedures for the nomination and appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PGN are subject to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The process for proposing candidates, conducting talent screening and fit and proper tests for members of the Board of Directors, as well as the proposal for appointment, is determined by the BUMN Talent Committee through a Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises. Subsequently, the appointment and formal determination of the Board of Commissioners and the Board of Directors are resolved at the GMS.



Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PGN yang mengatur pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga ditetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Nomination Procedure for the Board of Commissioners

The appointment process for candidates for members of the Board of Commissioners is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations governing the procedures for the appointment of members of the Board of Commissioners of SSOEs, in particular:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. The Articles of Association of PGN governing the appointment of members of the Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, which must be attended and approved by the holder of the Series A Dwiwarna Share, and the resolution of such meeting must obtain approval from the holder of the Series A Dwiwarna Share in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The GMS resolution concerning the appointment of members of the Board of Commissioners shall also stipulate the effective date of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate the effective date, the appointment as a member of the Board of Commissioners shall become effective as of the closing of the GMS.

Members of the Board of Commissioners are appointed for a term commencing from the date stipulated by GMS that appoints them and ending at the closing of the fifth Annual GMS following the date of their appointment, provided that such term shall not exceed five years, with due regard to the prevailing laws and regulations in the capital market sector, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Board of Commissioners at any time prior to the expiration of his or her term of office.

Upon the expiry of their term of office, a Member of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for one additional term.

Prosedur Nominasi Direksi

Proses pengangkatan calon anggota Direksi dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PGN yang mengatur pengangkatan anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi juga ditetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Direksi mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Kebijakan Suksesi/Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana RUPS tersebut harus dihadiri dan keputusannya disetujui

Procedure for the Directors Nomination

The appointment process for candidates for members of the Board of Directors is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations governing the procedures for the appointment of members of the Board of Commissioners of SOEs, in particular:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. The Articles of Association of PGN governing the appointment of members of the Board of Directors.

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, which must be attended and approved by the holder of the Series A Dwiwarna Share, and the resolution of such meeting must obtain approval from the holder of the Series A Dwiwarna Share in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The GMS resolution concerning the appointment of members of the Board of Directors shall also stipulate the effective date of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not stipulate the effective date, the appointment as a member of the Board of Directors shall become effective as of the closing of the GMS.

Members of the Directors are appointed for a term commencing from the date stipulated by the GMS that appoints them and ending at the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following the date of their appointment, provided that such term shall not exceed five years, with due regard to the prevailing laws and regulations in the capital market sector, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Directors at any time prior to the expiration of his or her term of office.

Upon the expiry of their term of office, a Member of the Directors may be reappointed by the GMS for one additional term.

Succession/Nomination Policy of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Pursuant to the Articles of Association, members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company are appointed and dismissed by the GMS, which must be

oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan oleh RUPS diambil dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

attended and whose resolutions must be approved by the holder of the Series A Dwiwarna Share. The appointment of members of the Board of Directors by the GMS is made from candidates proposed by the holder of the Series A Dwiwarna Share.

PGN menerapkan kebijakan suksesi/nominasi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum pada Pasal 140, adalah melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi BUMN serta menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang akan menjadi bagian dari Kebijakan GCG serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

PGN implements the succession/nomination policy for the Board of Directors with reference to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. One of the duties of the Remuneration and Nomination Committee, as stipulated in Article 140, is to evaluate proposals for the individual KPIs of members of the Board of Directors of BUMN and to prepare proposals for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs, which shall form part of the GCG Policy and serve as a guideline for the Board of Commissioners and the GMS in determining the remuneration and nomination of members of the Board of Commissioners and/or the Directors.

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan, antara lain jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau sebab lainnya sesuai penilaian RUPS. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

The GMS may dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners who no longer meet the requirements, including if they commit actions detrimental to the Company or other grounds as deemed by the GMS. The decision to dismiss is made after the individual has been given the opportunity to defend themselves, unless they have no objection to the dismissal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, yang akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya pengunduran diri tersebut.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners have the right to resign from their positions by providing written notification to the Company, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors. This will be followed up by convening a GMS within 60 days upon the receipt of the resignation letter. Resigning members of the Board of Directors will remain accountable for their actions from the time of their appointment until the resignation is approved.

Pada tahun 2025, kebijakan nominasi dijalankan kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris melalui penilaian Dewan Komisaris yang kemudian disampaikan kepada Holding Pertamina.

In 2025, the nomination policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners was carried out through an assessment by the Board of Commissioners, which was then submitted to Pertamina Holding.

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada BAB VII tentang Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

PROCEDURE AND IMPLEMENTATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Directors in 2025 refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, specifically Chapter VII regarding the Income of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners

1

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian remunerasi bagi Dewan Komisaris

The Nomination, Remuneration and GCG Committee conducts a review of the remuneration for the Board of Commissioners.

2

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyusun rekomendasi remunerasi bagi Dewan Komisaris

The Nomination, Remuneration and GCG Committee prepares remuneration recommendations for the Board of Commissioners.

3

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi Dewan Komisaris

The Nomination, Remuneration and GCG Committee submits the proposed remuneration for the Board of Commissioners to the Board of Commissioners.

4

Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

The Board of Commissioners discusses the proposal submitted by the Nomination, Remuneration and GCG Committee.

5*

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

The Board of Commissioners proposes the remuneration of the Board of Commissioners to the Minister of State-Owned Enterprises as the holder of the Series A Dwiwarna Share.

6*

Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atas remunerasi bagi Dewan Komisaris

The Minister of State-Owned Enterprises, as the holder of the Series A Dwiwarna Share, evaluates and provides written approval of the remuneration for the Board of Commissioners.

7

Persetujuan RUPS

Approval by the GMS.

*) Berdasarkan RUPST tanggal 28 Mei 2025
Based on the AGMS held on May 28, 2025

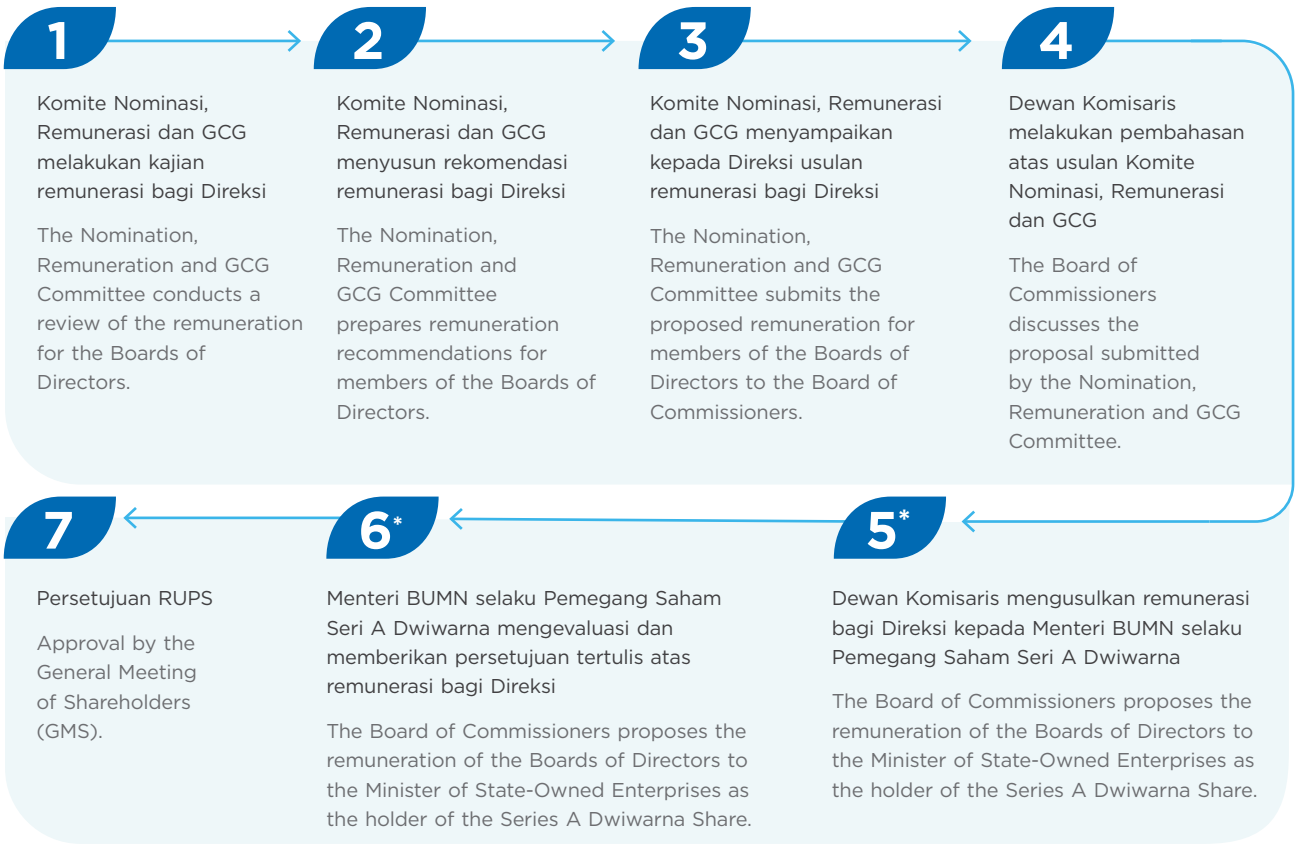
Tantiem merupakan insentif yang diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama di antaranya: kinerja Perseroan, pencapaian KPI tahunan Perseroan, dan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Tantiem is an incentive given by considering several key things, including: Company Performance, Company Annual KPI Achievement, and Company Soundness Level.

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025, PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan diberi wewenang dan kuasa dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025 bagi anggota Dewan Komisaris.

At the Annual GMS for Financial Year 2024 held on May 28, 2025, PT Pertamina (Persero), as the Company's Majority Holder of Series B Shares, was granted authority and power, subject to prior consultation with the holder of the Series A Dwiwarna Share, to determine the amount of Tantiem/ Performance, Incentives/Special Incentives for Financial Year 2024 performance, as well as the salaries, allowances, and facilities for Financial Year 2025 for members of the Board of Commissioners.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI
Procedure for Determining the Remuneration of the Board of DIrectors



*) Berdasarkan RUPST tanggal 28 Mei 2025
Based on the AGMS held on May 28, 2025

Tantiem merupakan insentif yang diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama di antaranya: Kinerja Perseroan, Pencapaian KPI Tahunan Perseroan, dan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Tantiem is an incentive given by considering several key things, including: Company Performance, Company Annual KPI Achievement, and Company Soundness Level.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024 bagi anggota Direksi. Penetapan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 57 Tanggal 28 Mei 2025.

The Annual GMS for Financial Year 2024, held on May 28, 2025, granted authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior written approval from PT Pertamina (Persero) as the Company's Majority Holder of Series B Shares after consultation with the holder of the Series A Dwiwarna Share, to determine the amount of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for Financial Year 2023 performance, as well as the salaries, allowances, and facilities for Financial Year 2024 for members of the Board of Directors. Such determination was stipulated in the Deed of Statement of GMS Resolutions Number 57 dated May 28, 2025.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
Remuneration Structure of the Board of Commissioners

Komponen Component	**Ketetapan** Decision	
	Komisaris Utama President Commissioner	**Komisaris** Commissioner
Honorarium Honorarium	45% dari gaji Direktur Utama 45% of President Director's salary	90% dari honorarium Komisaris Utama 90% of President Commissioner's honorarium
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 x Honorarium 1 x Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan Post Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris per bulan 20% of honorarium of each member of the Board of Commissioners per month	
Fasilitas Facilities		
Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Dalam bentuk *inkind* atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of in-kind or compensation for medical costs (at cost)	
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facilities	Sebesar pemakaian at cost	
Tantiem Tantiem	45% dari tantiem Direktur Utama 45% of President Director's tantiem	90% dari tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's tantiem

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI
Remuneration Structure of the Board of Directors

Komponen Component	Ketetapan Decision	
	Direktur Utama President Director	Direktur Lainnya Other Directors
Gaji Salary	100%	85% dari gaji Direktur Utama 85% of President Director's salary
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1x gaji 1x gaji	
Asuransi Purna Jabatan Post Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Perumahan Housing Allowances	Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 Year 2023 on Organs and Human Resources of SOEs	
Fasilitas Facilities		
Kendaraan Vehicle	Satu unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan One) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the Company's financial condition	
Kesehatan Health Facilities	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical costs (at cost)	
Bantuan Hukum Legal Assistance	Sebesar pemakaian at cost	
Tantiem Tantiem	100%	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Tantiem

Besaran Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut merupakan informasi mengenai jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025.

Remuneration of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following information sets out the total remuneration received by the Directors and the Board of Commissioners during the 2025 fiscal year.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Amount of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima Amount Received			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp
Remunerasi **Remuneration**				
Gaji Salary	7	10.430	8	22.087
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	-	-	8	2.174
Tantiem Tantiem	6	40.918	6	49.331
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	7	2.086	-	-
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura **Facility in the Form of Benefit in Kind**				

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Amount of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima Amount Received			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp
Perumahan (tidak dapat dimiliki) Housing (unable to be owned)	-	-	-	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki) Transportation (unable to be owned)	-	-	7	4.724
Asuransi Penuh (dapat dimiliki) Full Insurance (can be owned)	7	2.608	8	5.516
Kesehatan (tidak dapat dimiliki) Health (unable to be owned)	7	400	7	1.672
Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun **Amount of Remuneration Per Person in 1 Year**				
Di atas Rp2 miliar Above Rp 2 billion	6	52.339	8	73.593
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	1	1.096	-	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	-	-	-	-
Rp500 juta kebawah Below Rp500 million	-	-	-	-

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam merumuskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian terkait kesesuaian jenis dan tingkat remunerasi berdasarkan pencapaian kinerja, analisis perbandingan dengan jenis dan tingkat remunerasi perusahaan sejenis, serta aturan terkait remunerasi yang berlaku bagi BUMN.

Pemberian *Short-Term Incentive* (STI) bagi Direksi secara langsung dikaitkan dengan kinerja Perseroan, pencapaian KPI tahunan Perseroan, dan Tingkat Kesehatan Perseroan. Struktur STI sepenuhnya berbasis kinerja dan diturunkan dari kerangka KPI yang komprehensif yang terdiri dari KPI Kolektif dan KPI Individual, yang secara formal disetujui dan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Kementerian BUMN.

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In formulating the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee conducts an assessment of the appropriateness of the type and level of remuneration based on performance achievements, benchmarking analysis against the type and level of remuneration of comparable companies, as well as applicable regulations governing remuneration for SOEs.

The provision of Short-Term Incentive (STI) for the Board of Directors is directly linked to Company performance, Company annual KPI achievement, and Company Soundness Level. The STI structure is entirely performance-based and derived from a comprehensive KPI framework comprising Collective KPI and Individual KPI, which is formally approved and signed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and the SOE Ministry.

Pengembalian Tantiem dan Insentif Kinerja (*Clawback*) dan Tantiem yang Ditangguhkan (*Malus*)

Clawback merupakan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan. BUMN dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) dituangkan dalam suatu perjanjian antara Menteri atau pihak yang diberikan kuasa oleh Menteri dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Kebijakan *clawback* diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "BUMN") Nomor: PER3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen 3/2023").
2. Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor R-053/ C00000/2024-S8 tanggal 27 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023 dan Remunerasi 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023 ("Surat Dirut Pertamina").

Clawback of Tantiem and Performance Incentives and Deferred Tantiem (Malus)

Clawback refers to the recovery of Tantiem and cash Performance Incentives that have already been paid. SOEs may defer the payment of part or all of the Tantiem and Performance Incentives (malus) or reclaim Tantiem and cash Performance Incentives that have already been paid (clawback) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners/Board of Supervisors of SOEs under certain conditions as stipulated by the Minister.

Approval for the recovery of Tantiem and cash Performance Incentives that have already been paid (clawback) shall be set forth in an agreement between the Minister or a party authorized by the Minister and the respective member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Board of Supervisors of the SOEs.

The clawback policy is regulated in accordance with the following provisions:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as "SOEs") Number PER3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises ("Permen 3/2023"); and
2. Letter of the President Director of PT Pertamina (Persero) Number R-053/C00000/2024-S8 dated September 27, 2024 concerning the Determination of Annual Performance Awards for Fiscal Year 2023 and 2024 Remuneration for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for 2023 ("Pertamina President Director Letter").

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TRAINING PROGRAMS TO ENHANCE THE COMPETENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengajukan usulan program pengembangan kompetensi untuk mengikuti *Forum Group Discussion*, seminar, sertifikasi dan workshop sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas serta kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3. Setiap Komisaris dan Direktur yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi atau Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); dan
4. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan disampaikan ke Dewan Komisaris atau Direksi.

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

To support the performance of their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors may propose competency development programs, including participation in Focus Group Discussions, seminars, certification programs, and workshops, in accordance with their respective needs. The provisions concerning capability and competency enhancement programs for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. Competency development programs are implemented to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties;
2. Plans to undertake competency development programs must be incorporated into the Company's Work Plan and Budget;
3. Each Commissioner and Director who participates in competency development programs, such as seminars and/or training, is required to present the materials to other members of the Board of Directors or Board of Commissioners for the purpose of knowledge sharing; and
4. The respective member of the Board of Commissioners or Board of Directors must prepare a report on the implementation of the Competency Development Program and submit it to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program pelatihan, seminar, dan *workshop* sebagai berikut:

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors participated in the following training programs, seminars, and workshops:

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS
Training of the Board of Commissioners

Periode 1 Januari - 27 Agustus 2025 | Period January 1 - August 27, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementing Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session Energizing Motivation Session
		19-21 Agustus 2025 August 19-21, 2025	Yogyakarta	Implementing GRC Implementing GRC
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session Energizing Motivation Session
		1 Agustus 2025 August 1, 2025	Jakarta	Energy Leaders's Day Energy Leaders's Day
		5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	Jakarta	Pelatihan Tingkat Lanjut Arbitrase Pelatihan Tingkat Lanjut Arbitrase
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	1-3 Juli 2025 July 1-3, 2025	Semarang	Sustainable Energy Resilience: Indonesia's Path to Self Sufficiency Sustainable Energy Resilience Indonesia's Path to Self Sufficiency
		8 dan 11 Agustus 2025 August 8-11, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Risk Management Training and CRP Certification
		13-14 Agustus 2025 August 13-14, 2025	Jakarta	Master Class Corporate Governance Master Class on Corporate Governance
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2025 June 24, 2025	Jakarta	Seminar From Emissions to transactions: Legal Insight into Indonesia's Carbon Exchange Seminar "From Emissions to Transactions: Legal Insight into Indonesia's Carbon Exchange"
		1 Agustus 2025 August 1, 2025	Jakarta	Pertamina Energy Day Pertamina Energy Day
		19 Agustus 2025 August 19, 2025	Jakarta	Risk & Governance Summit 2025: Empowering The GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience oleh OJK Risk & Governance Summit 2025: Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience (organized by OJK)
Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session Energizing Motivation Session
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	24 Juni 2025 June 24, 2025	Jakarta	*Workshop* M&A oleh Komite PMR Pertamina Holding Workshop M&A oleh Komite PMR Pertamina Holding
		30 Juni 2025 June 30, 2025	Jakarta	Risk Manajemen Forum oleh Pertamina Holding Risk Manajemen Forum oleh Pertamina Holding
		1 Agustus 2025 August 1, 2025	Jakarta	Energy Leaders's Day Energy Leaders's Day
		5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	Jakarta	Pelatihan Tingkat Lanjut Arbitrase Advanced Arbitration Training
		19-21 Agustus 2025 August 19-21, 2025	Yogyakarta	Implementing GRC Implementing GRC

Periode 27 Agustus - 31 Desember 2025 | Period August 27 - December 31 2025

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementing Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	*Talkshow* Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Perlindungan Direksi dan Pekerja Pertamina Group Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy Training
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Risk Management Training and CRP Certification
		27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	*Talkshow* Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Perlindungan Direksi dan Pekerja Pertamina Group Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy Training
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	8-9 Oktober 2025 October 8-9, 2025	Jakarta	Investor Daily Summit 2025 Investor Daily Summit 2025
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Risk Management Training and CRP Certification
		27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	*Talkshow* Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Perlindungan Direksi dan Pekerja Pertamina Group Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy Training
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementing Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Risk Management Training and CRP Certification
		27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	*Talkshow* Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Perlindungan Direksi dan Pekerja Pertamina Group Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy Training
Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	*Talkshow* Implikasi Revisi UU BUMN terhadap Perlindungan Direksi dan Pekerja Pertamina Group Talkshow on the Implications of the Revision of the BUMN Law on the Protection of Directors and Employees of Pertamina Group
		3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas and LNG Business Development Strategic Training
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	*Retreat* Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Manajemen Risiko dan Sertifikasi CRP Risk Management Training and CRP Certification
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	*Retreat* Terintegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
		3 Desember 2025 December 3, 2025	Jakarta	Risk Governance Master Class Risk Governance Master Class

PELATIHAN DIREKSI
Training of the Board of Directors

Periode 1 Januari - 27 Agustus 2025 | Period Januari 1-August 27, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Arief Setiawan Handoko	Direktur Utama President Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Finance Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Ratih E. Prihatini	Direktur Komersial Commercial Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Strategy and Busniess Development Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Tekonologi Infrastructure and Technology Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Human Resource and Business Support Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	BOD-BOC Retreat "Accelerating Progress Toward Sustainable Growth" - PGN

Periode 27 Agustus - 31 Desember 2025 | Period August 27-December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
		04 Desember 2025 December 04, 2025	Jakarta	Executive Media Training 2025 - Corporate Communication Executive Media Training 2025 - Corporate Communication
Catur Dermawan	Direktur Keuangan Finance Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		08 Oktober 2025 October 09, 2025	Jakarta	Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Sertifikasi Certified Enterprise Risk Management ISO 1000:2018 oleh IRBA Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 Certification by IRBA
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Commercial Director	14 Januari 2025 January 14, 2025	Jakarta	Profesional Engineer Competency - "Insinyur Profesional Utama Executive Professional Engineer" - Fakultas Teknik UGM/Yogyakarta - Tahun 2025 Professional Engineer Competency - "Principal Professional Engineer Executive Professional Engineer" - Faculty of Engineering UGM/ Yogyakarta - 2025
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Sertifikasi Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 oleh IRBA Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 Certification by IRBA
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
		04 Desember 2025 December 04, 2025	Jakarta	Executive Media Training 2025 - Corporate Communication Executive Media Training 2025 - Corporate Communication
Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Strategy and Busniess Development Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		09 Oktober 2025 October 09, 2025	Jakarta	Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
		04 Desember 2025 December 04, 2025	Jakarta	Executive Media Training 2025 - Corporate Communication Executive Media Training 2025 - Corporate Communication
Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Tekonologi Infrastructure and Technology Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Sertifikasi Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 oleh IRBA Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 Certification by IRBA
		09 Oktober 2025 October 09, 2025	Jakarta	Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia Investor Daily Summit 2025: Exploring Energy and Commodities for a Better Indonesia
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Human Resource and Business Support Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Sertifikasi Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 oleh IRBA Certified Enterprise Risk Management ISO 31000:2018 Certification by IRBA
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Sosialisasi Peraturan Internal Perusahaan (Anggaran Dasar & *Board Manual*) Tahun 2025 - LCC PGN Dissemination of Internal Company Regulations (Articles of Association & Board Manual) Year 2025 - LCC PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Human Capital (Proses Orientasi dan Pengenalan, Peran strategi Human Capital, Hak Kewajiban dan Prosedur yang relevan bagi Direksi) - HCM Division PGN Human Capital Induction (Orientation and Introduction Process, Strategic Role of Human Capital, Rights, Obligations, and Relevant Procedures for the Board of Directors) - HCM Division PGN
		29 Agustus 2025 August 29, 2025	Jakarta	Induksi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), (pengenalan terkait kebijakan dan prosedur HSSE yang relevan untuk Direksi) - HSSE Division PGN Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Induction (Introduction to HSSE Policies and Procedures Relevant to the Board of Directors) - HSSE Division PGN
		07-10 September 2025 September 07-10, 2025	Jakarta	Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified GRC Executive Officer) - CRMS Indonesia Training and Certification for Contract Designers (Certified GRC Executive Officer) – CRMS Indonesia
		15 September 2025 September 15, 2025	Jakarta	The 16th IICD Corporate Governance Conference & Awards - Indonesian Institute for Corporate Directorship The 16th IICD Corporate Governance Conference & Awards - Indonesian Institute for Corporate Directorship
		29 September 2025 September 29, 2025	Jakarta	Sharing Knowledge Legal Preventive Program - Human Capital Manajement, PGN Legal Preventive Program Knowledge Sharing – Human Capital Management, PGN

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan & Sertifikasi Ulang Manajemen Risiko (Certified Risk Professional) - PT IRBA Group Indonesia Risk Management Retraining and Certification (Certified Risk Professional) – PT IRBA Group Indonesia
		20 Oktober 2025 October 20, 2025	Jakarta	Risk Management Forum 2025 Subholding PNRE - Turning Green into Gold - PT Pertamina Power Indonesia Risk Management Forum 2025 – PNRE Subholding: Turning Green into Gold – PT Pertamina Power Indonesia
		27 Oktober 2025 October 27, 2025	Jakarta	Talkshow Dengan Wakil Menteri Hukum RI - Implikasi Revisi UU BUMN Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Direksi dan Pekerja Pertamina Group - PT Pertamina (Persero) Talkshow with the Deputy Minister of Law of the Republic of Indonesia – Implications of the Amendment to the State-Owned Enterprises Law on Legal Protection for the Board of Directors and Employees of Pertamina Group – PT Pertamina (Persero)
		05 November 2025 November 05, 2025	Jakarta	Leaders Forum & Closing Pertamina Learning Festival 2025 - PT Pertamina (Persero) Leaders Forum & Closing of Pertamina Learning Festival 2025 – PT Pertamina (Persero)
		12 November 2025 November 12, 2025	Jakarta	Risk Management Forum 2025 PT Pertamina (Persero) - Project Risk Management Risk Intelligence & Strategic Evolution (RISE) - PT Pertamina (Persero) Risk Management Forum 2025 – PT Pertamina (Persero): Project Risk Management, Risk Intelligence & Strategic Evolution (RISE) – PT Pertamina (Persero)
		19 November 2025 November 19, 2025	Jakarta	Executive Workshop Pengendalian Korupsi Efektif, Menuju Tata Kelola BUMN Kompetitif - BPKP Executive Workshop on Effective Corruption Control: Towards Competitive SOE Governance – BPKP
		28 November 2025 November 28, 2025	Jakarta	Membangun Budaya Sadar Risiko Berbasis Model Tiga Lini - RSIG Building a Risk-Aware Culture Based on the Three Lines Model – RSIG
		28 - 30 November 2025 November 28-30, 2025	Magelang	Retreat Teritegrasi Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero) Integrated Retreat for the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group 2025 - Akademi Militer Magelang & PT Pertamina (Persero)
		04 Desember 2025 December 04, 2025	Jakarta	Executive Media Training 2025 - Corporate Communication Executive Media Training 2025 - Corporate Communication

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU

POLICY ON ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PGN memiliki kebijakan pelaksanaan program pengenalan Perusahaan yang ditujukan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat, agar dapat segera mengenal proses bisnis Perusahaan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perusahaan.

Melalui program ini, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru diangkat diharapkan dapat segera memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing secara efektif. Program pengenalan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dilaksanakan oleh Corporate Secretary.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2025

Pada tahun 2025, program pengenalan diberikan kepada lima anggota Dewan Komisaris dan lima Direksi baru, yakni Widjono Hardjanto, Edward Omar Sharif Hiariej, Conny Lolyta Rumondor, Rambe Kamarul Zaman, Thanon Aria Dewangga, Catur Dermawan, Hery Murahmanta, Mirza Mahendra, Aldiansyah Idham, dan Eri Surya Kelana.

Dalam pelaksanaan program tersebut, PGN melalui Corporate Secretary mempresentasikan berbagai hal terkait GCG dan kinerja Perusahaan yang mencakup: Bisnis & Posisi Bisnis Subholding Gas, Struktur & Proses Bisnis Subholding Gas, *Key Performance Indicator* Tahun 2025, *Overview* RJPP Subholding Gas, Program Strategis Subholding Gas, Profil Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta *Update* Aturan Internal PGN (Anggaran Dasar dan *Board Manual*)

PGN has a policy on the implementation of a corporate orientation program for members of the Board of Commissioners and Board of Directors who are appointed for the first time, enabling them to quickly gain an understanding of the Company's business processes, including all issues that have been, are currently being, and will be faced, thus helping them to work optimally for the benefit of the Company.

Through this program, the newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors are expected to quickly understand all aspects related to their roles and responsibilities to effectively carry out their respective duties. The orientation program for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is organized by the Corporate Secretary.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the orientation program was provided for five new members of the Board of Commissioners and five new members of the Board of Directors, namely Widjono Hardjanto, Edward Omar Sharif Hiariej, Conny Lolyta Rumondor, Rambe Kamarul Zaman, Thanon Aria Dewangga, Catur Dermawan, Hery Murahmanta, Mirza Mahendra, Aldiansyah Idham, and Eri Surya Kelana.

In the implementation of this program, PGN through the Corporate Secretary presented various topics related to GCG and the Company's performance, including: the Business and Business Position of the Gas Subholding, the Business Structure and Processes of the Gas Subholding, the 2025 Key Performance Indicators, an Overview of the Gas Subholding's RJPP, the Gas Subholding's Strategic Programs, Profiles of Subsidiaries and Affiliates, and updates on Internal PSN regulations (Articles of Association and Board Manual).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

PGN memiliki kebijakan dan target dalam menerapkan kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan dengan mematuhi persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memperhatikan peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menekankan pada keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

The composition of PGN's Board of Commissioners and Board of Directors is diverse in terms of age, gender, educational background, and experience required to sustain the implementation of their duties and responsibilities.

PGN has adopted policies and targets to promote diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners. Such implementation is conducted in compliance with the applicable requirements for the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, which take into account the following regulations:

1. Regulation of SOEs Minister Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of SOEs Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, emphasizing expertise, integrity, leadership, experience, good behavior, competence in performing legal actions, and high dedication to advancing and developing the Company.

Nama Name	***Gender*** Gender	**Usia** Age	**Latar Belakang Pendidikan** Educational Background			**Pengalaman** Experience					
			S1	**S2**	**S3**	**Oil&Gas** Oil&Gas	**Ekonomi** Economy	**Infrastruktur** Infrastructure	**Hukum** Law	**SDM** HR	**Sosial Politik** Politics and Social
Dewan Komisaris | Board of Commissioners											
Periode 1 Januari-27 Agustus 2025 | Period of January 1 – August 27, 2025											
Amien Sunaryadi	Pria Male	65	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Luky Alfirman	Pria Male	55	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Warih Sadono	Pria Male	62	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
Christian H. Siboro	Pria Male	57	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
Dini Shanti Purwono	Wanita Female	51	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
Abdullah Aufa Fuad	Pria Male	34	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Tony Setia Boedi Hoesodo	Pria Male	71	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓

Nama Name	*Gender* Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background			Pengalaman Experience					
			S1	S2	S3	Oil&Gas Oil&Gas	Ekonomi Economy	Infrastruktur Infrastructure	Hukum Law	SDM HR	Sosial Politik Politics and Social
Periode 27 Agustus 2025-sekarang I Period of August 27, 2025 – present											
Tony Setia Boedi Hoesodo	Pria Male	71	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
Widjono Hardjanto	Pria Male	69	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
Conny Lolyta Rumondor	Wanita Female	64	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-
Rambe Kamarul Zaman	Pria Male	69	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓
Edward Omar Sharif Hiariej	Pria Male	52	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
Thanon Aria Dewangga	Pria Male	52	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓
Direksi | Board of Directors											
Periode 1 Januari-27 Agustus 2025 I Period of January 1 – August 27, 2025											
Arief S. Handoko	Pria Male	58	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Harry Budi Sidharta	Pria Male	48	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Pria Male	58	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Rosa Permata Sari	Wanita Female	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Ratih Esti Prihatini	Wanita Female	59	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Rachmat Hutama	Pria Male	52	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
Arief Kurnia Risdianto	Pria Male	47	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
Periode 27 Agustus 2025-sekarang I Period of August 27, 2025 – present											
Arief Kurnia Risdianto	Pria Male	47	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
Hery Murahmanta	Pria Male	52	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
Catur Dermawan	Pria Male	52	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Mirza Mahendra	Pria Male	44	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Aldiansyah Idham	Pria Male	47	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Rachmat Hutama	Pria Male	52	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
Eri Surya Kelana	Pria Male	54	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-

PENGALAMAN DAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN saat ini memiliki keahlian yang relevan dengan industri, serta pemahaman mendalam tentang dinamika, tantangan, dan peluang yang spesifik terutama pada sektor transmisi dan distribusi gas bumi.

Keahlian ini mencakup pengalaman strategis dalam mengelola Perusahaan, kemampuan membaca tren pasar, serta wawasan terhadap regulasi dan teknologi yang relevan. Seluruh informasi mengenai pengalaman dan kompetensi anggota manajemen dapat dilihat melalui profil masing-masing anggota pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, keterwakilan perempuan di dalam level eksekutif adalah satu komisaris perempuan dari tujuh anggota Dewan Komisaris, dan dua perempuan dari tujuh anggota Direksi. Setelah terjadinya perubahan pengurus, per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris PGN terdiri atas enam anggota, di mana satu di antaranya adalah perempuan, sementara Direksi PGN terdiri atas tujuh laki-laki.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selaras dengan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mensyaratkan adanya setidaknya satu perwakilan perempuan yang menjabat sebagai Direktur Independen atau Komisaris. Sebagai bagian dari target jangka panjang, PGN menetapkan sasaran hingga tahun 2034 untuk mencapai rasio 25% pemimpin perempuan serta meningkatkan keterwakilan perempuan pada tingkat BOD-1 sebesar 15%.

EXPERIENCE AND COMPETENCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

All current members of PGN's Board of Commissioners and Board of Directors possess industry-relevant expertise and a strong understanding of the dynamics, challenges, and opportunities, particularly within the natural gas transmission and distribution sector.

Their expertise includes strategic experience in managing the Company, the ability to read market trends, and insight into relevant regulations and technology. All information regarding the experience and competencies of management members can be found in their respective profiles in the Chapter of Company Profile, Sub-Chapter of Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.

REPRESENTATION OF FEMALE MEMBERS ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

During 2025, female representation at the executive level included one female commissioner out of seven members of the Board of Commissioners and two female directors out of seven members of the Board of Directors. Subsequent to changes in the management composition, as of December 31, 2025, PGN's Board of Commissioners consisted of six members, including one woman, whereas the Board of Directors comprised seven men.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors adheres to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards, which require at least one female representative to serve as an Independent Director or Commissioner. As part of its long-term targets, PGN has set a target of achieving a 25% female leadership ratio and increasing female representation at the BOD-1 level of 15% by 2034.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI (PER 31 DESEMBER 2025)

AFFILIATIONS AMONG THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS (AS OF DECEMBER 31, 2025)

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Family Relations			Hubungan Keuangan Financial Relations			Kepemilikan Saham di PGN Share Ownership in PGN
		Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Utama Majority Shareholder	Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Utama Majority Shareholder	
Dewan Komisaris | Board of Commissioners								
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Thanon Aria Dewangga	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Rambe Kamarul Zaman	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Widjono Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Conny Lolyta Rumondor	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Direksi | Board of Directors								
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-
Hery Murahmanta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	-	-	-	-	-
Catur Dermawan	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-	-	-	-
Mirza Mahendra	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	-	-	-	-	-
Aldiansyah Idham	Direktur Komersial Director of Commercial	-	-	-	-	-	-	-
Eri Surya Kelana	Direktur Manajemen Risiko Director Risk Management	-	-	-	-	-	-	-
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	-	-	-	-	-	-	-

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris PGN dibantu oleh empat Komite. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komite tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi dan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi:
1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, the PGN Board of Commissioners is assisted by four Committees. The establishment and implementation of the Committees' functions are carried out pursuant to the provisions of applicable laws and regulations, including Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Regulation of SOEs Minister Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Regulation of SOEs Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee and Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.

The committees under the Board of Commissioners include:

1. The Audit Committee
2. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee
3. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee
4. The Integrated Governance Committee

KOMITE AUDIT

THE AUDIT COMMITTEE

Perubahan Komposisi Komite Audit

Changes in the Composition of the Audit Committee

Periode 1 Januari – 27 Agustus 2025 | Period of January 1 – August 27, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Dini Shanti Purwono
Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	Abdullah Aufa Fuad
Anggota Member	Rini Yulius
Anggota Member	Fajar Ariwinadi
Anggota Member	Yan Rahadian

Periode 27 Agustus – 30 Agustus 2025 | Period of August 27 – August 30, 2025

Anggota Member	Rini Yulius
Anggota Member	Fajar Ariwinadi
Anggota Member	Yan Rahadian

Periode 1 September – 14 September 2025 | Period of September 1 – 14, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Conny Lolyta Rumondor
Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	Widjono Hardjanto
Anggota Member	Rini Yulius
Anggota Member	Fajar Ariwinadi
Anggota Member	Yan Rahadian

Periode 15 September – 31 Desember 2025 | Period of September 15 – December 31, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Conny Lolyta Rumondor
Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	Widjono Hardjanto
Anggota Member	Fajar Ariwinadi
Anggota Member	Yan Rahadian
Anggota Member	Widya Perwitasari

Profil Anggota Komite Audit Per 31 Desember 2025

Profile of Audit Committee Members as of December 31, 2025

Conny Lolyta Rumondor - Ketua Komite Audit | Chairperson of the Audit Committee
(1 September 2025 - sekarang) | (September 1, 2025 - present)

Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/DKOM/ 2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is the Board of Commissioners Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/DKOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Conny Lolyta Rumondor juga merupakan Komisaris Independen PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Conny Lolyta Rumondor is also an Independent Commissioner of PGN. Her profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Widjono Hardjanto - Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee
(1 September 2025 - sekarang) | (September 1, 2025 - present)

Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/DKOM/ 2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is the Board of Commissioners Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/DKOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Widjono Hardjanto juga merupakan Komisaris Independen PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Widjono Hardjanto is also an Independent Commissioner of PGN. His profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Fajar Ariwinadi - Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee **(1 Januari 2025 - sekarang)** | (January 1, 2025 - present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 16 Juli 1976. Usia 48 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jakarta.	An Indonesian citizen, born in Jakarta on July 16, 1976. 49 years old as of December 31, 2025. Domiciled in Jakarta.
Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-06/D-KOM/2022 efektif berlaku tanggal 1 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Saudara Fajar Ariwinadi sebagai Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The legal basis for the appointment as a Member of the Audit Committee is the Board of Commissioners Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-06/D-KOM/2022, effective as of October 1, 2022 on the Appointment of Fajar Ariwinadi as Member of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.	Education: Bachelor of Civil Engineering from Universitas Indonesia and Master of Management from Universitas Indonesia.
Sertifikasi: Certification in Audit Committee Practices (CACP) dan Certified Risk Professional (CRP).	Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP) and Certified Risk Professional (CRP).
Riwayat pekerjaan: menjabat sebagai General Corporate Finance di Bomba Group (2021-2022), GM Finance di PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (2018-2021), Asisten VP di PT Semen Indonesia (2016-2017), dan AVP Finance di PT Pemalang Batang Toll Road (2016).	Work experience: served as General Corporate Finance at Bomba Group (2021-2022), GM Finance at PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (2018-2021), Assistant VP at PT Semen Indonesia (2016-2017), and AVP Finance at PT Pemalang Batang Toll Road (2016).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Yan Rahadian - Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee **(1 Januari 2025 - sekarang)** | (January 1, 2025 - present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 29 Juni 1977. Usia 48 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jakarta.	An Indonesian citizen, born in Bandung on June 29, 1977. 48 years old as of December 31, 2025. Domiciled in Jakarta.
Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-02/DKOM/2024 tanggal 14 Maret 2024 efektif berlaku tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengangkatan Saudara Yan Rahadian sebagai Anggota Komite Non Komisaris Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The legal basis for the appointment as a Member of the Audit Committee is the Board of Commissioners' Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-02/DKOM/2024 dated 14 March 2024, effective as of 15 March 2024, on the Appointment of Yan Rahadian as a Non-Commissioner Member of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia serta Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia.	Education: Bachelor of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, and Master of Science in Accounting, Graduate Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia.
Sertifikasi: Chartered Accountant (CA), Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), Certification in Audit Committee Practice (CACP), Certificate in Sustainability for Finance (Cert SF), dan Certified Risk Profesional (CRP).	Certification: Chartered Accountant (CA), Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), Certification in Audit Committee Practice (CACP), Certificate in Sustainability for Finance (Cert SF), and Certified Risk Professional (CRP).
Riwayat pekerjaan: menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Asuransi Bintang (2013 – 2024), Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2020-sekarang), Instruktur Pelatihan Accounting for Corporate Lawyer di Djakarta Legal Practice (DLP) (2019-sekarang), Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) (2012-sekarang) dan Staf Pengajar FEB di Universitas Indonesia (1998-sekarang).	Work experience: served as a Member of the Audit Committee at PT Asuransi Bintang (2013-2024), Member of the Government Accounting Standards Committee (KSAP) (2020-present), Training Instructor for Accounting for Corporate Lawyers at Djakarta Legal Practice (DLP) (2019-present), Member of the Bank Indonesia Financial Accounting Policy Committee (KAKBI) (2012-present), and Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (1998-present).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Widya Perwitasari - Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee **(15 September 2025 - sekarang)** | (September 15, 2025 - present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 1982 (43 tahun) per 31 Desember 2025, berdomisili di Tangerang Selatan.	An Indonesian citizen, born in Jakarta on July 29, 1982. 43 years old as of December 31, 2025. Domiciled in South Tangerang.
Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-18/D-KOM/2025 efektif berlaku tanggal 15 September 2025 tentang Pengangkatan Saudari Widya Perwitasari sebagai Anggota Komite Non Komisaris Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	The legal basis for the appointment as a Member of the Audit Committee is the Board of Commissioners Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-18/D-KOM/2025, effective on September 15, 2025, on the Appointment of Widya Perwitasari as a Non-Commissioner Member of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia (FEB UI), Master bidang Keuangan Internasional dari Universitas Sogang, Korea Selatan, dan S3 Kriminologi Keuangan dari Universiti Teknologi MARA Malaysia.	Education: Bachelor of Economics in Accounting from the Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Master's degree in International Finance from Sogang University, South Korea, and Doctorate in Financial Criminology from Universiti Teknologi MARA Malaysia.
Sertifikasi: Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant, dan Certified Public Accountant.	Certification: Chartered Accountant (CA), Certified Professional Management Accountant, and Certified Public Accountant.
Riwayat pekerjaan: menjabat sebagai Komite Audit di PT Asuransi Bintang (2022), Ketua Tim Implementasi PSAK 71 di beberapa BUMN (2018-2022), anggota Tim Teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) (2012-2018). Saat ini juga menjadi staf pengajar dan peneliti di Universitas Indonesia serta aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi dan keuangan.	Work experience: served in the Audit Committee at PT Asuransi Bintang (2022), Chair of the PSAK 71 Implementation Team at several SOEs (2018-2022), member of the Technical Team of the Bank Indonesia Financial Accounting Policy Committee (KAK BI) (2012-2018). Currently also a lecturer and researcher at Universitas Indonesia and actively provides training and consulting services in accounting and finance.
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Keahlian Komite Audit

Komite Audit memiliki anggota independen yakni Conny Lolyta Rumondor, Widjono Hardjanto, Fajar Ariwinadi, dan Yan Rahadian, dan Widya Perwitasari. Seluruh anggota independen Komite Audit tersebut memiliki keahlian dan latar belakang di bidang keuangan atau industri.

Expertise of the Audit Committee

The Audit Committee comprises independent members, namely Conny Lolyta Rumondor, Widjono Hardjanto, Fajar Ariwinadi, Yan Rahadian, and Widya Perwitasari. All independent members of the Audit Committee have expertise and backgrounds in finance or industry.

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

100%

Anggota Komite Audit adalah Independen
of the Audit Committee Members are Independent

Komite Audit PGN dipimpin oleh Komisaris Independen. Susunan Komite Audit terdiri dari satu orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan tiga orang anggota profesional dari luar Perseroan.

The Audit Committee of PGN is chaired by an Independent Commissioner. The Audit Committee consists of one member who is a member of the Board of Commissioners and three members who are professionals from outside the Company.

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan di Perseroan baik entitas anak maupun perusahaan afiliasi, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Susunan keanggotaan Komite Audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit senantiasa menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pernyataan independensi masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

All members of the Audit Committee are independent parties who have no relationship in terms of finance, management, share ownership and/or family ties with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor any business relationship with the Company, its subsidiaries or affiliated companies, which could affect their ability to act independently.

The composition of the Audit Committee complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee. In carrying out its duties, the Audit Committee consistently applies the principles of professionalism and independence, without interference from any party. The statements of independence of each member of the Audit Committee are as follows:

No.	Pernyataan Independensi Statement of Independence	Conny Lolyta Rumondor	Dini Shanti Purwono	Widjono Hardjanto	Abdullah Aufa Fuad	Fajar Ariwinadi	Yan Rahadian	Widya Perwitasari	Rini Yulius
1	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. Not working nor having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last six months, except Independent Commissioner	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan Not directly or indirectly owning any shares of the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/ pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Not having any affiliation with the Company or the majority/controlling shareholders of the Company or one of the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Not having a direct or indirect working/ professional relationship with the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Note:
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Audit
The terms of office of the Chairman and Members of the Audit Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Audit Committee

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Anggaran Dasar PGN; dan
7. *Board Manual* PGN.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Maret 2004 dan telah diperbarui pada 18 Januari 2024.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

1. Tugas dan Tanggung Jawab
2. Wewenang
3. Prosedur Kerja
4. Persyaratan Anggota
5. Masa Tugas
6. Rapat
7. Pelaporan
8. Evaluasi Kinerja

Piagam Komite Audit secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Periode dan Masa Jabatan

1. Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan.

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Audit Committee refers to:

1. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
2. OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidelines for Audit Committees;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
5. OJK Circular Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines for the Governance of Public Companies;
6. PGN Articles of Association; and
7. PGN Board Manual.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee adheres to the Audit Committee Charter, which was first established on March 30, 2004 and updated on January 18, 2024.

The scope of the Audit Committee Charter includes:

1. Duties and Responsibilities
2. Authority
3. Work Procedures
4. Member Requirements
5. Term of Office
6. Meetings
7. Reporting
8. Performance Evaluation

The complete Audit Committee Charter can be viewed on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

Period and Term of Office

1. The term of office of the Chairperson and Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners must not exceed the term of office of said Board of Commissioners.
2. The term of office of Audit Committee Members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of three years and may be extended once for a two-year term.

3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Memiliki minimal satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Mematuhi Kode Etik Perusahaan dan menandatangani Pakta Integritas.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai:
   a. Hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
9. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
10. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

3. The term of office of the Chairperson and Members of the Audit Committee may be terminated at any time based on the resolution of the Board of Commissioners.

Membership Requirements for the Audit Committee

1. Having high integrity, adequate skills, knowledge, and experience aligned with their educational background, as well as the ability to collaborate and communicate effectively.
2. Understanding financial statements, company business, particularly those related to the Company's business activities, the audit process, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector and other related laws and regulations.
3. Having at least one member with an educational background and expertise in accounting and finance.
4. Complying with the Company's Code of Ethics and signing the Integrity Pact.
5. Not being a member of a Public Accounting Firm, Law Firm, or other party that provides insurance services, non-insurance services, and/or other consulting services to the Company within the last six months before being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not being a party who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities within the last six months before being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners.
7. Not holding any direct or indirect shares in the Company. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares as a result of a legal event, they must transfer them to another party within a maximum period of six months after acquiring the shares.
8. Not having:
   a. Affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and
   b. Direct or indirect business relationships related to the Company's activities.
9. Not having any personal interests or connections that could have a negative impact on the Company or cause conflicts of interest.
10. Being able to devote sufficient time to complete their duties.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit PGN sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 002/11/KOM-1/2004 tanggal 30 Maret 2004 yang dimutakhirkan pada 18 Januari 2024 yaitu memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan antara lain pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Eksternal.
   a. Mengkaji hasil pemeriksaan oleh Auditor Eksternal;
   b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
   c. Memastikan dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan kebutuhan sumber daya dari Unit Kerja Audit Internal.
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

As outlined in the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the PGN Audit Committee are in accordance with those stipulated in the President Commissioner Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 002/11/KOM-1/2004 dated March 30, 2004, which was updated on January 18, 2024, namely to provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, and perform other duties related to the duties of the Board of Commissioners, including:

1. Reviewing financial information to be released by the Company, such as financial statements, projections, Long-Term Plans, Company Work Plans and Budgets, management reports, and other reports related to the Company's financial information.
2. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market and other laws and regulations related to the Company's activities.
3. Providing independent opinions in the event of differences of opinion between management and Public Accountants regarding the services provided.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of Public Accountants based on, among other things, independence, scope of assignment, and remuneration.
5. Reviewing the results of audits conducted by External Auditors.
   a. Reviewing the results of the audit by the External Auditor;
   b. Evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information by the Public Accounting Firm (KAP); and
   c. Ensuring and reviewing the effectiveness of the implementation of follow-up actions on the audit results.
6. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the preparation of audit plans, scope, and resource requirements of the Internal Audit Work Unit.
7. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors.
8. Providing recommendations for improvements to the management control system and its implementation.

9. Melakukan evaluasi perusahaan pemeringkat yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
10. Melakukan evaluasi terhadap usulan Piagam Audit Internal yang diusulkan Direksi.
11. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha apabila terdapat indikasi/ potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan dalam rangka penelaahan pelaksanaan peran Audit Internal sebagai lini ketiga dalam manajemen risiko.
12. Berkoordinasi dengan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG terkait dengan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan kualitas kinerja Audit Internal.
13. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
14. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan.
15. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
17. Menyusun Program Kerja Tahunan.
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit Perseroan juga memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap transaksi afiliasi yang material dan menyatakan bahwa transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dalam hal Auditor Eksternal, Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas Auditor Eksternal, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal, serta memberikan rekomendasi atas pemberhentian Auditor Eksternal.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki kewenangan tertentu dalam mendukung fungsi dan tugas yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan tugasnya.

9. Evaluating rating agencies to be appointed by the Board of Commissioners to assess the Company's Health Rating.
10. Evaluating the Internal Audit Charter proposed by the Board of Directors.
11. Coordinating with the Risk Management and Business Development Monitoring Committee in the event of indications/potential risks faced by the Company and in order to review the implementation of the Internal Audit's role as the third line of defense in risk management.
12. Coordinating with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee on Corporate Governance, the implementation of Environmental Social Responsibility (TJSL) and the quality of Internal Audit performance.
13. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
14. Ensuring satisfactory review procedures have been established for the Company's published financial information.
15. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest involving the Company.
16. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.
17. Preparing the Annual Work Program.
18. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

The Company's Audit Committee is also responsible for reviewing material related party transactions and declaring that such transactions are in the interests of the Company and its shareholders. With regard to the External Auditor, the Audit Committee also performs duties and responsibilities to actively supervise the activities of the External Auditor, monitor and evaluate the provision of audit services on annual historical financial information by the External Auditor, and provide recommendations on the dismissal of the External Auditor.

Authority of the Audit Committee

The Audit Committee exercises certain authority in supporting the functions and duties assigned by the Board of Commissioners, namely:

1. Having full, free, and unrestricted access to Company documents, data, and information about employees, funds, assets, and other resources of the Company that are necessary and relevant to the duties of the Committee.

2. Berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi keuangan dan akuntansi, Audit Internal, kepatuhan dan fungsi lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta dengan Kantor Akuntan Publik dari Perseroan.
3. Meminta bantuan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Practicing direct communication and coordination with employees, including the Board of Directors and parties performing financial and accounting functions, Internal Audit, compliance, and other functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee, as well as with the Company's Public Accounting Firm.
3. Requesting assistance from independent parties outside the Audit Committee as necessary to assist in the performance of its duties (if necessary).
4. Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan Anggota Komite Audit

Sesuai piagam Komite, PGN memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan anggota Komite, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, Anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan, *workshop*, konferensi ataupun seminar terkait dengan bidang keuangan, tata kelola, dan keberlanjutan sebagai berikut:

Training Programs for Members of the Audit Committee

In accordance with the Committee's charter, PGN implements a policy to support the development of Committee members through training and competency development to support the implementation of their duties and responsibilities. Throughout 2025, members of the Audit Committee attended training programs, workshops, conferences, and seminars related to finance, governance, and sustainability, as follows:

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT NON KOMISARIS
Training for Non-Commissioner Audit Committee Members

Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Location	Keterangan Description
Fajar Ariwinadi	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session – Retreat BOC BOD
	25-26 Juni 2025 June 25-26, 2025	Yogyakarta	National Anti Fraud Conference 2025 'Becik Ketitik Ala Ketara"
	15 Juli 2025 July 15, 2025	Jakarta	Seminar Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Streghthening Risk Governance and Portfolio Management Seminar on Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portfolio Management
	30 September 2025 September 30, 2025	Jakarta	Seminar Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals Seminar on Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Training on Domestic Gas & LNG Business Development Strategy
Yan Rahadian	14 Februari 2025 February 14, 2025	Jakarta	Perolehan Sertifikasi IPSAS-International Public Sector Accounting Standard IPSAS - International Public Sector Accounting Standard Certification
	13 Februari 2025 February 13, 2025	Batam	Energizing Motivation Session – Retreat BOC BOD
	23 – 24 April 2025 April 23-24, 2025	Jakarta	*Workshop* Penerapan SAK Indonesia untuk Entitas Privat Workshop on the Implementation of Indonesia Financial Accounting Standards for Private Entities
	25-26 Juni 2025 June 25-26, 2025	Yogyakarta	National Anti Fraud Conference 2025 'Becik Ketitik Ala Ketara"

Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Location	Keterangan Description
	15 Juli 2025 July 15, 2025	Jakarta	Seminar Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Streghthening Risk Governance and Portfolio Management -Ikatan Komite Audit Indonesia Seminar on Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portfolio Management - the Indonesian Audit Committee Association
	30 September 2025 September 30, 2025	Jakarta	Seminar Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals Seminar on Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals
	23-34 Oktober October 23-24, 2025	Jakarta	Pelatihan ICoFr 2025 ICoFr Training of 2025
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Training on Domestic Gas & LNG Business Development Strategy
Widya Perwitasari	30 September 2025 September 30, 2025	Jakarta	Seminar Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals Seminar on Sustainability Reporting: Impact and Implementation of PSPK 1 & 2 for Professionals
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Training on Domestic Gas & LNG Business Development Strategy
Rini Yulius	8 Februari 2025 February 8, 2025	Jakarta	Certified Public Accountant Professional penyelenggara Universitas Indonesia Certified Public Accountant Professional Program organized by Universitas Indonesia
	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session – Retreat BOC BOD
	25-26 Juni 2025 June 25-26, 2025	Yogyakarta	National Anti Fraud Conference 2025 'Becik Ketitik Ala Ketara"
	15 Juli 2025 July 15, 2025	Jakarta	Seminar Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Streghthening Risk Governance and Portfolio Management Seminar on Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight- The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portfolio Managemen

Pelatihan Anggota Komite Audit yang Merangkap Jabatan Komisaris

Informasi pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Audit yang merangkap Komisaris PGN dapat dilihat pada sub bab Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Penelaahan Rencana Perseroan atas:
   a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025;
   b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025; dan
   c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") 2026-2030,

Training for Members of the Audit Committee Concurrently Holding the Position of Commissioner

Information on training and competency development for the Audit Committee concurrently holding the position of Commissioner at PGN can be found in the Training for the Board of Commissioners and Board of Directors sub-section in the Corporate Governance Chapter.

Implementation of Audit Committee Activities

Throughout 2025, the Audit Committee carried out various activities as follows:

1. Reviewing the Company's Plans on:
   a. The Company's Work Plan and Budget for 2025;
   b. Revisions to the Company's Work Plan and Budget for 2025; and
   c. The Company's Long-Term Plan ("RJPP") for 2026-2030.

2. Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas:
   a. Pengadaan Jasa Audit Independen/Eksternal (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Keuangan Pendanaan UMK terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penetapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun 2024;
   b. Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2024;
   c. Revisi Piagam Audit Internal Tahun 2025;
   d. Revisi Audit Annual Plan Tahun 2025 Internal Audit;
   e. Transaksi Pengalihan Data WNTS - Pemping antara PGN dan PLN EPI.
3. Melakukan pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik EY terkait:
   a. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PGN Tahun 2024;
   b. Audit Laporan Keuangan (LK) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PGN Tahun Buku 2024;
   c. Audit Kepatuhan PSA 62 Tahun 2024;
   d. Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat & KPI Direktorat PGN dan Entitas Anak untuk Periode Tahun Buku 2024;
   e. Review Laporan Keuangan Konsolidasian PGN Semester I Tahun 2025;
   f. Review Laporan Keuangan Konsolidasian PGN Periode 30 September Tahun 2025
   g. Key Audit Matters ("KAM") Laporan Keuangan per 31 Desember 2024
4. Melakukan penelaahan atas Laporan Internal Audit, antara lain:
   a. Laporan Triwulanan Internal Audit Triwulan IV Tahun 2024 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2025;
   b. Sebanyak 20 Laporan Hasil Pengawasan yang mencakup Audit, Konsultasi dan Insight.
5. Melakukan penelaahan/evaluasi dan memberikan saran/masukan/nasihat atas:
   a. Laporan Keuangan PGN Tidak Diaudit Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2025;
   b. Laporan Kinerja Triwulanan PGN;
   c. Laporan Manajemen Bulanan PGN;
   d. Laporan Tahunan PGN Tahun 2024;
   e. Evaluasi Kinerja KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2024;

2. Conducting discussions and providing recommendations on:
   a. Procurement of Independent/External Audit Services (KAP) for Consolidated Financial Statement Audits, PSA 62 Compliance Audits, MSME Financing Financial Audits related to Social and Environmental Responsibility Programs, and Determination of Agreed Procedures on the 2024 Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Reports;
   b. Procurement of Rating Agency Services for Company Health Assessment for the 2024 Fiscal Year;
   c. Revision of the 2025 Internal Audit Charter;
   d. Revision of the 2025 Internal Audit Annual Plan;
   e. Transaction of WNTS - Pemping Data Transfer between PGN and PLN EPI.
3. Having discussions with EY Public Accounting Firm regarding:
   a. Audit of PGN Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
   b. Audit of Financial Statements (LK) for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) related to PGN's Social and Environmental Responsibility (TJSL) for the 2024 Fiscal Year;
   c. Audit on Compliance with PSA 62 for the Year 2024;
   d. Implementation of Agreed Procedures on the Report on the Evaluation of Corporate KPI and Directorate KPI Performance and PGN Subsidiaries for the 2024 Fiscal Year;
   e. Review of PGN Consolidated Financial Statements for the First Half of 2025;
   f. Review of PGN's Consolidated Financial Statements for the Period Ended 30 September 2025
   g. Key Audit Matters ("KAM") of the Financial Statements as of December 31, 2024
4. Reviewing Internal Audit Reports, including:
   a. Internal Audit Quarterly Report for Q4 of 2024 and Q1, Q2, and Q3 of 2025;
   b. A total of 20 Supervisory Reports covering Audit, Consultation, and Insight.
5. Conducting reviews/evaluations and providing suggestions/input/advice on:
   a. Unaudited PGN Financial Statements for Q1 and Q3 of 2025;
   b. PGN Quarterly Performance Report;
   c. PGN Monthly Management Report;
   d. PGN Annual Report for 2024;
   e. Evaluation of KAP Performance on the 2024 Financial Report;

f. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal; dan
g. Evaluasi Kinerja Internal Audit Division.
h. Laporan Kegiatan 3D Seismic Acquisition & Processing – WK Pangkah.

6. Melakukan Rapat Koordinasi Komite Audit Holding-Subholding.
7. Menghadiri 24 BOC Meeting sesuai permintaan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Lainnya dalam Penyusunan dan Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan

Komite Audit Perseroan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan. Beberapa tindakan lain yang dilakukan oleh Komite Audit dalam proses ini meliputi:

1. Keterlibatan langsung dalam perkembangan proses audit laporan keuangan yaitu melalui keikutsertaan Komite Audit sejak *kick off meeting* dan pada setiap *progress meeting* pembahasan audit laporan keuangan 31 Desember 2024;
2. *Review* mandiri dan memberikan masukan/koreksi atas *draft* laporan keuangan, baik *unaudited* maupun *audited*, baik interim maupun akhir tahun, sebelum laporan keuangan diterbitkan; dan
3. Membuka dan melakukan komunikasi langsung dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), jika diperlukan.

Berbagai tindakan yang dilakukan Komite Audit dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan mencerminkan tanggung jawab Komite Audit dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG.

Kendala/Tantangan Pelaksanaan Kinerja dan Antisipasi yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan kinerja sepanjang tahun buku 2025, Komite Audit tidak mengalami kendala dan atau tantangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit. Komite Audit juga menegaskan bahwa pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2025 dapat dilaksanakan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

f. Evaluation of Internal Control Effectiveness;
g. Evaluation of Internal Audit Division Performance; and
h. Activity Report on 3D Seismic Acquisition & Processing – WK Pangkah.

6. Conducting Coordination Meetings for the Holding-Subholding Audit Committee.
7. Attending 24 BOC Meetings as requested by the Board of Commissioners.

Implementation of Other Audit Committee Activities in the Preparation and Publication of Annual Financial Statement

The Company's Audit Committee plays an important role in ensuring the quality of the preparation and publication of the Annual Financial Statements. Other activities carried out by the Audit Committee in this process include:

1. Being directly involved in the development of the financial statement audit process, namely through the participation of the Audit Committee since the kick-off meeting and at every progress meeting discussing the audit of the financial statements for December 31, 2024;
2. Independently reviewing and providing input/corrections on draft financial statements, both unaudited and audited, interim and year-end, before the financial statements are published; and
3. Establishing and maintaining direct communication with the Public Accounting Firm (KAP), if necessary.

Various activities undertaken by the Audit Committee in the preparation and publication of the Company's Annual Financial Report reflect the Audit Committee's responsibility to ensure the transparency and accountability of the Company's annual financial reports in accordance with GCG principles.

Performance Implementation Challenges/ Obstacles and Mitigation Strategies

In implementing its performance throughout the 2025 fiscal year, the Audit Committee did not encounter any significant challenges or obstacles that could affect the implementation of the Audit Committee's duties, responsibilities, and authorities. The Audit Committee also emphasized that its performance throughout 2025 could be carried out independently without interference from any party.

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Audit

Policy, Frequency, and Attendance of Audit Committee Meetings

33 Kali | Times

Rapat Komite Audit di Tahun 2025
Audit Committee Meetings in 2025

Piagam Komite Audit mengatur kebijakan rapat Komite Audit sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Selama tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 33 kali, dalam rangka menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris dan menjalankan tugas-tugas Komite dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Audit Committee Charter stipulates that the Audit Committee must hold meetings at least once a month. During 2025, the Audit Committee held 33 meetings to follow up on the Board of Commissioners' dispositions and perform the Committee's duties, with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meetings During the Term of Office	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Conny Lolyta Rumondor	Ketua Chairperson	9	9	100
Dini Shanti Purwono	Ketua Chairperson	24	24	100
Widjono Hardjanto	Anggota Member	9	9	100
Abdullah Aufa Fuad	Anggota Member	24	24	100
Fajar Ariwinadi	Anggota Member	33	33	100
Yan Rahadian	Anggota Member	33	33	100
Widya Perwitasari	Anggota Member	9	9	100
Rini Yulius	Anggota Member	24	24	100

Keterangan | Note:
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Audit
The terms of office of the Chairman and Members of the Audit Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Audit Committee

AGENDA RAPAT INTERNAL KOMITE AUDIT
Audit Committee Internal Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Attendees	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Desember 2024 Management Report for the Period of December 2024
2.	7 Februari 2025 February, 7 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	1. LHA atas Pengelolaan Niaga Gas di PT Pertamina Gas (Pertagas) serta Bisnis Regasifikasi dan Operation & Maintenance di PT Perta Arun Gas (PAG) 2. LHA atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa di PT Saka Energi Indonesia (SEI) (Suissen-1 dan Jumpeline) 1. Audit Report on the Management of Gas Trading at PT Pertamina Gas (Pertagas), as well as the Regasification Business and Operation & Maintenance at PT Perta Arun Gas (PAG) 2. Audit Report on the Planning, Implementation, and Realization of Procurement of Goods and Services at PT Saka Energi Indonesia (SEI) (Suissen-1 and Jumpeline)
3.	17 Februari 2025 February 17, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Treasury, FCMA Chairperson and Members of the Audit Committee, Treasury, FCMA	Laporan Hasil Pengadaan Jasa Pemeringkat Kredit Untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode 2024 Report on the Procurement of Credit Rating Services for the 2024 Company Health Level Assessment
4.	5 Maret 2025 March 5, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Usulan Revisi RJPP 2025 – 2029, Suplemen hingga 2034 dan Program Strategis Korporat 2025 Proposed Revision of the RJPP 2025–2029, including the Supplement through 2034 and the 2025 Corporate Strategic Program
5.	7 Maret 2025 March 7, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Januari 2025 Management Report for the Period of January 2025
6.	7 Maret 2025 March 7, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	1. Laporan Pengelolaan Pengaduan Subholding Gas 2024 dari PT Pertamina (Persero) 2. Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2024 1. Report on the Management of Complaints of Gas Subholding 2024 from PT Pertamina (Persero) 2. Audit Report for Q4 of 2024
7.	13 Maret 2025 March 13, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	Status Tindak Lanjut Rekomendasi Internal Audit Division (IAD) PGN di PT Pertagas Status of Follow-Up Actions on the Recommendations of PT PGN Tbk's Internal Audit Division (IAD) at PT Pertagas
8.	17 Maret 2025 March 17, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	Informasi kelanjutan Pekerjaan 3D Seismik WK Pangkah di PT Saka Energi Indonesia (SEI) – ("Seismik 3D Pangkah") Information on the Continuation of 3D Seismic Activities in the Pangkah Work Area at PT Saka Energi Indonesia (SEI) ("Pangkah 3D Seismic")
9.	19 Maret 2025 March 19, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	1. Pertanyaan KAP mengenai Independensi, *Fraud*, dan Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 2. Laporan Manajemen Periode Februari 2025 1. Inquiries by the Public Accounting Firm concerning Independence, Fraud, and Compliance with Applicable Laws and Regulations 2. Management Report for the Period of January 2025
10.	10 April 2025 April 10, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Revisi RKAP 2025 Revision of the 2025 RKAP
11.	15 April 2025 April 15, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Tanggapan atas Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2024 Response to the Submission and Approval of the 2024 Annual Report and Sustainability Report
12.	16 April 2025 April 16, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	*Review* Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2024 dan *Review* Laporan Keuangan PUMK Tahun 2024 Review of the 2024 Consolidated Financial Statements and Review of the 2024 PUMK Financial Statements
13.	21 April 2025 April 21, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Realisasi RKAP Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan Manajemen Periode Maret 2025 Report on the RAKP Realization for Q1 of 2025 and Management Report for the Period of March 2025

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Attendees	Agenda Rapat Meeting Agenda
14.	5 Mei 2025 May 5, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Evaluasi Kinerja KAP Tahun Buku 2024 Performance Evaluation of Public Accounting Firms for the 2024 Fiscal Year
15.	7 Mei 2025 May 7, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Realisasi RKAP Tahun Buku 2024 *Audited* Audited Report on the RKAP Realization for the 2024 Fiscal Year
16.	4 Juni 2025 June 4, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan I Tahun 2025 Report on Internal Audit Activities for Q1 of 2025
17.	30 Juni 2025 June 30, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial dan Individual Direksi PGN Tahun Buku 2024 Report on the Agreed Procedures for the Performance Evaluation Report of the Collegial and Individual KPIs of PGN's Board of Directors for the 2024 Fiscal Year
18.	9 Juli 2025 July 9, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Penunjukan KAP TB 2025 pasca RUPS Appointment of the Public Accounting Firm TB for 2025 Following the GMS
19.	21 Juli 2025 July 21, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Juni 2025 Management Report for the Period of June 2025
20.	22 Juli 2025 July 22, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Realisasi RKAP Triwulan II Tahun 2025 PGN Report on the PGN RAKP Realization for Q2 of 2025
21.	24 Juli 2025 July 24, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Rekomendasi Komite Audit terkait Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk Pekerjaan *Agreed-Upon Procedure* Peringkat Komposit Risiko ('PKR') Tahun Buku 2023, 2024 dan 2025. Appointment of a Public Accounting Firm for Agreed-Upon Procedures on the Composite Risk Rating (PKR) for the 2023, 2024, and 2025 Fiscal Years.
22.	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Hasil Audit Pernyataan Standar Audit (PSA) 62 Tahun Buku 2024 Audit Report in accordance with Statement on Auditing Standards (PSA) 62 for the 2024 Financial Year
23.	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan *Update* Status Piutang Subholding Gas per 31 Maret 2025 Update Report on the Status of the Gas Subholding's Receivables as of 31 March 2025
24.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan II Tahun 2025 Report on Internal Audit Activities for Q2 of 2025
25.	11 September 2025 September 11, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	1. Perkenalan dan Mekanisme Kerja Komite Audit; 2. Pending Tugas Komite Audit; 3. Lain-lain 1. Introduction and Working Mechanism of the Audit Committee; 2. Pending Tasks of the Audit Committee; 3. Others
26.	25 September 2025 September 25, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	Laporan Hasil Audit Triwulan II Tahun 2025 Audit Report for Q2 of 2025
27.	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	Laporan Hasil Audit Triwulan II Tahun 2025 Audit Report for Q2 of 2025
28.	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Direktur Keuangan, Treasury Chairperson and Members of the Audit Committee, Director of Finance, Treasury	*Update* Status Piutang PGN per 30 Juni 2025 Update on the Status of PGN's Receivables as of 30 June 2025
29.	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Anggota Komite NRGCG, Sekretaris Perusahaan, CSR Chairperson and Members of the Audit Committee, NRGCG Committee Members, Corporate Secretary, CSR	*Update* Program TJSL dan Keuangan Program PUMK PGN Update on the TJSL Program and the Financial Position of PGN's PUMK Program

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Attendees	Agenda Rapat Meeting Agenda
30	23 Oktober 2025 October 23, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	1. Laporan Realisasi Triwulan III/2025 dan 2. Laporan Manajemen Periode September 2025 3. Laporan Revisi RKAP 2025 revisi 2 4. Laporan Keuangan per 30 September 2025 1. Q3 of 2025 Realization Report 2. Management Report for September of 2025 3. Second Revision of the 2025 RKAP Report 4. Financial Statements as of 30 September 2025
31.	14 November 2025 November 14, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Internal Audit Chairperson and Members of the Audit Committee, Internal Audit	Laporan Kegiatan Internal Audit Triwulan III/2025 dan Piagam Internal Audit Tahun 2025 Report on Internal Audit Activities for Q3 of 2025 and Internal Audit Charter for 2025
32.	4 Desember 2025 December 4, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit, Chairperson and Members of the Audit Committee	Laporan *Update* Kegiatan 3D Seismic Acquisition & Processing – WK Pangkah Update Report on 3D Seismic Acquisition & Processing Activities – Pangkah Work Area
33.	5 Desember 2025 December 5, 2025	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairperson and Members of the Audit Committee	Permohonan Persetujuan Transaksi Pengalihan Data WNTS - Pemping antara PGN dan PLN EPI dan Pernyataan KAP EY Request for Approval of the Data Transfer Transaction of WNTS - Pemping between PGN and PLN EPI and the Statement of EY Public Accounting Firm

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT DENGAN AKUNTAN PUBLIK/PIHAK TERKAIT LAINNYA
Audit Committee Meeting Agenda with Public Accountant/Other Relevant Parties

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Attendees	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	6 Januari 2025 January 6, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance PA, PAF EY	*Kick off meeting* laporan keuangan 31 Desember 2024 Kick-off meeting on the Financial Statements as of December 31, 2024
2.	21 Januari 2025 January 21, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance PA, PAF EY	*Progress meeting* I Laporan Keuangan 31 Desember 2024 Progress meeting I on the Financial Statements as of December 31, 2024
3.	31 Januari 2025 January 31, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance PA, PAF EY	*Progress meeting* II Laporan Keuangan 31 Desember 2024 Progress meeting II on the Financial Statements as of December 31, 2024
4.	11 Februari 2025 February 11, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance PA, PAF EY	*Progress meeting* III Laporan Keuangan 31 Desember 2024 Progress meeting III on the Financial Statements as of December 31, 2024
5.	21 Februari 2025 February 21, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance PA, PAF EY	*Progress meeting* IV Laporan Keuangan 31 Desember 2024 Progress meeting IV on the Financial Statements as of December 31, 2024
6.	4 Maret 2025 March 4, 2025	Komite Audit, Direktur Keuangan dan tim, KAP EY Komite Audit, Direktur Keuangan dan tim, KAP EY	*Progress meeting* V Laporan Keuangan 31 Desember 2024 Progress meeting V on the Financial Statements as of December 31, 2024
7.	20 Maret 2025 March 20, 2025	Komite Audit dan KAP EY Audit Committee and PAF EY	*Key Audit Matters* ("KAM") Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 dan Closing Meeting Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN Key Audit Matters (KAM) of the Financial Statements as of 31 December 2024 and the Closing Meeting of PGN's Micro and Small Business Financing Program under the Social and Environmental Responsibility Program

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Attendees	Agenda Rapat Meeting Agenda
8.	27 Agustus 2025 August 27, 2025	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Working Units, Director of Finance PA, PAF EY	*Closing* Laporan Keuangan 30 Juni 2025 Closing on the Financial Statements as of 31 June 2025
9.	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Working Units, Director of Finance PA, PAF EY	*Kick-Off Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PGN Tahun Buku 2025 Kick-off meeting on the Audit of PGN's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2025
10.	31 Oktober 2025 October 31, 2025	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Working Units, Director of Finance PA, PAF EY	*Monitoring Progress Meeting* II Audit Laporan Keuangan (Interim) Tahun Buku 2025 Monitoring Progress Meeting II on the Audit of the (Interim) Financial Statements for Financial Year 2025
11.	14 November 2025 November 14, 2025	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Working Units, Director of Finance PA, PAF EY	*Monitoring Progress Meeting* III Audit Laporan Keuangan (Interim) Tahun Buku 2025 Monitoring Progress Meeting III on the Audit of the (Interim) Financial Statements for Financial Year 2025
12.	28 November 2025 November 28, 2025	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Working Units, Director of Finance PA, PAF EY	*Monitoring Progress Meeting* IV Audit Laporan Keuangan (Interim) Tahun Buku 2025 Monitoring Progress Meeting IV on the Audit of the (Interim) Financial Statements for Financial Year 2025

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG

NOMINATION, REMUNERATION, AND GCG COMMITTEE

Perubahan Komposisi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Changes in the Composition of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee

Periode 1 Januari – 25 Maret 2025 | Period of January 1 - March 25, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Luky Alfirman
Anggota Member	Vera Sujatna
Anggota Member	Pradono Wicaksono
Anggota Member	Simon L. Himawan

Periode 26 Maret – 15 April 2025 | Period of March 26 - April 15, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Anggota Member	Vera Sujatna
Anggota Member	Pradono Wicaksono
Anggota Member	Simon L. Himawan

Periode 16 April – 30 April 2025 | Period of April 16 - April 30, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Anggota Member	Yuli Kristiyono
Anggota Member	Noviardy Fachruddin
Anggota Member	Simon L. Himawan

Periode 1 Mei – 27 Agustus 2025 | Period of May 1 - August 27, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Christian H. Siboro
Anggota Member	Yuli Kristiyono
Anggota Member	Noviardy Fachruddin

Periode 27 Agustus – 31 Agustus 2025 | Period of August 27 - August 31, 2025

Anggota Member	Yuli Kristiyono
Anggota Member	Noviardy Fachruddin

Periode 1 September – 8 September 2025 | Period of September 1 - September 8, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Tony Setia Boedi Hoesodo
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Edward Omar Syarif Hiariej
Anggota Member	Yuli Kristiyono
Anggota Member	Noviardy Fachruddin

Periode 9 September – 31 Desember 2025 | Period of September 9 - December 31, 2025

Ketua/Komisaris Independen Chairperson/Independent Commissioner	Tony Setia Boedi Hoesodo
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Edward Omar Syarif Hiariej
Anggota Member	Yuli Kristiyono
Anggota Member	Noviardy Fachruddin
Anggota Member	Kus Maryanto

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG per 31 Desember 2025

Profile of Nomination, Remuneration, and GCG Committee as of December 31, 2025

Tony S. B. Hoesodo - Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Chairperson of Nomination, Remuneration, and CGC Committee
(1 September 2025-sekarang) | (September 1, 2025 - present)

Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/D-KOM/2024 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as the Chairperson of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/D-KOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Tony S. B. Hoesodo juga merupakan Komisaris Independen PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Tony S. B. Hoesodo is also an Independent Commissioner of PGN. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Edward Omar Sharif Hiariej - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of Nomination, Remuneration, and CGC Committee
(1 September 2025-sekarang) | (September 1, 2025 - present)

Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/D-KOM/2024 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/D-KOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Edward Omar Sharif Hiariej juga merupakan Komisaris PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Edward Omar Sharif Hariej is also a Commissioner of PGN. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Yuli Kristiyono - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of Nomination, Remuneration, and CGC Committee
(16 April 2025-sekarang) | (April 16, 2025 - present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Usia 62 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jabodetabek.	Indonesian citizen, born in Banjarnegara on July 25, 1963. 62 years old as of December 31, 2025. Domiciled in the Greater Jakarta area.
Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-07/D-KOM/2020 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pengangkatan Saudara Yuli Kristiyono sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-07/D-KOM/2025 dated March 24, 2025 on the Appointment of Yuli Kristiyono as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.	Education: Diploma IV in Accounting, the State College of Accountancy
Sertifikasi: Certified Governance Oversight Professional (CGOP).	Certification: Certified Governance Oversight Professional (CGOP)
Riwayat Pekerjaan: menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2021-2023), Direktur Penegakan Hukum di DJP (2017-2021), Kepala Kantor Wilayah di DJP Yogyakarta (2016 - 2017), dan Direktur Intelijen dan Penyidikan di DJP (2004 - 2012).	Work Experience: served as Director of Internal Compliance and Apparatus Resource Transformation (KITSDA) at the Directorate General of Taxes (2021–2023), Director of Law Enforcement at the Directorate General of Taxes (2017–2021), Regional Office Head at the Yogyakarta Regional Office of the Directorate General of Taxes (2016–2017), and Director of Intelligence and Investigation at the Directorate General of Taxes (2004–2012).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Noviardy Fachruddin - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of Nomination, Remuneration, and CGC Committee
(16 April 2025-sekarang) | (April 16, 2025 - present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 14 November 1968. Usia 57 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jabodetabek.	Indonesian Citizen, born in Bandung on November 14, 1968. 57 years old as of December 31, 2025. Domiciled in the Greater Jakarta area.
Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-06/D-KOM/2020 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pengangkatan Saudara Noviardy Fachruddin sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-06/D-KOM/2025 dated March 24, 2025 on the Appointment of Noviardy Fachruddin as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Diploma III Sastra Inggris dari Universitas Padjadjaran.	Education: Diploma III in English Literature, Padjajaran University

Sertifikasi: Certified Governance Oversight Professional (CGOP).	Certification: Certified Governance Oversight Professional (CGOP)
Riwayat Pekerjaan: menjabat sebagai Direktur di PT Dhirajaya Garda Indonesia (2023-2024), Kepala Divisi HR Consulting & Integrated System di Kukelola (2016 - 2023), dan Kepala Cabang Senior di PT Asuransi Astra (2003 - 2016).	Work Experience: served as Director at PT Dhirajaya Garda Indonesia (2023–2024), Head of HR Consulting & Integrated System Division at Kukelola (2016–2023), and Senior Branch Head at PT Asuransi Astra (2003–2016).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Kus Maryanto - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of Nomination, Remuneration, and CGC Committee
(9 September-31 Desember 2025) | (September 9 - December 31, 2025)

Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-21/D-KOM/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pengangkatan Saudara Kus Maryanto sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-21/D-KOM/2020 dated September 9, 2025 on the Appointment of Kus Maryanto as a Member of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kus Maryanto kemudian diangkat menjadi Sekretaris Dewan Komisaris tanggal 1 Januari 2026. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Sekretaris Dewan Komisaris di Bab GCG dalam Laporan Tahunan ini.	Kus Maryanto was then appointed as Secretary to the Board of Commissioners on January 1, 2026. His profile can be found in the Board of Commissioners' Secretary Profile section in the CGC Chapter of this Annual Report.

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Independence of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee



>50%

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Independen
of the Members of Nomination, Remuneration, and GCG Committee are independent

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diketuai Komisaris Independen, memiliki satu orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan tiga orang profesional/ independen dari luar Perseroan. Melalui komposisi ini, PGN memastikan bahwa keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagian besar (lebih dari 50%) adalah independen yang disertai dengan adanya anggota eksternal yang memenuhi kriteria independen.

Susunan keanggotaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pernyataan mengenai independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat terlihat melalui tabel berikut:

The Nomination, Remuneration and GCG Committee is chaired by an Independent Commissioner and consists of one member from the Board of Commissioners and three professionals/independent members from outside the Company. Through this composition, PGN ensures that the majority (more than 50%) of the Nomination, Remuneration and GCG Committee members are independent, including external members who meet the independence criteria.

This composition complies with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014. The Nomination, Remuneration and GCG Committee carries out its duties and responsibilities in a professional and independent manner, free from any undue influence contrary to prevailing laws and regulations. The statement of independence of the Nomination, Remuneration and GCG Committee is presented in the following table:

No.	Pernyataan Independensi Independence Statement	Tony S.B. Hoesodo	Christian H. Siboro	Vera Adjas	Pradono Wicaksono	Simon L. Himawan	Yuli Kristiyono	Noviardy Fachruddin	Kus Maryanto
1	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir Not working, nor has authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last six months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Not directly or indirectly own shares in the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/controlling shareholders, or one of members of the Board of Commissioners or the Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan kerja/ profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect work/ professional relationships with the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Note :
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
The terms of office of the Chairman and Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN yang ditetapkan pertama kali pada 1 Juni 2018. Piagam ini telah diperbarui dan ditetapkan kembali pada tanggal 18 Januari 2024.

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Periode dan Masa Jabatan

1. Masa tugas Ketua dan anggota Komite NRGCG yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Masa Tugas Anggota Komite NRGCG yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan; dan
3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite NRGCG dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the PGN Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, which was first established on June 1, 2018. This charter was updated and re-established on January 18, 2024.

The complete Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter can be found on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

Period and Term of Office

1. The term of office of the Chairperson and Members of the NRGCG Committee who are members of the Board of Commissioners must not exceed the term of office of said Board of Commissioners.
2. The term of office of NRGCG Committee Members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of three years and may be extended once for a two-year term.
3. The term of office of the Chairperson and Members of the NRGCG Committee may be terminated at any time based on the resolution of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memiliki tugas untuk memberikan tanggapan, rekomendasi, dan saran kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. Fungsi Nominasi:
    1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
    2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
    3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
    4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan;

Duties and Responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee include:

1. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies, and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Governance of Public Companies.
2. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committees of Issuers or Public Companies, with reference to the Regulation of State-Owned Enterprises Minister Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
3. Regulation of State-Owned Enterprises Minister Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
4. Regulation of State-Owned Enterprises Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Based on the Charter of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, the Committee is responsible for providing responses, recommendations, and suggestions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors, identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, and performing other duties related to the responsibilities of the Board of Commissioners, including:

a. Nomination Function:
    1. Conduct periodic reviews of the Company's Talent Management System and monitoring and evaluation of its implementation;
    2. Evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;
    3. Conduct validation and calibration of the (selected) Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners to prepare a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister (Nominated Talent);
    4. Submit recommendations of eligible candidates as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners for onward submission to the GMS, in accordance with the request of the Company's Series A Dwiwarna Shareholder;

5. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;
6. Khusus untuk usulan persetujuan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Anak Perusahaan, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan surat dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
7. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi terkait;
8. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan atas usulan pengangkatan Kepala Internal Audit Division dan Sekretaris Perusahaan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk masukan atas usulan pengangkatan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perseroan;
11. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi dan masukan Kebijakan serta Program Pengembangan SDM sebagai penyiapan *Talent Pool* di Perseroan; dan
13. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.

b. Fungsi Remunerasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Remunerasi Pengurus Perseroan yang terdiri dari:
      a. Struktur Remunerasi;
      b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
      c. Besaran atas Remunerasi.
   2. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan *self-assessment* dan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan tentang sistem Remunerasi untuk Pekerja Perseroan;
   4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, Pekerja Sekretariat Dewan Komisaris, dan Anggota Komite Dewan Komisaris dari luar Perusahaan; dan

5. Evaluate and recommend prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries to be submitted to the Board of Commissioners;
6. For the appointment of President Director and President Commissioner of the Subsidiaries, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee provides recommendations to the Board of Commissioners as supporting material for the Board of Commissioners' letter to the Series A Dwiwarna Shareholder;
7. Evaluate the proposed Key Performance Indicators of individual members of the Board of Directors;
8. Propose an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
9. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the approval of the proposed appointment of the Head of Internal Audit Division and the Corporate Secretary;
10. Provide recommendations to the Board of Commissioners for input on the proposed appointment of Officials one level below the Board of Directors of the Company;
11. Prepare proposals of development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
12. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the evaluation and input on policies as well as HR Development Programs as preparation for the Talent Pool in the Company;
13. Evaluate the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.

b. Remuneration Function:
   1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration of the Company's Management, which includes:
      a. Remuneration Structure;
      b. Policy on Remuneration; and
      c. Amount of Remuneration.
   2. Assist the Board of Commissioners in conducting self-assessments and performance evaluations, including assessing the alignment between performance and the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
   3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input on the Remuneration system for the Company's Employees;
   4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the proposed salary for the Secretary to the Board of Commissioners, Secretariat Employees of the Board of Commissioners, and Committee Members of the Board of Commissioners from outside the Company; and

5. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pekerja yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.

c. Fungsi GCG:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan terhadap:
      a. Kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan;
      b. Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
      c. *Whistleblowing System*;
      d. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
      e. Keterbukaan Informasi;
      f. Kerahasiaan Informasi; dan
      g. Hal lain yang terkait dengan penerapan GCG.
   2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkoordinasikan proses pemilihan asesor GCG oleh Direksi dan proses penilaian penerapan GCG dengan Pihak Penilai (Asesor) agar hasil penilaian sesuai dengan kondisi penerapan GCG di Dewan Komisaris;
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan perbaikan penerapan GCG berdasarkan hasil pengawasan dan *Assessment*.

d. Fungsi HSSE: Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan Human Capital.

e. Fungsi Teknologi Informasi: Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan Teknologi Informasi dari sisi pengelolaan tata kelola dan Human Capital.

f. Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Berdasarkan PER 1/MBU/03/2023): Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan dan pemberian pandangan, saran serta nasehat terkait pelaksanaan Program TJSL.

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Selaras dengan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN, wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Evaluate remuneration policies for employees that require approval/response from the Board of Commissioners.

c. GCG Function:
   1. Provide recommendations to the Board of Commissioners in order to monitor and ensure that GCG has been implemented effectively and sustainably towards:
      a. Policies and management of the Company;
      b. Code of Conduct;
      c. Whistleblowing System;
      d. Conflict of Interest;
      e. Transparency of Information;
      f. Confidentiality of Information; and
      g. Other matters related to GCG implementation.
   2. Assist the Board of Commissioners in coordinating the process of selecting GCG assessors by the Board of Directors and the process of evaluating the implementation of GCG with the Assessors to ensure that the assessment results are in accordance with the conditions of GCG implementation by the Board of Commissioners;
   3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input for improving GCG implementation based on the supervision and Assessment results.

d. HSSE Function: Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice related to HSSE Operations and Implementation from the perspective of governance and Human Capital management.

e. Information Technology Function: Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice regarding the Operations and Application of Information Technology from the perspective of governance and Human Capital management.

f. Social and Environmental Responsibility Function (Based on PER 1/MBU/03/2023): Provide recommendations to the Board of Commissioners by monitoring and providing insights, suggestions, and advice regarding the implementation of the Social and Environmental Responsibility.

Authorities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Pursuant to the PGN Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee's authorities include:

1. Have full, free, and unrestricted access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other Company resources related to their duties.

2. Berkomunikasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan SDM, GCG, HSSE dan Teknologi Informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite NRGCG, sesuai tata kelola.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Communicate directly with each party that carries out the HR, GCG, HSSE, and Information Technology management functions related to the duties and responsibilities of the Nomination, Remuneration, and CGC Committee, in accordance with governance;
3. If deemed necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Committee may utilize independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in performing its duties at the company's expense;
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sesuai piagam Komite, PGN memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan anggota Komite, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengikuti program pelatihan, *workshop*, konferensi ataupun seminar terkait bisnis dan *corporate governance* sebagai berikut:

Nomination, Remuneration, and GCG Committee Member Training Program

Pursuant to the Committee charter, PGN has a policy to support the development of Committee members through training and competency development that supports the implementation of their duties and responsibilities. Throughout 2025, members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee attended the following training programs, workshops, conferences, and seminars related to business and corporate governance:

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG NON KOMISARIS
Training for Members of the Nomination, Remuneration, and Non-Commissioner GCG Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Location	Keterangan Description
Yuli Kristiyono	1-3 Juli 2025 July 1-3, 2025	Semarang	Sustainable Energy Resilience: Indonesia's Path to Self Sufficiency
	13-14 Agustus 2025 August 13-14, 2025	Jakarta	Master Class Corporate Governance
Noviardy Fachruddin	1-3 Juli 2025 August 13-14, 2025	Semarang	Sustainable Energy Resilience: Indonesia's Path to Self Sufficiency
	13-14 Agustus 2025 July 1-3, 2025	Jakarta	Master Class Corporate Governance
Kus Maryanto	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	Pelatihan Executive Cerified Risk Profesional di Tahun 2025 Certified Risk Professional Executive Training in 2025
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Pelatihan Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy Training

Pelatihan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang Merangkap Jabatan Komisaris

Informasi pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap Komisaris PGN dapat dilihat pada sub bab Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Training for Nomination, Remuneration, and GCG Committee Members Concurrently Serving as Commissioners

Information on training and competency development for the Nomination and Remuneration Committee, who also serve as Commissioners of PGN, can be found in the Training for the Board of Commissioners and the Board of Directors sub-chapter in the GCG Chapter.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara internal dan merekomendasikan usulan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan kepada Pemegang Saham Dwi Warna Seri A;
2. Melakukan evaluasi terhadap Usulan Direksi mengenai pengangkatan Pengurus Anak Perusahaan dan memberikan rekomendasi atas calon-calon tersebut kepada Dewan Komisaris, dan khusus bagi Direktur Utama/Komisaris Utama selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
3. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Pelaksanaan Program Kerja Triwulanan terkait pengelolaan sumber daya manusia, desain & budaya organisasi termasuk pengembangan digitalisasi dan sistem informasi;
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi LCGCG dan Internal Audit untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Implementasi Program GCG & ESG Perusahaan, termasuk melakukan evaluasi Sistem *Whistle Blowing System* (WBS), Keterbukaan Informasi dan penerapannya di Perusahaan;
5. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi HSSE untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan Human Capital;
6. Melakukan koordinasi, memberikan masukan dan memastikan implementasi proses asesmen GCG Tahun 2025;
7. Melakukan evaluasi atas calon anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas remunerasi anggota Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris, sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
9. Melakukan kunjungan kerja dan Management Walkthrough ke wilayah-wilayah kerja Perusahaan;
10. Mengikuti program pengembangan kompetensi; dan
11. Menelaah dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
    a. Program kerja Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis, Program Kerja Terkait GCG di tahun 2025 dan rencana 2026 dalam mendukung Rencana Jangka Panjang

Implementation of Duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Throughout 2025, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee carried out the following duties and responsibilities:

1. Conduct an internal study of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, recommending remuneration proposals for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners, which will then be used as a basis for submitting proposals to DwiWarna Series A shareholders;
2. Evaluate the Board of Directors' proposals regarding the appointment of Subsidiary Management and provide recommendations on such candidates to the Board of Commissioners; specifically for the President Director/ President Commissioner positions, which shall serve as a basis for submission by the Board of Commissioners to the President Director of PT Pertamina (Persero);
3. Hold regular meetings with the HR and Business Support Directorate to review and provide feedback on Quarterly Reports and the Implementation of Work Programs concerning human resource management, organizational design and culture, as well as digitalization and information systems development;
4. Hold regular meetings with the LCGCG Division and Internal Audit to review and provide feedback on the Reports and Implementation of the Company's GCG and ESG Programs, including evaluating the Whistleblowing System (WBS), Information Disclosure, and its practices in the Company;
5. Hold regular meetings with the HSSE Division to review and provide feedback on HSSE Operations and Implementation in terms of governance and Human Capital;
6. Coordinate, provide input, and ensure the implementation of the 2025 Good Corporate Governance (GCG) assessment process;
7. Evaluate prospective members of Supporting Committees for the Board of Commissioners;
8. Evaluate and provide input on the remuneration of Committee members of the Board of Commissioners and the Secretary to the Board of Commissioners, as input for the Board of Commissioners;
9. Undertake working visits and management walkthroughs to the Company's operational areas;
10. Participate in competency development programs; and
11. Review and provide input to the Board of Commissioners regarding:
    a. The Work Programs of the HR and Business Support Directorate, the 2025 GCG-related Work Programs, and the 2026 Plans in supporting the Company's

Perusahaan Periode 2024-2029 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2026;

b. Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan, khususnya terkait Sumber Daya Manusia dan Organisasi, GCG, IT dan HSSE;
c. Perubahan Piagam Komite Dewan Komisaris;

d. Rencana Investasi;
e. Penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris tahun 2025;

f. Kontrak Manajemen, KPI Korporat & Individual Direksi Tahun 2025 dan Revisi KPI Direksi Tahun 2025;

g. Perubahan Kebijakan sesuai cakupan kerja Komite NRGCG;
h. Penyusunan RKAP Tahun 2026;

i. Pembayaran tantiem yang ditangguhkan;
j. Draft Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
k. Laporan Tahunan PGN Tahun 2024;
l. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PGN Tahun Buku 2024;

m. Revisi Laporan Tahunan PGN Tahun 2025 Unaudited;
n. Penyampaian Usulan Revisi RKAP Tahun 2025 dan Usulan Buku RKAP Tahun 2026 PGN ;
o. Permohonan Arahan atas Draft Key Performance Indicator ("KPI") Kolegial Direksi Subholding Gas Tahun 2026; dan

Long-Term Corporate Plan for the 2024–2029 period and the 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Financial Year 2026;
b. Monthly and Quarterly Management Reports, particularly related to Human Capital and Organization, GCG, IT, and HSSE matters;
c. Amendments to the Charter of Committees of the Board of Commissioners;
d. Investment plans;
e. Performance assessment of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Committees of the Board of Commissioners in 2025;
f. Management Contracts, Corporate and Individual KPIs of the Board of Directors for 2025, and revisions to the the Board of Directors' KPIs for 2025;
g. Policy changes within the scope of work of the NRGCG Committee;
h. Preparation of the 2026 Company's Work Plan and Budget (RKAP);
i. Payment of deferred tantiem;
j. Draft improvements to the Good Corporate Governance Guidelines;
k. PGN's 2024 Annual Report;
l. Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program related to PGN's Social and Environmental Responsibility (TJSL) for the Financial Year 2024;
m. Revisions to PGN's unaudited 2025 Annual Report;
n. Submission of the Proposed Revision to the 2025 RKAP and the Proposed 2026 RKAP Book of PGN;
o. Request for direction on the Draft Collegial Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors of the Gas Subholding for 2026.

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Policy, Frequency, and Attendance of Nomination, Remuneration and GCG Committee Meetings

16 Kali | Times

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG di Tahun 2025
Nomination, Remuneration and GCG Committee Meetings in 2025

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mengatur kebijakan rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Selama tahun 2025, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter stipulates that the Nomination, Remuneration, and GCG Committee must meet at least once a month. During 2025, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

mengadakan 13 kali pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

held 13 meetings with the following attendance levels:

Nama Name	**Jabatan di Komite** Position in the Committee	**Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas** Number of Meetings according to Term of Office	**Kehadiran** Attendance	**Persentase (%)** Percentage (%)
Tony S.B. Hoesodo	Ketua Chairperson	6	6	100
Christian H. Siboro	Ketua Chairperson	10	10	100
Edward Omar Sharif Hiariej	Anggota Member	6	6	100
Luky Alfirman	Anggota Member	5	5	100
Vera Sujatna	Anggota Member	5	5	100
Simon L. Himawan	Anggota Member	6	6	100
Pradono Wicaksono	Anggota Member	5	5	100
Yuli Kristiyono	Anggota Member	11	11	100
Noviardy Fachruddin	Anggota Member	11	11	100
Kus Maryanto	Anggota Member	6	6	100

Keterangan | Note :
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
The terms of office of the Chairman and Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta rencana dan pengembangan usaha Perseroan.

RISK MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT MONITORING COMMITTEE

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee is established aligned with the Regulation of SOEs Minister Number PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee was formed to assist the Board of Commissioners in conducting regular monitoring and providing recommendations on the Company's risk management policies and implementation as well as business plans and development.

Perubahan Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Changes in the Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Members

Periode 1 Januari – 15 Mei 2025 | Period of January 1 - May 15, 2025

Ketua/Komisaris Chairperson/Commissioner	Warih Sadono
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Tony S.B. Hoesodo
Anggota Member	Yovita L. Handini
Anggota Member	Yudo Anggoro
Anggota Member	Moch Hatta Filsafawan

Periode 16 Mei – 3 Juni 2025 | Period of May 16 – June 3, 2025

Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Tony S.B. Hoesodo
Anggota Member	Yovita L. Handini
Anggota Member	Yudo Anggoro
Anggota Member	Moch Hatta Filsafawan

Periode 4 Juni – 27 Agustus 2025 | Period of June 4 – August 27, 2025

Ketua/Komisaris Chairperson/Commissioner	Tony S.B. Hoesodo
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Warih Sadono
Anggota Member	Yovita L. Handini
Anggota Member	Yudo Anggoro
Anggota Member	Moch Hatta Filsafawan

Periode 27 Agustus – 30 Agustus 2025 | Period of August 27 – August 30, 2025

Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Tony S.B. Hoesodo
Anggota Member	Yovita L. Handini
Anggota Member	Yudo Anggoro
Anggota Member	Moch Hatta Filsafawan

Periode 1 September – 31 Desember 2025 | Period of September 1 – 31 December 31, 2025

Ketua/Komisaris Chairperson/Commissioner	Thanon Aria Dewangga
Anggota/Komisaris Member/Commissioner	Rambe Kamarul Zaman
Anggota Member	Yovita L. Handini
Anggota Member	Yudo Anggoro
Anggota Member	Moch Hatta Filsafawan

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha per 31 Desember 2025

Profile of Risk Management and Business Development Monitoring Committee as of December 31, 2025

Thanon Aria Dewangga

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Chairperson of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 September-31 Desember 2025) | (September 1- Desember 31, 2025)

Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/D-KOM/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as the Chairperson of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/D-KOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Thanon Aria Dewangga juga merupakan Komisaris PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Thanon Aria Dewangga is also a Commissioner of PGN. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Rambe Kamarul Zaman

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 September-31 Desember 2025) | (September 1 - December 31, 2025)

Dasar hukum penugasan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-19/D-KOM/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-19/D-KOM/2025 dated September 1, 2025 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Rambe Kamarul Zaman juga merupakan Komisaris PGN. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Rambe Kamarul Zaman is also a Commissioner of PGN. His profile can be found in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Yovita L. Handini

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari-31 Desember 2025) | (January 1 - December 31, 2025)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 31 Mei 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jabodetabek.	Indonesian Citizen, born in Jakarta on May 31, 1972. 53 years old as of December 31, 2025.Domiciled in the Greater Jakarta area.
Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-24/D-KOM/2023 efektif berlaku tanggal 15 Desember 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Yovita L. Handini sebagai Anggota Komite Non Komisaris Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-24/D-KOM/2023 dated December 15, 2023 on the Extension of the Term of Office of Yovita L. Handini as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Bachelor of Science in Construction Management dari Colorado State University (1996) dan Master of Science in Construction Management dari University of Washington (1999).	Education: Bachelor of Science in Construction Management, Colorado State University (1996) and Master of Science in Construction Management, University of Washington (1999).
Sertifikasi: Qualified Risk Management Officer (QRMO), Project Management Certification (PMC) dan Certified Risk Professional (CRP).	Certification: Qualified Risk Management Officer (QRMO), Project Management Certification (PMC) dan Certified Risk Professional (CRP).
Riwayat pekerjaan: menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PGN (2015-2018), konsultan di CDR Consultant (2001-2003) dan Engineer di Sherman Homes (1999-2001). Saat ini juga menjadi Dosen di STIE Bhakti Pembangunan (sejak 2024).	Work Experience: served as a Member of the Audit Committee at PGN (2015–2018), a consultant at CDR Consultant (2001–2003), and an Engineer at Sherman Homes (1999–2001). Currently also as a Lecturer at STIE Bhakti Pembangunan (since 2024).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Yudo Anggoro

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

(1 Januari 2025-sekarang) | (January 1, 2025 - present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Karanganyar pada 5 Mei 1981. Usia 44 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jabodetabek.	Indonesian Citizen, born in Karanganyar on May 5, 1981. 44 years old as of December 31, 2025. Domiciled in the Greater Jakarta area.
Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-03/D-KOM/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-03/D-KOM/2024 dated March 14, 2024 on the Appointment of a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Sarjana Industrial Engineering dari ITB (2004), Master of Science Management Science dari ITB (2009), dan PhD Public Policy, Economic Competitiveness dari University of North Carolina (2015).	Education: Bachelor of Industrial Engineering of ITB (2004), Master of Science Management Science of ITB (2009), and PhD in Public Policy, Economic Competitiveness of University of North Carolina (2015).
Sertifikasi: Certified Business Analysis Professional, Certified in Financial Risk Management, dan Certified Risk Professional (CRP).	Certification: Certified Business Analysis Professional, Certified in Financial Risk Management, dan Certified Risk Professional (CRP)
Riwayat pekerjaan: sebagai Director, Center for Policy and Public Management for School of Business and Management di ITB (2020-sekarang), Komite Audit dan GCG di PT Transportasi Jakarta (2019-2020), Graduate Assistant & Instructor di University of North Carolina (2010-2015), Service Relationship Manager di Citibank (2004 – 2007).	Work Experience: as Director of the Center for Policy and Public Management, School of Business and Management, ITB (2020–present), member of the Audit and GCG Committee at PT Transportasi Jakarta (2019–2020), Graduate Assistant & Instructor at the University of North Carolina (2010–2015), and Service Relationship Manager at Citibank (2004–2007).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Moch Hatta Filsafawan

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

(1 Januari 2025-sekarang) | (January 1, 2025 - present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 25 Mei 1964. Usia 61 tahun per 31 Desember 2025. Domisili Jabodetabek.	Indonesian Citizen, born in Jakarta on May 25, 1964. 61 years old as of December 31, 2025. Domiciled in the Greater Jakarta area.
Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-09/D-KOM/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for the assignment as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-09/D-KOM/2024 dated July 23, 2024 on the Appointment of a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pendidikan: Sarjana Manajemen dari Universitas Padjadjaran (1990) dan Master Energy Management and Conservation Faculty of Technology dari Middlesex University (1997).	Education: Bachelor of Management graduated of Padjadjaran University (1990) and Master of Energy Management and Conservation, Faculty of Technology of Middlesex University (1997)
Sertifikasi: Certified Risk Professional (CRP).	Certification: Certified Risk Professional (CRP)
Riwayat pekerjaan: dalam perjalanan kariernya di SKKMigas, beliau pernah menjabat sebagai Vice President under Deputy of Finance and Monetization (2019), Vice President, Exploration PSC Audit Division (2017 – 2019), Vice President, Business Strategy, Risk Management and Taxation Division (2017), dan Vice President, Risk Management and Taxation Division (2015 – 2017).	Work Experience: His professional journey at SKKMigas includes Vice President under the Deputy of Finance and Monetization (2019), Vice President of the Exploration PSC Audit Division (2017–2019), Vice President of the Business Strategy, Risk Management and Taxation Division (2017), and Vice President of the Risk Management and Taxation Division (2015–2017).
Rangkap jabatan: Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, serta jabatan lainnya.	Concurrent position: Having no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, and/or a member of the Board of Directors, as well as other positions.

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Independence of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee



100%

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Independen
100% Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee are independent

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee consistently performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner, free from any undue influence from any party.

No.	Pernyataan Independensi Independence Statement	Thanon Aria Dewangga	Tony S. B. Hoesodo	Rambe Kamarul Zaman	Yovita L. Handini	Yudo Anggoro	Moch Hatta Filsafawan
1	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir Not working, nor has authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last six months.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Not directly or indirectly own shares in the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/ pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/controlling shareholders, or one of members of the Board of Commissioners or the Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect work/professional relationships with the Company	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Note:
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.
The terms of office of the Chairman and Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berpedoman pada Piagam Komite yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2012, dengan perubahan terakhir kali pada tanggal 1 Februari 2024.

Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is guided by the Committee Charter stipulated by the Decree of the Board of Commissioners on August 15, 2012, with the last amendment on February 1, 2024.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Masa Jabatan

1. Masa tugas Ketua dan anggota Komite PMRPU yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Masa Tugas Anggota Komite PMRPU yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan; dan
3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite PMRPU dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan serta memberikan rekomendasi terkait:
   a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
   c. Kebijakan Investasi (pengembangan/ekspansi) dan Divestasi, termasuk fungsi konsultansi untuk investasi di atas nilai tertentu;
   d. Laporan *Monitoring* realisasi rencana bisnis perusahaan dan/atau investasi;
   e. Pembentukan Anak Perusahaan;
   f. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Penurunan Kinerja Perusahaan;
   g. Manajemen Risiko Korporasi dan implementasi mitigasinya, utamanya melakukan pemantauan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko mencakup Sistem Manajemen Risiko, Potensi Risiko Strategis dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan yang dilakukan oleh fungsi kerja terkait;
   h. Optimalisasi aset; dan
   i. Menumbuhkan budaya sadar risiko dalam perusahaan.

The complete Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter can be found on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

Term of Office

1. The term of office of the Chairperson and members of the PMRPU Committee who are members of the Board of Commissioners must not exceed the term of office of the Board of Commissioners concerned;
2. The term of office of PMRPU Committee members who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of three years and may be extended once for a two-year term of office; and
3. The term of office of the Chairperson and Members of the PMRPU Committee may be terminated at any time based on the results of the resolution of the Board of Commissioners meeting.

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee, as stipulated in the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter, established by the Decree of the Board of Commissioners on February 1, 2024, are as follows:

1. Conduct evaluation and/or monitoring and provide recommendations regarding:
   a. The Company's Long-Term Plan (RJPP);
   b. The Company's Work Plan and Budget (RKAP);
   c. Investment (development/expansion) and Divestment Policies, including advisory functions for investments exceeding certain thresholds;
   d. Monitoring reports on the realization of the Company's business plans and/or investments;
   e. The establishment of Subsidiaries;
   f. The impact of the business environment on the decline in Company performance;
   g. Corporate risk management and the implementation of mitigation measures, particularly through monitoring policies and the application of risk management, including the Risk Management System, potential strategic risks, and the Company's risk management policies carried out by relevant work functions;
   h. Asset optimization; and
   i. Fostering a risk-awareness culture within the Company.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Komite Audit apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Menyusun Program Kerja Tahunan; serta
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkoordinasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi Risk Management serta Business Investment terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite PMRPU, dan sesuai tata kelola.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Program Pelatihan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Sesuai piagam Komite, PGN memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan anggota Komite, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi mencakup bidang hukum dan manajemen risiko sebagai berikut:

2. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee collaborates with the Audit Committee in the event of indication or potential risks faced by the Company;
3. Prepare the Annual Work Program; and
4. Perform other duties as mandated by the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations.

Authorities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The authorities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee include:

1. Access full, free, and unrestricted records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other company resources related to the performance of its duties.
2. Coordinate directly with all parties performing Risk Management and Business Investment functions regarding the duties and responsibilities of the PMRPU Committee, and in accordance with corporate governance.
3. If deemed necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Committee may utilize independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in the performance of its duties at the Company's expense.
4. Perform other authority granted by the Board of Commissioners.

Training Programs for Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Pursuant to the Committee charter, PGN has a policy to support the development of Committee members through training and competency development that supports the implementation of their duties and responsibilities. Throughout 2025, members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee attended the following training and competency development programs covering the areas of law and risk management:

PELATIHAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA NON KOMISARIS

Training for Non-Commissioner Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Location	Keterangan Description
Yovita Lasti Handini	15 Januari 2025 January 15, 2025	Jakarta	Manajemen Risiko Hukum Dalam Tindak Pidana Korporasi Hukum Legal Risk Management in Corporate Crime
	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session - Retreat BOC BOD Energizing Motivation Session - BOC/BOD Retreat
	24 Juni 2025 June 24, 2025	Jakarta	Workshop M&A oleh Komite PMR Pertamina M&A Workshop by Pertamina's PMR Committee
	7-9 Oktober 2025 October 7-9, 2025	Yogyakarta	Implementing GRC Implementing GRC
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik, Galeri Domestic Gas & LNG Business Development Strategy , Gallery
Yudo Anggoro	15 Januari 2025 January 15, 2025	Jakarta	Manajemen Risiko Hukum Dalam Tindak Pidana Korporasi Hukum Legal Risk Management in Corporate Crime
	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session - Retreat BOC BOD Energizing Motivation Session - BOC/BOD Retreat
	24 Juni 2025 June 24, 2025	Jakarta	Workshop M&A oleh Komite PMR Pertamina M&A Workshop by Pertamina's PMR Committee
	7-9 Oktober 2025 October 7-9, 2025	Yogyakarta	Implementing GRC Implementing GRC
	23 Oktober 2025 October 23, 2025	Jakarta	Pelatihan ICOFR ICOFR Training
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik, Galeri Domestic Gas & LNG Business Development Strategy, Gallery
Moch Hatta Filsafawan	15 Januari 2025 January 15, 2025	Jakarta	Manajemen Risiko Hukum Dalam Tindak Pidana Korporasi Hukum Legal Risk Management in Corporate Crime
	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session - Retreat BOC BOD Energizing Motivation Session - BOC/BOD Retreat
	7-9 Oktober 2025 October 7-9, 2025	Yogyakarta	Implementing GRC Implementing GRC
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik, Galeri Domestic Gas & LNG Business Development Strategy, Gallery

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang Merangkap Jabatan Komisaris

Informasi pelatihan dan pengembangan kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang merangkap Komisaris PGN dapat dilihat pada sub bab Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan.

Training for Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Concurrently Serving as Commissioners

Information on training and competency development for the Risk Management and Business Development Monitoring Committee, who also serve as Commissioners of PGN, can be found in the Training for the Board of Commissioners and the Board of Directors sub-chapter in the Corporate Governance Chapter.

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha, sebagai berikut:

1. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait laporan progres investasi dan laporan *top risk* termasuk mitigasinya melalui hasil *review* terhadap Laporan Manajemen bulanan Perusahaan.
2. Menelaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan persetujuan investasi termasuk *risk analysis, risk treatment*, dan *risk mitigation* (RAT) terhadap:
   a. Usulan Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga GasKita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR II Tahun 2024
   b. Persetujuan Revisi Final Investment Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack WK Muara Bakau PT Saka Energi Indonesia
   c. Persetujuan Revisi Final Investment Decision (RE-FID) atas Investasi Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack WK Muara Bakau SAKA
   d. Pemberhentian Perubahan Rencana Realokasi ABI atas Usulan Revisi Final Investment Decision (RE-FID) Drilling Development JNE-07 Sidetrack Muara Bakau
   e. Permohonan Persetujuan Investasi (FID) atas Usulan Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA
3. Menelaah dan memberikan rekomendasi terkait Penyampaian Usulan Revisi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2025-2029 ("RJPP") Suplemen Hingga 2034, dan Program Strategis Korporat 2025.
4. Menelaah dan memberikan rekomendasi terkait Penyampaian Rencana Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") 2026 – 2030.
5. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
   a. Penjelasan Terkait Tanggapan atas Usulan Kebijakan Manajemen Risiko PGN
   b. Penyampaian Laporan Realisasi RKAP Tahun 2024 (*Unaudited*) PGN

Implementation of Duties and Activities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Throughout 2025, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee carried out the following activities in accordance with the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter:

1. Provide review and input to the Board of Commissioners regarding investment progress reports, top risk and its mitigation measures reports through the Company's monthly Management Report;
2. Provide review and recommendations to the Board of Commissioners regarding the proposed investment approvals, including risk analyst, risk treatment, and risk mitigation (RAT) on:
   a. Investment Proposal for the of Gas Pipeline Infrastructure Installation for the GasKita Household Customer Attachment Program ("PSI") SOR II Year 2024;
   b. Approval of the Revised Final Investment of the JNE-07 Sidetrack Drilling Well in the Muara Bakau Working Area – PT Saka Energi Indonesia;
   c. Approval of the Revised Final Investment Decision (RE-FID) of the JNE-07 Sidetrack Drilling Well in the Muara Bakau Working Area by SAKA;
   d. Termination of the Reallocation Plan Change (ABI) related to the Revised Final Investment Decision (Re-FID) for the JNE-07 Sidetrack Drilling Development – Muara Bakau;
   e. Request for Approval of the Final Investment Decision (FID) for the Construction of the PGN MIRRA Office Building.
3. Provide review and recommendations on the submission of the Proposed Revision of the 2025-2029 Company's Long-Term Plan ("RJPP") Supplement through 2034, and the 2025 Corporate Strategic Plan.
4. Provide review and recommendations on the submission of the 2025-2030 Company's Long-Term Plan ("RJPP").
5. Provide review and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
   a. Clarification on responses to the proposed PGN Risk Management Policy;
   b. Submission of the 2024 RKAP Realization Report (Unaudited) of PGN;

c. Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Dokumen atas FID Pengeboran Sumur SID-05 WK Pangkah
d. Laporan Realisasi RKAP TW I Tahun 2025 PGN
e. Penyampaian Besaran Batasan Kewenangan Persetujuan Investasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Keuangan Teraudit Perseroan Tahun 2024
f. Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Dokumen atas FID Pengeboran Sumur UPA-17 WK Pangkah

g. Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Dokumen dan FID Pengeboran Sumur Bukit Tua BTJTB-T8 (NZ2) WK Ketapang
h. Laporan Realisasi RKAP TW II 2025 PGN
i. Usulan Revisi-4 RKAP Tahun 2025
j. Usulan *Contingency Plan* PGN
k. Update Laporan Pelaksanaan Investasi Pengeboran Sumur WPA-06 West Pangkah
l. Tindak Lanjut Usulan *Contingency Plan* PGN
m. Laporan Realisasi RKAP TW III Tahun 2025
n. Penyampaian Usulan Revisi-2 RKAP Tahun 2025 PGN
o. Penyampaian Kajian awal Penyelarasan Bisnis SHG

p. Penyampaian Usulan Revisi-3 RKAP Tahun 2025 PGN
q. Revisi Anggaran Konsultan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya *Employee*, *Social* dalam Penyusunan RKAP Tahun 2026
r. Laporan *Update* Pelaksanaan Investasi Proyek Revitalisasi Tanki F-6004 & Fasilitas Pendukung Lainnya.
s. Laporan *Update* Kegiatan 3D Seismic Acquisition & Processing - WK Pangkah
t. Revisi *Board Manual*
u. Update Usulan Investasi Tomori
v. Laporan Manajemen Bulanan PGN

6. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja SOR I PGN di Batam, Cilegon, Semarang, Palembang, wilayah kerja proyek Rokan, dan Infrastruktur PGN di Damai, wilayah kerja PMO, Proyek CGP, OMM Offtake Station Panaran, TGI Metering Gas Station Panaran, LNG Hub dan Usulan Baru Sport Arena Lifestyle Bandung.

c. Submission of document requirements for the FID for the SID-05 Well Drilling – Pangkah Working Area;
d. PGN's Q1 2025 RKAP Realization Report;
e. Submission of Investment Approval Authority Limits for the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the Company's 2024 audited financial statements;
f. Submission of document requirements for the FID for the UPA-17 Bukit Tua Well Drilling – Pangkah Working Area;
g. Submission of document requirements and the FID for the BTJTB-T8 (NZ2) Bukit Tua Well Drilling – Ketapang Working Area;
h. PGN's Q2 2025 RKAP Realization Report;
i. Proposal of the 4th Revision of 2025 RKAP;
j. Proposal of PGN Contingency Plan;
k. Update on the investment implementation report for WPA-06 Well Drilling – West Pangkah;
l. Follow-up on the proposed PGN Contingency Plan;
m. Q3 2025 RKAP Realization Report;
n. Proposal of the 2nd Revision of PGN's 2025 RKAP;
o. Submission of the preliminary Business Alignment Study of SHG;
p. Proposal of the 3rd Revision of RKAP 2025 PGN;
q. Revision of consultant fees, official travel expenses, employee costs, and social costs in the preparation of 2026 RKAP;
r. Update report on the investment implementation of the F-6004 Tank Revitalization Project and other supporting facilities;
s. Update report on 3D Seismic Acquisition & Processing Activities – Pangkah Working Area;
t. Revision of the Board Manual;
u. Update on the proposed Tomori investment;
v. Monthly PGN Management Reports.

6. Undertake working visits to the SOR I PGN work areas in Batam, Cilegon, Semarang, Palembang, the Rokan project work area, and PGN Infrastructure in Damai, the PMO work area, the CGP Project, the OMM Offtake Station Panaran, the TGI Metering Gas Station Panaran, the LNG Hub and the New Proposed Sport Arena Lifestyle Bandung.

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Policy, Frequency, and Attendance of Meetings of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee



20 Kali | Times

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha di Tahun 2025
Risk Management and Business Development Monitoring Committee Meetings in 2025

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha, rapat Komite minimal dilaksanakan 12 kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengadakan pertemuan sebanyak 20 kali, dengan rincian frekuensi kehadiran per masing-masing anggota sebagai berikut:

Based on the Charter of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee, Committee meetings shall be held at least 12 times per year. Throughout 2025, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee convened 20 meetings, with the attendance frequency of each member detailed as follows:

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meetings During Term	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Thanon Aria Dewangga	Ketua Chairperson	4	4	100
Warih Sadono	Anggota Member	15	15	100
Tony S.B Hoesodo	Anggota Member	15	15	100
Rambe Kamarul Zaman	Anggota Member	4	4	100
Yovita L. Handini	Anggota Member	20	20	100
Yudo Anggoro	Anggota Member	20	20	100
Moch Hatta Filsafawan	Anggota Member	20	20	100

Keterangan | Note:
Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengacu kepada tabel Perubahan Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.
The terms of office of the Chairman and Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refer to the table of Changes in the Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The establishment of the Integrated Governance Committee adheres to the Regulation of SOEs Minister Number PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. Anggota Komite terdiri dari pejabat-pejabat yang telah ditunjuk.

The Integrated Governance Committee was formed to assist the Board of Commissioners in carrying out oversight and providing advice on the implementation of other Integrated Governance functions pursuant to the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS/Minister. The Committee members consist of appointed officials.

KOMPOSISI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
Composition of the Integrated Governance Committee

Jabatan Position	**Jabatan dalam Komite** Position in the Committee
Komisaris Utama PGN* President Commissioner of PGN*	Ketua merangkap Anggota Chair concurrently serving as Member
Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN* Chair of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PGN*	Wakil Ketua merangkap Anggota Vice Chair concurrently serving as Member
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN Chair of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PGN	Anggota Member
Ketua Komite Audit PGN* Chair of the Audit Committee of PGN*	Anggota Member
Direktur Manajemen Risiko PGN Director of Risk Management of PGN	Sekretaris (tidak merangkap Anggota) Secretary (non-Member)
Komisaris Utama PT Pertamina Gas* President Commissioner of PT Pertamina Gas*	Anggota Member
Komisaris Utama PT PGAS Solution* President Commissioner of PT PGAS Solution*	Anggota Member
Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi* Nusantara President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi* Nusantara	Anggota Member
Komisaris Utama PT Saka Energi Indonesia* President Commissioner of PT Saka Energi Indonesia*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Permata Graha Nusantara* President Commissioner of PT Permata Graha Nusantara*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Transportasi Gas Indonesia* President Commissioner of PT Transportasi Gas Indonesia*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Gagas Energi Indonesia* President Commissioner of PT Gagas Energi Indonesia*	Anggota Member
Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia* President Commissioner of PT PGN LNG Indonesia*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Pertagas Niaga* President Commissioner of PT Pertagas Niaga*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Perta Daya Gas* President Commissioner of PT Perta Daya Gas*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Perta Samtan Gas* President Commissioner of PT Perta Samtan Gas*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Perta Arun Gas* President Commissioner of PT Perta Arun Gas*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Solusi Energi Nusantara* President Commissioner of PT Solusi Energi Nusantara*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa* President Commissioner of PT Permata Karya Jasa*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Widar Mandripa Nusantara* President Commissioner of PT Widar Mandripa Nusantara*	Anggota Member
Komisaris Utama PT Telemedia Dinamika Sarana* President Commissioner of PT Telemedia Dinamika Sarana*	Anggota Member

Catatan / Notes * :
- Jabatan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat *Ex Officio*
  Positions in the Integrated Governance Committee are ex officio in nature.
- Apabila Komisaris Utama Anak Perusahaan atau Cucu Perusahaan tidak ada, maka diwakili oleh Komisaris Independen atau Komisaris dengan masa tugas yang paling lama
  In the absence of a President Commissioner of a Subsidiary or Sub-subsidiary, the role shall be represented by an Independent Commissioner or the Commissioner with the longest tenure.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berpedoman pada Piagam Komite yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 28 Maret 2024.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 28 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan TKT, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penyempurnaan kebijakan TKT tersebut, untuk kemudian dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretaris Komite TKT.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas keselarasan dan penerapan kebijakan TKT di Perseroan/Anak Perusahaan/ Cucu Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, berupa upaya mitigasi dan solusi, atas isu strategis di Perseroan/ Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi yang terintegrasi.
4. Memfasilitasi *sharing* dan *benchmarking* dari entitas-entitas di dalam lingkup perusahaan para anggota Komite TKT, untuk mengakselerasi efektivitas penerapan tata kelola terintegrasi melalui *lesson learned* dari entitas yang dimaksud.
5. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite TKT.

Independence of the Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee consistently performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without interference from any party.

Charter of the Integrated Governance Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refers to the Committee Charter as stipulated by a Resolution of the Board of Commissioners dated March 28, 2024.

The complete Integrated Governance Committee Charter is available on PGN's website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

The duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee, as set out in the Charter of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PGN established by a Resolution of the Board of Commissioners dated March 28, 2024, are as follows:

1. Evaluate the policies and implementation of Integrated Governance (TKT), at a minimum through assessing the adequacy of internal controls and the implementation of compliance functions in an integrated manner, and to provide recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding improvements to such Integrated Governance policies, which shall subsequently be monitored by the Secretary of the Integrated Governance Committee.
2. Monitor and evaluate the alignment and implementation of Integrated Governance policies within the Company/ Subsidiaries/ Sub-subsidiaries.
3. Provide recommendations for governance improvements, in the form of mitigation measures and solutions, on strategic issues within the Company/Subsidiaries/Sub-subsidiaries based on integrated review and evaluation results.
4. Facilitate sharing and benchmarking among entities within the scope of the companies represented by the members of the Integrated Governance Committee, in order to accelerate the effective implementation of integrated governance through lessons learned from such entities.
5. Prepare the Annual Work Plan and Budget of the Integrated Governance Committee.

6. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Komite TKT berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas, atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite TKT dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan fungsi manajemen Perseroan (antara lain Audit Internal, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan aspek fungsi Operasional Usaha) dan entitas PGN Group serta Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan dan entitas PGN Group terkait dengan bidang tugas Komite TKT.

3. Apabila diperlukan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Komite TKT dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perseroan.

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite sejalan dengan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

1. *Top Risk Project* 2025 PGN Group;
2. Perspektif *Business Judgement Rules* dalam Tata Kelola Perusahaan dan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN;
3. Implementasi GCG dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
4. *Risk Based Budgeting*;
5. Pengelolaan risiko teknologi dan keamanan siber;
6. Evaluasi sistem pengendalian internal, identifikasi kondisi, dan rekomendasi perbaikan dalam perspektif Internal Audit;
7. Penguatan peran dan budaya kepatuhan dalam korporasi;

8. *Top Risk* 2026 SH Gas Group; dan
9. Mitigasi *Top Three Risk* RKAP 2026.

6. Perform other authorities, duties, and responsibilities related to its function.

Authorities of the Integrated Governance Committee

The authorities of the Integrated Governance Committee are as follows:

1. The Integrated Governance Committee has full, free, and unrestricted access to information related to the performance of its duties in accordance with the prevailing regulations.
2. In exercising the above authority, the Integrated Governance Committee may cooperate and coordinate with the Company's management functions (including Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources, and operational business functions) and PGN Group entities, as well as Committees under the Company's Board of Commissioners and PGN Group entities in relation to the Committee's scope of duties.
3. If necessary and subject to the approval of the Company's Board of Commissioners, the Integrated Governance Committee may engage external experts or consultants to assist in the performance of its duties at the Company's expense.

Implementation of Duties and Activities of the Integrated Governance Committee

During 2025, the Integrated Governance Committee carried out activities in the performance of its duties aligned with the Integrated Governance Committee Charter, as follows:

1. Top Risk Project 2025 PGN Group;
2. Business Judgment Rules perspective in Corporate Governance and Law Number 1 of 2025 on SOE;
3. Implementation of GCG to enhance transparency and accountability;
4. Risk-Based Budgeting;
5. Management of technology and cybersecurity risks;
6. Evaluation of the internal control system, identification of conditions, and recommendations for improvement from an Internal Audit perspective;
7. Strengthening the role and culture of compliance within the corporation;
8. Top Risk 2026 Gas SH Group; and
9. Mitigation of the Top Three Risks in the 2026 RKAP.

Kebijakan, Frekuensi, dan Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Policy, Frequency, and Attendance of Meetings of the Integrated Governance Committee

8 Kali | Times

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi di Tahun 2025
Integrated Governance Committee Meetings in 2025

Berdasarkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib dilaksanakan minimal empat kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan pertemuan sebanyak delapan kali, dengan rincian frekuensi kehadiran per masing-masing anggota sebagai berikut:

Based on the Integrated Governance Committee Charter, Committee meetings must be held at least four times per year. Throughout 2025, the Integrated Governance Committee convened eight meetings, with the attendance frequency of each member detailed as follows:

Nama Name	**Jabatan di Komite** Position in the Committee	**Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas** Number of Meetings during the Term of Office	**Kehadiran** Attendance	**Persentase (%)** Percentage (%)
Komisaris Utama PGN* President Commissioner of PGN*	Ketua merangkap Anggota Chair concurrently serving as Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN* Chair of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PGN*	Wakil Ketua merangkap Anggota Vice Chair concurrently serving as Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN Chair of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PGN	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Ketua Komite Audit PGN* Chair of the Audit Committee of PGN*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Direktur Manajemen Risiko PGN Director of Risk Management of PGN	Sekretaris (tidak merangkap Anggota) Secretary (non-Member)	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Pertamina Gas* President Commissioner of PT Pertamina Gas*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT PGAS Solution* President Commissioner of PT PGAS Solution*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi* Nusantara President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi* Nusantara	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Saka Energi Indonesia* President Commissioner of PT Saka Energi Indonesia	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Permata Graha Nusantara* President Commissioner of PT Permata Graha Nusantara*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Transportasi Gas Indonesia* President Commissioner of PT Transportasi Gas Indonesia*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Gagas Energi Indonesia* President Commissioner of PT Gagas Energi Indonesia*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meetings during the Term of Office	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia* President Commissioner of PT PGN LNG Indonesia*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Pertagas Niaga* President Commissioner of PT Pertagas Niaga*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Daya Gas* President Commissioner of PT Perta Daya Gas*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Samtan Gas* President Commissioner of PT Perta Samtan Gas*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Arun Gas* President Commissioner of PT Perta Arun Gas*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Solusi Energi Nusantara* President Commissioner of PT Solusi Energi Nusantara*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa* President Commissioner of PTPermata Karya Jasa	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Widar Mandripa Nusantara* President Commissioner of PT Widar Mandripa Nusantara*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Telemedia Dinamika Sarana* President Commissioner of PT Telemedia Dinamika Sarana*	Anggota Member	8 Rapat 8 Meetings	8 Rapat 8 Meetings	100%

Catatan / Notes * :
- Jabatan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat *Ex Officio*
  Positions in the Integrated Governance Committee are ex officio in nature
- Apabila Komisaris Utama Anak Perusahaan atau Cucu Perusahaan tidak ada, maka diwakili oleh Komisaris Independen atau Komisaris dengan masa tugas yang paling lama
  In the absence of a President Commissioner of a Subsidiary or Sub-subsidiary, the role shall be represented by an Independent Commissioner or the Commissioner with the longest tenure

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN, memiliki integritas yang baik, memahami fungsi kesekretariatan, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pursuant to the Regulation of SOEs Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Secretary to the Board of Commissioners must have an understanding of the management, supervision, and development systems of SOEs, possess strong integrity, understand secretarial functions, and have the ability to communicate and coordinate effectively.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS



STRASFIATRI AULIANA
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

1 Januari-31 Desember 2025 | January 1 - December 31, 2025

Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2025 64 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Sydney, Australia, 28 November 1961 Sydney, Australia, November 28, 1961
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep- 14/D-KOM/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengangkatan Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sesuai Keputusan Dewan Komisaris tersebut, masa tugas Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan adalah tiga tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian masa tugas tersebut diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-25/D-KOM/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-14/D-KOM/2020 dated December 23, 2020 on the Appointment of Ms. Strasfiatri Auliana as Secretary to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pursuant to such Decree, her term of office as Secretary to the Board of Commissioners was three years, effective from January 1, 2021 until December 31, 2023. Her term was subsequently extended through the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-25/D-KOM/2023 dated December 28, 2023 on the Extension of the Term of Office of Ms. Strasfiatri Auliana as Secretary to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, effective from January 1, 2024 until December 31, 2025.
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1986). Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1986).
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Corporate Services dan Regional di Koperasi Karyawan Indosat (2014- 2018); • Group Head Corporate Secretary di PT Indosat Tbk (2006–2014); • Group Head Risk Management di PT Indosat Tbk (2009–2012). • Director of Corporate Services and Regional at Indosat Employee Cooperative (2014–2018); • Group Head of Corporate Secretary at PT Indosat Tbk (2006–2014); • Group Head of Risk Management at PT Indosat Tbk (2009–2012).
Sertifikasi Certifications	Certified Audit Committee Practices (CACP) dan Certified Risk Professional (CRP) Certified Audit Committee Practices (CACP) and Certified Risk Professional (CRP)

KUS MARYANTO
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

1 Januari 2026-sekarang | January 1, 2026-Present

Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2025 64 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Magelang, 1 April 1961 Magelang, April 1, 1961
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-26/D-KOM/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pengangkatan Saudara Kus Maryanto sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sesuai Keputusan Dewan Komisaris tersebut, masa tugas Kus Maryanto sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan adalah tiga tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2028. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-26/D-KOM/2025 dated December 29, 2025 on the Appointment of Mr. Kus Maryanto as Secretary to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pursuant to such Decree, his term of office as Secretary to the Board of Commissioners of the Company is three years, effective from January 1, 2026 until December 31, 2028.
Periode Jabatan Term of Office	2025-sekarang (Periode Pertama) 2025-present (First Term)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana dari STIE Jakarta (1987), • S2 dari Universitas Surapati (2009). • Bachelor's degree from STIE Jakarta (1987), • Master's degree from Universitas Surapati (2009).
Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur di PT Garuda Elang Perkasa (2012-2018), • General Manager Group Holding di PT New Armada Group (1999-2012), • Kepala Internal Audit Group di PT Pembangunan Jaya Group (Holding) (1990-1998), • Auditor di KAP SGV Utomo (1987-1990). • Director at PT Garuda Elang Perkasa (2012–2018), • Group Holding General Manager at PT New Armada Group (1999–2012), • Head of Group Internal Audit at PT Pembangunan Jaya Group (Holding) (1990–1998), • Auditor at KAP SGV Utomo (1987–1990).
Sertifikasi Certifications	Certified Risk Professional (CRP). Certified Risk Professional (CRP).



PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan selaras dengan kebutuhan Perusahaan, antara lain:

TRAINING PROGRAM OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners participated in various education and training programs aimed at enhancing competencies and knowledge in alignment with the Company's needs, including:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Location	Keterangan Description
Strasfiatri Auliana	13-14 Februari 2025 February 13-14, 2025	Batam	Energizing Motivation Session - Retreat BOC BOD PT PGN Tbk
	3 November 2025 November 3, 2025	Jakarta	Strategi Pengembangan Bisnis Gas & LNG Domestik Domestic Gas & LNG Business Development Strategy

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beragam kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan huruf a sampai dengan e di atas tersimpan dengan baik; dan
7. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS 2025

Throughout 2025, the Secretary to the Board of Commissioners carried out various activities to support the effective performance of the duties and functions of the Board of Commissioners, including:

1. Preparing meetings of the Board of Commissioners, including the briefing sheets;
2. Preparing, documenting, and properly archiving the minutes of meetings of the Board of Commissioners
3. Administering all documents of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing correspondence, minutes of meetings, and other supporting documents;
4. Preparing draft Work Plans and Budgets of the Board of Commissioners;
5. Preparing draft reports of the Board of Commissioners;
6. Ensuring that all documents related in items a through e above are properly documented; and
7. Performing other duties as assigned by the Board of Commissioners.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2025, sehubungan dengan telah ditetapkannya Direktur Manajemen Risiko dengan dilengkapi Tata Kerja Direktorat Manajemen Risiko dan Organisasi di lingkup Direktorat Manajemen Risiko di akhir tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka pengelolaan risiko tidak lagi dilakukan melalui Komite di bawah Direksi atau Komite Manajemen Risiko, namun menjadi tugas dan tanggung jawab dari Direktur Manajemen Risiko selaku Chief Risk Officer.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In 2025, following the appointment of a Director of Risk Management along with the establishment of the Risk Management Directorate's Work Guidelines and Organizational Structure within the Risk Management Directorate at the end of 2024, in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises risk management is no longer carried out through a committee under the Board of Directors or through the Risk Management Committee. Instead, it has become the duty and responsibility of the Director of Risk Management in their capacity as Chief Risk Officer.



SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

PGN telah menunjuk Fajriyah Usman sebagai Sekretaris Perusahaan pada 31 Juli 2024, melalui Surat Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 049200.K/KP.02.03/PDO/2024 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 tanggal 31 Juli 2024.

PGN appointed Fajriyah Usman as Corporate Secretary on July 31, 2024, through Assignment Letter of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 049200.K/KP.02.03/PDO/2024, and the appointment was reported to the Financial Services Authority through Letter Nomor 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 dated July 31, 2024.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY PROFILE



FAJRIYAH USMAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Usia Age	46 tahun per 31 Desember 2025 46 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 16 November 1979 Jakarta, November 16, 1979
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Penunjukan Corporate Secretary dilakukan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara. Penunjukan Corporate Secretary yang kini menjabat dilaksanakan melalui Surat Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 049200.K/KP.02.03/ PDO/2024 tanggal 31 Juli 2024. Penunjukan Corporate Secretary itu telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 tanggal 31 Juli 2024. The appointment of the Corporate Secretary was made in compliance with Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 on Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The appointment of the current Corporate Secretary was carried out through the Assignment Letter of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Number 049200.K/KP.02.03/PDO/2024 dated July 31, 2024. The appointment was reported to the Financial Services Authority through Letter Number 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 dated July 31, 2024.
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Earned a Bachelor's degree in Economics from Universitas Indonesia in 2002.
Riwayat Jabatan Work Experience	• Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak 31 Juli 2024, • Mengawali karier di Pertamina Group sebagai Head of Investor Relations PT Elnusa Tbk (2009-2012), • VP Corporate Secretary PT Elnusa Tbk (2012-2018), • Direktur Utama PT Elnusa Trans Samudera (2018-2019), • VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) (2019-2022), • VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) (2022-2024), • Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-sekarang). • Serving as Corporate Secretary since July 31, 2024. • Began her career within the Pertamina Group as Head of Investor Relations at PT Elnusa Tbk (2009–2012), • Vice President Corporate Secretary at PT Elnusa Tbk (2012–2018), • President Director of PT Elnusa Trans Samudera (2018–2019), • Vice President Corporate Communication at PT Pertamina (Persero) (2019–2022), • Vice President CSR & SMEPP Management at PT Pertamina (Persero) (2022–2024), • Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024–present).

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Acuan dalam pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan PGN antara lain :

1. Anggaran Dasar PGN.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary menjalankan fungsi untuk mengelola kegiatan *stakeholder management*, komunikasi korporat, hubungan investor, layanan dukungan korporat, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Subholding Gas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini selaras dengan Keputusan Direksi Nomor 013000.K/OT/PDO/2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama tanggal 31 Maret 2022.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY

Dalam menjalankan fungsinya, Corporate Secretary dibantu oleh Divisi Investor Relations; Divisi Corporate Communication; Divisi Government and Community Relations; Divisi Corporate Support and Services; dan Divisi Corporate Social Responsibility. Corporate Secretary juga bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

References for the establishment, appointment, and implementation of the Corporate Secretary function at PGN include :

1. The Articles of Association of PGN.
2. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
3. Regulation of SOEs Minister Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as last amended by PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
4. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary carries out the function of managing stakeholder engagement activities, corporate communications, investor relations, corporate support services, and the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs to support the smooth operation of the Gas Subholding in accordance with prevailing laws and regulations. This function is aligned with Board of Directors Decree Number 013000.K/OT/PDO/2022 on the Work Guidelines of the President Director's Directorate dated March 31, 2022.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE CORPORATE SECRETARY

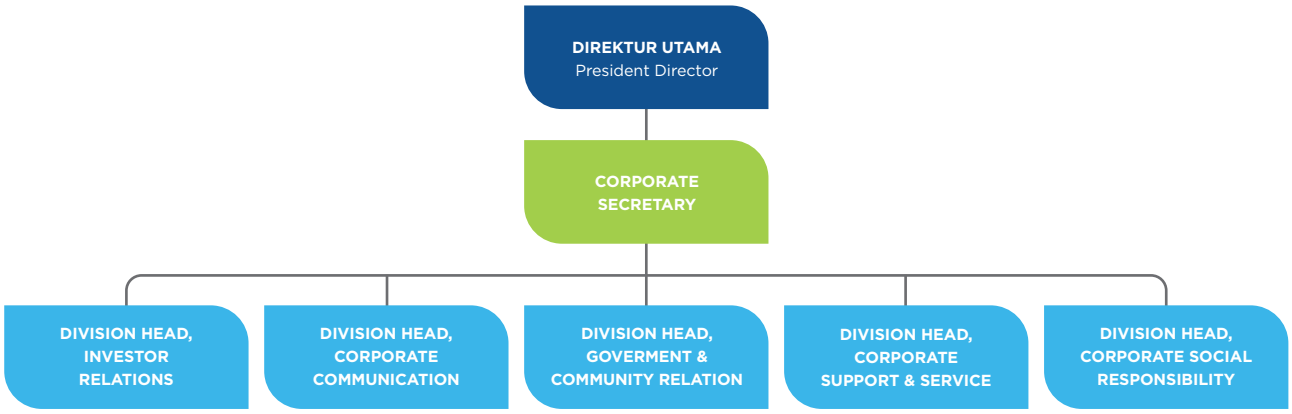
The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

In carrying out their duties, the Corporate Secretary is assisted by the Investor Relations Division; Corporate Communication Division; Government and Community Relations Division; Corporate Support and Services Division; and Corporate Social Responsibility Division. The Corporate Secretary reports directly to the President Director.

Berikut struktur organisasi Corporate Secretary yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 004100.K/OT.00/ HCGS/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang struktur organisasi berserta PRL dan formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

The following is the organizational structure of the Corporate Secretary as stipulated in Board of Directors Decree Number 004100.K/OT.00/HCGS/2023 dated March 24, 2023 on the organizational structure, including PRL and staffing formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

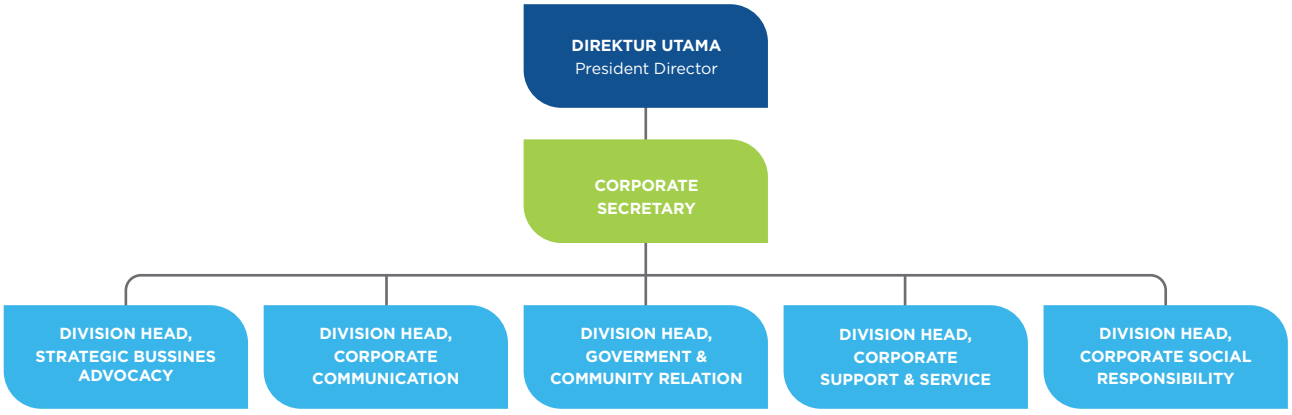


Pada 31 Desember 2025, PGN mengalami perubahan organisasi BOD-1 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 078000.K/OT.00/HCGS/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 062100.K/OT.00/HCGS/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 076300.K/OT.00/HCGS/2025 tanggal 16 Desember 2025.

As of December 31, 2025, PGN implemented changes to its BOD-1 organizational structure as stipulated in the Board of Directors Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 078000.K/OT.00/HCGS/2025 dated December 31, 2025 on Amendments to the Board of Directors Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 062100.K/OT.00/HCGS/2024 dated December 31, 2024 and Board of Directors Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 076300.K/OT.00/HCGS/2025 dated December 16, 2025.

Perubahan organisasi meliputi perpindahan garis lapor Fungsi Strategic Business Advocacy, yang semula berada di bawah Direktur Utama berubah menjadi di bawah Corporate Secretary. Kemudian, perpindahan garis lapor Fungsi Investor Relations yang semula berada di bawah Corporate Secretary, berubah menjadi di bawah Direktur Keuangan.

The organizational changes include a revision to reporting lines. The Strategic Business Advocacy Function, which previously reported to the President Director, has been reassigned to report to the Corporate Secretary. Furthermore, the Investor Relations Function, which was previously under the Corporate Secretary, has been reassigned to be under the Director of Finance.



PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY 2025

Selama tahun 2025, Corporate Secretary telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan;
2. Melaksanakan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru diangkat;
3. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan;
4. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sekretariat Negara, BPH Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL), Biro Administrasi Efek (BAE), dan lembaga-lembaga terkait lainnya; serta menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan investor;
5. Mengkoordinasikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi DPR terkait dan kunjungan kerja dengan *stakeholders*;
6. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi serta melakukan kegiatan administrasi notulen hasil rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi;
7. Mengelola keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta ketersediaan informasi dalam situs web Perusahaan;
8. Memastikan tersusun dan tersampaikannya Laporan Tahunan 2025 kepada publik dan otoritas regulator terkait;
9. Memastikan terselesaikannya seluruh arahan Dewan Komisaris dan Direksi PGN; dan
10. Mengelola kebijakan CSR PGN dan *corporate event* yang melibatkan pihak internal maupun eksternal dan berskala nasional atau internasional.

KETERBUKAAN INFORMASI

Corporate Secretary bersama Legal Counsel and Compliance Group dan Investor Relation senantiasa melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Keterbukaan informasi PGN dapat dilihat dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SECRETARY'S DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out the following duties:

1. Convened the Annual GMS;
2. Implemented orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
3. Organized the Annual Public Expose;
4. Maintained communication with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), the State Secretariat, BPH Migas, the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Indonesia Central Securities Depository (KSEI), the Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL), the Securities Administration Bureau (BAE), and other relevant institutions; and acted as liaison between the Company and its shareholders and investors;
5. Coordinated Hearing Meetings (RDP) with the relevant Commission of the House of Representatives (DPR) and working visits with stakeholders;
6. Attended all meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and carried out administrative activities related to the minutes of Board of Commissioners and Board of Directors meetings;
7. Managed public information disclosure, including submission of information disclosures to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, as well as ensuring the availability of information on the Company's website;
8. Ensured the preparation and submission of the 2025 Annual Report to the public and relevant regulatory authorities;
9. Ensured the completion of all directives from the Board of Commissioners and the Board of Directors of PGN; and
10. Managed PGN's CSR policies and corporate events involving internal and external parties at national and international levels.

INFORMATION DISCLOSURE

The Corporate Secretary, together with the Legal Counsel and Compliance Group and Investor Relations, consistently reports to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange as capital market authorities in order to fulfill public disclosure obligations. PGN's information disclosures are available on the Company's website and on the Indonesia Stock Exchange website.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary Training

Tanggal Date	Agenda Agenda	Penyelenggara Organizer
September 2025	Fraud Awareness	Pertamina Corporate University
September 2025	Perlindungan Data Pribadi Personal Data Protection	Pertamina Corporate University
September 2025	HSSE Culture Training	HSSE
26 November 2025 November 26th, 2025	Star Track Executive Development - Marketing Strategy	Cornell University
November 2025 November 2025	*Retreat* Terintegrasi Direksi dan Komisaris Pertamina Group Integrated Retreat of the Board of Directors and Board of Commissioners of Pertamina Group	Akademi Militer Magelang Military Academy, Magelang
4 Desember 2025 December 4, 2025	Executive Media Training	Konten Emiten Indonesia Indonesian Issuer Content
Desember 2025 December 2025	Corporate Life Saving Rules	HSSE
Desember 2025 December 2025	HSSE Mandatory Training	HSSE

INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS



Tim Investor Relations PGN
Investor Relations Team PGN

Divisi Investor Relations PGN bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan investor, calon investor, pemegang saham, analis, dan komunitas Pasar Modal lainnya. Tujuannya agar para pemangku kepentingan dan komunitas Pasar Modal dapat memiliki akses informasi yang komprehensif dan akurat terkait kinerja dan arah strategis perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi.

Hingga akhir tahun 2025, Divisi Investor Relations terdiri dari enam personel, termasuk satu orang Division Head. Sesuai Keputusan Direksi PGN Nomor: 078000.K/OT.00/HCGS/2025 tanggal 31 Desember 2025, Divisi Investor Relations berada di bawah Direktur Keuangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI INVESTOR RELATIONS

Divisi Investor Relations PGN bertugas:

1. Mengelola kebijakan Investor Relations yang setara dan berimbang kepada seluruh pemegang saham, baik kepada Holding Migas sebagai pemegang saham mayoritas, maupun kepada pemegang saham minoritas;
2. Mengelola data dan informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan di lingkungan Subholding Gas Group kepada investor/komunitas Pasar Modal dalam rangka mendapatkan penilaian yang wajar atas nilai perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan investasi investor maupun calon investor PGN;
3. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif dengan investor/komunitas keuangan, khususnya para pemegang saham PGN dan analis Pasar Modal melalui kegiatan seperti *Earning Call, Analyst Briefing*, dan *Public Expose*;
4. Menyiapkan rekomendasi *investor strategy* guna memastikan *fair value* PGN kepada Direksi;
5. Menyampaikan laporan secara regular kepada Direksi tentang kinerja saham PGAS serta kondisi dan persepsi Pasar Modal terhadap PGN;
6. Mengelola laporan dan informasi regular dan non regular dalam rangka melaksanakan kepatuhan Perusahaan Terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku (Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), berkoordinasi dengan fungsi Legal & Compliance;

PGN Investor Relations Division serves as a liaison between the Company and investors, potential investors, shareholders, analysts, and other Capital Market communities. The objective is to ensure that stakeholders and the Capital Market communities gain access to comprehensive and accurate information regarding the Company's performance and strategic direction, supporting the investment decision-making process.

As of the end of 2025, the Investor Relations Division comprises six personnel, including one Division Head. Pursuant to the Decree of PGN Board of Directors Number 078000.K/OT.00/HCGS/2025 dated December 31, 2025, the Investor Relations Division is subordinate to the Director of Finance.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INVESTOR RELATIONS DIVISION

The PGN Investor Relations Division is responsible for:

1. Managing an equitable and balanced Investor Relations policy to all shareholders, be it to the Oil and Gas Holding as the majority shareholder or to minority shareholders;
2. Managing financial and non-financial data and information within the Gas Subholding Group for investors/the Capital Market communities to obtain a fair assessment of the Company's value to support the investment decision-making process of PGN's investors and potential investors;
3. Developing and implementing an effective communication strategy with investors/the financial community, particularly PGN shareholders and Capital Market analysts, through activities such as Earning Calls, Analyst Briefings, and Public Exposes;
4. Preparing investor strategy recommendations to ensure PGN's fair value to the Board of Directors;
5. Submitting regular reports to the Board of Directors on PGAS's stock performance and the Capital Market's conditions and perceptions of PGN;
6. Managing regular and non-regular reports and information to ensure Public Company compliance with applicable regulations (Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority), in coordination with the Legal & Compliance function;

7. Mengelola pelaksanaan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan pelaporannya;
8. Mengoordinasi penyusunan *Annual Report*;
9. Mengelola pendokumentasian RUPS, termasuk materi yang akan disampaikan dalam RUPS.

7. Managing the implementation of dividend payments to shareholders and their reporting;
8. Coordinating the preparation of the Annual Report;
9. Managing the documentation of the GMS, including the materials to be presented at the GMS.

KEGIATAN DIVISI INVESTOR RELATIONS PADA 2025

Sepanjang tahun 2025, Divisi Investor Relations menyelenggarakan pertemuan berskala besar dengan pemegang saham, investor, calon investor, dan analis sebagai berikut:

INVESTOR RELATIONS DIVISION ACTIVITIES IN 2025

Across 2025, the Investor Relations Division held large-scale meetings with shareholders, investors, potential investors, and analysts as follows:

Kegiatan Activities	**Tanggal** Date
Analyst Briefing Analyst Briefing	23 Januari 2025 January 23, 2025
Mandiri Investment Forum Mandiri Investment Forum	12 Februari 2025 February 12, 2025
Earning Calls Kinerja Tahun 2024 Earnings Calls for 2024 Performance	26 Maret 2025 March 26, 2025
Earning Calls Kinerja Kuartal I 2025 Earnings Calls for Q1 2025 Performance	5 Mei 2025 May 5, 2025
Non Deal Roadshow Hosted by Mandiri Sekuritas Non-Deal Roadshow Hosted by Mandiri Securities	20 Mei 2025 May 20, 2025
Non Deal Roadshow Hosted by UBS Sekuritas Non-Deal Roadshow Hosted by UBS Securities	21 Mei 2025 May 21, 2025
Pertamina *Investor Day - Conference* Pertamina Investor Day Conference	16-18 Juli 2025 July 16-18, 2025
Publik Expose Kinerja Semester I 2025 Public Expose of Q1 2025 Performance	10 September 2025 September 10, 2025
Earning Calls Kinerja Kuartal III 2025 Earnings Calls for Q3 2025 Performance	5 November 2025 November 5, 2025

Selain itu, Divisi Investor Relations juga menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

Additionally, the Investor Relations Division also held the following activities:

Kegiatan Activities	**Frekuensi** Frequency
One-on-one Meeting	296 kali | times
Site Visit	5 kali | times

KEANGGOTAAN DIVISI INVESTOR RELATIONS PADA 2025
Membership of Investor Relations Division in 2025

Keanggotaan Membership	**Status** Status
National Investor Relations Institute (NIRI)	Anggota aktif Active member
Association of Indonesia Investor Relations (AIIR)	Anggota aktif Active member

COVERAGE REPORT SAHAM PGAS
Coverage Report of PGAS Shares

Selama tahun 2025, terdapat 25 analis dalam dan luar negeri yang melakukan *coverage report* saham PGAS, dengan perincian:

Throughout 2025, there were 25 domestic and foreign analysts conducting coverage report of PGAS shares, with details:

Jumlah Analis The Number of Analysts	**Rekomendasi** Recommendation
13 analis 13 analysts	Beli Buy
10 analis 10 analysts	Tahan Hold
1 analis 1 analyst	Jual Sell
1 analis 1 analyst	Tidak memberikan rekomendasi Not Rated

INTERNAL AUDIT
INTERNAL AUDIT

Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025, Chief Audit Executive dijabat oleh R. Aryo Seto Bomantari, dengan keterangan sebagai berikut:

During the period from January 1, 2025 to October 30, 2025, the position of Chief Audit Executive was held by R. Aryo Seto Bomantari, with the following details:

PROFIL CHIEF AUDIT EXECUTIVE
CHIEF AUDIT EXECUTIVE PROFILES



R. ARYO SETO BOMANTARI
CHIEF AUDIT EXECUTIVE

2024-November 2025 | 2024-November 2025

Usia Age	58 tahun per 31 Desember 2025 58 years old as of December 31, 2025
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Tangerang Selatan
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro (1995) • Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada (2000) • Bachelor's Degree in Accounting, Diponegoro University (1995) • Master's Degree in Management, Gadjah Mada University (2000)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Auditor Ahli Madya (Agustus 2024-Oktober 2024) • Kepala Auditorat VII.C (2022-2024) • Kepala Auditorat VII.D (2020-2022) • Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu (2019-2020) • Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta (2018-2019) • Kepala Subauditorat DKI Jakarta III (2016-2018) • Kepala Subauditorat Sumut I (2011-2016) • Kepala Subauditorat Kalsel II (2006-2011) • Kepala Subauditorat Kalteng-Kaltim (2006) • Kepala Seksi BUMN Pertanian-2 (2000-2006) • Auditor Ahli Pertama pada Subauditorat Pertamina (1996-2000) • Intermediate Expert Auditor (August 2024–October 2024) • Head of Auditorate VII.C (2022–2024) • Head of Auditorate VII.D (2020–2022) • Head of BPK Representative Office, Bengkulu Province (2019–2020) • Acting Head of BPK Representative Office, DKI Jakarta Province (2018–2019) • Head of Sub-Auditorat DKI Jakarta III (2016–2018) • Head of Sub-Auditorate North Sumatra I (2011–2016) • Head of Sub-Auditorate South Kalimantan II (2006–2011) • Head of Sub-Auditorat Central Kalimantan–East Kalimantan (2006) • Head of SOE Agriculture Section-2 (2000–2006) • Junior Expert Auditor at the Pertamina Sub-Auditorat (1996–2000)
Sertifikasi Certifications	• Certified State Finance Auditor (CSFA) • Chartered Accountant (CA) • Qualified Internal Audit (QIA)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Qualified Internal Audit (QIA) Certification

Melalui Surat Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Gas Negara Nomor 064800.S/KP/HCGS/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Selesai Masa Tugas Sebagai Chief Audit Executive di PGN, yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Chief Audit Executive PGN dikarenakan kembali bertugas di BPK.

Pada periode 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 posisi Chief Audit Executive dijabat oleh Division Head Internal Audit sebagai Penanggung Jawab Sementara (Pjs), dengan keterangan sebagai berikut:

Pursuant to the Letter of the Director of Human Resources and Business Support of PT Pertamina Gas Negara Nomor 064800.S/KP/HCGS/2025 dated October 31, 2025 on Notification of the End of Assignment as Chief Audit Executive at PGN, the individual concerned no longer serves as Chief Audit Executive of PGN due to returning to duty at BPK.

For the period from November 1, 2025 to December 31, 2025, the position of Chief Audit Executive was held by the Division Head of Internal Audit as Acting Officer (Pjs.), with the following details:

EDWARD SITUMORANG
PJS. CHIEF AUDIT EXECUTIVE
ACTING CHIEF AUDIT EXECUTIVE

1-16 November 2025 dan 1-13 Desember 2025 | November 1-16, 2025 and December 1-13, 2025

Usia Age	46 tahun, per tanggal 31 Desember 2025 46 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 12 April 1979 Bandung, April 12, 1979
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Depok
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia (2001)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Pjs. Chief Audit Executive, PGN (1-16 November 2025 dan 1-13 Desember 2025) • Division Head Finance & Business Support IA, PGN (Agustus 2024-sekarang) • Group Finance & ICoFR Internal Audit Manager (November 2020-Agustus 2024) • Internal Audit Manager, PT Pertamina Geothermal Energy (Juli 2018-2020) • Internal Audit Assistant Manager, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (April 2012-Juni 2018) • Superintendent Internal Audit, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (Mei 2011-April 2012) • Superintendent Internal Audit, Kodeco Energy Co Ltd (Juli 2010-Mei 2011) • Senior Internal Audit, Kodeco Energy Co Ltd (Juli 2009-Juli 2010) • Manajer, Kantor Akuntan Ernst & Young (Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja) (September 2007-Juli 2009) • Senior 1, Kantor Akuntan Ernst & Young (Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja) (Juli 2005-September 2007) • Senior 2, Kantor Akuntan Ernst & Young (Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja) (Juli 2004-Juli 2005) • Senior 3, Kantor Akuntan Ernst & Young (Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja) (Juli 2003-Juli 2004) • Asisten, Kantor Akuntan Ernst & Young (Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja) (Februari 2003-Juni 2003) • Semi Senior, Deloitte Touche Tohmatsu (Hans Tuanakotta and Mustofa) (Oktober 2001-Oktober 2002) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu (Hans Tuanakotta and Mustofa) (Oktober 2001-Oktober 2002) • Acting Chief Audit Executive, PGN (November 1–16, 2025 and December 1–13, 2025) • Division Head Finance & Business Support Internal Audit, PGN (August 2024–present) • Group Finance & ICoFR Internal Audit Manager (November 2020–August 2024) • Internal Audit Manager, PT Pertamina Geothermal Energy (July 2018–2020) • Internal Audit Assistant Manager, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (April 2012–June 2018) • Superintendent Internal Audit, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (May 2011–April 2012) • Superintendent Internal Audit, Kodeco Energy Co. Ltd. (July 2010–May 2011) • Senior Internal Auditor, Kodeco Energy Co. Ltd. (July 2009–July 2010) • Manager, Ernst & Young Public Accounting Firm (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (September 2007–July 2009) • Senior 1, Ernst & Young Public Accounting Firm (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (July 2005–September 2007) • Senior 2, Ernst & Young Public Accounting Firm (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (July 2004–July 2005) • Senior 3, Ernst & Young Public Accounting Firm (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (July 2003–July 2004) • Assistant, Ernst & Young Public Accounting Firm (Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) (February 2003–June 2003) • Semi-Senior, Deloitte Touche Tohmatsu (Hans Tuanakotta and Mustofa) (October 2001–October 2002) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu (Hans Tuanakotta and Mustofa) (October 2001–October 2002)
Sertifikasi Certifications	• Certified Public Accountant (CPA) • Chartered Accountant (CA) • Professional Certificate in Strategy Execution/Balance Score Card. • Qualified Internal Audit (QIA)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	• Auditor Academy pada tanggal 18-19 Juni 2025 • IIA Conference pada tanggal 27-28 Agustus 2025 • Auditor Academy on 18-19 June 2025 • IIA Conference on 27-28 August 2025



TUGIMIN
PJS. CHIEF AUDIT EXECUTIVE
ACTING CHIEF AUDIT EXECUTIVE

17-30 November 2025 dan 14 Desember 2025 – 3 Januari 2026 | November 7-30, 2025 and Desember 14, 2025 – January 3, 2026

Usia Age	44 tahun, per 31 Desember 2025 44 years old as of 31 December 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Boyolali, 15 November 1981 Boyolali, November 15, 1981
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Bekasi
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia (2004) Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia (2004)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Pjs. Chief Audit Executive, PGN (17-30 November 2025 dan 14 Desember 2025 – 3 Januari 2026) • Department Head, Strategic Plan & Business Development Internal Audit, PGN (Februari 2025-sekarang) • Pengawas Komite Etik, PGN (Februari 2025- sekarang) • Chief Audit Executive, PT Elnusa Tbk (September 2022-Januari 2025) • Manager Internal Audit Region I PT Kilang Pertamina Internasional (RU II Dumai dan RU III Plaju) (Desember 2021-Agustus 2022) • Manager Internal Audit Region III PT Kilang Pertamina Internasional (RU V Balikpapan dan RU VII Kasim) (Oktober 2020-November 2021) • Manager Internal Audit Region III PT Kilang Pertamina Internasional (RU II Dumai dan RU III Plaju) (Oktober 2020-November 2021) • Senior Auditor di MOR IV Semarang dan RU II Dumai (Mei 2017-September 2020) • Auditor di RU VI Balongan, RU III Plaju dan Investigasi PT Pertamina (Persero) (Februari 2012-April 2017) • Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) (Juli 2007-Januari 2012) • Acting Chief Audit Executive, PGN (November 17–30, 2025 and December 14, 2025–January 3, 2026) • Department Head, Strategic Plan & Business Development Internal Audit, PGN (February 2025–present) • Ethics Committee Supervisor, PGN (February 2025–present) • Chief Audit Executive, PT Elnusa Tbk (September 2022–January 2025) • Manager Internal Audit Region I, PT Kilang Pertamina Internasional (RU II Dumai and RU III Plaju) (December 2021–August 2022) • Manager Internal Audit Region III, PT Kilang Pertamina Internasional (RU V Balikpapan and RU VII Kasim) (October 2020–November 2021) • Manager Internal Audit Region III, PT Kilang Pertamina Internasional (RU II Dumai and RU III Plaju) (October 2020–November 2021) • Senior Auditor at MOR IV Semarang and RU II Dumai (May 2017–September 2020) • Auditor at RU VI Balongan, RU III Plaju, and Investigation Unit of PT Pertamina (Persero) (February 2012–April 2017) • Auditor at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (July 2007–January 2012)
Sertifikasi Certifications	• Chartered Accountant (CA) • Qualified Internal Audit (QIA) • Certified Fraud Examiner (CFE) • Certified Internal Auditor (CIA)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	National Anti Fraud Conference pada tanggal 25-26 Juni 2025 National Anti Fraud Conference on 25-26 June 2025



Pada 1 Maret 2026, Chief Audit Executive PGN dijabat oleh Erwansyah Nasrul Fuad berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 015100.K/KP/PDO/2026.

In March 1, 2026, Erwansyah Nasrul Fuad was appointed as Chief Audit Executive of PGN according to the Decree of the Board of Directors Number 015100.K/KP/PDO/2026.

ERWANSYAH NASRUL FUAD
CHIEF AUDIT EXECUTIVE
CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Maret 2026 - sekarang | March 2026 - present

Usia Age	48 tahun, per tanggal 31 Desember 2025 48 years old as of December 31, 2025
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Ponorogo, 25 Juni 1977 Ponorogo, June 25, 1977
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Ekonomi, Universitas Trisakti (2017) • DIV Akuntansi, STAN (2000) • DIII Akuntansi Non Register (1998) • Master's Degree in Economics, Trisakti University (2017) • Diploma IV in Accounting, STAN (2000) • Diploma III in Non-Register Accounting (1998)
Riwayat Jabatan Work Experience	• Chief Audit Executive PGN (1 Maret 2026 – sekarang) • Kepala Bidang Pemeriksaan Aceh II BPK Perwakilan Aceh (07 Oktober 2025 – 28 Februari 2026) • Kepala Bidang Pemeriksaan Daerah Khusus Jakarta II BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (10 Februari 2025 – 6 Oktober 2025) • Kepala Subauditorat DKI Jakarta II BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (15 Oktober 2024 – 9 Februari 2025) • Kepala Subauditorat Jawa Tengah IV BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (25 Oktober 2022 – 14 Oktober 2024) • Kepala Subauditorat IV.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara IV (31 Desember 2019 – 24 Oktober 2022) • Kepala Subauditorat VII.A.3 Auditorat Utama Keuangan Negara VII (02 Februari 2017 – 30 Desember 2019) • Chief Audit Executive of PGN (March 1, 2026 – present) • Head of Audit Division of Aceh II, BPK Representative Office of Aceh (October 7, 2025 – February 28, 2026) • Head of Audit Division of Jakarta Special Region II, BPK Representative Office of Jakarta Special Region Province (February 10, 2025 – October 6, 2025) • Head of Sub-Auditorate of DKI Jakarta II, BPK Representative Office of DKI Jakarta Province (October 15, 2024 – February 9, 2025) • Head of Sub-Auditorate of Central Java IV, BPK Representative Office of Central Java Province (October 25, 2022 – October 14, 2024) • Head of Sub-Auditorate IV.B.1, Principal Auditorate of State Finance IV (December 31, 2019 – October 24, 2022) • Head of Sub-Auditorate VII.A.3, Principal Auditorate of State Finance VII (February 2, 2017 – December 30, 2019)
Sertifikasi Certifications	• Certified State Finance Auditor (CSFA) • Certified Government Auditing Professional (CGAP) • Akuntan | Accountant (CPSAK) • Certified Public Accountant (CPA)
Pelatihan di 2025 Trainings in 2025	• Sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA), Badiklat PKN BPK RI • Penguatan Mutu Kelembagaan, Badiklat PKN BPK RI • Certified State Finance Auditor (CSFA), Training Institute for State Finansial Audit, the Audit Board of the Republic of Indonesia • Institutional Quality Strengthening, Training Institute for State Finansial Audit, the Audit Board of the Republic of Indonesia • Sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA), Badiklat PKN BPK RI • Penguatan Mutu Kelembagaan, Badiklat PKN BPK RI • Certified State Finance Auditor (CSFA), Training Institute for State Finansial Audit, the Audit Board of the Republic of Indonesia • Institutional Quality Strengthening, Training Institute for State Finansial Audit, the Audit Board of the Republic of Indonesia



DASAR PENGANGKATAN CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Chief Audit Executive pada periode 1 November 2024 sampai dengan 1 November 2025 dijabat oleh R. Aryo Seto Bomantari yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 071900.K/KP/PDO/2024 tanggal 4 November 2024 berlaku sejak tanggal 1 November 2024.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Pengangkatan dan pemberhentian Chief Audit Executive dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Pasal 5 poin (1), Anggaran Dasar PGN, *Board Manual* Perseroan dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 5 Februari 2024 poin (8.b).

Pengangkatan dan pemberhentian Chief Audit Executive dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero).

KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Satuan Kerja Internal Audit termasuk di dalam struktur organisasi PGN, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

BASIS APPOINTMENT OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The Chief Audit Executive for the period from November 1, 2024 to November 1, 2025 was held by R. Aryo Seto Bomantari, as stipulated in the Board of Directors Decree of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 071900.K/KP/PDO/2024 dated November 4, 2024, effective as of November 1, 2024.

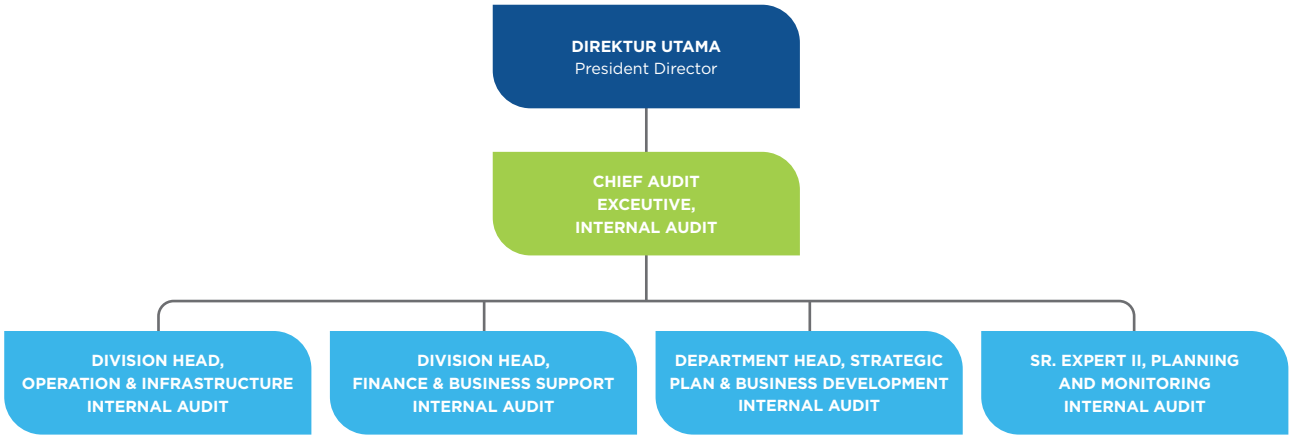
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The appointment and dismissal of the Chief Audit Executive are carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter, Article 5 point (1), PGN's Articles of Association, the Company's Board Manual, and the Internal Audit Charter dated February 5, 2024 point (8.b).

The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, after first obtaining a recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero).

POSITION OF INTERNAL AUDIT WITHIN THE COMPANY'S STRUCTURE

The Internal Audit Work Unit is part of PGN's organizational structure and reports directly to the President Director.



PIAGAM INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan oleh Chief Audit Executive, Direktur Utama dan Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen pada tanggal 5 Februari 2024.

Piagam Internal Audit secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Utama, Persyaratan Auditor Internal, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan, Struktur dan Kedudukan, Independensi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab, Standar Pelaksanaan, serta Kode Etik Auditor.

Piagam Internal Audit secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit mengacu pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Sedangkan dalam pelaksanaan penugasan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit Nomor P-001/18.00/2024 tanggal berlaku 29 Februari 2024.

Secara garis besar Pedoman tersebut mengatur kebijakan umum dan khusus terkait pengelolaan Satuan Kerja Internal Audit (SKIA), kualifikasi pelaksana kegiatan SKIA, perencanaan kegiatan SKIA, penugasan *assurance*, penugasan konsultasi, pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi, Quality Assurance and Improvement Program (QAIP).

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Internal Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui pemberian jasa *assurance, advice,* dan *insight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Subholding Gas.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan Annual Audit Plan (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan *resources* yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
4. Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit refers to the Internal Audit Charter, which was established by the Chief Audit Executive, the President Director, and the President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner on February 5, 2024.

In general, the Internal Audit Charter outlines the Vision, Mission, Objectives, Scope, Core Principles, Requirements for Internal Auditors, Prohibition of Concurrent Positions and Duties, Structure and Position, Independence, Authority, Duties and Responsibilities, Implementation Standards, and the Auditor Code of Ethics.

The complete Internal Audit Charter can be accessed on PGN's website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit refers to the Internal Audit Charter. While in executing audit engagements, it refers to the Internal Audit Unit Activity Management Guidelines Number P-001/18.00/2024, effective from February 29, 2024.

In general, the Guidelines regulate general and specific policies related to the management of the Internal Audit Unit (SKIA), the qualifications of SKIA personnel, planning of SKIA activities, assurance engagements, consulting engagements, monitoring of follow-up on recommendations, and the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP).

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include the following:

1. Conducting oversight activities through the provision of assurance, advisory, and insight services across all operational and business areas of the Gas Subholding.
2. Ensuring that the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competence are adequately implemented.
3. Preparing and proposing the Annual Audit Plan (AAP), which includes, among others, audit objects, audit schedules, and required resources, for approval by the President Director and the Board of Commissioners upon the recommendation of the Audit Committee.
4. Reviewing the ongoing AAP to ensure its alignment with the Company's business processes and risks, as well as the scope and objectives of the audit engagement.

5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
7. Memastikan SKIA secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance, advice,* dan *insight* di lingkungan Internal Audit Pertamina Group.
9. Menguji serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
12. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
13. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
14. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, dan Dewan Komisaris.
15. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
16. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan oleh Auditor Eksternal.
17. Melaksanakan audit investigasi yang dikoordinasikan dengan Internal Audit Holding dan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) atau masyarakat/pihak lainnya dan/atau berdasarkan *red flag* yang telah diidentifikasi oleh Internal Audit.
18. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) kegiatan Internal Audit.
19. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

5. Communicating resource limitations in audit execution, changes to the AAP, and shifts in policy direction to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Ensuring that each audit engagement is properly supervised and supported by adequate working papers, and that the recommendations, advice, and insights provided can be implemented by the auditee.
7. Ensuring that the Internal Audit Unit collectively possesses and/or acquires adequate knowledge, skills, and competencies.
8. Coordinating the management of Internal Audit activities, including but not limited to assurance, advisory, and insight services, within the Pertamina Group's Internal Audit environment.
9. Testing and evaluating the effectiveness of internal control implementation and risk management systems in accordance with applicable policies.
10. Conducting compliance audits with relevant laws and regulations.
11. Identifying alternatives for improvement and enhancement of the Company's operational efficiency.
12. Conducting special audits as necessary.
13. Coordinating with the Audit Committee.
14. Reporting oversight results to the President Director, other relevant Directors, and the Board of Commissioners.
15. Monitoring the follow-up implementation of Internal Audit, external audit, and other supervisory institutions' findings, and reporting periodically to the President Director and the Audit Committee.
16. Coordinating audit/examination activities conducted by External Auditors.
17. Conducting investigative audits in coordination with Internal Audit Holding, which may be carried out as follow-up to complaints received through the Whistleblowing System (WBS), from the public/other parties, and/or based on red flags identified by Internal Audit.
18. Implementing evaluation and quality improvement programs for Internal Audit activities.
19. Reporting the results of Internal Audit activities to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
20. Carrying out other assignments mandated by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.

21. Melakukan penyusunan dan pengkajian *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Internal) secara periodik, minimal setahun sekali serta menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

Wewenang

Satuan Kerja Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Auditor Eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Berperan aktif dalam diskusi penunjukan dan/atau pengangkatan Chief Audit Executive di Anak Perusahaan dalam ruang lingkup Subholding Gas dengan memberikan rekomendasi dan/atau memutuskan persetujuannya.
8. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karier pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *manpower* pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Subholding Gas dan Anggota Subholding Gas setelah berkonsultasi dengan Chief Audit Executive Internal Audit PT Pertamina (Persero).
9. Mengelola kegiatan *assurance, advice, insight*, dan audit investigasi di lingkungan Subholding Gas melalui mekanisme yang ditentukan sebelumnya.
10. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit dengan Internal Audit Holding dan Anggota Subholding sesuai dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

21. Periodically preparing and reviewing the Internal Audit Charter (at least once a year) and submitting it to the President Director and the Board of Commissioners for approval.

Authority

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit has the following authorities:

1. To obtain unrestricted access to all Company data, documents, functions, activities, and other resources, including requesting information or explanations from all officers/employees in the performance of Internal Audit duties.
2. To determine the scope, methods, procedures, techniques, strategies, and audit approach.
3. To communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
4. To coordinate with External Auditors and other supervisory institutions.
5. To request or obtain assistance from internal Company personnel as well as external parties in the execution of its duties.
6. To hold periodic meetings and meetings as necessary with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
7. To actively participate in discussions regarding the appointment and/or designation of the Chief Audit Executive in Subsidiaries within the Gas Subholding by providing recommendations and/or granting approval.
8. To determine policy direction, organizational structure, employee career development management (transfers and/or promotions), management of manpower for audit assignments, and to coordinate and supervise Internal Audit activities within the Gas Subholding and its Members after consultation with the Chief Audit Executive of Internal Audit of PT Pertamina (Persero).
9. To manage assurance, advisory, insight, and investigative audit activities within the Gas Subholding through predetermined mechanisms.
10. To coordinate the management of Internal Audit activities with Internal Audit Holding and Subholding Members in accordance with the coordination framework approved by the President Director.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT INTERNAL AUDIT DENGAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU KOMITE AUDIT

POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE FREQUENCY OF INTERNAL AUDIT MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND/OR THE AUDIT COMMITTEE

68 kali/times

Rapat Internal Audit Bersama Direksi
Internal Audit meetings with the Board of Directors

19 kali/times

Rapat Internal Audit Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit di Tahun 2025
Internal Audit meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee in 2025

Secara berkala, Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Rapat juga dapat diselenggarakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2025, Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti rapat dengan Direksi sebanyak 68 kali rapat, dan 19 kali rapat bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

On a regular basis, the Internal Audit Unit holds meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee. Meetings may also be conducted on an ad hoc basis as needed. Throughout 2025, the Internal Audit Unit attended 68 meetings with the Board of Directors and 19 meetings jointly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.

JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT

NUMBER OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL



19 Personel/Personnel

Internal Audit PGN
PGN's Internal Audit

Per 31 Desember 2025, jumlah personel Internal Audit sebanyak 19 personel, yang terdiri dari:

As of December 31, 2025, PGN's Internal Audit function consists of 19 personnel, comprising:

Jabatan Position	Jumlah Total
Chief Audit Executive	Kosong* Vacant*
Division Head, Operation and Infrastructure Internal Audit	1
Division Head, Finance and Business Support Internal Audit	1
Department Head, Strategic Plan and Business Development Internal Audit	1
Sr. Expert II, Planning and Monitoring Internal Audit	1
Expert Audit & Stakeholder Management	1
Lead Auditor	4

*) Posisi per 31 Desember 2025 diisi oleh Pejabat Sementara (PJS) yang merupakan dan Department Head, Strategic Plan and Business Developpent IA.
*) The position as of December 31, 2025 is served by Acting Official (PJS) who is the Department Head, Strategic Plan and Business Developpent IA.

Jabatan Position	Jumlah Total
Sr. Auditor II	2
Sr. Auditor I	1
Auditor II	4
Auditor I	1
Jr. Auditor I, Operation and Infrastructure	1
Assistant, Planning and Monitoring Internal Audit	1
Jumlah Total	19

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONEL INTERNAL AUDIT

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personel Internal Audit, selain standardisasi kompetensi melalui sertifikasi profesi, mengikuti pelatihan non sertifikasi yang dapat menunjang pengembangan manajerial maupun kompetensi audit secara langsung.

Internal Audit juga berperan aktif mengikuti forum Seminar seperti Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Regional Conference, seminar Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) ESDM dan BUMN.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan pengembangan kompetensi personel Internal Audit meliputi:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL

Programs to enhance the competencies and professionalism of Internal Audit personnel include standardizing competencies through professional certifications and non-certification training that directly support managerial and audit competency development.

Internal Audit also plays an active role in participating in seminar forums such as the National Seminar for Internal Auditors (SNIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Regional Conference, and the seminar of the Internal Monitoring Unit Communication Forum (FKSPI) of EMR and SOEs.

In 2025, some of the competency development activities for Internal Audit personnel include:

No	Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	Auditor Academy Internal Audit Pertamina Group TW I dengan topik AMS - Tahap Perencanaan dan Perencanaan Audit/Konsultasi Auditor Academy of Pertamina Group Internal Audit Q1 on AMS - Planning Stage and Audit/Consultation Planning	27 Februari 2025 February 27, 2025	Pertamina Corporate University
2.	Training Internal Assessor Risk Maturity Assessment Internal Assessor Training on Risk Maturity Assessment	24-25 April 2025 April 24-25, 2025	Risk Management PT Pertamina (Persero)
3.	IIA National Conference	27-28 Agustus 2025 August 27-28, 2025	The IIA Indonesia
4.	Auditor Academy Internal Audit Pertamina Group TW II Auditor Academy of Pertamina Group Internal Audit Q2	18-19 Juni 2025 June 18-19, 2025	Pertamina Corporate University
5.	National Anti Fraud Conference	25-26 Juni 2025 25-26, 2025	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia
6.	Konferensi Auditor Internal (KAI) Internal Auditor Conference (KAI)	1-4 Juli 2025 July 1-4, 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
7.	Probity Audit and Dispute Resolution	21-25 Juli 2025 July 21-25, 2025	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
8.	Training Certified Risk for Professional (CRP) Certified Risk for Professional (CRP) Training	21-25 Juli 2025 July 21-25, 2025	Indonesia Risk and Business Advisory (IRBA)
9.	Training Upgrading Awareness dan Internal Audit ISO 37001:2025 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) Training on Upgrading Awareness and Internal Audit ISO 37001:2025 (Anti-Bribery Management System/ABMS)	30-31 Juli 2025 July 30-31, 2025	PGN

No	Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
10.	Sertifikasi Panitia Tender PTK-007 PTK-007 Tender Committee Certification	4-7 Agustus 2025 August 4-7, 2025	PT Saka Energi Indonesia
11.	Training Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Training	11-14 Agustus 2025 August 11-14, 2025	Risk Advisory & Performance Learning Center
12.	Training Data Analysis and Visualization with Excel Training on Data Analysis and Visualization with Excel	27-29 Agustus 2025 August 27-29, 2025	Pertamina Corporate University
13.	Training Internal Control Over Finansial Report Batch III Training on Internal Control OVer Financial Report Batch III	9-11 September 2025 September 9-11, 2025	PT Pertamina (Persero)
14.	Auditor Academy Internal Audit Pertamina Group TW III dengan topik Perencanaan Audit Auditor Academy of Pertamina Group Internal Audit Q3 on Audit Planning	17 September 2025 September 17, 2025	Pertamina Corporate University
15.	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Manajerial Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certficiation	29 September-6 Oktober 2025 29 September-6 Oktober 2025	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
16.	Training Global Internal Audit Standards Global Internal Audit Standards Training	28-29 Oktober 2025 28-29 Oktober 2025	The IIA Indonesia
17.	Auditor Academy Internal Audit Pertamina Group TW IV dengan topik Pelaksanaan dan Pelaporan Audit serta ICoFR Auditor Academy of Pertamina Group Internal Audit Q4 on Audit Implementation and Reporting and ICoFR	7 November 2025 November 7, 2025	Pertamina Corporate University
18.	Training Certified Risk Management Officer Certified Risk Management Officer Training	24-26 November 2025 November 24-26, 2025	Risk Advisory & Performance Learning Center
19.	Training Portfolio Management Training Portfolio Management Training	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	Pertamina Corporate University

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

Sebagai bentuk komitmen PGN dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan standar profesi Internal Audit setiap personel Internal Audit wajib mengembangkan pengetahuan dan kompetensi melalui sertifikasi profesi. Personel Internal Audit PGN telah memperoleh sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional dengan rincian sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

As a form of PGN's commitment to developing Human Resources, in accordance with Internal Audit professional standards, each member of Internal Audit personnel is obliged to develop their knowledge and competencies through professional certifications. PGN's Internal Audit personnel have received national and international certifications as follows:

Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Number of Personnel
Qualified Internal Auditors (QIA)	18
Certified Risk Professional (CRP)	7
Certified Internal Audit (CIA)	1
Certified Fraud Examiners (CFE)	3
Chartered Accountant (CA)	3
Certified Internal Audit Executive (CIAE)	1
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	1
Certified Forensic Auditor (CFrA)	3

Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Number of Personnel
Certified Public Accountant (CPA)	1
Certified Government Accounting Expert (CGAE)	1
Certified Information Systems Auditor (CISA)	1

PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2025

Insight

Internal Audit meningkatkan perannya sebagai *Insight Generator* dan *Trusted Advisor*. Internal Audit lebih proaktif memberikan *insights* dan *strategic advises* kepada Manajemen terutama pada aspek Governance, Risk dan Compliance. Sepanjang tahun 2025, Internal Audit telah menyampaikan enam *insight* kepada Manajemen melalui *Management Letter.*

Pelaksanaan Audit dan Konsultasi

Berdasarkan *Annual Audit Plan* (AAP) 2025, Internal Audit telah melaksanakan sembilan penugasan audit dan konsultasi.

Selain melaksanakan penugasan berdasarkan AAP 2024 Internal Audit juga telah melaksanakan tiga penugasan Non AAP 2025, dua penugasan *Carry Over* AAP 2024.

Internal Audit PGN secara aktif berkoordinasi dengan Internal Audit Pertamina sebagai holding dan Internal Audit seluruh Entitas Anggota Subholding Gas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Pelaksanaan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut:

- Realisasi *monitoring* tindak lanjut hasil Audit Internal yang dilakukan oleh Internal Audit PGN pada periode tahun 2025 sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT ACTIVITY IMPLEMENTATION ACROSS 2025

Insight

Internal Audit strengthened its roles as Insight Generator and Trusted Advisor. Internal Audit has been more proactive in providing insights and strategic advice to the Management, especially regarding Governance, Risk, and Compliance. Throughout 2025, Internal Audit has delivered six insights to the Management through the Management Letter.

Audit and Consultation Implementation

Based on the 2025 Annual Audit Plan (AAP), Internal Audit has carried out nine audit and consultation assignments.

In addition to performing duties based on the 2024 AAP, Internal Audit has also carried out three assignments not included in the 2025 AAP and two carried-over assignments from the 2024 AAP.

PGN's Internal Audit actively coordinates with the Internal Audit of Pertamina as a holding and the Internal Audit of all Member Entities of Gas Subholding.

Follow-Up Actions on Audit Recommendations

Monitoring of follow-up action completion:

- The monitoring realization of follow-up actions on the results of PGN's Internal Audit in 2025 is as follows:

TABEL REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2025
Table of Recapitulation of Follow-Up Actions on the Results of Internal Audit for January 1 – December 31, 2025

No.	Uraian Description	Total
A.	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2024 Outstanding recommendations as of December 31, 2025	81
B.	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2025 Additional recommendations as of December 31, 2025	118
C.	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2025 Total recommendations as of December 31, 2025	199
D.	Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2025 Follow-up actions as of December 31, 2025	82

No.	Uraian Description	Total
E.	*Outstanding* rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2025 Outstanding recommendations as of December 31, 2025	117
E1.	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2025 yang telah melebihi *end date* Outstanding recommendations as of December 31, 2025 exceeding the end date	1
E2.	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2025 yang belum melebihi *end date* Outstanding recommendations as of December 31, 2025 not exceeding the end date	116
Persentase Pencapaian (F) =D/(D+E1) x 100% Percentage of Achievement (F) =D/(D+E1) x 100%		99%

Sesuai dengan pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut, Internal Audit akan menyampaikan kembali *reminder* penyelesaian tindak lanjut kepada Auditee pada Triwulan I 2026.

- Rekomendasi hasil audit eksternal (BPK RI dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit PSA 62).

  1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
     Telah dilaksanakan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester I 2024 untuk tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersama dengan BPK RI pada tanggal 9 September sampai dengan 13 September 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 pada tanggal 28 Oktober 2025, BPK RI menetapkan dari keseluruhan *outstanding* rekomendasi yang berjumlah 30, terdiri dari 12 rekomendasi telah sesuai dan 18 rekomendasi dinyatakan belum sesuai.

Adhering to the monitoring of follow-up actions, Internal Audit will resend reminders to complete them to Auditees in Q1 of 2026.

- Recommendations on external audit results (Audit Board of the Republic of Indonesia and Public Accounting Firm for PSA 62 Audit)

  1. Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI)

     Updates on Follow-Up Actions on Recommendations Arising from BPK RI's Audit Results for the First Semester of 2024 for three Audit Result Reports (LHP) were conducted with BPK RI from September 9 to September 13, 2024. Based on the Report on the Monitoring Results of Follow-Up Actions on Audit Recommendations for the Second Semester of 2024 on October 28, 2025, BPK RI determined that, of the total 30 outstanding recommendations, 12 were deemed appropriate and 18 were deemed not appropriate.

TABEL REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2025
Table of Recapitulation of Follow-Up Actions on the Results of Internal Audit for 1 January – 31 December 2025

No.	Keterangan Description		Jumlah Rekomendasi Total Recommendation
A.	*Outstanding* rekomendasi per 1 Januari 2024 Outstanding recommendations as of January 1, 2025		29
B.	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2025 Additional recommendations as of December 31, 2025		1
C.	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024 Total recommendations as of December 31, 2025		30
D.	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2024 Follow-up actions as of December 31, 2025	Sesuai Appropriate	12
		Belum Sesuai Not Appropriate	18
		Belum Ditindaklanjuti Not Yet Followed Up	-
		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot be Followed Up	-
E.	Outstanding rekomendasi per 31 Desember 2025 Outstanding recommendations as of December 31, 2025		18

Selanjutnya Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester II 2024 telah dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan I 2025.

2. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS)
   Telah dilakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil Audit PSA 62 Tahun 2024. KAP PSS telah menyetujui dan menyatakan bahwa PGN telah menindaklanjuti dua rekomendasi hasil audit PSA 62 tahun 2023 berdasarkan email yang telah disampaikan pada tanggal 24 Maret 2025. Berdasarkan Laporan Auditor Independen PSA 62 tahun 2024 Nomor 00235/2.1032/JL.0/02/1726-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 terdapat tambahan lima rekomendasi. Sampai dengan 31 Desember 2025, dua rekomendasi sudah selesai ditindaklanjuti oleh Fungsi Procurement namun masih menunggu persetujuan dari KAP PSS sehingga rekomendasi yang masih outstanding adalah lima rekomendasi.

Afterward, Updates on Follow-Up Actions on Recommendations Arising from BPK RI's Audit Results for the Second Semester of 2024 will be scheduled for implementation in the First Quarter of 2025.

2. Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS)
   Monitoring of follow-up actions on PSA 62 Audit Results for 2024 has been conducted. KAP PSS has agreed and stated that PGN has followed up on two recommendations arising from PSA 62 audit results for 2023, based on the email delivered on March 24, 2025. Based on PSA 62 Independent Auditor Report for 2024 Number 00235/2.1032/JL.0/02/1726-3/1/III/2025 dated March 25, 2025. As of December 31, 2025, two recommendations have been followed up by the Procurement Function yet are still awaiting approval from the PSS Public Accountant Office. Thus, five recommendations remain outstanding.

Pendampingan Auditor Eksternal

Internal Audit aktif melakukan pendampingan terhadap audit yang dilakukan Auditor Eksternal, sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dalam melaksanakan Audit PSA 62 Tahun Buku 2025.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan pemeriksaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan di PGN Group.
3. BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan atas Kinerja PT Pertamina (Persero), Subholding dan Instansi terkait Lainnya dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan pendukung lainnya
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan atas dukungan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero).

Assistance for External Auditor

Internal Audit facilitates audits performed by External Auditors, including:

1. Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja (firm member of Ernst & Young Global Limited) in conducting PSA 62 Audit for the 2025 Financial Year.
2. Development Finance Comptroller (BPKP) in conducting audits and assisting with problem resolutions at PGN Group.
3. BPK RI in conducting an audit of the Performance of PT Pertamina (Persero), Subholding, and Other Relevant Institutions in the Management of Oil and Natural Gas, as well as Other Supporting Activities.
4. The Inspectorate General of the Ministry of Finance in conducting government monitoring and support activities for PT Pertamina (Persero).

Lain-Lain

Internal Audit selain melakukan kegiatan audit dan pendampingan di atas, juga melakukan kegiatan:

1. Ikut serta dalam kegiatan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN dan ESDM.
2. Mengikuti pelatihan, konferensi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
3. Melaksanakan sosialisasi Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS).
4. Mengimplementasikan Audit Management System (AMS) dalam menjalankan penugasan dan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Miscellaneous

In addition to carrying out the aforementioned audit and assisting activities, Internal Audit also conducts the following activities:

1. Participating in the Internal Monitoring Unit Communication Forum (FKSPI) of EMR and SOEs.
2. Participating in training, conference, certification, and competency development programs.
3. Disseminating the Whistleblowing System (WBS) Manual.
4. Implementing the Audit Management System (AMS) in performing duties and monitoring of follow-up actions on audit recommendations.

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja (EY), firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia, untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. Penunjukan dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Mei 2025, yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan Dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Key Performance Indicator ("KPI") Kolegial Direksi/Korporat dan KPI Individual Direksi Tahun Buku 2025.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menunjuk KAP yang akan ditugaskan dalam audit laporan keuangan Perseroan tahun berjalan. Direksi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP hingga kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melakukan kajian mengenai kriteria calon Kantor Akuntan Publik yang dapat mengikuti proses pengadaan yang akan diselenggarakan sesuai dengan proses pengadaan di Perseroan
2. Dewan Komisaris meminta Direksi Perusahaan untuk melakukan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan peraturan Perusahaan dengan tetap berkoordinasi dengan Komite Audit
3. Direksi Perusahaan melakukan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG
4. Direksi menyampaikan hasil pengadaan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris
5. Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan hasil proses pengadaan
6. Direksi melaksanakan kontrak jasa pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketetapan Dewan Komisaris yaitu KAP Purwanto Susanti dan Surja ("EY")

EXTERNAL AUDITOR APPOINTMENT PROCESS

The Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Purwanto Susanti dan Surja (EY), a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia, to conduct a Financial Statement Audit for the 2025 Financial Year. The appointment was made based on the Annual General Meeting of Shareholders on 28 May 2025, which granted authority to the Board of Commissioners to carry out Consolidated Financial Statement Audit for the 2025 Financial Year, PSA 62 Compliance Audit, Financial Statement Audit of Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Implementation of Agreed-Upon Procedures in Respect of the Report on the Performance Evaluation Results of the Collegial KPI of the Board of Directors/Corporate and the Individual KPI of the Board of Directors for the 2025 Financial Year.

The Board of Commissioners is responsible for appointing the KAP to audit the Company's financial statements for the year. The Board of Directors assisted the Board of Commissioners in procuring KAP services until the contract was executed in accordance with applicable provisions.

1. The Board of Commissioners was assisted by the Audit Committee to review the criteria for Public Accounting Firm candidates that can participate in the procurement process, which would be carried out according to the procurement process in the Company
2. The Board of Commissioners asked the Board of Directors of the Company to carry out the procurement process for Public Accounting Firm services, in line with the Company's regulations and in coordination with the Audit Committee
3. The Board of Directors of the Company conducted the procurement process for Public Accounting Firm services according to the applicable regulations of the Company while upholding GCG principles
4. The Board of Directors submitted the results of the Public Accounting Firm service procurement to the Board of Commissioners
5. The Board of Commissioners stipulated the Public Accounting Firm based on the procurement results
6. The Board of Directors entered into a service contract with a Public Accounting Firm, namely Purwanto Susanti dan Surja ("EY"), for the audit of the Company's Financial Statements aligned with the stipulation of the Board of Commissioners

Adapun ruang lingkup jasa audit yang dilakukan Ernst & Young (EY) adalah sebagai berikut:

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025.
2. Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2025.
3. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) tahun buku 2025.
4. Penerapan Prosedur Yang Disepakati Sehubungan Dengan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Key Performance Indicator ("KPI") Kolegial Direksi/Korporat dan KPI Individual Direksi Tahun Buku 2025.

BESARAN BIAYA JASA AUDITOR EKSTERNAL

Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti jika KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Pada tahun 2025, total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku sebesar Rp3.500.000.000 (belum termasuk PPN). Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) juga ditunjuk untuk melakukan jasa audit, sebagai berikut:

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Saka Energi Indonesia Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp2.500.000.000 (belum termasuk PPN);
2. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Solution Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp400.000.000 (belum termasuk PPN);
3. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Gagas Energi Indonesia Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp400.000.000 (belum termasuk PPN)
4. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGN LNG Indonesia Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp400.000.000 (belumtermasuk PPN)
5. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permata Graha Nusantara Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp530.000.000 (belum termasuk PPN);
6. Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Kalimantan Jawa Gas Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesar Rp400.000.000 (belum termasuk PPN)

The scope of audit services provided by Ernst & Young (EY) covers:

1. General Audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2025 Financial Year;
2. Financial Statement Audit of Micro and Small Business Funding Related to the 2025 Social and Environmental Responsibility Program;
3. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control (PSA 62) for the 2025 Financial Year;
4. Implementation of Agreed-Upon Procedures in Respect of the Report on the Performance Evaluation Results of the Collegial KPI of the Board of Directors/Corporate and the Individual KPI of the Board of Directors for the 2025 Financial Year.

EXTERNAL AUDITOR SERVICE FEES

The Board of Commissioners also has the authority to stipulate audit fees, expand the scope of required work, and impose other requirements, including appointing a substitute Public Accounting Firm (KAP) if the appointed KAP fails to complete the assignment.

In 2025, the total costs incurred for the Audit of the Consolidated Financial Statements for the financial year amounted to Rp3,500,000,000 (excluding VAT). Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia) was also appointed to provide the following audit services:

1. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Saka Energi Indonesia for the 2025 Financial Year at a fee of Rp2,500,000,000 (excluding VAT);
2. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGAS Solution for the 2025 Financial Year at a fee of Rp400,000,000 (excluding VAT);
3. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Gagas Energi Indonesia for the 2025 Financial Year at a fee of Rp400,000,000 (excluding VAT);
4. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGN LNG Indonesia for the 2025 Financial Year at a fee of Rp400,000,000 (excluding VAT);
5. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Permata Graha Nusantara for the 2025 Financial Year at a fee of Rp530,000,000 (excluding VAT);
6. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Kalimantan Jawa Gas for the 2025 Financial Year at a fee of Rp400,000,000 (excluding VAT);

7. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Tahun Buku 2025 dengan biaya Rp400.000.000 (belum termasuk PPN); dan
8. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Gas dan entitas anak Tahun Buku 2025 dengan biaya sebesarRp3.700.000.000 (belum termasuk PPN).

Pada tahun 2025, total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan jasa audit terhadap PGN dengan ruang lingkup tersebut dan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak sebesar Rp12.230.000.000 (belum termasuk PPN). Daftar Akuntan dan Kantor Akuntan Publik PGN dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

7. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara for the 2025 Financial Year at a fee of Rp400,000,000 (excluding VAT); and
8. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Gas and subsidiary entities for the 2025 Financial Year at a fee of Rp3,700,000,000 (excluding VAT).

In 2025, the total costs incurred for the provision of audit services for PGN within that scope and for the general audit of the financial statements of Subsidiary Entities amounted to Rp12,230,000,000 (excluding VAT). The list of Accountants and Public Accounting Firms contracted by PGN in the last five years is as follows:

DAFTAR AKUNTAN DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PGN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR
Accountants and Public Accounting Firms Contracted by PGN in the Last Five Years

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (a member firm of the global network PricewaterhouseCoopers in Indonesia)	Daniel Kohar
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia)	Irwan Haswir
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia)	Irwan Haswir
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia)	Irwan Haswir
2025	Purwanto Susanti dan Surya (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwanto Susanti dan Surya (a member firm of the global network Ernst & Young in Indonesia)	Irwan Haswir

JASA LAIN

Pihak yang telah ditunjuk Perusahaan sebagai Auditor Eksternal PGN Tahun Buku 2025 tersebut telah menyelesaikan tugasnya secara independen, sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surya tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada PGN.

OTHER SERVICES

The party appointed by the Company as PGN's External Auditor for the 2025 Financial Year has completed its assignment independently according to public accountant professional standards, the work agreement, and the stipulated audit scope. Purwanto Susanti dan Surya Public Accounting Firm did not provide any other consulting services to PGN.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM



KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PGN terus mengupayakan pengembangan sistem pengendalian internal dengan mengacu kepada ISO 31000:2018 *framework*, selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 2-MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam prosesnya, PGN mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan mekanisme dan proses yang melibatkan Direksi, anggota manajemen, dan seluruh personel di Perseroan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan atas pencapaian operasional Perseroan, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi dasar kuat bagi kegiatan operasional PGN yang sehat dan aman, mencegah kegagalan pencapaian tujuan, menghasilkan laporan keuangan terpercaya, serta memastikan kegiatan Perusahaan patuh pada aturan dan hukum. Upaya ini juga dapat memberikan informasi yang relevan dalam menilai kinerja Perusahaan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM CONFORMITY

PGN continues to make efforts to develop its internal control system with reference to the ISO 31000:2018 framework, which aligns it with the provisions of Regulation of SOEs Minister Number PER 2-MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In the process, PGN implements an internal control system with mechanisms and processes involving the Board of Directors, management members, and all personnel of the Company. This is intended to provide assurance regarding the Company's operational achievements, reliable financial reporting, and compliance with applicable procedures and regulations.

Effective implementation of the internal control system serves as a strong foundation for PGN's healthy and safe operational activities, produces reliable financial reports, and ensures that the Company's activities comply with rules and laws. This effort can also provide relevant information to assess the Company's performance.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

PGN menerapkan sistem pengendalian internal dalam dua aspek, yaitu pengendalian operasional dan keuangan. Pengendalian operasional dilakukan melalui pengkajian ulang oleh Direksi terhadap kinerja operasional dan realisasi Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kelemahan pengendalian terpasang, atau kurang memadainya rencana dan upaya mitigasi risiko.

Pada tahun 2025, PGN melaksanakan *Internal Control Testing* terkait pengendalian operasional melalui perencanaan dan pemetaan pengendalian yang dituangkan dalam *Business Process Model* (BPM) dan *Risk Control Matrix* (RCM), serta melakukan *testing* untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan mengidentifikasi peluang perbaikan pada risiko utama maupun proses bisnis utama Perusahaan.

Dalam melakukan pengendalian keuangan, PGN menjalankan pemisahan fungsi agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, secara rutin PGN melakukan pembaruan kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi sebagai acuan dalam kegiatan operasional yang aktual.

Dalam rangka meningkatkan keandalan pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko kesalahan material atau salah saji, PGN telah mengembangkan Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR). Untuk memastikan bahwa pengendalian yang sudah dirancang secara terkini (*up to date*), hingga 31 Desember 2025 *Control Owner* di lingkungan PGN *Standalone* telah melakukan *Control Self-Assesment* secara triwulanan yang sertifikasinya dilakukan melalui Aplikasi IMS (ICoFR Management System) serta melakukan pemutakhiran Business Process Model (BPM) dan Risk Control Matrix (RCM).

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL AND COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

PGN implements the internal control system in two aspects, namely operational and financial controls. Operational control is exercised by the Board of Directors through a review of operational performance and realization of the Company Work Plan and Budget. The purpose is to detect any weaknesses in installed controls or inadequate risk mitigation plans and efforts.

In 2025, PGN conducted Internal Control Testing on operational control through control planning and mapping outlined in the Business Process Model (BPM) and the Risk Control Matrix (RCM). PGN also conducted a test to evaluate internal control effectiveness and identify opportunities for improvement in the main risks and main business processes of the Company.

In conducting financial control, PGN divides functions to prevent errors or deviations in the implementation of duties. Furthermore, PGN regularly updates policies, procedures, operational systems, and accounting standards as a reference for actual operational activities.

To increase the reliability of financial reporting and reduce the risk of material errors or misstatements, PGN has developed Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR). To ensure that control has been designed according to the latest requirements, as of December 31, 2025, Control Owners within PGN Standalone have carried out Self-Assessment Control on a quarterly basis, with the certification conducted through the IMS Application (ICoFR Management System), and updated the Business Process Model (BPM) and Risk Control Matrix (RCM).

Sementara itu, untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi ICoFR, mulai triwulan III tahun 2025 Internal Audit melakukan *Test of Design* dan *Test of Effectiveness* periode interim. Selain itu PGN juga mendorong pengembangan ICoFR di entitas anak perusahaan dan afiliasi di sepanjang tahun 2025 ini. Sampai dengan 31 Desember 2025, di level entitas anak telah dilaksanakan proses perancangan dan pemutakhiran Business Process Model (BPM) dan Risk Control Matrix (RCM) serta *Control Self-Assesment* triwulanan yang mulai dilaksanakan sejak April 2025.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018

Sistem pengendalian internal PGN merujuk pada *Framework* Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang mencakup integrasi, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan Manajemen Risiko di semua bisnis unit Perusahaan. Siklus prosesnya dimulai dari perencanaan awal hingga integrasi faktor internal dan eksternal Perusahaan.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal berlaku kepada seluruh lapisan Perseroan, termasuk Direksi, anggota manajemen, dan personel Perusahaan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan atas efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan, laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan.

Evaluasi atas efektivitas, efisiensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan audit oleh Internal Audit. Sedangkan efektivitas sebagian sistem pengendalian internal diuji melalui Audit PSA 62 setiap tahun oleh Akuntan Publik.

Meanwhile, to evaluate the level of effective ICoFR implementation, starting in the third quarter of 2025, Internal Audit has conducted Tests of Design and Test of Effectiveness during the interim period. Moreover, PGN also supports ICoFR development in subsidiary entities and affiliates throughout 2025. As of December 31, 2025, at the subsidiary entity level, the design and updating process for the Business Process Model (BPM) and Risk Control Matrix, as well as quarterly Self-Assessment Control, which began to be carried out in April 2025, have been implemented.

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH ISO 31000:2018

PGN's internal control system refers to the ISO 31000:2018 Framework for Risk Management, which covers the integration, design, implementation, evaluation, and improvement of Risk Management across all business units of the Company. The cycle begins with initial planning and ends with integration with internal or external factors of the Company.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

Internal control applies to all levels of the Company, including the Board of Directors, management members, and personnel of the Company. It aims to provide assurance of the Company's operational effectiveness and efficiency, reliable financial statements, and compliance with procedures and regulations.

The effectiveness, efficiency, and compliance in the implementation of the internal control system are evaluated through, among others, audits conducted by Internal Audit. Meanwhile, the effectiveness of certain parts of the internal control system is examined through a PSA 62 Audit, conducted annually by a Public Accountant.

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa PGN telah mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan serta tidak terdapat masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya yang memiliki kelemahan material.

Reports by Purwanto, Susanti, and Surja Public Accounting Firm on Compliance with Laws and Regulations ending December 31, 2025, and Reports by Purwanto, Susanti, and Surja Public Accounting Firm on Compliance with Internal Control ending December 31, 2025 revealed that PGN has complied with all material matters, certain articles, laws, regulations, contracts and assistance requirements. Additionally, there were no issues related to its internal control and operations with material weaknesses.

Perseroan selalu menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Audit Internal dan Audit PSA 62 dalam upaya penyempurnaan sistem pengendalian internal, serta agar kegiatan pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan secara efektif. Secara umum sepanjang tahun 2025, sistem pengendalian internal PGN telah berjalan efektif dan efisien.

The Company always follows up on recommendations arising from Internal Audits and PSA 62 Audits to enhance the internal control system and ensure that all operational activities of the Company proceed effectively. In general, throughout 2025, PGN's internal control system has operated effectively and efficiently.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Sesuai fungsinya, sistem pengendalian internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan tepat.

The Board of Directors is responsible for implementing the internal control system to the best of its ability in order to achieve the objectives of the Company. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for supervising the overall implementation of internal control, including the policies of the Board of Directors that govern internal control. According to its function, the internal control system was designed to manage and control risks properly and appropriately.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan yang dijalankan selama tahun 2025 telah memadai dan digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:

1. Operasi dijalankan secara efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku; dan
4. Pengamanan aset Perusahaan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners stated that the Company's internal control system implemented throughout 2025 was adequate and appropriately used to achieve the objectives of the Company's internal control, including:

1. Effective and efficient operations;
2. Accurate and reliable financial statements;
3. Compliance with applicable laws and regulations; and
4. Company asset security.

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan usaha, PGN senantiasa merujuk pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memiliki Fungsi Kepatuhan (*compliance)* yang memastikan bahwa kebijakan,prosedur, sistem dan kegiatan Perseroan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan juga merupakan bentuk penerapan GCG pada perusahaan BUMN, yang memastikan kepatuhan PGN terhadap komitmen yang telah dibuat kepada regulator dan otoritas pengawas lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

Direktorat Utama melakukan Fungsi Kepatuhan untuk memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepatuhan di Perusahaan dijalankan oleh beberapa satuan kerja di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 019400.K/OT.00/PDO/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Tata Kerja Direktorat Utama PGN.

Direktur Utama membawahi Fungsi Kepatuhan yang melekat kepada satuan kerja:
1. Legal Counsel and Compliance
2. Internal Audit
3. Corporate Secretary
4. HSSE
5. Strategic Business Advocacy

AUDIT KEPATUHAN DI PGN

Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh KAP yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan. Selain audit laporan keuangan, KAP juga telah melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal dan Peraturan Perundang-undangan (Audit PSA 62) di PGN yang merekomendasikan tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian internal yang berlaku dan interpretasi Perseroan atas implementasi peraturan perundang-undangan.

In making decisions and taking business actions, PGN always upholds high moral values and ensures compliance with the provisions of applicable laws and regulations. The Company has a Compliance Function that ensures its policies, procedures, systems, and activities comply with applicable laws and regulations.

The Compliance Function is also a form of GCG implementation in SOEs, ensuring PGN's compliance with the commitments made to regulators and other supervisory authorities.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF COMPLIANCE FUNCTION

The Principal Directorate performs the Compliance Function to ensure compliance with laws and regulations. The Compliance Function at the Company is carried out by several work units under the Board of Directors based on the Decree of President Director Number 019400.K/OT.00/PDO/2025 dated April 11, 2025 on Work Procedure for the Principal Directorate of PGN.

The President Director is in charge of the Compliance Function, which is attached to the following work units:
1. Legal Counsel and Compliance
2. Internal Audit
3. Corporate Secretary
4. HSSE
5. Strategic Business Advocacy

COMPLIANCE AUDIT AT PGN

The Company's Financial Statements are audited by the KAP appointed based on the Annual GMS Resolution. In addition to financial reports, KAP has also performed a Compliance Audit of Internal Control and Laws and Regulations (PSA 62 Audit) at PGN, upon which KAP recommends improvement actions for applicable internal control weaknesses and the Company's interpretation of laws and regulations.

PENGADAAN BARANG/JASA
GOODS/SERVICES PROCUREMENT

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis dan memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja Perseroan. Pengadaan barang/jasa menjadi pintu masuk utama bagi penyedia barang/jasa dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional Perseroan.

Pengadaan barang/jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perseroan dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional, dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa hingga serah terima hasil pekerjaan.

Seluruh proses dijalankan dengan mengedepankan aspek HSSE, pengelolaan risiko, dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kaidah *On Time, On Budget, On Scope/Specification, On Return, On Regulation* (OTOBOSOROR) sesuai prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, akuntabel, integritas, dan kehati-hatian.

Goods/services procurement is an important aspect in maintaining business continuity and plays a strategic role in influencing the Company's performance. Goods/services procurement is the main entry for goods/services providers to support the Company's investment and operational activities.

Goods/services procurement is carried out to meet the Company's needs for goods/services in supporting investment and operational activities, covering the planning of required goods/services and the handover of work results.

The entire process is conducted by prioritizing HSSE, risk management, and implementation of Domestic Component Level (TKDN), and the On Time, On Budget, On Scope/ Specification, On Return, On Regulation (OTOBOSOROR) principle, in accordance with the procurement principle, namely: efficient, effective, competitive, transparent, just and fair, open, accountable, upright, and careful.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Perseroan telah memiliki kebijakan dan ketentuan internal mengenai pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor P-001/31.00/2023 Rev.00 tanggal 30 Oktober 2023 yang berlaku tanggal 1 November 2023 disusun untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, khususnya terkait kegiatan pengadaan barang/jasa.

Selain itu Pedoman Pengadaan Barang/Jasa juga telah diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah SubHolding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group, yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-10/C00000/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberlakukan Pertamina Standar Pengadaan Barang/Jasa Nomor PS-S-022-390-2022 Edisi Ke – 2 tahun 2022.

GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY

The Company has internal policies and provisions on goods/services procurement, as outlined in Goods/Services Procurement Manual Number Number P-001/31.00/2023 Rev.00 dated October 30, 2023, valid from November 1, 2023. It was formulated to comply with the applicable regulation, namely Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, particularly related to goods/services procurement activities.

Additionally, the Goods/Services Procurement Manual has been aligned with the policies and provisions of PT Pertamina (Persero) as Oil and Gas Holding, where the Company serves as the Gas Subholding within Pertamina Group, namely Decree of President Director of PT Pertamina (Persero) Number Kpts-10/C00000/2023 dated July 17, 2023 on Implementation of Pertamina's Goods/Services Procurement Standards Number PS-S-022-390-2022 Second Edition of 2022.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor P-001/31.00/2023 Rev.00 tanggal 30 Oktober 2023 dan Dokumen Acuan Kerja terkait lainnya, yang mengatur tentang:

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa;
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa;
3. Pemilihan penyedia barang/jasa;
4. Kontrak dan amandemen kontrak pengadaan barang/jasa; dan
5. Penilaian kinerja dan koreksi sanksi penyedia barang/jasa.

Adapun metode pengadaan barang/jasa dilakukan Perseroan tidak terbatas pada:

1. Tender Terbuka, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara diumumkan guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa secara lebih luas.
2. Pemilihan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan mengundang lebih dari satu penyedia barang/jasa yang diyakini terbatas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Tender Terbatas, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang ditawarkan kepada seluruh penyedia barang/jasa teregistrasi atau terdaftar yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Tender Cepat, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang yang diikuti Penyedia barang/jasa teregistrasi atau terdaftar dengan membandingkan harga tanpa melalui penilaian kualifikasi khusus, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis dan masa sanggah.
5. Sinergi Pertamina Incorporated, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk satu Subholding Pertamina/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
6. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk satu penyedia barang/jasa, atau penunjukan berdasarkan hasil *Beauty Contest*.
7. Pengadaan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga pasar (*market price*), termasuk dalam hal ini *E-Purchasing*.

Goods/Services Procurement Manual Number P-001/31.00/2023 Rev.00 dated October 30, 2023, and other relevant Work Reference Documents, which regulate:

1. Registration of goods/services providers;
2. Planning of goods/services procurement;
3. Selection of goods/services providers;
4. Contracts and contract amendments for goods/services procurement; and
5. Performance assessment and sanction correction of goods/services providers.

The goods/services procurement methods used by the Company are not limited to:

1. Open Tendering, which is a method to meet the needs for goods/services that is conducted through public announcement to provide a wider opportunity to goods/services providers.
2. Direct Selection, which is a method to meet the needs for goods/services that is conducted by inviting more than one goods/services provider believed to be limited according to the work to be carried out.
3. Limited Tendering, which is a method to meet the needs for goods/services that gives an offer to all registered goods/services providers that meet the general qualifications according to the work to be carried out.
4. Fast Tendering, which is a method to meet the needs for goods participated by registered goods/services providers and conducted by comparing prices without going through specific qualification assessment, administrative bidding evaluation, technical bidding evaluation, or objection period.
5. Pertamina Incorporated Sinergy, which is a method to meet the needs for goods/services that is conducted by appointing a Pertamina Subholding/Pertamina Subsidiary/Pertamina Affiliate.
6. Direct Appointment, which is a method to meet the needs for goods/services that is conducted by appointing a goods/services provider or appointing based on Beauty Contest results.
7. Direct Procurement, which is a method to meet the needs for goods available at the market based on market prices, including E-Purchasing.

PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Selain Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Perseroan juga telah memiliki Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor P.002/10.01/2024 Rev.00 tanggal 30 April 2024 yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2024, yang telah selaras dengan kebijakan dan ketentuan PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah Subholding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group, yaitu Pedoman Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor A3.5-03/L100000/2023-S9 tanggal 3 Oktober 2023.

Pedoman tersebut telah dilakukan revisi terkait pengenaan Sanksi Finansial TKDN menjadi Pedoman Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor P.002/10.01/2024 Rev.01 tanggal 9 September 2025 dan yang berlaku efektif tanggal 09 September 2025.

DIGITALISASI *PROCUREMENT*

Untuk mendorong proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien serta implementasi TKDN, Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa. Hal ini selaras dengan implementasi digitalisasi pengadaan barang/jasa yang dicanangkan oleh PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah SubHolding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan oleh Perseroan antara lain:

1. Aplikasi iVendor Pertamina dipakai oleh Perseroan sejak 31 Mei 2023, aplikasi ini membantu dalam standarisasi proses pendaftaran penyedia barang/jasa, dimana Perseroan dapat menggunakan *data base* penyedia barang/jasa yang ada di Pertamina Group.
2. Aplikasi SMART-GEP, dipakai oleh Perseroan sejak 12 Agustus 2024, aplikasi ini membantu Perseroan dalam pengadaan barang/jasa mulai dari proses permintaan pengadaan dan proses pemilihan penyedia barang/jasa sejak pengumuman/undangan pengadaan hingga finalisasi kontrak secara online.
3. Aplikasi Local Content Management System (LCMS), dipakai oleh Perseroan sejak 1 September 2025, aplikasi ini membantu Perseroan dalam proses perhitungan perencanaan TKDN, monitoring implementasi hingga hasil verifikasi TKDN secara online.

MANUAL FOR INCREASING DOMESTIC PRODUCT USE

In addition to the Goods/Services Procurement Manual, the Company also has Manual for Increasing Domestic Product Use Number P.002/10.01/2024 Rev.00 dated 30 April 2024, effective from 1 July 2024, that aligns with the policies and provisions of PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas Holding, where the Company serves as the Gas Subholding within Pertamina Group, namely Manual for Increasing Domestic Product Use Number A3.5-03/L10000/2023-S9 dated 3 October 2023.

The guideline has been revised regarding the imposition of TKDN Financial Sanctions to become the Guideline for Increasing the Use of Domestic Products Number P.002/10.01/2024 Rev.01 dated September 9, 2025 effective from September 9, 2025.

PROCUREMENT DIGITALIZATION

To promote a more effective and efficient goods/services procurement process and TKDN implementation, the Company uses information technology in the form of applications to support the goods/services procurement process. It aligns with the digitalization of goods/services procurement initiated by PT Pertamina (Persero) as Oil and Gas Holding, where the Company serves as the Gas Subholding within Pertamina Group. The applications used by the Company comprise:

1. Vendor Pertamina Application, used by the Company since May 31, 2023. This application helps standardize the registration of goods/services providers and allows the Company to use a database of goods/services providers available within the Pertamina Group.
2. SMART-GEP Application, used by the Company since August 12, 2024. This application facilitates the Company's goods/services procurement process electronically, from goods/services procurement request and provider selection to contract finalization.
3. Local Content Management System (LCMS) Application, used by the Company since September 1, 2025. This application helps the Company with online TKDN planning calculations, monitoring of implementation, and TKDN verification results.

KEBIJAKAN *GREEN PROCUREMENT*

Perseroan juga berupaya untuk mendorong proses pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan serta Kebijakan *Sustainability* yang telah ditetapkan oleh Perseroan, dengan tetap memperhatikan prinsip dan praktik yang berlaku umum (*best practice*). Pada tanggal 25 Juni 2024, Perseroan juga telah mengeluarkan Kebijakan Green Procurement - berkaitan dengan aspek lingkungan, dan Kebijakan Sosial Untuk Supplier, Vendor, dan Kontraktor - berkaitan dengan aspek sosial yaitu: ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, dalam pengadaan barang/jasa.

Perseroan senantiasa melakukan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dengan mengadakan sosialisasi atau *refreshment* terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan, sesuai dengan porsi dan peruntukannya, antara lain:

1. Visi dan misi Perseroan;
2. Kebijakan pengadaan barang/jasa, khususnya terkait pendaftaran penyedia barang/jasa dan aplikasi SMART GEP;
3. Kebijakan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), khususnya terkait Contractor Safety Management System (CSMS); dan
4. GCG, etika usaha, dan anti penyuapan.

GREEN PROCUREMENT POLICY

The Company endeavors to promote sustainable goods/services procurement, aligned with the Quality, HSSE, and Anti-Bribery Policy, as well as the Sustainability Policy, stipulated by the Company, while taking into account generally accepted principles and practices (best practices). On June 25, 2024, the Company issued the Green Procurement Policy, covering environmental aspects, and the Social Policy for Suppliers, Vendors, and Contractors, covering social aspects, namely employment and Human Rights, for goods/services procurement.

The company continues to foster goods/services providers through dissemination or refreshment of the applicable provisions in the Company, according to the portions and purposes, including:

1. Vision and missions of the Company;
2. Goods/services procurement policy, especially regarding the registration of goods/services providers and SMART GEP application;
3. Health, Safety, Security, and Environment Policy, especially regarding Contractor Safety Management System (CSMS); and
4. GCG, business ethics, and anti-bribery policy.

KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY



Penerapan Standar ISO 37001
Implementation of ISO 37001

untuk Mencegah Praktik Penyuapan
to Prevent Bribery Practices

Komitmen PGN dalam mencegah penyuapan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum ditunjukkan dengan penerapan Standar ISO 37001. Melalui penerapan sistem manajemen anti-penyuapan yang sesuai dengan persyaratan ISO 37001, maka PGN dapat secara sistematis mencegah, mendeteksi, dan memerangi penyuapan.

Pada bulan Februari 2025, terdapat versi baru dari standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan yaitu ISO 37001:2025 yang akan menggantikan versi sebelumnya ISO 37001:2016. Dengan demikian, pada tanggal 28 Februari 2027, semua institusi yang telah disertifikasi harus melakukan transisi ke versi standar yang baru.

Standar baru ini menjadi tonggak penting bagi organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem pencegahan suap dengan pendekatan yang lebih modern, kontekstual, dan berbasis risiko.

Dalam masa transisi ini PGN tengah menyiapkan pembaruan menuju ISO 37001:2025, diantaranya dengan memperluas ruang lingkup, dan mengadakan pelatihan SMAP ISO 37001 bagi vendor dan auditor internal SMAP. Penanggung jawab Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan berada dalam kewenangan jawab Legal Counsel and Compliance.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Pedoman SMAP ISO 37001 Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

PGN's commitment to preventing bribery and ensuring compliance with legal requirements is demonstrated through the implementation of the ISO 27001 Standard. By implementing an anti-bribery management system aligned with ISO 37001 requirements, PGN can systematically prevent, detect, and deter bribery.

In February 2025, a new version of the international standard for anti-bribery management systems, namely ISO 37001:2025, was released, which will replace the previous version, ISO 37001:2016. Therefore, on February 28, 2027, all certified institutions are obliged to transition to the new standard version.

The new standard serves as a milestone for organizations across the globe, including in Indonesia, to strengthen their bribery prevention systems with a more modern, contextual, and risk-based approach.

In the transition period, PGN prepares for the ISO 37001:2025 update, including expanding the scope and providing ISO 37001 ABMS training for vendors and ABMS internal auditors. The Company's Anti-Bribery Management System is under the authority of Legal Counsel and Compliance.

Further details on the Company's Anti-Bribery Policy and ABMS ISO 37001 Manual can be found on the PGN website https://pgn.co.id/tata-kelola.

PROGRAM DAN PROSEDUR

PROGRAMS AND PROCEDURES



Prinsip 4 NO's
4 NO's Principle

- ***No Bribery***
- ***No Kickback***
- ***No Gift***
- ***No Luxurious Hospitality***

PGN berkomitmen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan serta menerapkan Kebijakan Antikorupsi, dengan menerapkan Sistem Manajeman Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan prinsip 4 NO's:

1. *No Bribery*, tidak boleh ada suap-menyuap dan pemerasan;
2. *No Kickback*, tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, baik dalam bentuk uang pelicin dan atau dalam bentuk lainnya;
3. *No Gift*, tidak boleh ada hadiah/gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
4. *No Luxurious Hospitality*, tidak boleh ada penyambutan dan jamuan mewah yang berlebihan.

Pada tahun 2025, PGN telah mengembangkan satuan kerja yang masuk dalam rencana ruang lingkup (*extend scope*) penerapan SMAP ISO 37001, untuk memastikan proses bisnis Perusahaan dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang bersih.

Selain PGN, beberapa anak perusahaan PGN juga telah menerapkan ISO 37001 Manajemen Anti Penyuapan, di antaranya adalah PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution dan PT Permata Graha Nusantara.

PGN is committed to conducting business activities by taking into account and implementing the Anti-Corruption Policy, particularly by applying the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System with the 4 NO's principle:

1. No Bribery, there must be no bribery or extortion;
2. No Kickback, there must be no commission or token of gratitude, be it in the form of bribe money and/or other forms;
3. No Gift, there must be no gift/gratuity that is contrary to applicable rules and regulations; and
4. No Luxurious Hospitality; there must be no luxurious and extravagant reception or entertainment.

In 2025, PGN established a task force as part of the extended scope plan to implement ISO 37001 ABMS, ensuring the Company's business processes align with clean governance principles.

In addition to PGN, several of its subsidiaries have also implemented the ISO 37001 Anti-Bribery Management System, including PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution, and PT Permata Graha Nusantara.

PROGRAM DAN PROSEDUR DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (*KICKBACKS*), *FRAUD*, SUAP DAN/ ATAU GRATIFIKASI

Selama tahun 2025, PGN melaksanakan beragam program dan prosedur yang dapat mendorong dan memastikan tidak adanya praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi di antaranya :

1. Perwira Subholding Gas wajib membuat deklarasi kepatuhan/ komitmen atas pemahaman untuk menerapkan GCG dan COC (Code of Conduct) termasuk komitmen tidak menerima suap/gratifikasi atau tidak memberikan suap (anti suap) dan tidak melakukan COI (*Conflict of Interest*) yang dinyatakan melalui aplikasi COMPOLS (Compliance Online Systems) untuk pekerja PGN dan GOLS (GCG Online Systems) untuk pekerja Anak Perusahaan.
2. Penilaian aspek integritas pada proses rekrutmen bagi calon Perwira Subholding Gas dan fit and proper test pada proses promosi Perwira Subholding Gas.
3. Pembuatan Pakta Integritas bagi Perwira Subholding Gas yang diangkat jabatannya atau dipromosikan.
4. Pembuatan Pakta Integritas pada setiap dilakukan setiap proses Pengadaan Barang dan Jasa bagi Calon vendor Barang dan Jasa maupun Pengguna/Pengelola Barang Jasa.
5. Menayangkan Video Sosialisasi terkait Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan pada setiap proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam tahap Rapat Penjelasan (*pre-bid meeting*) dan Rapat Klarifikasi & Negosiasi.
6. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyuapan yang dituangkan dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
7. Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan melakukan persiapan transisi menuju ISO 37001:2025, di antaranya rencana perluasan ruang lingkup (*extend scope*) Sertifikasi ISO 37001:2025, semula 9 satuan kerja disiapkan untuk bertambah menjadi 18 satuan kerja.
8. Internalisasi prinsip anti penyuapan 4 NO's dan Etika ke dalam program budaya AKHLAK dalam setiap meeting.
9. Mendukung program KPK dan aktif dalam peringatan kegiatan HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia) setiap tahun.

PROGRAMS AND PROCEDURES TO OVERCOME CORRUPTION PRACTICES, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERIES, AND/OR GRATIFICATION

Throughout 2025, PGN executed various programs and procedures to ensure there were no corrupt practices, kickbacks, fraud, bribes, or gratifications. The programs and procedures are as follows:

1. Gas Subholding employees are obliged to make a declaration of compliance/commitment to understanding and implementing GCG and COC (Code of Conduct), including a commitment not to accept bribes/gratuities or give bribes (anti-bribery) and not to engage in COI (Conflict of Interest), which is stated through the COMPOLS (Compliance Online Systems) application by PGN employees and GOLS (GCG Online Systems) application by employees of Subsidiaries.
2. Integrity is assessed in the recruitment process for candidates of Gas Subholding Employees, and a fit and proper test in the promotion process for Gas Subholding Employees.
3. Gas Subholding Employees who have been promoted must make an Integrity Pact.
4. An Integrity Pact is required for each Goods and Services Procurement process for prospective Goods and Services vendors and Users/Managers of Goods and Services.
5. Dissemination Videos regarding Quality, HSSE, and Anti-Bribery Policies are displayed during each step of selecting goods/services providers at the Explanation Meeting (pre-bid meeting) and the Clarification & Negotiation Meeting.
6. The supervision of the procurement of goods and services that is free from Corruption, Collusion, Nepotism, and Bribery, is outlined in the Preparation of Examination Report (BAP) and the Official Report of Work Handover (BAST).
7. ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System is enhanced by preparations for the transition to ISO 37001:2025, including through the ISO 37001:2025 Certification scope extension plan, for which 18 work units are being prepared, compared to the initial 9 work units.
8. The 4 NO's anti-bribery principle and Ethics are internalized in the AKHLAK culture program in every meeting.
9. PGN supports the programs of the Corruption Eradication Commission and plays an active role in commemorating World Anti-Corruption Day each year.



PELATIHAN DAN SOSIALISASI ANTIKORUPSI

Setiap tahun, PGN secara rutin telah melakukan kampanye kesadaran anti korupsi, anti penyuapan, pengendalian gratifikasi, *fraud*, melalui *channel* digital berupa *e-mail blasting* kepada seluruh pekerja, dan selama tahun 2025 Program *awareness*/pelatihan/sosialisasi Antikorupsi yang dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

1. Pembaharuan pernyataan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi penerapan tata kelola perusahaan yang baik etika usaha/kerja, anti korupsi, anti suap serta pengendalian gratifikasi 24 Agustus 2025;
2. Pembekalan SMAP bagi tim internal auditor SMAP 26 Mei 2025;
3. Melakukan Audit Internal SMAP tanggal 2 Juni – 10 Juli 2025;
4. *Sharing session* anti penyuapan/ anti korupsi/gratifikasi ke pekerja anak perusahaan, area, dan vendor.

ANTI-CORRUPTION TRAINING AND OUTREACH PROGRAM

Every year, PGN regularly carries out campaigns to foster awareness on anti-corruption, anti-bribery, gratuity control, and fraud through a digital channel in the form of an email blast to all employees. Throughout 2025, the Company implemented the Anti-Corruption Awareness/Training/ Outreach Program, which covers:

1. Update on the statement of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors to implementing good corporate governance, business/ work ethics, anti-corruption, anti-bribery, and gratuity control on 24 August 2025;
2. ABMS training for ABMS internal auditor team on 26 May 2025;
3. ABMS Internal Audit conducted on June 2 – July 10, 2025;
4. Sharing session on anti-bribery/anti-corruption/gratuity for subsidiary employees, area employees, and vendors.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL

PGN memiliki dan menerapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan BOD dan BOC pada tanggal 31 Desember 2024. Kebijakan tersebut menjadi dasar penerapan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja yang bersih sesuai tata kelola perusahaan yang baik,sebagai pencegah benturan kepentingan serta pencegah kecurangan.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

PGN has and implements Gratification Control Guidelines, which have been established by the BOC and BOD on December 31, 2024. These policies serve as the basis of gratification control implementation to encourage the implementation of clean business ethics and work ethics adhering to good corporate governance, as well as to prevent conflicts of interest and fraud.

The complete Gratification Control Guidelines are available on the PGN website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pengelolaan gratifikasi di PGN dilaksanakan oleh Tim UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) PGN dibawah Legal Counsel and Compliance (LCC) yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Nomor 003100.ST/PW.05.02/LGL/2025 tertanggal 31 Januari 2025 dengan masa tugas tim hingga 31 Desember 2025.

Tugas Tim UPG diantaranya menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG baik yang dalam penanganan maupun tindak lanjut penetapan kepemilikan dan pemanfaatan gratifikasi kepada KPK secara berkala serta menyampaikan laporan perkembangan dan evaluasi hasil implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan kepada Direksi.

PGN juga menyediakan saluran pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi, yaitu melalui *e-mail* ke tim UPG (pgn.upg@pertamina.com) atau dapat disampaikan langsung melalui website KPK (www.gol.kpk.go.id).

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui *Whistleblowing System* PGN (wbs.pgn.co.id) apabila terdapat indikasi adanya Perwira Subholding Gas yang memberikan/menerima hadiah atau gratifikasi kepada/dari *stakeholders* dengan mengatasnamakan pribadi maupun PGN.

GRATIFICATION MANAGEMENT

The PGN Gratification Control Unit (UPG) Team carried out Gratification management at PGN under Legal Counsel and Compliance (LCC), which was appointed based on Assignment Letter Number 003100.ST/PW.05.02/LGL/2025 dated January 31, 2025 with the team's term of office until December 31, 2025.

The UPG Team's duties include submitting a recapitulation report on the handling of reports on the receipt of gratification managed by the UPG, both in the handling and follow-up of determining ownership and use of gratification to the KPK on a regular basis, as well as submitting progress reports and evaluations of the results of the implementation of the Gratification Control Program within the Company to the Board of Directors.

PGN also facilitates a reporting channel for receiving gratification. The reports can be submitted via email to the UPG team (pgn.upg@pertamina.com) or directly through the KPK website (www.gol.kpk.go.id).

Reports can also be made through the PGN Whistleblowing System (wbs.pgn.co.id) if there are indications that Gas Subholding Employees have given/received gifts or gratification to/from stakeholders under their own name or PGN's.



Saluran Pelaporan Gratifikasi PGN:
PGN Gratification Reporting Channel:
pgn.upg@pertamina.com
www.gol.kpk.go.id
wbs.pgn.co.id

ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) PGN juga mengatur mengenai Etika mengenai Menerima dan Memberi Hadiah sebagai berikut:

1. Perwira Subholding Gas tidak menerima hadiah/cendera mata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:
   a. Menerima *hospitality* dalam bentuk jamuan makan dalam suatu acara atau *event* tertentu yang berlaku umum dan wajar.
   b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang berlaku umum dan bukan dimaksud untuk menyuap.
2. Perwira Subholding Gas dapat memberikan hadiah/cendera mata, donasi/sumbangan dan *entertainment* kepada pihak lain dengan syarat:
   a. Menunjang kepentingan Perusahaan.
   b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap.
   c. Telah di rencanakan atau dianggarkan oleh Perusahaan.
   d. Telah mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Bukan merupakan pemberian atau janji kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan yang diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penjabaran lebih lengkap terkait penerimaan dan pemberian Hadiah dijelaskan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

PGN dengan tegas melarang penerimaan/pemberian gratifikasi, namun sepanjang tahun 2025 terdapat empat laporan gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK dan telah mendapatkan penetapan status oleh KPK.

PENANAMAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI

PGN menanamkan budaya anti gratifikasi kepada seluruh Perwira Subholding Gas melalui berbagai cara, di antaranya:

1. Perwira setiap dua kali dalam setahun wajib membuat deklarasi/komitmen tidak melakukan gratifikasi yang dinyatakan melalui aplikasi COMPOLS (Compliance Online Systems) dan GOLS (GCG Online Systems).

ETHICS RELATED TO GRATIFICATION

PGN's Code of Conduct also regulates the Ethics regarding Receiving and Giving Gifts as follows:

1. Gas Subholding Employees do not accept gifts/souvenirs/gratification in any form related to their position or work, except:
   a. Receiving hospitality in the form of a banquet at a certain event that is generally accepted and reasonable.
   b. Receiving promotional items that include the logo/name of the giving company, which is generally accepted and is not intended to be bribery.
2. Gas Subholding Employees may give gifts/souvenirs, donations, and entertainment to other parties under the following conditions:
   a. Supporting the interests of the Company.
   b. Not intended as a bribery.
   c. Has been planned or budgeted by the Company.
   d. Have obtained the appropriate authorization and can be clearly accounted for. Not a gift or promises to parties related to the Company that are known or reasonably suspected to influence or affect the said party to perform or not perform something in its position, which is contrary to its obligations.

A detailed description of the acceptance and giving of gifts is stipulated in the Gratification Control Guidelines.

GRATIFICATION CONTROL REPORT 2025

The acceptance/giving of gratification is strictly prohibited by PGN. However, throughout 2025 there were four reports of gratifications that were reported to the KPK and have received status determination by the KPK.

ANTI-GRATIFICATION CULTURE

PGN instills an anti-gratification culture among all Gas Subholding Employees through various means, including:

1. Employees are required to make a declaration/commitment twice a year to refrain them from accepting gratifications, through the COMPOLS (Compliance Online Systems) and GOLS (GCG Online Systems) applications.

2. Internalisasi menggunakan media digital E-mail blast, tv totem, internalisasi/sosialisasi dari tim UPG ke Perwira Subholding melalui berbagai tema misalnya: suap, gratifikasi, pemerasan dan uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang diatur hukumannya dalam undang-undang, Katakan Tidak untuk Korupsi.
3. Penetapan Surat Edaran Direksi tentang Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Hadiah Terkait Hari Raya Keagamaan Atau Perayaan Hari Besar Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan pekerja Di Lingkungan Subholding Gas yang diterbitkan dua kali setahun, sebagai bentuk komitmen Perwira Subholding Gas untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.
4. Membacakan nilai tidak gratifikasi dalam 4 NO's di setiap meeting AKHLAK setiap bulan.

2. Internalization using digital media, including email blasts, TV totems, and outreach from the UPG team to Subholding Employees, covers various topics, such as: bribery, gratifications, extortion, and kickbacks are forms of corruption that are punishable by law. Say No to Corruption.
3. The Board of Directors' Circular on the Prohibition of Accepting and/or Giving Gifts Related to Religious Holidays or Other Major Celebrations for Directors, Board of Commissioners, and employees within the Gas Subholding Environment, issued twice a year, demonstrates the Subholding Gas Employees' commitment to rejecting gratifications in any form.
4. The value of not accepting gratifications is read out in the 4 NOs at every monthly AKHLAK meeting.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM
PREVENTION AGAINST INSIDER TRADING

Perwira Subholding Gas memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan informasi yang belum dipublikasikan. Setiap Perwira Subholding Gas, dalam pelaksanaan pekerjaannya memiliki akses yang dikategorikan informasi rahasia, dilarang untuk menggunakan atau berbagi informasi tersebut untuk tujuan lain, kecuali untuk kepentingan Perusahaan.

Seluruh informasi tentang Perseroan yang belum dipublikasikan dianggap sebagai informasi rahasia atau sebagai Informasi Orang Dalam. Jika informasi tersebut disalahgunakan, khususnya terkait perdagangan efek, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pedoman Perilaku Etika 29 Agustus 2024 telah mengatur mengenai batasan pemanfaatan data dan informasi Perseroan oleh Perwira Subholding Gas sebagai berikut:
1. Menggunakan sistem keamanan data yang lebih memadai;
2. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
3. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja; dan
4. Menjaga kerahasiaan informasi dan data tentang pelanggan maupun jaringan/infrastruktur Perseroan serta data-data atau informasi lainnya yang dianggap informasi rahasia oleh Perseroan.

Kebijakan *insider trading* PGN secara lengkap dapat dilihat pada situs web Perseroan https://pgn.co.id/tata-kelola.

Gas Subholding Employees are strongly committed to maintaining the confidentiality of Company information, particularly information that has not yet been made public. Each Gas Subholding Employee, in the course of their work, has access to confidential information and is prohibited from using or sharing such information for any purpose other than the Company's best interests.

All unpublished information about the Company is considered confidential or inside information. If such information is misused, particularly in connection with securities trading, it may constitute insider trading, which is prohibited by laws and regulations.

PGN's Code of Conduct, dated August 29, 2024, has regulated the following restrictions on the use of Company data and information by Gas Subholding Employees:
1. Use a more adequate data security system;
2. Avoid disseminating data and information to unauthorized parties, both during and after employment;
3. Submit all data related to the Company upon termination of employment; and
4. Maintain the confidentiality of information and data regarding customers, the Company's network/infrastructure, and other data or information deemed confidential by the Company.

PGN's complete insider trading policy can be found on the Company's website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF STATE OFFICIALS' WEALTH REPORTS (LHKPN)

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

Kebijakan mengenai kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dijalankan PGN dengan mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 012800.K/KP.00/HCGS/2017 tanggal 29 September 2017 dan Surat Keputusan Direktur Direksi PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-03/C00000/2021-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Anak Perusahaan serta Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) PGN tanggal 29 Agustus 2024 Bab IV Etika Kerja Nomer 4.1.12.

Kebijakan ini mengatur mengenai pejabat di lingkungan PGN yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK, sanksi bagi wajib lapor yang tidak mengisi, melaporkan dan menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan koordinator unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN.

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan, pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN yaitu:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PGN;
2. Pekerja PGN setingkat PRL 13 sampai dengan 24;
3. Pekerja PGN yang diperbantukan di Anak Perusahaan/Afiliasi termasuk yang ditugaskan sebagai Direktur Anak Perusahaan/Afiliasi.

PENGELOLA LHKPN

Pelaksanaan pelaporan LHKPN di PGN dikelola oleh unit Pengelolaan e-LHKPN dengan menunjuk Pejabat Struktural sebagai Koordinator Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan e-LHKPN yang berada pada Human Capital Management Division.

LHKPN SUBMISSION AND MANAGEMENT POLICY

The policy regarding compliance with the reporting of wealth of state officials is implemented by PGN pursuant to the Decree of the Board of Directors Number 012800.K/KP.00/HCGS/2017 dated September 29, 2017, and Decree of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) Number Kpts-03/C00000/2021-S0 on Mandatory Submission of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and Subsidiaries and PGN's Code of Conduct dated August 29, 2024, Chapter IV Work Ethics Number 4.1.12.

This policy regulates officials within PGN who are obliged to fill in and submit LHKPN to the KPK, sanctions for those who do not fill in, report, and submit LHKPN according to the predetermined time limit, and unit coordinators responsible for LHKPN management activities.

MANDATORY LHKPN REPORT

Based on State Official's Wealth Report Policy, officials who are required to complete and report their wealth are:

1. PGN Board of Directors and Board of Commissioners;
2. PGN employees at PRL 13 to 24 levels;
3. PGN employees who are seconded to Subsidiaries/Affiliates including those assigned as Directors of Subsidiaries/Affiliates.

LHKPN MANAGEMENT

The implementation of LHKPN reporting at PGN is managed by the e-LHKPN Management unit by appointing a Structural Official as the Unit Coordinator responsible for e-LHKPN management in the Human Capital Management Division.



Pelaksanaan LHKPN Tahun 2025

LHKPN Implementation in 2025

100%

Kepatuhan Pelaporan LHKPN PGN

PGN LHKPN Reporting Compliance

Pada tahun 2025, terdapat pelaksanaan pendampingan pengisian dan bimbingan teknis terkait LHKPN pada periode 1 Januari - 31 Maret 2025, yang dilakukan oleh Human Capital Management Division. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Informasi tingkat kepatuhan Pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN telah ditampilkan pada website Perusahaan bagian e-LHKPN. Hingga Desember 2025, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat PGN sebesar 100%.

In 2025, the Human Capital Management Division held technical guidance and provided assistance for filling in LHKPN in the period of January 1 to March 31, 2025. Reporting can be done through the e-LHKPN application at https://elhkpn.kpk.go.id.

Information on the compliance level of officials required to complete and report the LHKPN is available on the Company's website in the e-LHKPN section. As of December 2025, PGN officials' compliance rate for wealth reporting was 100%.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT SYSTEM

PGN memiliki dan menjalankan sistem manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023, terutama pada Bab III Penerapan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan peraturan Menteri BUMN di atas, PGN menerapkan sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan melalui langkah-langkah:
1. Penetapan kebijakan manajemen risiko;
2. Perencanaan, penerapan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan; dan
3. Proses pelaporan manajemen risiko baik kepada Pertamina selaku Holding Migas maupun Direksi dan Komisaris PGN sebagai manajemen puncak Perusahaan.

PGN has and implements a risk management system that is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises which was stipulated on March 3, 2023, particularly in Chapter III Implementation of State-Owned Enterprise Risk Management.

Based on the aforementioned SOEs Minister, PGN implements a risk management system aimed at protecting and creating value for the Company through the following steps:
1. Establishment of risk management policies;
2. Planning, implementation, monitoring, and evaluation of the Company's risk management implementation; and
3. Process of risk management reporting to both Pertamina as the Oil and Gas Holding Company and the PGN Board of Directors and Commissioners as the Company's top management.

ORGAN PENGELOLA RISIKO

Berdasarkan PER-2, PGN dinilai harus memenuhi Organ Pengelola Risiko sesuai pasal 55, maka pada Rapat Pemegang Saham Tahunan 2024 telah ditunjuk Direktur Manajemen Risiko yang membawahi tiga satuan kerja yaitu :
1. Risk Strategy and Integrated Governance;
2. Operational Risk, Internal Control & Business Continuity;
3. Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk

RISK MANAGEMENT ORGAN

Pursuant to PER-2, PGN is deemed to have to fulfill the Risk Management Organ as per Article 55, therefore at the 2024 Annual Shareholders Meeting, Director of Risk Management was appointed overseeing three work units, namely:
1. Risk Strategy and Integrated Governance;
2. Operational Risk, Internal Control & Business Continuity;
3. Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk

PROFIL GROUP HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY
Profile of Group Head Operational Risk, Internal Control & Business Continuity

Amanarita - HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY | HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada 17 Maret 1977. Usia 48 tahun per 31 Desember 2025. Domisili di Jakarta.	Indonesian citizen, born in Palembang on March 17, 1977. 48 years old as of December 31, 2025. Domiciled in Jakarta.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan program Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung.	Graduated from Padjadjaran University with a Bachelor's degree in Economics and continued her Master of Business Administration program at the Bandung Institute of Technology.
Memiliki sertifikasi profesional yaitu Certified Risk Professional (CRP), Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).	Held professional certifications, namely Certified Risk Professional (CRP) and Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) from the National Professional Certification Agency (BNSP).
Beliau mengawali karier di PGN pada tahun 2001. Sepanjang perjalanan kariernya, beliau telah menjabat berbagai posisi, di antaranya bidang Research and Development, Portfolio and Performance Management dan Corporate Finance. Sejak tahun 2024 bergabung di Manajemen Risiko PGN dengan jabatan terakhir menjabat sebagai Group Head Operational Risk, Internal Control and Business Continuity di tahun 2025.	Started her career at PGN in 2001. Throughout her career, She has held various positions, including Research and Development, Portfolio and Performance Management, and Corporate Finance. She joined PGN Risk Management in 2024, with her final position as Group Head of Operational Risk, Internal Control, and Business Continuity in 2025.

PROFIL DIVISION HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE
Profile of Division Head Risk Strategy And Integrated Governance

Rezki Anindhito - HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE | HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 16 Agustus 1972. Usia 53 tahun per 31 Desember 2025. Domisili di Jakarta.	Indonesian citizen, born in Surabaya on August 16, 1972. 53 years old as of December 31, 2025. Domiciled in Jakarta.
Memiliki latar belakang pendidikan, antara lain Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti, Master of Science in Finance di University of Denver, Master of Science in Mineral Economics di Colorado School of Mines, serta Doctor of Philosophy in Economics di Colorado State University.	Graduated from Trisakti University with a Bachelor's degree in Mechanical Engineering, received Master of Science in Finance from the University of Denver, Master of Science in Mineral Economics from the Colorado School of Mines, and Doctorate of Philosophy in Economics from Colorado State University.
Memperoleh sertifikasi profesional yaitu Certified Risk Professional (Manajemen Risiko Utama) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Certified Risk Management Professional (CRMP) oleh BNSP.	Held professional certifications, namely Certified Risk Professional (Primary Risk Management) from the National Professional Certification Agency (BNSP) and Certified Risk Management Professional from BNSP.
Beliau mengawali karier di PGN pada tahun 1999 di bidang proyek, kemudian melanjutkan karier di fungsi Strategic Planning dan Corporate Finance. Sejak 2018, beliau bertugas di pengelolaan Manajemen Risiko PGN dan saat ini menjabat sebagai Division Head Risk Strategy and Integrated Governance sejak 2024.	Started his career at PGN in 1999 in the project department, then continued his career in Strategic Planning and Corporate Finance. Since 2018, he has been in charge of PGN's Risk Management and has served as Division Head Risk Strategy and Integrated Governance since 2024.

PROFIL DIVISION HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK
Profile of Division Head Project Risk, Portfolio & Counterparty Risk

Muhamad Rofiq Arrosyid - HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK | HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 30 Agustus 1980. Usia 45 tahun per 31 Desember 2025. Domisili di Jakarta	Indonesian citizen, born in Bandung on August 30, 1980. 45 years old as of December 31, 2025. Domiciled in Jakarta.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sains Matematika di Universitas Padjadjaran dan program Master Practising Accounting dari Monash University	Completed Bachelor of Science in Mathematics at Padjadjaran University and Master of Practising Accounting from Monash University
Meraih sejumlah sertifikasi profesional, di antaranya Certified Risk Professional (Manajemen Risiko Utama) oleh BNSP, Certified Fraud Examiner (CFE) oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), Certified Internal Auditor (CIA) oleh Institute of Internal Auditors (IIA), Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) oleh BNSP	Held a number of professional certifications, including Certified Risk Professional (Primary Risk Management) from BNSP, Certified Fraud Examiner (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Certified Internal Auditor (CIA) from the Institute of Internal Auditors (IIA), Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) from BNSP
Beliau bergabung dengan PGN pada tahun 2021 dan memulai penugasan di Satuan Kerja Audit Internal. Selanjutnya, beliau berkiprah di bidang Manajemen Risiko sejak 2023 dan menjabat sebagai Division Head Project Risk, Portfolio & Counterparty Risk sejak 2024.	Started his career at PGN in 2021 and began his assignment in the Internal Audit Unit. He has been involved in Risk Management since 2023 and has served as Division Head Project Risk, Portfolio & Counterparty Risk since 2024.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Manajemen Risiko secara direktorat mengalami pengembangan pada tahun 2025, yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PGN Nomor 002700.K/OT/MRK/2025 tentang Tata Kerja Direktorat Manajemen Risiko tanggal 21 Maret 2025 antara lain:

1. Mengelola penyusunan *Risk Strategy*, *Risk Policy and Procedure* Subholding Gas *Group*, mencakup perencanaan dan pengembangan strategi pengelolaan risiko yang tepat, pembuatan kebijakan serta prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan risiko;
2. Mengelola *level* maturitas implementasi manajemen risiko termasuk *assessment* maturitas di Subholding Gas *Group*, untuk mengevaluasi sejauh mana manajemen risiko telah diterapkan dan bagaimana peningkatannya ke depannya dapat dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan yang optimal;
3. Mengelola program budaya sadar risiko Subholding Gas Group yang berfokus pada pengembangan dan penerapan program-program yang dapat mendorong kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan risiko dan menerapkan dalam setiap tindakan operasional yang mereka lakukan;
4. Mengelola penyusunan kajian risiko, mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Revisi RJPP, serta menyusun dan mengevaluasi *Stress Testing* dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengukur potensi dampak skenario ekstrem terhadap bisnis perusahaan, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko;
5. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Risiko dan *database* Manajemen Risiko untuk mendukung implementasi pengelolaan risiko secara terpadu di Subholding Gas Group;
6. Mengelola risk management terkait *revenue and performance* perusahaan (*top risk* korporat untuk *ongoing business*);
7. Melakukan pengelolaan resiliensi bisnis melalui program pengembangan SMKB Perusahaan, termasuk *Contingency Plan*;
8. Melakukan evaluasi *loss event* pada *ongoing business* dan monitoring-nya, mencakup analisis dan evaluasi kerugian atau peristiwa yang berdampak negatif pada operasional bisnis dan proyek, serta melakukan pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi risiko;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT

The duties and responsibilities of Risk Management as a directorate underwent development in 2025, stipulated in PGN Board of Directors Decree Number. 002700.K/OT/MRK/2025 on the Work Procedures of the Risk Management Directorate dated March 21, 2025, including:

1. Managing the development of the Gas Subholding Group's Risk Strategy, Risk Policy, and Procedures, including planning and developing an appropriate risk management strategy, creating clear and structured policies and procedures for risk management;
2. Managing the maturity level of risk management implementation, including a maturity assessment within the Gas Subholding Group, to evaluate the extent to which risk management has been implemented and how it can be improved to achieve an optimal level of maturity;
3. Managing the Gas Subholding Group's risk awareness culture program, which focuses on developing and implementing programs that foster awareness of the importance of risk management and its application in every operational activity;
4. Managing the preparation of risk assessments, including risk identification, analysis, and evaluation, within the Company's Long-Term Plan (RJPP) and RJPP Revisions, as well as developing and evaluating stress testing to identify, evaluate, and measure the potential impact of extreme scenarios on the company's business and develop risk mitigation strategies;
5. Managing the Risk Management Information System and Risk Management database to support the implementation of integrated risk management within the Gas Subholding Group;
6. Managing risk management related to the company's revenue and performance (top corporate risks for ongoing business);
7. Managing business resilience through the Company's BCMS development program, including a Contingency Plan;
8. Evaluating and monitoring loss events in ongoing business, including analyzing and evaluating losses or events that negatively impact business and project operations, and conducting ongoing monitoring to identify potential risks;

9. Mengelola *Operational Risk Early Warning System* dan monitoring-nya, melibatkan pengembangan dan penerapan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari potensi risiko operasional dan *project*;
10. Mengelola IT *Risk Management* (*Cyber Security* Digitalisasi) termasuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta mengelola risiko terkait *Asset Integrity*, mencakup pengelolaan risiko yang berkaitan dengan integritas dan reliabilitas aset-aset perusahaan;
11. Mengelola *Risk Control Self Assessment related to Operational Risk*, mencakup penyusunan dan pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap kontrol risiko yang ada di berbagai fungsi operasional perusahaan;
12. Mengelola risiko utama keproyekan (*top risk project*) Subholding Gas Group, baik investasi organik maupun anorganik, serta memastikan bahwa manajemen risiko proyek selaras dengan strategi Perusahaan melalui kegiatan perumusan profil risiko utama keproyekan dan monitoring risiko keproyekan Subholding Gas Group, termasuk *Asset Under Construction* (AUC) dan potensi asset impairment dalam ruang lingkup keproyekan Subholding Gas Group;
13. Melakukan *review* aspek risiko terhadap kegiatan *due diligence* atau *Know Your Counterparty* (KYC) untuk mengelola *counterparty risk* serta melakukan review dan monitoring aspek risiko terhadap kesepakatan atau perikatan yang bersifat strategis yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pengelolaan *contractual risk* di lingkungan Subholding Gas Group;
14. Pengelolaan risiko dalam implementasi ESG yang terkait dengan aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola perusahaan (*Governance*) dalam ruang lingkup keproyekan, dan melakukan pengelolaan *Emerging Risk* di lingkungan Subholding Gas Group; dan
15. Melakukan supervisi dan *advisory* terkait implementasi manajemen risiko proyek/investasi dan *counterparty/ contractual.*

TUGAS DAN FUNGSI RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM

Pemilik risiko (*risk owner*) dapat dibantu Risk Management Champions Team (RCT) dalam melaksanakan proses manajemen risiko untuk masing-masing satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN. RCT ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi PGN Nomor 017701.K/ PR.06.01/ FIN/2024 tanggal 30 April 2024.

9. Managing and monitoring the Operational Risk Early Warning System, involving the development and implementation of an early warning system that can detect early signs of potential operational and project risks;
10. Managing IT Risk Management (Cyber Security Digitalization), including compliance with the Personal Data Protection (PDP) Law, and managing risks related to Asset Integrity, including managing risks related to the integrity and reliability of company assets;
11. Managing Risk Control Self-Assessments related to Operational Risk, including the preparation and implementation of self-evaluations of existing risk controls across various company operational functions;
12. Managing the Gas Subholding Group's top project risks, both organic and inorganic investments, and ensuring that project risk management aligns with the Company's strategy by formulating key project risk profiles and monitoring Gas Subholding Group project risks, including Assets Under Construction (AUC) and potential asset impairment within the Gas Subholding Group's projects;
13. Reviewing risk aspects of due diligence or Know Your Counterparty (KYC) activities to manage counterparty risk, as well as reviewing and monitoring risk aspects of strategic agreements or engagements undertaken by the Company to manage contractual risk within the Gas Subholding Group;
14. Managing ESG risk implementation related to environmental, social, and corporate governance aspects within the project scope, and managing Emerging Risk within the Gas Subholding Group; and
15. Supervising and providing advisory services regarding the implementation of project/investment and counterparty/ contractual risk management.

RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM DUTIES AND FUNCTIONS

Risk owners may be assisted by the Risk Management Champions Team (RCT) in implementing the risk management process for each work unit within PGN and its subsidiaries/affiliates. The RCT was appointed based on PGN Board of Directors Decree Number 017701.K/PR.06.01/ FIN/2024 dated April 30, 2024.

Tugas RCT antara lain :

1. Menjalankan fungsi manajemen risiko dengan cara melakukan koordinasi dan memfasilitasi proses manajemen risiko (penentuan konteks, kriteria, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring, kaji ulang, konsultasi, dokumentasi, melaporkan serta komunikasi) yang dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*);
2. Melakukan pemantauan atas besaran biaya pengendalian risiko (*cost of risk*) yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dan menetapkan metode untuk pengukuran efisiensi dan efektivitas biaya pengendalian risiko tersebut dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai;
3. Dengan persetujuan dari pemilik risiko (*risk owner*), melaporkan pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fungsi Risk Management selaku Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan melaporkannya secara periodik maupun sewaktu-waktu jika diperlukan oleh SKMR;
4. Melaporkan pemantauan pelaksanaan penanganan risiko pada Satuan Kerja PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN secara berkala. Untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan kategori '*Low*', '*Low* to *Moderate*', '*Moderate*', dan '*Moderate to High*' dilakukan *monitoring* melalui laporan triwulanan, untuk kategori '*High*' *monitoring* dilakukan minimal sekali dalam setiap bulannya atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Manajemen PGN maupun SKMR, dan untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan kategori *Top Risk* diatur dalam ketentuan terpisah; dan
5. Sebagai implementator BCMS yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kapabilitas dalam penyusunan, evaluasi dan pembaruan dokumen (kertas kerja) dan dokumen pendukung lainnya dalam implementasi dan pengelolaan Business Continuity Management System (BCMS) berdasarkan ISO 22301:2019.

The duties of RCT are as follows:

1. Carry out risk management functions by coordinating and facilitating the risk management process (determining the context, criteria, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk handling, monitoring, review, consultation, documentation, reporting, and communication) conducted by the risk owner.
2. Monitor the cost of risk required by Work Units at PGN or PGN's Subsidiaries/Affiliates and establish methods for measuring the efficiency and effectiveness of these risk control costs compared to the results achieved.
3. With the approval of the risk owner, report on the implementation of Risk Management within Work Units at PGN or PGN's Subsidiaries/Affiliates using information system applications in accordance with the provisions established by the Risk Management function as the Risk Management Work Unit (SKMR), and report periodically or at any time as required by the SKMR.
4. Report on the monitoring of risk handling implementation within Work Units at PGN or PGN's Subsidiaries/Affiliates on a regular basis. Monitoring of the implementation of risk management in the "Low," "Low to Moderate," "Moderate," and "Moderate to High" categories is carried out through quarterly reports. For the "High" category, monitoring is conducted at least once a month or at a timeframe determined by PGN Management or the SKMR. Monitoring of the implementation of risk management in the "Top Risk" category is regulated in separate provisions; and
5. As a BCMS implementer with duties, responsibilities, and capabilities in preparing, evaluating, and updating documents (working papers) and other supporting documents for the implementation and management of the Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301:2019.

IMPLEMENTASI FRAMEWORK ISO 31000:2018

PGN secara berkelanjutan memperkuat penerapan kerangka manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 melalui penyempurnaan kebijakan, prosedur, metodologi, serta sistem pelaporan manajemen risiko agar tetap relevan dengan dinamika bisnis, transformasi digital, dan tantangan industri energi.

Penerapan ini tidak hanya mengacu pada praktik terbaik di lingkungan BUMN, namun juga mengadopsi *benchmark* praktik unggul lintas industri untuk memastikan pengelolaan risiko yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada penciptaan nilai.

ISO 31000:2018 digunakan sebagai kerangka acuan utama yang bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan pada seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan Perusahaan. Kerangka ini tidak bertujuan menyeragamkan praktik manajemen risiko, melainkan menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses yang mendukung pencapaian sasaran strategis serta peningkatan kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Perusahaan menjadikan ISO 31000:2018 sebagai landasan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh satuan kerja PGN dan Anak Perusahaan/Afiliasi, termasuk dalam pengelolaan risiko strategis, operasional, proyek dan investasi, teknologi informasi, serta *emerging risk*, guna mendukung pencapaian target kinerja dan keberlanjutan Subholding Gas Group.

IMPLEMENTATION OF ISO 31000:2018 FRAMEWORK

PGN is continuously strengthening the implementation of its ISO 31000:2018-based risk management framework by refining its policies, procedures, methodologies, and risk management reporting systems to stay relevant to business dynamics, digital transformation, and the challenges of the energy industry.

This implementation not only adheres to best practices within state-owned enterprises but also adopts cross-industry benchmarks, ensuring adaptive, integrated, and value-creating risk management.

ISO 31000:2018 serves as the primary reference framework, which is universal and flexible in nature, allowing it to be applied to all of the Company's business processes and decision-making processes. This framework does not aim to standardize risk management practices, but rather provides principles, frameworks, and processes that support the achievement of strategic objectives and performance improvement.

Aligned with this, by 2025, the Company made ISO 31000:2018 as the foundation for implementing risk management across all PGN work units and Subsidiaries/Affiliates, including in the management of strategic, operational, project and investment risks, information technology, and emerging risks, supporting the achievement of Gas Subholding Group performance and sustainability targets.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Selama beberapa tahun terakhir, Sistem Manajemen Risiko PGN telah mengalami berbagai pengembangan sebagai berikut:

DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Over the past few years, PGN's Risk Management System has undergone various developments, as follows:

2019

Perusahaan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang digunakan dalam rangka registrasi risiko, monitoring pemantauan risiko dan penyusunan profil risiko secara *online* dan *real-time.*

The Company applied a Risk Management Information System (SIMR) for online, real-time risk registration, monitoring, and risk profiling.

2020-2022

PGN mengembangkan serta menyempurnakan SIMR baik untuk *'Ongoing Business Risk'* maupun *'Project Risk',* dengan tetap mengutamakan kemudahan penggunaan aplikasi SIMR oleh RCT maupun pemantauan *dashboard* SIMR oleh manajemen PGN. Peningkatan implementasi dan utilisasi SIMR untuk seluruh RCT baik dalam lingkup satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN juga didukung dengan ditetapkannya Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Instruksi Kerja.

PGN developed and refined the SIMR for both Ongoing Business Risk and Project Risk, while prioritizing ease of use of the SIMR application by RCTs and monitoring of the SIMR dashboard by PGN management. The increased implementation and utilization of SIMR for all RCTs, both within PGN's work units and subsidiaries/affiliates, is also sustained by the establishment of a Work Reference Document (DAK) in the form of a Work Instruction.

2023-2024

Pertamina selaku Holding Migas memberikan arahan strategis inisiatif untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi yaitu Enterprise Risk Management Systems versi 2.0 (ERMS 2.0) baik untuk risiko yang dimiliki oleh satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN. Sehingga pada tahun 2023 pelaporan manajemen risiko PGN dan Pertamina telah terintegrasi dengan sempurna dan efektif dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2023, fungsi Risk Management PGN juga mengembangkan Sistem Database Manajemen Risiko (DAMARA), sebagai salah satu inovasi yang ditujukan untuk mengelola digitalisasi surat, dokumen kajian risiko dan dokumen pendukung lainnya dalam memastikan kemudahan pencarian arsip yang diperlukan oleh Manajemen Puncak.

Pertamina, as the Oil and Gas Holding Company, provided strategic direction for the initiative to implement an integrated risk management information system, Enterprise Risk Management Systems version 2.0 (ERMS 2.0), for risks across PGN's work units and subsidiaries/affiliates. This ensures that PGN and Pertamina's risk management reporting will be fully and effectively integrated within a single fiscal year in 2023.

In 2023, PGN's Risk Management function also developed the Risk Management Database System (DAMARA), an innovation aimed at digitizing letters, risk assessment documents, and other supporting documents to ensure easy retrieval of archives required by Top Management.

2025

Perusahaan telah menggunakan sistem informasi risiko terintegrasi ERMS 2.1 yang telah diimplementasikan sampai dengan lingkup Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dengan pengembangan modul Manajemen Risiko dan BCMS.

Pada tahun 2025 juga dikembangkan aplikasi Optimus Prime, yang digunakan sebagai inovasi digital untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi Implementasi *Project Risk Management* di lingkungan Subholding Gas.

The Company has implemented the ERMS 2.1 integrated risk information system, which has been implemented across PGN's subsidiaries/affiliates, with the development of Risk Management and BCMS modules.

In 2025, the Optimus Prime application was also developed, a digital innovation to optimize the effectiveness and efficiency of Project Risk Management implementation within the Gas Subholding.



Evaluasi atas Sistem Manajemen Risiko
Evaluation of the Risk Management System

3,6 dari Skala / on a scale of **5** "Fase Praktik yang Baik (+)" / "Good Practice Phase (+)"

Skor Risk Maturity Assessment (RMA) PGN
PGN Risk Maturity Assessment (RMA) score

PGN sebagai Subholding Gas telah menerapkan penilaian maturitas pengelolaan manajemen risiko. Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan pengukuran *Risk Maturity Assessment* (RMA) menggunakan metode pengukuran berdasarkan ketentuan dan tata pelaksanaan dalam SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, setelah sebelumnya menggunakan metodologi yang ditetapkan dalam 'Pertamina Risk Maturity Self-Assessment' (PRISMA).

Pelaksanaan RMA dilakukan atas dua aspek, yaitu aspek dimensi dan aspek kinerja.

1. Pada aspek dimensi, parameter yang diukur mengadopsi tiga pilar ISO 31000:2018, yaitu *Principles, Framework* dan *Process*. Adopsi ini dijabarkan menjadi lima poin penilaian, yaitu budaya dan kapabilitas risiko, organisasi & tata kelola risiko, kerangka risiko & kepatuhan, proses kontrol risiko, dan model, data & teknologi risiko, yang dilaksanakan dengan pendekatan pengumpulan bukti dokumen, survei, dan wawancara yang mewakili semua organ risiko seperti *Risk Owner*, unit kerja manajemen risiko, unit satuan pengendali internal, unit kerja kepatuhan, Direksi dan Komisaris.

2. Pada aspek kinerja, parameter yang diukur adalah berdasarkan tingkat kesehatan Perusahaan (rating Perusahaan) serta peringkat komposit risiko. Hasil penilaian akhir RMA adalah memperhitungkan skor dari parameter aspek dimensi dan aspek kinerja.

Skor penilaian dan pengukuran RMA PGN sebesar 3,6 dari skala 5, menunjukkan Perusahaan berada pada Fase Praktik yang Baik (+). Selanjutnya, pada tahun 2025 PGN terus melakukan monitoring dan perbaikan atas peluang perbaikan (OFI) yang telah dipetakan dalam laporan pelaksanaan RMA sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian *Risk Maturity Index* (RMI) agar lebih optimal pada pelaksanaan evaluasi maturitas risiko berikutnya.

PGN, as a Gas Subholding, has implemented a risk management maturity assessment. In 2025, the Company conducted a Risk Maturity Assessment (RMA) using a measurement method based on the provisions and implementation procedures in SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Instructions for Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises, after previously using the methodology stipulated in the 'Pertamina Risk Maturity Self-Assessment', known as PRISMA.

The RMA is implemented across two aspects, namely dimensions and performance.

1. In the dimensions aspect, the parameters measured adopt the three pillars of ISO 31000:2018: Principles, Framework, and Process. This adoption is broken down into five assessment points: risk culture and capabilities, risk organization & governance, risk & compliance framework, risk control processes, and risk models, data & technology. This is performed using documentary evidence collection, surveys, and interviews with representatives from all risk organs, including the Risk Owner, risk management work unit, internal control unit, compliance work unit, Board of Directors, and Board of Commissioners.
2. In the performance aspect, the parameters measured are based on the Company's health level (Company rating) and the composite risk rating. The final RMA assessment results consider the scores from the parameter of dimension and performance aspects.

PGN's RMA assessment and measurement score is 3.6 on a scale of 5, indicating the Company is in the Good Practices (+) Phase. Furthermore, in 2025, PGN continued to monitor and improve the opportunities for improvement (OFI) mapped in the previous RMA implementation report. This aims to improve the Risk Maturity Index (RMI) achievement for optimal performance in subsequent risk maturity evaluations.

ROADMAP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Roadmap RMI 2025–2030 menggambarkan perjalanan peningkatan kematangan manajemen risiko secara bertahap. Penerapan *roadmap* ini memastikan kesiapan organisasi untuk mengelola risiko secara proaktif, konsisten, dan selaras dengan praktik terbaik serta tuntutan regulator.

RISK MANAGEMENT ROADMAP

The RMI Roadmap 2025–2030 outlines the gradual journey of increasing risk management maturity. The implementation of this roadmap ensures the organization's readiness to manage risks proactively, consistently, and remain aligned with best practices and regulatory requirements.

2030

Perusahaan ditargetkan mencapai tingkat kematangan manajemen risiko yang penuh, ditandai dengan sistem risiko yang terintegrasi sepenuhnya, proses penilaian dan audit yang berkelanjutan, serta kemampuan deteksi dini risiko yang semakin matang melalui EWS.

The Company is targeted to achieve full risk management maturity, characterized by a fully integrated risk system, continuous assessment and audit processes, and increasingly mature early risk detection capabilities through EWS.

2029

Roadmap memperkuat konsolidasi tata kelola risiko melalui pembaruan kapasitas risiko, evaluasi *treatment* risiko, serta optimalisasi sistem informasi risiko yang terintegrasi.

The roadmap reinforces the consolidation of risk governance through updates to risk capacity, evaluation of risk treatment, and optimization of integrated risk information systems.

2028

Fokus diarahkan pada validasi independen model risiko, konsistensi review kebijakan, serta penyempurnaan Early Warning System (EWS).

The focus is directed toward independent validation of risk models, consistency in policy reviews, and refinement of the Early Warning System (EWS).

2027

Perusahaan memperdalam analisis risiko melalui evaluasi terhadap rencana mitigasi, pengembangan model kuantifikasi risiko, serta peningkatan integrasi data risiko untuk mendukung kecepatan pelaporan.

The Company deepens risk analysis through evaluation of mitigation plans, development of risk quantification models, and enhancement of risk data integration to support faster reporting.

2026

Melanjutkan penguatan tersebut dengan penekanan pada konsistensi survei, forum manajemen risiko, audit internal, serta mulai memperluas integrasi sistem informasi manajemen risiko dan penetapan metodologi limit risiko serta KRI.

This strengthening continues with an emphasis on survey consistency, risk management forums, internal audits, and the expansion of risk management information system integration, along with the establishment of risk limit methodologies and Key Risk Indicators (KRI).

2025

Fokus utama adalah penguatan fondasi budaya risiko melalui penetapan tanggung jawab manajemen, pelaksanaan survei budaya risiko, serta pengembangan program pelatihan, sertifikasi, dan verifikasi RMI tahunan.

The primary focus is strengthening the foundation of risk culture through the establishment of clear management responsibilities, implementation of risk culture surveys, and development of annual RMI training, certification, and verification programs.

SERTIFIKASI PERSONEL

Penyusunan dan pengawasan profil risiko memerlukan adanya sumber daya manusia yang memahami proses pengelolaan risiko mulai tahap identifikasi hingga penanganan risiko secara optimal. Selain itu, PER-2 BUMN juga mendorong persyaratan untuk organ pengelola risiko agar memenuhi sertifikasi yang sesuai dengan pengelolaan risiko. Hingga akhir tahun 2025, PGN telah memiliki beberapa personel yang memiliki sertifikasi manajemen risiko, antara lain:

PERSONNEL CERTIFICATION

The preparation and oversight of risk profiles requires human resources who understand the risk management process, from identification to optimal risk management. Furthermore, PER-2 SOEs also requires risk management bodies to meet certification requirements appropriate to risk management. By the end of 2025, PGN has several personnel who hold risk management certifications, including:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Sertifikasi** Certification			
		Certified Risk Professional oleh BNSP	**Business Continuity Management Certified Professional oleh BNSP**	**Certified Risk Management Professional oleh BNSP**	**Certified GRC Professional oleh BNSP**
Amanarita	Group Head, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity	✓	✓	-	-
Rezki Anindhito	Division Head, Risk Strategy and Integrated Governance	✓	-	✓	-
M. Rofiq Arrosyid	Division Head, Project Risk, Portfolio and Counterparty Risk	✓	✓	-	-
Asti Purwandari	Division Head, Operational Risk, Consolidation and Monitoring	✓	-	-	✓
Hendra Halim	Sr. Expert III, Internal Control & Business Continuity	✓	✓	-	-
Insan Kamil	Sr. Expert II, Internal Control & Business Continuity	✓	-	-	-
Puji Arman	Sr. Expert I,Operational Risk Corporate	✓	✓	✓	-
Arif Budhianto	Sr. Expert I, Internal Control & Business Continuity	✓	✓	-	-
Kevin Jeremia Situmeang	Analyst I, Internal Control & Business Continuity	✓	✓	✓	-
Masaji Suryo Jatmiko	Assistant, Operational Risk Subsidiary	✓	✓	-	-
Taryaka	Sr Expert III, Risk Policy Planning and Infrastructure	✓	-	-	-
Ichsan Priambodo	Sr. Expert III, Integrated Governance	✓	-	-	-
Diana Yulianty	Sr. Expert II, Integrated Governance	✓	✓	-	-
Arif Afrizal	Sr. Expert II, Risk Policy Planning and Infrastructure	✓	-	-	-
Markus Aditya	Sr. Analyst I, Risk Policy Planning and Infrastructure	✓	-	-	-
Elise	Principal Expert I, Project Risk	✓	-	✓	-
Leli Mulyani	Sr. Expert II, Risk Management Implementation	✓	✓	-	-
Abdur Rasyid	Sr. Expert I, Project Risk	✓	-	-	-
Bima Satria Agung	Sr. Analyst II, Project Risk	✓	✓	-	-
Muhammad Rizki Putranda	Analyst I, Project Risk	✓	✓	-	-

STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN

Kebijakan Selera Risiko

Dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai Perusahaan guna mencapai pertumbuhan perusahaan, PGN menerapkan selera risiko (*risk appetite statement*) sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki *zero appetite* terhadap aktivitas yang melanggar kepatuhan/compliance (fraud) serta berkomitmen untuk mencegah perilaku tersebut.
2. Perusahaan mengambil *risk appetite* normal dalam menetapkan Batas Toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima setelah melakukan tindakan penanganan risiko (*risk treatment*) sebagai perwujudan medium appetite terhadap *risk capacity* Perusahaan.
3. Perusahaan memiliki *high appetite* terhadap aktivitas investasi dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Perusahaan memiliki *zero appetite* terhadap pemenuhan *financial covenant*.
5. Perusahaan memiliki *medium appetite* terhadap aspek likuiditas Perusahaan.
6. Perusahaan memiliki preferensi *zero appetite* terhadap jumlah insiden yang terhitung sebagai NoA.
7. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap paparan fluktuasi pasar.
8. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap risiko reputasi, dengan menjaga *Corporate Index* agar tercipta kepercayaan publik terhadap Perusahaan.
9. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap tingkat nilai ESG, sehingga program ESG dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan Ambang Batas Risiko

Kebijakan ambang batas risiko menggambarkan tingkat risiko yang dapat diterima/ditoleransi oleh perusahaan yang terdiri dari *risk capacity* yang merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menghadapi eksposur risiko, *risk tolerance* yang merupakan nilai ambang batas risiko yang dapat diterima oleh perusahaan untuk pengelolaan risiko agar tetap dalam *risk appetite*, dan *risk limit* yang merupakan nilai batas risiko yang dimiliki perusahaan untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi berdasarkan aktivitas yang direncanakan dalam mencapai target perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, PGN sebagai Subholding Gas mengelola risiko korporat terintegrasi yang meliputi risiko dari masing-masing satuan kerja di PGN, maupun risiko yang berasal dari anak perusahaan/afiliasi PGN.

RISK STRATEGY IN THE COMPANY

Risk Appetite Policy

In a bid to protect and create Corporate value to achieve company growth, PGN applies the following risk appetite statement:

1. The Company has a zero appetite for activities that violate compliance (fraud) and is committed to preventing such behavior.
2. The Company adopts a normal risk appetite in determining the acceptable Risk Tolerance Limit after carrying out risk treatment measures as a manifestation of the medium appetite for the Company's risk capacity.
3. The Company has a high appetite for investment activities while taking into account the principles of Good Corporate Governance.
4. The Company has a zero appetite for fulfilling financial covenants.
5. The Company has a medium appetite for the Company's liquidity aspect.
6. The Company has a zero appetite preference for the number of incidents that count as NoA.
7. The Company has a low appetite preference for exposure to market fluctuations.
8. The Company has a low appetite preference for reputational risk, by maintaining the Corporate Index to create public confidence in the Company.
9. The Company has a low appetite preference for ESG value levels, ensuring that ESG programs can provide benefits to society and the environment.

Risk Threshold Policy

The risk threshold policy describes the level of risk that a company can accept/tolerate. It consists of risk capacity, which is the Company's financial ability to face risk exposure; risk tolerance, which is the risk threshold value that the Company can accept for risk management to remain within its risk appetite; and risk limit, which is the risk limit value the Company has in place to manage potential risks based on planned activities to meet Company targets.

MANAGING RISKS FACED BY THE COMPANY

Throughout 2025, PGN, as a Gas Subholding, managed integrated corporate risks, encompassing risks from each of PGN's work units, as well as risks from PGN's subsidiaries/affiliates.

Pelaporan dan monitoring pengelolaan risiko korporat disampaikan kepada Pertamina dan Manajemen Puncak PGN dalam bentuk 'Top Risk Subholding Gas 2025' dengan periode monitoring yang dilakukan dalam jangka waktu 1 kali dalam sebulan secara berkesinambungan.

Proses penetapan *top risk* tersebut dilakukan menggunakan mekanisme identifikasi dan analisis dua arah yaitu *top-down* dan *bottom-up*, atas *all-risk* yang telah diregistrasi oleh pemilik risiko (*risk owner*).

All-risk tersebut selanjutnya dilakukan seleksi kandidat *top risk* dengan menggunakan skema *funneling process* meliputi *threshold*, *self-asessment*, *sorting*, *scoring* dan *clustering*, yang selanjutnya kandidat *top risk* akan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Subholding Gas sebagai *Top Risk* Subholding Gas 2025 dalam buku RKAP 2025.

Penjabaran *Top Risk* Korporat Subholding Gas 2025 untuk kategori '*Ongoing Business*' untuk risiko yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif adalah sebagai berikut:

Reporting and monitoring of corporate risk management were submitted to Pertamina and PGN's Top Management in the form of a 'Top Risk Gas Subholding 2025' report, with a monitoring period conducted once a month on an ongoing basis.

The process of determining top risks is carried out using a two-way identification and analysis mechanism, namely top-down and bottom-up, for all risks registered by the risk owners.

These all-risks are then selected as top risk candidates using a funneling process, including thresholds, self-assessment, sorting, scoring, and clustering. The top risk candidates are then approved by the Board of Directors and Board of Commissioners of Gas Subholding as Top Risks for Gas Subholding 2025 in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP).

The description of the 2025 Gas Subholding Corporate Top Risk for the 'Ongoing Business' category, including both quantitative and qualitative risks, is as follows:

Jenis Risiko Risk Type	**Risk Event (Kejadian Risiko)** Risk Event	**Mitigasi** Mitigation
Kuantitatif Quantitative	Risiko sengketa hukum dan penyesuaian kebijakan Risk of legal disputes and policy adjustments	• Mengajukan tindakan hukum yang diperlukan File necessary legal action • Menyusun strategi arbitrase Develop an arbitration strategy • Melakukan advokasi yang diperlukan Conduct necessary advocacy
Kuantitatif Quantitative	Risiko penurunan pasokan gas atau keterbatasan LNG Risk of reduced gas supply or limited LNG	• Mengupayakan pengadaan pasokan alternatif dengan volume dan harga yang kompetitif Strive for alternative supply at competitive volumes and prices
Kuantitatif Quantitative	Risiko pengelolaan aset Migas Risk of oil and gas asset management	• Melakukan pengembangan aset migas seraya terus berkoordinasi dengan regulator Develop oil and gas assets while continuing to coordinate with regulators
Kualitatif Qualitative	Risiko terkait pengelolaan keamanan siber Risk related to cybersecurity management	• Meningkatkan keandalan infrastruktur IT, serta sistem keamanan informasi dengan enchancement berupa penyediaan Security Information and Event Management (SIEM) dan technical support security Enhance the reliability of IT infrastructure and information security systems by providing enhancements such as Security Information and Event Management (SIEM) and technical security support. • Menggunakan autentifikasi MFA/OTP, enkripsi data, dan back up data secara berkala Use MFA/OTP authentication, data encryption, and regular data backups.

Jenis Risiko Risk Type	Risk Event (Kejadian Risiko) Risk Event	Mitigasi Mitigation
Kualitatif Qualitative	Risiko Operasional terkait keandalan Infrastruktur Operational Risk related to infrastructure reliability	• Melaksanakan assesmen deviasi penurunan tanah, pipe analysis, vibrasi, CIPS-CDVG, melakukan Remaining Life Assessment pada fasilitas dan jaringan Conduct land subsidence deviation assessments, pipe analysis, vibration, CIPS-DCVG, and Remaining Life Assessments on facilities and networks. • Melakukan patroli rutin di jalur Right-of-Way (ROW) Conduct routine patrols on the Right-of-Way (ROW)
Kualitatif Qualitative	Risiko Operasional terkait pengelolaan HSSE Operational Risk related to HSSE management	• Melaksanakan peningkatan sosialisasi, edukasi, sertifikasi dan program "HSSE passport" Implement increased outreach, education, certification, and the "HSSE passport" program. • Melaksanakan kajian Process Safety Asset Integrity, Process Hazard Analysis, Major Accident Hazard Conduct Process Safety Asset Integrity, Process Hazard Analysis, and Major Accident Hazard studies. • Meningkatkan koordinasi aktif dengan aparat dan sertifikasi terhadap personel dan mitra pengamanan Ensure active coordination with authorities and certification of personnel and security partners.

Adapun daftar nama proyek yang menjadi Top Risk Korporat Subholding Gas 2025 untuk kategori 'Project' meliputi:
1. Pembangunan Pipa Minyak Mentah Koridor Minas-Duri-Dumai dan Koridor Balam-Bangko-Dumai;
2. Pembangunan Terminal LNG Jawa Timur;
3. Revitalisasi LNG Tank F-6004 & Fasilitas Pendukung Lainnya;
4. Empat Proyek Pembangunan Jaringan Gas APGN (Jargas);
5. Usulan Pengeboran Sumur - WK Pangkah;
6. Pembangunan pipa BBM Cikampek - Plumpang.

Pengelolaan Risiko meliputi analisa risiko dan penyusunan rencana mitigasi atas dasar pemenuhan tujuan pelaksanaan proyek seperti *on time*, *on budget*, *on specification*, *on regulation* dan *on return*, serta HSSE dan kepatuhan terhadap GCG.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Sebagai pemenuhan terkait dengan Organ Pengelola Risiko sesuai dengan PER-2 BUMN, struktur tata kelola manajemen risiko di PGN di tahun 2025 mengalami perubahan signifikan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Keputusan Direksi PGN Nomor 036800.K/OT.0/HCGS/2024, struktur organisasi pada Direktorat Manajemen Risiko terdiri atas: *Risk Strategic and Integrated Governance*, *Operational Risk*, *Internal Control and Business Continuity* dan *Project Risk*, *Portfolio and Counterparty Risk*.

The list of projects listed as Top Corporate Risks for Gas Subholding in 2025 under the 'Project' category includes:
1. Construction of the Minas-Duri-Dumai Corridor Crude Oil Pipeline and the Balam-Bangko-Dumai Corridor;
2. Construction of the East Java LNG Terminal;
3. Revitalization of LNG Tank F-6004 and Other Supporting Facilities;
4. Four PGN Gas Network Development Projects (Jargas);
5. Proposed Well Drilling - Pangkah Working Area;
6. Construction of the Cikampek–Plumpang Fuel Pipeline.

Risk Management covers risk analysis and preparation of mitigation plans based on fulfillment of project implementation objectives such as on time, on budget, on specification, on regulation and on return, as well as HSSE and compliance with GCG.

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

In fulfillment of the Risk Management Organ as stipulated in PER-2 of SOEs, PGN's risk management governance structure underwent significant changes in 2025, as follows:

1. Pursuant to Decree of the PGN Board of Directors Number 036800.K/OT.0/HCGS/2024, the organizational structure of the Risk Management Directorate comprises: Risk Strategy and Integrated Governance, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity, and Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk.

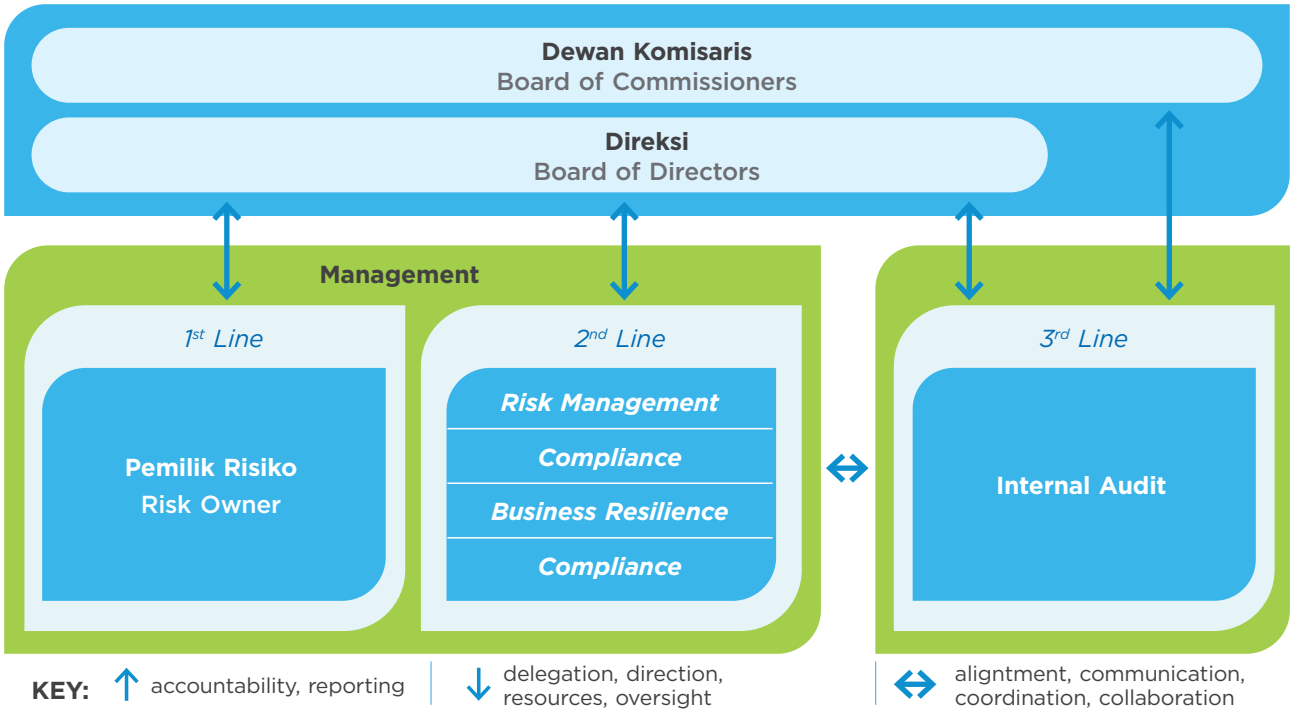


2. Terkait sistem pelaporan, menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi sejak Juni 2024, fungsi manajemen risiko melaporkan pengelolaan manajemen risiko kepada Direktur Manajemen Risiko selaku '*Chief Risk Officer*' (CRO).

Hingga akhir tahun 2025 PGN mengadopsi prinsip *Three Lines Model* sebagai acuan tata kelola pengelolaan risiko sejalan dengan pengelolaan risiko yang diimplementasikan oleh Holding Migas dan telah sesuai dengan persyaratan dari PER-2 BUMN. Penerapan *Three Lines Model* juga ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban masing-masing lini dalam menghadapi serta mengelola taksonomi risiko yang dihadapi Perusahaan.

2. Regarding the reporting system, aligned with changes in the organizational structure since June 2024, the risk management function reports risk management to the Director of Risk Management as the 'Chief Risk Officer' (CRO).

By the end of 2025, PGN adopted the Three Lines Model principle as a reference for risk management governance, aligned with the risk management implemented by the Oil and Gas Holding Company and in accordance with the requirements of PER-2 SOEs. The implementation of the Three Lines Model also aims to ensure the accountability and responsibility of each line in navigating and managing the Company's risk taxonomy.



PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN

Risk Strategy and Integrated Governance, *Operational Risk*, *Internal Control & Business Continuity* dan *Project Risk*, *Portfolio and Counterparty Risk* sebagai fungsi yang bertugas dalam mengelola manajemen risiko PGN pada tahun 2025, telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan *awareness* dan maturitas manajemen risiko Perusahaan melalui kegiatan sebagai berikut:

- *Upskilling* dan *Refreshment* Aplikasi ERMS 2.1 Pertamina, format pelaporan bulanan serta pelaporan risiko lainnya di lingkup Subholding Gas;
- *Refreshment* Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dan PER-2 BUMN melalui *cross-sharing* dengan satuan kerja PGN lainnya maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelaksanaan Sharing Session mengenai BCMS ISO 22301:2019 kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelaksanaan Forum Sharing BCMS Insight "A Benchmarks from Risk Management of State-Owned Enterprise in the Energy Sector PLN Group" dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Pelaksanaan event Discourse for Advancement Project Risk Management (DECEPTICON) dengan peserta RCT Satuan Kerja PGN maupun Anak Perusahaan;
- Pelaksanaan Risk Management Forum (RMF) Pertamina Across the Group pada bulan Desember 2025 dengan tema 'Regulator Gas Business Entity Sinergy for Stronger Risk Governance';
- Benchmark pengelolaan risiko dan BCMS dengan Angkasa Pura II, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan Risk Management Forum (RMF) di lingkup internal Subholding Gas yang diselenggarakan masing-masing Anak Perusahaan/Afiliasi dengan berbagai tema strategis seperti "Pengelolaan Risiko Operasional Pipa Transmisi dengan Penggunaan Teknologi Inspeksi Inline", "Mitigating Flow Assurance Risks", "Risk to Rise: Transforming Risk into Opportunity", serta "Business Continuity Through Smart Asset Integrity";
- Penyelenggaraan Acara Budaya Sadar Risiko kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelatihan dan sertifikasi Auditor Internal BCMS ISO 22301:2019 lingkup Subholding Gas;
- Paparan implementasi Living Core Values (LCV) AKHLAK lingkup Pertamina Group tahun 2025;
- Pemberian RCT Awards dan BCMS Awards Tahun 2025; dan
- Pelaksanaan sertifikasi CRP dan sertifikasi BCMCP oleh BNSP.

PROGRAMS TO IMPROVE THE COMPANY'S RISK AWARENESS CULTURE

Risk Strategy and Integrated Governance, Operational Risk, Internal Control & Business Continuity, and Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk, as the functions responsible for PGN's risk management by 2025, have implemented several programs to raise the Company's risk management awareness and maturity through the following activities:

- Upskilling and Refreshment of Pertamina's ERMS 2.1 Application, monthly reporting formats, and other risk reporting within the Gas Subholding;
- Refreshment of Risk Management based on ISO 31000:2018 and PER-2 SOEs through cross-sharing with other PGN work units and subsidiaries/affiliates;
- Implementation of Sharing Sessions on BCMS ISO 22301:2019 for RCTs within PGN work units and subsidiaries/affiliates;
- Implementation of the BCMS Insight Sharing Forum "A Benchmark from Risk Management of State-Owned Enterprises in the Energy Sector, PLN Group" with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Implementation of the Discourse for Advancement Project Risk Management (DECEPTICON) event with RCT participants from PGN Work Units and Subsidiaries;
- Implementation of the Pertamina Across-the-Group Risk Management Forum (RMF) in December 2025 with the theme 'Regulator Gas Business Entity Synergy for Stronger Risk Governance';
- Risk management and BCMS benchmarking with Angkasa Pura II, PT Pertamina Hulu Energi, and PT Pupuk Kalimantan Timur;
- Implementation of Risk Management Forums (RMFs) within the Gas Subholding, organized by each Subsidiary/Affiliate, with various strategic themes such as "Managing Transmission Pipeline Operational Risks Using Inline Inspection Technology," "Mitigating Flow Assurance Risks," "Risk to Rise: Transforming Risk into Opportunity," and "Business Continuity Through Smart Asset Integrity";
- Implementation of Risk Awareness Culture Events for RCTs within PGN work units and PGN subsidiaries/affiliates;
- Training and certification of Internal Auditors BCMS ISO 22301:2019 within the Gas Subholding;
- Presentation of the implementation of Living Core Values (LCV) AKHLAK within the Pertamina Group in 2025;
- Presentation of RCT Awards and BCMS Awards in 2025; and
- Implementation of CRP and BCMCP certification by the National Agency for Profession Standardization (BNSP).

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS

Selama tahun 2025, kondisi ekonomi global masih berada pada ketidakpastian dan ketidakstabilan, terutama akibat ketegangan geopolitik di Eropa Barat dan Timur Tengah yang secara tidak langsung memengaruhi *supply demand* energi global bahkan hingga di regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pada tahun 2025, kinerja ekonomi dalam negeri mencatat pertumbuhan yang positif dan tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global meskipun dengan faktor ketidakpastian yang masih cukup tinggi dirasakan oleh industri domestik.

Menghadapi tantangan ini, PGN terus menerapkan sistem manajemen kelangsungan bisnis (*Business Continuity Management Systems*) atau Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB) dengan mengacu pada ISO 22301:2019 untuk satu siklus penuh (*full cycle*). Sejak tahun 2022, dilakukan perluasan lingkup implementasi SMKB hingga ke kantor Area. PGN juga telah memulai implementasi awal pada lingkup Anak Perusahaan/Afiliasi di tahun 2024.

Pada triwulan terakhir 2025, PGN berhasil meraih sertifikat atas surveilance serta penambahan lingkup sertifikasi ISO 22301 Business Continuity Management System, dengan lingkup sertifikasi meliputi Kantor Pusat, Sales Operation Region II, Area Jakarta dan Area Bekasi, Sales Operation III, Area Surabaya dan Area Sidoarjo, sebagai wujud komitmen dan kesiapan dalam menghadapi disrupsi bisnis, membangun masa depan yang lebih stabil, dan berkembang secara berkelanjutan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di PGN tidak terlepas dari komitmen Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Manajemen Puncak yang selaras dengan *frameworks* manajemen risiko ISO 31000:2018. Bentuk komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi Subholding Gas oleh seluruh Direksi PGN serta diketahui dan disetujui oleh seluruh Direktur Utama Anak Perusahaan/ Afiliasi PGN.

IMPLEMENTATION OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM

During 2025, the global economic situation remained uncertain and unstable, primarily due to geopolitical tensions in Western Europe and the Middle East, which indirectly impacted global energy supply-demand even in the Southeast Asia region, including Indonesia.

In 2025, domestic economic performance saw a positive growth and remained robust amidst global economic challenges despite the continuing high levels of uncertainty felt by the domestic industry.

In the face of these challenges, PGN consistently implements Business Continuity Management Systems (BCMS) by adhering to ISO 22301:2019 for full cycle. Since 2022, the scope of BCMS implementation has been expanded to Area offices. PGN also begins initial implementation at its Subsidiaries/Affiliates in 2024.

In the last quarter of 2025, PGN successfully obtained surveillance certification and expanded its scope to ISO 22301 Business Continuity Management System certification, covering the Head Office, Sales Operation Region II, Jakarta Area and Bekasi Area, Sales Operation III, Surabaya Area and Sidoarjo Area. This demonstrates its steadfast commitment and readiness to navigate business disruption, build a more stable future, and evolve sustainably.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

PGN's risk management is inseparable from the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners as Top Management, aligned with ISO 31000:2018 risk management framework. This commitment is manifested by the signing of Gas Subholding Risk Management & Resilience Charter by all PGN Board of Directors and is acknowledged and approved by all President Directors of its subsidiaries/affiliates.

Piagam tersebut dilakukan pemutakhiran secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun, sebagai bentuk pemenuhan terhadap PER-2/ MBU/03/2023 BUMN. Selain itu, sesuai dengan PER-2 tersebut, Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan-kebijakan manajemen risiko, seperti, namun tidak terbatas kepada: kebijakan Three Lines Model, kebijakan selera, kapasitas dan toleransi risiko, kebijakan pengukuran risiko dan kebijakan sistem informasi risiko.

The Charter is updated on a regular basis at least once a year, in fulfillment of PER-2/ MBU/03/2023 SOEs. Additionally, pursuant to PER-2, the Board of Commissioners has also approved risk management policies, for example, but not limited to: Three Lines Model policy, risk policy, capacity and tolerance policy, risk measurement policy and risk information system policy.

Pengelolaan risiko di PGN juga telah dilengkapi dengan Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Pedoman, Prosedur Operasi serta Instruksi Kerja yang digunakan sebagai dasar dari seluruh kegiatan manajemen risiko di perusahaan.

Risk management at PGN has also been complemented with a Work Reference Document (DAK) comprising Guidelines, Operating Procedures and Work Instructions, which serve as a basis for all risk management activities in the Company.

Sebagai wujud pemenuhan persyaratan dari PER-2 BUMN tersebut, pada tahun 2024 juga telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) di PGN berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PGN Nomor Kep-04/D-KOM/2024 pada 28 Maret 2024, yang dipimpin oleh Komisaris Utama PGN dengan anggota adalah semua Komisaris Utama Anak Perusahaan/ Afiliasi. Pembentukan KTKT bertujuan untuk memperkuat serta melengkapi implementasi manajemen risiko di seluruh lini Perusahaan.

In fulfillment of the requirements of PER-2 SOEs, in 2024 an Integrated Governance Committee (KTKT) was also formed at PGN based on the Decree of the PGN Board of Commissioners Number Kep-04/D-KOM/2024 on March 28, 2024, which is led by the President Commissioner of PGN with members being all President Commissioners of Subsidiaries/Affiliates. The KTKT was formed with the aim to bolster and complement the implementation of risk management across all Company's lines.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem manajemen risiko yang dimiliki PGN telah memadai dan mampu mengantisipasi setiap risiko yang dimiliki Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya hasil pengukuran RMA PGN berada pada "Fase Praktik yang Baik (+)" dan mempertahankan sertifikasi ISO 22301:2019 Business Continuity Management System.

Throughout 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners assessed the risk management system at PGN as adequate and able to anticipate any risks the Company faces. This is evident from PGN's RMA measurement results being in the "Good Practice Phase (+)" and maintaining its ISO 22301:2019 Business Continuity Management System certification.

PGN juga terus melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko secara periodik, mulai dari tingkat fungsi, satuan kerja, hingga level manajemen senior yang tercermin dalam agenda rutin rapat Direksi yang selalu menyertakan pengelolaan risiko menjadi salah satu mata acara pembahasan utama.

PGN also consistently evaluates risk management periodically, starting from function level, work unit, to senior management level, as evident from the routine agenda of the Board of Directors' meetings with risk management being one of the primary discussion agenda items.

Proses monitoring dan implementasi perbaikan tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan akan kecukupan sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perusahaan terutama untuk pelaksanaan evaluasi maturitas risiko selanjutnya.

The monitoring process and the implementation of these improvements continue to be carried out on an ongoing basis. This aims to boost the level of confidence in the adequacy of the Company's risk management system, particularly for the execution of subsequent risk maturity evaluations.



PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
LEGAL CASES

Hingga 31 Desember 2025, terdapat lima perkara atau gugatan hukum bernilai material terhadap Perseroan. Perkara tersebut adalah perkara lanjutan atau belum diputuskan dan/ atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun sebelumnya.

Informasi mengenai perkara hukum material yang dihadapi PGN, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi pokok perkara, status perkara, serta pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan sebagai berikut:

As of December 31, 2025, five cases or lawsuits of material value against the Company had remained unsettled, meaning none of the cases had been legally settled and/or had permanent legal force when the previous year ended.

Information on material legal cases facing PGN, its subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners including the subject matter, the status, and its impact on the Company is as follows:

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
SENGKETA PPN DALAM NIAGA GAS BUMI PGN UNTUK PERIODE TAHUN 2012-2013.
VAT Dispute on Natural Gas Trading PGN for 2012-2013 Period.

Lembaga Agency	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Supreme Court of The Republic of Indonesia
Para Pihak Parties in Dispute	• Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) • PGN (sebagai Termohon Peninjauan Kembali)	• The Directorate General of Tax Affairs (as Applicant for Judicial Review) • PGN (as Respondent for Judicial Review)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Pajak	Taxation
Nilai Perkara Case Value	Rp4,15 triliun	Rp4.15 trillion
Pokok Perkara Subject Matter	Sengketa PPN 2012-2013 terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara DJP dan PGN terkait kegiatan niaga gas bumi yang dilakukan oleh PGN. DJP berpandangan bahwa untuk periode tahun 2012, gas yang dijual oleh PGN merupakan gas hasil pengolahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai barang sehingga dikenakan PPN sebesar 10% dan terdapat jasa distribusi atau pengangkutan gas dalam kegiatan niaga gas PGN sehingga dikenakan PPN untuk periode tahun 2013. PGN berpandangan bahwa tidak terdapat proses pengolahan dalam gas yang dijual oleh PGN kepada pelanggan dan PGN menerima gas sesuai Gas Sales Agreement (GSA) dari KKKS dengan spesifikasi yang telah diatur oleh regulasi pemerintah dan langsung proses/pengolahan untuk periode tahun 2012. Untuk periode tahun 2013, PGN melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan titik serah di lokasi pelanggan sehingga kegiatan niaga gas dan penyaluran gas kepada pelanggan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan adanya komponen rupiah dalam harga jual gas bumi guna menghindari risiko kurs mengingat krisis moneter seperti tahun 1998. Bahwa atas perkara tersebut pada tingkat PK yang dimohonkan oleh DJP, terdapat 18 putusan yang mengabulkan permohonan DJP dan enam perkara yang menolak permohonan DJP.	The 2012-2013 VAT dispute occurred due to different opinions between DGT and PGN regarding natural gas trading activities by PGN. DGT stated that the natural gas sold by PGN was processed gas which results in an increase in the value of goods so that 10% VAT was imposed and there were gas distribution or activities, so that it was subject to VAT for the 2013 period. Meanwhile, PGN stated that there was no processed gas in the natural gas sold by PGN to costumers and PGN received the gas according to the Gas Sales Agreement from KKKS with its specification set by government regulations and directly sell the gas to costumers without any processing for the 2012 period, For the 2013, PGN conducted natural gas trading activities with delivery points at the costumer's locations, that the natural gas trading activities and its distribution to the costumers were inseparable and the use of rupiah currency in the selling price of natural gas so as to avoid exchange rate risks following a monetary crisis like the one occurred in 1998. Whereas for the said cases at the judicial review level filed by DGT, there are 18 verdicts that granted DGT's requests and 6 (six) verdicts that rejected DGT's requests.
Status Saat Ini Current Condition	Atas 18 perkara yang telah putus tersebut, PGN melakukan PK kedua dan atas enam perkara yang memenangkan PGN, DJP juga mengajukan PK kedua. Sampai Desember 2023, 15 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus Niet Onvantkelijkverklaard (NO). Adapun untuk enam permohonan PK Kedua yang diajukan DJP juga telah diputus Nomor Sampai Desember 2024, terdapat dua permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus Nomor Pada tanggal 28 Februari 2025, MA telah menyampaikan putusan untuk sisa satu permohonan PK Kedua PGN dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijkverklaard*). Dengan demikian, terhadap 24 permohonan PK Kedua terkait sengketa PPN 2012-2013, PGN telah menerima putusan MA secara keseluruhan. Putusan Niet Onvantkelijkverklaard (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat formal. Konsekuensi atas Putusan NO tidak dapat disamakan dengan putusan ditolak mengingat masih dimungkinkan untuk mengajukan kembali permohonan sepanjang telah memenuhi syarat formal.	For the 18 cases that have been decided, PGN will conduct a second judicial review and for the six cases that won PGN, DGT also submitted a second judicial review. Until December 2023, 15 judicial review applications submitted by PGN decided Niet Onvantkelijkverklaard (NO). Meanwhile enam judicial review applications submitted by DJP also decided Number Until December 2024, there were two judicial reviews submitted by PGN with a decision of Number On February 28, 2025, the Supreme Court issued a ruling on PGN's final remaining Second Judicial Review (PK Kedua) petition, declaring the lawsuit Inadmissible (Niet Onvantkelijkverklaard). Consequently, PGN has now received Supreme Court rulings for all 24 Second Judicial Review petitions concerning the 2012-2013 VAT disputes. The Niet Onvantkelijkverklaard (NO) decision is a decision stating that the lawsuit cannot be accepted because it has yet to fulfill the formal requirements. NO Decision cannot be equated with a rejected decision, considering that it is still possible to resubmit the application as long as the formal requirements are satisfied.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK DAN PT SAKA ENERGI INDONESIA GUGATAN DEWAN PIMPINAN ADAT LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO).

Lawsuit of the Customary Leaders Council of Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO).

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Lamongan	The District Court of Lamongan
Para Pihak Parties in Dispute	• LEMASKO (Penggugat) • Saka Energi Indonesia & PGN (Tergugat)	• LEMASKO (Plaintiff) • Saka Energi Indonesia & PGN (Defendants)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp1.401.000.000.000	Rp1,401,000,000,000
Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 3 April 2023, SEI dan PGN menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa Saka Energi Indonesia ("SEI") telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO") yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar, mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Kontrak Bagi Hasil sesuai kesepakatan dengan SKK Migas.	On April 3, 2023, SEI and PGN received a lawsuit letter on the subject that SEI has taken control of ex-PT Freeport Indonesia's pipe inventories which are claimed to be belonged to the Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) as a grant from PT Freeport Indonesia. Management believes that the lawsuit is baseless, considering that SEI only controls of goods related to Oil and Gas activities, and Oil and Gas assets being controlled by SEI are State-Owned Goods and legally obtained in accordance with applicable legal provisions and the Production Sharing Contract as agreed with SKK Migas.
Status Saat Ini Current Condition	SEI dan PGN telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan Desember 2023, SEI dan PGN masih menjalani proses hukum yang ada dan manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Pada 3 April 2024 SEI dan PGN telah dinyatakan memenangkan perkara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg yang pada pokoknya menolak gugatan LEMASKO. LEMASKO kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 17 April 2024 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 374/PDT/2024/PT Surabaya tertanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan. Atas putusan banding tersebut, LEMASKO kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juli 2024. SEI kemudian mengirimkan kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024. Pada tanggal 16 Desember 2024 Mahkamah Agung telah mengeluarkan amar menolak permohonan kasasi dari LEMASKO. Pada bulan Mei tahun 2025 PGN telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5942 K/PDT/2024 tanggal 16 Desember 2024 jo. Nomor: 10/PDT.G/2023/PN LMG. Merujuk pada putusan tersebut, maka perkara gugatan LEMASKO terkait klaim kepemilikan pipa telah selesai.	SEI and PGN have appointed a legal consultant to handle the lawsuit. As of December 2023, SEI and PGN is still undergoing the legal process and management continues to believe the lawsuit is baseless. On April 3, 2024, SEI and PGN prevailed in accordance with the decision of the Lamongan District Court Number 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg which in principle rejected LEMASKO's lawsuit. LEMASKO then filed an appeal against the decision on April 17, 2024, and it was decided by the East Java High Court with decision Number 374/PDT/2024/PT Surabaya dated June 24, 2024, which in essence upheld the decision of the Lamongan District Court. Based on the appeal decision, LEMASKO then filed a cassation application to the Supreme Court on July 19, 2024. SEI then sent a counter cassation memorandum on July 29, 2024. On December 16, 2024, the Supreme Court issued a ruling rejecting the cassation application from LEMASKO. PGN is currently still waiting for an official copy of the decision from the Supreme Court. In May 2025, PGN received a copy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision Number: 5942 K/PDT/2024 dated December 16, 2024, jo. Number: 10/PDT.G/2023/PN LMG. Referring to this decision, the lawsuit filed by LEMASKO regarding pipe ownership claims has been concluded.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
GUGATAN TERKAIT SENGKETA TANAH DARI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PTPN VII).
Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII).

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	The District Court of Blambangan Umpu
Para Pihak Parties in Dispute	• PTPN VII (Penggugat) • 12 Masyarakat (Tergugat) • PGN (Tergugat 13, Terbanding 16, Turut Termohon Kasasi 16) • Bumi Madu Mandiri (Tergugat 14) • Kantah Kabupaten Way Kanan (Tergugat 15) • Kanwil BPN Provinsi Lampung (Tergugat 16) • BPN RI (Turut Tergugat)	• PTPN VII (Plaintiff) • 12 Communities (Defendant) • PGN (Defendant 13, Appellant 16, Co-Appellant in Cassation 16) • Bumi Madu Mandiri (defendant 14) • Land office Way Kanan Regency (defendant 15) • Regional office of Lampung Province (defendant 16) • BPN RI (Co-defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Imaterial Proporsional terhadap Para Tergugat	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Immaterial Proportional for Defendants
Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah"). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses pembentukan holding BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan aset berupa tanah konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972. PTP VII sedang dalam proses sertifikasi sehingga PTPN VII melakukan pengukuran tematik atas obyek sengketa dan telah terbit Peta Tematik Nomor Peta 6/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Turut Tergugat). PTPN VII menyatakan peta tematik tersebut menggambarkan bukti kepemilikan PTPN VII atas tanah dan memperkuat SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/I/72 tanggal 24 Januari 1972.	On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad's forest consession area ("Land"). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972. PTPN VII is currently in the certification process, and as part of this, PTPN VII conducted thematic mapping of the disputed area. Thematic Map Number 6/2021 has been issued by the BPN RI, who is also a Co-defendant. PTPN VII asserts that this thematic map serves as evidence of PTPN VII's ownership of the land, thereby strengthening the Minister of Agriculture's Decree Number 31/Kpts/UM/I/72 dated January 24, 1972.
Status Saat Ini Current Condition	Pada 3 Januari 2024 telah dilakukan agenda sidang pemeriksaan dokumen para pihak. Kemudian, telah dilakukan pertemuan lanjutan dengan BPN Way Kanan. BPN menjelaskan bahwa peta tematik merupakan visualisasi lokasi dan luas lahan berdasar dokumen yang diajukan pemohon sehingga bukan sebagai alas hak. Berdasar peta tersebut tergambar luasan tanah di bawah penguasaan PGN yang telah disertifikatkan. Kemudian, sidang perkara akan dilaksanakan kembali tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda mediasi. Pada 26 Januari 2024 PTPN VII dan PGN telah menandatangani perjanjian perdamaian yang pada intinya menjelaskan bahwa PTPN VII akan mengeluarkan PGN sebagai Tergugat, menghapus gugatan kepada PGN, dan menjadikan PGN sebagai Turut Tergugat. Perubahan gugatan PTPN VII di tolak oleh Majelis Hakim. Untuk selanjutnya PTPN VII akan mencabut gugatan dan mengajukan gugatan kembali tanpa PGN di dalamnya. Pada tanggal 6 Februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan: 1. Mengabulkan permohonan penggugat; 2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut; 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.	On January 3, 2024, the agenda for the hearing to examine the documents of the parties was carried out. Then, a follow-up meeting was held with the Way Kanan BPN. The BPN explained that the thematic map is a visualization of the location and area of land based on documents submitted by the applicant, which is not a basis for rights. Based on the map, the area of land under the control of PGN that has been certified is depicted. Then, the trial will be held again on January 10, 2024, with a mediation agenda. On January 26, 2024, PTPN VII and PGN signed a peace agreement, which in essence explains that PTPN VII will remove PGN as a Defendant, remove the lawsuit against PGN, and make PGN a Co-Defendant. The amendment to PTPN VII's lawsuit was rejected by the Panel of Judges. Furthermore, PTPN VII will withdraw the lawsuit and file a new lawsuit without PGN in it. On February 6, 2024, PTPN VII has withdrawn the lawsuit on the case as referred to. Furthermore, on February 12, 2024, PGN has received notification of the withdrawal of the lawsuit from PTPN VII with the verdict: 1. Granting the plaintiff's request; 2. Declaring the case Number 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu revoked; 3. Ordering the plaintiff to pay court costs.

	Pada tanggal 29 Februari 2024, PTPN VII kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pertanahan milik PTPN VII dengan mengubah kedudukan PGN yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat I. Pada 28 Maret 2024 PGN telah menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ("PN Blambangan Umpu") Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu, dan tidak terdapat petitum gugatan kepada PGN. Pada tanggal 31 Juli 2024, PN Blambangan Umpu memutuskan gugatan yang diajukan PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). Pada 30 Agustus 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas dari PT Tanjungkarang untuk tingkat Banding, posisi PGN dalam perkara tersebut semula Turut Tergugat I menjadi Terbanding XVI. Dalam memori banding yang diajukan PTPN VII tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan lahan milik PGN. Pada 24 September 2024, PT Tanjung Karang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu. Pada 10 Oktober 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan permohonan kasasi dan posisi PGN semula Terbanding XVI menjadi Termohon Kasasi XVI. Pada tanggal 14 Mei 2025 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor: 1533 K/Pdt/2025 dengan amar menolak permohonan kasasi dari PTPN VII. Berdasarkan gugatan PTPN VII tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil dan imateriel yang ditujukan kepada PGN. Adapun konsekuensi hukum PGN sebagai Turut Tergugat I adalah PGN diminta untuk tunduk dan patuh atas putusan yang nantinya dijatuhkan Majelis Hakim.	On February 29, 2024, PTPN VII filed anotherr lawsuit for unlawful acts related to land owned by PTPN VII by changing PGN's status from previously being Defendant to Co-Defendant I. On March 28, 2024, PGN received a summons from the Blambangan Umpu District Court ("PN Blambangan Umpu") Number 6/Pdt.G/2024/PN Bbu, and there was no petitum for the lawsuit against PGN. On July 31, 2024, the Blambangan Umpu District Court decided on the lawsuit filed by PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). On August 30, 2024, PGN received a notification release to examine the files from Tanjungkarang High Court for an Appeal, PGN's position in this case changed from Co-Defendant I to Appellant XVI. In the appeal memorandum filed by PTPN VII, it was not related to the control of land owned by PGN. On September 24, 2024, Tanjung Karang High Court upheld the decision of the Blambangan Umpu District Court. On October 10, 2024, PGN received a notification release for the cassation application and PGN's position was originally Appellant XVI to Appellant XVI. On May 14, 2025, the Supreme Court Issued Decision Number 1533 K/Pdt/2025, rejecting the appeal filed by PTPN VII. Based on the PTPN VII lawsuit, there are no material and immaterial demands directed at PGN. The legal consequences of PGN as Co-Defendant I are that PGN was requested to submit and comply with the decision that will be handed down by the Panel of Judges.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
PERMOHONAN ARBITRASE OLEH GUNVOR SINGAPORE PTE. LTD. KE THE LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION

Application for Arbitration by Gunvor Singapore Pte. Ltd. to The London Court of International Arbitration

Lembaga Agency	The London Court of International Arbitration (LCIA)	The London Court of International Arbitration (LCIA)
Para Pihak Parties in Dispute	• Gunvor Singapore Pte. Ltd. (Gunvor) (sebagai Penggugat) • PGN (sebagai Tergugat)	• Gunvor Singapore Pte. Ltd. (Gunvor) (as Plaintiff) • PGN (as Defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Belum dapat ditentukan	Not yet determined
Pokok Perkara Subject Matter	Penyampaian pemberitahuan Force Majeure dalam pelaksanaan Master LNG Sale and Purchase Agreement ("MSPA") dan Confirmation Notice ("CN") antara PGN selaku Penjual dengan Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor") selaku Pembeli. Sesuai dengan Klausul 2.1 MSPA, komitmen untuk menjual dan membeli LNG berdasarkan MSPA disepakati dengan menandatangani CN oleh para pihak. Pada tanggal 3 November 2023, PGN telah menyampaikan pemberitahuan Force Majeure kepada Pembeli terkait pelaksanaan CN. Dalam pelaksanaan MSPA dan CN, Gunvor mengajukan permohonan arbitrase ke The London Court of International Arbitration ("LCIA") terhadap PGN berkaitan dengan MSPA dan CN, dengan Gunvor sebagai Pemohon Arbitrase dan PGN sebagai Termohon Arbitrase.	Submission of Force Majeure notification in the implementation of the Master LNG Sale and Purchase Agreement ("MSPA") and Confirmation Notice ("CN") between PGN as the Seller and Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor") as the Buyer. In accordance with Clause 2.1 of the MSPA, the commitment to sell and purchase LNG based on the MSPA is agreed upon by signing the CN by the parties. On November 3, 2023, PGN has submitted a Force Majeure notification to the Buyer regarding the execution of the CN. In the execution of the MSPA and CN, Gunvor filed an arbitration application with The London Court of International Arbitration ("LCIA") against PGN in relation to the MSPA and CN, with Gunvor as the Arbitration Applicant and PGN as the Arbitration Respondent.

Status Saat Ini Current Condition	Pada tanggal 13 September 2024, PGN telah menerima informasi pengajuan Request for Arbitration (RFA) oleh Gunvor dengan Nomor Register Perkara 246358 dari LCIA. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2024 PGN telah menyampaikan Response to the RFA melalui Konsultan Hukumnya. Sepanjang bulan Februari hingga Juli 2025 Para Pihak telah melakukan penyampaian dokumen yang memuat klaim, tanggapan, dan pembelaan ke Tribunal. Selanjutnya, pada bulan Agustus hingga Desember 2025 telah dilakukan serangkaian proses arbitrase pada tahapan document production dan witness statement. PGN menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dengan menunjuk tim hukum internasional yang berpengalaman dalam bidang arbitrase untuk mewakili PGN, terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktivitas bisnis PGN, memastikan penguatan implementasi proses manajemen risiko internal, berkomitmen memastikan transparansi dengan memberikan informasi terkini setiap perkembangan yang material dari proses arbitrase kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	On September 13, 2024, PGN received information on the Request for Arbitration (RFA) submission by Gunvor with Case Registration Number 246358 from LCIA. Following this, on October 31, 2024, PGN submitted a Response to the RFA through its Legal Consultant From February through July 2025, the Parties submitted their respective claims, responses, and statements of defense to the Tribunal. This was followed by a series of arbitration proceedings during the document production and witness statement phase, conducted from August to December 2025. PGN respects the ongoing legal process, by appointing an international legal team that is experienced in arbitration to represent PGN, continuing to monitor the situation to ensure there is no disruption to PGN's operations and business activities, ensuring the strengthening of the implementation of internal risk management processes and committing to ensuring transparency by providing the latest information on any material developments in the arbitration process to shareholders and other stakeholders.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.	To date, there has been no impact on the Company's operational activities, legal matters, financial condition, or business continuity.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAHAN CIKARANG BARAT DI PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Lawsuit for Unlawful Acts in West Cikarang Land at the Cikarang District Court

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Cikarang	Cikarang District Court
Para Pihak Parties in Dispute	• Sainih, dkk (sebagai Para Penggugat) • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (sebagai Tergugat I) • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Cq. Direktur Jendral Sumber Daya Air, Cq. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (sebagai Tergugat II) • PT Gunung Garuda (sebagai Turut Tergugat I) • PT Cikarang Listrindo (sebagai Turut Tergugat II) • PGN (sebagai Turut Tergugat III) • Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (sebagai Turut Tergugat IV) • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Wilayah Jawa Barat, Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (sebagai Turut Tergugat V)	• Sainih, et al. (as Plaintiff) • The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia (as Defendant I) • The Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia, c.q. Directorate General of Water Resources, c.q. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (as Defendant II) • PT Gunung Garuda (as Co-Defendant I) • PT Cikarang Listrindo (as Co-Defendant II) • PGN (as Co-Defendant III) • The Regional Government of Bekasi Regency (as Co-Defendant IV) • The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency of the Republic of Indonesia, c.q. Regional Office of West Java, c.q. Bekasi Regency Land Office (as Co-Defendant V)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Penggugat dalam gugatannya meminta Majelis Hakim menyatakan sah kepemilikan lahan seluas kurang lebih 77.500M2 kepada Penggugat serta meminta ganti rugi materiil dan imateriel senilai Rp1.000 kepada Kementerian PUPR dan PJT II selaku Tergugat I dan Tergugat II.	In the lawsuit, the Plaintiffs request the Bench to declare the Plaintiffs as the rightful owners of a land parcel measuring approximately 77,500 m^2. Furthermore, the Plaintiffs are seeking material and immaterial damages in the amount of Rp1,000 from the Ministry of Public Works and Housing and PJT II, as Defendant I and Defendant II, respectively.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Entitas Anak selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

Details of the civil and criminal legal issues faced by the Subsidiaries in 2025 are as follows:

Entitas Anak Subsidiary	**Pokok Perkara** Subject Matter	**Status Penyelesaian Perkara** Case Settlement Status	**Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan** Potential Impact on the Company's Conditions
PT Pertamina Gas	Bahwa LEMASKO mengklaim selaku penerima hibah/ pemohon eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo Nomor: 31/Pen.Pdt/ Eks/2021/PN.Cbi dimana aset milik pipa milik Pertagas diklaim oleh LEMASKO sebagai aset yang tercantum dalam penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut. LEMASKO sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan substansi dan pihak yang sama, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 614/Pdt.G/2025/ PN Jkt.Pst dan telah melakukan pencabutan gugatan dan LEMASKO saat ini kembali mengajukan gugatan baru dengan register perkara Nomor Nomor 840/Pdt.G/2025/ PN Jkt.Pst. Dalam gugatan, LEMASKO mengklaim bahwa pada saat dilakukannya eksekusi, Pertagas menyatakan keberatan namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Sehingga Pertagas dianggap telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atas obyek pipa besi yang tercatat dalam Berita Acara Konstatering dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong, yakni berupa pipa besi panjang 4-25 meter sejumlah 1500 ton	Dalam gugatan menyebutkan bahwa, total nilai gugatan materiil yang diajukan adalah Rp7.500.000.000 dan imateriel sebesar Rp20.000.000.000. PGN sebagai Turut Tergugat I dimohonkan untuk mematuhi isi putusan ini. Penggugat menempatkan Pertagas sebagai Tergugat I serta PGN dan Pertamina sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena PGN dan Pertamina merupakan pemegang saham Pertagas. Pertagas sebagai Tergugat akan hadir pada setiap jadwal persidangan dan akan menyiapkan dokumen, bukti, dan jawaban yang diperlukan demi membela kepentingan Perusahaan.	Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
	LEMASKO claims to be the grantee/execution petitioner based on the Cibinong District Court Decision Number 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi and the Execution Order Number 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi in conjunction with (Jo) Number 31/Pen.Pdt/Eks/2021/PN.Cb. Under these rulings, LEMASKO asserts that certain pipeline assets owned by Pertagas are included within the scope of the court's execution order. LEMASKO previously filed a lawsuit involving the same substance and parties under Case Registry Number 614/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, which was subsequently withdrawn. However, LEMASKO has since refiled the claim under a new case registry, Number 840/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. In the lawsuit, LEMASKO alleges that while Pertagas raised objections during the execution process, it failed to provide sufficient proof of ownership. Consequently, the Plaintiff alleges that Pertagas willfully and unlawfully took possession of the subject matter—specifically, 1,500 tons of steel pipes measuring 4–25 meters in length—as recorded in the Cibinong District Court's Berita Acara Konstatering (Official Report of Identification) and Execution Order.	The lawsuit seeks material damages totaling IDR7,500,000,000 and immaterial damages of IDR20,000,000,000. PGN, as Co-Defendant I, is requested to comply with the final court decision. The Plaintiff has named Pertagas as Defendant I, while PGN and Pertamina are named as Co-Defendant I and Co-Defendant II, respectively, in their capacities as shareholders of Pertagas. Regarding this matter, PGN's position as Co-Defendant I only requires the Company to comply with the court's eventual ruling. There is no material impact on the Company's financial condition or business continuity. Pertagas, as the Defendant, intends to attend all scheduled court proceedings and will prepare the necessary documentation, evidence, and legal responses to protect the Company's interests.	As of the reporting date, the Company has not identified any material impact on its operations, legal position, financial results, or going concern status.

Entitas Anak Subsidiary	**Pokok Perkara** Subject Matter	**Status Penyelesaian Perkara** Case Settlement Status	**Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan** Potential Impact on the Company's Conditions
PT Pertamina Gas	Pada tanggal 01 Oktober 2025 Penggugat mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pertagas sebagai Tergugat dengan klaim bahwa tindakan Pertagas telah mengambil tanpa hak pipa besi obyek penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo. Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 23 Februari 2021 yang telah tercatat dalam Berita Acara Konstatering Pengadilan Negeri Gresik. Dalam gugatan menyebutkan bahwa, total nilai gugatan materiil yang diajukan adalah Rp1.875.000.000 dan imateriel sebesar Rp10.000.000.000. Mediasi Para Pihak dinyatakan gagal pada tanggal 18 Desember 2025. Hingga laporan ini disampaikan Pertagas masih menunggu panggilan sidang berikutnya.	Pertagas sebagai Tergugat akan hadir pada setiap jadwal persidangan dan akan menyiapkan dokumen, bukti, dan jawaban yang diperlukan demi membela kepentingan Perusahaan.	Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
	On October 1, 2025, the Plaintiff registered a Tort lawsuit (Perbuatan Melawan Hukum) at the Central Jakarta District Court naming Pertagas as the Defendant. The Plaintiff claims that Pertagas unlawfully took possession of steel pipes that were the subject of the Cibinong District Court Execution Order Number 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo. Number 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dated February 23, 2021, as recorded in the Berita Acara Konstatering (Official Report of Identification) of the Gresik District Court. The lawsuit seeks material damages totaling IDR1,875,000,000 and immaterial damages of IDR10,000,000,000. On December 18, 2025, the mediation process between the parties was declared unsuccessful. As of the date of this report, Pertagas is awaiting the summons for the next hearing.	Pertagas, as the Defendant, intends to attend all scheduled court proceedings and will prepare the necessary documentation, evidence, and legal responses to protect the Company's interests.	As of the reporting date, the Company has not identified any material impact on its operations, legal position, financial results, or going concern status.

Entitas Anak Subsidiary	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact on the Company's Conditions
PT Pertamina Gas	Pertagas menjadi salah satu tergugat atas dua gugatan hukum yang diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") ("Penggugat"). Gugatan pertama ditujukan ke beberapa Tergugat dengan dalil terkait pembangunan pipa gas milik CL, yang dianggap melanggar Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghentikan sementara pembangunan tersebut. Pada perkara ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR0,15 triliun. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR1 miliar. Pada tanggal 14 September 2021, Pertagas telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ("PTJ") atas gugatan tersebut. Pada tanggal 14 Juni 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan pertama. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Desember 2023, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan kasasi Pertagas, sehingga dengan demikian putusan sebelumnya untuk membayar sejumlah IDR1 miliar tetap berlaku. ("Perkara Satu") Selanjutnya, pada perkara kedua GPS mengajukan gugatan kepada beberapa tergugat dengan dalil para tergugat telah melakukan tindakan persekongkolan atau konspirasi atas penerbitan izin pembangunan pipa gas milik CL sebagai cadangan. Dalam gugatan ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR1,88 triliun. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR333,8 miliar untuk gugatan kedua. Pada tanggal 24 Februari 2022, PTJ mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR77,3 miliar. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2023, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR175,7 miliar. ("Perkara Dua") Pertagas is one of the defendants in two legal lawsuits filed by GPS ("the Plaintiff"). The first lawsuit was filed against several defendants, alleging violations related to the construction of CL's gas pipeline. This construction was deemed to be in contravention of the Jakarta Administrative Court's Interlocutory Decision, which had ordered a temporary halt to the development. In this case, the Plaintiff sought joint and several damages amounting to IDR 0.15 trillion. On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court partially granted the plaintiff's claim and ordered the defendants to jointly and severally pay damages to the Plaintiff totaling IDR 1 billion.	Pertagas sebagai Tergugat akan hadir pada setiap jadwal persidangan dan akan Pada 12 Februari 2024, dengan mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 dan 21 Desember 2023 atas kedua perkara termaksud, Pertagas telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan GPS atas adanya dugaan penggunaan lahan Right-of Way (ROW) Pipa Gas ruas Citarik-Tegal Gede milik Pertagas tanpa hak. Atas upaya hukum pidana tersebut, GPS, CL, Pertagas sepakat berdamai dan tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya dengan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Nomor 01 tanggal 9 September 2024, serta Perjanjian Pembongkaran Pipa Gas Bumi Pada Ruas Citarik-Tegal Gede dan pada Ruas Tegal Gede-Cikarang Nomor 02 tanggal 9 September 2024 antara GPS dengan Pertagas, dimana penyelesaian perkara tersebut difasilitasi oleh Kejaksaan Agung. Pada proses penyelesaian yang difasilitasi Kejaksaan Agung tersebut, Para Pihak antara lain menyepakati: 1. Penyelesaian Perkara Satu sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian (kewajiban Tergugat berdasarkan hasil putusan pengadilan atas Perkara Satu dianggap telah selesai dan terpenuhi). 2. Perkara Dua dianggap telah selesai dan terpenuhi. 3. GPS akan melakukan pembongkaran pipa beserta fasilitas penunjangnya yang ada di lahan Pertagas, dengan biaya pembongkaran yang ditanggung seluruhnya oleh GPS. Terkait penyelesaian Perkara Dua, pada tanggal 30 April 2025, Pertagas dan CL telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pembagian Nilai Tanggung Renteng dengan poin kesepakatan bahwa besaran nilai tanggung renteng porsi Pertagas adalah Rp58.579.316.488. Atas nilai tanggung renteng Rp58.579.316.488 telah dilakukan penyelesaian kewajiban secara penuh oleh Pertagas kepada CL. On February 12, 2024, considering the Supreme Court Decisions dated December 20 and 21, 2023, concerning both cases, Pertagas initiated criminal legal action by reporting GPS for alleged unauthorized use of the Right-of-Way (ROW) for the Citarik-Tegal Gede gas pipeline segment, which belongs to Pertagas.	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan. Affects the Company's consolidated profit/loss.

Entitas Anak Subsidiary	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact on the Company's Conditions
	On September 14, 2021, Pertagas filed an appeal against this lawsuit with the Jakarta High Court ("PTJ"). On June 14, 2022, the PTJ upheld the Central Jakarta District Court's decision on the first lawsuit. Subsequently, on July 25, 2022, Pertagas filed a cassation appeal against the first lawsuit with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. On December 21, 2023, the Supreme Court issued a decision rejecting Pertagas's cassation appeal, thereby affirming the previous judgment to pay IDR 1 billion. ("Case One") Next, in the second case, GPS filed a lawsuit against several defendants, alleging they engaged in collusion or conspiracy concerning the issuance of a construction permit for CL's gas pipeline as a backup. In this lawsuit, the Plaintiff sought joint and several damages amounting to IDR1.88 trillion. On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court partially granted the plaintiff's claim and ordered the defendants to jointly and severally pay damages to the Plaintiff totaling IDR333.8 billion for the second lawsuit. On February 24, 2022, the PTJ partially granted the plaintiff's claim and ordered the defendants to jointly and severally pay IDR77.3 billion. On May 17, 2022, Pertagas filed a cassation appeal against the second lawsuit with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. On December 20, 2023, the Supreme Court partially granted the plaintiff's claim and ordered the defendants to jointly and severally pay IDR175.7 billion. ("Case Two")	Regarding this criminal legal action, GPS, CL, and Pertagas agreed to settle and not pursue any further legal action by signing Settlement Agreement Number 01 dated September 9, 2024, as well as the Agreement for Dismantling the Natural Gas Pipeline on the Citarik-Tegal Gede and Tegal Gede-Cikarang Segments Number 02 dated September 9, 2024, between GPS and Pertagas. The resolution of this matter was facilitated by the Attorney General's Office. In the resolution process facilitated by the Attorney General's Office, the Parties agreed, among other things, to the following: 1. Resolution of Case One in accordance with the provisions of the Settlement Agreement (the Defendant's obligations based on the court's decision for Case One are deemed to be completed and fulfilled). 2. Case Two is considered completed and fulfilled. 3. GPS will dismantle the pipeline, and its supporting facilities located on Pertagas's land, with the dismantling costs fully borne by GPS. Regarding the settlement of Case Two, on April 30, 2025, Pertagas and CL signed the Minutes on the Apportionment of Joint Liability Value. The Minutes states that Pertagas's portion of the joint liability is Rp58.579.316.488. For the joint and several liability value of Rp58,579,316,488 (fifty-eight billion five hundred seventy-nine million three hundred sixteen thousand four hundred eighty-eight Rupiah), the obligation has been fully settled by Pertagas to CL.	

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PGN

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK

Sepanjang tahun 2025 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat tidak terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

IMPORTANT CASES FACED BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PGN

Throughout 2025, all serving members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were not involved in any important cases, whether criminal and/or civil cases.
Important Cases Faced by Members of the Board of

DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF SUBSIDIARIES

Throughout 2025, all serving members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Subsidiaries were not involved in any important cases, whether criminal and/or civil cases.

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
INFORMATION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang material yang dikenakan otoritas pasar modal atau otoritas lainnya kepada PGN, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM ATAU PERATURAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN ATAU MATERIAL

Tidak ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan atau material.

SANKSI DARI REGULATOR TERKAIT PERISTIWA PENTING

Sepanjang tahun 2025, PGN tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator yang disebabkan oleh tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PENCATATAN

Sepanjang tahun 2025, PGN tidak pernah mendapatkan sanksi terkait peraturan pencatatan. PGN selalu berupaya mematuhi aturan, regulasi, ketentuan dan/atau peraturan pencatatan dari regulator baik aturan pengungkapan maupun aturan terkait lainnya.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN

PGN tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2025, no material administrative sanctions were imposed by the Capital Market Authority or other authorities on PGN, members of the Board Commissioners and the Board of Directors.

SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH LAWS OR REGULATIONS PERTAINING TO SIGNIFICANT OR MATERIAL RELATED-PARTY TRANSACTIONS

There were no instances of non-compliance with applicable laws, rules, and regulations pertaining to significant or material related party transactions.

SANCTIONS FROM REGULATORS RELATED TO IMPORTANT EVENTS

Throughout 2025, PGN did not receive any sanctions from regulators for failing to make announcements within the required timeframe for important events.

SANCTIONS RELATED TO LISTING REGULATIONS

Throughout 2025, PGN did not incur any sanctions from regulators related to listing regulations. PGN consistently strives to comply with all rules, regulations, provisions, and/or listing requirements issued by regulators, including disclosure obligations and other relevant stipulations.

SANCTIONS RELATED TO TAX REGULATIONS

Over the past three years, PGN did not receive any guilty verdict from the highest tax court regarding tax matters.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN

MANAGEMENT AND CONTROL OF TAX ASPECTS



PGN memandang perpajakan tidak hanya sebagai kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai elemen integral dalam manajemen keuangan yang berdampak pada keseimbangan dan pertumbuhan Perusahaan. Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan menjadi tanggung jawab strategis yang memegang peranan penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan suatu organisasi.

PGN terus mengelola dan meminimalkan risiko perpajakan yang mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan, pengoptimalan struktur perpajakan, serta penerapan kebijakan internal yang memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman atas pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan membuahkan hasil yang baik bagi Perusahaan, yakni PGN mampu memitigasi risiko pengenaan sanksi perpajakan secara optimal yang dibuktikan dengan tidak adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dalam tiga tahun terakhir.

PGN views taxation as not solely a legal obligation, but as an integral element of financial management that affects the Company's balance and growth. The management and control of taxation aspects constitute a strategic responsibility that plays a vital role in the sustainability and success of the organization.

PGN continues to manage and minimize tax risks through a thorough understanding of tax regulations, optimization of the tax structures, and implementation of internal policies to ensure that the Company's tax rights and obligations are carried out in accordance with the provisions of the relevant tax laws and regulations.

Understanding tax management and control led to positive results for the Company, which is that PGN is able to optimally mitigate the risk of imposition of tax sanctions, as evidenced by no issuance of Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) or Tax Collection Letters (STP) in the last three years.

KODE ETIK PERUSAHAAN
COMPANY'S CODE OF ETHICS

99,57%

Deklarasi Kepatuhan Code of Conduct melalui COMPOLS
Compliance with Code of Conduct Declaration through COMPOLS

PGN memiliki Pedoman Perilaku Etika / *Code of Conduct* (COC) yang telah ditetapkan pada 29 Agustus 2024. COC merupakan kode etik perusahaan dan menjadi acuan berperilaku etis untuk Perwira Subholding Gas dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan. Agar dapat diketahui semua pihak, Pedoman Perilaku Etika secara lengkap dapat dilihat dalam situs web PGN https://pgn.co.id/tata-kelola.

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct)* menjadi acuan Perseroan dalam menghadapi berbagai resiko bisnis sebagaimana yang dimaksud dalam Pedoman ini di antaranya meminimalkan risiko potensi terjadinya konflik kepentingan maupun permasalahan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh Insan Perwira PGN, serta menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja positif yang mendukung perilaku berintegritas dari Insan Perwira PGN termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pencegahan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi dan penyuapan, serta penerapan praktik usaha yang adil dan transparan.

Code of Conduct disusun dalam rangka upaya untuk mencegah ketidakpatuhan dan meminimalkan potensi terjadinya perilaku tidak etis. Pelanggaran atas penegakan penerapan *Code of Conduct* dilakukan melalui mekanisme pembinaan, pemberian sanksi disiplin, serta tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai ketentuan internal Perseroan dan Perjanjian Kerja Bersama. Perseroan telah menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana bagi pekerja maupun pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara rahasia.

Dalam kerangka kerja pengelolaan risiko yang terintegrasi untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan aturan, risiko, dan tata kelola ini secara berkala dimonitor dan dievaluasi guna memastikan penerapan standar etika yang konsisten di seluruh lingkungan Subholding Gas.

PGN has established its Code of Conduct (COC), which was enacted on August 29, 2024. The COC serves as the Company's code of ethics and provides a reference for Gas Subholding Employees in conducting all business activities to achieve the Company's vision, mission, and objectives. To ensure broad accessibility, the complete Code of Conduct is available on PGN's website at https://pgn.co.id/tata-kelola.

The Code of Conduct serves as a reference for the Company in facing various business risks as referred to in this Code, including minimizing the risk of potential conflicts of interest and legal issues resulting from negligence by PGN's employees. It also serves as a means to create and maintain a positive work environment that promotes behavior with integrity by PGN's employees, including compliance with laws and regulations, preventing conflicts of interest, controlling bribery and bribery, and implementing fair and transparent business practices.

The Code of Conduct has been established to prevent non-compliance and minimize the potential for unethical behavior. Violations of the Code of Conduct are addressed through coaching mechanisms, imposition of disciplinary sanctions, and corrective and preventive measures in accordance with the Company's internal regulations and the Collective Labor Agreement. The Company has established a Whistleblowing System (WBS) as a means for employees and stakeholders to report suspected violations confidentially.

Within an integrated risk management framework, which aligns business objectives with regulations, risks, and governance, these are periodically monitored and evaluated to ensure consistent ethical standards are implemented throughout the Gas Subholding.



Penerapan Pedoman Perilaku Etika bersifat wajib bagi Perwira Subholding Gas, termasuk bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini merupakan perwujudan bentuk komitmen manajeman atas/*top level management* untuk menjadi *role model* atas perilaku etis.

Dalam pelaksanaannya, deklarasi pemahaman perilaku etika ini diujikan setiap tahun melalui aplikasi COMPOLS (Compliance Online Systems) dan GOLS (GCG Online Systems). Selain itu Pedoman Perilaku Etika menjadi referensi atas pedoman lain, diantaranya Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Penanggung jawab pelaksanaan penerapan etika ini berada dalam kewenangan Group Head, Legal Counsel and Compliance. Pada tahun 2025 deklarasi kepatuhan COC melalui aplikasi COMPOLS sebagai bentuk pernyataan komitmen atas Kode Etik Perusahaan mencapai 99,57%, membuktikan komitmen seluruh Perwira Subholding Gas yang tinggi akan kepatuhan terhadap kode etik Perusahaan.

The implementation of the Code of Conduct is mandatory for all Gas Subholding Employees, including members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This reflects the commitment of top-level management to act as role models in upholding ethical standards.

In practice, the declaration of understanding and compliance with ethical conduct is assessed annually through the COMPOLS (Compliance Online Systems) and GOLS (GCG Online Systems) applications. The Code of Conduct also serves as a reference for other governance policies, including the Conflict of Interest Guidelines, Gratification Control Guidelines, and the Anti-Bribery Management System Guidelines.

The responsibility for overseeing the implementation of ethical compliance lies in the Group Head, Legal Counsel and Compliance. In 2025, the Code of Conduct compliance declaration submitted through the COMPOLS application reached 99.57%, demonstrating the strong commitment of all Gas Subholding Employees to adherence to the Company's ethical standards.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Perilaku Etika merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang menjadi standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib diterapkan dalam menjalani kegiatan sehari-hari di Perusahaan, sekaligus merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi budaya kerja Perusahaan.

Etika Usaha

Pedoman Perilaku Etika bab Etika Usaha PGN berisi tentang standar perilaku yang harus dilaksanakan pada saat PGN berelasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan Perusahaan dalam hal keterbukaan informasi, perlakuan setara dan pemenuhan hak pemangku kepentingan, anti monopoli, perlindungan hak asasi manusia, gratifikasi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan lain-lainnya. Beberapa Etika Usaha yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas diantaranya:

1. Etika Perseroan dengan Perwira Subholding Gas
2. Etika Perseroan dengan Pelanggan
3. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
4. Etika Perseroan dengan Kreditur
5. Etika Perseroan dengan Kompetitor
6. Etika Perseroan dengan Holding/Anak Perusahaan/Afiliasi
7. Etika Perseroan dengan Pemerintah
8. Etika Perseroan dengan Masyarakat
9. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
10. Etika Perseroan dengan Pemasok Gas Bumi
11. Etika perseroan dengan Media
12. Etika Perseroan dengan Komunitas/Organisasi Profesi

Etika Kerja

Pedoman Perilaku Etika bab Etika Kerja yang menjadi panduan bagi Perwira Subholding Gas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa Etika Kerja yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas sebagai berikut:

1. Komitmen Individu
2. Kerja Sama Antar Perwira Subholding Gas
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
4. Benturan Kepentingan
5. Penerima Hadiah
6. Pemberi Hadiah
7. Perlindungan Aset PGN
8. Mencatat Data dan Pelaporan
9. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan

CODE OF ETHICS PRINCIPLES

Code of Conducts are a set of norms, values, and actions that represent the Company's ideal standards of behavior. This ideal behavior must be implemented in the Company's daily operations while also representing the high values that define the Company's work culture.

Business Ethics

The Business Ethics chapter of PGN's Code of Conducts outlines the behavioral standards that must be upheld when PGN interacts with stakeholders. This is reflected in the Company's efforts in information disclosure, equal treatment and fulfillment of stakeholder rights, anti-monopoly, human rights protection, gratification, intellectual property protection, and other areas. Gas Subholding Employees should adhere to the following business ethics:

1. Company Ethics with Gas Subholding Employees
2. Company Ethics with Customers
3. Company Ethics with Goods and Service Providers
4. Company Ethics with Creditors
5. Company Ethics with Competitors
6. Company Ethics with Holding Companies/Subsidiaries/Affiliates
7. Company Ethics with the Government
8. Company Ethics with the Communities
9. Company Ethics with Shareholders
10. Company Ethics with Natural Gas Suppliers
11. Company Ethics with Media
12. Company Ethics with the Professional Communities/Organizations

Work Ethics

The Work Ethics chapter of PGN's Code of Conducts serves as guidelines for Gas Subholding Employees in performing their duties and responsibilities. Gas Subholding Employees should adhere to the following work ethics:

1. Individual Commitment
2. Cooperation between Gas Subholding Employees
3. Compliance with Laws and Regulations
4. Conflict of Interest
5. Gift Recipients
6. Gift Givers
7. PGN Asset Protection
8. Recording Data and Reporting
9. Maintain the Confidentiality of Company Data and Information

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
12. Aktivitas Politik
13. Integritas Laporan Keuangan
14. Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)
15. Penggunaan Media Sosial

Kebijakan Sosial dan Politik

PGN mengalokasikan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan Corporate Social and Responsibility (CSR) sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN, serta mengacu pada berbagai regulasi terkait TJSL.

Dana tersebut merupakan salah satu komitmen serta kontribusi PGN dalam jangka panjang kepada lingkungan dan masyarakat, khususnya komunitas di sekitar lokasi jaringan (*site*) dan kantor PGN. Informasi secara rinci terkait dengan kegiatan CSR PGN selama tahun 2025 disampaikan pada Laporan Keberlanjutan 2025 yang dibuat secara terpisah namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

PGN juga tidak terlibat dalam kegiatan lobi politik maupun pembiayaan aktivitas politik atas nama Perseroan. PGN telah berkomitmen penuh untuk tidak memberikan dana untuk kegiatan partai politik manapun selaras dengan Surat Edaran Direksi Nomor: 034300.SE/KP.04/HCGS/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta Seluruh Pekerja di Lingkungan Subholding Gas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun demikian, PGN memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk menyalurkan aspirasinya melalui kegiatan politik, namun dengan senantiasa menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menjadi anggota parlemen, legislatif atau eksekutif dengan batasan-batasan tertentu untuk menghindari munculnya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest)*. Perwira yang terlibat dalam aktivitas politik wajib berperilaku etis dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Etika.

10. Intellectual Property Rights
11. Occupational Health and Safety and Environmental Management
12. Political Activities
13. Integrity of Financial Statements
14. Insider Trading
15. Use of Social Media

Sociopolitical Policy

PGN allocates funds to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities according to Regulation of SOEs Minister Number PER-01/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 on Special Assignments and Corporate Social Responsibility (TJSL) Programs of SOEs, referring to multiple regulations related to TJSL.

The funds are proof of PGN's commitment and long-term contribution to the environment and society, especially communities around its sites and offices. Detailed information on PGN's CSR activities throughout 2025 is presented in the 2025 Sustainability Report that was prepared separately but remains an integral part of this Annual Report.

PGN is also not involved in political lobbying activities or financing political activities on behalf of the Company. PGN has fully committed to not providing funds for any political party activities aligned with Circular of the Board of Directors Number: 034300.SE / KP.04 / HCGS/2023 dated November 10, 2023 on the Involvement of the Board of Directors, Board of Commissioners/Board of Supervisors, Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Supervisors and All Employees in the Gas Subholding in the Implementation of General Elections, Regional Head Elections, and/or as Political Party Administrators or Regional Head and Vice Regional Head Officials.

Nevertheless, PGN allows all employees the freedom to express their aspirations through political activities, while always maintaining neutrality, not engaging in practical politics nor becoming members of parliament, the legislature, or the executive branch, with certain limitations to avoid potential conflicts of interest. Employees involved in political activities are obliged to behave ethically in accordance with the Code of Conduct.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Perilaku Etika PGN wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Perwira Subholding Gas di semua level organisasi termasuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan Etika Kerja dan Etika Usaha secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas sehari hari. Pernyataan komitmen kepatuhan kode etik wajib disampaikan setiap tahun melalui aplikasi COMPOLS.

SOSIALISASI KODE ETIK

PGN terus melakukan sosialisasi kode etik melalui berbagai media berikut:

1. *Website* Perusahaan https://pgn.co.id.
2. Portal internal PGN-Quality: www.pgnq.pgn.co.id; yaitu Aplikasi PGN-Q merupakan sistem informasi kumpulan Dokumen Acuan Kerja yang dimiliki oleh Perseroan untuk kepentingan Perwira Subholding Gas dalam memperoleh informasi dokumen yang berkaitan dengan prosedur dan operasi bisnis Perseroan.
3. Aplikasi Compliance Online Systems (COMPOLS) merupakan sistem informasi digital yang diterapkan bagi seluruh Perwira Pertamina Group sebagai sarana untuk meningkatkan *awareness* GCG meliputi pemahaman terhadap etika, saluran pelaporan pelanggaran WBS, benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi/anti penyuapan/korupsi, wajib lapor LHKPN dan digunakan oleh Perwira Subholding Gas untuk menyatakan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Budaya Perusahaan.

STATEMENT OF CODE OF ETHICS APPLICABLE TO ALL ORGANIZATION LEVELS

The Code of Conduct of PGN must be adhered to and implemented by all Gas Subholding Employees at all organization levels, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, in consistently implementing the Work Ethics and Business Ethics as a work culture in daily activities. A statement of commitment to compliance with the code of ethics must be submitted annually through the COMPOLS application.

OUTREACH OF THE CODE OF ETHICS

PGN continues to disseminate the code of ethics through the following media:

1. Company website https://pgn.co.id.
2. PGN-Quality internal portal (ww.pgnq.pgn.co.id), an information system for a collection of Work Reference Documents owned by the Company for Gas Subholding Employees to obtain information on documents related to the procedures and business operations of the Company.
3. The Compliance Online Systems (COMPOLS) application is a digital information system applied for all Pertamina Group Employees as a means to raise GCG awareness including understanding of ethics, WBS channels, conflicts of interest, control of gratification/anti-bribery/corruption, mandatory LHKPN reporting and is used by Gas Subholding Employees to state their commitment to implementing GCG principles and Corporate Culture values.



4. Aplikasi GCG Online System (GOLS) merupakan sistem informasi digital sebagai sarana Perseroan untuk meningkatkan *awareness* GCG dan salah satu sarana bagi Perwira Subholding Gas di AP/Afiliasi untuk menyatakan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Budaya Perusahaan.
5. Melalui media lain yang dimiliki Perseroan, seperti: media sosial, *banner, flyer*, dan media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Perseroan menerapkan dan menegakkan kode etik yang dilakukan antara lain dengan:

1. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di satuan/ unit kerja masing-masing;
2. Perwira Subholding Gas yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Etika Kerja memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama;
3. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/ atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama; dan
4. Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*), yang diatur secara tersendiri.
5. Perseroan menetapkan fungsi FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan) memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.

SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi yang dikenakan untuk setiap pelanggaran etika usaha disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dokumen perikatan terkait lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran etika kerja diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Perwira Subholding Gas.

4. GCG Online System (GOLS) application, a digital information system used by the Company as a means to increase awareness of GCG and by Gas Subholding Employees at Subsidiaries/Affiliates as a means to state their commitment to implementing GCG principles and Corporate Culture values.
5. Other media owned by the Company, such as social media, banners, flyers, and other advertising media in office areas of the Company.

MEASURES TO IMPLEMENT AND ENFORCE THE CODE OF ETHICS

The Company implements and enforces the code of ethics through the following measures:

1. The Board of Directors decides on the imposition of guidance measures, disciplinary sanctions, and/ or corrective and preventive measures that must be implemented by the direct superior in each work unit;
2. Gas Subholding Employees committing deviations from Business Ethics and Work Ethics have a right to be heard before their direct superior prior to the imposition of guidance measures or disciplinary punishment, referring to the Collective Labor Agreement;
3. Guidance measures, disciplinary punishments and/ or corrective and preventive measures are carried out by direct superiors, referring to the Collective Work Agreement;
4. The Company formulates provisions that regulate the mechanisms for reporting suspected deviations (Whistleblowing System), regulated separately;
5. The Company stipulates that the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) has the responsibility and authority to implement an anti-bribery management system.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS

The sanctions imposed for every violation of business ethics are aligned with applicable regulations and other relevant binding documents. Sanctions for violations of work ethics are regulated in the Collective Work Agreement between the Company and Gas Subholding Employees.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2025

PGN memiliki Pedoman Perilaku Etika sebagai acuan perilaku bagi insan Perwira PGN dalam mengelola Perseroan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan pelanggaran kode etik, penanganan insiden atau pelanggaran terkait etika, PGN telah memiliki sistem pelaporan melalui *channel digital Whistleblowing* (www.wbs.pgn.co.id).

Sistem pelaporan ini memungkinkan pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika usaha maupun etika kerja. Insan Perwira PGN yang terbukti melakukan penyimpangan dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan internal PGN dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Hingga akhir tahun 2025, setiap pelanggaran terhadap etika akan diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Pekerja.

MONITORING DAN EVALUASI

Perseroan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Pedoman Perilaku Etika dengan melaksanakan *Assessment* GCG. Perseroan juga terus melakukan dengan berkelanjutan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, serta rekomendasi hasil *assessment* GCG.

VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS AND IMPOSITION OF SANCTIONS IN 2025

PGN has a Code of Conduct as a behavioral guideline for PGN Employees in managing the Company to achieve its vision, missions, and objectives. To manage violations of the code of ethics, incidents, or ethical violations, PGN has a reporting system that can be accessed through the digital Whistleblowing channel (www.wbs.pgn.co.id).

This reporting system allows internal and external parties to report suspected violations of business ethics and work ethics. PGN Employees proven to have committed a violation may be subjected to measures based on the provisions outlined in PGN's internal policies and the Collective Labor Agreement (CLA).

As of the end of 2025, every violation of ethics will be sanctioned in accordance with the Collective Labor Agreement between the Company and Employees.

MONITORING AND EVALUATION

The Company regularly monitors and evaluates the implementation of the Code of Conduct by carrying out GCG Assessment. The Company also continues to conduct it sustainably adhering to applicable laws and regulations, adapting to the Company's developments and needs, as well as recommendations from the GCG assessment results.

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN

DEVELOPMENT OF PGN CORPORATE CULTURE AND INCREASED EMPLOYEE ENGAGEMENT WITH THE COMPANY

PGN berkomitmen penuh menginternalisasi nilai-nilai utama organisasi sebagai fondasi budaya kerja perusahaan. Seluruh Perwira Subholding Gas mengemban peran strategis sebagai *Agent of Change* guna memastikan nilai-nilai tersebut terwujud secara nyata dalam perilaku keseharian. Melalui semangat One Pertamina, PGN melakukan penyelarasan visi, perilaku kerja yang spesifik, serta pencapaian hasil utama yang terukur demi mewujudkan tujuan bersama.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap standar kerja yang unggul, PGN menjadikan prinsip etika kerja perusahaan sebagai basis budaya organisasinya. Seluruh elemen di Subholding Gas berperan aktif mempelopori transformasi demi menciptakan keselarasan di bawah naungan One Pertamina. Upaya ini fokus pada penyatuan tujuan bersama dan penerapan perilaku kunci guna mencapai target-target strategis perusahaan secara kolektif.

Dengan semangat One Pertamina, penerapan budaya Perusahaan di tahun 2025 dituangkan menjadi tiga program utama yakni Program Standard (*One Hour Meeting*), Program Mandatory (*One Action*), serta Program Spesifik (*One Kolab*), yaitu:

1. One Hour Meeting - Clear and Effective Meeting
   Program standar yang dilakukan dengan tujuan membangun budaya *meeting* yang efektif dan efisien di lingkungan Pertamina Group dengan menyusun perencanaan *meeting* terencana, pelaksanaan *meeting* tepat waktu dengan risalah *meeting* dan tindak lanjut yang jelas;
2. One Action - Coffee Morning Briefing Online/Offline (C'Mon Bro)
   Program *mandatory* yang ditujukan untuk memberikan kualitas terbaik dalam setiap aspek pekerjaan, yang bentuknya bisa melalui rapat koordinasi rutin masing-masing Satuan Kerja yang berfokus pada program kerja dan upaya pencapaian target kinerja dengan menekankan kaidah C2NO (Compliance, No Delay, No Mistakes) sebagai nilai utama pelaksanaan *One Action*;
3. One Kolab
   Program spesifik/unggulan dari fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kolaborasi, serta pencapaian dari setiap fungsi yang ada di dalam Pertamina Group dengan membuat program yang disusun berdasarkan poin-poin survei atau peluang bisnis yang dimiliki setiap fungsi.

PGN is consistently committed to internalizing the organization's core values as the foundation of the Company's work culture. All Gas Subholding Employees play a strategic role as Agent of Change, ensuring these values are effectively realized in daily behavior. Through the One Pertamina spirit, PGN aligns its vision, specific work behaviors, and measurable key results to achieve shared goals.

As part of its commitment to upholding high work standards, PGN establishes its work ethics principle as the foundation of its organizational culture. All elements of the Gas Subholding play active roles in pioneering transformation to create harmony under One Pertamina. This effort focuses on the unity of common objectives and implementation of key behaviors to collectively achieve strategic targets of the company.

With the spirit of One Pertamina, implementation of corporate culture in 2025 is outlined into three main programs, namely Standard Program (One Hour Meeting), Mandatory Program (One Action), and Specific Program (One Collaboration) as follows:

1. One Hour Meeting - Clear and Effective Meeting
   It is a standard program that aims to establish an effective and efficient meeting culture within Pertamina Group, achieved by formulating meeting plans and executing meetings on time with minutes of meeting and clear follow-up actions;

2. One Action - Online/In-person Morning Coffee Briefing (C'Mon Bro)
   This mandatory program aims to deliver the highest quality in all aspects of work, which can be implemented through regular coordination meetings within each Work Unit, focusing on work programs and initiatives to achieve performance targets, while emphasizing the C2NO (Compliance, No Delay, No Mistakes) principle as the core value of One Action implementation.
3. One Collaboration
   This specific/flagship program aims to increase the performance, collaboration, and achievement of all functions within Pertamina Group through programs designed based on survey points or business opportunities of every function.

PGN juga melaksanakan kegiatan penguatan program budaya lain sebagai tindak lanjut dari program yang dibuat agar pelaksanaan budaya di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan berjalan terarah dan mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan penguatan program budaya yang dilakukan yaitu:

1. Uji Pemahaman Program Budaya, yaitu program berupa *quiz* atau uji pengetahuan mengenai pelaksanaan Program Budaya dan One Pertamina setiap Pekerja dan Mitra Kerja yang ada di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan dengan tujuan sebagai salah satu sarana meningkatkan *knowledge* serta *awareness* terhadap program budaya yang dilakukan.
2. *Monitoring* dan Evaluasi Program Budaya, yaitu berupa kegiatan *monitoring* pelaksanaan budaya serta kegiatan evaluasi yang dilakukan bersama Leader. Tujuan yang diharapkan adalah implementasi program budaya yang dilaksanakan sesuai dengan semangat One Pertamina, serta kaidah yang sudah ditentukan.
3. *Reward and Consequences*, yaitu implementasi pemberian *reward* serta *consequences* kepada pekerja ataupun mitra kerja atas pelaksanaan budaya di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan. Tujuan yang diharapkan adalah dapat mendorong pekerja maupun mitra kerja untuk melaksanakan budaya dengan lebih baik dan maksimal.
4. *Sharing* Budaya, yaitu *sharing* mengenai pelaksanaan serta dampak dari program budaya yang dilaksanakan antar fungsi/perusahaan/SH. Dengan tujuan dapat menginspirasi dan mendorong pelaksanaan budaya di fungsi yang mendapatkan *sharing*.
5. Artefak Visual, yaitu pengadaan artefak dengan nilai dan semangat One Pertamina, Program Budaya serta Sistem Kerja yang terintegrasi dengan tujuan untuk memastikan *core values* dan program budaya menjadi kebiasaan sehari-hari dari setiap fungsi dalam menjalankan proses bisnisnya.

Perusahaan secara berkesinambungan menginternalisasi Program Budaya AKHLAK Subholding Gas melalui mekanisme evaluasi berkala yang komprehensif, yaitu melalui Program Living Core Values (LCV), dengan tema ONE Pertamina untuk Swasembada Energi Indonesia. Proses ini dijalankan setiap bulan melalui metode self-assessment yang difasilitasi oleh Perwira Ksatriya (Pertamina Wira Komunitas Internalisasi Budaya). LCV memastikan Core Values Perusahaan terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari baik oleh Leader, Pekerja dan Mitra Kerja.

PGN also runs other activities to strengthen cultural programs as a follow-up to programs designed to ensure that culture implemented in each Work Unit/Subsidiary is focused and achieves predetermined targets. Some of the activities include:

1. Cultural Program Comprehension Test, a program in the form of a quiz or comprehension test regarding the implementation of Cultural Program and One Pertamina for each Employee or Work Partner in each Work Unit/Subsidiary, used as a means to increase knowledge and awareness of the ongoing cultural program.
2. Cultural Program Monitoring and Evaluation, comprises an activity to monitor the implementation of culture and an evaluation activity with Leaders. The purpose is to implement a cultural program in accordance with One Pertamina spirit and predetermined rules.
3. Rewards and Consequences, the granting of rewards and consequences to employees and work partners for cultural implementation at every Work Unit/Subsidiary. The purpose is to encourage employees and work partners to implement culture better and optimally.
4. Sharing Session on Culture, a sharing session discussing the implementation and impact of the cultural program carried out across functions/the company/Subholding. It aims to inspire and promote the implementation of culture within functions where the session is held.
5. Visual Artefact, the procurement of artefacts embodying the integrated values and spirit of One Pertamina, the Cultural Program, and Work System, with the purpose of ensuring the adoption of core values and the cultural program as a daily practice across all functions in conducting their business process.

The Company continuously internalizes the Gas Subholding AKHLAK Culture Program through a comprehensive periodic evaluation mechanism, namely through the Living Core Values (LCV) Program, with the theme ONE Pertamina for Indonesian Energy Self-Sufficiency. This process takes places on a monthly basis through a self-assessment method facilitated by Perwira Ksatriya (Pertamina Wira Internalization Culture Community). LCV ensures that the Company's Core Values are well implemented in daily work life by Leaders, Employees, and Work Partners.

Sebagai *agent of change* di setiap Satuan Kerja, Anak Perusahaan, maupun Afiliasi, para Perwira Ksatriya bertanggung jawab memastikan nilai-nilai organisasi terimplementasi secara nyata dan terukur di seluruh lini bisnis.

As agent of change in every Work Unit, Subsidiary, and Affiliate, Perwira Ksatriya are responsible for ensuring the organization's values are implemented in a tangible and measurable manner across all business lines.

Pemberian penghargaan kepada tiga unit kerja/anak perusahaan/afiliasi dengan skor pencapaian terbaik setiap bulannya dalam self assesment merupakan langkah strategis Perusahaan untuk senantiasa memotivasi dan menginspirasi seluruh insan organisasi dalam mengaktualisasikan budaya AKHLAK. Dengan adanya sistem penghargaan ini, diharapkan tercipta iklim kompetisi positif yang mendorong konsistensi implementasi budaya di seluruh lingkungan perusahaan.

Awarding three work units/subsidiaries/affiliates with the best achievement scores each month in self-assessment is a strategic step by the Company to continuously motivate and inspire all organizational people in actualizing the AKHLAK culture. With this award system, it is hoped that a positive competitive climate is created, encouraging consistent implementation of culture within the Company.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, Perusahaan mengadakan Perwira Ksatriya Award setiap satu tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi yang telah mengimplementasikan Budaya Perusahaan secara konsisten.

Based on the self-assessment results, the Company holds the Perwira Ksatriya Award annually to reward Work Units/ Subsidiaries/Affiliates that have consistently practiced Corporate Culture.

Kegiatan ini juga melibatkan seluruh Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi di lingkungan Subholding Gas dengan kategori meliputi The Best Perwira Ksatriya 2025, Top 3 Perwira Ksatriya in Working Unit, dan Top 3 Perwira Ksatriya in Subsidiary and Affiliation.

Furthermore, this activity involves all Work Units/ Subsidiaries/Affiliates within the Gas Subholding. The award categories consist of The Best Perwira Ksatriya of 2025, Top 3 Perwira Ksatriya in Work Units, and Top 3 Perwira Ksatriya in Subsidiaries and Affiliates.

PGN sebagai Subholding Gas ikut serta dalam Assessment Living Core Values (LCV) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero), yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan komitmen para pemimpin/*leader* terhadap pelaksanaan program budaya di lingkungan Pertamina Group.

PGN as a Gas Subholding participates in the Assessment of Living Core Values (LCV) conducted by PT Pertamina (Persero), which aims at evaluating the implementation and commitment of leaders to running cultural programs within Pertamina Group.

LCV dilakukan oleh seluruh pejabat setara Vice President (VP) sejumlah 323 orang dan pejabat setara General Manager (GM) sejumlah 109 orang. Pada LCV tahun 2025, Subholding Gas berhasil memenangkan beberapa kategori sebagai berikut:

1. Best Leader GM Category diraih oleh:
   - Direktur Utama PT PGAS Solution
2. Best Engagement Team yang diraih oleh:
   - Direktur Utama PT Saka Energi Indonesia
   - Group Head, Engineering & Technology.
   - Division Head, Risk Strategy & Integrated Governance; dan
3. The Inspiring Leader diraih oleh:
   - Chief Audit Executive
   - Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia

LCV is carried out by all officials at the Vice President (VP) level, totaling 323 individuals, and officials at the General Manager (GM) level, with 109 individuals. In the 2025 LCV, the Gas Subholding managed to win awards for the following categories:

1. Best Leader for GM Category, won by:
   - President Director of PT PGAS Solution
2. Best Engagement Team, won by:
   - President Director of PT Saka Energi Indonesia
   - Group Head, Engineering & Technology
   - Division Head, Risk Strategy & Integrated Governance
3. The Inspiring Leader, won by:
   - Chief Audit Executive
   - President Director of PT PGN LNG Indonesia

4. Best Incremental Improvement diraih oleh:
   - Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia
5. Best Sustained Performance diraih oleh:
   - General Manager, Sales & Operation Region II

Secara keseluruhan PGN mendapatkan rata-rata skor Assessment LCV Pertamina sebesar 464,14 (dari 500), dengan status *Maturity Level Ownership*. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *leader* yang berada di Subholding Gas sebagai *role model* telah menanamkan budaya dalam setiap elemen organisasi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen. Serta telah berperan aktif dalam menggerakkan seluruh unit/fungsi di bawahnya untuk mengimplementasikan program budaya sesuai dengan *workplan*, dan demi mencapai *success indicator*.

4. Best Incremental Improvement, won by:
   - President Director of PT Transportasi Gas Indonesia
5. Best Sustained Performance, won by:
   - General Manager, Sales & Operation Region II

Overall, PGN achieved an average Pertamina LCV Assessment score of 464.14 (out of 500), with Maturity Level Ownership status. This demonstrates that the average leader in the Gas Subholding, acting as a role model, has instilled culture in every element of the organization and integrated it into the management system. They also play an active role in motivating all units/functions under their jurisdiction to implement cultural programs adhering to the work plan and to achieve success indicators.

PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT*

INCREASING EMPLOYEE ENGAGEMENT

87,47 dari | of 100

Skor *Employee Engagement* 2025
2025 Employee Engagement Score

Dalam rangka meningkatkan *Employee Engagement,* PGN terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja. Berbagai inisiatif perusahaan untuk mencapai hal tersebut di antaranya sebagai berikut:

- ***Respectful Workplace Commitment***, mendukung terciptanya lingkungan kerja yang menjunjung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi serta bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, sesuai dengan *Respectful Workplace Policy*;
- ***Cross Talent Mobility***, program ini bertujuan untuk mendapatkan *talent* yang berpengalaman di lingkungan holding migas, penguatan kompetensi, dan *melting culture;*
- ***Growth Corner***, merupakan salah satu program budaya di Perusahaan Gas Negara (PGN) yang hadir untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan diri para-Perwira di luar kompetensi utama yang terkait dengan pekerjaan;

In a bid to enhance Employee Engagement, PGN consistently strives to create a work environment that promotes employee productivity, security, safety, and health. Various company initiatives introduced to achieve this include as follows:

- **Respectful Workplace Commitment,** as a manifestation of PGN's commitment to promoting the creation of a work environment that upholds diversity, equity, and inclusion and is free from discrimination, violence, and harassment, in accordance with the Respectful Workplace Policy;
- **Cross Talent Mobility**, aims at creating experienced talents within the oil and gas holding, enhancing competencies, and melting culture;
- **Growth Corner**, a cultural program at Perusahaan Gas Negara (PGN) designed to support and facilitate the Employees' development beyond their job-related competencies.

- ***Agent of Change* (AOC)**, merupakan komunitas internalisasi budaya yang terdiri dari perwakilan setiap Satuan Kerja/ Anak Perusahaan/ Afiliasi. AOC bertugas untuk menjadi agen perubahan dalam menerapkan nilai-nilai budaya di masing-masing Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi, sehingga *core values* dapat dapat terinternalisasi ke seluruh Perwira Subholding Gas; dan
- **Komunitas Keberagaman dan Inklusi Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa dan Integritas (Komunitas Pertiwi) Chapter Subholding Gas**, yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan Perwira perempuan dalam meningkatkan kemampuan dan menyiapkan kader pemimpin berkontribusi ke sosial masyarakat, perusahaan, dan dunia. Kegiatan Pertiwi mencakup beberapa bidang untuk mencapat tujuan Pertiwi yaitu: Bidang Development, Bidang Wellbeing, Bidang Sustainability, dan Bidang Partnership & Communication.
- **Badan Pengurus Olahraga dan Seni (Baporseni) Subholding Gas**, yang dibentuk dalam rangka kontinuitas peningkatan kesehatan jasmani dan rohani serta menyalurkan bakat pekerja dalam bidang olahraga dan seni sehingga dapat menyokong *Employee Wellbeing*, yang dapat menunjang peningkatan kinerja pekerja.

- **Fasilitas Olahraga, Kesehatan, dan *Employee Assistance Program*.** Perusahaan menyediakan fasilitas olah raga dan fasilitas kesehatan untuk Pekerja untuk menjamin kebugaran dan kesehatan Pekerja. Selain itu, Perusahaan menyediakan fasilitas *Employee Assistance Program* sebagai sarana Pekerja untuk meningkatkan kesehatan mental Pekerja dan keluarga.

Program-program tersebut turut berkontribusi dalam meningkatkan *employee engagement* pekerja. Berdasarkan hasil *Employee Engagement Survey* pada 2025, PGN mendapatkan skor *Employee Engagement* sebesar 87,47 dari 100 (2024: 80,68 dari 100) tertinggi di Pertamina Group. Beberapa indikator penilaian yang digunakan antara lain Reputasi Organisasi, Kepemimpinan, Pekerjaan, Karir dan Pengembangan Diri, Kebutuhan Dasar, dan Hubungan Sosial.

Pencapaian tersebut menjadi mencerminkan bahwa pekerja PGN merasa terlibat dan terikat secara positif dengan pekerjaan yang diemban, dan sepakat dengan tujuan Perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung pekerja PGN akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja perusahaan.

- **Agent of Change (AOC)**, a cultural internalization community comprising representatives from each Work Unit/Subsidiary/Affiliate. AOC serves as agents of change in adopting cultural values within their respective Work Unit/Subsidiary/Affiliate, allowing core values to be internalized by all Gas Subholding Employees; and

- **Diversity and Inclusion Community for Resilient, Inspirational, Dignified, and Principled Women of Pertamina (Komunitas Pertiwi) Gas Subholding Chapter**, aims at promoting equality for female Employees in developing skills and preparing prospective leaders that contribute to the society, the company, and the world. To achieve its objectives, the activities of Komunitas Pertiwi cover multiple sectors, namely Development, Wellbeing, Sustainability, and Partnership & Communication.

- **The Sports and Arts Management Board (Baporseni) of Gas Subholding**, which was formed to continuously improve employee physical and mental health and channel employee talents in sports and arts, promotes Employee Wellbeing, thereby supporting improved employee performance.

- **Sports, Healthcare, and Employee Assistance Program Facilities.** The Company provides sports facilities and healthcare facilities for Employees to ensure their fitness and health condition. Additionally, the Company provides an Employee Assistance program facilities to help Employees and their families improve their mental health.

Such programs also contribute to enhancing employee engagement. According to the 2025 Employee Engagement Survey, PGN received an Employee Engagement score of 87.47 out of 100 (2024: 80.68 out of 100), the highest in Pertamina Group. The assessment indicators include Organizational Reputation, Leadership, Work, Career and Self-Development, Basic Needs, and Social Relations.

This achievement shows that PGN's employees have felt engaged, maintained a positive connection with their job, and aligned with the objectives of the Company. Consequently, it suggests that PGN employees will continue to strive to enhance the company's performance.

PROGRAM ESOP/MSOP
ESOP/MSOP PROGRAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 November 2003, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 5 dari Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui program kepemilikan saham oleh karyawan (ESA) dan program kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) dengan syarat dan ketentuan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tersebut, Perusahaan menetapkan 3 program untuk peserta ESA, sebagai berikut:

1. Memberikan peserta ESA saham sebagai penghargaan atas kontribusi kepada Perusahaan masing-masing sebesar rata-rata dua kali jumlah penghasilan bulanan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
2. Peserta ESA juga dapat membeli saham dengan pembayaran menggunakan bonus tahun 2003 dengan sebanyak-banyaknya tiga kali penghasilan bulanan. Pembelian saham melalui cara ini memperoleh diskon sebesar 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
3. Apabila peserta ESA bersedia menggunakan haknya pada program 1 dan 2, maka peserta ESA diberi kesempatan membeli saham secara tunai menggunakan dana sendiri dengan diskon 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di bursa efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.

Berdasarkan rapat Dewan Komisaris pada 17 November 2003, yang berhak mengikuti program MSOP adalah Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen senior pada tingkatan tertentu. Dalam program ini, jumlah saham baru yang akan diterbitkan tidak melebihi 5% dari modal ditempatkan dan disetor dengan maksimum periode penerbitan saham 3

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 3, 2003, as stated in Deed Number 5 by Fathiah Helmi, S.H., shareholders approved the employee stock ownership program (ESA) and the management stock ownership program (MSOP), with terms and requirements stipulated by the Board of Commissioners.

Based on the resolution of the EGMS, the Company set 3 programs for ESA participants, namely:

1. ESA participants are provided shares as a reward for their contribution to the Company, each amounting to an average of twice their monthly income. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the Company's stock listing date on the Stock Exchange and cannot be redeemed for cash by ESA participants.
2. ESA participants may also purchase shares using their 2003 bonus, up to three times their monthly income. An 18% discount on the offering price is given for share purchases through this method. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the Company's stock listing date on the Stock Exchange and cannot be redeemed for cash by ESA participants.
3. Should ESA participants be willing to use their rights for programs 1 and 2, ESA participants are allowed to buy shares with cash using their own funds with an 18% discount on the offering price. Shares for this program cannot be sold within 1 year after the Company's stock listing date on the Stock Exchange and cannot be redeemed for cash by ESA participants.

Based on the meeting of the Board of Commissioners on November 17, 2003, eligible participants of the MSOP program are the Board of Directors, the Board of Commissioners, and senior management at certain levels. In this program, the number of new shares to be issued does not exceed 5% of the issued and paid-up capital, with

tahun dan dilaksanakan dalam 3 tahap dengan jangka waktu pelaksanaan program keseluruhan selama 5 tahun dengan perincian berikut:

1. Tahap Pertama
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 50% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham 110% dari harga penawaran umum perdana atau sebesar Rp1.650. Pemberian hak dilakukan pada 15 Desember 2003 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Desember 2004.
2. Tahap Kedua
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan Dewan Komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata- rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2005 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2006.
3. Tahap Ketiga
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata-rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2006 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2007. Program MSOP tahap pertama sebanyak 108.024.675 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2005, tahap kedua sebanyak 53.930.825 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2007 dan tahap ketiga sebanyak 53.551.388 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2008.

Seluruh tahapan program ESOP/MSOP tersebut di atas telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2025, tidak terdapat program kepemilikan saham ESOP/MSOP oleh karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris PGN.

a maximum share issuance period of 3 years. The program is executed in 3 stages with an overall implementation of 5 years with the following details:

1. First Stage
   The maximum number of shares to be issued is calculated at 50% x 5% x the total issued and paid-up capital, with a stock exercise price of 110% of the initial public offering price or Rp1,650. The rights were granted on December 15, 2003 with a vesting period of 1 year. The 1-year exercise period commenced on December 15, 2004.
2. Second Stage
   The maximum number of shares to be issued is calculated at 25% x 5% x the total issued and paid-up capital, with a stock exercise price that will be determined by the Board of Commissioners, provided that the minimum price is equal to the average stock price over the 25 trading days prior to the announcement of the relevant general meeting of shareholders. The rights were granted on February 15, 2005 with a vesting period of 1 year. The 1-year exercise period commenced on February 15, 2006.
3. Third Stage
   The maximum number of shares to be issued is calculated at 25% x 5% x the total issued and paid-up capital, with a stock exercise price that will be determined by the Board of Commissioners, provided that the minimum price is equal to the average stock price over the 25 trading days prior to the announcement of the relevant general meeting of shareholders. The rights were granted on February 15, 2006 with a vesting period of 1 year. The 1-year exercise period commenced on February 15, 2007. The first stage of the MSOP program, with 108,024,675 shares, was completed in 2005. The second stage, with 53,930,825 shares, was completed in 2007. Finally, the third stage, with 53,551,388 shares, was completed in 2008.

All stages of the ESOP/MSOP program mentioned above have been completed. In 2025, there was no ESOP/MSOP stock ownership program for employees, the Board of Directors, or the Board of Commissioners of PGN.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN
MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE POLICY

PGN telah mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada publik, paling lambat tiga hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan. Koordinasi pelaporan dilaksanakan melalui *Corporate Secretary*.

PGN has disclosed the share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company Profile chapter of this Annual Report. In accordance with the OJK regulations, the Company has a policy requiring public disclosure of share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than three working days after the ownership of shares or any change in ownership of the Company's shares. The coordination of such reporting is handled by the Corporate Secretary.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES

PGN memiliki dan menerapkan pedoman benturan kepentingan (*Conflict of Interest* /COI) sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Benturan Kepentingan tanggal 31 Desember 2024. Isi dari Pedoman Benturan Kepentingan yang dimiliki Perusahaan di antaranya berupa:

PRINSIP DASAR

1. Insan PGN yang di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
2. Setiap potensi maupun kenyataan terjadinya Benturan Kepentingan wajib dilaporkan kepada Atasan Langsung.

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi Benturan Kepentingan yang dapat dihadapi oleh insan PGN, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Situasi yang menyebabkan Insan Perwira PGN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cendera mata atau hiburan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perseroan dan peraturan perundangan yang menyebabkan adanya suatu keputusan/tindakan atau jabatan yang menguntungkan pihak Pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.

PGN has established and implemented Conflict of Interest (COI) Guidelines as stipulated in the Conflict of Interest Guidelines dated December 31, 2024. The provisions contained in the Company's Conflict of Interest Guidelines include, among others:

BASIC PRINCIPLES

1. PGN employees, who in carrying out their activities have the potential to face Conflict of Interest, are not allowed to participate in the decision-making process.
2. Any potential or actual occurrence of a Conflict of Interest must be reported to the Direct Superior.

SITUATIONS OF CONFLICT OF INTEREST

Situations of conflict of interest that may be encountered by PGN employees, include, but are not limited to:

1. Situations in which PGN Employees receive gratuities or provide or accept gifts/souvenirs, or entertainment in violation of the Company's internal provisions and applicable laws and regulations, resulting in decisions/actions, or positions that provide an undue benefit to the Giver.
2. Situations in which Company assets are used for personal/group/third-party interests.

3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau informasi Perseroan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
5. Situasi rangkap jabatan yang dimana keputusan atau tindakan yang diambil dapat menyebabkan Insan Perwira PGN tidak dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel dan/atau mengakibatkan adanya keuntungan pribadi/pihak lain yang merugikan Perseroan.
6. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Perwira PGN atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
7. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
8. Situasi dimana pihak yang melakukan penilaian/audit adalah pihak yang sama dengan pihak yang sedang dinilai/ diaudit.
9. Situasi yang memanfaatkan jabatan di Perseroan untuk kepentingan pekerjaan yang lain di luar Perseroan sehingga merugikan Perseroan.
10. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perseroan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.
11. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perwira PGN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perwira PGN sehubungan dengan jabatannya di Perseroan.
12. Situasi di mana Insan Perwira PGN memiliki hubungan sedarah dalam hubungan Keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Setiap Insan PGN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melakukan pelaporan atau pernyataan (*disclosure*) segera pada saat dialaminya situasi Benturan Kepentingan melalui cara sebagai berikut, yaitu menggunakan aplikasi COMPOLS atau GOLS.
2. Melakukan pelaporan atau pernyataan (*disclosure*) segera pada saat dialaminya situasi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung dan Atasan Langsung melaporkannya ke fungsi Fungsi Human Capital dan Fungsi GCG.
3. Perwira PGN atau pihak lainnya yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui saluran pelaporan yang disediakan oleh Perseroan termasuk *Whistleblowing System*.

3. Situations in which confidential position-related information or Company information is used for personal or group interests.
4. Situations in which position authority is misused for personal/group/third-party interests.
5. Situations involving concurrent positions in which decisions or actions taken may prevent PGN Employees from performing their duties in a professional, independent, and accountable manner and/or result in personal/third-party gains that are detrimental to the Company.
6. Situations in which special access is granted to PGN Employees or certain parties to circumvent applicable procedures and provisions.
7. Situations in which the supervision process does not comply with established procedures due to influence or expectations from the supervised party.
8. Situations in which the party conducting an assessment/ audit is the same party being assessed/audited.
9. Situations in which a position within the Company is used for the benefit of external employment, to the detriment of the Company.
10. Situations in which prospective suppliers of goods or services are granted access to information beyond Company-determined limits, special treatment, or opportunities to secure their win in the Company's procurement process.
11. Situations in which there is an affiliation/familial relationship between PGN Employees and other parties who have an interest in decisions and/or actions taken by PGN Employees in connection with their positions within the Company.
12. Situations in which PGN Employees have a blood or family relationship with a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners of the Company.

CONFLICT OF INTEREST REPORTING

1. Every PGN Employee who has the potential to be, and or is, in a Conflict of Interest situation is required to submit a report or disclosure immediately upon experiencing the Conflict of Interest situation, by the following methods, namely using the COMPOLS or GOLS applications.
2. Report or disclose any conflict of interest situation immediately after experiencing it to the Direct Superior, who will then report it to the Human Capital Function and GCG Function.
3. PGN employees or other parties who are aware of violations of the Conflict of Interest Guidelines may report them through the reporting channels provided by the Company, including the Whistleblowing System.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM



wbs.pgn.co.id

***Whistleblowing System* PGN**
PGN's Whistleblowing System

Sejalan dengan komitmen dalam implementasi GCG, PGN senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, termasuk dalam hal pelaporan pelanggaran. Perseroan memiliki dan menjalankan Pedoman *Whistleblowing System* Nomor P-002/ A011 tanggal 2 Agustus 2021.

Whistleblowing System merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di Perusahaan yang tidak dapat terselesaikan melalui prosedur normal.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing System* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga pihak-pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran.

Tujuan pelaksanaan *Whistleblowing System* ini sebagai berikut:
1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari *stakeholder*;
2. Sebagai saluran pelaporan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur normal organisasi;
3. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai;
4. Menghindari publikasi negatif terhadap Perseroan;
5. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perseroan dengan *stakeholder* sebagai pelaku usaha dan mitra Perseroan;
6. Sebagai salah satu upaya pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Aligned with its commitment to implement GCG, PGN consistently takes into consideration the interests of the stakeholders based on the principles of fairness and equality, including in terms of reporting violations. The Company has and implements the Guidelines for Whistleblowing System Number P-002/ A011 dated August 2, 2021.

The Whistleblowing System serves as a means for witnesses to report information regarding violations that are suspected to have occurred within the Company and cannot be resolved through normal procedures.

Reports obtained through the Whistleblowing System mechanism must be addressed and followed-up, including the imposition of appropriate sanctions, ensuring a deterrent effect for violators and other parties who may consider similar misconduct.

The purpose of implementing Whistleblowing System are as follows:
1. As a basis or implementation guideline in handling reporting violations from stakeholders;
2. As a channel for reporting matters that cannot be resolved through normal organizational procedures;
3. Ensuring the implementation of an effective mechanism for resolving whistleblowing within an adequate period;
4. Avoiding negative publications against the Company;
5. Supporting the principle of equality (fairness) in the relationship between the Company and stakeholders as the Company's business actors and partners;
6. As one of the efforts to disclose various issues in the Company that are not in accordance with the ethical standards that apply in the Company.

Sepanjang tahun 2025, PGN telah melaksanakan sosialisasi terkait *Whistleblowing System* setiap tahun kepada para karyawan yang disampaikan melalui:

1. Agenda *entry meeting audit*;
2. *Broadcast email* setiap bulan;
3. Survei Indeks Fraud Perception (PERFECT) pada bulan November-Desember 2025;
4. Sosialisasi *Fraud Awareness* kepada seluruh pekerja PGN dan Anak Perusahaan PGN.

CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Ketentuan dalam Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan terdiri dari:

1. Kewajiban Perusahaan menerima dan menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran. Dalam hal ini Perusahaan:
   a. Wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal;
   b. Wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak (anonim);
   c. Menyediakan saluran pengelolaan pelaporan pelanggaran yaitu melalui Komite Etik; dan
   d. Komite Etik akan meneruskan pelaporan pelanggaran sesuai dengan konteks pihak yang dilaporkan.
2. Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, yaitu:
   c. Pelaporan pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi maupun Perwira Subholding Gas;
   d. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan pada saat/di luar jam kerja;
   e. Pelaporan pelanggaran disampaikan melalui *e-mail, website*, surat, atau datang langsung ke Komite Etik;
   f. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis;
   g. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan pelanggaran;

Throughout 2025, PGN conducted dissemination related to the Whistleblowing System to employees annually, which was delivered through:

1. Audit entry meeting agenda;
2. Monthly email broadcast;
3. Fraud Perception Index Survey (PERFECT) in November-December 2025;
4. Fraud Awareness dissemination to all PGN employees and Subsidiaries.

MECHANISM TO SUBMIT WHISTLEBLOWING

The provisions in the Management of Company Whistleblowing are as follows:

1. The Company is obligated to receive and resolve Whistleblowing. In this regard, the Company:
   a. Is required to receive reports of violations from both internal and external parties;
   b. Is required to receive and resolve whistleblowing from whistleblowers who disclose their identity as well as those who remain anonymous;
   c. Provides a whistleblowing management channel through the Ethics Committee; and
   d. The Ethics Committee will forward the whistleblowing in accordance with the context of the reported party.
2. The Company has established a mechanism for the Receipt of Whistleblowing, as follows:
   a. Whistleblowing are submitted to the Ethics Committee, including those concerning the Board of Commissioners, Board of Directors, or Gas Subholding Employees;
   b. Whistleblowing may be submitted during/outside working hours;
   c. Whistleblowing may be submitted via email, website, letter, or by directly visiting the Ethics Committee;
   d. The Company accepts every whistleblowing submitted by stakeholders and/or their representatives, whether delivered verbally or in writing;
   e. The Company provides an explanation regarding the policies and procedures for resolving whistleblowing when stakeholders and/or their representatives submit a report;

h. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa resmi lainnya dengan mekanisme sebagai berikut:
   - Melalui *website* Perseroan yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: https://wbs.pgn.co.id;
   - Melalui *e-mail* pengelola WBS yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: pgn.etik@pertamina.com; dan
   - Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan c.q Komite Etik PGN, dengan cara diantar langsung atau pos ke Perseroan dengan alamat: Komite Etik PT PGN Tbk, Gedung Graha PGAS Lantai 3, Jl. KH Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 11140. Sistem *whistleblowing* tersebut tersedia bagi seluruh karyawan, vendor, pemasok, masyarakat, dan pemangku lainnya.

3. Pelaporan pelanggaran secara tertulis disarankan untuk dilengkapi bukti pendukung yang berkaitan dengan bukti indikasi awal terjadinya pelanggaran;
4. Jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas maka Perseroan memberikan tanda terima, dan jika pelaporan pelanggaran tidak dilengkapi dengan identitas maka akan dicatat dalam daftar pelaporan pelanggaran;
5. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
   a. Fotokopi bukti identitas *stakeholders* dan perwakilan *stakeholders*;
   b. Surat Kuasa dari *stakeholders* kepada perwakilan *stakeholders* yang menyatakan bahwa *stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*; dan
   c. Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
6. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pelaporan.

f. Alleged violations may be reported in writing or verbally in Bahasa Indonesia or other official languages through the following mechanism:
   - Through the Company's website, which operates to receive whistleblowing every day (Monday-Sunday), 24 hours a day, at the following URL: https://wbs.pgn.co.id;
   - Through the WBS administrator's email, which operates to receive whistleblowing every day (Monday-Sunday), 24 hours a day, at the following address: pgn.etik@pertamina.com; dan
   - Sending an official letter addressed to the Company c.q. PGN Ethics Committee, either by hand delivery or by post to the Company at the following address: Komite Etik PT PGN Tbk, Gedung Graha PGAS Lantai 3, Jl. KH Zainul Arifin No 20, Jakarta Barat 11140. The whistleblowing system is available to all employees, vendors, suppliers, the public, and other stakeholders.

3. Written whistleblowing are recommended to be accompanied by supporting evidence related to the preliminary indication of the alleged violation;
4. If a whistleblowing is submitted in writing and includes the whistleblower's identity, the Company will issue an acknowledgment of receipt. If the report is submitted without identity details, it will be recorded in the whistleblowing database;
5. If a whistleblowing is submitted by a stakeholders' representative, in addition to the documents mentioned above, the following documents must also be provided:
   a. A copy of Identity document of the stakeholder and the representative;
   b. A Power of Attorney from the stakeholder to the representative stating that the stakeholder authorizes the representative to act for and on behalf of the stakeholder; and
   c. If the stakeholder's representative is an institution or legal entity, supporting documents must be attached confirming that the person submitting the whistleblowing is authorized to represent such institution or legal entity.
6. The Company is required to provide proof of receipt of the whistleblowing to the stakeholders and/or their representatives who submit the report.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Dalam Pedoman *Whistleblowing System*, perlindungan bagi Pelapor menjadi hal yang wajib diperhatikan. Beberapa hal yang diatur sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor pelanggaran;
2. Perlindungan pelapor pelanggaran dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan Pelapor yang meliputi:
   a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan; dan
   b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
4. Terhadap pelapor pelanggaran yang merupakan pekerja di lingkungan perusahaan akan mendapatkan perlindungan dari upaya balas dendam (*retaliation*) yang berpotensi timbul, antara lain:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan
   d. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi (*personal file record*).

PENANGANAN PENGADUAN

Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, di antaranya:

1. Pelaporan Pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PGN Group baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja Perusahaan atau *Stakeholders* lain. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Komite Etik melalui sarana/ media Pelaporan Pelanggaran resmi yang telah disediakan baik yang disampaikan pada saat/di luar jam kerja, secara lisan maupun tertulis dan dengan identitas maupun tanpa identitas (anonim).
2. Dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran, pelapor disarankan untuk melampirkan bukti/indikasi awal yang dapat berupa dokumen, surat, barang maupun informasi yang dapat menunjukkan bahwa suatu dugaan pelanggaran telah terjadi untuk memudahkan proses verifikasi.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh Perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas, pelapor diminta untuk menyerahkan dokumen tambahan sebagai berikut:
   a. Fotokopi identitas *Stakeholders* dan Perwakilan *Stakeholders*.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

In the Whistleblowing System Guidelines, protection for the Whistleblower is a mandatory concern. Several provisions governing whistleblower protection are as follows:

1. The Company is obligated to protect the whistleblowers;
2. Whistleblower protection is aimed to encourage whistleblowing;
3. Whistleblower protection comprises:
   a. Assurance of confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report; and
   b. Assurance of safety for the whistleblower and the whistleblower's family.
4. For whistleblowers who are employees within the Company, protection is provided against potential acts of retaliation, including but not limited to:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion in position or rank;
   c. Harassment or discrimination in any form; and
   d. Adverse remarks in personal file record.

GRIEVANCE RESPONSE

The Company regulated the mechanism for Receiving Whistleblowing, including:

1. Whistleblowing is submitted to the Ethics Committee for alleged violations that occur within PGN Group, whether involving the Board of Commissioners, Board of Directors, Company Employees or other Stakeholders. whistleblowing is addressed to the Ethics Committee through the official whistleblowing facilities/media that have been provided, whether submitted during/outside of working hours, verbally or in writing and with identity or anonymous.
2. In submitting a Whistleblowing, the whistleblower is advised to attach preliminary evidence/indications which may be in the form of documents, letters, goods, or information showing an alleged violation occurred to facilitate the verification process.
3. If the Whistleblowing is submitted by the Stakeholder's Representative, then in addition to the above documents, the whistleblower is requested to submit additional documents as follows:
   a. A copy of the identity document of Stakeholder and the Representative.

b. Surat kuasa dari *Stakeholders* kepada Perwakilan *Stakeholders* yang menyatakan bahwa *Stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *Stakeholders*. Jika Perwakilan *Stakeholders* adalah Lembaga atau badan Hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili Lembaga atau badan hukum tersebut.

4. Komite Etik akan membuat tanda terima Pelaporan Pelanggaran dan menyampaikan tanda terima tersebut kepada Pelapor Pelanggaran atau perwakilannya. Terhadap Pelaporan Pelanggaran yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor (anonim), Komite Etik akan mencatat pelaporan tersebut ke dalam daftar/database Pelaporan Pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik akan menindaklanjuti setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan
   Komite Etik menerima setiap pelaporan pelanggaran dari pelapor melalui berbagai saluran pelaporan WBS yang telah disediakan, melakukan pengelolaan database pelaporan dan *monitoring* atas status setiap Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima.
2. Verifikasi Laporan
   Komite Etik melaksanakan pemeriksaan administratif atas Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima melalui WBS untuk melihat terpenuhi atau tidaknya kriteria pelanggaran yang dilaporkan untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Penelaahan Laporan
   Komite Etik melakukan pemeriksaan substantif atas Pelaporan Pelanggaran yang diterima dan telah memenuhi kriteria, untuk melihat kecukupan bukti permulaan untuk dapat dilakukan investigasi lebih lanjut.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Perusahaan membentuk Komite Etik sebagai organ independen yang berfungsi untuk mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PGN Group. Dalam kondisi Perusahaan belum membentuk unit khusus pengelola WBS (Komite Etik), maka pengelolaan WBS diserahkan kepada Satuan Kerja Audit Internal, dengan personil yang dapat berasal dari fungsi atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi Internal Audit, Hukum, GCG, dan Sumber Daya Manusia.

b. A Power of Attorney from the Stakeholder to the representative stating that the Stakeholder authorizes the representative to act for and on behalf of the Stakeholder. If the Stakeholder's Representative is an institution or legal entity, supporting documents must be attached confirming that the person submitting the Whistleblowing is authorized to represent such institution or legal entity.

4. The Ethics Committee will make a receipt of the Whistleblowing and provide the receipt to the Whistleblower or the representative. For the Whistleblowing that is not complemented by the whistleblower's identity (anonymous), the Ethics Committee will record the report into the Whistleblowing database.

In carrying out its duties, the Ethics Committee will follow up on every Whistleblowing received through the following stages:

1. Receipt of Report
   The Ethics Committee receives every whistleblowing from the whistleblowers through various WBS reporting channels that have been provided, manages the reporting database, and monitors the status of each Whistleblowing received.
2. Verification of Report
   The Ethics Committee conducts an administrative review of Whistleblowing received through the system to determine whether the reported violation criteria are met for further actions.
3. Review of Report
   The Ethics Committee conducts a substantive review of Whistleblowing received and met the criteria to assess the adequacy of preliminary evidence for further investigation.

PARTIES AUTHORIZED TO MANAGE GRIEVANCES

The Company has established an Ethics Committee as an independent body tasked with managing the Whistleblowing System (WBS) within the PGN Group. In circumstances where the Company has not yet formed a dedicated WBS management unit (Ethics Committee), the management of the WBS is assigned to the Internal Audit Unit, with personnel drawn from functions or work units responsible for Internal Audit, Legal, GCG, and Human Resources.

Saat ini, pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS di Perusahaan dilaksanakan oleh Komite Etik yang berasal dari unsur pekerja Satuan Kerja Internal Audit PGN, yang independensi dan objektivitasnya diatur dalam Piagam Audit Internal.

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA

Apabila terdapat Pelaporan Pelanggaran yang didapati telah memenuhi unsur kecukupan bukti permulaan, maka atas rekomendasi Komite Etik, Perusahaan dapat membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi atas permasalahan atau pelanggaran yang dilaporkan. Komite Etik akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut seluruh Pelaporan Pelanggaran yang diterima.

PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, terdapat 22 pengaduan yang diterima melalui sistem pelaporan *Whistleblowing* dan tujuh laporan pengaduan yang berasal dari tahun 2024, yang telah dikelola dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Currently, the Company's Whistleblowing System (WBS) is managed by the Ethics Committee, whose members are drawn from employees of the PGN Internal Audit Unit. Their independence and objectivity are governed under the Internal Audit Charter.

RESULTS OF GRIEVANCE RESPONSE AND FOLLOW-UP ACTIONS

If a whistleblowing is found to have met the minimum preliminary evidence requirements, upon the recommendation of the Ethics Committee, the Company may establish an Investigation Team to conduct an investigation into the reported issue or violation. The Ethics Committee will monitor the follow-up actions for all whistleblowing received.

GRIEVANCES THROUGH THE WHISTLEBLOWING SYSTEM IN 2025

Throughout 2025, a total of 22 grievances were received through the Whistleblowing reporting system, along with seven grievance reports carried over from 2024. All reports have been managed and followed up in accordance with the applicable procedures.

PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM TAHUN 2025
Grievances Through the Whistleblowing System in 2025

No		Uraian Description	Total
A.		*Outstanding* pelaporan WBS per 31 Desember 2024/ Outstanding WBS reports as of December 31, 2025	7
B.		Tambahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Additional WBS reports up to December 31, 2025	22
C.		Total pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Total WBS reports up to December 31, 2025	29
D.		Selesai ditindaklanjuti hingga 31 Desember 2025/ Completed / Followed up as of 31 December 2025	8
E.	E1	*Outstanding* pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Outstanding WBS reports as of December 31, 2025	21
	E2	Verifikasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Verification stage as of December 31, 2025	17
		Penelaahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Review stage as of December 31, 2025	4
	E3	Investigasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2025/ Investigation stage as of December 31, 2025	-

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

PGN melakukan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016.

PGN prepares its Consolidated Financial Statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK), as well as Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016.

Guna menjamin integritas data, PGN menerapkan sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICOFR) yang berbasis pada kerangka kerja COSO dan didukung oleh sistem informasi akuntansi yang terintegrasi secara modular.

To ensure data integrity, PGN implements an Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) system based on the COSO framework and supported by a modular, integrated accounting information system.

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh Accounting Group yang terdiri dari tenaga akuntan profesional bersertifikat (seperti CA, CPA, atau Ak). Selain kompetensi teknis, personel PGN secara rutin mengikuti pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Terkini untuk memastikan bahwa praktik pelaporan PGN selaras dengan penerapan standar terkini.

The Financial Statements are prepared by the Accounting Group, comprising certified professional accountants (such as CA, CPA, or Ak). In addition to technical competence, PGN personnel regularly participate in updates and training on the latest Financial Accounting Standards, ensuring that PGN's reporting practices remain aligned with current standards.

Proses ini juga melalui mekanisme peninjauan berlapis serta pengawasan oleh Komite Audit, untuk memastikan bahwa setiap informasi keuangan yang disajikan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

This process is also subject to layered review mechanisms and oversight by the Audit Committee to ensure that all financial information presented is transparent, accurate, and accountable to all stakeholders.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

PGN melakukan pemenuhan terhadap kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan selaras dengan ketentuan berlaku. Upaya ini dilakukan dengan penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web www.pgn.co.id.

PGN fulfills its obligations regarding transparency and disclosure of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations. This is carried out through the submission and publication of information via print media as well as the Company's website at www.pgn.co.id

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tanggal yang telah ditetapkan serta telah dipublikasikan pada situs web PGN.
2. Laporan Tahunan PGN yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, investor, *rating agency*, dan lainnya, serta dipublikasikan melalui situs web Perusahaan.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

1. The Quarterly Published Financial Statements have been submitted to the regulators in accordance with the applicable regulations and prescribed deadlines, and have been published on PGN's website.
2. PGN's Annual Report is prepared and presented in compliance with applicable provisions, submitted to regulators, investors, rating agencies, and other relevant parties, and published through the Company's website.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, di antaranya adalah Visi, Misi, Budaya Perusahaan, Komposisi dan Profil Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web PGN.
2. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, atau bentuk tertulis lainnya dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan pada situs web PGN, media sosial, dan lainnya agar investor, dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perusahaan.
3. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan Perusahaan dipublikasikan pada Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S NON-FINANCIAL CONDITION

1. Corporate governance information—such as the Company's Vision, Mission, Corporate Culture, Composition and Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as internal governance provisions ranging from the Articles of Association to the Charters of Board Committees—is published on PGN's website.
2. Information regarding the Company's products and services is disclosed through the Annual Report and other written materials in electronic form available on PGN's website, social media platforms, and other channels, enabling investors and the general public to easily access information about the Company's products and services.
3. Information on the transparency of the Company's ownership structure is published in the Annual Report and on the Company's website.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

PGN berkomitmen untuk terus memberikan data dan informasi terbaru mengenai Perusahaan kepada Publik, selaras dengan pemenuhan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi yang disampaikan kepada publik atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakses melalui media-media berikut ini:

1. Pelaporan terhadap informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal baik melalui surat maupun pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
2. PGN juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui *press release* dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dapat diakses melalui *website* PGN. Pada *website* bahasa Indonesia dan Inggris, tersedia akses informasi untuk Laporan Tahunan.
3. Pemberian informasi yang cukup kepada investor dan calon investor melalui media komunikasi seperti telepon, *conference call, e-mail,* dan *website* Perusahaan.
4. Pemberian informasi melalui pertemuan tatap muka secara langsung maupun virtual seperti *one-on-one/ group meeting,* kunjungan lapangan, *non-deal roadshow* dan *conference*. Secara proaktif, Perseroan juga mengikuti kegiatan-kegiatan temu publik yang diselenggarakan mandiri maupun institusi pemerintah serta sekuritas di dalam ataupun di luar negeri melalui konferensi, paparan publik, dan *investor summit*.

PGN is committed to continuously providing the public with up-to-date data and information regarding the Company, aligned with compliance with Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure and Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.

Information submitted to the public or stakeholders can be accessed through the following channels:

1. Reporting of material information and facts to the capital market authorities, either through formal letters or electronic reporting to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) via the Integrated Electronic Reporting System for Issuers and Public Companies provided by OJK and IDX.
2. PGN also actively publishes every corporate action through bilingual press releases (Indonesian and English), which are accessible via the PGN website. The Indonesian and English versions of the website also provide access to the Annual Report.
3. Provision of adequate information to investors and prospective investors through communication media such as telephone, conference calls, email, and the Company's website.
4. Provision of information through direct and virtual face-to-face meetings, including one-on-one or group meetings, site visits, non-deal roadshows, and conferences. Proactively, the Company also participates in public engagement activities organized independently or by government institutions and securities firms, both domestically and internationally, through conferences, public exposes, and investor summits.

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pelanggan, calon pelanggan, investor, analis, pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perseroan dengan menghubungi:

ACCESS TO INFORMATION AND COMMUNICATION

Customers, prospective customers, investor, analyst, shareholders, stakeholders, and community may obtain information regarding the Company by contacting:

Pelanggan dan Calon Pelanggan Customers and Prospective Customers	***Contact Center*** 135	***E-Mail*** pcc135@pertamina.com

Corporate Secretary	**Situs Web Resmi PGN** Official Website PGN www.pgn.co.id	**Telepon** Telephone (+62-21) 633-4838	***E-Mail*** PGN.corsec@pertamina.com

Investor Relations	**Situs Web Resmi PGN** Official Website PGN www.pgn.co.id	**Telepon** Telephone (+62-21) 633-4838	***E-Mail*** PGN.InvestorRelation@pertamina.com

PGN juga senantiasa memperkuat platform teknologi informasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui *website* Perseroan (www.pgn.co.id), dan sosial media yaitu:

PGN also continuously strengthens its information technology platforms to maintain and enhance the reliability of delivering integrated, timely, and targeted information through the Company's website (www.pgn.co.id) and social media platforms, including:

- www.pgn.co.id
- @PerusahaanGasNegaraPGN
- @gas_negara
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk
- @gas_negara

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IMPLEMENTATION

PGN melaksanakan *assessment* GCG setiap tahun menggunakan konsultan Independen sebagai bentuk komitmen PGN atas pelaksanaan Implementasi sesuai prinsip-prinsip GCG dan terukur setiap tahun. *Assesment* GCG dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG di lingkungan Subholding Gas Group.

Dalam proses assesment GCG menggunakan parameter/ metode ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), POJK 21/2015 dan PUG-KI 2021 masing-masing telah memiliki kriteria penilaian terhadap etika usaha / bisnis dan etika kerja.

Pada tahun 2025, PGN telah melakukan *assessment* GCG dengan berbagai parameter sebagai berikut:

PGN conducts an annual GCG assessment using an independent consultant as a form of the Company's commitment to implementing GCG principles in a measurable manner each year. The GCG assessment is carried out as part of the Company's responsibility to oversee and evaluate the implementation of GCG within the Gas Subholding Group.

The GCG assessment process used the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters/methods, OJK Regulation 21/2015, and PUG-KI 2021, each of which has assessment criteria for business ethics and work ethics.

In 2025, PGN carried out a GCG assessment using the following parameters:

PENERAPAN PARAMETER ACGS

IMPLEMENTATION OF ACGS PARAMETERS

114,60 – Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class)

Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Parameter ACGS
GCG Assessment Results Based on ACGS Parameters

Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG penerapan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Pada tahun 2025, penilaian ACGS dilakukan oleh asesor independen, PT Pratama Indomitra Konsultan, berdasarkan rekomendasi ACGS Revised October 2023 (Versi 2 Maret 2024) yang meliputi empat aspek dan 193 pertanyaan.

Hasil *assessment* Perusahaan tahun 2025 menunjukkan perolehan tingkat penerapan ACGS sebesar 114,60 poin dengan kriteria penilaian Leadership in Corporate Governance, (ASEAN Asset Class). Rincian hasil penilaian penerapan GCG di PGN untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Company continuously enhances the quality of its GCG best practice implementation by adopting the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards. In 2025, the ACGS assessment was conducted by an independent assessor, PT Pratama Indomitra Konsultan, based on the ACGS Revised October 2023 recommendations (Version 2 March 2024), covering four aspects and 193 questions.

The Company's 2025 assessment results show an ACGS implementation score of 114.60 points, achieving the rating of Leadership in Corporate Governance (ASEAN Asset Class). The detailed results of PGN's 2025 GCG implementation assessment are as follows:

PEMETAAN BERDASARKAN ACGS PERIODE TAHUN BUKU 2025

MAPPING BASED ON ACGS SCORECARD FOR 2025 FINANCIAL YEAR

Prinsip Principle	**Jumlah Item** Total Item	**Tidak Terdapat Item (s)** No Applicable Item(s)	**Jumlah Parameter setelah dikurangi N/A** Number of Parameters after deducting N/A	**Diterapkan** Applicable	**Belum Diterapkan** Not Applicable Yet	**Bobot** Weight	**Skor** Score
Prinsip A - Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Principle A - Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	4	26	25	1	20	19,23
Prinsip B - Keberlanjutan dan Ketahanan Principle B - Sustainability and Resilience	22	0	22	22	0	15	15,00
Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi Principle Principle C - Disclosure and Transparency	34	0	34	34	0	25	25,00
Prinsip D - Tanggung Jawab Dewan Principle D - Responsibility of the Board	63	0	63	62	1	40	39,37
Total Poin Level 1	149	4	145	143	2	100,00	98,60
Bonus	18	-	-	8	-	40	16
Penalti Penalty	26	-	-	0	-	0	0
Total Poin Level 2	44	0	0	8	0	40	16
Total Poin Level 1 + Level 2	193	4	145	151	2	140	114,60

Berikut penilaian yang Tidak Dapat Diterapkan atau Belum Diterapkan oleh Perseroan:

1. Hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Rights and Equitable Treatment of Shareholders*)

   Dari total 30 (tiga puluh) item penilaian pada Prinsip A (Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham), terdapat 4 (empat) item penilaian yang tidak dapat diterapkan atau *Not Applicable* (N/A) yakni pada indikator A.2.2, A.2.3 A.3.1, dan A.6.3. Sehingga item penilaian yang dapat diterapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) item pertanyaan/penilaian dan terdapat 1 (satu) item yang belum diterapkan oleh Perseroan yakni pada indikator A.6.4. Sehingga pemenuhan skor pada prinsip A sebesar 19,23 poin.

The following assessments are Not Applicable or have Not Been Implemented by the Company:

1. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

   Of the 30 (thirty) assessment items under Principle A (Rights and Equitable Treatment of Shareholders), 4 (four) are Not Applicable (N/A): indicators A.2.2, A.2.3, A.3.1, and A.6.3. Hence, the Company has 25 (twenty-five) applicable assessment items, and 1 (one) item, A.6.4, has not been applicable yet. Hence, the score fulfillment for principle A is 19.23 points.

Pada Prinsip ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

The following matters should be considered for this Principle:

No	Pertanyaan Question	Implementasi Implementation	Rekomendasi Recommendation	Nomor Parameter Parameter Number
1	Apakah Perseroan memberikan hak kepada Pemegang Saham Non Pengendali untuk mencalonkan calon Direksi/ Komisaris? Does the Company grant Non-Controlling Shareholders the right to nominate candidates for Directors/ Commissioners?	***Not Applicable*** **(N/A)**, karena berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 (SAHAM) hak untuk mencalonkan calon Direksi/Komisaris hanya dimiliki oleh Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa. **Not Applicable (N/A)**, because based on the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES), the right to nominate candidates for Directors/Commissioners is only held by Series A Dwiwarna Shares, namely shares owned specifically by the Republic of Indonesia which grant the holder with Special Rights.	Perseroan agar memberikan hak kepada Pemegang Saham Non Pengendali untuk mencalonkan calon Direksi/ Komisaris. The Company is to grant the right to Non-Controlling Shareholders to nominate candidates for Directors/ Commissioners.	A.2.2
2	Apakah Perseroan memperbolehkan Pemegang Saham memilih Direktur/ Komisaris secara individu? Does the Company allow Shareholders to elect Directors/Commissioners individually?	***Not Applicable*** **(N/A)**, karena berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 (SAHAM) hak untuk mencalonkan calon Direksi/Komisaris hanya dimiliki oleh Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa. **Not Applicable (N/A)**, because based on the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES), the right to nominate candidates for Directors/Commissioners is only held by Series A Dwiwarna Shares, namely shares owned specifically by the Republic of Indonesia which grant the holder with Special Rights.	Perseroan agar memperbolehkan Pemegang Saham memilih Direktur/ Komisaris secara individu The Company is to allow Shareholders to elect Directors/Commissioners individually	A.2.3
3	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Komisaris Perseroan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In the event of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring Shareholder approval, does the Company's Directors/Commissioners appoint an independent party to assess the fairness of the transaction price?	***Not Applicable*** **(N/A)**, karena berdasarkan konfirmasi diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 Perseroan tidak melakukan merger, akuisisi dan/ atau pengambilalihan. **Not Applicable (N/A)**, because based on confirmation it is known that throughout 2025 the Company did not carry out mergers, acquisitions and/or takeovers.	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan Pemegang Saham, agar Direksi/Komisaris Perseroan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi In the event of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring the approval of Shareholders, the Company's Directors/Commissioners is to appoint an independent party to assess the fairness of the transaction price.	A.3.1

No	Pertanyaan Question	Implementasi Implementation	Rekomendasi Recommendation	Nomor Parameter Parameter Number
4	Apakah profil Direksi/ Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan Direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? Is the profile of the Director/ Commissioner (at least age, academic qualifications, date of first appointment, experience, and Director position at other issuers) who wish to be elected/re-elected included?	***Not Applicable* (N/A)**, karena berdasarkana hasil kajian dokumen pemanggilan RUPS/surat edaran (sebagai contoh: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan), dokumen tersebut tidak memuat rincian profil Direksi/Komisaris (setidaknya meliputi usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan Direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 (SAHAM) yang menetapkan bahwa hak untuk mencalonkan calon Direksi/Komisaris hanya dimiliki oleh Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa. **Not Applicable (N/A)**, because based on the review of the GMS summons/circular letter document (for example: Summons of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk regarding Changes in the Composition of the Company's Management), the document does not contain details of the profiles of the Directors/Commissioners (at least including age, academic qualifications, date of first appointment, experience, and Director's position in other issuers) who wish to be elected/re-elected. This is due to the provisions in the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES) which stipulates that the right to nominate candidates for Directors/ Commissioners is only held by Series A Dwiwarna Shares, namely shares owned specifically by the Republic of Indonesia which grants their holders Special Rights.	Dalam pemanggilan RUPS/ surat edaran agar memuat rincian sebagai berikut profil Direksi/Komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan Direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan In the summons for the GMS/ circular letter, the following details should be included: profile of the Directors/ Commissioners (at least age, academic qualifications, date of first appointment, experience, and position of Director at another issuer) who wish to be elected/re-elected.	A.6.3
5	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors to be appointed/reappointed clearly identified?	Auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali belum diidentifikasi dengan jelas, karena berdasarkan hasil kajian dokumen Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali belum diidentifikasi dengan jelas. Auditors who wish to be appointed/reappointed have not been clearly identified, because based on the results of the study of the Announcement of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk held on May 28, 2025, the auditors who wish to be appointed/reappointed have not been clearly identified.	Perseroan direkomendasikan agar mengidentifikasi secara jelas auditor yang akan diangkat atau diangkat kembali dalam dokumen terkait. Karena berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025, auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali belum diidentifikasi secara jelas. The Company is recommended to clearly identify the auditors to be appointed or reappointed in the relevant documents. Based on a review of the Announcement of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk held on May 28, 2025, the auditors to be appointed or reappointed have not been clearly identified.	A.6.4

2. Keberlanjutan dan Ketahanan (*Sustainability and Resilience*)

Dari total 22 (dua puluh dua) item penilaian pada Prinsip B (Keberlanjutan dan Ketahanan), Perseroan telah menerapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) item pertanyaan/penilaian. Sehingga pemenuhan skor pada prinsip B sebesar 15,00 poin.

2. Sustainability and Resilience

Of the 22 (twenty-two) assessment items under Principle B (Sustainability and Resilience), the Company has applied 22 (twenty-two) questions/assessments. Hence, the score for Principle B is 15.00 points.

3. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
Dari total 34 (tiga puluh empat) item penilaian pada Prinsip C (Pengungkapan dan Transparansi), Perseroan telah menerapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) item pertanyaan/penilaian. Sehingga pemenuhan skor pada prinsip C sebesar 25,00 poin.

3. Disclosure and Transparency
Of the 34 (thirty-four) assessment items under Principle C (Disclosure and Transparency), the Company has applied 34 (thirty-four) questions/assessments. Hence, the score fulfillment for Principle C is 25.00 points.

4. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibility of the Board*)

Dari total 63 (enam puluh tiga) item penilaian pada Prinsip D (Tanggung Jawab Dewan), Perseroan telah menerapkan sebanyak 62 (enam puluh dua) item pertanyaan/penilaian, dan masih terdapat 1 (satu) item yang belum dapat diterapkan oleh Perseroan yakni pada indikator D.3.4. Pemenuhan skor pada prinsip D sebesar 39,37 poin.

4. Responsibility of the Board

Of the 63 (sixty-three) assessment items under Principle D (Responsibility of the Board), the Company has applied 62 (sixty-two) of the questions/assessments, with 1 (one) item remaining not applicable yet, namely indicator D.3.4. The score fulfillment for Principle D is 39.37.

Pada Prinsip ini, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

The following matters should be considered for this Principle:

No	**Pertanyaan (Belum diterapkan)** Question (Not Applicable Yet)	**Implementasi** Implementation	**Rekomendasi** Recommendation	**Nomor Parameter** Parameter Number
1	Apakah Perseroan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the Company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decision-making?	Perseroan belum menerapkan hal tersebut, karena berdasarkan hasil kajian dokumen Anggaran Dasar Pasal 13 ayat (13) tentang Rapat Direksi, disebutkan bahwa Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi. The Company has not applied this, because based on the results of a study of the Articles of Association document, Article 13 paragraph (13) on Board of Directors' Meetings, it is stated that Board of Directors' Meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended and/or represented by more than ½ (one half) of the number of Board of Directors' members.	Perseroan direkomendasikan agar meninjau dan menyesuaikan ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat Direksi yaitu mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan. The Company is recommended to review and adjust the provisions regarding the quorum for attendance at Board of Directors Meetings, namely requiring a minimum quorum of at least 2/3 for board decision-making.	D.3.4

5. Bonus dan Penalti

Untuk Tingkat 2 (Level 2) yaitu Bonus dan Penalti, dari total 18 (delapan belas) item bonus, dan 26 (dua puluh enam) item penalti, Perseroan mendapatkan bonus sebanyak 8 (delapan) item atau setara dengan skor 16 (enam belas) poin, dan tidak terdapat item penalti.

Adapun rincian Bonus adalah sebagai berikut:

5. Bonuses and Penalties

For Level 2, namely Bonuses and Penalties, out of a total of 18 (eighteen) bonus items and 26 (twenty-six) penalty items, the Company received 8 (eight) bonus items, equivalent to a score of 16 (sixteen) points, and no penalty items.

The bonus details are as follows:

No	Pertanyaan Question	Implementasi Implementation	Nomor Parameter Parameter Number
1	Apakah Perseroan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan *real-time* secara *in-absentia* pada Rapat Umum Pemegang Saham? Does the Company implement secure and real-time electronic voting in absentia at the General Meeting of Shareholders?	Perseroan telah menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan *real-time* secara *in-absentia* pada Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024. The Company has implemented secure and real-time electronic voting in absentia at the General Meeting of Shareholders as stated in the Annual Report (AR) for the 2024 Financial Year.	(B) A.1.1
2	Apakah Perseroan mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the Company disclose how it manages risks and opportunities related to climate change?	Perseroan telah mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 Hal 435. The Company has disclosed how they manage risks and opportunities related to climate change as stated in the Annual Report (AR) for the 2024 Financial Year, page 435.	(B) B.1.1
3	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/*Sustainability Reporting*-nya mendapat jaminan dari pihak eksternal? Does the Company disclose that its Sustainability Report has received assurance from an external party?	*Independent Assurance Statement Report* Nomor 0425/BD/0032/JK oleh PT. Moores Rowland Indonesia. Independent Assurance Statement Report Number 0425/BD/0032/JK by PT. Moores Rowland Indonesia.	(B) B.1.2
4	Apakah Perseroan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perseroan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan ESG (*Environmental, Social, and Governance*)? Does the Company disclose its engagement channels with stakeholder groups and how it responds to ESG (Environmental, Social, and Governance) stakeholder concerns?	Perseroan telah mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perseroan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Tercantum dalam *Sustainable Report* (SR) Tahun 2024. The Company has disclosed its engagement channels with stakeholder groups and how it responds to ESG (Environmental, Social, and Governance) stakeholder concerns as outlined in its 2024 Sustainable Report (SR).	(B) B.1.3
5	Apakah Perseroan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola urusan keberlanjutan? Does the Company have a unit/division/committee specifically responsible for managing sustainability matters?	Organisasi *Sustainability* yang terintegrasi dengan fungsi *Corporate Strategy and Sustainability* berdasarkan Keputusan Direksi PT PGN Tbk. Nomor 085700.K/OT.00/PDO/2024. Sustainability Organization integrated with Corporate Strategy and Sustainability function based on Decree of the Board of Directors of PT PGN Tbk. Number 085700.K/OT.00/PDO/2024.	(B) B.1.4

No	Pertanyaan Question	Implementasi Implementation	Nomor Parameter Parameter Number
6	Apakah Perseroan memiliki minimal satu Direktur/Komisaris Independen perempuan? Does the Company have at least one female Independent Director/Commissioner?	Berdasarkan susunan anggota Dewan Komisaris, diketahui bahwa Perseroan memiliki satu Komisaris Independen perempuan yaitu Ibu Conny Lolyta Rumondor. Based on the composition of the members of the Board of Commissioners, it is known that the Company has one female Independent Commissioner, namely Mrs. Conny Lolyta Rumondor.	(B) D.1.1
7	Apakah Perseroan mempunyai kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the Company have a policy and disclose measurable goals for implementing board diversity and report progress in achieving its goals?	Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk RUPS memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan senantiasa patuh dan menjalankan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menekankan pada keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan. The composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed by the GMS is diverse in terms of age, gender, educational background, and experience required to support the implementation of their duties and responsibilities. This is achieved by consistently complying with and implementing the requirements for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners, while observing the following regulations: 1. Regulation of SOEs Minister Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. 2. Regulation of SOEs Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. 3. Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which emphasizes expertise, integrity, leadership, experience, good behavior, legal capacity, and a strong dedication to advancing and developing the Company.	(B) D.1.2
8	Apakah Perseroan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the Company have a separate board-level Risk Committee?	Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. The Company has established a Risk Management and Business Development Monitoring Committee aligned with the Regulation of SOEs Minister Number PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.	(B). D.6.1

PEMENUHAN PARAMETER OJK DAN PUGKI

PGN melakukan evaluasi tata kelola berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/2015 dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dengan ruang lingkup assessment meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai Ketentuan OJK

FULFILLMENT OF OJK AND PUGKI PARAMETERS

PGN conducted a corporate governance evaluation based on Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 21/2015 and the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI), with the scope of the assessment covering GCG aspects in the management of the Company for fiscal year 2025.

Implementation of Public Company Corporate Governance Aspects and Principles in Accordance with OJK Regulation



Comply untuk Seluruh Aspek

Comply with All Aspects

Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Ketentuan OJK
GCG Assessment Result Based on OJK Regulations

PGN melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015. Penilaian tersebut mencakup lima aspek, delapan prinsip, dan 25 rekomendasi yang dipetakan terhadap implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pada Tahun Buku 2025, seluruh 25 rekomendasi yang ditetapkan dalam POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 telah dipenuhi oleh PGN. Dengan demikian, Perseroan memperoleh predikat ***Comply*** untuk **"Seluruh Aspek"**.

PGN conducted an evaluation of its corporate governance implementation based on POJK Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies, as well as SEOJK Number 32/SEOJK.04/2015. The assessment covers five aspects, eight principles, and 25 recommendations mapped against the implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

In Fiscal Year 2025, all 25 recommendations stipulated in POJK Number 21/POJK.04/2015 and SEOJK Number 32/SEOJK.04/2015 have been fulfilled by PGN. Accordingly, the Company obtained a **Comply** rating for **"All Aspects"**.

PEMETAAN BERDASARKAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA POJK21/POJK.04/2015 PERIODE TAHUN BUKU 2025 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Mapping Based on Corporate Governance Manual for Public Companies POJK21/POJK.04/2015 for The 2025 Financial Year PT Perusahaan Gas Negara Tbk

1. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Relationship Between the Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Pelaksanaan** Implementation	**Status** Status
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham **Aspect 1:** Relationship Between the Public Company and Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights	**Prinsip 1:** Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **Principle 1:** Improving the value of convening the General Meeting of Shareholders (GMS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham The Public Company has technical procedures for voting, both openly and closed, prioritizing independence and the interests of Shareholders	Perseroan telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) RUPS yang terdapat dalam: • Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 25; • Prosedur pengambilan suara juga terdapat dalam Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. pada poin 11. Pemungutan Suara yang telah diungkapkan dalam website perusahaan yaitu: https://pgn.co.id/agms-rups. The Company has already had procedures or technical procedures for voting at the GMS as stated in: • The Company's Articles of Association dated May 11, 2021 Article 25; • The voting procedures are also stated in the Rules of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. in point 11. Voting has been disclosed on the Company's website at: https://pgn.co.id/agms-rups	**Terpenuhi (Comply)**
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS	Seluruh Anggota Direksi Perseroan yang berjumlah 7 (tujuh) Orang dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berjumlah 5 (lima) orang telah menghadiri RUPS Tahunan, sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan pada tanggal 28 Mei 2025. All members of the Company's Board of Directors totaling 7 (seven) persons and members of the Company's Board of Commissioners totaling 5 (five) persons attended the Annual GMS, as stated in the Minutes of the Annual GMS dated May 28, 2025.	**Terpenuhi (Comply)**

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
	Prinsip 2: Meningkatkan kualitas komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham **Principle 2:** Improving the quality of communication between the Public Company and Shareholders	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor The Public Company has a communication policy with Shareholders or investors	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor yaitu Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Dokumen: P-001/0.36 Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nomor Dokumen:O-001/21.06/2023. Kebijakan tersebut telah diungkapan diungkapkan dalam website: https://pgn.co.id/investor-relations. The Company has already had a communication policy with Shareholders or investors, namely the Information and Communication Technology Governance Policy of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Document Number: P-001/0.36 and the Operating Procedure for Disclosure of Company Information to Investors and the Capital Market Community of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Document Number: O-001/21.06/2023. The policy has been disclosed on the website: https://pgn.co.id/investor-relations.	**Terpenuhi (Comply)**
		2.2 Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web The communication policy must be disclosed on the Website	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor telah diungkapkan dalam website resmi perseroan: https://pgn.co.id/investor-relations. The communication policy with Shareholders or investors has been disclosed on the Company's official website: https://pgn.co.id/investor-relations.	**Terpenuhi (Comply)**
		2.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris telah tersedia dalam Situs Web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun pada menu "Investor" sub menu "AGMS/RUPS" yaitu https://pgn.co.id/agms-rups. The summary of the minutes of the GMS in the Indonesian and English language has been available on the Company's Website for at least 1 (one) year under the "Investor" menu, sub-menu "AGMS/RUPS" at https://pgn.co.id/agms-rups.	**Terpenuhi** *Comply*

2. FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS
Functions and Roles of the Board of Commissioners

Aspek Aspect	**Prinsip** Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Pelaksanaan** Implementation	**Status** Status
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris **Aspect 2:** Functions and Roles of the Board of Commissioners	**Prinsip 3:** Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris **Prinsip 3:** Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris	3.1 Kondisi Perseroan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris The Company's condition is always used as a basis for consideration in determining the number of members of the Board of Commissioners	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kondisi Perseroan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. The number of members of the Board of Commissioners is in accordance with the Company's condition and refers to the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.	**Terpenuhi (Comply)**
		3.2 Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan The determination of the composition of the Board of Commissioners takes into account diversity, expertise, knowledge, and experience required	Jumlah anggota Dewan komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan. The number of members of the Board of Commissioners has taken into account the background of expertise, knowledge, and experience the Company requires.	**Terpenuhi (Comply)**
	Prinsip 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris **Principle 4:** Improving the quality of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners	Kebijakan Dewan Komisaris dalam penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah dimuat dalam Board Manual, 3.12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris poin 3, hlm 46. The Board of Commissioners' policy on self-assessment to assess the performance of the Board of Commissioners has been included in the Board Manual, 3.12 Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners point 3, page 46.	**Terpenuhi (Comply)**
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Annual Report , Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report, in the Procedure for the Implementation of the Performance Assessment of the Board of Commissioners.	**Terpenuhi (Comply)**

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan The Board of Commissioners has established a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes	Berdasarkan Permen BUMN 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART Perusahaan, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris dapat diberhentikan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri makan akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on Regulation of SOE Minister 03/03/2023, OJK Regulation 33/POJK.04/2014 and also the Company's Articles of Association, any member of the Board of Commissioners who no longer meets the requirements to serve as a member of the Board of Commissioners for any reason, including involvement in financial crimes, may be dismissed from their position as a member of the Board of Commissioners. In the event that the member of the Board of Commissioners resigns, the decision shall be made through the GMS mechanism	**Terpenuhi (Comply)**
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. The Nomination and Remuneration Committee already has a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors as stated in the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. And Regulation of SOE Minister Number PER-3/MBU/03/2023 on SOE Organs and Human Resources.	**Terpenuhi (Comply)**

3. FUNGSI DAN PERAN DIREKSI
Functions and Roles of the Board of Directors

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi **Aspect 3:** Functions and Roles of the Board of Directors	**Prinsip 5:** Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Direksi **Principle 5:** Strengthening the membership and composition of the Board of Directors	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Company's condition as well as effectiveness in decision making	Jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan, yaitu terdapat 7 anggota Direksi, yang termuat dalam Laporan Tahunan perusahaan halaman 164. The number of members of the Board of Directors has taken into account the condition of the Public Company as well as effectiveness in decision making, namely there are 7 members of the Board of Directors, as stated in the Company's Annual Report page 164.	**Terpenuhi (Comply)**

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan The determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required	Berdasarkan kaji dokumen CV para anggota Direksi. Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan, yang termuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan halaman 448. Based on the review of the CV documents of the members of the Board of Directors, the determination of the composition of the members of the Board of Directors has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required, as stated in the Company's Annual Report page 448.	**Terpenuhi (Comply)**
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Berdasarkan CV Direksi Keuangan perusahaan, Direktur Keuangan PT PGN yaitu Bapak Catur Dermawan memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, yang termuat dalam Laporan Tahunan perusahaan halaman 173. Based on the CV of the Company's Finance Director, Director of Finance PT PGN, Mr. Catur Dermawan, has an educational background in Accounting, as stated in the Company's Annual Report page 173.	**Terpenuhi (Comply)**
	Prinsip 6: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi **Prinsip 6:** Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting	Direksi telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Surat Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina, yang termuat dalam Laporan Tahunan perusahaan halaman 422-425. The Board of Directors already has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors. Letter Number 113/K00000/2024-S8 on the Policy on the Implementation of Annual Individual Performance Assessment for the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Members of the Supporting Committees of the Board of Commissioners in Subholding and Pertamina AP, as stated in the Company's Annual Report page 422-425.	**Terpenuhi (Comply)**
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (Self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka, pada halaman 422-425. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors has been disclosed in the Annual Report of the Public Company, on page 422-425.	**Terpenuhi (Comply)**

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan 6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/RT PT Perusahaan Gas Negara Tbk halaman 25. Bahwa setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka akan diberhentikan sebagai anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on Regulation of SOE Minister 03/03/2023 and OJK Regulation 33/POJK.04/2014 as well as the Articles of Association of PT Perusahaan Gas Negara Tbk page 25, any member of the Board of Directors who no longer meets the requirements to serve as a member of the Board of Directors for any reason, including involvement in financial crimes, shall be dismissed as a member of the Board of Directors. In the event that the member of the Board of Directors resigns, the decision shall be made through the GMS mechanism.	**Terpenuhi (Comply)**

4. PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
Stakeholders Participation

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan **Aspect 4:** Stakeholders participation	**Prinsip 7:** Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan **Principle 7:** Improving corporate governance aspects through stakeholders participation	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading The Public Company has established a policy to prevent insider trading.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* dalam Pedoman Perilaku Etika yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2024. The Company already has established a policy to prevent insider trading as stated in the Code of Conduct approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners on August 29, 2024.	**Terpenuhi (Comply)**
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti penipuan The Public Company has established an anti-corruption and anti-fraud policy	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya antikorupsi dan antipenipuan dalam Pedoman Perilaku Etika yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2024. The Company has established a policy to prevent anti-corruption and anti-fraud as stated in the Code of Conduct approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners on August 29, 2024.	**Terpenuhi (Comply)**

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor The Public Company has established a policy regarding the selection and capacity improvement of suppliers or vendors	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, sebagaimana telah diungkapkan dalam Website Perseroan, yaitu: https://pgn.co.id/pengadaan. The Company already has established a policy regarding the selection and capacity improvement of suppliers or vendors, as disclosed on the Company's Website, namely: https://pgn.co.id/pengadaan.	**Terpenuhi (Comply)**
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak Kreditur The Public Company has established a policy regarding the fulfillment of Creditors' rights.	Pelaksanaan hubungan dengan Kreditur diatur dalam Pedoman Perilaku Etika pada Bab III Etika Usaha Poin 3.4 tentang Etika Perseroan dengan Kreditur yang diantaranya mengatur tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak kreditur sesuai perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban Perusahaan kepada Kreditur tercantum di dalam kontrak dengan Kreditur. The implementation of relations with Creditors is regulated in the Code of Conduct in Chapter III Business Ethics Point 3.4 regarding the Company's Ethics with Creditors, which among others regulates the obligation to respect creditors' rights in accordance with binding agreements and prevailing laws and regulations. The rights and obligations of the Company toward Creditors are stated in the contracts with the Creditors.	**Terpenuhi (Comply)**
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing The Public Company has established a whistleblowing system policy	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem Whistleblowing System (WBS) yaitu Pedoman WBS, yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN Tbk tanggal 02 Agustus 2021. The Company already has a Whistleblowing System (WBS) policy, namely the WBS Guidelines, approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PGN Tbk on August 2, 2021.	**Terpenuhi (Comply)**
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan The Public Company has established a policy on the provision of long-term incentives to the Board of Directors and employees	Perseroan telah memiliki kebijakan insentif jangka panjang untuk Direksi tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dalam halaman 349, sementara kebijakan insentif jangka panjang untuk karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 yaitu Pasal 44 tentang Insentif Kerja Pekerja (IKP). Besaran dan tata cara pembayaran IKP diatur melalui Keputusan Direksi, halaman 419. The Company already has established a long-term incentive policy for the Board of Directors as stated in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in page 349, while the long-term incentive policy for employees is stated in the Collective Labor Agreement for the 2023–2025 Period, namely Article 44 on Employee Work Incentives (IKP). The amount and payment procedures for IKP are regulated through a Decree of the Board of Directors, page 419.	**Terpenuhi (Comply)**

5. KETERBUKAAN INFORMASI
Information Disclosure

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 5: Keterbukaan Informasi **Aspect 5:** Information Disclosure	**Prinsip 8:** Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi **Principle 8:** Improving information disclosure practices	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company leverages information technology beyond the website as an information disclosure medium.	Selain menggunakan situs web resmi Perseroan (https://pgn.co.id/disclosure-information). Perseroan juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti IG (https://www.instagram.com/gas_negara), LinkedIn, untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan. In addition to using the Company's official website (https://pgn.co.id/disclosure-information), the Company also leverages various social media platforms such as Instagram (https://www.instagram.com/gas_negara) and LinkedIn to disclose information about the Company.	**Terpenuhi (Comply)**
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of the Public Company discloses the ultimate beneficial owners in the share ownership of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of ultimate beneficial owners in the share ownership of the Public Company through the major and controlling shareholders.	Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan yang mencapai 5% atau lebih dalam Laporan Tahunan 2025, halaman 180. The Company has disclosed the ultimate beneficial owners in the Company's share ownership reaching 5% or more in the 2025 Annual Report, halaman 180.	**Terpenuhi (Comply)**

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai Ketentuan PUG-KI 2021

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in Accordance with PUGKI 2021 Provisions



Apply untuk Seluruh Prinsip

Apply for All Principles

Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Ketentuan PUGKI
GCG Assessment Result Based on PUGKI Provisions

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 sebagai pemutakhiran dari versi 2019. PUG-KI merupakan standar praktik tata kelola perusahaan yang direkomendasikan, khususnya bagi perusahaan terbuka dan entitas yang mengelola dana masyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mendorong penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Pemetaan implementasi PUG-KI dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur struktur governansi korporat melalui tiga organ utama, yaitu organ kepemilikan, organ pengelolaan, dan organ pengawasan.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia dalam PUG-KI terdiri atas delapan prinsip yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat (Prinsip 1–3);
2. Prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas (Prinsip 4–6); dan
3. Prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat (Prinsip 7–8).

Penerapan PUG-KI menggunakan pendekatan "Terapkan atau Jelaskan" (*Apply or Explain*). Korporasi didorong untuk menerapkan setiap Prinsip, Rekomendasi, Panduan dengan cara yang sesuai untuk bisnis korporasi.

The National Committee on Governance Policy (KNKG) has issued the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) as an update to the 2019 version. The PUGKI serves as a recommended standard of corporate governance practices, particularly for public companies and entities managing public funds, with the objective of protecting the interests of shareholders and stakeholders and promoting the creation of sustainable long-term value.

The mapping of PUGKI implementation is conducted with reference to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which regulates the corporate governance structure through three main organs: the ownership organ, the management organ, and the supervisory organ.

The Indonesian Corporate Governance Principles under the PUGKI consist of eight principles grouped into three categories:

1. Principles governing the organs responsible for corporate governance implementation (Principles 1–3);
2. Principles governing the processes and outputs produced by the above organs (Principles 4–6); and
3. Principles governing the beneficiaries of corporate governance implementation (Principles 7–8).

The implementation of PUGKI adopts the "Apply or Explain" approach. Corporations are encouraged to implement each Principle, Recommendation, and Guideline in a manner appropriate to their business context.

Pada Tahun Buku 2025, PGN telah melaksanakan *assessment* penerapan PUG-KI berdasarkan pendekatan *Apply or Explain*. Dari total 81 rekomendasi yang ditetapkan dalam PUG-KI 2021, PGN telah menerapkan 76 rekomendasi. Satu rekomendasi lainnya masuk kategori untuk "dijelaskan" (*explain*) oleh Perseroan secara keseluruhan mencapai predikat ***Apply*** untuk **"Seluruh Prinsip"**.

Berikut penilaian yang masuk kategori "Explain atau dijelaskan" untuk masing masing Prinsip dijelaskan sebagai berikut:

In Fiscal Year 2025, PGN conducted an assessment of its PUGKI implementation based on the Apply or Explain approach. Out of the total 81 recommendations stipulated in PUGKI 2021, PGN has implemented 76 recommendations. One recommendation falls under the "Explain" category. Overall, the Company achieved an **Apply** rating for **"All Principles"**.

The following is the assessment categorized as "Explain" for each relevant Principle:

PEMETAAN BERDASARKAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI) 2021 PERIODE TAHUN BUKU 2025 PGN

Mapping Based On The 2021 Indonesian Corporate Governance Manual (PUG-KI) For The 2025 Financial Year of PGN

1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.1:** Peran dan Tanggung Jawab Direksi **Sub-Principle 1.1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors	1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; d. ber kemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). In pursuing sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in business conduct; c. positively contributing to society and the environment; d. capable of withstanding and growing (corporate resilience).	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi. Perseroan telah menetapkan standar etika bisnis yang tinggi melalui Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) tanggal 29 Agustus 2024, sebagai wujud untuk menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa Pegawai bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai standar etika. In pursuing sustainable value creation, the Board of Directors exercise its leadership role and strives to achieve governance outcomes. The Company has established high standards of business ethics through its Code of Conduct, dated August 29, 2024. This serves as a means to foster a corporate culture that holds employees accountable for adhering to ethical standards.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors is responsible for ensuring that the corporate mission, vision, objectives, goals, strategies, and annual and medium-term plans are aligned with long-term objectives through the effective use of innovation and technology.	Direksi senantia melakukan reviu atas visi, misi dan nilai-nilai Perseroan secara berkala; menyusun kerangka kerja serta anggaran tahunan (RKAP), Tengah Tahunan dan Triwulanan untuk memastikan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi senantiasa mengoptimalkan penerapan teknologi informasi terkini yang menjadi bagian dalam mencapai target bisnis untuk jangka pendek dan jangka Panjang. The Board of Directors reviews the Company's vision, mission, and values on a regular basis and prepares annual, semi-annual, and quarterly work plans and budgets to ensure the achievement of the Company's objectives. The Board of Directors continuously optimizes the implementation of the latest information technology as part of its efforts to achieve short-term and long-term business targets.	Apply	1
		1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	Direksi memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem Manajemen Risiko dan pengendalian internal yang tepat dan efektif selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku; 1. Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko: 2. Keberadaan Komite Manajemen Risiko Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PGN tentang Komite Manajemen Risiko (KMR) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PGN Nomor 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 tentang Pembentukan *Chief Risk Officer* (CRO) dan Komite Manajemen Risiko tanggal 16 Juli 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko 3. PGN telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko Perseroan, yaitu "Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi". Terdapat Laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan Komite Manajemen Risiko.	***Apply***	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		The Board of Directors is responsible for ensuring that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategy, as well as complying with applicable regulations and standards.	The Board of Directors is responsible for ensuring that the Company has implemented appropriate and effective risk management and internal control systems aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies, as well as complying with applicable regulations and standards; 1. The Company has established a Risk Management Committee 2. The establishment of the Risk Management Committee is based on the PGN Board of Directors' Resolution on the Risk Management Committee (KMR), issued based on the Board of Directors' Resolution Number 026100. K/PR.06.01/PDO/2021 on the Appointment of Chief Risk Officer (CRO) and the Risk Management Committee dated July 16, 2021, on the Implementation of Risk Management. 3. PGN has adopted the Company's Risk Management Guidelines, namely the "Risk Management & Resilience Charter." Risk Management Committee reports are issued monthly, quarterly, and annually.		
		1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	Direksi/Perseroan telah membentuk unit Internal Audit dengan tugas dan fungsi pokok organisasi yang senantiasa diperbaharui sesuai dengan regulasi dan ketentuan-ketentuan terbaru. Secara struktural, Unit Audit Internal berada di bawah langsung pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direksi telah merancang dan menjalankan kepatuhan Perseroan termasuk menjamin pengungkapan dan laporan keuangan dan informasi material secara tepat waktu dan akurat; Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (ketentuan PSAK).	*Apply*	1
		The Board of Directors is responsible for ensuring the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems and for the timely and accurate disclosure of all material information regarding the Company.	The Board of Directors/Company has established an Internal Audit Unit, with its core duties and functions continuously updated aligned with prevailing laws and regulations. Structurally, the Internal Audit Unit operates under the direct supervision of and reports to the President Director. The Board of Directors has established and implemented the Company's compliance framework, including ensuring the timely and accurate disclosure of financial statements and material information. The Audited Financial Statements for the 2025 Financial Year have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors is responsible for ensuring that sustainability reporting is prepared in accordance with applicable standards.	Laporan Keberlanjutan/ (*Sustainability Report)* tahun 2025, telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi memastikan bahwa Laporan keberlanjutan telah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi telah melakukan persetujuan terhadap isi Laporan Keberlanjutan dengan menandatangani Lembar Persetujuan bersama Dewan Komisaris. The 2025 Sustainability Report has been prepared in accordance with applicable regulations. The Board of Directors ensures that the Sustainability Report has been prepared in accordance with applicable regulations. It has approved the contents of the Sustainability Report by signing the Approval Form together with the Board of Commissioners.	***Apply***	**1**
		1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat Manajemen Risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for the Company's information technology (IT) governance that is aligned with the Company's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 halaman 233. Perseroan telah memiliki kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) yang mendukung kegiatan bisnis Perseroan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) keamanan informasi dan pemulihan keadaan darurat. The Board of Directors has established a framework for information technology (IT) governance as outlined in the 2025 Annual Report, page 233. The Company has established a framework for information technology (IT) governance that supports the Company's business activities in the form of Standard Operating Procedures (SOPs) for information security and disaster recovery.	***Apply***	**1**
		1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities in accordance with Sharia principles, the Board of Directors must ensure that the Sharia Supervisory Board has the necessary authority and adequate support systems to perform its role effectively.	***Not Applicable/NA***, karena PT PGN adalah Perseroan yang bergerak di bidang pengembangan dan pemanfaatan gas bumi, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 dan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka tidak diperlukan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. **Not Applicable/NA**, because PT PGN operates in the development and utilization of natural gas, as stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, and does not conduct business activities based on Sharia principles. Accordingly, the Company does not require a Sharia Supervisory Board or the supporting mechanisms necessary for such a board to perform its role effectively.	***Explain***	**0**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual yang dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	Piagam Direksi ***(Board Manual)*** telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala, berdasarkan kajian dokumen *Board Manual* ditinjau dan dimutakhirkan terakhir tahun 2025. *Board Manual* ini disahkan oleh Dewan Komisaris Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan dalam *Board Manual* dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah Perseroan meratifikasi: 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	***Apply***	**1**
		The Board Manual is reviewed periodically. The Manual includes, among others, the distribution of roles among the Directors individually, which may be specified in the Board Manual or by a Board resolution.	The **Board Manual** has been periodically reviewed and updated. Based on the document review, the Board Manual was last reviewed and updated in 2025. This Board Manual was approved by the Board of Commissioners. The update was carried out to align the provisions of the Board Manual with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, particularly following the Company's ratification of: 1. Regulation of SOEs Ministry Number PER-1/MBU/03/2023 of 2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; 2. Regulation of SOEs Ministry Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. Regulation of SOEs Ministry Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.		
		1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum di dalam: 1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (23); 2. *Board Manual* PGN bab II Direksi Angka 2.9.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle		Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
			The Board of Directors establishes a policy regarding the resignation of Board members who are involved in financial crimes and have been found guilty of misconduct.	The Board of Directors has established a policy regarding the resignation of Board members who are involved in financial crimes, as stated in: 1. The Company's Articles of Association, Article 11, paragraph (23); 2. PGN Board Manual Chapter II Board of Directors Number 2.9.		
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.2:** Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya **Sub-Principle 1.2:** Performance Assessment - Board of Directors and its Members	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur sesuai *Board Manual* Bab II. Direksi Sub Bab 2.16 tentang Evaluasi Kinerja Direksi halaman 30. yang mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengimplementasikan *Key Performance Index* (KPI), dan melakukan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan pencapaian KPI Direksi yang dilaporkan dalam RUPS. Evaluasi (penilaian) ini dituangkan dalam bentuk Laporan Pengawasan Komisaris periode Tahun Buku 2024 yang disampaikan kepada RUPS. Evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur telah dituangkan dalam Laporan Tahunan ini.	***Apply***	**1**
			The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to assess the effectiveness of the Board of Directors and each Director.	The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, has conducted an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each director in accordance with Chapter II of the Board Manual. Board of Directors Sub-Chapter 2.16 on Evaluation of Board of Directors' Performance, page 30, stipulates that the Company's Board of Directors and Board of Commissioners implement Key Performance Indicators (KPIs) and conduct performance evaluations of the Board of Directors based on the achievement of the Board's KPIs as reported at the General Meeting of Shareholders. This evaluation (assessment) is documented in the form of the Supervisory Board Report for the 2024 Financial Year, submitted to the General Meeting of Shareholders. The annual formal evaluation, conducted objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each Director, is documented in this Annual Report.		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi telah memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Direksi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak yang menerima kuasa khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan KPI Direksi yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak, serta implementasi nilai-nilai BUMN *(core values)* atau menggunakan metode penilaian kinerja lainnya yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak dan/ atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Kebijakan penilaian Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan.	***Apply***	**1**
		The Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for establishing performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	The Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Nomination Committee, has ensured that the performance evaluations of the President Director and other members of the Board of Directors are based on pre-determined criteria that have been communicated to the Board of Commissioners. The performance evaluations of the Board of Directors are based on the provisions established by PT Pertamina (Persero) as the largest B Series Shareholder, which has been granted special authority by the A Series Dwiwarna Shareholders. The performance evaluation of the Board of Directors is conducted based on the Board's KPIs, as approved by the majority of B Series Shareholders, as well as the implementation of SOE core values, or other performance evaluation methods as determined by the majority of B Series Shareholders and/or the A Series Dwiwarna Shareholders. The Board's evaluation policy is disclosed in the Annual Report.		
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.3:** Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris **Sub-Principle 1.3:** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	Dewan Komisaris telah meninjau strategi korporasi termasuk melakukan reviu atas visi, misi dan nilai Perseroan secara berkala di dalam RJPP dan RKAP paling tidak setiap tahun. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Piagam Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagaimana diketahui berdasarkan kajian dokumen: 1. Laporan Tahunan Pengawasan Dewan komisaris; 2. Laporan Triwulanan; 3. Risalah Rapat Dewan Komisaris; 4. Telaah Dewan Komisaris terkait RKAP dan RJPP Perseroan.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises, and approves the corporation's long-term and short-term business and financial plans. The Board of Commissioners advises and monitors the management of its implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are critical to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	The Board of Commissioners has reviewed the corporate strategy, including periodically reviewing the Company's vision, mission, and values, as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) at least annually. The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the Board Manual. As noted based on document review: 1. Annual Board of Commissioners Supervisory Report; 2. Quarterly Reports; 3. Board of Commissioners Meeting Minutes; 4. Board of Commissioners' Review of the Company's RKAP and Long-Term Plan.		
		1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the Annual Report.	PGN telah mengungkapkan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2025 sub bab Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris halaman 362-363 dan di Bab Laporan Dewan Komisaris. PGN has disclosed the types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners in the 2025 Annual Report, sub-chapter on Implementation of the Duties of the Board of Commissioners, page 362-363 and in the Chapter on the Report of the Board of Commissioners.	***Apply***	**1**
		1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	**N/A** (***Not Applicable***) karena berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Pasal 5 (SAHAM). Dengan demikian prosesnya tidak melalui usulan Dewan Komisaris kepada, dan untuk diputuskan oleh RUPS.	***Explain***	**0**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and for decision by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In making the above proposals, the Board of Commissioners takes into account diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction of ethnicity, religion, race, intergroup, and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and selection process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	**NA (Not Applicable)** because based on document review and confirmation, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is carried out directly by the Holders of Series A Dwiwarna Shares, namely shares owned specifically by the Republic of Indonesia which grant the holders Special Rights, based on the Company's Articles of Association (AD) Article 5 (SHARES). Thus, the process does not go through a proposal from the Board of Commissioners to, and to be decided by the GMS.		
		1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the committee responsible for the nomination function develops a succession policy for the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the President Director's report on the implementation of the development and succession plan.	Perseroan telah memiliki kebijakan suksesi dan nominasi dalam *Board Manual* yang merupakan bagian dari Pedoman Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. Kemudian dalam praktiknya Anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. The Company has a succession and nomination policy in the Board Manual, which is part of the Nomination Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners, with reference to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners, through the Nomination & Remuneration Committee, reviews the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director. In practice, members of the Company's Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.3.5 Dewan Komisaris: mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners: submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is aligned with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and shareholders; periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	Berdasarkan Kajian Dokumen dan konfirmasi Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi kepada PT Pertamina (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham seri A Dwiwarna yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan untuk menetapkan besaran tantiem, gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya. Sistem remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dilakukan peninjauan, sebelum diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Based on the Document Review and confirmation, the Board of Commissioners has proposed remuneration to PT Pertamina (Persero) as the proxy of the Series A Dwiwarna Shareholders as determined in the Annual GMS to determine the amount of bonuses, salary/ honorarium, allowances, facilities and other incentives. The remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners is periodically reviewed before being proposed to the Series A Dwiwarna Shareholders.	***Apply***	**1**
		1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	*Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris telah mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Berdasarkan kajian dokumen-dokumen: 1. *Board Manual*; 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris; 3. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi; 4. Laporan Tahunan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025; 5. Laporan Triwulanan. Diketahui bahwa Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah mengawasi efektivitas kebijakan governansi Perseroan dan implementasinya serta mengusulkan perubahan-perubahan jika diperlukan.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	The Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners stipulates the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to ensure the implementation of Good Corporate Governance in all of the Company's business activities at all levels of the organization. Based on a review of the following documents: 1. Board Manual; 2. Minutes of the Board of Commissioners Meeting; 3. Minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors; 4. Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2025; 5. Quarterly Report. It is known that the Board of Commissioners, assisted by Committees under the Board of Commissioners, has overseen the effectiveness of the Company's governance policies and their implementation and proposed changes where necessary.		
		1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) telah mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan bisnis, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris baik secara langsung atau melalui komite-komite senantiasa mengawasi dan mengarahkan kebijakan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen, serta memberikan masukan untuk perbaikan, hal ini tercantum dalam: 1. *Board Manual*; 2. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi sepanjang tahun 2025; 3. Laporan Tahunan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025; 4. Laporan Triwulanan Manajemen Risiko. The Board Manual regulates the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to ensure the implementation of Risk Management in accordance with the Company's business, complexity, and risk profile. The Board of Commissioners, either directly or through committees, continuously oversees and directs the policies and effectiveness of the implementation of risk management and internal control systems implemented by management, and provides input for improvement. This is stated in: 1. Board Manual; 2. Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2025; 3. Board Commissioners' Annual Supervisory Report for 2025; 4. Quarterly Risk Management Report.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of accounting integrity and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	Piagam Direksi dan Dewan Komisaris telah mengatur pelaksanaan fungsi audit internal melalui Komite Audit. Dewan Komisaris telah mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat serta independensi fungsi Audit Internal dan eksternal dalam bentuk penelaahan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal. Informasi mengenai pembahasan Komite Audit dan Unit Audit Internal sepanjang tahun 2025 telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Hal ini diketahui berdasarkan kajian dokumen sbb: 1. *Board* Manual; 2. Laporan Tahunan (AR); 3. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi. The Board Manual regulates the implementation of the internal audit function through the Audit Committee. The Board of Commissioners has overseen and directed the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting systems, as well as the independence of the Internal and External Audit functions, through reviews of the effectiveness of external and internal audit implementation. Information regarding discussions of the Audit Committee and Internal Audit Unit throughout 2025 has been disclosed in the Annual Report. This is based on a review of the following documents: 1. Board Manual; 2. Annual Report (AR); 3. Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	***Apply***	**1**
		1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures its integrity, as well as oversees the corporation's disclosure and communication processes.	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (*Annual Report and Sustainability Report*) telah direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris, pada April 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan (AR) halaman 130 dan Laporan Keberlanjutan halaman 31. The Annual Report and Sustainability Report have been reviewed and approved by the Board of Commissioners, in April 2025 as stated in the Annual Report (AR) page 130 and the Sustainability Report page 31.	***Apply***	**1**
		1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board Manual is periodically reviewed.	Piagam Dewan Komisaris *(Board Manual)* secara periodik ditinjau, terbaru dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025 sebagai pembaruan dari *Board Manual* sebelumnya yang disahkan tanggal 13 Desember 2021. The Board Manual is periodically reviewed, most recently on January 31, 2025, as an update of the previous Board Manual which was ratified on December 13, 2021.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 28 tanggal 11 Mei 2021 Pasal 14 Ayat (25.a). The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association Number: 28 dated May 11, 2021, Article 14 Paragraph (25.a).	*Apply*	1
.		1.3.12 Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif, dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Komisaris Independen memiliki rekam jejak yang kredibel, tidak memiliki saham Perseroan, dan dapat berkontribusi dalam kemajuan Perseroan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan kajian dokumen-dokumen: 1. CV para Anggota Dewan Komisaris; 2. Risalah Rapat Dewan Komisaris tahun buku 2025; 3. Daftar kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris; 4. Risalah Rapat Dewan Komisaris tahun buku 2025. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently. Independent Commissioners must have a credible track record, do not own shares in the Company, and can contribute to the Company's progress. This can be determined by reviewing the following documents: 1. CVs of the Members of the Board of Commissioners; 2. Minutes of the Board of Commissioners Meeting for the 2025 financial year; 3. List of Attendance Lists for Board of Commissioners Meetings; 4. Minutes of the Board of Commissioners Meeting for the 2025 financial year.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner serves as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows for the expression of diverse views, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available for discussion of all items. Furthermore, the Board of Commissioners must be provided with opportunities to meet with the Board of Directors and senior management.	Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan demikian juga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Komisaris Tahun 2025. Komisaris Utama bertindak sebagai koordinator atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris agar sesuai dengan prinsip GCG. Komisaris Utama mengkoordinasikan pembagian peran pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris dan penetapan agenda rapat dengan jajaran Direksi dan manajemen senior sebagaimana tercantum di dalam *Board Manual.* The duties and responsibilities of the President Commissioner have been disclosed in the Annual Report as well as in the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Board of Commissioners. The President Commissioner acts as the coordinator for the implementation of all duties and functions of the Board of Commissioners to ensure compliance with GCG principles. The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of the Board of Commissioners through the Decision of the Board of Commissioners and the determination of meeting agendas with the Board of Directors and senior management as stated in the Board Manual.	***Apply***	**1**
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.4:** Pembentukan Komite **Sub-Principle 1.4:** Committee Establishment	1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	Perseroan telah memiliki 4 (empat) Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit. 2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha. 3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi. The Company has four committees under the Board of Commissioners: 1. Audit Committee. 2. Risk Management and Business Development Monitoring Committee. 3. Nomination, Remuneration, and GCG Committee. 4. Integrated Governance Committee.	***Apply***	**1**
		1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen. Seluruh anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen, hal ini diketahui berdasarkan profil para anggota komite.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that other committees formed by the Board of Commissioners are majority independent parties, and that all committee members have the competence, commitment, and sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	The Board of Commissioners has ensured that all members of the Audit Committee are independent, and that the other committees formed by the Board of Commissioners are composed predominantly of independent parties. All committee members are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently, as evidenced by the profiles of the committee members.		
		1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam Laporan Tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the Annual Report.	Berdasarkan kajian dokumen dan informasi dalam *website*, saat ini Ketua Komite Audit adalah Ibu Conny Lolyta Rumondor yang merupakan Komisaris Independen, dan tidak menjabat sebagai Komisaris Utama PT PGN (Persero). Based on a review of documents and information on the website, currently the Chair of the Audit Committee is Mrs. Conny Lolyta Rumondor who is an Independent Commissioner, and does not serve as the President Commissioner of PT PGN (Persero).	***Apply***	**1**
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.5:** Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya **Sub-Principle 1.5:** Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members	1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Dewan Komisaris setiap tahunnya melakukan penilaian efektivitas kinerja melalui penilaian sendiri *(self-assessment)* anggota Dewan Komisaris secara kolegial dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian kinerja ini telah diungkapkan dalam Laporan Pengawasan Komisaris periode Tahun Buku 2025 dan Laporan Tahunan Perseroan. The Board of Commissioners annually assesses the effectiveness of its performance through a collegial self-assessment of its members and all committees under the Board of Commissioners. This performance assessment has been disclosed in the Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Fiscal Year and the Company's Annual Report.	***Apply***	**1**
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.6:** Benturan Kepentingan **Sub-Principle 1.6:** Conflict of Interests	1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	Perseroan memiliki kebijakan dan/atau Pedoman bagi Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai Direktur atau Komisaris di korporasi lain di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. Saat ini tidak ada anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur atau Komisaris di korporasi lain di luar grup perseroan.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner shall notify the Board of Commissioners and the chair of the committee that performs the nominating function before accepting a new appointment as a Director or Commissioner of a public corporation, another Director position, or any other position with a significant time commitment.	The Company has policies and/or guidelines for Directors serving or seeking to serve as Directors or Commissioners in other corporations, as outlined in the Articles of Association and the Board Manual. Currently, no members of the Board of Directors serve as Directors or Commissioners in corporations outside the Company's group.		
		1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	Perseroan telah mengatur mengenai benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi sebagaimana telah diatur dalam: 1. Piagam Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*); 2. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*). Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan. Dewan Komisaris mengawasi potensi benturan kepentingan dalam Perseroan. Anggota Komisaris dan Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak dapat turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau Direktur yang bersangkutan.	***Apply***	**1**
		The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest between management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest are not involved in monitoring and decision-making regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or their affiliates.	The Company has regulated conflicts of interest between management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions, as stipulated in: 1. Board Manual; 2. Code of Conduct. All members of the Board of Commissioners and Directors have signed a Statement of No Conflict of Interest. The Board of Commissioners monitors potential conflicts of interest within the Company. Members of the Board of Commissioners and Directors who have a conflict of interest may not participate in monitoring and decision-making regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or Director in question.		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 1:** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 1.7:** Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Sub-Principle 1.7:** Competency Improvement for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka sejak baru diangkat melalui program pengenalan yang formal dan memadai. Dewan Komisaris dan Direksi juga rutin mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun kajian dari fungsi *Legal & Compliance*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengajukan usulan program untuk mengikuti *focus group discussion*, seminar, dan *workshop* sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diatur dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual)* melalui Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi halaman 436-445. Realisasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	***Apply***	**1**
		The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, and other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities from the moment they are appointed through a formal and adequate induction program. The Board of Commissioners and the Board of Directors also regularly participate in various training and competency improvement programs. Additionally, the Board of Commissioners and the Board of Directors regularly receive accurate, timely, and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors, and the corporate business environment through Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and reviews from the Legal & Compliance function. In order to support the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors related to the supervision and management of the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors may submit program proposals to participate in focus group discussions, seminars, and workshops according to the needs as stipulated in the Board Manual through the Board of Commissioners and the Board of Directors Competency Improvement Program on page 436-445. The realization of training and competency improvement activities attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors is disclosed in the Annual Report.		
Total Apply Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Total Apply for Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners					**29**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 1 (Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors	9	8	1
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Directors and its Members	2	2	0
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	13	12	1
1.4	Pembentukan Komite Committee Establishment	3	3	0
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members	1	1	0
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest	2	2	0
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Improving the Competence of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	1	1	0
	TOTAL	**31**	**29**	**2**

Dari total 31 (tiga puluh satu) item rekomendasi pada Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) item rekomendasi, kemudian masih terdapat 2 (dua) item rekomendasi yang masuk kategori *Explain* atau dijelaskan.

Out of a total of 31 (thirty-one) recommendation items under Principle 1 (Roles and Responsibilities of the Board of Directors), the Company has applied 29 (twenty-nine) recommendation items, while 2 (two) recommendation items fall into the Explain category.

2. KOMPOSISI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Prinsip Principle	**Sub Prinsip** Sub-Principle	**Rekomendasi** Recommendation	**Pelaksanaan** Implementation	**Status** (*Apply/ Explain*)	**Score**
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Prinsip 2:** Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	**Sub Prinsip 2.1:** Komposisi Direksi **Sub Prinsip 2.1:** Komposisi Direksi	2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau Pemegang Saham Mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective Director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	**N/A (*Not Applicable*)** karena berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, proses pengangkatan dan /atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak melalui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Demikian pula penggunaan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun dalam praktiknya pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Pasal 5 (SAHAM). **N/A (Not Applicable)** because based on document reviews and confirmation, the process to appoint and/or dismiss members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners does not involve the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners did not use independent sources either to determine qualified candidates. However, in practice, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is conducted directly by the Holder of the Dwiwarna A Series Share, which is owned especially by the Republic of Indonesia and grants its holders special Rights, based on the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES).	***Explain***	**0**
		2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	**N/A (*Not Applicable*)** karena berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, proses pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak melalui rekomendasi atau usulan Dewan Komisaris. Namun dalam praktiknya pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Pasal 5 (SAHAM).	***Explain***	**0**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		The Board of Commissioners ensures that criteria for the selection of members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills, and expertise required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pays attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	**N/A (Not Applicable)** because based on document reviews and confirmation, the process to appoint and/or dismiss members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners does not involve the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners did not use independent sources either to determine qualified candidates. However, in practice, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is conducted directly by the Holder of the Dwiwarna A Series Share, which is owned especially by the Republic of Indonesia and grants its holders special Rights, based on the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES).		
		2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Dalam proses pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan dalam hal ini RUPS mempertimbangkan berbagai aspek keberagaman, seperti usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian individu yang bersangkutan. Keberagaman komposisi ini menjadi bagian integral dari upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bagian profil anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	***Apply***	**1**
		Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and the Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	In the process of appointing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company, in this case represented by the GMS, considers multiple aspects of diversity, such as age, educational background, work experience, and individual expertise. The diversity of composition is an integral part of the Company's efforts to enhance the quality of decision-making process. The corporate policy on the diversity of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report's profile section of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.		
		2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris telah jelas dan transparan, kebijakan dan prosedur juga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bab Tata Kelola. Perseroan telah memiliki pedomana Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris; Nominasi anggota Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman karier profesional masing-masing. Keberagaman Anggota Dekom terlihat dalam profil (CV) masing-masing Anggota Dewan Komisaris.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures to select and nominate Commissioners are clear and transparent. The policies and procedures have also been disclosed in the Governance chapter of the Annual Report. The Company already has a manual for the Nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Nomination of members of the Company's Board of Commissioners is conducted by taking into account the educational background and professional experience of each candidate. The diversity of Members of the Board of Commissioners is detailed in the profile (CV) of each Member of the Board of Commissioners.		
		2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi nominasi berdasarkan prosedur dan kriteria nominasi yang tertuang dalam Piagam Komite Nominasi dan GCG (NRGCG) PGN yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal Jakarta, 18 Januari 2024 Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tercantum di dalam: 1. Undang-Undang RI Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik; 3. Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 14 Ayat (12); 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	***Apply***	**1**
		The Board of Commissioners/ Committee, which carries out the nomination function, determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix, which has been approved by the Board of Commissioners, and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	The Nomination and Remuneration Committee performs the nomination function based on the nomination procedures and criteria set out in the Charter of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee (NRGCG) of PGN that has been approved by the Board of Commissioners in Jakarta on 18 January 2024. Arrangements of the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are stipulated in: 1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 dated 16 August 2007 on Limited Liability Companies; 2. Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies; 3. Articles of Association of the Company dated 11 May 2021 Article 14 Paragraph (12); 4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Companies.		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan Perseroan, termasuk didalamnya keberagaman keahlian dan jumlah komposisi Dewan Komisaris. Perseroan memiliki Pedoman Nominasi untuk anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris PGN saat ini mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. The composition of members of the Board of Commissioners has met the Company's needs, including diversity of expertise and number of members of the Board of Commissioners. The Company has the Nomination Manual for members of the Board of Commissioners. Current members of PGN's Board of Commissioners reflect diversity in abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender. The diversity of members of the Board of Commissioners can be found in the Board of Commissioners Profile section.	*Apply*	1
		2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.	Dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, 3 (tiga) anggota atau 50% (lima puluh persen) adalah Komisaris Independen. Oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik, yang mensyaratkan lebih dari 30% anggota Komisaris harus independen. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	Out of 6 (six) members of the Board of Commissioners, 3 (three) members or 50% (fifty percent) are Independent Commissioners. Therefore, the Company has complied with the provision of Regulation of the Financial Services Authority Number 33/ POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies, which requires that independent members make up more than 30% of the Board of Commissioners. Based on the Articles of Association of the Company, members of the Board of Commissioners are appointed for a term starting from the date determined by the GMS that appoints them and ending at the conclusion of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, provided that it does not exceed a period of 5 (five) years, with due regard to applicable laws and regulations in the capital market sector, but without reducing the right of the GMS to dismiss Members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends. Once their term of office ends, Members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.		
		2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	**N/A (*Not Applicable*)** karena berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak melalui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun dalam praktiknya pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yaitu saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Pasal 5 (SAHAM).	***Explain***	**0**
		To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder trust, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the designation and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	**N/A (Not Applicable)** because based on document reviews and confirmation, the process to appoint and/or dismiss members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners does not involve the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners did not use independent sources either to determine qualified candidates. However, in practice, the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is conducted directly by the Holder of the Dwiwarna A Series Share, which is owned especially by the Republic of Indonesia and grants its holders special Rights, based on the Company's Articles of Association Article 5 (SHARES).		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Principle 2:** Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	**Sub Prinsip 2.2:** Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris **Sub-Principle 2.2:** Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2.2.1 Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi The policy on the remuneration for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Remuneration for the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners for decision by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Penetapan remunerasi Direksi dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberikan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota, situasi ekonomi serta kinerja korporasi mengusulkan remunerasi Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan tembusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham seri B (saham mayoritas) PGN. Selanjutnya RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Remuneration of the Board of Directors is determined based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Based on evaluation results and input from the Nomination and Remuneration Committee in account of the role of each member, economic situation, and corporate performance, the Board of Commissioners proposes the remuneration for the Board of Directors to the Minister of State-Owned Enterprises as the Holder of the Dwiwarna A Series Share, with a copy to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the holder of Series B shares (majority shares) of PGN. Furthermore, the GMS determines the salaries/honoraria, allowances, facilities, and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	***Apply***	**1**
		2.2.2 Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Ketentuan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi mengacu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Proses penyampaian usulan hingga penetapan tantiem dan gaji/honorarium Dewan Komisaris sebagaimana tersebut pada prinsip 2.2.1 di atas.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		The policy on the remuneration for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration for the Board of Commissioners proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, economic situation, and corporate performance. Moreover, the position of President Commissioner and chairpersonship and membership in committees must also be taken into account.	The policy on the remuneration for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Provisions regarding matters that need to be considered in preparing the structure, policies, and amount of remuneration refer to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The process for submitting proposals and determining bonuses and salaries/ honoraria for the Board of Commissioners is as stated in principle 2.2.1 above.		
		2.2.3 Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining the remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan tata cara dan prosedur yang dinyatakan dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi ekonomi/pasar. The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined based on the methods and procedures stated in the Manual for Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining the policy on remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, based on achievements, qualifications, and competencies of Directors and Commissioners, taking into account corporate operational performance, individual performance, and economic/market conditions.	*Apply*	1
Total Apply Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Total Apply for Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners					**8**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 2 (Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 2 (Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendations	*Apply*	*Explain*
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	8	5	3
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	3	0
	TOTAL	**11**	**8**	**3**

Dari total 11 (sebelas) item rekomendasi pada Prinsip 2 (Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 8 (delapan) item rekomendasi, kemudian masih terdapat 3 (tiga) item rekomendasi yang masuk kategori *Explain* atau dijelaskan.

Out of a total of 11 (eleven) recommendation items under Principle 2 (Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners), the Company has applied 8 (eight) recommendation items, while 3 (three) recommendation items fall into the Explain category.

3. HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS
Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris **Principle 3:** Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	**Sub Prinsip 3.1:** Sifat Hubungan Kerja **Sub Prinsip 3.1:** Sifat Hubungan Kerja	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is important to maintain information confidentiality to prevent leakage of confidential information.	Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan Board Manual PGN. Mekanismenya antara lain melalui Rapat Gabungan Direksi - Komisaris, sebagaimana yang dimuat dalam Rekapitulasi Risalah Rapat BOC - BOD PGN tahun 2025. The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Company's Governance Manual and the Board Manual of PGN. The mechanism involves a Joint Meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as stated in the Recapitulation of Minutes of the 2025 BOC - BOD Meeting.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Board Manual dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Perseroan. Dalam Proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan RJPP & RKAP. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 062000.K/PR.00/PDO/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Suplemen hingga 2034 dan Visi Misi PT PGN Tbk	*Apply*	1
		Aligned with their respective duties and roles, the Board of Directors works together with the Board of Commissioners to formulate the corporate mission, vision, and strategies and regularly discuss the implementation.	The Board of Commissioners and the Board of Directors have performed their duties and responsibilities according to the Articles of Association, Board Manual, and provisions applicable within the Company in formulating, discussing, and approving the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number: 062000.K/PR.00/PDO/2024 on the Stipulation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2025–2029 with Supplements Extending to 2034 and Vision and Mission of PT PGN Tbk.		
		3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.	Terdapat Tugas dan wewenang Sekretaris Perseroan yg termuat dalam website Perseroan dalam Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretaris Perseroan	*Apply*	1
		The Corporate Secretary plays an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with Shareholders and other stakeholders.	The duties and authority of Corporate Secretary are stated in the Company's website in the Functions and Responsibilities of Corporate Secretary menu.		

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris **Principle 3:** Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	**Sub Prinsip 3.2:** Akses Informasi Dewan Komisaris Sub Prinsip 3.2: Akses Informasi Dewan Komisaris **Sub-Principle 3.2:** Access to Information of the Board of Commissioners	3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Board Manual pada bab Wewenang Dewan Komisaris, telah mengatur mengenai hak Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari Direksi. Dewan Komisaris dapat berinteraksi dengan Direksi baik secara langsung maupun melalui rapat gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi.	***Apply***	1
		The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request additional information from the Board of Directors at any time.	The Board Manual in the Authority of the Board of Commissioners chapter regulates the rights of the Board of Commissioners to obtain accurate and relevant information from the Board of Directors. The Board of Commissioners may interact with the Board of Directors directly and through a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	***Apply***	1
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris **Principle 3:** Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	**Sub Prinsip 3.3:** Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi **Sub-Principle 3.3:** Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Impact of Ownership Structure on the Corporation	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memperhitungkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-Pemegang Saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and relationships between Shareholders that may impact the management and operations of the corporation.	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur Pemegang Saham dan hubungan antar Pemegang Saham tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Seluruh Keputusan dan kebijakan yang diambil Direksi dan Dewan Komisaris diambil secara independent dan transparan demi kepentingan Perseroan. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the Shareholder structure and relationships between Shareholders do not affect the implementation of their roles and responsibilities. All Decisions and policies taken by the Board of Directors and the Board of Commissioners are made independently and transparently for the benefit of the Company.	***Apply***	1
Total Apply Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Total Apply for Principle 3: Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners					5

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untukPrinsip 3 (Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris):

The following outlines the Company's compliance assessment results forPrinciple 3 (Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Work Relationship	3	3	0
3.2	Akses Informasi Dewan Komisaris Access to Information of the Board of Commissioners	1	1	0
3.3	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Impact of Ownership Structure on the Corporation	1	1	0
	TOTAL	**5**	**5**	**0**

Dari total 5 (lima) item rekomendasi pada Prinsip 3 (Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 5 (lima) item rekomendasi.

Out of a total of 5 (five) recommendation items under Principle 3 (Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners), the Company has applied all 5 (five) recommendation items.

4. PERILAKU ETIS DAN BERTANGGUNG JAWAB
Ethical and Responsible Behavior

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinisip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab **Prinisip 4:** Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	**Sub Prinsip 4.1:** Pedoman Etika dan Perilaku **Sub-Principle 4.1:** Code of Ethics and Code of Conduct	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku Etika yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya;	Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pedoman Perilaku Etika dan Pakta Integritas BOC, BOD & Pegawai This provision has been stated in the Code of Conduct and Integrity Pact of the BOC, BOD, & Employees.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelangganny; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.			

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		This statement is stipulated in the Code of Conduct and Business Ethics, which must explicitly express the corporate expectations that every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as employees will: a. Act in the best interests of the corporation; b. Act honestly and with high standards of integrity; c. Be independent and act on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and due care; d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate Code of Ethics; f. Not engage or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will negatively impact the reputation of the corporation; g. Not take advantage of property or information that is owned by the corporation, other asset ownership, or its customers for personal gain or that causes harm to the corporation and its customers; h. Not exploit their position or the opportunities generated by their position for personal gain;			

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		i. Avoid the act of requesting or receiving payments, gratuities, or other benefits from third parties for oneself or for other people that gives rise to a conflict of interest/provides benefits to third parties in violation of statutory regulations; j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other forms of public communications.			
		4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti-suap, anti-korupsi, anti-kecurangan (anti-fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti-pencucian uang, anti-suap, anti-korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors stipulate anti-money-laundering and anti-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement policies and practices with reference to national and international standards on anti-money-laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	Perseroan telah memiliki kebijakan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan P-003/0.20 PT PGN Tbk, Oktober 2020 dan Pedoman Perilaku Etika The Company has the Manual for Anti-Bribery Management System P-003/0.20 PT PGN Tbk, October 2020 and Code of Conduct	*Apply*	1
Prinisip 4 Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab **Principle 4:** Ethical and Responsible Behavior	**Sub Prinsip 4.2:** Nilai-nilai dan Budaya Organisasi **Sub-Principle 4.2:** Organizational Values and Culture	4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. 4.2.1 The corporation articulates, cultivates, and expresses corporate culture and values.	Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN turut mengimplementasikan core values BUMN AKHLAK sebagai budaya Perseroan. Program Budaya AKHLAK Subholding Gas. Budaya dan nilai-nilai korporasi. Juga diungkapkan pada Laporan Tahunan. As part of the Oil and Gas Holding, PGN also implements the SOE AKHLAK core values as part of the Company's corporate culture. The AKHLAK Culture Program for Gas Subholding and corporate culture and values are disclosed in the Annual Report.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 4 Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab **Principle 4:** Ethical and Responsible Behavior	**Sub Prinsip 4.3:** Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya **Sub-Principle 4.3:** Communications and Enforcement of Code of Ethics, Values, and Culture	4.3.1 Pedoman Perilaku Etika dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The Company Code of Conduct are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees. They are enforced and integrated into the corporate strategies and operations, including the risk management system and remuneration structure.	Perseroan telah mengkomunikasikan Pedoman Perilaku Etika kepada semua Insan Perseroan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi melalui penerapan Pedoman Perilaku Etika. Penegakan Pedoman/kebijakan Perseroan didukung dengan penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. The Company has effectively communicated the corporate Code of Conduct to all Company Personnel and integrated them into its corporate strategies and operations through the implementation of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines. Enforcement of the Company's Guidelines/ policies is supported by the application of sanctions for any proven violations.	***Apply***	**1**
Total Apply Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Total Apply for Principle 4: Ethical and Responsible Behavior					**4**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 4 - Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 4 (Ethical and Responsible Behavior):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conducts	2	2	0
4.2	Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture	1	1	0
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Conducts, Values, and Culture	1	1	0
	TOTAL	**4**	**4**	**0**

Dari total 4 (empat) item rekomendasi pada Prinsip 4 (Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 4 (empat) item rekomendasi.

Out of a total of 4 (four) recommendation items under Principle 4 (Ethical and Responsible Behavior), the Company has applied all four (4) recommendation items.

5. MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN
Risk Management, Internal Control, and Compliance

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5:** Risk Management, Internal Control, and Compliance	**Sub Prinsip 5.1:** Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Sub-Principle 5.1:** Internal Control and Compliance	5.1.1 Direksi melakukan review secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil review kepada para Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan Korporasi.	Direksi telah melakukan review secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil review kepada para Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan Korporasi.	*Apply*	1
		The Board of Directors conducts regular reviews of the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and the Company's compliance, and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Company's Annual Report.	The Board of Directors has conducted regular reviews of the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and the Company's compliance, and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Company's Annual Report.		
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5:** Risk Management, Internal Control, and Compliance	**Sub Prinsip 5.2:** Manajemen Risiko Sub Principle 5.2: Risk Management	5.2.1 Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk is one unit, disclosed in a transparent manner, incorporated into the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Strategi dan risiko telah diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi, termuat dalam Risalah rapat BOC-BOD tanggal 22 Januari 2025, No: 1/UNDD.00/D.KOM/2025 dengan agenda rapat Laporan Manajemen. The Company has disclosed its strategy and risks in a transparent manner and incorporated into the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, as documented in the Minutes of Meeting of the BOC-BOD, dated January 22, 2025, Number 1/UNDD.00/D.KOM/2025, under the Management Report agenda.	*Apply*	1
		5.2.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan Manajemen Risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the Company's risk management.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan Manajemen Risiko korporasi, termuat dalam Risalah rapat BOC PGN tahun 2025, Kamis 27 Februari 2025, No: 06/UNDE.00/D-KOM/2025. The Risk Management Oversight Committee assists in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the Company's risk management, as documented in the Minutes of Meeting of the 2025 BOC of PGN, on Thursday, February 27, 2025, Number 06/UNDE.00/D-KOM/2025.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5:** Risk Management, Internal Control, and Compliance	**Sub Prinsip 5.3:** Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan **Sub Principle 5.3:** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance	5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, Manajemen Risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity to ensure that the Company can achieve its objectives.	Direksi telah membangun sistem governansi, Manajemen Risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya, termuat dalam Risalah rapat BOC-BOD PGN, Kamis 27 November 2025 No: 11/UNDD.00/D-KOM/2025. The Board of Directors has established an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity to ensure that the Company can achieve its objectives, as documented in the Minutes of Meeting of the BOC-BOD of PGN, on Thursday, November 27, 2025, Number 11/ UNDD.00/D-KOM/2025.	***Apply***	**1**
		5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently perform functions that could lead to a conflict of interest.	Melalui konfirmasi Direksi telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Based on the Board of Directors' confirmation, the unit in charge of the compliance function does not hold any concurrent roles that may create potential conflicts of interest.	***Apply***	**1**
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan **Principle 5:** Risk Management, Internal Control, and Compliance	**Sub Prinsip 5.4:** Audit Internal **Sub Principle 5.4:** Internal Audit	5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi Audit Internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Directors, through the Audit Committee, oversees and ensures that the internal audit function assists the Company in achieving its goals by using an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan bahwa fungsi Audit Internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat, termuat dalam Risalah rapat BOC PGN tahun 2025, Kamis 27 Maret 2025, No: 10/UNDE.00/D-KOM/2025. The Board of Directors, through the Audit Committee, has overseen and ensured that the internal audit function assists the Company in achieving its goals by using an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance, as documented in the Minutes of Meeting of the 2025 BOC of PGN, on Thursday, March 27, 2025, Number 10/UNDE.00/D-KOM/2025.	***Apply***	**1**
Total Apply Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Total Apply for Principle 5: Risk Management, Internal Control, and Compliance					**4**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 5 - Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 5 (Risk Management, Internal Control, and Compliance):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance	1	1	0
5.2	Manajemen Risiko Risk Management	2	2	0
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management, and Compliance	2	2	0
5.4	Audit Internal Internal Audit	1	1	0
	TOTAL	**6**	**6**	**0**

Dari total 6 (enam) item rekomendasi pada Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 6 (enam) item rekomendasi.

Out of a total of 6 (six) recommendation items under Principle 5 (Risk Management, Internal Control, and Compliance), the Company has applied all 6 (six) recommendation items.

6. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI
Disclosure and Transparency

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle		Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi **Principle 6:** Disclosure and Transparency	**Sub Prinsip 6.1:** Kebijakan Pengungkapan **Sub Principle 6.1:** Policy on Disclosure	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The Company has disclosure and transparency policies and procedures in place to ensure that material information is disclosed while also safeguarding the Company's sensitive and confidential information.	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi, yaitu: Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Nomor: P-001/0.36. The Company has disclosure and transparency policies and procedures, namely the Information and Communication Technology Governance Guidelines, Number: P-001/0.36.	*Apply*	1
		6.1.2	Hak Pemegang Saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The Rights of Shareholders to obtain relevant material information regularly and in a timely manner must be met.	Hak Pemegang Saham untuk memperoleh informasi material yang relevan tentang korporasi secara teratur dan tepat waktu diwujudkan melalui penyediaan informasi yang lengkap bagi Pemegang Saham pada website Perseroan, yaitu pada bagian keterbukaan informasi. The Rights of Shareholders to obtain relevant material information regularly and in a timely manner is facilitated through the provision of comprehensive information on the Company's website, under the information disclosure section.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi **Principle 6:** Disclosure and Transparency	**Sub Prinsip 6.2:** Kebijakan Pengungkapan **Sub Principle 6.2:** Policy on Disclosure Financial and Sustainability Reports	6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Company discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate and complete and that investors have the information they need to make the right investment decisions.	Korporasi telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial statements that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate and complete and that investors have the information they need to make the right investment decisions.	*Apply*	1
		6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audits on financial statements carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee has ensured the quality of audits on financial statements carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	*Apply*	1
		6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Laporan keberlanjutan telah disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional, dan telah terdapat dalam website Perseroan. The sustainability report has been prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply*	1
		6.2.4 Korporasi menerbitkan Laporan Tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu Pemegang Saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	Korporasi telah menerbitkan Laporan Tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu Pemegang Saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	Score
		The Company publishes an integrated Annual Report that puts historical performance into context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects, allowing shareholders and stakeholders to understand the Company's strategic goals and progress in creating sustainable value.	The Company has published an integrated Annual Report that puts historical performance into context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects, allowing shareholders and stakeholders to understand the Company's strategic goals and progress in creating sustainable value.		
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi **Principle 6:** Disclosure and Transparency	**Sub Prinsip 6.3:** Diseminasi Informasi **Sub Principle 6.3:** Dissemination of Information	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.	Perseroan menyediakan akses informasi yang setara, tepat waktu dan relatif murah yaitu melalui website Perseroan yang didalamnya terdapat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang dapat diunduh secara gratis dan mudah. The Company provides equitable, timely, and relatively inexpensive access to information through the Company's website, where the Annual Reports and the Sustainability Reports are available for free and effortless download.	Apply	1
		6.3.2 Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Company ensures that an annual statement on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for at least five years.	Korporasi telah memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Company has ensured that an annual statement on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for at least five years.	Apply	1
		6.3.3 Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.	PGN hanya terdaftar di Pasar Modal di yurisdiksi asal atau Bursa Efek Indonesia.	***Apply***	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	Score
		Companies listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction must clearly disclose the applicable laws and regulations on corporate governance. In cross-listing arrangements, the criteria and procedures for cross-listing, as well as those for recognizing primary listing requirements, must be transparent and duly-documented.	PGN is listed exclusively on the capital market of its home jurisdiction, the Indonesia Stock Exchange.		
Total Apply Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi **Total Apply for Principle 6: Disclosure and Transparency**					**9**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 6 (Pengungkapan dan Transparansi):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 6 (Disclosure and Transparency):

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Apply	Explain
6.1	Kebijakan Pengungkapan Policy on Disclosure	2	2	0
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports	4	4	0
6.3	Diseminasi Informasi Dissemination of Information	3	3	0
	TOTAL	**9**	**9**	**0**

Dari total 9 (sembilan) item rekomendasi pada Prinsip 6 (Pengungkapan dan Transparansi), Perseroan telah Apply atau menerapkan sebanyak 9 (sembilan) item rekomendasi.

Out of a total of 9 (nine) recommendation items under Principle 6 (Disclosure and Transparency), the Company has applied all 9 (nine) recommendation items.

7. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
Protection on the Rights of Shareholders

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle		Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	*Score*
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham **Principle 7:** Protection on the Rights of Shareholders	**Sub Prinsip 7.1:** Hak Pemegang Saham **Sub Principle 7.1:** Rights of Shareholders	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi Pemegang Saham atau investor.	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor yaitu Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Dokumen: P-001/0.36 Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perseroan kepada Investor dan Komunitas Pasar Modal PGN dengan Nomor Dokumen: O-001/21.06/2023 Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam website: https://pgn.co.id/investor-relations.	Apply	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	*Score*
		The Company has established a communication policy that facilitates and encourages Shareholders or Investors participation.	The Company has established a policy for communicating with Shareholders and investors, which is outlined in the Information and Communication Technology Governance of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, under Document Number P-001/0.36, as well as the Operating Procedure for the Disclosure of Corporate Information to Investors and the Capital Market Community of PGN, under Document Number O-001/21.06/2023. These policies have been disclosed on the Company's website at https://pgn.co.id/investor-relations.		
		7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang didalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Parent companies ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and common control entities in which they have a significant investment.	Board Manual, Bab IV Tata Kerja Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris, 4.1.2 Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan, hlm 70 Board Manual, Chapter IV on the Work Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, Section 4.1.2 on Principles for the Management of Subsidiaries, p. 70.	*Apply*	1
		7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua Pemegang Saham sesuai dengan kelasnya. The Company has rules and procedures in place that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions, such as mergers and sales of significant corporate assets, to ensure that the transactions take place in a transparent and reasonable manner while also protecting the rights of all shareholders based on class.	Anggaran Dasar, Pasal 29 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan. Articles of Association, Article 29 on Merger, Consolidation, Acquisition, and Spin-off.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	*Score*
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham **Principle 7:** Protection on the Rights of Shareholders	**Sub Prinsip 7.2:** Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham **Sub Principle 7.2:** Fair Treatment of Shareholders	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. Semua Pemegang Saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan Pemegang Saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Company has rules and regulations in place to ensure: a. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally. b. Disclosure of the rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 tentang Saham ayat (1), seluruh saham merupakan saham atas nama yang memiliki hak suara yang sama (satu saham satu suara). Dengan demikian, seluruh Pemegang Saham diperlakukan secara setara dalam hal hak suara, meskipun tidak disebutkan adanya perbedaan seri saham. Kesetaraan hak suara tersebut merupakan salah satu aspek fundamental dalam perlakuan yang adil bagi Pemegang Saham. Pursuant to Article 5 on Shares paragraph (1) of the Company's Articles of Association, all shares are registered shares carrying equal voting rights (one share, one vote). Accordingly, all Shareholders are treated equally with respect to voting rights, even though no distinction between share series is specified. This equality of voting rights constitutes one of the fundamental aspects of fair treatment for Shareholders.	Apply	**1**
		7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan Pemegang Saham. The Company has rules and procedures in place to ensure the related-party transactions are approved and executed in a manner that provides assurance that conflicts of interest are properly managed and that the interests of the Company and its shareholders are protected.	Perseroan memiliki kebijakan dalam bentuk Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi tanggal 31 Desember 2024 untuk memastikan proses transaksi pihak berelasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat untuk melindungi kepentingan korporasi dan Pemegang Saham. The Company has a policy, which is the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines, dated December 31, 2024, which ensures that the related-party transaction process runs in accordance with applicable regulations and is managed appropriately and is able to protect the interests of the Company and its shareholders.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	*Score*
		7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Company has established and disclosed policies to prevent insider trading. The Company has clear rules in place for any trading in the Company's shares by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not/ not yet available on the market.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik insider trading, yang mengatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang dikategorikan sebagai orang dalam dilarang memanfaatkan informasi material yang belum tersedia bagi publik untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi saham Perseroan. Informasi terkait transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025, halaman 311-315 (Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi) The Company has established a policy to prevent insider-trading practices, stipulating that the Board of Directors, the Board of Commissioners, and any parties categorized as insiders are prohibited from using material information that has not been made public to obtain gains through transactions involving the Company's shares. Information regarding transactions that may give rise to conflicts of interest and affiliated transactions is disclosed in the Company's 2025 Annual Report, page 311-315 (Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions).	*Apply*	1
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham **Principle 7:** Protection on the Rights of Shareholders	**Sub Prinsip 7.3:** Rapat Umum Pemegang Saham **Sub-Principle 7.3:** General Meeting of Shareholders	7.3.1. Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi Pemegang Saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The Company issues a notice of the GMS by providing the meeting agenda and materials as comprehensively and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to ensure that Shareholders have sufficient time and information to thoroughly review the matters to be discussed. The meeting notice and all GMS-related information are disclosed through electronic means, including the Company's website.	Pengumuman RUPS pada tanggal 21 juli 2025, dan pelaksana pada tanggal 27 Agustus 2025. maka panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS sudah terlaksana yaitu paling lambat 28 hari sebelum RUPS. The GMS announcement was made on July 21, 2025, and the meeting was held on August 27, 2025. Accordingly, the notice of the GMS, including the agenda and meeting materials, was provided within the required timeframe, namely no later than 28 days prior to the GMS.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	*Score*
		7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi Pemegang Saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholders participation and effective voting at the GMS.	Pada tanggal 5 agustus 2025, telah di upload pada website Perseroan, Tata Tertib Rapat Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2025. On August 5, 2025, the Rules of Procedure for the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the year 2025 were uploaded on the Company's website.	*Apply*	1
		7.3.3 Pemegang Saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai partisipasi efektif Pemegang Saham dalam proses penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui website Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2025. The Company has disclosed information regarding effective participation of shareholders in the process of appointing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Company's website on August 28, 2025.	*Apply*	1
		7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Company ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2024 melalui website Perseroan pada tanggal 31 Mei 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada Pemegang Saham dalam RUPS. The Company has disclosed information regarding the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the audit of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the 2024 Financial Year through the Company's website on May 31, 2025, as a form of transparency and accountability to Shareholders at the GMS.	*Apply*	1
		7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of the results of the voting and the complete summary of the minutes of the GMS are announced to the public on the next business day.	Perseroan telah menyampaikan hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap kepada publik melalui website Perseroan. RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 dan ringkasan risalahnya diumumkan pada website Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2025, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pengumuman pada hari kerja berikutnya. The Company has submitted the results of the voting and the complete summary of the minutes of the GMS to the public through the Company's website. The EGMS was held on August 27, 2025, and the summary of the meeting was published on the Company's website on August 28, 2025, thereby fulfilling the requirement for disclosure on the next business day.	*Apply*	1
Total Apply Prinsip7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Total Apply for Principle 7: Protection on the Rights of Shareholders					11

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 7 (Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 7 (Protection on the Rights Shareholders).

No	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
7.1	Hak Pemegang Saham The Rights of Shareholder	3	3	0
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders	3	3	0
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	5	5	0
	TOTAL	**11**	**11**	**0**

Dari total 11 (sebelas) item rekomendasi pada Prinsip 7 (Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 11 (sebelas) item rekomendasi.

Out of a total of 11 (eleven) recommendation items under Principle 7 (Protection on the Rights of Shareholders), the Company has applied all 11 (eleven) recommendation items.

8. PENGHARGAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN
Recognition of Stakeholders' Interests

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	*Score*
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan **Principle 8:** Recognition of Stakeholders' Interests	**Sub Prinsip 8.1:** Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci **Sub-Principle 8.1:** Key Stakeholder Engagement	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	Perseroan melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi secara regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. Perseroan telah memiliki saluran/ media komunikasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan atau menyuarakan keluhan, yaitu melalui 1. call center 135, 2. situs web Perseroan (www.pgn.co.id) dan 3. e-mail sebagai berikut: - Investor/ pemegang saham: pgn.investorrelation@pertamina.com - Pelanggan: pcc135@pertamina.com Selain itu Perseroan juga melakukan pertemuan langsung seperti Temu Pelanggan serta pertemuan investor/ investor summit.	***Apply***	**1**

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply/ Explain*)	*Score*
		The Corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their expectations and complaints and the impact of the corporation on them.	The Company, through the Corporate Secretary, maintains regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages with them to understand their expectations and concerns, as well as the impact of the corporation on them. The Company has established communication channels/ media that stakeholders can use to convey opinions and input or voice complaints, including through 1. the call center 135, 2. the Company's website (www.pgn.co.id), and 3. email as follows: - Investors/shareholders: pgn.investorrelation@pertamina.com - Customers: pcc135@pertamina.com Additionally, the Company also conducts face-to-face meetings such as Customer Meetings and investor meetings/investor summits.		
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan **Principle 8:** Recognition of Stakeholders' Interests	**Sub Prinsip 8.2:** Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis **Sub-Principle 8.2:** Integrating Sustainability into Business Models	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan Manajemen Risiko. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including establishing the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in carrying out their roles, including in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.	Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan melalui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2025. Dewan Komisaris dan Direksi juga memasukkan pertimbangan keberlanjutan dalam menjalankan perannya termasuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan Manajemen Risiko. Perseroan memiliki fungsi terkait Environmental, Social, dan Governance yang terdiri dari Fungsi Keberlanjutan Lingkungan, Corporate Social Responsibility, dan fungsi Kepatuhan GCG dan Etika. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that the corporate sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders through the Management Report, Annual Report, and the 2025 Sustainability Report. The Board of Commissioners and the Board of Directors also incorporate sustainability considerations in carrying out their roles, including integrating sustainability aspects into the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and Risk Management. The Company has functions related to Environmental, Social, and Governance, consisting of the Environmental Sustainability Function, Corporate Social Responsibility, and the GCG and Ethics Compliance function.	*Apply*	1

Prinsip Principle	Sub Prinsip Sub-Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status (*Apply*/ *Explain*)	*Score*
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan **Principle 8:** Recognition of Stakeholders' Interests	**Sub Prinsip 8.3:** Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan **Sub-Principle 8.3:** Stakeholder Protection	8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan, hak-hak semua Pemegang Saham sesuai dengan kelasnya. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the implementation of high ethical standards, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders, the rights of all Shareholders according to their class.	Laporan Tahunan 2025, TJSL Kerangka pengelolaan keberlanjutan PGN juga telah diselaraskan dengan ketentuan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan berbagai international best practices. Pengelolaan ini mencakup penerapan standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tahun 2025, PGN terus mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (ISO 22301:2019) untuk meningkatkan ketahanan organisasi. Standar-standar ini memastikan keberlanjutan menjadi bagian integral dari operasional Perseroan, sejalan dengan regulasi dan praktik terbaik global. The 2025 Annual Report, Corporate Social Responsibility (TJSL). PGN's sustainability management framework has also been aligned with the provisions of POJK Number 51/POJK.03/2017 and various international best practices. This management includes the implementation of international management system standards, such as ISO 14001:2015 for Environmental Management Systems and ISO 37001:2016 for Anti-Bribery Management Systems. In 2025, PGN continued to optimize the implementation of its Business Continuity Management System (ISO 22301:2019) to enhance organizational resilience. These standards ensure sustainability is an integral part of the Company's operations, aligned with regulations and global best practices.	***Apply***	**1**
		8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability.	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan antara lain dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan pemberian insentif, mengutamakan keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selain itu Perseroan menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi, yang tujuannya adalah kepada manajemen karier dan promosi. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability, including by addressing employee welfare through incentive policies and prioritizing employee safety and comfort at work. Furthermore, the Company provides various education and training programs for employees to improve their competencies, aimed at career management and promotion.	***Apply***	**1**
Total Apply Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Total Apply for Principle 8: Recognition of Stakeholders' Interests					**4**

Berikut rangkuman hasil penilaian tingkat kepatuhan Perseroan untuk Prinsip 8 - (Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan):

The following outlines the Company's compliance assessment results for Principle 8 - Recognition of Stakeholders' Interests):

No	Sub Prinsip Sub Prinsip	Rekomendasi Recommendation	*Apply*	*Explain*
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci Key Stakeholder Engagement	1	1	0
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integrating Sustainability into Business Models	1	1	0
8.3	Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan Stakeholder Protection	2	2	0
	TOTAL	**4**	**4**	**0**

Dari total 4 (empat) item rekomendasi pada Prinsip 8 (Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan), Perseroan telah *Apply* atau menerapkan sebanyak 4 (empat) item rekomendasi.

Out of a total of 4 (four) recommendation items under Principle 8 (Recognition of Stakeholders' Interests), the Company has applied all 4 (four) recommendation items.

Selanjutnya, hasil penilaian terhadap praktik GCG tersebut menjadi dasar bagi Perseroan untuk mengevaluasi tren perbaikan kinerja tingkat kepatuhan yang telah dicapai dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan guna mengoptimalkan kinerja kepatuhan ke depan.

Subsequently, the results of the assessment of GCG practices serve as the basis for the Company to evaluate trends in improving compliance performance compared to the previous year, thereby enabling the identification of areas that still require improvement in order to optimize compliance performance going forward.

RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2026
GCG STRENGTHENING PLAN IN 2026

Pada tahun 2026, PGN merencanakan penguatan GCG melalui berbagai langkah berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang *Compliance* dan GCG dengan menambah personil yang telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), antara lain Certified Compliance Officer untuk fungsi kepatuhan dan Certified Governance Professional untuk fungsi GCG.
2. Mempersiapkan transisi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari ISO 37001:2016 menjadi ISO 37001:2025. Dalam rangka mendukung transisi tersebut, Perseroan akan melanjutkan pengembangan kompetensi personil melalui sertifikasi Lead Auditor ISO 37001:2025, serta sertifikasi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Manajemen Risiko guna mendukung upaya penguatan personil dalam pelaksanaan GCG berbasis risiko.
3. Sertifikasi ISO 37301:2021 CMS dalam rangka mendukung kepatuhan sistem manajemen di PGN.

In 2026, PGN plans to strengthen GCG through the following initiatives:

1. Enhancing the capabilities of human resources in the area of Compliance and GCG by increasing the number of certified personnel by the National Professional Certification Agency (BNSP), including Certified Compliance Officer and Certified Governance Professional for the GCG function.
2. Preparing for the transition of the Anti-Bribery Management System implementation from ISO 37001:2016 to ISO 37001:2025. To support this transition, the Company will continue to develop personnel competencies through Lead Auditor ISO 37001:2025 certification, as well as certifications in Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Risk Management to strengthen personnel capacity in implementing risk-based GCG.
3. ISO 37301:2021 CMS certification to support management system compliance at PGN.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

07





Informasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PGN 2025 diungkapkan secara komprehensif di dalam Laporan Keberlanjutan PGN 2025, yang disajikan dalam buku terpisah.

Information on the 2025 PGN Corporate Social Responsibility has been comprehensively disclosed in the 2025 PGN Sustainability Report, which is presented in a separate book.

IMPLEMENTASI KONSEP KEBERLANJUTAN DAN INTEGRASINYA DALAM PROSES BISNIS PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY CONCEPT AND ITS INTEGRATION INTO THE COMPANY'S BUSINESS PROCESSES

PGN memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan aspek keberlanjutan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perusahaan dengan mendorong inovasi, akses ke energi bersih, dan menciptakan nilai jangka panjang. PGN juga berkomitmen untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, kebijakan, dan preferensi konsumen terhadap bisnis.

Lebih lanjut, pelaksanaan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan juga penting untuk mengelola risiko serta meningkatkan reputasi dan daya tarik PGN, sehingga dapat menarik investor dan mitra bisnis yang berkelanjutan. Informasi secara lengkap mengenai hal ini telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.

PGN demonstrates a strong commitment to implementing sustainability aspects to sustain the Company's sustainability growth by encouraging innovation, providing access to clean energy, and creating long-term value. PGN is also committed to anticipating the impacts of climate change, regulatory changes, and shifting consumer preferences on its business.

Furthermore, the implementation of sustainability within the Company is crucial for risk management and improving PGN's reputation and attractiveness, allowing it to attract investors and sustainable business partners. Complete information regarding this matter has been disclosed in the Sustainability Report.

FOKUS KEBERLANJUTAN

Guna mendukung implementasi konsep keberlanjutan ke dalam proses bisnis, PGN memperkuat strategi keberlanjutan melalui penyusunan *Roadmap* ESG Subholding Gas Tahun 2025–2034 sebagai landasan pencapaian ambisi keberlanjutan jangka panjang. Peta jalan ini menjadi dasar perencanaan yang terintegrasi dalam menyeimbangkan kinerja ekonomi, tanggung jawab lingkungan, dan manfaat sosial secara inklusif.

Implementasi *Roadmap* ESG 2025-2034 menjadi wujud kontribusi PGN terhadap percepatan transisi energi bersih, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Sebagai turunan dari strategi tersebut, PGN menetapkan 12 Fokus Keberlanjutan sebagai arah prioritas hingga tahun 2034.

SUSTAINABILITY FOCUS

To support the implementation of sustainability concepts into business processes, PGN bolsters its sustainability strategy by developing the 2025–2034 Gas Subholding ESG Roadmap, which serves as a foundation for achieving its long-term sustainability ambitions. This roadmap serves as the basis for integrated planning that balances economic performance, environmental responsibility, and social benefits in an inclusive manner.

The implementation of PGN's 2025–2034 ESG Roadmap represents the Company's contribution to accelerating the clean energy transition, while also supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. As a derivative of this strategy, PGN has established 12 Sustainability Focus Areas as its key priorities through 2034.

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)
Environmental Social Governance (ESG)

12 Fokus Keberlanjutan Subholding Gas 2025 - 2034
12 Sustainability Focus of Gas Subholding 2025 - 2034

Lingkungan
Environmental

01
Energi & Emisi
Energy & Emissions

02
Limbah & Efluen
Waste & Effluent

03
Keanekaragaman Hayati & Penggunaan Lahan
Biodiversity & Land Use

Sosial
Social

04
Ketenagakerjaan
Employment

05
Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health & Safety (OHS)

06
Pengelolaan Integritas Aset
Asset Integrity Management

07
Hubungan dengan Masyarakat
Community Relations

Tata Kelola
Governance

08
Privasi & Keamanan Data
Data Privacy & Security

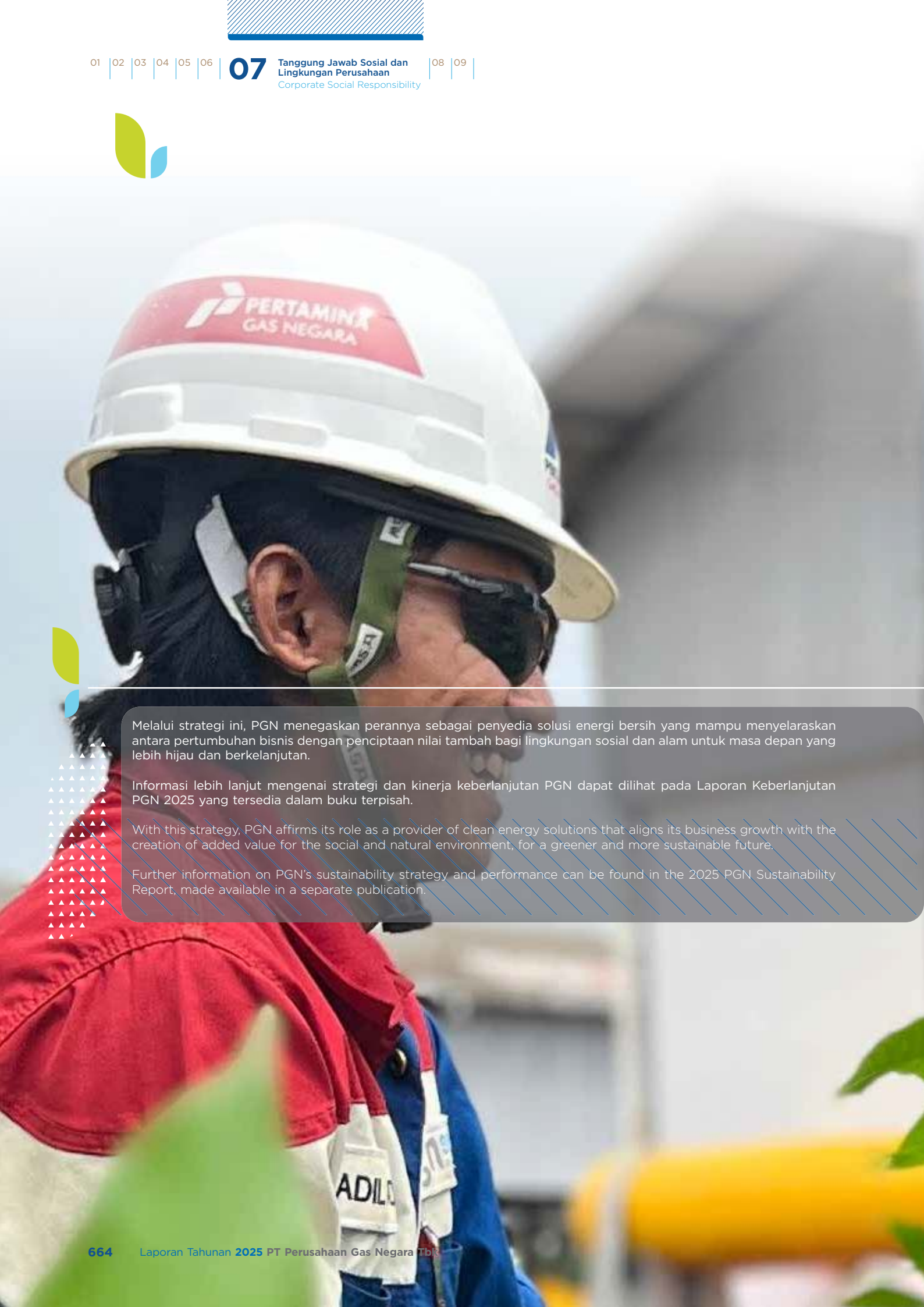
09
Tata Kelola & Etika Bisnis
Governance & Business Ethics

10
Pengelolaan Rantai Nilai
Value Chain Management

11
Produk & Layanan Keberlanjutan
Sustainability Products & Services

12
Aksesibilitas
Accessibility

Aspek Lingkungan Environmental Aspect	PGN memprioritaskan pengelolaan energi, emisi, limbah dan efluen, keanekaragaman hayati serta pelestarian alam. Fokus ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dalam operasional PGN dan meningkatkan efisiensi operasional melalui inisiatif bisnis rendah karbon (*Low Carbon Business*), serta dukungan terhadap pelestarian alam.	PGN puts the management of energy, emissions, waste and effluent, biodiversity, and environmental conservation above everything. This focus aims to reduce carbon emissions generated in PGN's operations and improve operational efficiency through low-carbon business initiatives and support for environmental conservation.
Aspek Sosial Social Aspect	PGN menempatkan perhatian besar pada ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan integritas aset, hubungan dengan masyarakat, serta pengembangan produk dan layanan berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi Pegawai PGN, serta meningkatkan kontribusi positif Perseroan bagi masyarakat dan pelanggan.	PGN puts significant emphasis on employment, Occupational Health and Safety (OHS), asset integrity management, community relations, and sustainable product and service development. These initiatives are designed to create a safe and inclusive work environment for PGN employees and enhance the Company's positive contribution to society and customers.
Aspek Tata Kelola Governance Aspect	PGN fokus pada penguatan pengelolaan rantai nilai, privasi dan keamanan data, tata kelola dan etika bisnis, serta aksesibilitas. Upaya ini mencerminkan tekad PGN dalam menjaga integritas bisnis, transparansi, dan keadilan, sekaligus menjawab tantangan digital dan kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam.	PGN is focused on strengthening value chain management, data privacy and security, governance and business ethics, and accessibility. These efforts reflect PGN's steadfast commitment to maintaining business integrity, transparency, and fairness, while also navigating digital challenges and the needs of diverse stakeholders.



Melalui strategi ini, PGN menegaskan perannya sebagai penyedia solusi energi bersih yang mampu menyelaraskan antara pertumbuhan bisnis dengan penciptaan nilai tambah bagi lingkungan sosial dan alam untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai strategi dan kinerja keberlanjutan PGN dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PGN 2025 yang tersedia dalam buku terpisah.

With this strategy, PGN affirms its role as a provider of clean energy solutions that aligns its business growth with the creation of added value for the social and natural environment, for a greener and more sustainable future.

Further information on PGN's sustainability strategy and performance can be found in the 2025 PGN Sustainability Report, made available in a separate publication.

Secara keseluruhan, terdapat 12 Fokus Keberlanjutan yang diturunkan ke dalam 38 Inisiatif Keberlanjutan, dengan 18 inisiatif sebagai prioritas. Implementasi inisiatif ini dilakukan secara bertahap melalui tiga fase:

In total, there are 12 Sustainability Focus broken down into 38 Sustainability Initiatives, with 18 initiatives as priorities. These initiatives are carried out in stages across three phases:

Fase 1
Phase 1
(2025–2026)



Inisiasi dan akselerasi implementasi awal terhadap prioritas utama keberlanjutan.
Initiating and accelerating initial implementation of key sustainability priorities.

Fase 2
Phase 2
(2027–2030)



Penguatan dan perluasan dampak dari inisiatif keberlanjutan yang telah berjalan.
Strengthening and expanding the impact of existing sustainability initiatives.

Fase 3
Phase 3
(2031–2034)



Integrasi penuh prinsip ESG dalam seluruh proses bisnis dan pencapaian tujuan jangka panjang keberlanjutan.
Integrating ESG principles into all business processes and achievement of long-term sustainability goals.

PROSEDUR DAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Acuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan mengacu pada ketentuan dan standar sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
2. Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021, dengan tingkat pemenuhan "In accordance with" dan beberapa indikator GRI seperti GRI 101: Keanekaragaman Hayati 2024, GRI 102: Perubahan Iklim 2025, serta GRI 103: Energi 2025.
3. *Global Reporting Initiative* (GRI) 11: *Oil and Gas Sector* 2021.

Proses Penentuan Topik Material

PGN melakukan peninjauan topik material setiap tahun guna memastikan prospek bisnis, strategi, dan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan tetap selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Perusahaan melakukan adopsi awal dari Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK), meliputi PSPK 1 dan PSPK 2. Untuk itu, PGN memperluas proses penilaian materialitas dengan menerapkan pendekatan penilaian materialitas ganda (*Double Materiality Assessment*) yang mengintegrasikan kerangka assessment PSPK 1 dan PSPK 2.

Pendekatan ini dianalisis melalui materialitas dampak (*impact materiality*) yang memerhatikan dampak aktivitas Perseroan terhadap lingkungan dan sosial (*inside-out*), serta materialitas finansial (*financial materiality*) yang memetakan dampak kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) terhadap kondisi keuangan (*outside-in*). Informasi lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan topik material disajikan dalam Laporan Keberlanjutan PGN Tahun 2025.

PROCEDURES AND INFORMATION SYSTEMS FOR SUSTAINABILITY REPORT PREPARATION

Reference for Report Preparation

The Sustainability Report is prepared with reference to the following provisions and standards:

1. OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, and the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stipulated in OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Annual Reports of Issuers or Public Companies.
2. Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, with a compliance level of "In accordance with" and several GRI indicators such as GRI 101: Biodiversity 2024, GRI 102: Climate Change 2025, and GRI 103: Energy 2025.
3. Global Reporting Initiative (GRI) 11: Oil and Gas Sector 2021.

Material Topic Determination Process

PGN reviews its material topics annually to ensure that business prospects, strategies, and sustainability initiatives remain aligned with stakeholder needs and expectations.

The company has committed to early adoption of Statement of Sustainability Disclosure Standards (PSPK), consisting of PSPK 1 and PSPK 2. PGN has therefore expanded its materiality assessment process by implementing a Double Materiality Assessment (DMA) approach that integrates the PSPK 1 and PSPK 2 assessment frameworks.

This approach evaluates impact materiality, which considers the Company's impacts on environmental and social aspects (inside-out), and financial materiality, which maps the effects of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on financial conditions (outside-in). Further information on the determination and management of material topics is presented in the 2025 PGN's Sustainability Report.


Taman
Sidrap

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENTS



08



PERTAMINA
GAS NEGARA

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1/1 – 5	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2/1 – 2	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3/1	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4/1 – 2	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5/1 – 243	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PERTAMINA
GAS NEGARA

Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Entitas Anak

Directors' statement letter regarding the responsibility for the consolidated financial statements as of December 31, 2025 and for the year then ended PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk and its Subsidiaries

kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *we, the undersigned:*

1. Nama	:	Arief Kurnia Risdianto SH	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No.20, Jakarta	:	*Office address*
Alamat Domisili	:	Jl. Tebet Timur Raya Blok B no. 47 A RT/RW 009/008, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan	:	*Residential Address*
Nomor Telepon	:	+6221633 9524	:	*Telephone*
Jabatan	:	Direktur Utama/*President Director*	:	*Title*
2. Nama	:	Catur Dermawan	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No.20, Jakarta	:	*Office address*
Alamat Domisili	:	Jl. Patas M2/3 RT/RW 004/011, Cibubur Ciracas, Jakarta Timur	:	*Residential Address*
Nomor Telepon	:	+6221633 9524	:	*Telephone*
Jabatan	:	Direktur Keuangan /*Director of Finance*	:	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan Entitas Anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk and its Subsidiaries (the "Group");*
2. *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of the Group has been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. *The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;*
4. *We are responsible for the internal control systems of the Group.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 04 Maret/*March* 2026

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan/ *Director of Finance*
Arief Kurnia Risdianto SH	**Catur Dermawan**

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KAP Purwanto Susanti dan Surja
Registered Public Accountants KMK No. 69/MK/SK/2025
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk setiap hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For each of the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matters is provided in such context.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal-hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal-hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Pengakuan pendapatan

Penjelasan atas hal audit utama:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, pendapatan konsolidasian Grup adalah US$3,98 miliar, terutama merupakan penjualan gas. Hal ini merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Grup dan merupakan pendorong utama profitabilitas. Pendapatan diakui pada saat kendali atas barang dan jasa telah dialihkan kepada pelanggan pada waktu tertentu atau sepanjang waktu, sesuai kontrak, pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup dapat diperoleh sebagai pertukaran atas barang dan jasa tersebut, dan khusus untuk penjualan niaga gas bumi, yang merupakan 69,7% dari total pendapatan, sesuai distribusi kepada pelanggan berdasarkan pencatatan pada angka meteran.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Revenue recognition

Description of key audit matter:

For the year ended December 31, 2025, the Group's consolidated revenue was amounted to US$3.98 billion, which mainly arising from sales of gas. It is an important measure used to evaluate the performance of the Group and is the main driver of profitability. Revenue is recognized when control of the goods and services is transferred to the customer, at a point in time or over time, in accordance with the contract, at the amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods and services, and specifically for the revenue from gas trading, which represent 69.7% of total revenue, recognized when the natural gas is distributed to the customers based on the meter readings.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat untuk meningkatkan hasil usaha dan mencapai pertumbuhan pendapatan sejalan dengan tujuan Grup, sehingga meningkatkan risiko salah saji material. Karena signifikansi keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2u dan 27 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir memberikan pengungkapan yang relevan terkait hal ini.

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses pendapatan. Atas dasar sampel, kami melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan dengan memeriksa bukti pendukung sampai dengan penerimaan kas untuk memastikan keterjadian atas pendapatan serta telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dicatat pada periode yang tepat. Kami juga melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan yang dicatat menjelang dan tepat setelah tanggal 31 Desember 2025 untuk memastikan pendapatan tersebut telah diakui pada periode yang tepat. Kami juga mengevaluasi kepatutan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan terkait pendapatan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Revenue recognition (continued)

Description of key audit matter:

Revenues may be inappropriately recognized in order to improve business results and achieve revenue growth in line with the objectives of the Group, thus increasing the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall consolidated financial statements and the decisions made by stakeholders. Accordingly, revenue recognition is a key audit matter for us. Notes 2u and 27 to the accompanying consolidated financial statements provide the relevant disclosures related to this matter.

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue process. On sample basis, we performed test of details on revenue transactions by inspecting to the supporting evidence up to cash receipts to ensure the occurrence of the revenue and whether they have been recognized in accordance with the applicable accounting standards and recorded in the proper period. We performed test of details on revenue transactions occurred approaching and immediately after December 31, 2025 to ensure these revenues were recognized in the correct period. We also evaluated the appropriateness and adequacy of the presentation and the relevant disclosures related to revenue in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup mengakui beban depresiasi, deplesi, dan amortisasi ("Beban DD&A") konsolidasian atas properti minyak dan gas bumi sebesar US$132,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Beban DD&A dihitung menggunakan metode unit produksi berdasarkan volume cadangan minyak dan gas bumi dan merupakan pos material dalam laporan keuangan konsolidasian. Estimasi cadangan minyak dan gas bumi mengharuskan manajemen dan pakar manajemen yang ditugaskan untuk menggunakan estimasi dan pertimbangan signifikan, dalam menentukan asumsi kompleks seperti harga minyak dan gas bumi, biaya operasi dan modal di masa mendatang. Oleh karena itu, hal ini adalah hal audit utama bagi kami.

Catatan 3i dan 28 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir menguraiikan pengungkapan yang relevan atas Beban DD&A dan aset minyak dan gas.

Respons audit:

Kami mengevaluasi rancangan dan efektivitas pengendalian utama atas proses estimasi cadangan minyak dan gas bumi. Kami menilai kompetensi, kapabilitas dan objektivitas pakar manajemen yang merupakan konsultan perminyakan independen yang ditugaskan dalam estimasi cadangan minyak dan gas bumi. Kami menguji kelayakan asumsi utama yang digunakan dengan membandingkan proyeksi harga yang digunakan terhadap proyeksi harga minyak pada sumber data publik dan mengevaluasi kelayakan proyeksi biaya modal terhadap rencana jangka panjang Grup dan pengeluaran biaya modal yang telah terjadi. Kami juga menguji konsistensi data cadangan minyak dan gas bumi dalam perhitungan Beban DD&A. Kami juga mengevaluasi kelayakan dan kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan terkait Beban DD&A dan properti minyak dan gas dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Estimation of oil and gas reserves

Description of key audit matter:

The Group recognized consolidated depreciation, depletion and amortization expenses (the "DD&A Expenses") on oil and gas properties amounting to US$132.5 million for the year ended December 31, 2025. The DD&A Expenses are computed using unit of production method based on oil and gas reserves, which are material line items in the consolidated financial statements. The estimation of oil and gas reserves required the management and its expert to use significant estimation and judgment in assessing complex assumptions such as oil and gas price assumptions, and future operating and capital cost. Therefore, this is a key audit matter for us.

Notes 3i and 28 to the accompanying consolidated financial statements provide the relevant disclosures regarding DD&A Expenses and oil and gas properties.

Audit response:

We evaluated the design and operating effectiveness of the key controls over the estimation process of the oil and gas reserves. We assessed the competence, capability and objectivity of the management's expert, an independent petroleum engineering consultant. We assessed the reasonableness of key assumptions by comparing forecast prices used in the reserves' calculation to the crude oil prices forecast data available for public and evaluated the future capital expenditures with the Group's long-term planning and historical capital expenditures. We assessed consistency of the oil and gas reserve data applied in the calculation of DD&A Expenses. We also evaluated the appropriateness and adequacy of the presentation and the relevant disclosures related to DD&A Expenses and oil and gas properties in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal-hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00105/2.1505/AU.1/02/1726-4/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Irwan Haswir
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726/*Public Accountant Registration No. AP.1726*

4 Maret 2026/*March 4, 2026*

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 1/1 *Page*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	**31 Desember/ *December 31,* 2025**	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4a	1.336.288.104	1.383.182.362	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	27.315.839	21.223.203	*Restricted cash*
Investasi jangka pendek	5	-	618.927	*Short term investment*
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	6	130.135.617	162.054.692	*Related parties*
Pihak ketiga	6	268.500.824	223.778.873	*Third parties*
Piutang sewa pembiayaan	14c	1.670.012	6.461.033	*Finance lease receivable*
Piutang lain-lain - neto - pihak ketiga	7	47.374.401	27.781.710	*Other receivables - net - third parties*
Persediaan - neto	8	143.258.153	81.932.846	*Inventories - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak	21a	41.533.847	34.173.305	*Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*
Uang muka	9	60.631.583	18.549.712	*Advances*
Beban dibayar di muka	10	17.215.702	27.205.099	*Prepaid expenses*
Total aset lancar		**2.073.924.082**	**1.986.961.762**	***Total current assets***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	158.744.853	148.412.844	*Restricted cash*
Piutang sewa pembiayaan	14c	75.763.005	76.991.693	*Finance lease receivable*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	11	43.924.136	46.139.826	*Other non-current receivables third parties*
Uang muka - bagian tidak lancar	9, 43	1.652.634	3.378.141	*Advances - non-current portion*
Beban dibayar di muka - bagian tidak lancar	10	30.392.763	30.329.186	*Prepaid expenses - non-current portion*
Penyertaan saham dan ventura bersama	12	305.825.339	311.953.210	*Investment in shares and joint ventures*
Aset tetap - neto	13a	2.470.039.165	2.509.268.088	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	14a	326.512.717	371.293.921	*Right-of-use assets - net*
Aset eksplorasi dan evaluasi	15a	50.494.842	65.231.075	*Exploration and evaluation assets*
Properti minyak dan gas - neto	15b	564.143.910	695.790.038	*Oil and gas properties - net*
Aset takberwujud - neto	13d	1.812.426	2.224.584	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak	21a	21.483.854	30.832.164	*Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	21d	70.299.357	95.848.091	*Deferred tax assets*
Pendapatan sewa yang masih harus diterima	14d, 43	30.481.261	34.105.640	*Accrued lease income*
Lain-lain		6.889.867	7.189.467	*Others*
Total aset tidak lancar		**4.158.460.129**	**4.428.987.968**	***Total non-current assets***
TOTAL ASET		**6.232.384.211**	**6.415.949.730**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	16	147.133.694	146.405.600	*Related parties*
Pihak ketiga	16	134.447.565	90.991.888	*Third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	17	95.267.554	98.350.200	*Other payables - third parties*
Pinjaman bank jangka pendek	20a	35.000.000	100.000.000	*Short-term bank loans*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka pendek	18	407.517.781	425.588.383	*Accrued liabilities - current*
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	20b	148.042.600	72.449.958	*Current portion of long-term bank loans*
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	14b	42.594.142	41.359.840	*Current portion of lease liabilities*
Utang pajak jangka pendek	21b	38.804.005	41.548.336	*Current taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22	101.277.523	86.983.717	*Current employee benefits liabilities*
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	19	19.361.027	30.809.453	*Current portion of deferred revenue*
Total liabilitas jangka pendek		**1.169.445.891**	**1.134.487.375**	***Total current liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31*, 2025	31 Desember/ *December 31*, 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES (continued)***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank - jangka panjang	20b	559.328.261	703.690.713	*Non-current bank loans*
Liabilitas sewa jangka panjang	14b	313.837.001	353.874.575	*Non-current lease liabilities*
Utang pajak jangka panjang	21b	7.214.347	5.547.456	*Non-current taxes payable*
Liabilitas pajak tangguhan	21d	135.618.698	123.064.838	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	18	72.027.462	72.027.462	*Accrued liabilities - non-current*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	23	164.726.738	146.128.524	*Asset abandonment and site restoration obligations*
Liabilitas imbalan pascakerja	22d	122.577.531	107.500.437	*Post-employment benefit obligation*
Pendapatan ditangguhkan - jangka Panjang	19	79.772.712	98.101.066	*Non-current deferred revenue*
Total liabilitas jangka panjang		**1.455.102.750**	**1.609.935.071**	***Total non-current liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**2.624.548.641**	**2.744.422.446**	***TOTAL LIABILITIES***

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to the owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal IDR100 per saham Modal dasar - 70.000.000.000 saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	24a	344.018.831	344.018.831	*Share capital - par value of IDR100 per share Authorised - 70,000,000,000 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 Series B shares Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares consisting of 1 Dwiwarna series A shares and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	24b	(467.574.628)	(467.574.628)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan		2.715.705.689	2.647.820.134	*Appropriated -*
- Tidak dicadangkan		215.364.799	339.427.774	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya		(67.097.375)	(37.646.189)	*Other components of equity*
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.740.417.316	2.826.045.922	*Net equity attributable to the owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	867.418.254	845.481.362	*Non-controlling interests*
EKUITAS NETO		**3.607.835.570**	**3.671.527.284**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.232.384.211**	**6.415.949.730**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
PENDAPATAN	27	3.975.918.206	3.788.619.187	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	28	(3.277.594.774)	(3.031.238.285)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**698.323.432**	**757.380.902**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	31a	27.791.020	40.293.915	*Other income*
Beban umum dan administrasi	29	(167.882.063)	(201.214.919)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	31b	(38.598.156)	(73.802.786)	*Other expenses*
LABA OPERASI		**519.634.233**	**522.657.112**	***OPERATING PROFIT***
Bagian laba dari ventura bersama	12	76.401.988	72.200.336	*Share of profit from joint ventures*
Pendapatan keuangan	30b	63.879.476	60.189.845	*Finance income*
Penurunan nilai properti minyak dan gas	15b	(99.532.172)	(9.068.015)	*Impairment losses of oil and gas properties*
Beban keuangan	30a	(64.951.330)	(75.327.749)	*Finance costs*
Laba/(rugi) selisih kurs - neto	31c	(7.226.188)	11.125.284	*Gain/(loss) on foreign exchange - net*
Provisi atas kontrak yang merugi	35p	-	(3.486.935)	*Provision for onerous contract*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**488.206.007**	**578.289.878**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21c	**(141.605.828)**	**(138.652.608)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**346.600.179**	**439.637.270**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak		(10.251.091)	17.247.355	*Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak		-	(22.555)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak		(19.200.095)	(6.988.514)	*Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		**(29.451.186)**	**10.236.286**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**317.148.993**	**449.873.556**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		215.364.799	339.427.774	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	131.235.380	100.209.496	*Non-controlling interests*
		346.600.179	**439.637.270**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		185.913.613	349.664.060	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	131.235.380	100.209.496	*Non-controlling interests*
		317.148.993	**449.873.556**	
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN	32	**0,0089**	**0,0140**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 3/1 *Page*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to the owners of the parent entity*										
					Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*						
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak/ *Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak/ *Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Total komponen ekuitas lainnya/ *Total other components of equity*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas neto/ *Net equity*	
			Dicadangkan/ *Appropriated*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*							
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.592.201.898**	**278.091.179**	**(30.939.165)**	**(16.912.030)**	**(31.280)**	**(47.882.475)**	**841.548.574**	**3.540.403.379**	***Balance as of January 1, 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	339.427.774	-	-	-	-	100.209.496	439.637.270	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	(6.988.514)	17.247.355	(22.555)	10.236.286	-	10.236.286	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(222.472.943)	-	-	-	-	(96.276.708)	(318.749.651)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	55.618.236	(55.618.236)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.647.820.134**	**339.427.774**	**(37.927.679)**	**335.325**	**(53.835)**	**(37.646.189)**	**845.481.362**	**3.671.527.284**	***Balance as of December 31, 2025***
Laba tahun berjalan	-	-	-	215.364.799	-	-	-	-	131.235.380	346.600.179	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	-	(19.200.095)	(10.251.091)	-	(29.451.186)	-	(29.451.186)	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(271.542.219)	-	-	-	-	(109.298.488)	(380.840.707)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	67.885.555	(67.885.555)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.715.705.689**	**215.364.799**	**(57.127.774)**	**(9.915.766)**	**(53.835)**	**(67.097.375)**	**867.418.254**	**3.607.835.570**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		4.107.120.086	3.834.863.981	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga		63.078.462	60.189.845	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok		(2.680.396.806)	(2.189.465.072)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya		(482.137.763)	(405.562.341)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran kepada karyawan		(162.166.498)	(175.241.931)	*Payments to employees*
Pembayaran pajak setelah dikurangi penerimaan dari tagihan pajak		(116.078.792)	(247.402.313)	*Payments for taxes after deduction from tax refunds*
Pembayaran beban keuangan		(40.153.294)	(48.688.515)	*Payments for finance cost*
Pembayaran bunga atas sewa	14b	(15.744.535)	(17.015.634)	*Payments for interest on lease*
Penempatan atas kas yang dibatasi penggunaannya		(16.424.645)	(26.463.031)	*Placements of restricted cash*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		**657.096.215**	**785.214.989**	***Net cash generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari ventura bersama		81.530.487	67.781.412	*Dividend received from joint ventures*
Penambahan properti minyak dan gas		(100.849.765)	(22.022.119)	*Additions of oil and gas properties*
Penambahan aset tetap		(97.700.806)	(62.753.331)	*Additions of fixed assets*
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi		(9.203.819)	(54.103.744)	*Additions of exploration and evaluation assets*
Penerimaan pelepasan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	23.178.224	*Proceeds from disposal of financial assets through other comprehensive income*
Penempatan investasi jangka pendek lainnya		-	(618.927)	*Placement for other short term investment*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(126.223.903)**	**(48.538.485)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	20	35.000.000	400.000.000	*Proceeds of bank loans*
Pembayaran dividen	25,26	(380.840.707)	(318.749.651)	*Payment of dividend*
Pembayaran pinjaman bank	20	(173.133.366)	(63.651.115)	*Payments of bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	14b	(41.430.217)	(36.923.038)	*Payments of lease liabilities*
Penerimaan pinjaman dari ventura bersama	20	-	4.223.033	*Proceeds of loans from joint ventures*
Pembayaran *buyback* obligasi		-	(552.961.000)	*Payments of bonds buyback*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(560.404.290)**	**(568.061.771)**	***Net cash used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(29.531.978)**	**168.614.733**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas		(17.362.280)	(30.164.053)	*Net effects of foreign exchange on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4a	**1.383.182.362**	**1.244.731.682**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4a	**1.336.288.104**	**1.383.182.362**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Perusahaan") pada awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. Kemudian, Perusahaan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM) pada tahun 1950, saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama Perusahaan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, Perusahaan didirikan sebagai Perusahaan Negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/1984, PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum ("Perum") dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara.

Status Perusahaan diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara ("Persero") dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37/1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7729HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (the "Company") initially named Firm L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage, was established in 1859. The Company was renamed NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM), when the Dutch Government took control in 1950. In 1958, when the Government of the Republic of Indonesia took over the entity, the Company's name was changed to Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) and then later became BPU-PLN in 1961. On May 13, 1965, based on Government Regulation No. 19/1965, the Company was established as a state owned company ("Perusahaan Negara") and became known as Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Based on Government Regulation No. 27/1984, PN. Gas was converted into a public service enterprise ("Perum") under the name Perusahaan Umum Gas Negara.

The status of the Company was changed from a Perum to a state owned limited liability company ("Persero") and the name was changed to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) based on Government Regulation No. 37/1994 and the Deed of Establishment No. 486 dated May 30, 1996 as notarised by Adam Kasdarmaji, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-7729HT.01.01.Th.96. dated May 31, 1996 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 8508 Supplement No. 80 dated October 4, 1996.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas dan nama Perusahaan berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6/2018. Perubahan status Perusahaan ini kemudian diikuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 48 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 29 Juni 2018. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 11 Mei 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 1 Juni 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") meliputi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan niaga gas buatan; dan jasa telekomunikasi; serta pengelolaan properti Perusahaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pada saat ini, usaha utama Perusahaan adalah niaga dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. Pemegang saham langsung Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan pemegang saham akhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The status of the Company was changed to a limited liability company and the Company's name was changed to PT Perusahaan Gas Negara Tbk. based on Government Regulation No. 6/2018. The change in the Company's status was followed by amendment to the Company's Articles of Association based on Notarial Deed No. 48 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 29, 2018. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 28 dated May 11, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The amendment was reported to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acknowledgment Letter No. AHU-AH.01.03-0342118 dated June 1, 2021.

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's objective is to implement and support the Government's economic and national development programs, particularly in developing the use of natural gas for the benefit of the public as well as in the supply of a sufficient volume and quality of gas for public consumption. The scope of activities of the Company and its subsidiaries (together, the "Group") comprises planning, construction, operation, and development of natural gas downstream business which includes processing, transporting, storing and trading, planning, construction, production development, supplying and distribution of processed gas; telecommunication services; managing the Company's property and providing manpower services. Currently, the Company's principal business is the trading and transmission of natural gas to industrial, commercial and household users.

The Company's Head Office is located at Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. The Company's immediate parent is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Grup

Pada tanggal 5 Desember 2003, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, dan 820.987.000 saham baru. Saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2003.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Juni 2008 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 49 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 13 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dari IDR500 per saham menjadi IDR100 per saham, sehingga jumlah saham Perusahaan meningkat dari 14 miliar saham menjadi 70 miliar saham dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 4.593.437.193 saham akan meningkat menjadi 22.967.185.965 saham.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD1.350.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited.* Pada tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan melunasi seluruh obligasinya.

Pada tanggal 26 April 2017, PT Saka Energi Indonesia ("SEI"), anak perusahaan, menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD625.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. Pada tanggal 6 Mei 2024, SEI melunasi seluruh obligasinya.

c. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 4 Maret 2026.

1. GENERAL (continued)

b. The Group's Public Offerings

On December 5, 2003, the Company obtained an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to conduct a public offering of 1,296,296,000 of its shares, which comprised 475,309,000 shares divested by the Government of the Republic of Indonesia, and 820,987,000 newly issued shares. The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 15, 2003.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 13, 2008, which was notarised in Notarial Deed No. 49 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 13, 2008, the shareholders ratified the stock split of the nominal value of the Series A Dwiwarna share and Series B shares from IDR500 per share to IDR100 per share resulting in an increase in the Company's authorised shares from 14 billion shares to 70 billion shares and an increase in the issued and paid-up capital from 4,593,437,193 shares to 22,967,185,965 shares.

On May 12, 2014, the Company issued and listed USD1,350,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. On May 16, 2024, the Company repaid all of its bonds.

On April 26, 2017, PT Saka Energi Indonesia ("SEI"), the Company's subsidiary, issued and listed USD625,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. On May 6, 2024, SEI repaid all of its bonds.

c. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Group's consolidated financial statements have been completed and authorized to be issued by the Company's Board of Directors on March 4, 2026.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the percentage of ownership of the Company, either directly or indirectly, and total assets of the subsidiaries is as follows:

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/ *Held directly by the Company*					
PT Saka Energi Indonesia ("SEI") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2011	1.039	1.209
PT PGN LNG Indonesia ("PLI") Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Indonesia, 26 Juni/*June* 2012	100,00%	100,00%	2014	581	604
PT Permata Graha Nusantara ("PGN MAS") Pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan/ *Management and leasing buildings and equipment* Indonesia, 17 Juni/*June* 2014	100,00%	100,00%	2014	59	58
PT PGAS Solution ("PGASSOL") Konstruksi/*Construction* Indonesia, 6 Agustus/*August* 2009	99,91%	99,91%	2010	124	116
PT Gagas Energi Indonesia ("GEI") Niaga gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2012	81	80
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASKOM") Telekomunikasi/ *Telecommunication*, Indonesia,10 Januari/*January* 2007	99,93%	99,93%	2009	51	47
PT Pertamina Gas ("Pertagas") Distribusi minyak dan gas/ *Distribution of oil and natural gas* Indonesia, 23 Februari/*February* 2007	51,00%	51,00%	2007	2.377	2.409

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Dimiliki melalui Pertagas/ *Held through Pertagas*					
PT Pertagas Niaga ("PTGN") Perniagaan gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 23 Maret/*March* 2010	99,00%	99,00%	2010	107	190
PT Perta Arun Gas ("PAG") Pengolahan LNG/ *Processing of LNG* Indonesia, 18 Maret/*March* 2013	99,95%	99,95%	2013	314	287
Dimiliki melalui PGASKOM/ *Held through PGASKOM*					
PGAS Telecommunications International Pte. Ltd. ("PTI") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Singapura/*Singapore,* 24 November/*November* 2009	100,00%	100,00%	2010	5	4
PT Telemedia Dinamika Sarana ("TDS") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Indonesia, 2 Oktober/*October* 2002	90,00%	90,00%	2013	7	6
Dimiliki melalui PGN MAS/ *Held through PGN MAS*					
PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") Transmisi gas/*Gas transmission* Indonesia, 23 Juli/*July* 2013	80,00%	80,00%	2015	12	15
Dimiliki melalui PGASSOL/ *Held through PGASSOL*					
PT Solusi Energy Nusantara ("Sena") Enginering, konsultasi dan jasa/ *Engineering, consultancy and services*, Indonesia, 20 April 2015	99,90%	99,90%	2016	14	12
Dimiliki melalui GEI/ *Held through GEI*					
PT Widar Mandripa Nusantara ("Widar") Jasa kelistrikan/*Electricity service* Indonesia, 29 Juli/*July* 2015	99,99%	99,99%	2016	8	7
Dimiliki melalui PLI/ *Held through PLI*					
PT Lamong Nusantara Gas Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Surabaya, 1 Oktober/*October* 2019	51,00%	51,00%	[2)]	3	9
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI*					
Saka Indonesia Pangkah B.V. ("SIPBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 3 Agustus/ *August* 2007	100,00%	100,00%	2007	133	126
PT Saka Energi Muara Bakau ("SEMB") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 10 Februari/ *February* 2014	100,00%	100,00%	2017	309	300

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI* (lanjutan/*continued)*					
PT Saka Ketapang Perdana ("SKP") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 17 Oktober/ *October* 2012	99,98%	99,98%	2015	87	100
PT Saka Energi Internasional ("SI") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 20 Februari/ *February* 2014	99,99%	99,99%	2014	6	1)
Saka Energi Overseas Holding B.V. ("SEOHBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
PT Saka Bangkanai Klemantan ("SBK") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 11 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	2016	56	59
PT Saka Energi Sumatera ("SES") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 24 September 2012	99,95%	99,95%	2014	1)	1)
PT Saka Indonesia Sesulu ("SIS") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 7 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	4)	11	124
PT Saka Energi Bangkanai Barat ("SEBB") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 12 Mei/*May* 2014	100,00%	100,00%	2)	1)	10
PT Saka Energi Investasi ("SEINVS") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 18 Juli/*July* 2014	99,99%	99,99%	4)	1)	1)
PT Saka Energi Wokam ("SEW") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 14 September 2015	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
Dimiliki melalui SEOHBV/ *Held through SEOHBV*					
Saka Energi Exploration Production B.V. ("SEEPBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands,* 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2015	41	41

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Dimiliki melalui SEEPBV/ *Held through SEEPBV*					
Saka Energi Muriah Limited ("SEML") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Virgin Britania Raya/ *British Virgin Islands*, 15 Juli/ *July* 2009	100,00%	100,00%	2015	39	61
Dimiliki melalui SI/*Held through SI*					
PT Saka Energi Yamdena Barat ("SEYB") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 26 Mei/*May* 2017	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
PT Saka Energi Sepinggan ("SEP") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 1 April 2015	100,00%	100,00%	2)	3	2
PT Saka Eksplorasi Ventura ("SEV") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 Desember/ *December* 2016	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
PT Saka Eksplorasi Baru ("SEB") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 30 Agustus/ *August* 2016	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
PT Saka Eksplorasi Timur ("SET") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 September 2016	100,00%	100,00%	2)	2	2
Saka Energi Asia Pte. Ltd. ("SEAPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	289	289
PT Saka Energi Investama ("SEINV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 9 November 2017	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
PT Saka Energi Sepinggan Timur ("SEST") Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 November 2019	100,00%	100,00%	2)	1)	1)
Saka Energy Fasken LLC ("Fasken") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Amerika Serikat/*USA*, 25 April 2014	100,00%	100,00%	2014	129	140

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024		31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Dimiliki melalui SIPBV/ *Held through SIPBV*					
Saka Indonesia Pangkah Limited ("SIPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Inggris/*United Kingdom*, 5 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	389	406
Saka Pangkah LLC ("SPLLC") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Cayman/*Cayman Islands*, 12 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	66	70
Dimiliki melalui SEAPL/ *Held through SEAPL*					
Saka Energi East Kalimantan Pte. Ltd. ("SEEKPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	4	4
Saka Energi Sanga Star Pte. Ltd. ("SESSPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/*June* 2016	100,00%	100,00%	2016	11	11
Dimiliki melalui SEEKPL/ *Held through SEEKPL*					
Saka Energi Sanga-sanga Ltd. ("SESL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Persemakmuran Bahama/ *Commonwealth of The Bahamas*, 18 November 1983	100,00%	100,00%	1983	39	39
Dimiliki melalui SEINVS/*Held through SEINVS*					
Saka Energi International Ventures Ltd. ("SEIV") Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 14 Februari/ *February* 2018	100,00%	100,00%	2018	164	164
Dimiliki melalui SEINVS dan PLI/ *Held through SEINVS and PLI*					
Bentang Energi Indonesia Ltd. ("BEI")[3] Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 31 Januari/ *January* 2018	100,00%	100,00%	2018	[1]	[1]

Keterangan:
1) Total aset di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat.
2) Belum beroperasi komersial.
3) PLI dan SEINVS masing-masing memiliki saham BEI sebesar 75% dan 25% sehingga kepemilikan efektif Grup atas BEI adalah 100%.
4) Dalam tahap eksplorasi atau pengembangan

Remarks:
1) The total assets are below one million United States dollar.
2) Not yet started commercial operations.
3) PLI and SEINVS own 75% and 25% interests in BEI's shares, respectively, therefore the Group's effective ownership in BEI is 100%.
4) In exploration and development stage

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Grup mempunyai kerjasama operasi minyak dan gas sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

The Group has interests in oil and gas joint operations as follow:

Wilayah Kerja/ *Working Area*	Negara/ *Country*	Tanggal Efektif Kontrak/ *Effective Date of Contract*	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak/ *Expiry Date of Contract*	Hak kepemilikan (%)/ *Participating interest (%)*	
				31 Desember/ *December* 31, 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024
Blok/*Block* Bangkanai	Indonesia	30 Desember 2005/ *December 30, 2005*	30 Desember 2035/ *December 30, 2035*	30%an	30%
Blok/*Block* Ujung Pangkah	Indonesia	8 Mei 1996/ *May 8, 1996*	8 Mei 2026/ *May 8, 2026**	100%	100%
Blok/*Block* Ketapang	Indonesia	11 Juni 1998/ *June 11, 1998*	11 Juni 2028/ *June 11, 2028***	19,4%	19,4%
Blok/*Block* Sesulu Selatan	Indonesia	5 Mei 2009/ *May 5, 2009*	5 Mei 2039/ *May 5, 2039****	100%	100%
Blok/*Block* Fasken	Amerika Serikat/ *United States of America*	15 Juli 2014/*July 15, 2014*	Produksi selesai/ *When production ends*	36%	36%
Blok/*Block* Muriah	Indonesia	20 Mei 1991/ *May 20, 1991*	31 Desember 2026/*December 31, 2026*	100%	100%
Blok/*Block* Bangkanai Barat	Indonesia	15 Mei 2013/ *May 15, 2013*	15 Mei 2043/ *May 15, 2043*	30%	30%
Blok/*Block* Muara Bakau	Indonesia	30 Desember 2002/ *December 30, 2002*	30 Desember 2032/ *December 30, 2032*****	11,67%	11,67%
Blok/*Block* Pekawai	Indonesia	14 Mei 2018/*May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Yamdena Barat	Indonesia	14 Mei 2018/ *May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Sangkar	Indonesia	30 Mei 2023/ *May 30, 2023*	30 Mei 2053/ *May 30, 2053*	100%	100%

* Perpanjangan Kontrak bagi Hasil ("OSC") menjadi PSC Gross Split ditandatangani pada 18 Oktober 2019. Kontrak PSC Gross Split akan berlaku efektif setelah kontrak PSC Cost Recovery berakhir dan akan berlaku selama 20 tahun/ Extension of Production Sharing Contract ("PSC") to gross split PSC signed on October 18, 2019. The Gross Split PSC contract will be effective after the previous Cost Recovery PSC contract ended and will be valid for 20 years.

** Perpanjangan PSC Ketapang telah ditandatangani tanggal 29 Desember 2023. Kontrak PSC ini akan berlaku efektif setelah kontraj PSC sebelumnya berakhir dan akan berlaku selama 20 tahun/ Extension of Ketapang PSC signed on December 29, 2023. This PSC contract will be effective after the previous PSC contract ended and will be valid for 20 years.

*** Manajemen telah menerima persetujuan dari Menteri ESDM atas POD I Lapangan SIS-A sebagaimana disampaikan oleh surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") pada 22 Agustus 2023. Mohon mengacu pada Catatan 15 untuk informasi detail/ Management had received approval from Minister of energy and Mineral of Resources in which conveyed through SKK Migas dated on August 22, 2023. Please refer to Note 15 for detail information.

**** Perpanjangan PSC Muara Bakau telah ditandatangani tanggal 13 Juni 2024. Kontrak PSC ini akan berlaku efektif setelah kontrak PSC sebelumnya berakhir an akan berlaku Selma 20 tahun/ *Extension of Muara Bakau PSC signed on June 13, 2024. This PSC contract will be effective since the previous PSC contract ended and will be valid 20 years.*

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Informasi mengenai ventura bersama dan entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL (continued)*

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

Information about joint ventures and associates entities in which the Group has an interest as of December 31, 2025 and December 31, 2024 is as follows:

Ventura bersama dan entitas asosiasi/ *Joint ventures and associate entities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun komersial dimulai dan domisili/ *Year commercial operations started and domicile*	Kegiatan usaha/ *Business activities*
	31 Desember/ *December 31, 2025*	31 Desember/ *December 31, 2024*		
Ventura bersama/ *Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia ("Transgasindo")	59,87%	59,87%	2002, Jakarta	Transportasi gas bumi melalui jaringan pipa transmisi/*Transportation of natural gas through transmission pipelines*
PT Permata Karya Jasa ("Perkasa")	60,00%	60,00%	2015, Jakarta	Jasa perbengkelan, pembinaan, penyaluran jasa tenaga kerja/*Workshop services, guidance, distribution of labour services*
PT Nusantara Regas ("Regas")	40,00%	40,00%	2012, Jakarta	Pengelolaan fasilitas *Floating Storage Regasification Terminal* ("FSRT") termasuk Pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT/*Managing Floating Storage Regasification Terminal ("FSRT") facilities including purchase of LNG and marketing of output from the operations of FSRT facilities*
PT Perta-Samtan Gas ("PSG")	66,00%	66,00%	2008, Banyuasin	Pengolahan *Liquefied Petroleum Gas* ("LPG")/ *LPG processing*
PT Perta Daya Gas ("PDG")	65,00%	65,00%	2012, Jakarta	Pengolahan LNG dan *Compressed Natural Gas* ("CNG")/*LNG and CNG processing*
Kerja Sama Operasi antara GEI dan PT Jakarta Utilitas Propertindo ("KSO GAGAS–JUP")	51,00%	51,00%	2015, Jakarta	Pemanfaatan Stasiun Pengisian Bahan Gas ("SPBG")/*Fuel Gas Filling Station utilization*
PT Padoma Global Neo Energi Indonesia ("PGNE")	30,00%	30,00%	2018, Papua	Operasi, distribusi, dan transportasi LNG/*LNG operation, distribution*, *and transportation*
Entitas asosiasi/*Associate*				
PT Gas Energi Jambi ("GEJ")	40,00%	40,00%	[1] Jambi	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*
PT Baskara Asri Ghas	0,14%	0,14%	2012, Banten	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*

Keterangan:
1) Sudah tidak beroperasi.

Remarks:
1) No longer in operation

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Grup mengakui keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham lain Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan KSO GAGAS–JUP yang menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki hak yang setara dengan Grup dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham lainnya, Grup hanya memiliki pengaturan bersama atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting meskipun Grup memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 01 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 9 September 2025 dan telah menerima perolehan pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0336642 tanggal 11 September 2025, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

The Group acknowledged the existence of substantive participating rights held by the other shareholders of Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG and KSO GAGAS–JUP which provide such shareholders with the same rights as the Group over the significant financial and operating policies. Considering the other shareholders' rights, the Group only has joint control over the financial and operating policies even though the Group has more than 50% share ownership.

e. Boards of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2025, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 27, 2025 which was notarised in the Notarial Deed No. 01 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated September 9, 2025 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0336642 dated September 11, 2025, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Tony Setia Boedi Hoesodo	*President Commisioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Conny Lolyta Rumondor	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Widjono Hardjanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Edward Omar Sharif Hiariej	*Commissioner*
Komisaris	Rambe Kamarul Zaman	*Commissioner*
Komisaris	Thanon Aria Dewangga	*Commissioner*

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arief Kurnia Risdianto	*President Director*
Direktur Keuangan	Catur Dermawan	*Director of Finance*
Direktur Komersial	Aldiansyah Idham	*Director of Commercial*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Hery Murahmanta	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Rachmat Hutama	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Mirza Mahendra	*Director of Strategy and Business Development*
Direktur Manajemen Risiko	Eri Surya Kelana	*Director of Risk Management*

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Mei 2024 dan telah menerima perolehan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0212762 tanggal 11 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

As of December 31, 2024, based on the Annual General Meeting of Shareholders on May 30, 2024 which was notarised in the Notarial Deed No.76 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 30, 2024 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-AH.01.09-0212762 dated June 11, 2024, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	*President Commisioner*
Komisaris Independen	Dini Shanti Purwono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Christian H. Siboro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Abdullah Aufa Fuad	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Tony Setia Boedi Hoesodo	*Independent Commissioner*
Komisaris	Luky Alfirman	*Commissioner*
Komisaris	Warih Sadono	*Commissioner*

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arief Setiawan Handoko	*President Director*
Direktur Keuangan	Fadjar Harianto Widodo	*Director of Finance*
Direktur Komersial	Ratih Esti Prihatini	*Director of Commercial*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Harry Budi Sidharta	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Rachmat Hutama	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Rosa Permata Sari	*Director of Strategy and Business Development*
Direktur Manajemen Risiko	Arief Kurnia Risdianto	*Director of Risk Management*

Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

Ketua	Conny Lolyta Rumondor	*Chairman*
Anggota	Widjono Hardjanto	*Member*
Anggota	Widya Perwitasari	*Member*
Anggota	Yan Rahadian[1)]	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi[2)]	*Member*

Keterangan:
1) Per tanggal 28 Januari 2026, mendapatkan penugasan baru sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.
2) Per tanggal 28 Januari 2026, mendapatkan penugasan baru sebagai Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Remarks:
1) As of January 28, 2026, received a new assignment as Risk Management Oversight and Business Development Committee.
2) As of January 28, 2026, received a new assignment as Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

Ketua	Dini Shanti Purwono	*Chairman*
Anggota	Abdullah Aufa Fuad	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi	*Member*
Anggota	Rini Yulius	*Member*
Anggota	Yan Rahadian	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing adalah 3.336 orang dan 3.322 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2025 and 2024, the Group had a total of 3,336 employees and 3,322 employees, respectively (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2e untuk informasi mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS").

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian FAS, including Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

Figures in the consolidated financial statements are stated in United States dollar, unless otherwise specified. Refer to Note 2e for the information on the Group's functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan standar akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen tersebut mengklarifikasi bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dan bagaimana entitas harus menentukan nilai tukar spot ketika kemampuan tukarnya kurang, serta mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari adanya mata uang yang bisa ditukar. Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini.

Amandemen ini tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian FAS requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting standards

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2025, including the following revised standards that do not have significant impact to the consolidated financial statements of the Group:

Amendment PSAK 221: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The amendments clarify how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking, as well as require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable. The amendments will be effective on January 1, 2025 and earlier application is permitted.

The amendments does not have any impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 and PSAK 115 on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard does not have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Mulai berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan tentang *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche.* Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective

Effective beginning on or after January 1, 2026

PSAK 109: Financial Instrument and PSAK 107 Financial Instrument: Disclosure on Classification and Measurement of Financial Instrument regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity

This amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 related to the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches. This amendment also modifies provisions in PSAK 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual requirements that change the timing or amount of contractual cash flows. Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 will be effective from January 1, 2026

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Penerapan PSAK 118 akan berdampak terhadap penyajian laporan keuangan seluruh perusahaan di seluruh industri. PSAK 118 mengakibatkan perubahan terutama pada laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, sebagian perubahan dalam arus kas dan sedikit perubahan pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan laba rugi, PSAK 118 mensyaratkan antara lain:

a. penyajian subtotal laba (rugi) operasi, laba (rugi) sebelum pendanaan dan pajak penghasilan, serta laba (rugi); dan

b. penghasilan dan beban untuk diklasifikasikan ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan, serta pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan.

Perubahan ini mengakibatkan struktur laporan laba rugi yang lebih konsisten dan meningkatkan komparabilitas antar perusahaan. Perubahan lainnya antara lain bahwa PSAK 118 juga mengatur mengenai pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen ("UKTM") dengan tujuan mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Pengungkapan UKTM memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118. PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

The implementation of PSAK 118 will impact the presentation of financial statements across all companies in all industries. PSAK 118 results in changes primarily to the income statement and notes to the financial statements, some changes in cash flows, and slight changes to the statement of financial position and statement of changes in equity. In the income statement, PSAK 118 requires, among other things:

a. the presentation of subtotal operating profit (loss), profit (loss) before financing and income tax, as well as profit (loss); and

b. income and expenses to be classified into operating, investing, and financing categories, as well as income tax and discontinued operations.

These changes result in a more consistent structure for the income statement and enhance comparability between companies. Another change is that PSAK 118 also regulates the disclosure of management-defined performance measures ("MDPM") with the aim of communicating management's views on the overall financial performance of the company. The disclosure of MDPM allows investors to understand how management views the company's financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118. PSAK 118 will replace PSAK 201: Presentation of Financial Statements and will be effective from January 1, 2027.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan, dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (lanjutan)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquirer is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with PSAK 109: Financial Instruments, in profit or loss and other comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas dalam Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquirer and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquire over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss and other comprehensive income.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with PSAK 338 "Business Combination of Entities Under Common Control". The difference between the transfer price paid and the carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between companies within the Group are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, the amounts reported by subsidiaries are adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang memiliki mata uang fungsional selain dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") pada akhir periode pelaporan. Di sisi lain, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata penutup JISDOR ketika periode laba-rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat disajikan dalam akun "Penghasilan komprehensif lain - Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak" sebagai bagian dari komponen ekuitas lainnya pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

For purposes of consolidating subsidiaries using currency other than United States dollar as functional currency, assets and liabilities are translated using the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR") closing rate at the end of the reporting period. On the other hand, revenue and expenses are translated using the average JISDOR closing rate during the profit and loss period.

The difference arising from the translation of subsidiaries' financial statements into United States dollar is presented as "Other comprehensive income - Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements" account as part of other components of equity in the equity section of the consolidated statement of financial position.

ii. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control or, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss and other comprehensive income. The initial carrying amount is the fair value for the remeasurement purposes of the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This means amounts previously recognised in other comprehensive income might be reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada harga perolehan, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian laba dari ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at acquisition cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss and other comprehensive income. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of profit from joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's consolidation financial statements only for the portion of other investors' interests in the associates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

v. Pengaturan bersama

Menurut PSAK 111, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki operasi bersama dan ventura bersama.

(1) Operasi bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama dalam sebuah pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama bagian kepemilikan dalam operasi bersama, Grup mengakui:

1) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
2) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
3) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
4) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
5) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates (continued)

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

v. Joint arrangements

Under PSAK 111 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group has joint operations and joint ventures.

(1) Joint operations

A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties own joint control of the arrangement that have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.

The Group has interests in several joint operations whereby the Group is included as a party which has joint control of a joint operation (joint operator), or as a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation.

In relation to its interests in joint operations, the Group recognises its:

1) Assets, including its share of any assets held jointly;
2) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
3) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
4) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
5) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

v. Pengaturan bersama (lanjutan)

(1) Operasi bersama (lanjutan)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

(2) Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

v. Joint arrangements (continued)

(1) Joint operations (continued)

When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognise gains and losses resulting from such transaction only for the portion of the other parties' interests in the joint operation.

(2) Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing

Masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam pelaksanaan.

Nilai tukar yang digunakan adalah kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign currency translation

Each entity within the Group considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company determined that its functional currency is the United States dollar ("USD" or "US dollar") and decided that the presentation currency for these consolidated financial statements is the US dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss, except for foreign exchange differentials that can be attributed to qualifying assets which are capitalised to construction in progress.

The exchange rates prevailing at the date of consolidation statement of financial position as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
1 dolar AS/JPY (nilai penuh)	155,40	157,84	*1 US dollar/JPY (full amount)*
1 dolar AS/Rupiah (nilai penuh)	16.720	16.157	*1 US dollar/Rupiah (full amount)*
1 dolar AS/SGD (nilai penuh)	1,28	1,36	*1 US dollar/SGD (full amount)*

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss ("FVTPL").*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang sewa pembiayaan.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL adalah investasi pada instrumen utang yang dicatat pada akun "Aset Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain".

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, restricted cash, short-term investment, account receivables, other receivables, and finance lease receivables.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognised in the consolidated statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognised in other comprehensif income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's financial asset at FVOCI is investments in debt securities recorded under "Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income" account.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognised as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan konsolidasian laba rugi.

Kategori ini termasuk investasi ekuitas yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas diakui sebagai pengurang nilai investasi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued)

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognised in the consolidated statement of profit or loss.

This category includes equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on equity investments are recognized as deduction of investment value when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 360 hari dari tanggal jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 360 days past due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Fitch, S&P, dan Moody's, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Fitch, S&P, dan Moody's baik untuk menentukan apakah risiko kredit dalam instrumen utang telah meningkat secara signifikan dan juga untuk mengestimasi KKE.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 360 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Fitch, S&P, dan Moody's and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Fitch, S&P, dan Moody's both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 360 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued liabilities, bank loans, and lease liabilities

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan konsolidasian laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost

i) Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas kecil, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi jangka pendek lainnya dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas" melainkan disajikan pada akun "Kas yang dibatasi penggunaannya". Deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek.

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual atau diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup. Sesuai peraturan OJK VIII. G7, piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lain-lain dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

Restricted cash in banks and time deposits used for collateral are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents" instead presented in "Restricted Cash" account. Time deposits with original maturities of more than three months are presented as short-term investment.

h. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods or services sold or provided in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group. In accordance with OJK VIII. G7 regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances on other receivables from related parties to be presented as current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost, less any provision for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban lain-lain". Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui pada "Pendapatan lain-lain" pada laba rugi.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya bahan baku dan perlengkapan, termasuk suku cadang, pemeliharaan dan alat pengeboran yang digunakan untuk operasi dinilai dengan biaya rata-rata tertimbang. Minyak mentah yang diproduksi dan tidak dijual tidak dicatat sebagai persediaan karena hak atas minyak tidak berpindah ke Kontraktor sampai minyak diangkat atau dimuat ke kapal atau gas ditransfer ke dalam pipa. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Trade and other receivables (continued)

Collectibility of trade and other receivables are reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "Other expenses". When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised on "Other income" in profit or loss.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. The cost of materials and supplies, which include spare parts, consumables, maintenance and drilling tools used for ongoing operations is valued at the weighted average. Crude oil produced and not sold is not recorded as inventory because the title does not pass to the Contractor until the oil is lifted or off-loaded into the crude tankers or the gas is transferred into pipelines. Allowance for inventory obsolescence is provided based on periodic review of the condition of the inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Lihat Catatan 2l terkait kebijakan kapitalisasi dan depresiasi atas properti minyak dan gas hulu.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Umur manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan dan prasarana	20	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	16 - 30	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*Vehicles*
Peralatan kantor	4 - 8	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	4 - 8	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	16	*Uninstalled assets*

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: Aset Tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Furthermore, when a significant inspection is carried out, the cost of the inspection is recognised in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are met. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss when incurred.

See Note 2l regarding capitalisation and depreciation policies for upstream oil and gas properties.

Fixed assets except land, are depreciated using the straight-line method.

The useful lives of the assets are as follows:

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent the underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 116: Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 216: Fixed Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perusahaan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset kerjasama operasi dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laba rugi.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is presented under "Fixed Assets" and is stated at cost. The accumulated cost of the asset constructed is transferred to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

Joint operation assets are the Company's land used to carry out the joint operation activities. Office buildings obtained as compensation in the joint operation and the respective unearned income are recognised when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Unearned income is recognised over the period of the joint operation.

Joint operation assets are stated at the estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognised as a loss in profit or loss.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognised as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya telah selesai secara substansial.

Aset tetap dinilai penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada Catatan 2m.

k. Aset eksplorasi dan evaluasi

Grup menerapkan PSAK 106: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan bahwa beban eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur eksplorasi termasuk biaya pengeboran sumur tes stratigrafi tahap eksplorasi dan biaya lainnya yang terkait untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi dikapitalisasi dan disajikan terpisah sebagai akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu *area of interest* dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya, dengan basis *area of interest*, apabila izin untuk melakukan eksplorasi di *area of interest* tersebut masih berlaku dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

- Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut; atau
- Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* atau melalui penjualan *area of interest*

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

Capitalisation of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalisation of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets for their intended use are substantially completed.

Fixed assets are assessed for impairment in line with the policy set out in Note 2m.

k. Exploration and evaluation assets

The Group adopted PSAK 106: Exploration for and Evaluation Activity of Mineral Resources Mining, which allows exploration and evaluation expenditures, including geological and geophysical costs, costs of drilling exploratory wells, including in the stratigraphic test well drilling costs of exploration stage and other costs related to evaluating the technical feasibility and commerciality of extraction of oil and gas, to be capitalised and presented separately as "Exploration and Evaluation Assets" in the consolidated statements of financial position.

Costs of exploration and evaluation in an area of interest are charged to profit or loss as incurred, unless these costs can be deferred, on an area of interest basis, if the permit to carry out exploration activities in the area of interest is current and meets one of the following conditions:

- *Exploration and evaluation activities as of the date of the consolidated financial statements have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of whether economically recoverable reserves exist, and active and significant activities in the related area of interest are still ongoing; or*
- *These costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Aset eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan terdiri dari biaya-biaya yang terjadi setelah izin eksplorasi diperoleh dan sebelum dimulainya pengembangan *area of interest* antara lain mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, dan geologi dan geofisika.

Aset eksplorasi dan evaluasi dinilai untuk penurunannya pada saat terdapat bukti dan keadaan yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke properti minyak dan gas pada saat kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi tersebut dapat dibuktikan.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka Grup akan mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK 236: Penurunan Nilai Aset.

l. Properti minyak dan gas

1. Aset pengembangan
Biaya-biaya pengeboran sumur dalam pengembangan termasuk biaya pengeboran sumur pengembangan yang tidak menghasilkan dan sumur pengembangan stratigrafi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian sumur pengembangan hingga proses pengeboran selesai. Pada saat pengembangan sumur telah selesai pada lapangan tertentu, maka sumur tersebut akan ditransfer sebagai sumur produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Exploration and evaluation assets (continued)

Exploration and evaluation assets include costs incurred after obtaining the exploration license and prior to commencement of development of the area of interest and includes accumulated costs associated with general investigation, administration and licensing, and geological and geophysical expenditure.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when evidence and circumstances indicate that the carrying amount of the asset may exceed its recoverable amount. Exploration and evaluation assets are reclassified to oil and gas properties at the time the technical feasibility and commerciality of the extraction of the oil and gas can be proved.

The recoverability of exploration and evaluation assets depends on the successful development and commercial exploitation in such an area (area of interest). Exploration and evaluation assets are tested for impairment if certain facts and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable value. In such conditions, the Group will measure, present and disclose the impairment loss as required under PSAK 236: Impairment of Assets.

l. Oil and gas properties

1. Development assets
The costs of drilling development wells, including the costs of drilling unsuccessful development wells and development-type stratigraphic wells, are capitalised as part of development well assets under construction until drilling is completed. When the development well is completed on a specific field, it is transferred to production wells.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

l. Properti minyak dan gas (lanjutan)

2. Aset produksi
Aset produksi merupakan agregasi aset eksplorasi dan evaluasi dan pengeluaran pengembangan (termasuk pembayaran untuk memperoleh *participating interests*) yang berhubungan dengan sumur berproduksi.

m. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap untuk digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Oil and gas properties (continued)

2. Production assets
Production assets are aggregated into exploration and evaluation assets, development expenditures associated with the producing wells and production facilities (including payments to acquire participating interests) associated with the producing wells.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life – for example, goodwill or intangible assets not ready for use – are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses on assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

o. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas pembelian gas yang telah diperoleh dari pemasok. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar atas barang dan jasa selain pembelian gas yang dilakukan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha dan utang lain-lain tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for gas purchased from suppliers. Other payables are obligations for goods or services other than gas purchases that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade and other payables are classified as short-term liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as long-term liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Borrowings (continued)

Fees paid to obtain loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

q. Leases

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Apabila Grup menganalisis bahwa pemasok memiliki *substantive substitution rights*, maka Grup menentukan bahwa Grup tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian. Sehingga Grup tidak mengakui aset hak guna.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
  1. *The Group has the right to operate the asset; or*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

If The Group analyzes that the supplier has substantive substitution rights, The Group determines that The Group does not have the right to use the identified asset. Therefore, The Group does not recognize the right-of-use asset.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:
- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai Pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:
- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *Determines the lease term of the modified lease;*
- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *Decreases the carrying amount of the right of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as a Lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Group applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Sewa pembiayaan

Pada saat aset disewakan sebagai sewa pembiayaan, maka nilai kini dari pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Perbedaan antara piutang kotor dan nilai kini dari piutang diakui sebagai pendapatan keuangan yang belum direalisasikan.

Metode untuk mengalokasikan penerimaan kotor ke periode akuntansi disebut sebagai "metode aktuarial". Metode aktuarial mengalokasikan sewa antara pendapatan keuangan dan pembayaran kembali dari modal di setiap periode akuntansi dimana pendapatan keuangan akan muncul sebagai tingkat imbal balik tetap pada investasi bersih penyewa di dalam suatu sewa.

Sewa operasi

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa. Kompensasi non kas sehubungan dengan kontrak yang belum diterima, dicatat pada akun "pendapatan sewa yang masih harus diterima".

r. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessor (continued)

Finance lease

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance income.

The method for allocating gross earnings to accounting periods is referred to as the "actuarial method". The actuarial method allocates rentals between finance income and repayment of capital in each accounting period in such a way that finance income will emerge as a constant rate of return on the lessors net investment in the lease.

Operating lease

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term. Non-cash compensation related to contract not yet received is recorded under "accrued lease income" account.

r. Employee benefits

i. Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

ii. Pension benefits and other post-employment benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos pendapatan komprehensif lain pada tahun terjadinya.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statements of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms to the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan, penghargaan pengabdian dan masa persiapan pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, namun pengukuran kembali atas kewajiban imbalan kerja diakui langsung sebagai beban atau pendapatan pada laba rugi.

iii. Program imbalan iuran pasti

Grup mempunyai program asuransi pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Pembayaran premi awal sekaligus dan premi periodik ditentukan berdasarkan perhitungan secara periodik yang disetujui oleh Grup dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selisih antara premi pertanggungan dengan kontribusi karyawan ditanggung oleh Grup.

Grup juga menyediakan tambahan tunjangan kesehatan bagi para pensiunan karyawan berdasarkan perhitungan tertentu yang disetujui oleh Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebagai pengelola dana.

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam PSC atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Estimasi awal biaya pembongkaran aset dan restorasi area properti minyak dan gas bumi diakui sebagai komponen biaya perolehan, yang disusutkan atau dideplesikan dengan menggunakan metode satuan unit produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The Group also provides other post-employment benefits, such as long service reward, jubilee rewards and pension preparation program. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan; however, remeasurement of the employee benefit obligation is directly recognized as expense or income in profit or loss.

iii. Defined contribution benefit program

The Group has a retirement insurance plan covering all of its qualified permanent employees. One-time initial retirement premium and periodic premium payments are based on periodic calculations agreed between the Group and the Financial Institution Pension Fund. The difference between the premium and employee contributions is covered by the Group.

The Group provides additional post-retirement health care benefits to its retired employees based on certain computations agreed between the Company and Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara as the fund manager.

s. Asset abandonment and site restoration obligation

The Group recognises its obligations for future dismantlement of assets and site restoration of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets in accordance with the provisions in the PSC or in line with applicable regulations.

The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognised as part of the acquisition costs of the assets and are subsequently depreciated or depleted using the unit-of-production method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (lanjutan)

Pada umumnya, aktivitas pembongkaran aset dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait terjadi pada beberapa tahun di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan restorasi area di masa yang akan datang adalah berupa estimasi terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan. Perkiraan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area di masa yang akan datang tersebut melibatkan estimasi manajemen mengenai saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas tersebut harus dilakukan, dan juga teknologi yang akan digunakan di masa depan.

Estimasi tersebut diperiksa setiap periode/tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian dicerminkan dalam nilai kini atas provisi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan dilakukan penyesuaian dengan jumlah yang sama atas nilai buku aset yang bersangkutan.

Pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi diakui sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dikelompokkan ke dalam arus kas terkait aktivitas operasi.

t. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Asset abandonment and site restoration obligation (continued)

In most instances, the dismantlement of assets and site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets will occur many years in the future. The provision for future dismantlement of assets and site restoration obligations is the best estimate of the present value of the future expenditures required to undertake the dismantlement of assets and site restoration at the reporting date, based on current legal requirements. The estimate of the obligation for future dismantlement of assets and site restoration, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of those activities, the extent of those activities required and future technologies.

Such estimates are reviewed on a periodic/annual basis and adjusted each period/year as required. Adjustments are reflected in the present value of the provision for the obligation for dismantlement of assets and site restoration with a corresponding change in the book value of the associated assets.

The unwinding of the effect of discounting the provision is recognised as a finance cost in profit or loss.

Placement of restricted cash for the funding of asset abandonment and site restoration obligations are classified as cash flows related to operating activities.

t. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Modal saham (lanjutan)

Ketika entitas anak Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

u. Pendapatan dan beban

Pendapatan Grup berasal dari kegiatan niaga gas bumi, jasa transmisi minyak dan gas bumi, penjualan minyak mentah, gas bumi, LPG, LNG, dan jasa lainnya.

Pendapatan dari niaga gas bumi dan jasa transmisi minyak dan gas bumi diakui pada saat gas atau minyak bumi telah didistribusikan kepada pelanggan berdasarkan pencatatan pada angka meteran. Kontrak Grup dapat dinegosiasikan dari waktu ke waktu dan harga diskon khusus dapat diberikan kepada pelanggan setelah Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") terkait yang mengatur harga diskon disepakati antara Grup dan pelanggan. Bergantung pada sifat perubahannya, Grup akan melakukan modifikasi kontrak yang ada berdasarkan komitmen volume yang disetujui sebelum dan sesudah modifikasi kontrak dan perubahan harga yang timbul dari modifikasi tersebut.

Pendapatan sehubungan dengan pengoperasian aset dan jaringan pipa transmisi diakui setelah jasa diberikan, dan diukur sebesar satuan gas yang telah diangkut selama suatu periode.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Share capital (continued)

Where the Company or any subsidiaries within the Group purchase the Company's equity share capital (treasury stock), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes), is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

u. Revenue and expense

Revenues of the Group are earned from gas trading, crude oil and natural gas transmission services, sale of crude oil, natural gas, LPG, LNG, and other services.

Revenues from gas trading and oil and natural gas transmission services are recognized when natural gas or crude oil is distributed to the customer based on the meter readings. The Group's contracts may be negotiated from time to time and special discounted prices may be given to customers after the respective Gas Sales and Purchase Agreement ("GSPA") which governs the discounted prices is agreed between the Group and the customers. Subject to the nature of these changes, the Group accounts for modification of the existing contract based on agreed volume commitments before and after the contract modification and the price changes arising from the modification.

Revenue arising from the operation of the asset and pipeline transmission is recognised after the service is rendered and is measured based on the units of gas which have been transported during such period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari produksi minyak mentah, gas bumi, LPG dan LNG (bersama-sama disebut sebagai hidrokarbon) diakui berdasarkan volume aktual yang dijual kepada pelanggan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada pendapatan untuk setiap perbedaan antara volume yang dijual ke pelanggan dan volume yang tidak terjual yang berhak dijual oleh Grup berdasarkan hak kepemilikannya. Pendapatan sehubungan dengan volume tersebut hanya diakui jika ada transfer output ke pelanggan Grup. Namun, jika *lifting* tidak sesuai dengan hak kepemilikan, penyesuaian dilakukan pada beban pokok pendapatan yang mencerminkan jumlah terutang/tagihan dari *partner* yang merupakan pergerakan *overlifting/underlifting*.

Perbedaan *lifting* aktual hidrokarbon menghasilkan piutang ketika *entitlements* final melebihi *lifting* (posisi *underlifting*) dan menghasilkan hutang ketika *lifting* hidrokarbon melebihi *entitlements* final (posisi *overlifting*). Volume *underlifting* dan *overlifting* dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang tahunan Minyak Mentah Indonesia (untuk minyak mentah) dan harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas yang bersangkutan (untuk gas bumi, LPG dan LNG).

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

Revenues from the production of crude oil, natural gas, LPG and LNG (together referred to as hydrocarbons) are recognised based on the actual volumes sold to customers. No adjustments are made to revenue for any differences between volumes sold to customers and unsold volumes which the Group is entitled to sell based on its participating interest. Revenue in respect of such volumes is only recognised when there is a transfer of output to the Group's customers. However, where liftings do not match participating interest, an adjustment is made to cost of revenue representing the amount due to/from partners representing overlifting/underlifting movements.

Differences between the actual liftings of hydrocarbons result in a receivable when final entitlements exceed the liftings (underlifting position) and in a payable when liftings exceed final entitlements (overlifting position). Underlifting and overlifting volumes are valued based on the annual weighted average Indonesia Crude Price (for crude oil) and the prices as determined in the respective Sale and Purchase Contracts (for natural gas, LPG and LNG).

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut (lanjutan):

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri *relative* diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

a. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan keuangan atas sewa diakui sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

v. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment (continued):

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:

a. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Finance income on lease is recognized over the lease term based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the lease.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

v. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. The management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If necessary, management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated statements of financial position. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini" dalam laba rugi. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini".

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development)* pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 ("PMK 136/2024"). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Grup telah menerapkan amandemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expense - Current" in profit or loss. The Group also presents interest/penalties, if any, as part of "Income tax expense - Current".

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 ("PMK 136/2024"). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2025, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes*, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

w. Laba per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

x. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan di periode dimana pembagian dividen diumumkan.

y. Segmen operasi

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is the same as basic earnings per share.

x. Dividends

Dividends distributed to the Group's shareholders are recognized as a liability in the Group's statement of financial position in the period in which the dividends are declared.

y. Operating segments

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);
b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
c. For which discrete financial information is available.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The directors are the Group's chief operating decision-maker. The segments are based on the nature of business. All transactions between segments have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224.

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

aa. Provisi kontrak merugi

Kontrak merugi adalah kontrak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Jika Grup terikat dalam suatu kontrak merugi, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 224.

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

aa. Provision for onerous contract

An onerous contract is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it. If the Group has a contract that is onerous, the present obligation under the contract shall be recognised and measured as a provision.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

a. Pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Grup memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Grup menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Grup untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Grup menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Grup mempertimbangkan berikut ini:

(1) Apakah pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah; dan

(2) Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
- Bentuk hukum dari entitas terpisah;
- Persyaratan pengaturan kontraktual; atau
- Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

b. Penentuan mata uang fungsional dan pelaporan

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

Perusahaan menentukan mata uang pelaporannya adalah USD.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

a. Joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control over an arrangement, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent.

The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operational and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, the Group considers the following:

(1) Whether the joint arrangement is structured through a separate entity; and

(2) When the arrangement is structured through a separate entity, the Group also considers the rights and obligations arising from:
- *The legal form of the separate entity;*
- *The terms of the contractual arrangement; or*
- *Other relevant facts and circumstances.*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion about both joint control, and whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting treatment.

b. Determination of functional and reporting currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

Group determined that its reporting currency is the USD.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

c. Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f.

d. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 116: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

Sehubungan dengan perjanjian antara PLI dengan PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") untuk penggunaan fasilitas *Floating Storage and Regasification Unit* ("FSRU") Lampung (Catatan 35e), manajemen mengevaluasi bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa dan Grup sebagai penyewa telah mengakuinya sebagai aset sewa guna usaha sesuai dengan PSAK 116: Sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

c. Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition financial liabilities based on PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

d. Leases

The Group as a lessee

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of a leased asset based on PSAK 116: Leases, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the year ended December 31, 2025, there is no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

In relation to the agreement between PLI and PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") for the use of the Lampung Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") facility (Note 35e), management has evaluated that such agreement contains a lease and the Group as the lessee has classified it as a right-of-use asset in line with PSAK 116: Leases.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Pesewa

Pertagas menandatangani perjanjian dengan PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") terkait pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Pipa Gas Bumi Senipah Balikpapan selama jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan kontrak, terdapat klausul pengalihan aset di akhir periode kontrak. Bagi Grup sebagai pesewa, perjanjian tersebut mungkin mengandung unsur sewa sehingga harus dicatat dengan menggunakan akuntansi sewa.

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah atau mengandung unsur sewa, yang dibuat pada awal sewa, memerlukan pertimbangan yang signifikan bagi manajemen. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut kadang-kadang secara legal tidak berbentuk sewa, namun memberikan hak untuk menggunakan aset dengan imbalan serangkaian pembayaran kepada pesewa sehingga perjanjian tersebut mungkin merupakan perjanjian sewa. Sebaliknya, terdapat perjanjian yang secara legal merupakan sewa, namun secara substansi bukan merupakan sewa.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh manajemen, perjanjian dengan KPI tersebut yang melibatkan penggunaan aset Grup merupakan perjanjian sewa pembiayaan. Oleh karena itu, Grup mengakui adanya piutang. Grup menggunakan asumsi suku bunga implisit dalam sewa sebagai dasar untuk menentukan piutang.

e. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun taksiran tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya di Kantor Pajak, dalam proses banding di Pengadilan Pajak maupun proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk pajak yang belum diakui harus diakui.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

d. Leases (continued)

The Group as a Lessor

Pertagas entered into a contract with PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") for construction and utilisation of Senipah Balikpapan Natural Gas Pipeline for a period of 30 years which involcing the use of the Group's assets. Based on the contract, there are clauses of transfer of assets at the end of contract period. For the Group as a lessor, these arrangements may contain a lease and therefore need to be accounted for using lease accounting.

Determination whether an arrangements is or contains lease, made at the inception of the lease, requires significant judgment from management. This is due to the fact that the arrangement sometimes does not take the legal form of a lease but nevertheless conveys a right to use an asset in return for series of payments to the lessor and therefore it may be a leasing arrangement. Conversely, there are arrangements that involve the legal form of a lease, which are not, in substance, a leasing arrangements.

Based on the assesments performed by management, the contract with KPI involving the use of the Group's assets reflects a finance lease. As such, the Group, as a lessor, recognised receivables. The Group used the assumption of implicit interest rate in the leases as basis to recognise the receivable.

e. Uncertain tax exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assesses whether the amounts recorded as claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, management also assesses the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection with the Tax Office, appeal process in the Tax Court and under judicial review by the Supreme Court.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all income tax positions to determine if a tax liability for unrecognised tax should be recognised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

e. Ketidakpastian eksposur perpajakan (lanjutan)

Seperti dijelaskan dalam Catatan 21f, Grup melakukan estimasi ketidakpastian eksposur perpajakan yang material atas sengketa pajak yang sedang dihadapi oleh Grup. Manajemen Grup dibantu oleh ahli pihak ketiga dalam menyiapkan analisa pajak yang komprehensif untuk mempertahankan posisi pajak Grup. Jangka waktu penyelesaian atas sengketa pajak ini tidak dapat diestimasi saat ini karena tergantung proses penyelesaian di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

f. Aset eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan tersebut belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan.

Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah dilakukan kapitalisasi atas biaya berdasarkan kebijakan ini, suatu pertimbangan dibuat bahwa pemulihan biaya dianggap tidak dimungkinkan, biaya yang telah dikapitalisasi tersebut akan dibebankan ke dalam laba rugi.

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu yang serupa dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi yang dijelaskan di atas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

e. Uncertain tax exposures (continued)

As disclosed in Note 21f, the Group has made material estimations in relation to uncertain tax exposures related to tax disputes involving the Group. The Group's management is assisted by third party experts in preparing a comprehensive tax analysis to defend the Group's tax position. The settlement period of these tax disputes can not currently be estimated as it depends on the settlement process at the Tax Court and Supreme Court.

f. Exploration and evaluation assets

The Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure results in certain items of expenditure being capitalised for an area of interest where it is considered likely to be recoverable through future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of the existence of reserves.

This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalised the expenditure under the policy, a judgement is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalised amount will be written off to profit or loss.

Development activities commence after a project is sanctioned by the appropriate level of management. Judgement is applied by management in determining when a project is economically viable. In exercising this judgement, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for the capitalisation of exploration and evaluation expenditure.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Estimasi atas suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") dari suatu sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

b. Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimating the incremental borrowing rate ("IBR") of a lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

Therefore, the IBR reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

b. Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets to be within four to 30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore future depreciation charges could be revised.

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

b. Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

c. Imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimating useful lives of fixed assets (continued)

The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

c. Employee benefits

The present value of the pension and other long-term benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Those assumptions include discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of employee service. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension and other long-term benefit obligations.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This interest rate should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension and other long-term benefit obligations.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Imbalan kerja (lanjutan)

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya yang bersangkutan.

Untuk kenaikan gaji masa depan, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa depan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

d. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas, fasilitas dan infrastruktur. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto, biaya yang diharapkan untuk membongkar semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area, dan waktu pelaksanaan pembongkaran aset serta restorasi area.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

c. Employee benefits (continued)

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension and other long-term benefit obligations.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it with future business plans.

Other key assumptions for pension obligation and other long-term benefits are based on current market conditions.

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

d. Asset abandonment and site restoration obligations

The Group recognises a provision for asset abandonment and site restoration obligations associated with its oil and gas wells, facilities and infrastructure. In determining the amount of the provision, the required assumptions and estimates consist of discount rate, the expected cost to dismantle all the structures from the site and restore the site and timing of assets dismantlement and restoration of the area.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

e. Ketersediaan laba kena pajak di masa depan untuk merealisasi aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

f. Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu

Provisi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan *unutilised gas volume*, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri ESDM ("Kepmen ESDM") untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah.

g. Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK 109 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

e. Availability of future taxable profits to realise deferred tax assets

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, provisions and other deductible temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the sufficiency of the future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depends on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales of goods and services, prices, operating costs, capital expenditure and other future transactions.

f. Provision for adjustment to the purchase price of certain natural gas

This provision will be recorded periodically based on the estimation in accordance with the addition of unutilized gas volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by Decree of the Minister of EMR ("Kepmen ESDM") for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. The Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government.

g. Impairment of financial assets

The implementation of PSAK 109 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to the provision for loss on impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables.

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang. Untuk seluruh piutang lain-lain Grup menerapkan cadangan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasikan. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

h. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat terpulihkan dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

The Group determines lifetime and point of initial recognition of receivables. For all other receivables the Group applies the 12 months expected loss provision. To measure the expected credit losses, other receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognises a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

h. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated each reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indications exist, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss will be recognised to the extent of the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit of a group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap, ditelaah untuk penurunan nilai ketika kejadian dan perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai terpulihkan aset akan diestimasi.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai untuk properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, tingkat diskonto menggunakan *weighted average cost of capital* ("WACC"), harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya *tolling*, cadangan atas properti minyak dan gas (lihat "Estimasi Cadangan Minyak dan Gas Bumi" di bawah), umur manfaat pipa, biaya operasi, biaya pembongkaran dan restorasi serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai terpulihkan aset. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

Lihat Catatan 13b untuk penurunan nilai aset tetap dan Catatan 15c untuk penurunan nilai properti minyak dan gas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

h. Impairment of non-financial assets (continued)

Proven oil and gas properties and fixed assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated.

The determination of fair value and value in use for proven oil and gas properties and fixed assets requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, discount rate using weighted average cost of capital ("WACC"), commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), tolling fees, reserves for oil and gas properties (see "Oil and Gas Reserve Estimates" below), pipelines' useful lives, operating costs, decommissioning and site restoration cost and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

See Note 13b for impairment of fixed assets and Note 15c for impairment of oil and gas properties.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

i. Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Nilai tercatat untuk deplesi, penyusutan dan untuk amortisasi beserta pemulihan nilai tercatat properti minyak dan gas, yang digunakan untuk memproduksi minyak dan gas tergantung pada estimasi cadangan minyak dan gas. Faktor utama yang mempengaruhi estimasi tersebut adalah penilaian teknis atas kuantitas produksi cadangan minyak dan gas yang ada dan kendala ekonomis, seperti ketersediaan pasar komersial atas produksi minyak dan gas bumi maupun asumsi yang terkait dengan antisipasi harga komoditas dan biaya pengembangan dan produksi cadangan tersebut.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu dan data geologi bertambah selama masa operasi, oleh karena itu perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Penyisihan untuk aktivitas purna-operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan-kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

i. Oil and gas reserve estimates

The amounts recorded for depletion, depreciation and amortisation, as well as the recovery of the carrying value of oil and gas properties involving production of oil and gas reserves depend on the estimated reserves of oil and gas. The primary factors affecting these estimates are technical engineering assessments of producible quantities of oil and gas reserves in place and economic constraints, such as the availability of commercial markets for oil and gas production, as well as assumptions related to anticipated commodity prices and the costs of development and production of the reserves.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and additional geological data are generated during the course of operations, therefore estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial performance and financial position in a number of ways, including the following:

- *Asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows.*
- *Depreciation and amortisation charged in the profit or loss and other comprehensive income may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change.*
- *Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.*
- *The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

j. Nilai wajar instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

k. Kerugian kredit ekspektasian

KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah KKE sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 12 bulan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

j. Fair value of financial instrument

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

k. Expected credit loss

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 12-month past due.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

k. Kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit.

l. Kontrak merugi

Estimasi kewajiban kini dari kontrak merugi yang diperkirakan akan ditanggung Grup dibuat dengan membandingkan nilai terendah antara total biaya pemenuhan kontrak dan biaya untuk membatalkan kontrak tersebut.

Dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak, pembayaran yang jatuh tempo pada periode dimana kontrak tidak dapat dibatalkan harus turut dipertimbangkan. Jika terdapat pilihan untuk membatalkan kontrak dan membayar denda, maka nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar pada saat pembatalan kontrak juga harus dipertimbangkan, dan kontrak diukur pada biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak. Biaya-biaya yang harus diperhitungkan dalam hal ini harus merupakan biaya yang tidak dihindarkan yang bisa dikaitkan langsung dengan kewajiban Perusahaan. Biaya yang tidak dihindarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan biaya-biaya langsung variabel dalam kontrak dan karena itu merupakan biaya inkremental terkait dengan kontrak.
- Tidak termasuk biaya alokasi atau biaya pembagian.
- Tidak bisa dihindari oleh rencana masa depan Grup.

Biaya yang akan terjadi terlepas apakah kontrak akan dipenuhi atau tidak, bukan merupakan biaya inkremental. Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental adalah biaya yang sifatnya tetap dan tidak dapat dibatalkan seperti biaya depresiasi atas aset tetap, biaya sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan, dan lain-lain.

Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental tersebut tidak perlu dimasukkan dalam analisis kontrak merugi karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya untuk menjalankan bisnis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

k. Expected credit loss (continued)

However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group.

l. Onerous contract

An estimate of the present obligation of a onerous contract that is expected to be borne by the Group is made by comparing the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it.

In determining the cost of fulfilling a contract, payments that are due in the period in which the contract cannot be canceled must also be considered. If there is an option to cancel the contract and to pay a penalty, then the present value of the amount to be paid at the time of the contract cancelled must also be considered, and the contract is measured at the lower net cost to be unbound from the contract. Costs that must be considered in this case is an unavoidable costs that can be directly related to the Company's obligation. The unavoidable costs criteria are as follow:

- *Direct costs of the contract and therefore incremental cost in relation to the contract.*
- *Does not represent allocation or distribution costs.*
- *Unavoidable cost by the Group's future plans.*

Costs that will be occured regardless the contract is fulfilled or not do not represent incremental costs. Non-incremental costs are fixed and irrevocable costs, such as depreciation expense on fixed assets, noncancelable operating lease costs, and others.

Non-incremental costs are excluded in the onerous contract analysis since they are costs to run the business.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH*

a. Kas dan setara kas / *a. Cash and cash equivalents*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Kas	**52.699**	**81.866**	***Cash on hand***
Kas pada bank			*Cash in bank*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	168.015.604	25.787.150	*PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. ("BNI")*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	127.052.502	208.521.381	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	79.721.261	133.724.701	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	286.749	286.809	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	266.625	21.027.220	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")*
Subtotal	375.342.741	389.347.261	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Citibank N.A.	3.059.320	3.353.859	*Citibank N.A.*
JP Morgan Chase, Texas	259.497	1.146.830	*JP Morgan Chase, Texas*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), Singapore	124.987	151.739	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), Singapore*
PT Bank ANZ Indonesia	29.634	29.704	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Dahulu sebagai PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	22.921	22.896	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Formerly known as PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)*
Subtotal	3.496.359	4.705.028	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Mandiri	134.472.135	138.024.515	*Bank Mandiri*
BRI	48.896.333	22.362.771	*BRI*
BSI	17.999.322	1.555.124	*BSI*
BNI	10.997.343	26.516.509	*BNI*
BTN	955.410	183.246.920	*BTN*
Bank Syariah Nasional ("BSN") (Dahulu Sebagai Unit Usaha Syariah BTN)	291.764	295.403	*Bank Syariah Nasional ("BSN") (Formerly known as BTN Sharia Business Unit)*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	14.102	14.612	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Subtotal	213.626.409	372.015.854	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)*

a. Kas dan setara kas (lanjutan) / *a. Cash and cash equivalents (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Kas pada bank (lanjutan)			*Cash in bank (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	867.937	141.733	*PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Central Asia Tbk.	581.322	543.146	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank Pembangunan Jambi	134.926	79.631	*PT Bank Pembangunan Jambi*
PT Bank UOB Indonesia	12.194	12.607	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank DBS Indonesia	972	22.996	*PT Bank DBS Indonesia*
Subtotal	1.597.351	800.113	*Subtotal*
Yen Jepang			*Japanese Yen*
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	6.901.249	587	*Bank Mandiri*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
Pihak ketiga			***Third party***
Citibank N.A., Jakarta	66.486	69.848	*Citibank N.A., Jakarta*
Subtotal	6.967.735	70.435	*Subtotal*
Jumlah kas pada bank	**601.030.595**	**766.938.691**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka dan setara kas lainnya			*Time deposits and other cash equivalents*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
BTN	191.000.000	30.000.000	*BTN*
Bank Mandiri	101.000.000	86.000.000	*Bank Mandiri*
BNI	90.410.000	161.004.000	*BNI*
BRI	6.027.131	32.563.023	*BRI*
Subtotal	388.437.131	309.567.023	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	107.126.601	59.905.878	*BNI*
BSI	77.084.030	39.807.560	*BSI*
BRI	59.417.095	79.751.927	*BRI*
BTN	58.283.494	99.203.751	*BTN*
Bank Mandiri	44.856.459	8.169.834	*Bank Mandiri*
BSN	-	15.423.345	*BSN*
Subtotal	346.767.679	302.262.295	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

a. Cash and cash equivalents (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Deposito berjangka dan setara kas lainnya (lanjutan)			*Time deposits and other cash equivalents (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	-	4.332.487	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*
Subtotal	-	4.332.487	Subtotal
Total deposito berjangka dan setara kas lainnya	**735.204.810**	**616.161.805**	***Total time deposits and other cash equivalents***
Jumlah kas dan setara kas	**1.336.288.104**	**1.383.182.362**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat bunga deposito berjangka dan setara kas lainnya adalah sebagai berikut:

The interest rates of time deposits and other cash equivalents are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Rekening Rupiah	4,00% - 6,95%	2,25% - 7,70%	*Rupiah Accounts*
Rekening Dolar AS	2,40% - 5,90%	2,00% - 7,15%	*US Dollar Accounts*

Nisbah bagi hasil deposito berjangka syariah untuk Grup tahun 2025 dan 2024 adalah 58,39% - 78,40% dan 66,76% - 76,88%.

The Group's portion of profit sharing from shariah time deposit in 2025 and 2024 were 58.39% - 78.40% and 66.76% - 76.88%.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

b. Kas yang dibatasi penggunaannya

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

b. Restricted cash

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
Rekening bersama dengan SKK Migas dan jaminan atas bank garansi			***Joint accounts with SKK Migas and collateral on bank guarantee***
Bank Mandiri	138.909.481	129.938.991	*Bank Mandiri*
BNI	33.041.140	38.185.652	*BNI*
Subtotal	171.950.621	168.124.643	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Jaminan Pelaksanaan Proyek			***Project performance Bond***
BNI	8.778.893	482.302	*BNI*
Bank Mandiri	3.855.783	-	*Bank Mandiri*
Pembongkaran dan Restorasi Aset			***Asset Retirement Obligation***
Bank Mandiri	469.104	-	*Bank Mandiri*
Rekening tantiem yang ditangguhkan			***Deferred bonuses accounts***
BNI	529.280	462.440	*BNI*
BRI	477.011	566.662	*BRI*
Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya	**186.060.692**	**169.636.047**	***Total restricted cash***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(158.744.853)	(148.412.844)	*Non-current portion*
Kas yang dibatasi penggunaannya, bagian lancar	**27.315.839**	**21.223.203**	***Restricted cash, current portion***

Grup diharuskan menempatkan bank garansi terkait komitmen pasti pada PSC Pangkah, PSC Sangkar, PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, dan PSC Bangkanai. Selama tahun 2024, Grup memperoleh Surat Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau dan PSC Bangkanai yang masing-masing berlaku sampai Mei 2026, Juni 2033, Desember 2037, dan Desember 2027 sebesar USD1.500.000, USD1.552.000, USD583.300, dan USD450.000. Bank garansi terkait komitmen pasti PSC Pangkah dan PSC Sangkar masing-masing akan berakhir pada Mei 2031 dan Juni 2033 dengan jumlah sebesar USD6.405.297 dan USD1.500.000. Jumlah bank garansi sehubungan dengan komitmen pasti ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar USD11.990.597 dan USD11.990.597.

The Group is required to place bank guarantees related to firm commitments for PSC Pangkah, PSC Sangkar, PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, and PSC Bangkanai. During 2024, the Group obtained an Extension Letter for the Validity of the Performance Guarantee for PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, and PSC Bangkanai, which are valid until May 2026, June 2033, December 2037, and December 2027 amounting to USD1,500,000, USD1,552,000, USD583,300, and USD450,000, respectively. The bank guarantees related to firm commitments for PSC Pangkah and PSC Sangkar will expire on May 2031 and June 2033, amounting to USD6,405,297 and USD1,500,000. The total amount of bank guarantees in connection with these firm commitments as of December 31, 2025 and December 31, 2024, are USD11,990,597 and USD11,990,597, respectively.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

b. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Rekening bersama dengan SKK Migas merupakan rekening yang ditempatkan di Bank Mandiri dan BNI (entitas berelasi dengan Pemerintah) untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area sehubungan dengan operasi hulu minyak dan gas. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan rekening bersama masing-masing sebesar USD148.210.023 dan USD135.584.046.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor ("DHE") dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam ("SDA") mengatur paling sedikit sebesar 30% DHE SDA dalam Grup ditempatkan ke dalam rekening khusus DHE SDA paling tidak selama 3 bulan sejak DHE SDA diterima dan ditempatkan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan DHE SDA masing-masing sebesar USD11.750.000 dan USD20.550.000.

Kas yang dibatasi penggunaannya mencakup jaminan keikutsertaan tender proyek serta jaminan pelaksanaan jasa pekerjaan konstruksi. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jaminan tersebut disimpan dalam rekening bank Perusahaan yang ditahan sebesar USD12.634.676 dan USD482.302.

Berdasarkan Permen 3/2023, BUMN harus melakukan penangguhan Tantiem/Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar persentase tertentu, minimal 10% dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun. Pembayaran dilakukan secara prorata sesuai jangka waktu penangguhan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan penangguhan pembayaran tantiem tersebut sebesar USD1.006.292 dan USD1.029.102.

Pada tahun 2025, Grup bersama PT Rukun Raharja Tbk. sebagai mitra Kerja Sama Operasi telah menempatkan dana atas Liabilitas Pembongkaran Aset sehubungan dengan pengelolaan pipa minyak mentah di Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai. Per 31 Desember 2025, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya porsi Grup sehubungan dengan penempatan dana ARO adalah USD469.104.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

b. Restricted cash (continued)

The joint account with SKK Migas is an account placed at Bank Mandiri and BNI (entities related to the Government) to fund the liabilities of asset dismantling and area restoration in connection with upstream oil and gas operations. As of December 31, 2025 and 2024, the amounts of cash whose use is restricted in connection with the joint account are USD148,210,023 and USD135,584,046, respectively.

Indonesia Government Regulation No. 36 of 2023 regarding Export Proceeds ("DHE") from Natural Resources ("SDA") Business, Management, and/or Processing regulates that at least 30% of the DHE SDA in the Group need to be placed into a special DHE SDA account for at least 3 months since the DHE SDA was received and placed. As of December 31, 2025 and 2024, the amount of restricted cash in connection with DHE SDA is USD11,750,000 and USD20,550,000.

Restricted cash represents bid bonds for project tenders and performance bonds for construction services. As of December 31, 2025 and 2024, these funds are held in the Company's bank account, which is subject to restrictions is USD12,634,676 and USD482,302.

Based on Permen 3/2023, BUMN must postpone Bonuses/Performance Incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners by a certain percentage, at least 10% for a minimum period of 3 years. Payment is made pro rata according to the suspension period. As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the amount of restricted cash for the deferral were USD1,006,292 and USD1,029,102.

In 2025, the Group, together with PT Rukun Raharja Tbk. as its Joint Operation Cooperation partner, placed funds related to the Asset Retirement Obligation in connection with the management of crude oil pipelines in the Balam–Bangko–Dumai Corridor and the Minas–Duri–Dumai Corridor. As of December 31, 2025, the Group's portion of restricted cash related to the ARO fund placement amounted to USD469,104.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *5. SHORT TERM INVESTMENT*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Entitas pihak berelasi			***Related parties***
BNI	-	618,927	*BNI*
Jumlah	**-**	**618.927**	***Total***

Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rates of time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Rekening Rupiah	-	5,5%	*Rupiah accounts*

6. PIUTANG USAHA - NETO / *6. TRADE RECEIVABLES - NET*

Piutang usaha terdiri dari: / *Trade receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Niaga gas bumi			*Gas trading*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	53.820.923	52.507.527	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")*
PT Iglas (Persero)	8.185.810	8.362.856	*PT Iglas (Persero)*
PT Pupuk Kujang	6.322.801	5.486.001	*PT Pupuk Kujang*
KPI	4.739.887	5.179.803	*KPI*
PT Kertas Leces (Persero)	3.912.975	3.942.171	*PT Kertas Leces (Persero)*
PT Freeport Indonesia	1.539.151	-	*PT Freeport Indonesia*
PT Pupuk Iskandar Muda	471.564	10.860.759	*PT Pupuk Iskandar Muda*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	1.743.974	3.939.712	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	80.737.085	90.278.829	*Subtotal*
Minyak dan gas			*Oil and gas*
PLN	2.825.041	3.539.113	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	964.611	1.601.298	*PT Pertamina Patra Niaga*
Subtotal	3.789.652	5.140.411	*Subtotal*
Transmisi minyak & gas dan jasa regasifikasi			*Oil & Gas transmission and regasification service*
PT Pertamina EP ("PEP")	13.544.294	12.955.578	*PT Pertamina EP ("PEP")*
PLN	12.069.780	9.645.369	*PLN*
KPI	11.117.679	27.403.638	*KPI*
PT Pertamina Hulu Rokan	9.988.155	10.660.458	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PSG	9.087.039	15.585.109	*PSG*
PT Pertamina Patra Niaga	6.171.233	4.333.211	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	5.414.290	2.176.198	*PT Petrokimia Gresik ("PKG")*
PT Pupuk Sriwidjaja ("PUSRI")	2.178.571	2.167.362	*PT Pupuk Sriwidjaja ("PUSRI")*
PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")	1.842.554	3.036.297	*PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")*
PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")	774.977	1.037.471	*PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT")*
PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")	655.149	1.767.359	*PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM")*
PT Pertamina Trans Kontinental	208.062	2.634.027	*PT Pertamina Trans Kontinental*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	837.193	1.961.196	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	73.888.976	95.363.273	*Subtotal*
Total pihak berelasi	**158.415.713**	**190.782.513**	**Total related parties**
Pihak ketiga			***Third parties***
Niaga gas bumi	239.069.571	200.831.708	*Gas trading*
Transmisi gas	140.467.801	135.054.169	*Gas transmission*
Minyak dan gas	31.475.744	21.520.966	*Oil and gas*
Konstruksi, operasi dan pemeliharaan	16.588.619	19.600.076	*Construction, operation and maintenance*
Sewa fiber optik	8.562.772	8.304.163	*Fiber optic rental*
Total pihak ketiga	**436.164.507**	**385.311.082**	**Total third parties**
Jumlah piutang usaha sebelum cadangan penurunan nilai	**594.580.220**	**576.093.595**	***Total trade receivables before allowance for impairment***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai			*Allowance for impairment*
Pihak berelasi	(28.280.096)	(28.727.821)	*Related parties*
Pihak ketiga	(167.663.683)	(161.532.209)	*Third parties*
	(195.943.779)	(190.260.030)	
Jumlah piutang usaha sesudah cadangan penurunan nilai	398.636.441	385.833.565	*Total trade receivables after allowance for impairment*
Bagian lancar	**398.636.441**	**385.833.565**	***Current portion***
Piutang usaha bagian lancar, bersih			*Trade receivables current portion, net*
Pihak berelasi	130.135.617	162.054.692	*Related parties*
Pihak ketiga	268.500.824	223.778.873	*Third parties*
Total	**398.636.441**	**385.833.565**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, komposisi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the allowance for impairment losses on the Group's trade receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Penurunan individual	166.913.337	166.231.774	*Individual impairment*
Penurunan kolektif	29.030.442	24.028.256	*Collective impairment*
Total	**195.943.779**	**190.260.030**	***Total***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo awal	190.260.030	151.699.440	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	11.451.332	42.380.279	*Addition during the year*
Dampak selisih kurs	(5.767.583)	(3.819.689)	*Foreign exchange impact*
Total	**195.943.779**	**190.260.030**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment for individual receivables is provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Allowance for impairment for collective receivables is provided for customers that have insignificant balances and possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

The aging analysis of trade receivables based on invoice dates is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Belum jatuh tempo	403.125.792	362.841.630	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
sampai dengan 3 bulan	14.806.626	26.594.523	*up to 3 months*
3 bulan - 6 bulan	2.171.408	6.585.108	*3 months - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	4.922.300	8.352.366	*6 months - 1 year*
Di atas 1 tahun	169.554.094	171.719.968	*more than 1 year*
Total	**594.580.220**	**576.093.595**	***Total***

Rincian piutang usaha sebelum penyisihan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables before allowance based on denominated currency are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Dolar AS	470.157.235	510.506.566	*US dollar*
Rupiah	124.422.985	65.587.029	*Rupiah*
Total	**594.580.220**	**576.093.595**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Berdasarkan rincian dari umur piutang usaha, sebesar 16,15% (2024: 13,96%) dari piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun merupakan piutang usaha dari entitas berelasi dengan pemerintah, yaitu masing-masing 9,02% (2024: 6,79%) dari PLN, 4,83% (2024: 4,87%) dari PT Iglas (Persero), dan 2,31% (2024: 2,30%) dari PT Kertas Leces (Persero). Manajemen terus berupaya melakukan langkah-langkah negosiasi untuk mengusahakan penagihan terkait dengan piutang-piutang usaha tersebut.

Nilai tercatat dari piutang usaha sama dengan nilai wajarnya.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Termasuk di dalam piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari kasus arbitrase terkait deklarasi keadaan kahar oleh Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), *shipper* di Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG") Kalija I (Catatan 36a).

Pada tanggal 14 juni 2024, hasil putusan *international of commerce* ("ICC") menyebutkan bahwa PCML harus membayar harus membayar *Pre-Termination Claim* kepada KJG sebesar USD17.300.000 diluar bunga, sehingga per tanggal 31 Desember 2024 KJG membukukan tambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dari PCML sebesar USD41.964.817.

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman maupun kontrak lainnya.

6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

Based on the detailed aging of the trade receivable, 16.15% (2024: 13.96%) of the trade receivables that are past due by more than one year represent amounts from government-related entities, comprising 9.02% (2024: 6.79%) due from PLN, 4.83% (2024: 4.87%) due from PT Iglas (Persero) and 2.31% (2024: 2.30%) due from PT Kertas Leces (Persero). Management is continuously taking negotiation steps to pursue the collection of those receivables.

The carrying value of trade receivables is the same as their fair value.

The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

Included in trade receivables is receivables in relation to the arbitration case from to the Force Majeure condition declared by Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), the shipper for Gas Transportation Agreement ("GTA") Kalija I (Note 36a).

On June 14, 2024, International Chamber of Commerce's ("ICC") verdict stated that PCML had to pay Pre-Termination Claim to KJG amounted to USD17,300,000 excluding interest, thus per December 31, 2024 KJG has recorded additional allowance for impairment losses of receivables from PCML amounted to USD41,964,817.

As of December 31, 2025, no account receivables are pledged in relation with debt or other contracts.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - NETO / *7. OTHER RECEIVABLES - NET*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah Republik Indonesia	1.302.638	1.302.638	*Government of Republic of Indonesia*
Subtotal pihak berelasi	1.302.638	1.302.638	*Subtotal related parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.302.638)	(1.302.638)	*Allowance for impairment losses*
Subtotal pihak berelasi – neto	-	-	*Subtotal related parties – net*
Pihak ketiga			***Third parties***
Piutang dari operasi bersama	10.230.072	7.355.605	*Joint operation receivables*
Uang muka kerja	8.718.832	6.368.185	*Employee working advances*
Piutang *carry* dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")	7.771.788	-	*Carry receivables from Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")*
Piutang klaim investasi	5.527.082	3.450.295	*Investment claims receivable*
Piutang *reimbursement*	1.983.728	-	*Reimbursement receivable*
Panjar dinas	519.252	1.999.198	*Prepaid travel expenses*
Piutang bunga	-	667.247	*Interest receivable*
Lain-lain	12.623.647	7.941.180	*Others*
Subtotal pihak ketiga	47.374.401	27.781.710	*Subtotal third parties*
Jumlah piutang lain-lain, bersih	**47.374.401**	**27.781.710**	***Total other receivables, net***

Piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai bagian dari aset lancar karena berdasarkan perjanjian kontraktual, pembayaran piutang lain-lainnya dari pihak berelasi dijadwalkan selesai dalam atau kurang dari satu tahun.

Other receivables from related parties are classified as current assets because according to the contractual agreements, the repayment of other receivables from related parties is expected within one year or less.

Piutang dari KUFPEC merupakan kewajiban pajak yang terutang di SIPBV yang akan ditanggung oleh KUFPEC sesuai dengan Perjanjian Jual Beli ("PJB") KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. antara SEI dengan KUFPEC tertanggal 24 April 2013, dengan tingkat bunga diskonto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 4,53%. SEI dan KUFPEC sepakat bahwa piutang ini akan dibayar saat PSC Pangkah mencapai *equity to be split* ("ETBS"). Pada tahun 2025, PSC Pangkah telah mencapai ETBS, sehingga SEI menyampaikan tagihan kepada KUFPEC pada tanggal 20 Juni 2025. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, proses pembahasan dan korespondensi formal antara SEI dan KUFPEC masih berlangsung terkait pemenuhan dan verifikasi dokumen.

Receivables from KUFPEC represent the tax obligation of SIPBV, which will be borne by KUFPEC based on the Sale and Purchase Agreement ("SPA") of KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. between SEI and KUFPEC dated April 24, 2013, with a discounted interest rate as of December 31, 2025 and 2024 of 4.53%. SEI and KUFPEC agreed that this receivable will be paid when the Pangkah PSC reaches equity to be split ("ETBS"). In 2025, the Pangkah PSC reached ETBS and SEI sent an invoice to KUFPEC on June 20, 2025. As of December 31, 2025, discussions and formal correspondence between SEI and KUFPEC were still ongoing in relation to the fulfillment and verification of supporting documents.

7. PIUTANG LAIN-LAIN – NETO (lanjutan)

Piutang lain-lain dari pihak ketiga merupakan piutang yang timbul sehubungan dengan operasi di PSC dimana Grup adalah *partner* bukan operator dari blok-blok tersebut.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

7. OTHER RECEIVABLES – NET (continued)

Other receivables from third parties represent the receivables arising from PSC operations where the Group is a non-operating partner of those PSC blocks.

Movement of allowance for impairment losses is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Saldo awal	1.302.638	1.302.638	*Beginning balance*
Pembalikan	-	-	*Reversal*
Saldo akhir	**1.302.638**	**1.302.638**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover any loss from uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN - NETO / *8. INVENTORIES - NET*

Persediaan terdiri dari: / *Inventories consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Suku cadang minyak dan gas, perlengkapan sumur dan lainnya	46.520.842	46.354.740	*Oil and gas spareparts, well supplies and others*
Gas alam dan LNG	39.291.855	15.195.370	*Natural gas and LNG*
LNG *in transit*	37.242.337	-	*LNG in transit*
Suku cadang	15.338.752	14.728.441	*Spareparts*
Persediaan real-estate	3.968.924	4.103.019	*Real-estate inventory*
Persediaan *marine gas oil*	1.372.497	2.028.330	*Marine gas oil inventory*
Jumlah persediaan, bruto	**143.735.207**	**82.409.900**	***Total inventories, gross***
Dikurangi dengan:			*Deducted by:*
Provisi penurunan nilai persediaan	(477.054)	(477.054)	*Provision for impairment - of inventories*
Jumlah persediaan, bersih	**143.258.153**	**81.932.846**	***Total inventories, net***

Mutasi provisi untuk penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut: / *Movement of provision for impairment of inventories is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo awal	477.054	477.054	*Beginning balance*
Pengurangan selama tahun berjalan	-	-	*Reductions during the year*
Saldo akhir	**477.054**	**477.054**	***Ending balance***

Suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya terdiri dari persediaan yang berhubungan dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Spare parts, well supplies and others represent inventories which are related to the exploration and production of oil and gas.

Persediaan LNG digunakan sebagai bahan baku regasifikasi untuk memenuhi pasokan gas domestik, kegiatan *Gas Up* and *Cool Down* maupun niaga LNG. Persediaan gas alam digunakan dalam rangka niaga gas alam.

LNG inventory is used as raw material for regasification to support domestic gas supply, Gas Up and Cool Down activities, and LNG trading. Natural gas inventory is used to support natural gas trading activities.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa provisi tersebut di atas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on a review at the reporting dates, management believes that the above provision is adequate to cover possible losses from impairment of inventories.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pembelian dan transmisi gas bumi			*Purchases and transmission of natural gas*
- PT Pertamina EP Cepu ("PEPC")	27.605.127	-	*PT Pertamina EP Cepu ("PEPC") -*
- Koreksi atas Implementasi Kepmen ESDM 76K/2025 dan 282K/2025	17.988.479	-	*Correction for the implementation of - Kepmen ESDM 76K/2025 dan 282K/2025*
- PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ")	7.781.656	-	*PT Pertamina Hulu Energi - Offshore North West Java ("PHE ONWJ")*
- PEP	99.914	-	*PEP -*
- Transgasindo	-	27.257	*Transgasindo -*
Pembelian barang dan jasa	3.124.449	7.483.630	*Purchase of goods and services*
Tantiem yang ditangguhkan	2.215.876	4.155.301	*Deferred bonuses*
Uang muka *cash call*	331.237	5.328.733	*Cash call advances*
Uang muka bangunan	-	180.867	*Advance for building*
Lain-lain	3.137.479	4.752.065	*Others*
Total uang muka	62.284.217	21.927.853	*Total advances*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar			*Non-current portion*
- Tantiem yang ditangguhkan	(1.291.873)	(2.770.201)	*Deferred bonuses*
- Pembelian barang dan jasa	(360.761)	(427.073)	*Purchase of goods and services -*
- Uang muka bangunan	-	(180.867)	*Advance for building -*
Subtotal	(1.652.634)	(3.378.141)	*Subtotal*
Uang muka, bagian lancar	**60.631.583**	**18.549.712**	***Advances, current portion***

Uang muka pembelian gas bumi merupakan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan "*Make-Up Gas*" untuk selisih jumlah gas yang dialirkan dengan jumlah kuantitas pembelian gas minimum seperti yang tertera dalam PJBG. Uang muka tersebut akan dikreditkan dengan kelebihan kuantitas gas yang dialirkan dengan jumlah kuantitas pembelian gas bumi minimum yang terjadi setelahnya.

The advances for purchase of natural gas represents payments made under the Make-Up Gas arrangements for the difference between the delivered quantity and the minimum purchase quantity of natural gas as stated in the GSPA. Such advances will be applied against future deliveries of quantities over the minimum specified purchase of natural gas.

Koreksi atas implementasi Kepmen merupakan saldo kelebihan bayar Perusahaan kepada beberapa pemasok yang disebabkan karena implementasi harga Kepmen ESDM 76K dan 282K tahun 2025 yang lebih rendah daripada harga PJBG. Perusahaan dapat mengutilisasi saldo ini untuk mengurangi tagihan pemasok di masa depan.

Correction on implementation of Ministry Decision represents the Company's overpayment balance to several supplier due to implementation of price based on Kepmen ESDM No 76K and 282K of 2025 which is lower than price in Gas Sales and Purchase Agreement. The Company can utilize this balance to deduct supplier's billing in the future.

Uang muka *cash call* merupakan akumulasi pembayaran *cash call* setelah dikurangi pengeluaran yang dilakukan oleh operator dari kerjasama operasi minyak dan gas bumi.

Cash call advances are the accumulated payments for cash calls net of expenditure incurred by the operator of the oil and natural gas joint operations.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh uang muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such advances can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

Beban dibayar di muka terdiri dari: / *Prepaid expenses consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Sewa dan beban dibayar di muka lainnya	43.020.627	45.778.774	*Rent and other prepaid expense*
Joint interest billing dari aktivitas minyak dan gas	4.069.448	11.364.843	*Joint interest billing from oil and gas activities*
Lain-lain	518.390	390.668	*Others*
Total beban dibayar di muka	47.608.465	57.534.285	*Total prepaid expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(30.392.763)	(30.329.186)	*Non-current portion*
Beban dibayar dimuka, bagian lancar	**17.215.702**	**27.205.099**	***Prepaid expenses, current***

Manajemen berpendapat bahwa seluruh beban dibayar di muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such prepaid expense can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG / *11. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES*

Piutang lain-lain jangka panjang terdiri dari: / *Other long-term receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
PPN yang dapat ditagihkan	43.924.136	38.566.458	*Reimbursable VAT*
Piutang *carry* dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")	-	7.771.788	*Carry receivables from Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. ("KUFPEC")*
Sub-total pihak ketiga	43.924.136	46.338.246	*Sub-total third parties*
Penyesuaian nilai wajar	-	(198.420)	*Fair value adjustment*
Sub-total pihak ketiga setelah penyesuaian	43.924.136	46.139.826	*Sub-total third parties after adjustment*
Total	**43.924.136**	**46.139.826**	***Total***

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG (lanjutan) / *11. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES (continued)*

Mutasi penyesuaian nilai wajar adalah sebagai berikut: / *Movements in the fair value adjustment were as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo awal	(198.420)	(3.023.701)	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Addition*
Amortisasi	198.420	337.920	*Amortisation*
Penyesuaian lain-lain	-	2.487.361	*Other adjustments*
Saldo akhir	**-**	**(198.420)**	***Ending balance***

PPN yang dapat ditagihkan adalah saldo PPN yang dapat ditagihkan ke SKK Migas pada saat Grup telah menghasilkan laba penjualan minyak atau laba penjualan gas di masing-masing PSC. Manajemen Grup mengevaluasi kemampuan pembayaran kembali PPN berdasarkan status operasi masing-masing PSC.

Reimbursable VAT is the remaining balance of VAT reimbursable by SKK Migas when the Group generates profit oil or profit gas from its respective PSCs. The Group's management assessed the reimbursability of the VAT based on the status of each PSC operation.

Nilai wajar piutang lain-lain jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung dengan menggunakan metode arus kas terdiskonto. Perhitungan nilai wajar ini diklasifikasikan sebagai tingkat tiga dalam hirarki nilai wajar.

The fair value of other long-term receivables as of December 31, 2025 and 2024 were calculated using the discounted cash flow method. This fair value measurement is within level three of the fair value hierarchy.

Manajemen Grup berpendapat bahwa saldo seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

The Group's management believes that all of the receivables are collectible. Hence, no allowance for impairment losses has been provided.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA / *12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES*

Rincian penyertaan adalah sebagai berikut: / *The details of joint ventures are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Investasi saham (nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)	2.718	2.718	***Investments in shares (FVOCI)***
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
Transgasindo	140.876.310	136.285.448	*Transgasindo*
Regas	79.396.593	89.612.231	*Regas*
PSG	62.932.077	66.106.819	*PSG*
PDG	11.501.315	9.786.043	*PDG*
Perkasa	10.967.518	10.011.143	*Perkasa*
KSO GAGAS–JUP	148.808	148.808	*KSO GAGAS–JUP*
Subtotal	305.822.621	311.950.492	*Subtotal*
Jumlah penyertaan saham	**305.825.339**	**311.953.210**	***Total investment in shares***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut. / *The movement of investment in joint ventures are as followings.*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo pada awal tahun	311.950.492	307.201.570	Balance *at beginning of year*
Bagian laba ventura bersama	76.401.988	72.200.336	*Share of profit of joint ventures*
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari ventura bersama	(425.209)	329.998	*Share of other comprehensive income from joint ventures*
Dividen tunai	(82.104.650)	(67.781.412)	*Cash dividends*
Pada akhir tahun	305.822.621	311.950.492	*At the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investment in joint ventures (continued)

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Nama entitas/ *Name of entity*	Kedudukan usaha/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *% of ownership*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Metode pengukuran/ *Measurement method*
Transgasindo	Jakarta, Indonesia	59,87%	Keterangan/*Remarks* 1	Ekuitas/*Equity*
Regas	Jakarta, Indonesia	40,00%	Keterangan/*Remarks* 2	Ekuitas/*Equity*
Perkasa	Jakarta, Indonesia	60,00%	Keterangan/*Remarks* 3	Ekuitas/*Equity*
PSG	Banyuasin, Indonesia	66,00%	Keterangan/*Remarks* 4	Ekuitas/*Equity*
PDG	Jakarta, Indonesia	65,00%	Keterangan/*Remarks* 5	Ekuitas/*Equity*
KSO GAGAS–JUP	Jakarta, Indonesia	51,00%	Keterangan/*Remarks* 6	Ekuitas/*Equity*

Keterangan:
1) Transgasindo bergerak di bidang transportasi gas dan memiliki infrastruktur pipa gas jaringan pipa Transmisi Grissik-Duri dan Grissik-Singapura.
2) Regas didirikan untuk pengelolaan fasilitas FSRT termasuk pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT.
3) Perkasa bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, pembinaan dan penyaluran jasa tenaga kerja.
4) PSG bergerak dalam bidang pengolahan gas serta menyediakan layanan jasa dan infrastruktur terkait pemrosesan gas.
5) PDG bergerak dalam bidang LNG dan gas pengangkutan/transportasi LNG, penyimpanan dan regasifikasi.
6) KSO GAGAS-JUP bergerak dalam bidang pemanfaatan SPBG.

Remarks:
1) Transgasindo is engaged in gas transportation and owns the Grissik- Duri and Grissik-Singapore pipelines.
2) Regas was established to manage FSRT facilities including purchase of LNG and marketing of products arising from the operations of FSRT facilities.
3) Perkasa is engaged in workshop services, development and distribution of labour services.
4) PSG is engaged in the business of gas processing and providing services and infrastructure for gas processing.
5) PDG is engaged in LNG and gas transportation, storage and regasification.
6) KSO GAGAS–JUP is engaged in Fuel Gas Filling Station utilisation.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh investasi pada ventura bersama tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such investment in joint ventures can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Set out below is the summarised financial information of the joint ventures which are accounted for using the equity method.

(1) Transgasindo
Ringkasan informasi keuangan Transgasindo adalah sebagai berikut:

(1) Transgasindo
Summarised financial information for Transgasindo is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	158.434.193	136.346.617	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	17.251.263	22.437.289	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	115.410.055	117.635.346	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(32.270.768)	(24.401.658)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(5.578.939)	(3.731.147)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas keuangan jangka panjang	(11.816.756)	(10.925.102)	*Long-term financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(5.381.971)	(8.982.322)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	236.047.077	228.379.023	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(1) Transgasindo (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(1) Transgasindo (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	143.861.686	131.142.201	*Revenue*
Biaya, depresiasi dan amortisasi	(55.672.136)	(57.507.675)	*Expenses, depreciation and amortisation*
Pendapatan/(beban) lainnya	187.283	347.507	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	4.836.415	5.616.929	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	93.213.248	79.598.962	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(21.588.963)	(16.473.143)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	71.624.285	63.125.819	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	(830.414)	242.568	*Other comprehensive income/(expenses)*
Dividen yang dibayarkan	(63.125.819)	(53.793.222)	*Dividend paid*

Transgasindo merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Transgasindo.

Transgasindo is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Nilai buku pada awal tahun	136.285.448	130.552.797	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	42.881.459	37.793.428	*Share of profit for the year*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	(497.169)	145.225	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Penerimaan dividen	(37.793.428)	(32.206.002)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	140.876.310	136.285.448	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(2) Regas

Ringkasan informasi keuangan Regas adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(2) Regas

Summarised financial information for Regas is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	208.647.706	228.998.478	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	6.369.508	8.260.069	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	66.479.851	41.201.035	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(41.503.253)	(12.782.162)	*Other long-term liabilities*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(32.086.274)	(33.657.512)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(8.151.261)	(6.656.447)	*Other short-term liabilities*
Aset bersih	199.756.277	225.363.461	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	81.961.691	81.961.691	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(47.645.914)	(47.427.119)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(13.395.514)	(11.071.905)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	10.504.625	12.055.677	*Finance income*
Beban keuangan	(1.996.412)	(2.410.815)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	29.428.476	33.107.529	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(5.007.442)	(5.207.276)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	24.421.034	27.900.253	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	39.870	286.527	*Other comprehensive income/(expenses)*
Dividen yang dibayarkan	(50.000.000)	(46.181.933)	*Dividend paid*

Regas merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Regas.

Regas is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investasi pada ventura bersama (lanjutan) / ***Investment in joint ventures (continued)***

(2) Regas (lanjutan) / *(2) Regas (continued)*

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Nilai buku pada awal tahun	89.612.231	96.810.292	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	9.768.414	11.160.101	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(20.000.000)	(18.472.773)	*Dividends received*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	15.948	114.611	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Nilai buku pada akhir tahun	79.396.593	89.612.231	*Carrying amount at the end of the year*

(3) Perkasa / *(3) Perkasa*

Ringkasan informasi keuangan Perkasa adalah sebagai berikut:

Summarised financial information for Perkasa is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	1.701.246	1.625.864	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	19.456.829	18.676.273	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1.195.497	936.398	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(1.076.555)	(1.653.347)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(6.616.364)	(6.266.108)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(1.858.922)	(1.567.901)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	12.801.731	11.751.179	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	70.020.758	64.725.590	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(63.869.730)	(58.345.394)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(2.887.362)	(3.233.361)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	36.920	123.723	*Finance income*
Beban keuangan	(275.536)	-	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	3.025.050	3.270.558	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(567.507)	(247.936)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	2.457.543	3.022.622	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	95.353	116.935	*Other comprehensive income/(expenses)*
Dividen yang dibayarkan	(956.938)	(1.004.394)	*Dividend paid*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investasi pada ventura bersama (lanjutan) / ***Investment in joint ventures (continued)***

(3) Perkasa (lanjutan) / *(3) Perkasa (continued)*

Rekonsiliasi dari nilai investasi pada Perkasa adalah sebagai berikut: / *Reconciliation of investment in Perkasa is summarised as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Nilai buku pada awal tahun	10.011.143	8.730.045	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	1.474.526	1.813.574	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(574.163)	(602.637)	*Dividends received*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	56.012	70.161	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Nilai buku pada akhir tahun	10.967.518	10.011.143	*Carrying amount at the end of the year*

Perkasa merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Perkasa. / *Perkasa is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.*

(4) PSG / *(4) PSG*

PSG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PSG. / *PSG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.*

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut: / *Summarised financial information for PSG is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	94.825.564	97.125.935	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	16.297.669	18.616.044	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	15.170.839	27.671.241	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(16.609.433)	(26.809.797)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(8.913.936)	(11.660.437)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	100.770.703	104.942.986	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(4) PSG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut: (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(4) PSG (continued)

Summarised financial information for PSG is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	118.472.475	123.854.860	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(81.636.427)	(85.091.972)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(573.798)	(3.594.355)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	4.207.010	3.557.936	*Finance income*
Beban keuangan	(2.545.042)	(615.747)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	37.924.218	38.110.722	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(7.734.433)	(7.782.592)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	30.189.785	30.328.130	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	(35.000.000)	(25.000.000)	*Dividend paid*

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Nilai buku pada awal tahun	66.106.819	62.585.407	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	19.925.258	20.021.412	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(23.100.000)	(16.500.000)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	62.932.077	66.106.819	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)*

Investasi pada ventura bersama (lanjutan) / ***Investment in joint ventures (continued)***

(5) PDG / *PDG*

Ringkasan informasi keuangan PDG adalah sebagai berikut: / *Summarised financial information for PDG is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	7.478.608	1.556.543	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	8.139.601	6.276.831	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	11.217.979	14.426.232	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(6.250.334)	(4.782.548)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(870.799)	(602.924)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	19.715.055	16.874.134	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	17.288.958	15.152.999	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(8.365.974)	(6.226.059)	*Cost of revenue*
Beban lainnya	(4.045.649)	(4.715.055)	*Other expenses*
Pendapatan keuangan	71.945	41.008	*Finance income*
Beban keuangan	(30.634)	(265.655)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	4.918.646	3.987.238	
Beban pajak penghasilan	(1.299.700)	(1.284.931)	*Profit before income taxes*
Laba tahun berjalan	3.618.946	2.702.307	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	980.091	-	*Dividend paid*

Rekonsiliasi dari investasi pada PDG adalah sebagai berikut: / *Reconciliation of investment in PDG is summarised as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Nilai buku pada awal tahun	9.786.043	8.368.868	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	2.352.331	1.417.175	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(637.059)	-	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	11.501.315	9.786.043	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(5) PDG (lanjutan)

PDG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PDG.

(6) KSO GAGAS–JUP

Ringkasan informasi keuangan KSO GAGAS–JUP adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(5) PDG (continued)

PDG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

(6) KSO GAGAS–JUP

Summarised financial information for KSO GAGAS–JUP is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Aset lancar lainnya	-	28	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	-	544.417	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	-	(30.946)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	(275.707)	*Other short-term liabilities*
Aset bersih	-	237.792	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Beban lainnya	-	(25.319)	*Other expenses*
Rugi tahun berjalan	-	(25.319)	*Loss for the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(6) KSO GAGAS–JUP

Rekonsiliasi dari investasi pada KSO GAGAS–JUP adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(6) KSO GAGAS–JUP

Reconciliation of investment in KSO GAGAS–JUP is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Nilai buku pada awal tahun	148.808	154.161	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian rugi diserap tahun berjalan	-	(5.353)	*Share of loss for the year*
Nilai buku pada akhir tahun	148.808	148.808	*Carrying amount at the end of the year*

KSO GAGAS-JUP merupakan sebuah Kerja Sama Operasi (“KSO”) antara GEI dengan PT Jakarta Utilitas Propertindo sehingga tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk kepemilikan dari KSO ini.

KSO GAGAS-JUP is a Joint Operation ("JO") between GEI and PT Jakarta Utilitas Propertindo, thus there is no quoted market price available for the ownership of this JO.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET*

a. Aset tetap / *a. Fixed assets*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of fixed assets are as follows:*

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	112.904.961	-	-	(34.854)	112.870.107	*Land*
Bangunan dan prasarana	232.868.258	-	-	9.124.841	241.993.099	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	5.171.037.819	9.820.026	(634.004)	124.993.524	5.305.217.365	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	12.249.988	7.025.457	(2.085.821)	(396.441)	16.793.183	*Vehicles*
Peralatan kantor	22.981.975	672.954	(3.504.151)	48.875	20.199.653	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	15.347.047	87.673	(1.393.793)	5.818	14.046.745	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	6.547.147	-	(231.829)	-	6.315.318	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	246.728.907	153.344.317	(3.112)	(156.540.865)	243.529.247	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.820.666.102	170.950.427	(7.852.710)	(22.799.102)	5.960.964.717	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	143.125.488	10.681.398	-	(109.226)	153.697.660	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	3.015.965.800	170.383.656	(634.004)	(2.565.496)	3.183.149.956	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	3.931.503	1.721.591	(1.313.209)	(116.322)	4.223.563	*Vehicles*
Peralatan kantor	22.472.985	409.141	(3.504.151)	(110.717)	19.267.258	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	13.515.159	611.757	(1.393.793)	(77.420)	12.655.703	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	4.540.650	133.860	(131.255)	-	4.543.255	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	3.203.551.585	183.941.403	(6.976.412)	(2.979.181)	3.377.537.395	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	107.846.429	4.274.341	-	1.267.387	113.388.157	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	107.846.429	4.274.341	-	1.267.387	113.388.157	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.509.268.088**				**2.470.039.165**	***Net book value***

	31 Desember/December 31, 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	111.207.463	-	-	1.697.498	112.904.961	*Land*
Bangunan dan prasarana	231.827.407	859.782	(36.120)	217.189	232.868.258	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	5.049.336.867	9.667.821	(480.609)	112.513.740	5.171.037.819	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	11.427.752	3.374.990	(2.096.815)	(455.939)	12.249.988	*Vehicles*
Peralatan kantor	23.404.747	74.868	(518.086)	20.446	22.981.975	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	15.135.666	247.541	(307.964)	271.804	15.347.047	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	7.111.524	-	(564.377)	-	6.547.147	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	312.576.801	139.042.471	(16.361.295)	(188.529.070)	246.728.907	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.762.028.227	153.267.473	(20.365.266)	(74.264.332)	5.820.666.102	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	132.773.173	10.582.883	(11.298)	(219.270)	143.125.488	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	2.856.385.148	164.698.136	(20.443)	(5.097.041)	3.015.965.800	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4.645.781	1.146.462	(1.706.548)	(154.192)	3.931.503	*Vehicles*
Peralatan kantor	22.306.438	1.095.411	(508.895)	(419.969)	22.472.985	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	13.505.197	396.304	(307.964)	(78.378)	13.515.159	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	4.741.668	146.788	(347.806)	-	4.540.650	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	3.034.357.405	178.065.984	(2.902.954)	(5.968.850)	3.203.551.585	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	106.482.806	1.363.623	-	-	107.846.429	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	106.482.806	1.363.623	-	-	107.846.429	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.621.188.016**				**2.509.268.088**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)*

a. Aset tetap (lanjutan) / *a. Fixed assets (continued)*

Penyusutan dibebankan ke: / *Depreciation was charged to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	177.945.137	170.527.238	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	5.996.266	7.538.746	*General and administrative expenses (Note 29)*
Total	**183.941.403**	**178.065.984**	***Total***

Asuransi aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dengan nilai pertanggungan untuk pipa *onshore* sebesar USD1.220.885.910 dan nilai pertanggungan untuk pipa *offshore* sebesar USD337.400.000 dengan keseluruhan nilai pertanggungan sebesar USD1.558.285.910, serta asuransi untuk peralatan mesin sebesar USD40.793.672 dan untuk aset lainnya sebesar IDR18.874.994.195.859. Aset tetap entitas anak diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan total nilai pertanggungan untuk fasilitas pendukung FSRU Lampung sebesar USD231.873.699, aset SPBG PT Gagas Energi Indonesia sebesar IDR369.504.481.506, aset PT Kalimantan Jawa Gas sebesar USD267.570.793, aset PT Widar Mandripa Nusantara sebesar USD1.302.405, dan aset PT Pertamina Gas sebesar USD1.968.651.670.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets insurance

As of December 31, 2025, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies from PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. with the sum insured totaling USD1,220,885,910 for onshore pipeline and sum insured totaling USD337,400,000 for offshore pipeline with overall asset coverage of USD1,558,285,910, USD40,793,672 for machinery breakdown and IDR18,874,994,195,859 for other assets. The Subsidiaries' fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies with sum insured for support facilities Lampung FSRU of USD231,873,699, SPBG PT Gagas Energi Indonesia asset for IDR369,504,481,506, PT Kalimantan Jawa Gas asset for USD267,570,793, PT Widar Mandripa Nusantara asset for USD1,302,405, and PT Pertamina Gas assets for USD1,968,651,670.

Management believes that the amounts insured are adequate to cover possible losses from insured assets.

Aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar USD428.367.728 dan USD371.461.106.

Fixed assets that have been fully depreciated but are still in use

As of December 31, 2025 and 2024, the cost of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but are still in use in the operational activities amounted to USD428,367,728 and USD371,461,106, respectively.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

a. Aset tetap (lanjutan)

Pengurangan aset tetap

Pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, yang masuk pada kolom pengurangan aset dalam penyelesaian adalah pembebanan atas biaya *overhead* dan biaya proyek yang tidak dilanjutkan. Selain itu, terdapat aset dalam penyelesaian berupa sewa lahan yang direklasifikasi ke akun sewa dibayar dimuka.

Reklasifikasi dan penyesuaian asset tetap

Pada 31 Desember 2024, yang masuk pada kolom reklasifikasi dan penyesuaian adalah penyelesaian atas proyek-proyek yang telah siap dimanfaatkan sehingga dapat diakui sebagai aset tetap dan reklasifikasi aset pipa Senipah – Balikpapan sebesar USD83.452.726 ke akun Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 14c), sehubungan dengan perjanjian dengan KPI terkait Pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pipa gas bumi selama jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan kontrak, terdapat klausul pengalihan aset di akhir periode kontrak.

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang – Tambak Lorok

Grup mencatat provisi penurunan nilai aset tetap KJG sebesar USD107.846.429. Perhitungan penurunan nilai aset tetap dilakukan oleh manajemen atas dasar volume penyaluran gas yang didukung oleh komitmen penjualan gas. Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat penambahan provisi penurunan nilai aset tetap di KJG sebesar USD1.363.623.

Jumlah terpulihkan unit penghasil kas ("UPK") dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan transmisi gas yang bersumber dari gas lapangan Kepodang di blok Muriah hingga tahun 2026 (2025 hingga tahun 2026) dengan metode *value-in-use* ("VIU") dimana lebih tinggi dari metode *fair value less cost to sell*.

Perhitungan arus kas diskontoan yang digunakan meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

a. Fixed assets (continued)

Deduction of fixed assets

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, included in the deduction column of assets under construction are expenses for overhead costs and discontinued project costs. In addition, there are assets under construction in the form of land lease assets that are reclassified to the advance account.

Reclassification and adjustment of fixed assets

As of December 31, 2024, included in the reclassification and adjustment of FA are completion of projects that are ready for use thus they can be recognized as fixed assets and recalsification of senipah – Balikpapan pipeline assets amounted to USD83,452,726 to Finance Lease Receivables (Note 14c), in relation with KPI agreement for construction and utilization of natural gas pipeline for a period for 30 years. Based on the contract, there are clauses of transfer of assets at the end of contract period.

b. Impairment test on fixed assets

Impairment of Kepodang – Tambak Lorok transmission pipe

The Group recorded a provision for the impairment of KJG's fixed assets amounting to USD107,846,429. The calculation of the impairment of fixed assets was carried out by management based on the volume of gas distribution supported by the commitment of gas sales. As of December 31, 2024, there were additions of provisions for the impairment of fixed assets in KJG amounting to USD1.363.623.

The recoverable amount of the cash generating units ("CGU") is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from gas transmission with the gas source from Kepodang field in Muriah block up to 2026 (2025 up to 2026) using the value-in-use method ("VIU") method, which is higher than the fair value less cost to sell method.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap (lanjutan)

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang – Tambak Lorok (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

b. Impairment test on fixed assets (continued)

Impairment of Kepodang – Tambak Lorok transmission pipe (continued)

The key assumptions used for VIU calculations as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Volume gas dari blok Muriah (mscf)			*Volume gas from Muriah block (mscf)*
2025	-	3.354.350	*2025*
2026	4.022.300	1.015.650	2026
Tarif jasa pengangkutan	USD2,326/MSCF	USD2,326/MSCF	*Toll-fee*
Tingkat diskonto	9,76%	9,38%	*Discount rate*
Periode arus kas	Sampai/*Until* 2026	Sampai/Until 2026	*Cash flows period*
Metode yang digunakan untuk nilai terpulihkan	VIU	VIU	*Method used for recoverable amount*

Penurunan nilai aset Cargo Dock, Filling Station Arun, dan Filling Station Bontang

Pada 31 Desember 2025, Grup mencatat kerugian penurunan nilai sebesar USD4.274.341 atas tiga aset di Pertagas yaitu Cargo Dock, Filling Station Arun, dan Filling Station Bontang karena rendahnya tingkat pemanfaatan aset-aset tersebut.

Impairment of assets on Cargo Dock, Filling Station Arun, and Filling Station Bontang

On December 31, 2025, the Group recorded impairment losses of USD4,274,341 for three assets in Pertagas, Cargo Dock, Filling Station Arun, and Filling Station Bontang, due to the low level of utilization of these assets.

c. Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian. Rincian aset dalam penyelesaian signifikan adalah sebagai berikut:

c. Construction in progress

Construction in progress represent projects that have not been completed at the date of the consolidated financial statements. Significant items of construction in progress are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2025		
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date***
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	36.254.309	2028
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	77,13%	12.707.970	2026
Pekerjaan revitalisasi tangki LNG F-6004 Arun/ *Revitalization project of LNG Arun F-6004*	99,00%	44.264.668	2026

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)*

c. Aset dalam penyelesaian (lanjutan) / *c. Construction in progress (continued)*

Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	31 Desember/*December* 31, 2024 Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date*
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	36.299.035	2027
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	70,68%	25.192.626	2025
Pekerjaan Pembangunan booster pump Pipa Minyak Duri-Rokan/*Construction project of booster pump for Duri-Rokan oil transportation pipeline*	98,12%	32.071.283	2025
Pekerjaan revitalisasi tangki LNG F-6004 Arun/ *Revitalization project of LNG Arun F-6004*	79,00%	31.430.318	2025

Selain dari aset dalam penyelesaian yang dinyatakan di atas, Grup masih memiliki aset dalam penyelesaian yang terdiri dari pengembangan jaringan dan infrastruktur untuk pelanggan kecil dan rumah tangga dalam jalur distribusi gas Grup.

Outside of the construction in progress stated above, the Group still has construction in progress assets which consist of the development of networks and infrastructure for small customers and household within the Group's gas distribution lines.

d. Aset takberwujud - neto / *d. Intangible assets - net*

Perubahan dalam akun aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The changes in intangible assets account for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025 Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan dan Penyesuaian/ *Deduction and Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	11.195.065	600.054	-	11.795.119	*Software*
Hak atas tanah	2.179.707	-	-	2.179.707	*Land rights*
	13.374.772	600.054	-	13.974.826	
Akumulasi amortisasi					***Accummulated amortisation***
Piranti lunak	(9.855.874)	(915.957)	-	(10.771.831)	*Software*
Hak atas tanah	(1.294.314)	(96.255)	-	(1.390.569)	*Land rights*
	(11.150.188)	(1.012.212)	-	(12.162.400)	
Nilai buku bersih	**2.224.584**	**(412.158)**	**-**	**1.812.426**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS – NET (continued)*

d. Aset takberwujud (lanjutan) / *d. Intangible Assets (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	10.375.017	820.048	-	11.195.065	*Software*
Hak atas tanah	2.116.698	63.009	-	2.179.707	*Land rights*
	12.491.715	883.057	-	13.374.772	
Akumulasi amortisasi					***Accummulated amortisation***
Piranti lunak	(8.811.438)	(1.044.436)	-	(9.855.874)	*Software*
Hak atas tanah	(1.192.509)	(101.805)	-	(1.294.314)	*Land rights*
	(10.003.947)	(1.146.241)	-	(11.150.188)	
Nilai buku bersih	**2.487.768**	**(263.184)**	**-**	**2.224.584**	***Net book value***

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD326.835 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD685.377. Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD327.758 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD818.483.

Amortization expenses of intangible assets for the year ended December 31, 2025 were recorded in Cost of Revenues amounting to USD326,835 and General and Administrative Expenses amounting to USD685,377. The amortization expenses of the intangible assets for the year ended December 31, 2024 were recorded in the Cost of Revenue amounting to USD327,758 and General and Administrative Expenses amounting to USD818,483.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh aset takberwujud tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such intangible assets can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

14. SEWA / *14. LEASES*

a. Aset hak-guna / *a. Right-of-use assets*

Catatan ini menyajikan informasi untuk sewa dimana Grup bertindak sebagai *lessee:*

This note provides information for leases where the Group acts as a lessee:

	31 Desember/*December 31,* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")*
Tug boats	32.446.429	-	-	32.446.429	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	17.191.636	-	(465.184)	16.726.452	*Buildings and improvements*
Kendaraan	12.010.873	340.949	(228.191)	12.123.631	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	58.937.945	21.585	-	58.959.530	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	308.742	-	-	308.742	*Other equipment*
Total nilai tercatat	567.227.450	362.534	(693.375)	566.896.609	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(154.797.165)	(30.959.433)	-	(185.756.598)	*FSRU*
Tug boats	(4.065.779)	(3.934.309)	19.799	(7.980.289)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(8.152.720)	(3.344.748)	(901.595)	(12.399.063)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(8.543.138)	(2.941.279)	137.220	(11.347.197)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(20.281.058)	(682.632)	-	(20.963.690)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(93.669)	(1.843.386)	-	(1.937.055)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(195.933.529)	(43.705.787)	(744.576)	(240.383.892)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**371.293.921**			**326.512.717**	***Net book value***

14. SEWA (lanjutan) / *14. LEASES (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / *a. Right-of-use assets (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")*
Tug boats	70.041.849	-	(37.595.420)	32.446.429	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	19.129.167	3.824.607	(5.762.138)	17.191.636	*Buildings and improvements*
Kendaraan	9.656.176	3.258.931	(904.234)	12.010.873	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	39.871.898	4.105.760	14.960.287	58.937.945	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	148.528	165.842	(5.628)	308.742	*Other equipment*
Total nilai tercatat	585.179.443	11.355.140	(29.307.133)	567.227.450	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(123.837.732)	(30.983.827)	24.394	(154.797.165)	*FSRU*
Tug boats	(22.762.457)	(4.090.047)	22.786.725	(4.065.779)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(6.200.988)	(2.018.468)	66.736	(8.152.720)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(7.115.708)	(2.568.680)	1.141.250	(8.543.138)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(11.995.251)	(4.362.877)	(3.922.930)	(20.281.058)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(56.079)	(39.760)	2.170	(93.669)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(171.968.215)	(44.063.659)	20.098.345	(195.933.529)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**413.211.228**			**371.293.921**	***Net book value***

Penyusutan dibebankan ke: / *Depreciation was charged to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	42.060.932	40.536.596	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	1.644.855	3.527.063	*General and administrative expenses (Note 29)*
	43.705.787	44.063.659	

Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai FSRU. Tidak ada penurunan nilai yang perlu dibukukan pada tanggal 31 Desember 2025.

The Group has carried out an impairment test for the FSRU. There were no impairment needs to be recorded at December 31, 2025.

b. Liabilitas sewa / *b. Lease liabilities*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo awal	395.234.415	430.682.063	*Beginning balance*
Beban bunga	15.744.535	17.015.634	*Interest expense*
Penambahan	3.825.284	11.619.468	*Additions*
Penyesuaian	(1.198.339)	(10.144.078)	*Adjustments*
Pembayaran	(57.174.752)	(53.938.672)	*Payments*
Saldo akhir	356.431.143	395.234.415	*Ending balance*
Bagian jangka pendek	42.594.142	41.359.840	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**313.837.001**	**353.874.575**	***Non-current portion***

14. SEWA (lanjutan) / *14. LEASES (continued)*

b. Liabilitas sewa (lanjutan) / *b. Lease liabilities (continued)*

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban bunga (Catatan 30a)	15.744.535	17.015.634	*Interest expense (Note 30a)*
Beban terkait sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah	33.601.974	49.865.960	*Expenses relating to short-term and low-value assets leases*

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of cash flows show the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembayaran kepada pemasok	(33.601.974)	(49.865.960)	*Payments to suppliers*
Pembayaran bunga atas sewa	(15.744.535)	(17.015.634)	*Payments for interest on lease*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pembayaran liabilitas sewa	(41.430.217)	(36.923.038)	*Repayments of lease liabilities*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa FSRU, gedung, peralatan berat, kendaraan, dan kapal *(time charter*). Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 sampai dengan 5 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 3. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

The Group entered into several lease agreements which are mainly related to rental of FSRU, buildings, heavy equipment, vehicles and shipping vessels (time charter). Rental agreements are typically made for fixed periods of 1 to 5 years but may have extension options as described in Note 3. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but leased assets may not be used as security for borrowing purposes.

14. SEWA (lanjutan) / *14. LEASES (continued)*

c. Piutang sewa pembiayaan / *c. Finance lease receivable*

Akun ini terkait dengan implikasi dari perlakuan akuntansi sewa pembiayaan atas perjanjian pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Pipa Gas Bumi Senipah Balikpapan antara Pertagas dengan KPI yang berlaku selama 30 tahun sejak tahun 2024.

This account related to the impact of the finance lease accounting treatment on the construction and utilisation of Senipah Balikpapan Natural Gas Pipeline agreement between Pertagas and KPI effective for 30 years starting from 2024.

Analisis maturitas dari piutang sewa, termasuk pembayaran sewa yang belum didiskontokan yang akan diterima adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of lease receivables, including the undiscounted lease payments to be received are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Kurang dari 1 tahun	5.737.214	10.591.779	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	5.295.890	5.295.890	*1 - 2* year
2 - 3 tahun	5.295.890	5.295.890	*2 - 3 year*
3 - 4 tahun	5.295.890	5.295.890	*3 - 4 year*
4 - 5 tahun	5.295.890	5.295.890	*4 - 5 year*
Di atas 5 tahun	121.805.460	127.101.347	*Above 5 year*
Total piutang sewa pembiayaan bruto	148.726.234	158.876.686	*Total gross financial lease receivable*
Penghasilan keuangan yang belum terealisasi	(71.293.217)	(75.423.960)	*Unearned finance income*
Piutang sewa pembiayaan bersih	**77.433.017**	**83.452.726**	***Net finance leases receivables***
Bagian jangka pendek	1.670.012	6.461.033	*Current portion*
Bagian jangka panjang	75.763.005	76.991.693	*Non-current portion*

Pada tanggal 31 Desember 2025, manajemen berpendapat tidak ada indikasi penurunan nilai terhadap piutang sewa pembiayaan, oleh karena itu uji penurunan nilai tidak diperlukan.

As of December 31, 2025, management believes that there is no indication of impairment in the value of the finance lease receivables and therefore an impairment test was not required.

d. Pendapatan sewa yang masih harus diterima / *d. Accrued lease income*

Akun ini merepresentasikan kompensasi non tunai terkait dengan perjanjian antara PGN dengan PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ") dan PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek") (Catatan 35i dan 35j).

This account represents non-cash compensation related to contract between PGN with PT Citraagung Tirta Jatim ("CTJ") and PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek") (Notes 35i and 35j).

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET

a. Aset eksplorasi dan evaluasi

Pergerakan aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Exploration and evaluation assets

Movements of exploration and evaluation assets are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Deduction)*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	6.142.623	(6.142.623)	-	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Yamdena Barat, Maluku	3.701.586	(11.918)	3.689.668	*West Yamdena, Maluku -*
- Pekawai, Kalimantan Timur	1.778.778	1.256.983	3.035.761	*Pekawai, East Kalimantan -*
- Sangkar, Jawa Tengah	392.356	143.893	536.249	*Sangkar, Central Java -*
- Pangkah, Jawa Timur	38.244.291	(2.814.070)	35.430.221	*Pangkah, East Java -*
- Ketapang, Jawa Timur	14.971.441	(14.971.441)	-	*Ketapang, Central Java -*
- Muara Bakau, Kalimantan Timur	-	7.802.943	7.802.943	*Muara Bakau, East Kalimantan -*
Total	**65.231.075**	**(14.736.233)**	**50.494.842**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	6.021.891	120.732	6.142.623	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Yamdena Barat, Maluku	3.626.552	75.034	3.701.586	*West Yamdena, Maluku -*
- Pekawai, Kalimantan Timur	1.428.888	349.890	1.778.778	*Pekawai, East Kalimantan -*
- Sangkar, Jawa Tengah	50.000	342.356	392.356	*Sangkar, Central Java -*
- Pangkah, Jawa Timur	-	38.244.291	38.244.291	*Pangkah, East Java -*
- Ketapang, Jawa Timur	-	14.971.441	14.971.441	*Ketapang, Central Java -*
Total	**11.127.331**	**54.103.744**	**65.231.075**	***Total***

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Pangkah dan Muara Bakau terdiri atas sumur eksplorasi Ronggolawe 3 dan Konta, dengan total pengeluaran masing-masing USD35.430.219, dan USD7.802.943 yang masih dalam tahap proses pengajuan serta finalisasi *Plan of Development* ("POD"). Manajemen telah melakukan berbagai upaya strategis guna memastikan kelayakan pengembangan aset tersebut, termasuk evaluasi keekonomian proyek, kegiatan diskusi dengan para pemangku kepentingan serta optimalisasi strategi eksplorasi untuk meningkatkan kepastian cadangan.

The exploration and evaluation assets in the Pangkah and Muara Bakau blocks consist of the Ronggolawe 3, and Konta exploration wells, with total expenditures of USD35,430,219 and USD7,802,943 respectively, which are still in the process of submitting and finalizing the Plan of Development ("POD"). Management has made various strategic efforts to ensure the feasibility of developing these assets, including evaluating the economics of the project, discussions with stakeholders and optimizing exploration strategies to increase reserve certainty.

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Ketapang yang terdiri atas sumur Hikmah dan Perkasa dengan total pengeluaran sebesar USD14.971.441 telah dibebankan pada beban produksi dan lifting dalam beban pokok pendapatan di laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dikarenakan tidak terdapatnya indikasi hidrokarbon pada sumur eksplorasi tersebut.

Exploration and evaluation assets in the Ketapang block, consisting of the Hikmah and Perkasa wells, with total expenditures of USD14,971,441, were charged to production and lifting costs in the cost of revenue in the consolidated statement of profit and loss for the year ended December 31, 2025 due to the absence of hydrocarbon indications in these exploration wells.

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Bangkanai Barat dengan total pengeluaran sebesar USD6.142.623 telah dibebankan pada beban produksi dan lifting dalam beban pokok pendapatan di laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dikarenakan tidak diperpanjangnya tambahan waktu eksplorasi oleh Operator yaitu Medco.

Exploration and evaluation assets in the West Bangkanai block, with total expenditures of USD6,142,623, were charged to production and lifting costs in the cost of revenue in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2025 due to the Operator, Medco, not extending the exploration period.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan) / *15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)*

b. Properti minyak dan gas / *b. Oil and gas properties*

Mutasi properti minyak dan gas adalah sebagai berikut: / *Movement of oil and gas properties is as follows:*

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	118.946.727	388.123	-	-	119.334.850	*Muriah, Central Java*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	99.034.867	497.305	-	-	99.532.172	*South Sesulu, East Kalimantan*
Ketapang, Jawa Timur	351.332.262	10.763.463	(513.596)	-	361.582.129	*Ketapang, East Java*
Pangkah, Jawa Timur	1.437.233.094	69.795.875	-	-	1.507.028.969	*Pangkah, East Java*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	93.202.716	347.164	(10.870)	-	93.539.010	*Bangkanai, Central Kalimantan*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, East Kalimantan*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	635.644.605	11.319.465	(957.065)	-	646.007.005	*Muara Bakau, East Kalimantan*
Fasken, Texas	360.515.404	8.801.422	-	-	369.316.826	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat	3.132.308.472	101.912.817	(1.481.531)	-	3.232.739.758	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(84.818.737)	(973.992)	-	-	(85.792.729)	*Muriah, Central Java*
Ketapang, Jawa Timur	(281.384.660)	(5.842.343)	-	-	(287.227.003)	*Ketapang, East Java*
Pangkah, Jawa Timur	(1.136.216.078)	(80.947.311)	-	-	(1.217.163.389)	*Pangkah, East Java*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(43.165.304)	(4.986.949)	-	-	(48.152.253)	*Bangkanai, Central Kalimantan*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, East Kalimantan*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(509.378.772)	(25.499.723)	-	-	(534.878.495)	*Muara Bakau, East Kalimantan*
Fasken, Texas	(227.564.532)	(14.294.924)	-	-	(241.859.456)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(2.318.926.880)	(132.545.242)	-	-	(2.451.472.122)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Central Java*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	-	(99.532.172)	-	-	(99.532.172)	*South Sesulu, East Kalimantan*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, East Java*
Pangkah, Jawa Timur	(9.068.015)	-	-	-	(9.068.015)	*Pangkah, East Java*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Central Kalimantan*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, East Kalimantan*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, East Kalimantan*
Fasken, Texas	-	-	-	-	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(117.591.554)	(99.532.172)	-	-	(217.123.726)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**695.790.038**				**564.143.910**	***Net book value***

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan) / *EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)*

b. Properti minyak dan gas (lanjutan) / *Oil and gas properties (continued)*

	31 Desember/ *December 31*, 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	119.021.049	20.005	(94.327)	-	118.946.727	*Muriah, Jawa Tengah*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	98.482.652	552.215	-	-	99.034.867	*South Sesulu, Kalimantan Timur*
Ketapang, Jawa Timur	351.418.726	106.501	(192.965)	-	351.332.262	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	1.416.024.623	22.738.612	(1.530.141)	-	1.437.233.094	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	93.196.858	161.798	(155.940)	-	93.202.716	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	623.582.656	13.068.578	(1.006.629)	-	635.644.605	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	360.867.565	396	(352.557)	-	360.515.404	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat	3.098.992.926	36.648.105	(3.332.559)	-	3.132.308.472	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(84.120.285)	(698.452)	-	-	(84.818.737)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(270.035.937)	(11.348.723)	-	-	(281.384.660)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(1.011.138.419)	(125.077.659)	-	-	(1.136.216.078)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(38.680.240)	(4.485.064)	-	-	(43.165.304)	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(472.625.271)	(36.753.501)	-	-	(509.378.772)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(207.343.994)	(20.220.538)	-	-	(227.564.532)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(2.120.342.943)	(198.583.937)	-	-	(2.318.926.880)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	-	(9.068.015)	-	-	(9.068.015)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	-	-	-	-	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(108.523.539)	(9.068.015)	-	-	(117.591.554)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**870.126.444**				**695.790.038**	***Net book value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 28) masing-masing sebesar USD132.545.242 dan USD198.583.937.

Depreciation expense for the year ended December 31, 2025 and 2024 was allocated to cost of revenues (Note 28) amounting to USD132,545,242 and USD198,583,937, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD1.819.096.517.

As of December 31, 2025, all wells and related equipment and facilities were insured for an amount of USD1,819,096,517.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)

c. Uji penurunan nilai atas properti minyak dan gas

c. Impairment test on oil and gas properties

Pengujian penurunan nilai atas properti minyak dan gas dilakukan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatat properti minyak dan gas tersebut mengalami penurunan. Dalam hal ini, manajemen Grup menentukan hak kepemilikan pada masing-masing blok sebagai satu UPK.

An impairment test on oil and gas properties is performed when there is an indication that the carrying value of oil and gas properties may be impaired. For this purpose, management of the Group has determined the participating interests in the respective blocks as the relevant CGUs.

Nilai terpulihkan UPK dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan produksi minyak dan gas dengan periode proyeksi hingga akhir masa PSC atau konsesi dengan metode *VIU* atau *fair value less cost to sell*, yang mana yang lebih tinggi. Rencana produksi pada proyeksi arus kas ini tidak melampaui cadangan minyak dan gas atau akhir masa PSC atau konsesi.

The recoverable amount of the CGUs is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from oil and gas production with projection periods up to the PSC or concession expiration date and using VIU or fair value less cost to sell methods, whichever is higher. The production plans used in the cash flow projections also do not exceed oil and gas reserves or the end of the PSC or concession period.

Perhitungan arus kas diskonto yang meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Management determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai properti minyak dan gas adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses on oil and gas properties were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Saldo awal	117.591.554	108.523.539	*Beginning balance*
Penambahan	99.532.172	9.068.015	*Addition*
Pembalikan	-	-	*Reversal*
Saldo akhir	**217.123.726**	**117.591.554**	***Ending balance***

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan)

c. Uji penurunan nilai atas properti minyak dan gas (lanjutan)

Pada tahun 2025, Grup mencatat penurunan nilai atas blok Sesulu Selatan sebesar USD99.532.172 yang disebabkan adanya pengkinian data, pendekatan teknis yang lebih konservatif serta bertambahnya pemahaman atas kondisi *subsurface*, sebagaimana tercermin dalam audit reserves LAPI ITB tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan ketidakpastian geologi dan volumetrik yang berdampak pada penurunan signifikan estimasi cadangan serta dampaknya terhadap indikator keekonomian. Perhitungan NPV menjadi negatif, sehingga menyebabkan kemampuan aset untuk memulihkan nilai tercatat tidak lagi didukung secara ekonomi

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)

c. Impairment test on oil and gas properties (continued)

In 2025, the Group recorded an impairment of USD99,532,172 on the South Sesulu block due to updated data, a more conservative technical approach, and an increased understanding of subsurface conditions, as reflected in the 2025 LAPI ITB reserves audit. This indicates geological and volumetric uncertainties that have resulted in a significant decrease in reserve estimates and their impact on economic indicators. The NPV calculation becomes negative, resulting in the asset's ability to recover its carrying amount no longer being economically supported.

Kontrak bagi hasil/ *Production sharing contract*	**Estimasi jumlah terpulihkan/ *Estimated recoverable amount***	**Sebelum penurunan nilai/ *Before impairment***	**Kerugian penurunan nilai/ *Impairment loss***	**Penurunan nilai pada properti minyak dan gas/ *Impairment loss on oil and gas properties***
Sesulu Selatan/ *South Sesulu*	(1.951.900)	99.532.172	99.532.172	99.532.172

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
PEP	66.348.694	40.419.874	*PEP*
PLN	23.391.146	-	*PLN*
Pertamina	15.660.168	39.400.882	*Pertamina*
PHE	15.053.794	20.545.607	*PHE*
PT Pertamina Training & Consulting	4.759.891	4.112.703	*PT Pertamina Training & Consulting*
PT Pertamina International Shipping	4.257.229	3.164.384	*PT Pertamina International Shipping*
PT Elnusa Tbk.	3.142.497	8.155.571	*PT Elnusa Tbk.*
PT Pertamina Trans Kontinental	3.125.282	7.019.452	*PT Pertamina Trans Kontinental*
Transgasindo	3.077.211	2.779.058	*Transgasindo*
PT Pertamina Bina Medika IHC	2.267.364	2.159.685	*PT Pertamina Bina Medika IHC*
PT Patra Drilling Contractor	1.617.265	1.339.246	*PT Patra Drilling Contractor*
PT Pertamina Patra Niaga	1.337.432	736.734	*PT Pertamina Patra Niaga*
KPI	129.515	7.707.752	*KPI*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	-	2.882.636	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	2.966.206	5.982.016	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	147.133.694	146.405.600	*Subtotal*
Pihak ketiga	134.447.565	90.991.888	***Third parties***
Total utang usaha	**281.581.259**	**237.397.488**	***Total trade payables***

Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga yang nilainya memerlukan penyajian terpisah. Semua utang usaha berstatus lancar. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

There are no payables to third parties which meet the threshold for separate disclosure. All trade payables are current. Due to their short-term nature, their fair value is equal to their carrying amount.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jaminan gas	36.069.262	35.023.790	*Gas guarantee deposits*
Utang KSO Pipa Rokan	21.100.616	24.112.188	*Rokan Pipe joint operation payable*
Utang *cash call*	8.245.301	8.733.693	*Cash calls payable*
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	29.695.261	30.328.527	*Liabilities to contractors and suppliers*
Lain-lain	157.114	152.002	*Others*
Subtotal pihak ketiga	95.267.554	98.350.200	*Subtotal third parties*
Total utang lain-lain	**95.267.554**	**98.350.200**	***Total other payables***

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *17. OTHER PAYABLES (continued)*

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok sebagian besar merupakan liabilitas sehubungan dengan pembangunan proyek-proyek oleh Divisi *Project Management Office* ("PMO") Perusahaan beserta liabilitas kepada kontraktor terkait aktivitas hulu minyak dan gas.

Liabilities to contractors and suppliers primarily represent liabilities related to the construction of projects by the Company's Project Management Office ("PMO") and liabilities to contractors related to upstream oil and gas activities.

Utang *cash call* merupakan utang kepada operator yang berkaitan dengan kegiatan operasional di blok Muara Bakau, Fasken, Ketapang dan Bangkanai.

Cash call payables represent payables to operators related to operational activities in Muara Bakau, Fasken, Ketapang and Bangkanai blocks.

Utang KSO Pipa Rokan merupakan porsi pendapatan Raja atas KSO Pertagas dengan Raja yang akan dibayarkan oleh Pertagas ke Raja.

The Rokan Pipeline KSO Payable represents Raja's portion of the revenues arising from the Pertagas–Raja KSO, which will be paid by Pertagas to Raja

Utang jaminan gas merupakan uang jaminan gas yang diterima oleh Grup dari pelanggan dalam rangka transaksi penjualan gas.

Gas guarantee deposits payable represents gas deposits received by the Group from customers in relation to gas sales transactions.

18. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *18. ACCRUED LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	277.685.986	243.139.554	*Liabilities to contractors and suppliers*
Provisi kontrak LNG (Catatan 35p)	72.027.462	72.027.462	*Provision for LNG contract (Note 35p)*
Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu (Catatan 36b)	55.037.555	117.273.420	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas (Note 36b)*
Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas	48.765.006	33.411.820	*Liabilities for oil and gas activities*
Provisi sengketa pajak	4.638.669	4.638.669	*Provision for tax dispute*
Liabilitas *Take or Pay* dan Kelebihan Bayar Pelanggan	4.573.424	3.430.988	*Take or Pay Liabilities and Customer's overpayments*
Bunga	3.729.405	5.424.934	*Interest*
Biaya legal dan arbitrase (Catatan 36a)	-	5.266.250	*Legal and arbitration expense (Note 36a)*
Lain-lain	13.087.736	13.002.748	*Others*
Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar	**479.545.243**	**497.615.845**	***Total accrued liabilities***
Bagian jangka pendek	407.517.781	425.588.383	*Current portion*
Bagian jangka panjang	72.027.462	72.027.462	*Non-current portion*

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok merupakan liabilitas dimana tagihan atas liabilitas tersebut belum diterima Grup.

Liabilities to contractors and suppliers represent liabilities for which the related invoices for such amounts have not yet been received by the Group.

Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas merupakan liabilitas yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Liabilities for oil and gas activities represent liabilities relating to oil and gas exploration and production activities.

Biaya bunga yang masih harus dibayar terdiri dari biaya bunga pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan bunga obligasi.

Accrued interest consists of interest on short-term bank borrowings, long-term bank borrowings and bonds.

19. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *19. DEFERRED REVENUE*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Bagian jangka pendek			*Current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* dari pelanggan	19.361.027	30.809.453	*Take or Pay and Ship or Pay from customer*
Bagian jangka panjang			*Non - current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* dari pelanggan	78.469.296	96.645.863	*Take or Pay and Ship or Pay from customer*
Perjanjian KSO	1.303.416	1.455.203	*JO Agreement*
Subtotal	**79.772.712**	**98.101.066**	***Subtotal***
Jumlah	**99.133.739**	**128.910.519**	***Total***

Pendapatan yang ditangguhkan timbul dari transaksi penjualan gas bumi dan transportasi gas bumi oleh Grup dimana PJBG memiliki skema *Take-or-Pay* dan PPG memiliki skema *Ship-or-Pay.*

Deferred revenue arose from natural gas sales transactions by the Group for which the GSPA contain a Take-or-Pay scheme and GTA contain a Ship-or-Pay scheme.

Dalam skema *Take-or-Pay* dan *Ship-or-Pay*, pembeli harus membayar jumlah minimum jika kuantitas gas aktual yang diambil (*Take-or-Pay*) atau dialirkan (*Ship-or-Pay*) kurang dari kuantitas minimum yang telah disepakati.

In a Take-or-Pay and Ship-or-Pay scheme, the buyers have to pay a minimum amount if the actual gas taken (Take-or-Pay) or transported (Ship-or-Pay) is less than the agreed minimum quantities.

Pembeli memiliki hak untuk mengambil (*Take-or-Pay*) atau menyalurkan (*Ship-or-Pay*) gas yang telah dibayar dari periode 6 - 12 bulan dari diakuinya *Take-or-Pay* atau *Ship-or-Pay*.

The buyers are entitled to take (Take-or-Pay) or transport (Ship-or-Pay) gas that has been paid for from period of 6 - 12 months following the recognition of Take-or-Pay or Ship-or-Pay.

Bagian lancar atas pendapatan ditangguhkan adalah estimasi penjualan gas kepada pembeli dalam 12 bulan kedepan.

The current portion of deferred revenue represents the estimated gas sales portion for the next 12 months.

20. PINJAMAN / *20. LOANS*

a. Pinjaman bank jangka pendek / *a. Short-term bank loan*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pihak berelasi			***Related-party loans***
BRI	35.000.000	50.000.000	*BRI*
Pihak ketiga			***Third-party loans***
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Dahulu sebagai PT Bank BTPN Tbk.)	-	50.000.000	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Formerly known as PT Bank BTPN Tbk.)*
Jumlah pinjaman	**35.000.000**	**100.000.000**	***Total loans***

Pada 26 November 2024, SEI melakukan penarikan *Revolving Loan Facility* dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. dan penarikan fasilitas kredit jangka pendek dengan BRI masing-masing sejumlah USD50.000.000 dan USD50.000.000 untuk kebutuhan tambahan modal kerja operasional.

On November 26 2024, SEI made a withdrawal of the Revolving Loan Facility with PT Bank SMBC Indonesia Tbk. and a withdrawal of a short-term credit facility with BRI for additional operational working capital amounting to USD50,000,000 and USD50,000,000, respectively.

Pinjaman PT Bank SMBC Indonesia Tbk mewajibkan Grup memenuhi kovenan tertentu seperti rasio *debt service* minimal 1,3 kali dan rasio *gross debt to equity* maksimal 2,3 kali. Tidak ada jaminan yang diserahkan sehubungan dengan pinjaman bank ini. Pada tanggal 24 November 2025, SEI telah melakukan pelunasan pinjaman senilai USD50.000.000.

The PT Bank SMBC Indonesia Tbk. loan requires the Group to comply with several covenants such as minimum debt service ratio of 1.3 times and maximum ratio gross debt to equity 2.3 times. No collaterals are pledged against this bank loan. On November 24, 2025, SEI made the loan repayment amounting to USD50,000,000.

Pinjaman BRI mewajibkan Grup memenuhi kovenan tertentu seperti rasio *debt service minima*l 1,3 kali dan rasio gross *debt to equity* maksimal 2,3 kali. Tidak ada jaminan yang diserahkan sehubungan dengan pinjaman bank ini. Pada tanggal 14 Mei 2025, SEI telah melakukan pelunasan pinjaman senilai USD50.000.000.

The BRI loan requires the Group to comply with several covenants such as minimum debt service coverage ratio of 1.3 times and maximum ratio gross debt to equity 2.3 times. No collaterals are pledged against this bank loan. On May 14, 2025, SEI made the loan repayment amounting to USD50,000,000.

Pada 25 November 2025, SEI melakukan penarikan fasilitas kredit jangka pendek pada Bank BRI untuk kebutuhan tambahan modal kerja operasional senilai USD35.000.000 dengan tenor 180 hari dan jatuh tempo pada 24 Mei 2026.

On November 25, 2025, SEI made a withdrawal of a short-term credit facility from Bank BRI for additional operational working capital amounting USD35,000,000 with a tenor of 180 days and a maturity date of May 24, 2026.

Rentang tingkat suku bunga pinjaman bank jangka pendek Grup Perusahaan dalam USD adalah 4,5% - 6%.

The range of interest rates on Group's short term bank loans are 4.5% - 6%.

20. PINJAMAN (lanjutan) / *20. LOANS (continued)*

b. Pinjaman bank jangka panjang / *b. Long-term bank loans*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Two-step loans			***Two-step loans***
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	179.040.552	186.622.230	*Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")*
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	2.803.989	8.173.441	*International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")*
Pihak berelasi			***Related-party loans***
Bank Mandiri	131.381.580	145.336.250	*Bank Mandiri*
BRI	131.381.580	145.336.250	*BRI*
Jumlah pinjaman pihak berelasi	262.763.160	290.672.500	*Total related party loans*
Pihak ketiga			***Third-party loans***
PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC")	131.381.580	145.336.250	*PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC")*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	131.381.580	145.336.250	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk.*
Jumlah pinjaman pihak ketiga	262.763.160	290.672.500	*Total third party loans*
Jumlah pinjaman	**707.370.861**	**776.140.671**	***Total loans***
Bagian jangka pendek	148.042.600	72.449.958	*Current portion*
Bagian jangka panjang	559.328.261	703.690.713	*Non-current portion*

Two-step loans merupakan pinjaman jangka panjang yang diorganisir oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diteruskan ke Grup.

Two-step loans represent long-term loans organized by the Government of the Republic of Indonesia and passed through to the Group.

20. PINJAMAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan) / *Long-term bank loans (continued)*

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Penarikan Fasilitas/ *Disbursement Facility (*mata uang asal/*original currency)*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Pembatasan pinjaman/ *Debt covenants*
JBIC	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	*Principal* I: 45.335.142.633 *Principal* II: 3.203.219.503	28 Mei/ *May* 2003 - 20 Maret/ *March* 2043	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (20 Maret/*March* dan/*and* 20 September)	*Principal* I: 1,30% *Principal* II: 1,1%	Tidak ada/*None*
IBRD	Dolar AS/ *US Dollar*	*Principal* I: 41.709.099 *Principal* II: 20.055.983	3 April/ *April* 2006 - 15 Februari/ *February* 2026	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (15 Februari/*February* dan/*and* 15 Agustus/ *August*)	*Principal* I: 5,48% *Principal* II: Tingkat Bunga IBRD +1% / *IBRD Rate Plus 1%*	*Debt to equity ratio: max 70:30* *Debt to service ratio: min 1.5x*
Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk., OCBC	Dolar AS/ *US Dollar*	*Principal* I: 600.000.000	9 Mei/ *May* 2023 -8 Mei/ *May 2028*	Triwulanan/ *Quarterly*	Principal I: *Term SOFR + 1,35%*	*Gross Debt to Equity*: *max* 2,3x *Debt to service ratio min 1.3x*

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003) / *JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003)*

Pada tanggal 27 Maret 2003, JBIC menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan JPY49.088.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

On March 27, 2003, JBIC agreed to provide a loan to the Government for a total aggregate amount equivalent to JPY49,088,000,000 to assist the Government in financing the development of a gas transmission pipeline from South Sumatera to West Java and a distribution pipeline in West Java. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

Pada tanggal 28 Mei 2003, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1156/DP3/2003, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari JBIC ini dengan jumlah tidak melebihi JPY49.088.000.000 kepada Perusahaan.

On May 28, 2003, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1156/DP3/2003, which provides for the Government's relending of the JBIC loan proceeds not exceeding JPY49,088,000,000 to the Company.

20. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank panjang (lanjutan)

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003) (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar JPY1.591.118.000 (setara dengan USD10.763.913) (2024: JPY1.591.118.000, setara dengan USD11.026.448).

2. IBRD (Perjanjian No. SLA-1201/DP3/2006)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 7 Februari 2006, IBRD menyetujui memberikan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan USD80.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai Proyek Pengembangan Pasar Gas Domestik.

Pada tanggal 3 April 2006, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan hasil pinjaman dari IBRD sebesar USD80.000.000 kepada Perusahaan yang akan melaksanakan Proyek. Pada bulan Desember 2011, jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi USD69.381.312. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar USD5.369.453 (2024: USD5.148.960).

20. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

1. JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003) (continued)

During the year ended December 31, 2025, the Company has already paid installments amounted to JPY1,591,118,000 (equivalent to USD10,763,913) (2024: JPY1,591,118,000, equivalent to USD11,026,448).

2. IBRD (Agreement No. SLA-1201/DP3/2006)

Based on the loan agreement dated February 7, 2006, IBRD agreed to provide a lending facility to the Government in an aggregate amount equivalent to USD80,000,000 to assist the Government in financing the Domestic Gas Market Development Project.

On April 3, 2006, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement, which provides for the Government's relending of the IBRD loan proceeds of USD80,000,000 to the Company, which shall undertake the Project. In December 2011, the total facilities were amended to USD69,381,312. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

As of 31 December 2025, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

During the year ended December 31, 2025, the Company has already paid installments amounted to USD5,369,453 (2024: USD5,148,960).

20. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

3. *Club Deal* (Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk., dan OCBC)

Pada tanggal 9 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *club deal* berjangka dengan Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. dan OCBC dengan total fasilitas pinjaman sebesar USD800.000.000 yang terdiri atas fasilitas A sebesar USD600.000.000 dan fasilitas B sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini untuk pendanaan *Liability Management*. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman fasilitas A senilai USD300.000.000.

Pada 28 Desember 2023 Perusahaan telah melakukan amendemen pertama dengan memperpanjang periode ketersediaan dari sebelumnya 180 hari setelah tanda tangan perjanjian menjadi sampai dengan 30 Juni 2024.

Pada tanggal 8 Mei 2024, PGN melakukan penarikan kedua fasilitas A dari pinjaman fasilitas senilai USD300.000.000 untuk pembayaran kembali utang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar USD57.000.000 (2024: USD15.000.000).

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diharuskan dalam perjanjian ini.

20. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

3. *Club Deal (Bank Mandiri, BRI,* PT Bank SMBC Indonesia Tbk.*, dan OCBC)*

On May 9, 2023, the Company entered into a club deal facility loan agreement with Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. *and OCBC in which the total loan facility amounted to USD800,000,000 which consist of facility A amounted USD600,000,000 and facility B amounted USD200,000,000. This loan will be used for financing of Liability Management. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.*

On May 30, 2023, the Company has withdrawn facility A of the credit facility in amount of USD300,000,000.

On December 28, 2023, Perusahaan has made the first amendment by extending the availability period from 180 days after signing the agreement to June 30, 2024.

On May 8, 2024, PGN made a second withdrawal of the facility A of credit facility in amount of USD300,000,000 for debt repayment.

During the year ended December 31, 2025, the Company has already paid installments amounting to USD57,000,000 (2024: USD15,000,000).

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants, no substantial change in the general business.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

20. PINJAMAN (lanjutan) / *20. LOANS (continued)*

c. Fasilitas yang belum digunakan / *c. Unused facilities*

Berikut ini adalah fasilitas yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2025:

Below are unused facilities as of December 31, 2025:

Bank	Jenis fasilitas/*Types of facilities*	Akhir periode/ *End of period*	Pembatasan/ *Covenants*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Sisa fasilitas/ *Remaining facilities*
Pihak berelasi/ *Related parties*:					
Bank Mandiri	*Standby Letter of Credit* ("SBLC"), Bank Garansi ("BG"), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), dan *Letter of Credit* ("L/C")/ *Standby Letter of Credit ("SBLC"), Bank Guarantee ("BG"), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") and Letter of Credit ("L/C")*	15 Agustus/ *August* 2026	*Debt service ratio > 1,3x Leverage ratio: 300%*	150.000.000	112.003.102
BNI	SBLC, BG, SKBDN, dan/*and* L/C	20 Maret/ *March* 2026	*Current ratio: min 1,0x Debt to equity ratio: min 3,0x EBITDA to interest: 200%*	140.000.000	85.882.394
BRI	SBLC, BG, SCF, KJP, Forex Line	5 April/ *April* 2026	*Gross Debt to Equity* maks 2.3x *Debt service ratio min 1.3x*	350.000.000	137.113.313
Bank Mandiri	SBLC	6 Februari/ *February 2026*	*Net Debt to Tangible* maks 2x *EBITDA to Interest Expense min 300%*	10.000.000	5.182.394
BNI	L/C, SKBDN, SBLC, BG	11 Oktober/ *October 2026*	*Net Debt to Tangible maks 2x EBITDA to Interest Expense min 300 %*	50.000.000	49.769.008
Pihak ketiga/ *Third party*:					
Bank ANZ Indonesia	SBLC dan/*and* BG atau/*or revolving credit facility*	30 November/ *November* 2026	Tidak ada/*None*	40.000.000	40.000.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	*Revolving uncommitted credit facility atau/or SBLC* dan/*and BG*	*31* Juli/ *July* 2026	*Debt service ratio: 1,3x Debt to equity ratio: max 233%*	80.000.000	80.000.000
Maybank Indonesia	SBLC, BG, *Line/Counter Guarantee ("CG")/ Demand Guarantee*	22 Januari/ *January 2026*	Tidak Ada/*None*	100.000.000	62.383.600
Bank Mizuho Indonesia	SBLC, BG, L/C, *Account Payable Financing*	18 Juli/ *July 2026*	Tidak Ada/*None*	100.000.000	25.832.998
MUFG Bank	SBLC, BG, L/C, *Revolving Loan*	14 November/ *November 2025 Dalam proses perpanjangan/ In renewal process*	Tidak Ada/*None*	100.000.000	100.000.000
Standard Chartered Bank	SBLC, BG, L/C, *Bond Guarantee*	27 Mei/ *May* 2026	Tidak Ada/*None*	50.000.000	50.000.000

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak / *a. Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pajak penghasilan pasal 22	529.305	7	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	729.481	500.497	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 24	-	427.701	*Income tax article 24*
Pajak penghasilan pasal 25	342.472	467.255	*Income tax article 25*
Pajak penghasilan pasal 28a	28.415.968	22.203.246	*Income tax article 28*
Pajak pertambahan nilai	33.000.475	41.406.763	*Value added tax*
Total	**63.017.701**	**65.005.469**	***Total***

Bagian lancar dan tidak lancar pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak adalah sebagai berikut: / *Current and non-current portion of prepaid taxes and estimated claims for tax refund are as following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Bagian lancar	41.533.847	34.173.305	*Current portion*
Bagian tidak lancar	21.483.854	30.832.164	*Non-current portion*
Total	**63.017.701**	**65.005.469**	***Total***

Lihat Catatan 21f untuk pembahasan mengenai taksiran tagihan pajak. / *See Note 21f for discussion of claims for tax refund.*

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Pajak penghasilan pasal 4(2)	945.778	1.306.289	*Income tax article 4(2)*
Pajak penghasilan pasal 21	2.428.573	4.601.605	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 22	543.245	17.447	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	1.788.667	1.543.974	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 25 dan 29	24.282.204	23.137.351	*Income tax article 25 and 29*
Pajak penghasilan pasal 26	1.363	529	*Income tax article 26*
Pajak pertambahan nilai	8.760.332	10.938.540	*Value added tax*
Pajak *first tranche petroleum (FTP)*	7.214.347	5.547.456	*First tranche petroleum (FTP)*
Lainnya	53.843	2.601	*Others*
Total	**46.018.352**	**47.095.792**	**Total**
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(38.804.005)	(41.548.336)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	7.214.347	5.547.456	*Non-current - portion*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	
Kini			*Current*
Perusahaan	8.368.564	41.191.627	*The Company*
Entitas anak	92.659.848	67.788.766	*Subsidiaries*
Subtotal	101.028.412	108.980.393	*Subtotal*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	18.548.978	(186.023)	*The Company*
Entitas anak	20.768.868	27.631.227	*Subsidiaries*
Subtotal	39.317.846	27.445.204	*Subtotal*
Penyesuaian atas tahun sebelumnya	1.259.570	2.227.011	*Adjustment in respond of the previous years*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**141.605.828**	**138.652.608**	***Consolidated Income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak atas laba sebelum pajak Grup berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian dalam jumlah sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	488.206.007	578.289.878	*Consolidated profit before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	126.749.310	111.155.749	*Tax calculated at applicable tax rate*
Dampak pajak penghasilan dari:			*Income tax effect from:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	43.299.036	41.792.995	*Non-deductible expenses*
Penghasilan tidak kena pajak dan dikenai pajak final	(12.433.179)	(20.785.648)	*Income subject to final tax*
Bagian laba dari ventura Bersama	(18.867.170)	(33.008.697)	*Share of profit from joint ventures*
Penyesuaian pajak penghasilan yang kurang pada tahun sebelumnya	1.259.570	2.227.011	*Underprovision of income tax in prior years*
Penyesuaian pada aset pajak tangguhan yang tidak diakui	1.598.261	37.271.198	*Changes in unrecognized deferred tax assets*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**141.605.828**	**138.652.608**	***Consolidated income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / *c. Income tax expense (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak, seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax, as shown in consolidated profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	488.206.007	578.289.878	*Consolidated profit before income tax*
Ditambahkan/(dikurangi):			*Added/(deducted) by:*
Laba sebelum pajak entitas anak	(287.657.797)	(295.452.957)	*Profit before tax of subsidiaries*
Penyesuaian konsolidasian	43.219.112	(84.227.936)	*Consolidation adjustments*
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	243.767.322	198.608.985	*Profit before income tax expense - the Company*
Beda temporer:			***Temporary differences:***
Penyisihan (pembayaran) bonus dan insentif	14.788.002	12.591.100	*Allowance (payment) of bonus and incentives*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	3.936.737	(2.364.695)	*Post-employment benefits and other long-term benefits*
Provisi atas penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu	(61.404.333)	33.590.868	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas*
Beban penyusutan	(46.460.996)	(46.380.402)	*Depreciation expense*
Piutang yang tidak dapat ditagih	(8.411.897)	-	*Uncollectible receivable*
Penyisihan piutang	(1.693.367)	(278.126)	*Receivable impairment*
Provisi atas kontrak LNG	-	3.486.935	*Provision for LNG contract*
Aset hak guna dan liabiltas sewa	(73.708)	55.264	*Right of use assets and lease liability*
Penurunan nilai piutang Pokok SHL	-	161.598.808	*Impairment of SHL receivables*
Sub-total	(99.319.562)	162.299.752	*Sub-total*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Beban yang tidak dapat dikurangkan	16.509.716	20.497.447	*Non-deductible expenses*
Beban pajak dan sanksi	1.901.352	627.382	*Tax and penalty expense*
Bagian laba anak perusahaan dan ventura bersama	(99.283.257)	(148.906.360)	*Share of profit from subsidiaries and joint ventures*
Penghasilan yang dikenakan pajak final - neto	(19.530.496)	(16.329.168)	*Income subject to final tax - net*
Sub-total	(100.402.685)	(144.110.699)	*Sub-total*
Estimasi laba kena pajak	44.045.075	216.798.038	*Estimated taxable income*
Beban pajak kini – Perusahaan Tahun berjalan	**8.368.564**	**41.191.627**	***Current tax expense – the company Current year***
Dikurangi pembayaran pajak dimuka - Perusahaan			*Less prepaid taxes - Company*
Pasal 22	(4.320.277)	(6.221.527)	*Article 22*
Pasal 23	(2.825.678)	(3.806.386)	*Article 23*
Pasal 25	(8.896.413)	(23.619.753)	*Article 25*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	(7.673.804)	7.543.961	*Underpayment of corporate income tax - the Company*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Entitas anak	17.010.634	4.233.341	*Underpayment of corporate income tax - Subsidiaries*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Konsolidasian	**9.336.830**	**11.777.302**	*Underrpayment of corporate income tax - Consolidated*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU 7/2021), Pemerintah Indonesia menyesuaikan tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan seterusnya (tidak berlaku untuk Perusahaan dan SEI).

Berdasarkan UU tersebut, Perusahaan dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 19% untuk tahun pajak 2024 dan 2025. Tarif pajak ini berlaku untuk Perusahaan karena Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i) Lebih dari 40% modal disetor Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh publik; dan
ii) Modal saham tersebut dimiliki lebih dari 300 individual, masing-masing memiliki kurang dari 5% saham;
iii) Seluruh persyaratan diatas sudah terpenuhi sejak awal tahun (lebih dari 183 hari).

Pada tanggal 6 Januari 2026 dan 2025 Perusahaan telah menerima surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria di atas untuk tahun pajak 2025 dan 2024.

Entitas anak yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 44% sampai 48% dan di luar Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 35%.

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2025 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2025.

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan undang-undang perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia (Catatan 2v). Grup berada dalam lingkup PMK 136/2024, yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian 2024 dan 2025.

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Based on Law No. 7/2021 regarding Harmonisation of Tax Regulations (Law 7/2021), the Government of Indonesia adjusted the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and onward (except for the Company and SEI).

Based on the above Law, the Company is entitled to a corporate income tax rate of 19% for the fiscal year 2024 and 2025. This tax rate is applicable to the Company after the Company fulfills the following requirements:

i) More than 40% of the Company's paid-up shares listed for trading on the Indonesian Stock Exchange are held by the public; and
ii) Those shares are owned by more than 300 individuals, each holding less than 5% of the paid-in shares;
iii) All criteria above shall have been fulfilled since the beginning of year (more than 183 days).

On January 6th, 2026 and January 6th, 2025 the Company obtained the notification letter from the Securities Administration Agency regarding the fulfillment of such criterias for fiscal years 2025 and 2024.

The subsidiaries involved in oil and gas exploration and production in Indonesia are subject to income tax at rates of 44% to 48% and outside Indonesia are subject to income tax at a rate of 35%.

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2025 to the Tax Office based on information reported in the 2025 consolidated financial statements.

Various countries have enacted or intend to enact tax legislation to comply with Pillar Two model rules, including Indonesia (Note 2v). The Group is within the scope of PMK 136/2024, which did not impact 2024 and 2025 consolidated financial statements.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Grup telah menerapkan amendemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait aturan Pilar Dua sehingga tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Aturan Pajak Minimum Global (*Global Anti-base Erosion Rule* atau model "Pilar 2") telah diadopsi di Indonesia pada akhir tahun 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berdasarkan aturan tersebut, Grup masuk dalam lingkup dan wajib menerapkan ketentuan Pilar 2. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 136/2024 mengenai Pilar 2 telah disahkan dan secara substantif berlaku di Indonesia dan peraturan serupa juga sudah diberlakukan di beberapa yurisdiksi lain tempat Grup beroperasi, dan telah berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025.

Grup telah melakukan evaluasi atas potensi eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar 2 sesuai Laporan per negara (*Country by Country Report or "CbCR")* dan informasi keuangan tahun 2025 untuk entitas-entitas konstituen dalam Grup dan menetapkan bahwa tarif pajak efektif yang disederhanakan Grup adalah di atas 16% sehingga dapat menerapkan ketentuan Safe Harbour dan tidak perlu membayar pajak tambahan Pilar 2.

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

For the year ended December 31, 2025, the Group has applied amendment to PSAK 212: Income Taxes, which provides mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two rules such that there is no impact to the consolidated financial statements.

*The Global Anti-base Erosion Rule ("Pillar 2" model) were adopted in Indonesia at the end of 2024 and are applicable starting from January 1, 2025. According to these rules, the Group is within the scope and shall apply Pillar 2 rules. PMK (*Peraturan Menteri Keuangan *or the Ministry of Finance Rule) No. 136/2024 related to Pillar 2 legislation has been enacted in Indonesia and similar laws also have been enacted in several other jurisdictions in which the Group operates effective for the financial year beginning January 1, 2025.*

The Group has assessed of its potential exposure to Pillar Two income taxes based on the 2025 CbCR and financial information for the constituent entities within the Group and determined the Group's simplified effective tax rates is above 16% and therefore can apply Safe Harbour does not have to pay top up Pillar 2 income tax.

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan / *d. Deferred tax*

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

The tax effects of significant temporary differences between commercial and tax reporting are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2025*	Penyesuaian lain-lain/ *Other adjustment*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	*Dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2025*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	24.873.868	-	747.980	2.058.055	27.679.903	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	11.378.992	-	2.809.720	-	14.188.712	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.392.427	1.598.261	(1.988.048)	-	6.002.640	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(39.889)	-	(14.005)	-	(53.894)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 91/255 dan 135	21.237.778	-	(11.666.823)	-	9.570.955	*Provision for implementation of Kepmen 91/255 and 135*
Aset tetap	(39.734.980)	-	(8.827.589)	-	(48.562.569)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persedian	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak merugi	13.685.218	-	-	-	13.685.218	*Provision of onerous contract*
Penurunan nilai piutang pokok SHL KJG	30.703.774	-	-	-	30.703.774	*Impairment of SHL Receivables KJG*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(37.625.332)	-	389.787	-	(37.235.545)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**30.962.496**	**1.598.261**	**(18.548.978)**	**2.058.055**	**16.069.834**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	31.874.152	-	(1.883.218)	-	29.990.934	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	24.394.555	-	(668.349)	-	23.726.206	*Allowance for impairment losses*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	5.665.042	-	(4.582.199)	-	1.082.843	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Pencadangan piutang	9.160.010	-	1.184.439	-	10.344.449	*Allowance receivables*
Cadangan persediaan	25.162	-	578.431	-	603.593	*Allowance for inventory*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	2.097.249	-	633.155	-	2.730.404	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	601.169	-	120.661	-	721.830	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	7.022.247	-	656.270	-	7.678.517	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	9.215.495	-	(1.849.653)	-	7.365.842	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(9.819.780)	-	(152.311)	-	(9.972.091)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(15.901.050)	-	(4.308.114)	-	(20.209.164)	*Oil and gas properties*
Lain-lain	551.344	-	(385.184)	-	166.160	*Others*
Aset pajak tangguhan	**64.885.595**	**-**	**(10.656.072)**	**-**	**54.229.523**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	221.158	-	9.801	-	230.959	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(9.074.144)	-	(60.729)	-	(9.134.873)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	414.079	-	(4.683)	-	409.396	*Allowance for inventory obsolescence*
Cadangan kerugian penurunan piutang	(80.100)	-	(133.616)	-	(213.716)	*Allowance for receivable impairment*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.000.435	-	964.435	(532.988)	1.431.882	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	(11.270.049)	-	(7.362.819)	-	(18.632.868)	*Asset abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	445.180	-	2.896.547	-	3.341.727	*Tax loss carry forward*
Implementasi PSAK 116	5.811.538	-	(206.488)	-	5.605.050	*Implementaion of PSAK 116*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(100.989)	-	(14.076)	-	(115.065)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(110.640.147)	-	(8.115.192)	-	(118.755.339)	*Oil and gas properties*
Lain - lain	208.201	-	5.948	-	214.149	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(123.064.838)**	**-**	**(12.020.872)**	**(532.988)**	**(135.618.698)**	***Deferred tax liabilities***
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian		**1.598.261**	**(41.225.922)**	**1.525.067**		***Consolidated deferred tax income (expense)***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**95.848.091**				**70.299.357**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(123.064.838)**				**(135.618.698)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	1 Januari/ *January 1, 2024*	Penyesuaian lain-lain/ *Other adjustment*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/*Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2024*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	21.579.089	-	(449.292)	3.744.071	24.873.868	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	8.986.683	-	2.392.309	-	11.378.992	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.445.271	-	(52.844)	-	6.392.427	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(50.389)	-	10.500	-	(39.889)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 91/255 dan 135	14.855.513	-	6.382.265	-	21.237.778	*Provision for implementation of Kepmen 91/255 and 135*
Aset tetap	(30.922.704)	-	(8.812.276)	-	(39.734.980)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persedian	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak merugi	13.022.700	-	662.518	-	13.685.218	*Provision of onerous contract*
Penurunan nilai piutang pokok SHL KJG	-	-	30.703.774	-	30.703.774	*Impairment of SHL Receivables KJG*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(6.974.402)	-	(30.650.930)	-	(37.625.332)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**27.032.401**	**-**	**186.024**	**3.744.071**	**30.962.496**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	47.352.975	-	15.478.823	-	31.874.152	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	24.032.176	-	362.379	-	24.394.555	*Allowance for impairment losses*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	732.229	-	4.932.813	-	5.665.042	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Pencadangan piutang	11.614.231	-	(2.453.260)	(961)	9.160.010	*Allowance receivables*
Cadangan persediaan	-	-	37.296	(12.134)	25.162	*Allowance for inventory*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	4.831.062	-	(2.455.172)	(278.641)	2.097.249	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	1.029.877	-	(421.644)	(7.064)	601.169	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	3.163.109	-	3.859.138	-	7.022.247	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	27.198.316	-	(17.982.821)	-	9.215.495	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(30.774.245)	-	20.954.465	-	(9.819.780)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(6.729.982)	-	(9.171.068)	-	(15.901.050)	*Oil and gas properties*
Lain-lain	1.919.153	-	(1.367.809)	-	551.344	*Others*
Aset pajak tangguhan	**84.368.901**	**-**	**(19.184.506)**	**(298.800)**	**64.885.595**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	131.294	-	89.864	-	221.158	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(7.972.526)	-	(1.101.618)	-	(9.074.144)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	114.111	-	299.968	-	414.079	*Allowance for inventory obsolescence*
Cadangan kerugian penurunan piutang	(68.800)	-	(11.300)	-	(80.100)	*Allowance for receivable impairment*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.465.715	-	1.701.998	(2.167.278)	1.000.435	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	(4.344.993)	-	(6.925.056)	-	(11.270.049)	*Asset abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	40.613.186	-	(40.168.006)	-	445.180	*Tax loss carry forward*
Implementasi PSAK 116	4.131.799	-	1.679.739	-	5.811.538	*Implementaion of PSAK 116*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	588.317	-	(642.552)	(46.754)	(100.989)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(150.288.397)	3.989.927	35.658.323	-	(110.640.147)	*Oil and gas properties*
Lain - lain	(763.717)	-	971.918	-	208.201	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(116.394.012)**	**3.989.927**	**(8.446.722)**	**(2.214.032)**	**(123.064.838)**	***Deferred tax liabilities***
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian		**3.989.927**	**(27.445.204)**	**1.231.239**		***Consolidated deferred tax income (expense)***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**111.401.302**				**95.848.091**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(116.394.012)**				**(123.064.838)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo liabilitas pajak tangguhan Blok Pangkah sebesar USD99.915.891. Berdasarkan proyeksi arus kas manajemen, sebagian besar porsi liabilitas pajak tangguhan akan terealisasi sebelum skema gross split berlaku efektif di tahun 2026 yang mengubah tarif pajak dari 44% menjadi 40%. Terdapat sisa porsi liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan properti minyak dan gas yang kemungkinan akan terealisasi setelah tahun 2026. Manajemen tidak melakukan penyesuaian saldo pajak tangguhan (akibat perubahan tarif pajak) dengan pertimbangan adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang.

e. Rugi pajak

Entitas anak Grup memiliki rugi pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak masa depan. Perusahaan tidak memiliki rugi pajak.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. SEI memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Beberapa entitas anak SEI belum mencapai posisi ETS sehingga masih mengakumulasikan kerugian fiskal.

21. TAXATION (continued)

d. Deferred tax (continued)

As of December 31, 2025, the balance of the Pangkah Block's deferred tax liabilities amounted to USD99,915,891. Based on management's cash flow projections, most of the deferred tax liability will be realized before the gross split scheme becomes effective in 2026 which changes the tax rate from 44% to 40%. Some portion of the deferred tax liabilities related to oil and gas properties will likely to be realized after 2026. Management did not adjust the deferred tax balance (from changes in tax rates) with consideration of uncertainty element in the future.

e. Tax losses

Subsidiaries of the Group had tax losses that can be used as deductions from future taxable income. The Company has no tax losses.

The tax losses can be utilised against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the tax loss was incurred. SEI believes that it is not probable that future taxable profit will be available to utilise accumulated tax losses before their expiry. SEI's subsidiaries have not reached the ETS position and are therefore still accumulating tax losses.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP")

Grup menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dan memiliki sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Perusahaan

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP")

The Group received underpayment tax assessment letters ("SKPKB") from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia - Directorate General of Taxation ("DGT") and has outstanding tax disputes in the Tax Court and the Supreme Court, as follows:

The Company

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat diterima/ *Period letter received*	Jumlah kurang bayar (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment (in million Rupiah)*	Jumlah kurang bayar (dalam Dolar AS)/ *Amount of underpayment (in USD)*	Status/*Status*
PPN atas penjualan gas/ *VAT for gas sales*	2012	SKPKB	Januari/ *January* 2017	3.258.454	197.780.061	1)
PPN atas penjualan gas/ *VAT for gas sales*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	892.062	54.145.993	1)
PPh 26/ *Income tax article 26*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	146	8.857	2)

Keterangan:
1) Per 31 Desember 2025, 18 dari 18 permohonan Peninjauan Kembali ("PK") PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2) Perusahaan memenangkan keputusan banding dan saat ini DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak PK DJP dengan nomor putusan 905.B/PK/PJK/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Remarks:
1) As of December 31, 2025, 18 of 18 PGN Judicial Review ("PK") applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by supreme court.
2) Appeal results in favour of the Company and DGT has submitted judicial review. The supreme court decided to reject DGT's Judicial Review with decision number 905.B/PK/PJK/2025 dated on March 5, 2025.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi

Pada bulan Januari dan Februari 2017, DJP menerbitkan 18 Surat Tagihan Pajak ("STP") sebesar IDR414 miliar karena Perusahaan dinilai belum menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan gas bumi periode 2012-2013.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah memenangkan sengketa pajak PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di Pengadilan Pajak. DJP telah mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung dan Perusahaan telah mengajukan kontra memori terhadap permohonan tersebut.

Pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Pengurangan STP karena Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang menguntungkan Perusahaan, bahwa penjualan gas bumi tidak dikenakan PPN, sehingga nilai Surat Tagihan Pajak nihil.

Pada triwulan keempat 2020, Perusahaan kalah atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (18 perkara dari 24 perkara). Sengketa PPN terkait dengan gas bumi yang dijual seharusnya dikenakan PPN menurut pandangan DJP. Dari total IDR3,25 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR892 miliar (untuk tahun 2013), Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan kalah untuk Perusahaan sebesar IDR2,4 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR666 miliar (untuk tahun 2013). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencatat beban sengketa pajak sebesar IDR4,2 triliun (setara dengan USD278,4 juta) dan USD15,9 juta sebagai kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi dan mencatat provisi sengketa pajak sebesar USD294,3 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada 6 Mei 2021 dan 16 September 2021, Perusahaan menang atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (4 perkara dari 6 perkara yang keputusannya belum keluar di 31 Desember 2020). Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan menang untuk Perusahaan sebesar IDR859 miliar (untuk tahun 2012) dan IDR78 miliar (untuk tahun 2013). Untuk sisa sengketa sejumlah IDR148 miliar (untuk tahun 2013), perkara tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada bulan Maret 2022.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales

In January and February 2017, the DGT issued 18 Tax Collection Letters ("STP") of IDR414 billion because the Company was considered to not have issued Tax Invoices on the sale of natural gas for the period of 2012-2013.

In 2019, the Company obtained favourable decisions of VAT tax disputes for 2012 and 2013 at the Tax Court. The DGT has submitted PK requests to the Supreme Court and the Company has submitted contra memory on the judicial review requests.

In December 2019 and January 2020, the DGT issued 18 Reduction Decisions on STP because the Tax Court issued a favorable decision for the Company, that the sale of natural gas was not subject to VAT, so the value of Tax Collection Letters was nil.

In the fourth quarter of 2020, the Company received unfavourable decisions for its VAT disputes for years 2012 and 2013 at the Supreme Court level (18 cases out of 24 cases). The VAT disputes were related to gas sold which should be subject to VAT according to the DGT's point of view. From the total of IDR3.25 trillion (for year 2012) and IDR892 billion (for year 2013), the Supreme Court has issued its written decisions which were unfavourable for the Company of IDR2.4 trillion (for year 2012) and IDR666 billion (for year 2013). For the year ended December 31, 2020, the Company has recorded tax dispute expenses of IDR4.2 trillion (equivalent to USD278.4 million) and USD15.9 million as loss on foreign exchange in the statement of profit or loss and recorded a provision for tax disputes of USD294.3 million as of December 31, 2020.

On May 6, 2021 and September 16, 2021, the Company received favourable decisions for its VAT disputes for 2012 and 2013 at the Supreme Court level (4 cases out of 6 cases pending decision on December 31, 2020). The Supreme Court has issued its written decisions which were favourable for the Company of IDR859 billion (for year 2012) and IDR78 billion (for year 2013). For the remaining disputed amount of IDR148 billion (for 2013), the cases were decided by the Supreme Court on March 2022.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi (lanjutan)

Pada bulan Mei dan Juni 2022, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Perubahan atas STP karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan bagi Perusahaan dengan nilai total IDR414 miliar (atau setara dengan USD27.599.264), bahwa penjualan gas bumi dikenakan PPN. Surat Perubahan DJP telah melewati batas waktu pemungutan pajak. Selain itu, Perusahaan juga telah mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan MA pada tanggal 21 April 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR937 miliar (setara dengan USD65,1 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR148 miliar (setara dengan USD10,3 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas 18 kasus untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar IDR3 triliun atas keputusan MA yang mengabulkan permohonan PK dari DJP. Selain itu DJP mengajukan PK kedua atas 6 putusan sebesar IDR1 triliun, dimana putusan MA menolak permohonan PK DJP.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan telah mencatat provisi atas 18 STP yang diterbitkan oleh DJP sebesar USD27.599.264 dan telah melakukan pembayaran pada bulan Agustus dan September 2023

Per 31 Desember 2023, 15 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan N.O. Perusahaan telah membayar senilai USD27.599.264 atas seluruh STP PPN tahun 2012 dan 2013 pada tanggal 25 Agustus, 7 September, dan 27 September 2023 dan telah membebankannya ke laba rugi konsolidasian.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales (continued)

In May and June 2022, DGT issued 18 Amendment Letter of Reduction Decisions on STP because the Supreme Court issued an unfavorable decision for the Company amounted to IDR414 billion (or equivalent to USD27,599,264), that the sale of natural gas was subject to VAT. The DGT's Amendment Letter is over the due of the tax collection period. Besides that, the Company has also filed further legal action against the Supreme Court Decision on April 21, 2022.

For the year ended December 31, 2021, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR937 billion (equivalent to USD65.1 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR148 billion (equivalent to USD10.3 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has submitted a PK to the Supreme Court for 18 cases for 2012 and 2013 in the amount of IDR3 trillion based on the Supreme Court decision which granted the PK request from the DGT. In addition, DGT submitted a second PK of 6 decisions in the amount of IDR1 trillion, where the Supreme Court's decision rejected the DGT's PK application.

As of June 30, 2023, the Company has recorded provision amounted to USD27,599,264 related to 18 STPs issued by DGT and fully paid in August and September 2023.

As of December 31, 2023, 15 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. by Supreme Court. The Company has paid amounted USD27,599,264 for all VAT STP for 2012 and 2013 on August 25, September 7, and September 27, 2023 and expensed to consolidated profit or loss.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, 17 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Per 31 Desember 2025, 18 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PPh Badan Tahun 2013

Pada 31 Desember 2025, Perusahaan telah mencatat provisi denda pajak atas putusan Banding sengketa PPh Badan tahun 2013 sebesar USD 4,973,017. Sampai tanggal pelaporan, STP belum diterbitkan oleh DJP.

SEI

SEI dan anak perusahaannya menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales (continued)

As of December 31, 2024, 17 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by Supreme Court.

As of December 31, 2025, 18 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by Supreme Court.

Corporate Income Tax 2013

As of December 31, 2025, the Company has recorded provision amounting to USD4,973,017 related to tax fines for Court's decision of 2013 income tax appeal case in favour of DGT. As of reporting date, STP has not yet issued by DGT.

SEI

SEI and its subsidiaries received several SKPKBs as follows:

Perusahaan/ *Company*	Beban pajak Terkait/ *related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat Diterima/ *period letter received*	Jumlah yang disengketakan termasuk sanksi (dalam dolar AS)/ *Disputed amount including penalty (in USD)*	Status/*Status*
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2013	Putusan Banding/*Tax Court Decision*	29 Apr/*Apr* 2024	3.316.397[1)]	[2)]
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2015	Putusan Banding/*Tax Court Decision*	29 Apr/*Apr* 2024	1.689.746	[2)]
SESSL	PPh Pasal 26 (4)/ *Income tax Article 26 (4)*	2015	Putusan Pengadilan Pajak/ *Tax Court Decision*	17 Mar/*Mar* 2021	4.331.929	Banding diterima, sedang dalam proses PK / *Appeal granted, currently in judicial review process* [3)]
SEBB	PPh Pasal 4 (2)/ *Income tax Article 4 (2)*	2018	KEP	21 Feb/*Feb 2022*	309[1)]	Gugatan/*Lawsuit*
SKP	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	14 Apr/*Apr 2025*	106.780	Keberatan/*Objection*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Perusahaan/ *Company*	Beban pajak Terkait/ *related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat Diterima/ *period letter received*	Jumlah yang disengketakan termasuk sanksi (dalam dolar AS)/ *Disputed amount including penalty (in USD)*	Status/*Status*
SIPL	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	791.849	3)
SIPL	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	15 Des/*Dec* 2025	1.329.504	3)
SIPBV	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	11 Des/*Dec* 2025	304.556	3)
SIPBV	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	11 Des/*Dec* 2025	511.411	3)
SPLLC	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	11 Des/*Dec* 2025	121.821	3)
SPLLC	Pajak penghasilan badan/*Corporate income tax*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	11 Des/*Dec* 2025	204.576	3)
SIPL	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	489.005[1)]	3)
SIPL	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	854.148[1)]	3)
SIPBV	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	188.079[1)]	3)
SIPBV	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	328.518[1)]	3)
SPLLC	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2021	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	75.232[1)]	3)
SPLLC	PPh Pasal 26/*Income tax Article 26*	2022	SKPKB/*Tax Underpayment Assessment Letter*	12 Des/*Dec* 2025	131.407[1)]	3)

Keterangan:
1) Mata uang asli dalam Rupiah
2) Kalah di Mahkamah Agung.
3) Keberatan akan diajukan pada Maret 2026.

Remarks:
1) Original currency in Rupiah
2) Unfavourable result at the Supreme Court9
3) Objection will be submitted in March 2026.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

Pajak penghasilan badan

SEI

Pada bulan Desember 2018, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sebesar IDR54.638.102.020 (setara dengan USD3.316.397) SEI telah mengajukan banding pada bulan Agustus 2020.

Pada bulan Agustus 2019, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 sebesar USD1.689.746. SEI telah mengajukan banding pada bulan Desember 2020.

Pada April 2024, SEI menerima putusan kalah Banding dari Pengadilan Pajak atas SKPKB PPh Badan tahun 2013 dan 2015 tersebut. Pada Juli 2024 SEI telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Makamah Agung. SEI tidak mencatat provisi untuk sengketa pajak ini.

Pada Juli 2025, SEI menerima putusan kalah Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung atas SKPKB PPh Badan tahun 2013 dan 2015 tersebut dengan Putusan Nomor 1436/B/PK/Pjk/2025 tanggal 2 Mei 2025 dan Putusan Nomor 1441/B/PK/Pjk/2025 tanggal 2 Mei 2025. SEI membalik taksiran pajak yang telah dicatat atas kedua sengketa tersebut sebesar USD5.500.200 dan mencatat sebagai Beban Pajak pada Laba Rugi tahun 2025.

SKP

Pada bulan April 2025, SEI melalui entitas anak SKP menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 sebesar USD106.780 dan mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI telah mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli 2025. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Direktorat Jenderal Pajak belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Corporate income tax

SEI

In December 2018, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax of 2013 amounting to IDR54,638,102,020 (equivalent to USD3,316,397). SEI has submitted an appeal in August 2020.

In August 2019, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax year 2015 amounting to USD1,689,746. SEI has submitted an appeal in December 2020.

In April 2024, SEI received unfavorable tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2013 and 2015. In July 2024, SEI submitted Judicial Review to Supreme Court. SEI has not recorded any provision for these tax disputes.

On July 2025, SEI received unfavorable Supreme Court Decision on judicial review for SKPKB income tax 2013 and 2015 with decision number 1436/B/PK/Pjk/2025 dated 2 Mei 2025 and decision number 1441/B/PK/Pjk/2025 dated 2 May 2025. SEI reversed claim for tax refund amounted USD5.500.200 and charged as tax expense in 2025 statement of profit or loss.

SKP

In April 2025, SEI on entity SKP received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax of 2021 amounting to USD106,780 and recorded such amount as claim for tax refund. SEI has submitted an objection to Directorate General of Tax in July 2025. As of the completion date of the financial statements, the Tax Court has not yet issued decisions on the appeal.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

Pajak penghasilan badan

SIPL

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SIPL menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan atas tahun pajak 2021 dan 2022 dengan nilai masing-masing sebesar USD791.849 dan USD1.329.504 dan mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

SIPBV

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SIPBV menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan atas tahun pajak 2021 dan 2022 dengan nilai masing-masing sebesar USD304.556 dan USD511.411 dan mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

SPLLC

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SPLLC menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan atas tahun pajak 2021 dan 2022 dengan nilai masing-masing sebesar USD121.821 dan USD204.576 dan mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Corporate income tax

SIPL

In December 2025, SEI on entity SIPL received Tax Underpayment Assessment Letters related to Corporate Income Tax of tax year 2021 and 2022 amounting to USD791,849 and USD1,329,504 respectively and recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

SIPBV

In December 2025, SEI on entity SIPBV received Tax Underpayment Assessment Letters related to Corporate Income Tax of tax year 2021 and 2022 amounting to USD304,556 and USD511,411 respectively and recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

SPLLC

In December 2025, SEI on entity SPLLC received Tax Underpayment Assessment Letters related to Corporate Income Tax of tax year 2021 and 2022 amounting to USD121,821 and USD204,576 *respectively and recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.*

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 26(4)

SESSL

Pada September 2021, SEI melalui entitas anak SESSL menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB tahun pajak 2014 atas sengketa Pajak penghasilan pasal 26(4). Pada Desember 2022, SESSL telah menerima seluruh pengembalian dana sebesar IDR170.017.227.364.

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan Tax Treaty oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

Pada Maret 2023, SESSL menerima putusan kalah PK dari Mahkamah Agung. SESSL menerima SP2PK dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar USD11.887.654. SESSL telah membayar pajak tersebut pada tanggal 13 April 2023.

Pada Maret 2021, SESSL juga menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB Pasal 26 ayat (4) atas tahun pajak 2015 sebesar senilai USD4.331.929. Pada Desember 2022, SESSL telah menerima pengembalian dana sebesar IDR62.341.601.281 (setara USD3.961.467).

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan *Tax Treaty* oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

Atas putusan banding tersebut, DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada 3 Agustus 2021. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Mahkamah Agung belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

SIPL

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SIPL menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 atas tahun pajak 2021 (masa pajak Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dan 2022 (masa pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dengan nilai total masing-masing tahun pajak sebesar Rp8.056.429.669 (setara USD489.005) dan Rp 14.072.209.028 (setara USD854.148). SEI mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 26(4)

SESSL

In September 2021, SEI on entity SESSL received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2014 of dispute on Income Tax Article 26(4). In December 2022, SESSL received the tax refund amounting to IDR170,017,227,364.

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously BPEK).

In March 2023, SESSL received an unfavourable PK Verdict from the Supreme Court. SESSL received SP2PK with a total tax to be paid amounting to USD11,887,654. SESSL has paid the tax on April 13, 2023.

In March 2021, SESSL also received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2015 of dispute on Income Tax Article 26(4) amounting to USD4,331,929. In December 2022, the SESSL received the tax refund amounting to IDR62,341,601,281 (equivalent to USD3,961,467).

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously by BPEK).

In regard to the Appeal Decision above, DGT submitted Civil Review to Supreme Court on August 3, 2021. As of the completion date of the financial statements, the Supreme Court has not yet issued decisions on the Civil Review.

SIPL

In December 2025, SEI on entity SIPL received Tax Underpayment Assessment Letters related to Income Tax Article 26 of tax year 2021 (period February, March, May, July, August, September, October, November, December) and 2022 (period February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) amounting to Rp8.056.429.669 (equivalent to USD489.005) and Rp 14.072.209.028 (equivalent to USD854.148) respectively. SEI recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

SIPL (lanjutan)

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

SIPBV

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SIPL menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 atas tahun pajak 2021 (masa pajak Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dan 2022 (masa pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dengan nilai total masing-masing tahun pajak sebesar Rp3.098.626.799 (setara USD188.079) dan Rp5.412.388.089 (setara USD328.518). SEI mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

SPLLC

Pada bulan Desember 2025, SEI melalui entitas anak SIPL menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 atas tahun pajak 2021 (masa pajak Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dan 2022 (masa pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) dengan nilai total masing-masing tahun pajak sebesar Rp1.239.450.724 (setara USD75.232) dan Rp2.164.955.240 (setara USD131.407). SEI mencatat taksiran pajak sejumlah tersebut. SEI akan mengajukan Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Maret 2026.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

SIPL (continued)

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

SIPBV

In December 2025, SEI on entity SIPL received Tax Underpayment Assessment Letters related to Income Tax Article 26 of tax year 2021 (period February, March, May, July, August, September, October, November, December) and 2022 (period February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) amounting to Rp3.098.626.799 (equivalent to USD188.079) and Rp5.412.388.089 (equivalent to USD328.518) respectively. SEI recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

SPLLC

In December 2025, SEI on entity SIPL received Tax Underpayment Assessment Letters related to Income Tax Article 26 of tax year 2021 (period February, March, May, July, August, September, October, November, December) and 2022 (period February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) amounting to Rp1.239.450.724 (equivalent to USD75.232) and Rp2.164.955.240 (equivalent to USD131.407) respectively. SEI recorded such amount as claim for tax refund. SEI will submit an objection to Directorate General of Tax in March 2026.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 4(2) (pajak pengalihan) atas restrukturisasi sub-holding gas oleh Pemerintah

SEBB

Pada Januari 2020, SEI melalui entitas anak SEBB telah menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2) sebesar IDR1.220.899.561 dan denda administrasi sebesar IDR512.777.816 atas perubahan Hak Kepemilikan. Pada Maret 2020, SEBB telah menyampaikan surat kepada DJP sehubungan dengan pengurangan denda pajak menjadi sebesar IDR120.098.389 yang telah dibayar pada 1 April 2020.

Pada Agustus 2020, SEBB telah menerima surat nomor KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 yang menerima pengurangan sebagian denda pajak menjadi sebesar IDR201.577.206. Pada September 2020, SEBB telah membayar sisanya sebesar IDR81.478.817.

Pada Agustus 2021, SEBB telah menerima STP sebesar IDR5.084.555 (atau setara USD309) sehubungan dengan denda administrasi dari pembayaran pajak sebelumnya. Pada September 2021, SEBB menyampaikan Permohonan Pembebasan Denda Pajak sehubungan dengan STP tersebut.

Pada November 2021, DJP menyampaikan surat nomor KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 yang menolak permohonan tersebut. Pada Desember 2021, SEBB menyampaikan kembali Permohonan Pembebasan Denda Pajak tersebut.

Pada 21 Februari 2022, SEBB menerima surat nomor KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 yang menolak permohonan tersebut. Pada Maret 2022, SEBB menyampaikan surat Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Pengadilan Pajak belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

Pada Juni 2024, SEBB membalik taksiran pajak yang telah dicatat sebesar IDR5.084.555 (setara USD309) dan mencatat sebagai beban pajak pada laba rugi periode berjalan.

Pada 9 Juli 2025, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan gugatan dengan hasil menerima sebagian permohonan, sehingga nilai STP seharusnya sebesar IDR2.297.980 (setara USD139).

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 4(2) (transfer tax) from sub-holding gas restructuring by the Government

SEBB

In January 2020, SEI on SEBB received Tax Underpayment Assessment Letter related to Tax Art 4(2) amounting to IDR1,220,899,561 and administration penalty amounting to IDR512,777,816 on changes in Participating Interest. In March 2020, SEBB filed a letter to DGT in relation to reduction of tax penalty to IDR120,098,389 which is paid on April 1, 2020.

In August 2020, SEBB received KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 which partially agreed to reduce tax penalty to IDR201,577,206. In September 2020, SEB paid the remaining difference of IDR81,478,817.

In August 2021, SEBB received Tax Collection Letter amounting to IDR5,084,555 (equivalent to USD309) related to previous payment of administration penalty. In September 2021, SEBB file Tax Penalty Waiver Request in relation to the Tax Collection Letter.

In November 2021, DGT released KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 which rejected the request. In December 2021, SEBB filed another Tax Penalty Waiver Request.

On February 21, 2022, SEBB received KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 which rejected the request. In March 2022, SEBB filed objection letter to Tax Court. As of the completion date of the financial statements, the Tax Court has not yet issued decisions on the appeal.

In June 2024, SEBB reversed claim for tax refund amounting to IDR5,084,555 (equivalent to USD309) and charged as tax expense in the current period.

On 9 July 2025, Tax Court issued verdict with result partially granted the lawsuit, decided the STP amount to become IDR2,297,980 (equivalent to USD139).

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

Pertagas

Pertagas menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

Pertagas

Pertagas received several SKPKBs as follows:

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima /*Letter received*	Periode surat diterima/ *Period of letter received*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment including penalty (in millions of Rupiah)*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam ribu Dolar AS)/ *Amount of underpayment including penalty in thousands of USD)*	Status/*Status*
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2014	SKPKB	Februari/ *February* 2019	69.806	4.175[1)]	[2)]
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	4.466	268	[3, 4)]
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	7.323	438[1)]	[4)]
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2016	SKPKB	Desember/ *December* 2020	20.535	1.228	[3)]

1) Mata uang asli dalam dolar AS
2) Pertagas mengajukan Peninjauan Kembali dan pada tahun 2024 ditolak oleh Mahkamah Agung ("MA").
3) DJP mengajukan PK dan pada tahun 2024 ditolak oleh MA
4) DJP mengajukan PK dan pada tahun 2025 ditolak oleh MA

1) Original currency in US dollar
2) Pertagas has submitted judicial review and in 2024 and rejected by the Supreme Court ("MA").
3) DGT has submitted judicial review in 2024 and rejected by the MA.
4) DGT has submitted judicial review in 2025 and rejected by the MA.

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat sengketa pajak yang masih berlangsung di Pertagas.

As of December 31, 2025, Pertagas does not have ongoing tax disputes.

22. IMBALAN KERJA / *22. EMPLOYEE BENEFITS*

Akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari: / *Current employee benefits liabilities account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Akrual gaji, tantiem dan bonus karyawan	94.017.338	82.056.839	*Employee salaries and bonus accruals*
Porsi jangka pendek atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka Panjang lainnya	7.260.185	4.926.878	*Short-term portion of liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Total	**101.277.523**	**86.983.717**	***Total***

Akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang terdiri dari: / *Long-term employee benefits liabilities account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Liabilitas Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya setelah dikurangi porsi jangka pendek	**122.577.531**	**107.500.437**	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits - net of short-term portion*

a. Akrual gaji, tantiem dan bonus karyawan / *a. Employee salary and bonus accruals*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Perusahaan	63.735.775	51.609.047	*The Company*
Entitas anak	30.281.563	30.447.792	*Subsidiaries*
Total	**94.017.338**	**82.056.839**	***Total***

b. Tunjangan kesehatan hari tua / *b. Post-retirement health care benefits*

Perusahaan menyediakan tambahan tunjangan kesehatan hari tua bagi seluruh karyawan tetap, para pensiunan dan mantan direksi yang ditetapkan oleh perjanjian bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 3% dan 6% dari penghasilan dasar.

The Company provides additional post-retirement health care benefits for its eligible permanent employees, retired employees and ex-members of the board of directors, as covered in a cooperative agreement with Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 3% and 6% of basic income, respectively.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Imbalan pensiun iuran pasti

Sejak Februari 2009, Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia dan Asuransi BRI Life yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002000.K/KP.05/UM/2009 tanggal 6 Februari 2009. Dana pensiun ini didirikan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan masing-masing dalam Surat Keputusannya No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 dan No. KEP.184/KM.17/1995. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 4,55% dan 14,07% dari penghasilan dasar pensiun. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban untuk program pensiun iuran pasti ini adalah masing-masing sebesar USD3.231.461 dan USD2.359.471.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

c. Defined contribution pension plan

Since February 2009, the Company established a defined contribution plan for all of its eligible permanent employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia and Asuransi BRI Life, the establishment of which was approved based on Director's Decision Letter No. 002000.K/KP.05/UM/2009, dated February 6, 2009. Both pension plans were established based on the approval from the Ministry of Finance in its Decision Letters No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 and No. KEP.184/KM.17/1995. The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 4.55% and 14.07%, respectively, of the basic Pension income. For the year ended December 31, 2025 and 2024, pension expenses for this defined contribution plan were USD3,231,461 and USD2,359,471, respectively.

d. Imbalan kerja jangka panjang

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan PKB yang dibandingkan dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003), mana yang lebih tinggi.

Saldo kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

d. Long-term employee benefits

The Group provides long-term employees' benefits to its employees in accordance with the CLA and Labour Law No. 13 year 2003 (Law No. 13/2003), whichever is higher.

The balance of employee benefits obligations recognised in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	158.868.799	139.639.957	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Aset Program	(29.031.083)	(27.212.642)	*Plan Asset*
Liabilitas neto	**129.837.716**	**112.427.315**	***Net liabilities***
Dikurangi porsi jangka pendek	(7.260.185)	(4.926.878)	*Less short-term portion*
Porsi jangka panjang, neto	**122.577.531**	**107.500.437**	***Long term-portion, net***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan mengakui sejumlah alokasi kewajiban terkait imbalan-imbalan kerja yang diberikan oleh Pertamina kepada Pekerja Perbantuannya yang diperbantukan di Perusahaan. Alokasi kewajiban ini meliputi seluruh imbalan kerja yang berlaku di Pertamina yaitu Dana Pensiun Pertamina ("DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP") dan Kesehatan Pasca Pensiun. Akumulasi alokasi kewajiban pekerja perbantuan yang telah dicatat pada periode selama masa perbantuan sampai dengan berakhir masa perbantuan, akan tetap dicatat di Perusahaan dengan nilai Kewajiban yang tetap (*freeze liability*) dan tidak akan berubah karena faktor apapun di masa mendatang. Kewajiban tersebut tidak akan dipindahbukukan ke Pertamina kecuali pada saat pekerja perbantuan tersebut berakhir hubungan kerjanya.

Pada tanggal 31 Desember 2025, alokasi kewajiban karyawan perbantuan Pertamina adalah sebesar USD352.782.

Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui oleh Perusahaan meliputi program Tunjangan Purna Bakti, Masa Persiapan Pensiun dan Imbalan Kesetiaan Kerja.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The Company acknowledged an amount of allocations of obligations related to employee benefits provided by the Pertamina to its Assigned Employees who are seconded in the Company. This liability allocation covers Dana Pensiun Pertamina ("DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP"), and Post Retirement Healthcare. Accumulated allocation of assigned employee's liabilities that have been recorded during the period of assignment until the end of the assignment period will be recorded in the Company amounted to a fixed amount of Liability (freeze liability) and will not change due to any factors in the future. This obligation will not be transferred to the Pertamina, except when the secondee employee's employment period has been ended.

As of December 31, 2025, the allocated liabilities of Pertamina's secondee employees is amounted to USD352,782.

Post-employment and other long-term benefit recognized by the Company consists of Post-employment benefits, Pension Retirement Program and Jubilee Program.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perhitungan program imbalan pascakerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya pada 24 Februari 2026 dan 10 Februari 2025.

Aset program SEI dan Pertagas terdiri dari kas dan setara kas yang seluruhnya dialokasikan ke pasar uang. Aset Program dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas jangka panjang lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The calculation of the Company's Employees Benefit Program as of December 31, 2025 internally and December 31, 2024 was performed by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, based on its reports dated February 24, 2026.

SEI's and Pertagas's plan assets consist of cash and cash equivalents wholly allocated to money market. Plan assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

The movement in the post-employment and other long-term benefit over the year is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	**139.639.957**	**158.968.432**	***Present value of liability - beginning of the year***
Biaya (penghasilan) yang diakui di laba rugi - neto:			*Expenses (income) recognized in profit or loss - net:*
- Biaya jasa kini	4.412,544	6.282.695	*- Current service cost*
- Beban bunga atas liabilitas	5.279.129	7.840.885	*- Interest expense on liability*
- Dampak selisih kurs dan penyesuaian lainnya	3.819.434	(4.302.856)	*Impact of foreign exchange and other adjustments*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:			*Remeasurement of defined benefit liability - net*
- Perubahan asumsi ekonomi	3.978.843	(18.949.562)	Economic assumptions change
- Penyesuaian pengalaman	6.588.909	(1.963.536)	*Experience adjustments*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(4.850.017)	(8.236.101)	*Benefit paid for the current year*
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	**156.868.799**	**139.639.957**	***Present value of liability - end of the year***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan) / *d. Long-term employee benefits (continued)*

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program SEI dan Pertagas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of plan assets of SEI and Pertagas:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Nilai wajar aset program - awal tahun	**27.212.642**	**14.409.797**	***Fair value of plan assets - beginning of the year***
Pembayaran iuran program oleh pemberi kerja	3.484.925	13.340.728	*Payment of program contribution from the employer*
Penghasilan keuangan aset program	(631.138)	164.304	*Finance income of plant asset*
Dampak selisih kurs	(1.035.346)	(702.187)	*Impact of foreign exchange*
Nilai wajar aset program - akhir tahun	**29.031.083**	**27.212.642**	***Fair value of plan assets - end of the year***

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas jangka panjang lain - neto yang diakui oleh Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation of post-employment and other long-term benefit - net recognized by the Group are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai - akhir tahun	158.868.799	139.639.957	*Present value of unfunded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas yang didanai - akhir tahun	(29.031.083)	(27.212.642)	*Present value of funded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas neto- akhir tahun	**129.837.716**	**112.427.315**	***Present value of net liability - end of the year***

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lain adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining expenses and liabilities for post employment benefit and other long-term benefit are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Tingkat diskonto aktuaria	6,20%-6,70% per tahun/ *per annum*	6,55%-7,15% per tahun/ *per annum*	*Actuarial discount rate*
Tingkat kematian (mortalitas)	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Kenaikan gaji	3%-10% di tahun pertama dan 3%-4% di tahun berikutnya/ *3%-10% in the first year and 4%-6% in the following years*	3%-10% di tahun pertama dan 4%-6% di tahun berikutnya/ *3%-10% in the first year and 4%-6% in the following years*	*Salary increment*
Umur pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	*Disability rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Rata-rata tertimbang durasi program

Pada tanggal 31 Desember 2025, rata-rata tertimbang durasi kewajiban adalah 11,70 tahun.

Penyesuaian pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

Rincian penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021 adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

Weighted average program duration

As of December 31, 2025, the weighted average duration of the liability are 11.70 years.

Experience adjustments to defined benefit obligation

Details of experience adjustments to the present value of the defined benefit obligation for the years ended December 31, 2025, 2024, 2023, 2022, and 2021 are as follows:

	2021	2022	2023	2024	2025	
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	**(5.413.617)**	**3.171.653**	**(1.173.341)**	**(1.423.921)**	**6.505.252**	*Experience adjustment on plan liabilities*

Tidak ada penyesuaian pengalaman atas nilai wajar aset program karena aset program ditempatkan pada deposito berjangka.

There is no experience adjustment on fair value of plan assets as the assets are placed in time deposits.

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Sensitivitas liabilitas secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan gaji adalah sebagai berikut:

Sensitivity of the overall liability to changes in the discount rate and salary increase rate assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	Dampak terhadap liabilitas/ *Impact on liability*	
31 Desember 2025			***December 31, 2025***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD11,3 juta/*million* naik/*increase by* USD12,2juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD14,0 juta/*million* turun/*decrease by* USD9,9 juta/*million*	*Salary increase rate*
31 Desember 2024			***December 31, 2024***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD9,8 juta/*million* naik/*increase by* USD11,6 juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD14,4 juta/*million* turun/*decrease by* USD8,2 juta/*million*	*Salary increase rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pascakerja) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi utama aktuaria yang digunakan sama dengan asumsi penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Dalam memenuhi kewajiban imbalan kerja, Grup menggunakan dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan investasi pada obligasi Negara dan obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara parsial dengan kenaikan dari nilai obligasi Perusahaan yang dimiliki.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the post-employment benefit obligation) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

The actuarial assumptions used are the same as the calculation of post-employment benefit obligation.

e. Risk management related to employee benefit program

The Group is exposed to a number of risks through its post-employment benefit and other long-term benefits. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

In order to fulfill the Group's employment benefit obligations, the Group uses funds generated from its operations and invested in government and corporate bonds listed on the Indonesian Stock Exchange.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the Company's bond holdings.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA / *23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS*

Mutasi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area adalah sebagai berikut:

The movement in asset abandonment and site restoration obligations is presented below:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Saldo awal	146.128.524	146.690.321	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Addition*
Beban akresi	9.261.150	7.168.994	*Accretion cost*
Penyesuaian karena perubahan estimasi dan lainnya	9.337.064	(7.730.791)	*Adjustment due to change in estimates and others*
Saldo akhir	**164.726.738**	**146.128.524**	***Ending balance***

Pertagas

Sesuai dengan surat Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 perihal Penugasan kepada Perusahaan dan Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai pada tanggal 26 Februari 2019 dan surat Perusahaan No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 perihal Penugasaan Perusahaan kepada Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai tanggal 30 April 2019, Pertagas telah melakukan pembangunan Pipa Minyak Rokan Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai.

Atas pembangunan pipa Rokan tersebut, Pertagas bermitra dengan PT Rukun Raharja Tbk. (“RAJA”) dalam bentuk perjanjian KSO (Catatan 35q). Berdasarkan perjanjian kedua pihak sepakat untuk menerapkan provisi terkait kegiatan pasca operasi yang termasuk namun tidak terbatas pada pembongkaran pipa Rokan secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas-fasilitas terkait pipa Rokan lainnya, serta melakukan pemulihan lingkungan pipa Rokan. Pertagas dan RAJA juga menyepakati untuk mencatat liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dari aset tersebut sesuai dengan bagian partisipasi para pihak.

Pertagas

In accordance with a letter from Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 regarding the Assignment of Pertamina to Perusahaan and Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on February 26, 2019, and a letter from the Company No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 regarding the Assignment from the Company to Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on April 30, 2019, Pertagas has carried out the construction of the Rokan Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor.

Regarding the construction of the Rokan pipeline, Pertagas partnered with PT Rukun Raharja Tbk. ("RAJA") in form of JO agreement Agreement (Note 35q). Based on the agreement both parties agreed to implement provisions related to post-operation activities including but not limited to the permanent dismantling of the Rokan crude pipeline, cessation of operations, and removal of the capabilities of other related Rokan crude pipeline facilities, as well as environmental restoration of the Rokan pipeline. Pertagas and RAJA also agree to record the liabilities of asset dismantling and area restoration from this asset according to the respective parties' participation portion.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA (lanjutan)

Pertagas (lanjutan)

Provisi ini merupakan kewajiban Pertagas dan RAJA untuk pembongkaran aset pipa Rokan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat perjanjian pipa Rokan selesai.

Provisi diakui sebesar nilai kini atas beban pembongkaran yang akan terjadi di masa depan. Amortisasi diskonto yang merupakan dampak dari nilai waktu uang atas kewajiban pembongkaran aset ini diakui sebagai beban akresi.

Estimasi terkini untuk kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

PLI

Nilai liabilitas pembongkaran aset PLI merupakan penyisihan terkait dengan pembongkaran aset dan restorasi area atas *Tower Yoke Mooring System* di FSRU Lampung yang dioperasikan oleh PLI. Nilai tersebut sesuai dengan estimasi terkini yang dilakukan oleh manajemen, dan manajemen berkeyakinan bahwa angka tersebut telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

SEI

Nilai liabilitas pembongkaran aset SEI merupakan penyisihan terkait pembongkaran aset dan restorasi area - area ekploitasi dan eksplorasi yang dimiliki oleh SEI. Nilai tersebut sesuai dengan estimasi terkini yang dilakukan oleh manajemen, dan manajemen berkeyakinan bahwa angka tersebut telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS (continued)

Pertagas (continued)

These provisions constitute the obligations of the Pertagas and RAJA for the dismantling of Rokan pipeline asset that will occur in the future when the Rokan crude pipeline agreement is completed.

The provisions are recognized at present value for future dismantling expenses. Discounted amortization, which is the impact of the time value of money on the asset dismantling obligations, is recognized as an accretion expense.

The current estimate for asset dismantling liabilities and area restoration is made by management. Management believes that the accumulated provisions are sufficient to cover all liabilities arising from area restoration activities and asset dismantling.

PLI

The value of PLI's asset abandonment and site restoration obligation is a provision related to asset dismantling and restoration of the upper area of the Tower Yoke Mooring System at the FSRU Lampung operated by PLI. This value is in accordance with the latest estimate made by management and management believes that this figure is sufficient to cover all liabilities arising from area restoration activities and asset dismantling.

SEI

The value of SEI's asset abandonment and site restoration obligation is a provision related to the dismantling of assets and restoration of exploitation and exploration areas owned by SEI. This value is in accordance with the latest estimate made by management, and management believes that this figure is sufficient to cover all liabilities arising from area restoration and asset dismantling activities.

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR / *24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

The details of the shareholders based on the report prepared by PT Datindo Entrycom, a Securities Administration Agency, are as follows:

a. Modal saham / *a. Share capital*

	31 Desember/*December 31*, 2025			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna Share*
Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B)				*Common Stock (Series B)*
Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Pertamina*
Aldiansyah Idham (Direktur)	60.000	0,00%	851	*Aldiansyah Idham (Director)*
Rachmat Hutama (Direktur)	2.500	0,00%	35	*Rachmat Hutama (Director)*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.432.406.940	43,03%	148.049.554	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

a. Modal saham (lanjutan) / *a. Share capital (continued)*

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the shareholders based on the report prepared by PT Datindo Entrycom, a Securities Administration Agency, are as follows (continued):

	31 Desember/*December 31*, 2024			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna Share*
Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B)				*Common Stock (Series B)*
Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Pertamina*
Fadjar Harianto Widodo (Direktur)	1.861.300	0,01%	26.415	*Fadjar Harianto Widodo (Director)*
Warih Sadono (Komisaris)	1.016.000	0,00%	14.419	*Warih Sadono (Commissioner)*
Luky Alfirman (Komisaris)	886.700	0,00%	12.583	*Luky Alfirman (Commissioner)*
Arief Setiawan Handoko (Direktur)	472.200	0,00%	6.701	*Arief Setiawan Handoko (Director)*
Harry Budi Sidharta (Direktur)	401.400	0,00%	5.696	*Harry Budi Sidharta (Director)*
Rosa Permata Sari (Direktur)	95.900	0,00%	1.361	*Rosa Permata Sari (Director)*
Ratih Esti Prihatini (Direktur)	95.900	0,00%	1.361	*Ratih Esti Prihatini (Director)*
Rachmat Hutama (Direktur)	2.500	0,00%	35	*Rachmat Hutama (Director)*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.427.637.540	43,02%	147.981.869	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak untuk mencalonkan direksi dan komisaris, menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi, perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Januari 2018 Pemerintah Indonesia telah mengalihkan 56,97% kepemilikan atas saham Perusahaan kepada Pertamina. Selain itu, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Perusahaan untuk:

- Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan;
- Mengangkat anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan calon anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan.

24. CAPITAL STOCKS AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Share capital (continued)

The Series A Dwiwarna share represents a share which provides the holder rights to propose directors and commissioners, attend and approve the appointment and dismissal of commissioners and directors, change in Articles of Association including changes in capital, closure and liquidation, merger and acquisition of the Company.

Series B shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 25, 2018 the Government of Indonesia transferred 56.97% ownership in the Company's shares to Pertamina. Furthermore, the Government of Indonesia as the owner of the Series A Dwiwarna share gave the authority to the Company's majority shareholder to do the following:

- *Change the Company's Articles of Association;*
- *Appoint members of the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose candidates for the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders; and*
- *Request and access the Company's data and documents.*

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *CAPITAL STOCKS AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

b. Tambahan modal disetor / *b. Additional paid-in capital*

Modal disetor lainnya terdiri dari: / *Other paid-in capital consists of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal	202.346.493	202.346.493	*Excess of proceeds over par value*
Dampak implementasi PSAK 110, "Laporan keuangan konsolidasian"	127.085.001	127.085.001	*Impact of PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" implementation*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	(787.215.590)	(787.215.590)	*Difference arising from transactions among entities under common control*
Biaya emisi saham	(9.790.532)	(9.790.532)	*Share issuance cost*
Total	**(467.574.628)**	**(467.574.628)**	***Total***

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *25. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests portion in equity and share of subsidiaries' net results are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	876.658.206	132.339.346	-	(109.298.488)	899.699.064	*Pertagas*
PGN MAS	(32.871.925)	(1.105.149)	-	-	(33.977.074)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.695.081	1.183	-	-	1.696.264	*Others*
Jumlah	**845.481.362**	**131.235.380**	**-**	**(109.298.488)**	**867.418.254**	***Total***

	31 Desember/*December* 31, 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	863.094.391	109.840.523	-	(96.276.708)	876.658.206	*Pertagas*
PGN MAS	(23.240.987)	(9.630.938)	-	-	(32.871.925)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.695.170	(89)	-	-	1.695.081	*Others*
Jumlah	**841.548.574**	**100.209.496**	**-**	**(96.276.708)**	**845.481.362**	***Total***

26. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk menyisihkan cadangan dari keuntungan wajib paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 28 Mei 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 57 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 28 Mei 2025, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar USD339.427.774 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR4.413.918.773.096 (setara dengan USD 271.542.219) atau IDR182,08 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Mei 2024 dan telah menerima perolehan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0212762 tanggal 11 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar USD278.091.179 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR3.595.162.762.112 (setara dengan USD 222.472.943) atau IDR148,31 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

26. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME

Under Indonesian Limited Company Law, the Company and each of its subsidiaries is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 28, 2025 which was notarised in the Notarial Deed No.57 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 28, 2025, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2024 financial year in the amount of USD339,427,774 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR4,413,918,773,096 (equivalent to USD271,542,219) or IDR182.08 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 30, 2024 which was notarised in the Notarial Deed No.76 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 30, 2024 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-AH.01.09-0212762 dated June 11, 2024, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2023 financial year in the amount of USD278,091,179 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR3,595,162,762,112 (equivalent to USD222,472,943) or IDR148.31 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

27. PENDAPATAN / *27. REVENUES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
PIHAK BERELASI			***RELATED PARTY***
Niaga gas bumi	687.811.870	733.556.515	*Gas trading*
Transmisi gas	228.541.309	227.167.229	*Gas transmission*
Transportasi minyak	157.555.779	142.961.203	*Oil transportation*
Pendapatan jasa regasifikasi	147.019.148	129.594.646	*Income from gas regasification*
Penjualan minyak dan gas bumi	45.495.866	70.143.618	*Crude oil and natural gas sales*
Jasa konstruksi dan pemeliharaan	57.254.750	42.765.565	*Construction and maintenance services*
Pendapatan pemrosesan gas bumi	25.013.059	25.724.901	*Income from gas processing*
Jasa jaringan telekomunikasi	1.082.890	4.234.903	*Telecommunication network services*
Subtotal	**1.349.774.671**	**1.376.148.580**	***Subtotal***
PIHAK KETIGA			***THIRD PARTY***
Niaga gas bumi	2.085.193.021	1.786.223.661	*Gas trading*
Penjualan minyak dan gas bumi	224.076.352	284.373.905	*Crude oil and natural gas sales*
LNG *Trading*	189.466.806	221.507.601	*LNG Trading*
Pendapatan jasa regasifikasi	39.842.483	42.852.182	*Income from gas regasification*
Transmisi gas	21.227.439	23.523.915	*Gas transmission*
Jasa jaringan telekomunikasi	26.941.337	21.899.139	*Telecommunication network services*
Jasa konstruksi dan pemeliharaan	23.284.230	20.832.015	*Construction and maintenance services*
Transportasi minyak	16.111.867	11.258.189	*Oil transportation*
Subtotal	**2.626.143.535**	**2.412.470.607**	***Subtotal***
Jumlah pendapatan	**3.975.918.206**	**3.788.619.187**	***Total revenues***

Pendapatan niaga gas bumi terdiri dari penjualan gas kepada: / *Revenues from gas trading consists of natural gas sales to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
Pelanggan industri dan komersial	2.718.296.537	2.476.861.110	*Industrial and commercial customers*
Pelanggan rumah tangga	50.475.712	38.746.057	*Households customers*
SPBG	4.232.642	4.173.009	*SPBG*
Jumlah	**2.773.004.891**	**2.519.780.176**	***Total***

Penjualan minyak dan gas bumi merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas Grup dari aktivitas hulu dari kerjasama operasi minyak dan gas.

Crude oil and natural gas sales represent the Group's sales of oil and gas from upstream oil and gas joint operations.

Penyediaan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan merupakan pendapatan PGASKOM dengan menggunakan fiber optik.

Telecommunication network services to the customers represents PGASKOM's revenues by using the fiber optic.

LNG Trading merupakan transaksi jual beli LNG antara Perusahaan dengan China National Technical IMP & EXP Corp ("CNTIC") (Catatan 35p).

LNG Trading is a LNG sales and purchase transaction between the Company and China National Technical IMP & EXP Corp ("CNTIC") (Note 35p).

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan PGASSOL atas penyediaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa gas dan PGN MAS atas penyediaan jasa pengamanan, sewa kendaraan, dan perumahan kepada pelanggannya.

Other revenue represents PGASSOL's revenue of construction and maintenance services for gas pipelines and PGN MAS's revenue of security services, vehicle rental and housing to the customers.

27. PENDAPATAN (lanjutan) / *27. REVENUES (continued)*

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) masing-masing sebesar USD671.803.950 atau 16,90% dan USD697.057.687 atau 18,40% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) amounting to USD671,803,950 or 16.90% and USD697,057,687 or 18.40% from total consolidated revenues for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *28. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:

The components of cost of revenue based on their nature are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pembelian gas bumi			***Purchase of natural gas***
Pihak ketiga	1.279.451.552	1.004.700.734	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 33)	836.039.733	814.864.769	*Related parties (Note 33)*
Subtotal	2.115.491.285	1.819.565.503	*Subtotal*
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi			***Oil and gas upstream operations***
Beban penyusutan, deplesi dan amortisasi	132.545.242	198.583.937	*Depreciation, depletion and amortisation*
Beban produksi dan lifting	111.152.744	107.124.986	*Production and lifting costs*
Subtotal	243.697.986	305.708.923	*Subtotal*
LNG			***LNG***
Beban penyusutan	47.821.278	47.762.110	*Depreciation expenses*
Beban terkait LNG	17.467.820	17.044.919	*LNG related expenses*
Subtotal	65.289.098	64.807.029	*Subtotal*
LNG Trading	178.348.780	208.669.488	***LNG Trading***
Pemrosesan gas	24.882.352	25.697.262	***Gas processing***
Sewa dan jasa lainnya	57.663.531	43.256.309	***Rent and other services***
Beban niaga dan infrastruktur			***Trading and infrastructure expenses***
Penyusutan	172.184.791	163.301.724	*Depreciation*
Perbaikan, pemeliharaan, dan jasa umum	127.366.299	104.336.175	*Repairs, maintenance, and general services*
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	99.365.935	92.548.977	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Jasa umum	62.143.372	64.073.013	*General services*
Sewa	28.595.933	33.278.070	*Rent*
Bahan bakar dan kimia	26.521.621	27.348.304	*Fuel and chemicals*
Amortisasi	10.702.014	15.659.551	*Amortisation*
Iuran badan pengatur hilir minyak dan gas bumi	16.764.392	14.621.729	*Downstream oil and gas regulatory agency levy*
Peralatan dan suku cadang	7.423.383	7.362.826	*Tools and spareparts*
Honorarium professional	9.498.877	6.495.723	*Professional fees*
Komunikasi	6.810.019	6.479.630	*Communication*
Pajak dan retribusi	5.029.613	5.056.690	*Tax and retributions*
Perjalanan dinas dan transportasi	3.806.155	5.013.785	*Traveling and transportation*
Asuransi aset	3.109.194	2.946.308	*Asset insurance*
Survei dan studi	2.626.340	2.541.677	*Survey and study*
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	2.481.049	2.275.042	*Corporate social and environmental responsibilty*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	7.792.755	10.194.547	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	592.221.742	563.533.771	*Subtotal*
Total beban pokok pendapatan	**3.277.594.774**	**3.031.238.285**	***Total cost of revenues***

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Pembelian neto dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari Pertamina dan entitas anaknya, masing-masing sebesar USD828.799.375 atau 25,29% dan USD723.945.536 atau 19,11% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Selain itu, pembelian neto dari pihak ketiga yang melebihi 10% jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari PT Medco Energi Internasional Tbk., masing-masing sebesar USD684.096.966 atau 17,26% dan USD785.630.658 atau 20,74% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

28. COST OF REVENUES (continued)

*Net purchases from related parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from Pertamina and its subsidiaries, amounting to USD*828,799,375 *or 25.29% and USD723,945,536 or 19.11% of total consolidated revenues for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively. Meanwhile, net purchases from third parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from PT Medco Energi Internasional Tbk., amounting to USD684,096,966 or 17.26% and USD785,630,658 or 20.74% of total consolidated revenues for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively.*

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	103.193.650	115.557.581	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Jasa umum	11.297.816	11.147.615	*General services*
Honorarium profesional	8.743.200	11.690.939	*Professional fees*
Penyusutan	7.641.121	11.065.809	*Depreciation*
Pengelolaan fasilitas	6.565.258	7.289.282	*Facilities management*
Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah	5.006.041	11.276.958	*Short-term leases and leases of low value assets*
Pajak dan retribusi	4.867.051	2.988.711	*Tax and retributions*
Perjalanan dinas dan transportasi	4.378.395	5.061.950	*Traveling and transportation*
Pendidikan dan pelatihan	3.410.209	3.634.617	*Education and training*
Perbaikan dan pemeliharaan	2.648.131	8.958.601	*Repairs and maintenance*
Komunikasi	2.307.582	1.305.868	*Communication*
Asuransi aset	1.662.265	1.846.775	*Asset insurance*
Representasi dan jamuan	1.251.395	2.203.062	*Representation and entertainment*
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	1.260.947	1.616.264	*Corporate social and environmental responsibility*
Survei dan studi	1.002.006	2.529.765	*Survey and study*
Amortisasi sewa lahan dan aset tak berwujud	685.377	818.483	*Amortisation of land lease and intangible asset*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	1.961.619	2.222.639	*Others (each below USD1,000,000)*
Jumlah beban umum dan administrasi	**167.882.063**	**201.214.919**	***Total general and administrative expenses***

30. BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN / *30. FINANCE COST AND INCOME*

a. Beban keuangan / *a. Finance costs*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
Bunga pinjaman dari pinjaman bank:			*Interest on bank loans:*
- *Club Deal*	33.577.504	35.134.865	*Club Deal* -
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	2.247.885	411.823	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk.* -
- BRI	1.261.458	300.000	*BRI* -
- PT Bank DBS Indonesia	-	157.276	*PT Bank DBS Indonesia* -
Beban bunga sewa pembiayaan	15.744.535	17.015.634	*Interest expenses on finance leases*
Beban akresi	9.261.150	7.168.994	*Accretion expense*
Bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dari Pemerintah:			*Interest on two-step loans from the Government:*
- JBIC	2.755.364	2.597.692	*JBIC* -
- IBRD	103.434	738.574	*IBRD* -
Bunga utang obligasi	-	11.645.616	*Interest on bonds payable*
Lain-lain	-	157.275	*Others*
Jumlah beban keuangan	**64.951.330**	**75.327.749**	***Total finance costs***

b. Pendapatan keuangan / *b. Finance income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
Bunga jasa giro	39.213.663	34.627.129	*Interest from current accounts*
Bunga deposito	24.665.813	25.136.709	*Interest from time deposits*
Bunga aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	426.007	*Interest from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Jumlah pendapatan keuangan	**63.879.476**	**60.189.845**	***Total finance income***

31. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN DAN SELISIH KURS / *OTHER INCOME AND EXPENSES AND FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE*

a. Pendapatan lain-lain / *a. Other income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
Jasa pemanfaatan lahan (Catatan 36f)	4.207.062	-	*Land utilisation services (Note 36f)*
Kompensasi Gas	4.170.141	310.819	*Gas compensation*
Jasa operasi dan pemeliharaan	3.886.598	5.445.122	*Operation and maintenance services*
Jasa pemakaian aset tetap	3.206.440	3.909.501	*Fixed asset usage services*
Denda	1.727.645	2.123.112	*Penalty*
Bunga arbitrase (Catatan 36a)	-	5.200.000	*Arbitration interest (Note 36a)*
Lain-lain	10.593.134	23.305.361	*Others*
Jumlah	**27.791.020**	**40.293.915**	***Total***

b. Beban lain-lain / *b. Other expenses*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
(Pemulihan)/Kerugian penurunan nilai piutang	8.546.478	41.348.762	*(Recovery)/Impairment loss on receivables*
Write-off aset lain WK Bangkanai	5.132.077	-	*Write-off of other assets WK Bangkanai*
Estimasi klaim (Catatan 36g)	4.926.057	6.739.177	*Estimated claims (Note 36g)*
Penurunan nilai aset tetap	4.274.341	-	*Impairments of fixed assets*
Pajak final jasa konstruksi	3.909.203	7.560.579	*Final tax on construction services*
Jasa pemanfaatan lahan (Catatan 36f)	3.603.772	-	*Land utilisation service (Note 36f)*
Provisi atas putusan arbitrase	-	3.816.018	*Provisions on arbitration result*
Lain-lain	8.206.228	14.338.250	*Others*
Jumlah	**38.598.156**	**73.802.786**	***Total***

c. Laba/(rugi) selisih kurs - neto / *c. Gain/(loss) on foreign exchange - net*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	
Selisih kurs transaksi	6.528.864	12.192.098	*Transaction foreign exchange*
Selisih kurs penjabaran	(13.755.052)	(1.066.814)	*Translation foreign exchange*
Jumlah	**(7.226.188)**	**11.125.284**	***Total***

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN / *BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE*

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pembelian kembali saham Perusahaan yang dilakukan selama tahun berjalan.

Basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period including buyback of the Company's shares made during the year.

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (lanjutan) / *32. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	215.364.799	339.427.774	*Net income attributable to owners of the parent*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	24.241.508.196	24.241.508.196	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**0,0089**	**0,0140**	***Basic earnings per share (full amount)***

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Group did not have any dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties***	**Transaksi/ *Transactions***
Pemerintah Republik Indonesia /*Government of the Republic of Indonesia*	Pemegang saham pengendali terakhir melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") / *Ultimate shareholders through the State-Owned Enterprises ("SOEs") regulatory agency*	Pembayaran dividen, penerusan pinjaman/ *Payment of dividends and two-step loans*
Pertamina	Pemegang saham langsung/*Immediate parent*	Debitur obligasi, penjualan dan pembelian minyak dan gas bumi, dan pinjaman dari pemegang saham/*Debtor of bonds, purchase and sale of oil and gas, and loan from shareholder*
SKK Migas, Direktorat Jendral Minyak dan Gas ESDM ("Ditjen Migas")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Pemasok/*Suppliers*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transactions*
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash Loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line*/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing facility, Treasury Line facility*
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas kredit investasi/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, investment credit facility*
BRI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas *Standby Letter of Credit*, fasilitas bank garansi dan fasilitas penangguhan jaminan impor/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, Standby Letter of Credit Facility, bank guarantee facility and guarantee of suspension of import facility*
BSI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya/*Placement of unrestricted time deposits*
BTN, Unit Usaha Syariah BTN	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro/*Placement of current accounts*
PHE dan entitas anak/*and subsidiaries*, PEP, PT Pertamina Hulu Rokan	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Uang muka pembelian gas bumi, pemasok gas, pelanggan, uang muka *ship-or-pay* pemasok gas, Pelanggan/*Advance of take or pay, gas supplier, customer, advance of ship or pay gas supplier, Customer*
PLN, PT Barata Indonesia (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	Pelanggan/*Customers*
PT Bhirawa Steel, PT Energi Agro Nusantara, PT Wijaya Karya Intrade, PT Wijaya Karya Beton,	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of State-Owned Enterprises ("SOEs") controlled by the Government*	Pelanggan/*Customers*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties***	**Transaksi/** ***Transactions***
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Krakatau Posco, PT Krakatau Semen Indonesia, PT Krakatau Nippon Steel Synergy, PT Krakatau Wajatama ("Krakatau Steel Grup")	Entitas BUMN yang dikendalikan Pemerintah dan anak perusahaannya/*SOE entity and its subsidiaries controlled by the Government*	Pemasok dan pelanggan/*Suppliers and customers*
PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petrogas Jatim Utama, Kaltim Methanol Industri,	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan minyak dan gas/*Oil and gas customers*
PT Patra Drilling Contractor, PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Patra Niaga, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk., PT Elnusa Tbk.	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok/*Suppliers*
KPI	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok dan Pelanggan/ *Supplier and Customer*
Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Perjanjian Kerja Sama Operasional Kilang LNG Arun/*Operational Cooperation Agreement of Arun LNG Plant*
PT PLN Batam, PIM, PT PLN Indonesia Power, PUSRI, PKG, PT Patra Logistik	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan transmisi dan niaga gas/*Gas transmission and trading customer*
Regas	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*
Transgasindo	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham dan transportasi gas bumi/*Investment in shares and gas transportation*
PSG	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Pendapatan (Catatan 27) / ***Revenues (Note 27)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Niaga gas bumi			***Gas trading***
PT PLN Batam	176.780.432	119.455.044	*PT PLN Batam*
PLN	165.256.010	184.446.775	*PLN*
PT PLN Indonesia Power	86.749.387	154.492.987	*PT PLN Indonesia Power*
KPI	81.734.950	87.714.624	*KPI*
PT Pupuk Iskandar Muda	79.740.828	95.637.232	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Pupuk Kujang	70.565.491	71.531.100	*PT Pupuk Kujang*
Krakatau Steel Grup	16.385.220	14.563.884	*Krakatau Steel Group*
PT Energi Agro Nusantara	1.941.494	1.145.161	*PT Energi Agro Nusantara*
PT Bhirawa Steel	1.643.968	1.799.783	*PT Bhirawa Steel*
Lainnya	7.014.090	2.769.925	*Others*
Jumlah	**687.811.870**	**733.556.515**	***Total***
Transmisi gas			***Gas transmision***
PLN	77.151.612	69.749.736	*PLN*
KPI	39.818.082	41.782.875	*KPI*
PEP	33.175.856	37.903.018	*PEP*
PKG	26.453.049	21.256.505	*PKG*
PUSRI	25.357.824	24.860.883	*PUSRI*
PT PLN Indonesia Power	14.017.091	15.615.914	*PT PLN Indonesia Power*
PT Pupuk Kalimantan Timur	11.515.961	11.727.942	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Lainnya	1.051.834	4.270.356	*Others*
Jumlah	**228.541.309**	**227.167.229**	***Total***
Penjualan minyak dan gas			***Oil and gas sales***
PLN	33.260.674	47.869.570	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	12.235.192	22.274.048	*PT Pertamina Patra Niaga*
Jumlah	**45.495.866**	**70.143.618**	***Total***
Pemrosesan gas			***Gas processing***
PT Pertamina Patra Niaga	23.632.819	24.096.260	*PT Pertamina Patra Niaga*
PHE	1.380.240	1.628.641	*PHE*
Jumlah	**25.013.059**	**25.724.901**	***Total***

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pendapatan (Catatan 27) (lanjutan)

Revenues (Note 27) (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Transportasi minyak			***Oil processing***
PT Pertamina Hulu Rokan	138.081.349	126.044.685	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PEP	19.474.430	16.916.518	*PEP*
Jumlah	**157.555.779**	**142.961.203**	***Total***
Jasa regasifikasi			***Gas regasification***
PLN	118.588.744	105.427.661	*PLN*
PT Pertamina Trans Kontinental	10.687.692	9.213.402	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PHE	1.740.766	1.849.479	*PHE*
PIM	8.788.842	5.607.410	*PIM*
PT Pertamina Patra Niaga	6.111.035	7.166.007	*PT Patra Niaga*
Lainnya	1.102.069	330.687	*Others*
Jumlah	**147.019.148**	**129.594.646**	***Total***
Jasa konstruksi dan pemeliharaan			***Construction and maintenance services***
PT Pertamina Hulu Rokan	22.218.529	19.443.573	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina Patra Niaga	22.562.349	12.413.871	PT Pertamina Patra Niaga
PHE	2.007.770	-	*PHE*
PT Kilang Pertamina Balikpapan	2.732.739	2.735.356	*PT Kilang Pertamina Balikpapan*
KPI	2.606.299	2.243.972	*KPI*
PEP	1.730.292	1.718.620	*PEP*
Lainnya	3.396.772	4.210.173	*Others*
Jumlah	**57.254.750**	**42.765.565**	***Total***
Jasa jaringan telekomunikasi			***Telecommunication network services***
Pertamina	-	3.082.761	*PLN*
PHE	747.352	160.500	*PHE*
Lainnya	335.538	991.642	*Others*
Jumlah	**1.082.890**	**4.234.903**	***Total***
Jumlah	**1.349.774.671**	**1.376.148.580**	***Total***
Persentase dari total pendapatan konsolidasian	33,95%	36,32%	*Percentage from total consolidated revenues*
Pembelian gas bumi (Catatan 28)			***Purchases of natural gas (Note 28)***
PEP	533.715.612	463.887.329	*PEP*
PHE	281.415.538	245.728.799	*PHE*
PT Pertamina Patra Niaga	11.781.447	10.970.085	*PT Pertamina Patra Niaga*
SKK Migas/Ditjen Migas	7.240.358	90.919.233	*SKK Migas/Ditjen Migas*
Pertamina	1.886.778	3.359.323	*Pertamina*
Jumlah	**836.039.733**	**814.864.769**	***Total***
Persentase dari total beban pokok pendapatan konsolidasian	25,51%	26,88%	*Percentage from total consolidated cost of revenues*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Transaksi pembelian gas kepada SKK Migas/Ditjen Migas merepresentasikan tambahan provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang diakui oleh Grup secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan *unutilised gas volume* /sesuai dengan Kepmen ESDM No. 76K/2025 dan No.282K/2025 (Catatan 18 dan 36c).

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 24,34% dan 24,04% dari total aset konsolidasian.

Piutang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo piutang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 2,15% dan 2,53% dari total aset konsolidasian.

Uang Muka
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo uang muka pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,86% dan 0,00% dari total aset konsolidasian.

Piutang sewa pembiayaan
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo piutang sewa pembiayaan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 1,24% dan 1,30% dari total aset konsolidasian.

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Gas purchase transactions to SKK Migas/Ditjen Migas represents additional provisions for adjustments to the purchase price of certain natural gas in which periodically recognized by the Group based on estimation in accordance with the addition of unutilised gas volumes based on Kepmen ESDM No. 76K/2024 and No.282K/2025 (Notes 18 dan 36c).

Significant balances with related parties are as follows:

Cash and cash equivalents and restricted cash
As of December 31, 2025 and December 31, 2024,, the balances of cash and cash equivalents and restricted cash placed with related parties amounted to 24.34% and 24,04%, respectively, of total consolidated assets.

Trade receivables
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of trade receivables from related parties amounted to 2.15% and 2.53%, respectively, of total consolidated assets.

Advances
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of advances from related parties amounted to 0.86% and 0.00%, respectively, of total consolidated assets.

Finance lease receivable
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of finance lease receivable from related parties amounted to 1.24% and 1.30%, respectively, of total consolidated assets.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Piutang lain-lain dan piutang lain-lain jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo piutang lain-lain pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% dari total aset konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo piutang lain-lain jangka panjang pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% dari total aset konsolidasian.

Utang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 5,59% dan 5,33% dari total liabilitas konsolidasian.

Utang lain-lain
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% dari total liabilitas konsolidasian.

Pinjaman
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang dipinjamkan dari pihak berelasi, termasuk penerusan pinjaman, pinjaman pemegang saham, dan pinjaman bank jangka pendek masing-masing sebesar 10,01% dan 12,41% dari total liabilitas konsolidasian.

Kompensasi dan imbalan lain

Grup memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant balance with related parties are as follows: (continued)

Other receivables and other long-term receivables

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of other receivables from related parties amounted to 0.00% and 0.00%, respectively, of total consolidated assets. As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of other long-term receivables from related parties are amounted to 0.00% and 0.00% respectively, of total consolidated assets.

Trade payables
As of Desember 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of trade payables due to related parties amounted to 5.59% and 5.33%, respectively, of total consolidated liabilities.

Other payables
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of other payables due to related parties amounted to 0.00% and 0.00%, respectively, of total consolidated liabilities.

Loans
As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the balances of long-term and short-term loans due to related parties, including two-step loans, shareholder loan and short-term bank loans, amounted to 10.01% and 12.41%, respectively, of total consolidated liabilities.

Compensation and other benefits

The Group provided compensation and other benefits to Commissioners and Directors of the Group with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Dewan Komisaris	2.111.067	6.365.679	*Board of Commissioners*
Direksi	5.123.807	11.622.426	*Directors*
Total	**7.234.874**	**17.988.105**	***Total***

34. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Sejak tahun 2016, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk tidak mengalokasikan anggaran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK"), sehingga Perusahaan hanya melaksanakan penagihan pada pinjaman yang sedang bergulir dan menyelesaikan kontrak yang sudah ditandatangani dengan menggunakan sisa alokasi laba bersih tahun 2012. Perusahaan juga menetapkan kebijakan dengan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dananya berasal dari anggaran yang ditetapkan sebagai biaya yang dananya dikelola di rekening terpisah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat beban atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada operasi berjalan yang disajikan pada akun "Beban pokok pendapatan serta Beban umum dan administrasi - tanggung jawab sosial dan bina lingkungan" pada laba rugi masing-masing sebesar USD 3.741.996 dan USD3.891.306.

Dana yang berasal dari anggaran Perusahaan yang penetapannya disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut ditempatkan dalam rekening bank terpisah. Saldo dana dalam rekening bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah USD108 dan USD64.227 yang dilaporkan sebagai bagian kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Since 2016, the Company established a policy not to allocate budget to the Micro Business and Small Business Funding ("UMK") Program, so the Company's only remaining activity for this program is to collect the remaining loans being rolled over and to complete the remaining contract that was already signed using the remaining allocation of net profit from 2012. The Company also established a policy to implement a Social and Environmental Responsibility Program to be funded from the budget set as the cost of funds deposited into a separate account.

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company has recorded the Corporate Social and Environmental Responsibility expense in current operations which is presented as part of "Cost of revenues and General and administrative expenses - Social and environmental responsibility" account in profit or loss amounted to USD3,741,996 and USD3,891,306 respectively.

The funds, which originated from the Company's budget and have been approved by the Board of Commissioners, are deposited into designated bank accounts. The balance of such funds as of December 31, 2025 and 2024 were USD108 and USD64,227, respectively, which are reported as part of cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a. PJBG Pemasok

Grup harus membeli dan membayar jumlah pembelian minimum per tahun/kuartal/bulan untuk setiap PJBG dengan pemasok dari kontraktor PSC pada masing-masing lapangan gas sesuai rincian di bawah ini. Perbedaan antara jumlah kuantitas pembelian nyata dan kuantitas pembelian minimum dicatat sebagai "*Make-Up Gas*", yang dapat direalisasikan setiap saat jika kuantitas minimum atau bagian dari jumlah kontrak tahunan/kuartalan/bulanan (mana yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing PJBG) telah diambil pada tahun/kuartal/bulan tertentu selama jangka waktu perjanjian. Saldo "*Make-Up Gas*" disajikan sebagai bagian dari "Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements:

a. Suppliers GSPA

The Group is required to purchase and pay for a minimum purchase quantity per year/quarter/month for each of the GSPA with the gas suppliers from the PSC contractors of each gas field as stated below. The difference between the purchased quantity and the minimum purchase quantity is recorded as "Make-Up Gas", which can be realised any time if the minimum quantity or part of annual/quarterly/monthly contract quantity (which is applicable in accordance with the respective GSPA) has been taken or at a specified year/quarter/month during the period of the agreement. The outstanding balance of the "Make-Up Gas" is presented as part of "Advances" in the consolidated statements of financial position.

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/ *Gas field***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
EMP Bentu Limited	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Pelalawan /*Mutual Agreement of Gas Delivery for Households in Pelalawan*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	1 November/ *November 1,* 2022	Berakhirnya PSC Bentu/*Completion of Bentu PSC*	-
EMP Bentu Limited	PJBG untuk Jaringan Distribusi Gas Sektor Rumah Tangga di Kota Dumai/ *Gas and Sales Purchase Agreement for Gas Distribution Netork Residential Sector ini Dumai*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	19 November/ *November 19,* 2019	23 Juli/*July 23,* 2029	-
Energy Equity Epic Sengkang Pty Ltd.	PJBG Jaringan Gas Rumah Tangga ("Jargas") Sengkang dan Wajo/*GSPA Jargas Sengkang and Wajo*	Wilayah kerja Sengkang/ *Sengkang working field*	0,6 MMSCFD	8 September/ *September 8,* 2020	17 Agustus/ *August 17,* 2032	-
Husky CNOOC Madura Ltd. ("HCML")	PJBG/*GSPA* HCML	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	20 MMSCFD (*Gas in* 13 Nov/*Nov 13,* 2017) 60 MMSCDF (mulai/*start from* 14 Nov/*Nov* 14, 2017)	30 Oktober/ *October 30,* 2007	31 Oktober/ *October 30,* 2032	-
HCML	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Lapangan MDA-MBH-MDK (3M)/*MDA-MBH-MDK field (3M)*	5 MMSCFD	21 Oktober/ *October 21, 2022*	31 Oktober/ *October 31, 2032*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/ *Gas field*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
HCML	Kesepakatan Bersama untuk Amendemen PJBG Jargas /*Mutual Agreement for Amendment of GSPA Jargas*	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	1,55 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	17 Agustus 2032/*August 17, 2032*	-
Joint Operating Body PSC Tomori (PT Medco EP Tomori Sulawesi, Tomori E&P Limited, dan/*and* PT PHE Tomori Sulawesi)	Kesepakatan Bersama Jargas Banggai/*Mutual Agreement Jargas Banggai*	Lapangan di wilayah kerja Senoro-Tolli/ *Field in Senoro-Tolli working area*	0,2 MMSCFD	20 Desember/ *December 20, 2019*	23 Juli/ *July 23, 2029*	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang dibangun oleh Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya/*Memorandum of agreement gas Supply Through the Government-Constructed Natural Gas Distribution Network for Household and Small-Scale Customers in the Administrative Areas of Bojonegoro Regency, Jombang Regency, and Surabaya City.*	Lapangan TSB/ *TSB field*	0,2 MMSCFD	9 September/ *September 9, 2022*	13 November/ *November 13, 2030*	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Jargas Jombang, Bojonegoro, dan Surabaya/*Mutual Agreement of Gas and Sales Purchase for Jargas Jombang, Bojonegoro, and Surabaya*	Lapangan TSB/ *TSB field*	Jombang 0,2 MMSCFD Bojonegoro 0,2 MMSCFD Surabaya 0,1 MMSCFD Gresik 0.2 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	13 November/ *November 13,* 2030	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Medco EP Grissik Ltd.	PJBG Jargas dan BBG/*GSPA Jargas and BBG*	Blok Koridor/ *Corridor Block*	Jargas 0,5 MMSCFD 1 Jan/*Jan* 1, 2020 – 26 Agu/*Aug* 26, 2020 0,8 MMSCFD 27 Agu/*Aug* 2020 – 31 Des/*Dec* 31, 2021 1 MMSCFD 1 Jan/*Jan* 1, 2022 – 17 Agu/*Aug* 17, 2022 1,4 MMSCFD 18 Agu/*Aug* 18, 2022 – 31 Des/*Dec* 31, 2028 BBG 2,47 MMSCFD 2020 3,39 MMSCFD 2021 4,82 MMSCFD 2022 7,02 MMSCFD 2023 9,57 MMSCFD 2024	1 Januari/ *January 1,* 2020	31 Desember/ *December 31*, 2028	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Medco EP Grissik Ltd.	PJBG/*GSPA*	Blok Koridor/ *Corridor Block*	335 BBTUD 1 Okt/Oct-19 Des/*Dec* 19, 2023 410 BBTUD 20 Des/*Dec* 19, 2023-31 Des/*Dec* 19, 2024 271 BBTUD 2025 238 BBTUD 2026 185 BBTUD 2027 129 BBTUD 2028	1 Oktober/ *October 1,* 2023	31 Desember 2028/ *December 31, 2028*	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau tanggal penandatangan an PJBG, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or the signing date of the GSPA, whichever comes first.*
Medco Madura Offshore Pty. Ltd.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase*	Lapangan/*Field* Meliwis	1 Sep/*Sep* 1, 2023 – 31 Des/*Dec* 31, 2023 = 13,1 BBTUD 2024 = 16,1 BBTUD 2025 = 22,2 BBTUD 2026 = 22,1 BBTUD 2027 = 13,7 BBTUD Total Jumlah Kontrak/*Total Contract Quantity* = 28,3 TBTU	1 September /*September 1, 2023*	3 Desember /*December 3,* 2027	Dokumen kesepakatan sementara selama amendemen PJBG Lapangan Meliwis dalam proses finalisasi/*Interim document until the amendment of GSPA Meliwis Field is finalised*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Medco Madura Offshore Pty. Ltd.	PJBG/*GSPA* Santos Maleo dan/*and* Peluang	Lapangan Maleo dan Lapangan Peluang / *Maleo Field and Peluang Field*	2024- 2025 = 8,5 BBTUD 2026 = 5 BBTUD 2027 = TBC Total Jumlah Kontrak/Total Contract Quantity = 8,0 TBTU	31 Mei/*May 31,* 2005	3 Desember /*December 31,* 2027	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Minarak Brantas Gas Inc.	Kesepakatan Bersama Kelanjutan Pasokan Gas/ *Agreement of Gas Supply Continuity*	Lapangan Brantas/ Brantas *field*	16,6 BBTUD (20 Apr/*Apr* 20, 2020 – 31 Jul/*Jul* 31, 2023) 0,35 BBTUD (1 Agt/*Aug* 1, 2023 – 31 Des/*Dec* 31, 2025)	20 April/ *April 20*, 2020	31 Desember/ *December* 31, 2025	-
Minarak Brantas Gas Inc.	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kabupaten Sidoarjo/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Sidoarjo Regency*	Lapangan Brantas/ Brantas *field*	0,6 MMSCFD 8 Sep 2020 – 31 Des/Dec 2021 0,3 MMSCFD 1 Jan 2022 – 26 Apr 2028 0,1 MMSCFD 27 Apr 2028 – 7 Sep 2030	8 September/ *September 8, 2020*	7 September / *September* 7, 2030	-
PT. Pertamina (Persero)	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Bumi Jambaran Tiung Biru ("JTB") /*Joint Cooperation Agreement of Jambaran Tiung Biru ("JTB") Gas Operation and Delivery*	Lapangan JTB/*JTB Field*	172 MMSCFD	20 September/ *September 20*, 2022	31 Desember/ *December 31,* 2025	Berlaku sampai dengan berakhirnya tanggal berakhir atau ditandatanganinya Novasi PJBG antara PEPC dengan Pertamina dan PGN, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end date or the signing date of Novation GSPA between PEPC, Pertamina, and PGN, whichever come first*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PetroChina Jabung Ltd.	PJBG Jargas Kabupaten Tanjung Jabung Barat / GSPA *Citygas West Tanjung Jabung Regency*	Wilayah kerja Jabung/ *Jabung working area*	0,2 MMSCFD	16 Desember/ *December 16*, 2022	28 Februari/ *February 28*, 2043	Berlaku sampai dengan berakhirnya produksi gas atau berakhirnya PSC Jabung, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end of gas production or the end of Jabung PSC, whichever come first*
PT Medco E&P Indonesia	PJBG untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Kota Palembang, Sumatera Selatan/ *GSPA for Residential Demand in Palembang, South Sumatera*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan / *Field in South Sumatera working area*	0,4 MMSCFD	8 September/ *September 8*, 2020	7 September/ *September 7*, 2030	-
PT Medco E&P Indonesia	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas Kota Tarakan/*Mutual Agreement of City Gas Distribution in Tarakan*	Lapangan di Wilayah Kerja Tarakan/*Field in Tarakan working area*	0,3 MMSCFD	14 Januari/ *January 14,* 2016	sampai berakhirnya PSC Tarakan/ *Until the end of Tarakan PSC*	Berlaku sampai dengan berakhirnya produksi gas atau berakhirnya PSC Tarakan, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end of gas production or the end of Tarakan PSC*
PT Medco E&P Indonesia	PJBG untuk Jargas Musi Banyu Asin/ GSPA *of City Gas Distribution in Musi Banyu Asin*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan/*Field in South Sumatera working area*	0,25 BBTUD	25 September/ *September 25*, 2017	19 Juli/*July 19*, 2027	-
PT Pema Global Energi	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas dari Wilayah Kerja "B: untuk Kebutuhan Pelanggan PGN dan/atau Afiliasinya/ *Mutual Agreement of Gas Delivery from "B" Working Area to the Customer of PGN and its Affiliation*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	17 BBTUD (2024) 21 BBTUD (2025) 27 BBTUD (2026) 40 BBTUD (2027) 38 BBTUD (2028) 37 BBTUD (2029) 35 BBTUD (2030) 34 BBTUD (2031)	1 Januari / *January 1*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2031	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT Pema Global Energi	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas WK B untuk Jargas/*Mutual Agreement of WK B Gas Sales and Purchase Offshore for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	Aceh Utara 0,2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0,2 MMSCFD Lhokseumawe-Lhoksukon 0,5 MMSCFD Medan 0,2 MMSCFD Sejak 1 Des 2022/*since 1 Dec 2022* (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja *North Sumatera Offshore* ("NSO")/*In total with volume from North Sumatera Offshore ("NSO") working area)*	18 Mei/ *May* 18, 2021	26 Agustus/ *August* 26, 2030	-
PEP	PJBG Sumatera Selatan-Jawa Barat/*GSPA South Sumatra-West Java*	DOH Sumatera Selatan/*South Sumatera*	1.006 TSCF	26 Juni/ *June 26,* 2003	31 Desember/ *December 31,* 2025	Berlaku sampai dengan kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PEP	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas/*Mutual Agreement of City Gas distribution*	Lapangan gas bumi PEP/*Gas field of PEP*	5,1 MMSCFD	sesuai *BA Gas in* masing-masing penugasan/ *In accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	31 Desember/ *December 31, 2024*	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG Jargas masih dalam proses pembahasan/ *Up to the date of this financial statements, the amendment of GSPA Jargas is ongoing.*
PEP	Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan PJBG PEP Medan	Lapangan gas bumi PEP Aset 1/*Gas field of PEP Asset 1*	4,45 MMSCFD 2025 5,87 MMSCFD 2026 11,01 MSCFD 2027 10,81 MMSCFD 2028 9,78 MMSCFD 2029	1 Januari /*January 1,* 2025	31 Desember / *December 31,* 2029	Dokumen kesepakatan sementara sampai Amendemen PJBG untuk Kebutuhan PGN Medan ditandatangani/ *Bridging document until the Amendment of GSPA for PGN Medan is signed*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PEP	Berita Acara Perpanjangan KB	Lapangan gas bumi PEP *Region* Jawa Bagian Barat/*Gas field of PEP West Java Region*	12 MMSCFD 2025 15 MMSCFD 2026 17 MMSCFD 2027-2029	1 Januari/ *January 1,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2029	Dokumen kesepakatan sementara sampai PJBG PEP Zona 7 ditandatangani/ *Bridging document until the GSPA* PEP *Zone 7 is signed*
PEPC	PJBG untuk Jargas Lamongan/ *GSPA for City Gas Distribution in Lamongan*	Wilayah kerja Cepu/*Cepu working area*	0,2 MMSCFD	1 Januari/ *January 1,* 2023	12 September/ *September 12,* 2029	-
PT PHE Jambi Merang	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Wilayah kerja Jambi Merang/*Jambi Merang working field*	34,5 BBTUD	10 Februari/ *February 10*, 2019	31 Desember/ *December 31*, 2025	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT PHE Jambi Merang	PJBG dari Wilayah Kerja Jambi Merang untuk Kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga/ *PJBG from the Jambi Merang Working Area for the Natural Gas Requirements of Household Consumers*	Wilayah kerja Jambi Merang/ *Jambi Merang working area*	Batam 0,1 MMSCFD Musi Banyuasin 0,1 MMSCFD Muaro Jambi 0,1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/*in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	26 Agustus /*August 26*, 2030	-
PT PHE NSO	Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan PJBG PHE NSO/ *Minutes of Meeting Recording the Agreement to Extend the Gas Sales and Purchase Agreement (GSPA) – PHE NSO*	Lapangan di wilayah kerja NSO/ *Field in NSO working area*	8,48 BBTUD 2025	1 Januari/ *January* 1, 2025	31 Desember/ *December 31,* 2025	Dokumen kesepakatan sementara sampai Amendemen PJBG untuk Kebutuhan PGN dan/atau Afiliasi ditandatangani/ *Bridging document until the Amendment of GSPA for PGN and/or Afilltation is signed*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PT PHE NSO	Kesepakatan Bersama NSO untuk Jargas Lhokseumawe dan Lhoksukon/*Mutual Agreement of NSO Gas Sales and Purchase for Jargas Lhokseumawe and Lhoksukon*	Lapangan di wilayah kerja NSO /*Field in NSO working area*	Lhokseumawe-Lhoksukon 0,5 MMSCFD (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area)*	1 Januari/ *January 1*, 2024	7 September/ *September 7*, 2030	-
PT PHE NSO	PJBG NSO untuk Jargas/*GSPA NSO for Gas Sales and Purchase for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja NSO/*Field in NSO working area*	Aceh Utara 0,2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0,2 MMSCFD Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area*	3 November/ *November 3,* 2019	23 Juli/ *July 23,* 2029	-
PHE Ogan Komering	Perjanjian Jual Beli Gas/ *Gas Sales and Purchase Agreement*	Wilayah kerja Ogan Komering/ *Ogan Komering working field*	3,99 BBTUD 2025 3,57 BBTUD 2026 3,07 BBTUD 2027 2,64 BBTUD 2028	1 Januari/ *January* 1, 2025	31 Desember/ *December 31,* 2028	-
PHE *West Madura Offshore* ("WMO"), dan Kontraktor WMO lainnya/ *and other WMO Contractors*	PJBG/*GSPA*	Wilayah kerja WMO/*WMO working field*	30 BBTUD (2019-2020) 19 BBTUD (2021-2027)	19 Desember/ *December 19,* 2006	31 Desember/ *December 31*, 2027	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PHE WMO, dan Kontraktor WMO/ *and WMO Contractors*	PJBG /GSPA *City Gas Surabaya*	Wilayah kerja WMO/*WMO working area*	0,9 BBTUD	23 November/ *November 23,* 2015	31 Desember/ *December 31*, 2034	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Balikpapan/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Balikpapan*	Wilayah kerja Kalimantan Timur/ *East Kalimantan working Area*	0,5 MMSCFD	25 Oktober/ *October 25*, 2020	24 Oktober/ *October 24*, 2028	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Kalimantan Timur/ *East Kalimantan working Area*	0,1 MMSCFD	17 Februari/ *February 17*, 2021	26 Agustus/ *August 26*, 2030	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Bontang/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Bontang*	Wilayah kerja Mahakam/ *Mahakam working Area*	0,5 MMSCFD	8 September/ *September 8*, 2020	7 September/ *September 7*, 2030	
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Mahakam/ *Mahakam working Area*	0,2 MMSCFD	6 Februari/ *February 6*, 2020	23 Juli/*July 23*, 2029	
PIM Area Sumatera Bagian Utara/ *Northern Sumatra Area*	Novasi dan Amendemen PJBG antara Pertamina, PIM dan PTGN/ *Novation and Amendment of GSPA between Pertamina, PIM and PTGN*	Wilayak Kerja Blok A PT Medco E&P Malaka/*A PSC Block Working Field with PT Medco E&P Malaka*	54 BBTUD	1 Juni/*June* 2020	31 Agustus/ *August 31,* 2032	-
PT Sele Raya Belida	Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Gas Sele Raya Belida/*Amendment and Restatement Gas and Sales Purchase Agreement*	Lapangan gas Cantik/*Cantik gas field*	2,5 BBTUD 1 Nov/*Nov* 1, 2020-31 Des/*Dec* 31, 2022 3,38 BBTUD 2023-2030	1 November/ *November 1*, 2020	31 Desember/ *December 31*, 2030	-
Triangle Pase Inc. ("TPI")	PJBG/GSPA	Blok Pase/*Pase Block*	5 BBTUD 2019 6 BBTUD 2020 7 BBTUD 2021-2032	15 Desember/ *December 15*, 2017	Sampai dengan berakhirnya PSC TPI/ *Until the end of TPI's PSC*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	Perjanjian/ *Agreements*	Lapangan gas/*Gas field*	Volume per tahun/ *Volume per year*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
PetroChina Jabung Ltd.	PJBG/*GSPA*	Wilayah kerja Jabung/ *Jabung working area*	1 Sep/*Sep 1*, – 31 Des/*Dec 1*, 2023 = 10 BBTUD 2025 = 6,25 BBTUD 2026 = 3,15 BBTUD	Sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Tanggal Dimulai/ *in accordance with the Commencement Date Minutes*	31 Desember/ *December 31,* 2026	-
Petrogas (Basin) Ltd	PJBG Wilayah Kerja Kepala Burung untuk Jaringan Distribusi Gas Bumi Rumah Tangga Di Sorong / *GSPA Of Kepala Burung Working Area For Household Gas Distribution In Sorong*	Blok Kepala Burung/ Kepala Burung *block*	0,2 MMSCFD	15 Oktober/*October 20,* 2020	7 September/ *September 7*, 2030	-
PT Medco E&P Indonesia	PJBG/*GSPA*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan / *Field in South Sumatera working area*	3 BBTUD Tahun Kontrak ke-1 sampai dengan ke-3/ *Contract Year 1 - 3* 2,07 BBTUD Tahun Kontrak ke-4/*Contract Year 4* 1 BBTUD Tahun Kontrak ke-5/*Contract Year 5*	Sesuai berita acara tanggal dimulai/ *In accordance with minutes of starting date*	4 tahun sejak tanggal dimulai/ *4 years since the starting date*	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Medco EP Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., Star Energy (Kakap) Ltd. ("West Natuna Group")	PJBG West Natuna Group/*GSPA West Natuna Group*	West Natuna Blok	Sampai dengan/*Up to* 27 BBTUD	22 Agustus/ *August* 22, 2025	30 Juni/ *June, 2026*	
West Natuna Exploration Ltd.	PJBG WNEL/*GSA WNEL*	Wilayah Kerja Duyung	35 BBTUD (Tanggal Dimulai – 31 Des 2032/*Start Date – 31 Dec 2032*) 29 BBTUD (2033) 26 BBTUD (2034) 20 BBTUD (2035) 10 BBTUD (2036) 7 (1 – 15 Jan 2037)	1 November 2025	15 Januari/ *January 15, 2037*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

b. PJB LNG dengan Pemasok

Untuk memenuhi komitmen Grup kepada pelanggan yang sudah terkontrak, Grup menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian LNG dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. LNG SPA with Suppliers

To fulfill the Group commitment's to the contracted customers, The Group entered into LNG Sales and Purchase Agreement with several suppliers as follows:

Counterparts	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
			Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Tangguh PSC *Contractor Parties*	Perjanjian Jual Beli LNG/*Master Sale and Purchase Agreement*	Volume disepakati dalam setiap CN/ *Volume agreed upon in each CN*	19 Juni/*June 19*, 2024	18 Juni/*June 18*, 2029	PGN sebagai Pembeli / *PGN as Buyer*
PT. Pertamina (Persero)	Perjanjian Jual Beli LNG/*Master Sale and Purchase Agreement*	Volume disepakati dalam setiap CN/ *Volume agreed upon in each CN*	14 Oktober /*October 14*, 2022	13 Oktober /*October 13*, 2027	PGN sebagai Pembeli / *PGN as Buyer*
Donggi Senoro LNG	Perjanjian Jual Beli LNG/*Master Sale and Purchase Agreement*	Volume disepakati dalam setiap CN/ *Volume agreed upon in each CN*	8 Agustus/*August 8*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2029	PGN sebagai Pembeli / *PGN as Buyer*

c. PJBG Pelanggan

Dalam menyalurkan gas kepada pelanggan, PGN memiliki komitmen volume penyaluran gas kepada pelanggan. Komitemen tersebut tertuang di dalam perjanjanjian jual beli gas antara PGN dengan Pelanggan dengan volume terkontrak sebesar 1,150 BBTUD dan kisaran harga jual sebesar USD7,22-16,33/MMBTU.

c. Customers GSPA

In delivering gas to customers, PGN has a commitment to the volume of gas distribution to customers. This commitment is stated in the gas sales agreement between PGN and the Customer, with a contracted volume of 1,150 BBTUD and estimated range gas price of USD7.22-16.33/MMBTU.

d. Perjanjian Pengangkutan Gas

Grup menandatangani kontrak-kontrak PPG dengan beberapa transporter dengan rincian sebagai berikut :

d. Gas Transportation Agreement

The Group entered into GTA with several transporter with details as follows :

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Pertagas	Amendemen IV atas PPG Bumi melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan PKG/ *Amendment IV to the GTA between Pertagas and PKG*	Gresik-Pegerungan	85,00 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1*, 2017 - 31 Des/*Dec 31,* 2026	1 Juli/ *July* 1, 2017	31 Desember/ *December 31*, 2026	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	Perjanjian/ *Agreements*	Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	Keterangan/ *Remarks*
Pertagas	Amendemen Keempat PPG dengan PUSRI /*Fourth amendmend of Natural GTA with PUSRI*	Grissik - PUSRI	70 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2019- 31 Des/*Dec 31*, 2023 59 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2024- 31 Des/*Dec 31*, 2024 74 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2025- 31 Des/*Dec 31*, 2025 65 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2026- 31 Des/*Dec 31*, 2026 58 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2027- 31 Des/*Dec 31*, 2027 49 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2028- 31 Des/*Dec 31*, 2028 45 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2029- 31 Des/*Dec 31*, 2030 29 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2031- 31 Des/*Dec 31*, 2032 9 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2033- 31 Des/*Dec 31*, 2034	1 Januari/ *January 1*, 2019	31 Desember/ *December 31,* 2034	-
Pertagas	Amendemen Kedua PPG dengan PUSRI - PT Tropik Energi Panda ("TEP") untuk Area Sumatera Bagian Selatan /*Third amendmend of GTA with PUSRI - TEP for Southern Sumetera Area*	TEP - PUSRI	9,50 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1*, 2019 - 29 Jul/*Jul 29*, 2021 6,57 MMSCFD 30 Jul/*Jul 30*, - 31 Des/*Dec 31*, 2021 7,39 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2022 - 18 Mei/*May 18*, 2023 0,82 MMSCFD 19 Mei/*May 19*, 2023 - 31 Des/*Dec 31*, 2024 8,21 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2025 - 31 Des/*Dec 31*, 2027	1 Agustus/ *August 1,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2027	-
Pertagas	Amendemen PPG dengan KPI/*Amendmend of GTA with KPI*	Duri - Dumai	21,09 – 35,20 MMSCFD 14 Apr/*Apr 14*, 2019 - 31 Des/*Dec 31,* 2019 35,20 - 44 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2020 - 31 Des/*Dec 31,* 2020 46,20 - 36,30 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2021 - 31 Des/*Dec 31,* 2025 36,30 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2026 - 31 Des/*Dec 31,* 2028	14 April/ *April 14*, 2019	31 Desember/ *December 31,* 2028	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ ***Transporter***	**Perjanjian/** ***Agreements***	**Pipa Transmisi/** ***Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/** ***Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/** ***Remarks***
				Awal/ ***Start***	**Akhir/*End***	
Pertagas	Amendemen III PPG dengan PEP untuk Sumatera bagian Selatan /*Amendment III of GTA with PEP for Southern Sumatera Area*	Betung-Pusri	0,97 – 161,81 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1,* 2017 - 31 Des/*Dec 31,* 2017 0,97 - 156,08 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2018 - 31 Des/*Dec 31,* 2018 0,97 - 179,07 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2019 - 31 Des/*Dec 31,* 2019 0,97 - 152,51 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1*, 2020 - 30 Sep/*Sep 30*, 2020 1,27 - 152,81 MMSCFD 1 Okt/*Oct 1,* 2020 - 31 Des/*Dec 31,* 2020 1,27 - 168,46 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2021 - 31 Des/*Dec 31,* 2021 1,27 - 144,19 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2022 - 31 Des/*Dec 31,* 2022 1,27 - 101,38 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2023 - 31 Des/*Dec 31,* 2023 1,27 - 109,62 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2024 - 31 Des/*Dec 31,* 2024 1,27 - 87,36 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2025 - 31 Des/*Dec 31,* 2025 1,27 - 68,42 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2026 - 31 Des/*Dec 31,* 2026 1,27 - 53,16 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2027 - 30 Jun/*Jun 30,* 2027	1 Juli 2017/*July 1, 2017*	30 Juni 2027/*June 30, 2027*	-
Pertagas	Amendemen atas PPG dengan PKT Timur untuk Area Kalimantan Timur/ *Amendment of GTA with PKT for Eastern Kalimantan Area*	Tanjung Santan - SKG Bontang	191,89 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2020 - 31 Des/*Dec 31,* 2021 273,04 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2022 - 31 Des/*Dec 31,* 2022 320,63 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2023 - 31 Des/*Dec 31,* 2028	1 Januari 2020/ *January 1,* 2020	31 Desember 2028/ *December 31,* 2028	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	Perjanjian/ *Agreements*	Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/*End*	
Pertagas	Amendemen PPG antara Pertagas dengan PEP untuk Area Sumatera Bagian Utara/ *Amendment to the GTA between Pertagas and PEP for the Northern Sumatra Area*	Pangkalan batu – Pangkalan Brandan Wampu	4,64 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1,* 2017 - 31 Des/*Dec 31,* 2017 3,68 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2018 - 31 Des/*Dec 31,* 2018 4,28 - 4,48 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2019 - 31 Des/*Dec 31,* 2019 2,88 - 3,08 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2020 - 31 Des/*Dec 31,* 2020 3,12 - 3,32 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2021 - 31 Des/*Dec 31,* 2021 2,92 - 3,12 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2022 - 31 Des/*Dec 31,* 2022 2,23 - 2,43 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2023 - 31 Des/*Dec 31,* 2023 1,93 - 2,13 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2024 - 31 Des/*Dec 31,* 2024 1,44 - 1,64 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2025 - 31 Des/*Dec 31,* 2025 1,44 - 1,64 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2026 - 31 Des/*Dec 31,* 2026 1,44 - 1,64 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2027 - 30 Jun/*Jun 30,* 2027	1 Juli/ *July 1,* 2017	30 Juni/ *June 30,* 2027	-
Pertagas	Amendemen IV atas PPG untuk Area Jawa Bagian Timur antara Pertagas dengan PLN *Amendment IV to the GTA for the Eastern Java Area between Pertagas and PLN*	Pagerungan – Gresik	25,00 MMSCFD 12 Mar/*Mar 12,* 2014 - 30 Jun/*Jun 30,* 2018 54,00 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1,* 2018 - 31 Des/*Dec 31,* 2018 100,00 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2019 - 31 Des/*Dec 31,* 2033	12 Maret/ *March 12,* 2014	31 Desember/ *December 31,* 2033	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	Perjanjian/ *Agreements*	Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Pertagas	Amendemen kedua PPG dengan PEP terkait titik terima baru pada ruas pipa untuk Jawa bagian Barat/ *Amendment of GTA with PEP regarding a new receipt point of the pipeline segment for Western Java area.*	Cisauh – Sunyaragi	80,911 MMSCFD 1 Jul/*Jul 1,* 2017 - 31 Des/Dec 31, 2017 86,345 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2018 - 31 Des/*Dec* 2018 80,960 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2019 - 31 Des/Dec 2019 85,551 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2020 2020 - 31 Des/*Dec* 2020 76,705 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2021 - 31 Des/*Dec* 2021 60,372 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2022 - 31 Des/*Dec* 2022 49,907 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2023 - 31 Des/Dec 2023 41,735 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2024 - 31 Des/*Dec* 2024 38,291 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2025 - 31 Des/*Dec* 2025 26,417 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2026 - 31 Des/Dec 2026 13,880 MMSCFD 1 Jan/*Jan 1,* 2027 - 31 Des/*Dec* 2027	1 Juli/*July 1,* 2017	30 Juni/*June 30,* 2027	-
Pertagas	Amendemen II atas PPG antara Pertagas dengan PLN Untuk Area Sumatera Bagian Utara/ *Amandment II* to *the GTA between Pertagas and PLN for the Northern Sumatra Area*	Arun - Belawan	95,00 MMSCFD 1 Februari/February 2015 - 31 Desember/ December 2016 117,68 MMSCFD 1 Januari/January - 31 Desember/ December 2017 140,00 MMSCFD 1 Januari/January 2018 - 31 Desember/ December 2034	1 Februari/ February 2015	31 Desember/ December 2034	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	Perjanjian/ *Agreements*	Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline*	Volume kontrak/ *Contract Volume*	Jangka waktu/*Term*		Keterangan/ *Remarks*
				Awal/ *Start*	Akhir/ *End*	
Pertagas	Amendemen PPG dengan PUSRI - untuk Area Sumatera Bagian Selatan /*Amendment of GTA with PUSRI for Southern Sumetera Area*	*South Sumatera Block*- Lematang	13,66 MMSCFD 1 Ags/*Aug* 2021 - 31 Des/*Dec* 2022 20,03 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2023 21,86 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2024 15,48 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2025 13,66 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2026 15,48 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2027 25,17 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2028 21,86 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2029 19,45 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2030 16,72 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2031 15,52 MMSCFD 1 Jan - 31 Des/*Dec* 2032 12,83 MMSCFD 1 Jan - 27 Nov 2033	1 Agustus/ *August 1,* 2021	27 November 2033	-
Transgasindo	PPG / *GTA*	Grissik - Panaran	67 MMSCFD 1 Jan 2023 - 30 Sep 2023 95 MMSCFD 1 Okt/Oct 2023 - 31 Des/Dec 31, 2023 75 MMSCFD 2024-2025 0 MMSCFD* 2026-2028	26 November/ November 26, 2019	31 Desember/ *December* 31, 2028	*Volume kontrak periode 2026-2028 akan dikonfirmasi PGN paling lambat 1 Desember 2025/*Contract volume for 2026-2028 will be confirmed by PGN at the latest on December 1, 2025*
Transgasindo	PPG PGN Duri-Dumai / *GTA* Duri-Dumai	Grissik - Duri	14,79 MMSCFD 1 Jan 2023 - 29 Mei/May2023 26,867 MMSCFD 30 Mei/May2023 - 19 Des/Dec 2023 23,29 MMSCFD 20 Des/Dec - 31 Des/Dec 2025	13 November/ November 13, 2017	31 Desember/ *December 31,* 2025	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

e. Perjanjian Sewa, Operasi dan Perawatan dengan Hoegh Lampung

Pada tanggal 25 Januari 2012, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan yang berlaku dari tanggal pengiriman dan berakhir 20 tahun setelah tanggal pengiriman.

Pada tanggal 21 Februari 2014, PLI, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani Perjanjian Novasi atas *Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement* dimana hak dan kewajiban Perusahaan terkait dengan perjanjian tersebut di atas beralih ke PLI. Melalui perjanjian novasi tersebut Hoegh Lampung akan menyediakan FSRU Lampung dan melakukan proses regasifikasi selama 20 tahun dengan opsi perpanjangan untuk dua periode masing-masing lima tahun.

f. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa *Onshore Receving Facility* (“ORF”) Senipah - *Refinery Unit* (“RU”) V Balikpapan antara Pertagas dan KPI.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Pertagas dan KPI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa ORF Senipah - RU V Balikpapan ("Perjanjian Senbal") No. 198/PG0000/2020-S0. KPI menugaskan Pertagas untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasioan, dan pemeliharaan pipa penyalur gas bumi ("fasilitas") dari Senipah sampai dengan RU V Balikpapan.

Pada tanggal 4 Maret 2022, dilakukan novasi Perjanjian Senbal dari KPI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB") dengan Pertagas melalui penandatanganan Perjanjian dan Pernyataan Kembali Perjanjian Senbal No. 042/PG0000/2022-S0 yang mengatur fasilitas hanya dipergunakan oleh KPB dan dapat dialihkan kepada KPB atas persetujuan Pertagas dan KPB. Jadwal pelaksanaan penyaluran gas bumi dimulai sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2053.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. Lease, Operation and Maintenance Agreement with Hoegh Lampung

On January 25, 2012, the Company and Hoegh Lampung entered into a lease, operation and maintenance agreement starting from the delivery date until 20 years from the delivery date.

On February 21, 2014, PLI, the Company and Hoegh Lampung entered into a Novation Agreement for the Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement, where the rights and obligations related to the above agreement of the Company were transferred to PLI. Through the novation agreement, Hoegh Lampung will provide FSRU Lampung and perform regasification process for 20 years with two extension period of five years each.

f. Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the Onshore Receving Facility (“ORF”) Senipah - Refinery Unit (“RU”) V Balikpapan Pipeline Section between Pertagas and KPI.

On 27 July 27 2020, Pertagas and KPI signed a Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the ORF Senipah - RU V Balikpapan Pipeline Section ("Senbal Agreement") No. 198/PG0000/2020-S0. KPI assigned Pertagas to carry out the construction, operation, and maintenance of the natural gas distribution pipeline ("facilities") from Senipah to RU V Balikpapan.

On 4 March 2022, the Senbal Agreement was novated from KPI to PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB") with Pertagas through the signing of the Agreement and Reaffirmation of the Senbal Agreement No. 042/PG0000/2022-S0, which stipulates that the facilities are to be used dedicated by KPB and may be transferred to KPB with the consent of Pertagas and KPB. The schedule for the commencement of natural gas distribution started from 1 July 2023 until 30 June 2053.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

f. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa ORF Senipah - RU V Balikpapan ("Perjanjian Senbal") antara Pertagas dan KPI (lanjutan)

Pada tanggal 14 Maret 2024, dilakukan novasi Perjanjian Senbal kembali dari KPB ke KPI dengan Pertagas melalui penandatanganan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Senbal yang mengalihkan posisi, seluruh hak, dan kewajiban KPB sebagai pihak dalam Perjanjian Senbal dan digantikan oleh KPI.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Pertagas dan KPI mendantangani Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas yang menyepakati pengalihan kepemilikan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal masing-masing pihak dan ketentuan Pertamina.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, Pertagas dan KPI sedang mendiskusikan amendemen Perjanjian Senbal terkait biaya pemanfaatan dan jadwal penyaluran gas bumi. Aktual pengaliran gas bumi telah dimulai sejak tanggal 27 Desember 2023.

g. Perjanjian Sewa Fasilitas Kilang LNG Arun antara PAG dengan LMAN

Pada tanggal 14 April 2023, Perusahaan menandatangani Perubahan Kedua *Adendum* dan *Restated* Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang Arun No. PRJ-18/LMAN/2023, terkait dengan perpanjangan masa sewa sampai dengan 28 Desember 2035 dengan LMAN dan perubahan nilai sewa.

Sewa dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan permohonan tertulis yang harus diterima paling lambat 6 (enam) bulan oleh LMAN sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

PAG mengelola aset yang disewa tersebut, termasuk melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pengurusan perizinan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional atas objek sewa tersebut.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the ORF Senipah - RU V Balikpapan Pipeline Section between Pertagas and KPI (continued)

On 14 March 2024, the Senbal Agreement was novated back from KPB to KPI with Pertagas through the signing of a Novation Agreement over the Senbal Agreement, which transferred the position, all rights, and obligations of KPB as a party to the Senbal Agreement to be replaced by KPI.

On 27 March 2024, Pertagas and KPI signed an Agreement on the Control and Ownership of Facilities, which agreed to the transfer of ownership of the facilities in accordance with the internal provisions of each party and the regulations of Pertamina.

As the date of the issuance of these consolidated financial statement, Pertagas and KPI are discussing amendments to the Senbal Agreement related to utilization costs and the schedule for natural gas distribution. The actual first commencement of natural gas commenced on 27 December 2023.

g. Lease Agreement for the Arun LNG Plant Facilities between PAG and LMAN

On April 14, 2023, the Company signed the Second Amendment to the Addendum and Restatement of the Lease Agreement for State Property in the Form of Arun Refinery Assets No. PRJ-18/LMAN/2023, related to the extension of the rental period until December 28, 2035 with LMAN and changes in lease value.

The lease arrangement is extendable based on the agreement of the parties, with requests to extend the lease period to be submitted to the LMAN in writing no later than 6 (six) months before the end of the lease term.

PAG manages the leased assets, including carrying out maintenance, security and management of permits needed in the operational activities of the leased object.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

h. Perjanjian Sewa Menyewa *Tug Boat* antara PAG dan PT Pertamina Trans Kontinental

Pada tanggal 22 November 2021, melalui adendum III perjanjian No. PAG: 028/PAG0000/2021-S0, PAG sebagai penyewa menandatangani perjanjian dengan PTK terkait dengan penyediaan 4 unit *tug boat* yang dimiliki oleh PTK dalam area pengelolaan pelabuhan Blang Lancang. Tarif sewa rata-rata USD5.057 per hari per kapal. Jangka waktu sewa berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2031.

i. Perjanjian Kerjasama dengan CTJ

Pada tanggal 2 April 2004, Perusahaan dan CTJ mengadakan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan tanah yang terletak di Surabaya untuk dibangun pusat perbelanjaan oleh CTJ dengan nilai sekitar IDR336.245.000.000. CTJ akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun hingga 2 April 2032. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan akan menjadi milik Perusahaan.

CTJ berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan berupa pendirian bangunan dengan nilai IDR20.750.000.000, yang terdiri dari gedung kantor dan rumah dinas Perusahaan, serta pembayaran royalti sebesar IDR200.000.000 termasuk pajak penghasilan setiap tahunnya dari tanggal 20 Maret 2010 sampai 20 Maret 2031.

Perusahaan akan memberikan hak prioritas kepada CTJ untuk memperoleh hak pengelolaan tahap kedua selama 25 tahun apabila tahap pengelolaan pertama telah berakhir, yaitu pada tanggal 2 April 2032.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Lease Agreement of Tug Boat Between PAG and PT Pertamina Trans Kontinental

On November 22, 2021, through adendum III the agreement No. PAG: 028/PAG0000/2021-S0, PAG who acts as a lessee entered into an agreement with PTK related to the rental of 4 tug boats owned by PTK in the area of Blang Lancang ports. The average rental rate is USD5,057 per day per vessel. The rental period is started from January 1, 2017, up to December 31, 2031.

i. Cooperation Agreement with CTJ

On April 2, 2004, the Company entered into a cooperation agreement with CTJ. In this agreement, the Company will provide its land located at Surabaya for CTJ to build a shopping centre with total value of approximately IDR336,245,000,000. CTJ will have the rights to operate the shopping centre from the completion date of the construction of the building until April 2, 2032, or for 28 years period. At the end of the operational period, the shopping centre will be transferred to the Company.

CTJ is obliged to give compensation to the Company in the form of building compensation with total value of IDR20,750,000,000, consisting of the Company's office building and the employee's house and annual royalty payment for IDR200,000,000 including income tax from March 20, 2010 until March 20, 2031.

The Company will give priority to CTJ to obtain the right to operate and manage the second operational period for 25 years at the end of the first operational phase which is April 2, 2032.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

j. Perjanjian Kerjasama dengan Winatek

Pada tanggal 10 Maret 2005, Perusahaan dan Winatek mengadakan perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan lahan yang terletak di Jakarta Pusat kepada Winatek untuk dibangun pusat perbelanjaan dan perkantoran termasuk fasilitas parkir dan fasilitas pendukungnya, senilai sekitar IDR80.000.000.000 atau sepadan bangunan minimal 20.000 meter persegi. Winatek akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun enam bulan. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan dan perkantoran akan menjadi milik Perusahaan.

Winatek berkewajiban untuk memberikan kompensasi awal sebesar IDR18.935.005.000 kepada Perusahaan, berupa bangunan kompensasi seluas 12.250 meter persegi.

Perjanjian ini telah diamendemen sebanyak tiga kali, dan terakhir kali diamendemen pada tanggal 24 April 2018. Amendemen ini mengubah ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

1. 68 unit Ruko/Rukan seluas minimal 17.977 meter persegi dengan nilai minimal IDR22.029.000.000 dan masa pengelolaan selama 25 tahun sejak 3 November 2010 atau sampai dengan 3 November 2035.
2. Bangunan Hotel dan Kantor seluas minimal 18.046 meter persegi dengan nilai minimal IDR124.673.920.277 dan masa pengelolaan selama 25 tahun sejak 23 Juni 2019 atau sampai dengan 23 Juni 2044.
3. Menambah ketentuan mengenai Kompensasi tambahan sebesar IDR125.000.000 tidak termasuk pajak-pajak, yang dibayarkan setiap tahunnya selama 25 tahun.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j. Cooperation Agreement with Winatek

On March 10, 2005, the Company entered into a cooperation agreement with Winatek. In this agreement, the Company will provide its land located at Central Jakarta to build a shopping centre and office building including parking area and other facilities with approximately value of IDR80,000,000,000 or equal to the value at a minimum of a 20,000 square meters building. Winatek will have the rights to operate the shopping centre, starting from the agreement date until the next 28 years and six month period. At the end of the operational period, the shopping centre and office building will be transferred to the Company.

Winatek is obliged to give initial compensation amounting to IDR18,935,005,000 to the Company, in the form of building compensation with an area of 12,250 square meters.

This agreement has been amended three times, with the latest amendment made on April 24, 2018. These amendments modified the provisions with the following details:

1. *68 shop/office units with a minimum area of 17,977 meters squared and a minimum value of IDR22,029,000,000 with an operational period of 25 years from November 3, 2010, or until November 3, 2035.*
2. *Hotel and office buildings with a minimum area of 18,046 meters squared and a minimum value of IDR124,673,920,277 with an operational period of 25 years from June 23, 2019, or until June 23, 2044.*
3. *An additional provision regarding additional compensation of IDR125,000,000, excluding taxes, to be paid annually for 25 years.*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

k. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi antara Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk.

Pada tanggal 31 Januari 2020, Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk. menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi No. 008/PG0000/2020-SO untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas milik PT Cikarang Listrindo Tbk. untuk penyaluran gas dari *Metering Station* KP 72 sampai dengan *Metering Station* CL MM2100. Perjanjian ini berlaku sejak 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2028 dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan untuk tahun 2020 sebesar USD10.879/bulan dan eskalasi 2% per tahun.

l. Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas antara Perusahaan dengan PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP")

Pada tanggal 29 April 2016, Pertagas dan ENP (dahulu PT Media Karya Sentosa) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas No. 046/PG0000/2016-S0 untuk melakukan pemrosesan *feed gas*. Perjanjian berlaku sampai dengan 27 Januari 2032.

Pabrik LPG milik ENP yang berada di Gresik, Jawa Timur, dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan produk LPG di Pertamina.

m. Perjanjian Novasi Jual Beli LPG antara PSG dengan Pertamina dan Patra Niaga

Pada tanggal 2 Juli 2013, PSG menandatangani perjanjian penjualan LPG dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PSG menandatangani perjanjian novasi jual beli LPG dimana hak dan kewajiban PSG terkait dengan perjanjian tersebut beralih dari Pertamina ke Patra Niaga. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k. Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility between Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk.

On January 31, 2020, Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk. signed Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility No. 008/PG0000/2020-SO for operating and maintenance PT Cikarang Listrindo Tbk.'s facilities for supplying gas from Metering Station KP 72 until Metering Station CL MM2100. This agreement is valid since August 19, 2020 until August 18, 2028 with operation and maintenance cost amounting to USD10,879/month in 2020 and 2% escalation every year.

l. Gas Processing Agreement between the Company and PT Energi Nusantara Perkasa ("ENP").

On April 29, 2016, Pertagas and ENP (perivously known as PT Media Karya Sentosa) signed a Gas Processing Agreement No. 046/PG0000/2016-S0 to perform feed gas processing. The agreement valid until January 27, 2032.

The LPG plant owned by ENP located in Gresik, East Java, is operated to meet the demand for LPG products at Pertamina.

m. LPG Sales and Purchase Novation Agreement between PSG with Pertamina and Patra Niaga

On July 2 2013, PSG entered into a LPG sales agreement with Pertamina. The term of this agreement shall be effective from July 2, 2013 until December 31, 2027.

On August 31, 2021, PSG entered into a LPG sales and purchase novation agreement where the rights and obligations related to the agreement were transferred from Pertamina to Patra Niaga. The term of this agreement shall be effective from August 31, 2021 until December 31, 2027.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

n. Perjanjian Penyaluran *Feed Gas* antara PSG dengan Pertagas

Pada tanggal 29 Juli 2012, PSG menandatangani perjanjian Penyaluran *Feed Gas* dengan Pertagas untuk menerima penyaluran *Feed Gas* yang akan diambil dari lapangan gas bumi milik PEP.

Feed Gas tersebut selanjutnya akan diproses di fasilitas ekstraksi oleh PSG menjadi *Natural Gas Liquid* ("NGL"). Harga beli gas terproses akan dihitung berdasarkan formula tertentu. Kondensat yang diproses oleh PSG dari Prabumulih, akan diberikan kembali ke Pertagas, dimana Pertagas akan menanggung biaya pemrosesan sesuai dengan perjanjian. Pertagas akan menyalurkan *Feed Gas* selama 15 tahun untuk PSG.

Perjanjian ini telah diamendemen sebanyak dua kali, dan terakhir kali diamendemen pada tanggal 28 September 2022. Amendemen ini merubah ketentuan nilai tukar mata uang yang digunakan, alamat penagihan, jaminan penyaluran *feed gas*, serta jatuh tempo pembayaran nota tagihan.

Pada tanggal 2 November 2023, PSG dan Pertagas telah menandatangani berita acara kesepakatan harga gas sementara untuk penyaluran *feed gas* periode 27 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023. Pada tanggal 19 Desember 2023, PSG dan Pertagas telah menandatangani berita acara kesepakatan harga gas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2027.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. Feed Gas Supply Agreement between PSG and Pertagas

On July 29, 2012, PSG entered into a Feed Gas Supply agreement with Pertagas to receive Feed Gas, which will be supplied from natural gas fields owned by PEP.

The feed gas will be extracted in PSG's extraction facility into Natural Gas Liquid ("NGL"). The purchase price of the processed gas will be calculated based on a certain formula. Condensates from prabumulih that are processed by PSG will be redelivered to Pertagas and Pertagas will pay the handling fee pursuant to the agreement. Pertagas will deliver the feed gas for 15 years to PSG.

This agreement has been amended two times, and lastly amended on September 28, 2022. Those amendments changed the provision of the exchange rate of the currency used, billing address, guarantee of feed gas supply, and the due date for payment of invoices.

On November 2, 2023, a minute of agreement was signed by PSG and Pertagas regarding the temporary gas price for the feed gas supply from July 27, 2023, to December 31, 2023. On December 19, 2023, PSG and Pertagas has signed minute of agreement for gas price.for the period until December 31, 2027.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

o. Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR.

Pada tanggal 18 November 2022 Pertagas dan PHR menandatangani Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR No. 192/PG00000/2022-S0. Perjanjian berlaku sejak 18 November 2022 sampai dengan 8 Agustus 2041.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR.

On November 18, 2022 Pertagas and PHR signed Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR No. 192/PG00000/2022-S0. The agreement valid from November 18, 2022 to August 8, 2041.

p. Komitmen Kontrak Pembelian dan Penjualan LNG *Trading*

p. LNG Trading Purchase and Sales Contract Commitment

Counterparts	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Tanggal penanda-tanganan/ *Signing date***	**Jangka waktu/*Term***		
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	**Keterangan/ *Remarks***
CNTIC	Perjanjian Jual Beli LNG FOB/ *LNG Sales and Purchase Agreement FOB*	7 kargo /*cargoes*	8 September/ *September 8*, 2023	1 Januari/ *January 1*, 2024	30 November/ *November 30,* 2025	PGN sebagai penjual, *back to back* dengan PJB LNG Petronas/*PGN as seller, back to back with Petronas LNG SPA*
Petronas LNG Ltd.	Perjanjian Jual Beli LNG DES/ *LNG Sales and Purchase Agreement DES*	7 kargo /*cargoes*	8 September/ *September 8*, 2023	1 Januari/ *January 1* 2024	30 November/ *November 30,* 2025	PGN sebagai pembeli, *back to back* dengan PJB LNG CNTIC/*PGN as buyer, back to back with CNTIC LNG SPA*
Gunvor Singapore Pte. Ltd. ("Gunvor")	*Master LNG Sale and Purchase Agreement* ("MSPA") dan *Confirmation Notice* DES	8 kargo /*cargoes*	23 Juni/ *June 23*, 2022	1 Januari/ *January 1,* 2024	31 Desember/ *December 31*, 2027	PGN sebagai Penjual, /*PGN as seller*
PT Kayan LNG Nusantara	PJB LNG FOB/ *LNG SPA FOB*	3,0 BBTUD 2023 5,0 BBTUD 2024-2028	14 November/ *November 14,* 2023	1 Januari/ *January 1,* 2023	23 Februari/ *February 23,* 2028	PGN, PTGN, dan GEI sebagai pembeli/*PGN, PTGN, and GEI as buyers (multibuyer)*
KSO/*JO* PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati	PJB LNG/ *LNG SPA*	727.050 MMBTU 2.230 MMBTUD 2025-2027 120.420 MMBTU 2.230 MMBTUD 1 Januari 2028 - 23 Februari 2028	25 November/ *November 25*, 2024	1 Januari/ *January 1,* 2025	23 Februari/ *February 23,* 2028	Pada 22 April 2025, PGN telah menovasikan Perjanjian Jual Beli LNG kepada GEI/ *On April 22, 2025, PGN has innovated the LNG SPA to GEI.*

Grup telah menandatangani komitmen kontrak pembelian LNG dengan Petronas LNG Ltd (jangka waktu 2024-2025) dan PT Kayan LNG Nusantara (jangka waktu 2023-2028) serta komitmen kontrak penjualan LNG dengan CNTIC (jangka waktu 2024-2025), Gunvor (jangka waktu 2024-2027) dan KSO PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati (jangka waktu 2025-2028).

Group has signed LNG purchase contract commitment with Petronas LNG Ltd (term 2024-2025) and PT Kayan LNG Nusantara (term 2023-2028) as well as LNG sales contract commitments with CNTIC (term 2024-2025). Gunvor (term 2024-2027) and KSO PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati (term 2025-2028).

.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

p. Komitmen Kontrak Pembelian dan Penjualan LNG Jangka Panjang (lanjutan)

Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian dan penjualan tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam PSAK 237 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi untuk kontrak merugi dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain harga, pembelian dan penjualan per tanggal pelaporan. Suatu estimasi nilai manfaat ekonomis telah dihitung dan dibandingkan dengan estimasi ganti rugi apabila perusahaan tidak menjalankan komitmen sesuai kontrak.

Untuk komitmen jangka panjang atas kontrak penjualan LNG *Trading* internasional yang telah terindikasi sebagai kontrak merugi, Perusahaan mengakui nilai yang lebih rendah antara estimasi nilai manfaat ekonomis dibandingkan dengan estimasi ganti rugi sebagai provisi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang merugi pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD72.027.462.

Pada tanggal 3 November 2023, perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Gunvor. terkait pelaksanaan kontrak. Perusahaan memperkirakan kondisi *Force Majeure* tersebut untuk beberapa bulan pada tahun 2024.

Pada 29 November 2024, PGN telah menerbitkan *Final Annual Delivery Program* (“ADP”) tahun 2025 yang berisi informasi bahwa pelaksanaan *Master Sales and Purchase Agreement* (“MSPA”) dan *Confirmation Notice* (“CN”) masih terhambat dan tertunda akibat kondisi *Force Majeure*.

Pada 1 Desember 2025, PGN telah menerbitkan *Final Annual Delivery Program* (“ADP”) tahun 2026 yang berisi informasi bahwa pelaksanaan *Master Sales and Purchase Agreement* (“MSPA”) dan *Confirmation Notice* (“CN”) masih terhambat dan tertunda akibat kondisi *force majeure*.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p. Long Term LNG Purchase and Sales Contract Commitment (continued)

Management has estimated the economic benefits for all of the purchase and sale contract commitments in accordance with the criteria stated in PSAK 237 regarding provisions, contingent liabilities and contingent assets for onerous contracts by considering several parameters including price, purchases and sales as of the reporting date. An estimate of the value of economic benefits has been calculated and compared with an estimated compensation if the company does not fulfill the commitments according to the contract

For the long-term sales commitment of international LNG Trading which has been indicated as onerous contract, the Company recognizes a lower value between the estimated economic benefit value compared to the estimated compensation as a provision, measured and presented as a provision for onerous contract of LNG in the consolidated financial position as of December 31, 2025 of USD72,027,462.

On November 3, 2023, the company submitted Force Majeure notice to Gunvor. in relation to implementation of the contract. Company’s estimate of the Force Majeure for several months of year 2024.

On November 29, 2024, PGN issued the Final Annual Delivery Program (“ADP”) for 2025 containing information that the implementation of the Master Sales and Purchase Agreement (“MSPA”) and Confirmation Notice (“CN”) was still hampered and delayed due to Force Majeure conditions.

On December 1, 2025, PGN issued the Final Annual Delivery Program (“ADP”) for 2026 containing information that the implementation of the Master Sales and Purchase Agreement (“MSPA”) and Confirmation Notice (“CN”) was still hampered and delayed due to force majeure conditions.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

q. Perjanjian KSO antara Pertagas dengan RAJA

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Pertagas dan RAJA menandatangani Perjanjian No. 245/PG0000/2020-S0 melalui skema KSO non-administratif untuk bersama-sama membagi kontribusi pendanaan terhadap nilai investasi, risiko, dan manfaat/keuntungan dan pelaksanaan kegiatan Proyek Pipa Rokan sesuai dengan bagian partisipasi. Kepemilikan aset pipa Rokan dicatatkan seluruhnya di dalam pembukuan Pertagas sebagai aset yang dimiliki oleh Pertagas. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan minyak bumi dengan PHR di wilayah kerja Rokan.

Pada tanggal 14 April 2021 dan 30 Agustus 2021, telah dilakukan amendemen pertama dan kedua atas KSO dengan RAJA yang antara lain berisi perubahan bahwa Pertagas dan RAJA masing-masing merupakan pemegang dan pemilik aset atas pipa Rokan, dan berhak untuk mencatatkan pipa Rokan tersebut sebagai aset, sesuai dengan bagian partisipasi para pihak dan RAJA sepakat untuk memberikan hak pengusahaan pipa Rokan milik RAJA kepada Pertagas, sehingga dengan demikian pipa Rokan dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Pertagas.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, Pertagas dan RAJA sedang mendiskusikan amendemen KSO terkait kontribusi manfaat/keuntungan.

r. Konfirmasi Gas Tahunan antara Perusahaan dan PLN

Pada tanggal 29 November 2024, Perusahaan dan PLN menandatangani Konfirmasi Gas Tahunan untuk memenuhi kebutuhan Gas PLN pada periode 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025. Pemakaian Minimum per Bulan Kontrak adalah 5 BBTUD untuk periode 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan 0 BBTUD untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025. Harga gas yang berlaku adalah sebesar USD6,06/MMBTU sesuai dengan Kepmen ESDM 135/2021. Untuk periode 1 November 2025 sampai dengan tanggal laporan keuangan, konfirmasi gas tahunan masih dalam proses pembahasan.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. JO Agreement between Pertagas and RAJA

On October 21, 2020, Pertagas and RAJA signed agreement No. 245/PG0000/2020-S0 through a non-administrative JO to jointly share contributions to the financing value, risks, and benefits/gains, and the implementation of the Rokan Pipeline Project activities with the respective parties' participation portion. Ownership of the Rokan pipeline assets is entirely recorded in the Pertagas's books as assets owned by the Pertagas. This agreement is valid until the end of the crude transportation agreement with PHR in the Rokan working area.

On April 14, 2021 and August 30, 2021, the first and the second amendment to the JO with RAJA was made, which among other things, include changes stating that Pertagas and RAJA respectively are holders and owners of the Rokan pipeline assets, and have the right to record the Rokan pipeline as assets, in accordance with the respective parties' participation portion and RAJA agreed to grant the operating rights of the Rokan pipeline owned by RAJA to Pertagas, thus enabling Pertagas to fully control and manage the Rokan pipeline

As the date of the issuance of this consolidated financial statement, Pertagas and RAJA are in discussions regarding an amendment of JO concerning the contributions of benefits/gains.

r. Annual Gas Confirmation between the Company and PLN

On November 29, 2024, the Company and PLN signed the Annual Gas Confirmation to meet PLN's Gas needs for the period from November 1, 2024 to October 31, 2025. The Minimum Usage per Contract Month is 5 BBTUD for period from November 1, 2024 to December 31, 2024, and 0 BBTUD for period from January 1, 2025 – October 31, 2025. The applied gas price is USD6.06/MMBTU according to the Kepmen ESDM No.135/2021. For the period from November 1, 2025 up to the financial reporting date, the annual gas confirmation is still under discussion.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

s. Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2023-2028 antara PAG dan PLN

Pada tanggal 28 Desember 2022, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PAG: 019/PAG0000/2022-S0 dan No. PLN: 0049.Pj/EPI.01.02/F01010600/2022 (KB 32) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 12 November 2024, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PAG: 023/PAG0000/2024-S0 dan No. PLN: 2370.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PLN: 2829.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2028.

t. Kesepakatan Bersama atas Regasifikasi antara PGN, PLI, PLN dan PLN EPI

Pada tanggal 11 Oktober 2023, PGN telah melakukan penandatanganan amendemen kesepakatan bersama antara PGN dengan PLN dan PLN EPI tentang pemanfaatan terminal LNG lampung dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG ke pembangkit listrik PLN dengan No. PGN: 029206.Amd/HK.02/SB/2023, No. PLN: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023 dan No.PLNEPI:1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023. Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak tanggal 10 September 2023 hingga 31 Desember 2024.

Pada tanggal 29 Desember 2023, PGN telah melakukan penandatanganan amendemen kelima perjanjian pemanfaatan terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 046500.AMD/KU.00.02/SBD/2023, No. PLN: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023 dan No. PLN EPI: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s. Agreement of LNG Regasification Service for Advance Cargo for the year 2023-2028 between PAG and PLN

On December 28, 2022, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PAG: 019/PAG0000/2022-S0 and No. PLN: 0049.Pj/EPI.01.02/F01010600/2022 (KB 32) concerning Provision of LNG Regasification Services for Advanced Cargo in 2023 to December 31, 2023.

On November 12, 2024, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PAG: 023/PAG0000/2024-S0 dan No. PLN: 2370.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) concerning Provision of LNG Regasification Services for Advanced Cargo in 2024 to December 31, 2024.

On December 31, 2024, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PLN: 2829.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) regarding the Provision of LNG Regasification Services for Onward Cargo in 2025 until December 31, 2028.

t. Mutual Agreement for Regasification between PGN, PLI, PLN and PLN EPI

On October 11, 2023, PGN signed an amendment agreement between PGN with PLN and PLN EPI regarding the utilization LNG terminal lampung and distribution of gas resulting from LNG regasification to power plant PT PLN (Persero) with No. PGN: 029206.Amd/HK.02/SB/2023, NO PLN: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023 and No, PLN EPI: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023. This agreement is effective and binding on the parties on September 10, 2023 until December 31, 2024.

On December 29, 2023, PGN signed an fifth amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PLN and PLN EPI with No. PGN: 046500.AMD/KU.00.02/SBD/2023, No. PLN: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023 and No. PLN EPI: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023. This amendment is valid from January 1, 2024 to December 31, 2024.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

t. Kesepakatan Bersama atas Regasifikasi antara PGN, PLI, PLN dan PLN EPI (lanjutan)

Pada tanggal 16 Agustus 2024, PGN telah melakukan amendemen kedua kesepakatan bersama terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PLI, PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 039500.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0061608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 dan No. PLN EPI: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2024.

Pada tanggal 16 Agustus 2024, PGN telah melakukan amendemen keenam perjanjian pemanfaatan terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PLI, PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 039600.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0051608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 dan No. PLN EPI: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. Amendemen ini mengubah dan menambahkan pihak dalam perjanjian yaitu PLI, yang mengoperasikan pemanfaatan Terminal LNG Lampung oleh PLN berdasarkan instruksi dari PGN. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2024. Dengan berlaku efektifnya Amendemen ini maka hak dan kewajiban PGN LNG akan timbul terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024, dan hak dan kewajiban sebelum tanggal 16 Agustus 2024 akan tetap menjadi hak dan kewajiban PGN.

Pada tanggal 24 Desember 2024, PGN, PLI dan PLN EPI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Terminal LNG Lampung dan Penyaluran Gas Hasil Regasifikasi LNG ke Pusat Listrik Muara Tawar dengan No. PGN:037700.PK/HK.02/COD/2024, No. PGN LNG:0032412.PER/UT-PLI/2025, dan No. PLN EPI: 2784.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024. Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak tanggal dimulai sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

u. Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan dan PT Freeport Indonesia

Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas untuk penyaluran gas di Titik Penyerahan sejak Tanggal Dimulai, yaitu Kav. J-1, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, *Java Intergrated Industrial and Port Estate* ("JIIPE"). Perjanjian berlaku mengikat sejak tanggal penandatangan dan berlaku efektif sejak Tanggal Dimulai, yaitu 1 Mei 2024 sesuai Berita Acara *Gas In*, sampai dengan 5 Tahun Kontrak. Pemakaian Gas *ramp-up* sampai dengan 7,03 - 9,49 BBTU ΣD/ Bulan Kontrak dengan Harga Gas USD 9,85/MMBTU dan akan direkonsiliasi mengikuti ketetapan BPH Migas terkait toll fee di JIIPE dengan baseline USD9,55 + Alpha/MMBTU.

35. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

t. Mutual Agreement for Regasification between PGN, PLI, PLN and PLN EPI (continued)

On August 16, 2024, PGN signed the second amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PLI, PLN and PLN EPI with No. PGN: 039500.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0061608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 and No. PLN EPI: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. This amendment is effective from 16 August 2024

On August 16, 2024, PGN signed the sixth amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PLI*, PLN and PLN EPI with No. PGN: 039600.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0051608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 and No. PLN EPI: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. This amendment changes and adds a party to the agreement, namely PLI which operates the utilization of the Lampung LNG Terminal by PLN based on instructions from PGN. This amendment is effective from August 16, 2024. With the effective date of this Amendment, PGN LNG's rights and obligations will arise from August 16, 2024, and the rights and obligations before August 16, 2024 will remain PGN's rights and obligations.*

On December 24, 2024, PGN, PLI, and PLN EPI executed the Agreement on the Utilization of the Lampung LNG Terminal and the Distribution of Regasified LNG Gas to the Muara Tawar Power Plant, with the following reference numbers: PGN: 037700.PK/HK.02/COD/2024, PGN LNG: 0032412.PER/UT-PLI/2025, and PLN EPI: 2784.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024. This Agreement becomes effective and binding upon the Parties as of the commencement date and shall remain in force until December 31, 2029.

u. Gas Sales and Purchase Agreement between the Company and PT Freeport Indonesia

On January 2, 2024, the Company and PT Freeport Indonesia signed a Gas Sales and Purchase Agreement for the distribution of gas at the Delivery Point from the Commencement Date, namely Kav. J-1, Gresik Special Economic Zone, Java Integrated Industrial and Port Estate ("JIIPE"). The agreement is binding from the date of signing and is effective from the Commencement Date, May 1, 2024 according to the Gas In Minutes, up to 5 Contract Years. Ramp-up gas usage up to 7.03 - 9.49 BBTU ΣD/Contract Month with a Gas Price of USD9.85/MMBTU and will be reconciled following the provisions of BPH Migas regarding toll fees at JIIPE with a baseline of USD9.55 + Alpha/MMBTU.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

v. Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG PAG

Pada tanggal 10 Agustus 2022, melalui TUA, PAG sebagai pemberi fasilitas menandatangani perjanjian dengan TEGPA terkait dengan penyediaan fasilitas penyimpanan LNG di Terminal LNG Arun. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 8 September 2022, telah dilakukan amendemen yang keempat atas TUA dengan TEGPA yang berisi perpanjangan termin yang semula berakhir pada 31 Agustus 2022 menjadi berakhir pada 31 Desember 2028.

w. Perjanjian Penjualan Gas antara Perusahaan (Pembeli) dengan West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Penjual)

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan (Pembeli) dengan West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Penjual) menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dari Lapangan Duyung. Jumlah Total Kontrak 122,77 TBTU dengan Harga Gas USD 5,50/MMBTU. Periode Pasokan adalah sejak Tanggal Dimulai (diperkirakan 1 November 2025) dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2037. Perjanjian akan berlaku efektif setelah Perusahaan mendapatan persetujuan *Final Investment Decision* ("FID") dan terbangunnya pipa interkoneksi *West Natuna Transportation System* ("WNTS") - Pemping. Berdasarkan Kepmen ESDM RI No. 20.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pencabutan Kepmen ESDM Nomor 6105K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau, penugasan kepada PGN untuk melaksanakan Pembangunan Pipa WNTS - Pemping telah dicabut.

Pada tanggal 12 Maret 2025, West Natuna Exploration Ltd melalui Surat Nomor: 032/WNEL/MAN/III/2025 perihal *Notice of Termintation of Gas Sales Agreement* menyampaikan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Penjualan Gas kepada Perusahaan dikarenakan Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Nomor T-83/MG.04/MEM.M/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang menjadi dasar penetapan alokasi gas dan harga gas dari Wilayah Kerja Duyung kepada Perusahaan, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor T-86/MG.04/MEM.M/2025 tanggal 5 Maret 2025, sehingga Penjual tidak dapat memenuhi kondisi prasyarat dalam Perjanjian.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

v. PAG LNG Storage Facility Agreement

On August 10, 2022, through the TUA, PAG as the facility provider signed an agreement with TEGPA related to the provision of LNG storage facilities at the Arun LNG Terminal. The term of the agreement is valid from July 1, 2022, to December 31, 2022.

On September 8, 2022, the fourth amendment was made to the TUA with TEGPA which contains an extension of the term, which originally ended on August 31, 2022, to end on December 31, 2028

w. Gas Sales Agreement between the Company (Buyer) and West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, and Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Seller)

On June 21, 2024, the Company (Buyer) with West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, and Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Seller) signed a Gas Sales Agreement from Duyung Field. The Total Contract Quantity is 122.77 TBTU with a Gas Price of USD 5.50/MMBTU. The Supply Period is from the Commencement Date (estimated November 1, 2025) and ends on January 15, 2037. The agreement will be effective after the Company obtains Final Investment Decision ("FID") approval and the construction West Natuna Transportation System ("WNTS") - Pemping interconnection pipeline is completed. Based on Kepmen ESDM No. 20.K/MG.01/MEM.M/2025 regarding the Revocation of Kepmen ESDM No. 6105K/12/MEM/2016 regarding Assignment to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. in constructing and operating natural gas pipeline from West Natuna Transportation System pipelines to Pemping Island, Kepulauan Riau Province, PGN's assignment to complete the WNTS - Pemping Construction is revoked.

On March 12, 2025, West Natuna Exploration Ltd through Letter Number: 032/WNEL/MAN/III/2025 regarding Notice of Termination of Gas Sales Agreement submitted a notice of termination of the Gas Sales Agreement to the Company due to the Stipulation Letter of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MEMR") Number T-83/MG.04/MEM.M/2024 dated February 7, 2024, which is the basis for determining the allocation of gas and gas prices from the Duyung Working Area to the Company, has been revoked and declared invalid based on the Stipulation Letter of the MEMR Number T-86/MG.04/MEM.M/2025 dated March 5, 2025, so that the Seller cannot fulfill the conditions precedent in the Agreement.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

x. Perjanjian Pengangkutan/ Fasilitas LNG / *x. LNG Transportation/ Facilities Agreement*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume kapasitas/ *Capacity Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
			Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT Pertamina International Shipping	Perjanjian Induk Pengangkutan LNG/ *LNG Transportation Agreement*	-	20 Januari 2025/*January* 20th, 2025	20 Januari 2030/*January* 20th, 2030	-
PT Nusantara Regas	Perjanjian Pemanfaatan Terminal LNG Jawa Barat dan Penyaluran Gas Hasil Regasifikasi LNG ke Jaringan DIstribusi Gas/	100 BBTUD	9 Januari 2025/*January* 9th, 2025	31 Desember 2028/*December* 31st, 2028	-

36. IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML

Pada tanggal 29 Agustus 2018, KJG mengajukan gugatan terhadap PCML dan PLN di Arbitrase ICC Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban *Ship or Pay* diatur dalam PPG oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi PPG, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan Tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018.

Karena ketidakmampuan PCML dalam memenuhi komitmen volume gas yang telah disepakati dalam PPG Kalija I, maka sesuai ketentuan PPG Kalija I timbul kewajiban SOP yang harus diselesaikan oleh pihak yang menyebabkan SOP tersebut. KJG telah melakukan musyawarah dengan PCML terkait kewajiban SOP tahun 2016 sejak awal tahun 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2017, PCML belum menyelesaikan kewajiban SOP tersebut. Selain itu PCML juga menyampaikan klaim kahar sesuai surat PCML tanggal 7 Juni 2017. Atas klaim kahar tersebut KJG menyampaikan penolakan sesuai surat tanggal 13 Juni 2017, dimana KJG menyampaikan bahwa sesuai PPG Kalija I maka syarat untuk keadaan kahar berlaku adalah adanya penetapan oleh konsultan mandiri yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh SKK Migas.

PCML telah menunjuk Lemigas sebagai konsultan independen untuk memeriksa keadaan kahar tersebut. Namun, KJG menganggap penunjukan dan hasil laporan Lemigas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PPG Kalija I.

Dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat keadaan kahar sesuai PPG Kalija I, KJG berpendapat bahwa semua hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku khususnya terkait dengan kewajiban SOP. KJG juga sudah meminta bantuan BPH Migas untuk menjadi mediator atas permasalahan SOP tersebut. BPH Migas mengundang para pihak dalam PPG pada tanggal 20 Maret 2018 dan 8 Mei 2018, namun PCML tidak hadir dalam kedua rapat tersebut. Mengingat KJG sudah melakukan upaya musyawarah dan mediasi dengan PCML tanpa hasil, maka KJG mengajukan gugatan arbitrase tersebut.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML

On August 29, 2018, KJG filed a lawsuit against PCML and PLN in the Hongkong Arbitration ICC in connection with the non performing Ship or Pay obligation as agreed in the Gas Transportation Agreement by PCML and compensation for a GTA termination, while the lawsuit to PLN was conducted in connection to a Monthly Invoice deduction since March 2018 until September 2018.

Due to PCML's inability to fulfil the gas volume commitment which has been agreed in GTA Kalija I, in accordance with GTA Kalija I, SOP liability arose and should be settled by the party who causes the SOP. KJG has conducted discussions with PCML in relation to the 2016 SOP liability since early 2017, nevertheless up until the end of 2017, PCML has not settled its SOP liability. Moreover, PCML has declared Force Majeure through its letter dated June 7, 2017. Regarding the Force Majeure claim, KJG has sent an objection letter dated June 13, 2017 in which KJG notified that in accordance with GTA Kalija I, Force Majeure should be determined by an independent consultant as agreed by each party and then should be examined and approved by SKK Migas.

PCML has appointed Lemigas as the independent consultant to assess the Force Majeure. However, KJG believes that the appointment of Lemigas including Lemigas's report are not in accordance with GTA Kalija I.

As the Force Majeure terms in accordance with GTA Kalija I have not been fulfilled, KJG believes that all rights and obligations of the parties are still valid, particularly related to the SOP obligation. KJG has requested BPH Migas's assistance as mediator for this ship-or-pay matter. BPH Migas has invited the parties in GTA Kalija I on March 20, 2018 and May 8, 2018, but PCML has failed to attend both meetings. Since KJG has already strived to engage PCML in negotiation and mediation without success, KJG then has submitted the arbitration claim.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

PCML telah menghentikan pengaliran gas sejak tanggal 23 September 2019 dan KJG telah melakukan terminasi PPG melalui surat tanggal 13 November 2019, yang berlaku efektif sejak tanggal 13 Desember 2019 karena KJG melihat tidak ada itikad baik dari PCML untuk melanjutkan dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dan disepakati dalam PPG. Terkait terminasi tersebut, KJG telah memasukan gugatan ganti rugi dalam *Statement of Claim* ("SOC") tertanggal 28 Februari 2020 ke ICC.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, PCML telah menyerahkan *Statement of Defense* atas *Cross-Claim* yang disampaikan PLN. Pada tanggal 5 Februari 2021, KJG telah mengajukan respon atas *Statement of Defense* dari PCML dan PLN. Selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak maka pada bulan Mei 2021, PCML serta PLN akan menjawab respon dari KJG dan menjawab respon atas *cross claim* dari PCML kepada PLN maupun *cross claim* PLN kepada PCML.

Dalam *Reply Memorial* tersebut, KJG menyampaikan bahwa (i) PCML sepatutnya tidak dapat menghindari kewajiban atas SOP KJG sejak tahun 2016 sampai dengan 13 Desember 2019 serta ganti rugi atas berakhirnya PPG senilai komitmen SOP dalam PPG yaitu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2026 berdasarkan PPG dengan nilai gugatan sebesar USD373 juta (ii) PLN bertanggung jawab atas pengembalian pemotongan pembayaran tarif kepada KJG sebesar USD 2,1 juta (belum termasuk bunga); dan (iii) bunga dan biaya ICC serta biaya Konsultan Hukum KJG maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan KJG.

Sebagai bentuk sinergi BUMN dan untuk mendukung pengaliran kembali gas dari Lapangan Kepodang untuk pembangkit listrik Tambak Lorok, pada tanggal 26 Februari 2021 KJG dan PLN telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang pada intinya menyepakati nilai yang harus dikembalikan oleh PLN atas klaim pemotongan tagihan bulanan KJG dalam Arbitrase ICC.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

PCML has stopped the gas flow since September 23, 2019 and KJG terminated the GTA in a letter dated November 13, 2019, effective as of December 13, 2019, because KJG determined that there was no good faith from PCML to continue and carry out its obligations in accordance with the terms stipulated and agreed in the GTA. In relation to the termination, KJG has submitted a claim for compensation in the Statement of Claim ("SOC") dated February 28, 2020 to the ICC.

On October 9, 2020, PCML submitted a Statement of Defense on the Cross-Claim submitted by PLN. On February 5, 2021, KJG submitted a response to the Statement of Defense from PCML and PLN. Furthermore, according to the schedule agreed upon by the Parties in May 2021, PCML and PLN will answer the response from KJG and answer the response on the cross claims from PCML to PLN and the cross claims from PLN to PCML.

In the Reply Memorial, KJG stated that (i) PCML cannot avoid the liability for KJG's SOP claims from 2016 to December 13, 2019 and the compensation for the end of the GTA equal to the SOP commitment in the GTA, namely from December 14, 2019 until the end of 2026 based on the GTA with a claims value of USD373 million (ii) PLN is responsible for returning the tariff payment to KJG in the amount of USD2.1 million (not yet including interest); and (iii) all interests and ICC fees and also all KJG's Legal Consultant fees and other costs incurred by KJG.

As a form of a BUMN synergy and to support the return of gas from the Kepodang Field to the Tambak Lorok power plant, on February 26, 2021, KJG and PLN signed a Settlement Agreement which essentially agreed on the value that must be returned by PLN for the claim for deducting the KJG monthly invoice in the ICC Arbitration.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Perdamaian tersebut, pada tanggal 31 Maret 2021 PLN telah melakukan pembayaran atas nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian yaitu sebesar USD1.054.495.

Karena adanya kendala kesehatan dari Ketua Arbiter yang diketahui oleh Para Pihak dalam proses Pra Hearing tanggal 13 April 2022, maka Konsultan hukum KJG merekomendasikan untuk melakukan penggantian Ketua Arbiter. Penggantian tersebut juga diusulkan oleh semua Pihak dalam arbitrase dan dengan adanya penggantian tersebut, maka proses *hearing* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 telah dijadwalkan ulang oleh ICC menjadi bulan Oktober 2023 (berdasarkan Surat dari Sekretariat *International Court of Arbitration* tanggal 26 September 2022).

Perubahan Jadwal Hearing menjadi Oktober 2023 antara lain dikarenakan mempersiapkan Arbiter Ketua yang baru sebelum sidang hearing, untuk:
- Informasi kasus dan pelaksanaan Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase ICC;
- Seluruh proses persidangan yang sudah berjalan sejak awal;
- Korespondensi para pihak dan korespondensi Arbitrase;
- Profil para Co-Arbiter

Pada tanggal 26 Juni 2023, telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan *King and Spalding* dalam rangka penyampaian hasil kajian KHI terhadap SOC KJG untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari *King and Spalding*.

Pada tanggal 6 - 7 September 2023 KJG telah melakukan rapat persiapan hearing bersama konsultan hukum dan *technical expert*.

Pada tanggal 30 Oktober - 3 November 2023 telah dilaksanakan *hearing* di ICC *Singapore*, dengan agenda: *Opening Statement* dari masing-masing pihak, keterangan dari *technical expert* dan *Closing Submissions*.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

As a follow-up to the Settlement Agreement, on March 31, 2021, PLN has paid the amount agreed in the Settlement Agreement in the amount of USD1,054,495.

Due to the health problem of the Tribunal President which was discovered by the Parties during the Pre Hearing on April 13, 2022, KJG's legal consultant recommended replacing the Tribunal President. The replacement was also proposed by all Parties in the arbitration and with the replacement, the hearing process which was planned to be held in May 2022 has been rescheduled by the ICC to October 2023 (based on the Letter from the Secretariat of the International Court of Arbitration dated September 26, 2022).

Hearing Schedule postpone to October 2023 due to preparing the new Chief Arbitrator before the hearing:
- *Give information on cases and implementation of Arbitration under the Rules ICC Arbitration;*
- *The entire trial process that has been running since the beginning;*
- *Correspondence of the parties and Arbitration correspondence;*
- *Profiles of Co-Arbitrators.*

On June 26, 2023, further coordination was carried out with the King and Spalding in order to submit the KHI study results to the KJG SOC to obtain clarification and confirmation from the King and Spalding.

On September 6 - 7, 2023 KJG held a preparation meeting for hearing with legal consultant and technical expert.

The abritrase hearing was held on October 30 - November 3, 2023 at ICC Singapore, with the agenda: Opening Statement from each Party, information from technical expert and Closing Submissions.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

Pada tanggal 15 Desember 2023, KJG telah mengirimkan data *Submission Cost* kepada *Tribunal*, yang didalamnya memuat biaya konsultan hukum, biaya *expert* dan *tribunal cost* yang sudah terbayar maupun yang masih terutang.

Hasil putusan arbitrase KJG pada 14 Juni 2024 yang disampaikan oleh Sekretariat ICC *International Court of Arbitration* melalui *email* pada tanggal 18 Juni 2024, bahwa:

1. PCML harus membayar kepada KJG USD17.300.000 atas *Pre-Termination Claim* dan bunga USD5.200.000.
2. KJG harus membayar *legal costs & expenses* serta ICC *advance cost* PCML dengan total USD5.266.250
3. KJG harus membayar *legal costs & expenses* PLN IDR3.600.000.000 dan biaya ICC *advance cost* USD286.250.

KJG telah menerima pembayaran dari PCML terkait putusan arbitrase pada tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD18.430.000. Nilai yang diterima sesuai dengan saldo piutang sebesar USD22.500.000 dengan tambahan bunga hingga tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD1.200.00,- dan dikurangi dengan beban legal sebesar USD5.270.000.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

On December 15, 2023, KJG submitted a Submission Cost to the Tribunal, which included paid and outstanding legal counsel fees, expert fees and tribunal cost.

KJG arbitration award dated June 14, 2024 was communicated by the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration via email on June 18, 2024, that:

1. *PCML shall pay to KJG USD17,300,000 on the Pre-Termination Claim and USD5,200,000 interest.*
2. *KJG shall pay PCML's legal costs & expenses and ICC advance costs totalling USD5,266,250.*
3. *KJG shall pay PLN's legal costs & expenses of IDR3,600,000,000 and ICC advance costs of USD286,250.*

KJG has received payment from PCML related to the arbitration award on October 29, 2024 amounting to USD18,430,000. The value received corresponds to the outstanding balance of USD22,500,000 with additional interest up to October 29, 2024 amounting to USD1,200,000 and reduced by legal expenses amounting to USD5,270,000.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 76 tahun 2025 dan 282 Tahun 2025

Menteri ESDM mengeluarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 juncto Kepmen ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri dan No. 77.K/HK.01/MEM.M/2025 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*). Kedua Kepmen ini ditetapkan pada 26 Februari 2025 dan berlaku surut dari 1 Januari 2025. Kedua Kepmen ini mengatur tentang harga gas bumi tertentu bagi industri dan pembangkit tenaga Listrik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan harga gas bumi tertentu dituangkan dalam side letter implementasi harga gas bumi tertentu dan/atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati antara industri dan pembangkit tenaga listrik penerima harga gas bumi tertentu dengan PGN.

SKK Migas sesuai kewenangannya akan mengkoordinasikan penyesuaian harga gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontraktor PSC. Untuk melaksanakan fungsinya, SKK Migas menerbitkan Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Bagi Hasil Kontraktor PSC dari Penurunan Harga Gas Bumi Melalui Mekanisme Perhitungan *Provisional Entitlement* dan *Final Entitlement*. Berdasarkan kajian manajemen, penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak mempengaruhi bagian pendapatan Kontraktor PSC (segmen usaha hulu minyak dan gas bumi) secara signifikan di masa mendatang dikarenakan adanya kompensasi dari Pemerintah melalui mekanisme *entitlement*.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Kepmen ESDM No. 76 year 2025 and 282 year 2025

The Minister of EMR has issued Kepmen ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 *juncto Kepmen ESDM No.76.K/MG.01/MEM.M/2025 regarding Specific Customers and Price of Natural Gas in the Industrial Sectors and No.77.K/HK.02/MEM.M/2025 regarding Price of Natural Gas at the Electricity Power Plant Gate. These two regulations were established on February 26, 2025, and effective retroactively from January 1, 2025. These two regulations regulate the price of certain natural gas for industry and electricity generation based on Presidential Decree 121 of 2020.*

In its implementation specific gas sales price will be stated in side letter and/or other written documents agreed upon between the industry and the electric power generation business entity with PGN.

SKK Migas, in accordance with its authority, will coordinate the adjustment of natural gas prices from upstream oil and gas business activities with PSC Contractors. To carry out its function, SKK Migas issued Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 regarding Technical Guidelines for Adjustment of Production Sharing for PSC Contractors from Decrease in Natural Gas Prices through the Provisional Entitlement and Final Entitlement Calculation Mechanism. Based on management's assessment, adjustments to the natural gas prices will not significantly affect the PSC Contractor's share of revenue (oil and gas upstream business segment) in the future due to the compensation provided by the Government through the entitlement mechanism.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 76 tahun 2025 dan 282 Tahun 2025 (lanjutan)

BPH Migas memiliki kewenangan dalam menentukan tarif transmisi gas. Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan, Grup menantikan tindak lanjut dari BPH Migas untuk mengimplementasikan Kepmen ini.

Penentuan harga beli dan jual dan alokasi ini ditentukan secara tahunan oleh Kementerian ESDM. Dalam operasi Grup, akibat dari pengaturan ini, terdapat *Unutilised Gas Volume*, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Dalam hal ini, manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sejumlah USD55.037.555 dan USD117.273.420 (Catatan 18). Manajemen Grup berpendapat jumlah provisi yang telah dibukukan mencukupi untuk penyelesaian kewajiban Grup kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan selisih harga pembelian gas bumi ini.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Kepmen ESDM No. 76 year 2025 and 282 year 2025 (continued)

BPH Migas has the authority to determine the tariff for gas transmission. As of the issuance date of these financial statements, the Group is awaiting for BPH Migas' action in order to implement this Kepmen.

The determination of the purchase and sale prices and the allocation is set annually by the Ministry of EMR. In the Group's operations, as a result of this arrangement, there is Unutilised Gas Volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by the Ministry of EMR for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. In this case, the Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government. As of December 31, 2025 and 2024, the provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas recorded in the consolidated statements of financial position amounted to USD55,037,555 and USD117,273,420, respectively (Note 18). The Group's management believes that the provision that has been recorded is adequate to settle the Group's obligations to the Government of Indonesia in relation to the difference in the purchase price of this natural gas.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO")

Pada 3 April 2023, SEI menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa SEI telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat LEMASKO yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan PSC yang telah ditandatangani bersama dengan SKK Migas.

SEI telah menunjuk Kantor Hukum RAJ & *Associates* dan Kantor Hukum RIFA sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menjalani beberapa proses persidangan termasuk menghadirkan beberapa saksi penting baik dari PT Freeport Indonesia maupun dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mineral Republik Indonesia. Manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar.

SEI telah dinyatakan memenangkan perkara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor Putusan Perkara No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg tertanggal 3 April 2024 yang pada menolak gugatan LEMASKO.

Pada Tanggal 17 April 2024, LEMASKO kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, dan atas kasus banding tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No 374/PDT/2024/PT Surabaya tertanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan menolak gugatan LEMASKO.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Claim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO")

On April 3 2023, SEI received a lawsuit letter with the main case being that SEI had taken control of ex-PT Freeport Indonesia pipe goods which were claimed to be goods belonging to the LEMASKO which was the result of a grant from PT Freeport Indonesia. Management is of the opinion that the lawsuit is baseless considering that SEI only controls goods related to activities related to Oil and Natural Gas, and Oil and Natural Gas assets controlled by SEI are State Property and are legally controlled by SEI based on applicable legal provisions and the PSC which has been signed together with SKK Migas.

SEI has appointed RAJ & Associates Law Firm and RIFA law firm as the attorney to handle the lawsuit. As of the completion date of these consolidated financial statements, SEI has undergone several trial processes including presenting several important witnesses both from PT Freeport Indonesia and from the Directorate General of Oil and Gas, Ministry of EMR of the Republic of Indonesia. Management continues to believe the lawsuit is baseless.

SEI received favorable result on the case based on the Lamongan District court decision rulling No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated April 3, 2024, stated that the Court had rejected LEMASKO's claim.

On April 17, 2024, LEMASKO then filed an appeal against the decision of the Lamongan District Court, and the appeal case was decided by the Surabaya High Court with decision No. 374/PDT/2024/PT Surabaya dated on June 24, 2024, which essentially upheld the decision of the Lamongan District Court by rejecting LEMASKO's claim.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO") (lanjutan)

Atas Keputusan Banding tersebut, kemudian LEMASKO mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024, yang disampaikan ke SEI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain dari Relaas Pemberitahuan Permohonan tersebut, disampaikan juga Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024. Atas hal tersebut maka SEI menindaklanjuti dengan mengirimkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024. SEI telah menunjuk Kantor Hukum Yustisia sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, belum ada Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

SEI tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar sebagaimana telah dibuktikan dengan ditolaknya gugatan pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, maka dari itu,manajemen tidak mencatat penyisihan atas nilai tuntutan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 16 Desember 2024, Mahkamah Agung telah memutus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan LEMASKO. PGN saat ini masih menunggu salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.

Pada bulan Mei tahun 2025 PGN telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5942 K/PDT/2024 tanggal 16 Desember 2024 jo. Nomor: 10/PDT.G/2023/PN LMG. Merujuk pada putusan tersebut, maka perkara gugatan LEMASKO terkait klaim kepemilikan pipa telah selesai.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Claim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO") (continued)

Based on the Appeal Decision, LEMASKO then filed a a cassation petition to the Supreme Court in accordance with the Cassation Application Notification Release No. 374/PDT/2024/PT Sby Jo No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024, which was submitted to SEI through the South Jakarta District Court, in addition to the Application Notification Release, a Cassation Memorandum Submission Notification Release No.374/PDT/2024/PT Sby Jo No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024 was also submitted. Regarding this,SEI followed up by sending a Counter Cassation Memorandum on July 29, 2024. SEI has appointed Yustisia Law Firm as the attorney to handle the lawsuit. As of the completion date of the financial statements, no decision issued by the Supreme Court.

SEI continues to believe the lawsuit is baseless, as evidenced by the rejection of the claim at both the district court and the high court levels, therefore no provision for the claim amount is recorded in the consolidated financial statements.

On December 16, 2024, the Supreme Court has decided with a verdict rejecting the cassation application submitted by LEMASKO. PGN is currently still waiting for an official copy of the decision from the Supreme Court.

In May 2025, PGN received a copy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision Number: 5942 K/PDT/2024 dated December 16, 2024, jo. Number: 10/PDT.G/2023/PN LMG. Referring to this decision, the lawsuit filed by LEMASKO regarding pipe ownership claims has been concluded.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII ("PTPN VII")

Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah''). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingisasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972.

Adapun tanah milik PGN yang menjadi obyek gugatan, PGN telah memiliki SHGB atas tanah obyek tanah tersebut.

Pada tanggal 6 Februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Pada tanggal 29 Februari 2024, PTPN VII kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pertanahan milik PTPN VII dengan mengubah kedudukan PGN yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat I.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. *Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII ("PTPN VI")*

On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad's forest consession area (''Land''). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972.

Regarding the land owned by PGN that is the subject of the lawsuit, PGN already holds a Right of Building Use Certificate (SHGB) for the said land.

On February 6, 2024, PTPN VII withdrew its lawsuit regarding the matter in question. Subsequently, on February 12, 2024, PGN received a notification of the lawsuit withdrawal from PTPN VII with the decree stating:

1. *Granting the plaintiff's petition;*
2. *Declaring case Number 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu withdrawn;*
3. *Ordering the plaintiff to pay the case costs.*

On February 29, 2024, PTPN VII once again filed a lawsuit alleging wrongful acts concerning land owned by PTPN VII by changing the position of PGN, which was previously a Defendant, to Co-Defendant I.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2024, PN Blambangan Umpu memutuskan gugatan yang diajukan PTPN VII *Niet Onvantkelijkverklaard* ("NO"). Pada 30 Agustus 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas dari PT Tanjungkarang untuk tingkat Banding, posisi PGN dalam perkara tersebut semula Turut Tergugat I menjadi Terbanding XVI. Dalam memori banding yang diajukan PTPN VII tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan lahan milik PGN. Pada 24 September 2024, PT Tanjung Karang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu. Pada 10 Oktober 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan permohonan kasasi dan posisi PGN semula Terbanding XVI menjadi Termohon Kasasi XVI. Sampai dengan tanggal laporan, perkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan gugatan PTPN VII tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil dan imateriil yang ditujukan kepada PGN. Adapun konsekuensi hukum PGN sebagai Turut Tergugat I adalah PGN diminta untuk tunduk dan patuh atas putusan yang nantinya dijatuhkan Majelis Hakim.

Pada tanggal 14 Mei 2025 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor. 1533 K/Pdt/2025 dengan amar menolak permohonan kasasi dari PTPN VII.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (continued)

On July 31, 2024, the Blambangan Umpu District Court decided on the lawsuit filed by PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). On August 30, 2024, PGN received a notice of examination of the files from PT Tanjungkarang for the Appeal level, with PGN's position in the case initially as Co-Defendant I becoming Appellant XVI. In the appeal memorandum submitted by PTPN VII, it was not related to the ownership of land belonging to PGN. On September 24, 2024, PT Tanjung Karang upheld the decision of the Blambangan Umpu District Court. On October 10, 2024, PGN received a notice of the cassation application, and PGN's position changed from Appellant XVI to Respondent XVI. As of the date of this report, the case is still in the process of cassation examination at the Supreme Court.

Based on PTPN VII's lawsuit, there are no material and immaterial claims directed at PGN. The legal consequence for PGN as Co-Defendant I is that PGN is required to comply with and adhere to the judgment that will be rendered by the Panel of Judges.

On May 14, 2025, the Supreme Court issued Decision No. 1533 K/Pdt/2025, rejecting the appeal filed by PTPN VII.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME")

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, ME menyatakan secara tegas dan sekaligus mengakui adanya utang kepada Perusahan. Terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa ME akan menyerahkan sebagian kepemilikan aset milik ME kepada Pertagas sebagai offsetting utang. Para pihak sepakat akan dilakukan serah terima aset kepada Pertagas setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang independen. Namun hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ME belum menyepakati nilai aset yang tercantum dalam laporan KJPP. Pertagas telah mengajukan gugatan perdata wanprestasi kepada ME di Pengadilan Negeri ("PN") Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2020.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME")

Based on Debt-Receivable Settlement Agreement, ME explicitly stated and also recognized its debt to Pertagas. There has been a mutual agreement between the two parties that ME would handover its assets entitlement partially to Pertagas in order to offset their debt. Both parties agreed that the assets would be transferred to Pertagas once the assets are appraised by the independent public appraiser ("KJPP"). However, as of the issuance date of these consolidated financial statements, ME has not agreed to the assets' valuation stated in the KJPP's report. Pertagas has filed a civil lawsuit against ME on the breach of contract in South Jakarta District Court, with the Case Register No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dated April 13, 2020.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME") (lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2021, ME menyampaikan surat permohonan perdamaian yang menyatakan bahwa ME bersedia memberikan hak kepemilikan pipa Pondok Tengah - Tegal Gede sebesar 60% kepada Pertagas sebagai penyelesaian utang ME. Namun, Pertagas belum menerima penawaran ini dan melanjutkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan wanprestasi dari Pertagas kepada ME.

Pada tanggal 5 Desember 2022, manajemen telah mengajukan banding dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ("PTJ") dengan perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, manajemen telah menerima putusan dari PTJ, dimana putusan tersebut menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan. Pertagas tidak melanjutkan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih merencanakan upaya terbaik untuk dapat menagihkan seluruh piutang dari ME.

f. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas

Pertagas menjadi salah satu tergugat atas dua gugatan hukum yang diajukan oleh GPS ("Penggugat"). Gugatan pertama ditujukan ke beberapa tergugat dengan dalil terkait pembangunan pipa gas milik CL, yang dianggap melanggar Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghentikan sementara pembangunan tersebut. Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR0,15 triliun.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME") (continued)

On October 28, 2021, ME submitted a letter of reconciliation which stated that ME was willing to give 60% of ownership rights to the Pondok Tengah - Tegal Gede pipeline to Pertagas as a settlement of ME's debt. However, Pertagas did not accept the offer and continue the civil lawsuit in South Jakarta District Court. On November 22, 2022, South Jakarta District Court rejected provisional demands of Pertagas to ME.

On December 5, 2022, the management filed an appeal and has been accepted by the Jakarta High Court with case No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

On August 29, 2023, the management received a decision from the Jakarta High Court, affirming the verdict of the South Jakarta District Court. Pertagas has opted not to pursue further legal actions in the form of cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

As the date of the issuance of these consolidated financial statements, the management is still planning the best course of action to collect all receivables from ME.

f. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas

Pertagas is one of the defendants in two legal lawsuits filed by GPS ("the Plaintiff"). The first lawsuit was directed at several defendants, alleging that the construction of the gas pipeline owned by CL violates the Interim Decision of the Jakarta Administrative Court, which ordered a temporary halt to the construction. The Plaintiff is seeking joint and several damages amounting to IDR0.15 trillion.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas (lanjutan)

Selanjutnya, GPS melakukan gugatan kedua kepada beberapa tergugat dengan dalil para tergugat telah melakukan tindakan persekongkolan atau konspirasi atas penerbitan izin pembangunan pipa gas milik CL sebagai cadangan. Dalam gugatan ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR1,88 triliun.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR1 miliar untuk gugatan pertama dan IDR333,8 miliar untuk gugatan kedua. Pada tanggal 14 September 2021, Pertagas telah mengajukan banding kepada PTJ atas kedua gugatan tersebut.

Pada tanggal 14 Juni 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan pertama. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Februari 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan kedua dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR77,3 miliar. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR175,7 miliar. Nilai ini telah dibayarkan oleh CL kepada GPS pada 22 April 2024.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas (continued)

Furthermore, GPS filed a second lawsuit against several defendants, alleging that the defendants engaged in collusion or conspiracy regarding the issuance of a construction permit for CL's gas pipeline as a backup. In this lawsuit, the Plaintiff is seeking joint and several damages amounting to IDR1.88 trillion.

On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court partially granted the petitioner's claims and ordered the respondent to jointly and severally pay damages to the Plaintiff amounting to IDR1 billion for the first lawsuit and IDR333.8 billion for the second lawsuit. On September 14, 2021, Pertagas filed an appeal to the Jakarta High Court against both lawsuits.

On June 14, 2022, the Jakarta High Court affirmed the decision of Central Jakarta District Court regarding the first claim. On July 25, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the first claim.

On February 14, 2022, the Jakarta High Court upheld the decision of Central Jakarta District Court for the second claim and partially granted the Plaintiff's claims, ordering the defendants jointly and severally to pay the amount of IDR77.3 billion. On May 17, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the second claim.

On December 20, 2023, the Supreme Court granted part of the Plaintiff's lawsuit and ordered the defendants to pay IDR175.7 billion jointly and severally. This amount has already been paid by CL to GPS on April 22, 2024.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas (lanjutan)

Pada 12 Februari 2024, dengan mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2023, Pertagas telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan GPS atas adanya dugaan penggunaan lahan *Right-of Way* (ROW) Pipa Gas ruas Citarik-Tegal Gede milik Pertagas tanpa hak.

Atas upaya hukum pidana tersebut, GPS, CL, Pertagas sepakat berdamai dan tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya dengan menandatangani Perjanjian Penyelesaian No. 01 tanggal 9 September 2024 dan Perjanjian Pembongkaran Pipa Gas Bumi Pada Ruas Citarik-Tegal Gede dan pada Ruas Tegal Gede-Cikarang antara GPS dengan Pertagas No. 02 tanggal 9 September 2024, dengan diawasi Kejaksaan Agung.

Dengan kesimpulan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas, CL telah melakukan pembayaran ke GPS pada tanggal 22 April 2024, dan GPS bersedia melakukan pembongkaran pipa beserta fasilitas penunjangnya yang ada di lahan Pertagas, dengan biaya pembongkaran yang ditanggung seluruhnya oleh GPS.

Pada tanggal 30 April 2025, Pertagas dan CL menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pembagian Nilai Tanggung Renteng yang menyebutkan bahwa Pertagas mengakui dan akan menanggung biaya tanggung renteng sebesar IDR58,6 miliar, yang akan dibayarkan ke CL. Di tanggal yang sama, Pertagas dan CL juga menandatangani Kesepakatan Bersama Pembayaran Biaya Kompensasi Pemanfaatan Lahan yang menyepakati besaran biaya kompensasi untuk periode pemanfaatan lahan yang digunakan oleh GPS dan akan dibayarkan oleh CL kepada Pertagas sebesar IDR68,6 miliar. Atas berita acara tersebut, Perusahaan mengakui pendapatan dan biaya jasa pemanfaatan lahan pada laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD4.207.062 dan USD3.603.772 (Catatan 31a dan 31b).

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas (continued).

On February 12, 2024, considering the Supreme Court's Decision on December 20, 2023, Pertagas has taken criminal legal action by reporting GPS for the alleged unauthorized use of the Right-of-Way (ROW) land for the Citarik-Tegal Gede gas pipeline owned by Pertagas.

As a result of this legal action, GPS, CL, and Pertagas have agreed to settle and will not pursue any further legal actions by signing Settlement Agreement No. 01 dated September 9, 2024, and the Agreement for the Dismantling of the Natural Gas Pipeline on the Citarik-Tegal Gede and Tegal Gede-Cikarang sections between GPS and Pertagas No. 02 dated September 9, 2024, under the supervision of the Attorney General's Office.

In conclusion, based on the Supreme Court's ruling mentioned above, CL made a payment to GPS on 22 April 2024, and GPS agreed to dismantle the pipes and supporting facilities located on the Company's RoW, with the dismantling costs fully borne by GPS.

On 30 April 2025, Pertagas and CL signed a Minutes of Agreement on the Distribution of Joint Liability Values, which stated that Pertagas acknowledged and would bear the joint liability costs of IDR58.6 billion, which would be paid to CL. On the same date, Pertagas and CL also signed a Joint Agreement on the Payment of Land Utilization Compensation Fees, which agreed on the amount of compensation fees for the land utilization period used by GPS and would be paid by CL to Pertagas in the amount of IDR68.6 billion. In relation to the Minutes of Agreement, the Company recognizes revenue and expense from land utilization services amounting to USD4,207,062 and USD3,603,772, respectively, in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2025 (Note 31a and 31b).

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Perjanjian Tripartit terkait Penjualan, Pengisian Ulang dan Pembelian LNG ("Perjanjian Tripartit") antara PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE")

Pada tanggal 12 November 2020, PAG, PPTETS, dan QE ("para pihak") menandatangani Perjanjian Tripartit yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penggantian LNG milik QE, yang terkontaminasi partikel asing ("Debris") dengan kuantitas sebanyak 3.345.759 MMbtu.

PAG diwajibkan untuk membayar ke PPTETS apabila harga aktual yang akan dibayarkan oleh PPTETS untuk penggantian LNG milik QE saat periode penggantian lebih tinggi dari nilai LNG Debris yang telah dijual oleh PPTETS, atau PAG akan menerima pengembalian dari PPTETS apabila harga aktual lebih rendah.

Pada tanggal 18 Januari 2021, PPTETS telah menjual LNG Debris.

Penggantian LNG tersebut akan dilakukan oleh PPTETS (selaku pihak yang berkontrak penyimpanan LNG milik QE dengan PAG) yang dimulai dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 atau periode lain yang disepakati para pihak.

Pada tanggal 7 November 2023, para pihak telah melakukan amendemen Perjanjian Tripartit, yang mengubah periode penggantian LNG menjadi 1 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, atau periode lain yang disepakati para pihak.

Atas penjualan, pengisian ulang dan pembelian LNG antara PAG, PTTETS dan QE, Perusahaan mengakui estimasi klaim pada laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD4.926.057 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.739.177 (Catatan 31a dan 31b).

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Tripartite Agreement in Relation to the Sale, Reloading and Purchase of LNG ("Tripartite Agreement") between PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE")

On November 12, 2020, PAG, PPTETS, and QE ("parties") signed a Tripartite Agreement aimed at establishing a mechanism for the replacement of QE's LNG, which was contaminated with foreign particles ("Debris"), in the quantity of 3,345,759 MMbtu.

PAG is required to pay to PPTETS if the actual price to be paid by PPTETS for the replacement of QE's LNG during the replacement period is higher than the value of the LNG Debris sold by PPTETS. Conversely, PAG will receive a refund from PPTETS if the actual price is lower.

On January 18, 2021, PPTETS has sold the LNG Debris.

The replacement of the LNG will be carried out by PPTETS (as the party contracted for the storage of QE's LNG with PAG), starting from April 1, 2023, until August 1, 2023, or another period agreed upon by the parties.

On November 7, 2023, the parties amended the Tripartite Agreement, changing the LNG replacement period to June 1, 2026, until June 30, 2026, or any other period mutually agreed by the parties.

In relation to the sale, reloading and purchase of LNG between PAG, PPTETS and QE, the Company recognizes estimated claims in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2025 amounting to USD4,926,057 and for the year ended December 31, 2024 amounting to USD6,739,177 (Note 31a and 31b).

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Insiden Ledakan Pipa Gas di Rumah Makan Famili Medan

Pada tanggal 15 Januari 2024, terjadi ledakan di Rumah Makan Famili, Kota Medan, yang berasal dari pipa milik PGN. Berdasarkan hasil olah TKP dan dugaan awal pihak kepolisian, hal ini disebabkan karena adanya upaya pencurian dengan cara memotong pipa PGN yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa dan adanya api yang berasal dari dari rokok yang dinyalakan oleh pelaku. Akibat dari meledaknya pipa tersebut mengakibatkan beberapa bangunan disekitar rumah makan tersebut mengalami kerusakan.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan ("Polrestabes Medan") kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim pada tanggal 23 Januari 2024 ("Surat Perintah Penyelidikan"), dengan merujuk kepada dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 359 jo. Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat dan/atau Pasal 187 jo. Pasal 188 mengguagenai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran atau ledakan.

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan termaksud, telah dilakukan pemberian keterangan oleh PGN dengan panggilan terakhir pada tanggal 19 Februari 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2024 Polrestabes Kota Medan menerbitkan surat Ketetapan Nomor: S.TAP.Lidik/417-b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan. Adapun dasar penerbitan surat tersebut adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Gas Pipe Explosion Incident at Rumah Makan Famili Medan

On January 15, 2024, an explosion occurred at Rumah Makan Famili in Medan, originating from a pipe owned by PGN. Based on the results of the crime scene investigation and initial suspicions from the police, this incident was caused by an attempted theft involving the cutting of the PGN pipe, which led to a gas leak and a fire ignited by a cigarette lit by the perpetrator. The explosion resulted in damage to several buildings surrounding the restaurant.

The Medan Metropolitan Police Department ("Polrestabes Medan") subsequently issued Investigation Order Number Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim on January 23, 2024 ("Investigation Order"), referring to the alleged criminal acts based on Article 359 in conjunction with Article 360 of the Penal Code regarding negligence resulting in death or serious injury and/or Article 187 in conjunction with Article 188 regarding acts deliberately causing fire or explosion.

Based on the Investigation Order, PGN provided testimony with the last summons on February 19, 2024.

On June 10, 2024, the Medan Police Headquarters issued a letter of Determination Number: S.TAP.Lidik/417-b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim regarding the Termination of Investigation. The basis for issuing this letter is that no criminal event has been found in the case.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Permohonan arbitrase oleh Gunvor ke *London Court of International Arbitration* ("LCIA") atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN

Sesuai dengan Klausul 2.1 MSPA, komitmen untuk menjual dan membeli LNG berdasarkan MSPA disepakati dengan menandatangani CN oleh para pihak. Pada 3 November 2023, PGN telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Pembeli terkait pelaksanaan CN (Catatan 35p).

Dalam pelaksanaan MSPA dan CN untuk tahun 2024, pada 13 September 2024 Gunvor mengajukan permohonan arbitrase ("PA") ke LCIA terhadap PGN sebagaimana diatur dalam MSPA dan CN, dengan Gunvor sebagai Pemohon Arbitrase dan PGN sebagai Termohon Arbitrase. Pada 31 Oktober 2024 Perusahaan telah menyampaikan Tanggapan atas PA melalui konsultan hukum Mayer Brown.

Pada 20 Januari 2025, LCIA telah menyampaikan penetapan pembentukan formasi *Tribunal*. Pada 17 Febuari 2025, Gunvor melalui konsultan hukumnya telah menyampaikan *Statement of Case* ("SOC") kepada konsultan hukum PGN, Mayer Brown. Pada 20 Februari 2025, *Case Management Conference* ("CMC") pertama telah dilaksanakan secara daring.

LCIA menyepakati bahwa tanggal penerimaan SOC Gunvor oleh para pihak terhitung pada 28 Februari 2025, dan perusahaan telah menyampaikan tanggapan berupa *Statement of Defense and Counterclaim* ("SODC") pada 31 Maret 2025.

Pada tanggal 28 April 2025, Gunvor menyampaikan *Statement of Reply and Defense to Counterclaim* ("SORDC") dan PGN menyampaikan tanggapannya dalam *Statement of Reply to Defense to Counterclaim* pada tanggal 26 Mei 2025. Pada tanggal 6 Juni 2025 Gunvor menyampaikan amendemen pada SOC kepada *Tribunal* dan PGN. Atas hal tersebut, PGN telah menyampaikan amendemen dari SODC pada tanggal 30 Juni 2025.

Pada bulan Juli hingga September 2025 telah dilakukan serangkaian proses arbitrase yang tahapannya telah mencapai *document production*. PGN telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta dalam proses *document production* di bulan Oktober 2025.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. Arbitration request from Gunvor to London Court of International Arbitration("LCIA") due to Notification of Force Majeure in the Implementation of the MSPA and CN

In accordance with Clause 2.1 of the MSPA, the commitment to sell and purchase LNG under the MSPA is agreed upon by signing the CN by the parties. On November 3rd 2023, PGN submitted Force Majeure notice to Buyer in relation to implementation of the CN (Note 35p).

In the implementation of the MSPA and CN for year 2024, on September 13, 2024 Gunvor filed an Reques for Arbitation ("RFA") to the LCIA against PGN as regulated on the MSPA and CN, with Gunvor as the Arbitration Claimant and PGN as the Arbitration Respondent. On October 31, 2024, the Company submitted a Response to the RFA through legal consultant Mayer Brown.

On January 20, 2025, LCIA submitted a determination on the formation of the Tribunal. On February 17, 2025, Gunvor, through its legal consultant, submitted a Statement of Case ("SOC") to PGN's legal consultant, Mayer Brown. On February 20, 2025, the first Case Management Conference ("CMC") was held online.

The LCIA agreed that the date of receipt of Gunvor's SOC by the parties is counted from February 28, 2025, and the Company has provided a response in the form of a Statement of Defense and Counterclaim ("SODC") on March 31, 2025.

On April 28, 2025, Gunvor submitting their Statement of Reply and Defense to Counterclaim ("SORDC") and PGN then presented its response in the Reply to Defense to Counterclaim on May 26, 2025. On June 6, 2025, Gunvor submitting their amended SOC to Tribunal and PGN. In response, PGN submitted an amendment to its SODC on June 30, 2025.

A sequence of arbitration proceedings was undertaken during the period July through September 2025, the procedural stage of which has advanced to document production. PGN has provided the documents requested as part of the document production process in October 2025.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Permohonan arbitrase oleh Gunvor *ke London Court of International Arbitration* ("LCIA") atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN (lanjutan)

Pada periode bulan Oktober hingga Desember 2025 telah dilakukan tahapan *document production* yang mana PGN dan Gunvor telah menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, telah disampaikan *witness statement* pada bulan Desember 2025 oleh Gunvor. Tahapan arbitrase selanjutnya adalah *exchange expert report* yang dijadwalkan di bulan Februari 2026.

Total nilai klaim yang telah diajukan Gunvor berdasarkan *Statement of Claim* dan Amendemennya, dan akan diproses oleh Tribunal pada Hearing bulan Mei-Juni 2026 sampai dengan saat ini adalah sebesar USD130,407,870.36.

Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktifitas bisnis Perusahaan.

j. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lahan di Cikarang Barat di Pengadilan Negeri Cikarang

Bahwa Penggugat mengklaim selaku pemilik atas lahan seluas kurang lebih 77.500 M² yang terletak di kecamatan Cikarang Barat yang dikuasai oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II). Berdasarkan penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini tanah tersebut masih dalam proses sertifikasi.

PGN dilibatkan sebagai Turut Tergugat III mengingat adanya aset berupa pipa pada tanah yang disengketakan. Dalam perkara ini, PGN telah terlebih dahulu melakukan pemanfaatan tanah kepada PJT II melalui perjanjian sewa menyewa sejak tahun 2018. Oleh karena itu, PGN berargumen dalam perkara ini bahwa PGN sebagai penyewa beritikad baik.

Penggugat dalam gugatannya meminta Majelis Hakim menyatakan sah kepemilikan lahan seluas kurang lebih 77.500 M2 kepada Penggugat serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil senilai IDR1.000,- (seribu rupiah) kepada Kementerian PUPR dan PJT II selaku Tergugat I dan Tergugat II.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. Arbitration request from Gunvor to London Court of International Arbitration("LCIA") due to Notification of Force Majeure in the Implementation of the MSPA and CN (continued)

During the period from October to December 2025, the document production phase was conducted, with both PGN and Gunvor successfully submitting all requisite documentations. Furthermore, a witness statement was filed by Gunvor in December 2025. The subsequent stage of the arbitration proceedings involves the exchange of expert reports, which is scheduled to take place in February 2026.

Total value of claims submitted by Gunvor based on the Statement of Claim and its Amendments, and which will be processed by the Tribunal at the Hearing in May-June 2026 is USD130.407.870,36.

As of the date of the report, the Company believes that there are no impact on its consolidated financial report. The Company respects the ongoing legal process and continues to monitor the situation to ensure that there are no disruptions to the Company' operations and business activities.

j. Lawsuit for Unlawful Act Regarding Land in West Cikarang at the Cikarang District Court

The Plaintiff asserts a claim of ownership over a parcel of land measuring approximately 77,500 square meters located in the sub-district of West Cikarang, which is currently under the control of PJT II (Perum Jasa Tirta II). Based on the explanation provided by the Ministry of Public Works and Public Housing (Kementerian PUPR), the land is presently undergoing the certification process.

PGN has been impleaded as Co-Defendant III due to the presence of its pipeline assets on the disputed property. PGN had previously utilized the land under a lease agreement with PJT II, which has been in effect since 2018. Consequently, PGN maintains the legal argument in this case that it is a good-faith lessee.

In its claim, the Plaintiff requests that the Panel of Judges declare the ownership of the approximately 77,500 M² land validly held by the Plaintiff and further seeks material and immaterial damages totalling IDR1,000 (one thousand Rupiah) from Kementerian PUPR and PJT II, designated as Defendant I and Defendant II, respectively.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

j. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Lahan di Cikarang Barat di Pengadilan Negeri Cikarang (lanjutan)

PGN sebagai Turut Tergugat III dimohonkan untuk mematuhi isi putusan ini. Dalam hal majelis mengabulkan gugatan Penggugat, untuk selanjutnya agar perjanjian sewa menyewa yang semula dilakukan oleh PGN dengan PT PJT II beralih kepada Penggugat.

Saat ini proses pemeriksaan perkara mencapai tahapan pengajuan bukti surat oleh masing-masing Pihak yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025.

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 telah dilakukan serangkaian proses persidangan dan pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2025.

Atas perkara ini, posisi PGN sebagai Turut Tergugat III hanya diwajibkan untuk mematuhi isi putusan dan tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

k. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Klaim Kepemilikan Pipa oleh LEMASKO

Bahwa LEMASKO mengklaim selaku penerima hibah/pemohon eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo Nomor: 31/Pen.Pdt/Eks/2021/PN.Cbi dimana aset milik pipa milik Pertagas diklaim oleh LEMASKO sebagai aset yang tercantum dalam penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

LEMASKO sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan substansi dan pihak yang sama, sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 614/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dan telah melakukan pencabutan gugatan dan LEMASKO saat ini kembali mengajukan gugatan baru dengan register perkara No. No. 840/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan, LEMASKO mengklaim bahwa pada saat dilakukannya eksekusi, Pertagas menyatakan keberatan namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Sehingga Pertagas dianggap telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atas obyek pipa besi yang tercatat dalam Berita Acara Konstatering dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong, yakni berupa pipa besi panjang 4-25 meter sejumlah 1500 ton.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

j. Lawsuit for Unlawful Act Regarding Land in West Cikarang at the Cikarang District Court (continued)

PGN, as Co-Defendant III, is requested to comply with the terms of the judgment. Should the panel grant the Plaintiff's claim, the request specifies that the existing lease agreement between PGN and PT PJT II shall be transferred to the Plaintiff

The current stage of the trial proceedings is the submission of documentary evidence by each respective party, which is scheduled to take place on October 6, 2025.

The period from October to December 2025 involved extensive proceedings, with the Tribunal delivering its Interlocutory Decision on December 15, 2025.

In this matter, PGN's position as Co-Defendant III is limited to an obligation to adhere to the final judgment, and the case is assessed to have no material impact on the Company's financial condition or business continuity.

k. Lawsuit for Unlawful Act Regarding Pipeline Ownership Claim by LEMASKO

LEMASKO claims to be the grantee/execution petitioner based on the Cibinong District Court Decision No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi and the Execution Order No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi in conjunction with (Jo) No. 31/Pen.Pdt/Eks/2021/PN.Cbi. Under these rulings, LEMASKO asserts that certain pipeline assets owned by Pertagas are included within the scope of the court's execution order.

LEMASKO previously filed a lawsuit involving the same substance and parties under Case Registry No. 614/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, which was subsequently withdrawn. However, LEMASKO has since refiled the claim under a new case registry, No. 840/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

In the lawsuit, LEMASKO alleges that while Pertagas raised objections during the execution process, it failed to provide sufficient proof of ownership. Consequently, the Plaintiff alleges that Pertagas willfully and unlawfully took possession of the subject matter—specifically, 1,500 tons of steel pipes measuring 4–25 meters in length—as recorded in the Cibinong District Court's Berita Acara Konstatering (Official Report of Identification) and Execution Order.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

l. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Klaim Kepemilikan Pipa oleh LEMASKO (lanjutan)

Dalam gugatan menyebutkan bahwa, total nilai gugatan materiil yang diajukan adalah IDR7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan imateriil sebesar IDR20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah). PGN sebagai Turut Tergugat I dimohonkan untuk mematuhi isi putusan ini. Penggugat menempatkan Pertagas sebagi Tergugat I serta PGN dan Pertamina sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena PGN dan Pertamina merupakan pemegang saham Pertagas.

Atas perkara ini, posisi PGN sebagai Turut Tergugat I hanya diwajibkan untuk mematuhi isi putusan dan tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

m. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor. 655/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Pst

Pada tanggal 01 Oktober 2025 Penggugat mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pertagas sebagai Tergugat dengan klaim bahwa tindakan Pertagas telah mengambil tanpa hak pipa besi obyek penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo. No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 23 Februari 2021 yang telah tercatat dalam Berita Acara Konstatering Pengadilan Negeri Gresik.

Dalam gugatan menyebutkan bahwa, total nilai gugatan materiil yang diajukan adalah IDR1.875.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan imateriil sebesar IDR10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah). Mediasi Para Pihak dinyatakan gagal pada tanggal 18 Desember 2025. Hingga laporan ini disampaikan Pertagas masih menunggu panggilan sidang berikutnya.

Pertagas sebagai Tergugat akan hadir pada setiap jadwal persidangan dan akan menyiapkan dokumen, bukti, dan jawaban yang diperlukan demi membela kepentingan Perusahaan.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

l. Lawsuit for Unlawful Act Regarding Pipeline Ownership Claim by LEMASKO (continued)

The lawsuit seeks material damages totaling IDR7,500,000,000.00 (Seven Billion Five Hundred Million Rupiah) and immaterial damages of IDR20,000,000,000.00 (Twenty Billion Rupiah). PGN, as Co-Defendant I, is requested to comply with the final court decision. The Plaintiff has named Pertagas as Defendant I, while PGN and Pertamina are named as Co-Defendant I and Co-Defendant II, respectively, in their capacities as shareholders of Pertagas.

Regarding this matter, PGN's position as Co-Defendant I only requires the Company to comply with the court's eventual ruling. There is no material impact on the Company's financial condition or business continuity.

m. Lawsuit for Unlawful Act Number. 655/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Pst.

On October 1, 2025, the Plaintiff registered a Tort lawsuit (Perbuatan Melawan Hukum) at the Central Jakarta District Court naming Pertagas as the Defendant. The Plaintiff claims that Pertagas unlawfully took possession of steel pipes that were the subject of the Cibinong District Court Execution Order No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo. No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dated February 23, 2021, as recorded in the Berita Acara Konstatering (Official Report of Identification) of the Gresik District Court.

The lawsuit seeks material damages totaling IDR1,875,000,000.00 (One Billion Eight Hundred Seventy-Five Million Rupiah) and immaterial damages of IDR10,000,000,000.00 (Ten Billion Rupiah). On December 18, 2025, the mediation process between the parties was declared unsuccessful. As of the date of this report, Pertagas is awaiting the summons for the next hearing.

Pertagas, as the Defendant, intends to attend all scheduled court proceedings and will prepare the necessary documentation, evidence, and legal responses to protect the Company's interests.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

n. Dugaan tindak pidana korupsi atas transaksi pemberian uang muka dari Perusahaan dengan PT Inti Alasindo Energi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ("KPK RI") melakukan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan transaksi pemberian uang muka dari Perusahaan dengan PT Inti Alasindo Energi tahun 2017. Dalam perkara ini, KPK RI telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yang mana dua diantaranya adalah eks Direksi Perusahaan. KPK RI menetapkan individu-individu tersebut sebagai tersangka, dan bukan Perusahaan atau Grup secara korporasi. Manajemen percaya bahwa proses penyidikan ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

n. Alleged corruption crimes related to the advance payment transaction made by the Company to PT Inti Alasindo Energi

Corruption Eradication Commission of Republic of Indonesia ("KPK RI") conducted an investigation in connection with alleged corruption related to the advance payment transaction between the Company and PT Inti Alasindo Energi in 2017. In this case, KPK RI has named four suspects, two of which are the Company's ex directors. KPK RI has designated those individuals as suspects, rather than the Company or Group as a corporate. Management believes that the investigation have no impact to the Group's consolidated financial statements.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi, utang usaha dan lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Grup. Grup juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas dan piutang usaha, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Direksi menyediakan kebijakan tertulis untuk manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis untuk area khusus, seperti risiko nilai tukar mata uang, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai secara ekonomis atas risiko keuangan. Masing-masing unit bisnis melaksanakan manajemen risiko berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Komite Manajemen Risiko memonitor pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Grup.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The principal financial liabilities of the Group consist of trade and other payables, accrued liabilities, short-term bank loans, lease liabilities, and long-term loans. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Group. The Group also has various financial assets such as cash and cash equivalents and trade receivables, which arised directly from their operations.

The Group's business involves taking risks in a targeted manner and managing them professionally. The core functions of the Group's risk management are to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

The Directors provide written policies for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group identifies, evaluates and economically hedges its financial risks. Each business unit carries out the risk management based on the written policies approved by the Directors. Risk Management Committee monitors the risk management carried out by the Group.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan atas penjualan barang dan jasa.

Grup menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

- Meminta jaminan dalam bentuk kas atau *standby L/C* senilai dua bulan pemakaian gas;
- Memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik; dan
- Menerima pelanggan baru dan penjualan disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan delegasi kekuasaan Grup.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek, risiko kredit yang dihadapi Grup timbul karena wanprestasi dari *counterparties*. Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 5.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks, which includes credit risk, market risk and liquidity risk.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, when the Group's customers fail to fulfil their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from trade receivables from the sale of goods and services to customers.

The Group implements a range of policies and practices to mitigate the credit risk. The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:

- *Taking of deposits in form of cash or standby L/C that equivalent to two months' gas usage;*
- *Selecting customers with a strong financial condition and good reputation; and*
- *Accepting new customers and sales that are approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.*

With respect to credit risk arising from the other financial assets, which comprise cash and cash equivalent, restricted cash, and short-term investment, the Group's exposure to credit risk arises from default of the counterparties. The Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and only put the investments in banks with a high credit ratings. The maximum exposure equal to the carrying amount as disclosed in Notes 4 and 5.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap piutang usaha, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Maximum credit risk exposure relating to trade receivables, finance lease receivable and other receivables in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Piutang usaha (Catatan 6)	398.636.441	385.833.565	*Trade receivables (Note 6)*
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 14c)	77.433.017	83.452.726	*Finance lease receivable (Note 14c)*
Piutang lain-lain (Catatan 7)	47.374.401	27.781.710	*Other receivables (Note 7)*
Piutang lain-lain jangka Panjang (Catatan 11)	43.924.136	46.139.826	*Other long-term receivables (Note 11)*
Total	**567.367.995**	**543.207.827**	***Total***

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat piutang usaha (memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan operasi utama.

The following table breaks down the Group's credit exposure at carrying amounts of trade receivables (taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the main operations.

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Belum jatuh tempo	403.125.792	362.841.630	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
0 bulan - 3 bulan	14.806.626	26.594.523	*0 month - 3 months*
3 bulan - 6 bulan	2.171.408	6.585.108	*3 months - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	4.922.300	8.352.366	*6 months - 1 year*
> 1 tahun	169.554.094	171.719.968	*> 1 year*
Subtotal	594.580.220	576.093.595	*Subtotal*
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai	(195.943.779)	(190.260.030)	*Allowance for impairment*
Piutang usaha - neto	**398.636.441**	**385.833.565**	***Trade receivables - net***

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar

Grup memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Grup memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para kreditur.

(i) Risiko tingkat bunga

Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman Grup dengan tingkat bunga variabel.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk

The Group is exposed to market risk, in particular interest rate risk and foreign currency risk.

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group's short-term and long-term debt is charged with floating interest rates. Group strictly monitors the market interest rate fluctuation and if the interest rate significantly increases, they will renegotiate the interest rate to the lenders.

(i) Interest rate risk

Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The table below summarises the Group's borrowings with floating interest.

	31 Desember 2025/*December 31,* 2025			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	940.470	170.000.000	390.526.320	*Bank loans*
Total	**940.470**	**170.000.000**	**390.526.320**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	50.872.997	57.891.204	525.285.470	*Bank loans*
Total	**50.872.997**	**57.891.204**	**525.285.470**	***Total***

Analisis sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika tingkat suku bunga pinjaman bank dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar USD2.807.334.

Sensitivity analysis for interest rate risk

On December 31, 2025, had the interest rate of the bank loans with floating interest rate been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit before tax for the nine-month period ended would have been USD2,807,334 lower/higher.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas perubahan nilai tukar dolar AS sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, khususnya Rupiah dan Yen Jepang. Risiko ini muncul disebabkan aset dan kewajiban dan transaksi operasional Grup sebagian dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yen Jepang sehingga pelemahan dolar AS terhadap Rupiah dan Yen Jepang dapat secara negatif mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup.

Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada kas dan setara kas, piutang usaha – neto, investasi jangka pendek, taksiran pengembalian pajak, piutang lain-lain - neto, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, utang pajak, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka pendek.

Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang disajikan pada Catatan 39.

Analisis sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2025, penurunan (kenaikan) nilai tukar dolar AS terhadap mata uang asing sebesar 100 *basis point* dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akan naik (turun) masing-masing sebesar USD1.986.048 dan (USD1.946.720), terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha - neto, taksiran pengembalian pajak, piutang lain-lain - neto, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, utang pajak, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka pendek.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that arises from the changes of the exchange rate of US dollar as the reporting currency against foreign currencies, in particular Rupiah and Japanese Yen. This risk Some of the Group's assets, liabilities and operational transactions are conducted in Rupiah or Japanese Yen, therefore, weakening of US dollar against Rupiah and Japanese Yen will negatively impact the result and financial position of the Group.

Monetary balances denominated in currencies other than US Dollar were included in cash and cash equivalents, trade receivables - net, short-term investment, estimated claim for tax refund, other receivable - net, long-term employee's benefits liabilities, taxes payable, short-term employee's benefits liabilities, accrued liabilities, lease liabilities, other payables, and non-current bank loan.

The Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2025 and December 31, 2024 which presented in Note 39.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of December 31, 2025, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in Indonesian Rupiah, Japanese Yen, and Singapore Dollar.

As of December 31, 2025, decrease (increase) in the exchange rates of the US dollar against foreign currencies by 100 basis point with all other constant variables, profit before tax for the year ended would increase (decrease) by USD1,986,048 and (USD1,946,720) respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables - net, estimated claim for tax refund, other receivable - net, long-term employee's benefits liabilities, taxes payable, short-term employee's benefits liabilities, accrued liabilities, lease liabilities, other payables, and non-current bank loan.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Grup terpapar risiko volatilitas harga terutama terkait dengan harga minyak brent, *Indonesian Crude Price* (ICP), dan *Japan Crude Cocktail* (JCC) yang menjadi basis penentuan harga jual LNG di pasar internasional. Grup memonitor pergerakan (tren) dan analisis pasar atas harga minyak brent secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangannya.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk

The Group is effected by the risk of price volatility especially related to brent oil price, Indonesian Crude Price (ICP), and *Japan Crude Cocktail* (JCC) *which become basis to formulate the LNG sale price in the international market. The Group monitors the market trend and analysis of coal price strictly and continously to minimize significant and negative impact to its financial performance.*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The Group evaluates and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of funds to settle the due obligations. In general, funds needed to settle the short-term and long-term liabilities are obtained from settlement of trade receivables from the customers with one month credit term.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities:

	31 Desember/*December 31*, 2025				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ ***On demand and within 1 year***	**Dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun/** ***Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years***	**Total/** ***Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	258.190.113	-	-	258.190.113	*Trade payables*
Utang lain-lain	74.166.938	-	-	74.166.938	*Other payables*
Pinjaman bank jangka pendek	35.000.000	-	-	35.000.000	*Short-term bank loan*
Liabilitas yang masih harus dibayar	330.180.397	-	-	330.180.397	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang	148.042.600	441.719.254	117.609.007	707.370.861	*Long-term bank loan*
Liabilitas sewa	42.594.142	287.751.917	26.085.084	356.431.143	*Lease liabilities*
Jumlah	**888.174.190**	**729.471.171**	**143.694.091**	**1.761.339.452**	***Total***

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (lanjutan)

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ *On demand within 1 year*	**Dalam waktu 1 tahun sampai sampai dengan 5 tahun/*Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	237.397.488	-	-	237.397.488	*Trade payables*
Utang lain-lain	74.238.012	-	-	74.238.012	*Other payables*
Pinjaman bank jangka pendek	100.000.000	-	-	100.000.000	*Short-term bank loan*
Liabilitas yang masih harus dibayar	287.242.558	-	-	287.242.558	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang	72.449.958	577.551.865	126.138.848	776.140.671	*Long-term bank loan*
Liabilitas sewa	41.359.840	327.789.491	26.085.084	395.234.415	*Lease liabilities*
Jumlah	**812.687.856**	**905.341.356**	**152.223.932**	**1.870.253.144**	**Total**

d. Manajemen modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas. Untuk tujuan tersebut, Grup mendefinisikan utang sebagai utang berbunga yaitu utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa.

d. Capital management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximising shareholder value.

Some of the Group's debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. The Group has complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements, primarily for debt to equity ratio. For this purpose, the Group defines debt as interest-bearing debt, consists of bank loans, bonds payable and lease liabilities.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen modal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, akun-akun Grup yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Capital management (continued)

As of December 31, 2025 and December 31, 2024, the Group's debt to equity ratio accounts are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Pinjaman bank jangka panjang	707.370.861	776.140.671	*Long-term bank loans*
Pinjaman bank jangka pendek	35.000.000	100.000.000	*Short-term bank loans*
Liabilitas sewa	356.431.143	395.234.415	*Lease liabilities*
Total utang	**1.098.802.004**	**1.271.375.086**	***Total debt***
Total ekuitas	**3.607.835.572**	**3.671.527.284**	***Total equity***
Rasio utang terhadap ekuitas	0,30	0,35	***Debt to equity ratio***

38. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat instrumen keuangan Grup dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following tables set forth the carrying values of the Group's financial instruments in its consolidated statement of financial position as of December 31, 2025 and December 31, 2024:

	Jumlah/*Total*	**Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/ *Financial assets/liabilities measured at amortised cost***	**Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss***	**Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income***
31 Desember/*December 31,* 2025				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.336.288.104	1.336.288.104		-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	186.060.692	186.060.692	-	-
Piutang usaha/*Trade receivables*	398.636.441	398.636.441	-	-
Piutang sewa pembiayaan	77.433.017	77.433.017	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	47.374.401	47.374.401	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	43.924.136	43.924.136	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.089.716.791**	**2.089.716.791**	**-**	**-**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	281.581.259	281.581.259	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	74.166.938	74.166.938	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	330.180.397	330.180.397	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	356.431.143	356.431.143	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	35.000.000	35.000.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	707.370.861	707.370.861	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**1.761.339.452**	**1.761.339.452**	**-**	**-**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	Jumlah/*Total*	Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/ *Financial assets/liabilities measured at amortised cost*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
31 Desember/*December 31, 2024*				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.383.182.362	1.383.182.362	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	169.636.047	169.636.047	-	-
Investasi jangka pendek/*Short term investment*	618.927	618.927	-	-
Piutang usaha/*Trade receivables*	385.833.565	385.833.565	-	-
Piutang sewa pembiayaan	83.452.726	83.452.726	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	27.781.710	27.781.710	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	46.139.826	46.139.826	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.096.645.163**	**2.096.645.163**	**-**	**-**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	237.397.488	237.397.488	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	74.238.012	74.238.012	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	287.242.558	287.242.558	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	395.234.415	395.234.415	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	100.000.000	100.000.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	776.140.671	776.140.671	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**1.870.253.144**	**1.870.253.144**	**-**	**-**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

1. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

   Nilai tercatat seluruh aset keuangan di atas telah mendekati nilai wajar aset keuangan tersebut.

1. Cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, and other receivables.

The carrying values of the above financial assets approximate the fair value of the financial assets.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

2. Piutang sewa pembiayaan

   Nilai wajar aset keuangan ini ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga implisit dalam sewa.

3. Piutang usaha dan piutang lain-lain jangka panjang

   Aset keuangan di atas merupakan piutang tanpa bunga yang pada pencatatan awal diakui pada nilai wajar berdasarkan bunga pasar pada tanggal pengakuan awal. Selanjutnya, penyesuaian nilai wajar diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

4. Utang usaha, utang lain-lain liabilitas yang masih harus dibayar dan utang bank jangka pendek.

   Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar.

5. Utang bank jangka panjang

   Liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap setara atau melebihi suku bunga pasar, atau suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah pokok terutangnya mendekati nilai wajar.

   Liabilitas keuangan di atas disajikan dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi ditentukan dengan memperhitungkan diskonto, premi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode SBE.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2. Finance lease receivables

   The fair value of this financial asset is determined by discounted cash flow using implicit interest rate on lease.

3. Non-current account receivables and other receivables

   The above financial assets represent non-interest bearing receivables that are initially recognised at fair value based on the market rate on their initial recognition date. Subsequently, fair value adjustments are amortised using the effective interest method.

4. Trade payables, other payables, accrued liabilities and short-term bank loan.

   All of the above financial liabilities are due within 12 months, therefore the carrying value of the financial liabilities approximate their fair value.

5. Long-term bank loan

   This financial liabilities represents debt with fixed rate at or above market rate, or floating interest rates which are adjusted with the movement of market interest rates, therefore the principal outstanding approximate their fair values.

   This financial liabilities is carried at amortized costs using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount, premium and transaction costs that are integral part of the EIR method.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hierarki nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value hierarchy is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).*

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2025		**31 Desember/ *December 31,* 2024**		
Aset dalam Rupiah					*Assets in Rupiah*
Kas dan setara kas	IDR	9.397.377.987.360	IDR	10.978.562.180.555	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	IDR	235.920.387.120	IDR	24.419.754.428	*Restricted cash*
Piutang usaha - neto	IDR	1.345.710.889.207	IDR	1.059.689.627.553	*Trade receivables-net*
Taksiran tagihan pajak	IDR	1.053.655.960.720	IDR	1.050.293.362.633	*Estimated claim for tax refund*
Piutang lain-lain - neto	IDR	154.460.764.480	IDR	135.191.806.162	*Other receivables-net*
Investasi jangka pendek	IDR	-	IDR	10.000.000.000	*Short term investment*
Sub total	IDR	12.187.125.988.887	IDR	13.258.156.731.331	*Sub-total*
Aset dalam Yen Jepang					*Assets in Japanese Yen*
Kas dan setara kas	JPY	1.072.479.588	JPY	92.652	*Cash and cash equivalents*
Sub total	JPY	1.072.479.588	JPY	92.652	*Sub-total*
Aset dalam Dolar Singapura					*Assets in Singapore Dollar*
Kas dan setara kas	SGD	85.063	SGD	94.993	*Cash and cash equivalents*
Sub total	SGD	85.063	SGD	94.993	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD**	**735.862.830**	**USD**	**820.653.262**	***US dollar equivalents***
Liabilitas dalam Rupiah					*Liabilities in Rupiah*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	IDR	2.049.496.318.320	IDR	1.687.739.167.429	*Long-term employee's benefits liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	1.693.360.184.560	IDR	1.102.774.772.388	*Short-term employee's benefits liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar	IDR	940.403.893.440	IDR	750.797.952.672	*Accrued Liabilities*
Utang pajak	IDR	769.426.845.440	IDR	696.461.460.805	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	IDR	212.226.349.121	IDR	494.071.699.338	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	IDR	355.429.763.920	IDR	392.036.517.830	*Other payables*
Sub total	IDR	6.020.343.354.801	IDR	5.123.881.570.462	*Sub-total*
Liabilitas dalam Yen Jepang					*Liabilities in Japanese Yen*
Pinjaman jangka panjang	JPY	27.844.565.000	JPY	29.435.683.000	*Long-term loans*
Sub total	JPY	27.844.565.000	JPY	29.435.683.000	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD**	**539.244.078**	**USD**	**503.621.395**	***US dollar equivalents***

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Sebagian besar pembelian gas dalam mata uang Dolar AS juga dijual dalam dolar AS, sehingga lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing terjadi secara alami. Saat ini, liabilitas yang timbul dari pembiayaan dalam mata uang asing tidak dilindung nilai.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain dolar AS pada tanggal 31 Desember 2025 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, aset moneter neto akan turun sekitar USD1.083.565.

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Most purchases of gas were in US Dollars which also sold in US dollar, therefore naturally hedging the related foreign currency exposures. Currently, liabilities denominated in foreign currency arising from financing activities are not hedged.

If assets and liabilities in currencies other than US dollar as of December 31, 2025 are translated using the exchange rate as of the issuance date of these consolidated financial statements, the total net monetary assets will increase by approximately USD1,083,565.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Niaga dan transmisi

   Segmen niaga dan transmisi gas melakukan kegiatan niaga dan transmisi minyak dan gas dan pengolahan LNG kepada pelanggan industri, komersial dan rumah tangga, serta *LNG trading*.

2. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

   Segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

3. Operasi lainnya

   Segmen operasional lainnya terkait dengan jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

40. SEGMENT INFORMATION

For management purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

1. *Trading and transmission*

   The gas trading and transmission segment is involved in trading and transmission of oil and gas and processing of LNG to industrial, commercial and household customers, and LNG trading.

2. *Exploration and production of oil and gas*

   The exploration and production of oil and gas segment is mainly involved in exploration, exploitation and business development in oil and gas.

3. *Other operations*

   The other operations segment provides fiber optic rental for network services and constructions and maintenance services to the customers and management and leasing buildings and equipment.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Grup.

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table represents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments.

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	3.711.272.221	288.990.606	375.956.152	(400.300.773)	3.975.918.206	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(3.139.874.100)	(244.726.686)	(282.394.263)	389.400.275	(3.277.594.774)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(32.455.237)	(5.230.031)	(6.512.382)	-	(44.197.650)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(609.453)	(154.687)	(2.640.798)	104.306	(3.300.632)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(3.523.489)	(60.131)	(1.758.423)	-	(5.342.043)	*Depreciation*
Lain-lain	(28.500.238)	(4.293.408)	(9.318.117)	-	(42.111.762)	*Others*
Jumlah beban segmen	(3.204.962.517)	(254.464.943)	(302.623.983)	389.504.581	(3.372.546.861)	*Total segment expenses*
Laba segmen	506.309.704	34.525.663	73.332.169	10.796.192	603.371.345	***Segment profit***
Beban Perusahaan dan Entitas Anak Yang Tidak Dapat Dialokasikan	-	-	-	-	(72.929.976)	*Unallocated expenses of the Company and Subsidiaries*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	27.791.020	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(38.598.156)	*Other expense*
Laba operasi					519.634.233	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(64.951.330)	*Finance cost*
Rugi selisih kurs	-	-	-	-	(7.226.188)	*Loss on foreign exchange*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	63.879.476	*Finance income*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	76.401.988	*Share of profit from joint ventures investment*
Penurunan nilai properti minyak dan gas	-	-	-	-	(99.532.172)	*Impairment losses of property of oil and gas*
Laba sebelum pajak penghasilan					488.206.007	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	7.839.948.661	1.039.587.054	221.442.485	(2.868.593.989)	6.232.384.211	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					6.232.384.211	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	2.417.309.209	548.048.262	89.668.303	(430.477.133)	2.624.548.641	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					2.624.548.641	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	163.164.343	111.116.637	8.148.619	-	282.429.599	***Capital expenditures***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *40. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	3.433.609.861	369.538.499	365.158.401	(379.687.574)	3.788.619.187	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(2.821.725.377)	(306.900.071)	(291.783.623)	389.170.786	(3.031.238.285)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(26.999.963)	(4.906.358)	(7.719.924)	-	(39.626.245)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(855.500)	(239.785)	(6.173.776)	1.969.391	(5.299.670)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(4.630.562)	(124.499)	(3.839.838)	-	(8.594.899)	*Depreciation*
Lain-lain	(28.842.013)	(4.150.995)	(11.430.656)	66.512	(44.357.152)	*Others*
Jumlah beban segmen	(2.883.053.415)	(316.321.708)	(320.947.817)	391.206.689	(3.129.116.251)	*Total segment expenses*
Laba segmen	550.556.446	53.216.791	44.210.584	(11.519.115)	659.502.936	***Segment profit***
Beban perusahaan dan entitas anak yang tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	(103.336.953)	*Unallocated expenses of the Company and subsidiaries*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	40.293.915	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(73.802.786)	*Other expense*
Laba operasi					522.657.112	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(75.327.749)	*Finance cost*
Laba selisih kurs	-	-	-	-	11.125.284	*Gain on foreign exchange*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	60.189.845	*Finance income*
Provisi atas kontrak LNG	-	-	-	-	(3.486.935)	*Provision for LNG Contract*
Penurunan nilai ventura bersama	-	-	-	-	(9.068.015)	*Impairment losses of property of oil and gas*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	72.200.336	*Share of profit from joint ventures investment*
Laba sebelum pajak penghasilan					578.289.878	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	7.908.172.122	1.203.458.524	206.117.076	(2.901.797.992)	6.415.949.730	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					6.415.949.730	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	2.514.056.264	594.984.499	79.402.762	(444.021.079)	2.744.422.446	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					2.744.422.446	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	**148.710.293**	**90.751.849**	**15.912.322**	**-**	**255.374.464**	***Capital expenditures***

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) (Catatan 27), dimana tercatat sebagai pendapatan pada segmen niaga dan transmisi, dan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) (Note 27), in which recorded as revenues on trading and transmission, and exploration and production of oil and gas segments.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

41. TRANSAKSI NON-KAS / *41. NON-CASH TRANSACTIONS*

	31 Desember/ *December 31*, 2025	31 Desember/ *December 31*, 2024	
Penambahan/(Pengurangan) aset minyak dan gas yang berasal dari penambahan atau penyesuaian biaya pembongkaran, dan lainnya	1.063.052	14.625.986	*Addition/(Deduction) of oil and gas properties from additions or adjustments of dismantling costs, and others*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud melalui utang, beban akrual, kapitalisasi biaya pinjaman dan penambahan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	73.849.675	91.397.199	*Acquisition of fixed assets and intangible assets through payables, accrued expense, capitalisation of finance cost and addition to assets abandonment and site restoration obligations*
Penambahan aset hak guna dengan mengkredit liabilitas sewa	3.825.284	11.619.468	*Addition of right-of-use assets by crediting lease liabilities*
Piutang dividen dari ventura bersama	(574.163)	-	Dividend receivable from joint venture

42. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN / *42. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES*

				Perubahan non-kas/*Non-cash change*			
	1 Januari/ *January* 2025	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December 31*, 2025
Pinjaman bank/*bank loans*	876.140.671	35.000.000	(173.133.366)	-	3.182.238	1.181.318	742.370.861
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	395.234.415	-	(41.430.217)	(15.744.535)	18.371.480	-	356.431.143
	1.271.375.086	**35.000.000**	**(214.563.583)**	**(15.744.535)**	**21.553.718**	**1.181.318**	**1.098.802.004**

				Perubahan non-kas/*Non-cash changes*			
	1 Januari/ *January* 2024	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from Financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December 31*, 2024
Pinjaman bank/*bank loans*	562.238.721	400.000.000	(63.651.115)	-	(22.446.935)	-	876.140.671
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	430.682.063	-	(36.923.038)	(17.015.634)	18.491.024	-	395.234.415
Utang obligasi/ *Bonds payable*	552.633.015	-	(552.961.000)	-	-	327.985	-
	1.545.553.799	**400.000.000**	**(653.535.153)**	**(17.015.634)**	**(3.955.911)**	**327.985**	**1.271.375.086**

43. REKLASIFIKASI AKUN / *43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Reklasifikasi Uang Muka ke Pendapatan Sewa yang Masih Harus Diterima

Reclassification of Advances to Accrued Lease Income

Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, manajemen melakukan perubahan kebijakan akuntansi dengan melakukan reklasifikasi penyajian pada laporan posisi keuangan konsolidasian Grup atas Transaksi Aset Kerjasama Operasi (Catatan 35i dan 35j) dari Uang Muka – bagian tidak lancar ke Pendapatan Sewa yang Masih Harus Diterima untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian reklasifikasi atas penyajian saldo pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In the process of preparing the consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2025, management made a change in accounting policy by reclassifying the presentation in the Group's consolidated statement of financial position for the Joint Operation Asset Transaction (Notes 35i and 35j), from Advances – non-current to Accrued Lease Income as of December 31, 2025 and 2024. Details for the reclassification of the disclosure in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 are as follow:

	Sebelum reklasifikasi/ *Beginning balance*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *Ending balance*	
Laporan posisi keuangan				***Statement of financial position***
Uang muka – bagian tidak lancar	37.483.781	(34.105.640)	3.378.141	*Advances - non-current portion*
Pendapatan sewa yang masih harus diterima	-	34.105.640	34.105.640	*Accrued lease income*
Total	**37.483.781**	**-**	**37.483.781**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa reklasifikasi ini tidak mengubah substansi laporan keuangan konsolidasian atau mempengaruhi pengguna laporan keuangan konsolidasian.

Management believes that this reclassification does not change the substance of the consolidated financial statements or affect the users of the consolidated financial statements.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN / *44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD*

Perubahan Nama Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 17 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 26 Januari 2026 dan telah menerima persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004617.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 29 Januari 2026, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perusahaan dari 'PT Perusahaan Gas Negara Tbk' menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Change of Company Name

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 29, 2025 which was notarized in the Notarial Deed No. 17 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 26, 2026 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0004617.AH.01. 02.TAHUN 2026 dated January 29, 2026, the shareholders approved the change in Company name from 'PT Perusahaan Gas Negara Tbk' to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY*

Informasi keuangan tambahan ini adalah informasi keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (entitas induk saja) pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas pengendalian bersama dan asosiasi berdasarkan metode biaya dan bukan metode ekuitas.

The supplementary financial information represents financial information of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (parent entity only) as of December 31, 2025 and for the year then ended, which present the Company's investments in subsidiaries under the cost method and investment in joint ventures and associated entities under the cost method, as opposed to the equity method.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	330.069.835	448.503.466	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	407.854	135.770	*Restricted cash*
Piutang usaha - neto	223.441.192	193.558.184	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	2.516.408	3.162.193	*Other receivables - net*
Piutang dari entitas anak	78.783.997	71.719.846	*Receivable from subsidiaries*
Taksiran tagihan pajak	7.697.368	24.386	*Estimated claims for tax refund*
Persediaan - neto	52.143.033	4.326.308	*Inventories - net*
Uang muka	66.784.699	18.206.571	*Advances*
Beban dibayar di muka	6.946.510	8.939.624	*Prepaid expenses*
Total aset lancar	768.790.896	748.576.348	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	271.539	*Restricted cash*
Uang muka, bagian tidak lancar	-	37.129.306	*Advances, non-current portion*
Pinjaman kepada entitas anak, bagian tidak lancar	114.714.892	123.997.439	*Loan provided to subsidiaries, non-current portion*
Penyertaan saham	2.928.498.082	2.928.498.080	*Investment in shares*
Aset tetap - neto	1.152.698.265	1.169.376.329	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - neto	6.303.607	6.964.653	*Right-of-use assets - net*
Aset takberwujud - neto	944.680	1.276.362	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan pajak	-	-	*Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	46.773.606	61.666.269	*Deferred tax assets*
Lain-lain	38.916.362	7.189.468	*Others*
Total aset tidak lancar	4.288.849.494	4.336.369.445	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**5.057.640.390**	**5.084.945.793**	***TOTAL ASSETS***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	109.617.197	70.472.971	*Trade payables*
Utang lain-lain	33.384.451	38.096.020	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	166.836.448	204.777.128	*Accrued liabilities*
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	148.042.600	72.449.958	*Short-term portion of long-term bank loans*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan	9.374.564	17.768.895	*Income taxes -*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36.208.504	55.260.855	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang kepada entitas anak	153.009.144	103.629.956	*Payable to subsidiaries*
Total liabilitas jangka pendek	656.472.908	562.455.783	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka panjang	559.328.261	703.690.713	*Long-term bank loans*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	72.027.462	72.027.462	*Accrued liabilities - long term*
Liabilitas imbalan pascakerja	110.079.875	98.384.929	*Post-employment benefits obligation*
Liabilitas sewa jangka panjang	148.323	279.848	*Long-term portion of lease liabilities*
Pendapatan diterima di muka	1.303.416	1.455.203	*Unearned income*
Total liabilitas jangka panjang	742.887.337	875.838.155	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**1.399.360.245**	**1.438.293.938**	***TOTAL LIABILITIES***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal IDR100 per saham Modal dasar - 70.000.000.000 dari saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B			*Share capital - par value of IDR100 per share Authorized - 70,000,000,000 shares consists of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	344.018.831	344.018.831	*Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares of which consist of 1 Series A Dwiwarna and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	284.339.313	284.339.313	*Additional paid-in capital*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	2.743.579.152	2.825.721.520	*Appropriated -*
- Tidak dicadangkan	291.952.190	189.399.853	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya	(5.609.341)	3.172.338	*Others components of equity*
TOTAL EKUITAS	**3.658.280.145**	**3.646.651.855**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.057.640.390**	**5.084.945.793**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
PENDAPATAN	2.798.511.174	2.549.268.365	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.573.221.543)	(2.255.441.133)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**225.289.631**	**293.827.232**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(88.119.619)	(103.036.437)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(7.224.753)	(6.291.351)	*Other expenses*
Pendapatan lain-lain	11.823.528	8.959.690	*Other income*
LABA OPERASI	**141.768.787**	**193.459.134**	***OPERATING INCOME***
Beban keuangan	(36.451.098)	(47.709.117)	*Finance costs*
Penurunan nilai pinjaman kepada pihak berelasi	-	(161.598.808)	*Impairment of loan to related party*
Pendapatan keuangan	32.931.214	34.740.573	*Finance income*
Laba/(rugi) selisih kurs	654.432	34.298.701	*Gain/(loss) on foreign exchange*
Provisi atas kontrak LNG	-	(3.486.935)	*Provision for LNG contract*
Pendapatan dividen	181.225.967	152.225.146	*Dividend income*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**320.129.302**	**201.928.694**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(28.177.112)	(12.528.841)	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA TAHUN BERJALAN	**291.952.190**	**189.399.853**	***PROFIT FOR THE YEAR***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	(8.781.682)	21.864.579	*Remeasurement of post-employment obligation, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	-	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(8.781.682)	21.864.579	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**283.170.508**	**211.264.432**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Changes in fair value of available-for-sale financial assets*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Keuntungan/ kerugian aktuarial/ *Actuarial gain/(loss)*	Saldo laba telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**(18.992.957)**	**2.826.831.298**	**221.363.165**	**3.657.860.366**	***Balance at January 1, 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	189.399.853	189.399.853	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(222.472.943)	(222.472.943)	*Payment of cash dividends*
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	(1.109.778)	1.109.778	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	21.864.579	-	-	21.864.579	*Other comprehensive income / loss for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**2.871.622**	**2.825.721.520**	**189.399.853**	**3.646.651.855**	***Balance at December 31, 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	291.952.190	291.952.190	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(271.542.219)	(271.542.219)	*Payment of cash dividends*
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	(82.142.368)	82.142.368	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(8.781.682)	-	-	(8.781.682)	*Other comprehensive income / loss for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**(5.910.059)**	**2.743.579.152**	**291.952.190**	**3.658.280.144**	***Balance at December 31, 2025***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	2.775.600.060	2.571.531.355	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga	17.321.380	13.395.058	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok	(2.279.831.498)	(1.900.686.627)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(259.162.538)	(261.420.965)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran kepada karyawan	(69.279.287)	(79.416.452)	*Payments to employees*
Pembayaran untuk beban keuangan	(36.242.529)	(44.785.840)	*Payments for finance cost*
Pembayaran pajak penghasilan	(73.816.199)	(123.992.619)	*Payments of income taxes*
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya	(407.854)	(407.309)	*Placement of restricted cash*
Pembayaran sengketa pajak	-	-	*Payments for tax disputes*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**74.181.536**	**174.216.601**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari anak perusahaan dan ventura bersama	181.226.227	152.203.488	*Dividends received from subsidiaries and joint ventures*
Penerimaan atas pelepasan investasi di entitas anak	-	-	*Proceeds from disposal of investment in a subsidiaries*
Pelepasan investasi jangka pendek	-	23.178.224	*Disposal of short-term investments*
Penambahan aset tetap	(22.684.414)	(11.486.367)	*Additions of fixed assets*
Pelunasan pinjaman pemegang saham dari anak perusahaan	-	155.553.268	*Receipt of shareholder loan from subsidiaries*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	**158.541.813**	**319.448.613**	***Net cash provided by investing activities***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

LAPORAN ARUS KAS (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	300.000.000	*Proceeds of long-term loans*
Penerimaan SHL dari anak perusahaan	1.560.592	-	*SHL received from subsidiaries*
Pembayaran obligasi - buyback	-	(396.709.000)	*Payments of obligation - buyback*
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(271.542.219)	(222.472.943)	*Payments of dividend to owners of the parent entity*
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(73.133.366)	(31.175.408)	*Repayments of long-term bank loans*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(343.114.993)**	**(350.357.351)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(110.391.644)**	**143.307.863**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas	(8.041.990)	(3.248.973)	*Net effects foreign exchange from cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**448.503.466**	**308.444.576**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**330.069.832**	**448.503.466**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan PSAK 227 (dahulu PSAK 4), Laporan Keuangan Tersendiri.

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

PSAK 227 memperkenankan (i) metode biaya perolehan, (ii) sesuai PSAK 109 (dahulu PSAK 71) - Instrumen Keuangan, atau (iii) metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan menerapkan metode biaya perolehan dalam laporan keuangan entitas induk saja pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi.

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)

a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the PSAK 227 (formerly PSAK 4), Separate Financial Statements.

PSAK 227 regulates that when an entity elects to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

PSAK 227 allows the use of (i) the cost method, (ii) in accordance with PSAK 109 (formerly PSAK 71) - Financial Instruments, or (iii) equity method to record the investment in subsidiaries, joint ventures, and associates in the separate financial statements. The Company implemented cost method in the financial statements of the parent entity only as at and for the years ended December 31, 2024 and 2023.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

b. Penyertaan saham pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi berikut:

b. Investments in shares of subsidiaries, associates and joint ventures

As of December 31, 2025 and 2024, the parent entity has the following investments in shares of subsidiaries, joint ventures and associates:

Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2025/ *Acquisition cost January 1, 2025*	Penambahan/ (Pengurangan) *Additions / (Deduction)*	Nilai tercatat 31 Desember 2025/ *Carrying value December 31, 2025*
		2025		
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	253.623.935	-	253.623.935
PT Permata Graha Nusantara	99,99%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59.87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40.00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40.00%	111.453	-	111.453
PT Baskara Asri Ghas (Dahulu PT Banten Gas Sinergy)	0.14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**2.928.498.080**	**-**	**2.928.498.080**

Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2024/ *Acquisition cost January 1, 2024*	Penambahan/ (Pengurangan) *Additions / (Deduction)*	Nilai tercatat 31 Desember 2024/ *Carrying value December 31, 2024*
		2024		
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	253.623.935	-	253.623.935
PT Permata Graha Nusantara	99,99%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59.87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40.00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40.00%	111.453	-	111.453
PT Baskara Asri Ghas (Dahulu PT Banten Gas Sinergy)	0.14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**2.928.498.080**	**-**	**2.928.498.080**

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)*

c. Penerimaan dividen dari entitas anak dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, entitas induk menerima dividen atas penyertaan saham pada entitas anak dan ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

c. Dividend received from subsidiaries and joint ventures

As of December 31, 2025 and 2024, the parent entity has received dividend in shares of subsidiaries and joint ventures with detail as follows:

Nama entitas/ *Entity name*	2025 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2025 Penerimaan dividen/ *Dividend received*
Entitas anak/*Subsidiary*		
PT Pertamina Gas	51,00%	113.759.709
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	6.554.606
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	2.234.680
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	883.543
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	37.793.428
PT Nusantara Gas	40,00%	20.000.000

Nama entitas/ *Entity name*	2024 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership*	2024 Penerimaan dividen/ *Dividend received*
Entitas anak/*Subsidiary*		
PT Pertamina Gas	51,00%	100.206.375
PT PGAS Solution	99,91%	-
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	934.278
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	405.718
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	32.206.002
PT Nusantara Gas	40,00%	18.472.774

Kantor Pusat PGN
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140, Indonesia

T +62 21 633 4838
E pcc135@pertamina.com

www.pgn.co.id

REFERENSI
REFERENCE



09


SRU-JAWA BARAT

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE OF CIRCULAR OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 16/SEOJK.04/2021 ON FORMS AND CONTENTS OF ISSUER'S OR PUBLIC LISTED COMPANY'S ANNUAL REPORT

Keterangan	Halaman Page	Description
I Ketentuan Umum		I General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau Perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau Perusahaan Publik.	✓	a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	✓	b. Issuers are parties who make public offerings.
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	✓	c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	✓	d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company.
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	✓	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.
f. Direksi:	✓	f. Management discussion and analysis
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	✓	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:	✓	g. Board of Commissioners:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	✓	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	✓	h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	✓	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	✓	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	2. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	3. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	✓	4. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	✓	5. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.
II Bentuk Laporan Tahunan		II Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	✓	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓	3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format Portable Document Format (PDF).	✓	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into Portable Document Format (PDF).
III Isi laporan Tahunan		III Content of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	22-26	a. Summary of key financial information;
b. Informasi saham (jika ada);	30-33	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	104-129	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	92-101	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	132-239	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	240-325	f. Management discussion and analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	326-659	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	660-667	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	668-937	i. Audited annual report; and

Keterangan	Halaman Page	Description
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	130-131	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report.
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	22-26	a. Summary of Key Financial Information
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	22-26	Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan;	22	1) Income/sales;
2) Laba bruto;	22	2) Gross profit;
3) Laba (rugi);	22	3) Profit (loss);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	22	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;
5) Total laba (rugi) komprehensif;	22	5) Total comprehensive profit (loss);
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	22	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) Laba (rugi) per saham;	22	7) Earning (loss) per share;
8) Jumlah aset;	23	8) Total assets;
9) Jumlah liabilitas;	23	9) Total liabilities;
10) Jumlah ekuitas;	23	10) Total equities;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	24	11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	24	12) Profit (loss) to equities ratio;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	24	13) Profit (loss) to income ratio;
14) Rasio lancar;	24	14) Current ratio;
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	24	15) Liabilities to equities ratio;
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	24	16) Liabilities to total assets ratio; and
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	24	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of Industry.
b. Informasi Saham	30-33	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	30-33	Stock Information (if any) at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	30-32	1) Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a). Jumlah saham yang beredar;	30	a). Number of outstanding shares;
b). Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	30, 32	b). Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c). Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	31	c). Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d). Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	30	d). Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on.
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	30-32	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	33	2) In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a). Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	33	a). Date of corporate action;
b). Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham;	33	b). Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c). Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	33	c). Number of outstanding shares prior to and after corporate action;
d). Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	33	d). The number of convertible securities exercised (if any); and
e). Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	33	e). Share price prior to and after corporate action;
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	33	3) In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	33	4) If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained.
c. Laporan Direksi	104-129	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	104-129	The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	104-129	1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a). Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	106-108	a). Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b). Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	109	b). Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c). Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	109	c). Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;
d). Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	110-115	d). Comparison between achievement of results and targets; and
e). Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	115-117	e). Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) Gambaran tentang prospek usaha; dan	119-123	2) Description on business prospects; and
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	123-127	3) Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company;
d. Laporan Dewan Komisaris	92-101	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	92-101	The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	93-96	1) Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company. including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	100	2) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors; and
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	97-98	3) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public.
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	132-239	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	132-239	Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	134	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	134-135	2) Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a). Alamat;	134	a). Address;
b). Nomor telepon;	134	b). Telephone number;
c). Alamat surat elektronik; dan	135, 594	c). E-mail address; and
d). Alamat Situs Web.	135	d). Website address.
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	136-145	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	146-148	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company;
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	150-154	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	155	6) Operational area of the Issuer or Public Company; The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operating activities.
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	156-160	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1(one) level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	200	8) List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	172-178	9) The Board of Directors profiles include:
Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab		Name and short description of duties and functions
a). Foto terbaru;	172-178	a). Latest photograph;
b). Usia;	172-178	b). Age;
c). Kewarganegaraan;	172-178	c). Citizenship;
d). Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	172-178	d). Education and/or certification;
e). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	172-178	e). History position, covering information on:
(1). Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	172-178	(1). Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
(2). Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	172-178	(2). Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(3). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	172-178	(3). Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company.
g). Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	172-178	g). Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h). Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	162-165	h). Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	166-171	10) The Board of Commissioners profiles, at least include:
a). Nama;	166-171	a). Name ;
b). Foto terbaru;	166-171	b). Latest photograph;
c). Usia;	166-171	c). Age;
d). Kewarganegaraan;	166-171	d). Citizenship;
e). Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	166-171	e). Education and/or certification;
f). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	166-171	f). History position, covering information on:
(1). Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	166-171	(1). Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners;
(2). Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	166-171	(2). Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3). Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	166-171	(3). Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(4). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	166-171	(4). Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g). Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	166-171	g). Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties in the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;

Keterangan	Halaman Page	Description
h). Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	166-168, 387	h). Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and
i). Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	162-165	i). Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	162-178	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	204-206	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form;
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	179-183	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a). Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik;	180	a). Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b). Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	180-182	b). Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and
c). Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	182-183	c). Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuer or Public Company; The above information can be presented in tabular form.
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	182	14 The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	179, 182-183	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a). Kepemilikan institusi lokal;	179, 182-183	a). Ownership of local institutions;
b). Kepemilikan institusi asing;	179, 182-183	b). Ownership of foreign institutions;
c). Kepemilikan individu lokal; dan	179, 182-183	c). Ownership of local individual; and
d). Kepemilikan individu asing;	179, 182-183	d). Ownership of foreign individual;

Keterangan	Halaman Page	Description
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	179-180	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, Perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	185-191	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assetsand operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	192-195	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	196	19) Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:	197	20) Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/ associations/ alliances include:
a). Nama dan alamat;	197	a). Name and address;
b). Periode penugasan;	197	b). Period of assignment;
c). Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	197	c). Information on scope of audit and/or nonaudit services;
d). Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku;	197	d). Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year;
e). Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	197	e). In the event that AP and KAP and their network/ association/ alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/ allies can be presented in tabular form.
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	198-199	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	240-325	f. Management Discussion and Analysis
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	240-325	Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	246-258	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a). Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	246-258	a). Production, including process, capacity, and growth;

Keterangan	Halaman Page	Description
b). Pendapatan/penjualan; dan	246-258	b). Income/sales; and
c). Profitabilitas;	246-258	c). Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	259-273	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a). Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	266-267	a). Current assets, non-current assets, and total assets;
b). Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	268-269	b). Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c). Ekuitas;	270	c). Equities;
d). Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	259-265	d). Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e). Arus kas;	271-273	e). Cash flows;
3) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	274	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	275	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	276-277	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	277	6) Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a). Tujuan dari ikatan tersebut;	277	a). The purpose of such ties;
b). Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	277	b). Source of funds expected to fulfill the said ties;
c). Mata uang yang menjadi denominasi; dan	277	c). Currency of denomination; and
d). Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	277	d). Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	278	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a). Jenis investasi barang modal;	278	a). Type of investment of capital goods;
b). Tujuan investasi barang modal;	278	b). Objective of the investment of capital goods;
c). Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	278	c). Value of the investment of capital good;
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	279	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	280-287	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	288-291	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a). Pendapatan/penjualan;	290	a). Income/sales;
b). Laba (rugi);	290	b). Profit (loss);
c). Struktur modal (capital structure); atau	290	c). Capital structure; or
d). Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	288-291	d). Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	292-295	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a). Pendapatan/penjualan;	294-295	a). Income/sales;
b). Laba (rugi);	294-295	b). Profit (loss);
c). Struktur modal (*capital structure*);	294-295	c). Capital structure;
d). Kebijakan dividen; atau	294-295, 308-309	d). Dividend policy; or
e). Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	292-295	e). Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	296-307	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	308-309	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a). Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	308-309	a). Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;
b). Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	309	b). The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c). Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	309	c). Amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d). Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	309	d). Amount of dividend per year paid;
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	308-309	Disclosure of information can be presented in tabular form. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	310	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a). Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	310	a). during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b). Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	310	b). In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	311-315	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a). Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	312-314	a). Transaction date, value, and object;
b). Nama pihak yang melakukan transaksi;	312-314	b). Name of transacting parties;
c). Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	312-314	c). Nature of related parties (if any);
d). Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	315	d). Description of the fairness of the transaction;
e). Pemenuhan ketentuan terkait;	312-314	e). Compliance with related rules and regulations;
f). Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	311-315	f). In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:

Keterangan	Halaman Page	Description
(1). Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms- length principle*);	315	(1). A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;
(2). Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*);	315	(2). The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;
g). Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	315	g). For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously; If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.
h). Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; dan	311-315	h). For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; and
i). Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	311-315	i). In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	316-318	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	318-319	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	326-659	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	326-659	Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	343-358	1) GMS, at least contains:
a). Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	343-358	a). Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
(1). Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	346-358	(1). Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and
(2). Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	346-358	(2). Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;

Keterangan	Halaman Page	Description
b). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	347, 353, 355	b). In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, paling sedikit memuat:	388-419	2) The Board of Directors, at the minimum, contains:
a). Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	388-394	a). The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors; The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described and can be presented in tabular form.
b). Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;	394	b). Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c). Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	396-419	c). Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.
d). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	436-445	d). Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1). Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	436, 446	(1). Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); dan
(2). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	440-445	(2). Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);
e). Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	419	e). The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1). Prosedur penilaian kinerja; dan	419	(1). Performance appraisal procedures; and
(2). Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	419	(2). The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and
f). Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	419	f). In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	359-387	3) The Board of Commissioners, among others include:
a). Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	359-360	a). Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b). Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;	361	b). Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;

Keterangan	Halaman Page	Description
c). Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	365-384	c). Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS; Information on the Board of Commissioners members' attendance level at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.
d). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	436-445	d). Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1). Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	436, 446	(1). Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	437-439	(2). Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);
e). Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	420-424	e). The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1). Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	421, 423	(1). Procedure for the implementation of performance assessment;
(2). Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	422, 424	(2). Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and
(3). Pihak yang melakukan penilaian; dan	422, 424	(3). Assessor; and
f). Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	424-245	f). Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1). Prosedur penilaian kinerja; dan	425	(1). Performance appraisal procedures; and
(2). Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	425	(2). The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	426-435	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a). Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	426-429	a). Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; dan
b). Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	430-435	b). Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1). Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	430-432	(1). Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2). Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	432-433	(2). The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and

Keterangan	Halaman Page	Description
(3). Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	433-434	(3). The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/A	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a). Nama;	N/A	a). Name;
b). Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	N/A	b). Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;
c). Periode penugasan dewan pengawas syariah;	N/A	c). Period of assignment of the sharia supervisory board;
d). Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	N/A	d). duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e). Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A	e). frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	451-468	6) Audit Committee, among others covering:
a). Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	452-454	a). Name and position in the committee;
b). Usia;	452-454	b). Age;
c). Kewarganegaraan;	452-454	c). Citizenship;
d). Riwayat pendidikan;	452-454	d). Education background;
e). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	452-454	e). History of position including:
(1). Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;	452-454	(1). Legal basis for appointment as committee member;
(2). Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	452-454	(2). Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	452-454	(3). Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f). Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	452-454	f). Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g). Pernyataan independensi Komite Audit;	454-455	g). statement of independence of the Audit Committee;
h). Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	460-461	h). Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i). Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; dan	464-468	i). Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and
j). Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit;	461-463	j). the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	468-479	7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a). Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	470-471	a). Name and position in committee membership;
b). Usia;	470-471	b). Age;

Keterangan	Halaman Page	Description
c). Kewarganegaraan;	470-471	c). Nationality;
d). Riwayat pendidikan;	470-471	d). Educational history;
e). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	470-471	e). Position history, including information on:
(1). Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	470-471	(1). Legal basis for appointment as committee member;
(2). Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada);	470-471	(2). Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any);
(3). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	470-471	(3). Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
f). Periode dan masa jabatan anggota komite;	470-471	f). Period and term of office of the committee members;
g). Pernyataan independensi komite;	471-472	g). Statement of committee independence;
h). Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	476	h). Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i). Uraian tugas dan tanggung jawab;	473-476	i). Description of duties and responsibilities;
j). Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*);	472	j). A statement that it has a guideline or charter;
k). Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	478-479	k). Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;
l). Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	477-478	l). Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and
m). Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	468-479	m). In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1). Alasan tidak dibentuknya komite; dan	468-479	(1). Reasons for not forming the committee; and; and
(2). Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	468-479	(2). The party carrying out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	479-489	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a). Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	481-482	a). Name and position in the Committee;
b). Usia;	481-482	b). Age;
c). Kewarganegaraan;	481-482	c). Citizenship;
d). Riwayat pendidikan;	481-482	d). Education background;
e). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	481-482	e). History of position, including:
(1). Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	481-482	(1). Legal basis for the appointment as member of the committee
(2). Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	481-482	(2). Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any);
(3). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	481-482	(3). Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
f). Periode dan masa jabatan anggota komite;	481-482	f). Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g). Pernyataan independensi komite;	483	g). Statement of committee independence;
h). Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	485-486	h). Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);
i). Uraian tugas dan tanggung jawab;	484-485	i). Description of duties and responsibilities;
j). Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;	483-484	j). A statement that the committee has had guidelines or charters;
k). Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	489	k). Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and
l). Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku;	487-488	l). A brief description of the committee's activities for the fiscal year;
9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	498-502	9) Corporate Secretary, including:
a). Nama;	498	a). name;
b). Domisili;	498	b). domicile;
c). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	498	c). history of position, including:
(1). Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	498	(1). legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	498	(2). working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d). Riwayat pendidikan;	498	d). education background;
e). Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	502	e). education and/or training during the year under review; and
f). Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	501	f). brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	506-519	10) Internal Audit Unit, among others including:
a). Nama kepala Unit Audit Internal;	506-509	a). Name of Head of Internal Audit Unit;
b). Riwayat jabatan, meliputi informasi:	506-509	b). History of position, including:
(1). Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	506-509	(1). Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2). Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	506-509	(2). Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c). Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	506-509	c). Qualification or certification as internal auditor (if any);
d). Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	506-509	d). Education and/or training during the year under review;
e). Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	510	e). Structure and position of Internal Audit Unit;
f). Uraian tugas dan tanggung jawab;	511-513	f). Description of duties and responsibilities; and
g). Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Unit Audit Internal; dan	511	g). Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h). uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	517-519	h). Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year, including the policy and implementation of the meeting frequency with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or audit committee;
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	523-526	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:

Keterangan	Halaman Page	Description
a). Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	524-525	a). Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules;
b). Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	525-526	b). Review on the effectiveness of internal control systems; and
c). Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	526	c). Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	540-557	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a). Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	540-557	a). General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b). Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	550-552	b). Types of risk and the management;
c). Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	555-556	c). Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company; and
d). Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	556-557	d). Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	557-566	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a). Pokok perkara/gugatan;	557-566	a). Substance of the case/claim;
b). Status penyelesaian perkara/gugatan; and	557-566	b). Status of settlement of case/claim; and
c). Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	557-566	c). Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	567	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	569-575	15 information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:;
a). Pokok-pokok kode etik;	571-572	a). Key points of the code of conduct;
b). Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	573-574	b). Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c). Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	573	c). Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP). Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	581-582	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP). In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:

Keterangan	Halaman Page	Description
a). Jumlah saham dan/atau opsi;	581-582	a). Number of shares and/or options;
b). Jangka waktu pelaksanaan;	581-582	b). Implementation period;
c). Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	581-582	c). Requirements for eligible employees and/or management; dan
d). Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	581-582	d). Exercise price or determination of exercise price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	583	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a). Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka;	583	a). Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company;
b). Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	583	b). Implementation of the policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	585-590	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a). Cara penyampaian laporan pelanggaran;	586-587	a). Mechanism for violation reporting;
b). Perlindungan bagi pelapor;	588	b). Protection for the whistleblower;
c). Penanganan pengaduan;	588-589	c). Handling of violation reports;
d). Pihak yang mengelola pengaduan;	589-590	d). Unit responsible for handling of violation report;
e). Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	590	e). Results from violation report handling, at least includes:
(1). Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	590	(1). Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2). Tindak lanjut pengaduan;	590	(2). Follow up of complaints;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki system pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed.
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	532-538	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:
a). Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik; dan	534	a). Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and
b). Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik;	535	b). Anti-corruption training / socialization to employees of Issuers or Public Companies;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.		If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained.
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	595-658	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a). Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan: dan/atau	595-658	a). Statement regarding recommendation that have been implemented: and/or
b). Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada); Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk table.	595-658	b). Description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any); Disclosure of information can be presented in tabular form.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	660-666	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:
a). Penjelasan strategi keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a). Explanation of the sustainability strategy;
b). Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b). Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);
c). Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	c). Brief profile of the Issuer or Public Company;
d). Penjelasan Direksi;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	d). Explanation of the Board of Directors;
e). Tata kelola keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	e). Sustainability governance;
f). Kinerja keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	f). Sustainability performance;
g). Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	g). Written verification from an independent party, if any;
h). Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	h). Feedback sheet for readers, if any; and
i). Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	i). The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a). Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a). Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or
b). Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b). Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
4) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a). Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a). Contains all the information as referred to in number 1); and
b). Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b). Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	661	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	661	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	668-937	i. Audited Annual Financial Statement Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Boardmof Directors on the financial report or the legislationsmin the Capital Markets sector governing the periodicmreports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	130-131	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

APPENDIX VII - REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES NUMBER PER-2/MBU/03/2023 CONCERNING GUIDELINES FOR GOVERNANCE AND SIGNIFICANT CORPORATE ACTIVITIES OF STATEOWNED ENTERPRISES

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
BAB I - INTRODUCTION		CHAPTER I - INTRODUCTION
1.1. Kondisi Umum	93-95, 105-106, 242-245	1.1. General Condition
1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan	16-17, 22-86, 110-118	1.2. Brief Overview of Company Performance
BAB II – KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025	246-258	CHAPTER II – COMPANY PERFORMANCE IN 2025
2.1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri, paling sedikit mengenai:	246-258	2.1. Operating review by business segment according to industry type, at least regarding:
2.1.1. Produksi;	246-258	2.1.1. Production;
2.1.2. Pangsa pasar;	296-297	2.1.2. Market share;
2.1.3. Ekspor (jika ada);	296	2.1.3. Export (if any);
2.1.4. Pendapatan/Penjualan; dan	246-258	2.1.4. Income/Sales; and
2.1.5. Profitabilitas	246	2.1.5. Profitability
2.2. Teknologi	118-119, 222-239	2.2. Technology
2.3. Penelitian dan Pengembangan	284-287	2.3. Research and Development
2.4. Hukum	557-566	2.4. Legal
2.5. Sumber Daya Manusia	118-119, 204-215	2.5. Human Resources
2.6. Investasi dan Sumber Pembiayaan	276-277	2.6. Investment and Financing Sources
2.7 Laporan Keuangan (di-*update* apabila audit sudah terbit)	668-937	2.7. Financial Statements (updated if the audit has been published)
2.7.1. Laporan Posisi Keuangan;	266-270, 684-688	2.7.1. Statement of Financial Position;
2.7.2. Laporan Laba Rugi;	259-265, 689-690	2.7.2. Statement of Profit or Loss;
2.7.3. Laporan Arus Kas;	271-272, 692-693	2.7.3. Statement of Cash Flows;
2.7.4. Laporan Perubahan Ekuitas;	272-273, 691	2.7.4. Statement of Changes in Equity;
2.7.5. Penjelasan terhadap perubahan akun-akun material;	694-936	2.7.5. Explanation of changes in material accounts
2.7.6. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; dan	274	2.7.6. Ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations; and
2.7.7. Tingkat kolektibilitas piutang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	275	2.7.7. Receivables collectibility by presenting relevant ratio calculations.
2.8 Informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat hutang, setoran modal, akuisisi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, restrukturisasi utang/modal, dan lainnya yang terjadi pada triwulan berjalan.	310-315	2.8 Information on the realization of corporate action plans such as asset sales, issuance of debt securities, capital deposits, acquisitions, divestments, business mergers/consolidations, debt/capital restructuring, and others that occurred in the current quarter.

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
2.9 Kontribusi kepada Negara	319	2.9 Contribution to the State
2.9.1. Pajak;	319	2.9.1. Taxes
2.9.2. Dividen; dan	319	2.9.2. Dividend; and
2.9.3. PNBP Lainnya.	319	2.9.3 Other Non-Tax Revenue.
BAB III – LAPORAN PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN	320	CHAPTER III - REPORT OF KPI ACHIEVEMENT AND SOUNDNESS LEVEL
BAB IV – RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2025	321-322	CHAPTER IV - DETAILS OF ISSUES ARISING DURING 2025
BAB V – LAPORAN MANAJEMEN RISIKO	540-557	CHAPTER V - RISK MANAGEMENT REPORT
5.1. Laporan penerapan Manajemen Risiko	540-557	5.1. Report of Risk Management implementation;
5.2. Laporan Audit Internal; dan	517-519	5.2. Internal Audit Report; and
5.3. Laporan Tata Kelola Terintegrasi (jika ada)	489-492	5.3. Integrated Governance Report (if any)
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	661-664	CHAPTER VI - IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS
BAB VII - LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN (jika ada)	323	CHAPTER VII - REPORT OF ADDITIONAL USE OF PMN (if any)
BAB VIII - PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN (jika ada)	323	CHAPTER VIII - IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS (if any)
BAB IX - TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS	346-358, 517-519	CHAPTER IX - FOLLOW-UP ON AUDITOR'S FINDINGS AND GMS RESOLUTIONS

2025

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT



PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta Barat 11140 Indonesia

Telp : +6221 633 4838
Fax : +6221 633 3080
www.pgn.co.id